SALINAN

BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 35 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024;

b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 273 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan Kepala Daerah setelah Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 192) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 262);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tatacara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 200);
13. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);
14. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 298);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

Renja Perangkat Daerah disusun dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Pasal 3

Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

BAB II

SISTEMATIKA DAN FUNGSI RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 4

Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. bab I : pendahuluan;
b. bab II : hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu;
c. bab III : tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
d. bab IV : rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan
e. bab V : penutup.

Pasal 5

Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah.

BAB II

PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 6

(1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah.
(2) Kepala Perangkat Daerah melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi Renja Perangkat Daerah kepada Bupati melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.

BAB III

PERANGKAT DAERAH PENYUSUN

Pasal 7

(1) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun oleh Perangkat Daerah sebagai berikut:
    a. Sekretariat Daerah;
    b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
    c. Inspektorat Daerah;
    d. Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan;
    e. Dinas Kesehatan;
    f. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang;
    g. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
    h. Satuan Polisi Pamong Praja;
    i. Dinas Sosial;

j. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak;
k. Dinas Pangan;
l. Dinas Lingkungan Hidup;
m. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil;
n. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa;
o. Dinas Perhubungan;
p. Dinas Komunikasi Dan Informatika;
q. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
r. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;
s. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
t. Dinas Pertanian dan Perikanan;
u. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah dan Perdagangan;
v. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
w. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
x. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
y. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
z. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
aa. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
bb. Kecamatan Weru;
cc. Kecamatan Bulu;
dd. Kecamatan Tawangsari;
ee. Kecamatan Sukoharjo;
ff. Kecamatan Nguter;
gg. Kecamatan Bendosari;
hh. Kecamatan Polokarto;
ii. Kecamatan Mojolaban;
jj. Kecamatan Grogol;
kk. Kecamatan Baki;
ll. Kecamatan Gatak; dan
mm. Kecamatan Kartasura.

(2) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf mm tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 10 Agustus 2023

BUPATI SUKOHARJO,

Ttd.

ETIK SURYANI

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 10 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd.

WIDODO

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2023 NOMOR 35

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ditandatangani secara elektronik oleh :

TEGUH PRAMONO, SH, MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19710429 199803 1 003

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI
NOMOR 35 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN
SUKOHARJO TAHUN 2024

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2024

Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 terdiri atas:

1. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Inspektorat Daerah;
4. Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan;
5. Dinas Kesehatan;
6. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang;
7. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
8. Satuan Polisi Pamong Praja;
9. Dinas Sosial;
10. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak;
11. Dinas Pangan;
12. Dinas Lingkungan Hidup;
13. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil;
14. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa;
15. Dinas Perhubungan;
16. Dinas Komunikasi Dan Informatika;
17. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
18. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;
19. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
20. Dinas Pertanian dan Perikanan;
21. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah dan Perdagangan;
22. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
23. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
24. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
25. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
26. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
27. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

28. Kecamatan Weru;
29. Kecamatan Bulu;
30. Kecamatan Tawangsari;
31. Kecamatan Sukoharjo;
32. Kecamatan Nguter;
33. Kecamatan Bendosari;
34. Kecamatan Polokarto;
35. Kecamatan Mojolaban;
36. Kecamatan Grogol;
37. Kecamatan Baki;
38. Kecamatan Gatak; dan
39. Kecamatan Kartasura.

BUPATI SUKOHARJO,

Ttd.

ETIK SURYANI

2024

BAPPERIDA
Sukoharjo

RENCANA KERJA BAPPERIDA 2024

KABUPATEN SUKOHARJO



KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, sang Maha Pencipta Semesta Alam, karena dengan rahmat dan hidayah Nya, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPERIDA) Kabupaten Sukoharjo telah menyelesaikan penyusunan Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2024.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) merupakan acuan perencanaan kegiatan PD selama satu tahun dan merupakan penjabaran tahunan dari RPJMD dan Renstra-PD. Adapun penyusunan Renja-PD merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, sedangkan aturan secara rinci berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

Rencana Kerja Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan tahun ketiga dari Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026 yang memuat rencana tujuan dan sasaran periode tersebut yang hendak dicapai pada APBD di Tahun 2024. Dokumen ini menjadi salah satu referensi untuk formulasi, implementasi, monitoring dan evaluasi kebijakan serta memberi manfaat dalam upaya serapan anggaran yang rasional dan kinerja yang profesional, akuntabel dan transparan untuk pembangunan yang berasaskan keadilan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Sukoharjo, Februari 2023

KEPALA BAPPERIDA
KABUPATEN SUKOHARJO

Drs. RUDIYANTO,M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19681019 199803 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI iii

DAFTAR TABEL iv

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Landasan Hukum 1

1.3. Maksud dan Tujuan 3

1.4. Sistematika Penulisan 3

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 5

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 5

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 16

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 27

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD 29

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 31

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 33

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 33

3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah 34

3.3. Program dan Kegiatan 35

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 54

BAB V PENUTUP 62

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Realisasi Anggaran per Program Tahun Anggaran 2022.....6

Tabel 3.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 Kabupaten Sukoharjo.....7

Tabel 3.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Bapperida Kabupaten Sukoharjo..... 19

Tabel 3.3. Hubungan Prioritas Pembangunan Nasional dengan Prioritas Pembangunan Daerah.....34

Tabel 3.4. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025.....38

Tabel 3.5. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah.....55

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun yang merupakan terjemahan dari perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai dokumen Perangkat Daerah, Renja mempunyai kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah, adalah meliputi:

1. persiapan penyusunan;
2. penyusunan rancangan awal;
3. penyusunan rancangan
4. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
5. perumusan rancangan akhir; dan
6. penetapan.

Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD serta didasarkan pada evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah dan pada akhirnya Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai

dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukun penyusunan Renja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024, adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender untuk Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RRPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005-2025;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 - 2026;

13. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 43 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 – 2026.
14. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 75 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Sukoharjo;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

   Maksud disusunnya Renja adalah untuk merumuskan rencana kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Sukoharjo untuk periode 1 (satu) tahun sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Renstra Perangkat Daerah.

2. Tujuan
   Tujuan disusunnya Renja adalah sebagai pedoman:
   a. pelaksanaan pelayanan Perangkat;
   b. pelaksanaan dan evaluasi program dan kegiatan;
   c. penyusunan rencana anggaran Perangkat Daerah.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Adapun sistematika penyusunan Renja Bapperida Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Bab I PENDAHULUAN

Bab ini memberi gambaran umum tentang penyusunan Renja Bapperida Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024, yang meliputi :

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

Bab II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini memuat terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Bapperida Tahun 2022 dan perkiraan Tahun 2023

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menguraikan tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang direncanakan

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3. Program dan Kegiatan

Bab IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Bab V PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja Bapperida Kabupaten Sukoharjo merupakan penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Bapperida Kabupaten Sukoharjo, tercapai tidaknya pelaksanaan program yang telah diformulasikan dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. untuk itu diperlukan tahapan evaluasi dalam rangka mengukur tingkat keberhasilan kebijakan yang telah diformulasikan dan diimplementasikan oleh Bapperida Kabupaten Sukoharjo.

Evaluasi memainkan sejumlah fungsi utama dalam analisis kebijakan, karena evaluasi memiliki beberapa tujuan diantaranya dengan adanya evaluasi terhadap suatu kebijakan atau program maka diharapkan kebijakan kedepannya akan lebih baik. selain dari pada itu, evaluasi juga untuk mengetahui apakah suatu kebijakan berhasil atau gagal, point selanjutnya evaluasi kebijakan digunakan untuk memenuhi aspek akuntabilitas publik, karena dengan melakukan penilaian kinerja suatu kebijakan maka dapat dipahami sebagai bentuk pertanggungjawaban Pemerintah kepada Publik sebagai pemilik dana dan mengambil manfaat dari kebijakan dan program Pemerintah. Lebih lanjut dapat disampaikan evaluasi kebijakan dilakukan agar tidak mengulangi kesalahan yang sama dan pada akhirnya evaluasi kebijakan bermanfaat untuk memberikan masukan bagi proses pengambilan kebijakan yang akan datang.

Demikian dapat dimaknai secara umum Rencana Kerja Beppelbangda Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 memuat rencana program dan kegiatan dengan tetap memperhatikan potensi yang ada dalam rangka **mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas** yang tertuang dalam Renstra Bapperida Kabupaten Sukoharjo. Keberhasilan perencanaan dapat dilihat dari hasil evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya, sejauh mana pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan berdampak terhadap capaian yang telah ditetapkan di dalam Renstra Perangkat Daerah, hasil dari evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan. Dukungan pembiayaan pelaksanaan kegiatan-kegiatan Bapperida Kabupaten Sukoharjo, berasal dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sukoharjo berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, yang di jabarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Bapperida Kabupaten SukoharjoTahun 2022, tanggal 21 Desember 2021. serta Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2022, tanggal 3 Oktober 2022.

Total Alokasi anggaran belanja sebesar **Rp. 7.993.855.768,00** terealisasi Sebesar **Rp. 7.558.179.622,00** atau sebesar **94,55%.**

Tabel 2.1.
Realisasi Anggaran per Program
Tahun Anggaran 2022

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi Tahun 2021	
			Anggaran (Rp)	%
1	2	3	4	5
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**	***4.846.812.128,00***	***4.494.938.857,00***	***97,20***
2	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	***1.010.590.192,00***	***1.004.058.276,00***	***99,35***
3	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	***1.966.453.448,00***	***1.890.783.789,00***	***96,15***
4	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	***170.000.000,00***	***168.398.700,00***	***99,05***
	Jumlah	**7.993.855.768,00**	**7.558.179.622,00**	**94,55**

Berdasarkan besar penyerapan dana sebagaimana dijelaskan di atas, maka telah terjadi penyimpangan/deviasi positif sebesar **5,45%** dari alokasi dana, atau tercapai sisa lebih sebesar Rp. **435.676.146,00** yang disebabkan oleh :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, sebesar 97,20% dikarenakan disesuaikan dengan kebutuhan;
2. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, sebesar 99,35% dikarenakan disesuaikan dengan kebutuhan;
3. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah, sebesar 96,15% dikarenakan disesuaiakan dengan kebutuhan;
4. Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah, sebesar 99,05% dikarenakan disesuaikan dengan kebutuhan.

Tabel 2.2
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023
Kabupaten Sukoharjo

Nama Perangkat Daerah : Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida)

No	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Tahun 2022			Tahun 2023 (S.d. Februari)		
		Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5	7	8	9
A	***PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH***	***4.878.175.128,00***	4.494.938.857,00	97,20	***4.878.175.128,00***	***387.412.413,00***	***7,94***
1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**115.000.000,00**	128.980.500,00	99,39	**115.000.000,00**	**29.203.000,00**	**25,39**
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*56.000.000,00*	55.063.000,00	98,33	*56.000.000,00*	*27.095.000,00*	*48,38*
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	*10.000.000,00*	9.994.800,00	99,95	*10.000.000,00*	*2.108.000,00*	*21,08*
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	*15.000.000,00*	14.982.200,00	99,88	*15.000.000,00*	-	-
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*49.240.000,00*	48.940.500,00	99,39	*34.000.000,00*	-	-
2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	3.880.994.000,00	3.538.945.577,00	91,19	**4.025.357.000,00**	**308.193.000,00**	**7,66**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.635.054.000,00	3.297.210.177,00	*90,71*	*3.779.417.000,00*	*277.913.000,00*	*7,35*
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	225.940.000,00	221.738.400,00	98,14	*225.940.000,00*	*30.280.000,00*	*13,40*
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	5.000.000,00	5.000.000,00	100	*5.000.000,00*	-	-
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.000.000,00	4.999.000,00	99,98	*5.000.000,00*	-	-
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	5.000.000,00	5.000.000,00	100	*5.000.000,00*	-	-
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5.000.000,00	4.998.000,00	99,96	*5.000.000,00*	-	-
3	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	100.000.000,00	99.627.100,00	99,63	**100.000.000,00**	**1.800.000,00**	**1,80**

1	2	3	4	5	7	8	9
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	0	-	-	-	-	-
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	15.000.000,00	14.900.000,00	99,33	*15.000.000,00*	*1.800.000,00*	*12,00*
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	85.000.000,00	84.727.100,00	99,68	*85.000.000,00*	-	-
4	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	380.855.000,00	378.221.556,00	96	**327.855.000,00**	**18.325.700,00**	**5,59**
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	90.000.000,00	88.898.000,00	98,78	*40.000.000,00*	-	-
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	0,00	0,00	0	-	-	-
	Penyediaan Bahan Logistik kantor	81.905.000,00	81.821.800,00	99,90	*88.905.000,00*	*8.546.000,00*	*9,61*
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	42.200.000,00	42.200.000,00	100,00	*42.200.000,00*	*3.589.700,00*	*8,51*
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.500.000,00	4.430.000,00	80,55	*5.500.000,00*	*660.000,00*	*12,00*
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	11.250.000,00	11.220.000,00	99,73	*11.250.000,00*	*450.000,00*	*4,00*
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150.000.000,00	149.651.756,00	99,77	*140.000.000,00*	*5.080.000,00*	*3,63*
5	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	119.963.128,00	114.450.276,00	97	**119.963.128,00**	**7.963.000,00**	**6,64**
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	26.960.000,00	26.927.000,00	99,88	*26.960.000,00*	*1.774.000,00*	*6,58*
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	26.445.000,00	25.749.000,00	97,37	*26.445.000,00*	*429.000,00*	*1,62*
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*66.558.128,00*	61.774.276,00	92,81	*66.558.128,00*	*5.760.000,00*	*8,65*
6	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	234.760.000,00	234.713.848,00	99,99	**190.000.000,00**	**21.927.713,00**	**11,54**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	233.000.000,00	232.953.848,00	99,98	180.000.000,00	21.927.713,00	*12,18*
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.760.000,00	1.760.000,00	100	10.000.000,00	-	-
B	***PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH***	***1.010.590.192,00***	1.004.058.276,00	99,35	***760.590.192,00***	***70.032.500,00***	***9,21***
1	**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**	584.032.064,00	582.303.900,00	99,82	**584.032.064,00**	**64.962.500,00**	**11,12**
	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	20.000.000,00	20.000.000,00	100	*20.000.000,00*	*10.435.000,00*	*52,18*

1	2	3	4	5	7	8	9
	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	140.000.000,00	139.730.000,00	99,81	*140.000.000,00*	*45.077.500,00*	*32,20*
	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	424.032.064,00	422.573.900,00	99,66	*424.032.064,00*	*9.450.000,00*	*2,23*
2	**Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	351.558.128,00	346.761.876,00	**98**	**101.558.128,00**	**5.070.000,00**	**4,99**
	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	50.779.064,00	49.355.688,00	97,20	*50.779.064,00*	*2.535.000,00*	*4,99*
	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	300.779.064,00	297.406.188,00	98,88	*50.779.064,00*	*2.535.000,00*	*4,99*
3	**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	75.000.000,00	74.992.500,00	99,99	**75.000.000,00**	**-**	**-**
	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	75.000.000,00	74.992.500,00	99,99	*75.000.000,00*	-	
C	***PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH***	1.966.453.448,00	1.890.783.789,00	96,15	***1.336.453.448,00***	***86.834.374,00***	***6,50***
1	**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	557.337.192,00	521.068.950,00	95,21	**457.337.192,00**	**13.047.474,00**	**2,85**
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah Bidang Pemerintah (RPJD, RPJMD dan RKPD)	20.000.000,00	19.705.600,00	98,53	*20.000.000,00*	*1.850.000,00*	*9,25*
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	40.000.000,00	38.042.900,00	95,11	*40.000.000,00*	-	-
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	15.000.000,00	13.670.000,00	91,13	*15.000.000,00*	-	-
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	200.779.064,00	181.856.888,00	90,58	*200.779.064,00*	*2.535.000,00*	*1,26*
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJD, RPJMD dan RKPD)	35.000.000,00	34.809.974,00	99,46	*35.000.000,00*	*3.877.474,00*	*11,08*
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	130.000.000,00	126.186.000,00	97,07	*30.000.000,00*	-	-

1	2	3	4	5	7	8	9
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	15.000.000,00	14.903.000,00	99,35	*15.000.000,00*	-	-
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	101.558.128,00	91.894.588,00	90,48	*101.558.128,00*	*4.785.000,00*	*4,71*
2	**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**	310.779.064,00	286.550.513,00	84,48	**310.779.064,00**	**36.717.000,00**	**11,81**
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJD, RPJMD dan RKPD)	20.000.000,00	19.750.000,00	98,75	*20.000.000,00*	*6.604.000,00*	*33,02*
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	20.000.000,00	20.000.000,00	100	*20.000.000,00*	*2.893.000,00*	*14,47*
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	100.000.000,00	99.927.100,00	99,93	*100.000.000,00*	*17.212.000,00*	*17,21*
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	75.779.064,00	73.537.413,00	97,04	*75.779.064,00*	*6.278.000,00*	*8,28*
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	15.000.000,00	14.936.000,00	99,57	*15.000.000,00*	*675.000,00*	*4,50*
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	10.000.000,00	9.800.000,00	98,00	*10.000.000,00*	*273.000,00*	*2,73*
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	70.000.000,00	68.580.000,00	97,97	*70.000.000,00*	*2.782.000,00*	*3,97*
3	**Koordinasi Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan**	1.098.337.192,00	1.083.164.326,00	97,58	**568.337.192,00**	**37.069.900,00**	**6,52**
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJD, RPJMD dan RKPD)	58.559.064,00	56.737.188,00	96,89	*58.559.064,00*	*6.741.600,00*	*11,51*

1	2	3	4	5	7	8	9
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	44.779.064,00	43.437.688,00	97,00	*44.779.064,00*	*5.813.800,00*	*12,98*
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	15.000.000,00	14.519.600,00	96,80	*15.000.000,00*	*978.400,00*	*6,52*
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	676.779.064,00	670.634.900,00	99,09	*226.779.064,00*	*9.081.800,00*	*4,00*
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJD, RPJMD dan RKPD)	41.620.000,00	39.975.000,00	96,05	*41.620.000,00*	*6.925.000,00*	*16,64*
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	25.000.000,00	24.888.800,00	99,56	*25.000.000,00*	*1.581.300,00*	*6,33*
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	15.000.000,00	14.504.200,00	96,69	*15.000.000,00*	*1.125.000,00*	*7,50*
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	221.600.000,00	218.466.950,00	98,59	*141.600.000,00*	*4.823.000,00*	*3,41*
D	***PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH***	170.000.000,00	168.398.700,00	99,05	**170.000.000,00**	**3.398.000,00**	***2,00***
1	**Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**	100.000.000,00	99.998.700,00	99,99	**100.000.000,00**	**3.023.000,00**	**3,02**
	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	85.000.000,00	84.999.500,00	99,99	*85.000.000,00*	*3.023.000,00*	*3,56*
	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	15.000.000,00	14.999.200,00	99,99	*15.000.000,00*	-	-
2	**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**	70.000.000,00	68.400.000,00	97,71	**70.000.000,00**	**375.000,00**	**0,54**
	Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	55.000.000,00	54.400.000,00	98,91	*55.000.000,00*	*375.000,00*	*0,68*
	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	15.000.000,00	14.000.000,00	93,33	*15.000.000,00*	-	-
	JUMLAH	7.993.855.768,00	7.578.159.622,00	94,80	**7.145.218.768,00**	**547.677.287,00**	**7,66**

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapperida) Kabupaten Sukoharjo, merupakan Lembaga Teknis Daerah sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah dalam perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan yang berkualitas dapat menjadi wahana untuk memperbaiki pola pembangunan di tingkat daerah, sehingga daerah dapat berkiprah dengan leluasa untuk membangun daerahnya sesuai potensi dan kemampuan yang ada (potensi lokal). di sisi lain, kondisi era globalisasi merupakan tantangan besar yang harus dan langsung dihadapi pemerintah dan masyarakat Kabupaten Sukoharjo. investor asing memiliki kebebasan penuh untuk membuka usaha di manapun sesuai peruntukannya, dan ini merupakan peluang pembangunan yang patut diraih dan dimanfaatkan dengan bijaksana.

Bapperida Kabupaten Sukoharjo selaku lembaga teknis di bidang perencanan harus mampu menjawab tantangan tersebut di atas. Keberhasilan suatu perencanaan dapat dilihat mulai dari proses sampai dengan tataran pelaksanaan/impelementasi di lapangan, sehingga akan terwujud sinergi antara perencanaan pembangunan baik ditingkat Nasional, Provinsi maupun Kabupaten. Namun disisi lain seiring berubah-rubahnya regeluasi tentang mekanisme perencanaan dari tingkat pusat akan memperlambat proses perencanaan dalam rangka menterpadukan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah provinsi dan perencanaan pembangunan kabupaten/kota belum bisa secara optimal.

Berangkat dari fenomena tersebut Bapperida Kabupaten Sukoharjo selaku Badan Perencana mencoba untuk mensinergikan proses perencanaan baik tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten dalam rangka :

1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah;
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Sukoharjo dibentuk sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019. Peraturan Pemerintah tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Serta berdasarkan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 75 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Sukoharjo, Bapperida mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, serta mempunyai fungsi :

1. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di unsur perencanaan, unsur penelitian dan pengembangan;
2. penyelenggaraan dukungan teknis unsur perencanaan, unsur penelitian dan pengembangan;
3. penyelenggaraan administrasi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
4. penyelenggaraan pemantauan evaluasi dan pelaporan tugas dukungan teknis unsur perencanaan, unsur penelitian dan pengembangan; dan
5. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Mengikuti dan memperhatikan adanya perubahan sistem pemerintahan daerah sebagai wujud diterapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Peranan perencanaan pada masa yang akan datang diharapkan lebih menonjolkan peran sebagai perumus, fasilitator, mediator dan inovator di dalam pelaksanaan pembangunan serta dituntut untuk lebih mampu mengelola perubahan yang semakin kompleks dan cepat. Secara umum pelayanan yang dilakukan oleh Bapperida Kabupaten Sukoharjo adalah :

1. Menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
2. Menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
3. Menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD);
4. Menyusun Rencana Strategis Bapperida Kabupaten Sukoharjo (RENSTRA);
5. Menyusun Rencana Kerja Tahunan Bapperida Kabupaten Sukoharjo (RENJA PD);
6. Mengadakan penelitian untuk kepentingan perencanaan pembangunan di Daerah dan atau melakukan koordinasi hasil-hasil penelitian;
7. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan di daerah baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD kabupaten) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) serta APBD Provinsi;

8. Melakukan koordinasi perencanaan diantara Perangkat Daerah lain dalam Lingkungan Pemerintah Daerah, Instansi-instansi Vertikal, Kecamatan-Kecamatan dan Badan-Badan lain yang berada dalam wilayah Kabupaten Sukoharjo; dan
9. Melaksanakan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi daerah.

Pada umumnya kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Sukoharjo mengalami peningkatan. Beberapa indikator yang menyebabkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tersebut meliputi :

1. Tersedianya sarana/prasarana dan sumber pembiayaan yang cukup untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Bapperida Kabupaten Sukoharjo;
2. Adanya Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagai ketentuan implementatitf dari penerapan Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIPD) pada Kabupaten/Kota.
3. Penerapan SAKIP dan E-Kinerja termasuk Renja dan RKPD (Permendagri 54 tahun 2010/86 tahun 2017).
4. Adanya penyelenggaraan mekanisme perencanaan pembangunan yang bersifat partisipatif;
5. Adanya keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan antara lain : DPRD, LSM, Lembaga masyarakat tingkat desa, organisasi profesi, perguruan tinggi dan sektor swasta;
6. Meningkatnya konsistensi antara dokumen perencanaan dengan mekanisme penyusunan anggaran.

Namun peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan tersebut belum diikuti oleh peningkatan kualitas produk perencanaan. Beberapa permasalahan yang dihadapi Bapperida Kabupaten Sukoharjo dalam peningkatan kualitas produk perencanaan pembangunan adalah sebagai berikut :

1. Perubahan Peraturan Perundangan dan pedoman yang mengatur mekanisme perencanaan;
2. Kemampuan Sumber Daya Manusia yang masih terbatas;
3. Belum tersedianya *prosedur standar operasional* perencanaan untuk mendukung pelaksanaan tupoksi;
4. Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat kelurahan dan di tingkat PD yang menyebabkan kurang optimalnya proses koordinasi perencanaan sehingga berdampak pada kualitas produk rencana pembangunan tahunan, contoh penyusunan prioritas usulan pembangunan;

5. Dalam pelaksanaannya, perencanaan pembangunan sering tidak tepat waktu/tidak sesuai jadwal yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan proses dan mekanismenya yang membutuhkan siklus waktu yang panjang dalam rangkaian kegiatan yang berurutan;
6. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program-program pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen-dokumen perencanaan;
7. Adanya kepentingan-kepentingan yang bersifat politis yang harus diakomodasi dalam perencanaan maupun penganggaran.

Tabel 2.3.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Bapperida
Kabupaten Sukoharjo

No	Indikator	Satuan	Target Renstra				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
			2021	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2025	
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
A.	**Persentase capaian target kinerja program, kegiatan, sub kegiatan PD**		**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	
B.	**Cakupan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah**		**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	
1	*Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/ RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)*	*dokumen*	*3*	*3*	*3*	*3*	*3*	*3*	*3*	*3*	
2	*Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah*	*dokumen*	*4*	*4*	*4*	*4*	*4*	*4*	*4*	*4*	
3	*Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik*	*berita acara*	*2*	*2*	*2*	*2*	*2*	*2*	*2*	*2*	
4	*Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah*	*berita acara*	*5*	*5*	*5*	*5*	*5*	*5*	*5*	*5*	
5	*Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/ Kota*	*berita acara*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	
6	*Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan*	*usulan*	*6*	*6*	*6*	*6*	*6*	*6*	*6*	*6*	
7	*Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota yang Ditetapkan (RPJPD/ RPJMD/ RKPD)*	*dokumen*	1	1	1	1	1	1	1	1	
C.	**Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah**		**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	

No	Indikator	Satuan	Target Renstra				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
			2021	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2025	
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	*Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)*	*masukan*	*2*	*2*	*2*	*2*	*2*	*2*	*2*	*2*	
2	*Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi*	*orang*	*6*	*6*	*6*	*6*	*6*	*6*	*6*	*6*	
3	*Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan*	*buku*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	
D.	**Cakupan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**		**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	
	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	*laporan*	*12*	*12*	*12*	*12*	*12*	*12*	*12*	*12*	
	Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya	*kerja sama*	*4*	*4*	*4*	*4*	*4*	*4*	*4*	*4*	
	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	*laporan*	*4*	*4*	*4*	*4*	*4*	*4*	*4*	*4*	
E	**Persentase keselarasan RKPD terhadap RPJMD bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**		**88%**	**88%**	**88%**	**88%**	**88%**	**88%**	**88%**	**88%**	
F.	**Persentase keselarasan RKPD terhadap RPJMD Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**		**88%**	**88%**	**88%**	**88%**	**88%**	**88%**	**88%**	**88%**	
G.	**Persentase keselarasan RKPD terhadap RPJMD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**		**88%**	**88%**	**88%**	**88%**	**88%**	**88%**	**88%**	**88%**	
H.	**Persentase keselarasan dokumen Renja terhadap Renstra bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**		**88%**	**88%**	**88%**	**88%**	**88%**	**88%**	**88%**	**88%**	
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	perangkat daerah	1	1	1	1	1	1	1	1	

No	Indikator	Satuan	Target Renstra				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
			2021	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2025	
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	laporan	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	laporan	3	3	3	3	3	3	3	3	
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	perangkat daerah	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	perangkat daerah	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	laporan	3	3	3	3	3	3	3	3	
	Persentase keselarasan dokumen Renja terhadap Renstra bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)		**88%**	**88%**	**88%**	**88%**	**88%**	**88%**	**88%**	**88%**	
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	perangkat daerah	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	perangkat daerah	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	laporan	1	1	1	1	1	1	1	1	

No	Indikator	Satuan	Target Renstra				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
			2021	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2025	
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	perangkat daerah	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	perangkat daerah	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	laporan	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Persentase keselarasan dokumen Renja terhadap Renstra bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		**88%**	**88%**	**88%**	**88%**	**88%**	**88%**	**88%**	**88%**	
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	perangkat daerah	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	perangkat daerah	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	laporan	3	3	3	3	3	3	3	3	
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	perangkat daerah	1	1	1	1	1	1	1	1	

No	Indikator	Satuan	Target Renstra				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
			2021	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2025	
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	perangkat daerah	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	laporan	3	3	3	3	3	3	3	3	
	Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan terhadap Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan		**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	
	Persentase hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan		**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	
	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	*laporan*	*3*	*3*	*3*	*3*	*3*	*3*	*3*	*3*	
	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	*laporan*	*6*	*6*	*6*	*6*	*6*	*6*	*6*	*6*	
	Persentase hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan		**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	
	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	*dokumen*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	
	Persentase hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan		**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	
	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	*dokumen*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	
	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	*dokumen*									
	Prosentase Rekomendasi hasil Inovasi dan Tehnologi		**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	
	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	*dokumen*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	

No	Indikator	Satuan	Target Renstra				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
			2021	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2025	
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	*laporan*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	
	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	**persen**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	
	Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;	**persen**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*dokumen*	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	*dokumen*	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	*dokumen*	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	*dokumen*	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	*dokumen*	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*laporan*	2	2	2	2	2	2	2	2	
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Laporan*	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**persen**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	*orang*	35	35	35	35	35	35	35	35	
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	*dokumen*	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	*dokumen*	12	12	12	12	12	12	12	12	

No	Indikator	Satuan	Target Renstra				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
			2021	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2025	
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	*dokumen*	45	45	45	45	45	45	45	45	
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*laporan*	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	*laporan*	16	16	16	16	16	16	16	16	
	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	*dokumen*	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**persen**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	*paket*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	
	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	*dokumen*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	*dokumen*	*12*	*12*	*12*	*12*	*12*	*12*	*12*	*12*	
	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	*dokumen*	*12*	*12*	*12*	*12*	*12*	*12*	*12*	*12*	
	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	*orang*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*	
	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	*orang*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	
	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	**persen**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	*paket*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	*paket*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	*paket*	*4*	*4*	*4*	*4*	*4*	*4*	*4*	*4*	

No	Indikator	Satuan	Target Renstra				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
			2021	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2025	
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	*paket*	*2*	*2*	*2*	*2*	*2*	*2*	*2*	*2*	
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	*dokumen*	*2*	*2*	*2*	*2*	*2*	*2*	*2*	*2*	
	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	*laporan*	*12*	*12*	*12*	*12*	*12*	*12*	*12*	*12*	
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*laporan*	*12*	*12*	*12*	*12*	*12*	*12*	*12*	*12*	
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	*dokumen*	*12*	*12*	*12*	*12*	*12*	*12*	*12*	*12*	
	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	*dokumen*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	
	Cakupan pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	***persen***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	*unit*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	*unit*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	***persen***	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*laporan*	*12*	*12*	*12*	*12*	*12*	*12*	*12*	*12*	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	*Laporan*	*4*	*4*	*4*	*4*	*4*	*4*	*4*	*4*	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	*Laporan*	*14*	*14*	*14*	*14*	*14*	*14*	*14*	*14*	
	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	***persen***	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	

No	Indikator	Satuan	Target Renstra				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
			2021	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2025	
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	*unit*	*23*	*23*	*23*	*23*	*23*	*23*	*23*	*23*	
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	*unit*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	

Pengukuran capaian kinerja ini merupakan hasil dari suatu penilaian sistematik yang sebagian besar didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator masukan, keluaran dan hasil. Berdasarkan target, realisasi dan tingkat capaian sasaran Bapperida Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024, dapat dijelaskan masing-masing indikator sasaran sebagai berikut :

Sasaran ke-1

Meningkatnya efektivitas pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, dengan Indikator Sasaran : Persentase capaian kinerja tujuan dan sasaran PD terhadap target kinerja tujuan dan sasaran PD, di Tahun 2024 sebesar 80%.

Hal ini merupakan komitmen Bapperida Kabupaten Sukoharjo dalam menjaga konsistensi pencapaian program seluruh OPD agar tujuan pembangunan dapat tercapai dengan optimal. Diharapkan dengan pencapaian yang optimal akan meningkatkan kemajuan Sukoharjo ke arah yang lebih baik.

Hal ini bisa dijabarkan dengan penelurusan hasil capaian program pertahunnya melalui data yang ada di LKPJ Bupati. Dalam LKPJ tersebut diperoleh data yang ada di tiap-tiap PD. Diharapkan dengan penelurusan dan kontrol yang baik akan meningkatkan pencapaian programnya di setiap tahunnya.

Sasaran ke-2

Meningkatnya sinkronisasi, dan sinergitas perencanaan pembangunan daerah, dengan Indikator Sasaran : Persentase keselarasan RKPD terhadap RPJMD, di Tahun 2024 ditargetkan sebesar 75%.

Pernyataan indikator sasaran yang kedua ini merupakan komitmen Bapperida Kabupaten Sukoharjo dalam menjaga konsistensi program antar dokumen perencanaan. Hal ini dirasa penting karena menjaga konsistensi program antar dokumen perencanaan berarti pula menjaga arah pembangunan Daerah sebagaimana yang sudah di tetapkan berdasarkan Dokumen Perencanaan dan merupakan arah haluan yang akan dicapai

Kabupaten Sukoharjo di masa yang akan datang. Konsistensi Program antar Dokumen Perencanaan membuat arah pembangunan dapat terarah, konsisten dan sesuai arah sebagaimana yang ditetapkan di dalam RPJMD dan merupakan penjabaran tertulis dari Visi dan Misi dari Kepala Daerah.

Hal ini merupakan komitmen Bapperida Kabupaten Sukoharjo dalam menjaga konsistensi pencapaian program seluruh PD agar tujuan pembangunan dapat tercapai dengan optimal. Diharapkan dengan pencapaian yang optimal akan meningkatkan kemajuan Sukoharjo ke arah yang lebih baik. Agar perencanaan tata ruang tersebut dapat berjalan dengan baik maka harus memenuhi prasyarat sebagai berikut :

1. Integratif, Bahwa setiap perencanaan harus dilaksanakan secara koordinatif dan sinkron terhadap skala waktu, tingkat pemerintahan, tingkat kepentingan dan skala wilayah dengan melibatkan semua pemangku kepentingan *(stakeholders);*
2. Implementatif, Bahwa setiap perencanaan harus dapat dioperasionalkan dan menuju pada penetapan produk hukum, sehingga mengikat semua pihak untuk melaksanakannya.

Sasaran ke-3

Meningkatnya Pemanfaatan hasil kelitbangan, dengan Indikator Sasaran : Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan yang mendukung perencanaan pembangunan daerah, ditargetkan Tahun 2024 sebesar 50%.

Prosentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang menjadi rumusan kebijakan Pembangunan Daerah dimana apabila penelitian yang di hasilkan menjadi rumusan kebijakan pembangunan daerah berarti sasaran tersebut dapat dikatakan berhasil karena produk yang dihasilkan telah digunakan demi membuat kebijakan bagi masyarakat.

Di karenakan pentingnya Penelitian dan pengembangan di dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah maka Bapperida Kabupaten Sukoharjo menjadikan sebagai Indikator sasaran ke-3 yang akan di capai oleh Bapperida Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024. Di harapkan dengan Indikator sasaran ketiga tersebut segala kebijakan pembangunan daerah telah di kaji secara ilmiah melalui penelitian dan pengembangan sehingga segala kebijakan yang di hasilkan dapat dipertanggungjawabkan secara konkrit.

Sasaran ke-4 :

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, dengan indikator Nilai SAKIP, di Tahun 2024 ditargetkan sebesar 65.

Indikator sasaran keempat ini menjelaskan Capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah yang diperoleh dari Hasil Evaluasi Inspektorat. Kabupaten Sukoharjo atas Pelaporan SAKIP Bapperida Kabupaten

Sukoharjo selama 1 Tahun (n-1 dan tahun ke n) yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, pemantauan kinerja dan pelaporan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Bapperida Kabupaten Sukoharjo.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Bapperida Kabupaten Sukoharjo merupakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang perencanaan dan penelitian & pengembangan. Sebagai perangkat daerah dengan fungsi perumusan kebijkan teknis perencanaan, pelaksana tugas teknis perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas teknis perencanaan dan pembinaan dibidang perencanaan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Bapperida Kabupaten Sukoharjo didukung dengan potensi sumber daya manusia dengan tingkat pendidikan tinggi. Namun demikian masih terdapat permasalahan-permasalahan yang dihadapi, yaitu :

1. Belum optimalnya pendayagunaan sarana prasarana dan kapasitas kelembagaan dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Pendayagunaan sarana dan prasarana perkantoran serta kapasitas kelembagaan dirasakan masih kurang optimal. Hal ini dapat dilihat dari kurangnya pemanfaatan sejumlah peralatan perkantoran secara efektif dan efisien maupun penggunaan peralatan perkantoran tersebut tidak difungsikan sebagaimana mestinya. Sedangkan penataan kapasitas kelembagaan masih dirasakan kurang sesuai dengan kebutuhan yang ada, selain penempatan personil (pegawai) yang kurang sesuai dengan kapasitas masing-masing pegawai tersebut (*back ground* pendidikan kurang sesuai dengan bidang tugas yang diemban)
2. Belum optimalnya penyusunan berbagai dokumen perencanaan pembangunan daerah. Penyusunan berbagai dokumen perencanaan pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh Bidang-bidang di Bapperida masih dirasakan kurang optimal. Hal ini lebih disebabkan oleh dinamisnya tingkat kebutuhan masyarakat yang memerlukan aturan yang jelas, disamping cepatnya perubahan peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi yang kadang-kadang antara peraturan satu dengan yang lainnya saling tumpang tindih.
3. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan daerah (proses perencanaan). Seiring dengan tuntutan untuk segera mewujudkan pemerintahan yang *good governance* dan *clean government*, kontribusi masyarakat (*stakeholders*) mutlak diperlukan. Hal ini diperlukan dalam rangka akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan sehingga asas keterbukaan dalam jalannya roda pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat (*stakeholders*).

4. Belum optimalnya sistem dan manajemen pengelolaan data dan informasi secara profesional. Kebutuhan akan ketersedian data dan informasi yang valid dan *up to date* dewasa ini adalah sesuatu yang mutlak. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan pelayanan akan kebutuhan data dan informasi kepada *stakeholders* dan atau pengguna data baik dari lembaga pemerintahan pusat, provinsi, kabupaten sampai dengan desa/kelurahan serta pihak swasta agar dapat menggunakannya untuk kepentingan masing-masing sehingga memperoleh hasil yang diharapkan. Bapperida sebagai institusi penyedia dan pengolah data dan informasi tentang pembangunan daerah berupaya dengan keras untuk meningkatkan manajemen pengelolaan, penyajian dan publikasi data dan informasi hasil-hasil pembangunan daerah yang lengkap dan berkualitas sehinggga diharapkan pada akhirnya akan mengurangi keslahan-kesalahan dalam merumuskan program / kegiatan sehingga perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah dapat tepat sasaran dan tepat manfaat.
5. Belum optimalnya peran dan fungsi penelitian dan pengembangan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Kurangnya perhatian terhadap hasil-hasil penelitian sebagai masukan bagi pengambilan kebijakan dirasakan cukup memprihatinkan, ditengah semakin besarnya tuntutan pembangunan daerah yang berkualitas dan tepat sasaran yang didasarkan pada hasil kajian ilmiah (akademis). Hal ini akan diatasi dengan mendorong tumbuhnya kemitraan dan sinergi antara pelaku IPTEK guna lebih meningkatkan kegiatan penelitian dan pengembangan tentang isu-isu strategis daerah serta penyediaan sarana dan prasarana penelitian dan pengembangan guna menghasilkan suatu hasil penelitian dan pengembangan yang bermanfaat sehingga benar-benar dapat digunakan sebagai acuan dalam pengambilan kebijakan.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD merupakan proses membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan analisis kebutuhan. Review terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 berkaitan dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2024. Rumusan kebutuhan program dan kegiatan dilengkapi dengan lokasi, indikator kinerja, besaran target atau tolak ukur dan besaran dana yang dibutuhkan. Program dan kegiatan yang ada pada Rencana Kerja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo tidak mengalami perubahan yang signifikan dan telah sesuai dengan Rencana Strategis Bapperida Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026, Namun ada perubahan terhadap besarnya pagu indikatif atau besarnya jumlah anggaran yang diusulkan untuk membiayai rencana kegiatan.

Rencana Kerja Bapperida Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 merupakan rencana kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam dokumen Rencana Strategis Bapperida Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026. Rencana Kerja Bapperida Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan tetap memperhatikan kepada Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024.

2.4.1. Perbandingan antara Rancangan Awal RKPD dengan Hasil Analisis Kebutuhan

Berdasarkan RPJPD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005-2025 (sebagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005-2025 dan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026, maka Rencana Kinerja Pemerintah Kabupaten Sukoharjo pada Bapperida Kabupaten Sukoharjo yang akan dicapai Tahun 2024 sebanyak 2 (dua) urusan penunjang sebagai berikut :

1. Urusan Perencanaan;
2. Urusan Penelitian dan Pengembangan.

Dari kedua urusan diatas dibagi dalam 4 (empat) program dan 18 (delapan belas) kegiatan yakni :

a. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah :
   1) Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
   2) Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
   3) Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam).
b. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota :
   1) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;

2) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
3) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
4) Administrasi Umum Perangkat Daerah;
5) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
8) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

c. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah:
1) Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
2) Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
3) Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan;
4) Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah.

d. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah :
1) Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan;
2) Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
3) Pengembangan Inovasi dan Teknologi.

2.4.2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan

Proses tersebut dilakukan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan upaya pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif. Adapun hal tersebut dapat diwujudkan melalui :

1. Penggunaan dana APBD adalah untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. oleh karena itu, akan terus dilakukan peningkatan program-program yang berorientasi pada masyarakat dan berupaya melaksanakan realisasi belanja daerah tepat waktu dengan mendorong proses penetapan Perda APBD secara tepat waktu pula.

2. Meningkatkan kualitas anggaran belanja daerah melalui pola penganggaran yang berbasis kinerja dengan pendekatan tematik pembangunan yang disertai sistem pelaporan yang makin akuntabel.
3. Dalam upaya meningkatkan kinerja pembangunan Kabupaten Sukoharjo sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026 serta peningkatan koordinasi dan sinergitas pembangunan antar tingkat pemerintahan, maka sesuai dengan kebutuhan, urusan dan kemampuan keuangan, diperlukan dana bantuan kepada masyarakat yang terdiri dari bantuan keuangan, bantuan hibah, dan bantuan sosial.
4. Mengalokasikan belanja tidak langsung yang meliputi gaji dan tunjangan ASN, belanja hibah, belanja sosial, belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dengan prinsip proporsional, pemerataan dan penyeimbang.

2.4.3. Temuan–temuan yang diperoleh setelah Proses tersebut dilakukan dan Catatan Penting terhadap Perbedaan dengan Ranwal RKPD

Berdasarkan tolok ukur peraturan perundang–undangan/pedoman, pelaksanaan proses perencanaan di Kabupaten Sukoharjo secara umum telah sesuai dengan aturan yang ada, yaitu Undang- Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dalam proses penyusunan dokumen perencanaan mulai dari Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra PD, Renja-PD dan RKPD sistematika dan substansi sudah mengacu pada peraturan tersebut namun belum sempurna. Pada penyusunan Renja-PD menampung usulan program dan kegiatan dari PD dan juga usulan program dan kegiatan secara partisipatif yaitu menjaring usulan program dan kegiatan dari masyarakat *(bottom-up)* atau *stakeholder* melalui mekanisme musrenbang dan forum PD, dari musrenbang dan forum PD inilah usulan program dan kegiatan di rekapitulasi dalam Renja-PD, kemudian dari Renja-PD usulan program dan kegiatan di adopsi sehingga tersusun Rancangan Awal RKPD.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan kajian terhadap program/ kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan. Pada Forum Perangkat Daerah, usulan program kegiatan dari pemangku kepentingan secara spesifik tidak ada yang ditujukan langsung ke Bapperida Kabupaten Sukoharjo tetapi kepada perangkat daerah terkait. Usulan yang disampaikan kepada Bapperida Kabupaten Sukoharjo pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang akan direncanakan.

Bapperida Kabupaten Sukoharjo dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya senantiasa memperhatikan usulan dari berbagai pihak termasuk dari para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari PD Kabupaten yang langsung ditujukan kepada PD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi PD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang Desa, Musrenbang Kecamatan hingga pada pelaksanaan Musrenbang Kabupaten.

Pada Bapperida Kabupaten Sukoharjo usulan pemangku kepentingan tidak ada, usulan dari pemangku kepentingan ditujukan kepada PD sesuai bidang peruntukannya, yakni Bidang Riset dan Inovasi, Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusa, serta Bidang Perencanaan Infrastruktur, Kewilayahan, Ekonomi dan Sumber Daya Alam. Perolehan Usulan Program dan Kegiatan di Bapperida Kabupaten Sukoharjo, melalui Proses sebagai berikut :

1. Musrenbang Desa;
   Musrenbang Desa merupakan forum musyawarah tahunan Para Pemangku Kepentingan Desa untuk menyepakati Rencana Kerja Pembangunan Desa tahun anggaran yang direncanakan. Musrenbang dilaksanakan oleh lembaga publik yaitu pemerintah desa, bekerja sama dengan warga dan para pemangku kepentingan lainnya. Musrenbang yang bermakna akan mampu membangun kesepahaman tentang kepentingan dan kemajuan desa, dengan cara memotret potensi dan sumber- sumber pembangunan yang tidak tersedia baik dari dalam maupun luar desa.
2. Musrenbang Kecamatan;
   Musrenbang Kecamatan merupakan forum musyawarah *stakeholder* kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari desa/kelurahan serta menyepakati kegiatan lintas desa/kelurahan di kecamatan tersebut sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah kabupaten/kota pada tahun berikutnya.

3. Forum PD;
   Forum PD (forum yang berhubungan dengan fungsi/ sub fungsi, kegiatan/sektor dan lintas sektor) adalah wadah bersama antar pelaku pembangunan untuk membahas prioritas kegiatan pembangunan hasil Musrenbang Kecamatan dengan PD atau gabungan PD sebagai upaya mengisi Rencana Kerja PD yang tata cara penyelenggaraannya difasilitasi oleh PD terkait.
4. Musrenbang Kabupaten.
   Musrenbang Kabupaten adalah musyawarah *stakeholder* Kabupaten untuk mematangkan rancangan RKPD Kabupaten berdasarkan Renja-PD hasil Forum PD dengan cara meninjau keserasian antara Renja-PD yang hasilnya digunakan untuk pemutakhiran RKPD.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Amanat konstitusi menegaskan bahwa anggaran negara dan daerah adalah instrumen untuk mencapai tujuan nasional dan tujuan daerah. Untuk itu politik perencanaan dan anggaran negara harus dikendalikan oleh tujuan atau manfaat yang akan dicapai dan bukan semata-mata dikendalikan oleh ketersediaan anggaran atau karena tugas pokok dan fungsi. Teknis perencanaan dan penganggaran dimaksudkan untuk memastikan tujuan pembangunan dapat dicapai dengan mengoptimalkan seluruh sumber daya (Pemerintah dan swasta) untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi dan keadilan.

Dengan melihat kondisi bangsa Indonesia saat ini, tantangan yang dihadapi dalam 20 tahun mendatang dengan memperhitungkan modal dasar yang dimiliki oleh bangsa Indonesia dan amanat pembangunan, maka visi pembangunan nasional untuk tahun 2020- 2024 adalah Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berdasarkan Gotong Royong.

Dalam upaya mewujudkan visi pembangunan nasional tersebut adalah melalui 9 (Sembilan) misi pembangunan nasional yaitu :

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya;
7. Perlindungan Bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya;
9. Sinergi Pemerintahan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Mengacu pada tujuan pembangunan jangka panjang tahun 2020-2024 adalah Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berdasarkan Gotong Royong sebagai landasan bagi tahap pembangunan berikutnya, sebagai ukuran tercapainya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berdasarkan Gotong Royong,

pembangunan nasional dalam 5 (lima) tahun mendatang, maka arah kebijakan umum pembangunan nasional tahun 2020-2024 adalah :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim;
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Dalam rangka mensinergikan pembangunan nasional dengan pembangunan daerah Kabupaten Sukoharjo, maka dapat disusun hubungan antara Kebijakan Pembangunan Nasional dengan Kebijakan Pembangunan Kabupaten Sukoharjo tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 3.1
Hubungan Prioritas Pembangunan Nasional dengan Prioritas Pembangunan Daerah

Prioritas Nasional	Prioritas Daerah
1. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam hal kesehatan dan pendidikan 3. Penanggulangan pengangguran yang disertai peningkatan decent job 4. Mendorong pemulihan dunia usaha 5. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan dalam rangka mendorong produktivitas 6. Ekonomi hijau 7. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar, antara lain air bersih dan sanitasi.	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing 2. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas 3. Peningkatan kepemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa yang berdasarkan hukum serta birokrasi yang profesional dan netral serta peningkatan kapasitas fiskal daerah 4. Pengurangan Kemiskinan 5. Peningkatan Infrastruktur Wilayah yang berwawasan lingkungan dan penguatan ketahanan bencana 6. Peningkatan revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila

	7. Kerjasama regional, kerjasama antara Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), dan kerjasama dengan komponen masyarakat

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja

Tujuan dan sasaran dalam Renja adalah turunan penjabaran dari Renstra yang ingin dicapai dalam waktu 1 (satu) tahun dan didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Bapperida Kabupaten Sukoharjo. Perumusan tujuan menjabarkan hal-hal yang dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan masalah dan menangani isu-isu strategis yang dihadapi Bapperida Kabupaten Sukoharjo. Lebih dari itu, perumusan tujuan Strategis juga memungkinkan untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah dicapai mengingat tujuan Strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Tujuan dan sasaran jangka menengah Bapperida Kabupaten Sukoharjo merupakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dicapai, sehingga merupakan arah yang akan dituju dalam terselenggaranya organisasi. Adapun tujuan Bapperida Kabupaten Sukoharjo adalah **"Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah dan Kelitbangan yang Berkualitas**", dengan indikator yang ditetapkan adalah Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dengan nilai BB di Tahun 2023 **.**

Pernyataan diatas dimaksudkan untuk menjadikan Bapperida Kabupaten Sukoharjo sebagai lembaga yang profesional dalam merespon aspirasi masyarakat dengan tetap memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku sesuai dengan tuntutan global dalam menghasilkan suatu perencanaan kabupaten yang transparan, akuntabel dan partisipatif untuk mendukung **"Mewujudkan Masyarakat Sukoharjo Yang Lebih Makmur".**

Untuk mendukung perwujudan tujuan Bapperida Kabupaten Sukoharjo, maka sasaran yang akan dijalankan adalah :

1. Meningkatnya efektivitas pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, dengan indikator sasaran Persentase capaian kinerja tujuan dan sasaran PD terhadap target kinerja tujuan dan sasaran PD dengan target sebesar **92%** di Tahun 2024;
2. Meningkatnya sinkronisasi, dan sinergitas perencanaan pembangunan daerah, dengan indikator sasaran Persentase keselarasan RKPD terhadap RPJMD dengan target sebesar **75%** di Tahun 2024;
3. Meningkatnya Pemanfaatan hasil kelitbangan, dengan indikator sasaran Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan yang mendukung perencanaan pembangunan daerah, dengan target sebesar **50%** di Tahun 2024;
4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja , dengan indikator sasaran Nilai SAKIP dengan target sebesar Nilai **73** di Tahun 2024,

3.3. Program dan Kegiatan

Apabila dikaitkan dengan pencapian Visi dan Misi Kabupaten Sukoharjo, pada dasarnya kegiatan Bapperida Kabupaten Sukoharjo adalah sebagai pengarah setiap program pembangunan dan sistem yang akan memberikan kemudahan bagi PD untuk menentukan arah dan sasaran kegiatan, lingkup dan pengukuran tingkat kesuksesannya.

Program dan kegiatan Rencana Kerja Bapperida Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 disusun dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut :

1. Mendukung pencapaian Visi Kepala Daerah terpilih yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026 yakni **"MEWUJUDKAN MASYARAKAT SUKOHARJO YANG LEBIH MAKMUR"**.
2. Mendukung pencapaian Misi Kepala Daerah terpilih yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026 yakni sebagai berikut :
   a. Misi I : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik melalui Percepatan Reformasi Birokrasi;
   b. Misi II : Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas;
   c. Misi III : Memperkuat Perekonomian Rakyat Yang Berdaya Saing Tinggi;
   d. Misi IV : Memperkuat Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan;
   e. Misi V : Meningkatkan Kualitas Kehidupan Sosial dan Keagamaan.
3. Misi I: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik melalui Percepatan Reformasi Birokrasi

   Misi ini mempunyai tujuan terwujudnya tata kepemerintahan yang profesional, dengan indikator kinerja adalah Indek Reformasi Birokrasi (IRB), dan sasaran yang ingin dicapai ada;ah meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel,
4. Misi II: Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas

   Misi ini mempunyai tujuan membentuk sumber daya manusia yang sehat, cerdas, inovatif, dan berkarakter dengan indikator kinerja adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah : 1) Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat; 2) Meningkatnya Kualitas Pendidikan; 3) Meningkatnya pengendalian penduduk; dan 4) Meningkatnya akses dan kualitas hidup, perlindungan terhadap perempuan dan anak serta kesetaraan gender

5. Misi III: Memperkuat Perekonomian Rakyat yang Berdaya Saing Tinggi

   Misi ini mempunyai tujuan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan insklusif, dengan indikator kinerja Pertumbuhan Ekonomi, Angka Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Pendapatan Per Kapita. Sasaran yang ingin dicapai dalam tujuan ini adalah 1) Meningkatnya pertumbuhan produktifitas dengan indikator; dan 2) Meningkatnya kualitas hidup penduduk miskin.

6. Misi IV: Memperkuat Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan

   Misi ini mempunyai tujuan meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, dengan indikator kinerja Indeks Pembangunan Infrastruktur (IPI), dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), dan Indeks Resiko Bencana. Sasaran yang ingin dicapai adalah 1) Meningkatnya kualitas infrastruktur; dan 2) Meningkatnya kualitas lingkungan.

7. Misi V: Meningkatkan Kualitas Kehidupan Sosial dan Keagamaan

   Misi ini mempunyai tujuan mewujudkan masyarakat Sukoharjo yang aman dan nyaman, dengan indikator adalah Persentase penurunan konflik SARA. Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah Meningkatnya kualitas ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Secara garis besar Program dan Kegiatan yang direncanakan pada tahun 2024 dan bersifat Loyalitas Kewenangan Bapperida Kabupaten Sukoharjo adalah sebagai berikut :

1. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah:
   a. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
   b. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
   c. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam).
2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota:
   a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
   b. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
   c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
   d. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
   e. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
   f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
   g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;

3. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah:
    a. Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
    b. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
    c. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan.
    d. Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah
4. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah :
    a. Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
    b. Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan;
    c. Pengembangan Inovasi dan Teknologi.

Dalam Renja Bapperida Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 ini, Bapperida Kabupaten Sukoharjo merencanakan 4 (Empat) program dan 17 (tujuh belas) kegiatan dengan jumlah total pagu indikatif sebesar Rp. 10.481.491.000 dengan lokasi kegiatan terpusat di wilayah Kabupaten Sukoharjo kecuali untuk kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang dilakukan di luar daerah. Dari total pagu indikatif tersebut, seluruhnya bersumber dari dana alokasi umum (DAU). Berikut disajikan pada tabel 3.1 rumusan rencana program dan kegiatan Bapperida Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 3.2
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

Nama Perangkat Daerah : Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapperida)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	**Persentase capaian target kinerja program, kegiatan, sub kegiatan PD**	**Persen**	Kabupaten Sukoharjo	**100%**	**Rp1.535.000.000**	D A U		**100%**	**Rp1.535.000.000**
	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	**Cakupan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah**	**persen**	Kabupaten Sukoharjo	**100%**	**Rp1.140.000.000**	D A U		**100%**	**Rp1.140.000.000**
	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	*Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)*	*dokumen*	Kabupaten Sukoharjo	*3*	*Rp270.000.000*	D A U		*1*	*Rp30.000.000*
	Pelaksanaan Konsultasi Publik	*Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik*	*berita acara*	Kabupaten Sukoharjo	*2*	*Rp60.000.000*	D A U		*1*	*Rp40.000.000*
	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	*Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah*	*berita acara*	Kabupaten Sukoharjo	*40*	*Rp30.000.000*	D A U		*40*	*Rp25.000.000*
	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	*Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota*	*berita acara*	Kabupaten Sukoharjo	*3*	*Rp450.000.000*	D A U		*1*	*Rp140.000.000*

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	*Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan*	*usulan*	Kabupaten Sukoharjo	*1670*	*Rp15.000.000*	D A U		*1670*	*Rp15.000.000*
	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)*	*dokumen*	Kabupaten Sukoharjo	3	*Rp500.000.000*	D A U		1	*Rp850.000.000*
	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;	**Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah**		Kabupaten Sukoharjo	**100**	**Rp220.000.000**	D A U		**100**	**Rp220.000.000**
	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)*	*Dokumen*	Kabupaten Sukoharjo	*1*	*Rp70.000.000*	D A U		*1*	*Rp100.000.000*
	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	*Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi*	*Orang*	Kabupaten Sukoharjo	*100*	*Rp50.000.000*	D A U		*100*	*Rp70.000.000*
	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Profil Pembangunan Daerah*	*dokumen*	Kabupaten Sukoharjo	*1*	*Rp30.000.000*	D A U		*1*	*Rp50.000.000*

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	**Cakupan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**		Kabupaten Sukoharjo	**100%**	**Rp175.000.000**	D A U		**100%**	**Rp175.000.000**
	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	*Jumlah Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah*	*Kali*	Kabupaten Sukoharjo	*2*	*Rp50.000.000*	D A U		*12*	*Rp50.000.000*
	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	*Jumlah Koordinasi tentang Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah*	*Kali*	Kabupaten Sukoharjo	*4*	*Rp25.000.000*	D A U		*4*	*Rp25.000.000*
	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah*	*laporan*	Kabupaten Sukoharjo	*4*	*Rp100.000.000*	D A U		*4*	*Rp100.000.000*
	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	*Prosentase Implementasi SIPD di Bidang Pembangunan Daerah*	*persen*	Kabupaten Sukoharjo	*100*	*Rp230.000.000*	DAU		*100*	*Rp250.000.000*
	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	*Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola*	*dokumen*	Kabupaten Sukoharjo	*1*	*Rp50.000.000*	DAU		*1*	*Rp70.000.000*

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota*	*dokumen*	Kabupaten Sukoharjo	*1*	*Rp50.000.000*	DAU		*1*	*Rp60.000.000*
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			Kabupaten Sukoharjo		**Rp2.425.000.000**	D A U			**Rp2.425.000.000**
		Persentase keselarasan RKPD terhadap RPJMD bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		Kabupaten Sukoharjo	**92%**	**Rp730.000.000**	D A U		**88%**	**Rp730.000.000**
		Persentase keselarasan RKPD terhadap RPJMD Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)		Kabupaten Sukoharjo	**92%**	**Rp370.000.000**	D A U		**88%**	**Rp370.000.000**
		Persentase keselarasan RKPD terhadap RPJMD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		Kabupaten Sukoharjo	**92%**	**Rp1.325.000.000**	D A U		**88%**	**Rp1.325.000.000**
	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;	**Persentase keselarasan dokumen Renja terhadap Renstra bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**		Kabupaten Sukoharjo	**92%**	**Rp730.000.000**	D A U		**88%**	**Rp730.000.000**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	*Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)*	dokumen	Kabupaten Sukoharjo	1	*Rp185.000.000*	D A U		1	*Rp185.000.000*
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	*Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan*	Laporan	Kabupaten Sukoharjo	1	*Rp60.000.000*	D A U		1	*Rp60.000.000*
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	*Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan*	Laporan	Kabupaten Sukoharjo	1	*Rp20.000.000*	D A U		1	*Rp20.000.000*
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	*Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan*	Laporan	Kabupaten Sukoharjo	3	*Rp100.000.000*	D A U		3	*Rp100.000.000*
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan	*Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang*	Dokumen	Kabupaten Sukoharjo	1	*Rp185.000.000*	D A U		1	*Rp185.000.000*

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	*Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)*								
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	*Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia*	Laporan	Kabupaten Sukoharjo	1	*Rp60.000.000*	D A U		1	*Rp60.000.000*
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	*Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia*	Laporan	Kabupaten Sukoharjo	1	*Rp20.000.000*	D A U		1	*Rp20.000.000*
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harminisasi Perencanaan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	*Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia*	Laporan	Kabupaten Sukoharjo	3	*Rp100.000.000*	D A U		3	*Rp100.000.000*
	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan	**Persentase keselarasan dokumen Renja terhadap Renstra bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**		Kabupaten Sukoharjo	**92%**	**Rp370.000.000**	D A U		**88%**	**Rp370.000.000**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	SDA (Sumber Daya Alam);									
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	*Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)*	Dokumen	Kabupaten Sukoharjo	1	Rp20.000.000	D A U		1	Rp20.000.000
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	*Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian*	Laporan	Kabupaten Sukoharjo	1	Rp35.000.000	D A U		1	Rp35.000.000
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	*Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian*	Laporan	Kabupaten Sukoharjo	1	Rp200.000.000	D A U		1	Rp200.000.000
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	*Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian*	Laporan	Kabupaten Sukoharjo	1	Rp50.000.000	D A U		1	Rp50.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang SDA	*Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)*	Dokumen	Kabupaten Sukoharjo	1	Rp15.000.000	D A U		1	Rp15.000.000
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	*Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA*	Laporan	Kabupaten Sukoharjo	1	Rp15.000.000	D A U		1	Rp15.000.000
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	*Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA*	Laporan	Kabupaten Sukoharjo	1	Rp10.000.000	D A U		1	Rp10.000.000
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	*Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA*	Laporan	Kabupaten Sukoharjo	1	Rp25.000.000	D A U		1	Rp25.000.000
	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	**Persentase keselarasan dokumen Renja terhadap Renstra bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**		Kabupaten Sukoharjo	**92%**	**Rp1.325.000.000**	D A U		**88%**	**Rp1.325.000.000**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	*Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)*	*Dokumen*	Kabupaten Sukoharjo	1	Rp75.000.000	D A U		1	Rp75.000.000
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	*Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur*	*Laporan*	Kabupaten Sukoharjo	1	Rp65.000.000	D A U		1	Rp65.000.000
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	*Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur*	*Laporan*	Kabupaten Sukoharjo	1	Rp15.000.000	D A U		1	Rp15.000.000
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	*Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur*	*Laporan*	Kabupaten Sukoharjo	1	Rp490.000.000	D A U		3	Rp490.000.000
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	*Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)*	*Dokumen*	Kabupaten Sukoharjo	1	Rp75.000.000	D A U		1	Rp75.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)									
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	*Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan PerangkatDaerah Bidang Kewilayahan*	Laporan	Kabupaten Sukoharjo	1	Rp65.000.000	D A U		1	Rp65.000.000
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	*Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan*	Laporan	Kabupaten Sukoharjo	1	Rp15.000.000	D A U		1	Rp15.000.000
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	*Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan*	Laporan	Kabupaten Sukoharjo	1	Rp525.000.000	D A U		3	Rp525.000.000
	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	**Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan terhadap Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan**		Kabupaten Sukoharjo	**100%**	**Rp980.000.000**	D A U		**100%**	**Rp980.000.000**
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan	**Persentase hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**		Kabupaten Sukoharjo	**100%**	**Rp250.000.000**	D A U		**100%**	**Rp250.000.000**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Pengkajian Peraturan									
	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	*Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik*	*laporan*	Kabupaten Sukoharjo	*2*	*Rp200.000.000*	D A U		*3*	*Rp200.000.000*
	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	*Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan*	*laporan*	Kabupaten Sukoharjo	*1*	*Rp50.000.000*	D A U		*6*	*Rp50.000.000*
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	**Persentase hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan**		Kabupaten Sukoharjo	**100%**	**Rp250.000.000**	D A U		**100%**	**Rp250.000.000**
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	*Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial*	*dokumen*	Kabupaten Sukoharjo	*1*	*Rp250.000.000*	D A U		*1*	*Rp250.000.000*
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	**Persentase hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan**		Kabupaten Sukoharjo	**100%**	**Rp250.000.000**	D A U		**100%**	**Rp250.000.000**
	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	*Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah*	*dokumen*	Kabupaten Sukoharjo	*1*	*Rp250.000.000*	D A U		*1*	*Rp250.000.000*
	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	*Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup*	*dokumen*	Kabupaten Sukoharjo	*1*		D A U			
	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	**Prosentase Rekomendasi hasil Inovasi dan Tehnologi**		Kabupaten Sukoharjo	**100%**	**Rp230.000.000**	D A U		**100%**	**Rp230.000.000**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	*Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi*	*Dokumen*	Kabupaten Sukoharjo	*1*	*Rp165.000.000*	D A U		*100*	*Rp165.000.000*
	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	*Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan*	*Laporan*	Kabupaten Sukoharjo	*1*	*Rp65.000.000*	D A U		*100*	*Rp65.000.000*
				Kabupaten Sukoharjo			D A U			
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah**	**persen**	Kabupaten Sukoharjo	**100%**	**Rp5.993.000.000**	D A U		**100%**	**Rp5.993.000.000**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;**	**persen**	Kabupaten Sukoharjo	**100**	**Rp145.000.000**	D A U		**100**	**Rp145.000.000**
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Disusun*	*dokumen*	Kabupaten Sukoharjo	2	Rp45.000.000	D A U		1	Rp45.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*	*dokumen*	Kabupaten Sukoharjo	2	Rp10.000.000	D A U		1	Rp10.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	*Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD*	*dokumen*	Kabupaten Sukoharjo	2	Rp10.000.000	D A U		1	Rp10.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil*	*laporan*	Kabupaten Sukoharjo	2	Rp45.000.000	D A U		2	Rp45.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*								
	Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*Laporan*	Kabupaten Sukoharjo	4	Rp15.000.000	D A U		1	Rp15.000.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**persen**	Kabupaten Sukoharjo	**100%**	**Rp4.203.000.000**	D A U		**100%**	**Rp4.203.000.000**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	*orang*	Kabupaten Sukoharjo	35	Rp3.860.000.000	D A U		35	Rp3.860.000.000
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	*dokumen*	Kabupaten Sukoharjo	3	Rp10.000.000	D A U		0	Rp10.000.000
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*	*dokumen*	Kabupaten Sukoharjo	15	Rp250.000.000	D A U		12	Rp250.000.000
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	*Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD*	*dokumen*	Kabupaten Sukoharjo	4	Rp11.000.000	D A U		45	Rp11.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	*laporan*	Kabupaten Sukoharjo	1	Rp10.000.000	D A U		1	Rp10.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD*	*laporan*	Kabupaten Sukoharjo	19	Rp41.000.000	D A U		16	Rp41.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	*Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran*	*dokumen*	Kabupaten Sukoharjo	1	Rp21.000.000	D A U		1	Rp21.000.000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**persen**	Kabupaten Sukoharjo	**100%**	**Rp300.000.000**	D A U		**100%**	**Rp300.000.000**
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*	*paket*	Kabupaten Sukoharjo	*100*	*Rp50.000.000*	D A U		*100*	*Rp50.000.000*
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	*Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian*	*dokumen*	Kabupaten Sukoharjo	*1*	*Rp5.000.000*	D A U		*1*	*Rp5.000.000*
	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian*	*dokumen*	Kabupaten Sukoharjo	*1*	*Rp10.000.000*	D A U		*12*	*Rp10.000.000*
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	*Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai*	*dokumen*	Kabupaten Sukoharjo	*2*	*Rp15.000.000*	D A U		*12*	*Rp15.000.000*
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan*	*orang*	Kabupaten Sukoharjo	*50*	*Rp55.000.000*	D A U		*50*	*Rp55.000.000*
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan*	*orang*	Kabupaten Sukoharjo	*90*	*Rp165.000.000*	D A U		*100*	*Rp165.000.000*
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**persen**	Kabupaten Sukoharjo	**100%**	**Rp640.000.000**	D A U		**100%**	**Rp640.000.000**
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	*paket*	Kabupaten Sukoharjo	*1*	*Rp60.000.000*	D A U		*1*	*Rp60.000.000*

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*	*paket*	Kabupaten Sukoharjo	*5*	*Rp90.000.000*	D A U		*0*	*Rp90.000.000*
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	*paket*	Kabupaten Sukoharjo	*1*	*Rp90.000.000*	D A U		*4*	*Rp90.000.000*
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	*paket*	Kabupaten Sukoharjo	*2*	*Rp65.000.000*	D A U		*2*	*Rp65.000.000*
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*	*dokumen*	Kabupaten Sukoharjo	*60*	*Rp15.000.000*	D A U		*2*	*Rp15.000.000*
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	*laporan*	Kabupaten Sukoharjo	*12*	*Rp35.000.000*	D A U		*12*	*Rp35.000.000*
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*laporan*	Kabupaten Sukoharjo	*12*	*Rp275.000.000*	D A U		*12*	*Rp275.000.000*
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD*	*dokumen*	Kabupaten Sukoharjo	*12*	*Rp5.000.000*	D A U		*12*	*Rp5.000.000*
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	*Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD*	*dokumen*	Kabupaten Sukoharjo	*1*	*Rp5.000.000*	D A U		*1*	*Rp5.000.000*
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	***Cakupan pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	***persen***	Kabupaten Sukoharjo	***100%***	***Rp310.000.000***	D A U		***100%***	***Rp310.000.000***
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	*Unit*	Kabupaten Sukoharjo	*1*	*Rp10.000.000*	D A U		*0*	*Rp10.000.000*

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Kantor atau Bangunan Lainnya									
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	***persen***	Kabupaten Sukoharjo	**100%**	**Rp145.000.000**	D A U		**100%**	**Rp145.000.000**
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	*laporan*	Kabupaten Sukoharjo	*12*	*Rp45.000.000*	D A U		*12*	*Rp45.000.000*
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	*Laporan*	Kabupaten Sukoharjo	*4*	*Rp50.000.000*	D A U		*4*	*Rp50.000.000*
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	*Laporan*	Kabupaten Sukoharjo	*14*	*Rp50.000.000*	D A U		*14*	*Rp50.000.000*
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	***persen***	Kabupaten Sukoharjo	**100%**	**Rp250.000.000**	D A U		**100%**	**Rp250.000.000**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	*Unit*	Kabupaten Sukoharjo	*25*	Rp250.000.000	D A U		*23*	Rp250.000.000
	JUMLAH					**Rp10.933.000.000**				**Rp10.933.000.000**

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, diuraikan bahwa pada Bab IV fokus perhatiannya adalah terkait dengan rencana kerja dan pendanaan dokumen rencana kerja Bapperida Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024.

Dokumen Rencana Kerja Bapperida Kabupaten Sukoharjo merupakan penjabaran dari dokumen rencana strategis Bapperida yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sukoharjo. Rencana Kerja (Renja) disusun untuk satu tahun yang memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai dengan tugas dan fungsi BAPPERIDA Kabupaten Sukoharjo yang ditransformasikan melalui Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

Rumusan program dan kegiatan pembangunan daerah menghasilkan rencana pembangunan yang konkrit dalam bentuk program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah. Dalam Renja Bapperida Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 terdapat 4 (empat) program dan 17 (tujuh belas) kegiatan, baik program utama yang merupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam mendukung visi dan misi daerah, maupun program dan kegiatan pendukung. Untuk menilai pencapaian kegiatan, maka pada setiap kegiatan dirumuskan indikator kinerja kegiatan. Perumusan kegiatan juga telah diarahkan untuk mendukung pencapaian kinerja pada setiap program.

Seluruh program dan kegiatan Bapperida Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 yang tertuang dalam Renja didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sukoharjo yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU).

Program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan urusan yang ditangani Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sukoharjo berikut kebutuhan anggaran dan sumber pendanaannya dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut ini.

Tabel 4.1
Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2024

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Pagu Dana (Draft) 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	BAPPERIDA				**Rp10.481.491.000**
	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	**Persentase capaian target kinerja program, kegiatan, sub kegiatan PD**		**100%**	**Rp1.670.000.000**
	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	**Cakupan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah**		**100%**	**Rp1.325.000.000**
	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	*Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)*	*dokumen*	*3*	*Rp270.000.000*
	Pelaksanaan Konsultasi Publik	*Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik*	*berita acara*	*2*	*Rp60.000.000*
	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	*Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah*	*berita acara*	*40*	*Rp30.000.000*
	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	*Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota*	*berita acara*	*3*	*Rp450.000.000*
	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	*Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan*	*usulan*	*1670*	*Rp15.000.000*
	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)*	*dokumen*	3	*Rp500.000.000*
	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;	**Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah**		**100**	**Rp150.000.000**
	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	*Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)*	*masukan*	*1*	*Rp70.000.000*
	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	*Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi*	*orang*	*100*	*Rp50.000.000*
	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota	*Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan*	*buku*	*1*	*Rp30.000.000*
	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	**Cakupan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Persen**	**100**	**Rp125.000.000**
	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/ Kota	*Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan*	*laporan*	*2*	*Rp50.000.000*
	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah*	*laporan*	*4*	*Rp75.000.000*
	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	**Prosentase Implementasi SIPD di Bidang Pembangunan Daerah**	***Persen***	***100***	***Rp70.000.000***

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Pagu Dana (Draft) 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	*Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola*	*Dokumen*	*1*	*Rp50.000.000*
	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota	*Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota*	*Dokuemn*	*1*	*Rp20.000.000*
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				**Rp2.122.210.000**
		Persentase keselarasan RKPD terhadap RPJMD bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		**92%**	**Rp590.000.000**
		Persentase keselarasan RKPD terhadap RPJMD Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)		**92%**	**Rp450.000.000**
		Persentase keselarasan RKPD terhadap RPJMD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		**92%**	**Rp1.082.000.000**
	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;	**Persentase keselarasan dokumen Renja terhadap Renstra bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**		**92%**	**Rp590.000.000**
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	*Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)*	dokumen	1	*Rp20.000.000*
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	*Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan*	Laporan	1	*Rp40.000.000*
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	*Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan*	Laporan	1	*Rp50.000.000*
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	*Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan*	Laporan	3	*Rp200.000.000*
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	*Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)*	Dokumen	1	*Rp90.000.000*
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	*Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia*	Laporan	1	*Rp30.000.000*

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Pagu Dana (Draft) 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	*Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia*	Laporan	1	*Rp0*
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harminisasi Perencanaan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	*Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia*	Laporan	3	*Rp160.000.000*
	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam);	**Persentase keselarasan dokumen Renja terhadap Renstra bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**		**92%**	**Rp450.000.000**
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	*Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)*	dokumen	1	Rp25.000.000
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	*Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian*	Laporan	1	Rp15.000.000
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	*Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian*	Laporan	1	Rp25.000.000
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	*Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian*	Laporan	1	Rp250.000.000
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang SDA	*Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)*	dokumen	1	Rp15.000.000
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	*Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA*	Laporan	1	Rp10.000.000
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	*Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA*	Laporan	1	Rp10.000.000
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	*Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA*	Laporan	1	Rp100.000.000
	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	**Persentase keselarasan dokumen Renja terhadap Renstra bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**		**92%**	**Rp1.082.000.000**
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	*Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)*	Dokumen	1	Rp65.279.000

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Pagu Dana (Draft) 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	*Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur*	Laporan	1	Rp45.817.000
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	*Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur*	Laporan	1	Rp15.000.000
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	*Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur*	Laporan	1	Rp382.904.000
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	*Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)*	Dokumen	1	Rp26.670.000
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	*Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan PerangkatDaerah Bidang Kewilayahan*	Laporan	1	Rp26.670.000
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	*Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan*	Laporan	1	Rp19.870.000
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	*Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan*	Laporan	1	Rp500.000.000
	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	**Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan terhadap Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan**		**100%**	**Rp785.000.000**
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	**Persentase hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**		**100%**	**Rp275.000.000**
	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	*Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik*	*laporan*	*2*	*Rp200.000.000*
	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	*Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan*	*laporan*	*1*	*Rp75.000.000*
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	**Persentase hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan**		**100%**	**Rp150.000.000**
	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	*Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup*	*dokumen*	*1*	*Rp150.000.000*
	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	**Prosentase Rekomendasi hasil Inovasi dan Tehnologi**		**100%**	**Rp360.000.000**
	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	*Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi*	*dokumen*	*1*	*Rp280.000.000*

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Pagu Dana (Draft) 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	*Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan*	*laporan*	*1*	*Rp80.000.000*
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah**	**persen**	**100%**	**Rp5.993.000.000**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;**	**persen**	**100**	**Rp100.000.000**
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Disusun*	*dokumen*	2	Rp40.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*	*dokumen*	1	Rp5.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD*	*dokumen*	1	Rp5.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	*Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD*	*dokumen*	1	Rp5.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD*	*dokumen*	1	Rp5.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	*laporan*	2	Rp30.000.000
	Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*Laporan*	4	Rp10.000.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**persen**	**100%**	**Rp4.759.931.000**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	*orang*	35	4.479.931.000
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*	*dokumen*	15	Rp260.000.000
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	*Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD*	*dokumen*	4	Rp5.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	*laporan*	1	Rp5.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD*	*laporan*	19	Rp5.000.000
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	*Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran*	*dokumen*	1	Rp5.000.000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**persen**	**100%**	**Rp216.250.000**
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*	*paket*	*100*	*Rp0*

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Pagu Dana (Draft) 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	*Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian*	*dokumen*	*1*	*Rp25.000.000*
	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian*	*dokumen*	*1*	*Rp10.000.000*
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	*Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai*	*dokumen*	*2*	*Rp10.000.000*
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan*	*orang*	*50*	*Rp21.250.000*
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan*	*orang*	*90*	*Rp150.000.000*
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**persen**	**100%**	**Rp431.000.000**
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	*paket*	*1*	*Rp100.000.000*
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*	*paket*	*5*	*Rp20.000.000*
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	*paket*	*1*	*Rp90.000.000*
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	*paket*	*2*	*Rp40.000.000*
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*	*dokumen*	*60*	*Rp6.000.000*
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	*laporan*	*12*	*Rp15.000.000*
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*laporan*	*12*	*Rp150.000.000*
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD*	*dokumen*	*12*	*Rp5.000.000*
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	*Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD*	*dokumen*	*1*	*Rp5.000.000*
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	***Cakupan pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	***persen***	***100%***	***Rp25.000.000***
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	*unit*	*1*	*Rp25.000.000*
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	***persen***	**100%**	**Rp140.000.000**
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	*laporan*	*12*	*Rp30.000.000*
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	*Laporan*	*4*	*Rp30.000.000*
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	*Laporan*	*14*	*Rp80.000.000*
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	***persen***	**100%**	**Rp232.100.000**

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Pagu Dana (Draft) 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	*unit*	*25*	Rp232.100.000

BAB V
P E N U T U P

Dokumen Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 ini nantinya merupakan pelaksanaan Rencana Strategis Bapperida Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026. Program dan kegiatan yang direncanakan merupakan prioritas dalam rangka mencapai visi dan misi Kabupaten Sukoharjo dan mendukung tercapainya visi dan misi pembangunan daerah jangka menengah. Rencana Kerja Bapperida Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi Bapperida Kabupaten Sukoharjo dalam menjalankan tugas dan fungsinya dan sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2024.

Untuk itu terkait dengan kaidah pelaksanan, Bapperida Kabupaten Sukoharjo sebagai *leading sector* yang diberikan kewenangan merencanakan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar senantiasa bekerja bersama sesuai dengan *standar operasional prosedur* untuk menghasilkan formulasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah yang dapat diimplementasikan dalam bentuk target kinerja dan realisasi sesuai kaidah dan aturan yang berlaku.

Rencana tindak lanjut dari dokumen Rencana Kerja Bapperida Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 adalah adanya masukan, informasi, saran dan data dari bidang-bidang untuk melakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya sehingga menghasilkan dokumen Rencana Kerja Bapperida Kabupaten Sukoharjo yang prospektif, realistis dan akuntabel serta transparan dalam rangka mewujudkan pembangunan berasaskan keadilan untuk kesejahteraan rakyat.

BUPATI SUKOHARJO

ETIK SURYANI

RENCANA KERJA

2024

Dinas Sosial

Kabupaten Sukoharjo

0271-593024

dinsos@sukoharjokab.go.id

Jl. Veteran No. 61, Jetis, Sukoharjo

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, sang Maha Pencipta Semesta Alam, karena dengan rahmat dan hidayah-Nya, Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo telah menyelesaikan penyusunan Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2024.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) merupakan acuan perencanaan kegiatan PD selama satu tahun dan merupakan penjabaran tahunan dari RPJMD dan Renstra-PD. Adapun penyusunan Renja PD merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, sedangkan aturan secara rinci berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Rencana Kerja Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan tahun ketiga dari Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026 yang memuat rencana tujuan dan sasaran periode tersebut yang hendak dicapai pada APBD di Tahun 2024. Dokumen ini menjadi salah satu referensi untuk formulasi, implementasi, monitoring dan evaluasi kebijakan serta memberi manfaat dalam upaya serapan anggaran yang rasional dan kinerja yang profesional, akuntabel dan transparan untuk pembangunan yang berasaskan keadilan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Sukoharjo, September 2023

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN SUKOHARJO

SUPARMIN, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19770121 199803 1 002

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 1

1.3 Maksud dan Tujuan 3

1.4 Sistematika Penulisan 3

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2021 5

2.1 Evaluasi Capaian Renstra OPD dan Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Sosial 5

2.2 Analisa Kinerja Pelayanan OPD 38

2.3 Isu- Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD 41

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....41

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ..67

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 68

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional.....68

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD 69

3.3 Program dan Kegiatan OPD Tahun 2024 69

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 79

BAB V PENUTUP 86

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo dan Pencapaian Renstra Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo s/d Tahun 2023 Kabupaten Sukoharjo.....18

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 39

Tabel 2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo 43

Tabel 3.1 Program dan Kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 70

Tabel 4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 80

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Pembangunan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Organisasi Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja (Renja) Sebagai dokumen rencana tahunan Organisasi Perangkat Daerah mempunyai arti strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah mengingat beberapa hal berikut:

1. Renja OPD merupakan dokumen yang memuat kebijakan, rencana program, kegiatan dan kebutuhan anggaran indikatif kegiatan yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran (RKA).
2. Renja merupakan acuan OPD untuk memasukkan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2024.
3. Renja OPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/ kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja pada tahun sebelumnya.
4. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

1.2 Landasan Hukum

Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 disusun berdasarkan:

1. Undang- undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang- undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman valuasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan keuangan Daerah
10. Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Permendagri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Permendagri No. 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005- 2025;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukoharjo tahun 2021-2026;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo;

16. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 74 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja Tahun 2024 ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024. Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan renja ini adalah :

1. Menjabarkan rencana strategis Dinas Sosial tahun 2021 - 2026.
2. Merumuskan program-program prioritas untuk mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi pada tahun yang lalu dan tahun yang akan datang.
3. Meningkatkan koordinasi dalam rangka mewujudkan sinergi pelaksanaan program dan kegiatan OPD.
4. Menciptakan efektifitas dan efisiensi pemanfaatan sumberdaya organisasi.
5. Menciptakan kesinambungan kegiatan pembangunan dari tahun ke tahun dan keselarasan program, kegiatan OPD dengan program dan kegiatan Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dan garis besar isi dokumen Renja Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 telah mengacu pada Permendagri No. 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yaitu sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN
   1.1 Latar Belakang
   1.2 Landasan Hukum
   1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan
2. BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2021
2.1 Evaluasi Capaian Renstra OPD dan Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Sosial
2.2 Analisa Kinerja Pelayanan OPD
2.3 Isu- Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
3. BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD
3.3 Program dan Kegiatan OPD Tahun 2024
4. BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
5. BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA DINAS SOSIAL KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2022

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 dan Capaian Renstra Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo

Proses penyusunan suatu perencanaan erat kaitannya dengan proses evaluasi, dari hasil evaluasi dapat teridentifikasi dua hal yaitu sejauh mana proses perencanaan pembangunan dilaksan akan oleh seluruh SKPD dan permasalahan-permasalahan yang rnenghambat pelaksanaan perencanaan pembangunan tersebut. Hasil evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan di tahun-tahun mendatang.

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Sosial dilaksanakan setelah selesai tahun anggaran berjalan, hasil dari evaluasi tersebut digunakan sebagai bahan untuk Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2022, pelaksanaan kinerja Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo ditunjang dengan Belanja Operasi yang anggaranya diperuntukkan untuk Belanja Pegawai dan diperuntukkan Belanja Urusan Sosial, dengan ruang lingkup Sub Kegiatanya sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
   a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
      1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
         Sub Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 25.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 24.482.600,00 atau 97,93%, keluaran Sub Kegiatan ini berupa terlaksananya Kegiatan penyusunan dokumen perencanaan.
      2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
         Sub Kegiatan ini di anggarkan sebesar Rp. 5.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 4.812.000,00 atau 96,24% keluaran Sub Kegiatan ini berupa terlaksananya Kegiatan

penyusunan dokumen RKA-SKPD.

3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

   Sub Kegiatan ini di anggarkan sebesar Rp. 5.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 4.682.000,00 atau 93,64% Sub Kegiatan ini ditujukan untuk terlaksananya penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD.

4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

   Sub Kegiatan ini di anggarkan Rp. 5.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 4.998.000,00 atau 99,96% Sub Kegiatan ini ditujukan untuk terlaksananya penyusunan dokumen DPA-SKPD.

5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD

   Sub Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 5.000.000,00 dan teralisasi sebesar Rp. 4.982.000,00 atau 99,64% Sub Kegiatan ini ditujukan untuk terlaksananya penyusunan perubahan dokumen DPA-SKPD.

6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

   Sub Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 5.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 4.985.000,00 atau 99,7% Sub Kegiatan ini ditujukan untuk terlaksananya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

   Sub Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 5.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 4.977.000,00 atau 99,54% Sub Kegiatan ini ditujukan untuk terlaksananya Dokumen Evaluasi kinerja Perangkat Daerah.

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

   Sub Kegiatan ini di anggarkan Rp. 3.750.207.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 3.463.327.305,00 atau 92,35% Sub Kegiatan ini ditujukan untuk terlaksananya ASN yang disediakan gaji dan tunjangan.

2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

   Sub Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 309.400.000,00 dan terealisasi Rp. 290.493.200,00 atau 93,89% Sub Kegiatan ini ditujukan untuk terlaksananya dokumen SPJ dan yang telah Verifikasi dan disahkan.

3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

   Sub Kegiatan ini di anggarkan sebesar Rp. 10.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 9.860.000,00 atau 98,6% Sub Kegiatan ini ditujukan untuk terlaksananya dokumen pelaporan keuangan akhir tahun.

4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/triwulan/semesteran SKPD

   Sub Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 5.000.000,00 dan terealisasi Rp. 4.968.500,00 atau 99,37% Sub Kegiatan ini untuk terlaksananya dokumen laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD.

5) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

   Sub Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 5.000.000,00 dan terealisasi Rp. 4.993.400,00 atau 99,87% Sub Kegiatan ini untuk terlaksananya dokumen laporan Prognosis realisasi anggaran.

c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1) Pendataan dan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

   Sub Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 5.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 4.860.000,00 atau 97,2%, keluaran Sub Kegiatan ini berupa terlaksananya Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian.

2) Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai

   Sub Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 5.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 4.995.000,00 atau 99,9%, keluaran Sub Kegiatan ini berupa terlaksananya Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai

3) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-

Undangan

Sub Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 10.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 9.830.000,00 atau 98,3%, keluaran Sub Kegiatan ini berupa terlaksananya Kegiatan Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan.

d. Administrasi Umum Perangkat Daerah

1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Sub Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 5.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 4.995.500,00 atau 99,91%, keluaran Sub Kegiatan ini berupa tersedianya komponen listrik.

2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Sub Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 79.431.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 77.825.000,00 atau 97,98%, keluaran Sub Kegiatan ini berupa tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Sub Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 10.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 9.991.000,00 atau 99,91%, keluaran Sub Kegiatan ini berupa tersedianya Peralatan rumah tangga.

4) Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Sub Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 65.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 64.861.000,00 atau 99,79%, keluaran Sub Kegiatan ini berupa tersedianya bahan logistik kantor.

5) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Sub Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 10.360.800,00 dan terealisasi sebesar Rp 10.360.400,00 atau 99,99%, keluaran Sub Kegiatan ini berupa tersedianya barang yang dicetak dan diagendakan.

6) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Sub Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 5.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 4.560.000,00 atau 91,20%, keluaran Sub Kegiatan ini berupa tersedianya bahan bacaan tiap bulan.

7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Sub Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 85.990.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 85.735.480,00 atau 99,7%, keluaran Sub Kegiatan ini berupa terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD.

e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1) Pengadaan Mebel

Sub Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 20.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 19.720.000,00 atau 98,6%, keluaran Sub Kegiatan ini berupa mebel yang diadakan.

f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Sub Kegiatan ini di anggarkan sebesar Rp. 7.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 6.967.000 atau 99,53%. Sub Kegiatan ini ditujukan untuk belanja pengadministrasian surat menyurat selama 12 bulan.

2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik

Sub Kegiatan ini di anggarkan sebesar Rp. 121.200.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 106.156.998,00 atau 87,59% yang dilaksanakan yaitu rekening jasa sumber daya yang dibayar selama 12 bulan.

3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Sub Kegiatan ini di anggarkan sebesar Rp. 4.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 3.972.000,00 atau 99,3% Sub Kegiatan ini ditujukan untuk tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor.

4) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Sub Kegiatan ini di anggarkan sebesar Rp. 506.664.047,00 dan terealisasi sebesar Rp. 464.248.078,00 atau 91,63% Sub Kegiatan ini ditujukan untuk tersedianya jasa pelayanan umum kantor.

g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas

Jabatan

Sub Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 226.465.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 203.730.529,00 atau 89,96%, keluaran Sub Kegiatan ini untuk memenuhi biaya pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional selama 12 bulan.

2) Pemeliharaan Mebel

Sub Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 4.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 3.990.000,00 atau 99,75%, keluaran Sub Kegiatan ini berupa pemeliharaan mebel.

3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Sub Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 17.440.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 16.517.500,00 atau 94,71%, keluaran Sub Kegiatan ini berupa Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara.

4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Sub Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 700.417.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 694.134.000,00 atau 99,1%, keluaran Sub Kegiatan ini berupa gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi.

2. Program Pemberdayaan Sosial

a. Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota

1) Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang

Sub Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 5.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 4.985.000,00 atau 99,70%. Keluaran Sub Kegiatan ini berupa edukasi dan fasilitasi bagi penyelenggara izin undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau barang.

b. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota

1) Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 193.800.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 191.647.600,00 atau 98,89 %.

Keluaran Sub Kegiatan ini berupa peserta bimtek potensi pekerja sosial.

2) Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota

   Sub Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 127.660.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 124.656.000,00 atau 97,65%. Keluaran Sub Kegiatan ini berupa potensi tenaga kesos yang meningkat kemampuannya.

3) Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota.

   Sub Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 422.260.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 389.553.500,00 atau 92,25%. Keluaran Sub Kegiatan ini berupa potensi tenaga kesos yang meningkat kemampuannya.

4) Peningkatan kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota

   Sub Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 73.650.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 71.687.500,00 atau 97,34%. Keluaran Sub Kegiatan ini berupa potensi lembaga sosial yang meningkat kemampuannya.

5) Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)

   Sub Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 19.640.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 19.640.000,00 atau 100%. Keluaran Sub Kegiatan ini berupa rapat koordinasi pelaksanaan peningkatan kapasitas mitra dan organisasi kemasyrakatan dalam pengelolaan program ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

3. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan

   a. Pemulangan Warga Negara Migran korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal

1) Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal

   Sub Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 75.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 73.813.446,00 atau 98,42%. Keluaran Sub Kegiatan ini berupa warga negara migran tindak kekerasan yang mendapatkan fasilitasi pemulangan.

4. Program Rehabilitasi Sosial

   a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial

      1) Penyediaan Alat Bantu

         Sub Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 59.850.400,00 dan terealisasi sebesar Rp. 43.176.341,00 atau 72,14%. Keluaran Sub Kegiatan ini berupa tersedianya alat bantu.

      2) Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga

         Sub Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 30.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 29.999.000,00 atau 99,99%. Keluaran Sub Kegiatan ini memberikan pelayanan reunifikasi keluarga.

      3) Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial

         Sub Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 123.019.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 120.575.625,00 atau 98,01 %. Keluaran Sub Kegiatan ini berupa memberi bimbingan fisik, mental, spritual, dan sosial.

      4) Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat

         Sub Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 169.205.400,00 dan terealisasi sebesar Rp. 152.000.200,00 atau 89,83 %. Keluaran Sub Kegiatan ini berupa terlaksananya peserta bimbingan sosial.

      5) Pemberian Layanan Data dan Pengaduan

         Sub Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 25.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 23.862.000,00 atau 95,45 %. Keluaran Sub Kegiatan ini yaitu memberi layanan data dan

pengaduan.

6) Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga

Sub Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 25.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 24.972.640,00 atau 99,89%. Keluaran Sub Kegiatan ini berupa pelayanan penelusuran keluarga yang diberikan.

7) Pemberian Layanan Rujukan

Sub Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 24.999.600,00 dan terealisasi sebesar Rp. 24.669.600,00 atau 98,68 %. Keluaran Sub Kegiatan ini berupa pelayanan rujukan yang diberikan.

b. Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial

1) Pemberian Layanan Data dan Pengaduan

Sub Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 25.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 24.025.000,00 atau 96,1%, keluaran Sub Kegiatan ini berupa Layanan dan pengaduan yang diberikan.

2) Pemberian Layanan Kedaruratan

Sub Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 25.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 24.995.000,00 atau 99,98%, keluaran Sub Kegiatan ini berupa Layanan kedaruratan yang diberikan.

3) Penyediaan Permakanan

Sub Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 5.905.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 5.680.000,00 atau 96,19%, keluaran Sub Kegiatan ini yaitu tersedianya permakanan.

4) Penyediaan Sandang

Sub Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 6.288.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 6.287.800,00 atau 100%, keluaran Sub Kegiatan ini yaitu sandang yang disediakan.

5) Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti

Sub Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 2.386.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 2.385.200,00 atau 99,97%, keluaran Sub Kegiatan ini yaitu perbekalan kesehatan diluar panti

yang disediakan.

6) Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial

Sub Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 20.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 19.190.000,00 atau 95,95%, keluaran Sub Kegiatan ini yaitu bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial yang diberikan.

7) Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA.

Sub Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 25.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 24.896.500,00 atau 99,59%, keluaran Sub Kegiatan ini yaitu peserta Bimbingan Sosial.

8) Pemberian Layanan Penelusuran Keluarga

Sub Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 25.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 24.998.700,00 atau 99,99%, keluaran Sub Kegiatan ini yaitu peserta Bimbingan Sosial.

9) Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga

Sub Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 25.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 24.659.714,00 atau 98,64%, keluaran Sub Kegiatan ini yaitu Pelayanan Reunifikasi Keluarga yang diberikan.

10) Pemberian Layanan Rujukan

Sub Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 25.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 24.806.130,00 atau 99,22%, keluaran Sub Kegiatan ini yaitu Pelayanan rujukan yang diberikan.

11) Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 40.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 39.999.125,00 atau 100 %, keluaran Sub Kegiatan ini yaitu melakukan Kerjasama antar lembaga dan kemitraan.

5. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial

a. Pemeliharaan Anak-anak Terlantar

1) Penjangkauan Anak – anak Terlantar

Sub Kegiatan ini di anggarkan sebesar Rp. 25.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 23.714.200 atau 94,86%. Sub

Kegiatan ini ditujukan untuk menjangkau anak - anak terlantar selama 12 bulan.

2) Rujukan Anak – anak Terlantar

Sub Kegiatan ini di anggarkan sebesar Rp. 25.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 24.609.800,00 atau 98,44%. Sub Kegiatan ini ditujukan untuk rujukan anak – anak terlantar selama 12 bulan.

3) Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar

Sub Kegiatan ini di anggarkan sebesar Rp.20.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 19.657.400,00 atau 98,29%. Sub Kegiatan ini ditujukan untuk memantau pelaksanaan pemeliharaan anak terlantar selama 12 bulan.

b. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

1) Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan ini di anggarkan Rp. 101.100.000,00 dan terealisasi Rp. 99.196.546,00 atau 98.12%. Sub Kegiatan ini ditujukan untuk memenuhi pendataan fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota.

2) Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan ini di anggarkan sebesar Rp. 657.542.800,00 dan terealisasi sebesar Rp. 655.754.600,00 atau 99,73% Sub Kegiatan ini untuk memenuhi Sub Kegiatan pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota.

3) Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga

Sub Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 25.348.793.040,00 dan terealisasi Rp. 25.296.331.929,00 atau 99,79% Sub Kegiatan ini untuk memenuhi fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga.

6. Program Penanganan Bencana

a. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota

1) Penyediaan Makanan

Sub Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 19.640.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 19.606.000,00 atau 99,83%. Keluaran Sub Kegiatan ini untuk tersedianya makanan untuk korban bencana alam.

2) Penyediaan Sandang

Sub Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 9.820.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 9.820.000,00 atau 100%. Keluaran Sub Kegiatan ini ditujukan untuk korban bencana yang mendapatkan sandang.

3) Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi

Sub Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 9.820.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 9.779.500,00 atau 99,59%. Keluaran Sub Kegiatan ini untuk tersediany tempat penampungan pengungsi.

4) Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan

Sub Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 4.910.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 4.867.000,00 atau 99,12%. Keluaran Sub Kegiatan ini untuk kelompok rentan yang mendapatkan penanganan.

5) Pelayanan Dukungan Psikososial

Sub Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 4.910.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 4.820.000,00 atau 98,17%. Keluaran Sub Kegiatan ini berupa terlaksananya pelayanan dukungan psikososial.

b. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota

1) Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencaa

Sub Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 9.820.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 9.668.000,00 atau 98,45%. Keluaran sub Sub Kegiatan ini berupa jumlah kampung siaga yang mengikuti sosialisasi. Permasalahan dari sub Sub Kegiatan ini adalah kebencanaan pada tahun 2021 sangat minim tingkat keparahanya, upaya untuk mengatasi kedepanya adalah meningkatkan SDM operasional kampung siaga bencana.

2) Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana

Sub Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 14.780.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 14.759.900,00 atau 99,86%. Keluaran sub Sub Kegiatan ini berupa jumlah Tagana yang mengikuti sosialisasi.

7. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

a. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

1) Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota

Sub Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 19.639.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 18.451.500,00 atau 93,95%. Keluaran sub Sub Kegiatan ini berupa jenis Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota.

2) Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 24.550.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 24.550.000,00 atau 100%. Keluaran sub Sub Kegiatan ini berupa jenis pemeliharaan yang dilaksanakan di Taman Makam Pahlawan.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023
Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Derah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	PROSENTASE PELAYANAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH								
1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Perencanaan dan evaluasi Kinerja PD	100	100	100	100	100,00%	100	50	50,00%
1.06.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	21	2	4	4	100,00%	2	8	38,10%
1.06.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6	1	1	1	100,00%	1	3	50,00%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Derah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.06.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6	1	1	1	100,00%	1	3	50,00%
1.06.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	6	1	1	1	100,00%	1	3	50,00%
1.06.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	6	1	1	1	100,00%	1	3	50,00%
1.06.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17	1	12	12	100,00%	1	14	82,35%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Derah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.06.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50	1	12	12	100,00%	1	14	28,00%
1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	100	100	100	100	100,00%	100	50	50,00%
1.06.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	176	30	27	27	100,00%	32	89	50,57%
1.06.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	61	12	12	12	100,00%	12	36	59,02%
1.06.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6	1	1	1	100,00%	1	3	50,00%
1.06.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	60	6	18	18	100,00%	6	30	50,00%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Derah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.06.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	8	2	1	1	100,00%	2	5	62,50%
1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian PD	100	100	100	100	100,00%	100	50	50,00%
1.06.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapanya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	340	64	0	0	#DIV/0!	69	133	39,12%
1.06.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	60	0	12	12	100,00%	32	44	73,33%
1.06.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	124	0	12	12	100,00%	64	76	61,29%
1.06.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	60	10	10	10	100,00%	10	30	50,00%
1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100	100	100	100	100,00%	100	50	50,00%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Derah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.06.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	72	12	12	12	100,00%	12	36	50,00%
1.06.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	32	12	4	4	100,00%	4	20	62,50%
1.06.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	72	12	12	12	100,00%	12	36	50,00%
1.06.01.2.06.04	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	67	12	11	11	100,00%	12	35	52,24%
1.06.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	25.012	12	5000	5000	100,00%	5.000	10.012	40,03%
1.06.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	72	12	12	12	100,00%	12	36	50,00%
1.06.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	274	24	50	50	100,00%	50	124	45,26%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Derah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	100	100	100	100,00%	100	50	50,00%
1.06.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	52	2	33	33	100,00%	2	37	71,15%
1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Porsentase jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	100	100	100	100	100,00%	100	50	50,00%
1.06.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000	2.000	2.000	2.000	100,00%	2.000	6.000	300,00%
1.06.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	12	12	100,00%	12	36	300,00%
1.06.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	32	32	32	32	100,00%	32	96	300,00%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Derah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.06.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	25	4	12	12	100,00%	25	41	164,00%
1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Porsentase Barang Milik Daerah yang dipelihara	100	100	100	100	100,00%	100	50	50,00%
1.06.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	15	15	15	15	100,00%	15	45	300,00%
1.06.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	20	20	20	20	100,00%	20	60	300,00%
1.06.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20	12	20	20	100,00%	20	52	260,00%
1.06.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	3	1	1	100,00%	3	7	233,33%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Derah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	prosentase PSKS yang meningkat kapasitasnya					#DIV/0!	61	61	#DIV/0!
1.06.02.2.02	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sosialisasi Dan Edukasi Bagi Perusahaan Yang Akan Menyelenggarakan Undian Gratis Berhadiah (UGB)	50	50	50	50	100,00%	50	150	300,00%
1.06.02.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang dan Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	50	50	50	50	100,00%	50	150	300,00%
1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	jumlah sumber kesejahteraan sosial yang meningkat potensinya	331	151	151	151	100,00%	331	633	191,24%
1.06.02.2.03.01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	90	75	200	200	100,00%	90	365	405,56%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Derah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.06.02.2.03.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	12	12	12	12	100,00%	12	36	300,00%
1.06.02.2.03.03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Potensi SumberKesejahteraan Sosial Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	105	105	105	105	100,00%	105	315	300,00%
1.06.02.2.03.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	16	6	6	6	100,00%	25	37	231,25%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Derah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.06.02.2.03.05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	1	1	100	100	100,00%	25	126	12600,00%
1.06.03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAAN	Prosentase penanganan warga migran korban tindak kekerasan	100	100	100	100	100,00%	100	300	300,00%
1.06.03.2.01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/ Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan	75	75	75	75	100,00%	75	225	300,00%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Derah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.06.03.2.01.01	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Ttik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	75	24	75	75	100,00%	75	174	232,00%
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Prosentase penanganan rehabilitasi sosial					#DIV/0!		0	#DIV/0!
1.06.04.2.01	Rehabiltasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Panti Sosial	fasilitasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar , lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis di luar panti	23		21	21	100,00%		21	91,30%
1.06.04.2.01.03	Penyediaan Alat bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	50	36	36	26	72,22%	50	112	224,00%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Derah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.06.04.2.01.04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	35	15	30	30	100,00%	35	80	228,57%
1.06.04.2.01.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	2.400	1.592	2.000	2.000	100,00%	2.400	5.992	249,67%
1.06.04.2.01.06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	1.600	1.232	1.232	1.232	100,00%	1.600	4.064	254,00%
1.06.04.2.01.09	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	254	244	254	254	100,00%	0	498	196,06%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Derah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.06.04.2.01.11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	35	108	30	30	100,00%	35	173	494,29%
1.06.04.2.01.12	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	50	35	40	40	100,00%	50	125	250,00%
1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial	fasilitasi PMKS lainya Bukan Korban HIV/ AIDS	11	9	9	9	100,00%		18	163,64%
1.06.04.2.02.01	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	254	234	244	244	100,00%	254	732	288,19%
1.06.04.2.02.02	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	60	50	55	55	100,00%	60	165	275,00%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Derah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.06.04.2.02.03	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	190	0	190	190	100,00%	190	380	200,00%
1.06.04.2.02.04	Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	90	10	90	90	100,00%	90	190	211,11%
1.06.04.2.02.06	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	50	20	50	50	100,00%	50	120	240,00%
1.06.04.2.02.07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	90	80	90	90	100,00%	90	260	288,89%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Derah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.06.04.2.02.08	Pemberian Bimbingan Sosial kepada keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS Lainya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	90	80	90	90	100,00%	90	260	288,89%
1.06.04.2.02.11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	45	0	45	45	100,00%	45	90	200,00%
1.06.04.2.02.12	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	45	20	45	45	100,00%	45	110	244,44%
1.06.04.2.02.13	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	45	30	45	45	100,00%	45	120	266,67%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Derah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.06.04.2.02.14	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	15	15	15	15	100,00%	15	45	300,00%
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	prosentase pemenuhan perlindungan dan jaminan sosial					#DIV/0!		0	#DIV/0!
1.06.05.2.01	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	fasilitasi pemiliharan anak-anak terlantar	8	6	6	6	100,00%		12	150,00%
1.06.05.2.01.01	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	70	60	70	70	100,00%	70	200	285,71%
1.06.05.2.01.02	Rujukan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	45	25	40	40	100,00%	45	110	244,44%
1.06.05.2.01.03	Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	45	35	40	40	100,00%	45	120	266,67%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Derah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Data Kemiskinan yang Tervalidasi dan Verifikasi	100	100	100	100	100,00%		200	200,00%
1.06.05.2.02.01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	167	167	320051	320051	100,00%	320.051	640.269	383394,61%
1.06.05.2.02.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	320.051	326.550	326.550	326.550	100,00%	326.550	979.650	306,09%
1.06.05.2.02.03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	3.000	2.498	2.498	7.867	314,93%	2.500	12.865	428,83%
1.06.05.2.02.04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyaraakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	200	60	0	0	#DIV/0!	200	260	130,00%
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Prosentase pemenuhan penanganan bencana					#DIV/0!		0	#DIV/0!

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Derah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	jumlah korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan perlindungan sosial	34	34	34	34	100,00%		68	200,00%
1.06.06.2.01.01	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	30	25	27	27	100,00%	30	82	273,33%
1.06.06.2.01.02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	30	25	25	25	100,00%	30	80	266,67%
1.06.06.2.01.03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	30	25	25	25	100,00%	30	80	266,67%
1.06.06.2.01.04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	4	3	25	25	100,00%	30	58	1450,00%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Derah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.06.06.2.01.05	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	30	25	25	25	100,00%	30	80	266,67%
1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	jumlah KK yang meningkat kemampuanya terkait kesiapsiagaan bencana	40	38	40	38	95,00%		76	190,00%
1.06.06.2.02.01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	3	1	3	3	100,00%	3	7	233,33%
1.06.06.2.02.02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	21	21	21	21	100,00%	21	63	300,00%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Derah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Cakupan rehabilitasi pemeliharaan dan penjagaan taman makam pahlawan					#DIV/0!		0	#DIV/0!
1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makan Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	jenis pemeliharaan yang dilaksanakan di TMP	1	3	3	2	66,67%		5	500,00%
1.06.07.2.01.01	Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	2	0	2	2	100,00%	2	4	200,00%
1.06.07.2.01.02	Pemeliharaan Taman Makan Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	3	3	3	3	100,00%	3	9	300,00%

2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo

Kinerja pelayanan OPD merupakan suatu sarana yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan perencanaan suatu program/ Kegiatan, memonitoring hasil pelaksanaan suatu program/ Kegiatan, serta mengevaluasi dampak yang terjadi pada target program/Kegiatan apakah sudah sesuai dengan keluaran yang diharapkan. Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang sosial. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Sosial memiliki sasaran kerja utama yaitu Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Berdasarkan data yang diperoleh dari pelaksana teknis Sub Kegiatan di lapangan dan dimasukkan ke dalam tabel pelaporan, maka dapat diberikan analisa kinerja Dinas Sosial sudah terealisasi sebesar 98,41% dan masuk dalam kategori baik.

Tabel. 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi Tahun 2023	Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan pelayanan rehabilitas sosial dasar di Luar Panti	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan pelayanan rehabilitas sosial dasar di Luar Panti	4.177	1.777	1.163	1.163	4.177	1.777	1.163	
2	Jumlah anak terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitas sosial dasar di Luar Panti	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti	Jumlah anak terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitas sosial dasar di Luar Panti	1.138	1.324	1.162	1.162	1.138	1.324	1.162	
3	Jumlah lanjut usia terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitas sosial dasar di Luar Panti	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	Jumlah lanjut usia terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitas sosial dasar di Luar Panti	352	744	1.163	1.163	352	744	1.163	
4	Jumlah tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis yang mendapatkan pelayanan rehabilitas sosial dasar di Luar Panti	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	Jumlah tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis yang mendapatkan pelayanan rehabilitas sosial dasar di Luar Panti	195	830	1.162	1.162	80	830	1.162	

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi Tahun 2023	Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Jumlah korban bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana yang tertangani.	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah korban bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana yang tertangani.	1.525	496	98	98	1.525	500	98	

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo

Penentuan isu- isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo didasarkan pada hasil telaah mengenai kondisi dan identifikasi permasalahan pembangunan Dinas Sosial pada tingkat Pemerintah Provinsi. Berdasarkan telaah analisa permasalahan, isu- isu penting Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo adalah sebagai berikut:

a. Meningkatkan pembinaan dan pemberdayaan sosial.
b. Meningkatkan sosialisasi dan pelatihan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi bagi PMKS.
c. Meningkatkan fungsi koordinasi dan implementasi kebijakan antar pilar pembangunan.
d. Meningkatkan kapasitas kelembagaan sosial dan kesetiakawanan sosial.
e. Meningkatkan jejaring dalam rangka perlindungan dan jaminan sosial.
f. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melestarikan, penghayatan serta pengamatan nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial.
g. Melakukan verifikasi dan validasi data PMKS dan PSKS yang valid.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan apabila ditunjang dengan produk dokumen perencanaan yang baik, dalam rangka mengawal program/ Kegiatan pembangunan yang dilaksanakan agar dapat berjalan secara efektif, efisien dan tepat sasaran. Dokumen perencanaan daerah diantaranya terdiri dari: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis SKPD, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), dan Rencana Kerja SKPD.

Dokumen perencanaan sebagaimana disebutkan di atas khususnya Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024, Program Kegiatan yang dilaksanakan berpedoman pada Permendagri No. 90 tahun 2019, agar terwujud konsistensi dokumen

perencanaan mulai dari RPJMD sampai dengan Renja yang dilaksanakan masing-masing SKPD.

Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022
Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo

o	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					tatan Penting
	Program / Kegiatan	k	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lok	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					19.187.001.000					**18.216.038.000**	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH		PROSENTASE PELAYANAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH	100	7.514.143.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH		PROSENTASE PELAYANAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH		7.245.651.000	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Cakupan Perencanaan dan evaluasi Kinerja PD	100	65.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Cakupan Perencanaan dan evaluasi Kinerja PD	100	55.000.000	
.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	30.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	25.000.000	
.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	6.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	5.000.000	

o	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					tatan Penting
	Program / Kegiatan	k	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lok	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	6.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	5.000.000	
.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	6.000.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	5.000.000	
.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	6.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	5.000.000	
.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	12	6.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	12	5.000.000	

o	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					tatan Penting
	Program / Kegiatan	k	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lok	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Realisasi Kinerja SKPD					Realisasi Kinerja SKPD			
.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12	5.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12	5.000.000	
2	Administrasi Keuangan		Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	100	4.919.420.000	Administrasi Keuangan		Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	100	5.212.009.000	
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	27	4.620.000.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	27	4.912.589.000	
2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1	279.420.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	279.420.000	

o	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					tatan Penting
	Program / Kegiatan	k	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lok	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	10.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	10.000.000	
.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18	5.000.000	
.5	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	5.000.000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	5.000.000	
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Prosentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian PD	100	42.975.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Prosentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian PD	100	20.000.000	

o	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					tatan Penting
	Program / Kegiatan	k	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lok	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapanya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	27	22.975.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapanya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0	0	
.2	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1	5.000.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1	5.000.000	
.3	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1	5.000.000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1	5.000.000	
.4	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15	10.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	12	10.000.000	
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Prosentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100	381.259.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Prosentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100	215.500.000	
.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	1	15.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	1	15.000.000	

o	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					tatan Penting
	Program / Kegiatan	k	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lok	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Bangunan Kantor yang Disediakan					Bangunan Kantor yang Disediakan			
.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	155.660.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6	50.000.000	
.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	15.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	15.000.000	
.4	Penyediaan bahan logistik kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	120.000.000	Penyediaan bahan logistik kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	75.000.000	
.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	10.599.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	25.012	7.500.000	
.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	5.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	72	5.000.000	

o	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					tatan Penting
	Program / Kegiatan	k	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lok	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	60.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	274	48.000.000	
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	25.387.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	10.000.000	
.2	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	8	25.387.000	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	52	10.000.000	
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Porsentase jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	100	1.251.142.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Porsentase jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	100	1.251.142.000	
.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.500	7.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000	7.000.000	
.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	150.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	150.000.000	

o	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					tatan Penting
	Program / Kegiatan	k	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lok	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	32	5.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	32	5.000.000	
.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	26	1.089.142.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	25	1.089.142.000	
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Porsentase Barang Milik Daerah yang dipelihara	100	828.960.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Porsentase Barang Milik Daerah yang dipelihara	100	482.000.000	
.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	70	349.990.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	15	175.000.000	
.2	Pemeliharaan Mebel		Jumlah Mebel yang Dipelihara	113	4.000.000	Pemeliharaan Mebel		Jumlah Mebel yang Dipelihara	20	4.000.000	

o	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					tatan Penting
	Program / Kegiatan	k	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lok	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	97	25.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20	10.000.000	
.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8	449.970.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	293.000.000	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL		prosentase PSKS yang meningkat kapasitasnya	73,52	715.443.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL		prosentase PSKS yang meningkat kapasitasnya		588.037.000	
1	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Sosialisasi Dan Edukasi Bagi Perusahaan Yang Akan Menyelenggarakan Undian Gratis Berhadiah (UGB)	50	15.000.000	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Sosialisasi Dan Edukasi Bagi Perusahaan Yang Akan Menyelenggarakan Undian Gratis Berhadiah (UGB)	50	5.000.000	
.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang dan Barang		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	50	15.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang dan Barang		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	50	5.000.000	

o	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					tatan Penting
	Program / Kegiatan	k	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lok	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota		jumlah sumber kesejahteraan sosial yang meningkat potensinya	421	700.443.000	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota		jumlah sumber kesejahteraan sosial yang meningkat potensinya	331	583.037.000	
.1	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	10	20.951.000	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	90	20.951.000	
.2	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	12	142.000.000	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	12	117.586.000	
.3	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan		Jumlah Potensi SumberKesejahteraan Sosial Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan	96	391.810.000	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan		Jumlah Potensi SumberKesejahteraan Sosial Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan	105	350.000.000	

o	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					tatan Penting
	Program / Kegiatan	k	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lok	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Kabupaten/Kota		Kabupaten/Kota			Kabupaten/Kota		Kabupaten/Kota			
.4	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	28	44.500.000	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	16	44.500.000	
.5	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)		Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	28	101.182.000	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)		Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	1	50.000.000	
	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAAN		Prosentase penanganan warga migran korban tindak kekerasan	100	50.000.000	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAAN		Prosentase penanganan warga migran korban tindak kekerasan	100	50.000.000	

o	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					tatan Penting
	Program / Kegiatan	k	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lok	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/ Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal		Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan	75	50.000.000	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/ Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal		Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan	75	50.000.000	
.1	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Ttik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal		Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	75	50.000.000	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Ttik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal		Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	75	50.000.000	
-	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		Prosentase penanganan rehabilitasi sosial	17,99	891.188.000	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		Prosentase penanganan rehabilitasi sosial		634.328.000	

o	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					tatan Penting
	Program / Kegiatan	k	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lok	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Rehabiltasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Panti Sosial		fasilitasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar , lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis di luar panti	23,52	608.063.000	Rehabiltasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Panti Sosial		fasilitasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar , lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis di luar panti	23	368.378.000	
.1	Penyediaan Alat bantu		Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	60	43.378.000	Penyediaan Alat bantu		Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	50	43.378.000	
.2	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	40	30.000.000	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	35	25.000.000	
.3	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial		Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan	2.800	300.000.000	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial		Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan	2.400	125.000.000	

o	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					tatan Penting
	Program / Kegiatan	k	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lok	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Kabupaten/Kota					Kabupaten/Kota			
.4	Pemberian Bimbingan Sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat		Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	1.800	184.685.000	Pemberian Bimbingan Sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat		Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	1.600	125.000.000	
.6	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	40	25.000.000	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	35	25.000.000	
.7	Pemberian Layanan Rujukan		Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan	55	25.000.000	Pemberian Layanan Rujukan		Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan	50	25.000.000	

o	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					tatan Penting
	Program / Kegiatan	k	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lok	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Kabupaten/Kota					Kabupaten/Kota			
2	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial		fasilitasi PMKS lainya Bukan Korban HIV/ AIDS	12,46	283.125.000	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial		fasilitasi PMKS lainya Bukan Korban HIV/ AIDS	11	265.950.000	
.1	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan		Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	120	10.725.000	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan		Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	254	10.000.000	
.2	Pemberian Layanan Kedaruratan		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	65	53.400.000	Pemberian Layanan Kedaruratan		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	60	50.000.000	

o	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					tatan Penting
	Program / Kegiatan	k	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lok	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
.3	Penyediaan Permakanan		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	190	14.000.000	Penyediaan Permakanan		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	190	10.950.000	
.4	Penyediaan Sandang		Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	90	20.000.000	Penyediaan Sandang		Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	90	20.000.000	
.5	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	50	25.000.000	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	50	25.000.000	

o	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					tatan Penting
	Program / Kegiatan	k	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lok	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
.6	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial		Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	95	20.000.000	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial		Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	90	20.000.000	
.7	Pemberian Bimbingan Sosial kepada keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS Lainya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA		Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	95	25.000.000	Pemberian Bimbingan Sosial kepada keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS Lainya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA		Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	90	25.000.000	
.8	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	50	25.000.000	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	45	25.000.000	

o	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					tatan Penting
	Program / Kegiatan	k	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lok	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
.9	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	50	25.000.000	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	45	25.000.000	
.10	Pemberian Layanan Rujukan		Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	50	25.000.000	Pemberian Layanan Rujukan		Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	45	25.000.000	
.11	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	15	40.000.000	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	15	30.000.000	
5	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		prosentase pemenuhan perlindungan dan jaminan sosial	5,13	9.641.226.000	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		prosentase pemenuhan perlindungan dan jaminan sosial		9.478.022.000	

o	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					tatan Penting
	Program / Kegiatan	k	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lok	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar		fasilitasi pemiliharan anak-anak terlantar	9,37	80.000.000	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar		fasilitasi pemiliharan anak-anak terlantar	8	60.000.000	
.1	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar		Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	70	25.000.000	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar		Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	70	20.000.000	
.2	Rujukan Anak-Anak Terlantar		Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	45	25.000.000	Rujukan Anak-Anak Terlantar		Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	45	20.000.000	
.3	Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar		Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	45	30.000.000	Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar		Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	45	20.000.000	
2	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Prosentase Data Kemiskinan yang Tervalidasi dan Verifikasi	100	9.561.226.000	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Prosentase Data Kemiskinan yang Tervalidasi dan Verifikasi	100	9.418.022.000	

o	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					tatan Penting
	Program / Kegiatan	k	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lok	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
.1	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	70.999	601.435.000	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	167	490.000.000	
.2	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	1.200	156.769.000	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	320.051	125.000.000	
.3	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga		Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	4.200	8.761.516.000	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga		Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	3.000	8.761.516.000	
.4	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyaraakat		Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	200	41.506.000	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyaraakat		Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	200	41.506.000	

o	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					tatan Penting
	Program / Kegiatan	k	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lok	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
)	PROGRAM PENANGANAN BENCANA		Prosentase pemenuhan penanganan bencana	73,91	285.000.000	PROGRAM PENANGANAN BENCANA		Prosentase pemenuhan penanganan bencana		165.000.000	
1	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota		jumlah korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan perlindungan sosial	34	165.000.000	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota		jumlah korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan perlindungan sosial	34	80.000.000	
.1	Penyediaan Makanan		Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	100	75.000.000	Penyediaan Makanan		Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	30	50.000.000	
.2	Penyediaan Sandang		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	30	35.000.000	Penyediaan Sandang		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	30	10.000.000	

o	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					tatan Penting
	Program / Kegiatan	k	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lok	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
.3	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi		Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	5	35.000.000	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi		Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	30	10.000.000	
.4	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan		Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	20	10.000.000	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan		Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	4	5.000.000	
.5	Pelayanan Dukungan Psikososial		Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	21	10.000.000	Pelayanan Dukungan Psikososial		Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	30	5.000.000	
2	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota		jumlah KK yang meningkat kemampuanya terkait kesiapsiagaan bencana	40	120.000.000	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota		jumlah KK yang meningkat kemampuanya terkait kesiapsiagaan bencana	40	85.000.000	

o	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					tatan Penting
	Program / Kegiatan	k	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lok	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
.1	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana		Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	2	15.000.000	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana		Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	3	10.000.000	
.2	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana		Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	15	105.000.000	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana		Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	21	75.000.000	
	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN		Cakupan rehabilitasi pemeliharaan dan penjagaan taman makam pahlawan	100	90.001.000	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN		Cakupan rehabilitasi pemeliharaan dan penjagaan taman makam pahlawan		55.000.000	
1	Pemeliharaan Taman Makan Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		jenis pemeliharaan yang dilaksanakan di TMP	3	90.001.000	Pemeliharaan Taman Makan Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		jenis pemeliharaan yang dilaksanakan di TMP	1	55.000.000	

o	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					tatan Penting
	Program / Kegiatan	k	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lok	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
.2	Pemeliharaan Taman Makan Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	1	20.001.000	Pemeliharaan Taman Makan Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	3	10.000.000	
.3	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	1	70.000.000	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		45.000.000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Sub Kegiatan Masyarakat

Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo merupakan Organisasi Pemerintah Daerah yang menangani urusan sosial. Pembangunan yang dilakukan oleh Dinas Sosial merupakan pembangunan yang bersifat non fisik karena bukan merupakan pembangunan infrastruktur maupun gedung yang bisa dirasakan langsung pemanfaatannya oleh masyarakat. Pada usulan perencanaan Sub Kegiatan tahun 2024, Dinas sosial telah menunggu hasil musyawarah rencana pembangunan kecamatan yang dilakukan di 12 kecamatan di kabupaten. Namun oleh karena Dinas Sosial bukan merupakan Organisasi Pemerintah Daerah yang melakukan pembangunan secara fisik, serta karena urusan sosial bukan merupakan program prioritas pembangunan daerah, maka tidak ditemukan usulan dari masyarakat yang bisa di ampu oleh Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo.

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dimana kebijakan Otonomi Daerah dengan memberikan kewenangan yang luas dan nyata serta bertanggungjawab kepada daerah yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta meningkatkan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk mendukung tujuan tersebut, pemerintah telah menyerahkan urusan pemerintahan tertentu kepada daerah sehingga menjadi otonomi daerah. Dalam mengelola urusan pemerintahan yang menjadi otonominya, daerah tentu membutuhkan sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta biaya. Sebagaimana diketahui kemampuan sumber daya manusia dan kemampuan APBD setiap daerah tidak sama, sehingga dalam mengelola otonomi daerahnya ada keterbatasan dan kendala.

Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo yang mempunyai tugas rnelaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang sosial berdasarkan asas otonorni dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Sebagaimana dijelaskan, bahwa tujuan Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo adalah berpijak pada pencapaian misi, maka untuk rnencapai sasaran tersebut Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo harus melaksanakan ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan dalam organisasi lingkup Pernerintah Kabupaten Sukoharjo, sehingga kinerjanya meskipun bermacam-macam, tetapi tetap pada misi dan visinya.

Tujuan ini juga mengisyaratkan tentang program jangka panjang, yakni lebih dari satu tahun, sebab dalam pelaksanaan program kerja itu dibutuhkan adanya keahlian akurasi (ketepatan) dalam mengolah dan menyajikan data administrasi, tujuan ini

nantinya juga menjadi arahan perjalanan Unit Kerja yang dibawahinya.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Dalam rangka mewujudkan Misi Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo maka perlu dijabarkan kembali rnenjadi tujuan dan sasaran strategis yang lebih optimal yang dituangkan dalam Renja Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024, yaitu

Sesuai dengan Misi 2 Kabupaten Sukoharjo : "*Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas"*, Maka Terangkum Tujuan Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo yaitu:

1. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Hidup Penduduk Miskin
   Indikator tujuan:
   a. Prosentase penduduk miskin perkotaan DTKS Desil I (sangat miskin) dan Desil II (miskin)
   b. Prosentase penduduk miskin perdesaan DTKS Desil I (sangat miskin) dan desil II (miskin).

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka sasaran Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo yang harus diwujudkan adalah:

1. Meningkatnya Tingkat Kesejahteraan Sosial PMKS
2. Meningkatnya kualitas SDM PSKS
3. Meningkatnya pengelolaan Taman Makam Pahlawan
4. Meningkatnya kualitas aparatur dan pelayanan publik.

3.3 Program dan Kegiatan

Berdasarkan analisis terhadap hasil evaluasi kinerja OPD tahun 2021, analisis kinerja pelayanan OPD, isu- isu penting tentang penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD, maka disusunlah program dan kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo tahun 2024. Program dan kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.1
Program dan Kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo
Tahun 2024

Kode	Urusan/ Bidang Urusan pemerintDaerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
					18.216.038.000				**26.924.800.000**
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	**PROSENTASE PELAYANAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH**	**Dinsos Kab. Sukoharjo**	**100**	**7.245.651.000**	**DAU**		**100**	**8.098.300.000**
	Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Cakupan Perencanaan dan evaluasi Kinerja PD**	**Dinsos Kab. Sukoharjo**	**100**	**55.000.000**	**DAU**		**100**	**75.000.000**
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinsos Kab. Sukoharjo	4	25.000.000	DAU		4	35.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dinsos Kab. Sukoharjo	1	5.000.000	DAU		1	6.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dinsos Kab. Sukoharjo	1	5.000.000	DAU		1	6.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dinsos Kab. Sukoharjo	1	5.000.000	DAU		1	7.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dinsos Kab. Sukoharjo	1	5.000.000	DAU		1	7.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinsos Kab. Sukoharjo	12	5.000.000	DAU		12	7.000.000
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinsos Kab. Sukoharjo	12	5.000.000	DAU		12	7.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan pemerintDaerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	Administrasi Keuangan	**Pelaksanaan Administrasi Perkantoran**	**Dinsos Kab. Sukoharjo**	**100**	**5.212.009.000**	**DAU**		**100**	**5.323.500.000**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Dinsos Kab. Sukoharjo	27	4.912.589.000	DAU		27	4.950.000.000
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dinsos Kab. Sukoharjo	12	279.420.000	DAU		1	350.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinsos Kab. Sukoharjo	1	10.000.000	DAU		1	12.500.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dinsos Kab. Sukoharjo	18	5.000.000	DAU		18	5.500.000
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dinsos Kab. Sukoharjo	1	5.000.000	DAU		1	5.500.000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Prosentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian PD**	**Dinsos Kab. Sukoharjo**	**100**	**20.000.000**	**DAU**		**100**	**112.700.000**
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapanya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Dinsos Kab. Sukoharjo	0	0	DAU		65	25.700.000
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dinsos Kab. Sukoharjo	1	5.000.000	DAU		1	6.000.000
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dinsos Kab. Sukoharjo	1	5.000.000	DAU		1	6.000.000
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Dinsos Kab. Sukoharjo	12	10.000.000	DAU		15	15.000.000
	Administrasi Umum Perangkat	**Prosentase Pelaksanaan Administrasi**	**Dinsos**	**100**	**215.500.000**	**DAU**		**100**	**325.000.000**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan pemerintDaerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	Daerah	**Umum**	**Kab. Sukoharjo**						
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Dinsos Kab. Sukoharjo	1	15.000.000	DAU		1	15.000.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Dinsos Kab. Sukoharjo	6	50.000.000	DAU		1	100.000.000
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Dinsos Kab. Sukoharjo	1	15.000.000	DAU		1	15.000.000
	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Dinsos Kab. Sukoharjo	12	75.000.000	DAU		1	80.000.000
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Dinsos Kab. Sukoharjo	25.012	7.500.000	DAU		1	10.000.000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dinsos Kab. Sukoharjo	72	5.000.000	DAU		1	5.000.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinsos Kab. Sukoharjo	274	48.000.000	DAU		1	100.000.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Dinsos Kab. Sukoharjo**	**100**	**10.000.000**	**DAU**		**100**	**222.000.000**
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Dinsos Kab. Sukoharjo	52	10.000.000	DAU		8	22.000.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Porsentase jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan**	**Dinsos Kab. Sukoharjo**	**100**	**1.251.142.000**	**DAU**		**100**	**1.278.200.000**
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinsos Kab. Sukoharjo	2.000	7.000.000	DAU		2.500	7.700.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan	Dinsos Kab.	12	150.000.000	DAU		12	165.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan pemerintDaerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Listrik yang Disediakan	Sukoharjo						
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Dinsos Kab. Sukoharjo	32	5.000.000	DAU		32	5.500.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Dinsos Kab. Sukoharjo	25	1.089.142.000	DAU		38	1.100.000.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Porsentase Barang Milik Daerah yang dipelihara**	**Dinsos Kab. Sukoharjo**	**100**	**482.000.000**	**DAU**		**100**	**761.900.000**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Dinsos Kab. Sukoharjo	15	175.000.000	DAU		70	410.000.000
	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Dinsos Kab. Sukoharjo	20	4.000.000	DAU		113	4.400.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Dinsos Kab. Sukoharjo	20	10.000.000	DAU		97	27.500.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Dinsos Kab. Sukoharjo	3	293.000.000	DAU		8	320.000.000
	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	**prosentase PSKS yang meningkat kapasitasnya**	**Dinsos Kab. Sukoharjo**	**73,52**	**588.037.000**	**DAU**		**86**	**803.500.000**
	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Sosialisasi Dan Edukasi Bagi Perusahaan Yang Akan Menyelenggarakan Undian Gratis Berhadiah (UGB)**	**Dinsos Kab. Sukoharjo**	**50**	**5.000.000**	**DAU**		**50**	**16.500.000**
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang dan Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Dinsos Kab. Sukoharjo	50	5.000.000	DAU		50	16.500.000
	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	**jumlah sumber kesejahteraan sosial yang meningkat potensinya**	**Dinsos Kab. Sukoharjo**	**331**	**583.037.000**	**DAU**		**511**	**787.000.000**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan pemerintDaerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinsos Kab. Sukoharjo	90	20.951.000	DAU		12	22.000.000
	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinsos Kab. Sukoharjo	12	117.586.000	DAU		12	155.000.000
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Potensi SumberKesejahteraan Sosial Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinsos Kab. Sukoharjo	105	350.000.000	DAU		96	430.000.000
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinsos Kab. Sukoharjo	16	44.500.000	DAU		28	45.000.000
	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinsos Kab. Sukoharjo	1	50.000.000	DAU		28	135.000.000
	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAAN	**Prosentase penanganan warga migran korban tindak kekerasan**	**Dinsos Kab. Sukoharjo**	**100**	**50.000.000**	**DAU**		**100**	**55.000.000**
	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/ Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	**Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan**	**Dinsos Kab. Sukoharjo**	**75**	**50.000.000**	**DAU**		**75**	**55.000.000**
	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Ttik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinsos Kab. Sukoharjo	75	50.000.000	DAU		54	55.000.000
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	**Prosentase penanganan rehabilitasi sosial**	**Dinsos Kab. Sukoharjo**	**17,99**	**634.328.000**	**DAU**		**19**	**1.301.000.000**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan pemerintDaerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	Rehabiltasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Panti Sosial	**fasilitasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar , lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis di luar panti**	**Dinsos Kab. Sukoharjo**	**23**	**368.378.000**	**DAU**		**25**	**873.000.000**
	Penyediaan Alat bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinsos Kab. Sukoharjo	50	43.378.000	DAU		60	65.000.000
	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinsos Kab. Sukoharjo	35	25.000.000	DAU		40	33.000.000
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinsos Kab. Sukoharjo	2.400	125.000.000	DAU		360	330.000.000
	Pemberian Bimbingan Sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinsos Kab. Sukoharjo	1.600	125.000.000	DAU		150	200.000.000
	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinsos Kab. Sukoharjo	35	25.000.000	DAU		40	27.500.000
	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinsos Kab. Sukoharjo	50	25.000.000	DAU		55	27.500.000
	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial	**fasilitasi PMKS lainya Bukan Korban HIV/ AIDS**	**Dinsos Kab. Sukoharjo**	**11**	**265.950.000**	**DAU**		**13**	**428.000.000**
	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinsos Kab. Sukoharjo	254	10.000.000	DAU		120	35.000.000
	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinsos Kab. Sukoharjo	60	50.000.000	DAU		65	55.000.000
	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan	Dinsos	190	10.950.000	DAU		190	12.500.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan pemerintDaerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Sukoharjo						
	Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinsos Kab. Sukoharjo	90	20.000.000	DAU		90	22.000.000
	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinsos Kab. Sukoharjo	50	25.000.000	DAU		50	27.500.000
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinsos Kab. Sukoharjo	90	20.000.000	DAU		95	22.000.000
	Pemberian Bimbingan Sosial kepada keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS Lainya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinsos Kab. Sukoharjo	90	25.000.000	DAU		95	27.500.000
	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinsos Kab. Sukoharjo	45	25.000.000	DAU		50	27.500.000
	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinsos Kab. Sukoharjo	45	25.000.000	DAU		50	27.500.000
	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinsos Kab. Sukoharjo	45	25.000.000	DAU		50	27.500.000
	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Dinsos Kab. Sukoharjo	15	30.000.000	DAU		15	44.000.000
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	**prosentase pemenuhan perlindungan dan jaminan sosial**	**Dinsos Kab. Sukoharjo**	**54,69**	**9.478.022.000**	**DAU**		**55**	**16.265.000.000**
	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	**fasilitasi pemiliharan anak-anak terlantar**	**Dinsos Kab.**	**8**	**60.000.000**	**DAU**		**10**	**80.000.000**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan pemerintDaerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
			Sukoharjo						
	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinsos Kab. Sukoharjo	70	20.000.000	DAU		70	25.000.000
	Rujukan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinsos Kab. Sukoharjo	45	20.000.000	DAU		45	25.000.000
	Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinsos Kab. Sukoharjo	45	20.000.000	DAU		45	30.000.000
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	**Prosentase Data Kemiskinan yang Tervalidasi dan Verifikasi**	**Dinsos Kab. Sukoharjo**	**100**	**9.418.022.000**	**DAU**		**100**	**16.185.000.000**
	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	Dinsos Kab. Sukoharjo	167	490.000.000	DAU		490.607	650.000.000
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Dinsos Kab. Sukoharjo	320.051	125.000.000	DAU		176.962	160.000.000
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinsos Kab. Sukoharjo	3.000	8.761.516.000	DAU		3.400	15.330.000.000
	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyaraakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinsos Kab. Sukoharjo	200	41.506.000	DAU		200	45.000.000
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	**Prosentase pemenuhan penanganan bencana**	**Dinsos Kab. Sukoharjo**	**73,91**	**165.000.000**	**DAU**		**74**	**302.000.000**
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	**jumlah korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan perlindungan sosial**	**Dinsos Kab. Sukoharjo**	**34**	**80.000.000**	**DAU**		**34**	**172.000.000**
	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinsos Kab. Sukoharjo	30	50.000.000	DAU		100	80.000.000
	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan	Dinsos	30	10.000.000	DAU		30	35.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan pemerintDaerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Sukoharjo						
	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinsos Kab. Sukoharjo	30	10.000.000	DAU		5	35.000.000
	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinsos Kab. Sukoharjo	4	5.000.000	DAU		20	11.000.000
	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinsos Kab. Sukoharjo	30	5.000.000	DAU		21	11.000.000
	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	**jumlah KK yang meningkat kemampuanya terkait kesiapsiagaan bencana**	**Dinsos Kab. Sukoharjo**	**40**	**85.000.000**	**DAU**		**40**	**130.000.000**
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinsos Kab. Sukoharjo	3	10.000.000	DAU		2	15.000.000
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinsos Kab. Sukoharjo	21	75.000.000	DAU		15	115.000.000
	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	**Cakupan rehabilitasi pemeliharaan dan penjagaan taman makam pahlawan**	**Dinsos Kab. Sukoharjo**	**1**	**55.000.000**	**DAU**		**1**	**100.000.000**
	Pemeliharaan Taman Makan Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	**jenis pemeliharaan yang dilaksanakan di TMP**	**Dinsos Kab. Sukoharjo**	**1**	**55.000.000**	**DAU**		**3**	**100.000.000**
	Pemeliharaan Taman Makan Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	Dinsos Kab. Sukoharjo	3	10.000.000	DAU		1	25.000.000
	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Dinsos Kab. Sukoharjo	1	45.000.000	DAU		1	75.000.000

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, diuraikan bahwa pada Bab IV fokus perhatiannya adalah terkait dengan rencana kerja dan pendanaan dokumen rencana kerja Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024.

Dokumen Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo merupakan penjabaran dari dokumen rencana strategis Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sukoharjo. Rencana Kerja (Renja) disusun untuk mengakomodir pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya yang memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo yang ditransformasikan melalui Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

Rumusan program dan kegiatan pembangunan daerah menghasilkan rencana pembangunan yang konkrit dalam bentuk program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah. Dalam Renja Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 terdapat 7 (tujuh) program dan 17 (tujuh belas) kegiatan, baik program utama yang merupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam mendukung visi dan misi daerah, maupun program dan kegiatan pendukung. Untuk menilai pencapaian kegiatan, maka pada setiap kegiatan dirumuskan indikator kinerja kegiatan. Perumusan kegiatan juga telah diarahkan

untuk mendukung pencapaian kinerja pada setiap program.

Seluruh program dan kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 yang tertuang dalam Renja didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sukoharjo yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU). Program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan urusan yang ditangani Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo berikut kebutuhan anggaran dan sumber pendanaannya dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut ini.

Tabel 4.1
Rencana Kerja dan Pendanaan
Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo
Tahun 2024

Kode	Urusan/ Bidang Urusan pemerintDaerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024		
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana
				18.216.038.000	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	**PROSENTASE PELAYANAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH**	**100**	**7.245.651.000**	**DAU**
	Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Cakupan Perencanaan dan evaluasi Kinerja PD**	**100**	**55.000.000**	**DAU**
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	25.000.000	DAU
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	5.000.000	DAU
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	5.000.000	DAU
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	5.000.000	DAU
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	5.000.000	DAU
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12	5.000.000	DAU
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12	5.000.000	DAU
	Administrasi Keuangan	**Pelaksanaan Administrasi Perkantoran**	**100**	**5.212.009.000**	**DAU**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	27	4.912.589.000	DAU
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	279.420.000	DAU
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil	1	10.000.000	DAU

	SKPD	Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18	5.000.000	DAU
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	5.000.000	DAU
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Prosentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian PD**	**100**	**20.000.000**	**DAU**
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapanya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0	0	DAU
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1	5.000.000	DAU
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1	5.000.000	DAU
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	12	10.000.000	DAU
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Prosentase Pelaksanaan Administrasi Umum**	**100**	**215.500.000**	**DAU**
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	15.000.000	DAU
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6	50.000.000	DAU
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	15.000.000	DAU
	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	75.000.000	DAU
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	25.012	7.500.000	DAU
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	72	5.000.000	DAU
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	274	48.000.000	DAU
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100**	**10.000.000**	**DAU**
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	52	10.000.000	DAU
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Porsentase jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan**	**100**	**1.251.142.000**	**DAU**
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000	7.000.000	DAU
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	150.000.000	DAU
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	32	5.000.000	DAU
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	25	1.089.142.000	DAU
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Porsentase Barang Milik Daerah yang dipelihara**	**100**	**482.000.000**	**DAU**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	15	175.000.000	DAU
	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	20	4.000.000	DAU
	Pemeliharaan Peralatan dan	Jumlah Peralatan dan Mesin	20	10.000.000	DAU

	Mesin Lainnya	Lainnya yang Dipelihara			
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	293.000.000	DAU
	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	**prosentase PSKS yang meningkat kapasitasnya**	**73,52**	**588.037.000**	**DAU**
	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Sosialisasi Dan Edukasi Bagi Perusahaan Yang Akan Menyelenggarakan Undian Gratis Berhadiah (UGB)**	**50**	**5.000.000**	**DAU**
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang dan Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	50	5.000.000	DAU
	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	**jumlah sumber kesejahteraan sosial yang meningkat potensinya**	**331**	**583.037.000**	**DAU**
	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	90	20.951.000	DAU
	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	12	117.586.000	DAU
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Potensi SumberKesejahteraan Sosial Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	105	350.000.000	DAU
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	16	44.500.000	DAU
	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	1	50.000.000	DAU
	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAAN	**Prosentase penanganan warga migran korban tindak kekerasan**	**100**	**50.000.000**	**DAU**
	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/ Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	**Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan**	**75**	**50.000.000**	**DAU**
	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Ttik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	75	50.000.000	DAU
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	**Prosentase penanganan rehabilitasi sosial**	**17,99**	**634.328.000**	**DAU**
	Rehabiltasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Panti Sosial	**fasilitasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar , lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis di luar panti**	**23**	**368.378.000**	**DAU**
	Penyediaan Alat bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	50	43.378.000	DAU
	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	35	25.000.000	DAU
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	2.400	125.000.000	DAU

		Kewenangan Kabupaten/Kota			
	Pemberian Bimbingan Sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	1.600	125.000.000	DAU
	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	35	25.000.000	DAU
	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	50	25.000.000	DAU
	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial	**fasilitasi PMKS lainya Bukan Korban HIV/ AIDS**	**11**	**265.950.000**	**DAU**
	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	254	10.000.000	DAU
	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	60	50.000.000	DAU
	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	190	10.950.000	DAU
	Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	90	20.000.000	DAU
	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	50	25.000.000	DAU
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	90	20.000.000	DAU
	Pemberian Bimbingan Sosial kepada keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS Lainya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	90	25.000.000	DAU
	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	45	25.000.000	DAU
	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	45	25.000.000	DAU
	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	45	25.000.000	DAU
	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	15	30.000.000	DAU
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	**prosentase pemenuhan perlindungan dan jaminan sosial**	**54,69**	**9.478.022.000**	**DAU**
	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	**fasilitasi pemiliharan anak-anak terlantar**	**8**	**60.000.000**	**DAU**
	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	70	20.000.000	DAU
	Rujukan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar	45	20.000.000	DAU

		yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota			
	Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	45	20.000.000	DAU
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	**Prosentase Data Kemiskinan yang Tervalidasi dan Verifikasi**	**100**	**9.418.022.000**	**DAU**
	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	167	490.000.000	DAU
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	320.051	125.000.000	DAU
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	3.000	8.761.516.000	DAU
	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyaraakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	200	41.506.000	DAU
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	**Prosentase pemenuhan penanganan bencana**	**73,91**	**165.000.000**	**DAU**
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	**jumlah korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan perlindungan sosial**	**34**	**80.000.000**	**DAU**
	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	30	50.000.000	DAU
	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	30	10.000.000	DAU
	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	30	10.000.000	DAU
	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	4	5.000.000	DAU
	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	30	5.000.000	DAU
	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	**jumlah KK yang meningkat kemampuanya terkait kesiapsiagaan bencana**	**40**	**85.000.000**	**DAU**
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	3	10.000.000	DAU
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	21	75.000.000	DAU
	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	**Cakupan rehabilitasi pemeliharaan dan penjagaan taman makam pahlawan**	**1**	**55.000.000**	**DAU**
	Pemeliharaan Taman Makan Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	**jenis pemeliharaan yang dilaksanakan di TMP**	**1**	**55.000.000**	**DAU**
	Pemeliharaan Taman Makan Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	3	10.000.000	DAU
	Pengamanan Taman Makam	Jumlah Laporan Hasil	1	45.000.000	DAU

	Pahlawan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota			

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Sosial Tahun 2024 menjadi pedoman bagi Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo dalam mewujudkan kesejahteraan penduduk miskin di Kabupaten Sukoharjo, dalam upaya mendukung misi Nomor 2 Kabupaten Sukoharjo yaitu Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas.

Tahun 2024 mendekati akhir periode RPJMD Kabupaten Sukoharjo, periode Renstra Dinas Sosial Tahun 2021–2026. Diperlukan pengambilan kebijakan yang sesuai dengan mempertimbangkan prioritas program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan guna pencapaian tujuan dan sasaran pada tahun 2024, yang akan berpengaruh pada pencapaian tujuan dan sasaran pada tahun-tahun perencanaan yang akan datang. Sub Kegiatan yang berbasis pemberdayaan masyarakat/kelompok masyarakat menjadi prioritas pada tahun 2024, untuk meningkatkan pelayanan terhadap PMKS guna menurunkan agka kemiskinan di Kabupaten Sukoharjo.

Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Sosial nantinya akan berkontribusi pada keberhasilan pembangunan daerah Kabupaten Sukoharjo yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh semua Perangkat Daerah dan *Stakeholder* serta masyarakat Kabupaten Sukoharjo.

Sukoharjo, September 2023

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN SUKOHARJO

SUPARMIN, SH. MH.
Pembina Tingkat I
NIP. 19770121 199803 1 002

RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2024



SEKRETARIAT DAERAHKABUPATEN SUKOHARJO

Gedung Menara Wijaya Lt.8-9

Jl. Jenderal Sudirman No.199, Sukoharjo Kode Pos 57521

Telp. (0271) 593068, Fax. (0271) 593335

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT kami ucapkan atas tersusunnya Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024.

Rencana Kerja ini merupakan acuan perencanaan kegiatan Sekretariat Daerah selama satu tahun dan merupakan penjabaran tahunan dari RPJMD dan Renstra Sekretariat Daerah 2021-2026. Rencana Kerja dibuat sebagai gambaran program kerja yang direncanakan, disusun dan bagaimana cara mencapainya, juga memberikan gambaran aktivitas kegiatan tahunan yang dilaksanakan di Sekretariat Daerah.

Penyusunan Renja Sekretariat Daerah merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, sedangkan aturan secara rinci berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Rencana Kerja Tahun 2024 memuat rencana tujuan dan sasaran yang hendak dicapai pada APBD di Tahun 2024. Dokumen ini menjadi salah satu referensi untuk formulasi, implementasi, monitoring dan evaluasi kebijakan serta memberi manfaat dalam upaya serapan anggaran yang rasional dan kinerja yang profesional, akuntabel dan transparan untuk pembangunan yang berasaskan keadilan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Demikian disampaikan, semoga Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2024 yang dibuat ini dapat bermanfaat bagi kita semua.
Aamiin.

Sukoharjo, Agustus 2023
SEKRETARIS DAERAH



WIDODO, SH.,MH
Pembina Utama Madya
NIP. 19650523 199203 1 008

DAFTAR ISI

		Hal
KATA PENGANTAR	.....	ii
DAFTAR ISI	.....	iii
DAFTAR TABEL	.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	.....	1
1.1 Latar Belakang	.....	I-1
1.2 Landasan Hukum	.....	I-2
1.3 Maksud dan Tujuan	.....	I-6
1.4 Sistematika Penulisan	.....	I-6
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	.....	II-1
2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah	.....	II-1
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah	.....	II-17
2.3. Prestasi Yang Dicapai Sekretariat Daerah Tahun 2022	.....	II-21
2.4. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah	.....	II-24
2.5. Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD	.....	II-25
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	.....	III-1
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	.....	III-1
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat Daerah	.....	III-2
3.3 Tantangan Dan Peluang	.....	III-3
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	.....	IV-1
BAB V PENUTUP	.....	79

DAFTAR TABEL

Hal

Tabel 2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2022 dan Perkiraan Capaian Renstra Perangkat Daerah II-3

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo..... II-18

Tabel 2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 ..... II-26

Tabel 3.1 Sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 ..... III- 3

Tabel 4.1 Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 ..... IV-2

Tabel 4.2 Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Tahun 2024 ... .. IV-12

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Perangkat Daerah harus memiliki Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah atau biasa disebut dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah). Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun. Renja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan berpedoman pada Rancangan Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah) serta memuat program, kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan serta pendanaan.

Sebagai sebuah dokumen resmi Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan RKPD, sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Selain itu Renja Perangkat Daerah juga berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Tahapan proses penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo adalah sebagai berikut:

1. Persiapan penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah. Tahap ini dilakukan dengan:
    a. membentuk Tim Penyusun Renja Sekretariat Daerah;
    b. melaksanakan orientasi mengenai Renja untuk penyamaan persepsi dan memberikan pemahaman dalam penyusunan Renja Sekretariat Daerah;
    c. menyusun tata kala sebagai panduan kerja; dan
    d. mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan Renja Sekretariat Daerah.

2. Penyusunan rancangan awal Rencana Kerja Sekretariat Daerah

   Pada tahap ini dilakukan analisis gambaran pelayanan Sekretariat Daerah dan mengevaluasi capaian Renja Sekretariat Daerah tahun yang lalu.

3. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah.

   Tahap ini merupakan koordinasi antar Unit Kerja yang bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam rancangan Rencana Kerja Sekretariat Daerah. Forum Perangkat Daerah Sekretariat Daerah telah dilaksanakan pada tanggal 24 Pebruari 2023.

4. Perumusan rancangan akhir Rencana Kerja Sekretariat Daerah.

   Tahap ini dilakukan dengan maksud untuk mempertajam rumusan program, kegiatan dan pagu indikatif. Rancangan akhir Renja Sekretariat Daerah disusun dengan sistematika:

   I. Pendahuluan

   II. Hasil Evaluasi Renja Sekretariat Daerah Tahun Lalu

   III. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

   IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

   V. Penutup

5. Penetapan Rencana Kerja Sekretariat Daerah.

   Rancangan akhir Rencana Kerja disampaikan oleh Bappeda Kabupaten Sukoharjo kepada Bupati Sukoharjo melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo untuk ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Sukoharjo.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundangan yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2023 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran

Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah

Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 174);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 192) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031(Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 262);
20. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);
21. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 298);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

23. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 81 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja, Staf Ahli Bupati, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat dan Kecamatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 73 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja, Staf Ahli Bupati, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat dan Kecamatan.

1.3. Maksud dan Tujuan

- Maksud

  Renja Sekretariat Daerah disusun sebagai pedoman dan arah bagi Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selama periode satu tahun dengan mengacu pada RKPD Kabupaten Sukoharjo dan berpedoman pada Renstra Sekretariat Daerah.

- Tujuan

  Renja Sekretariat Daerah disusun agar tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 dapat dicapai.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3. Prestasi Yang dicapai Tahun 2022

2.4. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.5. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3. Tantangan Dan Peluang Perangkat Daerah

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah

Tahun 2022 Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo memiliki 3 program, 19 kegiatan, dan 70 Sub Kegiatan yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota, terdiri dari :
    a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
    b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat
    c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
    d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
    e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
    f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
    g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
    h. Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
    i. Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah.
    j. Kegiatan Penataan Organisasi
    k. Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan.
2. Program-Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari beberapa kegiatan, yaitu :
    a. Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan
    b. Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah
    c. Kegiatan Fasilitasi Dan Koordinasi Hukum
    d. Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat

3. Program perekonomian dan pembangunan, terdiri dari beberapa kegiatan, yaitu:
    a. Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian
    b. Kegiatan Pemantauan Kebijakan Terkait Sumber Daya Alam.
    c. Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa.
    d. Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan.

Capaian kinerja program dan kegiatan Tahun yang lalu Tahun 2022 secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1
Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2022
Dan Perkiraan Capaian Renstra Perangkat Daerah

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)		Target RENSTRA pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan Renja tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun berjalan (Tahun 2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RENJA Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2022 (%)		Ket
1	2	3	4		5		6		7		8		9 = 6 +8		10=9/5 x100%		11
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**				**295.404.177.000**	**0**	**53.714.447.466**		**58.821.509.844**		**54.745.348.314**	**-**	**108.459.795.780**			
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**				**295.404.177.000**		**53.714.447.466**		**58.821.509.844**	**0**	**54.745.348.314**	**-**	**108.459.795.780**		**36,72**	
1	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan efektifitas dan efisiensi penataan organisasi**	**%**	**100**	**219.199.706.000**		**45.328.058.848**	**74**	**48.312.180.700**	**91**	**45.302.029.247**	**91**	**90.630.088.095**	**91,00**	**41,35**	
			Cakupan Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas SDM OPD	**%**	**100**				**100**		**100**						
			Prosentase pencapaian kinerja dan pelayanan perangkat daerah	**%**	**100**				**100**		**100**						
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)	%	100	465.000.000	100	57.817.300	100	70.000.000	99,39	69.573.250	199	127.390.550	199,4	27,4	
	4.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	Dokumen	12	325.000.000	2	38.057.600	2	45.000.000	2	44.862.050	4	82.919.650	33,33	25,51	
	4.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA - SKPD yang disusun	Dokumen	6	35.000.000	1	4.969.900	1	5.000.000	1	4.792.800	2	9.762.700	33,33	27,89	
	4.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA - SKPD yang disusun	Dokumen	6	35.000.000	1	4.879.800	1	5.000.000	1	5.000.000	2	9.879.800	33,33	28,23	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)		Target RENSTRA pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan Renja tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun berjalan (Tahun 2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RENJA Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2022 (%)		Ket
	4.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA - SKPD yang disusun	Dokumen	7	35.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	4.993.500	2	9.993.500	28,57	28,55	
	4.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA - SKPD	Dokumen	6	35.000.000	1	4.910.000	1	10.000.000	1	9.924.900	2	14.834.900	33,33	42,39	
	4.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**%**	**100**	**77.299.000.000**	**100**	**12.646.511.293**	**100**	**16.412.424.000**	**94,16**	**15.453.877.077**	**194**	**28.100.388.370**	**194,16**	**36,35**	
	4.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayar gaji dan tunjangannya	Orang	750	74.508.000.000	125	11.984.107.793	125	15.683.334.000	125	14.732.543.077	250	26.716.650.870	33,33	35,86	
	4.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	72	2.650.000.000	12	640.371.500	12	709.340.000	12	701.720.000	24	1.342.091.500	33,33	50,64	
	4.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	6	47.000.000	1	7.260.000	1	9.750.000	1	9.615.000	2	16.875.000	33,33	35,90	
	4.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	12	47.000.000	2	7.407.000	2	5.000.000	2	4.999.000	4	12.406.000	33,33	26,40	
	4.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	72	47.000.000	12	7.365.000	12	5.000.000	12	5.000.000	24	12.365.000	33,33	26,31	
	4.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**%**	**100**	**11.553.000.000**	**100**	**2.805.567.250**	**100**	**2.406.751.000**	**100**	**1.640.205.822**	**200**	**4.445.773.072**	**200,000**	**38,48**	
			Capaian Jumlah Jenis Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	**%**	**100**		**100**		**100**		**90,67**		**191**		**190,670**		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	**Orang**	**7.200**		**1200**		**1200**		**1200**		**2.400**		**33,333**		
	4.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Stel	1.120	1.668.000.000	260	149.377.750	260	393.000.000	222	365.118.390	482	514.496.140	43,04	30,85	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)		Target RENSTRA pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan Renja tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun berjalan (Tahun 2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RENJA Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2022 (%)		Ket
	4.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	1	30.000.000	1	4.965.500	1	5.000.000	1	5.000.000	2	9.965.500	200,00	33,22	
	4.01.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	1	30.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	2	10.000.000	200,00	33,33	
	4.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	625	1.325.000.000	125	1.323.112.000	125	296.500.000	125	284.741.840	250	1.607.853.840	40,00	121,35	
	4.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Capaian Jumlah Jenis Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Media)	Media	200	8.500.000.000	100	1.323.112.000	100	1.707.251.000	100	980.345.592	200	2.303.457.592	100,00	27,10	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	7.200		1.200		1.200		1.200		2.400		33,33		
	4.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)**	**%**	**100**	**27.947.634.000**	**100**	**2.815.290.953**	**100**	**5.830.978.300**	**94,5**	**5.510.835.668**	**195**	**8.326.126.621**	**194,5**	**29,79**	
	4.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Buah	13.342	1.160.000.000	2.271	249.126.900	2.271	254.935.800	2.271	254.892.659	4.542	504.019.559	34,04	43,45	
	4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Buah	2.760	1.700.000.000	460	322.081.000	460	375.000.000	400	374.835.700	860	696.916.700	31,16	41,00	
	4.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Buah	29.400	2.060.000.000	4.900	352.592.437	4.900	390.467.500	4.400	377.048.183	9.300	729.640.620	31,63	35,42	
	4.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jenis	300	13.000.000.000	50	1.084.360.079	50	2.616.975.000	50	2.489.589.853	100	3.573.949.932	33,33	27,49	
			Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman	Jenis	30		5		5		5		10		33,33		
	4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jenis	126	1.029.000.000	21	175.657.250	21	189.000.000	21	188.891.000	42	364.548.250	33,33	35,43	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)		Target RENSTRA pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan Renja tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun berjalan (Tahun 2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RENJA Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2022 (%)		Ket
	4.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Buah	6.720	613.632.000	1.120	129.291.500	1.120	116.000.000	1.120	115.977.500	2.240	245.269.000	33,33	39,97	
	4.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman Tamu	Orang	15.000	1.450.000.000	2.500	169.120.801	2.500	125.000.000	2.500	124.287.500	5.000	293.408.301	33,33	20,24	
	4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Kebutuhan Dalam Koordinasi dan Konsultasi	Kali	3.800	6.935.002.000	350	333.060.986	350	1.763.600.000	350	1.585.313.273	700	1.918.374.259	18,42	27,66	
	4.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**%**	**100**	**14.374.000.000**	**100**	**9.137.577.500**	**100**	**3.493.004.000**	**97,2**	**3.405.441.497**	**197**	**12.543.018.997**	**197,2**	**87,26**	
	4.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diadakan	Unit	353	7.124.000.000	352	7.670.701.000	1	601.404.000	1	537.295.000	353,00	8.207.996.000,00	100,00	115,22	
	4.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	Unit	270	1.250.000.000	10	1.466.876.500	10	791.600.000	221	782.802.100	231,00	2.249.678.600,00	85,56	179,97	
	4.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pembangunan Gedung	Unit	1	6.000.000.000		-	1	2.100.000.000	1	2.085.344.397	1,00	2.085.344.397,00	100,00	34,76	
	4.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**%**	**100**	**33.537.912.000**		**5.361.937.995**	**100**	**6.006.036.200**	**97,4**	**5.849.668.920**	**97,4**	**11.211.606.915**	**97**	**33**	
	4.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Informasi kepada SKPD dan Pemerintah Atasan	Surat	980.000	633.912.000	160.000	139.572.500	160.000	249.250.000	155.000	248.010.500	315.000	387.583.000,00	32,14	61,14	
	4.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Pembayaran Rekening Listrik, Air, Telepon dan Internet	Rekening	24	16.496.000.000	4	2.370.833.989	4	2.518.000.000	4	2.421.577.087	8,00	4.792.411.076,00	33,33	29,05	
	4.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis	54	1.608.000.000	9	253.671.500	9	433.175.000	9	382.320.000	18,00	635.991.500,00	33,33	39,55	
	4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah SDM Pelayanan Umum yang disediakan	Orang	180	14.800.000.000	30	2.597.860.006	30	2.805.611.200	30	2.797.761.333	60,00	5.395.621.339,00	33,33	36,46	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)		Target RENSTRA pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan Renja tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun berjalan (Tahun 2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RENJA Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2022 (%)		Ket
	4.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**%**	**100**	**15.430.400.000**	**100**	**5.574.850.813**	**100**	**6.840.521.000**	**95,33**	**6.520.974.413**	**195**	**12.095.825.226**	**195,33**	**78,39**	
	4.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan Mobil Jabatan	Unit	12	1.008.000.000	2	118.922.189	2	149.000.000	2	131.929.195	4	250.851.384	33,33	24,89	
	4.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas	Unit	472	7.987.000.000	79	1.229.234.740	79	1.616.295.000	79	1.549.602.195	158	2.778.836.935	33,47	34,79	
	4.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jenis	24	2.060.000.000	4	609.627.500	4	854.950.000	4	742.789.087	8	1.352.416.587	33,33	65,65	
	4.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/ Rehab Gedung Kantor	Unit	18	2.025.000.000	3	2.223.668.514	3	2.820.601.000	0	2.802.808.482	3	5.026.476.996	16,67	248,22	
			Jumlah Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah (PBB)	Unit	18		3		3		3		6		33,33		
	4.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarpras Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	30	2.350.400.000	5	1.393.397.870	5	1.399.675.000	5	1.293.845.454	10	2.687.243.324	33,33	114,33	
	4.01.01.2.11	**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**Cakupan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (%)**	**%**	**100**	**4.572.880.000**		**918.611.385**	**100**	**1.110.576.000**	**92,39**	**1.026.111.775**	**92**	**1.944.723.160**	**92,39**	**42,53**	
	4.01.01.2.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang	12	3.902.880.000	2	771.080.266	2	780.576.000	2	769.913.836	4	1.540.994.102	33,33	39,48	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)		Target RENSTRA pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan Renja tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun berjalan (Tahun 2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RENJA Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2022 (%)		Ket
	4.01.01.2.11.03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang	12	670.000.000	2	147.531.119	2	330.000.000	2	256.197.939	4	403.729.058	33,33	60,26	
	4.01.01.2.12	**Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah**	**%**	**100**	**9.020.000.000**		**1.875.256.338**	**100**	**2.290.725.000**	**92,06**	**2.108.913.828**	**92**	**3.984.170.166**	**92,06**	**44,17**	
	4.01.01.2.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jenis	36	6.200.000.000	6	1.072.092.197	6	1.498.000.000	6	1.369.606.835	12	2.441.699.032	33,33	39,38	
			Jumlah Penyediaan Kebutuhan Makan Minum Audiensi Kepala Daerah	Kali	288		48		48		48		96		33,33		
	4.01.01.2.12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Penyediaan Kebutuhan Makan Minum Audiensi Wakil Kepala Daerah	Kali	144	2.220.000.000	24	659.038.911	24	654.725.000	6	641.757.312	30	1.300.796.223	20,83	58,59	
			Jumlah Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jenis	36		6		6		6		12		33,33		
	4.01.01.2.12.03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretaris Daerah	Jenis	36	600.000.000	6	144.125.230	6	138.000.000	6	97.549.681	12	241.674.911	33,33	40,28	
	4.01.01.2.13	**Penataan Organisasi**	**Prosentase Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan**	**%**	**100**	**5.574.880.000**		**695.461.521**	**100**	**915.178.000**	**87,5**	**828.829.043**	**88**	**1.524.290.564**	**88**	**27,342123**	
			Prosentase Kegiatan Monev dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik yang dilaksanakan	**%**	**70**				**70**		**125**		**125**		**179**		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)		Target RENSTRA pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan Renja tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun berjalan (Tahun 2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RENJA Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2022 (%)		Ket
			Prosentase Kebijakan Bidang Ketatalaksanaan yang ditetapkan	**%**	**90**				**90**		**50**		**50**		**56**		
			Prosentase Kegiatan Fasilitasi dan Evaluasi Kelembagaan dan Anjab yang dilaksanakan	**%**	**70**				**70**		**100**		**100**		**143**		
	4.01.01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Rancangan Perda/Perbup tentang Kelembagaan yang disusun	%	44	2.007.880.000	4	239.330.521	4	359.400.000	8	320.989.040	12	560.319.561	27,27	27,91	
			Jumlah PD yang ABK, Anjab dan Evjab telah ditetapkan	OPD	40		40		40		40		80		200		
			Jumlah Buku Perda/Perbup tentang Kelembagaan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo	Buku	1920		450		320		425		875		45,572917		
	4.01.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Buku Alamat Pejabat	Buku	1500	853.200.000	250	92.841.000	250	126.000.000	250	115.992.386	500	208.833.386	33,33	24,48	
			Jumlah PD yang telah menyusun Peta Proses Bisnis	OPD	40				20		0		-				
			Jumlah Perbup tentang Ketatalaksanaan yang ditetapkan	Dokumen	5				1		2		2				
	4.01.01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen SAKIP Pemerintah Kab. yang tersusun dan terdokumentasi	Dokumen	240	835.230.000		109.813.000	40	133.200.000	40	121.209.750	40	231.022.750	16,67	27,66	
			Jumlah Laporan Evaluasi Program Reformasi Birokrasi	Dokumen	30				5		3		3		10		
	4.01.01.2.13.04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Buku Laporan Survei Kepuasan Masyarakat	Buku	300	730.000.000		108.910.000	60	122.358.000	72	113.061.867	72	221.971.867	24	30,41	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)		Target RENSTRA pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan Renja tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun berjalan (Tahun 2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RENJA Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2022 (%)		Ket
			Jumlah UPP yang memiliki Inovasi	OPD	43		3		4		12		15		34,88		
	4.01.01.2.13.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Kinerja yang tersusun	Dokumen	360	1.148.570.000	60	144.567.000	60	174.220.000	50	157.576.000	110	302.143.000	30,56	26,31	
			Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja yang tersusun	Dokumen	360		54		60		50		104		28,89		
	4.01.01.2.14	**Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**	**Cakupan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**	**%**	**100**	**19.425.000.000**		**3.439.176.500**	**100**	**2.935.987.200**	**100**	**2.887.597.954**	**100**	**6.326.774.454**	**100,00**	**32,57**	
	4.01.01.2.14.01	Fasilitasi Keprotokolan	Cakupan Pelayanan Keprotokolan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	%	100	1.675.000.000	100	216.243.039	100	203.187.080	0	199.043.397	100	415.286.436	100,00	24,79	
	4.01.01.2.14.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Terfasilitasinya Komunikasi Pimpinan	Bulan	72	9.850.000.000	12	1.761.531.300	12	1.480.638.680	12	1.448.379.373	24	3.209.910.673	33,33	32,59	
	4.01.01.2.14.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Terlaksananya Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Bulan	28	7.900.000.000	12	1.461.402.161	12	1.252.161.440	12	1.240.175.184	24	2.701.577.345	85,71	34,20	
2	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Cakupan Penyusunan produk dan pelayanan hukum (%)**	**%**	**100**	**49.032.181.000**		**4.624.790.838**	**100**	**7.078.911.016**	**100**	**6.151.476.475**	**100**	**10.776.267.313**	**100,00**	**21,98**	
			Cakupan Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan	**%**	**100**				**100**		**90**		**90**		**90,00**		
			Capaian pengembangan kapasitas otonomi daerah	**%**	**100**				**100**		**100**		**100**		**100,00**		
	4.01.02.2.01	**Administrasi Tata Pemerintahan**	**Jumlah Kajian/ Kebijakan yang disusun/ dievaluasi**	**Kbjk**	**30**	**7.760.100.000**	**5**	**674.834.000**	**5**	**781.600.000**	**5**	**758.118.923**	**10**	**1.432.952.923**	**33,33**	**18,46**	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)		Target RENSTRA pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan Renja tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun berjalan (Tahun 2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RENJA Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2022 (%)		Ket
	4.01.02.2.01.01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Pelaksanaan Koordinasi antar Perangkat Daerah dan Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Sukoharjo	Kali	18	1.835.100.000	3	109.573.000	3	200.000.000	3	190.158.323	6	299.731.323	33,33	16,33	
			Penyelenggaraan Rapat Batas Daerah	Kali	24		4		4		4		8		33,33		
			Penyususunan Dokumen Gesiter Rupa Bumi Kabupaten Sukoharjo	Dokumen	6		1		1		1		2		33,33		
	4.01.02.2.01.02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Fasilitasi Permasalahan - permasalahan di Bidang Pemerintahan	Kali	12	2.680.000.000	2	207.067.000	2	157.000.000	2	153.823.000	4	360.890.000	33,33	13,47	
			Penyelenggaraan Monitoring Administrasi Pemerintahan dan Dana ADD di Kecamatan dan Kelurahan	Kali	36		6		6		6		12		33,33		
	4.01.02.2.01.03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Penyusunan Dokumen LKPJ, LPPD, ILPPD dan Penyusunan Dokumen SPM yang baik	Dokumen	24	3.245.000.000	4	358.194.000	4	424.600.000	4	414.137.600	8	772.331.600	33,33	23,80	
	4.01.02.2.02	**Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**	**Jumlah Masyarakat yang lebih profesional dan bertambah Religius**	**%**	**100**	**31.846.061.000**		**3.129.769.346**	**100**	**5.001.806.888**	**65**	**4.113.513.346**	**65**	**7.243.282.692**	**65,00**	**22,74**	
			Jumlah Kelompok maupun Organisasi Masyarakat yang kegiatannya lebih meningkat di bidang Sosial, Budaya, Olahraga dan Pendidikan	**%**	**100**				**100**		**92**		**92**		**92,00**		
	4.01.02.2.02.01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Calon Jemaah Haji Daerah yang terfasilitasi	Orang	7.200	25.860.000.000	0	2.593.178.346	1.200	3.522.246.888	382	2.936.603.346	382	5.529.781.692	5,31	21,38	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)		Target RENSTRA pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan Renja tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun berjalan (Tahun 2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RENJA Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2022 (%)		Ket
			Jumlah Kegiatan Keagamaan yang terfasilitasi	%	600		78		100		60		138		23,00		
			Jumlah Kelompok Masyarakat Keagamaan dan Ormas Keagamaan yang Difasiltasi Bantuan	%	600		40		100		100		140		23,33		
			Jumlah Paket Sembako yang dibagikan Kepada Masyarakat Miskin menjelang Hari Raya ledul Fitri	Paket	19.000		3000		3.000		3.000		6.000		31,58		
	4.01.02.2.02.02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah rumusan kebijakan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan	Dokumen	12	780.000.000	2	92.641.000	2	138.864.000	1	20.890.000	3	113.531.000	25,00	15,04	
			Jumlah Rapat Koordinasi Masalah Penyakit Menular yang difasilitasi	Kegiatan	288		38		48		14		52		18,06		
	4.01.02.2.02.03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Rapat koordinasi dan Kegiatan monev terkait pelaksanaan kebijakan Kesejahteraan Masyarakat	%	600	5.206.061.000	9	443.950.000	100	1.340.696.000	40	1.156.020.000	49	1.599.970.000	8,17	86,23	
			Jumlah Kelompok Masyarakat dan Ormas yang terfasilitasi Bantuan Kegiatan di Bidang Olahraga, Seni Budaya dan Pendidikan	%	600		100		100		100		200		33,33		
			Jumlah Kegiatan Senam Rutin ASN yang terfasilitasi	Kegiatan	264		14		44		43		57		21,59		
	4.01.02.2.03	**Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**	**Cakupan Penyusunan produk dan pelayanan hukum (%)**	**%**	**97,5**	**8.926.020.000**		**765.661.492**	**95**	**1.209.504.128**	**95**	**1.196.648.206**	**95**	**1.962.309.698**	**97,44**	**21,98**	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)		Target RENSTRA pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan Renja tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun berjalan (Tahun 2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RENJA Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2022 (%)		Ket
			Cakupan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum (%)	**%**	**97,5**				**95**		**95**		**95**		**97,44**		
	4.01.02.2.03.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah YangSesuai Kaidah Hukum dan Selesai Tepat Waktu	Jenis	3	2.011.000.000	3	158.932.692	1	248.579.064	1	239.042.267	4	397.974.959	133,33	19,79	
			Persentase Produk Hukum yang tidak dibatalkan	%	100		100		100		100		200		200,00		
			Jumlah ASN yang memahami penyusunan produk hukum daerah yang sesuai kaidah penyusunan produk hukum daerah	Orang	75		75		75		75		150		200		
	4.01.02.2.03.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah kajian hukum terhadap permasalahan hukum yang tersusun	Buah	30	1.699.000.000	7	177.356.500	5	232.846.000	4	232.109.069	11	409.465.569	36,67	24,10	
			Jumlah laporan HAM yang tersusun (jenis)	Jenis	24		2		4		4		6		25,00		
			Jumlah sengketa hukum yang ditangani	Perkara	12		5		2		2		7		58,33		
	4.01.02.2.03.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Fasilitasi pengelolaan perpustakaan JDIH	bulan	72	5.216.020.000	12	429.372.300	12	728.079.064	12	725.496.870	24	1.154.869.170	33,33	22,14	
			Jumlah media publikasi peraturan perundang-undangan	Jenis	17		2		2		2		4		23,53		
			Jumlah Anggota JDIH yang terkoordinasi	OPD	30		30		30		0		30		100		
			Jumlah Aparatur Masyarakat Yang Tersosialisasi hukum	Orang	9.800		800		1.800		0		800		8,1632653		
	4.01.02.2.04	**Fasilitasi Kerjasama Daerah**	**Jumlah Dokumen Kerja Sama yang di Tanda Tangani**	**Dokumen**	**55**	**500.000.000**	**5**	**54.526.000**	**10**	**86.000.000**	**10**	**83.196.000**	**15**	**137.722.000**	**27,27**	**27,54**	
	4.01.02.2.04.01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Penyusunan Dokumen Kerjasama	Dokumen	55	500.000.000	5	54.526.000	10	86.000.000	10	83.196.000	15	137.722.000	27,27	27,54	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)		Target RENSTRA pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan Renja tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun berjalan (Tahun 2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RENJA Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2022 (%)		Ket
3	**4.01.03**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**Cakupan pengadaan barang dan jasa**	**%**	**100**	**27.172.290.000**	**100**	**3.761.597.780**	**100**	**3.430.418.128**	**133,93**	**3.291.842.592**	**234**	**7.053.440.372**	**233,93**	**25,96**	
			Cakupan Perumusan dan Pengendalian Kebijakan pembangunan	**%**	**100**		**100**		**100**		**100**		**200**		**199,99**		
			Cakupan Perumusan kebijakan, pengkoordinasian, sosialisasi, fasilitasi dan monev pelaksanaan kebijakan perekonomian dan SDA	**%**	**100**		**100**		**100**		**100**		**200**		**200,00**		
	4.01.03.2.01	**Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**	**Cakupan pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**	**%**	**600**	**7.873.140.000**		**926.934.180**	**100**	**1.232.800.000**	**100**	**1.130.087.238**	**100**	**2.057.021.418**	**16,67**	**26,13**	
	4.01.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Kegiatan	18	1.938.140.000	4	245.875.000	6	575.000.000	6	499.599.091	10	745.474.091	55,56	38,46	
	4.01.03.2.01.02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi dan Monitoring Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Kegiatan	11	2.500.000.000	5	192.610.000	6	325.000.000	6	322.908.749	11	515.518.749	100,00	20,62	
	4.01.03.2.01.03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, dan Monitoring Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi mikro Kecil	Kegiatan	12	3.435.000.000	5	488.449.180	4	332.800.000	4	307.579.398	9	796.028.578	75,00	23,17	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)		Target RENSTRA pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan Renja tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun berjalan (Tahun 2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RENJA Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2022 (%)		Ket
	4.01.03.2.02	**Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**	**Cakupan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**	**%**	**600**	**4.633.420.000**	**100**	**529.900.000**	**100**	**609.958.128**	**100**	**601.064.934**	**200**	**1.130.964.934**	**33,33**	**24,41**	
	4.01.03.2.02.01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Penyusunan Dokumen Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan	Dokumen	6	427.000.000	1	104.900.000	1	45.280.000	1	44.180.000	2	149.080.000	33,33	34,91	
	4.01.03.2.02.02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Koordinasi Pengendalian Program Pembangunan	Kali	24	2.901.800.000	4	247.535.000	4	284.678.128	4	280.059.934	8	527.594.934	33,33	18,18	
	4.01.03.2.02.03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran	Jenis	170	1.304.620.000	4	177.465.000	4	280.000.000	4	276.825.000	8	454.290.000	4,71	34,82	
	4.01.03.2.03	**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	**Cakupan pengadaan barang dan jasa**	**%**	**100**	**12.990.730.000**	**100**	**1.716.966.600**	**100**	**1.137.160.000**	**133,92**	**1.124.612.420**	**234**	**2.841.579.020**	**234**	**22**	
	4.01.03.2.03.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Pelaksanaan Pengadaan pada OPD	Paket	6.000	9.945.350.000	1015	1.305.436.800	1.000	441.410.000	1.011	433.771.100	2.026	1.739.207.900	33,77	17,49	
	4.01.03.2.03.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah pengguna Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang terlayani	Orang	1.812	1.282.502.000	100	169.147.000	360	198.000.000	600	196.111.900	700	365.258.900	38,63	28,48	
	4.01.03.2.03.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah pengelola pengadaan barang/jasa yang ditingkatkan kapasitas dan kompetensinya	Orang	1.755	1.762.878.000	172	242.382.800	350	497.750.000	486	494.729.420	658	737.112.220	37,49	41,81	
	4.01.03.2.04	**Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam**	**Cakupan Pemantauan Kebijakan terkait Sumber Daya Alam (%)**	**%**	**100**	**1.675.000.000**		**587.797.000**	**100**	**450.500.000**	**100**	**436.078.000**	**100**	**1.023.875.000**	**100**	**61,12**	
	4.01.03.2.04.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Kegiatan	24	675.000.000	3	531.012.000	4	400.500.000	4	388.058.000	7	919.070.000	29,17	136,16	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)		Target RENSTRA pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan Renja tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun berjalan (Tahun 2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RENJA Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2022 (%)		Ket
	4.01.03.2.04.02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pemantauan Kebijakan pertambangan dan Lingkungan hidup	Kegiatan	12	450.000.000	2	37.898.000	2	25.000.000	2	23.730.000	4	61.628.000	33,33	13,70	
	4.01.03.2.04.03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pemantauan Kebijakan Energi dan air	Dokumen	12	550.000.000	2	18.887.000	2	25.000.000	2	24.290.000	4	43.177.000	33,33	7,85	

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo memiliki 2 sasaran, yaitu:

1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah.
2. Meningkatnya kualitas aparatur dan pelayanan publik.

Capaian kinerja indikator sasaran tersebut secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.2

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Sekretariat Daerah
Kabupaten Sukoharjo

No	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah (Sasaran)	Indikator	Satuan	Target				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan Daerah	Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
		Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan perekonomian dan pembangunan	%	100	100	100	100	121,99	111,31	100	100	
		Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan administrasi umum	%	100	100	100	100	100	108	100	100	
2.	Meningkatkan Kualitas Aparatur dan Pelayanan Publik	Nilai sakip perangkat daerah	Angka	71	73	75	77	70,65	Belum keluar	75	77	

Pengukuran kinerja disajikan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2022. Realisasi kinerja dari masing-masing indikator sasaran adalah sebagai berikut:

1. Sasaran Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

    a. Indikator cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat merupakan indikator yang diperoleh dari hasil rata-rata dari tiga indikator yaitu, cakupan penyusunan produk dan pelayanan hukum, cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan kesejahteraan rekyat dan kemasyarakatan, dan cakupan pengembangan kapasitas otonomi daerah. Indikator cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat pada tahun 2022 dari target sebesar 100% dapat terealisasi 100% dengan capaian sebesar 100% atau dengan kata lain dapat mencapai target.

    b. Indikator Cakupan Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Perekonomian Dan Pembangunan merupakan indikator yang diperoleh dari hasil rata-rata dari tiga indikator yaitu, cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan pembangunan; cakupan perumusan kebijaka, pengkoordinasian, sosialisasi fasilitasi dan monev pelaksanaan kebijakan perekonomian dan SDA; dan cakupan pengadaan barang dan jasa. Indikator Cakupan Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Perekonomian Dan Pembangunan pada tahun 2022 dari target 100% dapat terealisasi 111,31% dengan capaian sebesar 111,31%. Salah satu faktor pendukung tercapainya realisasi yang melebihi target adalah meningkatnya jumlah pengguna Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang terlayani dengan target 360 orang dapat terealisasi 600 orang. Banyaknya jumlah pengguna layanan pengadaan secara elektronik dimaksud karena adanya kebijakan dari Pemerintah Pusat terkait dengan penggunaan katalog elektronik lokal dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Dengan adanya kebijakan tersebut penyedia barang/jasa lokal yang berasal dari UMKM berkonsultasi, melakukan pendaftaran penyedia di LPSE dan meminta pendampingan kepada Bagian Pengadaan

Barang dan Jasa untuk membantu menayangkan produknya di Katalog Elektronik Lokal Kabupaten Sukoharjo.

c. Indikator cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan Administrasi Umum merupakan indikator yang diperoleh dari hasil rata-rata dari tiga indikator yaitu, cakupan efektifitas dan efisiensi penataan organisasi; cakupan peningkatan sarana/prasarana kerja dan kulitas SDM OPD; dan cakupan kinerja pelayanan kedinasan KDH/ wakil KDH. Indikator cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan Administrasi Umum pada tahun 2022 dari target 100% dapat terealisasi 108% dengan capaian sebesar 108%. Peningkatan capaian ini didukung oleh meningkatnya jumlah inovasi pelayanan publik yang lolos pada ajang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Nasional dari target 4 UPP terealisasi sebanyak 12 UPP. Dari 12 inovasi tersebut, ada satu inovasi yang meraih penghargaan TOP 45 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Nasional adalah Gerakan Literasi Sukoharjo (GELIS).

2. Sasaran Meningkatkan Kualitas Aparatur dan Pelayanan Publik

a. indikator nilai SAKIP Perangkat Daerah pada tahun 2022 belum ada evaluasi sehingga belum ada nilai SAKIP Perangkat Daerah. Meskipun demikian, realisasi nilai SAKIP Perangkat Daerah dari tahun 2020 sebesar 69,91 mengalami peningkatan pada tahun 2021 menjadi 70,65. Nilai SAKIP pada tahun 2021 berdasarkan hasil evaluasi internal menunjukkan peningkatan nilai pada komponen capaian kinerja atas kriteria capaian kinerja keluaran (output dan outcome) secara umum telah memenuhi kriteria memadai yaitu capaian target kinerja keluaran (output dan outcome) yang diperoleh dapat dicapai dan lebih baik dari capaian sebelumnya.

2.3. Prestasi/penghargaan yang dicapai Sekretariat Daerah tahun 2022

Pada tahun 2022 Sekretariat Daerah kabupaten Sukoharjo meraih beberapa prestasi/penghargaan antara lain:

1. Terbaik ke II Nasional JDIH Award 2022 kategori Kabupaten

   Berdasarkan keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-2.HN.03.8 Tahun 2022, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia menyelenggarakan kegiatan Penganugerahan Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional.

   Penganugerahan diselenggarakan pada hari Rabu, 27 September 2022 di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta Pusat. Acara penganugerahan tersebut Bupati Sukoharjo Hj. Etik Suryani, SE.,MM menerima Penghargaan JDIH Award tahun 2022 dari Menteri Hukum dan HAM RI Yasonna Laoli.

   Penganugerahan ini merupakan perghargaan yang diberikan bagi anggota pengelola jaringan Dokumetasi dan informasi hukum yang mampu melakukan terobosan dan inovasi dalam membangun kemudahan dan pelayanan bagi masyarakat yang mendasar pada ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2022 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN).

Gambar II.1
Piagam Penghargaan
Terbaik ke II Nasional JDIH Award 2022 kategori Kabupaten



2. Pengelolaan JDIH terbaik tingkat Provinsi Jawa Tengah

   Berdasarkan keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 002.5/17/Tahun 2022 tanggal 7 September 2022 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten/Kota terbaik tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan pemberian penghargaan JDIH terbaik, bertempat di Asrama Haji Donohudan Kabupaten Boyolali pada hari Rabu tanggal 1 November 2022.

   Pada acara penganugerahan tersebut Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo Widodo, SH, MH menerima Penghargaan dari Gubernur Jawa Tengah yang diberikan oleh Bapak Sumarno selaku Sekretaris Daerah Jawa Tengah.

Gambar II.2

Piagam Penghargaan

Pengelolaan JDIH terbaik tingkat Provinsi Jawa Tengah



3. Kabupaten Peduli HAM Tahun 2021

   Berdasarkan keputusan Meteri Hukum dan HAM Nomor : M.HH-02.HA.02.01.01 Tahun 2022 tanggal 5 Desember 2022 tentang Kriteria Kabupaten/Kota Peduli HAM. Kemetrian HUkum dan HAM menyelenggarakan pemberian penganugrahan bagi Kabupaten/Kota ini merupakan bentuk penghargaan di tingkat Nasional oleh Kementrian Hukum dan HAM dalam upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan peran dan tanggung jawab dalam penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan dan pemajuan HAM (P5 HAM)

Pada acara penganugerahan tersebut Wakil Bupati Sukoharjo Drs H Agus Santosa menerima Penghargaan Kriteria Kabupaten Peduli HAM Tahun 2021 dari Menteri Hukum dan HAM RI Yasonna H. Laoly penghargaan ini yang diampu oleh Bagian Hukum Setda Kabupaten Sukoharjo

Gambar II.3

Piagam Penghargaan

Kabupaten Peduli HAM



MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM PENGHARGAAN

KRITERIA KABUPATEN/KOTA PEDULI HAM

NOMOR: M.HH-02.HA.02.01.01 TAHUN 2022

Diberikan kepada:

PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

SEBAGAI KABUPATEN PEDULI HAK ASASI MANUSIA PADA TAHUN 2021

Jakarta, 5 Desember 2022
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia,

Yasonna H. Laoly

4. Peraih Nilai SAKIP tertinggi ketiga Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021

Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo memperoleh penghargaan pada Gelar Pengawasan Daerah tahun 2022, sebagai peraih nilai SAKIP tertinggi ketiga Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021

Gambar II.3

Peraih Nilai SAKIP Tertinggi Ketiga Kab. Sukoharjo



2.4. Isu – isu Penting/Strategis Dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah merupakan unsur staf Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Berdasarkan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 81 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja, Staf Ahli Bupati, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat dan Kecamatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 73 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja, Staf Ahli Bupati, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat dan Kecamatan. mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Untuk melaksanakan tugas tersebut Sekretariat Daerah mempunyai fungsi:

1. pengkoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
2. pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
3. pengkoordinasian pelaksanaan tugas Staf Ahli;
4. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
5. pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas danfungsinya.

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kinerja Sekretariat Daerah dalam jangka panjang. Isu-isu strategis yang dihadapi oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo adalah:

1. Belum optimalnya perumusan dan pengendalian kebijakan pemerintah daerah;
2. Belum optimalnya pelayanan kedinasan KDH/WKDH;
3. Sarana/prasarana kerja dan kualitas sumber daya manusia Perangkat Daerah kurang memadai;
4. Belum optimalnya penguatan kelembagaan;
5. Belum optimalnya kinerja BUMD;
6. Belum optimalnya penyusunan laporan kinerja penyelenggaraan pemerintahan;
7. Belum optimalnya layanan pengadaan barang dan jasa pemerintah;
8. Belum optimalnya kualitas layanan kemasyarakatan; dan
9. Belum optimalnya penyusunan produk hukum.

2.5. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Tujuan yang ingin dicapai oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo adalah Terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel. Untuk mencapai tujuan tersebut maka perlu didukung dengan program dan kegiatan.

Review terhadap rancangan awal RKPD adalah membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses ini dilakukan dengan tujuan untuk meninjau ulang apakah program dan kegiatan yang sudah disusun dalam rancangan awal RKPD sesuai dengan kebutuhan riil Perangkat Daerah berdasarkan kondisi di lapangan. Hasil review tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.4.

TABEL 2.4

REVIU TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2024

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	RANCANGAN AWAL RKPD TA 2024		RENCANA KEBUTUHAN TA 2024		LOKASI
							TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**			**90.246.980.000**		**64.916.323.880**	
4	**01**	**02**			**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**			**41.256.780.000**		**16.187.058.880**	
4	**01**	**02**	**2.01**		**Administrasi Tata Pemerintahan**			**2.530.000.000**		**925.000.000**	**Bagian Pemerintahan**
4	01	02	2.01	0001	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	3 Dokumen	1.635.000.000	3 Dokumen	265.000.000	
4	01	02	2.01	0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	3 Dokumen	345.000.000	3 Dokumen	200.000.000	
4	01	02	2.01	0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	4 Dokumen	550.000.000	4 Dokumen	460.000.000	
4	**01**	**02**	**2.04**		**Fasilitasi Kerja Sama Daerah**			**100.000.000**		**100.000.000**	**Bagian Pemerintahan**
4	01	02	2.04	0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	10 Dokumen	100.000.000	10 Dokumen	100.000.000	
4	**01**	**02**	**2.02**		**Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**			**36.800.000.000**		**13.850.400.880**	**Bagian Kesejahteraan Rakyat**
4	01	02	2.02	0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	12 Dokumen	19.100.000.000	12 Dokumen	6.785.000.880	

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	RANCANGAN AWAL RKPD TA 2024		RENCANA KEBUTUHAN TA 2024		LOKASI
							TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8
4	01	02	2.02	0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	4 Dokumen	17.500.000.000	4 Dokumen	5.865.000.000	
4	01	02	2.02	0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	5 Dokumen	200.000.000	5 Dokumen	1.200.400.000,00	
4	**01**	**02**	**2.03**		**Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**			**1.826.780.000,00**		**1.311.658.000,00**	**Bagian Hukum**
4	01	02	2.03	0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	3 Dokumen	402.000.000	3 Dokumen	281.779.000,00	
4	01	02	2.03	0002	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	2 Kasus	353.000.000	2 Kasus	310.000.000,00	
4	01	02	2.03	0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	2 Dokumen	1.071.780.000	2 Dokumen	719.879.000,00	
4	**01**	**03**			**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**			**4.006.661.000**		**3.387.160.000**	
4	**01**	**03**	**2.01**		**Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**			**1.300.000.000**		**1.025.000.000**	**Bagian Perekonomian dan SDA**

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	RANCANGAN AWAL RKPD TA 2024		RENCANA KEBUTUHAN TA 2024		LOKASI
							TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8
4	01	03	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	4 Dokumen	500.000.000	4 Dokumen	250.000.000,00	
4	01	03	2.01	0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	4 Laporan	600.000.000	4 Laporan	575.000.000,00	
4	01	03	2.01	0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	3 Dokumen	200.000.000	3 Dokumen	200.000.000,00	
4	**01**	**03**	**2.04**		**Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam**			**475.000.000**		**475.000.000**	**Bagian Perekonomian dan SDA**
4	01	03	2.04	0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	3 Dokumen	325.000.000	3 Dokumen	325.000.000	
4	01	03	2.04	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	2 Dokumen	75.000.000	2 Dokumen	75.000.000	
4	01	03	2.04	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan	2 Dokumen	75.000.000	2 Dokumen	75.000.000,00	

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	RANCANGAN AWAL RKPD TA 2024		RENCANA KEBUTUHAN TA 2024		LOKASI
							TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8
						Permukiman, Pertanahan					
4	**01**	**03**	**2.02**		**Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**			**1.002.785.000**		**770.000.000**	**Bagian Administrasi Pembangunan**
4	01	03	2.02	0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	1 Dokumen	132.000.000	1 Dokumen	99.900.000,00	
4	01	03	2.02	0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	4 Laporan	478.060.000	4 Laporan	404.560.000,00	
4	01	03	2.02	0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	12 Laporan	392.725.000	12 Laporan	265.540.000,00	
4	**01**	**03**	**2.03**		**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**			**1.228.876.000**		**1.117.160.000**	**Bagian Pengadaan Barang Jasa**
4	01	03	2.03	0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1000 Dokumen	463.551.000	1000 Dokumen	421.410.000,00	
4	01	03	2.03	0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	12 Dokumen	217.800.000	12 Dokumen	198.000.000,00	
4	01	03	2.03	0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	370 Orang	547.525.000	370 Orang	497.750.000,00	
4	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**44.983.539.000**		**45.342.105.000**	

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	RANCANGAN AWAL RKPD TA 2024		RENCANA KEBUTUHAN TA 2024		LOKASI
							TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8
4	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**			**102.000.000**		**50.000.000**	**Bagian Umum**
4	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	70.000.000	1 Dokumen	30.000.000,00	
4	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	8.000.000	1 Dokumen	5.000.000,00	
4	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	8.000.000	1 Dokumen	5.000.000,00	
4	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	8.000.000	1 Dokumen	5.000.000,00	
4	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	8.000.000	1 Dokumen	5.000.000,00	
4	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**16.592.000.000**		**19.071.400.000**	**Bagian Umum**
4	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	124 Orang/bulan	15.968.000.000	124 Orang/bulan	18.324.400.000,01	
4	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	600.000.000	12 Dokumen	732.000.000,00	
4	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	8.000.000	1 Laporan	5.000.000,00	

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	RANCANGAN AWAL RKPD TA 2024		RENCANA KEBUTUHAN TA 2024		LOKASI
							TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8
4	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	8.000.000	2 Laporan	5.000.000,00	
4	01	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12 Dokumen	8.000.000	12 Dokumen	5.000.000,00	
4	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**			**637.000.000**		**454.012.000**	**Bagian Umum**
4	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	9 Paket	350.000.000	9 Paket	244.012.000,00	
4	01	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	6.000.000	1 Dokumen	5.000.000,00	
4	01	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	6.000.000	1 Dokumen	5.000.000,00	
4	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	175 Orang	275.000.000	175 Orang	200.000.000,00	
4	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**5.690.000.000**		**4.445.375.000**	**Bagian Umum**
4	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	240.000.000	4 Paket	200.000.000,00	
4	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	350.000.000	2 Paket	450.000.000,00	
4	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	425.000.000	4 Paket	315.000.000,00	

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	RANCANGAN AWAL RKPD TA 2024		RENCANA KEBUTUHAN TA 2024		LOKASI
							TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8
4	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 Paket	2.700.000.000	7 Paket	1.750.000.000,00	
4	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	210.000.000	1 Paket	150.375.000,00	
4	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	120.000.000	12 Dokumen	110.000.000,00	
4	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	36 Laporan	300.000.000	36 Laporan	370.000.000,00	
4	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	700 Laporan	1.345.000.000	700 Laporan	1.100.000.000,00	
4	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			**4.200.000.000**		**800.000.000**	**Bagian Umum**
4	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	9 Unit		9 Unit	0,00	
4	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	200.000.000	3 Unit	800.000.000,00	
4	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	4.000.000.000	1 Unit	0,00	
4	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**6.124.914.000**		**7.174.600.000**	**Bagian Umum**
4	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	124.914.000	12 Laporan	200.000.000,00	
4	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	3.000.000.000	12 Laporan	2.700.000.000,00	
4	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	300.000.000	12 Laporan	274.600.000,00	

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	RANCANGAN AWAL RKPD TA 2024		RENCANA KEBUTUHAN TA 2024		LOKASI
							TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8
4	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.700.000.000	12 Laporan	4.000.000.000,00	
4	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**3.480.000.000**		**4.825.295.000**	**Bagian Umum**
4	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	235.000.000	2 Unit	194.000.000,00	
4	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	79 Unit	1.725.000.000	79 Unit	1.331.295.000,00	
4	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2345 Unit	420.000.000	2345 Unit	700.000.000,00	
4	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	450.000.000	3 Unit	1.300.000.000,00	
4	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	650.000.000	5 Unit	1.300.000.000,00	
4	**01**	**01**	**2.11**		**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**			**915.576.000**		**940.374.000**	**Bagian Umum**
4	01	01	2.11	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	780.576.000	2 Orang/Bulan	780.374.000,00	
4	01	01	2.11	0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang	135.000.000	2 Orang	160.000.000,00	

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	RANCANGAN AWAL RKPD TA 2024		RENCANA KEBUTUHAN TA 2024		LOKASI
							TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8
4	**01**	**01**	**2.12**		**Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**			**1.845.000.000**		**2.585.000.000**	**Bagian Umum**
4	01	01	2.12	0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	6 Paket	1.300.000.000	6 Paket	1.700.000.000,00	
4	01	01	2.12	0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	5 Paket	410.000.000	5 Paket	750.000.000,00	
4	01	01	2.12	0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	4 Paket	135.000.000	4 Paket	135.000.000,00	
4	**01**	**01**	**2.13**		**Penataan Organisasi**			**1.200.000.000**		**942.820.000**	**Bagian Organisasi**
4	01	01	2.13	0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	4 Dokumen	440.000.000	4 Dokumen	329.400.000,00	
4	01	01	2.13	0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Laporan	182.600.000	1 Laporan	126.000.000,00	
4	01	01	2.13	0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	2 Dokumen	177.110.000	2 Dokumen	126.842.000,00	
4	01	01	2.13	0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	2 Dokumen	155.000.000	2 Dokumen	186.358.000,00	
4	01	01	2.13	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	2 Dokumen	245.290.000	2 Dokumen	174.220.000,00	
4	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**			**1.004.467.000**		**962.789.000,00**	**Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan**

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	RANCANGAN AWAL RKPD TA 2024		RENCANA KEBUTUHAN TA 2024		LOKASI
							TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8
4	01	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	1.004.467.000	100 Orang	962.789.000,00	
4	**01**	**01**	**2.14**		**Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**			**3.192.582.000**		**3.090.440.000**	**Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan**
4	01	01	2.14	0001	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	12 Laporan	264.484.000	12 Laporan	223.094.000,00	
4	01	01	2.14	0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12 Laporan	1.646.139.000	12 Laporan	1.624.376.000,00	
4	01	01	2.14	0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	12 Laporan	1.281.959.000	12 Laporan	1.242.970.000,00	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan di daerah merupakan satu kesatuan integral dengan perencanaan pembangunan nasional, sehingga tema dan prioritas pembangunan daerah harus mengacu pada tema dan prioritas pembangunan nasional. Tema Rencana Kerja Pemerinatah (RKP) pada 2024 adalah "Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan". RKP 2024 memiliki pedoman 8 Arah Kebijakan, yaitu:

1. Pengurangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan;
3. Penguatan Daya Saing Usaha;
4. Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset Terapan;
5. Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi;
6. Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas;
7. Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara; dan
8. Pelaksanaan Pemilu 2024

RKP 2024 dijabarkan dalam 7 Prioritas Nasional, yaitu:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim;
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Memperhatikan Agenda Pembangunan Nasional dan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024, maka Pembangunan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 diarahkan pada: ***"Penguatan Kesejahteraan Dan Perekonomian Masyarakat Didukung Penguatan Daya Saing ekonomi Daerah",*** dengan prioritas daerah diarahkan pada:

1. Penguatan kualitas sumber daya manusia yang unggul;

2. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan inklusif;
3. Perkuatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa, kondusivitas wilayah dan peningkatan kapasitas fiscal daerah serta kolaborasi inklusif;
4. Pengurangan kemiskinan;
5. Peningkatan infra struktur wilayah yang berwawasan lingkungan dan penguatan ketahanan bencana.

Dari kelima prioritas pembangunan daerah tersebut di atas Sekretariat Daerah masuk pada prioritas ke tiga yang sesuai dengan tujuan dan sasaran Sekretariat daerah, yaitu perkuatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa, kondusivitas wilayah dan peningkatan kapasitas fiscal daerah serta kolaborasi inklusif.

3.2. Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah

3.2.1 Tujuan

Berpedoman pada tujuan dalam Renstra Sekretariat Daerah dan menyesuaikan dengan aturan Permendagri No. 56 tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Permendagri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka tujuan Renja Sekretariat Daerah tahun 2024 adalah Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, dan Pelayanan Publik yang Responsif dan Akuntabel.

3.2.2 Sasaran

Berpedoman pada sasaran dalam Renstra Sekretariat Daerah dan menyesuaikan dengan aturan Permendagri No. 56 tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Permendagri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka sasaran Renja Sekretariat Daerah tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo
Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator	Target
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat.	100%
		Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan perekonpmian dan pembangunan	100%
		Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan administrasi umum	100%
2	Meningkatnya kualitas aparatur dan pelayanan publik	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	77

3.3. Tantangan dan Peluang Perangkat Daerah

3.3.1 Tantangan Sekretariat Daerah

Tantangan yang dihadapi Sekretariat Daerah sesuai dengan kedudukan dan fungsinya diantaranya :

a. Optimalisasi pelaksanaan reformasi birokrasi.

Birokrasi Pemerintah Daerah merupakan faktor yang sangat menentukan berjalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Reformasi birokrasi pemerintah daerah yang harus dilakukan adalah restrukturisasi dan refungsionalisasi lembaga perangkat daerah, ketatalaksanaan (mekanisme dan standar operasional prosedur), pelayanan perijinan, sistem pengelolaan keuangan daerah, manajemen kepegawaian daerah, manajemen pelayanan kepada masyarakat, sistem pengawasan dan pengendalian internal serta artikulasi partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan daerah.

b. Upaya penataan dan penyempurnaan kelembagaan (Institutional re- egineering).

Perwujudan penyelenggaraan pemerintah yang baik (good governance) diperlukan upaya-upaya penataan dan penyempurnaan kelembagaan (Institutional re-egineering) yang tepat atau “right sizing" dan optimal untuk melaksanakan

fungsi. Keberhasilan tujuan penataan organisasi tidak terlepas dari daya dukung penyelenggaraan manajemen publik yang baik. Penataan kelembagaan/organisasi menyangkut pembenahan seluruh alat-alat pemerintahan di Kabupaten Sukoharjo baik struktur maupun infrastrukturnya, sedangkan penyelenggaraan manajemen publik lebih kepada menata pada sistem peyelenggaraan layanan publik yang lebih responsif dan adaptif sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman.

c. Tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Tujuan diselenggarakannya pemerintahan dan pembangunan adalah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, sehingga pemerintah dituntut untuk dapat menunjukkan kinerja terbaik yakni kemajuan pembangunan dan pelayanan yang dapat memuaskan publik. Berbagai kebijakan baru pemerintah telah dikeluarkan dan harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka menyikapi tuntutan tersebut.

d. Pendayagunaan sumber daya aparatur daerah

Tuntutan warga masyarakat terhadap kebutuhan pelayanan prima (services excelent) perlu diimbangi dengan citra birokrasi yang mempunyai kompetensi yang baik dalam bidang profesionalisme aparatur, penguasaan komunikasi dan presentasi serta pemahaman terhadap manajemen standar pelayanan minimal public services and public complaint. Sumber daya aparatur merupakan aset strategis dalam kerangka perwujudan good governance.

e. Terdapat kebijakan pemerintah pusat yang sering berubah dan kurang sinkron satu sama lain, dapat menimbulkan pengaruh terhadap kinerja Sekretariat Daerah;

f. Terdapat peraturan perundang-undangan daerah yang sudah tidak selaras dengan perkembangan dan kebutuhan;

g. Adanya tuntutan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan yang profesional dan handal;

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, yang menekankan pada transparansi, manajemen pemerintahan yang lebih transparan, akuntabilitas, dan peningkatan efektivitas dan efisiensi serta ada upaya dan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap penanganan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

h. Manajemen Keuangan dan Aset Daerah

Keuangan dan aset daerah merupakan salah satu modal utama dalam penyelenggaraan pemerintah, oleh karena itu manajemen keuangan dan aset daerah menjadi sesuatu hal yang strategis dalam pencapaian keberhasilan pembangunan.

Sistem manajemen keuangan daerah (financial management system) merupakan bagian penting dalam rangka mendukung terciptanya good governance di daerah. Bagian-bagian lain yang sama pentingnya adalah menata sistem pembiayaan, sistem penganggaran, dan sistem akuntansi serta sistem pemeriksaan. Tuntutan pembaharuan sistem keuangan tersebut adalah agar pengelolaan dana masyarakat (public fund) dilakukan secara transparan dengan mendasarkan konsep value for money sehingga tercipta akuntabilitas publik (public accountabilify)

3.3.2 Peluang Sekretariat Daerah

Sedangkan peluang dalam pengembangan pelayanan Sekretariat Daerah adalah :

a. Adanya dukungan positif dari Kepala Daerah dan suluruh OPD dalam pelaksanaan tugas;

b. Adanya landasan hukum yang kuat sebagai dasar perumusan kebijakan daerah;

c. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan dapat dihimpun sebagai bahan perumus kebijakan;

d. Adanya komitmen yang kuat dari seluruh anggota organisasi dalam mewujudkan tujuan organisasi;

e. Adanya bantuan arahan dan bimbingan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten;

f. Adanya penerapan teknologi informasi pada tatanan manajemen pemerintahan memungkinkan dukungan positif bagi penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan;

k. Tersedianya sarana dan prasarana yang cukup memadai yang menunjang penyelenggaraan administrasi pemerintahan daerah Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan maka diperlukan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian tersebut.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Rencana Kerja Dan Pendanaan

Rencana kerja dan pendanaan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten dengan anggaran sebesar Rp 45.342.105.000,00 terdiri dari :
   a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
   b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat
   c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
   d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
   e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
   f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
   g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
   h. Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
   i. Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah.
   j. Kegiatan Penataan Organisasi
   k. Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan.
2. Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat dengan anggaran sebesar Rp 16.187.058.880,00, terdiri dari beberapa kegiatan, yaitu:
   a. Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan
   b. Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah
   c. Kegiatan Fasilitasi Dan Koordinasi Hukum
   d. Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat.
3. Program perekonomian dan pembangunan, dengan anggaran sebesar Rp 3.387.160.000,00 terdiri dari beberapa kegiatan, yaitu:
   a. Kegiatan Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian
   b. Kegiatan Pemantauan Kebijakan Terkait Sumber Daya Alam.
   c. Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa.
   d. Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan.

Secara rinci rencana kerja dan pendanaan Sekretariat Daerah tahun 2024 dan prakiraan maju tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 4.1

TABEL 4.1

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN TAHUN 2024

DAN PRAKIRAN MAJU TAHUN 2025

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	RENCANA PENDANAAN TA 2024		LOKASI	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU TA 2025		PENANGGUNG JAWAB
							TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)			TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1					2	3	4	5			6	7	8
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**								
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**			**64.916.323.880**				**63.194.997.400**	
4	**01**	**02**			**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	Cakupan Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan	100%	**16.187.058.880**			100%	**17.910.450.000**	
						Cakupan Penyusunan produk dan pelayanan hukum	97%				97%		
						Capaian pengembangan kapasitas otonomi daerah	100%				100%		
4	**01**	**02**	**2.01**		**Administrasi Tata Pemerintahan**	**Jumlah Kajian/ Kebijakan yang disusun/ dievaluasi**	**5 Kebijakan**	**925.000.000**	**Kab. Sukoharjo**		**5 Kebijakan**	**1.075.000.000**	**Bagian Pemerintahan**
4	01	02	2.01	0001	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	3 Dokumen	265.000.000			3 Dokumen	275.000.000	
4	01	02	2.01	0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	3 Dokumen	200.000.000			3 Dokumen	200.000.000	
4	01	02	2.01	0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	4 Dokumen	460.000.000			4 Dokumen	600.000.000	
4	**01**	**02**	**2.04**		**Fasilitasi Kerja Sama Daerah**	**Jumlah Dokumen Kerja Sama yang di Tanda Tangani**	**10 Dokumen**	**100.000.000**	**Kab. Sukoharjo**		**10 Dokumen**	**90.000.000**	**Bagian Pemerintahan**
4	01	02	2.04	0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	10 Dokumen	100.000.000			10 Dokumen	90.000.000	
4	**01**	**02**	**2.02**		**Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**	**Cakupan Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan**	**100%**	**13.850.400.880**	**Kab. Sukoharjo**		**100%**	**14.800.000.000**	**Bagian Kesejahteraan Rakyat**
4	01	02	2.02	0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental	12 Dokumen	6.785.000.880			12 Dokumen	7.500.000.000	

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	RENCANA PENDANAAN TA 2024		LOKASI	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU TA 2025		PENANGGUNG JAWAB
							TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)			TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1					2	3	4	5			6	7	8
						Spiritual							
4	01	02	2.02	0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	4 Dokumen	5.865.000.000			4 Dokumen	6.000.000.000	
4	01	02	2.02	0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	5 Dokumen	1.200.400.000,00			5 Dokumen	1.300.000.000	
4	**01**	**02**	**2.03**		**Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**	**Cakupan Penyusunan produk dan pelayanan hukum**	**96,5%**	**1.311.658.000,00**	**Kab. Sukoharjo**		**97%**	**1.945.450.000**	**Bagian Hukum**
						Cakupan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	**96,5%**				**97%**		
4	01	02	2.03	0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	3 Dokumen	281.779.000,00			3 Dokumen	432.000.000	
4	01	02	2.03	0002	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	2 Kasus	310.000.000,00			2 Kasus	378.000.000	
4	01	02	2.03	0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	2 Dokumen	719.879.000,00			2 Dokumen	1.135.450.000	
4	**01**	**03**			**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**Cakupan Perumusan dan Pengendalian Kebijakan pembangunan**	**100%**	**3.387.160.000**			**100%**	**4.077.657.000**	

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	RENCANA PENDANAAN TA 2024		LOKASI	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU TA 2025		PENANGGUNG JAWAB
							TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)			TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1					2	3	4	5			6	7	8
						Cakupan pengadaan barang dan jasa	**Nilai 45**				**Nilai 50**		
						Cakupan Perumusan kebijakan, pengkoordinasian, sosialisasi, fasilitasi dan monev pelaksanaan kebijakan perekonomian dan SDA	**100%**				**100%**		
4	**01**	**03**	**2.01**		**Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**	**Cakupan pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**	**100%**	**1.025.000.000**	**Kab. Sukoharjo**		**100%**	**1.300.000.000**	**Bagian Perekonomian dan SDA**
4	01	03	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	4 Dokumen	250.000.000,00			4 Dokumen	500.000.000	
4	01	03	2.01	0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	4 Laporan	575.000.000,00			4 Laporan	600.000.000	
4	01	03	2.01	0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	3 Dokumen	200.000.000,00			3 Dokumen	200.000.000	
4	**01**	**03**	**2.04**		**Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam**	**Cakupan Pemantauan Kebijakan terkait Sumber Daya Alam**	**100%**	**475.000.000**	**Kab. Sukoharjo**		**100%**	**475.000.000**	**Bagian Perekonomian dan SDA**
4	01	03	2.04	0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	3 Dokumen	325.000.000			3 Dokumen	325.000.000	

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	RENCANA PENDANAAN TA 2024		LOKASI	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU TA 2025		PENANGGUNG JAWAB
							TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)			TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1					2	3	4	5			6	7	8
4	01	03	2.04	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	2 Dokumen	75.000.000			2 Dokumen	75.000.000	
4	01	03	2.04	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	2 Dokumen	75.000.000,00			2 Dokumen	75.000.000	
4	**01**	**03**	**2.02**		**Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**	**Cakupan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**	**100%**	**770.000.000**	**Kab. Sukoharjo**		**100%**	**1.073.781.000**	**Bagian Administrasi Pembangunan**
4	01	03	2.02	0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	1 Dokumen	99.900.000,00			1 Dokumen	145.200.000	
4	01	03	2.02	0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	4 Laporan	404.560.000,00			4 Laporan	525.866.000	
4	01	03	2.02	0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	12 Laporan	265.540.000,00			12 Laporan	402.715.000	
4	**01**	**03**	**2.03**		**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	**Cakupan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	**100**	**1.117.160.000**	**Kab. Sukoharjo**			**1.228.876.000**	**Bagian Pengadaan Barang Jasa**
4	01	03	2.03	0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1000 Dokumen	421.410.000,00			1000 Dokumen	463.551.000	
4	01	03	2.03	0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	12 Dokumen	198.000.000,00			12 Dokumen	217.800.000	

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	RENCANA PENDANAAN TA 2024		LOKASI	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU TA 2025		PENANGGUNG JAWAB
							TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)			TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1					2	3	4	5			6	7	8
4	01	03	2.03	0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	370 Orang	497.750.000,00			370 Orang	547.525.000	
4	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan efektifitas dan efisiensi penataan organisasi**	**100%**	**45.342.105.000**			**100%**	**41.206.890.400**	
						Prosentase pencapaian kinerja dan pelayanan perangkat daerah	**100%**				**100%**		
						Cakupan Peningkatan Sarana/ Pra sarana Kerja dan Kualitas SDM OPD	**100%**				**100%**		
4	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100%**	**50.000.000**	**Kab. Sukoharjo**		**100%**	**94.000.000**	**Bagian Umum**
4	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	30.000.000,00				65.000.000	
4	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000,00				8.000.000	
4	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000,00			1 Dokumen	7.000.000	
4	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000,00			1 Dokumen	7.000.000	
4	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000,00			1 Dokumen	7.000.000	
4	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100%**	**19.071.400.000**	**Kab. Sukoharjo**		**100%**	**16.151.000.000**	**Bagian Umum**

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	RENCANA PENDANAAN TA 2024		LOKASI	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU TA 2025		PENANGGUNG JAWAB
							TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)			TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1					2	3	4	5			6	7	8
4	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	124 Orang/ bulan	18.324.400.000,01			124 Orang/bulan	15.524.000.000	
4	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	732.000.000,00			12 Dokumen	600.000.000	
4	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	5.000.000,00			1 Laporan	9.000.000,	
4	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	5.000.000,00			2 Laporan	9.000.000	
4	01	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12 Dokumen	5.000.000,00			12 Dokumen	9.000.000	
4	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100%**	**454.012.000**	**Kab. Sukoharjo**		**100%**	**665.000.000**	**Bagian Umum**
4	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	9 Paket	244.012.000,00			9 Paket	350.000.000	
4	01	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	5.000.000,00			1 Dokumen	8.500.000	
4	01	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	5.000.000,00			1 Dokumen	6.500.000	
4	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	175 Orang	200.000.000,00			175 Orang	300.000.000	

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	RENCANA PENDANAAN TA 2024		LOKASI	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU TA 2025		PENANGGUNG JAWAB
							TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)			TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1					2	3	4	5			6	7	8
4	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	**4.445.375.000**	**Kab. Sukoharjo**		**100%**	**5.690.000.000**	**Bagian Umum**
4	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	200.000.000,00			4 Paket	240.000.000	
4	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	450.000.000,00			2 Paket	350.000.000	
4	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	315.000.000,00			4 Paket	425.000.000	
4	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 Paket	1.750.000.000,00			7 Paket	2.600.000.000	
4	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	150.375.000,00			1 Paket	210.000.000	
4	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	110.000.000,00			12 Dokumen	120.000.000	
4	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	36 Laporan	370.000.000,00			36 Laporan	300.000.000	
4	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	700 Laporan	1.100.000.000,00			700 Laporan	1.445.000.000	
4	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**800.000.000**	**Kab. Sukoharjo**		**100%**	**200.000.000**	**Bagian Umum**
4	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	0,00			0 Unit	0,00	
4	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	800.000.000,00			3 Unit	200.000.000	
4	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0,00			1 Unit	0,00	

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	RENCANA PENDANAAN TA 2024		LOKASI	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU TA 2025		PENANGGUNG JAWAB
							TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)			TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1					2	3	4	5			6	7	8
4	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**7.174.600.000**	**Kab. Sukoharjo**		**100%**	**6.160.000.000**	**Bagian Umum**
4	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	200.000.000,00			12 Laporan	160.000.000	
4	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	2.700.000.000,00			12 Laporan	3.000.000.000	
4	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	274.600.000,00			12 Laporan	300.000.000	
4	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	4.000.000.000,00			12 Laporan	2.700.000.000	
4	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**4.825.295.000**	**Kab. Sukoharjo**		**100%**	**3.570.000.000**	**Bagian Umum**
4	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	194.000.000,00			2 Unit	300.000.000	
4	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	79 Unit	1.331.295.000,00			79 Unit	1.775.000.000	
4	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2345 Unit	700.000.000,00			2 Unit	420.000.000	
4	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	1.300.000.000,00			79 Unit	475.000.000	
4	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	1.300.000.000,00			2345 Unit	600.000.000	

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	RENCANA PENDANAAN TA 2024		LOKASI	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU TA 2025		PENANGGUNG JAWAB
							TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)			TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1					2	3	4	5			6	7	8
4	**01**	**01**	**2.11**		**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**Pelayanan kinerja administrasi keuangan dan operasional kepala daerah**	**100%**	**940.374.000**	**Kab. Sukoharjo**		**100%**	**920.576.000**	**Bagian Umum**
4	01	01	2.11	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/ Bulan	780.374.000,00			2 Orang/ Bulan	780.576.000	
4	01	01	2.11	0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang	160.000.000,00			2 Orang	140.000.000	
4	**01**	**01**	**2.12**		**Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah**	**100%**	**2.585.000.000**	**Kab. Sukoharjo**		**100%**	**1.940.000.000**	**Bagian Umum**
4	01	01	2.12	0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	6 Paket	1.700.000.000,00			6 Paket	1.300.000.000	
4	01	01	2.12	0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	5 Paket	750.000.000,00			5 Paket	500.000.000	
4	01	01	2.12	0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	4 Paket	135.000.000,00			4 Paket	140.000.000	
4	**01**	**01**	**2.13**		**Penataan Organisasi**	**Prosentase Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan**	**100%**	**942.820.000**	**Kab. Sukoharjo**		**100%**	**1.200.000.000**	**Bagian Organisasi**
						Prosentase Kegiatan Monev dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik yang dilaksanakan	**100%**				**100%**		
						Prosentase Kebijakan Bidang Ketatalaksanaan yang ditetapkan	**100%**				**100%**		
4	01	01	2.13	0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	4 Dokumen	329.400.000,00			4 Dokumen	440.000.000	
4	01	01	2.13	0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Laporan	126.000.000,00			1 Laporan	182.600.000	
4	01	01	2.13	0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	2 Dokumen	126.842.000,00			2 Dokumen	177.110.000	

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	RENCANA PENDANAAN TA 2024		LOKASI	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU TA 2025		PENANGGUNG JAWAB
							TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)			TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1					2	3	4	5			6	7	8
4	01	01	2.13	0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	2 Dokumen	186.358.000,00			2 Dokumen	155.000.000	
4	01	01	2.13	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	2 Dokumen	174.220.000,00			2 Dokumen	245.290.000	
4	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Capaian Jumlah Jenis Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Cukai**	**100%**	**962.789.000,00**	**Kab. Sukoharjo**		**100%**	**1.104.474.000**	**Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan**
4	01	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	962.789.000,00			100 Orang	1.104.474.000	
4	**01**	**01**	**2.14**		**Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**	**Terlaksananya Protokoler, Kegiatan Komunikasi Pimpinan dan Pendokumetasian Tugas Pimpinan**	**100%**	**3.090.440.000**	**Kab. Sukoharjo**		**100%**	**3.511.840.400**	**Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan**
4	01	01	2.14	0001	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	12 Laporan	223.094.000,00			12 Laporan	290.932.400	
4	01	01	2.14	0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12 Laporan	1.624.376.000,00			12 Laporan	1.810.753.000	
4	01	01	2.14	0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	12 Laporan	1.242.970.000,00			12 Laporan	1.410.155.000	

4.2. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan nasional, maka SKPD menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses partisipatif, proses *bottom-up* dan *top down.* Usulan program dan kegiatan di Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo merupakan hasil dari Kegiatan Forum Perangkat Daerah yang diikuti oleh semua Bagian di Sekretariat daerah dan Perangkat daerah terkait . Realisasi usulan yang disampaikan melalui Forum Perangkat Daerah diusahakan dapat tertampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Berikut adalah Program dan kegiatan yang diusulkan untuk tahun 2024 dapat dilihat di Tabel 4.2

TABEL 4.2

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT TAHUN 2024

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA
1					2	3	4
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**		
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**		
4	**01**	**02**			**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**		
4	**01**	**02**	**2.01**		**Administrasi Tata Pemerintahan**		
4	01	02	2.01	0001	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	3 Dokumen
4	01	02	2.01	0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	3 Dokumen
4	01	02	2.01	0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	4 Dokumen
4	**01**	**02**	**2.04**		**Fasilitasi Kerja Sama Daerah**		
4	01	02	2.04	0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	10 Dokumen
4	**01**	**02**	**2.02**		**Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**		
4	01	02	2.02	0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	12 Dokumen
4	01	02	2.02	0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	4 Dokumen

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA
1					2	3	4
4	01	02	2.02	0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	5 Dokumen
4	**01**	**02**	**2.03**		**Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**		
4	01	02	2.03	0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	3 Dokumen
4	01	02	2.03	0002	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	2 Kasus
4	01	02	2.03	0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	2 Dokumen
4	**01**	**03**			**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**		
4	**01**	**03**	**2.01**		**Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**		
4	01	03	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	4 Dokumen
4	01	03	2.01	0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	4 Laporan
4	01	03	2.01	0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	3 Dokumen
4	**01**	**03**	**2.04**		**Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam**		
4	01	03	2.04	0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	3 Dokumen
4	01	03	2.04	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	2 Dokumen
4	01	03	2.04	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	2 Dokumen
4	**01**	**03**	**2.02**		**Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**		
4	01	03	2.02	0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	1 Dokumen

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA
1					2	3	4
4	01	03	2.02	0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	4 Laporan
4	01	03	2.02	0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	12 Laporan
4	**01**	**03**	**2.03**		**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**		
4	01	03	2.03	0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1000 Dokumen
4	01	03	2.03	0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	12 Dokumen
4	01	03	2.03	0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	370 Orang
4	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		
4	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		
4	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen
4	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen
4	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen
4	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen
4	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen
4	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		
4	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	124 Orang/bulan
4	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen
4	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan
4	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan
4	01	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12 Dokumen

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA
1					2	3	4
4	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		
4	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	9 Paket
4	01	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen
4	01	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen
4	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	175 Orang
4	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		
4	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket
4	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket
4	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket
4	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 Paket
4	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket
4	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen
4	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	36 Laporan
4	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	700 Laporan
4	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		
4	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit
4	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit
4	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit
4	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		
4	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan
4	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan
4	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA
1					2	3	4
4	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan
4	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		
4	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit
4	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	79 Unit
4	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2345 Unit
4	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit
4	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit
4	**01**	**01**	**2.11**		**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**		
4	01	01	2.11	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan
4	01	01	2.11	0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang
4	**01**	**01**	**2.12**		**Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**		
4	01	01	2.12	0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	6 Paket
4	01	01	2.12	0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	5 Paket
4	01	01	2.12	0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	4 Paket
4	**01**	**01**	**2.13**		**Penataan Organisasi**		
4	01	01	2.13	0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	4 Dokumen
4	01	01	2.13	0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Laporan
4	01	01	2.13	0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	2 Dokumen
4	01	01	2.13	0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	2 Dokumen
4	01	01	2.13	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	2 Dokumen

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA
1					2	3	4
4	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		
4	01	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang
4	**01**	**01**	**2.14**		**Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**		
4	01	01	2.14	0001	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	12 Laporan
4	01	01	2.14	0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12 Laporan
4	01	01	2.14	0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	12 Laporan

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun. Renja Sekretariat Daerah Tahun 2024 disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2024 dan berpedoman pada Renstra Sekretariat Daerah tahun 2021-2026.

Renja Sekretariat Daerah Tahun 2024 selanjutnya menjadi pedoman bagi Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2024.

Perencanaan yang baik dan dapat dijadikan dasar pelaksanaan adalah kunci sukses pembangunan daerah, dalam artian kualitas suatu produk perencanaan dapat mendukung keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah, dengan prasyarat dokumen perencanaan ini ditaati oleh seluruh pelaku pembangunan dengan komitmen dan konsistensi yang tinggi serta menjadi acuan atas proses selanjutnya. Selain itu, diperlukan adanya mental, semangat, kejujuran, dan disiplin pada pelaku pembangunan yang tetap harus dikedepankan.

Untuk mencapai target sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo yang telah ditetapkan pada tahun 2024 maka perlu didukung dengan program, kegiatan dan sub kegiatan. Agar program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan maka perlu dilakukan koordinasi lintas Unit Kerja/Perangkat Daerah dalam rangka sinergitas.

Sukoharjo, Agustus 2023
SEKRETARIS DAERAH

WIDODO, SH.,MH
Pembina Utama Madya
NIP. 19650523 199203 1 008

RENCANA KERJA TAHUN 2024

RENJA 2024

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUKOHARJO



SALINAN

BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 23 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 174);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 192) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 262);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tatacara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 200);
22. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);
23. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 298);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun anggaran.

BAB II

RKPD

Pasal 2

RKPD Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun anggaran yang dimulai pada 1 Januari 2024 dan berakhir pada 31 Desember 2024.

Pasal 3

RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman dalam:

a. penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
b. penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024, dan
c. pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 4

RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. Bab I : Pendahuluan;
b. Bab II : Gambaran Umum Kondisi Daerah;
c. Bab III : Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah;
d. Bab IV : Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
e. Bab V : Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah;
f. Bab VI : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
g. Bab VII : Penutup

Pasal 5

Dokumen RKPD sebagaimana dimaksud Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 10 Juli 2023

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 10 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd.

WIDODO

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2023 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ditandatangani secara elektronik oleh :

TEGUH PRAMONO, SH, MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19710429 199803 1 003

PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA)

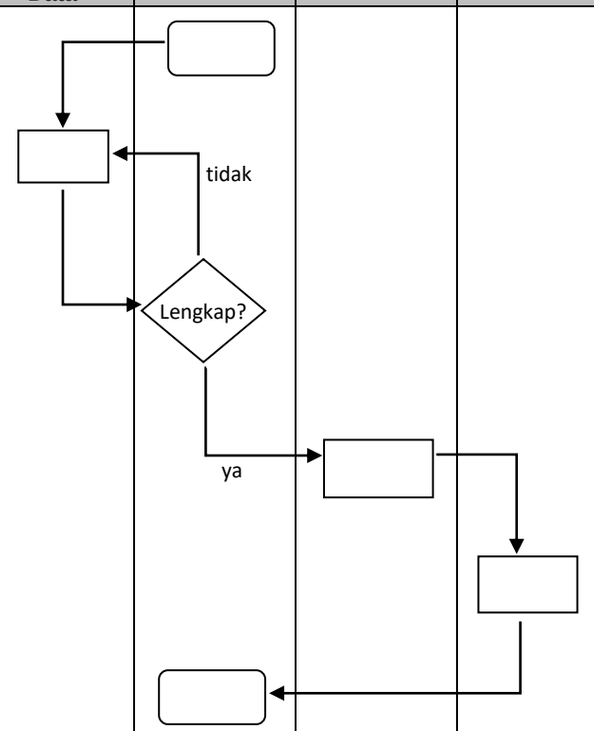
Jl. Abu Tholib Sastrotenoyo No. 378 Sukoharjo Kode Pos 57521

Telp. (0271) 593068 Ext. 154, (0271) 590244 Fax. (0271) 590244

PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU** Jl. Abu Tholib Sastrotenoyo No. 378 Sukoharjo Kode Pos 57521 Telp. (0271) 593068 Ext. 154, (0271) 590244 Fax. (0271) 590244	Nomor SOP	: 40/SOP/DPMPTSP/2023
	Tanggal Pembuatan	: 27 September 2021
	Tanggal Revisi	: 24 Januari 2023
	Tanggal Pengesahan	: 30 Januari 2023
	Disahkan oleh	KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUKOHARJO **RONI WICAKSONO, S.STP, MM** Pembina Tingkat I NIP. 19770316 199711 1 001
Sekretariat	Judul SOP	Penyusunan Rencana Kerja (Renja)

Dasar Hukum	**Kualifikasi Pelaksana**
1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja 3. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 03 Tahun 2021 tanteng Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo 2021 - 2026	1. Memiliki pemahaman tentang kegiatan penyusunan Renstra, Capaian Kinerja/LKjIP, IKU PD 2. Memiliki pemahaman tentang pelaksanaan kegiatan penyusunan Renja 3. Memahami tentang regulasi dalam penyusunan Renja 4. Mampu mengoperasikan perangkat komputer
Keterkaitan	**Peralatan/Perlengkapan**
1. SOP Pengumpulan Data Kinerja 2. SOP Renstra 3. SOP LKjIP	1. Buku Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah 2. SPJ Fungsional 3. Dokumen Renstra 4. Dokumen LKjIP 5. Komputer, ATK
Peringatan	**Pencatatan dan Pendataan**
Keterlambatan penyusunan Renja menyebabkan kegiatan operasional yang tertunda	Dokumen Renja

No	Kegiatan	Mutu Baku							
		Staf Pengolah dan Penyaji Data	Perencana	Sekretaris Dinas	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1.	Menerima disposisi pembuatan Renja					Surat Edaran Bupati	15 menit	Disposisi Kadis	
2.	Melaksanakan koordinasi dengan Koordinator Penanaman Modal dan Koordinator PTSP					Renstra, RPJMD Kabupaten Sukoharjo, Hasil Musrenbang	120 menit	Usulan Kegiatan dari Koordinator Penanaman Modal dan Koordinator PTSP	
3.	Menerima Usulan dari dengan Koordinator Penanaman Modal dan Koordinator PTSP, memverifikasi dan mengolah usulan Renja					Usulan Kegiatan dari Koordinator Penanaman Modal dan Koordinator PTSP	360 menit	Rangkuman Usulan Kegiatan dan Usulan Renja	
4.	Memberikan Paraf pada Renja					Rangkuman Usulan Kegiatan dan Usulan Renja	15 menit	Rangkuman Usulan Kegiatan dan Usulan Renja	
5.	Penandatanganan Renja					Rangkuman Usulan Kegiatan dan Usulan Renja	15 menit	SK Kepala Dinas dan Usulan Renja sudah ditandatangani Kepala Dinas	
6.	Menerima Renja yang sudah ditandatangani					SK Kepala Dinas dan Usulan Renja sudah ditandatangani Kepala Dinas	10 menit	Renja	



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Abu Tholib Sastrotenoyo No. 378 Sukoharjo Kode Pos 57521
Telp. (0271) 593068 Ext. 154, (0271) 590244 Fax (0271) 590244
Website : http://dpmptsp.sukoharjokab.go.id Email : dpmptsp@sukoharjokab.go.id

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : RONI WICAKSONO, S.STP, MM

NIP : 19770316 199711 1 001

Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo

Dengan ini saya menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa:

1. Rencana Kerja (Renja) disusun dengan benar dan terstruktur sebagai pedoman pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan dalam tugas pokok fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo. Untuk mewujudkan visi dan misi serta program kerja berdasarkan RPJMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026.
2. Berkomitmen yang tinggi untuk melaksanakan dan mewujudkan tujuan, sasaran, program dan kegiatan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 dengan menggunakan sumber daya organisasi secara efektif dan efisien.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan tanpa paksaan dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sukoharjo, 4 Juli 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SUKOHARJO

PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
DINAS PM DAN PTSP

RONI WICAKSONO, S.STP, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19770316 199711 1 001

SURAT KEPUTUSAN
RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS PM DAN PTSP
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2024

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SUKOHARJO
Jl. Abu Tholib Sastrotenoyo No. 378 Sukoharjo
Telp (0271) 590244, Fax (0271) 590244

P E M E R I N T A H K A B U P A T E N S U K O H A R J O
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Abu Tholib Sastrotenoyo No. 378 Sukoharjo Kode Pos 57521
Telp. (0271) 593068 Ext. 154, (0271) 590244 Fax (0271) 590244
Website : http://dpmptsp.sukoharjokab.go.id Email : dpmptsp@sukoharjokab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR : 500 / 1038 / 2023

T E N T A N G

RENCANA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUKOHARJO

Menimbang : a. bahwa sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026 perlu menyusun Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo tentang Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6472);
9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tangah Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 3 Tambahan-Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 174);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tatacara Penyusunan Perencaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 200);
17. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 03 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026 Peraturan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan Pedoman Pelaksanan Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun Anggaran 2024.

KETIGA : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 4 Juli 2023

KEPALA DINAS PM DAN PTSP
KABUPATEN SUKOHARJO

PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
DINAS PM DAN PTSP

RONI WICAKSONO, S.STP, MM

RENCANA KERJA (RENJA)

DINAS PM DAN PTSP

KABUPATEN SUKOHARJO

TAHUN 2024

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUKOHARJO

Jl. Abu Tholib Sastrotenoyo No. 378 Sukoharjo

Telp (0271) 590244, Fax (0271) 590244

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, sang Maha Pencipta Semesta Alam, karena dengan rahmat dan hidayah Nya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sukoharjo telah menyelesaikan penyusunan Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2024.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) merupakan acuan perencanaan kegiatan PD selama satu tahun dan merupakan penjabaran tahunan dari RPJMD dan Renstra-PD. Adapun penyusunan Renja-PD merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, sedangkan aturan secara rinci berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Rencana Kerja Tahun 2024 adalah merupakan dokumen perencanaan tahun ketiga dari Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026 yang memuat rencana tujuan dan sasaran periode tersebut yang hendak dicapai pada APBD di Tahun 2024. Dokumen ini menjadi salah satu referensi untuk formulasi, implementasi, monitoring dan evaluasi kebijakan serta memberi manfaat dalam upaya serapan anggaran yang rasional dan kinerja yang profesional, akuntabel dan transparan untuk pembangunan yang berasaskan keadilan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Sukoharjo, 4 Juli 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUKOHARJO

PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
DINAS PM DAN PTSP

RONI WICAKSONO, S.STP, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19770316 199711 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI iii

DAFTAR TABEL iv

BAB I PENDAHULUAN 1

Latar Belakang 1

Landasan Hukum 2

Maksud dan Tujuan 4

Sistematika Penulisan 4

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 6

Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 6

Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 18

Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 27

Review terhadap Rancangan Awal RKPD 28

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 32

Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 32

Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah 33

Tantangan dan Peluang 34

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 35

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN 49

BAB V PENUTUP 55

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Realisasi Anggaran per Program Tahun Anggaran 2022 7

Tabel 2.2. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 Kabupaten Sukoharjo.....8

Tabel 2.3. Pencapaian Kinerja Pelayanan DPMPTSP Kabupaten Sukoharjo 21

Tabel 3.1. Hubungan Prioritas Pembangunan Nasional dengan Prioritas Pembangunan Daerah 33

Tabel 3.2. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 40

Tabel 4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah 50

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun yang merupakan terjemahan dari perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai dokumen Perangkat Daerah, Renja mempunyai kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah, adalah meliputi:

1. Persiapan penyusunan;
2. Penyusunan rancangan awal;
3. Penyusunan rancangan
4. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
5. Perumusan rancangan akhir; dan
6. Penetapan.

Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD serta didasarkan pada evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah dan pada akhirnya Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024, adalah:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembantukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020

Nomor 10);

10. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 174);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 192) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031(Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 262);

20. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);
21. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 298);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300).

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

   Penyusunan Renja adalah untuk merumuskan rencana kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sukoharjo untuk periode 1 (satu) tahun, dimaksudkan :

   a. Sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Renstra Perangkat Daerah.
   b. Sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu untuk kurun waktu 1 tahun secara terencana, terarah dan terpadu.
   c. Pedoman dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu di Kabupaten Sukoharjo sebagaimana telah tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) 2021 – 2026 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo.

2. Tujuan

   Tujuan penyusunan Renja adalah sebagai pedoman :

   a. Memberikan landasan kebijakan bagi pelaksana dan evaluasi program kegiatan serta pelaksana pelayanan perangkat.
   b. Memperoleh kemudahan dalam menentukan skala prioritas.
   c. Memperoleh kemudahan pemahaman dalam menyusun perencanaan anggaran perangkat daerah.
   d. Mewujudkan penggunaan sumber daya secara efektif, efisien dan berkelanjutan.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 disusun dengan sistimatika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memberi gambaran umum tentang penyusunan Renja DPMPTSP Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024, yang meliputi :

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini memuat terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja DPMPTSP Tahun 2023 dan perkiraan Tahun 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan CapaianRenstra Perangkat Daerah

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menguraikan tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang direncanakan

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3 Tantangan dan Peluang

3.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja DPMPTSP Kabupaten Sukoharjo merupakan penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis DPMPTSP Kabupaten Sukoharjo, tercapai tidaknya pelaksanaan program yang telah diformulasikan dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Untuk itu diperlukan tahapan evaluasi dalam rangka mengukur tingkat keberhasilan kebijakan yang telah diformulasikan dan diimplementasikan oleh DPMPTSP Kabupaten Sukoharjo.

Evaluasi memainkan sejumlah fungsi utama dalam analisis kebijakan, karena evaluasi memiliki beberapa tujuan diantaranya dengan adanya evaluasi terhadap suatu kebijakan atau program maka diharapkan kebijakan kedepannya akan lebih baik. Selain daripada itu, evaluasi juga untuk mengetahui apakah suatu kebijakan berhasil atau gagal, point selanjutnya evaluasi kebijakan digunakan untuk memenuhi aspek akuntabilitas publik, karena dengan melakukan penilaian kinerja suatu kebijakan maka dapat dipahami sebagai bentuk pertanggungjawaban Pemerintah kepada Publik sebagai pemilik dana dan mengambil manfaat dari kebijakan dan program Pemerintah. Lebih lanjut dapat disampaikan evaluasi kebijakan dilakukan agar tidak mengulangi kesalahan yang sama dan pada akhirnya evaluasi kebijakan bermanfaat untuk memberikan masukan bagi proses pengambilan kebijakan yang akan datang.

Demikian dapat dimaknai secara umum Rencana Kerja DPMPTSP Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 memuat rencana program dan kegiatan dengan tetap memperhatikan potensi yang ada dalam rangka "**Mewujudkan Masyarakat Sukoharjo yang Lebih Makmur"** yang tertuang dalam Renstra DPMPTSP Kabupaten Sukoharjo. Keberhasilan perencanaan dapat dilihat dari hasil evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya, sejauh mana pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan berdampak terhadap capaian yang telah ditetapkan di dalam Renstra Perangkat Daerah, hasil dari evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan. Dukungan pembiayaan pelaksanaan kegiatan-kegiatan DPMPTSP Kabupaten Sukoharjo, berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah(APBD) Kabupaten Sukoharjo berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo 6 Tahun2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, yang di jabarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) DPMPTSP Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2022 tanggal 21 Desember 2021 serta Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja

Perangkat Daerah (DPPA SKPD) DPMPTSP Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2022 tanggal 03 Oktober 2022.

Total Alokasi anggaran belanja sebesar **Rp. 9.124.728.691,00** terealisasi sebesar **Rp. 8.684.315.901,00** atau sebesar **95,17%.**

Tabel 2.1.
Realisasi Anggaran per Program
Tahun Anggaran 2022

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi Tahun 2022	
			Anggaran (Rp)	%
1	2	3	4	5
1	PROGRAM PENUNJANG URUSANPEMERINTAH DAERAH	7.907.284.691,00	7.574.253.901,00	95,79%
2	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	152.000.000,00	147.388.500,00	96,96%
3	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	285.000.000,00	284.860.000,00	99,95%
4	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	227.050.000,00	219.384.000,00	96,62%
5	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	478.394.000,00	385.004.500,00	80,48%
6	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	75.000.000,00	73.425.000,00	97,90%
	Jumlah	**9.124.728.691,00**	**8.684.315.901,00**	**95,17%**

Berdasarkan besar penyerapan dana sebagaimana dijelaskan di atas, maka telah terjadi penyimpangan/deviasi positif sebesar **4,83%** dari alokasi dana, atau tercapai sisa lebih sebesar Rp. **440.412.790,00** yang disebabkan oleh :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, sebesar 95,79% dikarenakan disesuaikan dengan kebutuhan;
2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, sebesar 96,96%dikarenakan disesuaikan dengan kebutuahn;
3. Program Promosi Penanaman Modal, sebesar 99,95%dikarenakan disesuaiakan denmgan kebutuhan;
4. Program Pelayanan Penanaman Modal, sebesar 96,62% dikarenakan disesuaikandengan kebutuhan.
5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, sebesar 80,48% dikarenakan disesuaikan dengan kebutuhan.
6. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal, sebesar 97,90% dikarenakan disesuaikandengan kebutuhan.

Tabel 2.2
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023
Kabupaten Sukoharjo

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah DanProgram/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	RealisasiTarget Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatans/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program danKegiatan Tahun Lalu (n-2)			Perkiraan Realisasi CapaianTarget Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun2023	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2	**18**				**DPMPTSP**		**Rp 26.974.124.000**	**Rp 25.973.798.364**	**Rp 9.124.728.691**	**Rp 8.684.315.901**	**95,17%**	**Rp 7.849.394.900**	**Rp 4.319.844.873**	**55,03%**
2	**18**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP DPMPTSP**	**Rp 25.829.728.000**	**Rp 24.908.964.464**	**Rp 7.907.284.691**	**Rp 7.574.253.901**	**95,79%**	**Rp 6.905.994.900**	**Rp 3.864.995.063**	**55,97%**
2	**18**	**01**	**2,01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Cakupan Pelaporan capaian kinerja perencanaan dan evaluasi kinerja PD**	**Rp 55.000.000**	**Rp 50.747.200**	**Rp 57.326.000**	**Rp 57.040.800**	**99,50%**	**Rp 67.569.000**	**Rp 49.883.400**	**66,23%**
2	18	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	*Rp 25.000.000*	*Rp 22.728.400*	*Rp 27.326.000*	*Rp 27.041.000*	*98,96%*	*Rp 37.569.000*	*Rp 24.883.400*	*66,23%*
2	18	01	2,01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun	*Rp 5.000.000*	*Rp 4.690.000*	*Rp 5.000.000*	*Rp 5.000.000*	*100,00%*	*Rp 5.000.000*	*Rp 5.000.000*	*100,00%*
2	18	01	2,01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	*Rp 5.000.000*	*Rp 4.690.000*	*Rp 5.000.000*	*Rp 5.000.000*	*100,00%*	*Rp 5.000.000*	*Rp 5.000.000*	*100,00%*
2	18	01	2,01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD yang disusun	*Rp 5.000.000*	*Rp 4.560.000*	*Rp 5.000.000*	*Rp 5.000.000*	*100,00%*	*Rp 5.000.000*	*Rp 5.000.000*	*100,00%*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah DanProgram/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	RealisasiTarget Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatans/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program danKegiatan Tahun Lalu (n-2)			Perkiraan Realisasi CapaianTarget Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun2023	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2	18	01	2,01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun	*Rp 5.000.000*	*Rp 4.688.800*	*Rp 5.000.000*	*Rp 5.000.000*	*100,00%*	*Rp 5.000.000*	*Rp 0*	*0,00%*
2	18	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja SKPD	*Rp 5.000.000*	*Rp 4.700.000*	*Rp 5.000.000*	*Rp 5.000.000*	*100,00%*	*Rp 5.000.000*	*Rp 5.000.000*	*100,00%*
2	18	01	2,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	*Rp 5.000.000*	*Rp 4.690.000*	*Rp 5.000.000*	*Rp 4.999.800*	*100,00%*	*Rp 5.000.000*	*Rp 5.000.000*	*100,00%*
2	**18**	**01**	**2,02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Cakupan Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan Perangkat Daerah**	**Rp 3.583.732.000**	**Rp 3.287.969.242**	**Rp 3.895.581.000**	**Rp 3.721.708.923**	**95,54%**	**Rp 4.292.432.000**	**Rp 2.262.916.507**	**52,72%**
2	18	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan	*Rp. 3.348.012.000*	*Rp 3.053.463.242*	*Rp 3.672.021.000*	*Rp 3.498.149.123*	*95,26%*	*Rp 4.088.012.000*	*Rp 2.141.196.507*	*52,38%*
2	18	01	2,02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN yang disediakan administrasi pelaksanaan tugas	-	-	*Rp 5.000.000*	*Rp 5.000.000*	*100,00%*	*Rp 5.000.000*	*Rp 5.000.000*	*100,00%*
2	18	01	2,02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen SPJ yang telah diverifikasi dan disahkan	*Rp 225.720.000*	*Rp 224.520.000*	*Rp 208.560.000*	*Rp 208.560.000*	*100,00%*	*Rp 189.420.000*	*Rp 111.720.000*	*58,98%*
2	18	01	2,02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen pelaporan keuangan akhir tahun	*Rp 5.000.000*	*Rp 5.000.000*	*Rp 5.000.000*	*Rp 4.999.800*	*100,00%*	*Rp 5.000.000*	*Rp 0*	*0,00%*
2	18	01	2,02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan/sem	*Rp 5.000.000*	*Rp 4.986.000*	*Rp 5.000.000*	*Rp 5.000.000*	*100,00%*	*Rp 5.000.000*	*Rp 5.000.000*	*100,00%*
2	**18**	**01**	**2,05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Cakupan Sarana Kepegawaian bagi Aparatur**	**Rp 141.000.000**	**Rp 139.308.700**	**Rp. 80.000.000**	**Rp. 74.030.000**	**92,54%**	**Rp 84.483.500**	**Rp 71.096.000**	**84,15%**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah DanProgram/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	RealisasiTarget Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatans/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program danKegiatan Tahun Lalu (n-2)			Perkiraan Realisasi CapaianTarget Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun2023	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2	18	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya yang diadakan	*Rp 141.000.000*	*Rp 139.308.700*	-	-	-	*Rp 12.487.500*	*Rp 0*	*0,00%*
2	18	01	2,05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	-	*Rp 80.000.000*	*Rp. 74.030.000*	*92,54%*	*Rp 71.996.000*	*Rp 71.096.000*	*98,75%*
2	**18**	**01**	**2,06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Rp 297.081.000**	**Rp 281.418.490**	**Rp 1.268.435.756**	**Rp 1.251.870.974**	**98,69%**	**Rp 874.516.900**	**Rp 510.011.194**	**58,32%**
2	18	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik yang disediakan	*Rp 9.419.000*	*Rp 9.417.600*	*Rp 20.000.000*	*Rp 20.000.000*	*100,00%*	*Rp 20.000.000*	*Rp 16.041.500*	*80,21%*
2	18	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan yang disediakan	*Rp 39.976.000*	*Rp 33.579.000*	*Rp 607.674.756*	*Rp 595.927.950*	*98,07%*	*Rp 250.000.000*	*Rp 110.911.875*	*44,36%*
2	18	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	*Rp 25.000.000*	*Rp 24.397.500*	*Rp 93.500.000*	*Rp 93.500.000*	*100,00%*	*Rp 50.000.000*	*Rp 39.131.000*	*78,26%*
2	18	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah logistik kantor yang disediakan	*Rp 105.000.000*	*Rp 104.903.500*	*Rp 329.240.000*	*Rp 324.743.200*	*98,63%*	*Rp 306.890.000*	*Rp 201.735.635*	*65,74%*
2	18	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang yang dicetak dan digandakan	*Rp 60.000.000*	*Rp 59.999.350*	*Rp 60.000.000*	*Rp 60.000.000*	*100,00%*	*Rp 52.177.900*	*Rp 44.892.400*	*86,04%*
2	18	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang disediakan tiap bulan	*Rp 5.000.000*	*Rp 4.836.000*	*Rp 5.000.000*	*Rp 4.836.000*	*96,72%*	*Rp 5.000.000*	*Rp 2.418.000*	*48,36%*
2	18	01	2,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Tamu yang difasilitasi	*Rp 7.000.000*	*Rp 6.975.000*	*Rp 16.500.000*	*Rp 16.500.000*	*100,00%*	*Rp 30.000.000*	*Rp 7.200.000*	*24,00%*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah DanProgram/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	RealisasiTarget Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatans/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program danKegiatan Tahun Lalu (n-2)			Perkiraan Realisasi CapaianTarget Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun2023	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2	18	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Rp 45.686.000*	*Rp 37.310.540*	*Rp 136.521.000*	*Rp 136.363.824*	*99,88%*	*Rp 160.449.000*	*Rp 87.680.784*	*54,65%*
2	**18**	**01**	**2,07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Cakupan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Rp 21.417.360.000**	**Rp 20.843.013.600**	**Rp 1.360.795.052**	**Rp 1.288.029.000**	**94,65%**	**Rp 345.838.500**	**Rp 281.556.600**	**81,41%**
2	18	01	2,07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diadakan	-	-	*Rp 445.900.000*	*Rp 423.222.500*	*94,91%*	-	-	-
2	18	01	2,07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan	-	-	-	-	-	-	-	-
2	18	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	-	-	*Rp 914.895.052*	*Rp 864.806.500*	*94,53%*	*Rp 345.838.500*	*Rp 281.556.600*	*81,41%*
2	18	01	2,07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan yang diadakan	*Rp 21.417.360.000*	*Rp 20.843.013.600*	-	-	-	-	-	-
2	**18**	**01**	**2,08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Rp 174.955.000**	**Rp 155.694.857**	**Rp 946.446.883**	**Rp 888.505.845**	**93,88%**	**Rp 1.052.035.000**	**Rp 617.095.231**	**58,66%**
2	18	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang dikelola	*Rp 10.000.000*	*Rp 9.700.800*	*Rp 15.000.000*	*Rp 14.965.200*	*99,77%*	*Rp 15.000.000*	*Rp 12.157.000*	*81,05%*
2	18	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening jasa sumber daya yang dibayar tiap bulan	*Rp 15.000.000*	*Rp 10.404.057*	*Rp 293.200.000*	*Rp 261.532.999*	*89,20%*	*Rp 328.000.000*	*Rp 178.851.898*	*54,53%*
2	18	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah SDM Pelayanan Umum yang disediakan	*Rp 149.955.000*	*Rp 135.590.000*	*Rp 638.246.883*	*Rp 612.007.646*	*95,89%*	*Rp 709.035.000*	*Rp 426.086.333*	*60,09%*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah DanProgram/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	RealisasiTarget Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatans/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program danKegiatan Tahun Lalu (n-2)			Perkiraan Realisasi CapaianTarget Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun2023	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2	**18**	**01**	**2,09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan sarana dan prasarana aparatur kondisi baik**	**Rp 160.600.000**	**Rp 150.812.375**	**Rp 298.700.000**	**Rp 293.068.359**	**98,11%**	**Rp 189.120.000**	**Rp 72.436.131**	**38,30%**
2	18	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara/difasilitasi	*Rp 135.550.000*	*Rp 125.779.375*	*Rp 159.200.000*	*Rp 158.237.109*	*99,40%*	*Rp 151.250.000*	*Rp 61.713.631*	*40,80%*
2	18	01	2,09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebeleur yang dipelihara	-	-	*Rp 7.500.000*	*Rp 7.500.000*	*100,00%*	*Rp 7.500.000*	*Rp 0*	*0,00%*
2	18	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	*Rp 25.050.000*	*Rp 25.033.000*	*Rp 22.000.000*	*Rp 21. 992.250*	*99,96%*	*Rp 30.370.000*	*Rp 10.722.500*	*35,31%*
2	18	01	2,09	09	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		-	-	*Rp 110.000.000*	*Rp 105.339.000*	*95,76%*	-	-	-
2	**18**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**Cakupan Regulasi yang mendukung iklim investasi**	**Rp 302.086.000**	**Rp 288.660.700**	**Rp 152.000.000**	**Rp 147.388.500**	**96,97%**	**Rp 110.000.000**	**Rp 18.485.000**	**61,62%**
2	**18**	**02**	**2,01**		**Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Tersedianya regulasi kebijakan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal bagi Investor**	**Rp 157.872.000**	**Rp 147.100.900**	**Rp 45.000.000**	**Rp 43.735.000**	**97,19%**	**Rp 30.000.000**	**Rp 18.485.000**	**61,62%**
2	18	02	2,01	01	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah peserta sosialisasi regulasi kebijakan pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal bagi	*Rp 157.872.000*	*Rp 147.100.900*	*Rp 45.000.000*	*Rp 43.735.000*	*97,19%*	*Rp 30.000.000*	*Rp 18.485.000*	*61,62%*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah DanProgram/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	RealisasiTarget Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatans/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program danKegiatan Tahun Lalu (n-2)			Perkiraan Realisasi CapaianTarget Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun2023	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
						investor yang diselenggarakan Jumlah rancangan regulasi kebijakan pemberian fasilitas/ insentif, dan kemudahan penanaman modal yang disusun Jumlah usaha mikro/kecil yang diberikan kemudahan layanan penanaman modal								
2	**18**	**02**	**2,02**		**Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**	**Tersedianya data Potensi dan Peluang Investasi Penanaman Modal Tahunan dan jangka menengah Kabupaten Sukoharjo**	**Rp 144.214.000**	**Rp 141.559.800**	**Rp 107.000.000**	**Rp 103.653.500**	**96,87%**	**Rp 80.000.000**	**Rp 6.050.000**	**7,56%**
2	18	02	2,02	01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kajian Potensi Peluang Investasi dikabupaten Sukoharjo Jumlah rancangan Rencana Umum Penanaman Modal dan Perubahan Rencana Umum Penanaman Modal	*Rp 103.500.000*	*Rp 100.845.800*	*Rp 57.000.000*	*Rp 55.108.500*	*96,68%*	*Rp 57.000.000*	*Rp 5.490.000*	*9,63%*
2	18	02	2,02	02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Data Potensi dan Peluang Investasi yang disediakan Jumlah VCD Data Potensi dan	*Rp 40.714.000*	*Rp 40.714.000*	*Rp 50.000.000*	*Rp 48.545.000*	*97,09%*	*Rp 23.000.000*	*Rp 560.000*	*2,43%*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah DanProgram/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	RealisasiTarget Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatans/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program danKegiatan Tahun Lalu (n-2)			Perkiraan Realisasi CapaianTarget Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun2023	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
						Peluang Investasi yang disediakan								
2	**18**	**03**			**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**Kepeminatan Investasi di Kabupaten Sukoharjo**	**Rp 95.000.000**	**Rp 86.591.500**	**Rp 285.000.000**	**Rp 284.860.000**	**99,95%**	**Rp 85.000.000**	**Rp 69.928.810**	**82,27%**
2	**18**	**03**	**2,01**		**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Terlaksananya Forum Strategi Promosi Investasi dan tersampaikannya potensi dan peluang investasi kabupaten Sukoharjo kepada Masyarakat dan Dunia Usaha**	**Rp 95.000.000**	**Rp 86.591.500**	**Rp 285.000.000**	**Rp 284.860.000**	**99,95%**	**Rp 85.000.000**	**Rp 69.928.810**	**82,27%**
2	18	03	2,01	01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Orang yang mengikuti Forum Strategi Promosi antara Instansi Terkait dan Pelaku Usaha yang dilaksanakan	*Rp 20.000.000*	*Rp 16.232.500*	*Rp 10.000.000*	*Rp 10.000.000*	*100,00%*	*Rp 10.000.000*	*Rp 4.500.000*	*45,00%*
2	18	03	2,01	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Baliho yang dibuat dan dipelihara Jumlah Film Pendek/ Siaran Radio yang dibuat Jumlah Pameran Investasi yang diikuti	*Rp 75.000.000*	*Rp 70.359.000*	*Rp 275.000.000*	*Rp 274.860.000*	*99,95%*	*Rp 75.000.000*	*Rp 65.428.810*	*87,24%*
2	**18**	**04**			**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**Cakupan Pelayanan Penaman Modal yang**	**Rp 170.450.000**	**Rp 157.567.900**	**Rp 227.050.000**	**Rp 219.384.000**	**96,62%**	**Rp 315.000.000**	**Rp 191.776.000**	**60,88%**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah DanProgram/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	RealisasiTarget Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatans/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program danKegiatan Tahun Lalu (n-2)			Perkiraan Realisasi CapaianTarget Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun2023	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
						Optimal								
2	**18**	**04**	**2,01**		**Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**	**Terlaksananya Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha**	**Rp 170.450.000**	**Rp 157.567.900**	**Rp 227.050.000**	**Rp 219.384.000**	**96,62%**	**Rp 315.000.000**	**Rp 191.776.000**	**60,88%**
2	18	04	2,01	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah orang yang diberikan Layanan Coathing Klinik Pemenuhan Komitmen Jumlah orang yang diberikan Pelayanan Perizinan Jemput Bola Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi perizinan berusaha dan non berusaha yang ditangani secara On Line	-	-	*Rp 45.000.000*	*Rp 39.964.000*	*88,81%*	*Rp 45.000.000*	*Rp 30.252.000*	*67,23%*
2	18	04	2,01	02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah peninjauan lokasi perizinan berusaha dan non berusaha yang dilaksanakan oleh tim teknis Jumlah perizinan berusaha dan non berusaha yang diterbitkan	*Rp 125.000.000*	*Rp 124.139.200*	*Rp 151.750.000*	*Rp 151.535.000*	*99,86%*	*Rp 100.000.000*	*Rp 83.450.000*	*83,45%*
2	18	04	2,01	03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan	Jumlah Dok. pengelolaan pengaduan yang terselesaikan Jumlah Forum Zoom Meeting	*Rp 30.450.000*	*Rp 19.223.600*	*Rp 20.300.000*	*Rp 18.735.000*	*92,29%*	*Rp 10.000.000*	*Rp 7.029.000*	*70,29%*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah DanProgram/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	RealisasiTarget Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatans/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program danKegiatan Tahun Lalu (n-2)			Perkiraan Realisasi CapaianTarget Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun2023	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
					dan Non Perizinan	DPMPTSP Menyambut Jumlah Laporan Survey Kepuasan Masyarakat yang disusun								
2	18	04	2,01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi Fasilitasi terhadap pelaku usaha yang mengalami kendala dalam melaksanakan kegiatan Penanaman Modal	*Rp 15.000.000*	*Rp 14.205.100*	*Rp 10.000.000*	*Rp 9.150.000*	*91,50%*	*Rp 160.000.000*	*Rp 71.045.000*	*44,40%*
2	**18**	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**Persentase Realisasi Investasi**	**Rp 466.860.000**	**Rp 429.233.000**	**Rp 478.394.000**	**Rp 385.004.500**	**80,48%**	**Rp 383.400.000**	**Rp 154.638.000**	**40,33%**
2	**18**	**05**	**2,01**		**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**	**Rp 466.860.000**	**Rp 429.223.000**	**Rp 478.394.000**	**Rp 385.004.500**	**80,48%**	**Rp 383.400.000**	**Rp 154.638.000**	**40,33%**
2	18	05	2,01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Penanaman Modal (Monev dan LKPM) yang dilaksanakan	*Rp 86.498.000*	*Rp 68.175.000*	*Rp 60.000.000*	*Rp 32.681.500*	*54,47%*	*Rp 40.000.000*	*Rp 18.548.000*	*46,37%*
2	18	05	2,01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah orang yang mengikuti Sosialisasi LKPM On Line bagi perusahaan baru yang sudah memiliki ijin	*Rp 297.227.000*	*Rp 281.626.000*	*Rp 336.894.000*	*Rp 279.523.000*	*82,97%*	*Rp 262.250.000*	*Rp 115.840.000*	*44,17%*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah DanProgram/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	RealisasiTarget Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatans/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program danKegiatan Tahun Lalu (n-2)			Perkiraan Realisasi CapaianTarget Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun2023	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2	18	05	2,01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah orang yang mengikuti Forum Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengawasan Penanaman Modal yang dilaksanakan	*Rp 83.085.000*	*Rp 79.432.000*	*Rp 81.500.000*	*Rp 72.800.000*	*89,33%*	*Rp 81.150.000*	*Rp 20.250.000*	*24,95%*
2	**18**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**Persentase Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal**	**Rp 110.000.000**	**Rp 102.780.800**	**Rp 75.000.000**	**Rp 73.425.000**	**97,90%**	**Rp 50.000.000**	**Rp 13.972.000**	**27,94%**
2	**18**	**06**	**2,01**		**Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Tersedianya Informasi Data Penanaman Modal**	**Rp 110.000.000**	**Rp 102.780.800**	**Rp 75.000.000**	**Rp 73.425.000**	**97,90%**	**Rp 50.000.000**	**Rp 13.972.000**	**27,94%**
2	18	06	2,01	01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Aplikasi Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha serta Mal Pelayanan Publik yang dipelihara, dikembangkan dan diupgrade Jumlah Buku Profile Pelayanan Perizinan yang disusun Jumlah Dok. Data Base dan Arsip Perizinan Berusaha dan Non Berusaha yang disusun	*Rp 110.000.000*	*Rp 102.780.800*	*Rp 75.000.000*	*Rp 73.425.000*	*97,90%*	*Rp 50.000.000*	*Rp 13.972.000*	*27,94%*

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sukoharjo, merupakan Lembaga Teknis Daerah sebagai unsur utama Pemerintah Daerah dalam bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang berkualitas dapat menjadi wahana untuk memperbaiki pola penanaman modal di tingkat daerah, sehingga daerah dapat berkiprah dengan leluasa untuk meningkatkan nilai investasi daerahnya sesuai potensi dan kemampuan yang ada (potensi lokal). Di sisi lain, kondisi era globalisasi merupakan tantangan besar yang harus dan langsung dihadapi pemerintah dan masyarakat Kabupaten Sukoharjo. Investor asing memiliki kebebasan penuh untuk membuka usaha di manapun sesuai peruntukannya, dan ini merupakan peluang investasi yang patut diraih dan dimanfaatkan dengan bijaksana.

DPMPTSP Kabupaten Sukoharjo selaku lembaga teknis di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu harus mampu menjawab tantangan tersebut di atas. Keberhasilan suatu perencanaan dapat dilihat mulai dari proses sampai dengan tataran pelaksanaan/impelementasi di lapangan, sehingga akan terwujud sinergi antara penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu baik ditingkat Nasional, Provinsi maupun Kabupaten. Namun disisi lain seiring berubah-rubahnya regeluasi tentang mekanisme perencanaan dari tingkat pusat akan memperlambat proses perencanaan dalam rangka menterpadukan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintudaerah provinsi, penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten/kota belum bisa secara optimal.

Berangkat dari fenomena tersebut DPMPTSP Kabupaten Sukoharjo selaku Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mencoba untuk mensinergikan penanaman modal baik tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten dalam rangka :

1. Mendukung koordinasi antar pelaku penanam modal;
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah;
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara penanaman modal dan perizinan terpadu satu pintu;
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sukoharjo dibentuk sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Peraturan Pemerintah tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan

Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Berdasarkan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, serta mempunyai fungsi :

1. penyusunan dan perumusan kebijakan dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
4. pelaksanaan administrasi dinas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan
5. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Mengikuti dan memperhatikan adanya perubahan sistem pemerintahan daerah sebagai wujud diterapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. Peranan pelayanan perizinan terpadu satu pintu pada masa yang akan datang diharapkan lebih menonjolkan peran sebagai perumus, fasilitator, mediator dan inovator di dalam pelaksanaan penanaman modal serta dituntut untuk lebih mampu mengelola perubahan yang semakin kompleks dan cepat. DPMPTSP dalam melaksanakan pelayanan Perizinan Berusaha wajib menerapkan manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, meliputi :

1. pelaksanaan pelayanan;
2. pengelolaan pengaduan masyarakat;
3. pengelolaan informasi;
4. penyuluhan kepada masyarakat;
5. pelayanan konsultasi;
6. pendampingan hukum.

Pada umumnya kualitas penyelenggaraan penanaman modal dan perizinan terpadu satu pintu daerah di Kabupaten Sukoharjo mengalami peningkatan. Beberapa arah kebijakan yang menyebabkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan penanaman modal tersebut meliputi :

1. Perbaikan Iklim Penanaman Modal;
2. Persebaran Penanaman Modal;
3. Fokus Pengembangan Penanaman Modal;
4. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK);

5. Pemberian Fasilitas, Kemudahan dan/ atau Insentif Penanaman Modal; dan
6. Promosi Penanaman Modal.

Dalam rangka mewujudkan arah kebijakan penanaman modal, adapun indikator yang ditetapkan sebagai berikut:

1. Indeks kualitas pemetaan dan perencanaan pengembangan penanaman modal;
2. Jumlah hari dan prosedur dalam memulai usaha (starting a business) serta jumlah perusahaan besar yang bermitra dengan UMKM;
3. Kesepakatan/perjanjian kerjasama dalam dan luar negeri yang telah diimplementasikan;
4. Jumlah minat penanaman modal dan nilai komitmen penanaman modal;
5. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas pelayanan penanaman modal; dan
6. Fasilitasi permasalahan yang dihadapi perusahaan (debottlenecking).

Namun peningkatan kualitas penyelenggaraan penanaman modal tersebut belum diikuti oleh pertumbuhan investasi dan kualitas pelayanan perizinan yang optimal. Beberapa permasalahan yang dihadapi DPMPTSP Kabupaten Sukoharjo dalam mengoptimalkan pertumbuhan investasi dan kualitas pelayanan perizinan adalah sebagai berikut :

1. Rendahnya pemahaman pelaku usaha tentang pentingnya LKPM;
2. Tanah Kawasan Peruntukan Industri masih milik masyarakat;
3. Keterlambatan informasi yang diterima oleh masyarakat;
4. Sosialisasi kepada UMKM belum maksimal;
5. Kurangnya diklat/ kursus bidang teknis pelayanan perizinan di bidang perizinan online dan kurangnya kesadaran pelayan perizinan dalam meningkatkan ketrampilan dan pengetahuan di bidang perizinan online;
6. Sistem Perizinan Online Terintegrasi mengalami pembaharuan dengan adanya penyesuaian terhadap keadaan di lapangan serta penyempurnaan dan adanya kendala teknis;
7. Masyarakat khususnya pemohon perizinan belum mengetahui bahwa pelayanan perizinan diselenggarakan secara online dan terdapat beberapa pemohon perizinan online yang belum bisa mengoperasikan system perizinan online;
8. Biaya rekomendasi konsultan SLF yang menurut pemohon terlalu tinggi dan tambahan biaya bagi pemohon yang menggunakan jasa kepengurusan izin lewat pihak ke 3.

Analisa isu-isu strategis dilakukan berdasarkan pada situasi dan kondisi lingkungan strategis yang berpengaruh kuat terhadap tingkat pencapaian tujuan pembangunan. Lingkungan strategis yang meliputi dinamika yang terjadi perlu diantisipasi dalam melakukan perencanaan pembangunan. Isu-isu strategis yang dihadapi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik sebagai pusat pelayanan Peningkatan pertumbuhan nilai investasi;
2. Pendelegasian kewenangan perizinan ke DPMPTSP;

3. Penerapan OSS Berbasis Resiko (OSS RBA).

Tabel 2.3.
Pencapaian Kinerja Pelayanan DPMPTSP
Kabupaten Sukoharjo

Indikator	Satuan	Target Renstra				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
		2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
(2)	(3)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	**%**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**47**	**100**	**100**	-
Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**%**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**68**	**100**	**100**	-
Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	-
Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	-
Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	-
Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	-
Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	1	1	1	1	-	1	1	-
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	1	1	1	1	-	1	1	-
Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	3	3	3	3	3	1	1	1	-
Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**%**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**40**	**100**	**100**	-
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	39	39	39	39	29	27	27	27	-
Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	-
Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	12	12	12	12	6	12	12	-

Indikator	Satuan	Target Renstra				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
		2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
(2)	(3)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1	1	1	1	-	1	1	-
Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	4	4	4	4	4	2	4	4	-
Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**%**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	-	**100**	**100**	-
Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	-	1	1	1	-	-	1	1	-
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	80	40	40	40	80	-	40	40	-
Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	**%**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**50**	**100**	**100**	-
Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12	12	12	12	12	6	12	12	-
Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	12	12	12	12	6	12	12	-
Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	12	12	12	12	12	6	12	12	-
Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	12	12	12	12	6	12	12	-
Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	12	12	12	12	6	12	12	-
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	12	12	12	12	6	12	12	-
Jumlah Laporan Fasiliasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	12	12	12	12	6	12	12	-

Indikator	Satuan	Target Renstra				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
		2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
(2)	(3)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	12	12	12	6	12	12	-
Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**%**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**93**	**100**	**100**	**-**
Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1	-	-	-	1	-	-	-	-
Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	77	25	2	2	77	25	2	2	-
Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**%**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**50**	**100**	**100**	-
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12	12	12	12	6	12	12	-
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	12	12	12	6	12	12	-
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	12	12	12	6	12	12	-
Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**%**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**28**	**100**	**100**	-
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	28	24	24	24	28	12	24	24	-
Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	13	13	8	8	13	-	8	8	-
Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	36	47	23	23	36	10	23	23	-

Indikator	Satuan	Target Renstra				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
		2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
(2)	(3)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	-	-	-	2	-	-	-	-
Cakupan Regulasi yang mendukung iklim investasi	**%**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**57**	**100**	**100**	-
Cakupan Potensi Unggulan dan Peluang Investasi di Kabupaten Sukoharjo	**%**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**57**	**100**	**100**	
Cakupan regulasi kebijakan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal bagi Investor	**%**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**75**	**100**	**100**	-
Jumlah Peraturan Daerah/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota dalam Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Dokumen	3	3	3	3	3	2	3	3	-
Cakupan data Potensi dan Peluang Investasi Penanaman Modal Tahunan dan jangka menengah Kabupaten Sukoharjo	**%**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**38**	**100**	**100**	-
Jumlah Kajian Potensi Peluang Investasi dikabupaten Sukoharjo	Dokumen	1	1	-	1	1	-	-	1	-
Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/ Kota	Dokumen	1	1	1	1	1	-	1	1	-
Prosentase Kepeminatan Investasi di Kabupaten Sukoharjo	**%**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**38**	**100**	**100**	-
Cakupan Strategi Promosi Investasi dan tersampaikannya potensi dan peluang investasi kabupaten Sukoharjo kepada Masyarakat dan Dunia Usaha	**%**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**38**	**100**	**100**	-
Jumlah Baliho yang dibuat dan dipelihara	Buah	6	6	6	6	6	3	6	6	-
Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/ Kota	Dokumen	1	1	1	1	1	-	1	1	-
Prosentase Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha yang mendukung Investas	**%**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**50**	**100**	**100**	-
Prosentase Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Penanaman Modal	**%**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**50**	**100**	**100**	
Cakupan Pelayanan Penaman Modal yang Optimal	**%**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**50**	**100**	**100**	

Indikator	Satuan	Target Renstra				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
		2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
(2)	(3)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Cakupan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha										
Cakupan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non berusaha	**%**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**50**	**100**	**100**	
Cakupan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan Berusaha dan Non berusaha	**%**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**50**	**100**	**100**	-
	%	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**50**	**100**	**100**	
Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Pelaku Usaha	200	200	200	200	200	100	200	200	-
Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	Kegiatan Usaha	24	24	24	24	24	12	24	24	-
Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Orang	4	4	4	4	4	-	4	4	-
Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Kegiatan Usaha	40	1100	900	900	40	550	900	900	-
Prosentase jumlah pertumbuhan realisasi penanaman modal	**%**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**37**	**100**	**100**	-
Cakupan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	**%**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**37**	**100**	**100**	-
Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kegiatan Usaha	24	24	24	24	24	6	24	24	-
Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Pelaku Usaha	30	20	20	20	30	-	20	20	-
Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	Orang	40	40	20	20	40	20	20	20	-
Prosentase Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	**%**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**60**	**100**	**100**	-
Cakupan Informasi Data Penanaman Modal	**%**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**60**	**100**	**100**	-

Indikator	Satuan	Target Renstra				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
		2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
(2)	(3)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Dokumen	1	1	1	1	1	-	1	1	-

Pengukuran capaian kinerja ini merupakan hasil dari suatu penilaian sistematik yang sebagian besar didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator masukan, keluaran dan hasil. Berdasarkan target, realisasi dan tingkat capaian sasaran DPMPTSP Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024, dapat dijelaskan masing-masing indikator sasaran sebagai berikut :

Sasaran ke-1

Meningkatnya Investasi, dengan Indikator Sasaran : Realisasi Investasi, di Tahun 2024 sebesar 100%.

Hal ini merupakan komitmen DPMPTSP Kabupaten Sukoharjo dalam mengoptimalkan pemanfaatan potensi unggulan daerah dan mendorong terciptanya kepastian hukum dengan penyederhanaan dan harmonisasi peraturan terkait penanaman modal agar meningkatnya iklim kondusif bagi investor, meningkatnya jumlah investor dan meningkatkan promosi potensi dan peluang investasi, sehingga diharapkan dapat terwujudnya Sukoharjo sebagai tujuan investasi modern dengan didukung pelayanan perizinan yang pasti, mudah dan akuntabel.

Hal ini bisa dijabarkan dengan penelurusan hasil capaian Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Program Promosi Penanaman Modal dan Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal. Dalam capaian program tersebut diperoleh data regulasi yang mendukung iklim investasi, data potensi unggulan dan peluang investasi di Kabupaten Sukoharjo, data kepeminatan investasi di Kabupaten Sukoharjo, dan data jumlah pertumbuhan realisasi penanaman modal. Diharapkan dengan penelurusan dan kontrol yang baik akan meningkatkan pencapaian programnya di setiap tahunnya.

Sasaran ke-2

Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan Perizinan, dengan Indikator Sasaran : Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perizinan, di Tahun 2024 ditargetkan sebesar 85 nilai.

Pernyataan indikator sasaran yang kedua ini merupakan komitmen DPMPTSP Kabupaten Sukoharjo dalam mengoptimalkan kinerja pelayanan perizinan. Hal ini dirasa penting karena dapat meningkatkan kinerja pelayanan publik, sehingga diharapkan dapat terwujudnya Sukoharjo sebagai tujuan investasi modern dengan didukung pelayanan perizinan yang pasti, mudah dan akuntabel.

Hal ini bisa dijabarkan dengan penelurusan hasil capaian Program Pelayanan Penanaman Modal dan Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal. Dalam capaian program tersebut diperoleh data pelayanan perizinan berusaha dan non berusaha yang mendukung investasi, data pemantauan pemenuhan komitmen perizinan berusaha dan non berusaha penanaman modal, data pelayanan penaman modal yang optimal, dan data pengelolaan sistem informasi penanaman modal. Diharapkan dengan penelurusan dan kontrol yang baik akan meningkatkan pencapaian programnya di setiap tahunnya.

Sasaran ke-3

Meningkatnya Kualitas Aparatur dan Pelayanan Publik, dengan Indikator Sasaran : Nilai SAKIP Perangkat Daerah, di Tahun 2024 ditargetkan sebesar 74 angka.

Hal ini bisa dijabarkan dengan penelurusan hasil capaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Dalam capaian program tersebut diperoleh data pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah. Diharapkan dengan penelurusan dan kontrol yang baik akan meningkatkan pencapaian programnya di setiap tahunnya.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

DPMPTSP Kabupaten Sukoharjo merupakan menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Sebagai perangkat daerah dengan fungsi perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, pelaksanaan administrasi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya DPMPTSP Kabupaten Sukoharjo didukung dengan potensi sumber daya manusia dengan tingkat pendidikan tinggi. Namun demikian masih terdapat permasalahan-permasalahan yang dihadapi, yaitu :

1. Kurangnya kesadaran pelaku usaha untuk melaporkan LKPM karena rendahnya pemahaman pelaku usaha tentang pentingnya LKPM;
2. Pertumbuhan dan Persebaran Kawasan Peruntukan Industri belum merata karena Tanah Kawasan Peruntukan Industri masih milik masyarakat;
3. Perubahan regulasi yang cepat karena Keterlambatan informasi yang diterima oleh masyarakat;
4. Banyaknya UMKM yang belum memiliki NIB karena sosialisasi kepada UMKM belum maksimal;
5. SDM pelayanan perizinan kurang optimal karena kurangnya diklat/ kursus bidang teknis pelayanan perizinan di bidang perizinan online dan kurangnya kesadaran pelayan perizinan dalam meningkatkan ketrampilan dan pengetahuan di bidang perizinan online;

6. Sistem Perizinan Online Terintegrasi terkadang mengalami perubahan sistem dan terkadang mengalami masalah sistem karena Sistem Perizinan Online Terintegrasi mengalami pembaharuan dengan adanya penyesuaian terhadap keadaan di lapangan serta penyempurnaan dan adanya kendala teknis;
7. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap mekanisme dan tata cara pelayanan perizinan karena masyarakat khususnya pemohon perizinan belum mengetahui bahwa pelayanan perizinan diselenggarakan secara online dan terdapat beberapa pemohon perizinan online yang belum bisa mengoperasikan sistem perizinan online;
8. Adanya biaya dalam proses pengurusan perizinan yang melibatkan pihak ke 3 karena biaya rekomendasi konsultan SLF yang menurut pemohon terlalu tinggi dan tambahan biaya bagi pemohon yang menggunakan jasa kepengurusan izin lewat pihak ke 3.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD merupakan proses membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan analisis kebutuhan. Review terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 berkaitan dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2024. Rumusan kebutuhan program dan kegiatan dilengkapi dengan lokasi, indikator kinerja, besaran target atau tolak ukur dan besaran dana yang dibutuhkan. Program dan kegiatan yang ada pada Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo tidak mengalami perubahan yang signifikan dan telah sesuai dengan Rencana Strategis DPMPTSP Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026, Namun ada perubahan terhadap besarnya pagu indikatif atau besarnya jumlah anggaran yang diusulkan untuk membiayai rencana kegiatan.

Rencana Kerja DPMPTSP Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 merupakan rencana kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam dokumen Rencana Strategis DPMPTSP Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026. Rencana Kerja DPMPTSP Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan tetap memperhatikan kepada Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024.

2.4.1 Perbandingan antara Rancangan Awal RKPD dengan Hasil Analisis Kebutuhan

Berdasarkan RPJPD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005-2025 (sebagaimana Peraturan

Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005-2025 dan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026, maka Rencana Kinerja Pemerintah Kabupaten Sukoharjo pada DPMPTSP Kabupaten Sukoharjo yang akan dicapai Tahun 2024 sebanyak 6 (enam) program dan 13 (tiga belas) kegiatan sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

   Program ini terdiri dari kegiatan sebagai berikut :

   1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
   2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
   3) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
   4) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah;
   5) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
   6) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
   7) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

2. PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL

   Program ini terdiri dari kegiatan sebagai berikut :

   1) Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
      (1) Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
   2) Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
      (1) Sub Kegiatan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota

3. PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL

   Program ini terdiri dari kegiatan sebagai berikut :

   1) Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
      (1) Sub Kegiatan Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal
      (2) Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota

4. PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL

   Program ini terdiri dari kegiatan sebagai berikut :

   1) Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
      (1) Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

(2) Sub Kegiatan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Moda

(3) Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan

(4) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah

5. PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

   Program ini terdiri dari kegiatan sebagai berikut :

   1) Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

      (1) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal

      (2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal

      (3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

6. PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL

   Program ini terdiri dari kegiatan sebagai berikut :

   1) Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintergrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

      (1) Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

2.4.2 Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan

Proses tersebut dilakukan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan upaya pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif. Adapun hal tersebut dapat diwujudkan melalui :

1. Penggunaan dana APBD adalah untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, akan terus dilakukan peningkatan program-program yang berorientasi pada masyarakat dan berupaya melaksanakan realisasi belanja daerah tepat waktu dengan mendorong proses penetapan Perda APBD secara tepat waktu pula;

2. Meningkatkan kualitas anggaran belanja daerah melalui pola penganggaran yang berbasis kinerja dengan pendekatan tematik pembangunan yang disertai sistem pelaporan yang makin akuntabel;

3. Dalam upaya meningkatkan kinerja pembangunan Kabupaten Sukoharjo sebagaimana

tercantum dalam RPJMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026 serta peningkatan koordinasi dan sinergitas pembangunan antar tingkat pemerintahan, maka sesuai dengan kebutuhan, urusan dan kemampuan keuangan, diperlukan dana bantuan kepada masyarakat yang terdiri dari bantuan keuangan, bantuan hibah, dan bantuan social;

4. Mengalokasikan belanja tidak langsung yang meliputi gaji dan tunjangan PNS, belanja hibah, belanja sosial, belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dengan prinsip proporsional, pemerataan dan penyeimbang.

2.4.3 Temuan–temuan yang diperoleh setelah Proses tersebut dilakukan dan Catatan Penting terhadap Perbedaan dengan Rancana awal RKPD

Berdasarkan tolok ukur peraturan perundang–undangan/pedoman, pelaksanaan proses perencanaan di Kabupaten Sukoharjo secara umum telah sesuai dengan aturan yang ada, yaitu Undang- Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dalam proses penyusunan dokumen perencanaan mulai dari Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra PD, Renja-PD dan RKPD sistematika dan substansi sudah mengacu pada peraturan tersebut namun belum sempurna. Pada penyusunan Renja-PD menampung usulan program dan kegiatan dari PD dan juga usulan program dan kegiatan secara partisipatif yaitu menjaring usulan program dan kegiatan dari masyarakat *(bottom-up)* atau *stakeholder* melalui mekanisme musrenbang dan forum PD, dari musrenbang dan forum PD inilah usulan program dan kegiatan di rekapitulasi dalam Renja-PD, kemudian dari Renja-PD usulan program dan kegiatan di adopsi sehinggatersusun Rancangan Awal RKPD.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Amanat konstitusi menegaskan bahwa anggaran negara dan daerah adalah instrumen untuk mencapai tujuan nasional dan tujuan daerah. Untuk itu politik perencanaan dan anggaran negara harus dikendalikan oleh tujuan atau manfaat yang akan dicapai dan bukan semata-mata dikendalikan oleh ketersediaan anggaran atau karena tugas pokok dan fungsi. Teknis perencanaan dan penganggaran dimaksudkan untuk memastikan tujuan pembangunan dapat dicapai dengan mengoptimalkan seluruh sumber daya (Pemerintah dan swasta) untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi dan keadilan.

Dengan melihat kondisi bangsa Indonesia saat ini, tantangan yang dihadapi dalam 20 tahun mendatang dengan memperhitungkan modal dasar yang dimiliki oleh bangsa Indonesiadan amanat pembangunan, maka visi pembangunan nasional untuk tahun 2020-2024 adalah Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berdasarkan Gotong Royong.

Dalam upaya mewujudkan visi pembangunan nasional tersebut adalah melalui 9 (Sembilan) misi pembangunan nasional yaitu :

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya;
7. Perlindungan Bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya;
9. Sinergi Pemerintahan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Mengacu pada tujuan pembangunan jangka panjang tahun 2020-2024 adalah Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian BerdasarkanGotong Royong sebagai landasan bagi tahap pembangunan berikutnya, sebagai ukuran tercapainya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berdasarkan Gotong Royong, pembangunan nasional dalam 5 (lima) tahun mendatang, maka arah kebijakan umum pembangunan nasional tahun 2020-2024 adalah :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;

5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan PerubahanIklim;
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Dalam rangka mensinergikan pembangunan nasional dengan pembangunan daerah Kabupaten Sukoharjo, maka dapat disusun hubungan antara Kebijakan Pembangunan Nasional dengan Kebijakan Pembangunan Kabupaten Sukoharjo tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Hubungan Prioritas Pembangunan Nasional dengan
Prioritas Pembangunan Daerah

Prioritas Nasional	Prioritas Daerah
1. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam hal kesehatan dan pendidikan 3. Penanggulangan pengangguran yang disertai peningkatan decent job 4. Mendorong pemulihan dunia usaha 5. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan dalam rangka mendorong produktivitas 6. Ekonomi hijau 7. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar, antara lain air bersih dan sanitasi.	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing 2. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas 3. Peningkatan kepemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa yang berdasarkan hukum serta birokrasi yang profesional dan netral serta peningkatan kapasitas fiskal daerah 4. Pengurangan Kemiskinan 5. Peningkatan Infrastruktur Wilayah yang berwawasan lingkungan dan penguatan ketahanan bencana 6. Peningkatan revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila 7. Kerjasama regional, kerjasama antara Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), dan kerjasama dengan komponen masyarakat

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran dalam Renja adalah turunan penjabaran dari Renstra yang ingin dicapai dalam waktu 1 (satu) tahun dan didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Sukoharjo. Perumusan tujuan menjabarkan hal-hal yang dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan masalah dan menangani isu-isu strategis yang dihadapi DPMPTSP Kabupaten Sukoharjo. Lebih dari itu, perumusan tujuan Strategis juga memungkinkan untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah dicapai mengingat tujuan Strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Tujuan dan sasaran jangka menengah DPMPTSP Kabupaten Sukoharjo merupakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dicapai, sehingga merupakan arah yang akan dituju dalam terselenggaranya organisasi. Adapun tujuan DPMPTSP Kabupaten Sukoharjo :

1. **"Terwujudnya Pelayanan Perizinan yang berkualitas"**, dengan indikator yang ditetapkan adalah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan nilai 85 angka di Tahun 2024.
2. **"Tercapainya pertumbuhan investasi"**, dengan indikator yang ditetapkan adalah Pertumbuhan Investasi dengan nilai 18% di Tahun 2024.

Pernyataan diatas dimaksudkan untuk menjadikan DPMPTSP Kabupaten Sukoharjo sebagai lembaga yang profesional dalam merespon aspirasi masyarakat dengan tetap memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku sesuai dengan tuntutan global dalam menghasilkan suatu perencanaan kabupaten yang transparan, akuntabel dan partisipatif untuk mendukung **"Mewujudkan Masyarakat Sukoharjo Yang Lebih Makmur".**

Untuk mendukung perwujudan tujuan DPMPTSP Kabupaten Sukoharjo, maka sasaran yang akan dijalankan adalah :

1. Meningkatnya Investasi, dengan Indikator Sasaran adalah Realisasi Investasi dengan target sebesar **100%** di Tahun 2024;
2. Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan Perizinan, dengan Indikator Sasaran adalah Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perizinan dengan target sebesar **85 nilai** di Tahun 2024;
3. Meningkatnya Kualitas Aparatur dan Pelayanan Publik, dengan Indikator Sasaran adalah Nilai SAKIP Perangkat Daerah dengan target sebesar **74 angka** di Tahun 2024.

3.3 Tantangan dan Peluang

Dalam upaya meningkatkan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berdasarkan tugas pokok dan fungsi utamanya kurun waktu lima tahun ke depan, perlu mengetahui dinamika tantangan dan peluang yang ada, guna mempertajam kebijakan pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk mendukung pencapaian target dan sasaran RPJMD. Berikut tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo.

3.3.1 Tantangan DPMPTSP

Tantangan kita ada saat ini karena masih banyaknya penyeduaian yang harus dilakukan, antara lain :

a. Besarnya target realisasi investasi yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah;
b. Cepatnya perubahan regulasi dari pemerintah pusat;
c. Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan perizinan yang cepat, mudah dan murah;
d. Cepatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi;
e. Tuntutan masyarakat akan adanya Sistem Informasi berbasis mobile untuk mengkakses layanan tanpa batas ruang;
f. Dukungan dari pimpinan untuk peningkatan kualitas pelayanan.

3.3.2 Peluang DPMPTSP

Adapun peluang yang dimiliki antara lain :

a. Besarnya potensi realisasi investasi yang dapat terpenuhi, mengingat Kabupaten Sukoharjo merupakan daerah industri dan tujuan investor;
b. Menyesuaikan perkembangan regulasi sesuai dengan perkembangan regulasi dari pemerintah Pusat;
c. Pemenuhan tuntutan masyarakat dengan peningkatan pelayanan perizinan yang cepat, mudah dan murah;
d. Menyesuaikan dengan cepatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi;
e. Adanya kemudahan akses pelayanan melalui android/ mobile;
f. Adanya dukungan dari pimpinan untuk peningkatan kualitas pelayanan.

3.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan kajian terhadap program/ kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan. Pada Forum Perangkat Daerah, usulan program kegiatan yang disampaikan kepada DPMPTSP Kabupaten Sukoharjo pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatanyang akan direncanakan.

DPMPTSP Kabupaten Sukoharjo dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya senantiasa memperhatikan usulan dari berbagai pihak termasuk dari para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari PD Kabupaten yang langsung ditujukan kepada PD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi PD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan Forum Perangkat Daerah.

Pada DPMPTSP Kabupaten Sukoharjo usulan pemangku kepentingan tidak ada, usulan dari pemangku kepentingan ditujukan kepada PD sesuai peruntukannya, yakni Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Perolehan Usulan Program dan Kegiatan di DPMPTSP Kabupaten Sukoharjo, melalui Proses Forum PD (forum yang berhubungan dengan fungsi/ sub fungsi, kegiatan/sektor dan lintas sektor) adalah wadah bersama antar pelaku

pembangunan untuk membahas prioritaskegiatan sebagai upaya mengisi Rencana Kerja PD.

Apabila dikaitkan dengan pencapian Visi dan Misi Kabupaten Sukoharjo, pada dasarnya kegiatan DPMPTSP Kabupaten Sukoharjo adalah sebagai pengarah setiap program pembangunan dan sistem yang akan memberikan kemudahan bagi PD untuk menentukan arah dan sasaran kegiatan, lingkup dan pengukuran tingkat kesuksesannya.

Program dan kegiatan Rencana Kerja DDPMPTSP Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 disusun dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut :

1. Mendukung pencapaian Visi Kepala Daerah terpilih yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026 yakni **"MEWUJUDKAN MASYARAKAT SUKOHARJO YANG LEBIH MAKMUR"**.
2. Mendukung pencapaian Misi Kepala Daerah terpilih yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026 yakni sebagai berikut :
   a. Misi I : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik melaluiPercepatan Reformasi Birokrasi;
   b. Misi II : Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas;
   c. Misi III : Memperkuat Perekonomian Rakyat Yang Berdaya Saing Tinggi;
   d. Misi IV : Memperkuat Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan;
   e. Misi V : Meningkatkan Kualitas Kehidupan Sosial dan Keagamaan.
3. Misi 1: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik melalui Percepatan Reformasi Birokrasi

   Misi ini mempunyai tujuan terwujudnya tata kepemerintahan yang profesional, dengan indikator kinerja adalah Indek Reformasi Birokrasi (IRB), dan sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel.
4. Misi 2: Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas

   Misi ini mempunyai tujuan membentuk sumber daya manusia yang sehat, cerdas, inovatif, dan berkarakter dengan indikator kinerja adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah :

   1) Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat;
   2) Meningkatnya Kualitas Pendidikan;
   3) Meningkatnya pengendalian penduduk; dan
   4) Meningkatnya akses dan kualitas hidup, perlindungan terhadap perempuan dan anak serta kesetaraan gender.

5. Misi 3: Memperkuat Perekonomian Rakyat yang Berdaya Saing Tinggi

   Misi ini mempunyai tujuan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan insklusif, dengan indikator kinerja Pertumbuhan Ekonomi, Angka Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Pendapatan Per Kapita. Sasaran yang ingin dicapai dalam tujuan ini adalah :

   1) Meningkatnya pertumbuhan produktifitas dengan indikator; dan
   2) Meningkatnya kualitas hidup penduduk miskin.

6. Misi 4: Memperkuat Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan

   Misi ini mempunyai tujuan meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, dengan indikator kinerja Indeks Pembangunan Infrastruktur (IPI), dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), dan Indeks Resiko Bencana. Sasaran yang ingin dicapai adalah :

   1) Meningkatnya kualitas infrastruktur; dan
   2) Meningkatnya kualitas lingkungan.

7. Misi 5: Meningkatkan Kualitas Kehidupan Sosial dan Keagamaan

   Misi ini mempunyai tujuan mewujudkan masyarakat Sukoharjo yang aman dan nyaman, dengan indikator adalah Persentase penurunan konflik SARA. Sasaran yang ingin dicapaidari tujuan ini adalah Meningkatnya kualitas ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Secara garis besar Program dan Kegiatan yang direncanakan pada tahun 2024 dan bersifat Loyalitas Kewenangan DPMPTSP Kabupaten Sukoharjo adalah sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

   Program ini terdiri dari kegiatan sebagai berikut :

   1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
   2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
   3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
   4) Administrasi Umum Perangkat Daerah;
   5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
   6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
   7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

2. PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL

   Program ini terdiri dari kegiatan sebagai berikut :

   1) KegiatanPenetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

(1) Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

2) Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota

(1) Sub Kegiatan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota

3. PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL

Program ini terdiri dari kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota

(1) Sub Kegiatan Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal

(2) Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota

4. PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL

Program ini terdiri dari kegiatan sebagai berikut :

1) Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota

(1) Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

(2) Sub Kegiatan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Moda

(3) Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan

(4) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah

5. PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

Program ini terdiri dari kegiatan sebagai berikut :

1) Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

(1) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal

(2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal

(3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

6. PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL

Program ini terdiri dari kegiatan sebagai berikut :

1) Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintergrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

(1) Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

Dalam Renja DPMPTSP Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 ini, DPMPTSP Kabupaten Sukoharjo merencanakan 6 (enam) program, 13 (tiga belas) kegiatan dan 39 (tiga puluh sembilan) sub kegiatan dengan jumlah total pagu indikatif sebesar Rp. 7.853.092.000 dengan lokasi kegiatan terpusat di wilayah Kabupaten Sukoharjo. Dari total pagu indikatif tersebut, bersumber dari dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus non-fisik (DAK Non Fisik). Berikut disajikan pada tabel 3.1 rumusan rencana program dan kegiatan DPMPTSP Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 3.2
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat DaerahTahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	**18**				**DPMPTSP**					**Rp 7.853.092.000**	D A U D A K	-		**Rp 9.176.832.000**
2	**18**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**%**	Kabupaten Sukoharjo	**100**	**Rp 7.036.692.000**	D A U	-	**100**	**Rp 7.783.432.000**
2	**18**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**%**	Kabupaten Sukoharjo	**100**	**Rp 55.000.000**	D A U	-	**100**	**Rp 92.000.000**
2	18	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Kabupaten Sukoharjo	1	Rp 25.000.000	D A U	-	1	Rp 50.000.000
2	18	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	Kabupaten Sukoharjo	1	Rp 5.000.000	D A U	-	1	Rp 7.000.000
2	18	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	Kabupaten Sukoharjo	1	Rp 5.000.000	D A U	-	1	Rp 7.000.000
2	18	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Dokumen	Kabupaten Sukoharjo	1	Rp 5.000.000	D A U	-	1	Rp 7.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Penyusunan Dokumen DPA-SKPD								
2	18	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	Kabupaten Sukoharjo	1	Rp 5.000.000	D A U	-	1	Rp 7.000.000
2	18	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	Kabupaten Sukoharjo	1	Rp 5.000.000	D A U	-	1	Rp 7.000.000
2	18	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	Kabupaten Sukoharjo	1	Rp 5.000.000	D A U	-	1	Rp 7.000.000
2	**18**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**%**	Kabupaten Sukoharjo	**100**	**Rp 4.961.432.000**	D A U	-	**100**	**Rp 4.967.432.000**
2	18	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	Kabupaten Sukoharjo	31	Rp 4.757.012.000	D A U	-	31	Rp 4.757.012.000
2	18	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	Kabupaten Sukoharjo	1	Rp 5.000.000	D A U	-	1	Rp 7.000.000
2	18	01	2,02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	Kabupaten Sukoharjo	12	Rp 189.420.000	D A U	-	12	Rp 189.420.000
2	18	01	2,02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan AkhirTahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Laporan	Kabupaten Sukoharjo	1	Rp 5.000.000	D A U	-	1	Rp 7.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						SKPD								
2	18	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	Kabupaten Sukoharjo	2	Rp 5.000.000	D A U	-	2	Rp 7.000.000
2	**18**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**%**	Kabupaten Sukoharjo	**100**	**Rp 66.500.000**	D A U	-	**100**	**Rp 205.000.000**
2	18	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	Kabupaten Sukoharjo	0	-	D A U	-	0	Rp 120.000.000
2	18	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	Kabupaten Sukoharjo	37	Rp 66.500.000	D A U	-	37	Rp 85.000.000
2	**18**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**%**	Kabupaten Sukoharjo	**100**	**Rp 565.459.000**	D A U	-	**100**	**Rp 782.000.000**
2	18	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Kabupaten Sukoharjo	12	Rp 20.000.000	D A U	-	12	Rp 50.000.000
2	18	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Kabupaten Sukoharjo	0	-	D A U	-	0	Rp 40.000.000
2	18	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Kabupaten Sukoharjo	12	Rp 30.000.000	D A U	-	12	Rp 75.000.000
2	18	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Kabupaten Sukoharjo	12	Rp 300.000.000	D A U	-	12	Rp 350.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	18	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Kabupaten Sukoharjo	12	Rp 30.000.000	D A U	-	12	Rp 55.000.000
2	18	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	Kabupaten Sukoharjo	12	Rp 5.000.000	D A U	-	12	Rp 7.000.000
2	18	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	Kabupaten Sukoharjo	12	Rp 20.010.000	D A U	-	12	Rp 35.000.000
2	18	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Kabupaten Sukoharjo	12	Rp 160.449.000	D A U	-	12	Rp 170.000.000
2	**18**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**%**	Kabupaten Sukoharjo	**100**	**Rp 44.000.000**	D A U	-	**100**	**Rp 200.000.000**
2	18	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	Kabupaten Sukoharjo	2	Rp 44.000.000	D A U	-	2	Rp 200.000.000
2	**18**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**%**	Kabupaten Sukoharjo	**100**	**Rp 1.173.161.000**	D A U	-	**100**	**Rp 1.217.000.000**
2	18	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	Kabupaten Sukoharjo	12	Rp 15.000.000	D A U	-	12	Rp 17.000.000
2	18	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Kabupaten Sukoharjo	12	Rp 319.600.000	D A U	-	12	Rp 350.000.000
2	18	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Kabupaten Sukoharjo	12	Rp 838.561.000	D A U	-	12	Rp 850.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	**18**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**%**	Kabupaten Sukoharjo	**100**	**Rp 171.140.000**	D A U	-	**100**	**Rp 320.000.000**
2	18	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Kabupaten Sukoharjo	24	Rp 151.250.000	D A U	-	24	Rp 160.000.000
2	18	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	Kabupaten Sukoharjo	8	Rp 4.900.000	D A U	-	8	Rp 10.000.000
2	18	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Kabupaten Sukoharjo	23	Rp 14.990.000	D A U	-	23	Rp 50.000.000
2	18	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Kabupaten Sukoharjo	0	-	D A U	-	0	Rp 100.000.000
2	**18**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**Cakupan Potensi Unggulan dan Peluang Investasi di Kabupaten Sukoharjo** **Cakupan Regulasi yang mendukung iklim investasi**	**%** **%**	Kabupaten Sukoharjo	**100** **100**	**Rp 68.000.000**	D A U	-	**100** **100**	**Rp 195.000.000**
2	**18**	**02**	**2.01**		**Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Regulasi Kebijakan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal bagi Investor**	**%**	Kabupaten Sukoharjo	**100**	**Rp 20.000.000**	D A U	-	**100**	**Rp 50.000.000**
2	18	02	2.01	0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/ Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Dokumen	Kabupaten Sukoharjo	2	Rp 20.000.000	D A U	-	2	Rp 50.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	**18**	**02**	**2.02**		**Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**	**Cakupan Data Potensi dan Peluang Investasi Penanaman Modal Tahunan dan Jangka Menangah Kabupaten Sukoharjo**	**%**	Kabupaten Sukoharjo	**100**	**Rp 48.000.000**	D A U	-	**100**	**Rp 145.000.000**
2	18	02	2.02	0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	Kabupaten Sukoharjo	0	-	D A U	-	0	Rp 65.000.000
2	18	02	2.02	0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Dokumen	Kabupaten Sukoharjo	1	Rp 48.000.000	D A U	-	1	Rp 80.000.000
2	**18**	**03**			**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**Prosentase Kepeminatan Investasi di Kabupaten Sukoharjo**	**%**	Kabupaten Sukoharjo	**100**	**Rp 85.000.000**	D A U	-	**100**	**Rp 130.000.000**
2	**18**	**03**	**2.01**		**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Strategi Promosi Investasi dan tersampaikannya potensi dan peluang Investasi Kabupaten Sukoharjo kepada Masyarakat dan Dunia Usaha**	**%**	Kabupaten Sukoharjo	**100**	**Rp 85.000.000**	D A U	-	**100**	**Rp 130.000.000**
2	18	03	2.01	0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/ Kota	Dokumen	Kabupaten Sukoharjo	1	Rp 75.000.000	D A U	-	1	Rp 100.000.000
2	18	03	2.01	0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	Dokumen	Kabupaten Sukoharjo	1	Rp 10.000.000	D A U	-	1	Rp 30.000.000
2	**18**	**04**			**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**Cakupan Pelayanan Penaman Modal yang Optimal** **Prosentase Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha yang mendukung Investasi**	**%** **%** **%**	Kabupaten Sukoharjo	**100** **100** **100**	**Rp 240.000.000**	D A U	-	**100** **100** **100**	**Rp 555.000.000**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Prosentase Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Penanaman Modal								
2	**18**	**04**	**2.01**		**Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**	**Cakupan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan Berusaha dan Non Berusaha** **Cakupan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha** **Cakupan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Berusaha**	**%**	Kabupaten Sukoharjo	**100**	**Rp 240.000.000**	D A U	-	**100**	**Rp 555.000.000**
2	18	04	2.01	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	Kabupaten Sukoharjo	2	Rp 130.000.000	D A U	-	2	Rp 160.000.000
2	18	04	2.01	0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Pelaku Usaha	Kabupaten Sukoharjo	100	Rp 25.000.000	D A U	-	100	Rp 55.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	18	04	2.01	0007	Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Pelaku Ussaha	Kabupaten Sukoharjo	4	Rp 10.000.000	D A U	-	4	Rp 40.000.000
2	18	04	2.01	0008	Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	Kegiatan Usaha	Kabupaten Sukoharjo	24	Rp 75.000.000	D A U	-	24	Rp 300.000.000
2	**18**	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**Persentase jumlah pertumbuhan realisasi penanaman modal**	**%**	Kabupaten Sukoharjo	**100**	**Rp 383.400.000**	D A U D A K	-	**100**	**Rp 413.400.000**
2	**18**	**05**	**2.01**		**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**	**%**	Kabupaten Sukoharjo	**100**	**Rp 383.400.000**	D A U D A K	-	**100**	**Rp 413.400.000**
2	18	05	2.01	0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Kegiatan Usaha	Kabupaten Sukoharjo	150	Rp 40.000.000	D A U D A K	-	150	Rp 50.000.000
2	18	05	2.01	0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan	Pelaku Usaha	Kabupaten Sukoharjo	416	Rp 262.250.000	D A U D A K	-	416	Rp 272.250.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Berusaha Berbasis Risiko								
2	18	05	2.01	0006	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	Kegiatan Usaha	Kabupaten Sukoharjo	320	Rp 81.500.000	D A U D A K	-	320	Rp 91.150.000
2	**18**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**Persentase Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal**	**%**	Kabupaten Sukoharjo	**100**	**Rp 40.000.000**	D A U	-	**100**	**Rp 100.000.000**
2	**18**	**06**	**2.01**		**Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Informasi Data Penanaman Modal**	**%**	Kabupaten Sukoharjo	**100**	**Rp 40.000.000**	D A U	-	**100**	**Rp 100.000.000**
2	18	06	2.01	0002	Pengelolaan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Dokumen	Kabupaten Sukoharjo	1	Rp 40.000.000	D A U	-	1	Rp 100.000.000

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, diuraikan bahwa pada Bab IV fokus perhatiannya adalah terkait dengan rencana kerja dan pendanaan dokumen rencana kerja DPMPTSP Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024.

Dokumen Rencana Kerja DPMPTSP Kabupaten Sukoharjo merupakan penjabaran dari dokumen rencana strategis DPMPTSP yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sukoharjo. Rencana Kerja (Renja) disusun untuk satu tahun yang memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai dengan tugas dan fungsi DPMPTSP Kabupaten Sukoharjo yang ditransformasikan melalui Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

Rumusan program dan kegiatan pembangunan daerah menghasilkan rencana pembangunan yang konkrit dalam bentuk program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah. Dalam Renja DPMPTSP Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 terdapat 6 (enam) program, 13 (tiga belas) kegiatan, dan 39 (tiga puluh sembilan) sub kegiatan baik program dan kegiatan utama yang merupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam mendukung visi dan misi daerah, maupun program dan kegiatan pendukung. Untuk menilai pencapaian kegiatan, maka pada setiap kegiatan dirumuskan indikator kinerja kegiatan. Perumusan kegiatan juga telah diarahkan untuk mendukung pencapaian kinerja pada setiap program.

Seluruh program dan kegiatan DPMPTSP Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 yang tertuang dalam Renja didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sukoharjo yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK Non-Fisik).

Program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan urusan yang ditangani Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo berikut kebutuhan anggaran dan sumber pendanaannya dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut ini.

Tabel 4.1
Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Kode					Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Pagu Dana 2024
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2	**18**				**DPMPTSP**				**Rp 7.853.092.000**
2	**18**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**%**	**100**	**Rp 7.036.692.000**
2	**18**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**%**	**100**	**Rp 55.000.000**
2	18	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	1	Rp 25.000.000
2	18	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	Rp 5.000.000
2	18	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	Rp 5.000.000
2	18	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	Rp 5.000.000
2	18	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	Rp 5.000.000
2	18	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	Rp 5.000.000
2	18	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	Rp 5.000.000
2	**18**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**%**	**100**	**Rp 4.961.432.000**
2	18	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	31	Rp 4.757.012.000
2	18	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	Rp 5.000.000
2	18	01	2,02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	Rp 189.420.000
2	18	01	2,02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan AkhirTahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	Rp 5.000.000

Kode					Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Pagu Dana
								2024	2024
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2	18	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	2	Rp 5.000.000
2	**18**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**%**	**100**	**Rp 66.500.000**
2	18	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	0	-
2	18	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	37	Rp 66.500.000
2	**18**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**%**	**100**	**Rp 565.459.000**
2	18	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12	Rp 20.000.000
2	18	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	0	-
2	18	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	12	Rp 30.000.000
2	18	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	Rp 300.000.000
2	18	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	Rp 30.000.000
2	18	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	Rp 5.000.000
2	18	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	Rp 20.010.000
2	18	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	Rp 160.449.000
2	**18**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**%**	**100**	**Rp 44.000.000**
2	18	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	2	Rp 44.000.000

Kode					Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Pagu Dana 2024
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2	**18**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**%**	**100**	**Rp 1.173.161.000**
2	18	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	Rp 15.000.000
2	18	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	Rp 319.600.000
2	18	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	Rp 838.561.000
2	**18**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**%**	**100**	**Rp 171.140.000**
2	18	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	24	Rp 151.250.000
2	18	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	8	Rp 4.900.000
2	18	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	23	Rp 14.990.000
2	18	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	-
2	**18**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**Cakupan Potensi Unggulan dan Peluang Investasi di Kabupaten Sukoharjo** **Cakupan Regulasi yang mendukung iklim investasi**	**%** **%**	**100** **100**	**Rp 68.000.000**
2	**18**	**02**	**2.01**		**Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Regulasi Kebijakan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal bagi Investor**	**%**	**100**	**Rp 20.000.000**
2	18	02	2.01	0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/ Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Dokumen	2	Rp 20.000.000
2	**18**	**02**	**2.02**		**Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**	**Cakupan Data Potensi dan Peluang Investasi Penanaman Modal Tahunan dan Jangka Menangah Kabupaten Sukoharjo**	**%**	**100**	**Rp 48.000.000**
2	18	02	2.02	0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	0	-

Kode					Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Pagu Dana
								2024	2024
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2	18	02	2.02	0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Dokumen	1	Rp 48.000.000
2	**18**	**03**			**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**Prosentase Kepeminatan Investasi di Kabupaten Sukoharjo**	**%**	**100**	**Rp 85.000.000**
2	**18**	**03**	**2.01**		**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Strategi Promosi Investasi dan tersampaikannya potensi dan peluang Investasi Kabupaten Sukoharjo kepada Masyarakat dan Dunia Usaha**	**%**	**100**	**Rp 85.000.000**
2	18	03	2.01	0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/ Kota	Dokumen	1	Rp 75.000.000
2	18	03	2.01	0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	Dokumen	1	Rp 10.000.000
2	**18**	**04**			**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**Cakupan Pelayanan Penaman Modal yang Optimal** **Prosentase Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha yang mendukung Investasi** **Prosentase Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Penanaman Modal**	**%** **%** **%**	**100** **100** **100**	**Rp 240.000.000**
2	**18**	**04**	**2.01**		**Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**	**Cakupan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan Berusaha dan Non Berusaha** **Cakupan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha** **Cakupan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Berusaha**	**%**	**100**	**Rp 240.000.000**
2	18	04	2.01	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	2	Rp 130.000.000
2	18	04	2.01	0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Pelaku Usaha	100	Rp 25.000.000
2	18	04	2.01	0007	Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Pelaku Ussaha	4	Rp 10.000.000

Kode					Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Pagu Dana
								2024	2024
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2	18	04	2.01	0008	Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	Kegiatan Usaha	24	Rp 75.000.000
2	**18**	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**Persentase jumlah pertumbuhan realisasi penanaman modal**	**%**	**100**	**Rp 383.400.000**
2	**18**	**05**	**2.01**		**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**	**%**	**100**	**Rp 383.400.000**
2	18	05	2.01	0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Kegiatan Usaha	150	Rp 40.000.000
2	18	05	2.01	0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Pelaku Usaha	416	Rp 262.250.000
2	18	05	2.01	0006	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	Kegiatan Usaha	320	Rp 81.500.000
2	**18**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**Persentase Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal**	**%**	**100**	**Rp 40.000.000**
2	**18**	**06**	**2.01**		**Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Informasi Data Penanaman Modal**	**%**	**100**	**Rp 40.000.000**
2	18	06	2.01	0002	Pengelolaan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Dokumen	1	Rp 40.000.000

BAB V
P E N U T U P

Dokumen Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 ini nantinya merupakan pelaksanaan Rencana Strategis DPMPTSP Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026. Program dan kegiatan yang direncanakan merupakan prioritas dalam rangka mencapai visi dan misi Kabupaten Sukoharjo dan mendukung tercapainya visi dan misi pembangunan daerah jangka menengah. Rencana Kerja DPMPTSP Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi DPMPTSP Kabupaten Sukoharjo dalam menjalankan tugas dan fungsinya dan sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2024.

Untuk itu terkait dengan kaidah pelaksanan, DPMPTSP Kabupaten Sukoharjo sebagai *leading sector* yang diberikan kewenangan merencanakan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar senantiasa bekerja bersama sesuai dengan *standar operasional prosedur* untuk menghasilkan formulasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah yang dapat diimplementasikan dalam bentuk target kinerja dan realisasi sesuai kaidah dan aturan yang berlaku.

Rencana tindak lanjut dari dokumen Rencana Kerja DPMPTSP Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 adalah adanya masukan, informasi, saran dan data untuk melakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya sehingga menghasilkan dokumen Rencana Kerja DPMPTSP Kabupaten Sukoharjo yang prospektif, realistis dan akuntabel serta transparan dalam rangka mewujudkan pembangunan berasaskan keadilan untuk kesejahteraan rakyat.

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

ETIK SURYANI

BKPSDM

KABUPATEN SUKOHARJO

2024

RENCANA KERJA

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

JL. JEND. SUDIRMAN NO 199 SUKOHARJO
KODE POS 57521

(0271) 593068

bkpsd@sukoharjokab.go.id

SALINAN

BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 35 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024;

b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 273 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan Kepala Daerah setelah Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 192) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 262);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tatacara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 200);
13. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);
14. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 298);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

Renja Perangkat Daerah disusun dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Pasal 3

Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

BAB II

SISTEMATIKA DAN FUNGSI RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 4

Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. bab I : pendahuluan;
b. bab II : hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu;
c. bab III : tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
d. bab IV : rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan
e. bab V : penutup.

Pasal 5

Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah.

BAB II

PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 6

(1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah.
(2) Kepala Perangkat Daerah melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi Renja Perangkat Daerah kepada Bupati melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.

BAB III

PERANGKAT DAERAH PENYUSUN

Pasal 7

(1) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun oleh Perangkat Daerah sebagai berikut:
    a. Sekretariat Daerah;
    b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
    c. Inspektorat Daerah;
    d. Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan;
    e. Dinas Kesehatan;
    f. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang;
    g. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
    h. Satuan Polisi Pamong Praja;
    i. Dinas Sosial;

j. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak;
k. Dinas Pangan;
l. Dinas Lingkungan Hidup;
m. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil;
n. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa;
o. Dinas Perhubungan;
p. Dinas Komunikasi Dan Informatika;
q. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
r. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;
s. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
t. Dinas Pertanian dan Perikanan;
u. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah dan Perdagangan;
v. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
w. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
x. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
y. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
z. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
aa. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
bb. Kecamatan Weru;
cc. Kecamatan Bulu;
dd. Kecamatan Tawangsari;
ee. Kecamatan Sukoharjo;
ff. Kecamatan Nguter;
gg. Kecamatan Bendosari;
hh. Kecamatan Polokarto;
ii. Kecamatan Mojolaban;
jj. Kecamatan Grogol;
kk. Kecamatan Baki;
ll. Kecamatan Gatak; dan
mm. Kecamatan Kartasura.

(2) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf mm tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 10 Agustus 2023

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 10 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd.

WIDODO

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2023 NOMOR 35

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ditandatangani secara elektronik oleh :

TEGUH PRAMONO, SH, MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19710429 199803 1 003

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 35 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN
SUKOHARJO TAHUN 2024

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2024

Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 terdiri atas:

1. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Inspektorat Daerah;
4. Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan;
5. Dinas Kesehatan;
6. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang;
7. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
8. Satuan Polisi Pamong Praja;
9. Dinas Sosial;
10. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak;
11. Dinas Pangan;
12. Dinas Lingkungan Hidup;
13. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil;
14. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa;
15. Dinas Perhubungan;
16. Dinas Komunikasi Dan Informatika;
17. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
18. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;
19. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
20. Dinas Pertanian dan Perikanan;
21. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah dan Perdagangan;
22. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
23. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
24. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
25. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
26. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
27. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
28. Kecamatan Weru;
29. Kecamatan Bulu;

30. Kecamatan Tawangsari;
31. Kecamatan Sukoharjo;
32. Kecamatan Nguter;
33. Kecamatan Bendosari;
34. Kecamatan Polokarto;
35. Kecamatan Mojolaban;
36. Kecamatan Grogol;
37. Kecamatan Baki;
38. Kecamatan Gatak; dan
39. Kecamatan Kartasura.

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat dan hidayahNya, sehingga Rencana Kerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2024 dapat tersusun.

Rencana Kerja tahun 2024 disusun sebagai implementasi dari Tahapan Kegiatan Tahunan dari Rencana Strategis yang disusun selama lima tahunan , dimana rencana kerja tahunan 2024 ini disusun dalam Upaya memberkan arahan/pedoman untuk rencana tindak kegiatan Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo selama tahun 2023

Mudah-mudahan, penyajian Renstra Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2023 ini menjadi sarana acuan kegiatan selama satu tahun, serta dapat memberikan umpan balik bagi upaya perbaikan kinerja pada masa yang akan datang, agar dapat melaksasnakan kinerja secara lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya..

Kami telah berupaya membuat laporan ini dengan sebaik-baiknya, namun demikian disadari dalam penyusunan Rencana kerja tahun 2024 ini tentunya masih didapatkan kekurangan, untuk itu mohon kritik dan saran guna perbaikan pada masa yang akan datang.

Sukoharjo, Agustus 2023

KEPALA

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KABUPATEN SUKOHARJO

PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO BKPSDM

SUMINI, SE, MM

Pembina

NIP. 19681024 199403 2 010

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN..... I-1

1.1. Latar Belakang..... 1-1

1.2. Landasan Hukum..... I-3

1.3. Maksud dan Tujuan..... I-5

1.4. Sistematika Penulisan..... 1-6

BAB II HASIL EVALUASI PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022 ..... II-1

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Pd Tahun 2022 Dan Capaian Renstra Pd..... II-1

2.2 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah... II-7

2.3 Telaah Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah..... II-1

BAB III TUJUAN DAN SASARAN..... III-1

3.1 Tujuan Perangkat Daerah..... III-1

2.2 Sasaran Perangkat Daerah..... III-2

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH..... III-1

BAB V PENUTUP..... IV-1

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010, Rencana kerja SKPD yang selanjutnya disingkat Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Renja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan tahapan sebagai berikut:

a. Persiapan penyusunan renja skpd;

b. Penyusunan rancangan renja skpd;

c. Pelaksanaan forum skpd; dan

d. Penetapan Renja SKPD.

Persiapan penyusunan Renja SKPD sebagaimana dimaksud dalam huruf a, meliputi :

1. Penyusunan rancangan keputusan kepala daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja SKPD;

2. Orientasi mengenai Renja SKPD;

3. Penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja SKPD; dan

4. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah. Penyusunan rancangan

Renja SKPD sebagaimana dimaksud dalam huruf b, disusun :

1. Mengacu pada rancangan awal RKPD;

2. Mengacu pada Renstra SKPD;

3. Mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya;

4. Untuk memecahkan masalah yang dihadapi; dan

5. Berdasarkan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Penyusunan rancangan Renja SKPD terdiri atas:

1. Perumusan rancangan Renja SKPD, yang terdiri atas :

   Persiapan penyusunan rancangan Renja SKPD;

   Pengolahan data dan informasi;

   Analisis gambaran pelayanan SKPD provinsi;

   Mereview hasil evaluasi Renja SKPD tahun lalu berdasarkan Renstra SKPD;

   Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD ;

   Penelaahan rancangan awal RKPD;

   Perumusan tujuan dan sasaran;

   Penelaahan usulan masyarakat; dan Perumusan kegiatan prioritas.

2. Penyajian rancangan Renja SKPD, yang terdiri atas :

   Pendahuluan;

   Evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu;

   Tujuan, sasaran, program dan kegiatan;

   Indikator kinerja dan kelompok sasaran yang menggambarkan pencapaian Renstra SKPD;

   Dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif;

   Sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan; dan

   Penutup.

Pelaksanaan forum SKPD yang dikoordinasikan oleh Bapelbangda membahas rancangan Renja RKPD . Pembahasan rancangan Renja RKPD mencakup:

1. Penyelarasan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD provinsi berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang kabupaten/kota;
2. Penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD provinsi;
3. Penyelarasan program dan kegiatan antar SKPD provinsi dalam rangka sinergi pelaksanaan dan optimalisasi

pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD provinsi; dan

4. Penyesuaian pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing SKPD, sesuai dengan surat edaran kepala daerah.

Penetapan Renja SKPD sebagaimana dalam poin d meliputi tahapan :

1. Kepala SKPD menyempurnakan rancangan Renja SKPD dengan berpedoman pada RKPD yang telah ditetapkan.
2. Rancangan Renja SKPD yang telah disempurnakan disampaikan kepada kepala Bapelbanda untuk diverifikasi.
3. Verifikasi memastikan rancangan Renja SKPD provinsi telah sesuai dengan RKPD provinsi.
4. Kepala Bapperida menyampaikan rancangan Renja SKPD provinsi yang telah sesuai dengan RKPD provinsi kepada Gubernur untuk memperoleh pengesahan.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja SKPD adalah :

1. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86– 92);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran 5 Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ;
14. Keputusan Presiden Nomor 159 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah ;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa

Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);

17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa 6 Tengah (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 65);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
21. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 83 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah.
22. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 104 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanan Teknis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah.
23. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 72 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Fasilitasi Pengembangan Manajemen Kepegawaian di Provinsi Jawa Tengah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia kabupaten Sukoharjo 2024 adalah untuk menjamin keterkaitan dan konsistensian antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dalam jangka waktu satu tahun. Sedangkan tujuan dari penyusunan Renja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah untuk menjabarkan Renstra Badan Kepegawaian Dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 - 2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten sukoharjo Tahun 2021-2026 dengan mempertimbangkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun lalu. Dengan cara demikian diharapkan akan dapat dijaga keterkaitan antara perencanaan penganggaran dan penyusunan anggaran sehingga terwujud Anggaran Berbasis Kinerja.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BKPP KABUPATEN JAWA TENGAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo Tahun Lalu dan Capaian Renstra BKPP Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021- 2026

2.1. Analisa Kinerja Pelayanan BKPSDM Kabupaten Sukoharjo

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan fungsi BKPSDM Kabupaten Sukoharjo

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Renja BKPP Kabupaten Sukoharjo

3.2. Program dan Kegiatan

BAB II
HASIL EVALUASI PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2022 dan Capaian Renstra PD

Hasil evaluasi pelaksanaan renja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten sukoharjo capaian tahun berjalan (2022) dapat dilihat pada **Tabel 2.1.**

Pada realisasi program/kegiatan terdapat beberapa target yang terpenuhi bahkan melampaui, namun terdapat juga beberapa target yang tidak tercapai. Faktor tidak tercapai disebabkan beberpa hal, antara lain disebabkan oleh regulasi maupun kondisional, menyangkut tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo sebagai unsur pelayanan di bidang kepegawaian. Secara keseluruhan dinamika penuangan capaian merupakan kebutuhan didalam menjalankan tugas dan fungsi pelayanan di bidang kepegawaian untuk tercapaianya pelayanan yang lebih baik.

Kebijakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor penyebab tersebut di atas adalah untuk penyusunan Renstra ke depan akan dilakukan perbaikan penyusunan target indikator program/kegiatan dan pengawalan capaiannya yang dimulai dari proses perencanaan, penganggaran sampai evaluasinya.

Tabel 2.1
Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo
Tahun Anggaran 2022

No	Kode Rekening	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Renja PD Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang dievaluasi				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran DPA PD 2022 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran DPA 2022 yang dievaluasi (%)	
1		3	4	4.A	5				10=6+7+8+9		11=10/5*100	
					K	Rp (Ribu) Renja	K	Rp (Ribu) DPA	K	Rp (Ribu)	K	%
1		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (BKPP)				36.250.306.000		43.491.058.064	0	40.949.718.902		94,16%
	5,03	Kepegawaian				28.958.036.000		37.302.358.164	0	35.415.341.788	99,0 %	94,94%

	5.03.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Prosentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan PD**		**100 %**	**25.690.946.000**	**100 %**	**33.356.754.164**	**99,9 %**	**32.879.694.771**	**99,9 %**	**98,57%**
	5.03.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun**		**100 %**	**117.382.000**	**100 %**	**63.350.000**	**100 %**	**55.585.200**	**100,0%**	**87,74%**
	5.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	dok	4	60.809.000	4	31.345.000	4	28.586.000	100,0%	91,20 %
	5.03.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD yang dilakukan	kali	4	7.238.000	4	5.005.000	4	3.387.600	100,0%	67,68 %
	5.03.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan	Jumlah Koordinasi Penyusunan	kali	4	7.535.000	4	7.000.000	4	5.567.500	100,0%	79,54 %

		RKA-SKPD	Dokumen perubahan RKA-SKPD yang dilakukan									
	5.03.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Koordinasi Penyusunan DPA-SKPD yang dilakukan	kali	4	3.300.000	4	5.000.000	4	4.815.000	100,0%	96,30 %
	5.03.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Koordinasi Penyusunan perubahan DPA-SKPD yang dilakukan	kali	4	3.300.000	4	7.000.000	4	5.289.600	100,0%	75,57 %
	5.03.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	dok	3	35.200.000	3	8.000.000	3	7.939.500	100,0%	99,24 %
	5.03.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah laporan pelaksanaan administra**		**100 %**	**24.849.871.000**	100%	**32.367.629.600**	**100 %**	**31.976.249.375**	**100,0%**	**98,79%**

			si keuangan PD										
	5.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang diberikan gaji dan tunjangan	orang	452	24.488.423.000	784	32.000.000.000	784	31.609.813.875	100,0%	98,78%
	5.03.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen Keuangan SKPD yang dilakukan pengujian/verifikasi	dok	4	350.448.000	4	357.630.000	4	357.630.000	100,0%	100,00%
	5.03.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang disusun	laporan	1	5.500.000	1	4.999.800	1	4.422.000	100,0%	88,44%
	5.03.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan / Semesteran SKPD SKPD yang disusun	laporan	18	5.500.000	18	4.999.800	18	4.383.500	100,0%	87,67%

	5.03.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah laporan pelaksanaan adm umum PD**		**100 %**	**423.575.000**	**100 %**	**394.206.500**	**100 %**	**381.224.181**	**99,4 %**	**96,71%**
	5.03.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jenis Peralatan rumah tangga kantor yang disediakan	Jenis	16	30.500.000	16	26.143.500	16	22.394.500	100,0%	85,66 %
	5.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis bahan logistik kantor yang disediakan	Jenis	2	120.700.000	2	116.168.000	2	110.921.000	100,0%	95,48 %
	5.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang yang dicetak/digandakan	Jenis	2	66.000.000	2	75.000.000	2	74.254.000	100,0%	99,01 %
	5.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jenis Bacaan Dinas yang disediakan	Jenis	2	8.239.000	2	6.920.000	2	6.427.900	100,0%	92,89 %
	5.03.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jenis makanan dan minuman tamu yang disediakan	Jenis	2	2.195.000	2	6.975.000	2	4.455.000	100,0%	63,87 %
	5.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah koordinasi dan konsultasi	kali	141	195.941.000	141	163.000.000	136	162.771.781	96,5 %	99,86 %

			yang dilaksanaka n									
	5.03.01. 2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			**100 %**	**98.375.000**	**100%**	**230.200.000**	**0**	**211.610.000**	**100, 0%**	**91,9 2%**
	5.03.01.2. 07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jenis Peralatan dan Mesin Lainnya yang dibeli	jenis	3	98.375.000	3	230.200.000	3	211.610.000	100, 0%	91,92 %
	5.03.01. 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah laporan penyediaa n jasa penunjang urusan PD**		**100 %**	**73.668.000**	**100 %**	**71.929.064**	**100 %**	**45.391.708**	**100, 0%**	**63,1 1%**
	5.03.01.2. 08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase pemenuhan jasa surat menyurat	pers en	100	6.595.000	100	7.175.000	100	6.965.000	100, 0%	97,07 %
	5.03.01.2. 08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jenis Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang dibayarkan	jenis	1	6.600.000	1	9.000.000	1	2.023.000	100, 0%	22,48 %
	5.03.01.2. 08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jenis jasa pelayanan umum	jenis	2	60.473.000	2	55.754.064	2	36.403.708	100, 0%	65,29 %

			kantor yang dibayarkan										
	5.03.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemda**		**100 %**	**226.450.000**	**100 %**	**229.439.000**	**100 %**	**209.634.307**	**100,0%**	**91,37%**
	5.03.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jenis unit kendaraan dinas/jabtan yang dilakukan pemeliharaan	jenis	2	185.988.000	2	189.999.000	2	172.024.307	100,0%	90,54 %
	5.03.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jenis Peralatan dan Mesin Lainnya yang dilakukan pemeliharaan	jenis	3	40.462.000	4	39.440.000	4	37.610.000	100,0%	95,36 %
	5.03.02	**Program Kepegawaian Daerah**			**87 %**	**3.267.090.000**	87%	**3.945.604.000**	**98,1 %0**	**2.535.647.017**	**98,1 %**	**64,27%**
	5.03.02.2.01	**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi**	**Jumlah dokumen pelaksana**		**100 %**	**1.654.570.000**	**87%**	**1.625.951.900**	**100 %**	**808.641.128**	**100,0%**	**49,73%**

		Kepegawaian ASN	**an Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**										
	5.03.02.2.01.02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jenis dokumen pengadaan ASN yang disusun	dok	1	100.570.000	1	100.067.900	1	78.476.352	100,0%	78,42%
	5.03.02.2.01.03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1) Rata-rata pelaksanaan ujian seleksi CPNS Daerah dan PPPK	keg	1	1.142.000.000	1	910.489.000	1	172.450.200	100,0%	18,94%
			2) Jumlah SK Calon ASN yg diterbitkan	SK	827		783		783		100,0%	
	5.03.02.2.01.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah SK Pemberhentian dan SK Pensiun PNS yang diterbitkan	SK	500	210.000.000	589	221.145.000	589	188.960.826	100,0%	85,45%
	5.03.02.2.01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1) Jumlah peserta bimtek e-	orang	827	157.000.000	926	288.150.000	926	263.675.750	100,0%	91,51%

			personal dan tata naskah ASN										
			2) Jumlah data file pegawai/tata naskah pegawai ASN	taka h	7529		7557		7557		100, 0%		
			3) Jenis data Informasi dan Sistem Informasi kepegawaian yang disusun	jenis	3		3		3		100, 0%		
			Jenis data										
	5.03.02.2.01.11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jenis data kepegawaian yang dikelola	jenis	4	30.000.000	4	60.150.000	4	59.484.500	100, 0%	98,89 %	
	5.03.02.2.01.12	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah peserta rakor evaluasi KGB	orang	131	15.000.000	131	45.950.000	131	45.593.500	100, 0%	99,22 %	
	5.03.02.2.02	**Mutasi dan Promosi ASN**			**100 %**	**1.009.970.000**	**100 %**	**1.315.121.600**	**96,6 %**	**756.147.828**	**96,6 %**	**57,50%**	
	5.03.02.2.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jenis kegiatan mutasi ASN yang dikelola	jenis	3	792.970.000	3	953.243.100	3	485.453.928	100, 0%	50,93 %	

	5.03.02.2.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	1) Jumlah SK Kenaikan Pangkat yg diterbitkan	SK	700	170.000.000	1041	230.346.000	1041	188.355.400	100,0%	81,77%
			2) Jumlah Rakor KP yg dilaksanakan	kali	2		2		2		100,0%	
			3) Jumlah Sosialisasi Kenaikan Jabatan Fungsional tertentu yg dilaksanaan	kali	2		2		2		100,0%	
	5.03.02.2.02.03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Calon ASN yang diangkat menjadi ASN	orang	827	47.000.000	500	131.532.500	414	82.338.500	82,80%	62,60%
	5.03.02.2.04	**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	**Jumlah laporan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur yang disusun**		**100%**	**602.550.000**	**100%**	**1.004.530.500**	**97,8%**	**970.858.061**	**97,8%**	**96,65%**

	5.03.02.2.04.02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah OPD yang dilakukan pembinaan proses e-kinerja	OPD	7	210.250.000	40	358.000.000	40	349.700.500	100,0%	97,68%
	5.03.02.2.04.04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jenis pemberian penghargaan bagi pegawai	jenis	7	132.000.000	7	142.460.000	6	135.301.900	85,7%	94,98%
	5.03.02.2.04.05	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Jumlah plagam penghargaan satya lencana yang diterbitkan	plagam	100	14.300.000	100	27.070.500	97	18.281.400	97,0%	67,53%
	5.03.02.2.04.07	Pembinaan Disiplin ASN	1) Jumlah OPD yang dilakukan pemantauan.	OPD	40	170.000.000	40	327.000.000	40	322.815.084	100,0%	98,72%
			2) Jenis sistem aplikasi e-persensi yang dikembangkan	jenis	1		1		1		100,0%	
			3) Jumlah peserta rakor dan	orang	131		131		131		100,0%	

			sosialisasi peraturan kepegawaian									
	5.03.02.2.04.08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Prosentase proses penyelesaian pelanggaran disiplin ASN	persen	100	55.000.000	100	100.000.000	100	95.739.077	100,0%	95,74%
	5.03.02.2.04.09	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Prosentase proses pelayanan izin cerai	persen	100	21.000.000	100	50.000.000	100	49.020.100	100,0%	98,04%
	5,04	**Pendidikan dan Pelatihan**				**7.292.270.000**	0	**6.188.699.900**		**5.534.377.114**	**98,9%**	**89,43%**
	5.04.02	**Program Pengembangan Sumber Daya Manusia**	**Prosentase Pengembangan Kompetensi Teknis serta Kompetensi Manajerial dan Fungsional yang terlaksana**		**91,82%**	**7.292.270.000**	**91,82%**	**6.188.699.900**	**98,0%**	**5.534.377.114**	**98,9%**	**89,43%**
	5.04.02.2.01	**Pengembangan Kompetensi Teknis**			**87%**	**1.111.000.000**	**87%**	**1.892.271.250**	**100%**	**1.868.905.824**	**100,0%**	**98,77%**

	5.04.02.2.01.03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang mengikuti Pelatihan Teknis	orang	255	1.090.000.000	417	1.861.588.250	417	1.842.602.052	100,0%	98,98%
	5.04.02.2.01.04	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah laporan diklat teknis yg disusun	laporan	4	21.000.000	4	30.683.000	4	26.303.772	100,0%	85,73%
	5.04.02.2.02	**Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi**				**6.181.270.000**	**0**	**4.296.428.650**	**0**	**3.665.471.290**	**97,8%**	**85,31%**

		Manajerial dan Fungsional											
	5.04.02.2.02.01	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan,Sertajabatan Fungsional	1) Jenis surat ijin yang diterbitkan	jenis	4	160.270.000	4	518.492.600	4	499.204.414	100,0%	96,28%
			2) Jumlah peserta Ujian Dinas dan UKPPI yang dikirim	orang	75		75		76		101,3%	
			3) Jumlah dokumen Analisis Kebutuhan Diklat yang disusun	dok	1		1		1		100,0%	
			4) Jumlah peserta yang mengikuti Uji Kompetensi	orang	10		12		10		83,3%	
	5.04.02.2.02.07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jenis diklat yang diselenggarakan	jenis	5	6.000.000.000	5	3.746.043.050	5	3.136.938.659	100,0%	83,74%

	5.04.02.2.02.08	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1) Jumlah laporan diklat kepemimpinan dan fungsional yg disusun	lapo ran	5	21.000.000	5	31.893.000	5	29.328.217	100,0%	91,96 %
			2) Jumlah laporan Assesment yang dilakukan	lapo ran	1		1		1		100,0%	

2.2 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSIPELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Analisa isu - isu strategis di identifikasikan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam menjalankan pemerintahan ada berbagai permasalahan, sebagai berikut :

a. Sekretariat
   1. Masih kurangnya sumber daya yang proporsional dan keterampilan pegawai di Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaKabupaten Sukoharjo sehingga kegiatan administrasi perkantoran belum terlaksana secara maksimal;
   2. Belum terlaksananya Standart Pelayanan Minimal dalam proses 13gpelayanan administrasi kepegawaian.
b. Bidang Pembinaan dan Informasi Data Aparatur
   1. Masih kurangnya pemahaman pegawai terhadap peraturan perundang-undangan dan peraturan kepegawaian.
c. Bidang Mutasi
   1. Kurangnya personil PNS yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti Seleksi Terbuka JPT sehingga pelaksanaan seleksi terbuka kurang optimal;
   2. Kenaikan jabatan fungsional maupun pengangkatan dalam jabatan fungsional masih belum memenuhi persyaratan sesuai peraturan;
   3. Belum terpenuhinya kebutuhan ASN karena formasi yang ditetapkan oleh KemenpanRB tidak sebanding dengan formasi yang diusulkan.
d. Bidang Pendidikan dan Pelatihan
   1. Masih kurangnya pengetahuan PNS akan pentingnya pengembangan kompetensi melalui Diklat Teknis, sehingga peserta yang mengikuti diklat teknis kadang belum sesuai sasaran;
   2. Anggaran yang terbatas sehingga pengadaan dan penyelenggaraan Diklat Manajerial dan Fungsional belum bisa mengakomodasi seluruh PNS di Kabupaten Sukoharjo.

2.3 TELAAH VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan yang ada di Kabupaten Sukoharjo, agar lebih terarah dan berhasil guna

serta berdaya guna, maka pemerintah bersama-sama masyarakat Kabupaten Sukoharjo telah menetapkan visi, misi dan strategi dalam mencapai tujuannya yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 - 2026

a. VISI

Visi pembangunan Kabupaten Sukoharjo tahun 2021-2026 merupakan implementasi dari visi Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo periode tahun 2021-2026 yaitu:

"Terwujudnya Sukoharjo Yang Lebih Makmur"

Visi pembangunan daerah Kabupaten Sukoharjo tahun 2021-2026 merupakan keberlanjutan dari cita-cita pembangunan Kabupaten Sukoharjo tahun 2016-2020.

Mengandung arti bahwa dalam lima tahun ke depan masyarakat Kabupaten Sukoharjo akan tercipta kondisi sejahtera, terpenuhi seluruh kebutuhan hidupnya baik sosial maupun ekonomi, secara lahir maupun batin. MAKMUR juga merupakan motto atau slogan Kabupaten Sukoharjo yaitu Maju, Aman, Konstitusional,Mantap, Unggul, dan Rapi.

b. MISI

Dalam rangka upaya menuju pencapaian visi pembangunan daerah Kabupaten Sukoharjo tahun 2021-2026, ditetapkan misi pembangunan daerah yang dapat teroptimalisasi dengan Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusiayaitu:Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Percepatan Reformasi Birokrasi.

Misi ini bertujuan untuk semakin mempercepat implementasi reformasi birokrasi secara optimal, yang pada periode sebelumnya telah terwujud dalam membaiknya tata kelola pemerintahan Kabupaten Sukoharjo.

Reformasi birokrasi yang diharapkan kedepan adalah pada tiga dimensi utama yaitu pelayanan publik yang semakin dinamis, efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan, kapasitas kelembagaan, serta manajemen

sumber daya manusia aparatur yang semakin baik. Pelayanan publik yang dinamis diwujudkan dengan membangun open government dan pemerintahan yang responsif. Open government dilakukan dengan perkuatan keterbukaan informasi publik, transparansi, partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta meningkatkan komunikasi dan serapan aspirasi publik.

Sedangkan pemerintahan yang responsif tercermin dalam respon pemerintah kabupaten dalam menghadapi aduan dan persoalan riil masyarakat, dengan cepat dan tepat, baik dalam bentuk kebijakan maupun kegiatan. Pelayanan publik yang dinamis, terbuka, dan responsif diikat dalam satu tagline pelayanan yang mudah, murah, cepat, serta didukung inovasi dan teknologi informasi.

Efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan tergambarkan dalam proses perencanaan, penganggaran, serta evaluasi pembangunan yang akuntabel. Manajemen pembangunan Kabupaten Sukoharjo kedepan tidak hanya fokus pada kerja tetapi kinerja, dan berorientasi pada hasil (outcome). Untuk itu perlu juga dilakukan pengawasan dalam prosesnya, sejak dimulainya proses perencanaan, implementasi hingga evaluasi.

Agar dapat melaksanakan manajemen pemerintahan yang baik dan bersih maka dibutuhkan kelembagaan/organisasi yang tepat dan didukung dengan penataan sistem manajemen sumberdaya manusia aparatur yang baik. Manajemen sumber daya manusia aparatur yang baik terejawantahkan dalam bentuk integritas aparatur yang dibangun melalui kompetensi dan etika menuju integritas pribadi dan institusi, mendorong birokrasi yang inovatif, dan dijamin dalam quality assurance aparatur.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN

3.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH

3.1.1 Tujuan Perangkat Daerah

Dalam rangka mencapai visi dan misi Kabupaten Sukoharjo 2021 - 2026 oleh Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo, maka visi dan misi tersebut dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa rumusan tujuan strategis (strategic goals) organisasi. Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan,sehingga dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi misinya yang diformulasikan kedalam tujuan strategis dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Dalam perumusan tujuan strategis juga memungkinkan organisasi untuk mengukur sejauh mana visi misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih telah dicapai. Untuk itu, setiap tujuan strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja (performance indicator) yang terukur sehingga apa yang menjadi cita-cita Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2021-2026 dapat terwujud.

Selanjutnya dari uraian misi di maksud, maka ditetapkan tujuan yang akan dicapai, sebagai berikut :

Visi : Terwujudnya Sukoharjo yang Lebih Makmur

Misi 1 : **Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui percepatan Reformasi Birokrasi**

Tujuan : **Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel**

Misi 2 : **Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas**

Misi 3 : **Memperkuat Perekonomian Rakyat yang berdaya saing tinggi**

Misi 4 : **Memperkuat Pembangunan Infrastruktur berwawasan lingkungan**

Misi 5 : **Meningkatkan Kualitas Kehidupan Sosial dan Keagamaan**

3.1.2 Sasaran Perangkat Daerah

Dalam perumusan sasaran strategis juga memungkinkan organisasi untuk mengukur sejauh mana visi misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih telah dicapai. Untuk itu, setiap sasaran strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja (performance indicator) yang terukur sehingga apa yang menjadi cita-cita Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2021 – 2026 dapat terwujud.

Selanjutnya dari uraian misi di maksud, maka ditetapkan sasaran yang akan dicapai sebagai berikut :

Visi	:	**Terwujudnya Sukoharjo yang Lebih Makmur**
Misi 1	:	**Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik melalui**

		percepatan Reformasi Birokrasi
Tujuan	**:**	**Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Responsif dan Akuntabel**
Sasaran	**:**	**Meningkatnya kualitas aparatur dan pelayanan publik**
	:	**Meningkatnya kualitas manajemen ASN**
Misi 2	**:**	**Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas**
Misi 3	**:**	**Memperkuat Perekonomian Rakyat yang berdaya saing tinggi**
Misi 4	**:**	**Memperkuat Pembangunan Infrastruktur berwawasan lingkungan**
Misi 5	**:**	**Meningkatkan Kualitas Kehidupan Sosial dan Keagamaan**

Tabel 3.1Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA TUJUAN DAN SASARAN TAHUN KE-				
				2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel		**Indeks Sistem Merit**	**Indeks**	**Kategori I (Buruk)**	**Kategori II (Kurang)**	**Kategori II (Kurang)**	**Kategori III (Baik)**	**Kategori III (Baik)**
	1. Meningkatnya Kualitas Aparatur dan Pelayanan Publik	1) Nilai AKIP	**Angka**	**68 (baik)**	**70 (baik)**	**72 (baik)**	**74 (sgt baik)**	**76 (sgt baik)**
	2. Meningkatnya Kualitas Manajemen ASN	1) Persentase Administrasi Kepegawaian Daerah	**%**	**87**	**89**	**90**	**93**	**93**
		2) Persentase Pengembangan ASN	**%**	**82,75**	**84,5**	**86**	**87**	**88,5**

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

RKPD dan Renja merupakan pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Rencana Kerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan yang substansinya sebagai penjabaran visi, misi dan arah pembangunan daerah kabupaten Sukoharjo yang merupakan satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Program dan kegiatan yang dirancang Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten sukoharjo tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA
   (1) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   (2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   (3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
   (4) Administrasi Umum Perangkat Daerah
   (5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   (6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   (7) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2. PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
   (1) Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
   (2) Mutasi dan Promosi ASN
   (3) Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
3. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
   (1) Pengembangan Kompetensi Teknis
   (2) Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional

Rumusan Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakna oleh Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo sesuai dengan RKPD Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 4.1

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2023 Dan Perkiraan Maju Tahun 2024

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPJMD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPJPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rancana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah		Target	Pagu Indikatif	
5					URUSAN PEMERINTAHAN UMUM														
5	08				KEPEGAWAIAN						13,210,873,000							14,142,326,700	
5	08	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	%		%	100 %	6,891,851,400						100 %	9,673,267,400	
5	08	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi keuangan Perangkat Daerah	%		%	100 %	61,810,000						100 %	62,786,000	
5	08	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	50,000,000	Kab. Sukoharjo, Bendosari, Jombor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing	Perangkat Daerah BKPP	4 Dokumen	50,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	08	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	5,010,000	Kab. Sukoharjo, Bendosari, Jombor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing	Perangkat Daerah BKPP	1 Dokumen	5,005,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	08	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2 Dokumen	5,000,000	Kab. Sukoharjo, Bendosari, Jombor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing	Perangkat Daerah BKPP	2 Dokumen	5,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	08	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	7,000,000	Kab. Sukoharjo, Bendosari, Jombor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing	Perangkat Daerah BKPP	1 Dokumen	7,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	08	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				2 Dokumen	7,000,000	Kab. Sukoharjo, Bendosari, Jombor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing	Perangkat Daerah BKPP	2 Dokumen	7,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	08	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	7,000,000	Kab. Sukoharjo, Bendosari, Jombor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing	Perangkat Daerah BKPP	3 Laporan	8,768,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	08	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%		%	100 %	7,734,000,000						100 %	7,886,210,000	
5	08	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				145 Orang/bulan	7,367,070,000	Kab. Sukoharjo, Bendosari, Jombor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing	Perangkat Daerah BKPP	145 Orang/bulan	7,568,581,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode					Uraian/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Proyeksi Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	03	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				4 Dokumen	357,630,000	Kab. Sukoharjo, Bendosari, Jombor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing	Laporan Keuangan dari OPD BKPP	4 Dokumen	357,630,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	4,999,800	Kab. Sukoharjo, Bendosari, Jombor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing	Laporan Keuangan dari OPD BKPP	1 Laporan	4,999,800	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	4,999,800	Kab. Sukoharjo, Bendosari, Jombor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing	Laporan Keuangan dari OPD BKPP	18 Laporan	4,999,800	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	**03**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%		%	100 %	**220,100,000**							100 %	**270,847,000**	
5	03	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				143 Orang	220,100,000	Kab. Sukoharjo, Bendosari, Jombor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing	ASN di wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo	143 Orang	220,100,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	**03**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%	100 %	**475,918,000**							100 %	**473,332,000**	
5	03	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				16 Paket	33,550,000	Kab. Sukoharjo, Bendosari, Jombor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing	Perangkat Daerah BKPP	16 Paket	33,550,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	132,770,000	Kab. Sukoharjo, Bendosari, Jombor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing	Perangkat Daerah BKPP	2 Paket	132,770,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	80,000,000	Kab. Sukoharjo, Bendosari, Jombor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing	Perangkat Daerah BKPP	2 Paket	80,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	9,063,000	Kab. Sukoharjo, Bendosari, Jombor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing	Perangkat Daerah BKPP	2 Dokumen	9,063,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	4,995,000	Kab. Sukoharjo, Bendosari, Jombor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing	Perangkat Daerah BKPP	1 Laporan	2,414,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode					Uraian/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Proktirasi Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Proktirasi Mulai Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	03	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				141 Laporan	215,535,000	Kab. Sukoharjo, Bendosari, Jombor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing	Perangkat Daerah BKPP	141 Laporan	215,535,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	%		%	100 %	81,834,000						100 %	81,834,000	
5	03	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	7,254,000	Kab. Sukoharjo, Bendosari, Jombor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing	Perangkat Daerah BKPP	2 Laporan	7,254,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	7,260,000	Kab. Sukoharjo, Bendosari, Jombor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing	Perangkat Daerah BKPP	1 Laporan	7,260,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	64,520,000	Kab. Sukoharjo, Bendosari, Jombor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing	Perangkat Daerah BKPP	1 Laporan	64,520,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	348,885,000						100 %	348,885,000	
5	03	01	2.09	01	Pemeliharaan Jalan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				29 Unit	204,587,000	Kab. Sukoharjo, Bendosari, Jombor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing	Perangkat Daerah BKPP	29 Unit	204,587,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				21 Unit	44,508,000	Kab. Sukoharjo, Bendosari, Jombor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing	Perangkat Daerah BKPP	21 Unit	44,508,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	05	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Prosentase jabatan yang telah sesuai syarat jabatan Prosentase pemenuhan formasi usulan ASN Prosentase penanganan kasus kepegawaian Prosentase penyelesaian administrasi kepegawaian	% % % %		% % % %	65 % 98 % 85 % 100 %	4,944,224,000						65 % 98 % 85 % 100 %	4,488,830,160	

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Proiksi Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Proiksi Akhir Renstra Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
															Nasional	Daerah				
5	02	02	2.01			Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah dokumen pelaksanaan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	dok		dok	3 dok	1,670,885,900						3 dok	1,775,701,800	
5	05	02	2.01	02		Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN				1 Dokumen	82,400,000	Kab. Sukoharjo, Bendosari, Jombor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing 1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing	ASN yang ada di wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo	1 Dokumen	82,400,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	02	2.01	03		Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK				3 Dokumen	1,038,023,900	Kab. Sukoharjo, Bendosari, Jombor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing	ASN yang ada di wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo	3 Dokumen	1,142,839,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	02	2.01	06		Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian				1 Dokumen	210,000,000	Kab. Sukoharjo, Bendosari, Jombor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing	ASN yang ada di wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo	1 Dokumen	210,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	02	2.01	10		Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian				3 Dokumen	215,905,000	Kab. Sukoharjo, Bendosari, Jombor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing	ASN yang ada di wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo	3 Dokumen	215,905,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	02	2.01	11		Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian				4 Dokumen	75,557,000	Kab. Sukoharjo, Bendosari, Jombor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing	ASN yang ada di wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo	4 Dokumen	75,557,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	02	2.01	12		Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Laporan	45,000,000	Kab. Sukoharjo, Bendosari, Jombor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing	ASN yang ada di wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo	1 Laporan	45,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	02	2.02			Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah kegiatan mutasi dan promosi ASN dilakukan	keg		keg	2 keg	1,573,594,100						2 keg	1,573,594,100	
5	03	02	2.02	01		Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah				71 Dokumen	1,224,603,100	Kab. Sukoharjo, Bendosari, Jombor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing	ASN di wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo	71 Dokumen	1,224,603,100	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPD Tahun 2021	Proiksi Capaian Target RPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	03	02	2.02	02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				700 Dokumen	275.421.000	Kab. Sukoharjo, Bendosari, Jombor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing	ASN di wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo	700 Dokumen	275.421.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	02	2.02	03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN				144 Dokumen	73.570.000	Kab. Sukoharjo, Bendosari, Jombor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing	ASN di wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo	144 Dokumen	73.570.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	02	2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah laporan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur yang disusun	lap		lap	1 lap	1,119,744,000						1 lap	1,119,744,000	
5	03	02	2.04	02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				1 Dokumen	284.800.000	Kab. Sukoharjo, Bendosari, Jombor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing	ASN di wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo	1 Dokumen	284.800.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	02	2.04	04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan				2700 Orang	238.394.000	Kab. Sukoharjo, Bendosari, Jombor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing	ASN di wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo	2700 Orang	238.394.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	02	2.04	05	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa				150 Orang	27.070.000	Kab. Sukoharjo, Bendosari, Jombor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing	ASN di wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo	150 Orang	27.070.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	02	2.04	07	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan				131 Orang	419.480.000	Kab. Sukoharjo, Bendosari, Jombor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing	ASN di wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo	131 Orang	419.480.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	02	2.04	08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN				1 Laporan	100.000.000	Kab. Sukoharjo, Bendosari, Jombor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing	ASN di wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo	1 Laporan	100.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	02	2.04	09	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani				8 Dokumen	50.000.000	Kab. Sukoharjo, Bendosari, Jombor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing	ASN di wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo	8 Dokumen	50.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	04				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN						5,000,000,000							5,000,000,000	
5	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Presentase Pengembangan Kompetensi Teknis serta Kompetensi Manajerial dan Fungsional yang terlaksana	%		%	92 %	5,000,000,000						92 %	5,000,000,000	
5	04	02	2.01		Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase ASN yang memiliki kualifikasi kompetensi Teknis	%		%	89 %	1,030,000,000						89 %	1,000,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Proyeksi Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Proyeksi Mulai Rancana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	04	02	2.01	03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi				280 Orang	1.808.625.000	Kab. Sukoharjo, Bendosari, Jombor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing	ASN di wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo	280 Orang	1.808.625.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	04	02	2.01	04	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum				4 Laporan	30.683.000	Kab. Sukoharjo, Bendosari, Jombor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing	ASN di wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo	4 Laporan	30.683.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	04	02	2.02		**Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**	Jenis kompetensi kelembagaan pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional yang diklasifikasikan	jns		jns	8 jns	4.050.385.000						8 jns	4.050.385.000	
5	04	02	2.02	01	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan,Serta Jabatan Fungsional yang Diusun				4 Dokumen	518.492.600	Kab. Sukoharjo, Bendosari, Jombor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing	ASN di wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo	4 Dokumen	518.492.600	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Proyeksi Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rancana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah		Target	Pagu Indikatif	
5	04	02	2.02	07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan				5 Jenis	3,500,000,000	Kab. Sukoharjo, Bendosari, Jombor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing	ASN di wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo	5 Jenis	3,500,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	04	02	2.02	08	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama				6 Laporan	31,893,000	Kab. Sukoharjo, Bendosari, Jombor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing	ASN di wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo	6 Laporan	31,893,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
										TOTAL	19,140,708,289							20,602,828,369	

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 merupakan dokumen rencana pembangunan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Rencana Kerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo tahun 2024 disusun berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian Pendikan Dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026 dan mengacu pada RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) tahun 2024. Renja (Rencana Kerja) Badan Kepegawaian Dan Pengembanga Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo memuat sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan selama kurun waktu 1 (satu) tahun.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan sifatnya masih indikatif sehingga harus disesuaikan dengan pembiayaannya/anggaran yang tersedia. Seluruh elemen pelaksana Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo wajib menerapkan prinsip efisiensi, efektifitas, transparansi, akuntabilitas serta partisipasi dalam melaksanakan kegiatannya untuk pencapaian sasaran program-program yang tertuang dalam Rencana Kerja ini. Pelaksanaan semua kegiatan, baik dalam kerangka regulasi maupun dalam kerangka anggaran, mensyaratkan pentingnya koordinasi dan sinkronisasi antar kegiatan, baik di antara kegiatan dalam satu program maupun

kegiatan antar program, dalam satu bidang dan lintas bidang, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi serta tanggung jawab masing-masing, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku Dengan tersusunnya Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo tahun 2024 ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam penyusunan RKA maupun DPA untuk tahun yang akan datang.







RENJA DINAS PERHUBUNGAN 2024

https://dishub.sukoharjokab.go.id/ (0271) 593037 dishub@sukoharjokab.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas segenap ilmu dan karunia-Nya, akhirnya Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 dapat diselesaikan.

Rencana Kerja ini disusun sebagai tindak lanjut atas amanat perundang-undangan yang berlaku, sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dipandang perlu adanya Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo dengan harapan dapat menjadi pedoman kerja dalam mewujudkan sarana dan prasarana perhubungan yang aman, nyaman, tertib dan lancar sehingga dapat menghasilkan sebuah sistem transportasi yang handal dan mensejahterakan masyarakat dalam kurun waktu satu tahun anggaran di Wilayah Kabupaten Sukoharjo.

Seiring dengan perkembangan jaman, sarana dan prasarana perhubungan sudah menjadi kebutuhan pokok guna menggerakan produktifitas dan perekonomian masyarakat. Oleh karenanya sejalan dengan Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo diharapkan mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mendukung Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukoharjo Periode 2021-2026.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) ini dipergunakan sebagai pedoman dalam pelakasanaan kebijakan umum Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 sehingga target yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukoharjo periode 2021-2026 dapat tercapai dengan baik.

Selanjutnya bahwa penyusunan Rencana Kerja (Renja) ini masih jauh dari kata sempurna mengingat masih banyak kendala dan keterbatasan dalam mewujudkannya. Oleh karena itu, atas

semua kekurangan dalam penyusunan naskah ini diharapkan adanya tanggapan, saran dan umpan balik yang membangun sehingga segala kekurangan dalam penyusunan naskah rencana kerja pada tahun berikutnya dapat lebih baik dan terarah.

Sebagai kata akhir, kami menyampaikan banyak terima kasih kepada segenap jajaran Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo dan semua pihak terkait yang telah membantu sepenuhnya dalam penyusunan Rencana Kerja ini, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan berkah , anugerah dan hidayah-Nya.

Semoga Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Aamiin

Sukoharjo, 2023

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SUKOHARJO

Drs. FX. TONI SRI BUNTORO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19661110 199503 1 004

DAFTAR ISI

Kata Pengantar				1
Daftar Isi				3
Bab I		Pendahuluan	.....	4
	1.1	Latar Belakang	.....	4
	1.2	Landasan Hukum	.....	5
	1.3	Maksud dan Tujuan	.....	6
	1.4	Sistematika Penulisan	.....	7
Bab II		Hasil Evaluasi Rencana Kerja PD Tahun Lalu	.....	9
	2.1	Kondisi Umum Perangkat Daerah	.....	9
	2.2	Evaluasi Capaian Program Tahun Lalu (2022)	.....	25
	2.3	Evaluasi Capaian Kinerja Pelaksanaan Tahun Lalu (2022)	.....	31
	2.4	Evaluasi Capaian Program Kegiatan Sub Kegiatan Tahun Berjalan (2023)	.....	49
	2.5	Identifikasi Masalah dan Tantangan Perangkat Daerah Tahun 2024	.....	49
Bab III		Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah		51
	3.1	Kajian Renstra dan Prioritas Program Renstra Perangkat Daerah	.....	51
	3.2	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	.....	60
	3.3	Hasil Analisis dan Kondisi Masalah	.....	66
Bab IV		Dana Indikatif dan Sumber Dana		60
	4.1	Kajian Terhadap Pagu/ Plafon Identifikasi Tahun Rencana	.....	60
Bab V		Penutup	.....	72
LAMPIRAN			.....	73

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Periode 2021-2026 Kabupaten Sukoharjo merupakan pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024. Sesuai dengan Visi Kabupaten Sukoharjo, sektor transportasi yang berperan sebagai urat nadi kehidupan ekonomi, sosial, politik dan pertahanan keamanan yang mutlak perlu dikembangkan untuk melancarkan pergerakan manusia, barang, jasa dan informasi, sehingga akan memperlancar kegiatan perekonomian dan pengembangan sumber daya alam yang pada akhirnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, pembangunan sektor transportasi harus berlandaskan pada pemanfaatan potensi secara optimal, agar tercapai efektifitas dan efisiensi pelayanan.

Pengembangan sarana dan prasarana perhubungan di Kabupaten Sukoharjo merupakan solusi dalam mengantisipasi permasalahan transportasi yang muncul disebabkan adanya ketidakseimbangan antara peningkatan kendaraan dan penyebaran jumlah penduduk pada wilayah perkotaan serta dapat menurunkan indeks fatalitas setiap tahun yang telah ditetapkan pada Indikator Kinerja Utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukoharjo Periode 2021-2026.

Kondisi sarana dan prasarana perhubungan yang ada di Kabupaten Sukoharjo yang digunakan dalam rangka meningkatkan tata kelola transportasi masih belum dapat dikategorikan ideal. Hal ini dapat dilihat dari beberapa kondisi yang ada antara lain :

a. Kurang tercukupinya fasilitas perlengkapan keselamatan jalan seperti rambu-rambu, marka, dan guardril pada ruas jalan khususnya di daerah rawan kecelakaan sesuai kebutuhan yang telah direncanakan.

b. Kondisi fasilitas terminal, halte sebagai tempat pemberhentian dan pemberangkatan angkutan masih belum sesuai dengan standar minimal yang ditetapkan serta belum memenuhi target ketersediaan terminal yang telah ditargetkan pada RPJMD Kabupaten Sukoharjo;
c. Kepatuhan masyarakat (awak angkutan, penumpang dan pengguna jalan) terhadap rambu-rambu lalu lintas yang belum membudaya;
d. Sistem tata kelola traffic light yang perlu diintegrasikan lebih baik;
e. Tata kelola pelayanan trayek angkutan umum yang perlu ditingkatkan dan diratakan untuk meningkatkan konektifitas antar wilayah;dan
f. Kelaikan kendaraan angkutan yang perlu ditingkatkan.

1.2 Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Keuangan Negara;
3. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 2 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 adalah untuk memberikan pedoman kerja tahun 2024 bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo dan instansi terkait, sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Tahun 2021-2026 dan mengacu kepada RKPD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024.

Tujuan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 adalah :

a. Terwujudnya Visi dan Misi Kabupaten Sukoharjo;
b. Terwujudnya Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Perhubungan dalam rangka mendukung ketercapaian Visi dan Misi Kabupaten Sukoharjo;
c. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, pengganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan;

d. Terwujudnya pemanfaatan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan;
e. Terwujudnya pembangunan sarana dan prasarana yang lengkap dan inovatif;
f. Terwujudnya kondisi kelalulintasan yang aman dan kondusif;
g. Terwujudnya standar minimal pelayanan masyarakat yang baik di bidang perhubungan.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 yang mengimplementasikan perencanaan jangka menengah dan penganggaran tahunan, disusun dalam sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menjelaskan pengertian ringkas tentang Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubunga Kabupaten Sukoharjo, Keterkaitan antara Renja dan Dokumen Perangkat Daerah, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukoharjo.

1.2 Landasan Hukum

Memuat tantangan Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, Kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo.

1.3 Maksud dan Tujuan

Menjelaskan tentang maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PD TAHUN LALU

2.1 Kondisi Umum Perangkat Daerah

Memuat tentang kedudukan dan fungsi, struktur pejabat tugas dan fungsi, kualitas dan kuantitas aparatur, sarana dan prasarana Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo serta tantangan dan hambatan kinerja yang dihadapi guna peningkatan kerja.

2.2 Evaluasi Capaian Program Tahun Lalu (2022)

Menjelaskan evaluasi pelaksanaan program tahun lalu (tahun n-2)

2.3 Evaluasi Capaian Kinerja Tahun Lalu (2022)

Menjelaskan evaluasi pelaksanaan kinerja dan keuangan tahun lalu (tahun n-2)

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Kajian Renstra dan Prioritas Program Renstra Perangkat Daerah

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PD TAHUN LALU

2.1 Kondisi Umum Perangkat Daerah

2.1.1 Kedudukan dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta berdasarkan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 74 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo, Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo dipimpin oleh seorang Kepala Dinas memiliki Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut :

a. Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang perhubungan.

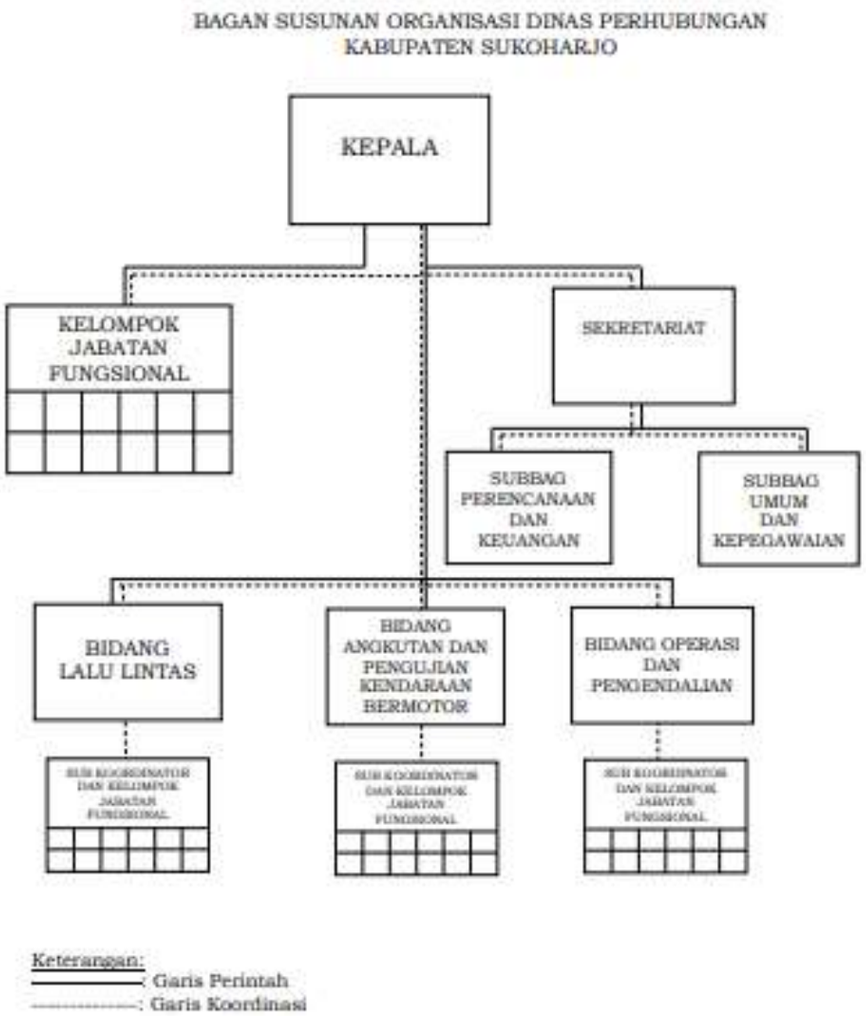
b. Dinas Perhubungan mempunyai fungsi sebagai berikut:

    1. perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan;
    2. pelaksanaan kebijakan di bidang perhubungan;
    3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perhubungan;
    4. pelaksanaan administrasi Dinas Perhubungan;
    5. pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD;
    6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.2. Struktur, Tugas dan Fungsi Pejabat Struktural

Berdasarkan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 74 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo, berikut struktur, tugas dan fungsi pejabat struktural adalah sebagai berikut:

a. Kepala Dinas (Eselon II)
b. Sekretaris Dinas (Eselon III), terdiri dari :
   - Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
   - Subbagian Umum dan Kepegawaian.
c. Bidang Lalu Lintas (Eselon III), terdiri dari :
   1. Sub Koordinator Manajemen Rekayasa Lalu Lintas;
   2. Sub Koordinator Perlengkapan Jalan; dan
   3. Sub Koordinator Perpakiran.
d. Bidang Operasi dan Pengendalian (Eselon III), terdiri dari :
   1. Sub Koordinator Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas;
   2. Sub Koordinator Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan; dan
   3. Sub Koordinator Perkeretaapian.
e. Bidang Angkutan dan Pengujian Kendaraan Bermotor (Eselon III), terdiri dari :
   1. Sub Koordinator Angkutan;
   2. Sub Koordinator Pengujian Kendaraan Bermotor; dan;
   3. Sub Koordinator Perbengkelan.



Gambar 01. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan

a. Sekretariat

Sekretariat dipimpin Sekretaris yang mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi keuangan, hukum, informasi, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian, pengelolaan dan penatausahaan aset, dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Perhubungan. Sekretariat mempunyai fungsi :

1. pengoordinasian penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Dinas Perhubungan;
2. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi keuangan, hukum, hubungan masyarakat, ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, dan pelayanan

administrasi di lingkungan Dinas Perhubungan;

3. pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas Perhubungan;
4. pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundangundangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Dinas Perhubungan;
5. pengoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
6. penyelenggaraan dan penatausahaan aset dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas Perhubungan;
7. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
8. pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas Perhubungan;
9. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.

Sekretariat terdiri atas 2 sub bagian, yaitu Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan

   Subbagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang perencanaan, data, informasi, dan program kerja, dan pengelolaan keuangan di lingkungan Dinas Perhubungan.

2. Subbagian Umum dan Kepegawaian

   Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, kearsipan, kepegawaian,

pengelolaan dan penatausahaan aset dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Perhubungan.

b. Bidang Lalu Lintas

Bidang Lalu Lintas dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi penetapan rencana induk jaringan lalu lintas angkutan jalan, penyediaan perlengkapan jalan dijalan, penerbitan izin penyelenggaraan, dan pembangunan fasilitas parkir, pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan, persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan. Bidang Lalu Lintas mempunyai fungsi :

1. perumusan program kegiatan di bidang lalu lintas;
2. pengoordinasian, pengembangan dan fasilitasi kegiatan di bidang lalu lintas;
3. penyelenggaraan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas (MRLL),
4. pengelolaan prasarana lalu lintas, pengelolaan dan penertiban parkir;
5. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang lalu lintas; dan
6. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya

Susunan Organisasi Bidang Lalu Lintas terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional yang terbagi atas 3 (tiga) Sub Koordinator, terdiri atas:

1. Sub Koordinator Manajemen Rekayasa Lalu Lintas;
2. Sub Koordinator Perlengkapan Jalan; dan
3. Sub Koordinator Perpakiran.

Sub Koordinator bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perhubungan melalui Kepala Bidang Lalu Lintas.

c. Bidang Angkutan dan Pengujian Kendaraan Bermotor

Bidang Angkutan dan Pengujian Kendaraan Bermotor dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam Daerah, penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan dalam satu Daerah, penetapan rencana umum jaringan trayek perdesaan yang menghubungkan satu Daerah, penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya berada dalam satu Daerah, penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek perdesaan dan perkotaan dalam satu Daerah, penerbitan izin penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam Daerah, penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antar kota dalam Daerah serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang wilayah pelayanannya dalam Daerah, pengelolaan terminal Tipe C, pengujian berkala kendaraan bermotor, sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor, pembinaan dan pengawasan bengkel dan karoseri, pengawasan dan pengelolaan fasilitas penyeberangan. Bidang Angkutan mempunyai fungsi :

1. perumusan program kegiatan di bidang angkutan dan pengujian kendaraan bermotor;
2. pengoordinasian, pengembangan dan fasilitasi kegiatan di bidang angkutan dan pengujian kendaraan bermotor;
3. pengendalian operasional angkutan, terminal, dan fasilitas pendukung angkutan jalan;
4. penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor;
5. penetapan rencana umum jaringan trayek dalam satu Daerah;
6. penetapan wilayah operasi angkutan orang dan barang dalam Daerah;

7. penyelenggaraan angkutan orang dan barang dalam satu Daerah;
8. pembinaan pemilik kendaraan bermotor wajib uji, kendaraan tidak bermotor, bengkel dan karoseri;
9. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang lalu lintas; dan
10. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Bidang Angkutan dan Pengujian Kendaraan Bermotor terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional yang terbagi atas 3 (tiga) Sub Koordinator terdiri atas:

1. Sub Koordinator Angkutan;

2. Sub Koordinator Pengujian Kendaraan Bermotor; dan;

3. Sub Koordinator Perbengkelan.

Sub Koordinator bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perhubungan melalui Kepala Bidang Angkutan dan Pengujian Kendaraan Bermotor.

d. Bidang Operasi dan Pengendalian

Bidang Operasi dan Pengendalian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi pengawasan dan penertiban lalu lintas, pembinaan dan penegakan hukum lalu lintas angkutan jalan sesuai dengan aturan yang berlaku, pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli lalu lintas, audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas angkutan jalan di jalan, penyelenggaraan perlintasan sebidang kereta api yang melintas di Daerah. Bidang Operasi dan Pengendalian mempunyai fungsi :

1. perumusan program kegiatan di bidang operasi dan pengendalian;
2. pengoordinasian, pengembangan dan fasilitasi kegiatan di bidang operasi dan pengendalian;
3. pengoordinasian kegiatan pengawalan dan

penertiban lalu lintas di bidang perhubungan;

4. penyelenggaraan audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas angkutan jalan di jalan;
5. pembinaan kepada pengguna jalan terkait pemahaman fungsi sarana dan prasarana jalan;
6. pengoordinasikan penyelenggaraan perlintasan sebidang kereta api yang melintas di Daerah;
7. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang operasi dan pengendalian; dan
8. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Bidang Operasi dan Pengendalian terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional yang terbagi atas 3 (tiga) Sub Koordinator, terdiri atas:

1. Sub Koordinator Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas;
2. Sub Koordinator Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan; dan
3. Sub Koordinator Perkeretaapian.

Sub Koordinator bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perhubungan melalui Kepala Bidang Operasi dan Pengendalian.

e. Kelompok Jabatan Fungsional

2.1.3 Kondisi Aparatur

Jumlah aparatur Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo per 30 Juni 2023 sejumlah 153 orang, dengan jumlah Pegawai Negeri Sipil sebanyak 42 orang, Calon Pegawai Negeri Sipil sebanyak 1 orang, Pegawai Honorer sebanyak 11 orang, dan Pegawai Jasa Tenaga Harian Lepas 99 orang. Bedasarkan Eselon terdiri dari Eselon II-b sebanyak 1 orang, Eselon III-a sebanyak 1 orang, Eselon III-b sebanyak 3 orang, Eselon IV-a sebanyak 2 orang, Fungsional Khusus sebanyak 13 orang, dan staf sebanyak 133 orang.

Berdasarkan tingkat pendidikan, Aparatur Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo dapat dikategorikan Strata 2 (S 2) sebanyak 9 orang, Strata 1 (S 1) sebanyak 41 orang, Diploma 3 (D III) sebanyak 18 orang, SMA sebanyak 73 orang, SMP sebanyak 4 orang, dan SD sebanyak 8 orang.

Hal tersebut dapat diketahui dari tabel sebagai berikut:

Gambar 1.

NO	POSISI KERJA	STATUS				JUMLAH
		PNS	CPNS	HONORER	THL	
1	2	3	4	5	6	7
1	Kepala Dinas	1				1
2	Sekretariat	12		2	18	32
3	Bidang Lalu Lintas	11		1	22	34
4	Bidang Operasional dan Pengendalian	5		8	38	51
5	Bidang Angkutan dan PKB	12	1		22	35

Gambar 2.

NO	UNIT	PENDIDIKAN							JUMLAH
		S2	S1	DIII	DII	SMA	SMP	SD	
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9
1	Pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo	9	41	17	1	73	4	8	153

2.1.4 Sarana dan Prasarana

Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo terletak di Jl. Rajawali No. 7 Kelurahan Joho Kecamatan Sukoharjo, bangunan terdiri dari 2 (dua) gedung utama yaitu 1 (satu) gedung induk administrasi perkantoran dan 1 (satu) gedung induk pelayanan pengujian kendaraan bermotor serta 2 (dua) gedung pendukung kegiatan operasional yaitu 1 (satu) gedung pertemuan yang tergabung dengan ruang CCTV/ ATCS (Automatic Traffic Control System) dan 1 (satu) gedung bengkel perbaikan rambu lalu lintas.

Sarana dan prasarana Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo secara umum dapat dikategorikan menjadi tiga kategori yaitu kendaraan bermotor, gedung dan bangunan serta alat pengujian kendaraan bermotor.

Kendaraan operasional terdiri dari 7 (tujuh) kendaraan roda empat yang digunakan untuk operasional patroli/ pengawalan, operasional sosialisasi keselamatan dan operasional pemeliharaan dan perbaikan traffic light/ penerangan jalan umum dan 2 (dua) kendaraan roda dua untuk operasional pengawalan dan pengamanan lalu lintas sedangkan kendaraan dinas jabatan terdiri dari 5 (lima) kendaraan roda empat dan 19 (sembilan belas) kendaraan roda dua sehingga secara total terdapat 31 (tiga puluh satu) kendaraan dinas. Hal tersebut dapat diketahui dari tabel berikut :

a. Kendaraan bermotor, terdiri dari :

Gambar 3.

NO	JENIS	MERK	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Mobil	Toyota Kijang Inova	1	Dinas Jabatan
2	Mobil	Toyota Rush	1	Dinas Jabatan
3	Mobil	Toyota Avanza	2	Dinas Jabatan
4	Mobil	Toyota Rush	2	Patroli
5	Mobil	Toyota Kijang Super	1	Operasional
6	Mobil	Isuzu Panther PU	1	Operasional
7	Mobil	Hino 300 Ps (Mobil Tangga)	2	Operasional
8	Mobil	Isuzu PS (Mobil Tangga)	1	Operasional
9	Spd Motor	Yamaha Scorpio	2	Patroli
10	Spd Motor	Honda Supra X	7	Dinas Jabatan
11	Spd Motor	Suzuki Thunder	4	Dinas Jabatan
12	Spd Motor	Yamaha Jupiter Z	6	Dinas Jabatan
13	Spd Motor	Yamaha Lexi S	2	Dinas Jabatan

b. Gedung dan Bangunan, terdiri dari :

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Luas Lantai (M2)	Letak/Lokasi Alamat	Harga (ribuan Rp)
1	2	3	4	5
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	536.37	Kantor Dinas Perhubungan Jl. Rajawali No. 7 Sukoharjo	462,450,000
2	Bangunan Gedung Kantor Permanen	277.59	Kantor Dinas Perhubungan Jl. Rajawali No. 7 Sukoharjo	726,714,750
3	Bangunan Gedung Kantor Permanen	80.5	Kantor Dinas Perhubungan Jl. Rajawali No. 7 Sukoharjo	190,403,500
4	Bangunan Gedung Kantor Permanen	24.5	Kantor Dinas Perhubungan Jl. Rajawali No. 7 Sukoharjo	85,915,500
5	Bangunan Gedung Kantor Permanen	28	Kantor Dinas Perhubungan Jl. Rajawali No. 7 Sukoharjo	73,499,000
6	Bangunan Gedung Kantor Permanen	37.5	Kantor Dinas Perhubungan Jl. Rajawali No. 7 Sukoharjo	187,805,000
7	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	55	Kantor Dinas Perhubungan Jl. Rajawali No. 7 Sukoharjo	94,215,000
8	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	24	Kantor Dinas Perhubungan Jl. Rajawali No. 7 Sukoharjo	23,600,000
9	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	91.85	Kantor Dinas Perhubungan Jl. Rajawali No. 7 Sukoharjo	104,734,500
10	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	320.87	Kantor Dinas Perhubungan Jl. Rajawali No. 7 Sukoharjo	203,319,650
11	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	400.77	Kantor Dinas Perhubungan Jl. Rajawali No. 7 Sukoharjo	158,814,000
12	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	64	Kantor Dinas Perhubungan Jl. Rajawali No. 7 Sukoharjo	85,658,750
13	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	7	Desa Kadilangu, Kecamatan Baki	26,257,000
14	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara Permanen	1082.2	Tawangsari Kabupaten Sukoharjo	3,297,105,000
15	Bangunan Gedung Terminal Lain-lain (dst)	735.07	Jl. Jend, Sudirman Sukoharjo	90,135,000

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Luas Lantai (M2)	Letak/Lokasi Alamat	Harga (ribuan Rp)
1	2	3	4	5
16	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen Bangunan	31.96	Dishubinfokom Sukoharjo	52,000,000
17	Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	50.45	Jl. Rajawali No 7 Sukoharjo	113,214,500
18	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	9	Pasar Ir Soekarno Kabupaten Sukoharjo	42,868,000
19	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	17.6	Kantor Dinas Perhubungan Jl. Rajawali No 7 Sukoharjo Jl Mojo-	60,500,000
20	Bangunan Fasilitas Umum lainnya	6.45	Jl Mojo-Sidan	30,443,333
21	Bangunan Fasilitas Umum lainnya	6.45	Jl Mojo-Sidan	30,443,333
22	Bangunan Fasilitas Umum lainnya	6.45	Jl Mojo-Sidan	30,443,333
23	Bangunan Fasilitas Umum lainnya	6.45	Jl Mojo-Sidan	30,443,333
24	Bangunan Fasilitas Umum lainnya	6.45	Jl Mojo-Sidan	30,443,333
25	Bangunan Fasilitas Umum lainnya	6.45	Jl Mojo-Sidan	30,443,333
26	Bangunan Fasilitas Umum lainnya	1903.7	Jl. Slamet Riyadi, Makamhaji, Kartasura	15,566,096,740
27	Bangunan gedung Tempat Kerja Lainnya	31.5	Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten SUkoharjo Jl.	77,060,250
28	Bangunan gedung Tempat Kerja Lainnya		Undepass Jl. Slamet Riyadi, Makamhaji, Kartasura	485,664,890
29	Bangunan gedung Tempat Kerja Lainnya		Undepass Jl. Slamet Riyadi, Makamhaji, Kartasura	10,000,000
TOTAL				22,400,691,028

(Sumber : Simda BMD Per 31 Desember Tahun 2022)

C. Peralatan dan Mesin

No	Jenis Barang	Jumlah Unit	Nilai (Rp)
1	2	3	4
1	Stasion Wagon	8	1.469.940.250
2	kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst)	1	24.500.000
3	Micro Bus (Penumpang 15 S/D 29 Orang)	1	119.600.000
4	Sepeda Motor	21	372.760.000
5	kendaraan bermotor beroda dua lainnya (dst)	2	9.840.000

6	kendaraan bermotor khusus lainnya (dst)	1	987.792.000
7	Gerobak Tarik	3	8.750.000
8	Perahu Penyeberangan	2	171.919.000
9	perkakas bengkel khusus lainnya (dst)	2	59.390.000
10	perkakas bengkel konstruksi logam lainnya (dst)	1	500.000.000
11	alat ukur universal lainnya (dst)	5	271.030.000
12	alat ukur lain - lain lainnya (dst)	2	33.000.000
13	alat timbangan/biara lainnya (dst)	1	99.000.000
14	Alat Penguji Kendaraan Bermotor	1	177.650.000
15	alat ukur lainnya lainnya (dst)	1	4.000.000
16	Penyemprot Mesin (Power Sprayer)	5	6.044.000
17	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inci)	8	8.050.000
18	Mesin Ketik Listrik	1	2.330.000
19	Lemari Kayu	15	34.733.375
20	Rak besi	4	63.712.000
21	Rak kayu	10	1.300.000
22	Filing Cabinet Besi	24	58.365.340
23	Brandkas	1	16.500.000
24	Peti Uang/Cash Box/Coin Box	4	5.520.000
25	Rotary Filling	1	29.800.000
26	CCTV - Camera Control Television System	1	8.800.000
27	Alat Detektor Uang Palsu	1	150.000
28	Alat Penghancur Kertas	3	6.557.500
29	Mesin Absensi	1	6.000.000
30	Alat Pengaman / Sinyal	2	5.900.000
31	Alat Kantor Lainnya	21	51.150.000
32	Meja Kerja Besi/Metal	1	17.000.000
33	Meja Kerja Kayu	97	94.093.750
34	Kursi Besi/Metal	4	8.400.000

35	Kursi Kayu	16	4.675.000
36	Sice	9	10.390.000
37	Bangku Panjang Besi/Metal	2	4.500.000
38	Meja Rapat	10	13.900.000
39	Meja Resepsionis	1	2.450.000
40	Meja Panjang	6	5.640.000
41	Meja 1/2 Biro	31	5.054.000
42	Kursi Fiber Glas/Plastik	2	2.260.000
43	Kursi Rapat	114	39.100.000
44	Kursi Tamu	31	13.375.000
45	Kursi Putar	26	21.303.000
46	Kursi Biasa	14	8.580.000
47	Bangku Tunggu	2	4.500.000
48	Kursi Lipat	34	2.235.000
49	Meja Komputer	9	3.076.500
50	Meubeleur lainnya	8	4.500.000
51	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	1	2.500.000
52	Mesin Pemotong Rumput	2	5.500.000
53	Lemari Es	1	2.430.000
54	A.C. Window	3	23.700.000
55	A.C. Split	19	103.515.000
56	Kipas Angin	14	8.555.000
57	Exhause Fan	2	4.000.000
58	Kompor Gas (Alat Dapur)	1	1.300.000
59	Rice Cooker (Alat Dapur)	5	3.871.500
60	Kitchen Set	1	11.000.000
61	Tabung Gas	1	630.000
62	Alat Dapur lainnya	2	2.700.000
63	Radio	1	1.500.000
64	Televisi	4	21.232.000
65	Amplifier	3	1.498.000
66	Loudspeaker	4	2.500.000

67	Sound System	2	29.175.000
68	Wireless	1	9.930.000
69	Megaphone	3	1.650.000
70	Microphone Floor Stand	1	475.000
71	Mic Conference	1	1.100.000
72	Unit Power Supply	16	13.811.000
73	Stabilisator	5	1.500.000
74	Camera Video	4	51.665.000
75	Camera film	1	2.250.000
76	Tangga Aluminium	1	1.350.000
77	Dispenser	3	8.030.000
78	Handy Cam	1	9.800.000
79	Karpet	1	420.000
80	Alat Rumah Tangga Lain-lain	62	89.057.500
81	Alat Pemadam/Portable	2	2.000.000
82	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	6.700.000
83	Meja Kerja Pejabat Eselon III	5	8.352.500
84	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	4	7.200.000
85	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	9	9.000.000
86	Meja Tamu Ruangan Tunggu Pejabat Eselon II	1	5.500.000
87	Meja Tamu Biasa	1	3.300.000
88	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	2.700.000
89	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	4	5.420.000
90	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	14	9.220.000
91	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon II	2	23.362.500
92	Buffet Kayu	1	13.712.500
93	Buffet Kaca	1	2.550.000
94	Audio Mixing Portable	3	9.875.000
95	Audio Catridge Recorder	1	1.565.000
96	Microphone/Wireless MIC	3	10.450.000
97	Camera Electronic	3	13.050.000

98	Layar Film/Projector	1	7.700.000
99	Kamera Udara	1	23.250.000
100	Telephone Mobile	2	6.000.000
101	Handy Talky (HT)	53	104.141.400
102	Facsimile	1	2.000.000
103	alat komunikasi telephone lainnya (dst)	1	1.200.000
104	alat komunikasi radio vhf lainnya (dst)	12	62.050.000
105	Local Area Network (LAN)	1	3.000.000
106	Komputer Jaringan lainnya	1	20.000.000
107	P.C Unit	24	256.456.225
108	Laptop	26	277.197.400
109	Note Book	1	4.620.000
110	Personal Komputer lainnya	1	83.655.000
111	Monitor	2	3.035.000
112	Printer (Peralatan Personal Komputer)	50	179.319.680
113	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	1	5.950.000
114	External/ Portable Hardisk	2	1.850.000
115	Peralatan Personal Komputer lainnya	4	8.022.000
116	Router	1	850.000
117	Modem	3	1.650.000
118	Peralatan Jaringan lainnya	1	24.890.000
119	Tenda	1	21.000.000
120	Traffic Light	352	5.727.720.275
121	rambu bersuar lainnya (dst)	9	1.191.858.600
122	Rambu Jalan	617	776.855.973
123	Rambu Papan Tambahan	52	245.728.917
124	Rambu Cermin	10	44.000.000
125	Rambu-rambu Larangan	5	6.457.200
126	Rambu-rambu Petunjuk/Penuntun	43	63.335.200
127	Guardrail	1	48.142.000
128	rambu tidak bersuar lainnya (dst)	1361	3.069.028.041
	Total		**17.700.681.126**

(Sumber : Simda BMD Per 31 Desember Tahun 2022)

2.1.5 Tantangan dan Hambatan dalam Peningkatan Kinerja

Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo dalam mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Sukoharjo yang tertuang pada RPJMD Kabupaten Sukoharjo Periode 2021-2026 dalam pelaksanaannya mendapati berbagai permasalahan dan keterbatasan. Permasalahan dan keterbatasan di bidang perhubungan pada Tahun 2024 antara lain :

1. Peningkatan mobilitas masyarakat yang massif pasca pandemic Covid-19;
2. Munculnya titik simpul kemacetan;
3. Meningkatnya area rawan kecelakaan (black spot);
4. Menurunnya jumlah trayek yang terlayani angkutan umum;
5. Kondisi kendaraan angkutan umum yang semakin tidak representatif;
6. Sistem pelayanan umum di sektor perhubungan yang belum terintegrasi secara maksimal;
7. Ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan yang belum maksimal sesuai kebutuhan;
8. Belum maksimalnya ketersediaan dan fungsi terminal;
9. Belum tersedianya ruang parkir dan bongkar muat bagi truk muatan besar yang terpusat dan terkendali;
10. Belum maksimalnya penerapan andalalin di daerah dengan adanya Sentral Bisnis terbangun yang belum menyusun analisa dampak lalu lintas;
11. Belum maksimalnya pengelolaan potensi pendapatan daerah;

2.2 Evaluasi Capaian Program Tahun Lalu (2022)

Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah pelaksana satu urusan wajib bukan pelayanan dasar yaitu urusan perhubungan pada Tahun Anggaran 2022 telah melaksanakan 4 program, 21 kegiatan dan 49 sub kegiatan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan capaiak kinerja keuangan yang terdiri dari 7 kegiatan dan 21 sub kegiatan, dengan rincian capaian kinerja keuangan sebagai berikut:
    1.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, capaian sebesar 94.33% dengan rincian capaian sub kegiatan sebagai berikut:
        a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, capaian 92.99%.
        b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, capaian 97.06%.
    1.2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, capain sebesar 96.35% dengan rincian capaian sub kegiatan sebagai berikut:
        a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, capaian 96.47%.
        b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, capaian 94.02%.
        c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, capaian 100%.
    1.3 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, capain sebesar 99.49% dengan rincian capaian Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya, capaian 99.49%.
    1.4 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah capain sebesar 92.43% dengan rincian capaian sub kegiatan sebagai berikut:
        a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, capaian 99.29%.
        b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, capaian 98.63%.
        c. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, capaian 98.98%.
        d. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor, capaian 87.10%.

e. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, capaian 97.36%.
f. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, capaian 97.01%
g. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, capaian 92.66%.

1.5 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah capain sebesar 96.67% dengan rincian capaian Sub Kegiatan Pengadaan Mebel, capaian 96.67%.

1.6 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah capain sebesar 85.48% dengan rincian capaian sub kegiatan sebagai berikut:
a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, capaian 100%.
b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, capaian 74.31%.
c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, capaian 97%.
d. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 89.31%.

1.7 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah capain sebesar 96.90% dengan rincian capaian sub kegiatan sebagai berikut:
a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, capaian 94.94%.
b. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, capaian sebesar 98.21%.
c. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, capaian 99.48%.

2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, terdiri dari 12 kegiatan dan 26 sub kegiatan, dengan rincian capaian kinerja keuangan sebagai berikut:

2.1 Kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota capain sebesar 95.54% dengan rincian capaian sub kegiatan sebagai berikut:

a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota, capaian 92.53%.
b. Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota, capaian sebesar 96.65%.
c. Sub Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota, capaian sebesar 98.08%.

2.2 Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota, capain sebesar 99.20% dengan rincian capaian sub kegiatan sebagai berikut:

a. Sub Kegiatan Pembangunan Prasaran Jalan di Jalan Kabupaten/Kota, capaian sebesar 98.31%.
b. Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota, capaian 99.38%.
c. Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan, capaian 91.69%.
d. Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan, capaian 96.35%.

2.3 Kegiatan Pengelolaan Terminal, capain sebesar 95.47% dengan capaian Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung), capaian sebesar 95.47%.

2.4 Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir, capain sebesar 99.02% dengan capaian Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parir Kewenangan Kabupaten/Kota, capaian sebesar 99.02%.

2.5 Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, capain sebesar 94.40% dengan rincian capaian sub kegiatan sebagai berikut:

a. Sub Kegiatan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, capaian sebesar 98.06%.
b. Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, capaian 94.02%.
c. Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, capaian 94.57%.
d. Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, capaian 99.20%.

2.6 Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, capain sebesar 96.69% dengan rincian capaian sub kegiatan sebagai berikut:
a. Sub Kegiatan Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, capaian sebesar 97.15%.
b. Sub Kegiatan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota, capaian 94.69%.

2.7 Kegiatan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota, capain sebesar 87.33% dengan capaian Sub Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin capaian sebesar 87.33%.

2.8 Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan, capaian sebesar 88.73%, dengan rincian capaian sub kegiatan sebagai berikut:
a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksanaan Uji Berkala Kendaraan Bermotor, capaian 88.40%.
b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota, capaian 95.63%.
c. Sub Kegiatan Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum, capaian 99.90%.

2.9 Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, capaian sebesar 98.58%, dengan rincian capaian sub kegiatan sebagai berikut:

a. Sub Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atai Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, capaian 98.68%.

b. Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota, capaian 96.86%.

2.10 Kegiatan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, capain sebesar 96.86% dengan capaian Sub Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota capaian sebesar 96.86%.

2.11 Kegiatan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota capain sebesar 94.12 yang terdiri dari :

a. Sub Kegiatan Perumusan Kebiajakn Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota, capaian sebesar 93.76%

b. Sub Kegiatan Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota, capaian sebesar 96.00%

2.12 Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, capaian sebesar 94.05%, dengan rincian sebagai berikut:

a. Sub Kegiatan Fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan izin penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, capaian 91.58%.

b. Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota, capaian 95.62%.

3 Program Pengelolaan Pelayaran, terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan, dengan rincian capaian kinerja keuangan Kegiatan Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Dalam Daerah Kabupaten/Kota sebesar 78.87% serta Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota capaian sebesar 78.87%.

4 Program Pengelolaan Perkretaapian, terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan, dengan rincian capaian Kegiatan Penerbitan Izin Pengadaan Atau Pembangunan Perkeretapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota sebesar 88.21% serta Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota capaian sebesar 88.21%.

2.3 Evaluasi Capaian Kinerja Pelaksanaan Tahun Lalu (2022)

2.3.1 Evaluasi Kinerja Sub Kegiatan

Berdasarkan evaluasi terhadap kinerja sub kegiatan, maka dapat disimpulkan bahwa 49 sub kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 yang merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 rata–rata capaian kinerja output sub kegiatan sebesar 100.97 %.

Disisi lain, secara umum pelaksanaan sub kegiatan yang menjadi penunjang utama pencapaian tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukoharjo Periode 2016-2021 telah dapat direalisasikan dengan baik dengan pencapaian rata-rata kinerja output sub kegiatan mencapai prosentase 101,35 %.

2.3.2 Evaluasi Kinerja Keuangan

Berdasarkan hasil pengukuran Kinerja Keuangan, capaian program kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 dapat tercapai 97.85 %. Bila dibandingkan dengan laporan tahun sebelumnya, maka capaian indikator kinerja keuangan tahun 2021 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya 96.45 % menjadi 97.85 % dikarenakan pencapaian program dan kegiatan yang baik.

Berdasarkan uraian di atas menunjukan bahwa secara umum seluruh kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2022 telah dilaksanakan secara efektif dan efisien dengan pencapaian kinerja keuangan sebesar 97.85 % guna mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi yang berpedoman pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukoharjo periode 2016-2021. Dalam hal pencapaian target kinerja sub kegiatan atau output sub kegiatan dapat terealisasi secara maksimal dengan presentase 101.60 %. Hal ini menunjukan adanya efisiensi anggaran yang baik dimana realisasi kinerja lebih baik dari pada realisasi keuangan.

Tabel 2.3.2.1

PERANGKAT DAERAH : DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SUKOHARJO

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/IKK	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	EVALUASI KINERJA
1	2	3	4	5	6	7
1	Program Penunjang Urusan		7.486.975.700	7.085.577.026	94,64	
	1 Kegiatan Perencanaan,		161.040.000	151.908.400	94,33	
	1.1 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen					
	- Input : Dana	Rupiah	108.020.000	100.448.000	92,99	Ketepatan dalam perencaaan Ketepatan penyerapan anggaran dimana dilaksanakan sesuai jadwal yang telah direncanakan Pertanggung jawaban administratif (spj) diselesaikan tepat waktu
	- Output : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	Dokumen	6	6	100,00	Pencapaian dengan kategori baik dan diharapkan capaian kinerja akan meningkat pada tahun selanjutnya
	- Outcome : Meningkatnya kualitas aparatur dan pelayanan publik	Nilai	66	72,96	110,55	Pencapaian maksimal dikarenakan seluruh unit kerja dapat saling bekerjasama dengan baik dalam mewujudkan tujuan perangkat daerah
	1.2 Sub Kegiatan Koordinasi dan					
	- Input : Dana	Rupiah	53.020.000	51.460.400	97,06	Ketepatan dalam perencaaan Ketepatan penyerapan anggaran dimana dilaksanakan sesuai jadwal yang telah direncanakan Pertanggung jawaban administratif (spj) diselesaikan tepat waktu
	- Output : Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja SKPD	Dokumen	5	5	100,00	Pencapaian dengan kategori baik dan diharapkan capaian kinerja akan meningkat pada tahun selanjutnya
	- Outcome : Meningkatnya kualitas aparatur dan pelayanan publik	Nilai	66	72,96	110,55	Pencapaian maksimal dikarenakan seluruh unit kerja dapat saling bekerjasama dengan baik dalam mewujudkan tujuan perangkat daerah
	2 Kegiatan Administrasi Keuangan		5.089.280.000	4.903.720.365	96,35	
	2.1 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan					
	- Input : Dana	Rupiah	4.711.954.000	4.545.784.465	96,47	Ketepatan dalam perencaaan Ketepatan penyerapan anggaran dimana dilaksanakan sesuai jadwal yang telah direncanakan Pertanggung jawaban administratif (spj) diselesaikan tepat waktu
	- Output : Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan	Orang	50	48	96,00	Pencapaian dengan kategori baik dan diharapkan dapat dipertahankan pada tahun selanjutnya
	- Outcome : Meningkatnya kualitas aparatur dan pelayanan publik	Nilai	66	72,96	110,55	Pencapaian maksimal dikarenakan seluruh unit kerja dapat saling bekerjasama dengan baik dalam mewujudkan tujuan perangkat daerah
	2.2 Sub Kegiatan Pelaksanaan					
	- Input : Dana	Rupiah	324.306.000	304.916.000	94,02	Ketepatan dalam perencaaan Ketepatan penyerapan anggaran dimana dilaksanakan sesuai jadwal yang telah direncanakan
	- Output : Jumlah dokumen SPJ yang telah diverifikasi dan	Dokumen	14	15	107,14	Pertanggung jawaban administratif (spj) diselesaikan tepat waktu
	- Outcome : Meningkatnya kualitas aparatur dan pelayanan publik	Nilai	66	72,96	110,55	Pencapaian dengan kategori baik dan diharapkan dapat dipertahankan pada tahun selanjutnya Pencapaian maksimal dikarenakan seluruh unit kerja dapat saling bekerjasama dengan baik dalam mewujudkan tujuan perangkat daerah
	2.3 Sub Kegiatan Koordinasi dan					
	- Input : Dana	Rupiah	53.020.000	53.019.900	100,00	Ketepatan dalam perencaaan Ketepatan penyerapan anggaran dimana dilaksanakan sesuai jadwal yang telah direncanakan Pertanggung jawaban administratif (spj) diselesaikan tepat waktu
	- Output : Jumlah dokumen pelaporan keuangan akhir tahun	Dokumen	1	1	100,00	Pencapaian dengan kategori baik dan diharapkan dapat dipertahankan pada tahun selanjutnya
	- Outcome : Meningkatnya kualitas aparatur dan pelayanan publik	Nilai	66	72,96	110,55	Pencapaian maksimal dikarenakan seluruh unit kerja dapat saling bekerjasama dengan baik dalam mewujudkan tujuan perangkat daerah

Tabel 2.3.2.1

PERANGKAT DAERAH : DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SUKOHARJO

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/IKK	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	EVALUASI KINERJA
1	2	3	4	5	6	7
1	Program Penunjang Urusan		7.486.975.700	7.085.577.026	94,64	
1	Kegiatan Perencanaan,		161.040.000	151.908.400	94,33	
3	Kegiatan Administrasi		157.555.000	156.747.000	99,49	
3.1	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian					
	- Input : Dana	Rupiah	157.555.000	156.747.000	99,49	Ketepatan dalam perencaaan
						Ketepatan penyerapan anggaran dimana dilaksanakan sesuai jadwal yang telah direncanakan
						Pertanggung jawaban administratif (spj) diselesaikan tepat waktu
	- Output : Jumlah pakaian dinas dan atribut yg diadakan	Stel	156	156	100,00	Pencapaian dengan kategori baik dan diharapkan dapat dipertahankan pada tahun selanjutnya
	- Outcome : Meningkatnya kualitas aparatur dan pelayanan publik	Nilai	66	72,96	110,55	Pencapaian maksimal dikarenakan seluruh unit kerja dapat saling bekerjasama dengan baik dalam mewujudkan tujuan perangkat daerah
4	Kegiatan Administrasi Umum		636.016.000	587.841.862	92,43	
4.1	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen					
	- Input : Dana	Rupiah	20.000.000	19.858.500	99,29	Ketepatan dalam perencaaan
						Ketepatan penyerapan anggaran dimana dilaksanakan sesuai jadwal yang telah direncanakan
						Pertanggung jawaban administratif (spj) diselesaikan tepat waktu
	- Output : Jumlah komponen listrik yang disediakan	Buah	20	20	100,00	Pencapaian dengan kategori baik dan diharapkan dapat dipertahankan pada tahun selanjutnya
	- Outcome : Meningkatnya kualitas aparatur dan pelayanan publik	Nilai	66	72,96	110,55	Pencapaian maksimal dikarenakan seluruh unit kerja dapat saling bekerjasama dengan baik dalam mewujudkan tujuan perangkat daerah
4.2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan					
	- Input : Dana	Rupiah	90.516.000	89.272.000	98,63	Ketepatan dalam perencaaan
						Ketepatan penyerapan anggaran dimana dilaksanakan sesuai jadwal yang telah direncanakan
						Pertanggung jawaban administratif (spj) diselesaikan tepat waktu
	- Output : Jumlah peralatan dan perlengkapan yang disediakan	Unit	6	6	100,00	Pencapaian dengan kategori baik dan diharapkan dapat dipertahankan pada tahun selanjutnya
	- Outcome : Meningkatnya kualitas aparatur dan pelayanan publik	Nilai	66	72,96	110,55	Pencapaian maksimal dikarenakan seluruh unit kerja dapat saling bekerjasama dengan baik dalam mewujudkan tujuan perangkat daerah
4.3	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan					
	- Input : Dana	Rupiah	40.000.000	39.590.000	98,98	Ketepatan dalam perencaaan
						Ketepatan penyerapan anggaran dimana dilaksanakan sesuai jadwal yang telah direncanakan
						Pertanggung jawaban administratif (spj) diselesaikan tepat waktu
	- Output : Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	Buah	20	20	100,00	Pencapaian dengan kategori baik dan diharapkan dapat dipertahankan pada tahun selanjutnya
	- Outcome : Meningkatnya kualitas aparatur dan pelayanan publik	Nilai	66	72,96	110,55	Pencapaian maksimal dikarenakan seluruh unit kerja dapat saling bekerjasama dengan baik dalam mewujudkan tujuan perangkat daerah

Tabel 2.3.2.1

PERANGKAT DAERAH : DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SUKOHARJO

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/IKK	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	EVALUASI KINERJA
1	2	3	4	5	6	7
1	Program Penunjang Urusan		7.486.975.700	7.085.577.026	94,64	
	4.4 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan					
	- Input : Dana	Rupiah	265.000.000	230.807.000	87,10	Ketepatan dalam perencaaan Ketepatan penyerapan anggaran dimana dilaksanakan sesuai jadwal yang telah direncanakan Pertanggung jawaban administratif (spj) diselesaikan tepat waktu
	- Output : Jumlah logistik kantor yang disediakan	Jenis	76	81	111,25	Pencapaian dengan kategori baik dan diharapkan capaian kinerja akan meningkat pada tahun selanjutnya
	- Outcome : Meningkatnya kualitas aparatur dan pelayanan publik	Nilai	66	72,96	110,55	Pencapaian maksimal dikarenakan seluruh unit kerja dapat saling bekerjasama dengan baik dalam mewujudkan tujuan perangkat daerah
	4.5 Sub Kegiatan Penyediaan Barang					
	- Input : Dana	Rupiah	80.000.000	77.890.800	97,36	Ketepatan penyerapan anggaran dimana dilaksanakan sesuai jadwal yang telah direncanakan
	- Output : Terwujudnya Penyediaan Barang Cetak Kantor	Lembar	1.500	1.500	100,00	Pencapaian dengan kategori baik dan diharapkan capaian kinerja akan meningkat pada tahun selanjutnya
	- Outcome : Meningkatnya kualitas aparatur dan pelayanan publik	Nilai	66	72,96	110,55	Pencapaian maksimal dikarenakan seluruh unit kerja dapat saling bekerjasama dengan baik dalam mewujudkan tujuan perangkat daerah
	4.6 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan					
	- Input : Dana	Rupiah	5.500.000	5.335.500	97,01	Ketepatan penyerapan anggaran dimana dilaksanakan sesuai jadwal yang telah direncanakan
	- Output : Jumlah bahan bacaan yang disediakan tiap bulan	Exemplar	90	90	100,00	Pencapaian dengan kategori baik dan diharapkan capaian kinerja akan meningkat pada tahun selanjutnya
	- Outcome : Meningkatnya kualitas aparatur dan pelayanan publik	Nilai	66	72,96	110,55	Pencapaian maksimal dikarenakan seluruh unit kerja dapat saling bekerjasama dengan baik dalam mewujudkan tujuan perangkat daerah
	4.7 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat					
	- Input : Dana	Rupiah	135.000.000	125.088.062	92,66	Ketepatan dalam perencaaan Ketepatan penyerapan anggaran dimana dilaksanakan sesuai jadwal yang telah direncanakan Pertanggung jawaban administratif (spj) diselesaikan tepat waktu
	- Output : Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang dikuti	Kali	32	32	100,00	Pencapaian dengan kategori baik dan diharapkan dapat dipertahankan pada tahun selanjutnya
	- Outcome : Meningkatnya kualitas aparatur dan pelayanan publik	Nilai	66	72,96	110,55	Pencapaian sarana prasarana terealisasi baik didukung dengan adanya kegiatan-kegiatan pengadaan ataupun pemeliharaan fasilitas kantor sehingga operasional kantor menjadi baik dan tanpa kendala
	5 Kegiatan Pengadaan Barang Milik		12.000.000	11.600.000	96,67	
	5.1 Sub Kegiatan Pengadaan Mebel					
	- Input : Dana	Rupiah	12.000.000	11.600.000	96,67	Ketepatan dalam perencaaan Ketepatan penyerapan anggaran dimana dilaksanakan sesuai jadwal yang telah direncanakan Pertanggung jawaban administratif (spj) diselesaikan tepat waktu
	- Output : Jumlah Mebel yang diadakan	Unit	15	15	100,00	Pencapaian dengan kategori baik dan diharapkan dapat dipertahankan pada tahun selanjutnya
	- Outcome : Meningkatnya kualitas aparatur dan pelayanan publik	Nilai	66	72,96	110,55	Pencapaian sarana prasarana terealisasi baik didukung dengan adanya kegiatan-kegiatan pengadaan ataupun pemeliharaan fasilitas kantor sehingga operasional kantor menjadi baik dan tanpa kendala

Tabel 2.3.2.1

PERANGKAT DAERAH : DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SUKOHARJO

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/IKK	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	EVALUASI KINERJA
1	2	3	4	5	6	7
1	Program Penunjang Urusan		7.486.975.700	7.085.577.026	94,64	
	6 Kegiatan Penyediaan Jasa		989.394.700	845.746.579	85,48	
	6.1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat					
	- Input : Dana	Rupiah	6.000.000	6.000.000	100,00	Ketepatan dalam perencaaan
						Ketepatan penyerapan anggaran dimana dilaksanakan sesuai jadwal yang telah direncanakan
						Pertanggung jawaban administratif (spj) diselesaikan tepat waktu
	- Output : Jumlah surat keluar dan masuk yang dikelola	Surat	3.010	3.010	100,00	Pencapaian dengan kategori baik dan diharapkan dapat dipertahankan pada tahun selanjutnya
	- Outcome : Meningkatnya kualitas aparatur dan pelayanan publik	Nilai	66	72,96	110,55	Pencapaian sarana prasarana terealisasi baik didukung dengan adanya kegiatan-kegiatan pengadaan ataupun pemeliharaan fasilitas kantor sehingga operasional kantor menjadi baik dan tanpa kendala
	6.2 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa					
	- Input : Dana	Rupiah	259.408.000	192.767.365	74,31	Lebih cermat kembali dalam penghitungan anggaran untuk belanja listrik dengan mempertimbangkan penggunaan listrik tahun lalu
						Tetap direncanakan anggaran untuk tahun selanjutnya dengan mempertimbangkan efektifitas penyerapan anggaran
						Pertanggung jawaban administratif (spj) diselesaikan tepat waktu
	- Output : Jumlah rekening jasa sumber daya yang dibayar tiap	Rekening	3	3	100,00	Pencapaian dengan kategori baik dan diharapkan dapat dipertahankan pada tahun selanjutnya
	- Outcome : Meningkatnya kualitas aparatur dan pelayanan publik	Nilai	66	72,96	110,55	Pencapaian sarana prasarana terealisasi baik didukung dengan adanya kegiatan-kegiatan pengadaan ataupun pemeliharaan fasilitas kantor sehingga operasional kantor menjadi baik dan tanpa kendala
	6.3 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa					
	- Input : Dana	Rupiah	5.000.000	4.850.000	97,00	Beberapa peralatan dan perlengkapan kantor masih dalam kondisi baik dan belum memerlukan perbaikan pada tahun 2021
						Tetap direncanakan anggaran untuk tahun selanjutnya dengan mempertimbangkan efektifitas penyerapan anggaran
						Pertanggung jawaban administratif (spj) diselesaikan tepat waktu
	- Output : Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang	Unit	5	5	100,00	Pencapaian dengan kategori baik dan diharapkan dapat dipertahankan pada tahun selanjutnya
	- Outcome : Meningkatnya kualitas aparatur dan pelayanan publik	Nilai	66	72,96	110,55	Pencapaian realasi peningkatan disiplin aparatur sangat baik hal ini didukung oleh tingkat kehadiran yang baik dari pegawai
	6.4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum					
	- Input : Dana	Rupiah	718.986.700	642.129.214	89,31	Ketepatan dalam perencaaan
						Ketepatan penyerapan anggaran dimana dilaksanakan sesuai jadwal yang telah direncanakan
						Pertanggung jawaban administratif (spj) diselesaikan tepat waktu
	- Output : Jumlah SDM Pelayanan Umum yang disediakan	Orang	12	12	100,00	Pencapaian dengan kategori baik dan diharapkan dapat dipertahankan pada tahun selanjutnya
	- Outcome : Meningkatnya kualitas aparatur dan pelayanan publik	Nilai	66	72,96	110,55	Pencapaian realasi peningkatan disiplin aparatur sangat baik hal ini didukung oleh tingkat kehadiran yang baik dari pegawai

Tabel 2.3.2.1

PERANGKAT DAERAH : DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SUKOHARJO

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/IKK	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	EVALUASI KINERJA
1	2	3	4	5	6	7
	7 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		441.690.000	428.012.820	96,90	
	7.1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					
	- Input : Dana	Rupiah	191.000.000	181.327.820	94,94	Ketepatan penyerapan anggaran dimana dilaksanakan sesuai jadwal yang telah direncanakan
	- Output : Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara/difasilitasi	Unit	33	33	100,00	Pencapaian dengan kategori baik dan diharapkan dapat dipertahankan pada tahun selanjutnya
	- Outcome : Meningkatnya kualitas aparatur dan pelayanan publik	Nilai	66	72,96	110,55	Pencapaian realiasi peningkatan disiplin aparatur sangat baik hal ini didukung oleh tingkat kehadiran yang baik dari pegawai
	7.2 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					
	- Input : Dana	Rupiah	212.690.000	208.882.000	98,21	Ketepatan dalam perencaaan Ketepatan penyerapan anggaran dimana dilaksanakan sesuai jadwal yang telah direncanakan Pertanggung jawaban administratif (spj) diselesaikan tepat waktu
	- Output : Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	4	100,00	Pencapaian dengan kategori baik dan diharapkan dapat dipertahankan pada tahun selanjutnya
	- Outcome : Meningkatnya kualitas aparatur dan pelayanan publik	Nilai	66	72,96	110,55	Terwujudnya peningkatan sistem pelaporan capaian kinerja yang baik didukung dengan adanya dokumen laporan kinerja yang akuntabel dan dapat dilaporkan tepat waktu

Tabel 2.3.2.1

PERANGKAT DAERAH : DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SUKOHARJO

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/IKK	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	EVALUASI KINERJA
1	2	3	4	5	6	7
	7.3 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					
	- Input : Dana	Rupiah	38.000.000	37.803.000	99,48	Ketepatan dalam perencaaan Ketepatan penyerapan anggaran dimana dilaksanakan sesuai jadwal yang telah direncanakan Pertanggung jawaban administratif (spj) diselesaikan tepat waktu
	- Output : Jumlah sarpras pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	16	16	100,00	Pencapaian dengan kategori baik dan diharapkan dapat dipertahankan pada tahun selanjutnya
	- Outcome : Meningkatnya kualitas aparatur dan pelayanan publik	Nilai	66	72,96	110,55	Terwujudnya peningkatan sistem pelaporan capaian kinerja yang baik didukung dengan adanya dokumen laporan kinerja yang akuntabel dan dapat dilaporkan tepat waktu
2	Program Penyelenggaraan Lalu		35.828.480.384	35.329.988.102	98,61	
	8 Kegiatan Penetapan Rencana		737.699.776	704.794.000	95,54	
	8.1 Sub Kegiatan Pelaksanaan					
	- Input : Dana	Rupiah	200.000.000	185.065.500	92,53	Ketepatan dalam perencaaan Ketepatan penyerapan anggaran dimana dilaksanakan sesuai jadwal yang telah direncanakan Pertanggung jawaban administratif (spj) diselesaikan tepat waktu
	- Output : Jumlah kajian manajemen lalu lintas yang diadakan	Dokumen	4	3	75,00	Pencapaian dengan kategori baik dan diharapkan dapat dipertahankan pada tahun selanjutnya
	- Outcome : Meningkatnya kinerja prasarana transportasi	Persen	26	15,39	140.81%	Terwujudnya perencanaan satuan kerja perangkat daerah yang baik didukung dengan lengkapnya dokumen perencanaan yang akuntabel dan mempunyai indikator yang jelas dalam mewujudkan target kinerjanya
	8.1 Sub Kegiatan Penetapan					
	- Input : Dana	Rupiah	536.399.776	518.453.500	96,65	Ketepatan dalam perencaaan Ketepatan penyerapan anggaran dimana dilaksanakan sesuai jadwal yang telah direncanakan Pertanggung jawaban administratif (spj) diselesaikan tepat waktu
	- Output : Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi keselamatan lalu lintas	Orang	8.590	14.090	164,03	Pencapaian dengan kategori baik dan diharapkan dapat dipertahankan pada tahun selanjutnya
	- Outcome : Meningkatnya kinerja prasarana transportasi	Persen	26	15,39	140.81%	Terwujudnya perencanaan satuan kerja perangkat daerah yang baik didukung dengan lengkapnya dokumen perencanaan yang akuntabel dan mempunyai indikator yang jelas dalam mewujudkan target kinerjanya

Tabel 2.3.2.1

PERANGKAT DAERAH : DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SUKOHARJO

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/IKK	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	EVALUASI KINERJA
1	2	3	4	5	6	7
	8.2 Sub Kegiatan Jumlah					
	- Input : Dana	Rupiah	1.300.000	1.275.000	98,08	Ketepatan dalam perencaaan Ketepatan penyerapan anggaran dimana dilaksanakan sesuai jadwal yang telah direncanakan Pertanggung jawaban administratif (spj) diselesaikan tepat waktu
	- Output : Terwujudnya database keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan	Kali	7	7	100,00	Pencapaian dengan kategori baik dan diharapkan dapat dipertahankan pada tahun selanjutnya
	- Outcome : Meningkatnya kinerja prasarana transportasi	Persen	26	15,39	140.81%	Terwujudnya perencanaan satuan kerja perangkat daerah yang baik didukung dengan lengkapnya dokumen perencanaan yang akuntabel dan mempunyai indikator yang jelas dalam mewujudkan target kinerjanya
	9 Kegiatan Penyediaan		30.823.197.992	30.575.898.578	99,20	
	9.1 Sub Kegiatan Pembangunan					
	- Input : Dana	Rupiah	150.000.000	147.470.000	98,31	Ketepatan dalam perencaaan Ketepatan penyerapan anggaran dimana dilaksanakan sesuai jadwal yang telah direncanakan Pertanggung jawaban administratif (spj) diselesaikan tepat waktu
	- Output : Jumlah pagar pengaman jalan yang diadakan	Meter	72	72	100,00	Pencapaian dengan kategori baik dan diharapkan dapat dipertahankan pada tahun selanjutnya
	- Outcome : Meningkatnya kinerja prasarana transportasi	Persen	26	15,39	140.81%	Tercapaianya target dengan baik berdasarkan output kegiatan pendukung yang tercapai dengan baik seperti terlaksananya kajian lalu lintas, perparkiran, rekomendasi andalalin yang menjadi faktor keterwujudannya target progam
	9.2 Sub Kegiatan Penyediaan					
	- Input : Dana	Rupiah	29.872.666.448	29.687.438.078	99,38	Ketepatan dalam perencaaan Ketepatan penyerapan anggaran dimana dilaksanakan sesuai jadwal yang telah direncanakan Pertanggung jawaban administratif (spj) diselesaikan tepat waktu
	- Output : Jumlah titik pju yang dilakukan pemeliharaan	Titik	3.200	3.191	99,72	Pencapaian dengan kategori baik dan diharapkan dapat dipertahankan pada tahun selanjutnya
	- Outcome : Meningkatnya kinerja prasarana transportasi	Persen	26	15,39	140.81%	Tercapaianya target dengan baik berdasarkan output kegiatan pendukung yang tercapai dengan baik seperti terlaksananya kajian lalu lintas, perparkiran, rekomendasi andalalin yang menjadi faktor keterwujudannya target progam

Tabel 2.3.2.1

PERANGKAT DAERAH : DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SUKOHARJO

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/IKK	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	EVALUASI KINERJA
1	2	3	4	5	6	7
	9.3 Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan					
	- Input : Dana	Rupiah	650.531.544	596.464.500	91,69	Ketepatan dalam perencaaan Ketepatan penyerapan anggaran dimana dilaksanakan sesuai jadwal yang telah direncanakan Pertanggung jawaban administratif (spj) diselesaikan tepat waktu
	- Output : Jumlah rambu keselamatan jalan yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1.275	1.267	99,37	Pencapaian dengan kategori baik dan diharapkan dapat dipertahankan pada tahun selanjutnya
	- Outcome : Meningkatnya kinerja prasarana transportasi	Persen	26	15,39	140.81%	Tercapaianya target dengan baik berdasarkan output kegiatan pendukung yang tercapai dengan baik seperti terlaksananya kajian lalu lintas, perparkiran, rekomendasi andalalin yang menjadi faktor keterwujudannya target progam
	9.4 Sub Kegiatan Rehabilitasi dan					
	- Input : Dana	Rupiah	150.000.000	144.526.000	96,35	Ketepatan dalam perencaaan Ketepatan penyerapan anggaran dimana dilaksanakan sesuai jadwal yang telah direncanakan Pertanggung jawaban administratif (spj) diselesaikan tepat waktu
	- Output : Luas marka jalan dan zona aman selamat sekolah yang diadakan	m2	5.320	5.310	99,81	Pencapaian dengan kategori baik dan diharapkan dapat dipertahankan pada tahun selanjutnya
	- Outcome : Meningkatnya kinerja prasarana transportasi	Persen	26	15,39	140.81%	Tercapaianya target dengan baik berdasarkan output kegiatan pendukung yang tercapai dengan baik seperti terlaksananya kajian lalu lintas, perparkiran, rekomendasi andalalin yang menjadi faktor keterwujudannya target progam
	10 Kegiatan Pengelolaan		336.206.764	320.985.000	95,47	
	10.1 Sub Kegiatan Rehabilitasi dan					
	- Input : Dana	Rupiah	336.206.764	320.985.000	95,47	Ketepatan dalam perencaaan Ketepatan penyerapan anggaran dimana dilaksanakan sesuai jadwal yang telah direncanakan Pertanggung jawaban administratif (spj) diselesaikan tepat waktu
	- Output : Jumlah terminal tipe c yang dilakukan pemeliharaan	Unit	4	4	100,00	Pencapaian dengan kategori baik dan diharapkan dapat dipertahankan pada tahun selanjutnya
	- Outcome : Meningkatnya kinerja prasarana transportasi	Persen	26	15,39	140.81%	Tercapaianya target dengan baik berdasarkan output kegiatan pendukung yang tercapai dengan baik seperti terpenuhinya target fasilitas layak terminal, alat uji lolos kalibrasi dan opersional perahu dengan baik yang menjadi faktor keterwujudannya target progam

Tabel 2.3.2.1

PERANGKAT DAERAH : DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SUKOHARJO

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/IKK	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	EVALUASI KINERJA
1	2	3	4	5	6	7
	11 Kegiatan Penerbitan Izin		512.928.128	507.891.900	99,02	
	11.1 Sub Kegiatan Koordinasi dan					
	- Input : Dana	Rupiah	512.928.128	507.891.900	99,02	Ketepatan dalam perencaaan Ketepatan penyerapan anggaran dimana dilaksanakan sesuai jadwal yang telah direncanakan Pertanggung jawaban administratif (spj) diselesaikan tepat waktu
	- Output : Jumlah petugas parkir yang mengikuti sosialisasi	Orang	875	875	100,00	Pencapaian dengan kategori baik dan diharapkan dapat dipertahankan pada tahun selanjutnya
	- Outcome : Meningkatnya kinerja prasarana transportasi	Persen	26	15,39	140.81%	Tercapaianya target dengan baik berdasarkan output kegiatan pendukung yang tercapai dengan baik seperti terpenuhinya target fasilitas layak terminal, alat uji lolos kalibrasi dan opersional perahu dengan baik yang menjadi faktor keterwujudannya target progam
	12 Kegiatan Pengujian Berkala		813.629.632	768.049.562	94,40	
	12.1 Sub Kegiatan Sosialisasi					
	- Input : Dana	Rupiah	49.000.000	48.047.000	98,06	Ketepatan dalam perencaaan Ketepatan penyerapan anggaran dimana dilaksanakan sesuai jadwal yang telah direncanakan Pertanggung jawaban administratif (spj) diselesaikan tepat waktu
	- Output : Jumlah pemilik bengkel umum dan karoseri serta para pemilik kendaraan tidak bermotor yang mengikuti sosialisasi	Orang	50	50	100,00	Pencapaian dengan kategori baik dan diharapkan dapat dipertahankan pada tahun selanjutnya
	- Outcome : Meningkatnya kinerja sarana transportasi	Persen	26	15,39	140.81%	Tercapaianya target dengan baik berdasarkan output kegiatan pendukung yang tercapai dengan baik seperti terpenuhinya target fasilitas layak terminal, alat uji lolos kalibrasi dan opersional perahu dengan baik yang menjadi faktor keterwujudannya target progam
	12.2 Sub Kegiatan Pemeliharaan					
	- Input : Dana	Rupiah	728.049.632	684.482.562	94,02	Ketepatan dalam perencaaan Ketepatan penyerapan anggaran dimana dilaksanakan sesuai jadwal yang telah direncanakan Pertanggung jawaban administratif (spj) diselesaikan tepat waktu
	- Output : Jumlah alat uji yang lulus uji kalibrasi	Unit	9	9	100,00	Pencapaian dengan kategori baik dan diharapkan dapat dipertahankan pada tahun selanjutnya
	- Outcome : Meningkatnya kinerja sarana transportasi	Persen	26	15,39	140.81%	Tercapaianya target dengan baik berdasarkan output kegiatan pendukung yang tercapai dengan baik seperti terpenuhinya target fasilitas layak terminal, alat uji lolos kalibrasi dan opersional perahu dengan baik yang menjadi faktor keterwujudannya target progam

Tabel 2.3.2.1

PERANGKAT DAERAH : DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SUKOHARJO

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/IKK	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	EVALUASI KINERJA
1	2	3	4	5	6	7
	12.3 Sub Kegiatan Koordinasi					
	- Input : Dana	Rupiah	16.580.000	15.680.000	94,57	Ketepatan dalam perencaaan Ketepatan penyerapan anggaran dimana dilaksanakan sesuai jadwal yang telah direncanakan Pertanggung jawaban administratif (spj) diselesaikan tepat waktu
	- Output : Jumlah pemilik kendaraan wajib uji yang mengikuti sosialisasi	Orang	50	50	100,00	Pencapaian dengan kategori baik dan diharapkan dapat dipertahankan pada tahun selanjutnya
	- Outcome : Meningkatnya kinerja sarana transportasi	Persen	1.5	0.33	178 %	Tercapaianya target dengan baik berdasarkan output kegiatan pendukung yang tercapai dengan baik dengan tercapainya target kajian angkutan yang dilaksanakan, jumlah peserta sosialisasi keselamatan angutan bagi juru mudi, pengelola angkutan serta pelajar di wilayah Kab. Sukoharjo serta terlaksananya pengendalian pengamanan angkutan di jalan
	12.4 Sub Kegiatan Monitoring dan					
	- Input : Dana	Rupiah	20.000.000	19.840.000	99,20	Ketepatan dalam perencaaan Ketepatan penyerapan anggaran dimana dilaksanakan sesuai jadwal yang telah direncanakan Pertanggung jawaban administratif (spj) diselesaikan tepat waktu
	- Output : Jumlah kendaraan angkutan di terminal-terminal dan garasi PO Bus yang melaksanakan uji petik	Unit	100	100	100,00	Pencapaian dengan kategori baik dan diharapkan dapat dipertahankan pada tahun selanjutnya
	- Outcome : Meningkatnya kinerja sarana transportasi	Persen	1.5	0.33	178 %	Tercapaianya target dengan baik berdasarkan output kegiatan pendukung yang tercapai dengan baik dengan tercapainya target kajian angkutan yang dilaksanakan, jumlah peserta sosialisasi keselamatan angutan bagi juru mudi, pengelola angkutan serta pelajar di wilayah Kab. Sukoharjo serta terlaksananya pengendalian pengamanan angkutan di jalan
	13 Kegiatan Pelaksanaan		514.458.500	497.431.986	96,69	
	13.1 Sub Kegiatan Pengadaan,					
	- Input : Dana	Rupiah	418.158.500	406.246.986	97,15	Kegiatan baru bisa dilaksanakan satu kali pada awal tahun dari yang dijadwalkan sebanyak dua kali dikarenakan adanya pandemi covid-19 Tetap direncakan target kinerja pada tahun selanjutnya dengan memperhatikan perkembangan pandemi covid-19 sehingga realisasi kinerja dapat maksimal
	- Output : Jumlah Rambu Keselamatan Jalan dan ATCS yang diadakan	Unit	121	121	100,00	Pencapaian dengan kategori baik dan diharapkan dapat dipertahankan pada tahun selanjutnya
	- Outcome : Meningkatnya kinerja prasarana transportasi	Persen	1.5	0.33	178 %	Tercapaianya target dengan baik berdasarkan output kegiatan pendukung yang tercapai dengan baik dengan tercapainya target kajian angkutan yang dilaksanakan, jumlah peserta sosialisasi keselamatan angutan bagi juru mudi, pengelola angkutan serta pelajar di wilayah Kab. Sukoharjo serta terlaksananya pengendalian pengamanan angkutan di jalan

Tabel 2.3.2.1

PERANGKAT DAERAH : DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SUKOHARJO

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/IKK	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	EVALUASI KINERJA
1	2	3	4	5	6	7
	13.2 Sub Kegiatan Forum Lalu					
	- Input : Dana	Rupiah	96.300.000	91.185.000	94,69	Ketepatan dalam perencaaan Ketepatan penyerapan anggaran dimana dilaksanakan sesuai jadwal yang telah direncanakan Pertanggung jawaban administratif (spj) diselesaikan tepat waktu
	- Output : Jumlah kasus lalu lintas yang diselesaikan dalam koordinasi lalu lintas antar stakeholder bidang perhubungan	Kasus	6	6	100,00	Pencapaian dengan kategori baik dan diharapkan dapat dipertahankan pada tahun selanjutnya
	- Outcome : Meningkatnya kinerja prasarana transportasi	Persen	26	15,39	140.81%	Tercapaianya target dengan baik berdasarkan output kegiatan pendukung yang tercapai dengan baik dengan tercapainya target kajian angkutan yang dilaksanakan, jumlah peserta sosialisasi keselamatan angutan bagi juru mudi, pengelola angkutan serta pelajar di wilayah Kab. Sukoharjo serta terlaksananya pengendalian pengamanan angkutan di jalan
	14 Kegiatan Persetujuan Hasil		50.000.000	43.665.000	87,33	
	14.1 Sub Kegiatan Pengawasan					
	- Input : Dana	Rupiah	50.000.000	43.665.000	87,33	Ketepatan dalam perencaaan Ketepatan penyerapan anggaran dimana dilaksanakan sesuai jadwal yang telah direncanakan Pertanggung jawaban administratif (spj) diselesaikan tepat waktu
	- Output : Jumlah bangunan yang dilakukan kajian analisis dampak lalu lintas	Unit	13	13	100,00	Pencapaian dengan kategori baik dan diharapkan dapat dipertahankan pada tahun selanjutnya
	- Outcome : Meningkatnya kinerja prasarana transportasi	Persen	26	15,39	140.81%	Tercapaianya target dengan baik berdasarkan output kegiatan pendukung yang tercapai dengan baik dengan tercapainya target kajian angkutan yang dilaksanakan, jumlah peserta sosialisasi keselamatan angutan bagi juru mudi, pengelola angkutan serta pelajar di wilayah Kab. Sukoharjo serta terlaksananya pengendalian pengamanan angkutan di jalan
	15 Kegiatan Audit dan Inspeksi		862.879.592	765.627.826	88,73	
	15.1 Sub Kegiatan Pelaksanaan					
	- Input : Dana	Rupiah	832.879.592	736.297.826	88,40	Ketepatan dalam perencaaan Ketepatan penyerapan anggaran dimana dilaksanakan sesuai jadwal yang telah direncanakan Pertanggung jawaban administratif (spj) diselesaikan tepat waktu
	- Output : Jumlah operasi pelaksanaan penertiban angkutan umum yang dilaksanakan	Kali	120	120	100,00	Pencapaian dengan kategori baik dan diharapkan dapat dipertahankan pada tahun selanjutnya
	- Outcome : Meningkatnya kinerja sarana transportasi	Persen	1.5	0.33	178 %	Tercapaianya target dengan baik berdasarkan output kegiatan pendukung yang tercapai dengan baik dengan tercapainya target kajian angkutan yang dilaksanakan, jumlah peserta sosialisasi keselamatan angutan bagi juru mudi, pengelola angkutan serta pelajar di wilayah Kab. Sukoharjo serta terlaksananya pengendalian pengamanan angkutan di jalan

Tabel 2.3.2.1

PERANGKAT DAERAH : DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SUKOHARJO

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/IKK	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	EVALUASI KINERJA
1	2	3	4	5	6	7
	15.2 Sub Kegiatan Pelaksanaan					
	- Input : Dana	Rupiah	15.000.000	14.345.000	95,63	Ketepatan dalam perencaaan Ketepatan penyerapan anggaran dimana dilaksanakan sesuai jadwal yang telah direncanakan Pertanggung jawaban administratif (spj) diselesaikan tepat waktu
	- Output : Jumlah sopir/jurumudi yang mengikuti sosialisasi	Orang	30	30	100,00	Pencapaian dengan kategori baik dan diharapkan dapat dipertahankan pada tahun selanjutnya
	- Outcome : Meningkatnya kinerja sarana transportasi	Persen	1.5	0.33	178 %	Tercapaianya target dengan baik berdasarkan output kegiatan pendukung yang tercapai dengan baik dengan tercapainya target kajian angkutan yang dilaksanakan, jumlah peserta sosialisasi keselamatan angutan bagi juru mudi, pengelola angkutan serta pelajar di wilayah Kab. Sukoharjo serta terlaksananya pengendalian pengamanan angkutan di jalan
	15.3 Sub Kegiatan Pelaksanaan					
	- Input : Dana	Rupiah	15.000.000	14.985.000	99,90	Ketepatan penyerapan anggaran dimana dilaksanakan sesuai jadwal yang telah direncanakan
	- Output : Jumlah pengelola angkutan Umum yang mengikuti sosialisasi	Orang	30	30	100,00	Pencapaian dengan kategori baik dan diharapkan capaian kinerja akan meningkat pada tahun selanjutnya
	- Outcome : Meningkatnya kinerja sarana transportasi	Persen	1.5	0.33	178 %	Tercapaianya target dengan baik berdasarkan output kegiatan pendukung yang tercapai dengan baik dengan terlaksananya pengadaan rambu perlengkapan sesuai dengan target yang telah direncanakan
	16 Kegiatan Penyediaan		582.200.000	573.928.000	98,58	
	16.1 Sub Kegiatan Penyediaan					
	- Input : Dana	Rupiah	548.700.000	541.480.000	98,68	Ketepatan dalam perencaaan Ketepatan penyerapan anggaran dimana dilaksanakan sesuai jadwal yang telah direncanakan Pertanggung jawaban administratif (spj) diselesaikan tepat waktu
	- Output : Jumlah kajian manajemen pengelolaan angkutan yang diadakan	Dokumen	1	1	100,00	Pencapaian dengan kategori baik dan diharapkan capaian kinerja akan meningkat pada tahun selanjutnya
	- Outcome : Meningkatnya kinerja sarana transportasi	Persen	1.5	0.33	178 %	Tercapaianya target dengan baik berdasarkan output kegiatan pendukung yang tercapai dengan baik dengan terlaksananya pengadaan rambu perlengkapan sesuai dengan target yang telah direncanakan

Tabel 2.3.2.1

PERANGKAT DAERAH : DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SUKOHARJO

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/IKK	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	EVALUASI KINERJA
1	2	3	4	5	6	7
	16.2 Sub Kegiatan Pengendalian					
	- Input : Dana	Rupiah	33.500.000	32.448.000	96,86	Ketepatan dalam perencaaan Ketepatan penyerapan anggaran dimana dilaksanakan sesuai jadwal yang telah direncanakan Pertanggung jawaban administratif (spj) diselesaikan tepat waktu
	- Output : Jumlah database pelayanan angkutan yang terupdate	Database	1	1	100,00	Pencapaian dengan kategori baik dan diharapkan capaian kinerja akan meningkat pada tahun selanjutnya
	- Outcome : Meningkatnya kinerja sarana transportasi	Persen	1.5	0.33	178 %	Tercapaianya target dengan baik berdasarkan output kegiatan pendukung yang tercapai dengan baik dengan terlaksananya pengadaan rambu perlengkapan sesuai dengan target yang telah direncanakan
	17 Kegiatan Penetapan Rencana		418.780.000	405.627.250	96,86	
	17.1 Sub Kegiatan Pengendalian					
	- Input : Dana	Rupiah	418.780.000	405.627.250	96,86	Ketepatan dalam perencaaan Ketepatan penyerapan anggaran dimana dilaksanakan sesuai jadwal yang telah direncanakan Pertanggung jawaban administratif (spj) diselesaikan tepat waktu
	- Output : Jumlah pengamanan harian dan insidentil yang diselenggarakan	Kali	187	187	100,00	Pencapaian dengan kategori baik dan diharapkan dapat dipertahankan pada tahun selanjutnya
	- Outcome : Meningkatnya kinerja sarana transportasi	Persen	1.5	0.33	178 %	Tercapaianya target dengan baik berdasarkan output kegiatan pendukung yang tercapai dengan baik dengan terlaksananya pengadaan rambu perlengkapan sesuai dengan target yang telah direncanakan
	18 Kegiatan Penetapan Rencana		125.000.000	117.653.000	94,12	
	18.1 Sub Kegiatan Perumusan					
	- Input : Dana	Rupiah	105.000.000	98.453.000	93,76	Ketepatan dalam perencaaan Ketepatan penyerapan anggaran dimana dilaksanakan sesuai jadwal yang telah direncanakan
	- Output : Jumlah Dokumen RUJT dan SK Bupati tentang RUJT yang diadakan	Dokumen	1	1	100,00	Pencapaian dengan kategori baik dan diharapkan dapat dipertahankan pada tahun selanjutnya
	- Outcome : Meningkatnya kinerja sarana transportasi	Persen	1.5	0.33	178 %	Tercapaianya target dengan baik berdasarkan output kegiatan pendukung yang tercapai dengan baik dengan terlaksananya pengadaan rambu perlengkapan sesuai dengan target yang telah direncanakan

PERANGKAT DAERAH : DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SUKOHARJO

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/IKK	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	EVALUASI KINERJA
1	2	3	4	5	6	7
	18,2 Sub Kegiatan Sosialisasi dan					
	- Input : Dana	Rupiah	20.000.000	19.200.000	96,00	Ketepatan dalam perencaaan Ketepatan penyerapan anggaran dimana dilaksanakan sesuai jadwal yang telah direncanakan
	- Output : Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi dan uji coba implementasi RUJT	Orang	60	60	100,00	Pencapaian dengan kategori baik dan diharapkan dapat dipertahankan pada tahun selanjutnya
	- Outcome : Meningkatnya kinerja sarana transportasi	Persen	1.5	0.33	178 %	Tercapaianya target dengan baik berdasarkan output kegiatan pendukung yang tercapai dengan baik dengan terlaksananya pengadaan rambu perlengkapan sesuai dengan target yang telah direncanakan
	19 Kegiatan Penerbitan Izin		51.500.000	48.436.000	94,05	
	19.1 Sub Kegiatan Fasilitasi					
	- Input : Dana	Rupiah	20.000.000	18.315.000	91,58	Ketepatan dalam perencaaan Ketepatan penyerapan anggaran dimana dilaksanakan sesuai jadwal yang telah direncanakan
	- Output : Jumlah perizinan yang terfasilitasi	Izin	25	25	100,00	Pencapaian dengan kategori baik dan diharapkan dapat dipertahankan pada tahun selanjutnya
	- Outcome : Meningkatnya kinerja sarana transportasi	Persen	1.5	0.33	178 %	Tercapaianya target dengan baik berdasarkan output kegiatan pendukung yang tercapai dengan baik dengan terlaksananya pengadaan rambu perlengkapan sesuai dengan target yang telah direncanakan
	19.2 Sub Kegiatan Koordinasi dan					
	- Input : Dana	Rupiah	31.500.000	30.121.000	95,62	Ketepatan dalam perencaaan Ketepatan penyerapan anggaran dimana dilaksanakan sesuai jadwal yang telah direncanakan
	- Output : Jumlah koordinasi peningkatan perencanaan pengelolaan angkutan yang dilaksanakan	Kali	7	7	100,00	Pencapaian dengan kategori baik dan diharapkan dapat dipertahankan pada tahun selanjutnya
	- Outcome : Meningkatnya kinerja sarana transportasi	Persen	1.5	0.33	178 %	Tercapaianya target dengan baik berdasarkan output kegiatan pendukung yang tercapai dengan baik dengan terlaksananya pengadaan rambu perlengkapan sesuai dengan target yang telah direncanakan

Tabel 2.3.2.1

PERANGKAT DAERAH : DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SUKOHARJO

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/IKK	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	EVALUASI KINERJA
1	2	3	4	5	6	7
3	Program Pengelolaan Pelayaran		15.000.000	11.830.000	78,87	
	19 Kegiatan Penetapan Lintas		15.000.000	11.830.000	78,87	
	19.1 Sub Kegiatan Pengendalian					
	- Input : Dana	Rupiah	15.000.000	11.830.000	78,87	Ketepatan dalam perencaaan Ketepatan penyerapan anggaran dimana dilaksanakan sesuai jadwal yang telah direncanakan Pertanggung jawaban administratif (spj) diselesaikan tepat waktu
	- Output : Jumlah perahu yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	1	100,00	Pencapaian dengan kategori baik dan diharapkan dapat dipertahankan pada tahun selanjutnya
	- Outcome : Meningkatnya kinerja sarana transportasi	Persen	1.5	0.33	178 %	Tercapaianya target dengan baik berdasarkan output kegiatan pendukung yang tercapai dengan baik dengan terlaksananya pengadaan rambu perlengkapan sesuai dengan target yang telah direncanakan
4	Program Pengelolaan Perkeretaapian		274.655.900	242.282.706	88,21	
	20 Kegiatan Penerbitan Izin		274.655.900	242.282.706	88.21	
	20.1 Sub Kegiatan Koordinasi dan					
	- Input : Dana	Rupiah	274.655.900	242.282.706	88,21	Ketepatan dalam perencaaan Ketepatan penyerapan anggaran dimana dilaksanakan sesuai jadwal yang telah direncanakan Pertanggung jawaban administratif (spj) diselesaikan tepat waktu
	- Output : Jumlah Fasilitas Penyeberangan Kereta yang dilakukan pemeliharaan	Titik	7	7	100,00	Pencapaian dengan kategori baik dan diharapkan capaian kinerja akan meningkat pada tahun selanjutnya
	- Outcome : Meningkatnya kinerja prasarana transportasi	Persen	26	15,39	59,19	Tercapaianya target dengan baik berdasarkan output kegiatan pendukung yang tercapai dengan baik dengan terlaksananya pengadaan rambu perlengkapan sesuai dengan target yang telah direncanakan
	Total		43.605.111.984	42.669.677.834	97,85	

Jika dilihat dari tabel pencapaian indikator kinerja sub kegiatan tersebut, maka untuk kategori input sub kegiatan jika dibandingkan dengan realisasi sub kegiatan dimaksud akan didapatkan kesimpulan bahwa dari 49 sub kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2022 Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo terdapat 1 sub kegiatan yang dananya terserap seluruhnya sesuai dengan rencana dan 48 sub kegiatan dananya tidak terserap secara keseluruhan dikarenakan belum maksimalnya penggunaan anggaran dari semua kegiatan, dan dana yang terserap adalah 97.85 %.

Jika dilihat pada sisi outputnya, maka seluruh kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 telah dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) ataupun Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) tahun 2022.

Nilai capaian kinerja instansi Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 sebesar 100.97 %. Dari analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity dan Threat) dapat ditemukan bahwa tersedianya sumber daya manusia aparatur pengelola kantor dan tenaga karyawan dengan jumlah yang besar dan tersedianya dana dari sumber dan dukungan APBD yang baik merupakan faktor kekuatan yang paling dominan dalam mendukung kinerja instansi. Dukungan optimal aparatur sipil negara, tenaga honorer dan tenaga harian lepas serta terjalinnya kerja sama yang sinergis antara Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo dengan Lembaga seluruh Kantor/ Bagian/ Dinas/ Badan Lembaga baik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo maupun Lembaga Swadaya Masyarakat juga memberikan konstribusi yang signifikan terhadap kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo dalam menunaikan tugas dan fungsinya.

Namun demikian masih terdapat banyak kendala dan tantangan yang dapat menyebabkan kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo belum dapat berjalan

optimal seperti yang ditetapkan dalam perencanaan strategis. Dari hasil analisis SWOT dapat diuraikan beberapa kelemahan yang akan dapat menyebabkan kegagalan dalam upaya mewujudkan tujuan Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo. Kelemahan-kelemahan itu antara lain :

1. Jumlah Pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo yang mempunyai dasar pendidikan transportasi atau ilmu perhubungan yang belum mencukupi;
2. Kurangnya inovasi dalam perencanaan kegiatan di bidang perhubungan;
3. Kurang sinergitas perencanaan yang telah ditetapkan dengan kebutuhan kantor tahun berikutnya;
4. Belum maksimalnya pelaksanaan kegiatan, terutama dalam perencanaan dan evaluasi pasca kegiatan;
5. Sarana yang belum maksimal untuk mendukung pelaksanaan tugas serta mewujudkan pelayanan yang baik terhadap masyarakat;

2.4 Evaluasi Capaian Program Kegiatan Sub Kegiatan Tahun Berjalan (2023)

Capaian kinerja keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 pada saat ini sampai bulan Juni Tahun 2023 sekitar 46.25 % dari keseluruhan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan. Hal ini dipengaruhi beberapa faktor diantaranya belum maksimalnya pelaksanaan penatausahaan keuangan. Untuk itu dukungan dan kerja sama dengan pihak-pihak terkait sangat diperlukan untuk memberi kontribusi yang signifikan terhadap kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo dalam menunaikan tugas dan fungsinya.

2.5 Identifikasi Masalah dan Tantangan Perangkat Daerah Tahun 2024

Dengan berbagai keterbatasan yang dimiliki Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo dalam melaksanakan amanat Undang-undang No 23 Tahun 2014 serta untuk mendukung

pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Sukoharjo yang telah dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukoharjo Periode 2021-2026. Dinas Perhubungan memiliki beberapa permasalahan dan hambatan yang akan dihadapi pada tahun 2024 antara lain:

1. Peningkatan mobilitas masyarakat yang massif pasca pandemic Covid-19;
2. Munculnya titik simpul kemacetan;
3. Meningkatnya area rawan kecelakaan (black spot);
4. Menurunnya jumlah trayek yang terlayani angkutan umum;
5. Kondisi kendaraan angkutan umum yang semakin tidak representatif;
6. Sistem pelayanan umum di sektor perhubungan yang belum terintegrasi secara maksimal;
7. Ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan yang belum maksimal sesuai kebutuhan;
8. Belum maksimalnya ketersediaan dan fungsi terminal;
9. Belum tersedianya ruang parkir dan bongkar muat bagi truk muatan besar yang terpusat dan terkendali;
10. Belum maksimalnya penerapan andalalin di daerah dengan adanya Sentral Bisnis terbangun yang belum menyusun analisa dampak lalu lintas;
11. Belum maksimalnya pengelolaan potensi pendapatan daerah;

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Kajian Renstra dan Prioritas Program Renstra Perangkat Daerah

3.1.1 Visi dan Misi

Untuk melaksanakan wewenang dan tanggung jawab dalam rangka mendukung program-program Bupati dan Wakil Bupati, maka Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo harus berpedoman pada Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih yang telah dirangkum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukoharjo Periode 2021-2026 yaitu : **"TERWUJUDNYA SUKOHARJO YANG LEBIH MAKMUR".**

Visi Pembangunan Kabupaten Sukoharjo ini diharapkan akan mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat Kabupaten Sukoharjo. Visi Pembangunan Kabupaten Sukoharjo tersebut harus dapat diukur keberhasilannya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan, makna yang terkandung dalam Visi tersebut dijabarkan sebagai mana berikut:

1.	Maju	:	Mempunyai pengertian bergerak kedepan menjadi lebih baik, tidak berhenti, tidak terlambat, mencapai tingkat peradaban yang lebih tinggi. Sebagai tugas panggilan dalam hidup. Dengan maju kita ingin tumbuh dan berkembang, dan selalu berpikir dan berusaha
2.	Aman	:	Keamanan merupakan salah satu unsur/ syarat mutlak untuk dapat terlaksanannya pembangunan. Tanpa stabilitas keamanan yang terpelihara secara mantap dan berkesinambungan, tidak mungkin kegiatan pembangunan dapat terlaksana dengan lancar.

3.	Konstitusional	:	Penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, maupun kemasyarakatan harus dilandasi hukumatau dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum.
4.	Mantap	:	Warga dan segenap penyelenggara pemerintahan optimis dalam membangun Sukoharjo.
5.	Unggul	:	Mempunyai arti semangat berprestasi untuk selalu berusaha mencapai yang terbaik.
6.	Rapi	:	Mengandung pengertian apik, baik, bersih, teratur, tertib, beres.

Visi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Tahun 2021-2026 tersebut dicapai melalui Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis RPJMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026 sebagai berikut :

1. Misi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan percepatan reformasi birokrasi. Misi ini mempunyai Tujuan terwujudnya tata kepemerintahan yang profesional, dengan indikator kinerja adalah Indeks Reformnasi Birokrasi (IRB) dan Sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya kualkitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel.
2. Misi meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas. Misi ini mempunyai Tujuan membentuk sumber daya manusia yang sehat, cerdas, inovatif dan berkarakter dengan indikator kinerja adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Sasaran yang ingin dicapai adalah 1) Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat; 2) Meningkatnya kualitas pendidikan; 3) Meningkatnya pengendalian penduduk; 4) Meningkatnya akses dan kualitas hidup , perlindungan terhadap perempuan, anak , kesetaraan gender dan pemuda; 5) Meningkatnya kearifan dan budaya lokal; 6) Meningkatnya kualitas hidup penduduk miskin.

3. Misi memperkuat perekonomian rakyat yang berdaya saing tinggi. Misi ini mempunyai Tujuan mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif dengan indikator kinerja adalah Tingkat pertumbuhan ekonomi, Tingkat angka kemiskinan, Tingkat pengangguran terbuka, dan TIngkat pendapatan perkapita. Sasaran yang ingin dicapai adalah 1) Meningkatnya pertumbuhan produktivitas; 2) Meningkatnya kemandirian desa.
4. Misi memperkuat pembangunan infrastruktur berwawasan lingkungan. Misi ini mempunyai Tujuan meningkatkan pemerataan pembangunan insfrastuktur yang berkelanjutan dengan indikator kinerja adalah Indeks pambangunan infrastruktur (IPI), Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH), dan Indeks resiko bencana. Sasaran yang ingin dicapai adalah 1) Meningkatnya kualitas infrastruktur; 2) Meningkatnya kualitas lingkungan.
5. Misi meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan keagamaan. Misi ini mempunyai Tujuan mewujudkan masyarakat sukoharjo yang aman dan nyaman dengan indikator kinerja adalah Presentase penanganan gangguan keamanan, ketentraman masyarakat dan ketertiban umum. Sasaran yang ingin dicapai adalah 1) Meningkatnya kualitas ketentraman dan ketertiabn masyarakat; 2) Meningkatnya kesatuan bangsa dan bernegara.

3.1.2 Tujuan Perangkat Daerah

Berdasarkan visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Sukoharjo tahun 2021-2026 serta tujuan dan sasaran pembangunan selama lima tahun kedepan yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Sukoharjo tahun 2021-2026. Dalam

rangka mendukung ketercapaian kinerja khususnya dalam Misi ke 4 (empat) yaitu Memperkuat pembangunan infrastruktur berwawasan lingkungan, Tujuan ke 1 (satu) yaitu Meningkatkan pemerataan pembangunan insfrastuktur yang berkelanjutan dengan indikator kinerja Indeks Pembangunan infrastruktur (IPI) serta Sasaran ke 1 (satu) dari Tujuan ke 1 (satu) Misi ke 4 (empat) yaitu Meningkatnya kualitas infrastruktur dengan indikator kinerja Indeks Fatalitas.

Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo telah menentukan Tujuan Perangkat Daerah yang ingin dicapai yaitu Terwujudnya Pelayanan Transportasi Daerah yang Baik dengan indikator kinerja Rasio Angka Fatalitas Kecelakaan di Sektor Perhubungan yang mana diharapakan target kinerja yang dapat tercapai untuk tahun 2024 adalah 0,190.

Upaya untuk menurunkan Rasio Angka Fatalitas Kecelakaan di Sektor Perhubungan adalah melalui peningkatan sarana dan prasarana transportasi. Hal tersebut dilaksanakan dalam rangka meningkatkan produktifitas pembangunan infrastruktur. Infrastruktur dapat didefinisikan sebagai kebutuhan dasar fisik pengorganisasian sistem struktur yang diperlukan untuk jaminan ekonomi sektor publik dan privat sebagai layanan dan fasilitas yang diperlukan agar perekonomian dapat berfungsi dengan baik. Penguatan berarti Dinas Perhubungan berusaha meningkatkan sarana dan prasarana transportasi untuk mendukung tercapainya infrastruktur yang baik ebagaimana misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo periode 2021-2026. Untuk mencapai indikator kinerja sebagaimana tersebut di atas dilaksanakanlah program dan kegiatan tahunan Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo sebagaimana tercantum dalam lampiran Rencana Kerja Tahunan.

3.1.3 Sasaran Perangkat Daerah

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang mana dalam kaitan urusan perhubungan, sasaran merupakan sesuatu yang akan dicapai sebagai tolok ukur berhasil atau tidaknya

pencapaian dari suatu tujuan. Sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo adalah 1) meningkatnya kinerja sarana transportasi dengan indikator kinerja persentase angka kecelakaan sarana transportasi dan; 2) meningkatnya kinerja prasarana transportasi dengan indikator kinerja persentase angka kecelakaan prasarana transportasi. Adapun target kinerja yang ingin dicapai pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kinerja sarana transportasi, dengan target kinerja 0.85%;
2. Meningkatnya kinerja prasarana transportasi, dengan target kinerja 18.5%.

Sementara itu, untuk indikator tujuan dan sasaran jangka menengah berkaitan dengan kesekretariatan :

1. Meningkatnya kualitas aparatur dan pelayanan publik, dengan target kinerja nilai SAKIP 75.

Sasaran tersebut diatas ditargetkan akan menurun setiap tahunnya sehingga angka kecelakaan juga semakin menurun. Sasaran di atas merupakan indikator/ tolok ukur dari program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo dalam satu tahun anggaran dengan harapan dapat mencapai target indikator kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo periode 2021-2026 pada urusan perhubungan. Hubungan keterkaitan tersebut dapat dijelaskan sebagaimana berikut:

VISI BUPATI

Terwujudnya Sukoharjo Yang Lebih Makmur

↓

MISI BUPATI (POIN IV)

Memperkuat pembangunan infrastruktur berwawasan lingkungan

↓

TUJUAN RPJMD

Meningkatkan pemerataan pembangunan insfrastuktur yang berkelanjutan dengan indikator kinerja adalah Indeks pambangunan infrastruktur (IPI)

↓

SASARAN RPJMD

Meningkatnya kualitas infrastruktur dengan indikator kinerja adalah Indeks Fatalitas

→

TUJUAN PD

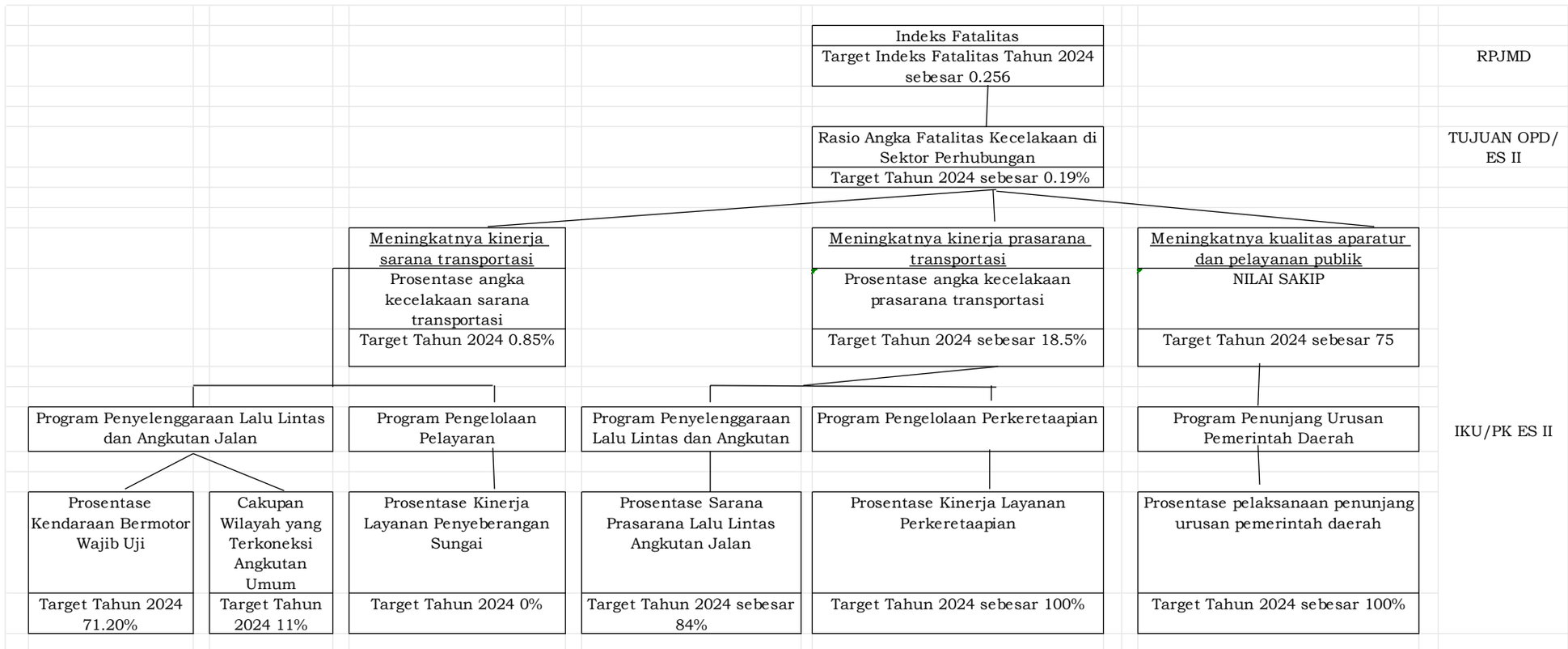
Terwujudnya Pelayanan Transportasi Daerah yang Baik dengan indikator tujuan adalah Rasio Angka Fatalitas Kecelakaan di Sektor Perhubungan

↓

SASARAN PD

1. Meningkatnya kinerja sarana transportasi dengan indikator kinerja adaalah persentase angka kecelakaan sarana transportasi
2. Meningkatnya kinerja prasarana transportasi dengan indikator kinerja adaalah persentase angka kecelakaan prasarana transportasi

Keterkaitan pola kinerja Rencana Kerja Dinas Perhubungan tahun 2024 terhadap target kinerja RPJMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026 dapat dilihat sebagai berikut:



3.1.4 Arah Kebijakan

Kebijakan merupakan arah / tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan. Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berkewenangan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur pemerintah ataupun masyarakat agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran dan tujuan organisasi.

Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo selaku Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo yang bertanggung jawab kepada Bupati atas Urusan di Bidang Perhubungan merumuskan beberapa kebijakan yang dijadikan prioritas dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun 2024, kebijakan-kebijakan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan fasilitas perhubungan berupa sarana mobilitas pemeliharaan perlengkapan jalan (marka, rambu, traffic light, cctv, pagar pengaman jalan, dan lain-lain);
2. Peningkatan kuantitas dan kualitas perlengkapan jalan;
3. Peningkatan pemahaman keselamatan lalu lintas kepada masyarakat;
4. Peningkatan sarana edukasi kelalulintasan kepada masyarakat;
5. Pengaturan, pengamanan, dan pengawasan lalu lintas;
6. Peningkatan pelayanan pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan standar laik jalan yang telah diatur dalam perundang-undangan;
7. Penataan trayek angkutan umum sesuai dengan potensi penumpang angkutan umum melalui kajian study angkutan;

8. Mewujudkan kajian study kelalulintasan guna inovasi pelaksanaan urusan perhubungan di Wilayah Kabupaten Sukoharjo;
9. Peningkatan jumlah terminal/halte;
10. Peningkatan layanan andalalin;

Kebijakan tersebut dijabarkan dalam 4 program, 21 kegiatan dan 53 sub kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo pada anggaran tahun 2024 guna mewujudkan indikator kinerja yang telah ditetapkan pada tahun tersebut sesuai target Rencana Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo tahun 2021-2026.

3.1.5 Strategi

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analistis, realistis, rasional dan komprehensip. Strategi diwujudkan dalam kebijakan yang dijabarkan ke dalam program dan kegiatan oleh perangkat daerah yang bersangkutan. Berdasarkan strategi yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo menetapkan beberapa strategi guna menghadapi isu-isu strategis dan permasalahan yang dihadapi dalam kaitannya dengan urusan perhubungan. Strategi dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas dan keprofesionalan aparat Dinas Perhubungan melalui peningkatan kualifikasi pendidikan dan pelatihan;
2. Meningkatkan kuantitas aparat Dinas Perhubungan dengan basic pengetahuan bidang transportasi sehingga perencanaan dan pelaksanaan kegiatan lebih terarah dan inovatif untuk peningkatan kualitas transportasi;
3. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi (TI) dalam pelaksanaan tata kelola/ administrasi/ manajemen pemerintahan serta meningkatan mutu pelayanan kepada madsyarakat melalui media teknologi informasi menuju e-government;
4. Peningkatan kelancaran pelayanan lalu lintas angkutan jalan secara terpadu melalui penataan sistem jaringan

dan terminal, manajemen lalu lintas, pemasangan fasilitas dan rambu jalan,penegakan hukum dan disiplin dijalan, penegakan andalalin, penataan ijin trayek dan kerja sama antar lembaga pemerintah;

5. Pengintegrasian sistem jaringan jalan dengan kebijakan tata ruang wilayah yang merupakan acuan pengembangan wilayah dan meningkatkan keterpaduannya dengan sistem prasarana lainnya;
6. Menginplementasikan kebijakan dan kegiatan di bidang perhubungan sesuai dengan prosedur protokol kesehatan yang telah ditetapkan.

3.2 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Berdasarkan program yang telah ditentukan, Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo menetapkan program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2024 sebagai berikut :

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
1	2
2.15.01.2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2.15.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2.15.01.2.01.0001	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2.15.01.2.01.0006	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2.15.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2.15.01.2.02.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

2.15.01.2.02.0003	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
2.15.01.2.02.0005	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
2.15.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
2.15.01.2.05.0002	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
2.15.01.2.05.0009	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
2.15.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
2.15.01.2.06.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2.15.01.2.06.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2.15.01.2.06.0003	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
2.15.01.2.06.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
2.15.01.2.06.0005	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
2.15.01.2.06.0006	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
2.15.01.2.06.0009	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
2.15.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2.15.01.2.07.0001	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2.15.01.2.07.0005	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
2.15.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.15.01.2.08.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2.15.01.2.08.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi,

	Sumber Daya Air dan Listrik
2.15.01.2.08.0003	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2.15.01.2.08.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
2.15.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.15.01.2.09.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2.15.01.2.09.0009	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2.15.01.2.09.0011	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2.15.02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
2.15.02.2.01	Kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
2.15.02.2.01.0001	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
2.15.02.2.01.0002	Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
2.15.02.2.01.0007	Sub Kegiatan Pelaksanaan Evaluasi (Reviu) Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
2.15.02.2.02	Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
2.15.02.2.02.0001	Sub Kegiatan Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
2.15.02.2.02.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
2.15.02.2.02.0003	Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan
2.15.02.2.02.0004	Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan

	Perlengkapan Jalan
2.15.02.2.03	Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C
2.15.02.2.03.0009	Sub Kegiatan Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang
2.15.02.2.03.0011	Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)
2.15.02.2.04	Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir
2.15.02.2.04.0002	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota
2.15.02.2.05	Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
2.15.02.2.05.0005	Sub Kegiatan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
2.15.02.2.05.0007	Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
2.15.02.2.05.0008	Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
2.15.02.2.05.0010	Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
2.15.02.2.06	Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
2.15.02.2.06.0015	Sub Kegiatan Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
2.15.02.2.06.0016	Sub Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

2.15.02.2.07	Kegiatan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota
2.15.02.2.07.0006	Sub Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin
2.15.02.2.08	Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan
2.15.02.2.08.0004	Sub Kegiatan Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota
2.15.02.2.08.0007	Sub Kegiatan Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum
2.15.02.2.08.0009	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Melalui Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor
2.15.02.2.11	Kegiatan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
2.15.02.2.11.0003	Sub Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
2.15.02.2.09	Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
2.15.02.2.09.0002	Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
2.15.02.2.09.0003	Sub Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
2.15.02.2.12	Kegiatan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

2.15.02.2.12.0001	Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan kabupaten/Kota
2.15.02.2.12.0002	Sub Kegiatan Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota
2.15.02.2.14	Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
2.15.02.2.14.0002	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota
2.15.02.2.14.0003	Sub Fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik
2.15.03	Program Pengelolaan Pelayaran
2.15.03.2.06	Kegiatan Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota
2.15.03.2.06.0004	Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota
2.15.05	Program Pengelolaan Perkeretaapian
2.15.05.2.07	Kegiatan Penerbitan Izin Pengadaan Atau Pembangunan Perkeretapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya Dalam Daerah

	Kabupaten/Kota
2.15.05.2.07.0002	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota
2.15.05.2.07.0002	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota

Secara lengkap target kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam rangka mewujudkan program pembangunan yang terdapat dalam RPJMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026 dapat dilihat dalam lampiran Renja ini.

3.3 Hasil Analisis dan Kondisi Masalah

Beberapa permasalahan Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo yang dihadapi pada tahun 2024, antara lain :

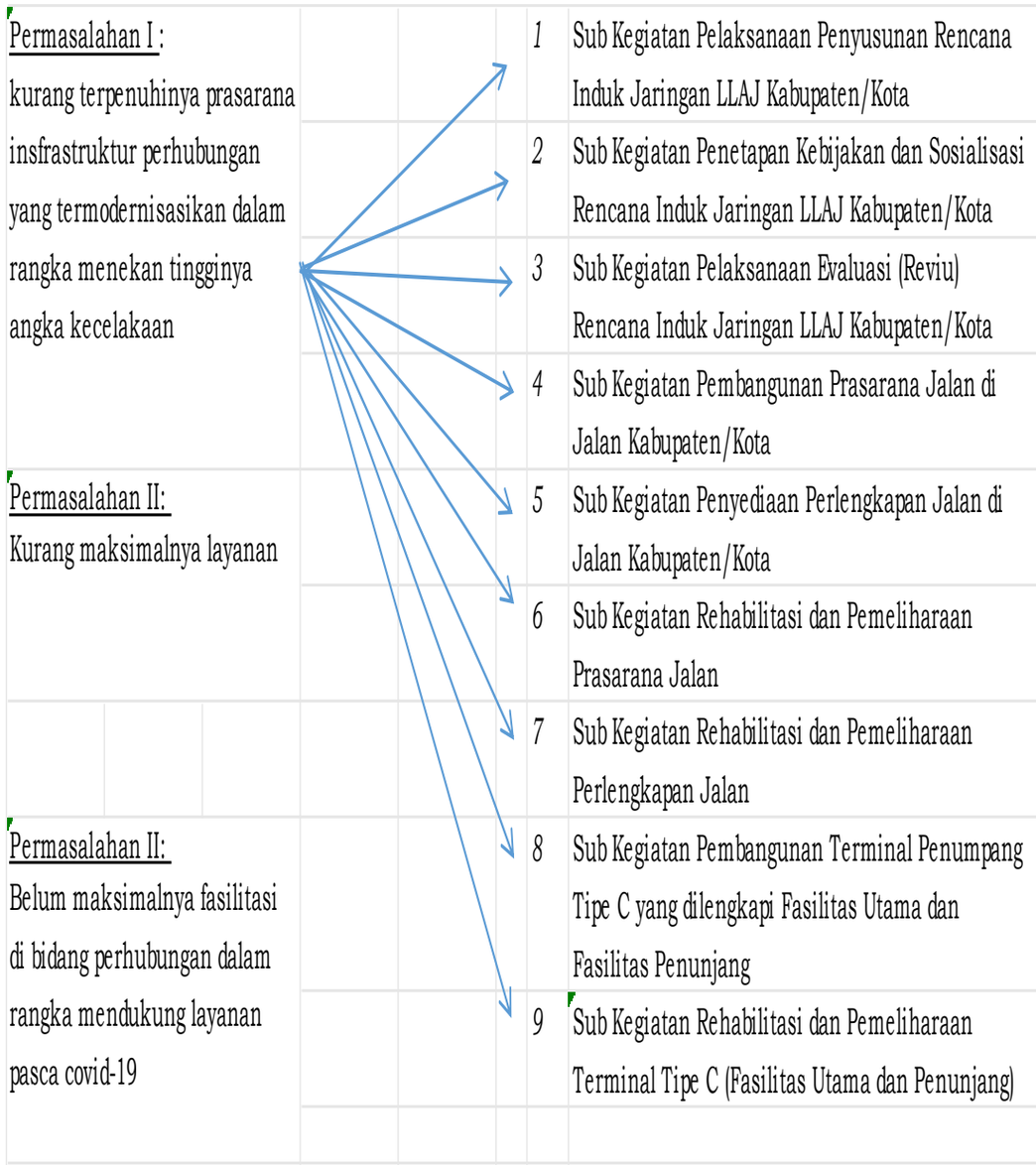
1. Angka kecelakaan lalu lintas yang masih tinggi;
2. Fasilitas keselamatan lalu lintas belum dapat mencukupi kebutuhan baik di tempat-tempat strategis maupun di lokasi rawan kecelakaan sehingga masih seringnya terjadi kecelakaan lalu lintas;
3. Kondisi terminal type c yang kurang representatif untuk pelayanan kepada masyarakat;
4. Kondisi angkutan umum yuang kurang representatif bagi pengguna angkutan umum baik dari segi sarana dan prasarananya sehingga kurang diminati oleh masyarakat;
5. Kurangnya study kajian kelalulintasan khusus guna inovasi pelaksanaan urusan perhubungan di Wilayah Kabupaten Sukoharjo;
6. Kondisi masyarakat pengguna jalan yang belum tertib berlalu lintas dan melaksanakan keselematan berkendara;

7. Managemen rekayasa lalu lintas yang perlu ditingkatkan;
8. Kondisi trayek angkutan yang masih tidak sesuai dengan jumlah pengguna angkutan;
9. Belum maksimalnya sarana dan prasarana pelayanan masyarakat di bidang perhubungan;
10. Belum maksimalnya layanan andalalin;
11. Belum mencukupinya personel operasional pemeliharaan untuk memonitoring dan menyelesaikan permasalahan rambu di wilayah secara tepat waktu
12. Belum tersedianya angkutan bersubsidi baik melalui mekanisme APBD ataupun CSR, dan baru 2 jalur yang terlayani oleh BST yang pendanaannya berasal dari Pusat
13. Keterbatasan anggaran untuk pengelolaan angkutan umum.
14. Penurunan jumlah kendaraan angkutan umum yang beroperasi;
15. Masih terdapat Kesulitan dalam penyusunan dokumen keselamatan lalu lintas
16. Masih terdapat perlintasan sebidang yang belum memiliki sarana ataupun prasarana pengaman yang memadai

Sesuai dengan permasalahan di atas, dapat dianalisis bahwa terdapat 3 (tiga) kriteria permasalahan yaitu kurang terpenuhinya prasarana insfrastruktur perhubungan yang termodernisasikan dalam rangka menekan tingginya angka kecelakaan, kurang maksimalnya layanan angkutan umum, dan belum maksimalnya fasilitasi di bidang perhubungan dalam rangka mendukung layanan pasca covid-19. Pemenuhan sarana prasarana infrastruktur dapat ditindak lanjuti dengan kegiatan pengadaan rambu, traffic light, sarana keamanan lalu lintas, rehabilitasi dan perbaikan fasilitas umum perhubungan/ terminal dengan memperhatikan kelengkapan fasilitas protokol kesehatan. Untuk meningkatkan pelayanan angkutan umum dapat ditindaklanjuti dengan mulai melaksanakan kajian analisis kebutuhan jaringan trayek sehingga dapat diketahui potensi jaringan trayek yang ada di wilayah serta melakukan sosialisasi pengusaha angkutan untuk dapat meningkatkan layanannya. Peningkatan layanan perhubungan di masa pasca pandemi dapat dilaksanakan dengan menyediakan prasarana

Bus Trans Jateng dan berkoordinasi serta menerapkan kebijakan dari kabupaten, provinsi ataupun pusat dalam rangka mendukung layanan pasca covid-19 terutama yang berkaitan sektor perhubungan.

Kerangka pikir analisis permasalahan Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo tahun 2024 dapat dilihat sebagai berikut :



Permasalahan I : kurang terpenuhinya prasarana insfrastruktur perhubungan yang termodernisasikan dalam rangka menekan tingginya angka kecelakaan	10	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota
	11	Sub Kegiatan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
	12	Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
	36.	Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
Permasalahan II: Kurang maksimalnya layanan	37.	Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
	38.	Sub Kegiatan Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
	39.	Sub Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
Permasalahan II: Belum maksimalnya fasilitasi di bidang perhubungan dalam rangka mendukung layanan pasca covid-19	40.	Sub Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin
	41.	Sub Kegiatan Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota
	42.	Sub Kegiatan Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum
	43.	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Melalui Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor
	44.	Sub Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
	45.	Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
	46.	Sub Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
	47.	Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan kabupaten/Kota
	48.	Sub Kegiatan Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota
	49.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota
	50.	Sub Fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik
	51.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota

BAB IV
DANA INDIKATIF DAN SUMBER DANA

4.1 Kajian Terhadap Pagu/ Plafon Identifikasi Tahun Rencana

Sebagaimana diuraikan pada BAB III bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo pada Tahun Anggaran 2024, jumlah program yang diusulkan sebanyak 3 program, 21 kegiatan dan 52 sub kegiatan. Adapun kajian terhadap kebutuhan anggaran/ pagu indikatif pada masing-masing program adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

   Terdiri dari 7 kegiatan dan 23 sub kegiatan. Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan rutin kesekretariatan. Dana pagu indikatif yang diperlukan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota sebesar Rp 9.589.124.700.

2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

   Terdiri dari 11 kegiatan dan 22 sub kegiatan. Berkaitan dengan kegiatan pemenuhan kebutuhan infrastruktur perhubungan serta peningkatan pengelolaan dan keselamatan angkutan jalan. Dana pagu indikatif yang diperlukan pada Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebesar Rp. 39.888.634.200.

3. Program Pengelolaan Perkeretaapian

   Terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan. Berkaitan dengan pengelolaan keselamatan di perlintasan sebidang. Dana pagu indikatif yang diperlukan pada Program Pengelolaan Perkeretaapian sebesar Rp. 775.000.000.

4.2 Rumusan Usulan Prioritas Program dan Kegiatan, Target Kinerja, Capaian dan Kebutuhan Pendanaan

Sesuai dengan usulan program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun Anggaran 2023, Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo mempunyai target kinerja sebanyak 3 program, 21 kegiatan dan 52 sub kegiatan dengan kebutuhan pagu anggaran sebesar Rp. 50.252.758.900 (Lima Puluh Juta Dua Ratus Lima Puluh Dua Ribu

Tujuh Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Rupiah) yang berasal dari APBD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 sebagaimana tabel pada lampiran Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024.

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 ini sebagai pedoman pelaksanaan pencapaian target indikator kinerja pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode 2021-2026 guna mewujudkan visi misi Bupati terpilih serta acuan program jangka pendek dan landasan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo.

Oleh sebab itu, dengan kesederhanaan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 ini, diharapkan dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat serta dapat diimplementasikan ke dalam kinerja yang lebih bailk sesuai isi dan tujuan Rencana Kerja dimaksud.

Keberhasilan program-program pembangunan ini akan sangat bergantung pada komitmen pimpinan beserta jajarannya serta didukung dengan etos kerja yang tinggi disertai dengan disiplin ilmu sesuai dengan tugas yang diemban dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat, menciptakan kebersamaan dan pendayagunaan peran aktif masyarakat dan tokoh masyarakat dalam menciptakan suatu kondisi lalu lintas yang aman, nyaman, tertib, dan lancar.

Lampiran

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2024 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Lokasi	Rencana Tahun 2024			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
					Target	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.15.01.2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah	Persen	Kab. Sukoharjo	100	9.589.124.700	APBD		100	12.582.000.000	APBD
2.15.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	Kab. Sukoharjo	100	70.000.000	APBD		100	97.000.000	APBD
2.15.01.2.01.0001	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	Kab. Sukoharjo	5	40.000.000	APBD		6	61.000.000	APBD
2.15.01.2.01.0006	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	laporan	Kab. Sukoharjo	4	30.000.000	APBD		5	36.000.000	APBD
2.15.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	Kab. Sukoharjo	100	6.979.979.700	APBD		100	7.122.000.000	APBD
2.15.01.2.02.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	Kab. Sukoharjo	48	6.628.073.000	APBD		57	6.696.000.000	APBD
2.15.01.2.02.0003	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	dokumen	Kab. Sukoharjo	12	331.906.700	APBD		14	402.000.000	APBD
2.15.01.2.02.0005	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	dokumen	Kab. Sukoharjo	1	20.000.000	APBD		1	24.000.000	APBD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Lokasi	Rencana Tahun 2024			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
					Target	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana
2.15.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	Kab. Sukoharjo	100	341.190.000	APBD		100	597.000.000	APBD
2.15.01.2.05.0002	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	Kab. Sukoharjo	0	-	APBD		163	194.000.000	APBD
2.15.01.2.05.0009	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	Kab. Sukoharjo	120	341.190.000	APBD		129	403.000.000	APBD
2.15.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	Kab. Sukoharjo	100	505.500.000	APBD		100	827.000.000	APBD
2.15.01.2.06.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Kab. Sukoharjo	20	40.000.000	APBD		20	48.000.000	APBD
2.15.01.2.06.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Kab. Sukoharjo	12	30.000.000	APBD		12	121.000.000	APBD
2.15.01.2.06.0003	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Kab. Sukoharjo	20	40.000.000	APBD		30	48.000.000	APBD
2.15.01.2.06.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Kab. Sukoharjo	76	215.000.000	APBD		76	321.000.000	APBD
2.15.01.2.06.0005	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Kab. Sukoharjo	2	80.000.000	APBD		2	88.000.000	APBD
2.15.01.2.06.0006	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	dokumen	Kab. Sukoharjo	2	5.500.000	APBD		2	7.000.000	APBD
2.15.01.2.06.0009	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	Kab. Sukoharjo	4	95.000.000	APBD		32	194.000.000	APBD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Lokasi	Rencana Tahun 2024			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
					Target	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana
2.15.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	Kab. Sukoharjo	100	15.000.000	APBD		100	1.497.000.000	APBD
2.15.01.2.07.0001	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	Kab. Sukoharjo	0	-	APBD		6	1.424.000.000	APBD
2.15.01.2.07.0005	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	Kab. Sukoharjo	30	15.000.000	APBD		30	73.000.000	APBD
2.15.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	Kab. Sukoharjo	100	1.149.195.000	APBD		100	1.544.000.000	APBD
2.15.01.2.08.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	Kab. Sukoharjo	12	10.000.000	APBD		12	12.000.000	APBD
2.15.01.2.08.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	Kab. Sukoharjo	12	332.540.000	APBD		12	427.000.000	APBD
2.15.01.2.08.0003	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	*laporan*	Kab. Sukoharjo	*6*	6.655.000	APBD		*6*	*8.000.000*	APBD
2.15.01.2.08.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	*laporan*	Kab. Sukoharjo	*12*	800.000.000	APBD		*12*	1.097.000.000	APBD
2.15.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persen*	Kab. Sukoharjo	*100*	528.260.000	APBD		*100*	*898.000.000*	APBD
2.15.01.2.09.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	*Unit*	Kab. Sukoharjo	*36*	200.000.000	APBD		*38*	*353.000.000*	APBD
2.15.01.2.09.0009	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Kab. Sukoharjo	5	308.260.000	APBD		4	484.000.000	APBD
2.15.01.2.09.0011	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	*Unit*	Kab. Sukoharjo	*20*	20.000.000	APBD		*20*	61.000.000	APBD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Lokasi	Rencana Tahun 2024			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
					Target	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana
2.15.02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan					39.888.634.200	APBD			50.496.000.000	APBD
		Prosentase kendaraan bermotor wajib uji	Persen	Kab. Sukoharjo	71,20				71,50		
		Cakupan wilayah yang terkoneksi angkutan umum	Persen	Kab. Sukoharjo	11,00				11,49		
		Prosentase sarana prasarana lalu lintas angkutan jalan	Persen	Kab. Sukoharjo	84				85		
2.15.02.2.01	Kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Prosentase Kualitas Pengelolaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Persen	Kab. Sukoharjo	*100*	250.000.000	APBD		*100*	*303.000.000*	APBD
2.15.02.2.01.0001	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	dokumen	Kab. Sukoharjo	4	-	APBD		4	303.000.000	APBD
2.15.02.2.01.0002	Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	dokumen	Kab. Sukoharjo	*0*	-	APBD		*0*	*0*	APBD
2.15.02.2.01.0007	Sub Kegiatan Pelaksanaan Evaluasi (Reviu) Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Evaluasi (Reviu) Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	laporan	Kab. Sukoharjo	*0*		APBD		*0*	0	APBD
2.15.02.2.02	Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Prosentase Kualitas Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persen	Kab. Sukoharjo	100	36.339.151.000	APBD		100	44.536.000.000	APBD
2.15.02.2.02.0001	Sub Kegiatan Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	unit	Kab. Sukoharjo	*50*	200.000.000	APBD		*60*	242.000.000	APBD
2.15.02.2.02.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	unit	Kab. Sukoharjo	3412	35.211.401.000	APBD		3489	43.060.000.000	APBD
2.15.02.2.02.0003	Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	unit	Kab. Sukoharjo	1411	527.750.000	APBD		1537	750.000.000	APBD
2.15.02.2.02.0004	Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Unit	Kab. Sukoharjo	7829	400.000.000	APBD		8650	484.000.000	APBD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Lokasi	Rencana Tahun 2024			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
					Target	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana
2.15.02.2.03	Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Prosentase Kualitas Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Persen	Kab. Sukoharjo	100	563.800.000	APBD		100	776.000.000	APBD
2.15.02.2.03.0009	Sub Kegiatan Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	Jumlah terminal Tipe C yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	Unit	Kab. Sukoharjo	6	200.000.000	APBD		6	242.000.000	APBD
2.15.02.2.03.0011	Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	Unit	Kab. Sukoharjo	4	363.800.000	APBD		40	534.000.000	APBD
2.15.02.2.04	Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Prosentase Kualitas Pengelolaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persen	Kab. Sukoharjo	100	100.000.000	APBD		100	660.000.000	APBD
2.15.02.2.04.0002	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	laporan	Kab. Sukoharjo	2	100.000.000	APBD		2	660.000.000	APBD
2.15.02.2.05	Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Prosentase Pengelolaan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	persen	Kab. Sukoharjo	100	815.000.000	APBD		100	1.052.000.000	APBD
2.15.02.2.05.0005	Sub Kegiatan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	*laporan*	Kab. Sukoharjo	*1*	15.000.000	APBD		*2*	36.000.000	APBD
2.15.02.2.05.0007	Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	*Unit*	Kab. Sukoharjo	*9*	760.000.000	APBD		*9*	968.000.000	APBD
2.15.02.2.05.0008	Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	*laporan*	Kab. Sukoharjo	*1*	20.000.000	APBD		*2*	24.000.000	APBD
2.15.02.2.05.0010	Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Bermotor	*laporan*	Kab. Sukoharjo	*2*	20.000.000	APBD		*2*	24.000.000	APBD
2.15.02.2.06	Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Prosentase Kualitas Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persen	Kab. Sukoharjo	100	415.000.000	APBD		100	738.000.000	APBD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Lokasi	Rencana Tahun 2024			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
					Target	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana
2.15.02.2.06.0015	Sub Kegiatan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	laporan	Kab. Sukoharjo	6	50.000.000	APBD		6	133.000.000	APBD
2.15.02.2.06.0016	Sub Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan	dokumen	Kab. Sukoharjo	2	365.000.000	APBD		2	605.000.000	APBD
2.15.02.2.07	Kegiatan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Prosentase Kualitas Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Persen	Kab. Sukoharjo	100	50.000.000	APBD		100	103.000.000	APBD
2.15.02.2.07.0006	Sub Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi	laporan	Kab. Sukoharjo	11	50.000.000	APBD		12	103.000.000	APBD
2.15.02.2.08	Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Prosentase Kualitas Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ	*Persen*	Kab. Sukoharjo	*100*	1.090.266.000	APBD		*100*	*1.825.000.000*	APBD
2.15.02.2.08.0004	Sub Kegiatan Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	laporan	Kab. Sukoharjo	*12*	275.000.000	APBD		12	783.000.000	APBD
2.15.02.2.08.0007	Sub Kegiatan Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Laporan	Kab. Sukoharjo	*0*	*0*	APBD		*0*	*0*	APBD
2.15.02.2.08.0009	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Melalui Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah laporan Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	*laporan*	Kab. Sukoharjo	*12*	815.266.000	APBD		*12*	1.042.000.000	APBD
2.15.02.2.11	Kegiatan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Kualitas Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Persen*	Kab. Sukoharjo	*0*	-	APBD		*0*	*0*	APBD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Lokasi	Rencana Tahun 2024			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
					Target	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana
2.15.02.2.11.0003	Sub Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota	*dokumen*	Kab. Sukoharjo	*0*	-	APBD		*0*	*0*	APBD
2.15.02.2.09	Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Pengelolaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	persen	Kab. Sukoharjo	100	185.000.000	APBD		100	243.000.000	APBD
2.15.02.2.09.0002	Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	*Laporan*	Kab. Sukoharjo	*5*	155.000.000	APBD		*5*	158.000.000	APBD
2.15.02.2.09.0003	Sub Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	*Unit*	Kab. Sukoharjo	*33*	30.000.000	APBD		*33*	85.000.000	APBD
2.15.02.2.12	Kegiatan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Kualitas Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*persen*	Kab. Sukoharjo	*100*	33.100.000	APBD		*100*	*148.000.000*	APBD
2.15.02.2.12.0001	Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	*dokumen*	Kab. Sukoharjo	*0*	-	APBD		*0*	*0*	APBD
2.15.02.2.12.0002	Sub Kegiatan Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	*dokumen*	Kab. Sukoharjo	*5*	33.100.000	APBD		*6*	148.000.000	APBD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Lokasi	Rencana Tahun 2024			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
					Target	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana
2.15.02.2.11.0003	Sub Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota	*dokumen*	Kab. Sukoharjo	*0*	-	APBD		*0*	*0*	APBD
2.15.02.2.09	Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Pengelolaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	persen	Kab. Sukoharjo	100	185.000.000	APBD		100	243.000.000	APBD
2.15.02.2.09.0002	Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	*unit*	Kab. Sukoharjo	*33*	155.000.000	APBD		*5*	85.000.000	APBD
2.15.02.2.09.0003	Sub Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	*laporan*	Kab. Sukoharjo	*5*	30.000.000	APBD		*33*	158.000.000	APBD
2.15.02.2.12	Kegiatan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Kualitas Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*persen*	Kab. Sukoharjo	*100*	33.100.000	APBD		*100*	*148.000.000*	APBD
2.15.02.2.12.0001	Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	*dokumen*	Kab. Sukoharjo	*0*	-	APBD		*0*	*0*	APBD
2.15.02.2.12.0002	Sub Kegiatan Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	*dokumen*	Kab. Sukoharjo	*5*	33.100.000	APBD		*6*	148.000.000	APBD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Lokasi	Rencana Tahun 2024			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
					Target	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana
2.15.02.2.14	Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Kualitas Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Persen*	Kab. Sukoharjo	*100*	47.317.200	APBD		*100*	*112.000.000*	APBD
2.15.02.2.14.0002	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	*laporan*	Kab. Sukoharjo	*12*	20.000.000	APBD		12	33.000.000	APBD
2.15.02.2.14.0003	Sub Fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	*laporan*	Kab. Sukoharjo	5	27.317.200	APBD		*5*	79.000.000	APBD
2.15.03	Program Pengelolaan Pelayaran	Persentase Kinerja layanan penyeberangan sungai	Persen	Kab. Sukoharjo	0	-	APBD		0	0	APBD
2.15.03.2.06	Kegiatan Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota	Prosentase Kualitas Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota	Persen	Kab. Sukoharjo	0	-	APBD		0	0	APBD
2.15.03.2.06.0004	Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota	laporan	Kab. Sukoharjo	0	-	APBD		0	0	APBD
2.15.05	Program Pengelolaan Perkeretaapian	Prosentase Kinerja layanan perkeretaapian	Persen	Kab. Sukoharjo	100	775.000.000	APBD		100	1.355.000.000	APBD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Lokasi	Rencana Tahun 2024			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
					Target	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana
2.15.05.2.07	Kegiatan Penerbitan Izin Pengadaan Atau Pembangunan Perkeretapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Kualitas Penerbitan Izin Pengadaan Atau Pembangunan Perkeretapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persen	Kab. Sukoharjo	100	775.000.000	APBD		100	1.355.000.000	APBD
2.15.05.2.07.0002	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	laporan	Kab. Sukoharjo	7	775.000.000	APBD		7	1.355.000.000	APBD

RENCANA KERJA

TAHUN 2024

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KAB. SUKOHARJO



Jln. Wandyo Pranoto , Mandan,
Sukoharjo Kode Pos 57516,
Telp (0271) 593020, 590993
Fax (0271) 591603

https://dikbud.sukoharjokab.go.id
disdikskh@gmail.com

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 dapat tersusun. Renja Perangkat Daerah adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk periode 1 (satu) tahun. Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan salah satu produk perencanaan di bidang Pendidikan dan Kebudayaan yang merupakan penjabaran Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026. Renja ini disusun sebagai acuan dan pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo.

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2024 merupakan pelaksanaan tahun ketiga periode Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 - 2026. Penyusunan Rencana Kerja ini sebagai salah satu bentuk implementasi **Visi** Bupati Sukoharjo yaitu ***Mewujudkan Masyarakat Sukoharjo yang lebih Makmur***, serta **Misi Kedua** yaitu Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas.

Dokumen Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2024 memuat arah kebijakan pembangunan pelayanan pendidikan, prioritas pembangunan bidang pendidikan dan kebudayaan, berikut program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai target strategis yang telah direncanakan dalam Rencana Strategis.

Sukoharjo, 10 Agustus 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SUKOHARJO

HERU INDARJO, S.H., M.Hum
Pembina Utama Muda
NIP. 19650927 199203 1 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iii
BAB I 1
PENDAHULUAN 1
A. LATAR BELAKANG 1
B. LANDASAN HUKUM 3
C. MAKSUD DAN TUJUAN 6
BAB II 7
KINERJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 7
A. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2021 DAN CAPAIAN RENSTRA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 7
B. KINERJA PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 12
1. Aspek Pelayanan Umum 12
2. Anggaran dan Realisasi Pendanaan 22
C. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 24
1. Tantangan 24
2. Peluang 25
BAB III 28
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 28
A. Visi dan Misi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 28
B. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 29
C. Program dan Kegiatan 29
BAB IV 30
PENUTUP 30
A. CATATAN PENTING 30
B. KAIDAH PELAKSANAAN 30
C. RENCANA TINDAK LANJUT 31

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia yang dijamin Undang-Undang, untuk itu setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama, dan gender, sehingga pemerintah berkewajiban untuk memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.

Penyelenggaraan pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan dilakukan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa, selain itu pembangunan pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan Pendidikan dan Kebudayaan.

Di era otonomi daerah saat ini, tuntutan dalam bidang pendidikan adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan pembangunan pendidikan yang menjamin **ketersediaan** layanan pendidikan, memperluas **keterjangkauan** layanan Pendidikan dan Kebudayaan, meningkatkan **kualitas** dan relevansi pendidikan, mewujudkan **kesetaraan** bagi semua warga negara dalam layanan pendidikan dan menjamin **kepastian** layanan pendidikan. Kondisi ini menuntut suatu perencanaan penyelenggaraan pembangunan pendidikan yang akurat, transparan dan akuntabel, sehingga diharapkan kebijakan, strategi, program maupun kegiatan pembangunan dapat mengakomodir kebutuhan pemangku kepentingan pendidikan di daerah.

Tuntutan masyarakat untuk mewujudkan penyelenggaraan pembangunan pendidikan yang transparan dan akuntabel mengharuskan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berorientasi pada pemecahan masalah. Oleh karena itu kecermatan dan ketelitian mengidentifikasi permasalahan atau isu-isu strategis di daerah menjadi faktor penting dalam proses tahapan perencanaan pembangunan di bidang pendidikan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Renstra Dinas Pendidikan disusun dengan pendekatan teknokratik, partisipatif, politik, atas-bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*). Oleh karena itu penyusunan Renstra Dinas Pendidikan melibatkan dan mengakomodasikan masukan dari seluruh pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing. Sehingga diharapkan Renstra ini menjadi satu kesatuan dalam perencanaan pembangunan nasional dan daerah berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2024 merupakan pelaksanaan tahun kedua periode Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 - 2026 yang disusun pada tahun 2021. Penyusunan Rencana Kerja ini sebagai salah satu bentuk implementasi **Visi** Bupati Sukoharjo yaitu ***Mewujudkan masyarakat Sukoharjo yang lebih Makmur***, serta **Misi Kedua** yaitu meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan **Misi Ketiga** yaitu memperkuat perekonomian rakyat yang berdaya saing tinggi.

Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2024 disusun dengan mempertimbangkan hasil kinerja pelayanan pendidikan pada tahun 2022. Pengembangan layanan Pendidikan

dan kebudayaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo tahun 2024 difokuskan pada peningkatkan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal (PAUDNI) yang merata, berkualitas dan terjamin, peningkatkan layanan Pendidikan Dasar (DIKDAS) yang merata dan berkualitas, peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan yang setara serta pengembangan dan pelestarian adat dan budaya serta tradisi.

Dokumen Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2024 memuat arah kebijakan pembangunan pelayanan pendidikan, prioritas pembangunan bidang pendidikan dan kebudayaan, berikut program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai target strategis yang telah direncanakan dalam Rencana Strategis. Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 - 2026 juga mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tahun 2019 – 2024 dan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2024.

Perumusan Indikator Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengacu pada tujuan dan sasaran pada RPJMD Daerah Kabupaten Sukoharjo. Program dan Kegiatan dalam Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahunan.

B. LANDASAN HUKUM

Dasar hukum Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata

Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Penataan Struktur Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2007 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2007 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana diubah dengan PP Nomor 66 Tahun 2012 tentang Perubahan PP Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
16. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3);

17. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 6);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 39 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 39);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
20. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 5);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah;
22. Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 87 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 62).
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo.
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025.
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo tahun 2024 disusun dengan

maksud menjabarkan visi, misi, program dan kegiatan Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo ke dalam perencanaan tahunan guna memberikan arah dalam melaksanakan pembangunan pendidikan di Kabupaten Sukoharjo.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo tahun 2024 adalah :

1. Sebagai dasar dalam melaksanakan Program dan Kegiatan Tahunan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo;
2. Sebagai alat evaluasi dan pengukuran kinerja bagi keberhasilan dalam mencapai tujuan tahun 2024;
3. Sebagai dasar bagi masyarakat dan stakeholder untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan pendidikan di Kabupaten Sukoharjo;
4. Sebagai instrumen bagi masyarakat dan stakeholder dalam mengukur keberhasilan kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo.

BAB II
KINERJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

A. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2022 DAN CAPAIAN RENSTRA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Review hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2022 sebagaimana disajikan dalam LKjIP Tahun 2022 sekaligus realisasi APBD dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.1
Realisasi Belanja Program Bersumber APBD Kabupaten Tahun 2022

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	% CAPAIAN
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**463.216.834.319**	**443.375.934.840**	**95,72**
1.	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**453.740.000**	**453.135.000**	**99,87**
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	368.740.000	368.135.000	99,84
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10.000.000	10.000.000	100
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	10.000.000	10.000.000	100
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	10.000.000	10.000.000	100
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	10.000.000	10.000.000	100
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	25.000.000	25.000.000	100
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.000.000	20.000.000	100
2.	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**457.851.965.180**	**438.101.601.170**	**95,69**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	455.180.465.180	435.487.121.170	95,67
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2.519.400.000	2.463.900.000	97,8
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	20.000.000	20.000.000	100
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	112.100.000	110.580.000	98,64

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	10.000.000	10.000.000	100
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	10.000.000	10.000.000	100
3.	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**182.300.000**	**180.860.000**	**99,21**
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	182.300.000	180.860.000	99,21
4.	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**710.860.000**	**698.944.150**	**98,32**
	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	115.110.000	112.760.000	97,96
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	55.000.000	54.850.150	99,73
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	285.520.000	283.504.000	99,29
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	157.730.000	150.994.000	95,73
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	97.500.000	96.836.000	99,32
5.	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**1.377.214.162**	**1.366.186.216**	**99,2**
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	49.388.750	48.409.100	98,02
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	286.215.000	286.215.000	100
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9.000.000	9.000.000	100
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	493.264.500	493.189.000	99,98
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	324.299.600	321.742.000	99,21
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	36.980.000	35.640.000	96,38
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.490.000	5.295.000	96,45
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	172.576.312	165.326.116	95,8
6.	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**119.220.000**	**117.633.000**	**98,67**
	Pengadaan Mebel	119.220.000	117.633.000	98,67
7.	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.670.944.977**	**1.621.286.676**	**97,03**
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60.000.000	59.955.000	99,93
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	504.800.641	464.691.462	92,05
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.106.144.336	1.096.640.214	99,14

8.	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**850.590.000**	**836.288.628**	**98,32**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	408.534.000	399.280.128	97,73
	Pemeliharaan Mebel	5.000.000	4.970.000	99,4
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	224.015.000	223.799.500	99,9
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	213.041.000	208.239.000	97,75
II	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**151.187.887.247**	**144.685.086.158**	**95,7**
1.	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**	**68.843.507.328**	**66.200.203.656**	**96,16**
	Penambahan Ruang Kelas Baru	1.276.000.000	1.273.868.000	99,83
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	641.000.000	635.678.000	99,17
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	4.750.000.000	4.664.698.000	98,2
	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	754.209.000	749.564.000	99,38
	Pengadaan Mebeluer Sekolah	610.000.000	606.099.000	99,36
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	4.085.000.000	3.742.390.000	91,61
	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	800.000.000	796.373.000	99,55
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	475.000.000	475.000.000	100
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	12.806.428.328	12.763.862.211	99,67
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	1.642.500.000	1.630.571.000	99,27
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	1.052.670.000	1.045.213.000	99,29
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	39.665.700.000	37.533.728.445	94,63
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	285.000.000	283.159.000	99,35
2.	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	**51.670.790.475**	**50.850.039.524**	**98,41**
	Penambahan Ruang Kelas Baru	1.922.732.000	1.921.239.900	99,92
	Pembangunan Laboratorium	1.267.213.000	1.232.100.700	97,23
	Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah	523.525.000	514.787.900	98,33
	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	920.563.000	886.783.900	96,33

	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	3.581.831.000	3.411.822.900	95,25
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	317.400.000	283.755.000	89,4
	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	607.550.000	587.896.000	96,77
	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	1.631.912.000	1.533.108.900	93,95
	Rehabilitasi Sedang Berat Ruang Serba Guna Aula	256.550.000	251.575.500	98,06
	Rehabilitasi Sedang Berat Fasilitas Parkir	334.250.000	328.986.100	98,43
	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.472.582.000	1.451.341.000	98,56
	Pengadaan Mebel Sekolah	700.800.000	684.912.000	97,73
	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	27.500.000	27.500.000	100
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	424.880.000	377.304.000	88,8
	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	593.390.000	592.950.600	99,93
	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	915.067.500	912.971.300	99,77
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	1.586.636.500	1.573.613.730	99,18
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	4.848.010.475	4.835.234.229	99,74
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	400.000.000	400.000.000	100
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	549.098.000	547.558.000	99,72
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	28.553.800.000	28.259.643.865	98,97
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	235.500.000	234.954.000	99,77
3.	**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**	**24.755.775.444**	**24.625.478.978**	**99,47**
4.	**Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	**5.917.814.000**	**3.009.364.000**	**50,85**
	Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.115.000.000	735.000.000	65,92
	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	128.500.000	83.500.000	64,98
	Pengadaan Mebeluer Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	20.000.000	17.500.000	87,5

	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	1.475.000.000	484.550.000	32,85
	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	2.977.400.000	1.488.700.000	50
III	**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**	**340.000.000**	**337.103.500**	**99,15**
1.	**Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar**	**50.000.000**	**50.000.000**	**100**
2.	**Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal**	**290.000.000**	**287.103.500**	**99**
IV	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	**96.268.000**	**96.268.000**	**100**
1.	**Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	**96.268.000**	**96.268.000**	**100**
V	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	**2.127.737.000**	**1.962.820.820**	**92,25**
1.	**Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**819.000.000**	**758.654.220**	**92,63**
2.	**Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**1.118.737.000**	**1.017.836.000**	**90,98**
3.	**Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**190.000.000**	**186.330.600**	**98,07**
VI	**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**	**155.000.000**	**153.905.000**	**99,29**
1.	**Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**155.000.000**	**153.905.000**	99,29
VII	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	**320.660.000**	**314.244.400**	**98**
1.	**Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**	**95.000.000**	**93.800.000**	**98,74**
2.	**Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**	**225.660.000**	**220.444.400**	**97,69**
VIII	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	**435.775.000**	**431.773.000**	**99,08**
1.	**Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota**	**240.000.000**	**239.350.000**	**99,73**
2.	**Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**	**180.775.000**	**177.423.000**	**98,15**
3.	**Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota**	**15.000.000**	**15.000.000**	**100**

IX	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	**566.000.000**	**562.037.500**	**99,3**
1.	**Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**	**566.000.000**	**562.037.500**	**99,3**
	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	5.000.000	3.385.000	67,7
X	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	**305.000.000**	**211.312.769**	**69,28**
1.	**Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar**	**305.000.000**	**211.312.769**	**69,28**
	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	200.000.000	107.192.769	53,6

B. KINERJA PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Pembangunan pendidikan adalah bidang pembangunan yang menempati posisi strategis bagi pengembangan sumber daya manusia berkualitas sebagai modal dasar pembangunan secara menyeluruh. Keberhasilan pembangunan pendidikan akan mampu memberikan kontribusi bagi terciptanya insan yang mandiri dan bermartabat. Oleh karena itu tugas utama pembangunan pendidikan adalah memberi konstribusi yang berarti bagi pemecahan permasalahan bangsa.

Pendidikan pada hakekatnya bertujuan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab. Sejalan dengan tujuan tersebut Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bertekad mewujudkan insan Jawa Tengah yang bemoral, kompetitif dan berwawasan kebangsaan yang dibangun melalui pendidikan formal dan pendidikan non formal

yang dilaksanakan secara berkelanjutan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender.

1. Aspek Pelayanan Umum

a. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir hingga usia enam tahun melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan untuk memasuki jenjang pendidikan selanjutnya. Jenis pelayanan PAUD meliputi : (1) Taman Penintipan Anak (TPA) dengan sasaran anak usia 0-2 tahun, (2) Kelompok Bermain (KB) dengan sasaran anak usia 3-4 tahun, dan (3) Taman Kanak-kanak/Raudlotul Athfal (TK/RA) dengan sasaran anak usia 5-6 tahun

1) Perkembangan TK/TKLB/RA

Sejalan dengan perkembangan penduduk dan meningkatnya peran serta masyarakat di Kabupaten Sukoharjo, pembangunan pendidikan anak usia dini, khususnya TK/RA mengalami peningkatan cukup signifikan mulai tahun 2017 s.d. 2020, dengan data sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 2.2
Data Perkembangan TK/RA di Kabupaten Sukoharjo
Tahun 2016 – 2020

No	Komponen	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Sekolah	559	558	564	565	564
2.	Siswa	25.384	25.189	25.429	25.123	24.527
3.	Kelas	1.235	1.439	1.359	1.354	1.344
4.	Kondisi Ruang Kelas :					
	- Baik	1.083	1.114	1.131	1.142	1.270
	- Rusak Ringan	32	37	23	22	18

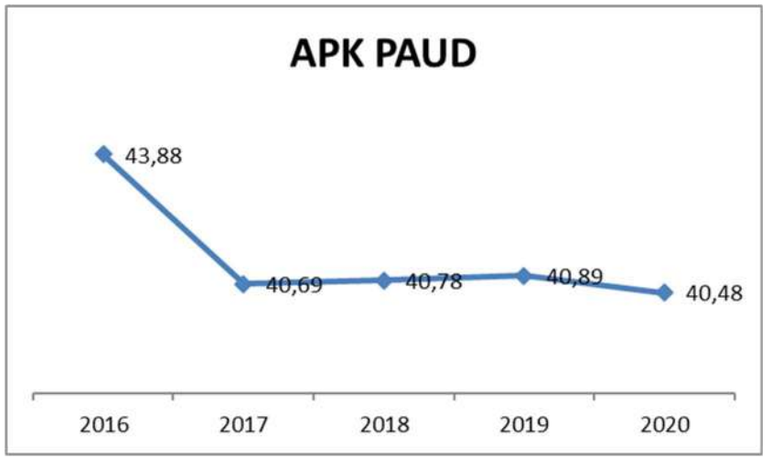
	- Rusak Berat	168	190	197	190	183
5.	Guru	1.997	1.894	1.891	1.869	2.010

Sumber : Data Profil Pendidikan Kabupaten Sukoharjo

2) Angka Partisipasi Kasar PAUD

Angka Partisipasi Kasar PAUD di Kabupaten Sukoharjo selama kurun waktu 2016 – 2020 mengalami pasang surut seperti ditunjukkan gambar berikut:

Gambar 2.1
Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD
Kabupaten Sukoharjo



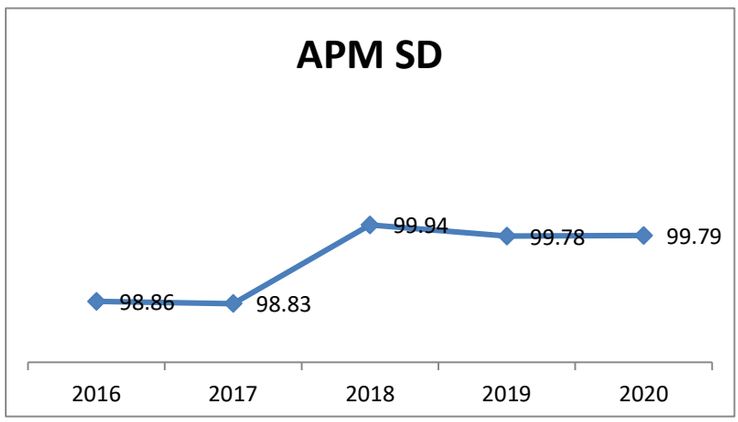
b. Pendidikan Dasar (DIKDAS)

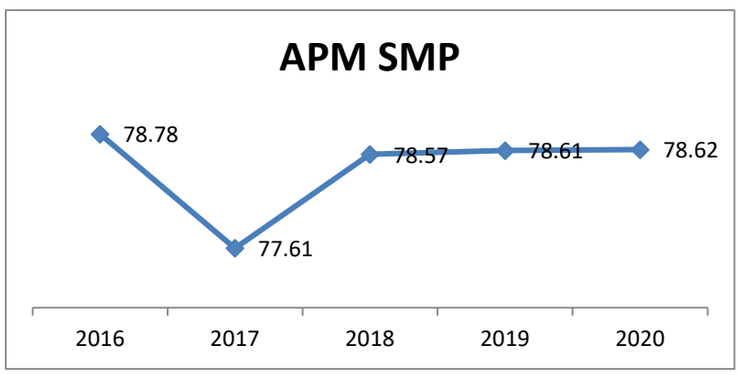
Jenjang Pendidikan Dasar (DIKDAS) merupakan program prioritas dalam rangka menuntaskan wajib belajar 9 tahun di Jawa Tengah. Sasaran Dikdas adalah anak usia 7-12 tahun untuk jenjang SD/SDLB/MI dan anak usia 13-15 tahun untuk jenjang SMP/SMPLB/MTs.

1) Angka Partisipasi Murni (APM)

Capaian Angka Partisipasi Murni (APM) pada tiap kelompok umur pendidikan dasar dari tahun ke tahun mengalami fluktuatif. Perkembangan APM dapat dilihat sebagaimana pada gambar 2.2

Gambar 2.2
Angka Partisipasi Murni (APM) jenjang SD/MI dan jenjang SMP/MTs Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 - 2020

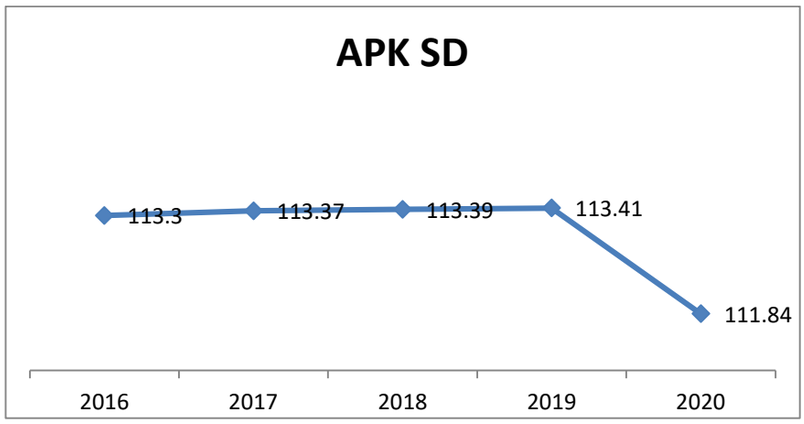


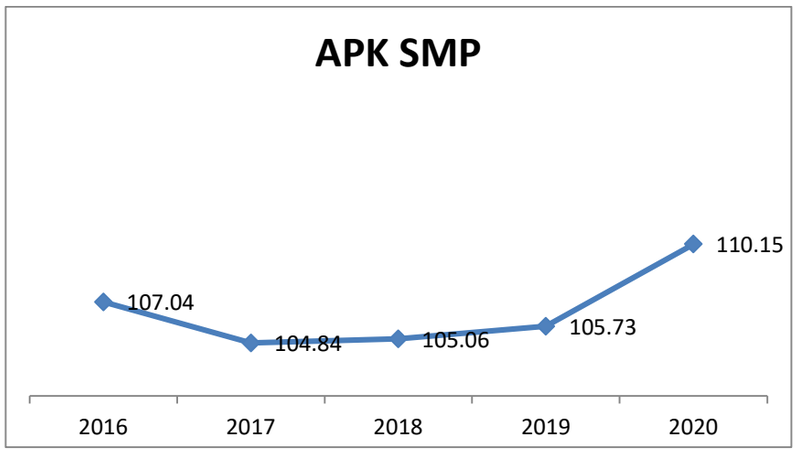


2) Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) SD di Kabupaten Sukoharjo mengalami peningkatan dari 110,17% pada tahun 2016 menjadi 110,99% pada tahun 2020. Kondisi ini menunjukkan bahwa Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun di Kabupaten Sukoharjo telah berhasil, selengkapnya sebagaimana Gambar 2.3

Gambar 2.3
Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang SD/MI dan jenjang SMP/MTs Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 – 2020





3) Perkembangan SD/SDLB/MI

Dengan pertumbuhan penduduk usia 7-12 tahun di Kabupaten Sukoharjo yang secara umum menurun mengakibatkan jumlah siswa SD/MI juga mengalami penurunan sehingga sebagian lembaga SD/SDLB/MI dilakukan regrouping. Data perkembangan SD/SDLB/MI di Kabupaten Sukoharjo tahun 2016-2020 sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 2.3
Data Perkembangan SD/SDLB/MI di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 - 2020

No	Komponen	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Sekolah	548	540	542	549	537
2.	Siswa	76.646	77.267	77.952	78.510	77.564
3.	Kelas	3.917	4.032	4.039	4.012	4.104
4.	Kondisi Ruang Kelas :					
	- Baik	2.549	2.710	2.804	3.036	3.066
	- Rusak Ringan	918	889	858	765	801
	- Rusak Berat	314	258	202	177	197
5.	Guru	5.998	5.972	5.998	6.109	6.538
6.	Fasilitas :					
	- Perpustakaan	475	482	490	492	493
	- UKS	316	344	353	383	384

Sumber : Data Profil Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Sukoharjo

4) Perkembangan SMP/SMPLB/MTs

Jumlah lembaga pendidikan ini cukup menggembirakan, hal ini terlihat dari perkembangan jumlah sekolah, jumlah siswa, jumlah kelas dan jumlah guru SMP/SMPLB/MTs di Jawa Tengah. Data perkembangan SMP/SMPLB/MTs di Jawa Tengah tahun 2016 - 2020 sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 2.4
Data Perkembangan SMP/SMPLB/MTs di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 – 2020

No	Komponen	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Sekolah	85	87	89	89	89
2.	Siswa	36.973	36.470	36.367	36.524	34.992

No	Komponen	2016	2017	2018	2019	2020
3.	Kelas	1.419	1.294	1.034	1.276	1.292
4.	Kondisi Ruang Kelas :					
	- Baik	1.095	1.098	1.106	1.152	1.196
	- Rusak Ringan	168	172	160	103	117
	- Rusak Berat	17	14	11	17	14
5.	Guru	2.733	2.722	2.699	2.653	2.874
6.	Fasilitas :					
	- Perpustakaan	67	66	63	68	92
	- Laboratorium	92	87	88	106	132
	- UKS	76	92	79	120	85

Sumber : Data Profil Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo

5) Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah

Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah menunjukkan jumlah sekolah jenjang pendidikan tertentu per 10.000 penduduk usia sekolah. Rasio ini mengindikasikan sejauh mana ketersediaan sekolah sudah mampu menampung semua penduduk usia sekolah. Berdasarkan data rasio ketersediaan sekolah untuk SD/MI per 10.000 penduduk usia 7-12 tahun, pada kurun waktu Tahun 2016-2020 mengalami penurunan dari 80,92 menjadi 77,31. Kondisi tersebut cukup menunjukkan bahwa ketersediaan SD/MI di Kabupaten Sukoharjo cukup memadai. Pada kurun waktu yang sama rasio ketersediaan SMP/MTs per 10.000 penduduk usia 13-15 tahun meningkat dari 24,27 menjadi 26,29. Namun demikian kondisi tersebut menunjukkan bahwa jumlah SMP/MTs relatif kurang memadai, karena idealnya mencapai rasio 52,08. Data selengkapnya terlihat dalam Tabel 2.5

Tabel 2.5
Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap 10.000 Jumlah Penduduk Jenjang Pendidikn Dasar Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2020

No	Komponen	2016	2017	2018	2019	2020
1	SD/MI					
	Sekolah	548	540	542	543	537
	Juml Penduduk 7-12 Tahun	67.720	68.221	68.829	69.073	69.465
	- Rasio SD/MI per 10.000 penduduk 7-12 tahun	80,92	79,15	78,75	78,62	77,31
2	SMP/MTs					
	Sekolah	85	87	89	89	92
	Juml Penduduk 13-15 Tahun	35.018	35.276	35.067	34.992	34992
	- Rasio SD/MI per 10.000 penduduk 13-15 tahun	24,27	24,66	25,38	25,43	26,29

Sumber : Data Profil Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo

6) Rasio Siswa terhadap Guru

Rasio siswa terhadap guru adalah jumlah siswa per jumlah murid berdasarkan tingkat pendidikan. Rasio ini selain mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar juga mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai kualitas pembelajaran.

Selama kurun waktu Tahun **2016 - 2020**, rasio ketersediaan guru terhadap murid SD/MI di Kabupaten Sukoharjo tidak mengalami perubahan signifikan. Demikian pula pada jenjang SMP/SMPLB/MTs. Data selengkapnya terdapat pada Tabel 2.6

Tabel 2.6
Rasio Guru dan Murid Jenjang Dikdas Di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 - 2020

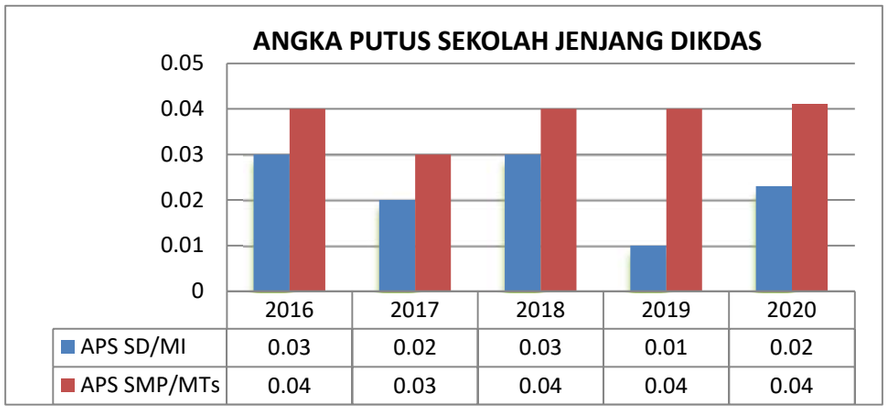
No	Komponen	2016	2017	2018	2019	2020
1.	SD/MI					
	- Jumlah Guru	5.998	5.972	5.998	5.982	6.538
	- Jumlah Siswa	76.646	77.267	77.952	78.242	77.564
	- Rasio	13	13	13	13	12
2.	SMP/MTs					
	- Jumlah Guru	2.733	2.722	2.699	2.653	2.874
	- Jumlah Siswa	36.973	36.470	36.367	36.524	38.269
	- Rasio	13	13	13	13	13

Sumber : Data Profil Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo

7) Angka Putus Sekolah

Angka putus sekolah (Drop Out) untuk jenjang pendidikan dasar mengalami penurunan. Angka Putus Sekolah siswa SD/SDLB/MI turun dari 0,08 menjadi 0,04 dan Angka Putus Sekolah siswa SMP/SMPLB/MTs turun dari 0,09 menjadi 0,03. Selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 2.4

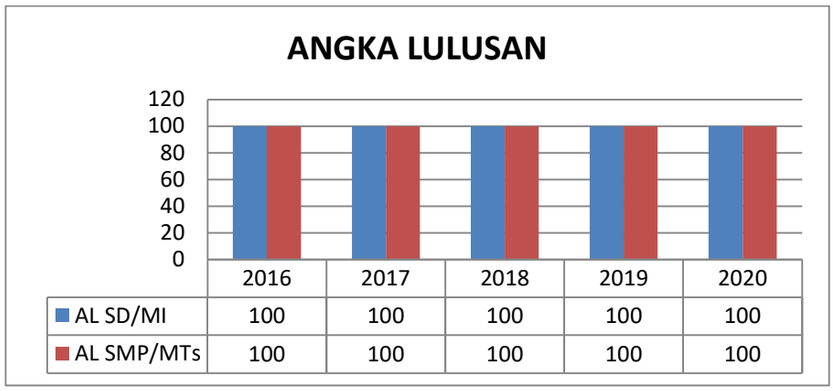
Gambar 2.4
Angka Putus Sekolah Dikdas Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 - 2020



8) Angka Lulusan

Angka lulusan menunjukkan tingkat keberhasilan siswa dalam menyelesaikan pendidikan pada masing-masing jenjang pendidikan**.** Capaian Angka Lulusan SD/SDLB/MI dan SMP/SMPLB/MTs tahun 2016 – 2020 mengalami peningkatan sebagaimana terlihat pada gambar 2.5

Gambar 2.5
Angka Lulusan (AL) Jenjang Dikdas Kabupaten Sukoharjo
Tahun 2016 - 2020

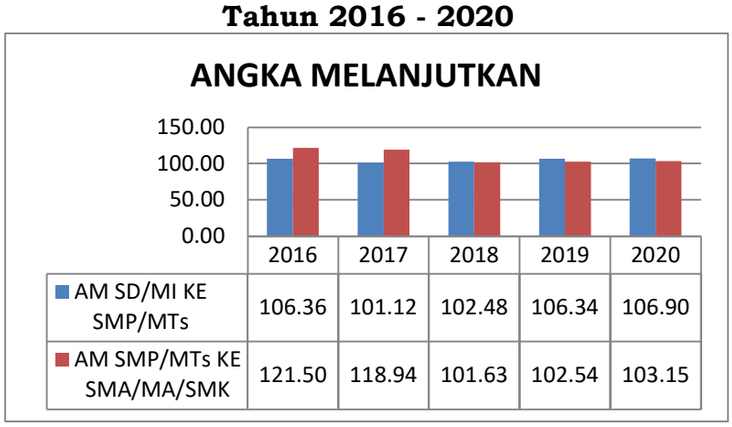


	2016	2017	2018	2019	2020
AL SD/MI	100	100	100	100	100
AL SMP/MTs	100	100	100	100	100

9) Angka Melanjutkan

Persentase siswa lulusan SD/MI yang melanjutkan ke jenjang SMP/MTs dalam kurun waktu tahun 2016-2020 mengalami sedikit Kenaikan. Angka melanjutkan (Angka Transisi) ke SMP/MTs sebesar 106,36 menjadi 106,90% dapat dilihat pada Gambar 2.6

Gambar 2.6
Angka Melanjutkan Jenjang Dikdas Kabupaten Sukoharjo
Tahun 2016 - 2020



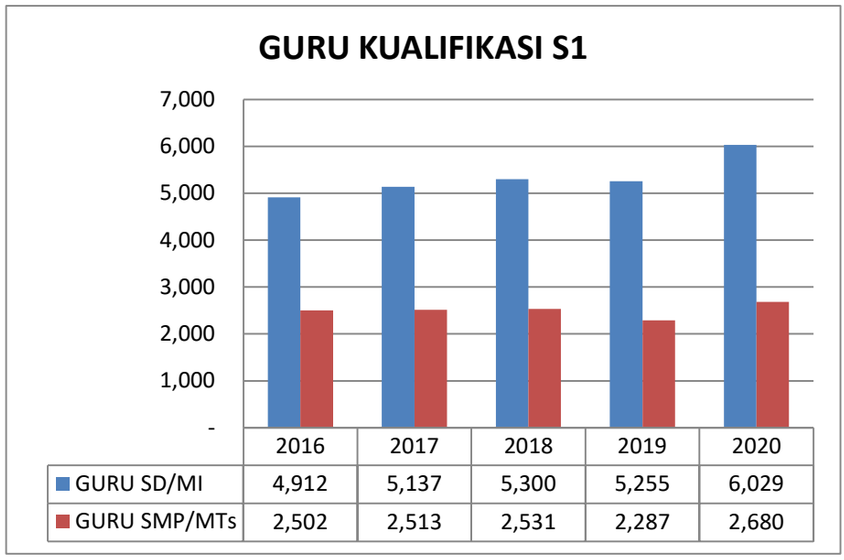
	2016	2017	2018	2019	2020
AM SD/MI KE SMP/MTs	106.36	101.12	102.48	106.34	106.90
AM SMP/MTs KE SMA/MA/SMK	121.50	118.94	101.63	102.54	103.15

Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

10) Kualifikasi Pendidik Dikdas

Selama kurun waktu tahun **2016 – 2020** persentase pendidik SD/SDLB/MI dan SMP/SMPLB/MTs yang memiliki kualifikasi S1/D4 mengalami peningkatan sebagaimana tertera pada Gambar 2.7

Gambar 2.7
Persentase Pendidik Dikdas Berkualifikasi S1/D4
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 - 2020



	2016	2017	2018	2019	2020
GURU SD/MI	4,912	5,137	5,300	5,255	6,029
GURU SMP/MTs	2,502	2,513	2,531	2,287	2,680

c. Kebudayaan

Kekhasan setiap daerah dapat dilihat salah satunya dari kebudayaan yang dimiliki oleh daerah itu sendiri. Kabupaten Sukoharjo ini memiliki beraneka ragam kebudayaan yang sampai sekarang masih tetap dipertahankan, "*nguri-uri budayaning jawi*" istilah ini memang tepat ditunjukkan untuk menjaga eksistensi budaya yang dimiliki. Hal ini dapat dilihat mulai dari elemen masyarakat desa, sekolah, hingga pemerintah daerah ikut serta bersama-sama menjaga kebudayaan yang dimiliki supaya tidak hilang sering berkembangnya jaman. Kebudayaan yang dilestarikan ini menjadi icon sebuah daerah. Adapun berbagai macam

kebudayaan yang dilestarikan ialah, kesenian musik, permainan daerah, upacara adat, tari, dan lain sebagainya, yang berjumlah 10 macam kesenian dan 18 Obyek Pemajuan Kebudayaan.

Tabel 2.7
Daftar Obyek Pemajuan Kebudayaan Dan Kesenian

NO	OBYEK PEMAJUAN KEBUDAYAAN	KETERANGAN
1	Adat Istiadat	Berdasarkan UU Nomor 5 tahun 2017
2	Bahasa	
3	Manuskrip	
4	Olahraga Tradisional	
5	Pengetahuan Tradisional	
6	Permainan Rakyat	
7	Ritus	
8	Seni	
9	Teknologi Tradisional	
10	Tradisi Lisan	

Tabel 2.8
Daftar Jenis Kesenian

No	**Jenis Kesenian**
1	Karawitan
2	Tari
3	Wayang
4	Teater
5	Kethoprak

Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Jenis Kesenian
6	Reog
7	Jathilan
8	Keroncong
9	Campursari
10	Dangdut
11	Band
12	Larasmadyo/santiswaran
13	Paduan suara
14	Hadroh/Sholawatan
15	Seni Rupa
16	Seni Kriya
17	Sastra
18	Permainan tradisional

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berupaya memfasilitasi kegiatan kebudayaan ini di sekolah-sekolah sehingga generasi muda saat ini merasa memiliki dan menjaganya.

2. Anggaran dan Realisasi Pendanaan

Realisasi anggaran pendanaan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo berasal dari APBD Kabupaten Sukoharjo, Bantuan Provinsi dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Pemerintah Pusat dengan rincian sebagai berikut :

a. APBD

Struktur anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo yang bersumber dari APBD Kabupaten Sukoharjo terbagi dalam 2 (dua) kategori, yaitu : Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung. Secara umum alokasi anggaran pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo mengalami peningkatan sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 2.8
Alokasi Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo Yang bersumber dari APBD Tahun 2016 – 2020

No	Belanja	Alokasi Anggaran (Rp 000)				
		2016	2017	2018	2019	2020
A	**Belanja Tidak Langsung**					
1	Belanja Pegawai	748.105.430	654.077.427	595.360.293	556.122.886	561.222.910
B	**Belanja Langsung**					
1	Belanja Pegawai	20.782.377	10.608.282	11.384.964	12.242.701	13.345.265
2	Belanja Barang dan Jasa	20.020.860	21.095.752	76.133.580	31.729.989	39.902.933
3	Belanja Modal	23.443.068	22.879.355	39.688.906	39.307.777	32.254.522
Total Belanja		812.351.735	708.660.816	722.567.743	639.403.353	646.725.630

Sumber : DPA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo

b. Bantuan Provinsi dan Dana Alokasi Khusus (DAK)

Selain dana APBD, Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo juga mengelola dana yang bersumber dari Bantuan Provinsi dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Adapun rincian anggaran dana Bantuan Provinsi dan Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah sebagai berikut :

Tabel 2.9
Alokasi Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo Yang bersumber dari Bantuan Provinsi dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2016 – 2020

NO	BELANJA	ALOKASI ANGGARAN (Rp 000)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Bantuan provinsi	3.419.434			200.000	60.000
2	Dana Alokasi Khusus		8.225.270	9.296.010	18.884.619	11.791.534
	Total Belanja	3.419.434	8.225.270	9.296.010	19.084.619	11.851.534

Sumber : Data Laporan Keuangan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah

C. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1. Tantangan.

Dalam mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo sesuai kondisi yang diharapkan, terdapat tantangan yang berpotensi menghambat pencapaian tersebut sebagai berikut :

a. Pemulihan ekonomi nasional yang lambat dan inflasi yang cukup tinggi, berpengaruh terhadap kemampuan Pemerintah dan sebagian orang tua dalam membiayai pendidikan.
b. Keterbatasan kemampuan keuangan Pemerintah/ Pemerintah Daerah untuk pembiayaan pendidikan.
c. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk menyekolahkan anak sampai jenjang pendidikan yang lebih tinggi terkait faktor ekonomi dan budaya.
d. Meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan pendidikan untuk memenuhi kebutuhan lokal dan nasional serta mampu bersaing secara global.
e. Ketersediaan layanan pendidikan yang tercukupi dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.
f. Meningkatkan partisipasi/kemitraan dengan dunia usaha dan industri, organisasi masyarakat dan organisasi profesi.
g. Globalisasi dan modernisasi melawan arus kebudayaan, sehingga generasi muda kurang mengenal dan menjaga kebudayaan yang dimiliki;
h. Belum optimalnya pemeliharaan, pengelolaan, dan pemanfaatan benda-benda budaya dan cagar budaya;
i. Belum optimalnya pembinaan dan pengembangan kesenian tradisional;
j. Sumber dana dan SDM yang masih terbatas.

2. Peluang.

Sekalipun dalam upaya pencapaian pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo dihadapkan pada tantangan di atas, namun dalam pelaksanaannya juga terdapat kondisi yang merupakan peluang bagi upaya pencapaian pelayanan. Peluang tersebut diantaranya adalah :

a. Diterbitkannya berbagai regulasi bidang Pendidikan dan Kebudayaan yang memberikan daya dukung bagi pelaksanaan kebijakan pendidikandan Kebudayaan.
b. Menguatnya komitmen Pemerintah dan DPRD terhadap dukungan alokasi pembiayaan pendidikan dan Kebudayaan.
c. Meningkatnya pemanfaatan dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi bagi pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan.
d. Meningkatnya kebutuhan tenaga kerja terampil dan meningkatnya daya tampung pada jenjang Pendidikan Tinggi.
e. Munculnya organisasi-organisasi baru di bidang Pendidikan dan Kebudayaan yang dapat menjadi mitra dalam peningkatan kualitas dan kuantitas Pendidikan dan Kebudayaan.
f. Meningkatnya peran serta pelaku usaha melalui program *Corporate Social Responbility* (CSR) untuk Pendidikan dan Kebudayaan.
g. Mengenalkan kebudayaan daerah melalui event-event sekolah dan inovatif.
h. Bonus Demografi.

   Bonus demografi merupakan suatu tantangan atas peluang yang sangat menjanjikan jika mampu memanfaatkan dengan optimal. Pada kondisi dimana penduduk dengan usia produktif yang sangat besar, sementara pada sisi lain jumlah usia muda semakin kecil,

dan penduduk usia lanjut dengan populasi yang belum terlalu besar. Bonus demografi akan diikuti dengan dampak sosial maupun ekonomi yang salah satunya merupakan dampak utama yakni angka ketergantungan penduduk, yaitu tingkat penduduk produktif yang menanggung penduduk nonproduktif (usia tua dan anak-anak) akan sangat rendah, diperkirakan mencapai 44 per 100 penduduk produktif. Peluang bonus demografi ini diharapkan jumlah penduduk produktif tidak banyak menanggung beban atas penduduk yang tidak produktif, dan dalam perspektif akhirnya selisih jumlah subsidi yang semakin kecil akan memberikan dampak kemandirian secara ekonomis yang mampu dimanfaatkan untuk sektor lain. Jumlah penduduk usia kerja yang melimpah pada kurun waktu terjadinya bonus demografi (2021-2030) sangat potensial memberikan dampak positif sebagai modal pembangunan untuk memacu pertumbuhan ekonomi menjadi semakin tinggi dan pada akhirnya hasil ini mampu meningkatkan tingkat kesejahteraan secara lebih luas.

Uraian tersebut di atas akan menjadi terbalik dan merupakan bencana bagi negara manakala bonus demografi tidak mampu dimanfaatkan sebagai peluang, karena jumlah penduduk yang besar dan dalam usia produktif namun tidak mampu terserap dalam dunia kerja akibat terbatasnya lapangan kerja dan rendahnya kompetensi. Hal yang paling utama harus dilakukan oleh pemerintah dengan kondisi tersebut adalah memberdayakan semua potensi yang ada, mempersiapkan rencana pembangunan yang diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja guna menampung penduduk usia produktif pada saat terjadinya bonus demografi tersebut. Guna menyonsong terjadinya bonus demografi tersebut, pendidikan menjadi sangat prioritas

untuk menjadi garapan utama guna mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas dan unggul. Kegagalan menyiapkan sumber daya yang unggul akan berakibat munculnya musibah pada situasi yang seharusnya menjadi berkah. Bonus demografi yang diperkirakan akan tersedianya jumlah penduduk usia produktif dan diperkirakan sebesar 70 % dari jumlah pendudk usia produktif di tahun 2021-2030 harus disikapi sebagai sebuah peluang emas untuk menjadikan negara ini mampu menjadi kekuatan ekonomi, dan hal yang harus dipersiapkan adalah penyediaan lapangan kerja dan sumber daya manusia yang berkualitas. Kata kunci untuk menyambut era bonus demografi dengan kesadaran bahwa pendidikan yang merupakan nvestasi jangka panjang dan sebagai instrumen utama kemajuan bangsa harus menjadi prioritas pembangunan.

BAB III
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

A. Visi dan Misi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Visi dan Misi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo mendukung Visi dan Misi Bupati untuk Mewujudkan Masyarakat Sukoharjo yang lebih Makmur.

Makna Visi Mewujudkan Masyarakat Sukoharjo yang lebih Makmur adalah :

Maju

Maju merupakan pelaksanaan pembangunan menuju ke arah yang lebih baik

Aman

Aman mengandung arti terhindar dari ancaman lahir dan batin secara indiividu dan kelompok

Konstitusional

Penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, maupun kemasyarakatan harus dilandasi hukum atau dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum

Mantap

Warga Masyarakat dan segenap penyelenggara Pemerintahan optimis dalam membangun Sukoharjo

Unggul

Unggul mempunyai arti semangat berprestasi untuk selalu berusaha mencapai yang terbaik

Rapi

Rapi mengandung pergertian *apik, baik, bersih, teratur, tertib, beres*

Untuk mencapai visi di atas, dilakukan melalui misi :

Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas

B. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Tujuan dan sasaran pada hakekatnya merupakan arahan bagi pelaksanaan setiap kegiatan dalam mendukung pelaksanaan misi, untuk mewujudkan visi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo selama kurun waktu 2021 - 2026. Tujuan dan sasaran diuraikan sebagai berikut :

Misi ke 2 **:**Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas

Tujuan :Membentuk sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, inovatif, dan berkarakter

Sasaran :Meningkatnya kualitas dan tingkat pendidikan masyarakat

Tujuan yang menjadi prioritas di bidang pendidikan dan Kebudayaan, antara lain:

1. Meningkatkan Kualitas pendidikan.
2. Meningkatkan kearifan budaya local

Adapun sasaran pembangunan di bidang pendidikan dan Kebudayaan yang dilaksanakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, antara lain:

1. Meningkatnya kualitas Aparatur dan Pelayanan Publik
2. Meningkatnya kualitas dan Akses pendidikan masyarakat
3. Meningkatnya profesionalisme Pendidik
4. Meningkatnya pengembangan budaya
5. Berkembangnya kesenian dan nilai-nilai budaya
6. Pelestarian situs, Cagar Budaya dan budaya Lokal

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan seperti Tabel 3.1 pada lampiran.

C. Program dan Kegiatan

Berdasarkan realisasi kinerja pelayanan pendidikan dan kinerja keuangan pada tahun 2022, dan untuk merealisasikan tujuan dan sasaran seperti dijabarkan di atas, rencana program dan kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2024 sebagaimana tabel 3.2 pada lampiran ini.

BAB IV
PENUTUP

A. CATATAN PENTING

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo tahun 2024 dilakukan dengan mempertimbangkan aspek legalitas, kebersamaan dengan menampung berbagai masukan dari berbagai fihak utamanya stakeholders pendidikan sehingga, sehingga berhasil disusun dokumen perencanaan untuk satu tahun ke depan.

Rencana Kerja Dinas Pendidikan dimaksudkan sebagai acuan dan pedoman bagi jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Dengan demikian seluruh jajaran di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten, Kormin Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan, Unit Pelaksana Teknis Dinas baik Sanggar Kegiatan Belajar serta sekolah terikat akan dokumen perencanaan ini.

Dengan Rencana Kerja Dinas Pendidikan ini, diharapkan pula dapat mendorong partisipasi masyarakat khususnya stakeholders pendidikan dalam pengelolaan pendidikan, sehingga lebih ikut bertanggung jawab dalam pembangunan layanan pendidikan yang lebih berkualitas.

B. KAIDAH PELAKSANAAN

Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2024 merupakan tahun keempat dari periode Renstra Dinas Pendidikan Tahun 2021-2026. Kaidah Pelaksanaan Renja sebagai berikut :

1. Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2024 digunakan sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2024;

3. Dengan disahkannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2021, maka akan dilakukan review Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2024 sesuai dengan dokumen RPJMD tersebut.

C. RENCANA TINDAK LANJUT

Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tujuannya, diharapkan dapat dipergunakan sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan sebagai dasar penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran tahun 2024 yang dapat dimanfaatkan oleh jajaran pendidikan sendiri maupun stakeholder yang berkepentingan.

Semoga Renja ini dapat dipedomani sebagai alat kendali mulai perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan sampai dengan evaluasi kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2024.

Sukoharjo, 10 Agustus 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SUKOHARJO

HERU INDARJO, S.H., M.Hum.
Pembina Utama Muda
NIP. 19650927 199203 1 007

Tabel 3.2
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kab. Sukoharjo
Tahun 2024

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu 2024 (Rp)
							Program	Keluaran Sub Kegiatan	
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				**652.684.221.276**
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**649.858.824.276**
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**				**649.858.824.276**
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**510.828.767.976**
1	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**270.000.000**
1	01	01	2.02	0002	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100 %	5 Dokumen	185.000.000
1	01	01	2.02	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100 %	1 Dokumen	10.000.000
1	01	01	2.02	0004	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	100 %	1 Dokumen	10.000.000
1	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	100 %	1 Dokumen	10.000.000
1	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	100 %	1 Dokumen	10.000.000
1	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100 %	2 Laporan	25.000.000
1	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	1 Laporan	20.000.000

1	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**505.071.340.000**
1	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	4443 Orang/bulan	501.898.184.000
1	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100 %	14 Dokumen	3.133.156.000
1	01	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	100 %	54 Dokumen	10.000.000
1	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100 %	1 Laporan	10.000.000
1	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	100 %	2 Laporan	10.000.000
1	01	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	100 %	1 Dokumen	10.000.000
1	**01**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**				**75.000.000**
1	01	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	100 %	450 Laporan	75.000.000
1	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				**730.593.000**
1	01	01	2.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	100 %	5 Dokumen	50.000.000
1	01	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	100 %	5 Dokumen	50.000.000
1	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100 %	120 Orang	150.000.000
1	01	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 %	5000 Orang	295.593.000
1	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100 %	2058 Orang	185.000.000
1	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**1.118.913.000**

1	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100 %	13 Paket	25.168.000
1	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100 %	5 Paket	318.084.000
1	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100 %	4 Paket	437.755.000
1	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	100 %	24 Paket	185.000.000
1	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	100 %	3240 Dokumen	20.000.000
1	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	100 %	300 Laporan	9.990.000
1	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 %	135 Laporan	122.916.000
1	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**280.000.000**
1	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	100 %	1 Unit	140.000.000
1	01	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	100 %	1 Unit	140.000.000
1	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**2.245.896.976**
1	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100 %	260 Laporan	50.000.000
1	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100 %	0 Laporan	1.078.000.000
1	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100 %	53 Laporan	1.117.896.976
1	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**1.037.025.000**
1	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	100 %	45 Unit	559.360.000
1	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	100 %	96 Unit	15.000.000
1	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100 %	175 Unit	222.420.000

1	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100 %	17 Unit	240.245.000
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**				**138.677.056.300**
1	**01**	**02**	**2.01**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**				**65.247.072.500**
1	01	02	2.01	0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	95,92 %	2 Unit	455.000.000
1	01	02	2.01	0009	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	95,92 %	1 Ruang	75.000.000
1	01	02	2.01	0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	95,92 %	1 Ruang	75.000.000
1	01	02	2.01	0014	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	95,92 %	9 Paket	307.000.000
1	01	02	2.01	0022	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	95,92 %	1 Paket	476.515.000
1	01	02	2.01	0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	95,92 %	1620 Peserta Didik	450.000.000
1	01	02	2.01	0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	95,92 %	2200 Orang	8.300.555.000
1	01	02	2.01	0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	95,92 %	5300 Orang	868.823.500
1	01	02	2.01	0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	95,92 %	5050 Satuan Pendidikan	1.078.879.000
1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	95,92 %	443 Satuan Pendidikan	50.974.300.000
1	01	02	2.01	0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	95,92 %	449 Orang	255.000.000
1	01	02	2.01	0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	95,92 %	4 Ruang	245.000.000
1	01	02	2.01	0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	95,92 %	3 Unit	300.000.000
1	01	02	2.01	0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	95,92 %	450 Satuan Pendi	300.000.000

								dikan	
1	01	02	2.01	0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	95,92 %	60 Ruang	1.086.000.000
1	**01**	**02**	**2.02**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**				**50.201.037.800**
1	01	02	2.02	0006	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	95,92 %	3 Ruang	1.460.365.000
1	01	02	2.02	0011	Pembangunan Kantin Sekolah	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun	95,92 %	1 Unit	168.155.000
1	01	02	2.02	0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	95,92 %	5 Unit	1.074.356.000
1	01	02	2.02	0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	95,92 %	10 Ruang	1.617.650.000
1	01	02	2.02	0018	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	95,92 %	2 Ruang	376.091.000
1	01	02	2.02	0019	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	95,92 %	1 Ruang	115.148.000
1	01	02	2.02	0022	Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	95,92 %	2 Unit	170.580.000
1	01	02	2.02	0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	95,92 %	6 Unit	543.252.000
1	01	02	2.02	0025	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	95,92 %	5 Paket	213.850.000
1	01	02	2.02	0026	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	95,92 %	1 Paket	25.000.000
1	01	02	2.02	0035	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	95,92 %	3 Paket	470.698.000
1	01	02	2.02	0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	95,92 %	4681 Peserta Didik	1.472.334.000
1	01	02	2.02	0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	95,92 %	593 Orang	3.932.195.800
1	01	02	2.02	0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	95,92 %	1755 Orang	300.000.000
1	01	02	2.02	0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	95,92 %	79 Satuan Pendidikan	562.803.000

1	01	02	2.02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	95,92 %	76 Satuan Pendidikan	35.471.700.000
1	01	02	2.02	0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	95,92 %	76 Orang	130.000.000
1	01	02	2.02	0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	95,92 %	79 Dokumen	955.538.000
1	01	02	2.02	0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	95,92 %	79 Satuan Pendidikan	373.670.000
1	01	02	2.02	0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	95,92 %	4 Ruang	543.421.000
1	01	02	2.02	0064	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	95,92 %	1 Ruang	224.231.000
1	**01**	**02**	**2.03**		**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**				**20.658.988.000**
1	01	02	2.03	0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	95,92 %	8 Unit	1.155.127.000
1	01	02	2.03	0003	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	95,92 %	1 Unit	115.500.000
1	01	02	2.03	0012	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	95,92 %	45 Paket	10.000.000
1	01	02	2.03	0013	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	95,92 %	1282 Peserta Didik	110.000.000
1	01	02	2.03	0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	95,92 %	1553 Orang	6.300.676.000
1	01	02	2.03	0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	95,92 %	580 Orang	250.000.000
1	01	02	2.03	0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	95,92 %	3653 Satuan Pendidikan	1.144.500.000
1	01	02	2.03	0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	95,92 %	660 Satuan Pendidikan	11.188.800.000

1	01	02	2.03	0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	95,92 %	305 Dokumen	69.500.000
1	01	02	2.03	0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	95,92 %	5 Ruang	224.885.000
1	01	02	2.03	0042	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	95,92 %	3 Unit	90.000.000
1	**01**	**02**	**2.04**		**Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**				**2.569.958.000**
1	01	02	2.04	0015	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	95,92 %	70 Orang	44.000.000
1	01	02	2.04	0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	95,92 %	433 Satuan Pendidikan	157.000.000
1	01	02	2.04	0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	95,92 %	8 Satuan Pendidikan	1.348.200.000
1	01	02	2.04	0043	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	95,92 %	1 Ruang	182.100.000
1	01	02	2.04	0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	95,92 %	332 Peserta Didik	200.000.000
1	01	02	2.04	0048	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	95,92 %	4 Paket	100.000.000
1	01	02	2.04	0049	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	95,92 %	2 Unit	538.658.000
1	**01**	**03**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**				**263.000.000**
1	**01**	**03**	**2.01**		**Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar**				**35.000.000**
1	01	03	2.01	0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya	100 %	443 Orang	35.000.000
1	**01**	**03**	**2.02**		**Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal**				**228.000.000**
1	01	03	2.02	0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	-	250 Dokumen	125.000.000

1	01	03	2.02	0006	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	-	274 Dokumen	103.000.000
1	**01**	**04**			**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**				**90.000.000**
1	**01**	**04**	**2.01**		**Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**				**90.000.000**
1	01	04	2.01	0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	75 %	1975 Dokumen	75.000.000
1	01	04	2.01	0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	75 %	40 Laporan	15.000.000
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**2.825.397.000**
2	**22**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**				**2.825.397.000**
2	**22**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**				**2.385.397.000**
2	**22**	**02**	**2.01**		**Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**				**875.000.000**
2	22	02	2.01	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	40 %	60 Objek	800.000.000
2	22	02	2.01	0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	40 %	120 Orang	75.000.000
2	**22**	**02**	**2.02**		**Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**				**1.185.397.000**
2	22	02	2.02	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	40 %	40 Objek	1.185.397.000

2	**22**	**02**	**2.03**		**Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota**				**325.000.000**
2	22	02	2.03	0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	40 %	50 Orang	25.000.000
2	22	02	2.03	0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi	40 %	1 Unit	300.000.000
2	**22**	**04**			**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**				**110.000.000**
2	**22**	**04**	**2.01**		**Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**				**110.000.000**
2	22	04	2.01	0003	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	20 %	2 Dokumen	110.000.000
2	**22**	**05**			**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**				**330.000.000**
2	**22**	**05**	**2.01**		**Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**				**200.000.000**
2	22	05	2.01	0002	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	9 %	4 Objek	200.000.000
2	**22**	**05**	**2.02**		**Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**				**130.000.000**
2	22	05	2.02	0001	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	9 %	4 Objek	130.000.000

RENCANA KERJA (RENJA)

TAHUN 2024

DINAS PPKB dan P3A

KABUPATEN SUKOHARJO

Disusun oleh :

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA dan PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DINAS PPKB dan P3A)
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas Rahmat dan Hidayah Nya sehingga penyusunan dokumen Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 dapat tersusun dengan baik. Rencana kerja ini disusun sebagai salah satu langkah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas sebagai acuan/pedoman untuk pelaksanaan kegiatan pada tahun 2024.

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuthakiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah akan merubah perspektif Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di tiap daerah. Permendagri tersebut membawa perubahan yang sangat besar dan membutuhkan penyesuaian dan pelaksanaannya.

Disadari sepenuhnya pula bahwa dalam penyusunan Renja ini masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan baik dari segi penulisan maupun kualitas materi yang sangat jauh dari yang diharapkan. Oleh sebab itu, saran dan masukan yang bersifat konstruktif sangat kami perlukan demi penyempurnaan Renja ini.

Demikian Renja ini dibuat semoga dapat memberikan manfaat bagi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo, Pemerintah dan lapisan masyarakat di wilayah Kabupaten Sukoharjo.

Sukoharjo, 10 Agustus 2023

Plt. KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN SUKOHARJO

PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
DINAS PPKB DAN P3A

SUMINI, SE, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19681021 199403 2 010

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN		**4**
1.1	Latar Belakang	4
1.2	Landasan Hukum	6
1.3	Maksud dan Tujuan	8
1.4	Sistematika Penulisan	9
BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA DINAS PPKB DAN PPPA TAHUN LALU		**10**
2.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas PPKB dan PPPA Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Dinas PPKB dan PPPA	10
2.2	Analisis Kinerja Pelayanan Dinas PPKB dan PPPA	22
2.3	Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas PPKB dan PPPA	34
2.4	Review terhadap Rancangan Awal RKPD	36
2.5	Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	48
BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS PPKB DAN PPPA		**49**
3.1	Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	49
3.2	Tujuan dan Sasaran Renja Dinas PPKB dan PPPA	50
3.3	Program dan Kegiatan	52
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN		**62**
BAB V PENUTUP		**114**

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Renja Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo merupakan dokumen perencanaan Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Sukoharjo untuk periode 1 (satu) tahun. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Perencanaan adalah suatu proses yang sistimatis untuk mewujudkan kondisi masa depan yang diharapkan secara ekonomis, efisien dan efektif, yang meliputi tahapan penyusunan rencana yang SMART, terpadu dan tanggap terhadap dinamika perubahan, tahapan penetapan rencana, tahapan pengendalian pelaksanaan rencana dan tahapan evaluasi hasil pelaksanaan rencana. Telah dipahami secara umum bahwa : gagal merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan.

Daerah sesuai dengan kewenanganya menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Secara teknis operasional, perencanaan pembangunan daerah tersebut diselenggarakan oleh perangkat daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah.

Dokumen perencanaan di tingkat daerah adalah rencana strategis dan rencana kerja perangkat daerah. Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renja PD) adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk 5 (lima) tahun, yang menjadi pedoman dalam peningkatan kinerja

penyelenggaraan pembangunan bidang urusan pemerintahannya untuk mewujudkan target RPJMD, yang diselaraskan dengan pencapaian sasaran pembangunan nasional.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) adalah dokumen perencanaan kinerja perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) perangkat daerah untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja Renstra dan RPJMD, yang diselaraskan dengan pencapaian sasaran pembangunan nasional.

Proses penyusunan Renja Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 didasarkan pada Renstra Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Sukoharjo 2021-2026 dengan memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan dalam RKPD Tahun 2024. Sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Sukoharjo serta sejalan dengan visi pembangunan jangka menengah daerah maka telah dirumuskan visi Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Sukoharjo di dalam rencana strategis tahun 2021 -2026 yaitu **“ Terwujudnya Sukoharjo Yang Lebih Makmur”.** Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mendukung pencapaian misi ke 2 (dua) yaitu Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas.

Renja Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Sukoharjo memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas fungsinya. Tahapan penyusunan Renja Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Sukoharjo adalah sebagai berikut :

1. Persiapan penyusunan Renja Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Sukoharjo
2. Penyusunan Rancangan awal Renja Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Sukoharjo berpedoman pada Renstra Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Sukoharjo, evaluasi hasil Renja Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Sukoharjo

tahun lalu dan evaluasi hasil Renja Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Sukoharjo tahun berjalan.

3. Penyusunan Rancangan Renja Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Sukoharjo berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah dan Rancangan Awal RKPD.
4. Pembahasan Rancangan Renja Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Sukoharjo dalam forum Perangkat Daerah/lintas perangkat Daerah untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran.
5. Perumusan Rancangan Akhir Renja Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Sukoharjo berdasarkan Perkada tentang RKPD.
6. Verifikasi Rancangan Akhir Renja Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Sukoharjo untuk ditetapkan oleh Kepala Daerah, paling lambat 1 (satu) minggu setelah Perkada tentang RKPD ditetapkan.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Tahun 2024 adalah :

a. Landasan Idiil: Pancasila.
b. Landasan Konstitusional : UUD 1945.
c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
e. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025.
f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa

kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
h. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024.
i. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
k. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
l. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
m. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor : 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo;
n. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026.

1.3 Maksud dan tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud penyusunan Renja Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 ini adalah untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja Renstra dan RPJMD Kabupaten Sukoharjo di tahun 2024 melalui perencanaan kinerja tahunan.

1.3.2 Tujuan

Tujuan dari penyusunan Renja Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 ini adalah:

a. Mensinkronkan dan mensinergikan program Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 dengan target dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana terumus dalam dokumen RPJM Daerah Kabupaten sukoharjo 2021-2026;
b. Menyiapkan rencana Program Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024;
c. Menyiapkan rencana Kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024;
d. Menyusuan Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dicapai, guna mencapai sasaran organisasi Tahun 2024;
e. Menetapkan pendanaan indikatif untuk setiap program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 disusun berikut :

Bab I. PENDAHULUAN

Bab ini memberi gambaran umum tentang penyusunan Renja Dinas PPKB dan PPPA Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024, yang meliputi : latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

Bab II. HASIL EVALUASI RENCANA KERJA DINAS PPKB DAN PPPA TAHUN LALU

Bab ini memuat terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas PPKB dan PPPA Tahun 2022 dan perkiraan Tahun 2023.

Bab III. TUJUAN DAN SASARAN DINAS PPKB DAN PPPA

Bab ini menguraikan tujuan, sasaran, program, dan kegiatan yang direncanakan.

Bab IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PPKB DAN PPPA

Berisi rencana kerja dan rencana pendanaan, yaitu Program Pembangunan Daerah (Program Strategis Daerah) dan Program Dinas PPKB dan PPPA untuk mewujudkan target tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah dan RPJMD.

Bab V. PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA DINAS PPKB DAN PPPA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas PPKB dan PPPA Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas PPKB dan PPPA

Untuk melaksanakan kebijakan yang merupakan perwujudan dari Visi dan Misi akan sangat dipengaruhi oleh tingkat kualitas sumber daya manusia. Karena manusia sebagai subyek pelaku pembangunan yang sangat berperan dan menentukan baik sebagai perencana, pelaksana, pengguna maupun sebagai evaluator dari hasil kegiatan pembangunan. Dengan demikian tingginya tingkat kualitas sumber daya manusia para pelaku pembangunan sangat diperlukan dalam upaya mencapai tujuan pembangunan.

Secara umum Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 memuat rencana program dan kegiatan dengan tetap memperhatikan potensi yang ada dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kabupaten Sukoharjo. Keberhasilan suatu proses perencanaan akan bisa dilihat dari hasil evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya, sejauh mana pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan berdampak terhadap capaian yang telah ditetapkan didalam Renstra Perangkat Daerah. Hasil dari evaluasi sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan di tahun mendatang.

Pada tahun Anggaran 2024, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.

Dalam rangka mencapai visi dan misi serta sesuai dengan fungsi dan tugas pokok, Dinas PPKB dan P3A

Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2024 melaksanakan 2 urusan dengan rincian sebagai berikut :

1. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melaksanakan 7 (tujuh) Program dan 22 (Dua puluh dua) Kegiatan, serta;
2. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melaksanakan 3 (tiga) Program dan 8 (delapan) Kegiatan.

Evaluasi Program dan Kegiatan pada Renja Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Tahun 2023 dapat dilihat Sebagaimana dalam tabel 2.1 berikut

Tabel 2.1
Evaluasi Program dan Kegiatan pada Renja Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Tahun 2023

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcomes)*/ Kegiatan *(output)*	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun n-1) 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
				Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 2023
1	2	3	4	5	6	7 = (6/5)	8	9=(4+6+8)	10=(9/3)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan perencanaan, penganggaran dan evaluasi Perangkat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan administrasi keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Administrasi Umum Perangkat daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

	Pemerintahan Daerah								
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER	Prosentase Lembaga yang Responsif Gender	35%	20%	20%	20%	100%	35%	100%	100%
Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Prosentase Perangkat Daerah yang menyusun Program Kerja Pengarusutamaan Gender	50%	50%	60%	60%	100%	50%	100%	100%
Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan kabupaten/Kota	Prosentasi Keterlibatan Perempuan di Bidang Politik, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan	50%	50%	50%	50%	100%	50%	100%	100%
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Masyarakat dalam Pemberdayaan Perempuan yang dikuatkan dan dikembangkan	50%	50%	60%	60%	100%	50%	100%	100%

PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Prosentase Kekerasan Terhadap Perempuan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Prevalensi kekerasan terhadap perempuan	0,018	0,018	0,017	0,017	100%	0,018	100%	100%
Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Prosentase Kasus kekerasan terhadap Perempuan yang mendapatkan pelayanan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Lembaga Penyedia Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	0,04	0,04	0,04	0,04	100%	0,04	100%	100%
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Prosentase Perempuan yang mendapat	0,16	0,12	0,15	0,15	100%	0,16	100%	100%

	pendampingan jadi pelaku usaha ekonomi								
Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Pemanfaatan Hasil Pelatihan Peningkatan Kualitas Keluarga	0,04	0,04	0,09	0,09	100%	0,04	100%	100%
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Lembaga yang memanfaatkan PUSPAGA	10%	10%	15%	15%	100%	10%	100%	100%
Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Kunjungan ke PUSPAGA	30%	30%	50%	50%	100%	30%	100%	100%

PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Prosentase Data da Informasi PPPA yang tersedia	70%	50%	60%	60%	100%	70%	100%	100%
Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan data dan informasi PPPA	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	100%	2 laporan	100%	100%
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Skor Kabupaten Layak Anak	700 Skor	650 Skor	675 Skor	675 Skor	100%	700 Skor	100%	100%
Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Prosentase Keterlibatan Stakeholder dalam menuju Kabupaten Layak Anak	70%	70%	75%	75%	100%	70%	100%	100%
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Prosentase Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	75%	75%	80%	80%	100%	75%	100%	100%

PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Prosentase Kekerasan Terhadap Anak yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak	60%	60%	62%	62%	100%	60%	100%	100%
Penyediaan Layanan bagi Anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat Kabupaten/Kota	Cakupan tersediannya layanan anak yang memerlukan perlindungan	60%	60%	62%	62%	100%	60%	100%	100%
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Cakupan Stakeholder yang memanfaatkan GDPK	30%	20%	25%	25%	100%	30%	100%	100%
Pemanduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian	Regulasi GDPK	1 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	1 Dokumen	100%	100%

Kuantitas Penduduk									
Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah	Prosentase Efektifitas Rumah Data Kependudukan (RDK) di kampung KB	10%	10%	20%	20%	100%	10%	100%	100%
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Cakupan Peserta KB Aktif	63,89%	68,85%	69,40%	68,40%	100%	63,89%	100%	100%
Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Prosentase peran serta stakeholder dan mitra kerja dalam penggerakan KB	80%	80%	80%	80%	100%	80%	100%	100%
Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Cakupan peserta KB baru	67%	67%	68%	68%	100%	67%	100%	100%
Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta pelaksanaan Pelayanan KB di daerah Kabupaten/Kota	Prosentase PUS yang terpenuhi kebutuhan alat kontrasepsinya	13,27%	14,30%	13,30%	13,30%	100%	13,27%	100%	100%

Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Cakupan Kampung KB aktif	75%	75%	75%	75%	100%	75%	100%	100%
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Cakupan Kelompok Kegiatan yang aktif	76%	72%	74%	74%	100%	76%	100%	100%
Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah terbentuknya Poktan di masing-masing Desa/Kelurahan	10 Kel	10 Kel	20 Kel	20 Kel	100%	10 Kel	100%	100%
Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga	Prosentase Peran aktif Organisasi Kemasyarakatan dalam Pembangunan Keluarga	75%	50%	75%	75%	100%	75%	100%	100%

melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga									

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas PPKB dan PPPA

Sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Sukoharjo menyelenggarakan 2 urusan Pemerintahan, yaitu Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana .

Pengukuran kinerja Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Sukoharjo didasarkan pada 6 sasaran strategis dalam Review Renstra SKPD 2021-2026 dengan capaian sasaran sebagai tolak ukur keberhasilan atau kegagalannya sebagaimana pada tabel berikut :

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungaan Anak Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 dan RPJMD Tahun 2021-2026 terdapat 2 Tujuan dan 6 Sasaran yang harus diwujudkan pada tahun ini, yaitu :

Tujuan :

1. Terwujudnya pengendalian penduduk.
2. Terwujudnya kesetaraan gender dan perlindungan anak.

Sasaran :

1. Meningkatnya kesetaraan gender dalam pembangunan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi.
2. Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak.
3. Menurunnya angka kelahiran.
4. Meningkatnya pendewasaan usia perkawinan (PUP).
5. Meningkatnya kualitas aparatur dan pelayanan publik.

Sasaran 1 : Meningkatnya kesetaraan gender dalam pembangunan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi.

Pencapaian indikator kinerja pada sasaran 1 :

1. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) :

Tabel 2.2
Capaian Kinerja Sasaran 1
Meningkatnya Kesetaraan Gender dalam Pembangunan
Bidang Politik, Sosial, Hukum dan Ekonomi

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022			% Capaian thd Target Akhir Renstra (2026)
			Target	Realisasi	Capaian	
1	2	3	4	5	6	8
1	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Nilai	76,22	79,16	103,86	76.37

Sumber : BPS Sukoharjo

Berdasarkan pengukuran kinerja sebagaimana tabel di atas, dari 1 (satu) indikator kinerja sebagai tolok ukurnya, capaian kinerja sasaran 1 sebesar 103,86 % atau dikategorikan Sangat Baik.

Untuk memperoleh gambaran mengenai perbandingan capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun sebelumnya, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.3
Perbandingan Capaian
Meningkatnya Kesetaraan Gender dalam Pembangunan
Bidang Politik, Sosial, Hukum dan Ekonomi

No	Indikantor Kinerja	Satuan	Tahun 2021			Tahun 2022		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Nilai	76,17	77,69	102	76,22	79,16	103,86

Sumber : BPS Sukoharjo

Apabila dilihat dari tabel tersebut, perbandingan antara realisasi dan target dari indikator kinerja Indek Pemberdayaan Gender (IDG) Pada Tahun 2021 dan 2022 tercapai lebih dari 100%. Hal ini ditunjukkan dengan tercapainya realisasi pada indikator Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Tahun 2021 dan Tahun 2022 lebih dari 100%

Selanjutnya untuk mengetahui perbandingan pencapaian kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan target akhir Renstra Tahun 2021-2026, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.4
Perbandingan Capaian Kinerja s.d Tahun 2022
Dengan Target Akhir Renstra
Sasaran Meningkatnya Kesetaraan Gender dalam Pembangunan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi s.d Tahun 2022	Target Akhir Renstra (2026)	Tingkat Kemajuan
1	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	%	79,16	76,37	103,65

Sumber : BPS Sukoharjo

Berdasarkan tabel di atas, indikator kinerja utama jika dibandingkan dengan target RPJMD/Renstra pada tahun 2022 dapat diketahui bahwa untuk sasaran strategi Meningkatnya Kesetaraan Gender dalam Pembangunan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD/Renstra pada Tahun 2026 maka prosentase capaian Indeks Pemberdayaan Gender sebesar 100%.

Pencapaian sasaran 1 didukung dengan pelaksanaan Program : Program Pengarusutamaan Gender, Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak, Program Peningkatan Kualitas Keluarga, Program Pemenuhan Hak Anak, sebesar Rp. 1.001.108.000,- Terealisasi sebesar Rp. 981.944.881.000,- Atau

(98,09%) dengan demikian terdapat efisiensi penggunaan sumber anggaran sebesar Rp. 19.163.119,- Atau sebesar (1,91%) dari pagu anggaran yang ditetapkan.

Sasaran 2 : Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak

Pencapaian indikator kinerja pada sasaran 2 :

1. Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan.
2. Rasio Kekerasan Terhadap Anak.

Tercermin pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2.5
Capaian Kinerja Sasaran 2
Sasaran Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak

No.	Indikator Kinerja	Sat	Tahun 2022			% Capaian thd Target Akhir Renstra (2026)
			Target	Realisasi	Capaian	
1	2	3	4	5	6	8
1	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan	Rasio	1:10400	1:10565	101,57	1:10410
2	Rasio Kekerasan Terhadap Anak	Rasio	1:8450	1:8596	101,73	1:8525

Sumber : Disdukcapil dan DPPKBP3A

Berdasarkan pengukuran kinerja sebagaimana tabel di atas, dari 2 (dua) indikator kinerja sebagai tolok ukurnya, capaian kinerja sasaran 2 Rasio kekerasan terhadap perempuan sebesar 101,57 atau dikategorikan sangat baik, Rasio Kekerasan terhadap anak sebesar 101,73 % dikategorikan sangat baik.

Untuk memperoleh gambaran mengenai perbandingan capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun sebelumnya, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.6
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan 2022
Sasaran Meningkatnya Perlindungan
Perempuan dan Anak

No	Indikantor Kinerja	Satuan	Tahun 2021			Tahun 2022		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan	Rasio	1:10397	1:12187	117,23	1:10400	1:10565	101,57
2	Rasio Kekerasan Terhadap Anak	Rasio	1:8419	1:8600	102,15	1:8550	1:8596	101,73

Sumber : Disdukcapil dan DPPKBP3A

Apabila dilihat dari tabel tersebut diatas, perbandingan antara realisasi dan target dari indikator kinerja Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan dan Rasio Kekerasan Terhadap Anak Pada Tahun 2021 dan 2022 tercapai lebih dari 100%. Hal ini ditunjukkan dengan tercapainya realisasi pada indikator Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan dan Rasio Kekerasan Terhadap Anak Tahun 2021 dan Tahun 2022 lebih dari 100%

Untuk mengetahui perbandingan pencapaian kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan target akhir Renstra Tahun 2021-2026, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.7
Perbandingan Capaian Kinerja s.d Tahun 2022
dengan Target Akhir Renstra

Sasaran Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi s.d Tahun 2022	Target Akhir Renstra (2026)	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6
1	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan	Rasio	1:10565	1:10410	98,53%
2	Rasio Kekerasan Terhadap Anak	Rasio	1:8596	1:8525	99,17%

Sumber : Disdukcapil dan DPPKBP3A

Berdasarkan tabel di atas, capaian sasaran Menigkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak, sampai dengan tahun 2022 untuk Indikator Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan sudah mencapai 101,57% dari target akhir renstra, indikator Rasio Kekerasan terhadap anak capaiannya melebihi target renstra sebesar 101,73 %

Pencapaian sasaran 2 didukung dengan pelaksanaan Program : Program Perlindungan Perempuan dan Program Perlindungan Khusus Anak dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 721.830.000,- terealisasi sebesar Rp. 428.892.700,- Atau (59,41%) dengan demikian terdapat efisiensi penggunaan sumber anggaran sebesar Rp. 292.937.300,- Atau sebesar (40,58 %) dari pagu anggaran yang ditetapkan.

Sasaran 3 : Menurunnya Angka Kelahiran

Pencapaian indikator kinerja pada sasaran 3 :

1. Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR)

2. Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Spesifik Fertility Rate / ASFR)

Tercermin pada Tabel 2.8 sebagai berikut.

Tabel 2.8
Capaian Kinerja Sasaran 3
Sasaran Menurunnya Angka Kelahiran

No.	Indikator Kinerja	Sat	Tahun 2022			% Capaian thd Target Akhir Renstra (2026)
			Target	Realisasi	Capaian %	
1	2	3	4	5	6	8
1	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate / TFR)	Angka	1,87	1,67	110,70	1,84
2	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Spesifik Fertility Rate / ASFR)	Angka	4,98	4,70	105,62	4,85

Sumber : Disdukcapil dan DPPKBP3A

Berdasarkan pengukuran kinerja sebagaimana tabel di atas, dari 2 (dua) indikator kinerja sebagai tolok ukurnya, capaian kinerja sasaran 3 Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) sebesar 110,70 atau dikategorikan sangat baik, Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Spesifik Fertility Rate/ASFR) sebesar 105,62% dikategorikan sangat baik.

Untuk memperoleh gambaran mengenai perbandingan capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun sebelumnya, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.9
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan 2022
Sasaran Menurunnya Angka Kelahiran

No	Indikantor Kinerja	Satuan	Tahun 2021			Tahun 2022		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate / TFR)	Angka	1,88	1,81	102,72	1,87	1,67	110,70
2	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Spesifik Fertility Rate / ASFR)	Angka	5,01	0,99	180,24	4,98	4,70	105,62

Sumber : Disdukcapil dan DPPKBP3A

Apabila dilihat dari tabel tersebut diatas, perbandingan antara realisasi dan target dari indikator kinerja Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) dan Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Spesifik) Pada Tahun 2021 dan 2022 tercapai lebih dari 100%. Hal ini ditunjukkan dengan tercapainya realisasi pada indikator Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) dan Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Spesifik) Tahun 2021 dan Tahun 2022 lebih dari 100%

Untuk mengetahui perbandingan pencapaian kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan target akhir Renstra Tahun 2021-2026, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.10
Perbandingan Capaian Kinerja s.d Tahun 2022
dengan Target Akhir Renstra
Sasaran Menurunnya Angka Kelahiran

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi s.d Tahun 2022	Target Akhir Renstra (2026)	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6
1	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate / TFR)	Angka	1,67	1,84	109,24
2	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Spesifik Fertility Rate / ASFR)	Angka	4,70	4,85	103,19

Sumber : Disdukcapil dan DPPKBP3A

Berdasarkan tabel di atas, capaian sasaran Menurunnya angka kelahiran, sampai dengan tahun 2022 untuk Indikator Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) sudah mencapai 109,24 dari target akhir renstra dan indikator Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Spesifik Fertility Rate/ASFR) sebesar 103,19%).

Pencapaian sasaran 3 didukung dengan pelaksanaan Program : Program Pengendalian Penduduk dan Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 7.494.980.000,- terealisasi sebesar Rp. 6.537.056.449,- Atau (87,21%) dengan demikian terdapat efisiensi penggunaan sumber anggaran sebesar Rp. 957.923.551,- Atau sebesar (12,78%) dari pagu anggaran yang ditetapkan.

Sasaran 4 : Meningkatnya Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP)

Pencapaian indikator kinerja pada sasaran 4 :

1. Rata-rata Usia Kawin Pertama Perempuan (UKP)

Tercermin pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.11
Capaian Kinerja Sasaran 3
Sasaran Meningkatnya Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP)

No.	Indikator Kinerja	Sat	Tahun 2022			% Capaian thd Target Akhir Renstra (2026)
			Target	Realisasi	Capaian	
1	2	3	4	5	6	8
1	Rata-rata Usia Kawin Pertama Perempuan (UKP)	Umur	22	22	100	23

Sumber : Kemenag dan DPPKBP3A

Berdasarkan pengukuran kinerja sebagaimana tabel di atas, capaian kinerja sasaran 4 adalah rata-rata Usia Kawin Pertama Perempuan (UKP) sebesar 95,45 dikategorikan baik. Realisasi kinerja Tahun 2022 dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya.

Untuk memperoleh gambaran mengenai perbandingan capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun sebelumnya, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.12
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan 2022
Sasaran Meningkatnya Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP)

No	Indikantor Kinerja	Satuan	Tahun 2021			Tahun 2022		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Rata-rata Usia Kawin Pertama Perempuan (UKP)	Umur	22	22	100	22	22	100

Sumber : Kemenag dan DPPKBP3A

Apabila dilihat dari tabel tersebut, perbandingan antara realisasi dan target dari indikator kinerja Rata-rata Usia Kawin Pertama Perempuan (UKP) Pada Tahun 2021 dan 2022 tercapai 100%. Hal ini ditunjukkan dengan tercapainya realisasi pada indikator Rata-rata Usia Kawin Pertama Perempuan (UKP) Tahun 2021 dan Tahun 2022 sebesar 100%.

Untuk mengetahui perbandingan pencapaian kinerja sampai dengan tahun 2021 dengan target akhir Renstra Tahun 2021-2026, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.13
Perbandingan Capaian Kinerja s.d Tahun 2022
dengan Target Akhir Renstra

Sasaran Meningkatnya Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP)

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi s.d Tahun 2022	Target Akhir Renstra (2026)	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6
1	Rata-rata Usia Kawin Pertama Perempuan (UKP)	Umur	22	23	95,65%

Sumber : Kemenag dan DPPKBP3A

Berdasarkan tabel di atas, capaian sasaran Meningkatnya Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP), sampai dengan tahun 2022 untuk Indikator Rata-rata usia kawin pertama perempuan (UKP) sudah mencapai 95,65% dari target akhir renstra.

Pencapaian sasaran 4 didukung dengan pelaksanaan Program : Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.377.850.000,- terealisasi sebesar Rp. 1.308.110.00,- Atau (94,93 %) dengan demikian terdapat efisiensi penggunaan sumber anggaran sebesar Rp. 69.740.000,- Atau sebesar (5,06%) dari pagu anggaran yang ditetapkan.

Sasaran 5 : Meningkatnya Kualitas Aparatur dan Pelayanan Publik

Pencapaian indikator kinerja pada sasaran 5 :

1. Nilai SAKIP Perangkat daerah

Tercermin pada Tabel 2.14 sebagai berikut.

Tabel 2.14
Capaian Kinerja Sasaran 3
Sasaran Meningkatnya Kualitas Aparatur dan Pelayanan Publik

No.	Indikator Kinerja	Sat	Tahun 2022			% Capaian thd Target Akhir Renstra (2026)
			Target	Realisasi	Capaian	
1	2	3	4	5	6	8
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	66	70,98		79

Sumber : DPPKBP3A

Berdasarkan pengukuran kinerja sebagaimana tabel di atas, dari indikator kinerja sebagai tolok ukurnya, capaian kinerja sasaran 5 adalah Nilai SAKIP Perangkat Daerah sebesar 104,81% dikategorikan sangat baik.

Untuk memperoleh gambaran mengenai perbandingan capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun sebelumnya, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.15
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan 2022
Sasaran Meningkatnya Kualitas Aparatur
dan Pelayanan Publik

No	Indikantor Kinerja	Satuan	Tahun 2021			Tahun 2022		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	64	67,08	104,81	66	70,98	107,54

Sumber : DPPKBP3A

Apabila dilihat dari tabel tersebut, perbandingan antara realisasi dan target dari indikator kinerja Nilai SAKIP Perangkat Daerah Pada Tahun 2021 dan 2022 tercapai 100%. Hal ini ditunjukkan dengan tercapainya realisasi pada indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Tahun 2022 lebih dari 100%

Untuk mengetahui perbandingan pencapaian kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan target akhir Renstra Tahun 2021-2026, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.16
Perbandingan Capaian Kinerja s.d Tahun 2022
dengan Target Akhir Renstra
Sasaran Meningkatnya Kualitas Aparatur
dan Pelayanan Publik

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi s.d Tahun 2022	Target Akhir Renstra (2026)	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	70,98	79	89,85

Sumber : DPPKBP3A

Berdasarkan tabel di atas, capaian sasaran Meningkatnya Kualitas Aparatur dan Pelayanan Publik, sampai dengan tahun 2022 untuk Indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah sudah mencapai 89,85% dari target akhir renstra.

Pencapaian sasaran 5 didukung dengan pelaksanaan Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.333.394.000,- terealisasi sebesar Rp. 3.153.627.005,- atau (94,60%) dengan demikian terdapat efisiensi penggunaan sumber anggaran sebesar Rp. 179.766.995,- atau sebesar (5,39%) dari pagu anggaran yang ditetapkan.

Dari beberapa program yang telah dilaksanakan dalam mencapai target kinerja sasaran 1 : Meningkatnya kesetaraan gender dalam pembangunan bidang apolitik, hukum, sosial dan ekonomi, 2 : Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak, 3: Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR), 4 : Meningkatnya pendewasaan usia perkawinan (PUP), 5 : Meningkatnya kualitas aparatur dan pelayanan publik.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas PPKB dan PPPA

Dengan kedudukan dan fungsinya serta urusan pemerintahan yang diselenggarakan Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Sukoharjo memiliki permasalahan dan isu strategis untuk Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yaitu Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Permasalahan yang dihadapi Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Sukoharjo dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya diuraikan sebagai berikut.

a. Permasalahan terkait kesetaraan dan keadilan gender :
   1) Kurangnya partisipasi perempuan dalam pembangunan.
   2) Kurangnya sumber daya manusia untuk menjalankan fungsi advokasi, fasilitasi menyusun perencanaan analisis dan manajemen PUG.
   3) Belum efektifnya pelaksanaan tugas-tugas pokja PUG.
   4) Masih rendahnya sumbangan pendapatan perempuan dalam keluarga.
b. Permasalahan terkait perlindungan hak perempuan :
   1) Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT.
   2) Perempuan banyak menjadi objek pornografi, menjadikan perempuan sangat rentan terhadap kekerasan.
   3) Kurangnya peran serta stakeholder dalam pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.
c. Permasalahan terkait perlindungan anak :
   1) Tingginya pengaruh negatif media terhadap

pembentukan kepribadian anak.

2) Kurangnya peran serta stakeholder dalam pencapaian kabupaten layak Anak (KLA).

3) Tingginya kasus perkawinan anak.

d. Permasalahan terkait dengan pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana :

1) Masih rendahnya Pasangan Usia Subur yang menjadi peserta KB aktif serta masih tingginya *unmeetneed*.

2) Masih rendahnya tingkat kesertaan ber KB bagi pria.

3) Kecenderungan meningkatnya kelahiran dari wanita usia 15-19 tahun (ASFR=*Age Spesifik Fertility Rate*).

4) Belum terwujudnya Grand Desain Pembangunan Kependudukan (GDPK).

e. Permasalahan terkait Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga :

1) Kurangnya pengelolaan Tribina (BKB,BKR,BKL dan UPPKS).

2) Belum optimalnya pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan keluarga.

f. Permasalahan terkait Kesekretariatan :

1) Belum optimalnya pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah.

Dari uraian permasalahan yang dihadapi Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Sukoharjo tersebut, maka rumusan isu-isu strategis masing-masing urusan wajib non pelayanan dasar yang dilaksanakan sebagaimana disebutkan dalam Renstra Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Sukoharjo 2021-2026 sebagai berikut.

1. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Isu Strategis Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak meliputi :

a. Kurangnya partisipasi perempuan dalam pembangunan.

b. Tingginya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.
c. Tingginya pengaruh negatif media terhadap pembentukan kepribadian anak.
d. Belum efektifnya pelaksanaan tugas-tugas Pokja PUG.
e. Kurangnya peran serta stakeholder dalam pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.

2. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Isu Strategis Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana meliputi :

a. Belum meratanya pengetahuan masyarakat terhadap kesehatan reproduksi.
b. Belum optimalnya pengembangan advokasi dan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE).
c. Cukup tingginya pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terlayani.
d. Masih rendahnya Pasangan Usia Subur yang menjadi peserta KB aktif.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD menjadi acuan dalam penyusunan rancangan rencana kerja PD. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan PD. Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD 2021-2026 serta urusan wajib non pelayanan dasar yang diselenggarakan Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Sukoharjo, maka misi ke dua, dari Misi Pemerintah Kabupaten Sukoharjo adalah misi yang harus di-emban Dinas PPKB dan P3A. Misi ke dua tersebut dimaknai sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Sukoharjo dengan pengendalian penduduk, meningkatkan kualitas hidup anak dan kesetaraan gender.

Sebagai salah satu PD yang ikut mengemban misi kedua bersama PD yang lain, mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Perempuan, yang berperan dalam pengendalian penduduk, mengaturan kelahiran, meningkatkan kesehatan ibu dan anak, menurunkan kematian ibu melahirkan, menekan angka pernikahan dini, meningkatkan ekonomi keluarga menuju masyarakat Sukoharjo yang lebih makmur dan memiliki daya saing tinggi, dengan melaksanakan :

1. Pengendalian laju pertumbuhan penduduk melalui pengaturan kelahiran dan meningkatkan pelayanan kesehatan reproduksi.
2. Peningkatan pemberdayaan dan ketahanan keluarga serta memperkuat kelembagaan dan jejaring program KB.
3. Peningkatan pengarusutamaan gender, advokasi dan perlindungan anak melalui peningkatan kesetaraan dan keadilan gender, peningkatan penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Secara keseluruhan, hasil telaahan terhadap rancangan awal RKPD/ Renstra PD dapat dilihat pada Tabel 2.17 berikut.

TABEL 2.17

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2024 KABUPATEN SUKOHARJO

OPD : Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Sukoharjo

NO.	Rancangan awal RKPD/Renstra PD					Hasil analisa kebutuhan					Catatan penting
	Program / kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian Kinerja**	**Pagu Indikatif (Rp.000)**	**Program / kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian Kinerja**	**Pagu Indikatif (Rp.000)**	
A.	URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					
	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		Prosentase Lembaga yang responsif gender	40%	352.000	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		Prosentase Lembaga yang responsif gender	40%	352.000	
1	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga pemerintah kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Sukoharjo	Prosentasi Perangkat Daerah yang menyusun Program kerja Pengarusutamaan Gender (PUG)	80%	95.000	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga pemerintah kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Sukoharjo	Prosentasi Perangkat Daerah yang menyusun Program kerja Pengarusutamaan Gender (PUG)	80%	95.000	

2	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota		Prosentasi keterlibatan perempuan di bidang politik, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan	70%	22.000	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota		Prosentasi keterlibatan perempuan di bidang politik, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan	70%	22.000	
3	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		Prosentase Partisipasi Aktif Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan	80%	235.000	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		Prosentase Partisipasi Aktif Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan	80%	235.000	
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN		Persentase kekerasan terhadap perempuan yang ditindaklanjuti	100%	118.950	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN		Persentase kekerasan terhadap perempuan yang ditindaklanjuti	100%	118.950	
1	Pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah Kabupaten/Kota		Prevalensi Kekerasan Terhadap Anak	0,01%	28.750	Pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah Kabupaten/Kota		Prevalensi Kekerasan Terhadap Anak	0,01%	28.750	

2	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan Kabupaten/Kota		Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang mendapatkan pelayanan	100%	62.200	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan Kabupaten/Kota		Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang mendapatkan pelayanan	100%	62.200	
3	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Prosentase lembaga penyedia layanan bagi perempuan korban kekerasan yang aktif	0,05%	28.000	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Prosentase lembaga penyedia layanan bagi perempuan korban kekerasan yang aktif	0,05%	28.000	
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA		Persentase perempuan yang mendapat pendampingan jadi pelaku usaha ekonomi	0,16%	81.050	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA		Persentase perempuan yang mendapat pendampingan jadi pelaku usaha ekonomi	0,16%	81.050	
1	Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender	Kab. Sukoharjo	Prosentase Pemanfaatan hasil pelatihan peningkatan	0,10%	20.450	Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan Hak	Kab. Sukoharjo	Prosentase Pemanfaatan hasil pelatihan peningkatan	0,10%	20.450	

	(KG) dan Hak anak tingkat daerah Kabupaten/Kota		kualitas keluarga			anak tingkat daerah Kabupaten/Kota		kualitas keluarga			
2	Penguatan dan Pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam daerah	Kab. Sukoharjo	Cakupan Lembaga yang menfaatkan PUSPAGA	15%	22.750	Penguatan dan Pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam daerah	Kab. Sukoharjo	Cakupan Lembaga yang menfaatkan PUSPAGA	15%	22.750	
3	Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan Hak anak yang wilayah kerjanya dalam daerah Kabupaten/Kota		Prosentase Kunjungan ke PUSPAGA	60%	37.850	Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan Hak anak yang wilayah kerjanya dalam daerah Kabupaten/Kota		Prosentase Kunjungan ke PUSPAGA	60%	37.850	
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Kab. Sukoharjo	Persentase data dan informasi PPPA yang tersedia	70%	33.000	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Kab. Sukoharjo	Persentase data dan informasi PPPA yang tersedia	70%	33.000	
1	Pengumpulan , Pengolahan Analisis	Kab. Sukoharjo	Jumlah laporan data dan informasi	2	33.000	Pengumpulan , Pengolahan Analisis dan	Kab. Sukoharjo	Jumlah laporan data dan informasi	2	33.000	

	dan Penyajian data Gender dan anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		PPPA			Penyajian data Gender dan anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		PPPA			
	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)		Skor kabupaten Layak Anak	725/madya	105.000	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)		Skor kabupaten Layak Anak	725/madya	105.000	
1	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten / Kota		Prosentase keterlibatan stakeholde rdalam menuju Kabupaten Layak Anak	85%	60.000	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten / Kota		stakeholde rdalam menuju Kabupaten Layak Anak	85%	60.000	
2	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan kabupaten/Kota	Kab. Sukoharjo	Prosentase lembaga penyedia layanan Peningkatan Kwalitas Hidup Anak	85%	45.000	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan kabupaten/Kota	Kab. Sukoharjo	Prosentase lembaga penyedia layanan Peningkatan Kwalitas Hidup Anak	85%	45.000	
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		Prosentase Kekerasan Terhadap Anak yang	100%	145.000	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		Prosentase Kekerasan Terhadap Anak yang	100%	145.000	

			diTindaklanjuti					diTindaklanjuti			
1	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		Prosentase pencegahan kekerasan terhadap anak	52%	60.000	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		Prosentase pencegahan kekerasan terhadap anak	52%	60.000	
2	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Cakupan tersedianya layanan anak yang memerlukan perlindungan	70%	55.000	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Cakupan tersedianya layanan anak yang memerlukan perlindungan	70%	55.000	
3	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Kab/Kota			65%	30.000	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Kab/Kota			65%	30.000	

B.	URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					
	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK		Cakupan stakeholder yang memanfaatkan GDPK	35 %	451.800	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK		Cakupan stakeholder yang memanfaatkan GDPK	35 %	451.800	
1	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Pengedalian Kuantitas Penduduk		Regulasi GDPK	12 dokumen	106.775	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Pengedalian Kuantitas Penduduk		Regulasi GDPK	12 dokumen	106.775	
2	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Prosentase efektifitas Rumah Data Kependudukan di kampung KB	80%	345.025	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Prosentase efektifitas Rumah Data Kependudukan di kampung KB	80%	345.025	
	PROGRAM PEMBINAAN		Cakupan Peserta KB aktif	69,75 %	9.264.386	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA		Cakupan Peserta KB aktif	69,75 %	9.264.386	

	KELUARGA BERENCANA					BERENCANA					
1	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal		Prosentase peran serta stageholder dan mitra kerja dalam penggerakan KB	80%	1.194.600	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal		Prosentase peran serta stageholder dan mitra kerja dalam penggerakan KB	80%	1.194.600	
2	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas lapangan KB (PKB/PLKB)		Cakupan peserta KB baru	70%	2.890.812	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas lapangan KB (PKB/PLKB)		Cakupan peserta KB baru	70%	2.890.812	
3	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di daerah Kabupaten/Kota		Prosentase PUS yang TIDAK terpenuhi kebutuhan alat kontrasepsinya (Unmetneed)	10,56%	2.566.974	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di daerah Kabupaten/Kota		Prosentase PUS yang TIDAK terpenuhi kebutuhan alat kontrasepsinya (Unmetneed)	10,56%	2.566.974	

4	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB		Prosentase kampung KB aktif	75%	2.612.000	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB		Prosentase kampung KB aktif	75%	2.612.000	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)		Cakupan kelompok kegiatan yang aktif	78%	4.984.080	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)		Cakupan kelompok kegiatan yang aktif	78%	4.984.080	
1	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		Prosentase terbentuknya Poktan di masing-masing Desa/Kelurahan	40 %	4.954.080	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		Prosentase terbentuknya Poktan di masing-masing Desa/Kelurahan	40 %	4.954.080	
2	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Prosentase Peran Aktif Organisasi Kemasyarakatan dalam Pembangunan Keluarga	75%	30.000	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan		Prosentase Peran Aktif Organisasi Kemasyarakatan dalam Pembangunan Keluarga	75%	30.000	

dalam Pembangunan
Keluarrga Melalui
Pembinaan
Ketahanan dan
Kesejahteraan
Keluarga

Keluarrga Melalui
Pembinaan Ketahanan
dan Kesejahteraan
Keluarga

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rancangan rencana kerja Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Sukoharjo didiskusikan dalam pembahasan forum Perangkat Daerah Kabupaten. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja dengan kesepakatan hasil musrenbang RKPD Kabupaten di kecamatan. Pada forum Perangkat Daerah ada usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Sukoharjo selaku Perangkat Daerah baik dari kelompok masyarakat, LSM, dan Kecamatan. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan.

Tabel 2.18

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Kabupaten Sukoharjo

Nama Perangkat Daerah : Dinas PPKB dan P3A

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
NIHIL					

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan pembangunan yang dihadapi dan capaian pembangunan selama ini, Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional untuk tahun 2020-2024 adalah:

TERWUJUDNYA INDONESIA MAJU YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG

Upaya untuk mewujudkan rancangan Pembangunan Nasional ,perlu adanya Visi-Misi yaitu:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia.
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing.
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan.
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan.
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa.
6. Menegakkan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya.
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga.
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya.
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Untuk mencapai Visi Misi ada 5 Arahan Presiden yang terdiri dari:

Pembangunan SDM, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi dan Transformasi Ekonomi.

Lima arahan Presiden ini diterjemahkan dalam 7 Agenda Pembangunan RPJMN yaitu :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing.
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan transformasi Pelayanan Publik.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas PPKB dan P3A

Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Sukoharjo melaksanakan 2 Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar, yaitu Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, sehingga program kegiatan di Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Sukoharjo tidak secara spesifik mendukung salah satu atau beberapa program prioritas di tahun 2023, tetapi secara tidak langsung menunjang seluruh program prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 tersebut diatas.

Meningkatkan Kinerja Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Sukoharjo, Tujuan Rencana Kerja Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 berdasarkan Renstra Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026 adalah:

1. Terwujudnya Kesetaraan Gender dan perlindungan Anak
2. Terwujudnya Pengendalian Penduduk

Sedangkan sasaran yang akan dicapai pada masing-masing tujuan dalam Rencana Kerja Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Sukoharjo adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas PPKB dan P3A Tahun 2024

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA
1.	Terwujudnya Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak	Meningkatnya kesetaraan gender dalam pembangunan bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	76,32
		Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak	1.Rasio kekerasan terhadap anak	1:8500
			2. Rasio kekerasan terhadap perempuan	1:10407
3.	Terwujudnya Pengendalian Penduduk	1. Menurunnya angka kelahiran	1. Angka Kelahiran Total/TFR	1,85 %
			2. Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Spesifik Fertility Rate/ASFR) partisipasi perempuan	4,90 %
		2.Meningkatnya pendewasaan usia perkawinan	Rata-rata usia kawin pertama perempuan	22 tahun
		3. Meningkatnya kualitas aparatur dan pelayanan publik	Nilai sakip perangkat daerah	72 angka

3.3 Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Sukoharjo tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Rancangan awal Perangkat Daerah pada RKPD mencakup 10 program terdiri atas 30 kegiatan dan 116 sub kegiatan yaitu:

A. Program Pengarusutamaam Gender dan Pemberdayaan Perempuan

1. Pelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) pada Lembaga pemerintah kewenangan Kabupaten/Kota
   - Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG.
   - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten.
   - Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG.
   - Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG.
2. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan kabupaten.
   - Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik , Hukum, Sosial dan Ekonomi
   - Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
3. Penguatan dan pengembangan Lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten
   - Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
   - Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten.
   - Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten.

B. Program Perlindungan Perempuan

1. Pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten.

- Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten.
- Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten.

2. Penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan kabupaten.
   - Penyediaan layanan pengaduan masyarakat bagi perempuan korban kekerasan kewenangan Kabupaten.
   - Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan Kabupaten.
3. Penguatan dan pengembangan Lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat daerah kabupaten/kota
   - Advokasi kebijakan dan pendampingan penyediaan sarana prasarana layanan bagi perempuan korban kekersan kewenangan Kabupaten.
   - Peningkatan Kapasitas Sumber daya lembaga penyedia layanan penanganan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan Kabupaten.
   - Penyediaan Kebutuhan spesifik bagi perempuan dalam situasi darurat dan kondisi khusus kewenangan Kabupaten.
   - Penguatan Jejaring antar lembaga penyedia kewenangan Kabupaten.

C. Program Peningkatan Kualitas Keluarga

1. Peningkatan kualitas keluarga dalam dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat daerah kabupaten.
   - Advokasi kebijakan dan pendampingan untuk

mewujudkan KG dan perlindungan anak kewenangan kabupaten.

- Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan anak bagi keluarga kewenangan Kabupaten.
- Pengembangan Kegiatan masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga kewenangan Kabupaten.

2. Penguatan dan pengembangan Lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan Hak anak yang wilayah kerjanya dalam daerah kabupaten.
   - Advokasi Kebijakan dan pendampingan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga tingkat Daerah kabupaten.
   - Peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga tingkat Daerah Kabupaten.
   - Penguatan Jejaring antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga tingkat daerah Kabupaten.
3. Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam daerah kabupaten.
   - Pelaksanaan Penyediaan layanan komprehensif bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan perlindungan anak yang wilayah kerjanya dalam daerah Kabupaten

D. Program Pengelolaan system data gender dan anak

1. Pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat daerah kabupaten.
   - Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten.
   - Penyajian dan Pemanfaatan data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten.

E. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)

1 Pelembagaan PHA pada Lembaga pemerintah , non pemerintah dan dunia usaha kewenangan kabupaten.

- Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak Pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten.
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten.

2 Penguatan dan pengembangan Lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kabupaten.

- Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak Bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten.
- Penguatan Jejaring antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah/kabupaten.

F. Program Perlindungan Khusus Anak

1. Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah kabupaten.

- Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan terhadap Kabupaten.
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan Kabupaten.

2. Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten.

- Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten.
- Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus

G. Program Pengendalian Penduduk

1. Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam rangka pengendalian kualitas penduduk
   - Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK)
   - Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Desaign Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten.
   - Dukungan Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan
   - Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan
   - Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidika Formal
   - Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidika NonFormal
   - Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal
   - Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga
   - Pelaksanaan Rapat Pengedalian Program KKBPK
2. Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah Kabupaten.
   - Perumusan Parameter Kependudukan
   - Penyusunan Profil Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga
   - Pemetaan Kependudukan
   - Membentuk Rumah Data Kependudukan Di KB Untuk memperkuat Integrasi Program KKBPK di sektor lain
   - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga
   - Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan

pelaporan Program KKBPK

H. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

1. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai kearifan budaya local
   - Advokasi Program KKBPK kepada stekholder dan Mitra Kerja
   - Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya lokal
   - Dukungan Media KIE dan Managemen BOKB
   - Promosi dan KIE Program KKBPK melalui media massa, cetak dan elektronik serta media luar ruang
   - Penggunaan Media massa cetak, elektronik dan media lainnya sesuai kearifan budaya lokal dalam pencitraan program KKBPK
   - Pelaksanaan Mekanisme operasional program KKBPK melalui rapat koordinasi kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes) dan Mini Loka Karya (Minilok)
   - Pengendalian Program KKBPK
2. Pendayagunaan tenaga penyuluh KB/Petugas Lapangna KB (PKB/PLKB)
   - Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan Oleh PKB/PLKB
   - Penyediaan sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB
   - Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana /Penyuluh lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)
   - Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)
3. Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan pelayanan KB di wilayah Kabupaten.
   - Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan sara Penunjang Pelayanan KB Ke

Fasilitas Kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya

- Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik alat dan obat Kontrasepsi serta sarana penunjang pelayanan KB
- Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
- Penyediaan Dukungan ayoman komplikasi berat dan kegagalan penggunaan MKJP
- Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB
- Pembinaan Pasca Pelayanan Bagi Peserta KB
- Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Faslitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
- Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, Serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan
- Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi
- Peningkatan Kesertaan KB Pria

4. Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah Kabupaten dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB
   - Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB
   - Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB
   - Pembinaan Terpadu Kampung KB

I. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

1. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
   - Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB
   - Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKL, PPKS, PIK-R, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)

- Orientasi/Pelatihan Teknis Pelayanan/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKL, PPKS, PIK-R, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
- Penyediaan Biaya Operasional Bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKL, PPKS, PIK-R, dan Pemberdayaan Ekonomi
- Penyediaan Biaya Operasional Bagi Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKL, PPKS, PIK-R, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
- Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)

2. Pelaksanaan dan Peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga
   - Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya Dalam Pembinaan Ketahanan dan kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
   - Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)

J. Program Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- Koordinasi dan penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD
- Koordinasi dan penyusunan Perubahan DPA-SKPD
- Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
   - Pelaksanaa penatausahaan dan penguJian verivikasi
   - Koordinasi dan penyususnan laporan keuangan akhir tahun
   - Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan bulanan/triwulanan/semesteran
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
   - Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
   - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
   - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
   - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
   - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
   - Fasilitas Kunjungan Tamu
   - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD
4. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
   - Penyediaan jasa surat menyurat
   - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
   - Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
   - Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya

6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
   - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
   - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan
   - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
   - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan
7. Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah
   - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta atribut kelengkapannya
   - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi
   - Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rumusan rencana program dan kegiatan Dinas PPKB dan PPPA tahun 2023 dan prakiraan maju tahun 2024 Kabupaten Sukoharjo untuk sumber dana APBD Kabupaten, APBD Provinsi, dan APBN secara detail dapat dilihat pada lampiran sebagai berikut :

TABEL 3.2
RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA-PD) TAHUN 2024
DINAS PPKB DAN P3A KABUPATEN SUKOHARJO

Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.02.0000 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Sub Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.02.0000 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Kode					Urusan / Bidang Urusan /Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kgiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
					Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak								19.998.678.880,00					16.264.300.380,00
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								19.998.678.880,00					16.264.300.380,00
2	08				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK								5.298.412.880,00					5.589.514.380,00
2	08	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								4.463.412.880,00					4.374.514.380,00
2	08	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								55.000.000,00					125.000.000,00
						Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Sukoharjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %		100 %	25.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	35.000.000,00
2	08	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD													

						Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Sukoharjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %		100 %	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	15.000.000,00
2	08	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD													
						Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Sukoharjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Dokumen	100 %	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	15.000.000,00
2	08	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD													
						Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Sukoharjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Dokumen	100 %	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	15.000.000,00
2	08	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD													
						Persentase Pelaksanaan	Jumlah Dokumen	Cakupan Perencanaan	Kab. Sukoharjo,	100 %	1 Dokumen	100 %	5.000.000,00	Dana Transfer		Jumlah Dokumen	1 Dokum	15.000.000,00

						Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa					Umum-Dana Alokasi Umum		Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	en	
2	08	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													
						Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Sukoharjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	3 Laporan	100 %	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	15.000.000,00
2	08	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
						Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Kab. Sukoharjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Laporan	100 %	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	15.000.000,00

								Perangkat Daerah										
2	08	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								3.790.171.000,00					3.391.486.000,00
2	08	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
						Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Sukoharjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	21 Orang/bulan	100 %	3.514.601.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21 Orang/bulan	3.085.916.000,00
2	08	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD													
						Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Sukoharjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	12 Dokumen	100 %	266.070.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	276.070.000,00
2	08	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD													
						Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Sukoharjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	3 Laporan	100 %	4.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 Laporan	14.500.000,00
2	0	0	2.0	00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD													

	8	1	2	07														
						Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Sukoharjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	3 Laporan	100 %	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3 Laporan	15.000.000,00
2	08	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								5.000.000,00					104.237.500,00
2	08	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya													
						Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Sukoharjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	50 Paket	100 %	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	50 Paket	29.237.500,00
2	08	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian													
						Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawai	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Sukoharjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Dokumen	100 %	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	15.000.000,00

							an											
2	08	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi													
						Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	44 Orang	100 %	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	44 Orang	60.000.000,00
2	08	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								200.224.000,00					270.773.000,00
2	08	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
						Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Sukoharjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	9 Paket	100 %	2.565.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	9 Paket	12.985.000,00
2	08	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
						Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Sukoharjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	15 Paket	100 %	8.851.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	15 Paket	18.851.000,00
2	08	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
						Persentase Pelaksanaan	Jumlah Paket	Cakupan Administrasi	Kab. Sukoharjo,	100 %	40 Paket	100 %	94.408.000,00	Dana Transfer		Jumlah Paket Bahan Logistik	40 Paket	104.537.000,00

						Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Umum Perangkat Daerah	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa					Umum-Dana Alokasi Umum		Kantor yang Disediakan		
2	08	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
						Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Sukoharjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	5 Paket	100 %	15.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	25.000.000,00
2	08	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
						Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Sukoharjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	2 Dokumen	100 %	4.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	14.000.000,00
2	08	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu													
						Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Sukoharjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	50 Laporan	100 %	5.400.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	50 Laporan	15.400.000,00
2	08	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
						Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan	Cakupan Administrasi Umum Perangkat	Kab. Sukoharjo, Semua Kecamata	100 %	88 Laporan	100 %	70.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat	88 Laporan	80.000.000,00

						Pemerintah Daerah	Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Daerah	n, Semua Kel/Desa					Alokasi Umum		Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
2	08	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								19.149.000,00					29.149.000,00
2	08	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
						Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Sukoharjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Unit	100 %	0,00	-		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	0,00
2	08	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
						Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Sukoharjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	2 Unit	100 %	19.149.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	29.149.000,00
2	08	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								158.900.880,00					188.900.880,00
2	08	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
						Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sukoharjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	2 Laporan	100 %	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	15.000.000,00
2	0	0	2.0	00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													

	8	1	8	02													
						Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sukoharjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	2 Laporan	100 %	13.434.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	23.434.000,00
2	08	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor												
						Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sukoharjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	5 Laporan	100 %	140.466.880,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	150.466.880,00
2	08	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								234.968.000,00					264.968.000,00
2	08	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan												
						Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sukoharjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	5 Unit	100 %	134.998.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	144.998.000,00
2	08	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan												

						Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sukoharjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	6 Unit	100 %	80.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	90.000.000,00
2	08	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
						Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sukoharjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	25 Unit	100 %	19.970.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	29.970.000,00
2	08	02			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN								352.000.000,00					442.000.000,00
2	08	02	2.01		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota								95.000.000,00					135.000.000,00
2	08	02	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG													
						Prosentase Lembaga yang Responsif Gender	Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan	Prosentase Perangkat Daerah yang menyusun Program Kerja Pengarus Utamaan Gender (PUG)	Kab. Sukoharjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40 %	1 Dokumen	80 %	15.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan	1 Dokumen	25.000.000,00

							Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/ Kota									Kabupaten/Kota		
2	08	02	2.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota													
						Prosentase Lembaga yang Responsif Gender	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/ Kota	Prosentase Perangkat Daerah yang menyusun Program Kerja Pengarus Utamaan Gender (PUG)	Kab. Sukoharjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40 %	1 Dokumen	80 %	29.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	39.500.000,00
2	08	02	2.01	0003	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG													
						Prosentase Lembaga yang Responsif Gender	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusta	Prosentase Perangkat Daerah yang menyusun Program Kerja Pengarus Utamaan Gender (PUG)	Kab. Sukoharjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40 %	40 Perangkat Daerah	80 %	25.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan	40 Perangkat Daerah	35.000.000,00

							maan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/ Kota									Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota		
2	08	02	2.01	0004	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG													
						Prosentase Lembaga yang Responsif Gender	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/ Kota	Prosentase Perangkat Daerah yang menyusun Program Kerja Pengarus Utamaan Gender (PUG)	Kab. Sukoharjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40 %	40 Perangkat Daerah	80 %	25.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Perangkat Daerah	35.500.000,00

2	08	02	2.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota								22.000.000,00					42.000.000,00
2	08	02	2.02	0001	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi													
						Prosentase Lembaga yang Responsif Gender	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/ Kota	Prosentase Keterlibatan Perempuan di Bidang Politik, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan	Kab. Sukoharjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40 %	1 Dokumen	70 %	11.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	21.000.000,00
2	08	02	2.02	0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi													
						Prosentase Lembaga yang Responsif Gender	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum,	Prosentase Keterlibatan Perempuan di Bidang Politik, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan	Kab. Sukoharjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40 %	24 Organisasi	70 %	11.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	24 Organisasi	21.000.000,00

							Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/ Kota											
2	08	02	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota								235.000.000,00					265.000.000,00
2	08	02	2.03	0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota													
						Prosentase Lembaga yang Responsif Gender	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	Prosentase Partisipasi Aktif Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan	Kab. Sukoharjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40 %	28 Lembaga	80 %	25.735.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	28 Lembaga	35.735.000,00
2	08	02	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota													
						Prosentase Lembaga yang Responsif Gender	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/	Prosentase Partisipasi Aktif Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan	Kab. Sukoharjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40 %	15 Orang	80 %	25.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan	15 Orang	35.000.000,00

							Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas									Kapasitas		
2	08	02	2.03	0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota													
						Prosentase Lembaga yang Responsif Gender	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota yang Tersedia	Prosentase Partisipasi Aktif Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan	Kab. Sukoharjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40 %	2 Dokumen	80 %	184.265.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	2 Dokumen	194.265.000,00
2	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN								118.950.000,00					198.950.000,00
2	08	03	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota								28.750.000,00					48.750.000,00
2	08	03	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota													
						Prosentase kekerasan terhadap perempuan yang ditindaklanjuti	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan	Prevalensi Kekerasan Terhadap Perempuan	Kab. Sukoharjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	4 Dokumen	0,01 %	20.200.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan	4 Dokumen	30.200.000,00

							Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota									Kewenangan Kabupaten/Kota		
2	08	03	2.01	0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota													
						Prosentase kekerasan terhadap perempuan yang ditindaklanjuti	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Prevalensi Kekerasan Terhadap Perempuan	Kab. Sukoharjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	4 Perangkat Daerah	0,01 %	8.550.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Perangkat Daerah	18.550.000,00
2	08	03	2.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota								62.200.000,00					82.200.000,00
2	08	03	2.02	0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota													
						Prosentase kekerasan terhadap perempuan yang ditindaklanjuti	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/ Kota yang Mendapatk	Prosentase Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan yang mendapatkan pelayanan	Kab. Sukoharjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	50 Orang	100 %	46.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan	50 Orang	56.500.000,00

							an Layanan Pengaduan									Layanan Pengaduan		
2	08	03	2.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota													
						Prosentase kekerasan terhadap perempuan yang ditindaklanjuti	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Prosentase Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan yang mendapatkan pelayanan	Kab. Sukoharjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	50 Layanan	100 %	15.700.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Layanan	25.700.000,00
2	08	03	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								28.000.000,00					68.000.000,00
2	08	03	2.03	0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota													
						Prosentase kekerasan terhadap perempuan yang ditindaklanjuti	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi	Prosentase lembaga penyedia layanan bagi perempuan korban kekerasan yang aktif	Kab. Sukoharjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Dokumen	0,05 %	7.650.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan	1 Dokumen	17.650.000,00

							Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/ Kota									Kabupaten/Kota		
2	08	03	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota													
						Prosentase kekerasan terhadap perempuan yang ditindaklanjuti	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/ Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Prosentase lembaga penyedia layanan bagi perempuan korban kekerasan yang aktif	Kab. Sukoharjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	72 Orang	0,05 %	7.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	72 Orang	17.500.000,00
2	08	03	2.03	0003	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota													
						Prosentase kekerasan terhadap perempuan yang ditindaklanjuti	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/	Prosentase lembaga penyedia layanan bagi perempuan korban kekerasan yang aktif	Kab. Sukoharjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	50 Orang	0,05 %	5.250.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan	50 Orang	15.250.000,00

							Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik									Pemenuhan Kebutuhan Spesifik		
2	08	03	2.03	0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota													
						Prosentase kekerasan terhadap perempuan yang ditindaklanjuti	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Prosentase lembaga penyedia layanan bagi perempuan korban kekerasan yang aktif	Kab. Sukoharjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	3 Dokumen	0,05 %	7.600.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Dokumen	17.600.000,00
2	08	04			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA								81.050.000,00					151.050.000,00
2	08	04	2.01		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								20.450.000,00					50.450.000,00
2	08	04	2.01	0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota													
						Prosentase Perempuan yang mendapat Pendampingan Menjadi Pelaku Usaha Ekonomi	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan	Prosentase Pemanfaatan hasil pelatihan peningkatan kualitas keluarga	Kab. Sukoharjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,17 %	4 Perangkat Daerah	0,11 %	7.950.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan	4 Perangkat Daerah	17.950.000,00

							Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota									Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		
2	08	04	2.01	0002	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota													
						Prosentase Perempuan yang mendapat Pendampingan Menjadi Pelaku Usaha Ekonomi	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota yang Tersedia	Prosentase Pemanfaatan hasil pelatihan peningkatan kualitas keluarga	Kab. Sukoharjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,17 %	2 Dokumen	0,11 %	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	2 Dokumen	15.000.000,00
2	08	04	2.01	0003	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota													
						Prosentase Perempuan yang mendapat Pendampingan Menjadi Pelaku	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat	Prosentase Pemanfaatan hasil pelatihan peningkatan kualitas keluarga	Kab. Sukoharjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,17 %	1 Dokumen	0,11 %	7.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk	1 Dokumen	17.500.000,00

						Usaha Ekonomi	untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota									Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		
2	08	04	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota								22.750.000,00					52.750.000,00
2	08	04	2.02	0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota													
						Prosentase Perempuan yang mendapat Pendampingan Menjadi Pelaku Usaha Ekonomi	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan	Cakupan Lembaga yang Memanfaatkan PUSPAGA	Kab. Sukoharjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,17 %	24 Lembaga	20 %	7.600.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan	24 Lembaga	17.600.000,00
2	08	04	2.02	0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota													
						Prosentase Perempuan yang mendapat Pendampingan Menjadi Pelaku Usaha Ekonomi	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga	Cakupan Lembaga yang Memanfaatkan PUSPAGA	Kab. Sukoharjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,17 %	80 Orang	20 %	7.650.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan	80 Orang	17.650.000,00

							Kewenangan Kabupaten/ Kota									Kabupaten/Kota		
2	08	04	2.02	0003	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota													
						Prosentase Perempuan yang mendapat Pendampingan Menjadi Pelaku Usaha Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota	Cakupan Lembaga yang Memanfaatkan PUSPAGA	Kab. Sukoharjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,17 %	1 Dokumen	20 %	7.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	17.500.000,00
2	08	04	2.03		Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota								37.850.000,00					47.850.000,00
2	08	04	2.03	0001	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota													
						Prosentase Perempuan yang mendapat Pendampingan Menjadi Pelaku Usaha Ekonomi	Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang	Prosentase Kunjungan Ke PUSPAGA	Kab. Sukoharjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,17 %	1 Layanan	50 %	37.850.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup	1 Layanan	47.850.000,00

							Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota yang Tersedia									Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia		
2	08	05			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK								33.000.000,00					53.000.000,00
2	08	05	2.01		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								33.000.000,00					53.000.000,00
2	08	05	2.01	0001	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota													
						Prosentase Data dan Informasi PPPA yang tersedia	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/ Kota yang Tersedia	Jumlah Laporan Data dan Informasi PPPA	Kab. Sukoharjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80 %	1 Dokumen	2 Laporan	13.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	23.000.000,00
2	08	05	2.01	0002	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota													
						Prosentase Data dan Informasi PPPA yang tersedia	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Data dan Informasi PPPA	Kab. Sukoharjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80 %	1 Dokumen	2 Laporan	20.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	30.000.000,00
2	08	06			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)								105.000.000,00					165.000.000,00
2	0	0	2.0		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan								60.000.000,00					80.000.000,00

	8	6	1		Kabupaten/Kota												
2	08	06	2.01	0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota												
						Skor kabupaten Layak Anak	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	Prosentase Keterlibanatan Stakeholder dalam menuju Kabupaten Layak Anak	Kab. Sukoharjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	725 Nilai	70 Organisasi	85 %	40.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	70 Organisasi	50.000.000,00
2	08	06	2.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota												
						Skor kabupaten Layak Anak	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak	Prosentase Keterlibanatan Stakeholder dalam menuju Kabupaten Layak Anak	Kab. Sukoharjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	725 Nilai	2 Dokumen	85 %	20.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	30.000.000,00

							Kewenangan Kabupaten/ Kota											
2	08	06	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota								45.000.000,00					85.000.000,00
2	08	06	2.02	0001	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota													
						Skor kabupaten Layak Anak	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	Prosentase Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	Kab. Sukoharjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	725 Nilai	100 Orang	85 %	20.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	30.000.000,00
2	08	06	2.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota													
						Skor kabupaten Layak Anak	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	Prosentase Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	Kab. Sukoharjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	725 Nilai	2 Dokumen	85 %	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	15.000.000,00
2	08	06	2.02	0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota													

						Skor kabupaten Layak Anak	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	Prosentase Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	Kab. Sukoharjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	725 Nilai	1 Dokumen	85 %	10.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	20.000.000,00
2	08	06	2.02	0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota													
						Skor kabupaten Layak Anak	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	Prosentase Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	Kab. Sukoharjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	725 Nilai	2 Dokumen	85 %	10.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	20.000.000,00
2	08	07			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK								145.000.000,00					205.000.000,00

2	08	07	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota								60.000.000,00					80.000.000,00
2	08	07	2.01	0003	Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA													
						Prosentase kekerasan terhadap anak yang ditindaklanjuti	Jumlah kegiatan pencegahan KtA terpadu	Prosentase pencegahan kekerasan terhadap anak	Kab. Sukoharjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	2 Kegiatan	52 %	50.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah kegiatan pencegahan KtA terpadu	2 Kegiatan	60.000.000,00
2	08	07	2.01	0004	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA													
						Prosentase kekerasan terhadap anak yang ditindaklanjuti	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Prosentase pencegahan kekerasan terhadap anak	Kab. Sukoharjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	50 Orang	52 %	10.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	50 Orang	20.000.000,00
2	08	07	2.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								55.000.000,00					65.000.000,00
2	08	07	2.02	0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota													
						Prosentase kekerasan terhadap anak yang ditindaklanjuti	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	Prosentase tersedianya layanan anak yang memerlukan perlindungan	Kab. Sukoharjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	40 Orang	70 %	25.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	40 Orang	25.000.000,00
2	08	07	2.02	0006	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK													
						Prosentase kekerasan	Jumlah AMPK yang	Prosentase tersedianya	Kab. Sukoharjo,	100 %	40 Orang	70 %	30.000.000,00	Dana Transfer		Jumlah AMPK yang	40 Orang	40.000.000,00

						terhadap anak yang ditindaklanjuti	mendapatkan layanan	layanan anak yang memerlukan perlindungan	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa					Umum-Dana Alokasi Umum		mendapatkan layanan		
2	08	07	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								30.000.000,00					60.000.000,00
2	08	07	2.03	0005	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota													
						Prosentase kekerasan terhadap anak yang ditindaklanjuti	Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK	Cakupan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sukoharjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Kegiatan	100 %	10.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK	1 Kegiatan	20.000.000,00
2	08	07	2.03	0006	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/													
						Prosentase kekerasan terhadap anak yang ditindaklanjuti	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	Cakupan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sukoharjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Orang	100 %	10.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	1 Orang	20.000.000,00

2	08	07	2.03	0007	Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota												
						Prosentase kekerasan terhadap anak yang ditindaklanjuti	Jumlah KIE Perlindungan khusus anak	Cakupan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sukoharjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	01 Dokumen	100 %	10.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah KIE Perlindungan khusus anak	01 Dokumen	20.000.000,00
2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA								14.700.266.000,00					10.674.786.000,00
2	14	02			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK								451.800.000,00					621.800.000,00
2	14	02	2.01		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk								106.775.000,00					196.775.000,00
2	14	02	2.01	0002	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota													
						Cakupan Stakehoder yang Memanfaatkan GDPK	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Regulasi GDPK	Kab. Sukoharjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30 %	1 Dokumen	12 Dokumen	10.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen	20.000.000,00

2	14	02	2.01	0004	Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan												
						Cakupan Stakehoder yang Memanfaatkan GDPK	Jumlah Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan	Regulasi GDPK	Kab. Sukoharjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30 %	1 Dokumen	12 Dokumen	10.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan	1 Dokumen	20.000.000,00
2	14	02	2.01	0017	Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga												
						Cakupan Stakehoder yang Memanfaatkan GDPK	Jumlah pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Regulasi GDPK	Kab. Sukoharjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30 %	1 Kegiatan	12 Dokumen	10.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	1 Kegiatan	20.000.000,00
2	14	02	2.01	0018	Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal												
						Cakupan Stakehoder yang Memanfaatkan GDPK	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal	Regulasi GDPK	Kab. Sukoharjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30 %	1 Kegiatan	12 Dokumen	10.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal	1 Kegiatan	20.000.000,00
2	14	02	2.01	0019	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal												
						Cakupan Stakehoder yang Memanfaatk	Jumlah Pelaksanaan Pendidikan	Regulasi GDPK	Kab. Sukoharjo, Semua Kecamata	30 %	1 Kegiatan	12 Dokumen	10.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana		Jumlah Pelaksanaan Pendidikan Kependuduka	1 Kegiatan	20.000.000,00

						an GDPK	Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal		n, Semua Kel/Desa					Alokasi Umum		n Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal		
2	14	02	2.01	0020	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)													
						Cakupan Stakehoder yang Memanfaatkan GDPK	Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Regulasi GDPK	Kab. Sukoharjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30 %	1 Dokumen	12 Dokumen	25.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	1 Dokumen	35.000.000,00
2	14	02	2.01	0021	Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal													
						Cakupan Stakehoder yang Memanfaatkan GDPK	Jumlah Kerjasama Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal yang dilaksanakan	Regulasi GDPK	Kab. Sukoharjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30 %	5 Kegiatan	12 Dokumen	15.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Kerjasama Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal yang dilaksanakan	5 Kegiatan	25.000.000,00
2	14	02	2.01	0022	Pelaksanaan penyediaan data dan sosialisasi Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)													

						Cakupan Stakehoder yang Memanfaatkan GDPK	Jumlah Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan	Regulasi GDPK	Kab. Sukoharjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30 %	1 Dokumen	12 Dokumen	6.775.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan	1 Dokumen	16.775.000,00
2	14	02	2.01	0023	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana													
						Cakupan Stakehoder yang Memanfaatkan GDPK	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Regulasi GDPK	Kab. Sukoharjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30 %	2 Kegiatan	12 Dokumen	10.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	2 Kegiatan	20.000.000,00
2	14	02	2.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota								345.025.000,00					425.025.000,00
2	14	02	2.02	0005	Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan													
						Cakupan Stakehoder yang Memanfaatkan GDPK	Jumlah Kajian Dampak Kependudukan	Prosentase Efektifitas RDK di Kampung KB	Kab. Sukoharjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30 %	1 Dokumen	45 %	10.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Kajian Dampak Kependudukan	1 Dokumen	20.000.000,00
2	14	02	2.02	0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga													
						Cakupan	Jumlah	Prosentase	Kab.	30	1 Laporan	45 %	74.200.000,00	Dana		Jumlah	1	84.200.000,00

						Stakehoder yang Memanfaatkan GDPK	Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Efektifitas RDK di Kampung KB	Sukoharjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	%				Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAK Non Fisik-BOKB-KB		Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Laporan	
2	14	02	2.02	0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga													
						Cakupan Stakehoder yang Memanfaatkan GDPK	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Prosentase Efektifitas RDK di Kampung KB	Kab. Sukoharjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30 %	12 Laporan	45 %	150.600.000,00	DAK Non Fisik-BOKB-KB		Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	12 Laporan	160.600.000,00
2	14	02	2.02	0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB													
						Cakupan Stakehoder yang Memanfaatkan GDPK	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Prosentase Efektifitas RDK di Kampung KB	Kab. Sukoharjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30 %	1 Dokumen	45 %	72.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKB-KB		Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	1 Dokumen	82.000.000,00
2	14	02	2.02	0015	Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain													
						Cakupan Stakehoder yang Memanfaatkan GDPK	Jumlah Rumah Data Kependudukan di	Prosentase Efektifitas RDK di Kampung KB	Kab. Sukoharjo, Semua Kecamatan, Semua	30 %	48 Unit	45 %	3.225.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi		Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif	48 Unit	13.225.000,00

							Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk		Kel/Desa					Umum		Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk		
2	14	02	2.02	0018	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana													
						Cakupan Stakehoder yang Memanfaatkan GDPK	Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangga Kencana	Prosentase Efektifitas RDK di Kampung KB	Kab. Sukoharjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30 %	12 Laporan	45 %	15.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangga Kencana	12 Laporan	25.000.000,00
2	14	02	2.02	0019	Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)													
						Cakupan Stakehoder yang Memanfaatkan GDPK	Jumlah dokumen Pemetaan Program Pembangunan Keluarga,	Prosentase Efektifitas RDK di Kampung KB	Kab. Sukoharjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30 %	1 Dokumen	45 %	10.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah dokumen Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependuduka	1 Dokumen	20.000.000,00

							Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)									n, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)		
2	14	02	2.02	0020	Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)													
						Cakupan Stakehoder yang Memanfaatkan GDPK	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Prosentase Efektifitas RDK di Kampung KB	Kab. Sukoharjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30 %	40 Dokumen	45 %	10.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	40 Dokumen	20.000.000,00
2	14	03			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)								9.264.386.000,00					9.484.386.000,00
2	14	03	2.01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal								1.194.600.000,00					1.264.600.000,00
2	14	03	2.01	0008	Pengendalian Program KKBPK													
						Cakupan Peserta KB Aktif	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	Prosentase Peran Serta Stageholder dan Mitra Kerja dalam Penggerakan KB	Kab. Sukoharjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	69,75 %	1 Laporan	80 %	305.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAK Non Fisik-BOKB-KB		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	1 Laporan	315.000.000,00
2	14	03	2.01	0009	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana													
						Cakupan Peserta KB	Jumlah Unit Sarana	Prosentase Peran Serta	Kab. Sukoharjo,	69,75 %	12 Unit	80 %	10.000.000,00	Dana Transfer		Jumlah Unit Sarana	12 Unit	20.000.000,00

						Aktif	Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Stageholder dan Mitra Kerja dalam Penggerakan KB	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa					Umum-Dana Alokasi Umum		Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)		
2	14	03	2.01	0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana														
						Cakupan Peserta KB Aktif	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Prosentase Peran Serta Stageholder dan Mitra Kerja dalam Penggerakan KB	Kab. Sukoharjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	69,75 %	1 Laporan	80 %	348.600.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAK Non Fisik-BOKB-KB		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	1 Laporan	358.600.000,00
2	14	03	2.01	0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)														
						Cakupan Peserta KB Aktif	Jumlah Laporan Mekanisme	Prosentase Peran Serta Stageholder	Kab. Sukoharjo, Semua	69,75 %	1 Laporan	80 %	171.000.000,00	Dana Transfer Umum-		Jumlah Laporan Mekanisme	1 Laporan	181.000.000,00

							Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	dan Mitra Kerja dalam Penggerakan KB	Kecamatan, Semua Kel/Desa					Dana Alokasi Umum, DAK Non Fisik-BOKB-KB		Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)		
2	14	03	2.01	0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang													
						Cakupan Peserta KB Aktif	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui	Prosentase Peran Serta Stageholder dan Mitra Kerja dalam Penggerakan KB	Kab. Sukoharjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	69,75 %	1 Dokumen	80 %	210.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAK Non Fisik-BOKB-KB		Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik	1 Dokumen	220.000.000,00

							Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang									serta Media Luar Ruang		
2	1 4	0 3	2.0 1	00 13	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal													
						Cakupan Peserta KB Aktif	Jumlah Komunikasi , Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	Prosentase Peran Serta Stageholder dan Mitra Kerja dalam Penggerakan KB	Kab. Sukoharjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	69,75 %	10 Dokumen	80 %	20.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	10 Dokumen	30.000.000,00
2	1 4	0 3	2.0 1	00 14	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja													
						Cakupan Peserta KB Aktif	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga	Prosentase Peran Serta Stageholder dan Mitra Kerja dalam Penggerakan KB	Kab. Sukoharjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	69,75 %	4 Organisasi	80 %	130.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAK Non		Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana	4 Organisasi	140.000.000,00

							Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja							Fisik-BOKB-KB		(Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja		
2	14	03	2.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)								2.890.812.000,00					2.920.812.000,00
2	14	03	2.02	0002	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB													
						Cakupan Peserta KB Aktif	Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia	Cakupan Peserta KB Baru	Kab. Sukoharjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	69,75 %	12 Unit	70 %	1.592.262.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia	12 Unit	1.602.262.000,00
2	14	03	2.02	0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)													
						Cakupan Peserta KB Aktif	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Cakupan Peserta KB Baru	Kab. Sukoharjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	69,75 %	167 Orang	70 %	979.200.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAK Non Fisik-		Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	167 Orang	989.200.000,00

														BOKB-KB					
2	14	03	2.02	0006	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)														
						Cakupan Peserta KB Aktif	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Cakupan Peserta KB Baru	Kab. Sukoharjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	69,75 %	1 Laporan	70 %	319.350.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	1 Laporan	329.350.000,00
2	1	0	2.0		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan								2.566.974.000,00					2.646.974.000,00	

	4	3	3		Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota												
2	14	03	2.03	0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya												
						Cakupan Peserta KB Aktif	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Prosentase PUS yang TIDAK Terpenuhi Kebutuhan Alat Kontrasepsinya (Unmetneed)	Kab. Sukoharjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	69,75 %	1 Laporan	10,56 %	44.600.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAK Non Fisik-BOKB-KB		Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1 Laporan	54.600.000,00
2	14	03	2.03	0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)												
						Cakupan Peserta KB Aktif	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Prosentase PUS yang TIDAK Terpenuhi Kebutuhan Alat Kontrasepsinya (Unmetneed)	Kab. Sukoharjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	69,75 %	68 Orang	10,56 %	2.424.874.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAK Non Fisik-BOKB-KB		Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	68 Orang	2.434.874.000,00
2	14	03	2.03	0004	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP												
						Cakupan Peserta KB Aktif	Jumlah Laporan Dukungan Ayoman	Prosentase PUS yang TIDAK Terpenuhi	Kab. Sukoharjo, Semua Kecamata	69,75 %	1 Laporan	10,56 %	15.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana		Jumlah Laporan Dukungan Ayoman	1 Laporan	25.000.000,00

							Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Kebutuhan Alat Kontrasepsinya (Unmetneed)	n, Semua Kel/Desa					Alokasi Umum		Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP		
2	14	03	2.03	0007	Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB													
						Cakupan Peserta KB Aktif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	Prosentase PUS yang TIDAK Terpenuhi Kebutuhan Alat Kontrasepsinya (Unmetneed)	Kab. Sukoharjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	69,75 %	40 Orang	10,56 %	10.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	40 Orang	20.000.000,00
2	14	03	2.03	0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya													
						Cakupan Peserta KB Aktif	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Prosentase PUS yang TIDAK Terpenuhi Kebutuhan Alat Kontrasepsinya (Unmetneed)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	69,75 %	1 Laporan	10,56 %	32.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAK Non Fisik-BOKB-KB		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1 Laporan	42.500.000,00
2	14	03	2.03	0010	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi													
						Cakupan Peserta KB Aktif	Jumlah Tenaga Pelayanan yang	Prosentase PUS yang TIDAK Terpenuhi	Kab. Sukoharjo, Semua Kecamata	69,75 %	40 Orang	10,56 %	10.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana		Jumlah Tenaga Pelayanan yang	40 Orang	20.000.000,00

							Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Kebutuhan Alat Kontrasepsinya (Unmetneed)	n, Semua Kel/Desa					Alokasi Umum		Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi		
2	14	03	2.03	0013	Peningkatan Kesertaan KB Pria													
						Cakupan Peserta KB Aktif	Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria	Prosentase PUS yang TIDAK Terpenuhi Kebutuhan Alat Kontrasepsinya (Unmetneed)	Kab. Sukoharjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	69,75 %	5 Orang	10,56 %	20.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria	5 Orang	30.000.000,00
2	14	03	2.03	0015	Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB													
						Cakupan Peserta KB Aktif	Jumlah Pengelola dan Petugas yang mengikuti Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi	Prosentase PUS yang TIDAK Terpenuhi Kebutuhan Alat Kontrasepsinya (Unmetneed)	Kab. Sukoharjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	69,75 %	40 Orang	10,56 %	10.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Pengelola dan Petugas yang mengikuti Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	40 Orang	20.000.000,00

							serta Sarana Penunjang Pelayanan KB											
2	14	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)								4.984.080.000,00					568.600.000,00
2	14	04	2.01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga								4.954.080.000,00					508.600.000,00
2	14	04	2.01	0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))													
						Cakupan Kelompok Kegiatan yang Aktif	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Prosentase Terbentuknya Poktan di Masing-Masing Desa/Kelurahan	Kab. Sukoharjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	78 %	12 Laporan	40 %	10.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	12 Laporan	20.000.000,00
2	14	04	2.01	0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)													
						Cakupan Kelompok Kegiatan yang Aktif	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan	Prosentase Terbentuknya Poktan di Masing-Masing	Kab. Sukoharjo, Semua Kecamatan, Semua	78 %	40 Unit	40 %	369.480.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi		Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan	40 Unit	379.480.000,00

							dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	Desa/Kelurahan	Kel/Desa					Umum, DAK Non Fisik-BOKB-KB		dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia		
2	14	04	2.01	0019	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)													
						Cakupan Kelompok Kegiatan yang Aktif	Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/ Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/U	Prosentase Terbentuknya Poktan di Masing-Masing Desa/Kelurahan	Kab. Sukoharjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	78 %	180 Orang	40 %	10.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	180 Orang	20.000.000,00

							saha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)											
2	14	04	2.01	0021	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)													
						Cakupan Kelompok Kegiatan yang Aktif	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	Prosentase Terbentuknya Poktan di Masing-Masing Desa/Kelurahan	Kab. Sukoharjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	78 %	12 Laporan	40 %	10.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	12 Laporan	20.000.000,00
2	14	04	2.01	0024	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)													
						Cakupan Kelompok Kegiatan yang Aktif	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader)	Prosentase Terbentuknya Poktan di Masing-Masing Desa/Kelurah	Kab. Sukoharjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	78 %	334 Orang	40 %	4.510.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum,		Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan	334 Orang	4.520.000,00

							Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	an						DAK Non Fisik-BOKB-KB		Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan		
2	14	04	2.01	0026	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)													
						Cakupan Kelompok Kegiatan yang Aktif	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapata	Prosentase Terbentuknya Poktan di Masing-Masing Desa/Kelurahan	Kab. Sukoharjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	78 %	13 Kelompok	40 %	19.600.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAK Non Fisik-BOKB-KB		Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang	13 Kelompok	29.600.000,00

							n Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan									mendapat biaya operasional kegiatan		
2	14	04	2.01	0028	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)													
						Cakupan Kelompok Kegiatan yang Aktif	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga	Prosentase Terbentuknya Poktan di Masing-Masing Desa/Kelurahan	Kab. Sukoharjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	78 %	12 Kelompok	40 %	25.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk	12 Kelompok	35.000.000,00

							Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk											
2	14	04	2.02		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga								30.000.000,00					60.000.000,00
2	14	04	2.02	0001	Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)													
						Cakupan Kelompok Kegiatan yang Aktif	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahtera	Prosentase Peran Aktif Organisasi Kemasyarakatan dalam Pembangunan Keluarga	Kab. Sukoharjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	78 %	6 Organisasi	75 %	10.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Organisasi yang Mengikuti Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS,	6 Organisasi	20.000.000,00

							an Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)									PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)		
2	14	04	2.02	0003	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)													
						Cakupan Kelompok Kegiatan yang Aktif	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/U	Prosentase Peran Aktif Organisasi Kemasyarakatan dalam Pembangunan Keluarga	Kab. Sukoharjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	78 %	6 Organisasi	75 %	10.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	6 Organisasi	20.000.000,00

							PPKS)											
2	1 4	0 4	2.0 2	00 04	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja													
						Cakupan Kelompok Kegiatan yang Aktif	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Prosentase Peran Aktif Organisasi Kemasyarakatan dalam Pembangunan Keluarga	Kab. Sukoharjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	78 %	12 Laporan	75 %	10.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	12 Laporan	20.000.000,00
												TOTAL	**19.998.678.880,00**					**16.264.300.380,00**

BAB IV
P E N U T U P

Rencana Kerja Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 merupakan pelaksanaan rencana strategis tahun ke-4, periode Renstra 2021-2026. Program dan kegiatan yang direncanakan merupakan prioritas dalam rangka mencapai visi dan misi Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Sukoharjo dan mendukung tercapainya visi dan misi Pembangunan Daerah Jangka Menengah.

Rencana ini akan dijadikan sebagai pedoman / acuan bagi Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Sukoharjo dalam menjalankan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta sebagai acuan dalam menyusun program / kegiatan Perangkat Daerah tahun 2024. Keberhasilan pelaksanaan Renja Dinas PPKB dan P3A tahun 2024 tidak terlepas dari peran dan tanggungjawab seluruh karyawan-karyawati Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Sukoharjo serta peran aktif stakeholder yang bersangkutan.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah guna mewujudkan masyarakat Sukoharjo yang semakin sejahtera.

BUPATI SUKOHARJO

Ttd

ETIK SURYANI

RENCANA KERJA
TAHUN 2024



DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN SUKOHARJO

Gedung Menara Wijaya Lt. 5
Jl. Jenderal Sudirman No. 199 Sukoharjo, Kode Pos. 57521 Telp (0271) 593068 ext. 1552, Fax (0271) 593335
Website : www.diskominfo.sukoharjokab.go.id, Email : diskominfo@sukoharjokab.g

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Alloh SWT, atas karunia Nya penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika (Renja OPD) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 ini dapat diselesaikan pada waktunya. Rencana Kerja ini disusun sebagai salah satu langkah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance), yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas sebagai acuan/pedoman untuk pelaksanaan kegiatan pada tahun 2024.

Disadari sepenuhnya pula bahwa dalam penyusunan Renja ini masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan baik dari segi penulisan maupun kualitas materi yang sangat jauh dari harapan. Oleh sebab itu saran masukan yang bersifat konstruktif sangat kami perlukan demi penyempurnaan Renja ini.

Demikian Renja ini di buat semoga dapat memberikan manfaat bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo, pemerintah dan lapisan masyarakat diwilayah Kabupaten Sukoharjo.

Sukoharjo, 2023

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN SUKOHARJO



SUYAMTO, ST, M.Kom
Pembina Utama Muda
NIP. 19720520 199803 1 007

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....i

Daftar Isi.....ii

BAB I PENDAHULUAN.....1

1.1 Latar Belakang.....1

1.2 Landasan Hukum.....5

1.3 Maksud dan Tujuan.....6

1.4 Sistematika Penulisan.....7

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU.....10

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Restra PD.....11

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....17

2.3 Isu – Isu penting Penyelenggaraan tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....19

2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD.....25

BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN.....29

3.1 Telahaan terhadap kebijakan nasional dan provinsi.....29

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD.....31

3.3 Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024.....32

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD.....38

BAB V PENUTUP.....42

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo sebagai Perangkat Daerah yang menjalankan Urusan Komunikasi dan Informatika, Urusan Persandian dan Urusan Statistik diharapkan dapat memenuhi tuntutan masyarakat dalam rangka memberikan pelayanan dan mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang transparan serta akuntabel sesuai dengan era keterbukaan informasi maupun perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

Tuntutan tentang pelayanan informasi dan keterbukaan informasi publik menguat seiring dengan kemajuan teknologi informasi. Pasal 28 F UUD 1945 menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat menuntut Dinas Komunikasi dan Informatika untuk lebih kreatif dalam memberikan maupun merespon informasi. Berbagai media informasi perlu lebih diberdayakan dalam upaya penyebarluasan dan pemerataan informasi kepada masyarakat. Peran strategis potensi lembaga komunikasi masyarakat untuk dapat menjadi penyebar informasi perlu tetap diperhatikan. Keberadaan Lembaga komunikasi masyarakat diperlukan karena adanya perbedaan kemampuan masyarakat dalam mengakses dan memperoleh informasi. Kemampuan akses terhadap teknologi informasi, keberagaman pendidikan, ketersediaan infrastruktur merupakan

penyebab terjadinya kesenjangan dalam mengakses dan memperoleh informasi.

Dalam merespon maupun melaksanakan pelayanan dan keterbukaan informasi publik perlu diiringi dengan penguatan keamanan informasi. Kejahatan di dunia maya sekarang berkembang dengan pesat. Beredarnya berita palsu, disinformasi, mis-informasi maupun pencurian data akibat lemahnya sistem keamanan informasi perlu menjadi perhatian khusus oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.

Selain keterbukaan informasi publik, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo dituntut dapat mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Hal tersebut dapat diwujudkan melalui upaya Penyelenggaran Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Penyelenggaraan SPBE yang saat ini menjadi perhatian pemerintah pusat diharapkan dapat mewujudkan digitalisasi dalam tata kelola pemerintahan.

Peningkatan infrastruktur teknologi informasi, tersedianya tata Kelola SPBE, pemenuhan data statistik dan keamanan informasi merupakan hal yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Komunikasi dan Informatika. Peran Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai perangkat daerah yang melayani integrasi proses bisnis perangkat daerah di Kabupaten Sukoharjo perlu mendapatkan dukungan dalam hal tata Kelola SPBE yang memadai agar eksekusi terhadap tujuan SPBE dapat terlaksana.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan, yang disusun dengan memperhatikan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika 2021 – 2026 Kabupaten Sukoharjo sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan dibidang komunikasi dan informatika pada tahun 2024.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo disusun berdasarkan dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Sukoharjo 2021-2026, Rencana Strategis (Renstra) Diskominfo Kabupaten Sukoharjo serta rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sukoharjo, yang selanjutnya dapat dijadikan sebagai acuan dalam mengoperasionalkan RKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo dalam menjalankan visi jangka menengah daerah. yang selanjutnya dapat dijadikan sebagai acuan dalam mengoperasionalkan RKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Infomatika Kabupaten Sukoharjo dalam menjalankan visi jangka menengah daerah.

Renja disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukoharjo 2021-2026, sekaligus untuk mendukung tercapainya Visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sukoharjo terpilih yaitu : **"MEWUJUDKAN MASYARAKAT SUKOHARJO YANG LEBIH MAKMUR".**

❖ **Visi dan Misi Jangka Menengah Daerah**

Adapun visi dan misi jangka menengah sebagai tercantum dalam dokumen RPJMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026 adalah :

- **Visi : "Mewujudkan Masyarakat Sukoharjo Yang Lebih Makmur**"

Visi Pembangunan Kabupaten Sukoharjo ini diharapkan akan mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat Kabupaten Sukoharjo. Visi Pembangunan Kabupaten Sukoharjo tersebut harus dapat diukur keberhasilannya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan

Dalam rangka mendukung penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-

2026 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo yang menjabarkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo jangka menengah (5 tahun) untuk diselaraskan dengan RPJMD Kabupaten Sukoharjo. Selain maksud diatas, penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026 juga dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja bidang urusan Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik dalam rangka mewujudkan visi dan misi daerah yang telah disepakati dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

- **Misi**

Selanjutnya visi tersebut dijabarkan dalam misi yang pada hakekatnya diarahkan untuk mendukung terwujudnya visi lima tahun kedepan, dengan tujuan agar tercipta kesinambungan arah pembangunan yang diinginkan. Misi yang dirumuskan untuk mengemban pencapaian visi selama lima tahun yang akan datang adalah sebagai berikut:

1. **Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Percepatan Reformasi Birokrasi**

   Mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance) didukung oleh aparatur Pemerintah Daerah yang professional bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

2. **Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas.**

   Mewujudkan kualitas sumberdaya manusia penggerak pembangunan yang produktif, cerdas sehat, berbudaya dan religius.

3. **Memperkuat Perekonomian Rakyat Yang Berdaya Saing Tinggi**

Mewujudkan pertumbuhan perekonomian masyarakat dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi unggulan daerah dan pemanfaatan sumber daya alam dalam konteks pembangunan yang berkelanjutan dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan

4. **Memperkuat Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan**

   Mewujudkan pemerataan pembangunan melalui pengembangan wilayah yang didukung kelengkapan sarana dan prasarana penunjang aktivitas sosial ekonomi masyarakat.

5. **Meningkatkan Kualitas Kehidupan Sosial dan Keagamaan**

   Mewujudkan kondisi daerah yang aman, damai, tertib, dan tenteram melalui penegakan supremasi hukum dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 berdasarkan pada :

1. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor : 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penanaman Modal di Kabupaten Sukoharjo;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 – 2031
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 – 2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 merupakan suatu dokumen perencanaan kinerja dan menjadi pedoman dalam merencanakan anggaran dan merupakan suatu alat untuk mengukur kinerja instansi yang efektif, berkelanjutan. Maksud dari Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 adalah untuk memberikan pedoman kerja tahun 2024 bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo dan instansi terkait, sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021-2026 dan mengacu kepada RKPD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024.

Tujuan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 adalah :

a. Terwujudnya Visi dan Misi Kabupaten Sukoharjo;
b. Terwujudnya Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Perhubungan dalam rangka mendukung ketercapaian Visi dan Misi Kabupaten Sukoharjo;
c. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, pengganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan;
d. Terwujudnya pemanfaatan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan;
e. Terwujudnya pembangunan sarana dan prasarana Yang lengkap dan inovatif;
f. Memberikan landasan kebijakan bagi pelaksana kegiatan:
g. Untuk menetapkan program/kegiatan yang ada di rencana kerja (renja) ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Sementara Pembangunan tahun 2024.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 yang mengimplementasikan perencanaan jangka menengah dan penganggaran tahunan, disusun dalam sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini memberi gambaran umum tentang penyusunan Renja DISKOMINFO Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024

1.1. Latar Belakang

Bagian ini mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja DISKOMINFO, proses penyusunannya, dan keterkaitannya dengan dokumen RKPD, Renstra DISKOMINFO serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Bagian ini memuat peraturan-peraturan yang mendasari penyusunan Renja DISKOMINFO Kabupaten Sukoharjo

1.3. Maksud dan Tujuan

Bagian ini memberikan penjelasan mengenai maksud dan tujuan dari penyusunan Renja DISKOMINFO Kabupaten Sukoharjo

1.4. Sistematika Penulisan

Bagian ini menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja DISKOMINFO serta susunan garis besar isi dokumen

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Kinerja DISKOMINFO Tahun 2023

Bab ini memuat terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja DISKOMINFO sampai dengan Triwulan II Tahun 2023

2.1. Kondisi Umum Perangkat Daerah

Bagian ini menguraikan Kedudukan dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo, struktur organisasi, tugas dan fungsi Pejabat Struktural dan Subkordinator

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Renja DISKOMINFO Tahun Lalu (2022)

Bagian ini menguraikan review hasil evaluasi pelaksanaan Renja DISKOMINFO tahun 2022 dan realisasi Renstra DISKOMINFO mengacu pada hasil Laporan Kinerja Tahunan

2.3. Evaluasi Capaian Kinerja Tahun Berjalan (2023) sampai dengan Triwulan II

Bagian ini menguraikan capaian kinerja tahun berjalan DISKOMINFO, permasalahan dan hambatan, dampak terhadap visi dan misi, tantangan dan peluang, dan rekomendasi serta catatan strategis untuk ditindak lanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun 2023.

2.4. Identifikasi Masalah dan Tantangan Perangkat Daerah Tahun 2024

Bab III DANA INDIKATIF DAN SUMBER DANA

3.1. Kajian Terhadap Pagu / Plafon Identifikasi Tahun Rencana

3.2. Rumusan Usulan Prioritas Program dan Kegiatan, Target Kinerja, Capaian dan Kebutuhan Pendanaan

Bab IV Penutup

Bab ini menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

Rencana Kerja (Renja) suatu OPD adalah Penjabaran Perencanaan tahunan dari Rencana Strategis OPD tersebut. Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program & kegiatan, pelaksanaan rencana program & kegiatan, dan hasil rencana program & kegiatan.

Penyusunan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024, memperhatikan beberapa unsur pokok sebagaimana berikut :

a. Masalah – masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
b. Tujuan yang dikehendaki;
c. Sasaran – sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;
d. Kebijakan – kebijakan untuk melaksanakannya serta seksi pelaksana;

Penyusunan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024 juga memperhatikan hal – hal sebagai berikut :

a. Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2023 sebagai entry point dalam penyusunan perencanaan tahun 2024;
b. Memperhatikan keberlanjutan (*sustainable development)* untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan. Masalah-masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023 sampai dengan TW II

Anggaran Tahun 2023 Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp. 13.668.560.938,- dengan 5 program dan 12 kegiatan, 60 Subkegiatan terdiri dari Belanja Operasi Rp. 11.769.912.938,- dan Belanja Modal Rp. 1.898.648.000,-. Dari jumlah dana tersebut terealisasi sebesar Rp. 14.083.275.120- atau 97,24 % sampai dengan triwulan II Tahun Anggaran 2023, seperti tabel berikut :

FORMULIR EVALUASI HASIL RENJA PD KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2023
s/d TRIWULAN III TAHUN 2023

PD : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No	Kode Rekening	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Renja PD Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran DPPA PD 2023 yang dievaluasi			PD Penanggung Jawab	Permasalahan
										I		II		III		IV						
1		2	3	4	4.A	5				6		7		8		9		10=6+7+8+9			12	13
						K	Rp (Ribu) DPA	K	Rp (Ribu) DPPA	K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)	%		
	2.16		**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**				13.660.560.938		13.833.204.738	28,1	3.889.944.357		3.157.594.886		-		-		7.047.539.243	50,95	DISKOMINFO	
	2.16.01		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**	**Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah**	**persen**	**100**	**5.015.595.200**	**100**	**4.960.227.000**	**17,2**	**851.609.157**		**1.482.003.985**					**17**	**2.333.613.142**	**47,05**		
	2.16.01.2.01		***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	***Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	***persen***	***100***	***45.000.000***	***100***	***41.135.000***	**54,9**	***22.530.000***		***3.267.300***					***55***	***25.797.300***	**62,71**		
	2.16.01.2.01.01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	dokumen	4	25.000.000	4	23.051.000	2	20.734.000		545.800		0			2	21.279.600	92,28		
	2.16.01.2.01.02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	dokumen	4	10.000.000	4	10.000.000		-		1.770.500		0			0	1.770.500	17,71		
	2.16.01.2.01.06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	12	5.000.000	12	5.000.000	3	1.856.000		400.000		0			3	2.256.000	45,12		
	2.16.01.2.01.07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	laporan	4	5.000.000	4	3.074.000		-		491.200		0			0	491.200	15,98		
	2.16.01.2.02		***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	***Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	***persen***	***100***	***4.284.827.000***	***100***	***4.172.561.000***	**14,9**	***620.653.567***		***1.360.160.420***					***15***	***1.981.033.995***	**47,48**		
	2.16.01.2.02.01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	35	4.002.927.000	35	3.952.571.000	35	567.782.757		1.309.752.428		822.704.695			35	2.700.239.880	68,14		
	2.16.01.2.02.03		Pelaksanaan Penatausahaan dan Penguji/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Penguji/Verifikasi Keuangan SKPD	dokumen	12	266.900.000	12	196.940.000	3	48.948.800		49.416.000		49.128.000			3	147.492.800	74,89		
	2.16.01.2.02.05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	laporan	1	5.000.000	1	5.000.000		-		-		0			0	-	0,00		
	2.16.01.2.02.07		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	laporan	18	5.000.000	18	5.000.000	4	2.002.000		1.012.000		1.348.000			4	4.362.000	87,24		
	2.16.01.2.02.08		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	dokumen	4	5.000.000	4	2.990.000	1	2.120.000		-					1	2.120.000	70,90		
	2.16.01.2.05		***Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***	***Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***	***persen***	100	***83.850.000***	100	***71.200.000***	**26,5**	***18.900.000***		-					**27**	**18.900.000**	**26,54**		
	2.16.01.2.05.02		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		orang	53	18.900.000	53	18.900.000	53	18.900.000		-					53	18.900.000	100,00		

	2.16.01.2.05.03		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	orang	53	64.960.000	53	52.300.000				-	49.800.000			0	49.800.000	95,22		
	2.16.01.2.06		***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***persen***	***100***	***263.458.200***	***100***	***283.313.000***	**35,3**	***102.402.310***		***46.476.300***				***35***	***148.879.810***	**51,35**		
	2.16.01.2.06.01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	2.849.400	1	4.275.000	1	2.849.400		-	-			1	2.849.400	66,65		
	2.16.01.2.06.03		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	2	25.949.600	2	27.860.600	1	14.722.800		3.735.000	1.600.000			1	20.057.800	71,99		
	2.16.01.2.06.04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5	123.241.000	5	134.420.000	3	57.678.000		20.552.500	22.877.000			3	101.107.500	75,22		
	2.16.01.2.06.05		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	paket	1	22.160.200	1	14.405.400		2.239.700		1.456.400	3.224.000			0	6.980.100	48,45		
	2.16.01.2.06.06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	dokumen	1	3.140.000	1	570.000		-		180.000	225.000			0	405.000	71,05		
	2.16.01.2.06.09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	1	80.118.000	1	108.388.000		24.853.010		20.553.000	28.513.000			0	73.919.010	68,20		
	2.16.01.2.08		***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	***persen***	***100***	***119.710.000***	***100***	***106.072.000***	**20,1**	***21.309.288***		***23.284.476***				***20***	***44.593.764***	**42,04**		
	2.16.01.2.08.01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	1	5.350.000	1	3.000.000		1.000.000		-	1.000.000			0	2.000.000	66,67		
	2.16.01.2.08.02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	1	71.400.000	1	42.200.000		8.030.822		8.141.312	*10.152.085*			0	26.324.219	62,38		
	2.16.01.2.08.04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	2	42.960.000	2	60.872.000		12.278.466		15.143.164	*15.297.978*			0	42.719.608	70,18		
	2.16.01.2.09		***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	***persen***	***100***	***218.740.000***	***100***	***279.400.000***	**23,5**	***65.553.392***		***48.854.881***				***23***	***114.408.273***	**40,95**		
	2.16.01.2.09.01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	16	90.900.000	16	140.900.000	3	14.583.228		23.013.443	16.219.400			*3*	53.816.071	38,19		
	2.16.01.2.09.02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	6	87.760.000	6	84.760.000	2	41.675.164		15.506.438	11.407.793			*2*	68.589.395	80,92		
	2.16.01.2.09.06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	44	40.080.000	44	53.740.000	11	9.295.000		10.335.000	7.956.000			*11*	27.586.000	51,33		
	2.16.02		**PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	**prosentase Badan Publik Terbuka**	**persen**	**45**	**1.469.440.164**	**45**	**1.501.440.164**	**24,4**	**367.055.898**		**508.535.903**				**24**	**875.651.801**	**58,32**		
	2.16.02.2.01		***Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota***	***Cakupan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah KabiKota***	***persen***	***63***	***1.469.440.164***	***63***	***1.501.440.164***	**24,4**	***367.055.898***		***508.535.903***				***24***	***875.651.801***	***58,32***		
	2.16.02.2.01.01		Perumusan kebijakan teknis bidang informasi dan komunikasi publik	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	dokumen	2	15.000.000	2	17.000.000		-		-	-			0	-	0,00		
	2.16.02.2.01.02		Monitoring opini dan aspirasi publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	dokumen	2	50.000.000	2	35.920.000		2.275.000		4.863.000	28.370.000			0	35.508.000	98,85		
	2.16.02.2.01.03		Monitoring informasi dan penetapan agenda prioritas komunikasi pemerintah daerah	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi	dokumen	1	160.000.000	1	160.000.000		-		28.935.001	127.255.000			0	156.190.001	97,62		

	2.16.02.2.01.03		Monitoring informasi dan penetapan agenda prioritas komunikasi pemerintah daerah	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	dokumen	1	160.000.000	1	160.000.000		-		28.935.001		127.255.000			0	156.190.001	97,62		
	2.16.02.2.01.04		Pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	dokumen	3	57.412.000	3	19.000.000	1	19.000.000		-		-			1	19.000.000	100,00		
	2.16.02.2.01.05		Pengelolaan media komunikasi publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	dokumen	2	534.391.164	2	566.823.164	1	281.922.398		102.615.902		80.737.349			1	465.275.649	82,08		
	2.16.02.2.01.06		Pelayanan informasi publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	dokumen	2	200.000.000	2	218.060.000		35.258.500		49.635.000		81.730.000			0	166.623.500	76,41		
	2.16.02.2.01.07		Layanan hubungan media	Jumlah Layanan Hubungan Media	layanan	3	43.925.000	3	43.925.000		6.450.000		-		23.100.000			0	29.550.000	67,27		
	2.16.02.2.01.08		Kemitraan dengan pemangku kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	dokumen	2	15.000.000	2	15.000.000		-		12.050.000		-			0	12.050.000	80,33		
	2.16.02.2.01.09		Manajemen komunikasi krisis	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	dokumen	1	15.000.000	1	15.000.000		-		-		14.000.000			0	14.000.000	93,33		
	2.16.02.2.01.10		Penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkat Kapasitasnya	orang	10	20.000.000	10	20.000.000		-		-		-			0	-	0,00		
	2.16.02.2.01.12		Penyelenggaraan hubungan masyarakat, media dan kemitraan komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	dokumen	1	50.000.000	1	50.000.000		2.150.000		22.985.000		9.307.000			0	34.442.000	68,88		
	2.16.02.2.01.13		Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	unit	6	308.712.000	6	340.712.000	2	20.000.000		287.512.000		-			2	307.512.000	90,26		
	2.16.03		**PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA**	**Persentase penyelenggaraan jaringan intra pemerintahan daerah**	**persen**	**68**	**6.401.108.210**	**68**	**6.589.108.210**	**38,7**	**2.551.069.507**	**0**	**966.345.741**	**#**	**-**	**-**	**-**	**##**	**2.551.069.507**	**38,72**		
				Prosentase Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintah Berbasis Elektronik	**persen**	**85**	**6.401.108.210**	**85**	**6.589.108.210**	**38,7**	**2.551.069.507**							**39**	**2.551.069.507**	**38,72**		
	2.16.03.2.01		***Pengelolaan Nama Domain Yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Subdomain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota***	***Prosentase Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Subdomain ditingkup pemerintah daerah yang dikelola***	***persen***	***100***	***3.955.929.650***	***100***	***3.912.830.000***	**60,4**	***2.364.791.167***		***275.000.043***					***60***	***2.639.791.210***	***67,47***		
	2.16.03.2.01.02		Penatalaksanaan dan pengawasan nama domain dan sub domain dalam penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	dokumen	216	32.475.000	216	29.175.000		11.440.000		111.000		6.771.000			0	18.322.000	62,80		
	2.16.03.2.01.03		Penyelenggaraan sistem jaringan intra pemerintah daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	unit	40	3.923.454.650	40	3.883.655.000	2	2.353.351.167		274.889.043		1.106.940.880			2	3.735.181.090	96,18		
	2.16.03.2.02		***Pengelolaan e-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota***	***Prosentase E-Government di lingkup Pemerintah Daerah yang dikelola***	***persen***	***100***	***2.445.178.560***	***100***	***2.676.278.210***	**6,96**	***186.278.340***		***691.345.698***					***7***	***877.624.038***	**32,79**		
	2.16.03.2.02.01		Penatalaksanaan dan pengawasan e-government dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	dokumen	4	8.120.000	4	8.120.000		3.960.000		-		-			0	3.960.000	48,77		
	2.16.03.2.02.02		Sinkronisasi pengelolaan rencana induk dan anggaran pemerintahan berbasis elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	dokumen	2	23.836.000	2	23.836.000	1	12.661.000		-		5.652.000			1	18.313.000	76,83		

2.16.03.2.02.03		Pengelolaan pusat data pemerintah daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	unit	2	700.864.560	2	923.612.210		83.407.340		211.273.698		74.317.239			0	368.998.277	39,95		
2.16.03.2.02.04		Penyelenggaraan sistem komunikasi intra pemerintah daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	dokumen	16	8.120.000	16	8.120.000		-		-		-			0	-	0,00		
2.16.03.2.02.05		Koordinasi dan sinkronisasi sistem keamanan informasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	dokumne	2	617.670.000	2	623.880.000		-		218.000.000		35.000.000			0	253.000.000	40,55		
2.16.03.2.02.06		Koordinasi dan sinkronisasi data dan informasi elektronik	Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	perangkat daerah	40	21.000.000	40	21.000.000		-		7.234.000		-			0	7.234.000	34,45		
2.16.03.2.02.07		Pengembangan aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	unit	2	424.180.000	2	430.228.000		40.700.000		78.400.000		58.800.000			0	177.900.000	41,35		
2.16.03.2.02.08		Penyelenggaraan sistem penghubung layanan pemerintah	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	layanan	1	138.180.000	1	144.860.000		22.700.000		45.400.000		35.010.000			0	103.110.000	71,18		
2.16.03.2.02.09		Pengembangan dan pengelolaan ekosistem kabupaten/kota cerdas dan kota cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	dokumen	12	253.428.000	12	290.814.000		22.850.000		131.038.000		19.920.000			0	173.808.000	59,77		
2.16.03.2.02.10		Pengembangan dan pengelolaan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi pemerintah daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	dokumen	2	228.400.000	2	180.428.000		-		-		-			0	-	0,00		
2.16.03.2.02.11		Pengelolaan government chief information officer (GCIO)	Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	dokumen	1	15.320.000	1	15.320.000		-		-		-			0	-	0,00		
2.16.03.2.02.12		Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	dokumen	1	6.060.000	1	6.060.000		-		-		3.060.000			0	3.060.000	50,50		
2.20.02		**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	**Prosentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral**	**persen**	**78**	**206.980.000**	**78**	**217.252.000**	**3,1**	**6.730.000**		**47.695.000**					**3,1**	**54.425.000**	25,05		
2.20.02.2.01		***Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota***	***Prosentase Penyelenggaraan Statistik Sektoral lingkup Kabupaten***	***persen***	***78***	***206.980.000***	***78***	***217.252.000***	**3,1**	***6.730.000***		***47.695.000***					3,1	**54.425.000**	25,05		
2.20.02.2.01.01		Koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	dokumen		100.000.000		93.296.000		-		45.240.000		1.200.000			0	46.440.000	49,78		
2.20.02.2.01.02		Peningkatan kapasitas sdm pemda dalam peningkatan mutu statistik daerah yang terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	orang		15.000.000		14.330.000		-		1.780.000		12.436.000			0	14.216.000	99,20		
2.20.02.2.01.03		Membangun metadata statistik sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	dokumen		10.000.000		10.265.000		3.515.000		-		6.125.500			0	9.640.500	93,92		
2.20.02.2.01.04		Peningkatan kapasitas kelembagaan statistik sektoral	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	orang		10.000.000		11.010.000		3.065.000		450.000		4.953.000			0	8.468.000	76,91		
2.20.02.2.01.05		Pengembangan infrastruktur	Jumlah Infrastruktur Statistik	unit		57.980.000		74.341.000		150.000		225.000		49.894.500			0	50.269.500	67,62		
2.20.02.2.01.06		Penyelenggaraan otorisasi statistik sektoral di daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral yang Dihimpun	dokumen		14.000.000		14.010.000		-		-		-			0	-	0,00		

	2.21.02		**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	**Prosentase Ketersediaan sarana keamanan informasi**	**persen**	**63**	**575.437.364**	**63**	**565.177.364**	**20,1**	**113.479.795**		**152.954.257**					**20**	**266.434.052**	**47,14**		
	2.21.02.2.01		***Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota***	***Cakupan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten***	***nilai***	***48***	***375.681.000***	***48***	***362.389.000***	**19,1**	***63.264.795***		***88.963.257***					19,1	**158.234.052**	43,59		
	2.21.02.2.01.01		Penetapan kebijakan tata kelola keamanan informasi dan jaring komunikasi sandi pemerintah daerah kabupaten	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	dokumen		14.000.000		16.300.000		-		6.880.000		-			0	6.880.000	42,21		
	2.21.02.2.01.02		Pelaksanaan analisis kebutuhan dan pengelolaan sumber daya keamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/ kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	2	52.000.000	2	24.584.000		-		1.215.500		16.290.436			0	17.505.936	71,21		
	2.21.02.2.01.03		Pelaksanaan keamanan informasi pemerintah daerah kabupaten berbasis elektronik dan non elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	laporan	2	105.681.000	2	116.889.000		26.497.795		26.821.020		21.944.019			0	75.262.834	64,39		
	2.21.02.2.01.04		Penyediaan layanan keamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/ kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	perangkat daerah	40	204.000.000	40	205.216.000		42.767.000		54.052.737		21.342.000			0	118.161.737	57,58		
	2.21.02.2.02		***Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota***	***Cakupan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah yang ditetapkan***	***kalurahan***	***3***	***199.756.364***	***3***	***202.188.364***	**21,9**	***44.215.000***		***63.985.000***					***22***	***108.200.000***	**53,51**		
	2.21.02.2.02.01		Operasionalisasi jaring komunikasi sandi pemerintah daerah kabupaten/ kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	perangkat daerah	3	199.756.364	3	202.188.364		44.215.000		63.985.000		42.182.950				150.382.950	74,38		

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo didasarkan pada kajian capaian kinerja pelayanan sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, disajikan pada tabel, sebagai berikut:

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																			
1	Jumlah OPD yang terkoneksi internet	-	-	-	-	40	40	40	40	-	40	40	40	40	-	100	100	100	100
2	Jumlah desa/kelurahan yang terkoneksi internet	-	-	-	-	167	167	167	167	-	167	167	167	167	-	100	100	100	100
3	Jumlah hotspot yang dikelola Pemkab	-	-	-	-	207	207	207	207	-	207	207	207	207	-	100	100	100	100
4	Jumlah hotspot di tempat publik yang dikelola pemkab	-	-	-	-	10	10	12	12	-	10	10	12	12	-	100	100	100	100
5	VoIP ke Kecamatan	-	-	-	-	12	12	12	12	-	12	12	12	12	-	100	100	100	100
6	Persentase OPD yang menggunakan sandi dalam komunikasi	-	-	-	-	80	30	30	30	-	80	30	30	30	-	100	100	100	100
7	Jumlah sub-domain OPD	-	-	-	-	40	40	40	40	-	40	40	40	40	-	100	100	100	100
8	Jumlah domain desa	-	-	-	-	150	150	150	150	-	150	150	150	150	-	100	100	100	100
9	Perkada terkait tentang implementasi e-goverment	-	-	-	-	-	1	5	5	-	-	1	5	5	-	-	100	100	100
URUSAN STATISTIK																			
1	Tersedia dokumen Sukoharjo Dalam Angka	-	-	-	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	100	100	100	100	100
2	Tersedia Dokumen PDRB Kabupaten Sukoharjo	-	-	-	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	100	100	100	100	100
URUSAN PERSANDIAN																			
1	Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan sandi	-	-	-	-	-	15	15	15	-	-	15	15	15	-	-	100	100	100

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Analis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan dan menjawab persoalan nyata yang dihadapi dalam pembangunan. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Penguatan infrastruktur digital dan peningkatan sumber daya manusia menjadi aspek utama untuk mendorong transformasi digital, Pesatnya perkembangan ekonomi digital di Indonesia harus diimbangi oleh infrastruktur digital yang kuat dan adaptif. Jadi, memang perlu ada kesinambungan konektivitas jaringan, inovasi digital, talenta digital yang ditopang oleh dukungan pemerintah, baik itu melalui regulasi, insentif, maupun kolaborasi.

Literasi digital menjadi salah satu pilar pendukung terwujudnya agenda transformasi digital. Berdasarkan Survei Literasi Digital Nasional yang mengacu pada kerangka literasi digital dari UNESCO, Indeks Literasi Digital Indonesia sendiri masih berada di tingkat sedang, Sebagai tingkat paling dasar, kemampuan literasi digital merupakan hal yang paling krusial dalam mewujudkan transformasi digital.

Masyarakat Indonesia tidak boleh hanya sekedar mengenal teknologi, tapi juga harus cermat menggunakannya.

Hasil survei Literasi Digital Kementerian Kominfo bersama Katadata menunjukkan indeks literasi digital Indonesia berada di angka 3,47 dari skala 4, Hal itu menunjukan indeks literasi digital kita hanya sedikit di atas tingkat sedang dan belum menunjukkan tingkat baik. Agar dapat mencapai tingkat baik, tentu membutuhkan dukungan dari semua pihak

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo sebagai perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dalam pelaksanaan kegiatan tersebut yaitu :

a. Bidang Aplikasi Informatika

1. Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

   Lahirnya Peraturan Presiden nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik diharapkan dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya.

   Terwujudnya tata Kelola dan manajemen SPBE, Layanan SPBE yang terpadu dan berorientasi pengguna, terselenggaranya infrastruktur SPBE yang terintegrasi serta meningkatnya kapasitas SDM SPBE merupakan bagian penting untuk tercapainya SPBE yang efektif dan efisien. Berkaitan dengan hal tersebut diatas, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo memandang beberapa hal terkait isu strategis SPBE kedepan yaitu tata kelola SPBE, layanan SPBE, teknologi informasi dan komunikasi, dan SDM SPBE.

2. Penyelenggaraan Kabupaten Cerdas dengan memanfaatkan Teknologi Informasi.

Kabupaten Cerdas merupakan salah satu konsep pengembangan Kabupaten berdasarkan prinsip teknologi informasi yang dibuat untuk kepentingan bersama secara efektif dan efisien. Kabupaten Cerdas merupakan upaya – upaya inovatif yang dilakukan ekosisten di Kabupaten dalam mengatasi berbagai persoalan dan meningkatkan kualitas hidup manusia,

Terciptanya kota hijau yang berdaya saing dan berbasis teknologi didukung sinergi smart governance, smart branding, smart economy, smart society, smat environment dan smart living merupakan isu penting dalam pengelolaan Kabupaten Cerdas

b. Bidang Statistik dan Persandian

1. Satu Data Sukoharjo

   Satu Data Indonesia (SDI) merupakan kebijakan tata kelola data pemerintah yang bertujuan untuk menciptakan data berkualitas, mudah diakses, dan dapat dibagipakaikan antar-instansi pusat serta daerah. Kebijakan SDI tertuang dalam Peraturan Presiden No. 39/2019 tentang Satu Data Indonesia. Sebagai turunan dari Peraturan tersebut, Pemerintah kabupaten Sukoharjo sudah menentapkan *Peraturan Bupati* (*PERBUP*) Kabupaten *Sukoharjo* Nomor 46 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan *Satu Data* Indonesia Tingkat Daerah. Penyusunan dan pengambilan suatu kebijakan pembangunan daerah tidak bisa terlepas dari tersedianya data sebagai bahan perencanaan dan dasar pengambilan kebijakan, hal ini dikarenakan pembangunan akan berjalan dengan baik dan tepat sasaran jika didukung dengan data yang mutakhir dan valid yang menggambarkan kondisi sebenarnya. Tujuan penyajian data adalah memberikan gambaran yang sistematis tentang peristiwa-peristiwa yang merupakan hasil penelitian atau observasi, sehingga data lebih cepat ditangkap dan dimengerti, memudahkan dalam membuat analisis data,

dan membuat proses pengambilan keputusan dan kesimpulan lebih tepat, cepat, dan akurat. Berkaitan dengan hal tersebut maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo melalui Bidang/Urusan Statistik mempunyai strategi untuk meningkatkan ketersediaan dan kualitas data statistik sektoral melalui single data dan disebarluaskan melalui portal satu data kabupaten Sukoharjo sehingga dapat dimanfaatkan sebagai bahan perencanaan,pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan di Kabupaten Sukoharjo.

2. Kebijakan Satu Peta

Kebijakan Satu Peta Nasional atau lebih sering disebut ***One Map Policy*** (OMP) adalah kebijakan Pemerintah Republik Indonesia dalam hal informasi geospasial. Pada tahun 2016 Presiden menetapkan kebijakan Percepatan Kebijakan Satu Peta melalui Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000, yang selanjutnya telah diubah melalui Peraturan Presiden Nomor 23 tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000.

Berdasarkan Perpres Nomor 23 Tahun 2021, untuk mencapai satu peta yang dapat dibagi-pakaikan dan dijadikan sebagai acuan bersama, kegiatan Percepatan Kebijakan Satu Peta (PKSP) memiliki 4 kegiatan utama, yang meliputi: Kompilasi, integrasi, sinkronisasi, dan berbagi data dan informasi geospasial melalui jaringan informasi geospasial nasional. Berkaitan dengan hal tersebut diatas, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo memandang 4 kegiatan tersebut sebagai isu strategis yang harus diperhatikan,

sehingga perlu koordinasi lebih intens dengan berbagai pihak yang berkepentingan terutama dengan Pembina data geospasial, yaitu Badan Informasi Geospasial (BIG).

Persandian

1. Implementasi Tanda Tangan Elektronik (TTE)

   Selain diterapkan pada Tata Naskah Dinas Elektronik/ Srikandi dan pelayanan perijinan, akan diterapkan pada aplikasi aplikasi berbasis web untuk menunjang pelayanan pada Masyarakat. Pemanfaatan TTE pada bidang pendapatan untuk pembayaran PBB, pajak dan retribusi daerah. Pada bidang Kesehatan akan diterapkan untuk e-Rekam Medis sesuai dengan ketentuan Kementrian Kesehatan. Juga akan diterapkan untuk menunjang pelayanan pada sektor lainnya

2. Penerapan system kriptografi untuk keamanan data base tertuang dalam pasal 21peraturan bupati sukoharjo nomor 65 tahun 2022 tentang keamanan SPBE. Istilah sandi data atau modul kriptografi di aplikasikan pada data base sebagai benteng terakhir keamanan informasi. Dengan enkripsi data menggunakan modul kriptografi ini, apabila system/ aplikasi berhasil diambil maka data di dalam nya tidak akan bisa digunakan orang yang tidak berwenang.

c. Informasi dan Komunikasi Publik

1. PPID
   - Belum optimalnya pemahaman pengelola PPID terhadap keterbukaan informasi publik sesuai Undang - Undang Keterbukaan Informasi Publik;
   - Belum optimalnya koordinasi dan pemahaman dari setiap PPID Pelaksana;
   - Belum optimalnya kapasitas sumber daya manusia pengelola PPID;
   - Belum optimalnya diseminasi kepada Masyarakat tentang PPID

2. LAPOR SP4N
    - Kurangnya komitmen untuk menggunakan aplikasi Lapor SP4N;
    - Belum optimalnya diseminasi kepada Masyarakat tentang aplikasi Lapor SP4N;
    - Belum maksimalnya pemanfaatan aplikasi Lapor SP4N;
    - Belum optimalnya pengelolaan aplikasi Lapor SP4N;
    - Belum optimalnya kapsitas sumber daya manusia pengelola Aplikasi Lapor SP4N.
3. WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL
    - Belum optimalnya pemanfaatan website dan media sosial pemerintah sebagai sarana ruang publik dalam membangun partisipasi Masyarakat.
    - Belum optimalnya pemanfatan website dan media sosial pemerintah sebagai kontrol sosial.
    - Belum optimalnya sinergitas pengelola website dan media sosial pemerintah dengan pengelola website dan media social Masyarakat.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 2024

Rencana Kerja (Renja) merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamongan yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan setiap tahunnya. Dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 yang disusun ini memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran serta rencana capaiannya yang merupakan tolak ukur keberhasilan dari tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo.

Disamping itu juga, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 yang disusun ini memuat informasi tentang program, kegiatan, indicator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen Rencana Kerja (Renja) ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo.

Program dan kegiatan Tahun 2024 yang telah diusulkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo merupakan rancangan awal Rencana Kerja (Renja) yang akan dilaksanakan Tahun 2024 dan telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Sukoharjo.

RANCANGAN APBD TA. 2024 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

12.181.911.893

No	Kode	URUSAN PEMERINTAHAN, BIDANG URUSAN, PERANGKAT DAERAH, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	APBD 2023	B OPERASI					B.MODAL	JUMLAH	KUA PPAS DISKOMINFO (Stlh Pencermatan)	Keterangan
				Bel Pegawai	Bel Barang&Jasa	Bel Subsidi	Bel. Hibah	Bel Bansos				
1	2	3	4	5a	5b	5c	5d	5e	5f	5=(5a+5b+5c+5d+5e+5f+5g)		
		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	**13.668.559.738**	**4.354.495.000**	**7.824.663.008**	-	**200.000.000**	-	**478.817.200**	**12.857.975.208**	**12.967.175.208**	
	2.16.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								***5.190.437.608***	***5.190.437.608***	
	2.16.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								***45.000.000***	***45.000.000***	
	2.16.01.2.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25.000.000		25.000.000					25.000.000	25.000.000	
	2.16.01.2.01.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	*10.000.000*		*10.000.000*					10.000.000	10.000.000	
	2.16.01.2.01.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*5.000.000*		*5.000.000*					5.000.000	5.000.000	
	2.16.02.2.02.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*5.000.000*		*5.000.000*					5.000.000	5.000.000	
	2.16.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								***4.569.465.000***	***4.569.465.000***	
	2.16.01.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*4.002.927.000*	*4.354.495.000*						4.354.495.000	4.354.495.000	
	2.16.01.2.02.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*266.900.000*		*199.970.000*					199.970.000	199.970.000	
	2.16.01.2.02.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*5.000.000*		*5.000.000*					5.000.000	5.000.000	
	2.16.01.2.02.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	*5.000.000*		*5.000.000*					5.000.000	5.000.000	
	2.16.01.2.02.8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	*5.000.000*		*5.000.000*					5.000.000	5.000.000	
	2.16.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								***20.000.000***	***20.000.000***	
	2.16.01.2.05.2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	*18.900.000*		-					-	-	
	2.16.01.2.05.9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	*64.960.000*							-	-	
	2.16.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	-		*20.000.000*					20.000.000	20.000.000	
	2.16.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								***258.030.400***	***258.030.400***	
	2.16.01.2.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*2.849.000*		*2.849.400*					2.849.400	2.849.400	
	2.16.01.2.06.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*25.949.000*		*23.055.000*				-	23.055.000	23.055.000	
	2.16.01.2.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*129.241.000*		*127.973.000*					127.973.000	127.973.000	
	2.16.01.2.06.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*22.160.000*		*20.025.000*					20.025.000	20.025.000	
	2.16.01.2.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*3.140.000*		*240.000*					240.000	240.000	
	2.16.01.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*80.118.000*		*83.888.000*					83.888.000	83.888.000	
	2.16.01.2.07	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								-	-	
	2.16.01.2.07.1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan			-					-	-	

	2.16.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								***75.722.208***	***75.722.208***	
	2.16.01.2.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*5.350.000*		*1.500.000*					1.500.000	1.500.000	
	2.16.01.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*71.400.000*		*12.000.000*					12.000.000	12.000.000	
	2.16.01.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*42.960.000*		*62.222.208*					62.222.208	62.222.208	
	2.16.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								***222.220.000***	***222.220.000***	
	2.16.01.2.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*90.900.000*		*169.900.000*					169.900.000	169.900.000	
	2.16.01.2.09.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*87.760.000*		*12.750.000*					12.750.000	12.750.000	
	2.16.01.2.09.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*40.080.000*		*32.220.000*				7.350.000	39.570.000	39.570.000	
	2.16.02	**PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**								***1.348.999.800***	***1.348.999.800***	45.000.000
	2.16.02.2.01	**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**								***1.348.999.800***	***1.348.999.800***	
	2.16.02.2.01.1	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	*15.000.000*		*12.063.200*					12.063.200	12.063.200	
	2.16.02.2.01.2	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	*50.000.000*		*35.000.000*					35.000.000	35.000.000	
	2.16.02.2.01.3	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	*160.000.000*		*157.125.000*					157.125.000	157.125.000	
	2.16.02.2.01.4	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	*57.412.000*		*19.000.000*					19.000.000	19.000.000	
	2.16.02.2.01.5	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	*534.391.164*		*349.780.000*		*200.000.000*			549.780.000	549.780.000	
	2.16.02.2.01.6	Pelayanan Informasi Publik	*200.000.000*		*158.650.000*					158.650.000	158.650.000	
	2.16.02.2.01.7	Layanan Hubungan Media	*43.925.000*		*40.000.000*					40.000.000	40.000.000	
	2.16.02.2.01.8	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	*15.000.000*		*9.000.000*					9.000.000	9.000.000	
	2.16.02.2.01.9	Manajemen Komunikasi Krisis	*15.000.000*		*10.880.000*					10.880.000	10.880.000	
	2.16.02.2.01.10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	*20.000.000*		*18.700.000*					18.700.000	18.700.000	
	2.16.02.2.01.12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	*50.000.000*		*43.500.000*					43.500.000	43.500.000	
	2.16.02.2.01.13	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikkasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*308.712.000*		*98.914.400*				196.387.200	295.301.600	295.301.600	
	2.16.03	**PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA**								**5.619.581.436**	***5.728.781.436***	
	2.16.03.2.01	**Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**								***3.026.406.812***	***3.026.406.812***	
	2.16.03.2.01.2	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	*32.475.000*		*19.050.000*					19.050.000	19.050.000	
	2.16.03.2.01.3	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	*3.923.454.650*		*2.861.676.812*				145.680.000	3.007.356.812	3.007.356.812	

	2.16.03.2.02	**Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**								***2.593.174.624***	***2.702.374.624***	
	2.16.03.2.02.1	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	*8.120.000*		*8.000.000*					8.000.000	8.000.000	
	2.16.03.2.02.2	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	*23.836.000*		*20.000.000*					20.000.000	20.000.000	
	2.16.03.2.02.3	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	*700.864.560*		*1.011.887.624*				92.400.000	1.104.287.624	1.104.287.624	
	2.16.03.2.02.4	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	*8.120.000*		*8.120.000*					8.120.000	8.120.000	
	2.16.03.2.02.5	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	*617.670.000*		*530.589.000*					530.589.000	530.589.000	
	2.16.03.2.02.6	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	*21.000.000*		*21.000.000*					21.000.000	21.000.000	
	2.16.03.2.02.7	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	*424.180.000*		*270.140.000*					270.140.000	270.140.000	
	2.16.03.2.02.8	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	*138.180.000*		*195.258.000*					195.258.000	243.258.000	
	2.16.03.2.02.9	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	*253.428.000*		*252.580.000*					252.580.000	252.580.000	
	2.16.03.2.02.10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	*228.400.000*		*167.200.000*					167.200.000	228.400.000	
	2.16.03.2.02.11	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	*15.320.000*		*10.000.000*					10.000.000	10.000.000	
	2.16.03.2.02.12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	*6.060.000*		*6.000.000*					6.000.000	6.000.000	
	2.20	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**								***169.000.000***	***169.000.000***	100.000.000
	2.20.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**								**169.000.000**	***169.000.000***	
	2.20.02.2.01	**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**								***169.000.000***	***169.000.000***	
	2.20.02.2.01.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	*100.000.000*		*75.000.000*					75.000.000	75.000.000	
	2.20.02.2.01.2	Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	*15.000.000*		*15.000.000*					15.000.000	15.000.000	
	2.20.02.2.01.3	Membangun Metadata Statistik Sektoral	*10.000.000*		*10.000.000*					10.000.000	10.000.000	
	2.20.02.2.01.4	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	*10.000.000*		*10.000.000*					10.000.000	10.000.000	
	2.20.02.2.01.5	Pengembangan Infrastruktur	*57.980.000*		*45.000.000*					45.000.000	45.000.000	
	2.20.02.2.01.6	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	*14.000.000*		*14.000.000*					14.000.000	14.000.000	
	2.21	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**								***529.956.364***	***529.956.364***	
	2.21.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**								***529.956.364***	***529.956.364***	
	2.21.02.2.01	**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**								***355.000.000***	***355.000.000***	
	2.21.02.2.01.1	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*14.000.000*		*10.000.000*					10.000.000	10.000.000	

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Dalam perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah selain didasarkan pada rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat daerah juga dilakukan penelaahan terhadap Kebijakan Nasional.

3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Berdasar Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dimana berdasar rumpun urusan, maka urusan persandian dan statistik serumpun dengan urusan komunikasi dan informatika

Sebagai leading sektor di bidang komunikasi dan informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam Renstra tahun 2020-2024 akan berfokus membangun sektor telekomunikasi, tata kelola internet, dan digitalisasi siaran televisi.

Tantangan dan potensi program Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam rangka mendukung seluruh fokus pembangunan pemerintah Indonesia tahun 2020-2024, antara lain sebagai berikut:

1. Masih tingginya kesenjangan digital di wilayah Indonesia;
2. Kurangnya akses masyarakat terhadap informasi;
3. Belum terjangkaunya seluruh wilayah Indonesia dengan jaringan infrastruktur pitalebar (Palapa Ring);
4. Meningkatnya citra pemerintah di mata masyarakat versus turunnya kinerja pemerintah terkait hasil-hasil pembangunan;
5. Intoleransi dan krisis kepribadian bangsa.

Sedangkan tantangan dan potensi program Universal Service Obligation (USO) yang mendukung 4 (empat) fokus pembangunan pemerintah Indonesia, antara lain:

1. Keterbatasan akses masyarakat terhadap informasi;
2. Kebutuhan akses internet untuk SMK/SMU;
3. Kebutuhan ketersediaan jaringan internet untuk informasi pertanian;
4. Kebutuhan radio keselamatan untuk nelayan.

Tujuan Kementerian Komunikasi dan Informatika meliputi fokus pembangunan bidang komunikasi dan informatika dimana Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai pendukung program unggulan pemerintah Indonesia yaitu kedaulatan pangan, kedaulatan energi, kemaritiman, pariwisata dan industri, infrastruktur, pengembangan SDM, dan perbatasan dan Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai leading sektor. Tujuan Kementerian Komunikasi dan Informatika antara lain:

1. Mengelola sumber daya spektrum frekuensi radio secara optimal;
2. Mewujudkan tata kelola komunikasi dan informatika yang sehat, efisien dan aman;
3. Meningkatkan efisiensi industri komunikasi dan informatika;
4. Meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi;
5. Menciptakan sumber daya TIK yang unggul, produktif dan berdaya saing;
6. Meningkatkan partisipasi publik terhadap pengambilan kebijakan publik;
7. Menyediakan dukungan TIK dalam rangka pencapaian fokus pembangunan pemerintah Indonesia.

Rencana strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah telah ditetapkan Tahun 2018-2023 telah menetapkan tujuan dan sasaran. Tujuan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah yaitu digitalisasi tata kelola Pemerintahan Jawa Tengah.

Tujuan tersebut menggunakan sasaran yang dijabarkan sebagai berikut :

1) Meningkatnya teknologi informasi dan komunikasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
2) Meningkatnya pemanfaatan data dan informasi statistik sektoral.
3) Meningkatnya keamanan informasi dalam mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja DISKOMINFO Kabupaten Sukoharjo

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (*Critical Success Factor*) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tujuan mewujudkan kualitas aparatur dan pelayanan publik, dengan sasaran sebagai berikut :

1. Terwujudnya Tata Kelola dan Ekosistem E-Government;
2. Terwujudnya Kualitas Infrastruktur Telekomunikasi;

Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga yang melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang Komunikasi dan Informatika. Adapun untuk menyelenggarakan tugas pembantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang komunikasi dan informatika mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Komunikasi dan Informatika;
b. Pelaksanaan kebijakan teknis dibidang Komunikasi dan Informatika;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang Komunikasi dan Informatika;
d. Pelaksanaan administrasi dibidang Komunikasi dan Informatika;

3.3 Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024

Program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2024 disusun berdasarkan pada tupoksi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo setelah mengalami *Refocusing* mengelola anggaran sebesar Rp. 12.234.951.108,- yang terdiri dari :

a. Belanja Pegawai sebesar Rp. 4.604.721.000,-
b. Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 6.866.621.758
c. Belanja Hibah sebesar Rp. 200.000.000,-
d. Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 563.608.350,-

Adapun program dan kegiatan tersebut adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran ini.

A. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika ;

1. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

   Kegiatan :

   Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan :

1. Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
2. Monitoring Opini dan Aspirasi Publik
3. Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah
4. Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik
5. Pengelolaan Media Komunikasi Publik
6. Pelayanan Informasi Publik
7. Layanan Hubungan Media
8. Kemitraan dengan Pemangku Kepetingan
9. Manajemen Komunikasi Krisis
10. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik
11. Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas
12. Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo

2. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika.

Kegiatan :

a. Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan :
    1. Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
    2. Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah.

b. Pengelolaan e-government Dilingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

1. Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik
3. Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah
4. Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah.
5. Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi.
6. Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik.
7. Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik.
8. Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah.
9. Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas.
10. Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah.
11. Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)
12. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE.

3. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral.

Kegiatan :

Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota.

1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengelolaan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral.
2. Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi.
3. Membangun Metadata Statistik Sektoral.
4. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral.
5. Pengembangan Infrastruktur.
6. Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah.

4. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi.

Kegiatan :

a. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan :
    1. Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
    2. Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
    3. Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik.
    4. Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

(2) Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan:

1. Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Program Pendukung

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

   Kegiatan :

   a. ***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan :***
      1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
      2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
      3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD; dan
      4. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

   b. ***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan :***
      1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
      2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;
      3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
      4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD; dan
      5. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis.

   c. ***Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan :***
      1. *Bimbingan Teknis Inplementasi Peraturan Perundang -undangan*

   d. ***Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan :***
      1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
      2. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;

3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Sub Kegiatan :
    1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
    2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Sub Kegiatan :
    1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan; dan
    2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
    3. Penyediaan Peralatan dan Mesin Lainnya

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo 2021-2026 melalui tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program dan kegiatan yang disertai pendanaan untuk 5 (lima) tahun mendatang

Berdasarkan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan tersebut maka Dinas Komunikasi dan Informatika Sukoharjo menetapkan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2021-2026. Selengkapnya dapat dilihat pada *Lampiran 1*

RANCANGAN APBD TA. 2024 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

12.181.911.893

No	Kode	URUSAN PEMERINTAHAN, BIDANG URUSAN, PERANGKAT DAERAH, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	APBD 2023	B OPERASI					B.MODAL	JUMLAH	KUA PPAS DISKOMINFO (Stlh Pencermatan)	Keterangan
				Bel Pegawai	Bel Barang&Jasa	Bel Subsidi	Bel. Hibah	Bel Bansos				
1	2	3	4	5a	5b	5c	5d	5e	5f	5=(5a+5b+5c+5d+5e+5f+5g)		
		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	**13.668.559.738**	**4.354.495.000**	**7.824.663.008**	**-**	**200.000.000**	**-**	**478.817.200**	**12.857.975.208**	**12.967.175.208**	
	2.16.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								***5.190.437.608***	***5.190.437.608***	
	2.16.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								***45.000.000***	***45.000.000***	
	2.16.01.2.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25.000.000		25.000.000					25.000.000	25.000.000	
	2.16.01.2.01.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	*10.000.000*		*10.000.000*					10.000.000	10.000.000	
	2.16.01.2.01.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*5.000.000*		*5.000.000*					5.000.000	5.000.000	
	2.16.02.2.02.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*5.000.000*		*5.000.000*					5.000.000	5.000.000	
	2.16.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								***4.569.465.000***	***4.569.465.000***	
	2.16.01.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*4.002.927.000*	*4.354.495.000*						4.354.495.000	4.354.495.000	
	2.16.01.2.02.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*266.900.000*		*199.970.000*					199.970.000	199.970.000	
	2.16.01.2.02.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*5.000.000*		*5.000.000*					5.000.000	5.000.000	
	2.16.01.2.02.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	*5.000.000*		*5.000.000*					5.000.000	5.000.000	
	2.16.01.2.02.8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	*5.000.000*		*5.000.000*					5.000.000	5.000.000	
	2.16.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								***20.000.000***	***20.000.000***	
	2.16.01.2.05.2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	*18.900.000*		-					-	-	
	2.16.01.2.05.9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	*64.960.000*							-	-	
	2.16.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	-		*20.000.000*					20.000.000	20.000.000	
	2.16.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								***258.030.400***	***258.030.400***	
	2.16.01.2.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*2.849.000*		*2.849.400*					2.849.400	2.849.400	
	2.16.01.2.06.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*25.949.000*		*23.055.000*				-	23.055.000	23.055.000	
	2.16.01.2.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*129.241.000*		*127.973.000*					127.973.000	127.973.000	
	2.16.01.2.06.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*22.160.000*		*20.025.000*					20.025.000	20.025.000	
	2.16.01.2.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*3.140.000*		*240.000*					240.000	240.000	
	2.16.01.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*80.118.000*		*83.888.000*					83.888.000	83.888.000	
	2.16.01.2.07	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								-	-	
	2.16.01.2.07.1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan			-					-	-	

	2.16.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								***75.722.208***	***75.722.208***	
	2.16.01.2.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*5.350.000*		*1.500.000*					1.500.000	1.500.000	
	2.16.01.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*71.400.000*		*12.000.000*					12.000.000	12.000.000	
	2.16.01.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*42.960.000*		*62.222.208*					62.222.208	62.222.208	
	2.16.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								***222.220.000***	***222.220.000***	
	2.16.01.2.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*90.900.000*		*169.900.000*					169.900.000	169.900.000	
	2.16.01.2.09.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*87.760.000*		*12.750.000*					12.750.000	12.750.000	
	2.16.01.2.09.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*40.080.000*		*32.220.000*				7.350.000	39.570.000	39.570.000	
	2.16.02	**PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**								***1.348.999.800***	***1.348.999.800***	45.000.000
	2.16.02.2.01	**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**								***1.348.999.800***	***1.348.999.800***	
	2.16.02.2.01.1	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	*15.000.000*		*12.063.200*					12.063.200	12.063.200	
	2.16.02.2.01.2	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	*50.000.000*		*35.000.000*					35.000.000	35.000.000	
	2.16.02.2.01.3	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	*160.000.000*		*157.125.000*					157.125.000	157.125.000	
	2.16.02.2.01.4	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	*57.412.000*		*19.000.000*					19.000.000	19.000.000	
	2.16.02.2.01.5	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	*534.391.164*		*349.780.000*		*200.000.000*			549.780.000	549.780.000	
	2.16.02.2.01.6	Pelayanan Informasi Publik	*200.000.000*		*158.650.000*					158.650.000	158.650.000	
	2.16.02.2.01.7	Layanan Hubungan Media	*43.925.000*		*40.000.000*					40.000.000	40.000.000	
	2.16.02.2.01.8	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	*15.000.000*		*9.000.000*					9.000.000	9.000.000	
	2.16.02.2.01.9	Manajemen Komunikasi Krisis	*15.000.000*		*10.880.000*					10.880.000	10.880.000	
	2.16.02.2.01.10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	*20.000.000*		*18.700.000*					18.700.000	18.700.000	
	2.16.02.2.01.12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	*50.000.000*		*43.500.000*					43.500.000	43.500.000	
	2.16.02.2.01.13	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikkasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*308.712.000*		*98.914.400*				196.387.200	295.301.600	295.301.600	
	2.16.03	**PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA**								**5.619.581.436**	***5.728.781.436***	
	2.16.03.2.01	**Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**								***3.026.406.812***	***3.026.406.812***	
	2.16.03.2.01.2	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	*32.475.000*		*19.050.000*					19.050.000	19.050.000	
	2.16.03.2.01.3	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	*3.923.454.650*		*2.861.676.812*				145.680.000	3.007.356.812	3.007.356.812	

	2.16.03.2.02	**Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**								***2.593.174.624***	***2.702.374.624***	
	2.16.03.2.02.1	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	*8.120.000*		*8.000.000*					8.000.000	8.000.000	
	2.16.03.2.02.2	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	*23.836.000*		*20.000.000*					20.000.000	20.000.000	
	2.16.03.2.02.3	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	*700.864.560*		*1.011.887.624*				92.400.000	1.104.287.624	1.104.287.624	
	2.16.03.2.02.4	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	*8.120.000*		*8.120.000*					8.120.000	8.120.000	
	2.16.03.2.02.5	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	*617.670.000*		*530.589.000*					530.589.000	530.589.000	
	2.16.03.2.02.6	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	*21.000.000*		*21.000.000*					21.000.000	21.000.000	
	2.16.03.2.02.7	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	*424.180.000*		*270.140.000*					270.140.000	270.140.000	
	2.16.03.2.02.8	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	*138.180.000*		*195.258.000*					195.258.000	243.258.000	
	2.16.03.2.02.9	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	*253.428.000*		*252.580.000*					252.580.000	252.580.000	
	2.16.03.2.02.10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	*228.400.000*		*167.200.000*					167.200.000	228.400.000	
	2.16.03.2.02.11	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	*15.320.000*		*10.000.000*					10.000.000	10.000.000	
	2.16.03.2.02.12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	*6.060.000*		*6.000.000*					6.000.000	6.000.000	
	2.20	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**								***169.000.000***	***169.000.000***	100.000.000
	2.20.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**								**169.000.000**	***169.000.000***	
	2.20.02.2.01	**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**								***169.000.000***	***169.000.000***	
	2.20.02.2.01.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	*100.000.000*		*75.000.000*					75.000.000	75.000.000	
	2.20.02.2.01.2	Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	*15.000.000*		*15.000.000*					15.000.000	15.000.000	
	2.20.02.2.01.3	Membangun Metadata Statistik Sektoral	*10.000.000*		*10.000.000*					10.000.000	10.000.000	
	2.20.02.2.01.4	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	*10.000.000*		*10.000.000*					10.000.000	10.000.000	
	2.20.02.2.01.5	Pengembangan Infrastruktur	*57.980.000*		*45.000.000*					45.000.000	45.000.000	
	2.20.02.2.01.6	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	*14.000.000*		*14.000.000*					14.000.000	14.000.000	
	2.21	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**								***529.956.364***	***529.956.364***	
	2.21.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**								***529.956.364***	***529.956.364***	
	2.21.02.2.01	**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**								***355.000.000***	***355.000.000***	
	2.21.02.2.01.1	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*14.000.000*		*10.000.000*					10.000.000	10.000.000	

BAB V
P E N U T U P

Dokumen Rencana Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sukoharjo tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 1 tahun. Dokumen ini merupakan penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, visi dan visi, kebijakan, dan program Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sukoharjo .

Dengan perencanaan yang matang diharapkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sukoharjo dapat terlaksana dengan baik dengan tetap memperhatikan azas kewenangan, efisiensi dan efektifitas. Selain itu Rencana Kerja mempunyai fungsi sebagai pedoman bagi segenap unsur dan jajaran Perangkat Daerah dalam merealisasikan program dan kegiatan, sehingga diharapkan dapat mengeliminir kesalahan dalam perencanaan.

Sukoharjo, 2023

KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN SUKOHARJO

SUYAMTO, ST, M.Kom
Pembina Utama Muda
NIP. 19720520 199803 1 007

RENJA
(RENCANA KERJA)
TAHUN 2024

KECAMATAN SUKOHARJO

Kabupaten Sukoharjo

Jalan Rajawali No 12 Sukoharjo

SALINAN

BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 35 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024;

b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 273 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan Kepala Daerah setelah Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 192) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 262);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tatacara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 200);
13. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);
14. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 298);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

Renja Perangkat Daerah disusun dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Pasal 3

Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

BAB II

SISTEMATIKA DAN FUNGSI RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 4

Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. bab I : pendahuluan;
b. bab II : hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu;
c. bab III : tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
d. bab IV : rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan
e. bab V : penutup.

Pasal 5

Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah.

BAB II

PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 6

(1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah.
(2) Kepala Perangkat Daerah melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi Renja Perangkat Daerah kepada Bupati melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.

BAB III

PERANGKAT DAERAH PENYUSUN

Pasal 7

(1) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun oleh Perangkat Daerah sebagai berikut:
    a. Sekretariat Daerah;
    b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
    c. Inspektorat Daerah;
    d. Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan;
    e. Dinas Kesehatan;
    f. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang;
    g. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
    h. Satuan Polisi Pamong Praja;
    i. Dinas Sosial;

j. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak;
k. Dinas Pangan;
l. Dinas Lingkungan Hidup;
m. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil;
n. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa;
o. Dinas Perhubungan;
p. Dinas Komunikasi Dan Informatika;
q. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
r. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;
s. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
t. Dinas Pertanian dan Perikanan;
u. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah dan Perdagangan;
v. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
w. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
x. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
y. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
z. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
aa. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
bb. Kecamatan Weru;
cc. Kecamatan Bulu;
dd. Kecamatan Tawangsari;
ee. Kecamatan Sukoharjo;
ff. Kecamatan Nguter;
gg. Kecamatan Bendosari;
hh. Kecamatan Polokarto;
ii. Kecamatan Mojolaban;
jj. Kecamatan Grogol;
kk. Kecamatan Baki;
ll. Kecamatan Gatak; dan
mm. Kecamatan Kartasura.

(2) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf mm tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 10 Agustus 2023

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 10 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd.

WIDODO

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2023 NOMOR 35

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ditandatangani secara elektronik oleh :

TEGUH PRAMONO, SH, MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19710429 199803 1 003

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 35 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN
SUKOHARJO TAHUN 2024

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2024

Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 terdiri atas:

1. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Inspektorat Daerah;
4. Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan;
5. Dinas Kesehatan;
6. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang;
7. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
8. Satuan Polisi Pamong Praja;
9. Dinas Sosial;
10. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak;
11. Dinas Pangan;
12. Dinas Lingkungan Hidup;
13. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil;
14. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa;
15. Dinas Perhubungan;
16. Dinas Komunikasi Dan Informatika;
17. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
18. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;
19. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
20. Dinas Pertanian dan Perikanan;
21. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah dan Perdagangan;
22. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
23. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
24. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
25. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
26. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
27. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
28. Kecamatan Weru;
29. Kecamatan Bulu;

30. Kecamatan Tawangsari;
31. Kecamatan Sukoharjo;
32. Kecamatan Nguter;
33. Kecamatan Bendosari;
34. Kecamatan Polokarto;
35. Kecamatan Mojolaban;
36. Kecamatan Grogol;
37. Kecamatan Baki;
38. Kecamatan Gatak; dan
39. Kecamatan Kartasura.

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, telah berhasil disusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 yang berisikan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan termasuk juga Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif.

Renja ini disusun dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah. Renja ini pada dasarnya merupakan penjabaran dari rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 di bidang Administrasi Pemerintah Umum. Adapun tujuannya adalah sebagai arahan, acuan atau rujukan yang harus dijabarkan dan dilaksanakan oleh seluruh pejabat structural, fungsional dan seluruh Organisasi Kemasyarakat di lingkungan Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo.

Pada kesempatan ini diucapkan terima kasih atas peran aktif seluruh staf, khususnya Tim Penyusunan serta para Pemangku Kepentingan “stakeholders” yang telah memberikan berbagai masukan terutama isu-isu strategis, baik secara langsung pada saat rapat pembahasan/dialog maupun secara tak langsung untuk terwujudnya Renja ini.

Mudah-mudahan dengan adanya Renja ini sebagai pedoman, acuan atau rujukan dalam pelaksanaannya dapat membawa hasil positif di bidang administrasi pemerintahan umum khususnya dalam menindaklanjuti RPJMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024.

Kami menyadari Renja ini jauh dari sempurna, untuk itu saran dan koreksi sangat kami harapkan demi kesempurnaan Renja ini dan keberlanjutan penyusunan di periode berikutnya. Kami berharap apa yang terangkum dalam Renja Pemerintah Kecamatan Sukoharjo Tahun 2023 ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Sukoharjo, 2023

CAMAT SUKOHARJO

HAVID DANANG PURNOMO W, SH.,MH.

Pembina

NIP. 19841107 201001 1 023

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iv
DAFTAR TABEL v
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Landasan Hukum 3
C. Maksud dan Tujuan 6
D. Sistematika Penulisan 7
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 9
A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Program Renstra Perangkat Daerah 9
B. Analisa Kinerja Perangkat Daerah 25
C. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 30
D. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 35
E. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 76
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 77
A. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 77
B. Tujuan dan Sasaran serta Arah Kebijakan 78
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 80
A. Rencana Kerja 80
B. Program, Kegiatan dan Pendanaan 80
BAB V PENUTUP 233

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Renja Perangkat Daerah Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo	10
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 - 2026	27
Tabel 2.3	Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 - 2026	29
Tabel 2.4	Identifikasi Permasalahan Kecamatan Sukoharjo	30
Tabel 2.5	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024	36
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah	69
Tabel 4.1	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024	70
Tabel 4.2	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan rencana Pendanaan Tahun 2024	74

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja Perangkat Daerah merupakan sebuah dokomen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya. Renja Perangkat Daerah memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja Perangkat Daerah merupakan produk perencanaan pada Unit Organisasi Pemerintah terendah dan terkecil. Renja Perangkat Daerah berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kualtitas penyusunan Renja Perangkat Daerah sangatlah menentukan pada kualitas pelayanan pada publik.

Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dimulai dengan persiapan penyusunan Renja Perangkat Daerah dengan mengumpulkan data dan informasi. Menganalisa gambaran pelayanan Perangkat Daerah untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu berdasarkan Renstra Perangkat Daerah yang didasrkan pada penelaahan rancangan awal RKPD. Selanjutnya menjadi perumusan kegiatan prioritas yang juga didasarkan kepada penelaahan usulan kegiatan masyarakat.

Penyusunan Renja Kecamatan Sukoharjo Tahun 2024 didasarkan pada Renstra Kecamatan Sukoharjo 2021-2026 dengan memperhatikan program prioritas. Tahun 2024 merupakan tahun ke-4 perencanaan pembangunan Kabupaten Sukoharjo yang berpedoman pada RPJMD 2021-2026. Sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Sukoharjo serta sejalan dengan visi pembangunan jangka menengah daerah tahun 2021-2026 yaitu "**Mewujudkan Masyarakat Sukoharjo Yang Lebih Makmur** ".

Prinsip-prinsip di dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah, adalah sebagai berikut :

a. Berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan mengacu pada rancangan awal RKPD;
b. Rumusan program/kegiatan/sub kegiatan di dalam Renja Perangkat Daerah didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerluksan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing Perangkat Daerah;
c. Penyusunan bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD;
d. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolak ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun n dan tahun n+1.

Keterkaitan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD dan Renstra Perangkat Daerah memrupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena didalam Renja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD, Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Renja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari RKP, Renstra Perangkat Daerah. Dan RPJMD bagi RKA Perangkat Daerah, KUA, PPAS dan RAPBD.

B. Landasan Hukum

Dasar Hukum Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);

17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 174);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 192) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031(Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 262);
20. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);

21. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 298);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);

C. Maksud dan Tujuan

Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Sukoharjo Tahun 2024 merupakan dokumen resmi perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk 1 (satu) tahun ke depan, yang dimulai tanggal 1 Januari 2024 dan berakhir tanggal 31 Desember 2024, serta menggambarkan capaian kinerja yang dapat ditransformasikan ke dalam Renja Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah.

Sedangkan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Sukoharjo adalah :

1. Mendeskripsikan tentang program-program prioritas yang akan dilaksanakan langsung oleh Perangkat Daerah Kecamatan Sukoharjo;
2. Program-program tersebut dapat terlaksana sesuai yang diharapkan dengan menitikberatkan pada program-program prioritas.

D. Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Sukoharjo Tahun 2024 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renja, landasan hukum penyusunan Renja, maksud dan tujuan penyusunan Renja, dan sistematika penulisan dokumen Renja.

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

Memuat Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah . Analis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan fungsi Perangkat Daerah, Review terhadap Rancangan Awal Perangkat Daerah dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Bab ini memuat penelaahan terhadap kebijakan Nasional serta tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah.

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab ini berisi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah serta Pendanaannya.

Bab V Penutup

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan Capaian Program Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2020 merupakan kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan perkiraan capaian Renja Perangkat Daerah Tahun 2023. Evaluasi tersebut dilakukan melalui penilaian terhadap realisasi DPA Perangkat Daerah yang mencakup program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran, lokasi serta dana indikatif.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Sukoharjo Tahun 2022 digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Selain itu, evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Sukoharjo Tahun 2022 dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja Kecamatan Sukoharjo Tahun 2022 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Kecamatan Sukoharjo Tahun 2021-2026 serta sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022.

Pengukuran kinerja Kecamatan Sukoharjo didasarkan pada sasaran dengan capaian sasaran sebagaimana pada table berikut :

Pengukuran Sasaran Rencana Kerja Kecamatan Sukoharjo
Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target		Realisasi	
		2021	2022	2021	2022
1	2		3		4
Meningkatnya kualitas aparatur dan pelayanan publik	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	60,50	60,60	65,73	NA (Nilai SAKIP th 2022 belum rilis)
Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	Persentase peningkatan pelayanan kecamatan	100 %	100 %	98,10 %	99,75 %

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Sukoharjo Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut : (Tabel 2.1)

Tabel 2.1

REKAPITULASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2022

KECAMATAN SUKOHARJO KABUPATEN SUKOHARJO

Kode Rekening	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Renja PD Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran DPA PD 2022 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran DPA 2022 yang dievaluasi (%)	
						I		II		III		IV					
	2	3	4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5*100	
				K	Rp DPA	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp (Ribu)	K	%
1.2	Meningkatnya kualitas aparatur dan pelayanan publik		Nilai SAKIP PD														
0.0.1	**ASN di Kelurahan dan Masyarakat di wilayah Kecamatan Sukoharjo**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah**	**100%**	**17.051.078.480**	**15,79 %**	**2.243.989.751**	**29,53 %**	**5.035.719.042**	**26,12 %**	**4.453.953.300**	**22,51 %**	**3.838.554.668**	**99,43 %**	**15.572.216.761**	**99,43%**	**91,33 %**
0.0.1.2.01	**Dokumen perencanaan PD**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100%**	**85.000.000**	**29,56 %**	**25.125.000**	**20,21 %**	**17.178.000**	**35,90 %**	**30.517.000**	**14,33 %**	**12.180.000**	**100,00%**	**85.000.000**	**100,00 %**	**100,00%**
0.0.1.2.01.1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dok	25.000.000	0	-	0	12.083.000	1	12.917.000			1	25.000.000	100,00 %	100,00%
0.0.1.2.01.2		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun	1 Dok	10.000.000	1	10.000.000	0	-	0	0			1	10.000.000	100,00 %	100,00%
0.0.1.2.01.3		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	1 Dok	10.000.000	0	-	0	-	1	10.000.000			1	10.000.000	100,00 %	100,00%

0.0.1.2.01.4		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun	1	Dok	10.000.000	1	10.000.000	0	-	0	0			1	10.000.000	100,00%	100,00%
0.0.1.2.01.5		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD yang disusun	1	Dok	10.000.000	0	-	0	-	0	2.475.000	1	7.525.000	1	10.000.000	100,00%	100,00%
0.0.1.2.01.6		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	2	Dok	10.000.000	1	2.550.000	1	2.520.000	0	2.550.000	0	2.380.000	2	10.000.000	100,00%	100,00%
0.0.1.2.01.7		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	1	Dok	10.000.000	0	2.575.000	0	2.575.000	1	2.575.000	0	2.275.000	1	10.000.000	100,00%	100,00%
0.0.1.2.02	**Dokumen keuangan PD**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100%**		**12.442.899.000**	**14,67%**	**1.694.756.589**	**29,63%**	**3.687.407.049**	**25,12%**	**3.126.109.213**	**22,55%**	**2.805.953.646**	**100,00%**	**11.314.226.497**	**100,00%**	**90,93%**
0.0.1.2.02.1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan	97	Org	11.274.274.000	99	1.408.426.589	99	3.406.447.049	99	2.851.449.213	96	2.537.743.646	99	10.204.066.497	100,00%	90,51%
0.0.1.2.02.3		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen SPJ yang telah diverifikasi dan disahkan	12	Dok	1.131.440.000	2	272.845.000	4	274.210.000	3	264.855.000	3	261.110.000	12	1.073.020.000	100,00%	94,84%
0.0.1.2.02.4		Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD	Jumlah laporan realisasi anggaran dan neraca sesuai dengan SAP dan kebijakan akuntansi	1	Lap	12.185.000	0	5.240.000	0	3.460.000	0	2.285.000	1	1.185.000	1	12.170.000	100,00%	99,88%
0.0.1.2.02.5		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen pelaporan keuangan akhir tahun	1	Dok	5.000.000	0	-	0	-	0	0	1	4.970.000	1	4.970.000	100,00%	99,40%
0.0.1.2.02.7		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/ triwulan/ semesteran	20	Dok	15.000.000	5	5.675.000	5	1.720.000	5	6.660.000	5	945.000	20	15.000.000	100,00%	100,00%
0.0.1.2.02.8		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran yang disusun	12	Dok	5.000.000	2	2.570.000	4	1.570.000	3	860.000	3	-	12	5.000.000	100,00%	100,00%

0.0.1.2.05	**ASN kelurahan dan Kecamatan Sukoharjo**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100%**		**35.000.000**	**33,27 %**	**11.644.000**	**7,70 %**	**2.695.000**	**0,00 %**	**-**	**59,03 %**	**20.661.000**	**100,00%**	**35.000.000**	**100,00 %**	**100,00%**
0.0.1.2.05.3		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian yang disusun	97	Lap	20.000.000	40	7.869.000	5	930.000	0	-	52	11.201.000	97	20.000.000	100,00 %	100,00%
0.0.1.2.05.5		Monitoring,Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen monev dan penilaian kinerja pegawai yang disusun	97	Dok	10.000.000	55	3.775.000	18	1.765.000	0	-	24	4.460.000	97	10.000.000	100,00 %	100,00%
0.0.1.2.05.10		Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	70	Org	5.000.000	0	-	0	-	0	0	70	5000000	70	5.000.000	100,00 %	100,00%
0.0.1.2.06	**ASN kelurahan dan Kecamatan Sukoharjo**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**		**917.347.000**	**16,60 %**	**152.262.350**	**26,02 %**	**238.670.900**	**20,40 %**	**187.135.200**	**29,21 %**	**267.914.700**	**92,22 %**	**845.983.150**	**91,49%**	**92,22 %**
0.0.1.2.06.1		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik yang disediakan	1517	Bh	56.758.000	172	6.447.350	507	18.996.500	380	14.240.600	344	12.907.700	1403	52.592.150	92,49%	92,66 %
0.0.1.2.06.2		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan yang disediakan	3	Bh	30.000.000	0	-	2	16.000.000	1	14.000.000	0	-	3	30.000.000	100,00 %	100,00%
0.0.1.2.06.3		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	2693	Bh	63.956.000	468	11.116.500	905	21.502.000	686	16.305.500	528	12.559.000	2587	61.483.000	96,06%	96,13 %
0.0.1.2.06.4		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	17903	Bh	615.492.000	3477	119.556.500	4324	148.656.000	2930	100.742.500	5794	199.205.500	16525	568.160.500	92,30%	92,31 %
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang yang dicetak dan digandakan	139610	Lbr	58.552.000	19004	7.963.000	36070	15.113.400	38916	16.306.600	42325	17.734.500	136315	57.117.500	97,64%	97,55 %
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang disediakan tiap bulan	477	Bh	39.900.000	85	6.979.000	140	11.573.000	110	9.127.000	125	10.163.000	460	37.842.000	96,44%	94,84 %
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti	394	Kali	52.689.000	6	200.000	79	6.830.000	58	16.413.000	115	15.345.000	258	38.788.000	65,48%	73,62 %
0.0.1.2.07	**BMD Kecamatan dan Kelurahan**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**		**343.827.000**	**3,76 %**	**9.751.000**	**61,60 %**	**211.794.000**	**3,20 %**	**11.000.000**	**30,60 %**	**105.200.000**	**100,00%**	**337.745.000**	**100,00 %**	**98,23 %**

0.0.1.2.07.5		Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan	74	Unit	89.067.000	0	-	40	71.067.000	0	-	34	17.968.000	74	89.035.000	100,00 %	99,96 %
0.0.1.2.07.6		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	33	Unit	119.863.000	7	9.201.000	16	93.592.000	1	3.000.000	9	14.070.000	33	119.863.000	100,00 %	100,00%
0.0.1.2.07.10		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	30	Unit	134.897.000	1	550.000	20	47.135.000	2	8.000.000	7	73.162.000	30	128.847.000	100,00 %	95,52 %
0.0.1.2.08	**ASN, Honorer dan THL Kec Sukoharjo**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**		**1.986.927.480**	**27,06 %**	**334.342.312**	**26,45 %**	**525.578.193**	**23,76 %**	**472.156.387**	**21,02 %**	**417.640.941**	**98,29 %**	**1.749.717.833**	**96,76%**	**88,06 %**
0.0.1.2.08.1		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan surat keluar yang dikelola	5100	Surat	96.912.000	587	11.166.500	1687	32.057.650	1365	25.940.400	1390	26.427.000	5029	95.591.550	98,61%	98,64 %
0.0.1.2.08.2		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening jasa sumber daya yang dibayar tiap bulan	58	Rekening	422.069.000	58	52.745.390	58	62.562.306	58	131.326.145	58	94.318.300	58	340.952.141	100,00 %	80,78 %
0.0.1.2.08.3		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disewa	1896	Unit	35.160.000	0	-	210	3.900.000	372	6.910.000	1095	20.310.000	1677	31.120.000	88,45%	88,51 %
0.0.1.2.08.4		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah SDM pelayanan umum yang disediakan	58	Org	1.432.786.480	58	270.430.422	58	427.058.237	58	307.979.842	57	276.585.641	58	1.282.054.142	100,00 %	89,48 %
0.0.1.2.09	**BMD Kecamatan dan Kelurahan**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**		**1.240.078.000**	**2,18 %**	**16.108.500**	**28,42 %**	**352.395.900**	**50,56 %**	**627.035.500**	**16,85 %**	**209.004.381**	**98,26 %**	**1.204.544.281**	**98,26%**	**97,13 %**
0.0.1.2.09.1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara/ difasilitasi	67	Unit	185.206.000	24	13.983.500	14	46.980.900	14	45.535.000	15	60.002.681	67	166.502.081	100,00 %	89,90 %
0.0.1.2.09.2		Penyediaan Jasa, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara/ difasilitasi	1	Unit	4.200.000	0	-	1	300.000	1	200.000	1	2.428.000	1	2.928.000	100,00 %	69,71 %
0.0.1.2.09.5		Pemeliharaan Mebel	Jumlah meubelair yang dipelihara	57	Unit	29.950.000	0	-	9	4.950.000	20	11.000.000	24	12.375.000	53	28.325.000	92,98%	94,57 %

0.0.1.2.09.6		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	174	Unit	94.050.000	2	1.125.000	63	34.406.000	44	23.542.500	59	31.899.000	168	90.972.500	96,55%	96,73 %
0.0.1.2.09.9		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	10	Unit	879.430.000	0	-	2	220.594.000	4	546.758.000	4	102.299.700	10	869.651.700	100,00 %	98,89 %
0.0.1.2.09.11		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarpras pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1	Unit	47.242.000	0	1.000.000	1	45.165.000	0	0	0	0	1	46.165.000	100,00 %	97,72 %
1.1	**Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat**		**Persentase Peningkatan Pelayanan Kecamatan**															
7.1.2	**Masyarakat Kecamatan Sukoharjo**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**100%**		**80.000.000**	**16,33 %**	**13.060.000**	**23,01 %**	**18.405.000**	**21,78 %**	**17.420.000**	**38,89 %**	**31.115.000**	**100,00%**	**80.000.000**	**100,00 %**	**100,00%**
7.1.2.2.01	**ASN Kelurahan dan Kecamatan**	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Cakupan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan**	**100%**		**40.000.000**	**8,33 %**	**5.545.000**	**20,09 %**	**8.035.000**	**10,84 %**	**4.335.000**	**55,21 %**	**22.085.000**	**100,00%**	**40.000.000**	**100,00 %**	**100,00%**
7.1.2.2.01.2		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah peserta koordinasi efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	360	Org	40.000.000	30	5.545.000	150	8.035.000	90	4.335.000	90	22.085.000	360	40.000.000	100,00 %	100,00%
7.1.2.2.02	**ASN di Kelurahan dan Masyarakat di wilayah Kecamatan Sukoharjo**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan**	**Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**100%**		**40.000.000**	**18,79 %**	**7.515.000**	**25,93 %**	**10.370.000**	**32,71 %**	**13.085.000**	**22,58 %**	**9.030.000**	**100,00%**	**40.000.000**	**100,00 %**	**100,00%**
7.1.2.2.02.2		Fasilitasi Percepatan Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah responden survei IKM	350	Org	20.000.000	0	7.515.000	0	3.635.000	175	6.350.000	175	2.500.000	350	20.000.000	100,00 %	100,00%
7.1.2.2.02.3		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Keapada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah peserta sosialisasi pelayanan kepada masyarakat	300	Org	20.000.000	0	-	100	6.735.000	100	6.735.000	100	6.530.000	300	20.000.000	100,00 %	100,00%

7.1.3		**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**100%**	**18.604.833.000**	**15,95 %**	**2.968.228.500**	**28,15 %**	**5.238.118.700**	**21,33 %**	**3.967.576.450**	**33,28 %**	**6.191.183.761**	**99,09 %**	**18.365.107.411**	**99,48%**	**98,71 %**
7.1.3.2.01	**Masyarakat Kecamatan Sukoharjo**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Cakupan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**100%**	**20.000.000**	**40,00 %**	**8.000.000**	**28,75 %**	**5.750.000**	**13,50 %**	**2.700.000**	**17,55 %**	**3.510.000**	**99,80 %**	**19.960.000**	**99,43%**	**99,80 %**
7.1.3.2.01.3		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah peserta koordinasi peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	350 Org	20.000.000	30	8.000.000	150	5.750.000	60	2.700.000	108	3.510.000	348	19.960.000	99,43%	99,80 %
7.1.3.2.02	**ASN di Kelurahan dan Masyarakat di wilayah Kecamatan Sukoharjo**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**100%**	**18.093.633.000**	**15,82 %**	**2.862.046.000**	**28,31 %**	**5.121.859.500**	**20,98 %**	**3.795.964.750**	**33,60 %**	**6.080.160.500**	**98,71 %**	**17.860.030.750**	**100,00 %**	**98,71 %**
7.1.3.2.02.1		Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah peserta musrenbang kecamatan dan kelurahan	1500 Org	96.000.000	1500	92.091.250	0	3.680.000	0	0	0	0	1500	95.771.250	100,00 %	99,76 %
7.1.3.2.02.2		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah titik lokasi sarana dan prasarana yang dibangun	173 Lokasi	11.504.343.000	32	2.065.592.000	55	3.367.880.000	37	2.734.772.000	49	3.186.099.000	173	11.354.343.000	100,00 %	98,70 %
7.1.3.2.02.3		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah peserta koordinasi pemberdayaan masyarakat di kelurahan	914 Org	6.468.290.000	914	692.437.750	914	1.747.264.500	914	1.055.797.750	914	2.889.446.500	914	6.384.946.500	100,00 %	98,71 %
7.1.3.2.02.4		Evaluasi Kelurahan	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan pengendalian keuangan kelurahan	12 Dok	25.000.000	3	11.925.000	3	3.035.000	3	5.395.000	3	4.615.000	12	24.970.000	100,00 %	99,88 %
7.1.3.2.03	**Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan di Tingkat Kecamatan**	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Cakupan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**100%**	**491.200.000**	**19,99 %**	**98.182.500**	**22,50 %**	**110.509.200**	**34,39 %**	**168.911.700**	**21,89 %**	**107.513.261**	**98,76 %**	**485.116.661**	**99,00%**	**98,76 %**
7.1.3.2.03.1		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan tingkat desa/kelurahan yang terbina	15 Lembaga	339.500.000	15	87.132.500	15	84.798.200	15	96.198.200	15	69.462.400	15	337.591.300	100,00 %	99,44 %

7.1.3.2.03.2		Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah peserta koordinasi antar organisasi kepemudaan di wilayah kecamatan/kelurahan	2574	Org	141.700.000	200	11.050.000	285	15.711.000	1321	72.713.500	691	38.050.861	2497	137.525.361	97,01%	97,05 %
7.1.3.2.03.4		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Peserta Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	75	Org	10.000.000	0	-	75	10.000.000	0	-	0	0	75	10.000.000	100,00 %	100,00%
7.1.4		**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Capaian Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**100%**		**116.750.000**	**3,91 %**	**4.568.000**	**24,56 %**	**28.679.000**	**44,34 %**	**51.763.114**	**26,27 %**	**30.665.000**	**99,67 %**	**115.675.114**	**99,67%**	**99,08 %**
7.1.4.2.01	**Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Stakeholder terkait**	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Cakupan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**100%**		**40.000.000**	**8,33 %**	**2.950.000**	**37,38 %**	**14.950.000**	**31,64 %**	**12.656.000**	**23,50 %**	**9.400.000**	**100,00%**	**39.956.000**	**100,00 %**	**99,89 %**
7.1.4.2.01.1		Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia Dan Instansi Vertikal di Wilayah Indonesia	Jumlah peserta rapat koordinasi lintas sektoral	360	Org	20.000.000	60	2.950.000	120	8.200.000	120	5.856.000	60	2.950.000	360	19.956.000	100,00 %	99,78 %
7.1.4.2.01.2		Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah peserta rapat koordinasi Paguyuban Kerukunan Umat Beragama (PKUB)	390	Org	20.000.000	0	-	150	6.750.000	120	6.800.000	120	6.450.000	390	20.000.000	100,00 %	100,00%
7.1.4.2.02	**Linmas dan KST**	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah**	**Cakupan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**100%**		**76.750.000**	**2,11 %**	**1.618.000**	**17,89 %**	**13.729.000**	**50,95 %**	**39.107.114**	**27,71 %**	**21.265.000**	**99,34 %**	**75.719.114**	**99,34%**	**98,66 %**
7.1.4.2.02.1		Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah Yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah peserta koordinasi linmas dan KST	1979	Org	76.750.000	0	1.618.000	263	13.729.000	1184	39.107.114	519	21.265.000	1966	75.719.114	99,34%	98,66 %

7.1.5		**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**100%**	**172.355.000**	**25%**	**45.540.000**	**24,85 %**	**42.825.000**	**25,37 %**	**43.725.000**	**22,88 %**	**39.440.000**	**100,00%**	**171.530.000**	**100,00 %**	**99,52 %**
7.1.5.2.01	**Forkopimcam Kecamatan**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasa Kepala Daerah**	**100%**	**172.355.000**	**25%**	**45.540.000**	**24,85 %**	**42.825.000**	**25,37 %**	**43.725.000**	**22,88 %**	**39.440.000**	**100,00%**	**171.530.000**	**100,00 %**	**99,52 %**
7.1.5.2.01.8		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah peserta forum koordinasi pimpinan di kecamatan yang difasilitasi	13 Org	172.355.000	13	45.540.000	13	42.825.000	13	43.725.000	13	39.440.000	13	171.530.000	100,00 %	99,52 %
7.1.6		**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**	**100%**	**149.370.000**	**0%**	**-**	**0,00 %**	**-**	**0,00 %**	**-**	**100**	**146.625.000**	**100,00%**	**146.625.000**	**100,00 %**	**98,16 %**
7.1.6.2.01	**Tanah Eks Bondo Desa Kelurahan**	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**100%**	**149.370.000**	**0**	**-**	**0,00 %**	**-**	**0,00 %**	**-**	**100,00%**	**146.625.000**	**100,00%**	**146.625.000**	**100,00 %**	**98,16 %**
7.1.6.2.01.3		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah bidang tanah kas desa yang dilelangkan	1031 Bidang	149.370.000	0	-		-	0	0	1031	146.625.000	1031	146.625.000	100,00 %	98,16 %
					36.174.386.480		**5.275.386.251**		**10.363.746.742**		**8.534.437.864**				**34.451.154.286**		

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Kecamatan Sukoharjo tahun 2022 pada Tabel 2.1 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Rata-rata capaian output 6 program 16 kegiatan 52 sub kegiatan Urusan Administrasi Pemerintahan Kecamatan Sukoharjo pada Tahun 2022 adalah sebesar 104,105 % dengan prosentase realisasi keuangan sebesar 95,24 %

a) Permasalahan dan Solusi

1. Capaian Realisasi Output

Berdasarkan tabel tersebut diatas, dari 52 sub kegiatan telah dapat mencapai target output 99,65 %, ini menunjukan ada efisiensi yang berasal dari penghematan belanja.

Untuk capaian output yang masih rendah, bisa kita lihat pada table dibawah ini :

NO	SUB KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA	PERMASALAHAN
1.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsutasi SKPD yang Diikuti	*Capaian output kegiatan 65,48%, dengan realisasi anggaran 73,62%. Hal ini disebabkan karena menyesuaikan kebutuhan dan pertimbangan waktu kegiatan perjalanan dinas keluar kota/ luar daerah*

2. Capaian Anggaran

Penyerapan Anggaran tahun 2022 adalah 95,24 %. Selain menunjukan adanya efisiensi, tingkat penyerapan anggaran tersebut disebabkan oleh permasalahan sebagai berikut:

NO	SUB KEGIATAN	PERMASALAHAN
1.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Realisasi anggaran 73,62 % hal ini di karenakan menyesuaikan kebutuhan dan pertimbangan waktu kegiatan perjalanan dinas keluar kota/ luar daerah
2.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Realisasi Anggaran sebesar 69,71% hal ini dikarenakan menyesuaikan biaya pajak kendaraan ambulance

3. Solusi

Atas permasalahan tersebut diatas, upaya perbaikan yang akan dilakukan pada tahun anggaran berikutnya adalah sebagai berikut :

- Kegiatan studi banding atau perjalanan dinas ke luar daerah sebaiknya dilaksanakan di awal tahun anggaran.
- Penghitungan lebih cermat untuk perencanaan yang akan datang dengan mengusulkan indeks standar satuan harga yang sesuai ke bidang aset BPKPAD Kabupaten Sukoharjo.

B. Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja palayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Kecamatan Sukoharjo dilakukan terhadap penilaian capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan.

IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah yang mengacu pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026. Secara rinci, capaian IKU Kecamatan Sukoharjo disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.2
INDIKATOR KINERJA UTAMA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KECAMATAN SUKOHARJO KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2021 – 2026

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	PENAGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2		3	4	5	6
1	Terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Survey terhadap resposden yang dilayani	Camat Sukoharjo	Dokumen Surevy Kepuasan Masyarakat
	1.1	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	Presentase peningkatan pelayanan kecamatan	=(20% dikalikan capaian program I + 20% dikalikan capaian program II + 20% dikalikan capaian program III + 20% dikalikan capaian program IV + 20% dikalikan capaian program V)	Camat Sukoharjo	Laporan Monev
	1.2	Meningkatnya kualitas Aparatur dan Pelayan Publik	Nilai SAKIP PD	NA	Camat Sukoharjo	- E-SAKIP

Tabel. 2.3
Pencapaian IKU Kecamatan Sukoharjo
Kabupaten Sukoharjo
Tahun 2021-2026

No	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah (Tujuan/Sasaran)	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke -						Realisasi Capaian Tahun ke-		Rasio Capaian pada Tahun ke-	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2021	2022
			%	%	%	%	%		%	%	%	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Terwujudnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Responsif dan Akuntabel	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87	87,5	88	88,5	89	89,5	85,103	87,546	97,82	100
1.1	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	Nilai SAKIP PD	60,50	60,60	60,70	60,80	70	70	65,73	NA	108,64	NA
1.2	Meningkatnya kualitas aparatur dan pelayanan publik	Presentase peningkatan pelayanan kecamatan	100	100	100	100	100	100	96,67	99,75	96,67	99,75

Capaian Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Sebagaimana Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat unit Penyelenggara Pelayanan Publik, Survei Kepuasan Masyarakat adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Kecamatan Sukoharjo sebagai salah satu perangkat daerah yang menyelenggarakan pelayanan publik sesuai dengan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat dilakukan pengukuran kinerja sesuai dengan Renstra Kecamatan Sukoharjo tahun 2021-2026 yaitu Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Capaian indator kinerja Nilai IKM Kecamatan Sukoharjo pada tahun 2022 sebesar 87,546%, capaian ini telah melampaui target yang ditetapkan sebesar 87,5 %. Ketercapaian kinerja ini sesuai dengan kebijakan perencanaan dan penganggaran program/ kegiatan guna mendukung kinerja dimaksud.

Capaian Nilai SAKIP

Mendasari Peraturan Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disebutkan bahwa Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingka SAKIP adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Kecamatan Sukoharjo sebagai salah satu perangkat daerah yang menyelenggarakan kinerja penyelenggaraan pemerintahan

dilakukan pengukuran kinerja sesuai dengan Renstra Kecamatan Sukoharjo Tahun 2021-2026 yaitu Nilai SAKIP.

Capaian indikator kinerja Nilai SAKIP Kecamatan Sukoharjo pada tahun 2022 masih belum dirilis oleh Tim Evaluasi SAKIP Kabupaten Sukoharjo sehingga capaian ini masih belum diketahui terhadap target yang telah ditetapkan sebesar 60,60.

Persentase Penyerapan Anggaran

Berdasarkan Peraturan Mentri Keuangan Nomor 249/PMK.02/2011, penyerapan anggaran adalah salah satu indikator dalam evaluasi kinerja atas aspek implementasi. Penyerapan anggaran merupakan salah satu indikator yang dapat menunjukkan keberhasilan program dan kebijakan yang dilakukan suatu pemerintahan.

Tidak hanya dari sisi dampak atas kinerja program/ kegiatan atau *outcome,* penyerapan anggaran berupa *output* merupakan salah satu kunci keberhasilan ketercapaian kinerja pemerintah daerah termasuk Kecamatan Sukoharjo sebagai salah satu Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi tersebut. Capaian indikator kinerja Persentase Peningkatan Pelayanan Kecamatan pada tahun 2022 sebesar 99,75%. Ketercapaian kinerja ini sesuai dengan kebijakan perencanaan dan penganggaran program/ kegiatan dengan capaian per program sebagai berikut :

- Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah.

  Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 17.051.078.480,- terealisasi Rp. 15.572.216.761,- dengan capaian kinerja 99,43 %.
- Tingkat kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

  Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan anggaran sebesar Rp. 80.000.000,- terealisasi Rp. 80.000.000 dengan capaian kinerja 100 %.

- Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
  Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan anggaran sebesar Rp. 18.604.833.000,- terealisasi Rp. 18.365.107.411 dengan capaian kinerja 99,48 %.
- Persentase capaian ketentraman dan ketertiban umum.
  Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan anggaran sebesar Rp. 116.750.000,- terealisasi Rp. 115.675.114,- dengan capaian kinerja 99,67 %.
- Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.
  Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan anggaran sebesar Rp. 172.355.000,- terealisasi Rp. 171.530.000,- dengan capaian kinerja 100 %.
- Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa.
  Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan anggaran sebesar Rp. 149.370.000,- terealisasi Rp. 146.625.000,- dengan capaian kinerja 100 %.

C. Isu-isu Penting Penyelenggaran Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, Kantor Kecamatan Sukoharjo sesuai dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 81 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja , Staf Ahli Bupati , Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat dan Kecamatan, maka kecamatan, mempunyai tugas-tugas dalam membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan dimaksud memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam menyelenggarakan urusan tersebut selama tahun 2022 Kecamatan Sukoharjo menghadapi beberapa permasalahan sebagai berikut :

Tabel 2.4
Identifikasi Permasalahan Kecamatan Sukoharjo

No	Permasalahan	Hambatan
1.	Belum optimalnya tingkat kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	- Belum optimalnya penyusunan dan penerapan SOP - Belum optimalnya sarana dan prasarana pelayanan publik sesuai standar - Belum optimalnya budaya kerja aparatur - Jumlah kapasitas dan kompetensi aparatur perlu ditingkatkan
2.	Belum optimalnya tingkat kinerja ketentraman dan ketertiban umum	- Kurangnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan perundangan - Kurangnya peran serta masyarakat untuk menjaga ketertiban dan ketentraman lingkungan - Kualitas anggota linmas yang belum memadai
3.	Belum optimalnya tingkat kinerja pemberdayaan masyarakat	- Peran dan fungsi kelembagaan masyarakat dalam pembangunan perlu dioptimalkan - Koordinasi lintas sektor perlu dioptimalkan
4.	Belum optimalnya tingkat kinerja pemerintahan umum	- Perlu peningkatan kesadaran masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Sukoharjo tahun 2024

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan, para aparatur kecamatan bekerjasama untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan bersama, yang pada prosesnya mempunyai peluang sekaligus tantangan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja. Tantangan dan peluang pengembangan OPD Kecamatan Sukoharjo, dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Tantangan

Tantangan yang dihadapi Kantor Kecamatan Sukoharjo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat diuraikan sebagai berikut:

a) Kualitas/profesionalisme aparatur pemerintahan, baik yang ada di Kantor Kecamatan maupun Perangkat kelurahan masih belum maksimal;
b) Adanya fenomena demokrasi yang mengarah kepada kebebasan dan aroganisi dalam berpendapat dan menyikapi kebijakan pemerintah;
c) Masyarakat Kecamatan Sukoharjo yang heterogen;
d) Semakin meningkatnya pengangguran utamanya usia produktif sebagai akibat dari tidak seimbangnya pertumbuhan penduduk angkatan kerja dengan kesempatan kerja;
e) Ada indikasi menurunnya partisipasi masyarakat dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
f) Semakin berkurangnya luas lahan pertanian yang dialihfungsikan menjadi pemukiman;
g) Semakin transparannya informasi melalui media elektronik aparatur dituntut harus lebih responsive terhadap dinamika pembangunan masyarakat.

2) Peluang

Peluang yang dihadapi Kantor Kecamatan Sukoharjo dalam menjalankan tugas dan fungsinya dapat diuraikan sebagai berikut :

a) Adanya kebijakan otonomi daerah, yang memberi keleluasaan penyerahan sebagian kewenangan urusan pemerintahan dan urusan umum lain dari Bupati kepada Camat;
b) Adanya kebijakan pengembangan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri No 4 Tahun 2010;
c) Adanya kebijakan penerapan disiplin PNS melalui Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS;
d) Potensi pengembangan industri dan perdagangan di Wilayah Kecamatan Sukoharjo;
e) Adanya aparatur dari OPD (Dinas/Badan) yang bertugas di Kecamatan;
f) Jumlah penduduk yang besar yang tersebar di 14 (empat belas) kelurahan;
g) Adanya dukungan dari lembaga lain (lembaga sosial dan keagamaan) dalam mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi serta pencapaian tujuan dalam pemberdayaan masyarakat;

Dari uraian diatas dapat dilihat perbandingan antara peluang dan tantangan adalah 7:7, dengan perbandingan tersebut jelas terlihat bahwa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan visi dan misi yang ingin dicapai diperlukan suatu usaha dan strategi yang tepat agar tantangan yang lebih besar tersebut dapat teratasi sehingga dapat menghasilkan kinerja yang lebih baik dari periode sebelumnya.

Dengan memperhatikan Permasalahan dan hambatan sertah Peluang dan Tantangan yang dihadapi selama tahun 2022, maka isu-isu penting berupa catatan dan rekomendasi

untuk ditindak lanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Kecamatan Sukoharjo tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Perlu penambahan kuantitas SDM aparatur sipil negara dan peningkatan kualitas SDM ASN Kecamatan Sukoharjo.
2. Adanya monitoring yang terjadwal secara rutin ke wilayah kelurahan se Kecamatan Sukoharjo
3. Peningkatan kualitas perencanaan.

Sedangkan isu-isu penting lainnya yang ada di Kecamatan Sukoharjo adalah sebagai berikut :

a. Bidang Sekretariat

1) Masih kurangnya sarana dan prasarana teknologi informasi di Kecamatan Sukoharjo, sehingga sebagai OPD yang membawahi 14 kelurahan dibutuhkan sarana dan prasarana teknologi informasi yang dapat membantu peningkatan kinerja
2) Kurangnya personil di bagian sekretariat kantor Kecamatan Sukoharjo, sehingga banyak tenaga yang merangkap tugas lain. Untuk meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat perlu adanya tambahan personil;
3) Kurangnya kesadaran pegawai untuk menegakkan budaya kerja ASN, sehingga kebanyakan pegawai cenderung berada di zona nyaman. Untuk meningkatkan kesadaran pegawai, perlu adanya pembinaan pegawai untuk menegakkan budaya kerja ASN sehingga tercipta birokrasi yang profesional.

b. Bidang Pemerintahan dan Pelayanan Publik

1) Belum optimalnya kinerja aparatur di bidang pemerintahan dan pelayanan publik
2) Masih ada sebagian jenis pelayanan administrasi kependudukan yang belum bisa dilayani ditingkat Kecamatan

3) Perlu peningkatan sinergitas antar unit kerja dalam pelayanan kepada warga masyarakat

c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1) Masih kurangnya kesadaran dan peran serta masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan wilayah
2) Perlu peningkatan kualitas sarana dan prasarana di kelurahan

d. Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum

1) Pemahaman warga masyarakat tentang peraturan perundangan belum optimal
2) Masih perlu peningkatan peran serta warga terhadap penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum belum optimal

e. Bidang Kesejahteraan Sosial

1) Belum terwujudnya sinkronisasi data sebagai dasar pengambilan kebijakan terkait dengan bantuan sosial.
2) Perlu peningkatan upaya strategis dalam rangka penanganan pandemi covid-19 terutama dari aspek ekonomi, kesehatan dan sosial

D. Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024

Review terhadap rancangan awal RKPD Kecamatan Sukoharjo tahun 2024 dilakukan dengan membandingkan antara rancangan awal RKPD Kabupaten Sukoharjo tahun 2024 dengan hasil analisa kebutuhan Kecamatan Sukoharjo tahun 2024. Rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan dalam mendukung pencapaian RJPMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026 yang berdasarkan pertimbangan atas kinerja pencapaian target Renstra dan target kinerja yang dicapai oleh Kecamatan Sukoharjo dengan arahan Kepala Daerah terkait dengan program prioritas kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan. Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan tersebut terdapat beberapa perbaikan dan penambahan pagu indikatif kegiatan dan sub kegiatan dari pagu

anggaran yang telah diusulkan sebelumnya. Hasil analisa terhadap rancangan awal kegiatan tersebut menjadi Renja yang siap untuk difinalisasikan dalam RKPD. Hasil review terhadap rancangan awal RKPD Kabupaten Sukoharjo tahun 2024 disampaikan pada tabel berikut : tabel (2.5)

Tabel 2.5

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2024

KECAMATAN SUKOHARJO KABUPATEN SUKOHARJO

Tujuan/ Sasaran/ Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	RENSTRA PD TAHUN 2024			Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2024			Lokasi
			Target Capaian		Pagu Indkatif	Target Capaian		Kebutuhan Dana	
			Target	Satuan		Target	Satuan		
UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN									
Terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,5	angka		88,5	angka		
Meningkatnya kualitas aparatur dan pelayanan publik		Nilai SAKIP Perangkat Derah	68	Nilai		68	Nilai		

07.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah**	100	%	**17.436.010.000**	100	%	**19.940.456.000**	Kecamatan Sukoharjo
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	%	115.000.000	100	%	52.430.000	
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	Dokumen	20.000.000	1	Dokumen	9.330.000	
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	15.000.000	1	Dokumen	8.150.000	
7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	15.000.000	1	Dokumen	8.150.000	
7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen	15.000.000	1	Dokumen	8.150.000	
7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen	15.000.000	1	Dokumen	8.150.000	

7.01.01.2.01.0006	Koordinas dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	Laporan	20.000.000	2	Laporan	6.000.000	
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Laporan	15.000.000	1	Laporan	4.500.000	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	%	12.313.510.000	100	%	14.567.902.000	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	130	Orang/Bulan	11.448.510.000	99	Orang/Bulan	13.410.952.000	
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	Dokumen	800.000.000	12	Dokumen	1.136.950.000	
	Kecamatan Sukoharjo		12	Dokumen				201.190.000	
	Kelurahan Kenep		12	Dokumen				66.840.000	
	Kelurahan Banmati		12	Dokumen				66.840.000	
	Kelurahan Mandan		12	Dokumen				66.840.000	
	Kelurahan Begajah		12	Dokumen				66.840.000	
	Kelurahan Gayam		12	Dokumen				66.840.000	
	Kelurahan Joho		12	Dokumen				66.840.000	
	Kelurahan Jetis		12	Dokumen				66.840.000	

	Kelurahan Combongan		12	Dokumen				66.840.000	
	Kelurahan Kriwen		12	Dokumen				66.840.000	
	Kelurahan Bulakan		12	Dokumen				66.840.000	
	Kelurahan Dukuh		12	Dokumen				66.840.000	
	Kelurahan Sukoharjo		12	Dokumen				66.840.000	
	Kelurahan Bulakrejo		12	Dokumen				66.840.000	
	Kelurahan Sonorejo		12	Dokumen				66.840.000	
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	25.000.000	1	Laporan	5.000.000	
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	20	Laporan	20.000.000	20	Laporan	10.000.000	
7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12	Dokumen	20.000.000	12	Dokumen	5.000.000	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	%	385.000.000	100	%	193.000.000	

7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	180	Paket	150.000.000	0	Paket	0	
7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	130	Dokumen	15.000.000	99	Dokumen	20.000.000	
7.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi dan Penialaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	130	Dokumen	15.000.000	99	Dokumen	10.000.000	
7.01.01.2.05.0009	Pendidikaan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	180	Orang	130.000.000	160	Orang	153.000.000	
7.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100	Orang	55.000.000	100	Orang	10.000.000	
7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50	Orang	20.000.000	0	Orang	0	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah			991.900.000			1.283.645.000	

7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	15	Paket	60.400.000	15	Paket	108.623.000	
	Kecamatan Sukoharjo		1	Paket	11.400.000	1	Paket	21.988.000	
	Kelurahan Kenep		1	Paket	3.500.000	1	Paket	7.000.000	
	Kelurahan Banmati		1	Paket	3.500.000	1	Paket	5.000.000	
	Kelurahan Mandan		1	Paket	3.500.000	1	Paket	5.000.000	
	Kelurahan Begajah		1	Paket	3.500.000	1	Paket	7.000.000	
	Kelurahan Gayam		1	Paket	3.500.000	1	Paket	5.761.000	
	Kelurahan Joho		1	Paket	3.500.000	1	Paket	5.000.000	
	Kelurahan Jetis		1	Paket	3.500.000	1	Paket	6.995.000	
	Kelurahan Combongan		1	Paket	3.500.000	1	Paket	7.000.000	
	Kelurahan Kriwen		1	Paket	3.500.000	1	Paket	7.000.000	
	Kelurahan Bulakan		1	Paket	3.500.000	1	Paket	4.200.000	
	Kelurahan Dukuh		1	Paket	3.500.000	1	Paket	9.845.000	
	Kelurahan Sukoharjo		1	Paket	3.500.000	1	Paket	2.844.000	
	Kelurahan Bulakrejo		1	Paket	3.500.000	1	Paket	7.000.000	
	Kelurahan Sonorejo		1	Paket	3.500.000	1	Paket	6.990.000	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15	Paket	30.000.000	0		0	
	Kecamatan Sukoharjo		1	Paket	9.000.000				

	Kelurahan Kenep		1	Paket	1.500.000				
	Kelurahan Banmati		1	Paket	1.500.000				
	Kelurahan Mandan		1	Paket	1.500.000				
	Kelurahan Begajah		1	Paket	1.500.000				
	Kelurahan Gayam		1	Paket	1.500.000				
	Kelurahan Joho		1	Paket	1.500.000				
	Kelurahan Jetis		1	Paket	1.500.000				
	Kelurahan Combongan		1	Paket	1.500.000				
	Kelurahan Kriwen		1	Paket	1.500.000				
	Kelurahan Bulakan		1	Paket	1.500.000				
	Kelurahan Dukuh		1	Paket	1.500.000				
	Kelurahan Sukoharjo		1	Paket	1.500.000				
	Kelurahan Bulakrejo		1	Paket	1.500.000				
	Kelurahan Sonorejo		1	Paket	1.500.000				
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	15	Paket	80.000.000	15	Paket	122.852.000	
	Kecamatan Sukoharjo		1	Paket	38.000.000	1	Paket	30.000.000	
	Kelurahan Kenep		1	Paket	3.000.000	1	Paket	10.000.000	
	Kelurahan Banmati		1	Paket	3.000.000	1	Paket	5.000.000	
	Kelurahan Mandan		1	Paket	3.000.000	1	Paket	5.000.000	
	Kelurahan Begajah		1	Paket	3.000.000	1	Paket	10.000.000	
	Kelurahan Gayam		1	Paket	3.000.000	1	Paket	7.852.000	

	Kelurahan Joho		1	Paket	3.000.000	1	Paket	5.000.000	
	Kelurahan Jetis		1	Paket	3.000.000	1	Paket	5.000.000	
	Kelurahan Combongan		1	Paket	3.000.000	1	Paket	5.000.000	
	Kelurahan Kriwen		1	Paket	3.000.000	1	Paket	10.000.000	
	Kelurahan Bulakan		1	Paket	3.000.000	1	Paket	5.000.000	
	Kelurahan Dukuh		1	Paket	3.000.000	1	Paket	5.000.000	
	Kelurahan Sukoharjo		1	Paket	3.000.000	1	Paket	3.000.000	
	Kelurahan Bulakrejo		1	Paket	3.000.000	1	Paket	7.000.000	
	Kelurahan Sonorejo		1	Paket	3.000.000	1	Paket	10.000.000	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	60	Paket	650.000.000	60	Paket	848.658.000	
	Kecamatan Sukoharjo		4	Paket	230.000.000	4	Paket	391.750.000	
	Kelurahan Kenep		4	Paket	30.000.000	4	Paket	34.486.000	
	Kelurahan Banmati		4	Paket	30.000.000	4	Paket	27.811.000	
	Kelurahan Mandan		4	Paket	30.000.000	4	Paket	49.910.000	
	Kelurahan Begajah		4	Paket	30.000.000	4	Paket	34.700.000	
	Kelurahan Gayam		4	Paket	30.000.000	4	Paket	38.500.000	
	Kelurahan Joho		4	Paket	30.000.000	4	Paket	30.800.000	
	Kelurahan Jetis		4	Paket	30.000.000	4	Paket	33.364.000	
	Kelurahan Combongan		4	Paket	30.000.000	4	Paket	37.485.000	
	Kelurahan Kriwen		4	Paket	30.000.000	4	Paket	26.500.000	
	Kelurahan Bulakan		4	Paket	30.000.000	4	Paket	30.000.000	

	Kelurahan Dukuh		4	Paket	30.000.000	4	Paket	35.130.000	
	Kelurahan Sukoharjo		4	Paket	30.000.000	4	Paket	37.290.000	
	Kelurahan Bulakrejo		4	Paket	30.000.000	4	Paket	21.820.000	
	Kelurahan Sonorejo		4	Paket	30.000.000	4	Paket	19.112.000	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	15	Paket	62.500.000	15	Paket	96.192.000	
	Kecamatan Sukoharjo		1	Paket	20.000.000	1	Paket	29.866.000	
	Kelurahan Kenep		1	Paket	3.000.000	1	Paket	5.000.000	
	Kelurahan Banmati		1	Paket	3.000.000	1	Paket	8.000.000	
	Kelurahan Mandan		1	Paket	3.000.000	1	Paket	5.230.000	
	Kelurahan Begajah		1	Paket	3.000.000	1	Paket	5.000.000	
	Kelurahan Gayam		1	Paket	3.000.000	1	Paket	3.000.000	
	Kelurahan Joho		1	Paket	3.000.000	1	Paket	2.006.000	
	Kelurahan Jetis		1	Paket	3.000.000	1	Paket	5.005.000	
	Kelurahan Combongan		1	Paket	3.000.000	1	Paket	5.000.000	
	Kelurahan Kriwen		1	Paket	3.000.000	1	Paket	10.000.000	
	Kelurahan Bulakan		1	Paket	3.500.000	1	Paket	1.000.000	
	Kelurahan Dukuh		1	Paket	3.000.000	1	Paket	4.075.000	
	Kelurahan Sukoharjo		1	Paket	3.000.000	1	Paket	5.000.000	
	Kelurahan Bulakrejo		1	Paket	3.000.000	1	Paket	5.000.000	
	Kelurahan Sonorejo		1	Paket	3.000.000	1	Paket	3.010.000	

7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	372	Dokumen	50.000.000	180	Dokumen	30.320.000	
	Kecamatan Sukoharjo		36	Dokumen	11.500.000	24	Dokumen	4.200.000	
	Kelurahan Kenep		24	Dokumen	2.750.000	0	Dokumen	0	
	Kelurahan Banmati		24	Dokumen	2.750.000	12	Dokumen	1.800.000	
	Kelurahan Mandan		24	Dokumen	2.750.000	12	Dokumen	1.800.000	
	Kelurahan Begajah		24	Dokumen	2.750.000	12	Dokumen	1.800.000	
	Kelurahan Gayam		24	Dokumen	2.750.000	12	Dokumen	1.800.000	
	Kelurahan Joho		24	Dokumen	2.750.000	12	Dokumen	2.000.000	
	Kelurahan Jetis		24	Dokumen	2.750.000	12	Dokumen	2.280.000	
	Kelurahan Combongan		24	Dokumen	2.750.000	12	Dokumen	3.360.000	
	Kelurahan Kriwen		24	Dokumen	2.750.000	12	Dokumen	1.800.000	
	Kelurahan Bulakan		24	Dokumen	2.750.000	12	Dokumen	1.560.000	
	Kelurahan Dukuh		24	Dokumen	2.750.000	12	Dokumen	2.880.000	
	Kelurahan Sukoharjo		24	Dokumen	2.750.000	12	Dokumen	1.800.000	
	Kelurahan Bulakrejo		24	Dokumen	2.750.000	12	Dokumen	1.440.000	
	Kelurahan Sonorejo		24	Dokumen	2.750.000	12	Dokumen	1.800.000	
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	155	Laporan	8.000.000			0	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120	Laporan	51.000.000	120	Laporan	77.000.000	

	Kecamatan Sukoharjo		50	Laporan	30.000.000	50	Laporan	50.000.000	
	Kelurahan Kenep		5	Laporan	1.500.000	5	Laporan	1.000.000	
	Kelurahan Banmati		5	Laporan	1.500.000	5	Laporan	1.500.000	
	Kelurahan Mandan		5	Laporan	1.500.000	5	Laporan	1.500.000	
	Kelurahan Begajah		5	Laporan	1.500.000	5	Laporan	3.000.000	
	Kelurahan Gayam		5	Laporan	1.500.000	5	Laporan	1.500.000	
	Kelurahan Joho		5	Laporan	1.500.000	5	Laporan	1.500.000	
	Kelurahan Jetis		5	Laporan	1.500.000	5	Laporan	3.000.000	
	Kelurahan Combongan		5	Laporan	1.500.000	5	Laporan	3.000.000	
	Kelurahan Kriwen		5	Laporan	1.500.000	5	Laporan	1.000.000	
	Kelurahan Bulakan		5	Laporan	1.500.000	5	Laporan	3.000.000	
	Kelurahan Dukuh		5	Laporan	1.500.000	5	Laporan	2.000.000	
	Kelurahan Sukoharjo		5	Laporan	1.500.000	5	Laporan	1.500.000	
	Kelurahan Bulakrejo		5	Laporan	1.500.000	5	Laporan	2.000.000	
	Kelurahan Sonorejo		5	Laporan	1.500.000	5	Laporan	1.500.000	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan pengadan barang milik daerah urusan penunjang pemerintah daerah	100	%	920.000.000	100	%	188.373.000	
7.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0	Unit	300000000	0	Unit	-	
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	60	Unit	80.000.000	106	Unit	53.770.000	

	Kecamatan Sukoharjo		4	Unit	10.000.000	19	Unit	8.500.000	
	Kelurahan Kenep		4	Unit	5.000.000	0	Unit	0	
	Kelurahan Banmati		4	Unit	5.000.000	1	Unit	3.000.000	
	Kelurahan Mandan		4	Unit	5.000.000	1	Unit	1.950.000	
	Kelurahan Begajah		4	Unit	5.000.000	0	Unit	0	
	Kelurahan Gayam		4	Unit	5.000.000	0	Unit	0	
	Kelurahan Joho		4	Unit	5.000.000	1	Unit	7.550.000	
	Kelurahan Jetis		4	Unit	5.000.000	10	Unit	7.000.000	
	Kelurahan Combongan		4	Unit	5.000.000	0	Unit	0	
	Kelurahan Kriwen		4	Unit	5.000.000	32	Unit	0	
	Kelurahan Bulakan		4	Unit	5.000.000	0	Unit	0	
	Kelurahan Dukuh		4	Unit	5.000.000	0	Unit	8.250.000	
	Kelurahan Sukoharjo		4	Unit	5.000.000	0	Unit	0	
	Kelurahan Bulakrejo		4	Unit	5.000.000	42	Unit	17.520.000	
	Kelurahan Sonorejo		4	Unit	5.000.000	0	Unit	0	
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	75	Unit	95.000.000	15	Unit	121.090.000	
	Kecamatan Sukoharjo		5	Unit	25.000.000	1	Unit	10.000.000	
	Kelurahan Kenep		5	Unit	5.000.000	1	Unit	10.000.000	
	Kelurahan Banmati		5	Unit	5.000.000	1	Unit	9.500.000	
	Kelurahan Mandan		5	Unit	5.000.000	1	Unit	19.000.000	
	Kelurahan Begajah		5	Unit	5.000.000	1	Unit		

								19.000.000	
	Kelurahan Gayam		5	Unit	5.000.000	1	Unit	-	
	Kelurahan Joho		5	Unit	5.000.000	1	Unit	18.590.000	
	Kelurahan Jetis		5	Unit	5.000.000	1	Unit	-	
	Kelurahan Combongan		5	Unit	5.000.000	1	Unit	10.000.000	
	Kelurahan Kriwen		5	Unit	5.000.000	1	Unit	11.000.000	
	Kelurahan Bulakan		5	Unit	5.000.000	1	Unit	-	
	Kelurahan Dukuh		5	Unit	5.000.000	1	Unit	-	
	Kelurahan Sukoharjo		5	Unit	5.000.000	1	Unit	-	
	Kelurahan Bulakrejo		5	Unit	5.000.000	1	Unit	-	
	Kelurahan Sonorejo		5	Unit	5.000.000	1	Unit	14.000.000	
7.01.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	75	Unit	15.000.000	0	Unit	0	
	Kelurahan Dukuh		25	Unit	5.000.000	0	Unit	0	
	Keluran Bulakrejo		25	Unit	5.000.000	0	Unit	0	
	Kelurahan Combongan		25	Unit	5.000.000	0	Unit	0	
7.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	Unit	350.000.000	0	Unit	0	
	Kecamatan Sukoharjo								
	Kelurahan Kenep								
	Kelurahan Banmati								
	Kelurahan Mandan								

	Kelurahan Begajah								
	Kelurahan Gayam		1	Unit	100.000.000				
	Kelurahan Joho								
	Kelurahan Jetis								
	Kelurahan Combongan								
	Kelurahan Kriwen								
	Kelurahan Bulakan								
	Kelurahan Dukuh		1	Unit	250.000.000				
	Kelurahan Sukoharjo								
	Kelurahan Bulakrejo								
	Kelurahan Sonorejo								
7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	15	Unit	80.000.000	0	Unit	13.513.000	
	Kecamatan Sukoharjo		1	Unit	10.000.000	0	Unit	-	
	Kelurahan Kenep		1	Unit	5.000.000	0	Unit	-	
	Kelurahan Banmati		1	Unit	5.000.000	0	Unit	3.500.000	
	Kelurahan Mandan		1	Unit	5.000.000	0	Unit	-	
	Kelurahan Begajah		1	Unit	5.000.000	0	Unit	-	
	Kelurahan Gayam		1	Unit	5.000.000	0	Unit	-	
	Kelurahan Joho		1	Unit	5.000.000	0	Unit	7.013.000	
	Kelurahan Jetis		1	Unit	5.000.000	0	Unit	-	
	Kelurahan Combongan		1	Unit	5.000.000	0	Unit	3.000.000	

	Kelurahan Kriwen		1	Unit	5.000.000	0	Unit	-	
	Kelurahan Bulakan		1	Unit	5.000.000	0	Unit	-	
	Kelurahan Dukuh		1	Unit	5.000.000	0	Unit	-	
	Kelurahan Sukoharjo		1	Unit	5.000.000	0	Unit	-	
	Kelurahan Bulakrejo		1	Unit	5.000.000	0	Unit	-	
	Kelurahan Sonorejo		1	Unit	5.000.000	0	Unit	-	
7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	Unit	0	0	Unit	0	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	%	1.814.000.000	100	%	1.954.566.000	
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5100	Laporan	110.000.000	180	Laporan	142.005.000	
	Kecamatan Sukoharjo		1600	Laporan	33.000.000	12	Laporan	30.000.000	
	Kelurahan Kenep		250	Laporan	5.500.000	12	Laporan	10.000.000	
	Kelurahan Banmati		250	Laporan	5.500.000	12	Laporan	10.000.000	
	Kelurahan Mandan		250	Laporan	5.500.000	12	Laporan	10.000.000	
	Kelurahan Begajah		250	Laporan	5.500.000	12	Laporan	10.000.000	
	Kelurahan Gayam		250	Laporan	5.500.000	12	Laporan	4.002.000	
	Kelurahan Joho		250	Laporan	5.500.000	12	Laporan	4.800.000	
	Kelurahan Jetis		250	Laporan	5.500.000	12	Laporan	10.000.000	

	Kelurahan Combongan		250	Laporan	5.500.000	12	Laporan	10.000.000	
	Kelurahan Kriwen		250	Laporan	5.500.000	12	Laporan	10.000.000	
	Kelurahan Bulakan		250	Laporan	5.500.000	12	Laporan	5.000.000	
	Kelurahan Dukuh		250	Laporan	5.500.000	12	Laporan	8.000.000	
	Kelurahan Sukoharjo		250	Laporan	5.500.000	12	Laporan	5.000.000	
	Kelurahan Bulakrejo		250	Laporan	5.500.000	12	Laporan	7.000.000	
	Kelurahan Sonorejo		250	Laporan	5.500.000	12	Laporan	8.203.000	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	Laporan	415.000.000	180	Laporan	422.960.000	
	Kecamatan Sukoharjo		4	Laporan	75.500.000	12	Laporan	70.500.000	
	Kelurahan Kenep		4	Laporan	24.250.000	12	Laporan	33.000.000	
	Kelurahan Banmati		4	Laporan	24.250.000	12	Laporan	24.000.000	
	Kelurahan Mandan		4	Laporan	24.250.000	12	Laporan	24.000.000	
	Kelurahan Begajah		4	Laporan	24.250.000	12	Laporan	22.300.000	
	Kelurahan Gayam		4	Laporan	24.250.000	12	Laporan	28.000.000	
	Kelurahan Joho		4	Laporan	24.250.000	12	Laporan	31.700.000	
	Kelurahan Jetis		4	Laporan	24.250.000	12	Laporan	23.760.000	
	Kelurahan Combongan		4	Laporan	24.250.000	12	Laporan	23.900.000	
	Kelurahan Kriwen		4	Laporan	24.250.000	12	Laporan	18.300.000	
	Kelurahan Bulakan		4	Laporan	24.250.000	12	Laporan	20.950.000	
	Kelurahan Dukuh		4	Laporan	24.250.000	12	Laporan	24.000.000	
	Kelurahan Sukoharjo		4	Laporan	24.250.000	12	Laporan	33.150.000	

	Kelurahan Bulakrejo		4	Laporan	24.250.000	12	Laporan	24.000.000	
	Kelurahan Sonorejo		4	Laporan	24.250.000	12	Laporan	21.400.000	
7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	60	Laporan	43.000.000	1	Laporan	5.000.000	
	Kecamatan Sukoharjo		4	Laporan	15.000.000	1	Laporan	5.000.000	
	Kelurahan Kenep		4	Laporan	2.000.000	0	Laporan	0	
	Kelurahan Banmati		4	Laporan	2.000.000	0	Laporan	0	
	Kelurahan Mandan		4	Laporan	2.000.000	0	Laporan	0	
	Kelurahan Begajah		4	Laporan	2.000.000	0	Laporan	0	
	Kelurahan Gayam		4	Laporan	2.000.000	0	Laporan	0	
	Kelurahan Joho		4	Laporan	2.000.000	0	Laporan	0	
	Kelurahan Jetis		4	Laporan	2.000.000	0	Laporan	0	
	Kelurahan Combongan		4	Laporan	2.000.000	0	Laporan	0	
	Kelurahan Kriwen		4	Laporan	2.000.000	0	Laporan	0	
	Kelurahan Bulakan		4	Laporan	2.000.000	0	Laporan	0	
	Kelurahan Dukuh		4	Laporan	2.000.000	0	Laporan	0	
	Kelurahan Sukoharjo		4	Laporan	2.000.000	0	Laporan	0	
	Kelurahan Bulakrejo		4	Laporan	2.000.000	0	Laporan	0	
	Kelurahan Sonorejo		4	Laporan	2.000.000	0	Laporan	0	

7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	180	Laporan	1.246.000.000	180	Laporan	1.384.601.000	
	Kecamatan Sukoharjo		12	Laporan	204.000.000	12	Laporan	176.500.000	
	Kelurahan Kenep		12	Laporan	85.000.000	12	Laporan	72.600.000	
	Kelurahan Banmati		12	Laporan	70.000.000	12	Laporan	54.100.000	
	Kelurahan Mandan		12	Laporan	82.000.000	12	Laporan	122.550.000	
	Kelurahan Begajah		12	Laporan	71.000.000	12	Laporan	54.130.000	
	Kelurahan Gayam		12	Laporan	89.000.000	12	Laporan	78.065.000	
	Kelurahan Joho		12	Laporan	85.000.000	12	Laporan	80.595.000	
	Kelurahan Jetis		12	Laporan	65.000.000	12	Laporan	104.856.000	
	Kelurahan Combongan		12	Laporan	60.000.000	12	Laporan	74.200.000	
	Kelurahan Kriwen		12	Laporan	85.000.000	12	Laporan	95.620.000	
	Kelurahan Bulakan		12	Laporan	75.000.000	12	Laporan	121.320.000	
	Kelurahan Dukuh		12	Laporan	70.000.000	12	Laporan	84.945.000	
	Kelurahan Sukoharjo		12	Laporan	50.000.000	12	Laporan	52.810.000	
	Kelurahan Bulakrejo		12	Laporan	70.000.000	12	Laporan	95.460.000	
	Kelurahan Sonorejo		12	Laporan	85.000.000	12	Laporan	116.850.000	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100	%	896.600.000	100	%	1.700.540.000	

7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	67	Unit	199.600.000	67	Unit	253.550.000	
	Kecamatan Sukoharjo		11	Unit	75.000.000	11	Unit	80.000.000	
	Kelurahan Kenep		4	Unit	8.900.000	4	Unit	13.000.000	
	Kelurahan Banmati		4	Unit	8.900.000	4	Unit	18.500.000	
	Kelurahan Mandan		4	Unit	8.900.000	4	Unit	18.500.000	
	Kelurahan Begajah		4	Unit	8.900.000	4	Unit	8.610.000	
	Kelurahan Gayam		4	Unit	8.900.000	4	Unit	9.900.000	
	Kelurahan Joho		4	Unit	8.900.000	4	Unit	6.895.000	
	Kelurahan Jetis		4	Unit	8.900.000	4	Unit	16.800.000	
	Kelurahan Combongan		4	Unit	8.900.000	4	Unit	12.850.000	
	Kelurahan Kriwen		4	Unit	8.900.000	4	Unit	13.000.000	
	Kelurahan Bulakan		4	Unit	8.900.000	4	Unit	8.000.000	
	Kelurahan Dukuh		4	Unit	8.900.000	4	Unit	10.375.000	
	Kelurahan Sukoharjo		4	Unit	8.900.000	4	Unit	8.500.000	
	Kelurahan Bulakrejo		4	Unit	8.900.000	4	Unit	8.620.000	
	Kelurahan Sonorejo		4	Unit	8.900.000	4	Unit	20.000.000	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan ,Pajak , dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1	Unit	10.000.000	1	Unit	4.000.000	

7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	20	Unit	50.000.000	20	Unit	10.500.000	
	Kecamatan Sukoharjo		7	Unit	14.000.000	16	Unit	7.500.000	
	Kelurahan Kenep		3	Unit	6.000.000	-	Unit	0	
	Kelurahan Banmati		3	Unit	6.000.000	51	Unit	0	
	Kelurahan Mandan		0	Unit	0	3	Unit	0	
	Kelurahan Begajah		0	Unit	0	1	Unit	0	
	Kelurahan Gayam		0	Unit	0	0	Unit	0	
	Kelurahan Joho		0	Unit	0	0	Unit	0	
	Kelurahan Jetis		0	Unit	0	0	Unit	0	
	Kelurahan Combongan		0	Unit	0	0	Unit	0	
	Kelurahan Kriwen		3	Unit	0	0	Unit	0	
	Kelurahan Bulakan		3	Unit	0	0	Unit	0	
	Kelurahan Dukuh		3	Unit	6.000.000	0	Unit	0	
	Kelurahan Sukoharjo		3	Unit	6.000.000	0	Unit	3.000.000	
	Kelurahan Bulakrejo		3	Unit	6.000.000	0	Unit	0	
	Kelurahan Sonorejo		3	Unit	6.000.000	0	Unit	0	
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25	Unit	82.000.000	25	Unit	82.490.000	
	Kecamatan Sukoharjo		11	Unit	20.000.000	40	Unit	20.500.000	
	Kelurahan Kenep		1	Unit	4.000.000	32	Unit	4.975.000	
	Kelurahan Banmati		1	Unit	4.000.000	5	Unit	4.000.000	

	Kelurahan Mandan		1	Unit	4.500.000	5	Unit	4.000.000	
	Kelurahan Begajah		1	Unit	4.500.000	8	Unit	3.470.000	
	Kelurahan Gayam		1	Unit	4.500.000	6	Unit	4.610.000	
	Kelurahan Joho		1	Unit	4.500.000	4	Unit	4.500.000	
	Kelurahan Jetis		1	Unit	4.500.000	6	Unit	5.500.000	
	Kelurahan Combongan		1	Unit	4.500.000	6	Unit	5.000.000	
	Kelurahan Kriwen		1	Unit	4.500.000	7	Unit	4.975.000	
	Kelurahan Bulakan		1	Unit	4.500.000	6	Unit	4.640.000	
	Kelurahan Dukuh		1	Unit	4.500.000	4	Unit	5.300.000	
	Kelurahan Sukoharjo		1	Unit	4.500.000	6	Unit	3.910.000	
	Kelurahan Bulakrejo		1	Unit	4.500.000	6	Unit	3.610.000	
	Kelurahan Sonorejo		1	Unit	4.500.000	7	Unit	3.500.000	
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15	Unit	485.000.000	10	Unit	1.150.000.000	
	Kecamatan Sukoharjo		1	Unit	65.000.000	1	Unit	200.000.000	
	Kelurahan Kenep		1	Unit	30.000.000	1	Unit	0	
	Kelurahan Banmati		1	Unit	30.000.000	0	Unit	100.000.000	
	Kelurahan Mandan		1	Unit	30.000.000	1	Unit	150.000.000	
	Kelurahan Begajah		1	Unit	30.000.000	1	Unit	200.000.000	
	Kelurahan Gayam		1	Unit	30.000.000	0	Unit	100.000.000	
	Kelurahan Joho		1	Unit	30.000.000	0	Unit	75.000.000	
	Kelurahan Jetis		1	Unit	30.000.000	1	Unit	0	

	Kelurahan Combongan		1	Unit	30.000.000	1	Unit	0	
	Kelurahan Kriwen		1	Unit	30.000.000	1	Unit	0	
	Kelurahan Bulakan		1	Unit	30.000.000	1	Unit	100.000.000	
	Kelurahan Dukuh		1	Unit	30.000.000	0	Unit	50.000.000	
	Kelurahan Sukoharjo		1	Unit	30.000.000	1	Unit	75.000.000	
	Kelurahan Bulakrejo		1	Unit	30.000.000	1	Unit	0	
	Kelurahan Sonorejo		1	Unit	30.000.000	0	Unit	100.000.000	
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15	Unit	70.000.000	1	Unit	200.000.000	
	Kecamatan Sukoharjo		1	Unit	7.000.000,00	1	Unit	200.000.000	
	Kelurahan Kenep		1	Unit	4.500.000	0	Unit	-	
	Kelurahan Banmati		1	Unit	4.500.000	0	Unit	-	
	Kelurahan Mandan		1	Unit	4.500.000	0	Unit	-	
	Kelurahan Begajah		1	Unit	4.500.000	0	Unit	-	
	Kelurahan Gayam		1	Unit	4.500.000	0	Unit	-	
	Kelurahan Joho		1	Unit	4.500.000	0	Unit	-	
	Kelurahan Jetis		1	Unit	4.500.000	0	Unit	-	
	Kelurahan Combongan		1	Unit	4.500.000	0	Unit	-	
	Kelurahan Kriwen		1	Unit	4.500.000	0	Unit	-	
	Kelurahan Bulakan		1	Unit	4.500.000	0	Unit	-	
	Kelurahan Dukuh		1	Unit	4.500.000	0	Unit	-	

	Kelurahan Sukoharjo		1	Unit	4.500.000	0	Unit	-	
	Kelurahan Bulakrejo		1	Unit	4.500.000	0	Unit	-	
	Kelurahan Sonorejo		1	Unit	4.500.000	0	Unit	-	
7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15	Unit	0	0	Unit	0	
	Kecamatan Sukoharjo		0	Unit	0	0	Unit	0	
	Kelurahan Kenep		0	Unit	0	0	Unit	0	
	Kelurahan Banmati		0	Unit	0	0	Unit	0	
	Kelurahan Mandan		0	Unit	0	0	Unit	0	
	Kelurahan Begajah		0	Unit	0	0	Unit	0	
	Kelurahan Gayam		0	Unit	0	0	Unit	0	
	Kelurahan Joho		0	Unit	0	0	Unit	0	
	Kelurahan Jetis		0	Unit	0	0	Unit	0	
	Kelurahan Combongan		0	Unit	0	0	Unit	0	
	Kelurahan Kriwen		0	Unit	0	0	Unit	0	
	Kelurahan Bulakan		0	Unit	0	0	Unit	0	
	Kelurahan Dukuh		0	Unit	0	0	Unit	0	
	Kelurahan Sukoharjo		0	Unit	0	0	Unit	0	
	Kelurahan Bulakrejo		0	Unit	0	0	Unit	0	
	Kelurahan Sonorejo		0	Unit	0	0	Unit	0	

Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat		Persentase Peningkatan Pelayanan Kecamatan	100	%		100	%		
07.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Tingkat kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik Kecamatan Sukoharjo**			**192.800.000**			**75.000.000**	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Cakupan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	100	%	62.800.000	100	%	35.000.000	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	80	Laporan	30.000.000	0	Laporan	0	
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	180	Dokumen	32.800.000	16	Dokumen	35.000.000	
7.01.02.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	100	%	90.000.000	100	%	40.000.000	

7.01.02.2.02.0001	Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	60		30.000.000	0		0	
7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	200		30.000.000	1	Laporan	20.000.000	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat d Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	280		30.000.000	4	Laporan	20.000.000	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan kepada Camat	Cakupan Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan camat	100	%	40.000.000	100	%	0	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang teekait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	100	Laporan	40.000.000	0	Laporan	0	
07.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	100	%	**10.411.780.000**	100	%	**14.359.080.000**	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Desa	100	%	25.000.000	100	%	25.000.000	

7.01.03.2.01.0003	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	180	Laporan	25.000.000	1	Laporan	25.000.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100	%	9.483.560.000	100	%	13.626.080.000	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	117	Lembaga Kemasyarakatan	101.000.000	75	Lembaga Kemasyarakatan	146.080.000	
	Kecamatan Sukoharjo		5	Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000	5	Lembaga Kemasyarakatan	30.000.000	
	Kelurahan Kenep		8	Lembaga Kemasyarakatan	6.500.000	5	Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000	
	Kelurahan Banmati		8	Lembaga Kemasyarakatan	6.500.000	5	Lembaga Kemasyarakatan	7.000.000	

	Kelurahan Mandan		8	Lembaga Kemasyarakatan	6.500.000	5	Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000	
	Kelurahan Begajah		8	Lembaga Kemasyarakatan	6.500.000	5	Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000	
	Kelurahan Gayam		8	Lembaga Kemasyarakatan	6.500.000	5	Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000	
	Kelurahan Joho		8	Lembaga Kemasyarakatan	6.500.000	5	Lembaga Kemasyarakatan	5.000.000	
	Kelurahan Jetis		8	Lembaga Kemasyarakatan	6.500.000	5	Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000	
	Kelurahan Combongan		8	Lembaga Kemasyarakatan	6.500.000	5	Lembaga Kemasyarakatan	5.000.000	
	Kelurahan Kriwen		8	Lembaga Kemasyarakatan	6.500.000	5	Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000	

	Kelurahan Bulakan		8	Lembaga Kemasyarakatan	6.500.000	5	Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000	
	Kelurahan Dukuh		8	Lembaga Kemasyarakatan	6.500.000	5	Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000	
	Kelurahan Sukoharjo		8	Lembaga Kemasyarakatan	6.500.000	5	Lembaga Kemasyarakatan	5.000.000	
	Kelurahan Bulakrejo		8	Lembaga Kemasyarakatan	6.500.000	5	Lembaga Kemasyarakatan	8.000.000	
	Kelurahan Sonorejo		8	Lembaga Kemasyarakatan	6.500.000	5	Lembaga Kemasyarakatan	6.080.000	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	185	Unit	4.200.000.000	157	Unit	8.570.000.000	
	Kelurahan Kenep		10	Unit	300.000.000	6	Unit	640.000.000	
	Kelurahan Banmati		10	Unit	300.000.000	9	Unit	640.000.000	
	Kelurahan Mandan		10	Unit	300.000.000	8	Unit	560.000.000	
	Kelurahan Begajah		10	Unit	300.000.000	5	Unit	640.000.000	
	Kelurahan Gayam		10	Unit	300.000.000	5	Unit	690.000.000	
	Kelurahan Joho		10	Unit	300.000.000	9	Unit	600.000.000	

	Kelurahan Jetis		10	Unit	300.000.000	4	Unit	600.000.000	
	Kelurahan Combongan		10	Unit	300.000.000	12	Unit	600.000.000	
	Kelurahan Kriwen		10	Unit	300.000.000	10	Unit	600.000.000	
	Kelurahan Bulakan		10	Unit	300.000.000	7	Unit	600.000.000	
	Kelurahan Dukuh		10	Unit	300.000.000	13	Unit	600.000.000	
	Kelurahan Sukoharjo		10	Unit	300.000.000	9	Unit	600.000.000	
	Kelurahan Bulakrejo		10	Unit	300.000.000	8	Unit	600.000.000	
	Kelurahan Sonorejo		10	Unit	300.000.000	10	Unit	600.000.000	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	45	Pokmas/ Ormas	5.157.560.000	42	Pokmas/ Ormas	4.900.000.000	
	Kecamatan Sukoharjo		3	Pokmas/ Ormas	84.760.000	0	Pokmas/ Ormas	-	
	Kelurahan Kenep		3	Pokmas/ Ormas	341.600.000	3	Pokmas/ Ormas	350.000.000	
	Kelurahan Banmati		3	Pokmas/ Ormas	320.000.000	3	Pokmas/ Ormas	350.000.000	
	Kelurahan Mandan		3	Pokmas/ Ormas	341.600.000	3	Pokmas/ Ormas	350.000.000	
	Kelurahan Begajah		3	Pokmas/ Ormas	363.200.000	3	Pokmas/ Ormas	350.000.000	
	Kelurahan Gayam		3	Pokmas/ Ormas	377.600.000	3	Pokmas/ Ormas	350.000.000	

	Kelurahan Joho		3	Pokmas/ Ormas	334.400.000	3	Pokmas/ Ormas	350.000.000	
	Kelurahan Jetis		3	Pokmas/ Ormas	341.600.000	3	Pokmas/ Ormas	350.000.000	
	Kelurahan Combongan		3	Pokmas/ Ormas	327.200.000	3	Pokmas/ Ormas	350.000.000	
	Kelurahan Kriwen		3	Pokmas/ Ormas	363.200.000	3	Pokmas/ Ormas	350.000.000	
	Kelurahan Bulakan		3	Pokmas/ Ormas	398.000.000	3	Pokmas/ Ormas	350.000.000	
	Kelurahan Dukuh		3	Pokmas/ Ormas	388.400.000	3	Pokmas/ Ormas	350.000.000	
	Kelurahan Sukoharjo		3	Pokmas/ Ormas	438.800.000	3	Pokmas/ Ormas	350.000.000	
	Kelurahan Bulakrejo		3	Pokmas/ Ormas	370.400.000	3	Pokmas/ Ormas	350.000.000	
	Kelurahan Sonorejo		3	Pokmas/ Ormas	366.800.000	3	Pokmas/ Ormas	350.000.000	
7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	12	Laporan	25.000.000	12	Laporan	10.000.000	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Cakupan pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	100	%	903.220.000	100	%	708.000.000	

7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	15	Lembaga Kemasyarakatan	688.220.000	15	Lembaga Kemasyarakatan	500.000.000	
	Kecamatan Sukoharjo		1	Lembaga Kemasyarakatan	65.220.000	1	Lembaga Kemasyarakatan	80.000.000	
	Kelurahan Kenep		1	Lembaga Kemasyarakatan	44.500.000	1	Lembaga Kemasyarakatan	30.000.000	
	Kelurahan Banmati		1	Lembaga Kemasyarakatan	44.500.000	1	Lembaga Kemasyarakatan	30.000.000	
	Kelurahan Mandan		1	Lembaga Kemasyarakatan	44.500.000	1	Lembaga Kemasyarakatan	30.000.000	
	Kelurahan Begajah		1	Lembaga Kemasyarakatan	44.500.000	1	Lembaga Kemasyarakatan	30.000.000	
	Kelurahan Gayam		1	Lembaga Kemasyarakatan	44.500.000	1	Lembaga Kemasyarakatan	30.000.000	

	Kelurahan Joho		1	Lembaga Kemasyarakatan	44.500.000	1	Lembaga Kemasyarakatan	30.000.000	
	Kelurahan Jetis		1	Lembaga Kemasyarakatan	44.500.000	1	Lembaga Kemasyarakatan	30.000.000	
	Kelurahan Combongan		1	Lembaga Kemasyarakatan	44.500.000	1	Lembaga Kemasyarakatan	30.000.000	
	Kelurahan Kriwen		1	Lembaga Kemasyarakatan	44.500.000	1	Lembaga Kemasyarakatan	30.000.000	
	Kelurahan Bulakan		1	Lembaga Kemasyarakatan	44.500.000	1	Lembaga Kemasyarakatan	30.000.000	
	Kelurahan Dukuh		1	Lembaga Kemasyarakatan	44.500.000	1	Lembaga Kemasyarakatan	30.000.000	
	Kelurahan Sukoharjo		1	Lembaga Kemasyarakatan	44.500.000	1	Lembaga Kemasyarakatan	30.000.000	

	Kelurahan Bulakrejo		1	Lembaga Kemasyarakatan	44.500.000	1	Lembaga Kemasyarakatan	30.000.000	
	Kelurahan Sonorejo		1	Lembaga Kemasyarakatan	44.500.000	1	Lembaga Kemasyarakatan	30.000.000	
7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	15	Lembaga Kemasyarakatan	150.000.000	17	Lembaga Kemasyarakatan	190.000.000	
	Kecamatan Sukoharjo		1	Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000	4	Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000	
	Kelurahan Kenep		1	Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000	1	Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000	
	Kelurahan Banmati		1	Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000	1	Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000	
	Kelurahan Mandan		1	Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000	1	Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000	

	Kelurahan Begajah		1	Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000	1	Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000	
	Kelurahan Gayam		1	Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000	1	Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000	
	Kelurahan Joho		1	Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000	0	Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000	
	Kelurahan Jetis		1	Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000	1	Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000	
	Kelurahan Combongan		1	Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000	1	Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000	
	Kelurahan Kriwen		1	Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000	1	Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000	
	Kelurahan Bulakan		1	Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000	1	Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000	

	Kelurahan Dukuh		1	Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000	1	Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000	
	Kelurahan Sukoharjo		1	Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000	1	Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000	
	Kelurahan Bulakrejo		1	Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000	1	Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000	
	Kelurahan Sonorejo		1	Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000	1	Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000	
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	14	Laporan	65.000.000	1	Laporan	18.000.000	
07.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase capaian ketentraman dan ketertiban umum**	100	%	**139.780.000**	100	%	**132.000.000**	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Cakupan Upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	100	%	60.000.000	100	%	12.000.000	

7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Istansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	30.000.000	4	Laporan	6.000.000	
7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	4	Laporan	30.000.000	4	Laporan	6.000.000	
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Cakupan koordinasi penerapan dan penegakaan peraturan daerah dan peraturan Kepala Daerah	100	%	79.780.000	100	%	120.000.000	
7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1	Laporan	79.780.000	15	Laporan	120.000.000	
	Kecamatan Sukoharjo			Laporan	23.780.000	1	Laporan	50.000.000	
	Kelurahan Kenep			Laporan	4.000.000	1	Laporan	5.000.000	
	Kelurahan Banmati			Laporan	4.000.000	1	Laporan	5.000.000	

	Kelurahan Mandan			Laporan	4.000.000	1	Laporan	5.000.000	
	Kelurahan Begajah			Laporan	4.000.000	1	Laporan	5.000.000	
	Kelurahan Gayam			Laporan	4.000.000	1	Laporan	5.000.000	
	Kelurahan Joho			Laporan	4.000.000	1	Laporan	5.000.000	
	Kelurahan Jetis			Laporan	4.000.000	1	Laporan	5.000.000	
	Kelurahan Combongan			Laporan	4.000.000	1	Laporan	5.000.000	
	Kelurahan Kriwen			Laporan	4.000.000	1	Laporan	5.000.000	
	Kelurahan Bulakan			Laporan	4.000.000	1	Laporan	5.000.000	
	Kelurahan Dukuh			Laporan	4.000.000	1	Laporan	5.000.000	
	Kelurahan Sukoharjo			Laporan	4.000.000	1	Laporan	5.000.000	
	Kelurahan Bulakrejo			Laporan	4.000.000	1	Laporan	5.000.000	
	Kelurahan Sonorejo			Laporan	4.000.000	1	Laporan	5.000.000	
07.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum**	100	%	**192.800.000**	100	%	**276.000.000**	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	100	%	192.800.000	100	%	276.000.000	
7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialissai, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	100	Orang	42.800.000	100	Orang	100.000.000	

7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12	Dokumen	150.000.000	12	Dokumen	176.000.000	
07.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa**	100	%	**159.060.000**	100	%	**350.000.000**	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan Fasilitasi pengeloaan keuangan desa dan pendayagunaan aset kelurahan	100	%	159.060.000	100	%	350.000.000	
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	14	Dokumen	159.060.000	14	Dokumen	350.000.000	
	Kelurahan Kenep		1	Dokumen	11.000.000	1	Dokumen	25.000.000	
	Kelurahan Banmati		1	Dokumen	11.000.000	1	Dokumen	25.000.000	
	Kelurahan Mandan		1	Dokumen	11.000.000	1	Dokumen	25.000.000	
	Kelurahan Begajah		1	Dokumen	11.000.000	1	Dokumen	25.000.000	
	Kelurahan Gayam		1	Dokumen	15.760.000	1	Dokumen	25.000.000	
	Kelurahan Joho		1	Dokumen	11.000.000	1	Dokumen	25.000.000	
	Kelurahan Jetis		1	Dokumen	11.000.000	1	Dokumen	25.000.000	
	Kelurahan Combongan		1	Dokumen	11.000.000	1	Dokumen	25.000.000	
	Kelurahan Kriwen		1	Dokumen	11.000.000	1	Dokumen	25.000.000	

	Kelurahan Bulakan		1	Dokumen	11.000.000	1	Dokumen	25.000.000	
	Kelurahan Dukuh		1	Dokumen	11.000.000	1	Dokumen	25.000.000	
	Kelurahan Sukoharjo		1	Dokumen	11.000.000	1	Dokumen	25.000.000	
	Kelurahan Bulakrejo		1	Dokumen	11.000.000	1	Dokumen	25.000.000	
	Kelurahan Sonorejo		1	Dokumen	11.300.000	1	Dokumen	25.000.000	
	JUMLAH				**28.532.230.000**			**35.132.536.000**	

Hasil analisa kebutuhan merupakan usulan program/kegiatan berdasarkan pagu yang diberikan pada saat Forum Perangkat Daerah, sehingga terjadi perbedaan rincian dengan Rancangan Awal RKPD. Selain terjadi perbedaan pada besaran anggaran tiap kegiatan, juga terdapat perbedaan pada rincian output serta jumlah target kegiatan, yaitu pada Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kelurahan dan Program Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat. Karena di dalam program tersebut ada kegiatan dari aspirasi masyarakat dan kegiatan pembangunan infrastuktur di kelurahan.

E. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rancangan rencana kerja Kecamatan Sukoharjo didiskusikan dalam pembahasan forum OPD Kecamatan Sukoharjo. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja dengan kesepakatan hasil Musrenbang dari kelurahan-kelurahan.

Pada forum OPD Kecamatan Sukoharjo, membahas usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada OPD pelaksana baik dari kelompok masyarakat, LSM, perguruan tinggi dan OPD kabupaten. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/ kegiatan yang direncanakan.

BAB III
TUJUAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

A. Telaah terhadap Kebijakan Nasional

Untuk mendukung pencapaian tujuan Strategis, dirumuskan Sasaran Strategis Kementerian Dalam Negeri, sebagai berikut:

1. Untuk mewujudkan tujuan pada T1 ditetapkan Sasaran Strategis:

a. Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia (SS1), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi: (1) Indeks Demokrasi Indonesia. (2) Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilukada dan Pemilu. (3) Indeks Kinerja Ormas.

b. Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah (SS2), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi: (1) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi. (2) Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM). (3) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi. (4) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya.

c. Meningkatnya kewaspadaan nasional (SS3), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, yaitu Indeks Kewaspadaan Nasional.

d. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas (SS4), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi: (1) Jumlah daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas kategori “Baik”. (2) Indeks Kepuasaan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas.

B. Tujuan dan Sasaran serta Arah Kebijakan

Berdasarkan visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Sukoharjo tahun 2021-2026, tujuan dan sasaran pembangunan selama lima tahun kedepan sebagai berikut :

V I S I :

“ MEWUJUDKAN MASYARAKAT SUKOHARJO YANG LEBIH MAKMUR “

Visi ini diharapkan akan mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat Kabupaten Sukoharjo. Visi Kabupaten Sukoharjo tersebut harus dapat diukur keberhasilannya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan. Adapun makna yang terkandung dalam Visi tersebut dijabarkan dengan misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik melalui Percepatan reformasi birokrasi
2. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas
3. Memperkuat perekonomian rakyat yang berdaya saing tinggi
4. Memperkuat pembangunan infrastruktur berwawasan lingkungan
5. Meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan keagamaan

Sedangkan untuk Perangkat Daerah Kecamatan Sukoharjo atas dasar Visi dan Misi (I) Bupati 2021-2026, Tujuan, Sasaran dan arah kebijakan Jangka Menengah adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Pada Tahun 2024
1.	Terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,5
		Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	Persentase peningkatan pelayanan kecamatan	100%
		Meningkatnya kualitas aparatur dan pelayanan publik	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	B (68)

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

A. Rencana Kerja

Rencana Kerja yang berisi tentang program dan kegiatan Perangkat Daerah adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerja sama dengan masyarakat, guna mencapai sasaran tertentu. Program dan Kegiatan Tahun 2024 disusun melalui proses perencanaan mulai dari Musrenbang Kelurahan dan Musrenbang Kecamatan. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

B. Program, Kegiatan dan Pendanaan

Secara umum sasaran program dan kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dijabarkan di dalam Rancangan Kerja Tahun 2024 ini. Rencana Kerja Kecamatan Sukoharjo Tahun 2024 terdiri dari 6 Program, 17 Kegiatan dan 57 Sub Kegiatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo. Rancangan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Sukoharjo Tahun 2024 dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 4.1

Program, Kegiatan dan Sub kegiatan Tahun 2024

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Evaluasi Kelurahan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Pengadaan Mebel
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Pemeliharaan Mebel
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Adapun kerangka pendanaan untuk setiap Program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2024 kami uraikan pada tabel. 4.2 sebagai berikut

PROGRAM KERJA DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2024

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Sukoharjo
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Sukoharjo

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
					Kecamatan Sukoharjo								15.772.706.000,00					2.794.960.000,00
7					UNSUR KEWILAYAHAN								15.772.706.000,00					2.794.960.000,00
7	01				KECAMATAN								15.772.706.000,00					2.794.960.000,00
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								15.217.886.000,00					2.113.960.000,00
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								52.430.000,00					75.000.000,00
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Sukoharjo, Sukoharjo, Semua Kel/Desa	100 %	1 Dokumen	100 %	9.330.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	15.000.000,00

7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD												
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Sukoharjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Dokumen	100 %	8.150.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	10.000.000,00
7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD												
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Sukoharjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Dokumen	100 %	8.150.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	15.000.000,00
7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD												

						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Sukoharjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Dokumen	100 %	8.150.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	10.000.000,00
7	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD													
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Sukoharjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Dokumen	100 %	8.150.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	15.000.000,00
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													

						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Sukoharjo , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	2 Laporan	100 %	6.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	5.000.000,00
7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Sukoharjo , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Laporan	100 %	4.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	5.000.000,00
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								13.632.142.000,00					256.260.000,00
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													

						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Sukoharjo , Sukoharjo , Semua Kel/Desa	100 %	99 Orang/bulan	100 %	13.410.952.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	99 Orang/bulan	13.000.000,00
7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD													
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Sukoharjo , Sukoharjo , Semua Kel/Desa	100 %	12 Dokumen	100 %	201.190.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	208.260.000,00
7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD													
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Sukoharjo , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Laporan	100 %	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	10.000.000,00
7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD													

						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Sukoharjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	20 Laporan	100 %	10.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	20 Laporan	15.000.000,00
7	01	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran													
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Sukoharjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	12 Dokumen	100 %	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12 Dokumen	10.000.000,00
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								193.000.000,00					346.700.000,00
7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya													
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Sukoharjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	0 Paket	100 %	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut	0 Paket	56.700.000,00

																Kelengkapan		
7	01	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian													
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Sukoharjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	99 Dokumen	100 %	20.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	99 Dokumen	20.000.000,00
7	01	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai													
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Sukoharjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	99 Dokumen	100 %	10.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	99 Dokumen	10.000.000,00
7	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi													
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Sukoharjo, Sukoharjo, Semua Kel/Desa	100 %	115 Orang	100 %	153.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan	115 Orang	200.000.000,00

																dan Pelatihan		
7	01	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan													
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Sukoharjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	50 Orang	100 %	10.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	10.000.000,00
7	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan													
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Sukoharjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	100 Orang	100 %	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	50.000.000,00
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								527.814.000,00					579.000.000,00
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Sukoharjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Paket	100 %	21.998.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	1 Paket	20.000.000,00

							Disediakan									Bangunan Kantor yang Disediakan		
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Sukoharjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Paket	100 %	30.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	20.000.000,00
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Sukoharjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	4 Paket	100 %	391.750.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	300.000.000,00
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Sukoharjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Paket	100 %	29.866.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengganda an yang Disediakan	1 Paket	25.000.000,00
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													

						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Sukoharjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	24 Dokumen	100 %	4.200.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen	4.000.000,00
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Sukoharjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	150 Laporan	100 %	50.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Laporan	210.000.000,00
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								18.500.000,00					135.000.000,00
7	01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Sukoharjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Unit	100 %	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	0,00
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel													

						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Sukoharjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Unit	100 %	8.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	30.000.000,00
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Sukoharjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Unit	100 %	10.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	80.000.000,00
7	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Sukoharjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	2 Unit	100 %	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	25.000.000,00
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								282.000.000,00					307.000.000,00
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Kab. Sukoharjo, Semua Kecamata	100 %	12 Laporan	100 %	30.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat	12 Laporan	27.000.000,00

						pemerintah daerah		Pemerintahan Daerah	n, Semua Kel/Desa					Alokasi Umum		Menyurat		
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sukoharjo , Sukoharjo , Semua Kel/Desa	100 %	12 Laporan	100 %	70.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	75.000.000,00
7	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sukoharjo , Sukoharjo , Semua Kel/Desa	100 %	1 Laporan	100 %	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	5.000.000,00
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sukoharjo , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	12 Laporan	100 %	176.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang	12 Laporan	200.000.000,00

																Disediakan		
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								512.000.000,00					415.000.000,00
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sukoharjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	10 Unit	100 %	80.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 Unit	80.000.000,00
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sukoharjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	2 Unit	100 %	4.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinanny	2 Unit	5.000.000,00

																a		
7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel													
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sukoharjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	50 Unit	100 %	7.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Mebel yang Dipelihara	50 Unit	10.000.000,00
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sukoharjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	24 Unit	100 %	20.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	24 Unit	20.000.000,00
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Kab. Sukoharjo, Sukoharjo, Semua Kel/Desa	100 %	1 Unit	100 %	200.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/	1 Unit	200.000.000,00

								Daerah								Direhabilitasi		
7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sukoharjo, Sukoharjo, Semua Kel/Desa	100 %	1 Unit	100 %	200.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	100.000.000,00
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								75.000.000,00					80.000.000,00
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								35.000.000,00					40.000.000,00
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan													
						Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Cakupan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kab. Sukoharjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	16 Dokumen	100 %	35.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	16 Dokumen	40.000.000,00
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan								40.000.000,00					40.000.000,00
7	01	02	2.02	0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan													

						Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kab. Sukoharjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	2 Laporan	100 %	20.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	20.000.000,00
7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan													
						Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kab. Sukoharjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	4 Laporan	100 %	20.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	20.000.000,00
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								227.385.000,00					213.000.000,00
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa								25.000.000,00					25.000.000,00
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan													
						Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Cakupan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kab. Sukoharjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Laporan	100 %	25.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	1 Laporan	25.000.000,00

																di Wilayah Kecamatan		
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								47.385.000,00					40.000.000,00
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan													
						Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kab. Sukoharjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	5 Lembaga Kemasyarakatan	100 %	30.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan	30.000.000,00
7	01	03	2.02	0004	Evaluasi Kelurahan													
						Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kab. Sukoharjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	12 Laporan	100 %	17.385.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	12 Laporan	10.000.000,00
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan								155.000.000,00					148.000.000,00
7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan													

						Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Cakupan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kab. Sukoharjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	15 Lembaga Kemasyarakatan	100 %	80.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	15 Lembaga Kemasyarakatan	80.000.000,00
7	01	03	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan													
						Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Cakupan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kab. Sukoharjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	4 Lembaga Kemasyarakatan	100 %	50.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	4 Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000,00
7	01	03	2.03	0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat													
						Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Cakupan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kab. Sukoharjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Laporan	100 %	25.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan	18.000.000,00
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								90.000.000,00					112.000.000,00
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum								40.000.000,00					12.000.000,00
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan													

						Persentase capaian ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Cakupan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kab. Sukoharjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	3 Laporan	100 %	20.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	3 Laporan	6.000.000,00
7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat													
						Persentase capaian ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Cakupan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kab. Sukoharjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	3 Laporan	100 %	20.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	3 Laporan	6.000.000,00
7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah								50.000.000,00					100.000.000,00
7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia													

						Persentase capaian ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Cakupan Koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Kab. Sukoharjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Laporan	100 %	50.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 Laporan	100.000.000,00
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM								162.435.000,00					276.000.000,00
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah								162.435.000,00					276.000.000,00
7	01	05	2.01	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional													
						Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kab. Sukoharjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	100 Orang	100 %	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi,	100 Orang	100.000.000,00

							Kebangsaan dan Ketahanan Nasional									Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan													
						Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kab. Sukoharjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	12 Dokumen	100 %	162.435.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	176.000.000,00
					Kelurahan Kenep								1.276.701.000,00					2.146.900.000,00
7					UNSUR KEWILAYAHAN								1.276.701.000,00					2.146.900.000,00
7	01				KECAMATAN								1.276.701.000,00					2.146.900.000,00
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								267.901.000,00					1.116.900.000,00
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								66.840.000,00					668.400.000,00
7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD													
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Sukoharjo, Sukoharjo, Kenep	100 %	12 Dokumen	100 %	66.840.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	668.400.000,00
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								57.486.000,00					105.500.000,00

7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor												
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Sukoharjo, Sukoharjo, Kenep	100 %	1 Paket	100 %	7.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.000.000,00
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga												
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Sukoharjo, Sukoharjo, Kenep	100 %	1 Paket	100 %	10.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	5.000.000,00
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor												
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Sukoharjo, Sukoharjo, Kenep	100 %	4 Paket	100 %	34.486.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	80.000.000,00
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan												
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Sukoharjo, Sukoharjo, Kenep	100 %	2 Paket	100 %	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengganda an yang	2 Paket	10.000.000,00

																Disediakan		
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Sukoharjo, Sukoharjo, Kenep	100 %	0 Dokumen	100 %	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0 Dokumen	2.500.000,00
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Sukoharjo, Sukoharjo, Kenep	100 %	20 Laporan	100 %	1.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	3.000.000,00
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								10.000.000,00					40.000.000,00
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel													
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Kab. Sukoharjo, Sukoharjo, Kenep	100 %	0 Unit	100 %	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit	10.000.000,00

								Daerah									
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya												
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Sukoharjo , Sukoharjo , Kenep	100 %	2 Unit	100 %	10.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	20.000.000,00
7	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya												
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Sukoharjo , Sukoharjo , Kenep	100 %	0 Unit	100 %	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	10.000.000,00
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								115.600.000,00					124.000.000,00
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat												
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sukoharjo , Sukoharjo , Kenep	100 %	12 Laporan	100 %	10.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	10.000.000,00
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik												

						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sukoharjo , Sukoharjo , Kenep	100 %	12 Laporan	100 %	33.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	30.000.000,00
7	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sukoharjo , Sukoharjo , Kenep	100 %	0 Laporan	100 %	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Laporan	3.000.000,00
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sukoharjo , Sukoharjo , Kenep	100 %	12 Laporan	100 %	72.600.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	81.000.000,00
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								17.975.000,00					179.000.000,00
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													

						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sukoharjo , Sukoharjo , Kenep	100 %	5 Unit	100 %	13.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	15.000.000,00
7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel													
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sukoharjo , Sukoharjo , Kenep	100 %	0 Unit	100 %	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Mebel yang Dipelihara	0 Unit	6.000.000,00
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sukoharjo , Sukoharjo , Kenep	100 %	12 Unit	100 %	4.975.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	8.000.000,00
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													

						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sukoharjo, Sukoharjo, Kenep	100 %	0 Unit	100 %	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	0 Unit	150.000.000,00
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								984.000.000,00					1.000.000.000,00
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								959.000.000,00					960.000.000,00
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan													
						Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kab. Sukoharjo, Sukoharjo, Kenep	100 %	6 Lembaga Kemasyarakatan	100 %	10.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000,00
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan													
						Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kab. Sukoharjo, Sukoharjo, Kenep	100 %	7 Unit	100 %	640.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7 Unit	600.000.000,00

7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan												
						Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kab. Sukoharjo, Sukoharjo, Kenep	100 %	39 Pokmas / Ormas	100 %	309.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	39 Pokmas / Ormas	350.000.000,00
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan								25.000.000,00					40.000.000,00
7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan													
						Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Cakupan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kab. Sukoharjo, Sukoharjo, Kenep	100 %	1 Lembaga Kemasyarakatan	100 %	25.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	1 Lembaga Kemasyarakatan	30.000.000,00
7	01	03	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan													
						Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Cakupan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kab. Sukoharjo, Sukoharjo, Kenep	100 %	0 Lembaga Kemasyarakatan	100 %	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	0 Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000,00
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								3.000.000,00					5.000.000,00
7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah								3.000.000,00					5.000.000,00
7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia													

						Persentase capaian ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Cakupan Koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Kab. Sukoharjo , Sukoharjo , Kenep	100 %	1 Laporan	100 %	3.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 Laporan	5.000.000,00
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA								21.800.000,00					25.000.000,00
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa								21.800.000,00					25.000.000,00
7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa													
						Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kab. Sukoharjo , Sukoharjo , Kenep	100 %	1 Dokumen	100 %	21.800.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagu	1 Dokumen	25.000.000,00

																naan Aset Desa		
					Kelurahan Banmati								1.345.051.000,00					1.525.340.000,00
7					UNSUR KEWILAYAHAN								1.345.051.000,00					1.525.340.000,00
7	01				KECAMATAN								1.345.051.000,00					1.525.340.000,00
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								342.551.000,00					495.340.000,00
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								66.840.000,00					66.840.000,00
7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD													
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Sukoharjo, Sukoharjo, Banmati	100 %	12 Dokumen	100 %	66.840.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	66.840.000,00
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								49.111.000,00					105.500.000,00
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Sukoharjo, Sukoharjo, Banmati	100 %	1 Paket	100 %	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.000.000,00
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													

						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Sukoharjo , Sukoharjo , Banmati	100 %	1 Paket	100 %	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	5.000.000,00
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Sukoharjo , Sukoharjo , Banmati	100 %	4 Paket	100 %	27.811.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	80.000.000,00
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Sukoharjo , Sukoharjo , Banmati	100 %	1 Paket	100 %	8.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengganda an yang Disediakan	1 Paket	10.000.000,00
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Sukoharjo , Sukoharjo , Banmati	100 %	24 Dokumen	100 %	1.800.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen	2.500.000,00

7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD												
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Sukoharjo , Sukoharjo , Banmati	100 %	20 Laporan	100 %	1.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	3.000.000,00
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								16.000.000,00					40.000.000,00
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel													
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Sukoharjo , Sukoharjo , Banmati	100 %	1 Unit	100 %	3.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	10.000.000,00
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Sukoharjo , Sukoharjo , Banmati	100 %	1 Unit	100 %	9.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	20.000.000,00
7	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													

						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Sukoharjo , Sukoharjo , Banmati	100 %	2 Unit	100 %	3.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	10.000.000,00
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								88.100.000,00					104.000.000,00
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sukoharjo , Sukoharjo , Banmati	100 %	12 Laporan	100 %	10.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	10.000.000,00
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sukoharjo , Sukoharjo , Banmati	100 %	12 Laporan	100 %	24.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	30.000.000,00
7	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor													

						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sukoharjo , Sukoharjo , Banmati	100 %	0 Laporan	100 %	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Laporan	3.000.000,00
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sukoharjo , Sukoharjo , Banmati	100 %	12 Laporan	100 %	54.100.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	61.000.000,00
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								122.500.000,00					179.000.000,00
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sukoharjo , Sukoharjo , Banmati	100 %	4 Unit	100 %	18.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan	4 Unit	15.000.000,00

																Pajaknya		
7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel													
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sukoharjo , Sukoharjo , Banmati	100 %	0 Unit	100 %	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Mebel yang Dipelihara	0 Unit	6.000.000,00
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sukoharjo , Sukoharjo , Banmati	100 %	8 Unit	100 %	4.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	8.000.000,00
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Kab. Sukoharjo , Sukoharjo , Banmati	100 %	1 Unit	100 %	100.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/	1 Unit	150.000.000,00

								Daerah								Direhabilitasi		
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								985.500.000,00					1.000.000.000,00
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								955.500.000,00					960.000.000,00
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan													
						Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kab. Sukoharjo, Sukoharjo, Banmati	100 %	5 Lembaga Kemasyarakatan	100 %	7.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000,00
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan													
						Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kab. Sukoharjo, Sukoharjo, Banmati	100 %	11 Unit	100 %	640.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11 Unit	600.000.000,00
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan													

						Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kab. Sukoharjo, Sukoharjo, Banmati	100 %	52 Pokmas / Ormas	100 %	308.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	52 Pokmas / Ormas	350.000.000,00
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan								30.000.000,00					40.000.000,00
7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan													
						Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Cakupan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kab. Sukoharjo, Sukoharjo, Banmati	100 %	1 Lembaga Kemasyarakatan	100 %	25.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	1 Lembaga Kemasyarakatan	30.000.000,00
7	01	03	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan													
						Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Cakupan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kab. Sukoharjo, Sukoharjo, Banmati	100 %	1 Lembaga Kemasyarakatan	100 %	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000,00
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								4.000.000,00					5.000.000,00
7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah								4.000.000,00					5.000.000,00
7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia													

						Persentase capaian ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Cakupan Koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Kab. Sukoharjo , Sukoharjo , Banmati	100 %	1 Laporan	100 %	4.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 Laporan	5.000.000,00
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA								13.000.000,00					25.000.000,00
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa								13.000.000,00					25.000.000,00
7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa													
						Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kab. Sukoharjo , Sukoharjo , Banmati	100 %	1 Dokumen	100 %	13.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagu	1 Dokumen	25.000.000,00

																naan Aset Desa		
					Kelurahan Mandan								1.391.930.000,00					1.600.340.000,00
7					UNSUR KEWILAYAHAN								1.391.930.000,00					1.600.340.000,00
7	01				KECAMATAN								1.391.930.000,00					1.600.340.000,00
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								485.280.000,00					570.340.000,00
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								66.840.000,00					66.840.000,00
7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD													
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Sukoharjo, Sukoharjo, Mandan	100 %	12 Dokumen	100 %	66.840.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	66.840.000,00
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								68.440.000,00					105.500.000,00
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Sukoharjo, Sukoharjo, Mandan	100 %	1 Paket	100 %	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.000.000,00
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													

						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Sukoharjo , Sukoharjo , Mandan	100 %	1 Paket	100 %	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	5.000.000,00
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Sukoharjo , Sukoharjo , Mandan	100 %	4 Paket	100 %	49.910.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	80.000.000,00
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Sukoharjo , Sukoharjo , Mandan	100 %	1 Paket	100 %	5.230.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengganda an yang Disediakan	1 Paket	10.000.000,00
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Sukoharjo , Sukoharjo , Mandan	100 %	1 Dokumen	100 %	1.800.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	2.500.000,00

7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD												
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Sukoharjo , Sukoharjo , Mandan	100 %	1 Laporan	100 %	1.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	3.000.000,00
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								20.950.000,00					40.000.000,00
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel													
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Sukoharjo , Sukoharjo , Mandan	100 %	2 Unit	100 %	1.950.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	10.000.000,00
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Sukoharjo , Sukoharjo , Mandan	100 %	1 Unit	100 %	19.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	20.000.000,00
7	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													

						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Sukoharjo , Sukoharjo , Mandan	100 %	0 Unit	100 %	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	10.000.000,00
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								156.550.000,00					179.000.000,00
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sukoharjo , Sukoharjo , Mandan	100 %	3 Laporan	100 %	10.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3 Laporan	10.000.000,00
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sukoharjo , Sukoharjo , Mandan	100 %	5 Laporan	100 %	24.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5 Laporan	30.000.000,00
7	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor													

						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sukoharjo , Sukoharjo , Mandan	100 %	0 Laporan	100 %	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Laporan	3.000.000,00
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sukoharjo , Sukoharjo , Mandan	100 %	7 Laporan	100 %	122.550.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	7 Laporan	136.000.000,00
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								172.500.000,00					179.000.000,00
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sukoharjo , Sukoharjo , Mandan	100 %	3 Unit	100 %	18.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan	3 Unit	15.000.000,00

																Pajaknya		
7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel													
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sukoharjo , Sukoharjo , Mandan	100 %	0 Unit	100 %	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Mebel yang Dipelihara	0 Unit	6.000.000,00
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sukoharjo , Sukoharjo , Mandan	100 %	2 Unit	100 %	4.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	8.000.000,00
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Kab. Sukoharjo , Sukoharjo , Mandan	100 %	5 Unit	100 %	150.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/	5 Unit	150.000.000,00

								Daerah								Direhabilitasi		
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								890.150.000,00					1.000.000.000,00
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								845.060.000,00					960.000.000,00
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan													
						Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kab. Sukoharjo, Sukoharjo, Mandan	100 %	6 Lembaga Kemasyarakatan	100 %	10.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000,00
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan													
						Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kab. Sukoharjo, Sukoharjo, Mandan	100 %	8 Unit	100 %	560.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit	600.000.000,00
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan													

						Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kab. Sukoharjo, Sukoharjo, Mandan	100 %	12 Pokmas / Ormas	100 %	275.060.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12 Pokmas / Ormas	350.000.000,00
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan								45.090.000,00					40.000.000,00
7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan													
						Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Cakupan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kab. Sukoharjo, Sukoharjo, Mandan	100 %	4 Lembaga Kemasyarakatan	100 %	40.090.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 Lembaga Kemasyarakatan	30.000.000,00
7	01	03	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan													
						Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Cakupan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kab. Sukoharjo, Sukoharjo, Mandan	100 %	4 Lembaga Kemasyarakatan	100 %	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	4 Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000,00
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								4.000.000,00					5.000.000,00
7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah								4.000.000,00					5.000.000,00
7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia													

						Persentase capaian ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Cakupan Koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Kab. Sukoharjo, Sukoharjo, Mandan	100 %	5 Laporan	100 %	4.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	5 Laporan	5.000.000,00
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA								12.500.000,00					25.000.000,00
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa								12.500.000,00					25.000.000,00
7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa													
						Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kab. Sukoharjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sukoharjo, Sukoharjo	100 %	1 Dokumen	100 %	12.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagu	1 Dokumen	25.000.000,00

									, Mandan							naan Aset Desa		
						Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kab. Sukoharjo , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sukoharjo , Sukoharjo , Mandan	100 %	5 Dokumen	100 %	12.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	5 Dokumen	25.000.000,00
					Kelurahan Begajah								1.410.430.000,00					1.524.340.000,00
7					UNSUR KEWILAYAHAN								1.410.430.000,00					1.524.340.000,00
7	01				KECAMATAN								1.410.430.000,00					1.524.340.000,00
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								445.850.000,00					494.340.000,00
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								66.840.000,00					66.840.000,00
7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD													
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Sukoharjo , Sukoharjo , Begajah	100 %	12 Dokumen	100 %	66.840.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	66.840.000,00

7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								61.500.000,00					105.500.000,00
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Sukoharjo, Sukoharjo, Begajah	100 %	1 Paket	100 %	7.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.000.000,00
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Sukoharjo, Sukoharjo, Begajah	100 %	1 Paket	100 %	10.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	5.000.000,00
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Sukoharjo, Sukoharjo, Begajah	100 %	4 Paket	100 %	34.700.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	80.000.000,00
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Sukoharjo, Sukoharjo, Begajah	100 %	1 Paket	100 %	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengganda	1 Paket	10.000.000,00

																an yang Disediakan		
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Sukoharjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sukoharjo, Sukoharjo, Begajah	100 %	1 Dokumen	100 %	1.800.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	2.500.000,00
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Sukoharjo, Sukoharjo, Begajah	100 %	2 Laporan	100 %	3.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	3.000.000,00
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								19.000.000,00					40.000.000,00
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel													
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Kab. Sukoharjo, Sukoharjo, Begajah	100 %	2 Unit	100 %	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	10.000.000,00

						daerah		Urusan Pemerintah Daerah						Umum				
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Sukoharjo , Sukoharjo , Begajah	100 %	2 Unit	100 %	19.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	20.000.000,00
7	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Sukoharjo , Sukoharjo , Begajah	100 %	2 Unit	100 %	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	10.000.000,00
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								86.430.000,00					103.000.000,00
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sukoharjo , Sukoharjo , Begajah	100 %	2 Laporan	100 %	10.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	10.000.000,00
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													

						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sukoharjo , Sukoharjo , Begajah	100 %	3 Laporan	100 %	22.300.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	30.000.000,00
7	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sukoharjo , Sukoharjo , Begajah	100 %	1 Laporan	100 %	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	3.000.000,00
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sukoharjo , Sukoharjo , Begajah	100 %	5 Laporan	100 %	54.130.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	60.000.000,00
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								212.080.000,00					179.000.000,00
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													

						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sukoharjo , Sukoharjo , Begajah	100 %	2 Unit	100 %	8.610.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	15.000.000,00
7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel													
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sukoharjo , Sukoharjo , Begajah	100 %	10 Unit	100 %	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit	6.000.000,00
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sukoharjo , Sukoharjo , Begajah	100 %	3 Unit	100 %	3.470.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	8.000.000,00
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													

						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sukoharjo, Sukoharjo, Begajah	100 %	3 Unit	100 %	200.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	3 Unit	150.000.000,00
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								944.580.000,00					1.000.000.000,00
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								914.580.000,00					960.000.000,00
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan													
						Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kab. Sukoharjo, Sukoharjo, Begajah	100 %	6 Lembaga Kemasyarakatan	100 %	10.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000,00
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan													
						Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kab. Sukoharjo, Sukoharjo, Begajah	100 %	3 Unit	100 %	640.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	600.000.000,00

						Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kab. Sukoharjo, Sukoharjo, Begajah	100 %	6 Unit	100 %	640.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit	600.000.000,00
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan													
						Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kab. Sukoharjo, Sukoharjo, Begajah	100 %	44 Pokmas / Ormas	100 %	264.580.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	44 Pokmas / Ormas	350.000.000,00
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan								30.000.000,00					40.000.000,00
7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan													
						Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Cakupan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kab. Sukoharjo, Sukoharjo, Begajah	100 %	3 Lembaga Kemasyarakatan	100 %	25.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	3 Lembaga Kemasyarakatan	30.000.000,00
7	01	03	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan													
						Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Cakupan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kab. Sukoharjo, Sukoharjo, Begajah	100 %	3 Lembaga Kemasyarakatan	100 %	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan	3 Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000,00

																Kapasitasn ya		
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								4.000.000,00					5.000.000,00
7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah								4.000.000,00					5.000.000,00
7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia													
						Persentase capaian ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Cakupan Koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Kab. Sukoharjo , Sukoharjo , Begajah	100 %	3 Laporan	100 %	4.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	3 Laporan	5.000.000,00
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA								16.000.000,00					25.000.000,00
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa								16.000.000,00					25.000.000,00
7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa													

						Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kab. Sukoharjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sukoharjo, Sukoharjo, Begajah	100 %	5 Dokumen	100 %	16.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	5 Dokumen	25.000.000,00
						Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kab. Sukoharjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sukoharjo, Sukoharjo, Begajah	100 %	1 Dokumen	100 %	16.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Dokumen	25.000.000,00
					Kelurahan Gayam								1.443.820.000,00					1.538.340.000,00
6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN								38.500.000,00					80.000.000,00
6	01				INSPEKTORAT DAERAH								38.500.000,00					80.000.000,00
6	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								38.500.000,00					80.000.000,00
6	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								38.500.000,00					80.000.000,00
6	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													

						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Sukoharjo , Sukoharjo , Gayam	100 %	4 Paket	100 %	38.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	80.000.000,00
7					UNSUR KEWILAYAHAN								1.405.320.000,00					1.458.340.000,00
7	01				KECAMATAN								1.405.320.000,00					1.458.340.000,00
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								311.330.000,00					428.340.000,00
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								66.840.000,00					66.840.000,00
7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD													
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Sukoharjo , Sukoharjo , Gayam	100 %	12 Dokumen	100 %	66.840.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	66.840.000,00
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								19.913.000,00					25.500.000,00
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Sukoharjo , Sukoharjo , Gayam	100 %	1 Paket	100 %	5.761.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.000.000,00
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													

						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Sukoharjo , Sukoharjo , Gayam	100 %	1 Paket	100 %	7.852.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	5.000.000,00
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Sukoharjo , Sukoharjo , Gayam	100 %	1 Paket	100 %	3.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengganda an yang Disediakan	1 Paket	10.000.000,00
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Sukoharjo , Sukoharjo , Gayam	100 %	12 Dokumen	100 %	1.800.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	2.500.000,00
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Sukoharjo , Sukoharjo , Gayam	100 %	20 Laporan	100 %	1.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyelengg araan Rapat Koordinasi	20 Laporan	3.000.000,00

																dan Konsultasi SKPD		
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								0,00					40.000.000,00
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel													
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Sukoharjo , Sukoharjo , Gayam	100 %	2 Unit	100 %	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	10.000.000,00
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Sukoharjo , Sukoharjo , Gayam	100 %	2 Unit	100 %	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	20.000.000,00
7	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Sukoharjo , Sukoharjo , Gayam	100 %	2 Unit	100 %	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	10.000.000,00

7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								110.067.000,00					117.000.000,00
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sukoharjo , Sukoharjo , Gayam	100 %	12 Laporan	100 %	4.002.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	10.000.000,00
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sukoharjo , Sukoharjo , Gayam	100 %	12 Laporan	100 %	28.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	30.000.000,00
7	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sukoharjo , Sukoharjo , Gayam	100 %	1 Laporan	100 %	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	3.000.000,00
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													

						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sukoharjo , Sukoharjo , Gayam	100 %	12 Laporan	100 %	78.065.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	74.000.000,00
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								114.510.000,00					179.000.000,00
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sukoharjo , Sukoharjo , Gayam	100 %	4 Unit	100 %	9.900.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit	15.000.000,00
7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel													
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sukoharjo , Sukoharjo , Gayam	100 %	10 Unit	100 %	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit	6.000.000,00
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													

						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sukoharjo , Sukoharjo , Gayam	100 %	10 Unit	100 %	4.610.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	8.000.000,00
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sukoharjo , Sukoharjo , Gayam	100 %	1 Unit	100 %	100.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	150.000.000,00
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								1.073.790.000,00					1.000.000.000,00
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								1.049.790.000,00					960.000.000,00
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan													
						Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kab. Sukoharjo , Sukoharjo , Gayam	100 %	5 Lembaga Kemasyarakatan	100 %	10.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangun	5 Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000,00

																an di Kelurahan		
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan													
						Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kab. Sukoharjo, Sukoharjo, Gayam	100 %	6 Unit	100 %	690.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit	600.000.000,00
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan													
						Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kab. Sukoharjo, Sukoharjo, Gayam	100 %	57 Pokmas / Ormas	100 %	349.790.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	57 Pokmas / Ormas	350.000.000,00
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan								24.000.000,00					40.000.000,00
7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan													
						Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Cakupan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Kab. Sukoharjo, Sukoharjo	100 %	1 Lembaga Kemasyarakatan	100 %	19.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang	1 Lembaga Kemasyarakatan	30.000.000,00

						kelurahan		Tingkat Kecamatan	, Gayam					Alokasi Umum		Diselenggarakan		
7	01	03	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan													
						Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Cakupan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kab. Sukoharjo , Sukoharjo , Gayam	100 %	1 Lembaga Kemasyarakatan	100 %	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000,00
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								4.000.000,00					5.000.000,00
7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah								4.000.000,00					5.000.000,00
7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia													
						Persentase capaian ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Cakupan Koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Kab. Sukoharjo , Sukoharjo , Gayam	100 %	1 Laporan	100 %	4.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau	1 Laporan	5.000.000,00

															Kepolisian Negara Republik Indonesia		
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA								16.200.000,00					25.000.000,00
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa								16.200.000,00					25.000.000,00
7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa													
						Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kab. Sukoharjo , Sukoharjo , Gayam	100 %	1 Dokumen	100 %	16.200.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Dokumen	25.000.000,00
					Kelurahan Joho								1.290.677.000,00					1.541.340.000,00
7					UNSUR KEWILAYAHAN								1.290.677.000,00					1.541.340.000,00
7	01				KECAMATAN								1.290.677.000,00					1.541.340.000,00
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								349.789.000,00					511.340.000,00
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								66.840.000,00					66.840.000,00
7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD													

						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Sukoharjo, Sukoharjo, Joho	100 %	20 Dokumen	100 %	66.840.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	20 Dokumen	66.840.000,00
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								46.306.000,00					105.500.000,00
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Sukoharjo, Sukoharjo, Joho	100 %	1 Paket	100 %	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.000.000,00
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Sukoharjo, Sukoharjo, Joho	100 %	1 Paket	100 %	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	5.000.000,00
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Sukoharjo, Sukoharjo, Kenep	100 %	4 Paket	100 %	30.800.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang	4 Paket	80.000.000,00

						daerah								Umum		Disediakan		
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Sukoharjo , Sukoharjo , Joho	100 %	1 Paket	100 %	2.006.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengganda an yang Disediakan	1 Paket	10.000.000,00
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Sukoharjo , Sukoharjo , Joho	100 %	240 Dokumen	100 %	2.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	240 Dokumen	2.500.000,00
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Sukoharjo , Sukoharjo , Joho	100 %	30 Laporan	100 %	1.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyelengg araan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	3.000.000,00
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								33.153.000,00					22.000.000,00

7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel												
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Sukoharjo , Sukoharjo , Joho	100 %	16 Unit	100 %	7.550.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	16 Unit	10.000.000,00
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya												
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Sukoharjo , Sukoharjo , Joho	100 %	8 Unit	100 %	18.590.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	2.000.000,00
7	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya												
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Sukoharjo , Sukoharjo , Joho	100 %	2 Unit	100 %	7.013.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	10.000.000,00
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								117.095.000,00					138.000.000,00
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat												

						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sukoharjo , Sukoharjo , Joho	100 %	120 Laporan	100 %	4.800.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	120 Laporan	10.000.000,00
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sukoharjo , Sukoharjo , Joho	100 %	12 Laporan	100 %	31.700.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	30.000.000,00
7	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sukoharjo , Sukoharjo , Joho	100 %	1 Laporan	100 %	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	3.000.000,00
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Kab. Sukoharjo , Sukoharjo	100 %	12 Laporan	100 %	80.595.000,00	Dana Transfer Umum-Dana		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	12 Laporan	95.000.000,00

						pemerintah daerah	Disediakan	Pemerintahan Daerah	, Joho					Alokasi Umum		Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								86.395.000,00					179.000.000,00
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sukoharjo , Sukoharjo , Joho	100 %	4 Unit	100 %	6.895.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit	15.000.000,00
7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel													
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sukoharjo , Sukoharjo , Joho	100 %	10 Unit	100 %	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit	6.000.000,00
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													

						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sukoharjo , Sukoharjo , Joho	100 %	7 Unit	100 %	4.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit	8.000.000,00
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sukoharjo , Sukoharjo , Joho	100 %	1 Unit	100 %	75.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	150.000.000,00
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								925.000.000,00					1.000.000.000,00
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								895.000.000,00					960.000.000,00
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan													
						Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kab. Sukoharjo , Sukoharjo , Joho	100 %	3 Lembaga Kemasyarakatan	100 %	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangun	3 Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000,00

																an di Kelurahan		
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan													
						Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kab. Sukoharjo, Sukoharjo, Joho	100 %	8 Unit	100 %	640.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit	600.000.000,00
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan													
						Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kab. Sukoharjo, Sukoharjo, Joho	100 %	36 Pokmas / Ormas	100 %	250.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	36 Pokmas / Ormas	350.000.000,00
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan								30.000.000,00					40.000.000,00
7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan													
						Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Cakupan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Kab. Sukoharjo, Sukoharjo	100 %	1 Lembaga Kemasyarakatan	100 %	25.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang	1 Lembaga Kemasyarakatan	30.000.000,00

						kelurahan		Tingkat Kecamatan	, Joho					Alokasi Umum		Diselenggarakan		
7	01	03	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan													
						Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Cakupan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kab. Sukoharjo , Sukoharjo , Joho	100 %	1 Lembaga Kemasyarakatan	100 %	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000,00
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								4.000.000,00					5.000.000,00
7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah								4.000.000,00					5.000.000,00
7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia													
						Persentase capaian ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Cakupan Koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Kab. Sukoharjo , Sukoharjo , Joho	100 %	12 Laporan	100 %	4.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau	12 Laporan	5.000.000,00

															Kepolisian Negara Republik Indonesia		
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA								11.888.000,00					25.000.000,00
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa								11.888.000,00					25.000.000,00
7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa													
						Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kab. Sukoharjo , Sukoharjo , Joho	100 %	1 Dokumen	100 %	11.888.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Dokumen	25.000.000,00
					Kelurahan Jetis								1.290.400.000,00					1.549.340.000,00
7					UNSUR KEWILAYAHAN								1.290.400.000,00					1.549.340.000,00
7	01				KECAMATAN								1.290.400.000,00					1.549.340.000,00
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								290.400.000,00					519.340.000,00
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								66.840.000,00					66.840.000,00
7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD													

						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Sukoharjo, Sukoharjo, Jetis	100 %	3 Dokumen	100 %	66.840.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3 Dokumen	66.840.000,00
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								55.644.000,00					105.500.000,00
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Sukoharjo, Sukoharjo, Jetis	100 %	1 Paket	100 %	6.995.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.000.000,00
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Sukoharjo, Sukoharjo, Jetis	100 %	1 Paket	100 %	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	5.000.000,00
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Sukoharjo, Sukoharjo, Jetis	100 %	5 Paket	100 %	33.364.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang	5 Paket	80.000.000,00

						daerah								Umum		Disediakan		
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Sukoharjo , Sukoharjo , Jetis	100 %	2 Paket	100 %	5.005.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengganda an yang Disediakan	2 Paket	10.000.000,00
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Sukoharjo , Sukoharjo , Jetis	100 %	1 Dokumen	100 %	2.280.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	2.500.000,00
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Sukoharjo , Sukoharjo , Jetis	100 %	1 Laporan	100 %	3.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyelengg araan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	3.000.000,00
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								7.000.000,00					30.000.000,00

7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel												
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Sukoharjo , Sukoharjo , Jetis	100 %	1 Unit	100 %	7.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	10.000.000,00
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya												
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Sukoharjo , Sukoharjo , Jetis	100 %	2 Unit	100 %	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	20.000.000,00
7	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya												
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Sukoharjo , Sukoharjo , Jetis	100 %	2 Unit	100 %	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	0,00
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								138.616.000,00					138.000.000,00
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat												

						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sukoharjo , Sukoharjo , Jetis	100 %	3 Laporan	100 %	10.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3 Laporan	10.000.000,00
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sukoharjo , Sukoharjo , Jetis	100 %	3 Laporan	100 %	23.760.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	30.000.000,00
7	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sukoharjo , Sukoharjo , Jetis	100 %	1 Laporan	100 %	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	3.000.000,00
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Kab. Sukoharjo , Sukoharjo	100 %	5 Laporan	100 %	104.856.000,00	Dana Transfer Umum-Dana		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	5 Laporan	95.000.000,00

						pemerintah daerah	Disediakan	Pemerintahan Daerah	, Jetis					Alokasi Umum		Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								22.300.000,00					179.000.000,00
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sukoharjo , Sukoharjo , Jetis	100 %	2 Unit	100 %	16.800.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	15.000.000,00
7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel													
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sukoharjo , Sukoharjo , Jetis	100 %	10 Unit	100 %	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit	6.000.000,00
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													

						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sukoharjo , Sukoharjo , Jetis	100 %	2 Unit	100 %	5.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	8.000.000,00
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sukoharjo , Sukoharjo , Jetis	100 %	1 Unit	100 %	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	150.000.000,00
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								980.000.000,00					1.000.000.000,00
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								950.000.000,00					960.000.000,00
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan													
						Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kab. Sukoharjo , Sukoharjo , Jetis	100 %	4 Lembaga Kemasyarakatan	100 %	10.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangun	4 Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000,00

																an di Kelurahan		
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan													
						Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kab. Sukoharjo, Sukoharjo, Jetis	100 %	3 Unit	100 %	690.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	600.000.000,00
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan													
						Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kab. Sukoharjo, Sukoharjo, Jetis	100 %	10 Pokmas / Ormas	100 %	250.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	10 Pokmas / Ormas	350.000.000,00
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan								30.000.000,00					40.000.000,00
7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan													
						Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Cakupan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Kab. Sukoharjo, Sukoharjo	100 %	4 Lembaga Kemasyarakatan	100 %	25.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang	4 Lembaga Kemasyarakatan	30.000.000,00

						kelurahan		Tingkat Kecamatan	, Jetis					Alokasi Umum		Diselenggarakan		
7	01	03	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan													
						Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Cakupan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kab. Sukoharjo , Sukoharjo , Jetis	100 %	3 Lembaga Kemasyarakatan	100 %	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	3 Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000,00
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								4.000.000,00					5.000.000,00
7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah								4.000.000,00					5.000.000,00
7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia													
						Persentase capaian ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Cakupan Koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Kab. Sukoharjo , Sukoharjo , Jetis	100 %	3 Laporan	100 %	4.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau	3 Laporan	5.000.000,00

															Kepolisian Negara Republik Indonesia		
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA								16.000.000,00					25.000.000,00
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa								16.000.000,00					25.000.000,00
7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa													
						Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kab. Sukoharjo , Sukoharjo , Jetis	100 %	5 Dokumen	100 %	16.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	5 Dokumen	25.000.000,00
					Kelurahan Combongan								1.282.040.000,00					1.537.340.000,00
6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN								7.000.000,00					11.000.000,00
6	01				INSPEKTORAT DAERAH								7.000.000,00					11.000.000,00
6	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								7.000.000,00					11.000.000,00
6	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								7.000.000,00					5.000.000,00
6	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													

						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Sukoharjo, Sukoharjo, Combongan	100 %	1 Paket	100 %	7.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.000.000,00
6	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								0,00					6.000.000,00
6	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel													
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sukoharjo, Sukoharjo, Combongan	100 %	3 Unit	100 %	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Mebel yang Dipelihara	3 Unit	6.000.000,00
7					UNSUR KEWILAYAHAN								1.275.040.000,00					1.526.340.000,00
7	01				KECAMATAN								1.275.040.000,00					1.526.340.000,00
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								259.635.000,00					496.340.000,00
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								66.840.000,00					66.840.000,00
7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD													
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Sukoharjo, Sukoharjo, Combongan	100 %	12 Dokumen	100 %	66.840.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	66.840.000,00

7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								53.845.000,00				100.500.000,00
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga												
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Sukoharjo, Sukoharjo, Combongan	100 %	1 Paket	100 %	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	5.000.000,00
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor												
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Sukoharjo, Sukoharjo, Combongan	100 %	4 Paket	100 %	37.485.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	80.000.000,00
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan												
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Sukoharjo, Sukoharjo, Combongan	100 %	2 Paket	100 %	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengganda an yang Disediakan	2 Paket	10.000.000,00
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan												
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Sukoharjo, Sukoharjo, Combong	100 %	3 Dokumen	100 %	3.360.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	3 Dokumen	2.500.000,00

									an							Undangan yang Disediakan		
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Sukoharjo, Sukoharjo, Combongan	100 %	12 Laporan	100 %	3.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	3.000.000,00
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								13.000.000,00					40.000.000,00
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel													
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Sukoharjo, Sukoharjo, Combongan	100 %	2 Unit	100 %	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	10.000.000,00
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Kab. Sukoharjo, Sukoharjo, Combong	100 %	1 Unit	100 %	10.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	20.000.000,00

								Pemerintah Daerah	an									
7	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Sukoharjo , Sukoharjo , Combong an	100 %	3 Unit	100 %	3.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	10.000.000,00
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								108.100.000,00					116.000.000,00
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sukoharjo , Sukoharjo , Combong an	100 %	4 Laporan	100 %	10.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	10.000.000,00
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sukoharjo , Sukoharjo , Combong an	100 %	12 Laporan	100 %	23.900.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	30.000.000,00

7	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor												
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sukoharjo , Sukoharjo , Combongan	100 %	1 Laporan	100 %	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	3.000.000,00
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor												
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sukoharjo , Sukoharjo , Combongan	100 %	12 Laporan	100 %	74.200.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	73.000.000,00
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								17.850.000,00					173.000.000,00
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan												
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sukoharjo , Sukoharjo , Combongan	100 %	4 Unit	100 %	12.850.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	4 Unit	15.000.000,00

																dibayarkan Pajaknya		
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sukoharjo , Sukoharjo , Combong an	100 %	7 Unit	100 %	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit	8.000.000,00
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direha bilitasi	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sukoharjo , Sukoharjo , Combong an	100 %	1 Unit	100 %	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilita si	1 Unit	150.000.000,00
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								1.000.017.000,00					1.000.000.000,00
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								962.267.000,00					960.000.000,00
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan													

						Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kab. Sukoharjo, Sukoharjo, Combongan	100 %	6 Lembaga Kemasyarakatan	100 %	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000,00
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan													
						Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kab. Sukoharjo, Sukoharjo, Combongan	100 %	12 Unit	100 %	672.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	600.000.000,00
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan													
						Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kab. Sukoharjo, Sukoharjo, Combongan	100 %	14 Pokmas / Ormas	100 %	285.267.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di	14 Pokmas / Ormas	350.000.000,00

																Kelurahan		
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan								37.750.000,00					40.000.000,00
7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan													
						Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Cakupan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kab. Sukoharjo, Sukoharjo, Combongan	100 %	2 Lembaga Kemasyarakatan	100 %	30.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2 Lembaga Kemasyarakatan	30.000.000,00
7	01	03	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan													
						Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Cakupan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kab. Sukoharjo, Sukoharjo, Combongan	100 %	1 Lembaga Kemasyarakatan	100 %	7.750.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000,00
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								4.000.000,00					5.000.000,00
7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah								4.000.000,00					5.000.000,00
7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia													

						Persentase capaian ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Cakupan Koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Kab. Sukoharjo, Sukoharjo, Combongan	100 %	4 Laporan	100 %	4.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	4 Laporan	5.000.000,00
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA								11.388.000,00					25.000.000,00
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa								11.388.000,00					25.000.000,00
7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa													
						Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kab. Sukoharjo, Sukoharjo, Combongan	100 %	1 Dokumen	100 %	11.388.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagu	1 Dokumen	25.000.000,00

																naan Aset Desa		
					Kelurahan Kriwen								1.290.115.000,00					1.560.340.000,00
7					UNSUR KEWILAYAHAN								1.290.115.000,00					1.560.340.000,00
7	01				KECAMATAN								1.290.115.000,00					1.560.340.000,00
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								276.035.000,00					530.340.000,00
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								66.840.000,00					66.840.000,00
7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD													
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Sukoharjo, Sukoharjo, Kriwen	100 %	12 Dokumen	100 %	66.840.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	66.840.000,00
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								56.300.000,00					105.500.000,00
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Sukoharjo, Sukoharjo, Kriwen	100 %	1 Paket	100 %	7.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.000.000,00
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													

						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Sukoharjo , Sukoharjo , Kriwen	100 %	1 Paket	100 %	10.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	5.000.000,00
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Sukoharjo , Sukoharjo , Kriwen	100 %	4 Paket	100 %	26.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	80.000.000,00
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Sukoharjo , Sukoharjo , Kriwen	100 %	2 Paket	100 %	10.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengganda an yang Disediakan	2 Paket	10.000.000,00
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Sukoharjo , Sukoharjo , Kriwen	100 %	4 Dokumen	100 %	1.800.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	2.500.000,00

7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD												
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Sukoharjo , Sukoharjo , Kriwen	100 %	20 Laporan	100 %	1.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	3.000.000,00
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								11.000.000,00					40.000.000,00
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel													
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Sukoharjo , Sukoharjo , Kriwen	100 %	0 Unit	100 %	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit	10.000.000,00
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Sukoharjo , Sukoharjo , Kriwen	100 %	1 Unit	100 %	11.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	20.000.000,00
7	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													

						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Sukoharjo , Sukoharjo , Kriwen	100 %	0 Unit	100 %	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	10.000.000,00
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								123.920.000,00					139.000.000,00
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sukoharjo , Sukoharjo , Kriwen	100 %	3 Laporan	100 %	10.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3 Laporan	10.000.000,00
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sukoharjo , Sukoharjo , Kriwen	100 %	12 Laporan	100 %	18.300.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	30.000.000,00
7	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor													

						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sukoharjo , Sukoharjo , Kriwen	100 %	0 Laporan	100 %	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Laporan	3.000.000,00
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sukoharjo , Sukoharjo , Kriwen	100 %	12 Laporan	100 %	95.620.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	96.000.000,00
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								17.975.000,00					179.000.000,00
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sukoharjo , Sukoharjo , Kriwen	100 %	4 Unit	100 %	13.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan	4 Unit	15.000.000,00

																Pajaknya		
7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel													
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sukoharjo , Sukoharjo , Kriwen	100 %	0 Unit	100 %	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Mebel yang Dipelihara	0 Unit	6.000.000,00
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sukoharjo , Sukoharjo , Kriwen	100 %	3 Unit	100 %	4.975.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	8.000.000,00
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Kab. Sukoharjo , Sukoharjo , Kriwen	100 %	0 Unit	100 %	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/	0 Unit	150.000.000,00

								Daerah								Direhabilitasi		
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								997.580.000,00					1.000.000.000,00
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								967.580.000,00					960.000.000,00
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan													
						Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kab. Sukoharjo, Sukoharjo, Kriwen	100 %	6 Lembaga Kemasyarakatan	100 %	10.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000,00
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan													
						Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kab. Sukoharjo, Sukoharjo, Kriwen	100 %	7 Unit	100 %	640.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7 Unit	600.000.000,00
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan													

						Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kab. Sukoharjo, Sukoharjo, Kriwen	100 %	44 Pokmas / Ormas	100 %	317.580.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	44 Pokmas / Ormas	350.000.000,00
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan								30.000.000,00					40.000.000,00
7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan													
						Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Cakupan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kab. Sukoharjo, Sukoharjo, Kriwen	100 %	1 Lembaga Kemasyarakatan	100 %	25.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	1 Lembaga Kemasyarakatan	30.000.000,00
7	01	03	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan													
						Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Cakupan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kab. Sukoharjo, Sukoharjo, Kriwen	100 %	1 Lembaga Kemasyarakatan	100 %	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000,00
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								4.000.000,00					5.000.000,00
7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah								4.000.000,00					5.000.000,00
7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia													

						Persentase capaian ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Cakupan Koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Kab. Sukoharjo , Sukoharjo , Kriwen	100 %	1 Laporan	100 %	4.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 Laporan	5.000.000,00
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA								12.500.000,00					25.000.000,00
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa								12.500.000,00					25.000.000,00
7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa													
						Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kab. Sukoharjo , Sukoharjo , Kriwen	100 %	1 Dokumen	100 %	12.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagu	1 Dokumen	25.000.000,00

																naan Aset Desa		
					Kelurahan Bulakan								1.400.380.000,00					1.579.340.000,00
7					UNSUR KEWILAYAHAN								1.400.380.000,00					1.579.340.000,00
7	01				KECAMATAN								1.400.380.000,00					1.579.340.000,00
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								371.510.000,00					549.340.000,00
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								66.840.000,00					66.840.000,00
7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD													
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Sukoharjo, Sukoharjo, Bulakan	100 %	12 Dokumen	100 %	66.840.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	66.840.000,00
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								44.760.000,00					105.500.000,00
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Sukoharjo, Sukoharjo, Bulakan	100 %	1 Paket	100 %	4.200.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.000.000,00
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													

						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Sukoharjo , Sukoharjo , Bulakan	100 %	1 Paket	100 %	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	5.000.000,00
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Sukoharjo , Sukoharjo , Bulakan	100 %	4 Paket	100 %	30.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	80.000.000,00
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Sukoharjo , Sukoharjo , Bulakan	100 %	2 Paket	100 %	1.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengganda an yang Disediakan	2 Paket	10.000.000,00
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Sukoharjo , Sukoharjo , Bulakan	100 %	24 Dokumen	100 %	1.560.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen	2.500.000,00

7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD												
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Sukoharjo , Sukoharjo , Bulakan	100 %	20 Laporan	100 %	3.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	3.000.000,00
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								0,00					40.000.000,00
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel													
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Sukoharjo , Sukoharjo , Bulakan	100 %	2 Unit	100 %	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	10.000.000,00
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Sukoharjo , Sukoharjo , Bulakan	100 %	2 Unit	100 %	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	20.000.000,00
7	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													

						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Sukoharjo , Sukoharjo , Bulakan	100 %	2 Unit	100 %	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	10.000.000,00
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								147.270.000,00					158.000.000,00
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sukoharjo , Sukoharjo , Bulakan	100 %	4 Laporan	100 %	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	10.000.000,00
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sukoharjo , Sukoharjo , Bulakan	100 %	3 Laporan	100 %	20.950.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	30.000.000,00
7	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor													

						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sukoharjo , Sukoharjo , Bulakan	100 %	1 Laporan	100 %	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	3.000.000,00
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sukoharjo , Sukoharjo , Bulakan	100 %	12 Laporan	100 %	121.320.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	115.000.000,00
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								112.640.000,00					179.000.000,00
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sukoharjo , Sukoharjo , Bulakan	100 %	4 Unit	100 %	8.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan	4 Unit	15.000.000,00

																Pajaknya		
7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel													
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sukoharjo , Sukoharjo , Bulakan	100 %	10 Unit	100 %	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit	6.000.000,00
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sukoharjo , Sukoharjo , Bulakan	100 %	10 Unit	100 %	4.640.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	8.000.000,00
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Kab. Sukoharjo , Sukoharjo , Bulakrejo	100 %	1 Unit	100 %	100.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/	1 Unit	150.000.000,00

								Daerah								Direhabilitasi		
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								1.011.770.000,00					1.000.000.000,00
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								984.770.000,00					960.000.000,00
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan													
						Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kab. Sukoharjo, Sukoharjo, Bulakan	100 %	6 Lembaga Kemasyarakatan	100 %	10.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000,00
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan													
						Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kab. Sukoharjo, Sukoharjo, Bulakan	100 %	6 Unit	100 %	640.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit	600.000.000,00
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan													

						Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kab. Sukoharjo, Sukoharjo, Bulakan	100 %	52 Pokmas / Ormas	100 %	334.770.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	52 Pokmas / Ormas	350.000.000,00
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan								27.000.000,00					40.000.000,00
7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan													
						Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Cakupan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kab. Sukoharjo, Sukoharjo, Bulakan	100 %	1 Lembaga Kemasyarakatan	100 %	21.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	1 Lembaga Kemasyarakatan	30.000.000,00
7	01	03	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan													
						Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Cakupan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kab. Sukoharjo, Sukoharjo, Bulakan	100 %	4 Lembaga Kemasyarakatan	100 %	6.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	4 Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000,00
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								4.000.000,00					5.000.000,00
7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah								4.000.000,00					5.000.000,00
7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia													

						Persentase capaian ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Cakupan Koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Kab. Sukoharjo , Sukoharjo , Bulakan	100 %	1 Laporan	100 %	4.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 Laporan	5.000.000,00
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA								13.100.000,00					25.000.000,00
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa								13.100.000,00					25.000.000,00
7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa													
						Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kab. Sukoharjo , Sukoharjo , Bulakan	100 %	1 Dokumen	100 %	13.100.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagu	1 Dokumen	25.000.000,00

																naan Aset Desa		
					Kelurahan Dukuh								1.331.140.000,00					1.542.340.000,00
7					UNSUR KEWILAYAHAN								1.331.140.000,00					1.542.340.000,00
7	01				KECAMATAN								1.331.140.000,00					1.542.340.000,00
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								317.240.000,00					512.340.000,00
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								66.840.000,00					66.840.000,00
7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD													
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Sukoharjo, Sukoharjo, Dukuh	100 %	12 Dokumen	100 %	66.840.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	66.840.000,00
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								58.930.000,00					105.500.000,00
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Sukoharjo, Sukoharjo, Dukuh	100 %	1 Paket	100 %	9.845.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.000.000,00
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													

						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Sukoharjo , Sukoharjo , Dukuh	100 %	1 Paket	100 %	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	5.000.000,00
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Sukoharjo , Sukoharjo , Dukuh	100 %	4 Paket	100 %	35.130.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	80.000.000,00
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Sukoharjo , Sukoharjo , Dukuh	100 %	1 Paket	100 %	4.075.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengganda an yang Disediakan	1 Paket	10.000.000,00
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Sukoharjo , Sukoharjo , Dukuh	100 %	20 Dokumen	100 %	2.880.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	20 Dokumen	2.500.000,00

7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD												
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Sukoharjo , Sukoharjo , Dukuh	100 %	30 Laporan	100 %	2.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	3.000.000,00
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								8.250.000,00					40.000.000,00
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel													
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Sukoharjo , Sukoharjo , Dukuh	100 %	2 Unit	100 %	8.250.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	10.000.000,00
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Sukoharjo , Sukoharjo , Dukuh	100 %	2 Unit	100 %	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	20.000.000,00
7	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													

						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Sukoharjo , Sukoharjo , Dukuh	100 %	2 Unit	100 %	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	10.000.000,00
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								117.545.000,00					121.000.000,00
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sukoharjo , Sukoharjo , Dukuh	100 %	10 Laporan	100 %	8.600.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10 Laporan	10.000.000,00
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sukoharjo , Sukoharjo , Dukuh	100 %	12 Laporan	100 %	24.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	30.000.000,00
7	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor													

						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sukoharjo , Sukoharjo , Dukuh	100 %	1 Laporan	100 %	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	3.000.000,00
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sukoharjo , Sukoharjo , Dukuh	100 %	12 Laporan	100 %	84.945.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	78.000.000,00
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								65.675.000,00					179.000.000,00
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sukoharjo , Sukoharjo , Dukuh	100 %	4 Unit	100 %	10.375.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan	4 Unit	15.000.000,00

																Pajaknya		
7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel													
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sukoharjo , Sukoharjo , Dukuh	100 %	10 Unit	100 %	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit	6.000.000,00
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sukoharjo , Sukoharjo , Dukuh	100 %	10 Unit	100 %	5.300.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	8.000.000,00
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Kab. Sukoharjo , Sukoharjo , Dukuh	100 %	1 Unit	100 %	50.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/	1 Unit	150.000.000,00

								Daerah								Direhabilitasi		
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								996.400.000,00					1.000.000.000,00
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								966.900.000,00					960.000.000,00
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan													
						Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kab. Sukoharjo, Sukoharjo, Dukuh	100 %	8 Lembaga Kemasyarakatan	100 %	10.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	8 Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000,00
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan													
						Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kab. Sukoharjo, Sukoharjo, Dukuh	100 %	12 Unit	100 %	640.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	600.000.000,00
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan													

						Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kab. Sukoharjo, Sukoharjo, Dukuh	100 %	3 Pokmas / Ormas	100 %	316.900.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	350.000.000,00
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan								29.500.000,00					40.000.000,00
7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan													
						Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Cakupan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kab. Sukoharjo, Sukoharjo, Dukuh	100 %	1 Lembaga Kemasyarakatan	100 %	25.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	1 Lembaga Kemasyarakatan	30.000.000,00
7	01	03	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan													
						Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Cakupan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kab. Sukoharjo, Sukoharjo, Dukuh	100 %	1 Lembaga Kemasyarakatan	100 %	4.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000,00
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								4.500.000,00					5.000.000,00
7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah								4.500.000,00					5.000.000,00
7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia													

						Persentase capaian ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Cakupan Koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Kab. Sukoharjo , Sukoharjo , Dukuh	100 %	1 Laporan	100 %	4.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 Laporan	5.000.000,00
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA								13.000.000,00					25.000.000,00
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa								13.000.000,00					25.000.000,00
7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa													
						Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kab. Sukoharjo , Sukoharjo , Dukuh	100 %	1 Dokumen	100 %	13.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagu	1 Dokumen	25.000.000,00

																naan Aset Desa		
					Kelurahan Sukoharjo								1.322.740.000,00					1.575.340.000,00
7					UNSUR KEWILAYAHAN								1.322.740.000,00					1.575.340.000,00
7	01				KECAMATAN								1.322.740.000,00					1.575.340.000,00
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								299.644.000,00					555.340.000,00
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								66.840.000,00					66.840.000,00
7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD													
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Sukoharjo , Sukoharjo , Sukoharjo	100 %	12 Dokumen	100 %	66.840.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	66.840.000,00
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								51.434.000,00					105.500.000,00
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Sukoharjo , Sukoharjo , Sukoharjo	100 %	1 Paket	100 %	2.844.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.000.000,00
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													

						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Sukoharjo , Sukoharjo , Sukoharjo	100 %	1 Paket	100 %	3.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	5.000.000,00
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Sukoharjo , Sukoharjo , Sukoharjo	100 %	4 Paket	100 %	37.290.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	80.000.000,00
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Sukoharjo , Sukoharjo , Sukoharjo	100 %	2 Paket	100 %	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengganda an yang Disediakan	2 Paket	10.000.000,00
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Sukoharjo , Sukoharjo , Sukoharjo	100 %	24 Dokumen	100 %	1.800.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen	2.500.000,00

7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD												
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Sukoharjo , Sukoharjo , Sukoharjo	100 %	20 Laporan	100 %	1.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	3.000.000,00
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								0,00					40.000.000,00
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel													
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Sukoharjo , Sukoharjo , Sukoharjo	100 %	2 Unit	100 %	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	10.000.000,00
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Sukoharjo , Sukoharjo , Sukoharjo	100 %	2 Unit	100 %	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	20.000.000,00
7	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													

						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Sukoharjo , Sukoharjo , Sukoharjo	100 %	2 Unit	100 %	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	10.000.000,00
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								90.960.000,00					164.000.000,00
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sukoharjo , Sukoharjo , Sukoharjo	100 %	12 Laporan	100 %	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	10.000.000,00
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sukoharjo , Sukoharjo , Sukoharjo	100 %	12 Laporan	100 %	33.150.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	30.000.000,00
7	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor													

						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sukoharjo , Sukoharjo , Sukoharjo	100 %	1 Laporan	100 %	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	3.000.000,00
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sukoharjo , Sukoharjo , Sukoharjo	100 %	12 Laporan	100 %	52.810.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	121.000.000,00
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								90.410.000,00					179.000.000,00
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sukoharjo , Sukoharjo , Sukoharjo	100 %	4 Unit	100 %	8.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan	4 Unit	15.000.000,00

																Pajaknya		
7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel													
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sukoharjo , Sukoharjo , Sukoharjo	100 %	10 Unit	100 %	3.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit	6.000.000,00
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sukoharjo , Sukoharjo , Sukoharjo	100 %	10 Unit	100 %	3.910.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	8.000.000,00
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sukoharjo , Sukoharjo , Sukoharjo	100 %	1 Unit	100 %	75.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	150.000.000,00

7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								1.014.096.000,00					990.000.000,00
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								985.096.000,00					950.000.000,00
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan													
						Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kab. Sukoharjo , Sukoharjo , Sukoharjo	100 %	5 Lembaga Kemasyarakatan	100 %	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan	0,00
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan													
						Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kab. Sukoharjo , Sukoharjo , Sukoharjo	100 %	6 Unit	100 %	640.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit	600.000.000,00
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan													
						Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kab. Sukoharjo , Sukoharjo , Sukoharjo	100 %	65 Pokmas / Ormas	100 %	340.096.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan	65 Pokmas / Ormas	350.000.000,00

																Masyarakat di Kelurahan		
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan								29.000.000,00					40.000.000,00
7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan													
						Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Cakupan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kab. Sukoharjo , Sukoharjo , Sukoharjo	100 %	1 Lembaga Kemasyarakatan	100 %	29.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	1 Lembaga Kemasyarakatan	30.000.000,00
7	01	03	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan													
						Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Cakupan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kab. Sukoharjo , Sukoharjo , Sukoharjo	100 %	4 Lembaga Kemasyarakatan	100 %	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	4 Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000,00
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								0,00					5.000.000,00
7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah								0,00					5.000.000,00
7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia													

						Persentase capaian ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Cakupan Koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Kab. Sukoharjo , Sukoharjo , Sukoharjo	100 %	1 Laporan	100 %	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 Laporan	5.000.000,00
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA								9.000.000,00					25.000.000,00
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa								9.000.000,00					25.000.000,00
7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa													
						Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kab. Sukoharjo , Sukoharjo , Sukoharjo	100 %	1 Dokumen	100 %	9.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagu	1 Dokumen	25.000.000,00

																naan Aset Desa		
					Kelurahan Bulakrejo								1.254.260.000,00					1.558.340.000,00
7					UNSUR KEWILAYAHAN								1.254.260.000,00					1.558.340.000,00
7	01				KECAMATAN								1.254.260.000,00					1.558.340.000,00
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								267.310.000,00					528.340.000,00
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								66.840.000,00					66.840.000,00
7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD													
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Sukoharjo, Sukoharjo, Bulakrejo	100 %	6 Dokumen	100 %	66.840.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	6 Dokumen	66.840.000,00
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								44.260.000,00					105.500.000,00
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Sukoharjo, Sukoharjo, Bulakrejo	100 %	1 Paket	100 %	7.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.000.000,00
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													

						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Sukoharjo , Sukoharjo , Bulakrejo	100 %	1 Paket	100 %	7.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	5.000.000,00
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Sukoharjo , Sukoharjo , Bulakrejo	100 %	4 Paket	100 %	21.820.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	80.000.000,00
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Sukoharjo , Sukoharjo , Bulakrejo	100 %	2 Paket	100 %	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengganda an yang Disediakan	2 Paket	10.000.000,00
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Sukoharjo , Sukoharjo , Bulakrejo	100 %	2 Dokumen	100 %	1.440.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2.500.000,00

7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD												
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Sukoharjo , Sukoharjo , Bulakrejo	100 %	2 Laporan	100 %	2.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	3.000.000,00
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								17.520.000,00					40.000.000,00
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel													
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Sukoharjo , Sukoharjo , Bulakrejo	100 %	2 Unit	100 %	17.520.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	10.000.000,00
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Sukoharjo , Sukoharjo , Bulakrejo	100 %	2 Unit	100 %	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	20.000.000,00
7	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													

						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Sukoharjo , Sukoharjo , Bulakrejo	100 %	2 Unit	100 %	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	10.000.000,00
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								126.460.000,00					137.000.000,00
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sukoharjo , Sukoharjo , Bulakrejo	100 %	1 Laporan	100 %	7.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	10.000.000,00
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sukoharjo , Sukoharjo , Bulakrejo	100 %	1 Laporan	100 %	24.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	30.000.000,00
7	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor													

						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sukoharjo , Sukoharjo , Bulakrejo	100 %	1 Laporan	100 %	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	3.000.000,00
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sukoharjo , Sukoharjo , Bulakrejo	100 %	5 Laporan	100 %	95.460.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	94.000.000,00
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								12.230.000,00					179.000.000,00
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sukoharjo , Sukoharjo , Bulakrejo	100 %	4 Unit	100 %	8.620.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan	4 Unit	15.000.000,00

																Pajaknya		
7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel													
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sukoharjo , Sukoharjo , Bulakrejo	100 %	10 Unit	100 %	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit	6.000.000,00
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sukoharjo , Sukoharjo , Bulakrejo	100 %	5 Unit	100 %	3.610.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	8.000.000,00
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sukoharjo , Sukoharjo , Bulakrejo	100 %	1 Unit	100 %	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	150.000.000,00

7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								971.450.000,00					1.000.000.000,00
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								949.450.000,00					960.000.000,00
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan													
						Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kab. Sukoharjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	5 Lembaga Kemasyarakatan	100 %	8.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000,00
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan													
						Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kab. Sukoharjo, Sukoharjo, Bulakrejo	100 %	6 Unit	100 %	640.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit	600.000.000,00
						Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kab. Sukoharjo, Sukoharjo, Bulakrejo	100 %	10 Unit	100 %	640.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	600.000.000,00
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan													

						Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kab. Sukoharjo, Sukoharjo, Bulakrejo	100 %	77 Pokmas / Ormas	100 %	301.450.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	77 Pokmas / Ormas	350.000.000,00
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan								22.000.000,00					40.000.000,00
7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan													
						Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Cakupan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kab. Sukoharjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sukoharjo, Sukoharjo, Bulakrejo	100 %	1 Lembaga Kemasyarakatan	100 %	20.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	1 Lembaga Kemasyarakatan	30.000.000,00
						Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Cakupan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kab. Sukoharjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sukoharjo,	100 %	1 Lembaga Kemasyarakatan	100 %	20.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	1 Lembaga Kemasyarakatan	30.000.000,00

									Sukoharjo , Bulakrejo									
7	01	03	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan													
						Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Cakupan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kab. Sukoharjo , Sukoharjo , Bulakrejo	100 %	1 Lembaga Kemasyarakatan	100 %	2.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000,00
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								2.000.000,00					5.000.000,00
7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah								2.000.000,00					5.000.000,00
7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia													
						Persentase capaian ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Cakupan Koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Kab. Sukoharjo , Sukoharjo , Bulakrejo	100 %	1 Laporan	100 %	2.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	1 Laporan	5.000.000,00

															dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA								13.500.000,00					25.000.000,00
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa								13.500.000,00					25.000.000,00
7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa													
						Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kab. Sukoharjo , Sukoharjo , Bulakrejo	100 %	1 Dokumen	100 %	13.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Dokumen	25.000.000,00
					Kelurahan Sonorejo								1.478.260.000,00					1.590.340.000,00
7					UNSUR KEWILAYAHAN								1.478.260.000,00					1.590.340.000,00
7	01				KECAMATAN								1.478.260.000,00					1.590.340.000,00
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								393.205.000,00					560.340.000,00
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								66.840.000,00					66.840.000,00
7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD													

						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Sukoharjo, Sukoharjo, Sonorejo	100 %	12 Dokumen	100 %	66.840.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	66.840.000,00
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								42.412.000,00					105.500.000,00
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Sukoharjo, Sukoharjo, Sonorejo	100 %	1 Paket	100 %	6.990.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.000.000,00
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Sukoharjo, Sukoharjo, Sonorejo	100 %	1 Paket	100 %	10.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	5.000.000,00
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Sukoharjo, Sukoharjo, Sonorejo	100 %	4 Paket	100 %	19.112.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang	4 Paket	80.000.000,00

						daerah								Umum		Disediakan		
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Sukoharjo , Sukoharjo , Sonorejo	100 %	1 Paket	100 %	3.010.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengganda an yang Disediakan	1 Paket	10.000.000,00
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Sukoharjo , Sukoharjo , Sonorejo	100 %	27 Dokumen	100 %	1.800.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	27 Dokumen	2.500.000,00
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Sukoharjo , Sukoharjo , Sonorejo	100 %	20 Laporan	100 %	1.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyelengg araan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	3.000.000,00
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								14.000.000,00					40.000.000,00

7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel												
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Sukoharjo , Sukoharjo , Sonorejo	100 %	2 Unit	100 %	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	10.000.000,00
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya												
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Sukoharjo , Sukoharjo , Sonorejo	100 %	2 Unit	100 %	14.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	20.000.000,00
7	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya												
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Sukoharjo , Sukoharjo , Sonorejo	100 %	2 Unit	100 %	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	10.000.000,00
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								146.453.000,00					169.000.000,00
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat												

						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sukoharjo , Sukoharjo , Sonorejo	100 %	12 Laporan	100 %	8.203.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	10.000.000,00
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sukoharjo , Sukoharjo , Sonorejo	100 %	12 Laporan	100 %	21.400.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	30.000.000,00
7	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sukoharjo , Sukoharjo , Sonorejo	100 %	1 Laporan	100 %	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	3.000.000,00
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Kab. Sukoharjo , Sukoharjo	100 %	12 Laporan	100 %	116.850.000,00	Dana Transfer Umum-Dana		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	12 Laporan	126.000.000,00

						pemerintah daerah	Disediakan	Pemerintahan Daerah	, Sonorejo					Alokasi Umum		Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								123.500.000,00					179.000.000,00
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sukoharjo , Sukoharjo , Sonorejo	100 %	3 Unit	100 %	20.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit	15.000.000,00
7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel													
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sukoharjo , Sukoharjo , Sonorejo	100 %	10 Unit	100 %	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit	6.000.000,00
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													

						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sukoharjo , Sukoharjo , Sonorejo	100 %	10 Unit	100 %	3.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	8.000.000,00
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sukoharjo , Sukoharjo , Sonorejo	100 %	1 Unit	100 %	100.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	150.000.000,00
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								1.070.880.000,00					1.000.000.000,00
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								1.025.130.000,00					960.000.000,00
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan													
						Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kab. Sukoharjo , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sukoharjo , Sukoharjo , Sonorejo	100 %	6 Lembaga Kemasyarakatan	100 %	6.080.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangun	6 Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000,00

																an di Kelurahan		
						Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kab. Sukoharjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sukoharjo, Sukoharjo, Sonorejo	100 %	5 Lembaga Kemasyarakatan	100 %	6.080.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000,00
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan													
						Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kab. Sukoharjo, Sukoharjo, Sonorejo	100 %	10 Unit	100 %	680.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	600.000.000,00
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan													

						Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kab. Sukoharjo, Sukoharjo, Sonorejo	100 %	3 Pokmas / Ormas	100 %	339.050.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	350.000.000,00
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan								45.750.000,00					40.000.000,00
7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan													
						Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Cakupan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kab. Sukoharjo, Sukoharjo, Sonorejo	100 %	1 Lembaga Kemasyarakatan	100 %	40.750.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	1 Lembaga Kemasyarakatan	30.000.000,00
7	01	03	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan													
						Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Cakupan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kab. Sukoharjo, Sukoharjo, Sonorejo	100 %	1 Lembaga Kemasyarakatan	100 %	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000,00
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								2.000.000,00					5.000.000,00
7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah								2.000.000,00					5.000.000,00
7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia													

						Persentase capaian ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Cakupan Koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Kab. Sukoharjo , Sukoharjo , Sonorejo	100 %	1 Laporan	100 %	2.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 Laporan	5.000.000,00
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA								12.175.000,00					25.000.000,00
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa								12.175.000,00					25.000.000,00
7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa													
						Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kab. Sukoharjo , Sukoharjo , Sonorejo	100 %	1 Dokumen	100 %	12.175.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagu	1 Dokumen	25.000.000,00

																naan Aset Desa		
												TOTAL	**35.915.230.000,00**					**26.454.280.000,00**

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 merupakan panduan kerja bagi Kecamatan Sukoharjo selama 1 (satu) tahun ke depan. Rencana Kerja ini disusun berdasarkan kebutuhan Perangkat Daerah dan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun dalam rangka mendukung pencapaian program Kepala Daerah. Mendasarkan pada hal tersebut, pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 didasarkan dari Rencana Strategis Kecamatan Sukoharjo tahun 2021 – 2026. Guna pencapaian tujuan perencanaan pembangunan dalam 1 (satu) tahun ke depan. Penyusunan perencanaan pembangunan yang berkualitas akan menopang dalam mewujudkan pembangunan yang berkualitas terutama dalam mencapai visi dan misi Kepala Daerah.

Renja Perangkat Daerah Kecamatan Sukoharjo Tahun 2024 merupakan indikator dalam proses evaluasi laporan perencanaan atas kinerja satu tahun, sehingga dapat meminimalisir pelaksanaan kegiatan yang menyimpang dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2021-2026 sesuai dengan tupoksi Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo.

Sukoharjo, 2023

BUPATI SUKOHARJO,

ETIK SURYANI

PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
Jl. Dr. Muwardi No. 14 Sukoharjo Kode Pos. 57514
Telp./Fax. (0271) 593138
Website : www.dpp.sukoharjokab.go.id E-mail : dpp@sukoharjokab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR : 520/KPTS/ 6 /I/2024

TENTANG

RENCANA KINERJA PADA DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN

KABUPATEN SUKOHARJO

KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN KABUPATEN SUKOHARJO,

Menimbang :

a. bahwa sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pertanian Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026 perlu menyusun Rencana Kinerja pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara 2757);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tatacara Penyusunan Perencaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 200);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307) ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Rencana Kinerja pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan Pedoman Pelaksanan Program dan Kegiatan Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sukoharjo
pada tanggal : 2 Januari 2024
KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN SUKOHARJO



Ir. BAGAS WINDARYATNO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.

RENCANA KINERJA TAHUNAN
DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN SUKOHARJO

2024



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN

Jl. Dr. Muwardi No. 14 Telp/Fax. (0271) 593138, 593019
Web: dpp.sukoharjokab.go.id; email : dpp@sukoharjokab.go.id

S U K O H A R J O

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunianya Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo, telah dapat disusun sesuai dengan aturan yang berlaku.

Dokumen ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dalam sistem Akutanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah salah satu instrumentnya adalah Rencana Strategis. Perencanaan tahunan yang berpedoman pada Rencana Strategis tertuang dalam bentuk Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

Penyusunan Dokumen ini dimaksud sebagai bentuk pedoman Perencanaan Kinerja Tahunan pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk mewujudkan Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Semoga Dokumen ini bermanfaat serta dapat dijadikan bahan evaluasi penyelenggaraan pembangunan yang merupakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo.

Sukoharjo, Januari 2024

KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN SUKOHARJO

BAGAS WINDARYATNO, SP. M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19670115 198902 1 003

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita- cita bangsa bernegara serta terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Undang-undang No. 28 tahun 1999 tentang penyeleggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN mengamanatkan hal tersebut sebagai penegasan dari Tap MPR No.XI/MPR/1998 yang dalam implementasinya dipertegas dengan Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pemerintahan Daerah sebagai penyelenggara pemerintahan di daerah sesuai dengan Undang-undang No. 23 tahun 2014 berkewajiban untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih *(Clean Government),* dan mempertanggungjawabkannya melalui media Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Agar dapat memenuhi maksud tersebut, maka Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaen Sukoharjo menyusun Dokumen Rencana Kinerja Tahunan 2023 sebagai bentuk komitmen OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dalam pelaksanaan pembangunan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Penyusunan dokumen ini mengacu pada RPJMD 2021 – 2026 Kabupaten Sukoharjo dan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas

Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 - 2026.

Penyusunan dokumen RKT memperhatikan Peraturan Menteri Negara pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

B. Tugas Pokok dan Fungsi

Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo berdasar pada Peraturan Bupati Nomor ***50 tahun 2016*** tentang ***Penjabaran Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo***.

Tugas dan Fungsi

Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo adalah sebagai berikut :

1. **Tugas**

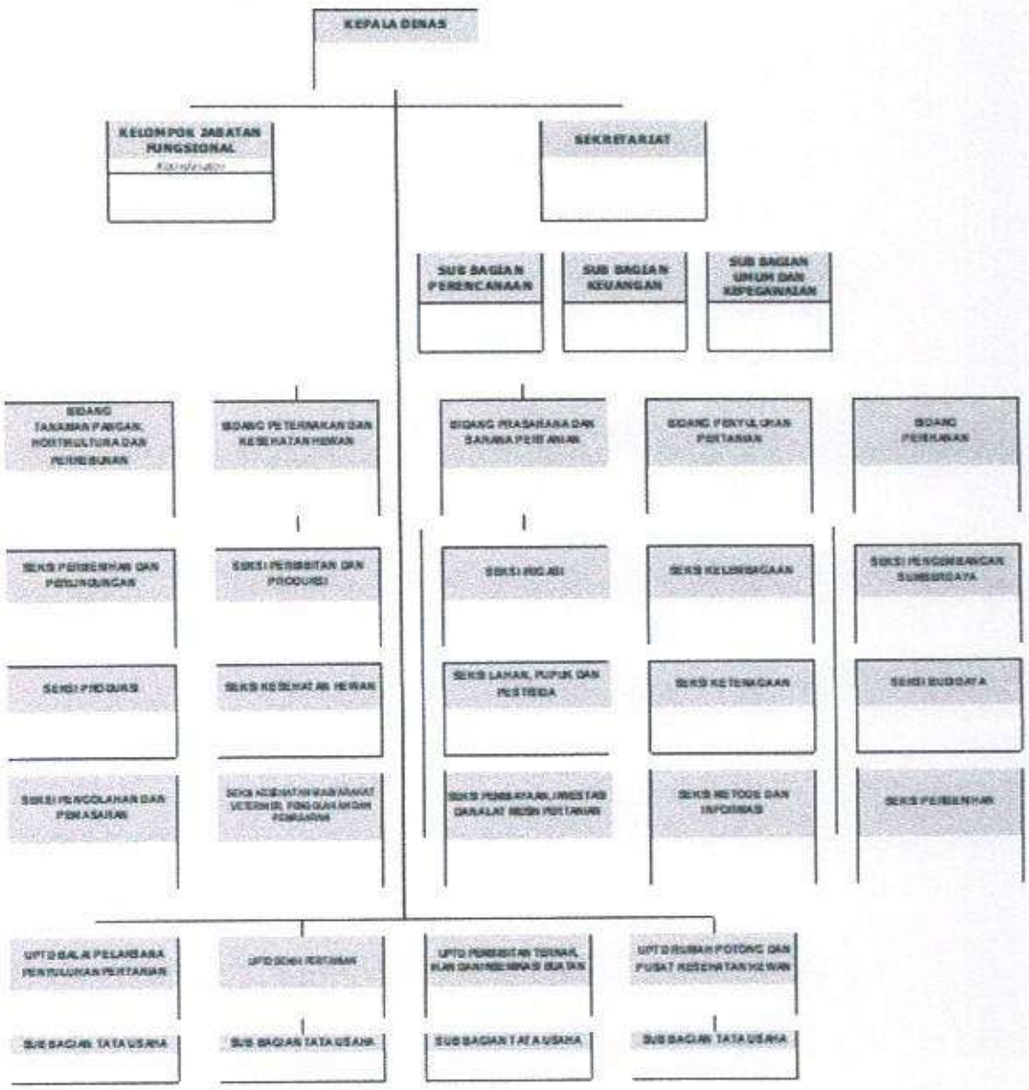
   Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pertanian dan perikanan.

2. **Fungsi**

   a. perumusan kebijakan Bupati di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, bidang peternakan dan kesehatan hewan, bidang prasarana dan sarana, bidang penyuluhan dan bidang perikanan;
   b. penyusunan program penyuluhan pertanian dan perikanan;
   c. pengembangan prasarana pertanian dan perikanan;
   d. pengawasan mutu, peredaran dan pengendalian penyediaan benih tanaman, benih/bibit ternak, hijauan pakan ternak dan bibit ikan;

e. pengawasan penggunaan sarana pertanian dan perikanan;
f. pembinaan produksi di bidang pertanian dan perikanan;
g. pengendalian dan penanggulangan Hektarma penyakit tanaman, penyakit hewan dan penyakit ikan;
h. pengendalian dan penanggulangan bencana alam di bidang pertanian dan perikanan;
i. pembinaan pengolahan

C. Susunan Organisasi



Gambar 1. Susunan Organisasi dan Tatalaksana Dinas Pertanian dan Perikanan

Pejabat struktural dalam struktur organisasi Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo sebanyak 123 jabatan, terdiri dari :

1. Pejabat Eselon II.b (Kepala Dinas)
2. Pejabat Eselon III.a (Sekretaris)
3. Pejabat Eselon III.b (Kepala Bidang) dengan jumlah 5 jabatan
4. Pejabat Eselon IV.a sebanyak 7 jabatan yang terdiri dari Kepala Sub Bagian di Sekretariat dengan jumlah 3 orang dan Kepala UPTD sebanyak 4 orang,
5. Pejabat Eselon IV.b sebanyak 4 jabatan yang terdiri dari Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Teknis sejumlah 4 jabatan;
6. Pejabat fungsional tertentu sebayak 37 jabatan yang tergabung dalam Kelompok Jabatan Fungsional khusus.

BAB II
RENCANA STRATEGIS ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

A. VISI DAN MISI KEPALA DAERAH

Telaahan terhadap visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih di Kabupaten Sukoharjo dalam hubungannya dengan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 - 2026, visi Kabupaten Sukoharjo adalah "MEWUJUDKAN MASYARAKAT SUKOHARJO YANG LEBIH MAKMUR"

Visi pembangunan daerah Kabupaten Sukoharjo tahun 2021-2026 merupakan keberlanjutan dari cita-cita pembangunan Kabupaten Sukoharjo tahun 2016-2021. Mengandung arti bahwa dalam lima tahun ke depan masyarakat Kabupaten Sukoharjo akan tercipta kondisi sejahtera, terpenuhi seluruh kebutuhan hidupnya baik sosial maupun ekonomi, secara lahir maupun batin. MAKMUR juga merupakan motto atau slogan Kabupaten Sukoharjo yaitu ***Maju, Aman, Konstitusional, Mantap, Unggul, dan Rapi.***

MAJU, Maju mempunyai pengertian bergerak kedepan menjadi lebih baik, tidak berhenti, tidak terlambat, mencapai tingkat peradaban yang lebih tinggi. Sebagai tugas panggilan dalam hidup. Dengan maju kita ingin tumbuh dan berkembang, dan selalu berpikr dan berusaha keras kearah peningkatan menjadi lebih baik.

AMAN, Keamanan merupakan salah satu unsur/syarat mutlak untuk dapat terlaksananya pembangunan. Tanpa stabilitas keamanan yang terpelihara secara mantap dan berkesinambungan, tidak mungkin kegiatan pembangunan dapat terlaksana dengan lancar.

KONSTITUSIONAL, Penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, maupun kemasyarakatan harus dilandasi hukum atau dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum.

MANTAP, Warga masyarakat dan segenap penyelenggara pemerintahan optimis dalam membangun Sukoharjo.

UNGGUL, Unggul mempunyai arti semangat berprestasi untuk selalu berusaha mencapai yang terbaik.

RAPI, Rapi mengandung pengertian *apik, baik, bersih, teratur ,tertib, beres.*

Dalam rangka upaya menuju pencapaian visi pembangunan daerah Kabupaten Sukoharjo tahun 2021-2026, ditetapkan misi pembangunan daerah yaitu:

1. **Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Percepatan Reformasi Birokrasi**

   Misi kesatu ini bertujuan untuk semakin mempercepat implementasi reformasi birokrasi secara optimal, yang pada periode sebelumnya telah terwujud dalam membaiknya tata kelola pemerintahan Kabupaten Sukoharjo.

   Reformasi birokrasi yang diharapkan kedepan adalah pada tiga dimensi utama yaitu pelayanan publik yang semakin dinamis, efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan, kapasitas kelembagaan, serta manajemen sumber daya manusia aparatur yang semakin baik. Pelayanan publik yang dinamis diwujudkan dengan membangun *open government* dan pemerintahan yang responsif. *Open government* dilakukan dengan perkuatan keterbukaan informasi publik, transparansi, partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta meningkatkan komunikasi dan serapan aspirasi publik.

   Sedangkan pemerintahan yang responsif tercermin dalam respon pemerintah kabupaten dalam menghadapi aduan dan persoalan riil masyarakat, dengan cepat dan tepat, baik dalam bentuk kebijakan maupun kegiatan. Pelayanan publik yang dinamis, terbuka, dan responsif diikat dalam satu tagline pelayanan yang mudah, murah, cepat, serta didukung inovasi dan teknologi informasi.

   Efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan tergambarkan dalam proses perencanaan, penganggaran, serta evaluasi pembangunan yang akuntabel. Manajemen pembangunan Kabupaten Sukoharjo kedepan tidak hanya

fokus pada kerja tetapi kinerja, dan berorientasi pada hasil (*outcome*). Untuk itu perlu juga dilakukan pengawasan dalam prosesnya, sejak dimulainya proses perencanaan, implementasi hingga evaluasi.

Agar dapat melaksanakan manajemen pemerintahan yang baik dan bersih maka dibutuhkan kelembagaan/organisasi yang tepat dan didukung dengan penataan sistem manajemen sumberdaya manusia aparatur yang baik. Manajemen sumber daya manusia aparatur yang baik terejawantahkan dalam bentuk integritas aparatur yang dibangun melalui kompetensi dan etika menuju integritas pribadi dan institusi, mendorong birokrasi yang inovatif, dan dijamin dalam *quality assurance* aparatur.

2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas

Misi kedua mengarah pada kualitas dan daya saing sumberdaya manusia Sukoharjo, agar semakin sehat, pintar, berbudaya, dan lebih mencintai lingkungan. Era globalisasi yang semakin terbuka menuntut kualitas sumberdaya manusia yang mampu bersaing secara kompetitif dalam kompetensi dan kualifikasi. Bonus demografi yang saat ini telah dialami oleh Sukoharjo dapat dijadikan sebagai peluang sekaligus tantangan, bagaimana kedepan modal sosial ini akan menempatkan Sukoharjo sebagai salah satu daerah dengan sumberdaya manusia yang mampu bersaing. Sehingga diharapkan, dapat memberikan dampak pertumbuhan ekonomi yang semakin baik, dan menciptakan masyarakat Sukoharjo yang semakin sejahtera.

Tidak hanya tentang kualitas dan daya saing sumberdaya manusia yang diharapkan, namun juga bagaimana membentuk karakter masyarakat Sukoharjo yang semakin berbudaya. Di tengah arus keterbukaan informasi dunia yang nyata kemudian bagaimana masyarakat Sukoharjo tetap kuat menjaga etika dan

norma serta nilai budaya asli Sukoharjo, serta menjaga kearifan lokal sejak dini.

3. Memperkuat Perekonomian Rakyat Yang Berdaya Saing Tinggi

Misi ketiga ini mempunyai tujuan mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan insklusif. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang penting dalam melakukan pembangunan ekonomi yang terjadi pada suatu negara ataupun daerah. Pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan distribusi pendapatan yang merata sangat dibutuhkan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah diukur dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan laju pertumbuhannya atas dasar harga konstan. Pertumbuhan ekonomi yang cepat akan menimbulkan ketimpangan distribusi pendapatan. Hal ini disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang bersifat sentralisasi. Pada tahun 1999 pemerintah mengubah kebijakan sentralisasi menjadi desentralisasi dengan memberlakukan Otonomi Daerah. Hal tersebut memberikan harapan dalam upaya mengurangi tingkat kemiskinan dan ketimpangan antar daerah.

Misi ini adalah untuk mengarahkan kebijakan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam rangka menurunkan jumlah penduduk miskin, yang didukung oleh perekonomian daerah yang stabil, berkualitas, inklusif, dan menyebar. Program pengentasan kemiskinan difokuskan kepada kelompok sasaran utama, seperti petani pelaku UKM dan pekerja dan kelompok rentan lainnya. Program pengentasan kemisikinan tersebut perlu didukung oleh pertumbuhan ekonomi yang tersebar, inklusif, dan berkualitas, yakni pertumbuhan ekonomi yang menyebar di seluruh wilayah Sukoharjo, memperhitungkan kelestarian lingkungan dan keberlangsungan

ketersediaan sumber daya, melibatkan seluruh kelompok masyarakat dengan mengutamakan peran dan kontribusi kelompok masyarakat yang kurang beruntung, dan menghapus praktek ekonomi biaya tinggi.

4. Memperkuat Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan

Misi keempat mengarah kepada pembangunan infrastruktur akan terus dilaksanakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar, yang akan dilaksanakan dengan penguatan konektivitas, penyediaan akses perumahan, permukiman, air minum dan sanitasi yang layak, telekomunikasi dan transportasi yang aman dan memadai.

Pembangunan berwawasan lingkungan hidup dilakukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan meningkatkan kualitas hidup manusia. Untuk menjaga kelestarian lingkungan agar kualitas lingkungan hiudp tetap terjaga, pemànfaatan sumber daya alam harus dilakukan secara bijaksana, adil, efisien, dan bertanggungjawab serta lingkungan yang tangguh bencana.

5. Meningkatkan Kualitas Kehidupan Sosial dan Keagamaan

Misi ini menggambarkan sebuah kondisi yang ingin diciptakan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera, tercermin dari rasa aman dan nyaman yang dirasakan dalam kehidupan masyarakat. Kondisi yang tercipta merupakan manifestasi implementasi nilai-nilai religius dalam kehidupan masyarakat. Membangun masyarakat Sukoharjo yang religius, toleran, dan guyup ini adalah dengan menciptakan kondisi obyektif yang memungkinkan interaksi antar umat beragama untuk saling menghormati dan menghargai satu sama lain,

mendorong keberagaman, kebhinekaan, dan toleransi dalam kerangka kesatuan.

Upaya yang dilakukan antara lain dengan menguatkan pemahaman keberagaman dan kebhinekaan sejak usia dini, mengembangkan ruang-ruang publik untuk membangun komunikasi antar masyarakat melalui kegiatan seni dan rekreasi, serta mendorong kearifan lokal dalam bentuk gerakan-gerakan masyarakat termasuk gerakan gotong royong. Dalam misi ini terkandung tujuan untuk menciptakan kehidupan masyarakat Sukoharjo yang aman dan nyaman, tanpa ada konflik sosial maupun agama.

Dari kelima misi tersebut, **misi ketiga** sangat berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo. Tujuan Misi ini mempunyai untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan insklusif, dengan indikator kinerja Pertumbuhan Ekonomi, Angka Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Pendapatan Per Kapita. Sasaran yang ingin dicapai dalam tujuan ini adalah 1) Meningkatnya pertumbuhan produktivitas; dan 2) Meningkatnya kemandirian desa dengan program unggulan di sektor Pertanian adalah :

a. Pemberdayaan petani melalui model *Corporate Farming;*
b. Pemberian bantuan kepada Kelompok Wanita Tani (KWT);
c. Pembangunan, revitalisasi embung dan jaringan irigasi air tanah dalam sebagai sumber air irigasi pertanian;
d. Peningkatan produksi pertanian melalui pemeliharaan dan perluasan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT)/Jaringan Irigasi Desa (JIDES) dan Jalan Usaha Tani;
e. Memberikan bantuan Alat Mesin Pertanian (Alsintan), Bibit, Pupuk dan Pestisida;
f. Pengembangan pertanian organik dan pertanian terpadu;
g. Pengembangan Pasar Mitra Tani di setiap kecamatan.

B. TUJUAN DAN SASARAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun mendatang. Tujuan strategis ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis sehingga dapat mengarahkan perumusan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi. Berdasarkan tujuan yang akan ditetapkan, maka Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo akan dapat mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh lembaga dalam jangka waktu tertentu. Sasaran adalah salah satu dasar di dalam penilaian dan pemantauan kinerja sehingga merupakan alat pemicu bagi organisasi terhadap sesuatu yang harus dicapai.

Adapun tujuan, indikator tujuan, sasaran serta indikator sasaran dijabarkan dalam Tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pertanian dan Perikanan Tahun 2016-2021

No.	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1.	Memperkuat Perekonomian Masyarakat yang berdaya saing tinggi	Terwujudnya Pertumbuhan PDRB sektor pertanian dan perikanan	rata-rata Prosentase Pertumbuhan Produksi sektor Pertanian (%)	Meningkatnya Produktivitas Sektor Padi, Jagung, Kedelai dan Produksi pada Komoditas Pertanian Utama	Produktivitas padi (kw/ha)
			Prosentase Pertumbuhan Nilai produksi perikanan (%)		Produktivitas jagung (kw/ha)
			Prosentase Pertumbuhan Angka Konsumsi Ikan (%)		Produktivitas kedelai (kw/ha)
					Peningkatan Produksi Padi (Ton)
					Peningkatan Produksi Jagung (Ton)
					Peningkatan Produksi Kedelai (Ton)
					Peningkatan Produksi bawang merah (Ton)
					Peningkatan Produksi Cabe (Ton)
					Peningkatan Produksi Tebu
					Peningkatan Produksi Pisang
					Peningkatan Produksi Tembakau (Ton)

No.	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
				Meningkatnya Produksi Daging dan telur yang berkualitas	Peningkatan Produksi Daging (Ton)
					Peningkatan Produksi Daging Sapi (Ton)
					Peningkatan Produksi Daging Kambing (Ton)
					Peningkatan Produksi Daging Unggas (Ton)
					Prosentase Daging ASUH
				Meningkatnya Produksi Perikanan dan nilai produksi Ikan	Peningkatan Produksi Perikanan (Ton)
					Nilai Produksi Ikan (Rp. 000)
				Meningkatnya Angka Konsumsi Ikan	Peningkatan Angka Konsumsi Ikan

BAB III

KOMPONEN RENCANA KINERJA TAHUN 2024

Perencanaan kinerja ini merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (RENSTRA), yang akan dilaksanakan oleh organisasi Perangkat Daerah melalui berbagai kegiatan tahunan.

Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan Rencana Kinerja dilakukan seiring agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi organisasi Perangkat Daerah untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja organisasi Perangkat Daerah, pada Dokumen Rencana Kinerja Tahunan memuat informasi tentang : sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tahun 2023, indikator kinerja dan rencana tingkat capaian (target).

Terkait dengan hal tersebut di atas, Dokumen Rencana Kinerja Tahunan ini dalam pelaksanaannya yang dimaksud dengan :

1. Sasaran Strategis

   Sasaran Strategis yang dimaksud pada Rencana Kinerja Tahunan ini adalah sasaran strategis sebagaimana dimuat dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Selanjutnya diindentifikasi sasaran mana yang akan diwujudkan pada tahun yang bersangkutan.

2. Indikator Kinerja.

   Indikator kinerja yang dimaksud dalam dokumen rencana kinerja tahunan ini adalah ukuran kuantitatif dan / atau kualitattif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator kinerja ini memberikan penjelasan secara kuantitatif maupun secara kualitatif mengenai apa yang diukur untuk menemukan apakah tujuan sudah tercapai.

3. Rencana Tingkat Capaian (Target)

Rencana tingkat capaian (target) harus ditetapkan secara realitas sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh organisasi Perangkat Daerah.

Dalam penyusunan dokumen Rencana Kinerja Tahunan ini, Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo telah merencanakan 21 indikator kinerja yang tercakup dalam 6 sasaran strategis.

Indikator kinerja Tahun 2023 yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo, secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1 Rencana Kinerja Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
1	2	3	4	
1	Meningkatnya Produktivitas Sektor Padi, Jagung, Kedelai	- Produktivitas Padi (Ku/Ha)	65,50	(Ku/Ha)
		- Prduktivitas Jagung (Ku/Ha)	79,46	(Ku/Ha)
		- Produktivitas Kedelai (Ku/Ha)	18,43	(Ku/Ha)
2	Meningkatnya Produksi pada Komoditas Pertanian Utama	- Peningkatan Produksi Padi (Ton)	7.541,50	(Ton)
		- Peningkatan Produksi Jagung (Ton)	244,76	(Ton)
		- Peningkatan Produksi Kedelai (Ton)	42,79	(Ton)
		- Peningkatan Produksi Bawang Merah (Ton)	5,93	(Ku)
		- Peningkatan Produksi Cabe (Ton)	10,62	(Ku)
		- Peningkatan Produksi Biofarmaka (Ton)	0,5	(Ku)
		- Peningkatan Produksi Tebu	15,45	(Ku)
		- Peningkatan Produksi Pisang	60,	(Ku)
		- Peningkatan Produksi Tembakau (Ton)	3,50	(Ku)
3	Meningkatnya Produksi Daging dan Telur yang Berkualitas	- Peningkatan Produksi Daging (Ton)	154,12	(Ton)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
		- Prosentase Daging ASUH	92,80	%
4	Meningkatnya Produksi Perikanan dan Nilai Produksi Ikan	- Peningkatan Produksi Perikanan (Ton)	421,57	(Ton)
		- Nilai Produksi Ikan (Rp. 000)	269,12	(Rp. 000)
5	Meningkatnya Angka Konsumsi Ikan	- Angka Konsumsi Ikan	0,5	Kg/Kapita/ Tahun

BAB IV

PENUTUP

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan organisasi Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo tahun 2024 merupakan komitmen Pemerintah Kabupaten Sukoharjo pada umumnya dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) serta sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (*clean government*) sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo tahun 2024 ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman Perencanaan Kinerja Tahunan oleh Dinas Pertanian dan Perikanan dalam melaksanakan misi guna dapat mewujudkan visi yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo.

Semoga dokumen ini dapat bermanfaat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Sukoharjo, Januari 2024

KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN SUKOHARJO

BAGAS WINDARYATNO, SP. M.Si.
Pembina Tk. I
NIP. 19670115 198902 1 003

RENCANA KERJA (RENJA)

PERANGKAT DAERAH

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN



KABUPATEN SUKOHARJO

TAHUN 2024

Alamat : Gedung Menara Wijaya Lt 6
Jl. Jenderal Sudirman Nomor 199
Sukoharjo
Kode Pos 57512
Telp. (0271) 59068
Fax. (0271) 593335
Email: dpkpsukoharjo@gmail.com

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Alloh SWT, atas karunia Nya penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Renja OPD) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 ini dapat diselesaikan pada waktunya. Rencana Kerja ini disusun sebagai salah satu langkah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance), yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas sebagai acuan/pedoman untuk pelaksanaan kegiatan pada tahun 2024.

Disadari sepenuhnya pula bahwa dalam penyusunan Renja ini masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan baik dari segi penulisan maupun kualitas materi yang sangat jauh dari harapan. Oleh sebab itu saran masukan yang bersifat konstruktif sangat kami perlukan demi penyempurnaan Renja ini.

Demikian Renja ini di buat semoga dapat memberikan manfaat bagi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo, pemerintah dan lapisan masyarakat diwilayah Kabupaten Sukoharjo.

Sukoharjo, Agustus 2023

KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN KABUPATEN SUKOHARJO,

LANJAR BUDI WAHONO, S.T.
Pembina Tingkat I
NIP. 19691128 199703 1 007

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
KEPUTUSAN KEPALA DPKP KABUPATEN SUKOHARJO	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	4
1.3. Maksud dan Tujuan	8
1.4. Sistematika Penulisan	9
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU	11
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD	11
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD	14
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD	19
BAB III TUJUAN DAN SASARANPERANGKAT DAERAH	23
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	23
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	25
3.2. Program dan Kegiatan	27
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD	31
BAB V PENUTUP	39
LAMPIRAN	

PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Gedung Menara Wijaya Lantai 6
Jalan Jenderal Sudirman Nomor 199 Sukoharjo, Kode Pos 57521
Telepon (0271) 593068 Fax. (0271) 593335

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN SUKOHARJO

Nomor : 050 / 107 / I / 2023

Tentang

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2024

KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN SUKOHARJO,

Menimbang :

a. bahwa sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo tahun 2021-2026 perlu disusun Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024;

b. bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 di pandang perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo;

c. bahwa berdasarkan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo, Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata cara Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Sukoharjo Nomor 200);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo, Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026 (Lembaran daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 3);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo, Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);
11. Peraturan Bupati Sukoharjo, Nomor 75 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tatakerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu Keputusan ini, melaksanakan tugas secara penuh dalam menyiapkan dokumen Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024.

KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
Pada tanggal 10 Januari 2023

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN KABUPATEN SUKOHARJO,

LANJAR BUDI WAHONO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR : 050 / 107 / I/2023
TANGGAL : 10 JANUARI 2023

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2024

NO	JABATAN KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo	Penanggung Jawab	Bertanggungjawab pada hasil pelaksanaan tugas tim
2	Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggungjawab pada pelaksanaan tugas tim
3	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan pada Sekretariat DPKP Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Membantu pelaksanaan tugas administrasi
4	Kepala Bidang Perumahan DPKP Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya
5	Kepala Bidang Kawasan Permukiman DPKP Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya
6	Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum DPKP Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya

KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN SUKOHARJO,

LANJAR BUDI WAHONO

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Hal ini dimaksudkan agar perencanaan pembangunan daerah senantiasa konsisten, sejalan dan selaras dengan kebijakan perencanaan pembangunan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Selaras dengan hal tersebut, perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 mengacu pada perencanaan Nasional dan Provinsi sehingga diharapkan ada kesinambungan program-program pembangunan baik dari tingkat pusat hingga daerah.

Selain itu, perencanaan pembangunan daerah dilakukan bersama-sama dengan para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing, mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah serta mempertimbangkan kondisi dan potensi yang dimiliki, sesuai dengan dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Disamping itu, perencanaan pembangunan harus disesuaikan dengan kondisi riil yang dialami oleh Kabupaten Sukoharjo dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, dimana kapasitas fiskal memegang peranan penting dan menentukan dalam memilih arah kebijakan pembangunan yang akan ditempuh.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan, yang disusun dengan memperhatikan Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 2021 – 2026 Kabupaten Sukoharjo sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan dibidang Perumahan dan Kawasan Permukiman pada tahun 2024.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo disusun berdasarkan dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Sukoharjo 2021-2026, Rencana Strategis (Renstra) Bappelbangda Kabupaten Sukoharjo serta rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sukoharjo, yang selanjutnya dapat dijadikan sebagai acuan dalam mengoperasionalkan RKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo dalam menjalankan visi jangka menengah daerah.

❖ **Visi dan Misi Jangka Menengah Daerah**

Adapun visi dan misi jangka menengah sebagai tercantum dalam dokumen RPJMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026 adalah :

➢ **Visi : "Mewujudkan Masyarakat Sukoharjo Yang Lebih Makmur"**

Visi Pembangunan Kabupaten Sukoharjo ini diharapkan akan mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat Kabupaten Sukoharjo. Visi Pembangunan Kabupaten Sukoharjo tersebut harus dapat diukur keberhasilannya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan, makna yang terkandung dalam Visi tersebut dijabarkan sebagai berikut:

"MAKMUR" juga merupakan motto atau slogan Kabupaten Sukoharjo yaitu Maju, Aman, Konstitusional, Mantap, Unggul, dan Rapi., serta tergambarkan pada misi ke empat yaitu " Memperkuat Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan" dengan tujuan Mewujudkan pembangunan infrastruktur berkelanjutan, dengan indikator keberhasilan Indeks Pembangunan Infrastruktur. Sasaran yang ingin ditingkatkan dalam rangka mencapai tujuan diatas Meningkatnya hunian yang layak, dengan indikator keberhasilan yaitu: Pelayanan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Dokumen RPJMD ialah penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD. Implementasi RPJPD Kabupaten Sukoharjo 2005–2025, telah memasuki tahapan Pembangunan Lima Tahun Keempat. Tahapan Pembangunan Lima Tahun keempat ini menjadi bagian yang integral dengan visi dan misi dalam kepemerintahan Bupati Sukoharjo periode

2021–2026 sebagai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021–2026.

Dalam rangka mendukung penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2021 ini menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2021-2026 yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu sampai lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

Pada akhirnya, Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2021-2026 ini diharapkan mampu menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta menjadi pedoman dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan tahunan dan lima tahunan sesuai dengan hasil pelaksanaan rencana pembangunan yang telah ditetapkan dan mensinergikan dengan beberapa dokumen Sakip

- **Misi**

Selanjutnya visi tersebut dijabarkan dalam misi yang pada hakekatnya diarahkan untuk mendukung terwujudnya visi lima tahun kedepan, dengan tujuan agar tercipta kesinambungan arah pembangunan yang diinginkan. Misi yang dirumuskan untuk mengemban pencapaian visi selama lima tahun yang akan datang adalah sebagai berikut:

1. **Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Percepatan Reformasi Birokrasi**

   Mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance) didukung oleh aparatur Pemerintah Daerah yang professional bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

2. **Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas.**

   Mewujudkan kualitas sumberdaya manusia penggerak pembangunan yang produktif, cerdas sehat, berbudaya dan religius.

3. **Memperkuat Perekonomian Rakyat Yang Berdaya Saing Tinggi**
   Mewujudkan pertumbuhan perekonomian masyarakat dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi unggulan daerah dan pemanfaatan sumber daya alam dalam konteks pembangunan yang berkelanjutan dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan.
4. **Memperkuat Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan**
   Mewujudkan pemerataan pembangunan melalui pengembangan wilayah yang didukung kelengkapan sarana dan prasarana penunjang aktivitas sosial ekonomi masyarakat.
5. **Meningkatkan Kualitas Kehidupan Sosial dan Keagamaan**
   Mewujudkan kondisi daerah yang aman, damai, tertib, dan tenteram melalui penegakan supremasi hukum dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 174);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 192) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031(Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 262);
20. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);
21. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 298);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
23. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan. Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo
24. Peraturan Bupati Nomor : 85 Tahun 2017 Tarif Sewa Satuan Rumah Susun Sederhana Sewa Milik Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
25. Peraturan Bupati Nomor: 34 Tahun 2020 Tata Cara Pengesahan Pertelaan Dan Akta Pemisahan Rumah Susun.

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal.
27. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
28. Memperhatikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

1. Sebagai acuan dalam mengevaluasi kegiatan/program pada tahun 2024.
2. Sebagai pedoman penyusunan KUA PPAS dan sebagai perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan pada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo tahun 2024.

1.3.2. Tujuan

1. Memberikan landasan kebijakan bagi pelaksana kegiatan.
2. Memperoleh kemudahan dalam menentukan skala prioritas.
3. Memperoleh kemudahan pemahaman dalam menyusun perencanaan anggaran.
4. Untuk menetapkan program/kegiatan yang ada di Rencana Kerja (Renja) ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Sementara Pembangunan tahun 2024.

4.1. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penyusunan Renja DPKP Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini memberi gambaran umum tentang penyusunan Renja DPKP Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024

1.1. Latar Belakang

Bagian ini mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja DPKP, proses penyusunannya, dan keterkaitannya dengan dokumen RKPD, Renstra DPKP serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Bagian ini memuat peraturan-peraturan yang mendasari penyusunan Renja DPKP Kabupaten Sukoharjo

1.3. Maksud dan Tujuan

Bagian ini memberikan penjelasan mengenai maksud dan tujuan dari penyusunan Renja DPKP Kabupaten Sukoharjo

1.4. Sistematika Penulisan

Bagian ini menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja DPKP serta susunan garis besar isi dokumen

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Kinerja DPKP Tahun 2023

Bab ini memuat terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja DPKP Tahun 2023 dan perkiraan Tahun 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja DPKP Tahun Lalu

Bagian ini menguraikan review hasil evaluasi pelaksanaan Renja DPKP tahun 2022 dan realisasi Renstra DPKP mengacu pada hasil Laporan Kinerja Tahunan

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan DPKP.

Bagian ini menguraikan capaian kinerja pelayanan DPKP berdasarkan indikator yang sudah ditentukan

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPKP

Bagian ini menguraikan tingkat kinerja pelayanan DPKP, permasalahan dan hambatan, dampak terhadap visi/misi,

tantangan dan peluang, dan rekomendasi serta catatan strategis untuk ditindak lanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun 2024.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Bagian ini menguraikan proses pembandingan rancangan awal dengan analisis kebutuhan, dan temuan-temuan yang ada setelah proses tersebut

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bagian ini menguraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan.

Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Tahun 2024 dan Pendanaan

Bab ini menguraikan tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang direncanakan serta rencana pendanaan

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Bagian ini menguraikan tentang telaahan terhadap kebijakan nasional yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional terkait dengan tugas pokok dan fungsi DPKP Kabupaten Sukoharjo

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja DPKP Kabupaten Sukoharjo

Bagian ini merumuskan tujuan dan sasaran didasarkan atas isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi DPKP yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra DPKP

3.3. Program dan Kegiatan

Bagian ini menguraikan garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan

Bab IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab V Penutup

Bab ini menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2022

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2022

Rencana Kerja (Renja) suatu OPD adalah Penjabaran Perencanaan tahunan dari Rencana Strategis OPD tersebut. Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program & kegiatan, pelaksanaan rencana program & kegiatan, dan hasil rencana program & kegiatan.

Penyusunan Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024, memperhatikan beberapa unsur pokok sebagaimana berikut :

a. Masalah – masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
b. Tujuan yang dikehendaki;
c. Sasaran – sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;
d. Kebijakan – kebijakan untuk melaksanakannya serta seksi pelaksana;

Penyusunan Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 juga memperhatikan hal – hal sebagai berikut :

a. Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2022 sebagai entry point dalam penyusunan perencanaan tahun 2024;
b. Memperhatikan keberlanjutan (*sustainable development)* untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan. Masalah-masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;

❖ **Evaluasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022**

Anggaran Tahun 2022 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo sebesar Rp. 10.662.865.891,- (termasuk perubahan) dengan 5 program 16 kegiatan dan 38 Sub Kegiatan, terdiri dari :

No.	Uraian Belanja	Target	Realisasi	%
1.	Belanja Pegawai	3.977.691.910	3.764.152.733	95
2.	Belanja Barang dan Jasa	3.899.483.981	6.681.353.112	92
3.	Belanja Hibah	439.950.000	439.950.000	100
4.	Belanja Bantuan Sosial	2.230.000.000	2.230.000.000	100
5.	Belanja Modal	115.740.000	112.445.000	97

Hasilnya evaluasi pelaksanaan kegiatan sebagaimana tercantum dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2022 adalah seperti table berikut pada lampiran 1.

Pencapaian Tahun Anggaran 2022

Pencapaian Kinerja Belanja Operasional tahun anggaran 2022 dengan anggaran sebesar Rp. **10.662.865.891**,- atau mencapai 95.08 %.

Apabila dikaitkan dengan pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Sukoharjo, pada dasarnya kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo adalah sebagai "*Pengarah*". Setiap program pembangunan dan sistem yang akan memberikan kemudahan bagi OPD untuk menentukan arah dan sasaran kegiatan, lingkup dan pengukuran tingkat kesuksesannya.

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2022 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2023, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai berikut:

1. Kualitas sumber daya manusia aparat perencanaan masih perlu ditingkatkan.

2. Koordinasi dengan dinas/instansi/satuan kerja dan *stakeholders* yang belum optimal.
3. Pemahaman tentang pedoman penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah oleh dinas/instansi/satuan kerja dan *stakeholders* yang masih kurang.

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam pelaksanaan urusan perencanaan pembangunan daerah, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo tahun 2021-2026, maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penyusunan dokumen yang akan menghasilkan perencanaan Perangkat Daerah yang berupa RKA, DPA dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
2. Meningkatkan pelaksanaan koordinasi dengan para pemangku maupun lembaga atau institusi non pemerintah dan masyarakat pada umumnya, untuk mencapai capaian tersebut tahun 2022 telah mencapai target yaitu melaksanakan koordinasi perencanaan pembangunan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
3. Meningkatkan kualitas kajian dan atau evaluasi kebijakan pembangunan dan peningkatan kualitas koordinasi kebijakan pembangunan daerah.

Untuk lebih rinci evaluasi Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 dapat dilihat pada ***Lampiran 2***

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Sesuai dengan tugas dan fungsinya Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo melaksanakan program dan kegiatan untuk mewujudkan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2021-2026, sedangkan analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah dalam kinerja umum dan khusus sebagai berikut :

1. Luasan kawasan kumuh di Kabupaten Sukoharjo pada awal RPJMD adalah sebesar 7% diharapkan sesuai dengan program dari Pemerintah Pusat, maka kawasan kumuh dapat menjadi 0% pada akhir Renstra / RPJMD tahun 2026 nantinya;
2. Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) diharapkan berkurang secara signifikan dari semula sebanyak 8.836 unit rumah pada tahun 2022 berkurang sekitar 1.355 unit rumah, sehingga Tahun 2022 masih ada sisa menjadi sebanyak 6.481 unit;
3. Prosentase Ruang Terbuka Hijau Perkotaan diharapkan dapat meningkat dari semula sebesar 17% pada awal RPJMD menjadi sebesar 20% pada akhir RPJMD;
4. Prosentase Lahan Hijau pada awal RPJMD sebesar 55% menjadi 50% pada akhir RPJMD;
5. Rasio kebutuhan rumah dan penyediaan rumah diharapkan dapat meningkat dari semula 72% pada awal RPJMD menjadi sebesar 85% pada akhir RPJMD;
6. Prosentase penyerahan PSU pada awal RPJMD 5,72 % diharapkan menjadi 14.14 % pada akhir RPJMD.

Identifikasi permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya secara umum dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Rumah Tidak Layak Huni

   Permasalahan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang dihuni atau dimiliki oleh Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) memiliki aspek multidimensional. Oleh sebab itu, kepedulian untuk menangani masalah tersebut diharapkan terus ditingkatkan dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat (*stakeholder*) baik pemerintah pusat maupun daerah, dunia usaha, masyarakat, dan elemen lainnya. Pada Tahun 2022 jumlah RTLH adalah sebanyak 1.355 unit, diharapkan pada akhir RPJMD nanti dapat berkurang menjadi 2.202 unit rumah. Dimana direncanakan dalam 5 tahun ke depan dapat ditangani sebanyak 9.936 unit RTLH dengan bantuan dana dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten maupun dari sumber yang lain.

2. Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan

   Banyaknya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan, maka perlu dilaksanakan inventarisasi dan survei untuk itu Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo untuk mengadakan pendataan kawasan perumahan dan permukiman kumuh. Luasan kawasan kumuh di Kabupaten Sukoharjo pada awal RPJMD adalah sebesar 7% diharapkan sesuai dengan program dari Pemerintah Pusat, maka kawasan kumuh dapat menjadi 0% pada akhir Renstra/RPJMD tahun 2026 nantinya;

3. Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum

Jumlah perumahan berdasarkan siteplan yang telah disahkan oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo sebanyak 297 lokasi dan sampai akhir Pebruari 2017 jumlah PSU yang diserahkan baru 17 lokasi perumahan (5,72 %). Dalam rangka memenuhi Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman, maka diharapkan perumahan yang sudah selesai dibangun dapat menyerahkan prasarana, sarana dan utilitas umum nya ke Pemerintah Daerah. Dimana dalam 5 tahun kedepan akan dilakukan sosialisasi kepada masyarakat dan pengembang untuk menyerahkan prasarana, sarana dan utilitas umum nya yang ditargetkan 80 PSU.

❖ **Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi**

Sampai saat ini, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati Sukoharjo.

Susunan organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman terdiri dari :

1. Susunan organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman terdiri dari :

1. Kepala Dinas;

2. Sekretariat, yang membawahi :

   a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan

   b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

3. Bidang Perumahan, yang membawahi :

   a. Sub Koordinator Perencanaan dan Pengembangan Perumahan;

   b. Sub Koordinator Perumahan Formal dan Swadaya; dan

c. Sub Koordinator Pengelolaan Rumah Susun.

4. Bidang Kawasan Permukiman, yang membawahi:

   a. Sub Koordinator Perencanaan Kawasan Permukiman;

   b. Sub Koordinator Penanganan Permukiman Kumuh;

   c. Sub Koordinator Pemanfaatan dan Pengendalian Kawasan Permukiman.

5. Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum, yang membawahi :

   a. Sub Koordinator Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum;

   b. Sub Koordinator Pembangunan dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum; dan

   c. Sub Koordinator Evaluasi dan Pembinaan Pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum.

6. Kelompok Jabatan Fungsional

❖ Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo yang akan dipakai landasan penyusunan program dengan mengantisipasi perkembangan di masa mendatang, sebagai berikut :

❖ Tugas Pokok

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang perumahan dan Kawasan permukiman.

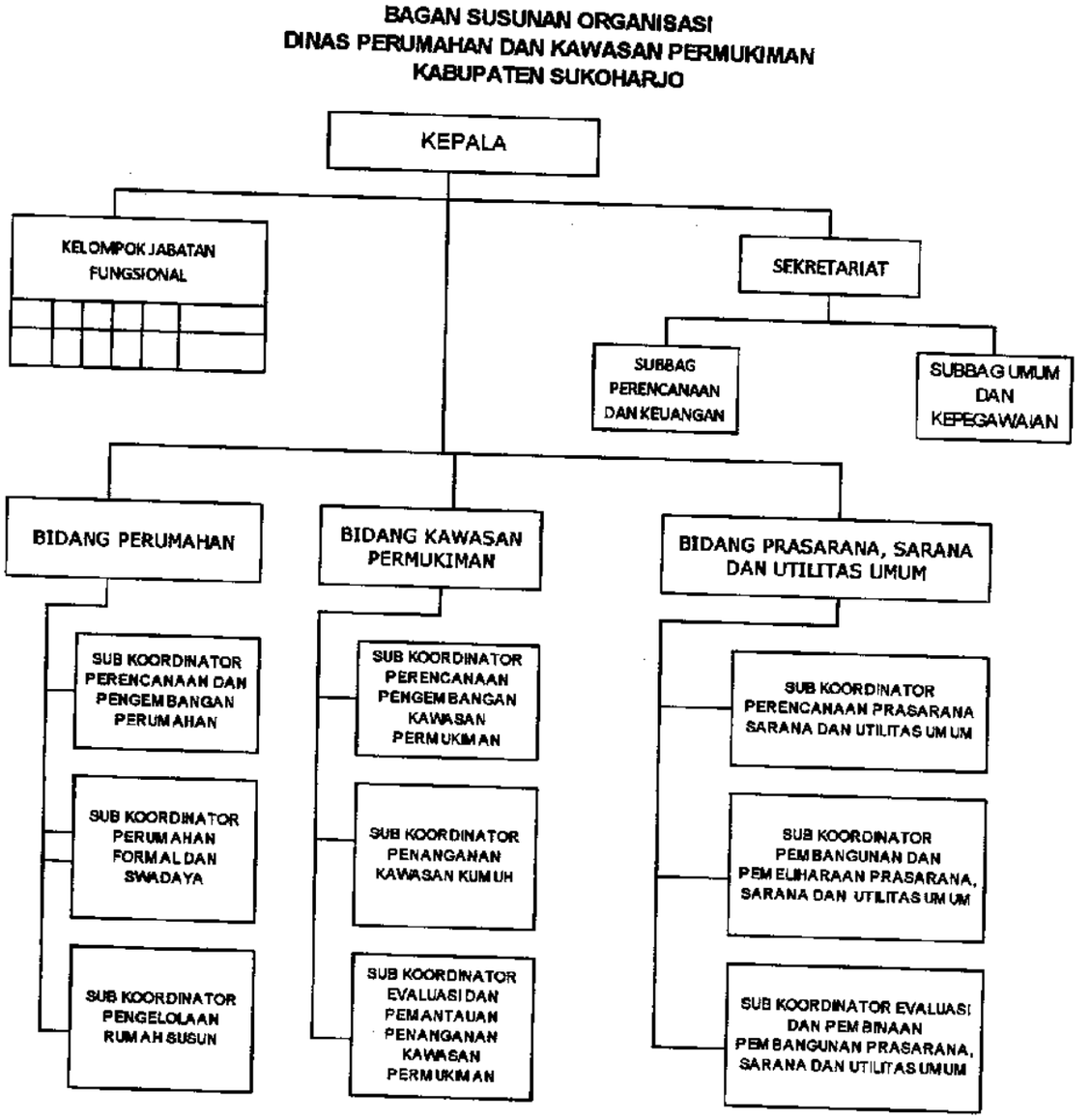
❖ Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis di bidang perumahan dan Kawasan permukiman;
b. pelaksanaan kebijakan teknis dibidang perumahan dan Kawasan permukiman;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang perumahan dan Kawasan permukiman;
d. pelaksanaan administrasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan
e. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagan Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo



2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Potret kondisi atau gambaran umum pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo yang telah diuraikan sebelumnya, dijadikan dasar dalam mengidentifikasi isu-isu strategis pembangunan Kabupaten Sukoharjo. Sehingga isu-isu pembangunan yang faktual tersebut akan menentukan agenda aktual kebijakan, sasaran serta program dan kegiatan pembangunan yang akan digulirkan.

Berdasarkan hal-hal diatas, beberapa Isu Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo antara lain adalah :

1. Belum optimalnya pendayagunaan sarana prasarana dan kapasitas kelembagaan dalam penyusunan perencanaan. Pendayagunaan sarana dan prasarana perkantoran serta kapasitas kelembagaan dirasakan masih kurang optimal. Hal ini dapat dilihat dari kurangnya pemanfaatan sejumlah peralatan perkantoran secara efektif dan efisien maupun penggunaan peralatan perkantoran tersebut tidak difungsikan sebagaimana mestinya.

   Sedangkan penataan kapasitas kelembagaan masih dirasakan kurang sesuai dengan kebutuhan yang ada, selain penempatan personil (pegawai) yang kurang sesuai dengan kapasitas masing-masing pegawai tersebut (*back ground* pendidikan kurang sesuai dengan bidang tugas yang diemban).

2. Belum optimalnya penyusunan berbagai dokumen perencanaan

   Penyusunan berbagai dokumen perencanaan pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh Bidang-bidang di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman masih dirasakan kurang optimal.

Hal ini lebih disebabkan oleh dinamisnya tingkat kebutuhan masyarakat yang memerlukan aturan yang jelas, disamping cepatnya perubahan peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi yang kadang-kadang antara peraturan satu dengan yang lainnya saling tumpang tindih.

3. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan daerah (proses perencanaan)

   Seiring dengan tuntutan untuk segera mewujudkan pemerintahan yang *good governance* dan *clean government*, kontribusi masyarakat (*stakeholders*) mutlak diperlukan. Hal ini diperlukan dalam rangka akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan sehingga asas keterbukaan dalam jalannya roda pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat (*stakeholders*).

4. Belum optimalnya sistem dan manajemen pengelolaan data dan informasi secara profesional. Kebutuhan akan ketersedian data dan informasi yang valid dan *up to date* dewasa ini adalah sesuatu yang mutlak. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan pelayanan akan kebutuhan data dan informasi kepada *stakeholders* dan atau pengguna data baik dari lembaga pemerintahan pusat, provinsi, kabupaten sampai dengan desa/kelurahan serta pihak swasta agar dapat menggunakannya untuk kepentingan masing-masing sehingga memperoleh hasil yang diharapkan.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Proses penyusunan RKPD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Guna menghasilkan suatu rencana kerja OPD yang selaras dengan rencana kerja pemerintah daerah, maka diperlukan suatu telaahan (*review*) terhadap rancangan awal penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024.

Berdasarkan pada isu strategis dan evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2024 dan RKPD Tahun Berjalan 2023, agar sasaran pembangunan tahun 2024 lebih fokus, maka perlu disusun prioritas pembangunan Kabupaten Sukoharjo, yaitu sebagai berikut :

1. Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Infrastruktur;
2. Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat;
3. Penurunan Angka Kemiskinan;
4. Pelayanan Publik yang Prima serta Tata Kelola Pemerintahan yang Baik;

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga yang melaksanakan pengelolaan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah dan membantu Bupati Sukoharjo dalam menyusun dan merumuskan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah dituntut untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas terutama produk berupa rencana pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan.

Dalam menjaring usulan dari para pemangku kepentingan tersebut, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman selaku unsur perencana mengadakan beberapa mekanisme antara lain dengan melalui musrenbang mulai dari tingkat Desa sampai Kabupaten. Usulan-usulan tersebut ditampung dan ditelaah manfaatnya dan dianalisis berdasarkan kebutuhan masyarakat untuk dituangkan menjadi RKPD dan Renja Organisasi Perangkat Daerah terkait.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH (DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN)

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan dimulai dengan mengenali potensi dan kebutuhan dari masyarakat penerima manfaat dan penanggung resiko. Langkah selanjutnya adalah mencari cara dan upaya untuk mewujudkannya. Dengan demikian kegiatan pembangunan yang menyangkut perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan, dan pemantauan serta evaluasi seharusnya beranjak dari keinginan dan kemampuan masyarakat penerima manfaat dan penanggung resiko itu sendiri.

Perumusan kebijakan dan pelaksanaannya serta pemilahan dan pemilihan prioritas yang tajam dan terpercaya merupakan sarana untuk mengejawantahkan apa yang tercantum dalam Renstra Perangkat Daerah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 - 2026.

Pendanaan (anggaran daerah) merupakan instrumen atau unsur manajemen utama dalam perencanaan yang harus dilaksanakan secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan.

Sejalan dengan otonomi dan desentralisasi bagi pemerintah daerah sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, dalam pengelolaan keuangan daerah menuntut untuk dilakukan pengelolaan yang berorientasi pada kepentingan public (public oriented). Hal ini tidak hanya terlihat dari besarnya porsi alokasi namun juga terlihat dari besarnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan keuangan daerah.

Kapasitas dan efektivitas pemerintah daerah dalam penggunaan anggaran dirasakan perlu dioptimalkan. Karena pada umumnya unit kerja belum menjalankan fungsi dan peran secara optimal dan efisien. Terjadinya penganggaran belanja yang kurang tepat merupakan fenomena umum yang digunakan dalam penetuan alokasi dana dengan pendekatan incrementalisme atau line-item budget (trend atau pos anggaran yang tersedia) yang sebetulnya pos tersebut secara riil tidak dibutuhkan.

Oleh karena itu perlu adanya analisis secara akurat tentang alokasi anggaran bagi masing-masing Perangkat Daerah, dimana setiap kegiatan pengalokasian dana (belanja) yang harus berbasis kinerja (capaian), biarpun belum sepenuhnya secara komprehensip dan representative. Kita lakukan hal tersebut dikarenakan secara ideal membutuhkan adanya variable/indikator yang dapat mewakili semua bidang pembangunan. Indikator/variabel yang dibutuhkan antara lain: Indeks pembangunan (ekonomi/sosial) sesuai dengan aktivitas masing-masing Perangkat Daerah, kondisi pembangunan, efektivitas terhadap capaian hasil Ranja Perangkat Daerah, tingkat out put yang dihasilkan Peragkat Daerah, anggaran belanja tahun sebelumnya, indeks belanja publik dan belanja aparatur.

Penerapan atau implementasi anggaran berbasis kinerja secara menyeluruh dan optimal juga diperlukan kesepahaman pola pikir, membangun komitmen yang sinergis dari segenap unsur eksekutif, legislatif dan stakeholder pembangunan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja DPKP Kabupaten Sukoharjo

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (*Critical Success Factor*) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai tujuan dengan Terwujudnya Lingkungan Sehat Perumahan dan Permukiman, dengan sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya cakupan pelayanan SPM Perumahan Rakyat;
2. Meningkatnya RTLH menjadi RLH;
3. Meningkatnya penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
4. Meningkatnya penanganan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang diserahkan kepada pemerintah daerah; dan
5. Meningkatnya kualitas aparatur dan pelayanan publik.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga yang melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang perumahan dan kawasan permukiman. Adapun untuk menyelenggarakan tugas pembantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang perumahan dan kawasan permukiman mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
b. Pelaksanaan kebijakan teknis dibidang perumahan dan kawasan permukiman;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang perumahan dan kawasan permukiman;
d. Pelaksanaan administrasi dibidang perumahan dan kawasan permukiman.

Guna mendukung pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati maka Dinas Perumahan mempunyai tujuan dan beserta sasaran strategis beserta indicator capaiannya sesuai dengan Renstra DPKP Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026, seperti tersaji dalam table 3.1 :

Tabel 3.1
Keterkaitan Tujuan dan Sasaran dengan indikator Target dalam Pencapaian Renstra dan Renja Tahun 2024 Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 – 2026 Sesudah Perubahan Renstra.

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran pada Tahun				
				2023	2024	2025	2026	Jmh
a	Terwujudnya lingkungan sehat perumahan dan permukiman		Prosentase Lingkungan Hunian Layak	81.65	84.70	87.76	90.81	90.81
1.		Meningkatnya Cakupan Pelayanan SPM Perumahan Rakyat	Prosentase pelayanan SPM Perumahan Rakyat	100	100	100	100	100
2.		Meningkatnya RTLH menjadi RLH	Prosentase Penurunan rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni	61.36	48.48	35.60	22.72	22.72
3.		Meningkatnya penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh	Prosentase penurunan perumahan kumuh dan permukiman kumuh	60.01	46.68	33.35	20.02	20.02
4.		Meningkatnya penanganan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah	Prosentase PSU Perumahan yang sudah diserahkan ke Pemerintah Daerah dan tertangani dengan baik	72.35	78.24	84.12	90	90
5.		Meningkatnya kualitas aparatur dan pelayanan publik	Nilai SAKIP PD	65	70	75	80	80

3.3. Program dan Kegiatan DPKP

Program merupakan Kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerja sama dengan Masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Program dan kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tahun 2024 disusun berdasarkan pada tupoksi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo mengelola anggaran sebesar Rp. 10.580.651.000,- yang terdiri dari :

1.	Belanja Pegawai	Rp. 4.889.369.000,-
2.	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 3.691.612.000,-
3.	Belanja Modal	Rp. 34.670.000,-
4.	Belanja Hibah	Rp. 400.000.000,-
5.	Belanja Bansos	Rp. 1.565.000.000,-

Adapun program dan kegiatan tersebut adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran ini.

A. Program Utama (teknis);

1. Program : Pengembangan Perumahan

   Kegiatan :

   a. Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota.
   b. Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana.
   c. Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus, dengan Sub Kegiatan Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus.

d. Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan, dengan Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Perumahan Umum /Rumah Susun Umum.
e. Penerbitan Sertipikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB), dengan Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB).

2. Program : Kawasan Permukiman.
Kegiatan :
a. Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas Di Bawah 10 (sepuluh) Ha, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
1. Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembanya Permukiman Kumuh;
b. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) ha, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh;
2. Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukimah Kumuh.

3. Program : Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh.
Kegiatan : Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) ha.

4. Program : Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
Kegiatan :

Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan, dengan Sub Kegiatan :

1. Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan;
2. Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan Untuk Menunjang Fungsi Hunian;
3. Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan;
4. Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan; dan
5. Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang.

B. Program Pendukung (generik).

1. Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

   Kegiatan :

   a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan :
      1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
      2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
      3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD;
      4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD; dan
      5. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

   b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan :
      1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
      2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;
      3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD; dan
      4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD.

c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
   1. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian;
   2. Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai dan
   3. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.
d. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan:
   1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
   2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
   3. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
   4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
   5. Fasilitasi Kunjungan Tamu; dan
   6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Sub Kegiatan :
   1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
   2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
   3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor; dan
   4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Sub Kegiatan :
   1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.

Berikut adalah Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo pada Lampiran 3.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 disajikan pada Tabel Lampiran 4 berikut ini :

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						-	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	-	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	-	12 Laporan	-	35.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	12 Laporan	35.000.000
1	04	03			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN								837.100.000,00					731.750.000,00
1	04	03	2,02		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha								77.100.000,00					131.750.000,00
1	04	03	2,02	0004	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh													
						-	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	-	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	-	12 Laporan	-	77.100.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembang nya Permukiman Kumuh	12 Laporan	131.750.000,00
1	04	03	2,03		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha								590.000.000,00					600.000.000,00
1	04	03	2,03	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh													
						-	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	-	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	-	12 Laporan	-	75.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/ Peremajaan	12 Laporan	115.000.000,00
1	04	03	2,03	0009	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh													
						-	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan	-	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	-	32 Ha	-	465.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan	32 Ha	465.000.000,00
1	04	04			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH								2.187.450.000,00					3.800.000.000,00
1	04	04	2,01		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota								2.187.450.000,00					3.800.000.000,00
1	04	04	2,01	0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha													
						-	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	-	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	-	1400 Unit Rumah	-	2.187.450.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembang nya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	1400 Unit Rumah	3.800.000.000,00
1	04	05			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)								930.250.000,00					1.616.667.000,00
1	04	05	2,01		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan								930.250.000,00					1.616.667.000,00
1	04	05	2,01	0001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						-	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	-	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	-	1 Dokumen	-	75.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	1 Dokumen	100.000.000,00
1	04	05	2,01	0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian													
						-	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	-	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	-	4 Lokasi	-	505.250.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	4 Lokasi	716.607.000,00
1	04	05	2,01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan													
						-	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	-	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	-	12 Laporan	-	200.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	12 Laporan	250.000.000,00
1	04	05	2,01	0009	Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Permukiman													
						-		-	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	-	12 Dokumen	-	50.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Kerja Sama Penyediaan/ Pengelolaan PSU Perumahan	12 Dokumen	150.000.000,00
1	04	05	2,01	0010	Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang													
						-	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	-	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	-	25 Laporan	-	100.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	25 Laporan	300.000.000,00
1	04	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								5.738.301.000,00					
1	04	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													5.460.197.000,00
1	04	01	2,01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								55.000.000,00					55.000.000,00
						-	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	-	2 Dokumen	-	35.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	35.000.000,00
1	04	01	2,01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						-	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	-	2 Dokumen	-	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	5.000.000,00
1	04	01	2,01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD													
						-	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	-	2 Dokumen	-	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	5.000.000,00
1	04	01	2,01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													
						-	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	-	1 Laporan	-	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	5.000.000,00
1	04	01	2,01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
						-	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	-	1 Laporan	-	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	5.000.000,00
1	04	01	2,02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**4.654.504.000,00**					**4.645.409.600,00**
1	04	01	2,02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
						-	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	-	36 Orang/bulan	-	4.641.104.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36 Orang /bulan	4.350.000.000,00
1	04	01	2,02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD													
						-	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	-	12 Dokumen	-	283.400.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	283.400.000,00
1	04	01	2,02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD													

Kode					Uraian / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						-	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	-	1 Laporan	-	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	5.000.000,00
1	04	01	2,02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD													
						-	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	-	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	-	2 Laporan	-	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan B ulanan/Triwul anan/Semest eran SKPD	2 Laporan	5.000.000,00
1	04	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								85.000.000,00					
1	04	01	2,05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian													80.000.000,00
						-	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	-	5 Dokumen	-	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaia n	5 Dokum en	5.000.000,00
1	04	01	2,05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai													
						-	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	-	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	-	1 Dokumen	-	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokum en	5.000.000,00
1	04	01	2,05	0011	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi													
						-	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	-	50 Orang	-	75.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50 Orang	80.000.000,00
1	04	01	2,08		Administrasi Umum Perangkat Daerah								218.500.000,00					
1	04	01	2,08	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													228.500.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						-	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	-	6 Paket	-	47.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengk apan Kantor yang Disediakan	5 Paket	55.000.000,00
1	04	01	2,06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
						-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	-	50 Paket	-	70.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	50 Paket	70.000.000,00
1	04	01	2,06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
						-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	-	2 Paket	-	20.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaa n yang Disediakan	2 Paket	20.000.000,00
1	04	01	2,06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
						-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	-	3 Dokuman	-	4.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Pe rundang-Und angan yang Disediakan	3 Dokum en	4.000.000,00
1	04	01	2,06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu													
						-	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	-	1 Laporan	-	7.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	7.500.000,00
1	04	01	2,06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
						-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	-	70 Laporan	-	70.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Pen yelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70 Laporan	70.000.000,00
1	04	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								249.997.000,00					249.997.000,00
1	04	01	2,08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
						-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	-	2 Laporan	-	10.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	10.000.000,00
1	04	01	2,08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													

Kode					Uraian / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	-	12 Laporan	-	80.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	80.000.000,00
1	04	01	2,06	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
						-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	-	12 Laporan	-	10.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	10.000.000,00
1	04	01	2,06	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
						-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	-	12 Laporan	-	149.897.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	149.897.000,00
1	04	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								195.400.000,00					195.400.000,00
1	04	01	2,09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
						-	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	-	16 Unit	-	195.400.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	16 Unit	195.400.000,00
												TOTAL	10.560.651.000,00					12.568.564.000,00

BAB V

PENUTUP

RENCANA KERJA 2024

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN SUKOHARJO

BAB V
PENUTUP

Dokumen Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 1 tahun serta memuat kebijakan (kerangka regulasi), program (kerangka kegiatan), dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan berpedoman Renstra PD dan mengacu pada Rancangan Awal RKPD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024.

Kedudukan Renja PD menjadi tak terpisahkan dari RKPD, merupakan rujukan untuk menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) APBD dan Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara (PPAS).

Keberhasilan pelaksanaan dokumen ini, disamping sangat tergantung pada kesiapan dan kemampuan semua komponen masyarakat, baik eksekutif, legislatif, dunia usaha, kelompok kepentingan, maupun kelompok masyarakat lainnya, juga sangat ditentukan oleh sikap mental, tekad dan semangat, ketaatan, kejujuran dan disiplin dari setiap pelaku pembangunan.

Faktor-faktor ini dicerminkan pada kualitas dan profesionalisme dalam pengelolaan pembangunan yang mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan, serta koordinasi yang makin mantap sehingga hasil pembangunan menjadi optimal. Pasal 28 dan 29 UU 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengatur pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

Untuk Pemerintahan Daerah, pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan oleh masing-masing pimpinan Perangkat Daerah. Demikian juga halnya dengan evaluasi pembangunan daerah dilakukan oleh masing-masing Kepala Perangkat Daerah.

BUPATI SUKOHARJO,

ETIK SURYANI

LAMPIRAN II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2022

RENCANA KERJA

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN SUKOHARJO

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN ANGGARAN 2022

OPD : DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

URUSAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

TOTAL BELANJA TA. 2022 : **10.662.865.891**

REALISASI BELANJA TA. 2022 : **10.137.936.777**

NO.	PROGRAM	KEGIATAN						PERMASALAHAN	SOLUSI	KET
		NAMA KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SAT	TARGET	REALISASI	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**			Rp.	**4.891.394.545,00**	**4.540.150.212,00**	**92,82**			
		1 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Rp.	**45.000.000,00**	**41.795.500,00**	**92,88**			
		a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	**Input :**							
			Dana	Rp.	25.000.000,00	23.711.500,00	94,85			
			Output :							
			Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	dokumen	2,00	2,00	100,00			
			Pelaksanaan forum PD	kali	1,00	1,00	100,00			
			Outcome :							
			Tersusunnya dokumen perencanaan PD	dokumen	2,00	2,00	100,00			
			Terlaksananya forum perencanaan	kali	1,00	1,00	100,00			
		b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	**Input :**							
			Dana	Rp.	5.000.000,00	4.072.000,00	b			
			Output :							
			Jumlah dokumen RKA yang disusun	dokumen	2,00	2,00	100,00			
			Outcome :							
			Tersusunnya dokumen RKA PD	dokumen	2,00	2,00	100,00			
		c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	**Input :**							
			Dana	Rp.	5.000.000,00	4.245.000,00	84,90			
			Output :							
			Jumlah dokumen DPA yang disusun	dokumen	2,00	2,00	100,00			
			Outcome :							
			Tersusunnya dokumen DPA PD	dokumen	2,00	2,00	100,00			
		d Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	**Input :**							
			Dana	Rp.	5.000.000,00	4.955.000,00	99,10			
			Output :							
			Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd	Laporan	1,00	1,00	100,00			

NO.	PROGRAM	KEGIATAN						PERMASALAHAN	SOLUSI	KET
		NAMA KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SAT	TARGET	REALISASI	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Outcome : Tersusunnya laporan capaian realisasi kinerja SKPD	Laporan	1,00	1,00	100,00			
		e. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Input :**							
			Dana	Rp.	5.000.000,00	4.812.000,00	96,24			
			Output :							
			Jumlah dokumen evaluasi kinerja yang disusun	dokumen	1,00	1,00	100,00			
			Outcome :							
			Tersusunnya dokumen evaluasi kinerja PD	dokumen	1,00	1,00	100,00			
		2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Rp.	**4.004.431.910,00**	**3.790.145.233,00**	**94,65**			
		a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	**Input :**							
			Dana	Rp.	3.711.031.910,00	3.543.457.733,00	95,48			
			Output :							
			Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan	ASN	33,00	33,00	100,00			
			Outcome :							
			Terpenuhinya kebutuhan gaji ASN	ASN	33,00	33,00	100,00			
		b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	**Input :**							
			Dana	Rp.	283.400.000,00	238.544.000,00	84,17			
			Output :							
			Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian /verifikasi keuangan SKPD	dokumen	12,00	12,00	100,00			
			Outcome :							
			Tersusun dan terpenuhinya dokumen SPJ	dokumen	12,00	12,00	100,00			
		c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	**Input :**							
			Dana	Rp.	5.000.000,00	4.717.000,00	94,34			
			Output :							
			Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	dokumen	1,00	1,00	100,00			
			Outcome :							
			Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun	dokumen	1,00	1,00	100,00			

NO.	PROGRAM	KEGIATAN						PERMASALAHAN	SOLUSI	KET
		NAMA KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SAT	TARGET	REALISASI	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		d Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD.	**Input :** Dana	Rp.	5.000.000,00	3.426.500,00	68,53	Efisiensi anggaran	Merencanakan sesuai kebutuhan	
			Output : Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/semesteran	dokumen	2,00	2,00	100,00			
			Outcome : Terpenuhinya laporan bulanan/tri wulanan/semesteran SKPD	dokumen	2,00	2,00	100,00			
		3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Rp.	**94.065.000,00**	**84.797.400,00**	**90,15**			
		a. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	**Input :** Dana	Rp.	5.000.000,00	4.854.400,00	97,09			
			Output : Jumlah laporan pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian yang disusun	Laporan	5,00	5,00	100,00			
			Outcome : Tersusunnya laporan pendataan dan pengolahan adm. Kepegawaian	Laporan	5,00	5,00	100,00			
		b. Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	**Input :** Dana	Rp.	5.000.000,00	4.563.000,00	91,26			
			Output : Jumlah laporan monitoring evaluasi dan penilaian kinerja pegawai yang disusun	dokumen	1,00	1,00	100,00			
			Outcome : Tersusunnya laporan monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	dokumen	1,00	1,00	100,00			
		c. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	**Input :** Dana	Rp.	84.065.000,00	75.380.000,00	89,67			
			Output : Jumlah ASN yg mengikuti pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Pegawai	48,00	48,00	100,00			
			Outcome : Meningkatnya SDM dari Aparatur Sipil Negara DPKP	Pegawai	48,00	48,00	100,00			

NO.	PROGRAM	KEGIATAN						PERMASALAHAN	SOLUSI	KET
		NAMA KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SAT	TARGET	REALISASI	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4 Administrasi Umum Perangkat Deerah		Rp.	**278.260.000,00**	**245.847.900,00**	**88,35**			
		a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	**Input :**							
			Dana	Rp.	89.760.000,00	89.388.000,00	99,59			
			Output :							
			Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli	Unit	8,00	8,00	100,00			
			Outcome :							
			Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai	Unit	8,00	8,00	100,00			
		b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	**Input :**							
			Dana	Rp.	75.000.000,00	51.916.500,00	69,22	Efisiensi anggaran	Merencanakan sesuai kebutuhan	
			Output :							
			Jumlah logistik kantor yang disediakan	Jenis	50,00	50,00	100,00			
			Outcome :							
			Tersedianya logistik kantor	Jenis	50,00	50,00	100,00			
		c. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	**Input :**							
			Dana	Rp.	22.000.000,00	14.614.800,00	66,43	Efisiensi anggaran	Merencanakan sesuai kebutuhan	
			Output :							
			Jumlah barang yang dicetak dan digandakan	Lembar	20.000,00	20.000,00	100,00			
			Outcome :							
			Tersedianya barang yang dicetak dan penggandaan	Lembar	20.000,00	20.000,00	100,00			
		d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	**Input :**							
			Dana	Rp.	4.000.000,00	3.960.000,00	99,00			
			Output :							
			Jumlah/jenis bahan bacaan yang disediakan tiap bulan	Buah	3,00	3,00	100,00			
			Outcome :							
			Tersedianya bahan bacaan dinas	Buah	3,00	3,00	100,00			

NO.	PROGRAM	KEGIATAN						PERMASALAHAN	SOLUSI	KET
		NAMA KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SAT	TARGET	REALISASI	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		e. Fasilitasi Kunjungan Tamu	**Input :**							
			Dana	Rp.	7.500.000,00	7.470.000,00	99,60			
			Output :							
			Jumlah tamu yang difasilitasi	Orang	150,00	150,00	100,00			
			Outcome :							
			Tersedianya makanan dan minuman tamu	Orang	150,00	150,00	100,00			
		f. Penyelenggaraan Rapat -rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	**Input :**							
			Dana	Rp.	80.000.000,00	78.498.600,00	98,12			
			Output :							
			Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang di ikuti	Kali	40,00	40,00	100,00			
			Outcome :							
			Terlaksananya rapat rapat koordinasi yang diikuti	Kali	40,00	40,00	100,00			
		5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Rp.	**262.897.635,00**	**207.914.599,00**	**79,09**			
		a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	**Input :**							
			Dana	Rp.	13.000.000,00	10.903.000,00	83,87			
			Output :							
			Jumlah surat masuk dan keluar yang dikelola	Surat	3.500,00	3.774,00	107,83			
			Outcome :							
			Terkelolanya surat dan terkirim ke tujuan	Surat	3.500,00	3.774,00	107,83			
		b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	**Input :**							
			Dana	Rp.	90.000.000,00	77.693.387,00	86,33			
			Output :							
			Jumlah rekening jasa sumber daya yang dibayar tiap bulan	Rekening	3,00	3,00	100,00			
			Outcome :							
			Tersedianya pembayaran rekening jasa sumber daya	Rekening	3,00	3,00	100,00			

NO.	PROGRAM	KEGIATAN						PERMASALAHAN	SOLUSI	KET
		NAMA KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SAT	TARGET	REALISASI	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	**Input :** Dana	Rp.	10.000.000,00	9.050.000,00	90,50			
			Output : Jumlah unit peralatan kantor yang dilakukan pemeliharaan/service	unit	10,00	10,00	100,00			
			Outcome : Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor	unit	10,00	10,00	100,00			
		d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	**Input :** Dana	Rp.	149.897.635,00	110.268.212,00	73,56	Efisiensi biaya karena masih ada 1(satu) Tenaga Harian Lepas yang kosong belum diisi	Tahun depan masih dianggarkan	
			Output : Jumlah SDM pelayanan umum yang disediakan	Orang	6,00	5,00	83,33			
			Outcome : Tersedianya pembayaran bagi tenaga pelayanan umum kantor	Orang	6,00	5,00	83,33			
		6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Rp.	**206.740.000,00**	**169.649.580,00**	**82,06**			
		a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	**Input :** Dana	Rp.	206.390.000,00	169.299.580,00	82,03			
			Output : Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara/difasilitasi	Unit	16,00	16,00	100,00			
			Outcome : Terpelihara dan terawatnya kendaraan dinas/jabatan	Unit	16,00	16,00	100,00			
		b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	**Input :** Dana	Rp.	350.000,00	350.000,00	100,00			
			Output : Jumlah kendaraan dinas operasional atau Lapangan yang dipelihara/difasilitasi	Unit	1,00	1,00	100,00			
			Outcome : Terpelihara dan terawatnya kendaraan operasional lapangan	Unit	1,00	1,00	100,00			

NO.	PROGRAM	KEGIATAN						PERMASALAHAN	SOLUSI	KET
		NAMA KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SAT	TARGET	REALISASI	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	**Program Pengembangan Perumahan**				**1.005.603.218,00**	**967.751.967,00**	**96%**			
		1 Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/kota			**27.400.000,00**	**26.269.000,00**	**99,98**			
		a Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP	**Input :**							
			Dana	Rp.	27.400.000,00	26.269.000,00	95,87			
			Output :							
			Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi	orang peserta	100,00	100,00	100,00			
			Outcome : Bertambahnya pengetahuan masyarakat di bidang Perumahan	orang peserta	100,00	100,00	100,00			
		2 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota			**50.000.000,00**	**49.940.000,00**	**97,63**			
		a Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana	**Input :** Dana	Rp.	50.000.000,00	49.940.000,00	99,88			
			Output : Jumlah rumah korban bencana yang direhabilitasi	penerima	8,00	8,00	100,00			
			Outcome : Tersedianya penanganan ruma korban bencana	penerima	8,00	8,00	100,00			
		3 Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus			**612.766.026,00**	**594.895.344,00**	**97,08**			
		a Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	**Input :** Dana	Rp.	612.766.026,00	594.895.344,00	97,08			
			Output : Jumlah rumah susun yang dipelihara	Unit	6,00	6,00	100,00			

NO.	PROGRAM	KEGIATAN						PERMASALAHAN	SOLUSI	KET
		NAMA KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SAT	TARGET	REALISASI	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Outcome : Terkelolanya rumah susun umum/khusun bagi masyarakat berpenghasilan rendah	Unit	6,00	6,00	100,00			
		4 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan			**267.837.192,00**	**258.869.623,00**	**96,65**			
		a Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum	**Input :** Dana	Rp.	267.837.192,00	258.869.623,00	96,65			
			Output : Jumlah dokumen site plan perumahan dan rumah susun yang diterbitkan	Dokumen	50,00	58,00	116,00			
			Outcome : Tersusunnya dokumen site plan perumahan dan rumah susun	Dokumen	50,00	58,00	116,00			
		5 Penerbitan Sertipikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)			**47.600.000,00**	**37.778.000,00**	**79,37**			
		a Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertipikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)	**Input :** Dana	Rp.	47.600.000,00	37.778.000,00	79,37			
			Output : Jumlah sertipikat kepemilikan bangunan gedung yang diterbitkan	Dokumen	1,00	1,00	100,00			
			Outcome : Terlaksananya koordinasi penerbitan dokumen kepemilikan	Dokumen	1,00	1,00	100,00			
3	**Program Kawasan Permukiman**				**717.688.128,00**	**607.346.298,00**	**85%**			
		1 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman			**1.760.000,00**	**1.759.800,00**	**99,98**			
		a Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman	**Input :** Dana	Rp.	1.760.000,00	1.759.800,00	99,99			
			Output : Jumlah dokumen pengawasan dan pengendalian kawasan permukiman/permukiman kumuh yang disusun	dokumen	1,00	1,00	100,00			

NO.	PROGRAM	KEGIATAN						PERMASALAHAN	SOLUSI	KET
		NAMA KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SAT	TARGET	REALISASI	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Outcome : Tersusunnya dokumen survey dan rancangan SK Bupati tentang penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh	dokumen	1,00	1,00	100,00			
		1 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha			**133.240.000,00**	**102.505.600,00**	**99,98**			
		a Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	**Input :** Dana	Rp.	14.350.000,00	10.937.800,00	76,22			
			Output : Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang dibentuk	KSM	10,00	10,00	100,00			
			Outcome : Terbentuknya KSM di masyarakat	KSM	10,00	10,00	100,00			
		b Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	**Input :** Dana	Rp.	75.000.000,00	53.518.900,00	71,36	Efisiensi biaya, karena sisa dari pembayaran honor dan masih ada Tenaga HarianLepas (THL) yang msih kosong.	Tahun depan masih dianggarkan	
			Output : Jumlah orang yang mengikuti penyuluhan tentang pencegahan tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh	Orang peserta	250,00	250,00	100,00			
			Outcome : Terwujudnya pemahaman masyarakat tentang penting nya mencegah kawasan kumuh	Orang peserta	250,00	250,00	100,00			
		b Penyusunan/Revieu/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	**Input :** Dana	Rp.	43.890.000,00	38.048.900,00	86,69			
			Output : Jumlah Dokumen kebijakan bidang perumahan dan kawasan permukiman yang disusun	Dokumen	1,00	1,00	100,00			
			Outcome : Tersedianya dokumen kebijakan bidang perumahan dan kawasan permukiman.	Dokumen	1,00	1,00	100,00			

NO.	PROGRAM	KEGIATAN						PERMASALAHAN	SOLUSI	KET
		NAMA KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SAT	TARGET	REALISASI	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas Di Bawah 10 (sepuluh) Ha			**582.688.128,00**	**503.080.898,00**	**99,98**			
		a Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	**Input :**							
			Dana	Rp.	582.688.128,00	503.080.898,00	86,34			
			Output :							
			Jumlah Dokumen koordinasi dan sinkronisasi pengendalian penyelenggaraan pemugaran/peremajaan permukiman kumuh	Dokumen	1,00	1,00	100,00			
			Outcome :							
			Tersedianya dokumen koordinasi dan sinkronisasi pengendalian penyelenggaraan pemugaran/peremajaan permukiman kumuh	Dokumen	1,00	1,00	100,00			
4	**Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh**				**2.955.500.000,00**	**2.937.025.300,00**	**99,98**			
		1 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh Pada Daerah Kabupaten/Kota		**Rp.**	**2.955.500.000,00**	**2.937.025.300,00**	**99,37**			
		a Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) ha.	**Input :**							
			Dana	Rp.	2.955.500.000,00	2.937.025.300,00	99,37			
			Output :							
			Jumlah rumah layak huni yang tertangani	Unit	1.400,00	1.355,00	96,79			
			Outcome :							
			Terlaksananya pembangunan rumah layak huni bangi masyarakat	Unit	1.400,00	1.355,00	96,79			
5	**Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)**									
		1 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan			**1.092.680.000,00**	**1.085.683.000,00**	**99%**			
					1.092.680.000,00	**1.085.683.000,00**	**99%**			
		a Perencanaan Penyediaan PSU	**Input :**							
			Dana	Rp.	231.100.000,00	230.931.000,00	99,93			

NO.	PROGRAM	KEGIATAN						PERMASALAHAN	SOLUSI	KET
		NAMA KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SAT	TARGET	REALISASI	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Output : Jumlah dokumen perencanaan PSU yang disusun	Dokumen	1,00	1,00	100,00			
			Outcome : Tersedianya dokumen perencanaan PSU Perumahan	Dokumen	1,00	1,00	100,00			
		b Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	**Input :** Dana	Rp.	634.900.000,00	629.277.000,00	99,11			
			Output : Jumlah PSU yang menunjang fungsi hunian yang dipelihara	Lokasi	3,00	3,00	100,00			
			Outcome : Terlaksananya pemeliharaan PSU	Lokasi	3,00	3,00	100,00			
		c Koordinasi dan Sinkronisasi Dalam Rangka Penyediaan PSU Perumahan	**Input :** Dana	Rp.	226.680.000,00	225.455.000,00	99,46			
			Output : Jumlah PSU Perumahan yang dimonitoring	Unit	25,00	48,00	192,00			
			Outcome : Terlaksananya penyerahan PSU Perumahan oleh pengembang	Unit	25,00	48,00	192,00			
		Total Anggaran			**10.662.865.891,00**	**10.137.936.777,00**	**95,08**	**524.929.114,00**		

Sukoharjo, Januari 2023

KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN SUKOHARJO,

LANJAR BUDI WAHONO, S.T.
Pembina Tingkat I
NIP. 19691128 199703 1 007

LAMPIRAN III

RUMUSAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2024 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025

RENCANA KERJA

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN SUKOHARJO

LAMPIRAN 3

RUMUSAN PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2024 DAN PRA KIRAAN MAJU TAHUN 2025

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
					Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman													
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	04				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN								10.680.851.000,00					12.680.554.000,00
1	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN								1.087.550.000,00					1.090.000.000,00
1	04	02	2,01		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota								130.000.000,00					100.000.000
1	04	02	2,01	0009	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota													
						-	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	H	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	-	12 Dokumen	-	130.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	12 Dokumen	100.000.000,00
1	04	02	2,03		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota								75.000.000,00					100.000.000,00
1	04	02	2,03	0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana													
						-	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	-	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	-	12 Unit Rumah	-	75.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	12 Unit Rumah	100.000.000,00
1	04	02	2,05		Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus								500.000.000,00					600.000.000,00
1	04	02	2,05	0002	Pemataubahan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus													
						-	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	-	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	-	12 Dokumen	-	500.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	12 Dokumen	600.000.000,00
1	04	02	2,06		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan								247.550.000,00					200.000.000,00
1	04	02	2,06	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum													
						Prosentase pemenuhan kebutuhan rumah baru (backlog)	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum	Prosentase rekomendasi/pengesahan dokumen site plan perumahan dan rusun	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 %	12 Laporan	100 %	247.550.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum	12 Laporan	200.000.000,00
1	04	02	2,07		Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)								35.000.000					35.000.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	04	02	2,07	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)													
						-	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	-	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	-	12 Laporan	-	35.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	12 Laporan	35.000.000
1	04	03			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN								637.100.000,00					731.750.000,00
1	04	03	2,02		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha								77.100.000,00					131.750.000,00
1	04	03	2,02	0004	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh													
						-	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	-	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	-	12 Laporan	-	77.100.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	12 Laporan	131.750.000,00
1	04	03	2,03		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha								560.000.000,00					600.000.000,00
1	04	03	2,03	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh													
						-	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	-	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	-	12 Laporan	-	75.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan	12 Laporan	115.000.000,00
1	04	03	2,03	0009	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh													
						-	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan	-	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	-	32 Ha	-	485.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan	32 Ha	485.000.000,00
1	04	04			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH								2.187.450.000,00					3.800.000.000,00
1	04	04	2,01		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota								2.187.450.000,00					3.800.000.000,00
1	04	04	2,01	0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha													
						-	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	-	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	-	1400 Unit Rumah	-	2.187.450.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembang nya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	1400 Unit Rumah	3.800.000.000,00
1	04	05			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)								930.250.000,00					1.818.667.000,00
1	04	05	2,01		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan								930.250.000,00					1.818.667.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	04	05	2,01	0001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan													
						-	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	-	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	-	1 Dokumen	-	75.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	1 Dokumen	100.000.000,00
1	04	05	2,01	0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian													
						-	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	-	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	-	4 Lokasi	-	505.250.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	4 Lokasi	716.607.000,00
1	04	05	2,01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan													
						-	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	-	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	-	12 Laporan	-	200.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	12 Laporan	250.000.000,00
1	04	05	2,01	0009	Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Permukiman													
						-	Jumlah Dokumen Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan	-	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	-	12 Dokumen	-	50.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Kerja Sama Penyediaan/ Pengelolaan PSU Perumahan	12 Dokumen	150.000.000,00
1	04	05	2,01	0010	Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang													
						-	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	-	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	-	25 Laporan	-	100.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	25 Laporan	300.000.000,00
1	04	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								8.736.301.000,00					8.499.197.000,00
1	04	01	2,01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								55.000.000,00					55.000.000,00
1	04	01	2,01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
						-	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	-	2 Dokumen	-	35.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	35.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	04	01	2,01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD													
						-	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	-	2 Dokumen	-	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	5.000.000,00
1	04	01	2,01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD													
						-	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	-	2 Dokumen	-	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	5.000.000,00
1	04	01	2,01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													
						-	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	-	1 Laporan	-	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	5.000.000,00
1	04	01	2,01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
						-	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	-	1 Laporan	-	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	5.000.000,00
1	04	01	2,02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**4.834.864.000,00**					**4.643.400.000,00**
1	04	01	2,02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
						-	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	-	36 Orang/bulan	-	4.641.104.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36 Orang/bulan	4.350.000.000,00
1	04	01	2,02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD													
						-	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	-	12 Dokumen	-	283.400.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	283.400.000,00
1	04	01	2,02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
										Target Capaian Kinerja								
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
																Tolok Ukur	Target	
						-	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	-	1 Laporan	-	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	5.000.000,00
1	04	01	2,02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD													
						-	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	-	2 Laporan	-	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	5.000.000,00
1	04	01	2,06		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								80.000.000,00					80.000.000,00
1	04	01	2,05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian													
						-	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	-	5 Dokumen	-	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5 Dokumen	5.000.000,00
1	04	01	2,05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai													
						-	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	-	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	-	1 Dokumen	-	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	5.000.000,00
1	04	01	2,05	0011	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi													
						-	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	-	50 Orang	-	75.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50 Orang	80.000.000,00
1	04	01	2,08		Administrasi Umum Perangkat Daerah								218.500.000,00					236.500.000,00
1	04	01	2,08	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
						-	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	-	5 Paket	-	47.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	55.000.000,00
1	04	01	2,05	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	-	50 Paket	-	70.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	50 Paket	70.000.000,00
1	04	01	2,06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
						-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	-	2 Paket	-	20.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	20.000.000,00
1	04	01	2,06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
						-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	-	3 Dokumen	-	4.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	4.000.000,00
1	04	01	2,06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu													
						-	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	-	1 Laporan	-	7.600.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	7.600.000,00
1	04	01	2,06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
						-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	-	70 Laporan	-	70.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70 Laporan	70.000.000,00
1	04	01	2,06		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								248.997.000,00					248.997.000,00
1	04	01	2,06	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
						-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	-	2 Laporan	-	10.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	10.000.000,00
1	04	01	2,06	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
						-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	-	12 Laporan	-	80.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	80.000.000,00
1	04	01	2,06	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
						-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	-	12 Laporan	-	10.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	10.000.000,00
1	04	01	2,06	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													

Kode					Uraian / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	-	12 Laporan	-	149.897.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	149.897.000,00
1	04	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								195.400.000,00					195.400.000,00
1	04	01	2,09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
						-	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	-	16 Unit	-	195.400.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	16 Unit	195.400.000,00
TOTAL																		12.598.864.000,00

SALINAN

BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 35 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024;

b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 273 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan Kepala Daerah setelah Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 192) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 262);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tatacara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 200);
13. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);
14. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 298);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

Renja Perangkat Daerah disusun dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Pasal 3

Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

BAB II

SISTEMATIKA DAN FUNGSI RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 4

Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. bab I : pendahuluan;
b. bab II : hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu;
c. bab III : tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
d. bab IV : rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan
e. bab V : penutup.

Pasal 5

Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah.

BAB II

PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 6

(1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah.
(2) Kepala Perangkat Daerah melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi Renja Perangkat Daerah kepada Bupati melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.

BAB III

PERANGKAT DAERAH PENYUSUN

Pasal 7

(1) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun oleh Perangkat Daerah sebagai berikut:
    a. Sekretariat Daerah;
    b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
    c. Inspektorat Daerah;
    d. Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan;
    e. Dinas Kesehatan;
    f. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang;
    g. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
    h. Satuan Polisi Pamong Praja;
    i. Dinas Sosial;

j. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak;
k. Dinas Pangan;
l. Dinas Lingkungan Hidup;
m. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil;
n. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa;
o. Dinas Perhubungan;
p. Dinas Komunikasi Dan Informatika;
q. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
r. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;
s. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
t. Dinas Pertanian dan Perikanan;
u. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah dan Perdagangan;
v. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
w. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
x. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
y. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
z. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
aa. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
bb. Kecamatan Weru;
cc. Kecamatan Bulu;
dd. Kecamatan Tawangsari;
ee. Kecamatan Sukoharjo;
ff. Kecamatan Nguter;
gg. Kecamatan Bendosari;
hh. Kecamatan Polokarto;
ii. Kecamatan Mojolaban;
jj. Kecamatan Grogol;
kk. Kecamatan Baki;
ll. Kecamatan Gatak; dan
mm. Kecamatan Kartasura.

(2) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf mm tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 10 Agustus 2023

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 10 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd.

WIDODO

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2023 NOMOR 35

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ditandatangani secara elektronik oleh :

TEGUH PRAMONO, SH, MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19710429 199803 1 003

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 35 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN
SUKOHARJO TAHUN 2024

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2024

Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 terdiri atas:

1. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Inspektorat Daerah;
4. Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan;
5. Dinas Kesehatan;
6. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang;
7. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
8. Satuan Polisi Pamong Praja;
9. Dinas Sosial;
10. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak;
11. Dinas Pangan;
12. Dinas Lingkungan Hidup;
13. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil;
14. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa;
15. Dinas Perhubungan;
16. Dinas Komunikasi Dan Informatika;
17. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
18. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;
19. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
20. Dinas Pertanian dan Perikanan;
21. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah dan Perdagangan;
22. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
23. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
24. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
25. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
26. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
27. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
28. Kecamatan Weru;
29. Kecamatan Bulu;

30. Kecamatan Tawangsari;
31. Kecamatan Sukoharjo;
32. Kecamatan Nguter;
33. Kecamatan Bendosari;
34. Kecamatan Polokarto;
35. Kecamatan Mojolaban;
36. Kecamatan Grogol;
37. Kecamatan Baki;
38. Kecamatan Gatak; dan
39. Kecamatan Kartasura.

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2024

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA(DPMD)
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, sang Maha Pencipta Semesta Alam, karena dengan rahmat dan hidayah Nya, DPMD Kabupaten Sukoharjo telah menyelesaikan penyusunan Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2024.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) merupakan acuan perencanaan kegiatan PD selama satu tahun dan merupakan penjabaran tahunan dari RPJMD dan Renstra-PD. Adapun penyusunan Renja-PD merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, sedangkan aturan secara rinci berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Rencana Kerja Tahun 2024 adalah merupakan dokumen perencanaan tahun kedua dari Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026 yang memuat rencana tujuan dan sasaran periode tersebut yang hendak dicapai pada APBD di Tahun 2024. Dokumen ini menjadi salah satu referensi untuk formulasi, implementasi, monitoring dan evaluasi kebijakan serta memberi manfaat dalam upaya serapan anggaran yang rasional dan kinerja yang profesional, akuntabel dan transparan untuk pembangunan yang berasaskan keadilan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Selanjutnya harapan kami Rancangan Akhir Rencana Kerja PD ini dapat menjadi acuan pencapaian kinerja dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi DPMD Kabupaten Sukoharjo, yang pada akhirnya diharapkan dapat menunjang tercapainya pembangunan Kabupaten Sukoharjo.

Sukoharjo, Agustus 2023

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN SUKOHARJO

ROHMADI, S.H., M.Si.
Pembina
NIP.19690730 199503 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR II

DAFTAR ISI II

DAFTAR TABEL 3

BAB I 2

PENDAHULUAN 2

1.1. LATAR BELAKANG 2

1.2. LANDASAN HUKUM 3

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN 5

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN 5

BAB II 6

HASIL EVALUASI RENJA DPMD TAHUN LALU 7

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja DPMD Tahun Lalu dan Capaian Renstra DPMD 7

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan DPMD 55

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPMD 65

2.3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa 65

2.3.2 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DPMD 69

2.3.3 Penentuan Isu-Isu Strategis 70

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD 70

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 98

BAB III 101

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 101

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 101

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja DPMD 101

3.2.1 Tujuan 102

3.2.2 SASARAN 102

Rumusan tujuan dan sasaran Renja DPMD Kabupaten Sukoharjo beserta target indikator kinerja yang akan dicapai disajikan dalam tabel 4.1.: 103

1.1 Program dan Kegiatan 104

BAB IV 129
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN 129
BAB V 141
P E N U T U P 141

DAFTAR TABEL

TABEL 2. 1 REALISASI ANGGARAN PER PROGRAM TAHUN ANGGARAN 2022 8
TABEL 2. 2 REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2023 KABUPATEN SUKOHARJO 10
TABEL 2. 3 PENCAPAIAN KINERJA DPMD TAHUN 2023 63
TABEL 2. 4 PEMETAAN PERMASALAHAN DAN AKAR MASALAH DPMD KABUPATEN SUKOHARJO 65
TABEL 2. 7 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD DAN ANALISIS KEBUTUHAN TA 2024 72
TABEL 2. 8 USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TA 2024 98
TABEL 3. 1 TUJUAN DAN SASARAN DPMD TAHUN 2024 103
TABEL 3. 2 RUMUSAN PROGRAM DAN KEGIATAN DPMD TAHUN 2024 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2025 106
TABEL 4. 1 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DPMD TAHUN ANGGARAN 2024 130

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun yang merupakan terjemahan dari perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai dokumen Perangkat Daerah, Renja mempunyai kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untukmendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah, adalah meliputi:

1. persiapan penyusunan;
2. penyusunan rancangan awal;

3. penyusunan rancangan
4. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
5. perumusan rancangan akhir; dan
6. penetapan.

Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD serta didasarkan pada evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah dan pada akhirnya Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukun penyusunan Renja DPMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024, adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender untuk Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RRPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5

Tahun 2012 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 - 2026;
14. Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2022 tentang tentang kedudukan, Susunan Organisasi , Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja DPMD Kabupaten Sukoharjo.
15. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 43 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 – 2026.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

   Maksud disusunnya Renja adalah untuk merumuskan rencana kerja DPMD Kabupaten Sukoharjo untuk periode 1 (satu) tahun sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Renstra Perangkat Daerah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dalam pembangunan daerah serta mewujudkan efisiensi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

2. Tujuan

   Tujuan disusunnya Renja adalah sebagai pedoman:

   a. Pelaksanaan pelayanan DPMD;
   b. Pelaksanaan dan evaluasi program, kegiatan dan sub kegiatan;
   c. Penyusunan rencana anggaran DPMD;
   d. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan DPMD melalui capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan;

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Adapun sistematika penyusunan Renja DPMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Bab I PENDAHULUAN

Bab ini memberi gambaran umum tentang penyusunan Renja DPMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024, yang meliputi :

1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan

Bab II HASIL EVALUASI RENJA DPMD TAHUN LALU

Bab ini memuat terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja DPMD Tahun 2022 dan perkiraan Tahun 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja DPMD Tahun Lalu dan Capaian Renstra DPMD
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan DPMD
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPMD
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5. Penelaahan Usulan

Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III TUJUAN DAN SASARAN

DPMD

Bab ini menguraikan tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang direncanakan

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
3.2. Tujuan dan sasaran Renja DPMD
3.3. Program dan Kegiatan

Bab IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Bab V PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA DPMD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja DPMD Tahun Lalu dan Capaian Renstra DPMD

Rencana Kerja DPMD Kabupaten Sukoharjo merupakan penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis DPMD Kabupaten Sukoharjo, tercapai tidaknya pelaksanaan program yang telah diformulasikan dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. untuk itu diperlukan tahapan evaluasi dalam rangka mengukur tingkat keberhasilan kebijakan yang telah diformulasikan dan diimplementasikan oleh DPMD Kabupaten Sukoharjo.

Evaluasi memainkan sejumlah fungsi utama dalam analisis kebijakan, karena evaluasi memiliki beberapa tujuan diantaranya dengan adanya evaluasi terhadap suatu kebijakan atau program maka diharapkan kebijakan kedepannya akan lebih baik. selain dari pada itu, evaluasi juga untuk mengetahui apakah suatu kebijakan berhasil atau gagal, point selanjutnya evaluasi kebijakan digunakan untuk memenuhi aspek akuntabilitas publik, karena dengan melakukan penilaian kinerja suatu kebijakan maka dapat dipahami sebagai bentuk pertanggungjawaban Pemerintah kepada Publik sebagai pemilik dana dan mengambil manfaat dari kebijakan dan program Pemerintah. Lebih lanjut dapat disampaikan evaluasi kebijakan dilakukan agar tidak mengulangi kesalahan yang sama dan pada akhirnya evaluasi kebijakan bermanfaat untuk memberikan masukan bagi proses pengambilan kebijakan yang akan datang.

Demikian dapat dimaknai secara umum Rencana Kerja DPMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 memuat rencana program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai tugas dan fungsinya mendukung capaian Visi Pemerintah Kabupaten Sukoharjo "**Terwujudnya Masyarakat Sukoharjo yang lebih Makmur**" melalui Misi 3 yaitu "**Memperkuat Perekonomian Rakyat yang Berdaya Saing Tinggi"** yang tertuang dalam Renstra DPMD Kabupaten Sukoharjo. Keberhasilan perencanaan dapat dilihat dari hasil evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya, sejauh mana pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan berdampak terhadap capaian yang telah ditetapkan di dalam Renstra Perangkat Daerah, hasil dari evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan- kebijakan perencanaan. Dukungan pembiayaan pelaksanaan kegiatan- kegiatan DPMD Kabupaten Sukoharjo, berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah(APBD) Kabupaten Sukoharjo berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 ,Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2022 tanggal 03 Oktober 2022.

Total Alokasi anggaran belanja Tahun 2022 sebesar Rp.15.012.830.384,00 dan jumlah anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 14.510.510.184,00 atau sebesar 96,65%.

Tabel 2. 1 Realisasi Anggaran per Program Tahun Anggaran 2022

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi Tahun 2022	
			Anggaran (Rp)	Capaian
1	2	3	4	5
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.634.261.384	4.254.527.728	91,81%
2	PROGRAM PENATAAN DESA	2.494.510.000	2.490.884.036	99,85%

3	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	280.000.000	279.607.520	99,86%
4	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	3.143.540.000	3.073.516.100	96,63%
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	4.460.519.000	4.447.974.800	99,72%
JUMLAH		**15.012.830.384**	**14.510.510.184**	**96,65%**

Berdasarkan besar penyerapan dana sebagaimana dijelaskan di atas, maka telah terjadi penyimpangan/deviasi positif sebesar **3,35%** dari alokasi dana, atau tercapai sisa lebih sebesar Rp. **502.320.200,00** yang disebabkan oleh :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, sebesar 91,81% dikarenakan disesuaikan dengan kebutuhan;
2. Program Penataan Desa, sebesar 99,85% dikarenakan disesuaikan dengan kebutuhan;
3. Program Peningkatan Kerja Sama Desa, sebesar 99,86% dikarenakan disesuaikan dengan kebutuhan;
4. Program Administrasi Pemerintahan Desa, sebesar 96,63% dikarenakan disesuaikan dengan kebutuhan.
5. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat sebesar 99,72% dikarenakan disesuaikan dengan kebutuhan.

Tabel 2. 2 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 Kabupaten Sukoharjo

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD)

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Kinerja Capaian Program (Renstra DPMD) Tahun 2022	Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja DPMD tahun 2023	Perkiraan realisasi capaian target renstra perangkat daerah s/d tahun 2023	
										Target Renja DPMD tahun 2022	Realisasi Renja DPMD tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2						URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2	13					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA									

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Kinerja Capaian Program (Renstra DPMD) Tahun 2022	Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja DPMD tahun 2023	Perkiraan realisasi capaian target renstra perangkat daerah s/d tahun 2023	
										Target Renja DPMD tahun 2022	Realisasi Renja DPMD tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	13	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kegiatan Pelayanan Urusan Pemerintah Daerah	100	88	100	100	100%	100	100	100%
2	13	01	2	01		KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGARAN, dan EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Cakupan Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100	100	100	100	100%	100	100	100%
2	13	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	2	2	2	2	100%			
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						2	2	100%

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Kinerja Capaian Program (Renstra DPMD) Tahun 2022	Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja DPMD tahun 2023	Perkiraan realisasi capaian target renstra perangkat daerah s/d tahun 2023	
										Target Renja DPMD tahun 2022	Realisasi Renja DPMD tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	13	01	2	01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA	1	1	1	1	100%			
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						1	1	100%
2	13	01	2	01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA	1	1	1	1	100%			
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan						1	1	100%

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Kinerja Capaian Program (Renstra DPMD) Tahun 2022	Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja DPMD tahun 2023	Perkiraan realisasi capaian target renstra perangkat daerah s/d tahun 2023	
										Target Renja DPMD tahun 2022	Realisasi Renja DPMD tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
							Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD								
2	13	01	2	01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA	1	1	2	2	100%			
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD						1	1	100%
2	13	01	2	01	05	Koordinasi dan Penyusunan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA	1	1	1	1	100%			

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Kinerja Capaian Program (Renstra DPMD) Tahun 2022	Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja DPMD tahun 2023	Perkiraan realisasi capaian target renstra perangkat daerah s/d tahun 2023	
										Target Renja DPMD tahun 2022	Realisasi Renja DPMD tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
						Perubahan DPA-SKPD									
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD					1	1	100%
2	13	01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian,Realisasi Kinerja SKPD	4	1	4	4	100%			

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Kinerja Capaian Program (Renstra DPMD) Tahun 2022	Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja DPMD tahun 2023	Perkiraan realisasi capaian target renstra perangkat daerah s/d tahun 2023	
										Target Renja DPMD tahun 2022	Realisasi Renja DPMD tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						5	5	100%
2	13	01	2	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen LKPJ,LPPD,LAKIP ,SAKIP	4	4	4	4	100%			

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Kinerja Capaian Program (Renstra DPMD) Tahun 2022	Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja DPMD tahun 2023	Perkiraan realisasi capaian target renstra perangkat daerah s/d tahun 2023	
										Target Renja DPMD tahun 2022	Realisasi Renja DPMD tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						4	4	100%
2	13	01	2	02		KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Cakupan administrasi keuangan perangkat daerah	100	100	100	100	100%	100	100	100%
2	13	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Gaji	12	12	12	12	100%			
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN						31	31	100%
2	13	01	2	02	03	Pelaksanaan penatausahaan dan Penguji/Verivikasi Keuangan SKPD	Jumlah pelaksanaan penatausahaan	12	12	12	12	100%			

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Kinerja Capaian Program (Renstra DPMD) Tahun 2022	Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja DPMD tahun 2023	Perkiraan realisasi capaian target renstra perangkat daerah s/d tahun 2023	
										Target Renja DPMD tahun 2022	Realisasi Renja DPMD tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						12	12	100%
2	13	01	2	02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	1	1	1	1	100%			
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan						2	2	100%

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Kinerja Capaian Program (Renstra DPMD) Tahun 2022	Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja DPMD tahun 2023	Perkiraan realisasi capaian target renstra perangkat daerah s/d tahun 2023	
										Target Renja DPMD tahun 2022	Realisasi Renja DPMD tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
							Keuangan Akhir Tahun SKPD								
2	13	01	2	02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/triwulanan/semesteran	12	12	12	12	100%			
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD							12	12	100%

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Kinerja Capaian Program (Renstra DPMD) Tahun 2022	Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja DPMD tahun 2023	Perkiraan realisasi capaian target renstra perangkat daerah s/d tahun 2023	
										Target Renja DPMD tahun 2022	Realisasi Renja DPMD tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	13	01	2	02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Prognosis Realisasi	1	1	1	1	100%			
						Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran							1	1	100%
2	13	01	2	03		KEGIATAN ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	Cakupan Administrasi barang milik daerah pada SKPD	100		100	0		100	100	100%

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Kinerja Capaian Program (Renstra DPMD) Tahun 2022	Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja DPMD tahun 2023	Perkiraan realisasi capaian target renstra perangkat daerah s/d tahun 2023	
										Target Renja DPMD tahun 2022	Realisasi Renja DPMD tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	13	01	2	03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan barang milik daerah pada SKPD	5		5	0				
							Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD						5	5	100%
2	13	01	2	05		KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	50	100	95	95%	100	100	100%
2	13	01	2	05	02	Pengadfaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas	0	1						

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Kinerja Capaian Program (Renstra DPMD) Tahun 2022	Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja DPMD tahun 2023	Perkiraan realisasi capaian target renstra perangkat daerah s/d tahun 2023	
										Target Renja DPMD tahun 2022	Realisasi Renja DPMD tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan						37	37	100%
2	13	01	2	05	03	Pendataan & Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Data Pegawai	40	40	40	37	92,50%			
							Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian						3	3	100%
2	13	01	2	05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan sistem informasi kepegawaian	2		2	2	100%			

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Kinerja Capaian Program (Renstra DPMD) Tahun 2022	Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja DPMD tahun 2023	Perkiraan realisasi capaian target renstra perangkat daerah s/d tahun 2023	
										Target Renja DPMD tahun 2022	Realisasi Renja DPMD tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian						1	1	100%
2	13	01	2	06		KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Cakupan Administrasi umum perangkat daerah	100	68	100	100.75	100,75%	100	100	100%
2	13	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan komponen instalasi listrik	15	15	15	15	100%			
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan						1	1	100%

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Kinerja Capaian Program (Renstra DPMD) Tahun 2022	Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja DPMD tahun 2023	Perkiraan realisasi capaian target renstra perangkat daerah s/d tahun 2023	
										Target Renja DPMD tahun 2022	Realisasi Renja DPMD tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
							Kantor yang Disediakan								
2	13	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	6		6	6	100%			
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan						1	1	100%
2	13	01	2	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	252	192	252	226	89,68%			

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Kinerja Capaian Program (Renstra DPMD) Tahun 2022	Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja DPMD tahun 2023	Perkiraan realisasi capaian target renstra perangkat daerah s/d tahun 2023	
										Target Renja DPMD tahun 2022	Realisasi Renja DPMD tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
							Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan						1	1	100%
2	13	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bulan Pemenuhan Bahan Logistik Kantor	12	12	12	12	100%			
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan						3	3	100%
2	13	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Cetakan dan Penggandaan	62.000	60717	62.000	62475	100,77%			
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan						2	2	100%

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Kinerja Capaian Program (Renstra DPMD) Tahun 2022	Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja DPMD tahun 2023	Perkiraan realisasi capaian target renstra perangkat daerah s/d tahun 2023	
										Target Renja DPMD tahun 2022	Realisasi Renja DPMD tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	13	01	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan	48	36	48	48	100%			
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan						1	1	100%
2	13	01	2	06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu yang Terfasilitasi	20	14	3	3	100%			

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Kinerja Capaian Program (Renstra DPMD) Tahun 2022	Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja DPMD tahun 2023	Perkiraan realisasi capaian target renstra perangkat daerah s/d tahun 2023	
										Target Renja DPMD tahun 2022	Realisasi Renja DPMD tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu						20	20	100%
2	13	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Pelaksanaan Perjalanan Dinas dan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	45	50	45	78	173,33%			
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						45	45	100%

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Kinerja Capaian Program (Renstra DPMD) Tahun 2022	Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja DPMD tahun 2023	Perkiraan realisasi capaian target renstra perangkat daerah s/d tahun 2023	
										Target Renja DPMD tahun 2022	Realisasi Renja DPMD tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	13	01	2	07		KEGIATAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Cakupan Pengadaan barang milik penunjang urusan pemerintah daerah	100	100	100	100	100%	100	100	100%
2	**13**	**01**	**2**	**07**	**01**	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		1						
2	13	01	2	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit pengadaan peralatan dan mesin	2	7	2	2	100%			

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Kinerja Capaian Program (Renstra DPMD) Tahun 2022	Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja DPMD tahun 2023	Perkiraan realisasi capaian target renstra perangkat daerah s/d tahun 2023	
										Target Renja DPMD tahun 2022	Realisasi Renja DPMD tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	13	01	2	08		KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100	100	100	100	100%	100	100	100%
2	13	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa surat menyurat	1.500	1582	1.500	3006	119,99%			
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat						12	12	100%
2	13	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran jasa komunikasi	12	12	12	9	78,92%			
2	13	01	2	08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah unit Peralatan kantor yang dilakukan pemeliharaan/servis	10	10	10	10	100%			

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Kinerja Capaian Program (Renstra DPMD) Tahun 2022	Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja DPMD tahun 2023	Perkiraan realisasi capaian target renstra perangkat daerah s/d tahun 2023	
										Target Renja DPMD tahun 2022	Realisasi Renja DPMD tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	13	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pembayaran jasa pelayanan umum kantor	12	12	12	12	100%			
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan						12	12	100%
2	13	01	2	09		KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100	100	100	100	100%	100	100	100%

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Kinerja Capaian Program (Renstra DPMD) Tahun 2022	Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja DPMD tahun 2023	Perkiraan realisasi capaian target renstra perangkat daerah s/d tahun 2023	
										Target Renja DPMD tahun 2022	Realisasi Renja DPMD tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	13	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah Unit Kendaraan yang mendapatkan jasa,biaya, pemeliharaan dan pajak kendaraan	20	21	20	20	100%			
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya						20	20	100%
2	13	01	2	09	05	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara						10	10	100%

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Kinerja Capaian Program (Renstra DPMD) Tahun 2022	Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja DPMD tahun 2023	Perkiraan realisasi capaian target renstra perangkat daerah s/d tahun 2023	
										Target Renja DPMD tahun 2022	Realisasi Renja DPMD tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	13	02				PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Penyelenggaraan Penataan Desa	100	100	100	100	100%	100	100	100%
2	13	02	2	01		KEGIATAN PENYELENGGARAAN PENATAAN DESA	Cakupan Fasilitasi Penyelenggaraan Penataan Desa	100	100	100	100	100%	100	100	100%
2	13	02	2	01	03	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi penataan kewenangan desa	30	30	30	30	100%			
							Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya						150	150	100%
2	13	02	2	01	06	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa (Bantuan Keuangan Propinsi dan Bankeu Kab)	Jumlah Desa yang Mendapat Fasilitasi Sarpras Desa	150	100	150	150	100%			

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Kinerja Capaian Program (Renstra DPMD) Tahun 2022	Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja DPMD tahun 2023	Perkiraan realisasi capaian target renstra perangkat daerah s/d tahun 2023	
										Target Renja DPMD tahun 2022	Realisasi Renja DPMD tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	13	03				PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Persentase Desa yang Melakukan Kerja Sama Desa	4,67	2,67	4,67	4,67	100%	6,67	6,67	100%
2	13	03	2	01		KEGIATAN FASILITASI KERJA SAMA ANTAR DESA	Cakupan fasilitasi kerja sama antar desa	100	100	100	100	100%	100	100	100%
2	13	03	2	01	01	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten / Kota	Jumlah Desa yang Melakukan Kerja Sama Antar Desa Dalam Kab/Kota	7	4	7	7	100%			
							Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota						1	1	100%

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Kinerja Capaian Program (Renstra DPMD) Tahun 2022	Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja DPMD tahun 2023	Perkiraan realisasi capaian target renstra perangkat daerah s/d tahun 2023	
										Target Renja DPMD tahun 2022	Realisasi Renja DPMD tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	13	03	2	01	02	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak ketiga dalam Kabupaten / Kota	Jumlah Desa yang Melakukan Kerja Sama Antar Desa Dengan Pihak Ketiga	1	150	1	1	100%			
							Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota						1	1	100%
2	13	03	2	01	03	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Desa yang mengikuti sosialisasi Kawasan perdesaan		150						

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Kinerja Capaian Program (Renstra DPMD) Tahun 2022	Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja DPMD tahun 2023	Perkiraan realisasi capaian target renstra perangkat daerah s/d tahun 2023	
										Target Renja DPMD tahun 2022	Realisasi Renja DPMD tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
							Jumlah Kawasan yang terbentuk	1		1	1	100%			
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan						1	1	100%
2	13	04				PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Prosentase Desa Yang Penyelenggaraan Administrasinya Tertib	40	33,33	40	40	100%	46,67	46,67	100%

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Kinerja Capaian Program (Renstra DPMD) Tahun 2022	Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja DPMD tahun 2023	Perkiraan realisasi capaian target renstra perangkat daerah s/d tahun 2023	
										Target Renja DPMD tahun 2022	Realisasi Renja DPMD tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	13	04	2	01		KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Cakupan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	100	100	100	100	100%	100	100	100%
2	13	04	2	01	01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang dimonitoring dan dievaluasi dalam bidang administrasi pemerintahan desa	22	22	33	33	100%			
							Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi						1	1	100%

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Kinerja Capaian Program (Renstra DPMD) Tahun 2022	Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja DPMD tahun 2023	Perkiraan realisasi capaian target renstra perangkat daerah s/d tahun 2023	
										Target Renja DPMD tahun 2022	Realisasi Renja DPMD tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
							Pemerintahan Desa								
2	13	04	2	01	02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Regulasi atau Aturan Tentang Desa yang Ditetapkan	2	4	4	4	100%			
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa						2	2	100%

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Kinerja Capaian Program (Renstra DPMD) Tahun 2022	Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja DPMD tahun 2023	Perkiraan realisasi capaian target renstra perangkat daerah s/d tahun 2023	
										Target Renja DPMD tahun 2022	Realisasi Renja DPMD tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	13	04	2	01	03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Desa yang Mengikuti Bimtek Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	150	150	150	150	100%			
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa						1	1	100%
2	13	04	2	01	04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Desa yang Menerima ADD, DD dan yang dikendalikan APBDesnya	150	150	150	150	100%			

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Kinerja Capaian Program (Renstra DPMD) Tahun 2022	Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja DPMD tahun 2023	Perkiraan realisasi capaian target renstra perangkat daerah s/d tahun 2023	
										Target Renja DPMD tahun 2022	Realisasi Renja DPMD tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa						3	3	100%
2	13	04	2	01	05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	150	150	150	150	100%			
							Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas						150	150	100%
2	13	04	2	01	06	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah Desa yang diberikan Fasilitasi Dalam Penyelenggaraan	150	150	150	150	100%			

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Kinerja Capaian Program (Renstra DPMD) Tahun 2022	Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja DPMD tahun 2023	Perkiraan realisasi capaian target renstra perangkat daerah s/d tahun 2023	
										Target Renja DPMD tahun 2022	Realisasi Renja DPMD tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
							Musyawarah Desa								
							Jumlah Laporan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa						1	1	100%
2	13	04	2	01	07	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah Desa yang Produk Hukumnya dilakukan Evaluasi dan Pengawasan	150	150	150	150	100%			

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Kinerja Capaian Program (Renstra DPMD) Tahun 2022	Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja DPMD tahun 2023	Perkiraan realisasi capaian target renstra perangkat daerah s/d tahun 2023	
										Target Renja DPMD tahun 2022	Realisasi Renja DPMD tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
							Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa						1	1	100%
2	13	04	2	01	08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerjasama antar Desa	Jumlah BUMDes dan Lembaga Kerjasama Antar Desa yang dibina	125		11	11	100%			
							Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa						1	1	100%

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Kinerja Capaian Program (Renstra DPMD) Tahun 2022	Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja DPMD tahun 2023	Perkiraan realisasi capaian target renstra perangkat daerah s/d tahun 2023	
										Target Renja DPMD tahun 2022	Realisasi Renja DPMD tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	13	04	2	01	09	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Desa yang Melaksanakan Pemilihan, Pemberhentian dan Penetapan Kepala Desa	13	1	16	16	100%			
							Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa						1	1	100%
2	13	04	2	01	10	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Desa yang Melakukan Pengangkatan dan	15	20	20	20	100%			

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Kinerja Capaian Program (Renstra DPMD) Tahun 2022	Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja DPMD tahun 2023	Perkiraan realisasi capaian target renstra perangkat daerah s/d tahun 2023	
										Target Renja DPMD tahun 2022	Realisasi Renja DPMD tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
							Pemberhentian Perangkat Desa								
							Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa						1	1	100%
2	13	04	2	01	11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Peserta yang mengikuti Pelatihan Penyusunan Profil Desa	150	150	150	150	100%			

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Kinerja Capaian Program (Renstra DPMD) Tahun 2022	Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja DPMD tahun 2023	Perkiraan realisasi capaian target renstra perangkat daerah s/d tahun 2023	
										Target Renja DPMD tahun 2022	Realisasi Renja DPMD tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
							Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun						1	1	100%
2	13	04	2	01	12	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Kepala Desa yang Mengikuti Bimtek IT	150	150	150	150	100%			
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa						1	1	100%

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Kinerja Capaian Program (Renstra DPMD) Tahun 2022	Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja DPMD tahun 2023	Perkiraan realisasi capaian target renstra perangkat daerah s/d tahun 2023	
										Target Renja DPMD tahun 2022	Realisasi Renja DPMD tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	13	04	2	01	13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi Permasalahan dan Pelepasan Aset Desa	4	4	4	5	125%			
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa						2	2	100%
2	13	04	2	01	14	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Desa yang Mengikuti Bimtek	150	150	150	150	100%			
							Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas						150	150	100%

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Kinerja Capaian Program (Renstra DPMD) Tahun 2022	Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja DPMD tahun 2023	Perkiraan realisasi capaian target renstra perangkat daerah s/d tahun 2023	
										Target Renja DPMD tahun 2022	Realisasi Renja DPMD tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	13	05				PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKTAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase lembaga kemasyarakatan yang diberdayakan/dibina	50	33,33	50	33,33	66,66%	50	50	100%

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Kinerja Capaian Program (Renstra DPMD) Tahun 2022	Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja DPMD tahun 2023	Perkiraan realisasi capaian target renstra perangkat daerah s/d tahun 2023	
										Target Renja DPMD tahun 2022	Realisasi Renja DPMD tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	13	05	2	01		KEGIATAN PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN YANG BERGERAK DI BIDANG PEMBERDAYAAN DESA DAN LEMBAGA ADAT TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT YANG MASYARAKAT PELAKUNYA HUKUM ADAT YANG SAMA DALAM DAERAH KABUPATEN / KOTA	Cakupan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat	100	100	100	100	100%	100	100	100%

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Kinerja Capaian Program (Renstra DPMD) Tahun 2022	Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja DPMD tahun 2023	Perkiraan realisasi capaian target renstra perangkat daerah s/d tahun 2023	
										Target Renja DPMD tahun 2022	Realisasi Renja DPMD tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	13	05	2	01	02	Fasilitasi Penataan,Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa /Kelurahan (RT, RW ,PKK ,Posyandu,LPM dan Karang Taruna),Lembaga Adat Desa / Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Desa yang membentuk satgas adat	13	13	13	17	130,77%			

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Kinerja Capaian Program (Renstra DPMD) Tahun 2022	Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja DPMD tahun 2023	Perkiraan realisasi capaian target renstra perangkat daerah s/d tahun 2023	
										Target Renja DPMD tahun 2022	Realisasi Renja DPMD tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
							Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat							3	3	100%

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Kinerja Capaian Program (Renstra DPMD) Tahun 2022	Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja DPMD tahun 2023	Perkiraan realisasi capaian target renstra perangkat daerah s/d tahun 2023	
										Target Renja DPMD tahun 2022	Realisasi Renja DPMD tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	13	05	2	01	03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa / Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa / Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Peserta ~~LPM~~ yang dibina KPM	40	40	40	40	100%			
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna),						1	1	100%

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Kinerja Capaian Program (Renstra DPMD) Tahun 2022	Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja DPMD tahun 2023	Perkiraan realisasi capaian target renstra perangkat daerah s/d tahun 2023	
										Target Renja DPMD tahun 2022	Realisasi Renja DPMD tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
							Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya							
2	13	05	2	01	04	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa / Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa / Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Peserta Rakor Pengelolaan BPSPAMS	88	150	88	88	100%			

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Kinerja Capaian Program (Renstra DPMD) Tahun 2022	Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja DPMD tahun 2023	Perkiraan realisasi capaian target renstra perangkat daerah s/d tahun 2023	
										Target Renja DPMD tahun 2022	Realisasi Renja DPMD tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	13	05	2	01	05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Lembaga Ekonomi yang difasilitasi	3	3	3	3	100%			
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa						1	1	100%

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Kinerja Capaian Program (Renstra DPMD) Tahun 2022	Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja DPMD tahun 2023	Perkiraan realisasi capaian target renstra perangkat daerah s/d tahun 2023	
										Target Renja DPMD tahun 2022	Realisasi Renja DPMD tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	13	05	2	01	06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Pemerintahan Desa yang Memanfaatkan TTG yng difasilitasi	4	4	4	4	100%			
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna						1	1	100%
2	13	05	2	01	07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Desa/Kel yang Mengikuti Kegiatan Bulan Bakhti Gotong Royong	167	167	167	167	100%			

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Kinerja Capaian Program (Renstra DPMD) Tahun 2022	Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja DPMD tahun 2023	Perkiraan realisasi capaian target renstra perangkat daerah s/d tahun 2023	
										Target Renja DPMD tahun 2022	Realisasi Renja DPMD tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat						1	1	100%
2	13	05	2	01	09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah PKK Desa / Kel yang dibina	24	24	24	24	100%			
							Jumlah dokumen hasil fasilitasi tim penggerak PKK dalam penyelenggaraan gerakan						2	2	100%

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Kinerja Capaian Program (Renstra DPMD) Tahun 2022	Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja DPMD tahun 2023	Perkiraan realisasi capaian target renstra perangkat daerah s/d tahun 2023	
										Target Renja DPMD tahun 2022	Realisasi Renja DPMD tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
							pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga								

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan DPMD

DPMD Kabupaten Sukoharjo, Sesuai tugas pokok dan fungsi menyelenggarakan urusan wajib pemerintahan yaitu Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Dasar Pembentukan DPMD Kabupaten sukoharjo yaitu:

a. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

b. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

c. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 74 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo maka DPMD Kabupaten Sukoharjo.

Adapun deskripsi dari pekerjaan atau tugas dan fungsi DPMD Kabupaten Sukoharjo adalah:

a. Tugas Organisasi

Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Administrasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

b. Fungsi Organisasi

1) Perumusan kebijakan teknis di bidang administrasi pemberdayaan masyarakat dan desa;
2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang administrasi pemberdayaan masyarakat dan desa;
3) Pelaksanaan kebijakan di bidang administrasi pemberdayaan masyarakat dan desa;
4) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang administrasi pemberdayaan masyarakat dan desa;
5) Pelaksanaan fungsi administrasi pemberdayaan masyarakat dan desa; dan
6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf b adalah unsur pembantu pimpinan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa.

Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi keuangan, hukum, informasi, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian, pengelolaan dan penatausahaan aset, dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Sekretariat mempunyai fungsi:

a. pengoordinasian penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa;

b. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi keuangan, hukum, hubungan masyarakat, ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa;

c. pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa;

d. pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa;

e. pengoordinasian pelaksanaan Reformasi Birokrasi;

f. penyelenggaraan dan penatausahaan aset dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa;

g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;

h. pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa; dan

i. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.

Subbagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang perencanaan, data, informasi, dan program kerja, dan pengelolaan keuangan di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa.

Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, kearsipan, kepegawaian, pengelolaan dan penatausahaan aset dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa.

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) huruf a berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa.

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi lembaga kemasyarakatan, sosial dan adat, lembaga ekonomi dan teknologi tepat guna, dan partisipasi masyarakat.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai fungsi:

a. perencanaan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah bidang lembaga kemasyarakatan, sosial dan adat, lembaga ekonomi dan teknologi tepat guna, dan partisipasi masyarakat;

b. penyelenggaraan kebijakan Pemerintah Daerah bidang lembaga kemasyarakatan, sosial dan adat, lembaga ekonomi dan teknologi tepat guna, dan partisipasi masyarakat;

c. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah bidang lembaga kemasyarakatan, sosial dan adat, lembaga ekonomi dan teknologi tepat guna, dan partisipasi masyarakat;

d. pembinaan dan fasilitasi kebijakan Pemerintah Daerah bidang lembaga kemasyarakatan, sosial dan adat, lembaga ekonomi dan teknologi tepat guna, dan partisipasi masyarakat;

e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan Pemerintah Daerah bidang lembaga kemasyarakatan, sosial dan adat, lembaga ekonomi dan teknologi tepat guna, dan partisipasi masyarakat; dan

f. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) huruf b berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa.

Bidang Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi penataan dan administrasi pemerintahan desa, kelembagaan dan aparatur desa dan keuangan dan aset desa.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pemerintahan Desa mempunyai fungsi:

a. perencanaan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah bidang penataan dan administrasi pemerintahan desa, kelembagaan dan aparatur desa dan keuangan dan aset desa;

b. penyelenggaraan kebijakan Pemerintah Daerah bidang penataan dan administrasi pemerintahan desa, kelembagaan dan aparatur desa dan keuangan dan aset desa;

c. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah bidang penataan dan administrasi pemerintahan desa, kelembagaan dan aparatur desa dan keuangan dan aset desa;

d. pembinaan dan fasilitasi kebijakan Pemerintah Daerah bidang penataan dan administrasi pemerintahan desa,

kelembagaan dan aparatur desa dan keuangan dan aset desa;

e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan pemerintah bidang penataan dan administrasi pemerintahan desa, kelembagaan dan aparatur desa dan keuangan dan aset desa; dan

f. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Penataan dan Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) huruf c berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa.

Bidang Penataan dan Kerjasama Desa dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi penataan desa, kerja sama desa dan sarana dan prasarana desa.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bidang Penataan dan Kerjasama Desa mempunyai fungsi:

a. perencanaan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah bidang penataan desa, kerja sama desa dan sarana dan prasarana desa;

b. penyelenggaraan kebijakan Pemerintah Daerah bidang penataan desa, kerja sama desa dan sarana dan prasarana desa;

c. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah bidang penataan desa, kerja sama desa dan sarana dan prasarana desa;

d. pembinaan dan fasilitasi kebijakan Pemerintah Daerah bidang penataan desa, kerja sama desa dan sarana dan prasarana desa;

e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan pemerintah bidang penataan desa, kerja sama desa dan sarana dan prasarana desa; dan

f. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Tugas Sub Koordinator/Kelompok Jabatan Fungsional sebagai berikut:

1. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

   a. Sub Koordinator Lembaga Kemasyarakatan, Sosial dan Adat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, koordinasi, pelaksanaan kebijakan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang lembaga kemasyarakatan, sosial dan adat.

   b. Sub Koordinator Lembaga Ekonomi dan Teknologi Tepat Guna mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, koordinasi, pelaksanaan kebijakan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang lembaga ekonomi dan teknologi tepat guna.

   c. Sub Koordinator Partisipasi Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, koordinasi, pelaksanaan kebijakan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang partisipasi masyarakat.

2. Bidang Pemerintahan Desa

   a. Sub Koordinator Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, koordinasi, pelaksanaan kebijakan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang penataan dan administrasi pemerintahan desa.

   b. Sub Koordinator Kelembagaan dan Aparatur Desa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, koordinasi, pelaksanaan kebijakan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang kelembagaan dan aparatur des

   c. Sub Koordinator Seksi Keuangan dan Aset Desa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, koordinasi, pelaksanaan kebijakan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang keuangan dan aset desa.

3. Bidang Penataan dan Kerjasama Desa

   a. Sub Koordinator Penataan Desa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, koordinasi, pelaksanaan kebijakan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang penataan desa.

b. Sub Koordinator Sarana dan Prasarana Desa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, koordinasi, pelaksanaan kebijakan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang sarana dan prasarana desa.

c. Sub Koordinator Kerjasama Desa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, koordinasi, pelaksanaan kebijakan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang kerja sama desa.

Mengingat eratnya kaitan antara Renstra DPMD Kabupaten Sukoharjo dengan Dokumen RPJMD 2021- 2026, maka dalam penyusunan harus menjadikan dokumen perencanaan Jangka menengah tersebut sebagai acuan, artinya indikator kinerja DPMD Kabupaten Sukoharjo harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan urusan DPMD Kabupaten Sukoharjo yang telah dicantumkan dalam target Kinerja RPJMD. DPMD Kabupaten Sukoharjo memiliki tugas dan fungsi yang terkait dengan misi ke 3 (ketiga) pembangunan pembangunan jangka menengah Kabupaten Sukoharjo,yaitu :

Misi ke 3 **:** Memperkuat Perekonomian Rakyat yang Berdaya Saing Tinggi

Tujuan RPJMD **:** Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas Dan Insklusif

Sasaran RPJMD : Meningkatnya Kemandirian Desa

Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, dalam rangka pencapaian Misi pemerintah Kabupaten Sukoharjo, DPMD Kab. Sukoharjo berkontribusi untuk mewujudkan Misi ke 3 dalam RPJMD sesuai dengan kewenangan dan urusan yang dimiliki yaitu:

Tujuan : “Terwujudnya Kemandirian Desa”.

Indikator: IDM (Indeks Desa Membangun)

Sasaran PD :

1. Meningkatnya Desa Maju

2. Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Desa

3. Meningkatnya Kualitas Aparatur dan Pelayanan Publik.

Sasaran 1 : Meningkatnya Desa Maju

Pencapaian indikator kinerja pada sasaran 1 :

5.1 Persentase Desa Mandiri

5.2 Persentase Berdirinya Bumdes

Sasaran 2 : Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Desa

Pencapaian indikator kinerja pada sasaran 2 :

Persentase aparatur Pemerintahan Desa yang dibina

Sasaran 3 : Meningkatnya Kualitas Aparatur dan Pelayanan Publik

Pencapaian indikator kinerja pada sasaran 3 : Nilai Sakip

Tabel 2. 3 *Pencapaian Kinerja DPMD Tahun 2023*
Kabupaten Sukoharjo

No	Indikator	SPM	IKK	Satuan	Target Renstra				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	**Persentase Desa Mandiri**			%	3,33	4	5,33	22,67	3,33	5,33	5,33	25,33	
	Persentase Berdirinya Bumdes			%	83,33	86,67	90	93,33	83,33	87,33	90	98	
	Persentase penyelenggaraan penataan desa			%	100	100	100	100	100	100	100	100	
	Persentase Desa yang melakukan kerja sama desa			%	2,67	4,67	6,67	8,67	2,67	4,67	6,67	8,67	
	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang diberdayakan/ dibina			%	33,33	50	50	66,66	33,33	33,33	50	83,33	
2	**Persentase aparatur pemerintahan desa yang dibina**			%	9,33	18,66	46,64	55,97	9,33	46,64	46,64	55,97	
	Persentase desa yang administrasinya tertib			%	33,33	40	46,67	53,33	33,33	40	46,67	90	
3	**Nilai Sakip**			point	60	65	70	75	57,72	60,85	70	75	
	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah			%	100	100	100	100	88	100	100	100	

Pengukuran capaian kinerja ini merupakan hasil dari suatu penilaian sistematik yang sebagian besar didasarkan pada kelompok indikator kinerja sasaran program, kegiatan dan subkegiatan yang berupa indikator masukan, keluaran dan hasil. DPMD Kabupaten Sukoharjo berkontribusi untuk mewujudkan Misi ke-3 (tiga) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukoharjo yaitu Memperkuat perekonomian rakyat yang berdaya saing tinggi. Berdasarkan tabel tersebut capaian kinerja DPMD Kabupaten Sukoharjo s/d Tahun 2022 adalah :

a. Persentase desa mandiri 5,33% atau sejumlah 8 desa dari total desa di Kabupaten Sukoharjo, dengan rasio ketercapaian 133,25 % dari target Tahun 2022;

b. Persentase desa yang sudah mendirikan BUMDes 87,33 % atau sejumlah 131 desa dari total desa di kabupaten Sukoharjo, dengan rasio ketercapaian 100,76 % dari target Tahun 2022;

c. Persentase Aparatur Pemerintahan Desa yang dibina 46,64 % dari total Aparatur Pemerintahan Desa dimana per awal tahun 2021 sejumlah 1608 orang, dengan ketercapaian 249,95 % dari target Tahun 2022;

d. Capaian nilai SAKIP DPMD 60,85 dimana target tahun 2022 yaitu 65,dengan rasio ketercapaian hanya 93,61 %

Berdasarkan uraian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa capaian kinerja DPMD pada tahun 2022 sudah mencapai target bahkan sudah melampaui target kecuali capaian nilai SAKIP DPMD yang ketercapaiannya hanya 93,61%. Faktor pendukung tercapainya kinerja DPMD yaitu :

a. Komitmen dan tanggung jawab Kepala DPMD dan pelaksana kegiatan;
b. Tersedianya media baik bagi masyarakat dan OPD dalam menyalurkan aspirasi baik saran maupun kebutuhan akan pelaksanaan program dalam bentuk Forum Musrenbang mulai dari tingkat Desa/Kelurahan , Kecamatan hingga Kabupaten;
c. Sumber daya manusia yang kompeten sehingga program dan kegiatan bisa terlaksana dengan baik dan maksimal;
d. Tersedianya media dalam rangka pemantauan pelaksanaan kegiatan dan program melalui laporan dan rapat evaluasi bulanan.

Sedangkan kendala atau permasalahan belum tercapaianya target nilai SAKIP Tahun 2022 yaitu :

a. PK belum dijadikan pedoman dalam pembuatan Rencana Aksi Kinerja;
b. Pimpinan belum sepenuhnya terlibat dalam mencapai kinerja yang telah di rencanakan;
c. Belum maksimal dalam koordinasi capaian kinerja secara berkala;
d. Dokumen perencanaan belum sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPMD

2.3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

DPMD mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa. DPMD mempunyai fungsi perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa serta pelaksanaan administrasi di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa. Permasalahan DPMD dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dapat lihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 4 Pemetaan Permasalahan dan Akar Masalah DPMD Kabupaten Sukoharjo

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)
Masih rendahnya tingkat kemandirian desa di Kabupaten Sukoharjo	Belum optimalnya Lembaga Kemasyarakatan yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan.	• Belum semua Desa di Kabupaten Sukoharjo membentuk BUMDesa; sebagai indikator untuk meningkatnya desa maju; • Belum semua desa paham dalam memutakhirkan data IDM sehingga pemutakhiran IDM tidak maksimal; • Masih kurangnya keterlibatan lembaga kemasyarakatan dalam pemberdayaan masyarakat desa; • Belum optimalnya pemanfaatan sistem informasi di desa;

Tabel 2. 5 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan DPMD terhadap pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi: Terwujudnya Masyarakat Sukoharjo Yang Lebih Makmur				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Misi 3 : Memperkuat Perekonomian Rakyat yang Berdaya Saing Tinggi;	• Belum optimalnya Lembaga Kemasyarakatan yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	• Regulasi yang berubah-ubah; • Kemampuan dan kemauan SDM terbatas; • Kurangnya pemahaman dalam menentukan indikator capaian kinerja sehingga efektivitas program dan kegiatan seringkali kurang terarah; • Lembaga kemasyarakatan desa belum berperan secara optimal dalam pembangunan desa.	• Komitmen dan tanggung jawab Kepala DPMD dan pelaksana kegiatan; • Tersedianya media baik bagi masyarakat dan OPD dalam menyalurkan aspirasi baik saran maupun kebutuhan akan pelaksanaan program dalam bentuk Forum Musrenbang mulai dari tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan hingga Kabupaten;

Tabel 2. 6 Permasalahan Pelayanan DPMD Kabupaten Sukoharjo

Berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penangannya

NO	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	Sasaran : Berkembangnya Status Pembangunan desa dengan	- Belum optimalnya peningkatan status desa di	- kurangnya pemahaman perangkat daerah terkait pengkoordinasia	- Program dan Kebijakan dari pemerintahan pusat dan

	indikator jumlah desa mandiri, jumlah desa berkembang dan jumlah desa tertinggal	kabupaten Sukoharjo; - Belum optimalnya penginputan pemutakhiran data IDM ;	n dan pengintegrasian serta sinergitas program dan kegiatan untuk mewujudkan desa mandiri - perubahan indikator dan ketentuan tentang desa mandiri; - Kurangnya pemahaman desa tentang pemutakhiran data IDM.	provinsi terkait desa mandiri - Koordinasi instensif dari pemerintahan daerah ke pemerintahan pusat dilandasi regulasi tentang desa mandiri - Adanya dukungan tenaga ahli/pendamping desa - Adanya Teknologi Informasi untuk mendukung pemutakhiran data IDM - pendampingan dan pelatihan dari pemerintahan daerah dalam penginputan data terkait IDM
	Terevitalisasinya BUMDes dengan target BUMDes berkembang dan BUMDes Maju	- Belum semua Desa di Kabupaten Sukoharjo mendirikan BUMDes; - Belum Optimalnya dalam pengembangan usaha BUMDes; - SDM pengelola BUMDes yang rata-rata belum	- Regulasi yang berubah-ubah; - Kemampuan dan kemauan SDM pengelola BUMDes terbatas - Penguatan kelembagaan belum sesuai kebutuhan BUMDes; - kesulitan dalam menetukan jenis usaha BUMDes;	- Adanya Regulasi terkait pembentukan dan pengelolaan BUMDes - Adanya dukungan Dana Desa, Bantuan Keuangan, Hibah maupun Bansos untuk penyertaan modal maupun pengembangan usaha BUMDes - Adanya sarana prasarana

		memahami manajemen BUMDes; - Belum adanya pembinaan dan pengawasan penetapan terkait klasifikasi BUMDes dalam rangka penguatan BUMDes		lembaga Desa yang dapat dijadikan Unit Usaha BUMDes

2.3.2 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DPMD

Dalam analisis SWOT, tantangan *(Threat)* didefinisikan sebagai faktor-faktor eksternal yang berpotensi merugikan organisasi, sedangkan peluang *(Opportunity)* didefinisikan sebagai faktor -faktor eksternal yang kedepannya menguntungkan organisasi dan apabila di manfaatkan dapat memberikan keunggulan kompetitif.

DPMD mempunyai tugas yaitu melaksanakan penyusunan dan urusan pemerintahan daerah di bidang administrasi pemberdayaan masyarakat dan desa.Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan di mana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Pemberdayaan masyarakat hanya bisa terjadi apabila warganya ikut berpartisipasi. Suatu usahanya berhasil dinilai sebagai "pemberdayaan masyarakat" apabila kelompok komunitas atau masyarakat tersebut menjadi agen pembangunan atau dikenal juga sebagai subjek. Di sini subjek merupakan motor penggerak, dan bukan penerima manfaat atau objek saja. Rukun Warga atau Rukun Tetangga (RW/RT) sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat hendaknya didorong untuk lebih berperan dalam penyelenggaraan proses pembangunan mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasinya. Selain RT/RW, PKK menjadi aktor lain yang juga perlu mendapat perhatian.

Dalam mencapai capaian kinerja tersebut tidak terlepas dari berbagai tantangan. Secara umum tantangan yang harus dihadapi DPMD adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya peran Lembaga Kemasyarakatan dalam mendukung Pembangunan desa;
2. Belum optimalnya lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan,
3. Belum optimalnya lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan,
4. Belum optimalnya lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan, sehingga diperlukan peningkatan kapasitas SDM dan lembaga kemasyarakatan;
5. Era globalisasi atau pasar bebas, membutuhkan peningkatan kemampuan masyarakat dalam pengelolaan kelembagaan ekonomi masyarakat yang dapat meningkatkan usaha, posisi tawar dan daya saingnya;
6. Sumberdaya alam atau potensi desa, belum secara optimal dikelola serta dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat;
7. Lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

23 Tahun 2014, melahirkan banyak regulasi yang perlu ditindaklanjuti secara operasional.

Selain berbagai tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat dan desa, juga terdapat berbagai potensi atau peluang yang dapat dimaksimalkan dalam rangka mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas, yaitu :

1. Keterbukaan Informasi dan Teknologi Informasi yang terus berkembang;
2. Akses pasar yang terbuka untuk hasil usaha masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing;
3. Adanya aplikasi di desa dan sarana IT yang menjangkau 150 Desa di Kabupaten Sukoharjo;
4. Adanya Lembaga Ekonomi Desa yang dapat dikelola untuk meningkatkan perekonomian desa;
5. Alakosi Dana Desa untuk meningkatkan Pembangunan desa;
6. Dukungan masyarakat terhadap upaya pemberdayaan.

2.3.3 Penentuan Isu-Isu Strategis

Dalam menjalankan tugas dan fungsi DPMD Kabupaten Sukoharjo yakni melaksanakan melaksanakan penyusunan dan urusan pemerintahan daerah di bidang administrasi pemberdayaan masyarakat dan desa. Untuk melaksanakan Perencanaan Pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Berdasarkan gambaran pelayanan Perangkat Daerah, identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, telaah visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka isu-isu strategis DPMD adalah *MASIH RENDAHNYA STATUS DESA MANDIRI DI KABUPATEN SUKOHARJO* .

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD merupakan proses membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan analisis kebutuhan. Review terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 berkaitan dengan program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2024. Rumusan

kebutuhan program, kegiatan dan sub kegiatan dilengkapi dengan lokasi, indikator kinerja, besaran target atau tolak ukur dan besaran dana yang dibutuhkan. Program dan kegiatan yang ada pada Rencana Kerja DPMD Kabupaten Sukoharjo selaras dengan perubahan Rencana Strategis Tahun 2021-2026 dimana dilakukan perubahan renstra salah satunya karena adanya penyesuaian indikator berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Rencana Kerja DPMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 merupakan rencana kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam dokumen Rencana Strategis DPMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026. Rencana Kerja DPMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan tetap memperhatikan kepada Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024. Review terhadap rancangan awal RKPD dengan analisis hasil kebutuhan Tahun 2024 disajikan pada Tabel 2.4 sebagai berikut :

Tabel 2. 7 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD dan Analisis Kebutuhan TA 2024

NO	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan							
	Program/kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program/kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif		Catatan
						17.614.994.384						20.899.626.600		
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Sukoharjo, Seluruh Desa Dan Kelurahan	Persentase Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	%	4.996.994.384	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Sukoharjo, Seluruh Desa Dan Kelurahan	Persentase Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	%	4.879.376.600		
	Kegiatan Perencanaan, Pengangaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab.Sukoharjo, Seluruh Desa Dan Kelurahan	Cakupan Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100	%	75.000.000	Kegiatan Perencanaan, Pengangaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab.Sukoharjo, Seluruh Desa Dan Kelurahan	Cakupan Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100	%	65.000.000		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab.Sukoharjo, Seluruh Desa Dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	Dokumen	45.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab.Sukoharjo, Seluruh Desa Dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	Dokumen	35.000.000		

NO	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan							
	Program/kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program/kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Catatan
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab.Sukoharjo, Seluruh Desa Dan Kelurahan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab.Sukoharjo, Seluruh Desa Dan Kelurahan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	5.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab.Sukoharjo, Seluruh Desa Dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab.Sukoharjo, Seluruh Desa Dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	5.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab.Sukoharjo, Seluruh Desa Dan Kelurahan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1	Dokumen	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab.Sukoharjo, Seluruh Desa Dan Kelurahan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1	Dokumen	5.000.000	

NO	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan							
	Program/kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program/kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Catatan
			Dokumen DPA-SKPD						Dokumen DPA-SKPD				
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab.Sukoharjo, Seluruh Desa Dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab.Sukoharjo, Seluruh Desa Dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen	5.000.000	

NO	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan							
	Program/kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program/kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Catatan
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab.Sukoharjo, Seluruh Desa Dan Kelurahan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	Laporan	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab.Sukoharjo, Seluruh Desa Dan Kelurahan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	Laporan	4.000.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab.Sukoharjo, Seluruh Desa Dan Kelurahan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	Dokumen	5.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab.Sukoharjo, Seluruh Desa Dan Kelurahan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	Dokumen	6.000.000	
	KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Kab.Sukoharjo, Seluruh Desa Dan Kelurahan	Cakupan administrasi keuangan perangkat daerah	100	Persen	4.257.270.000	KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Kab.Sukoharjo, Seluruh Desa Dan Kelurahan	Cakupan administrasi keuangan perangkat daerah	100	Persen	4.202.901.000	

NO	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan							
	Program/kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program/kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Catatan
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab.Sukoharjo, Seluruh Desa Dan Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31	Orang/bulan	3.957.270.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab.Sukoharjo, Seluruh Desa Dan Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31	Orang/bulan	3.976.901.000	
	Pelaksanaan penatausahaan dan Penguji/Verivikasi Keuangan SKPD	Kab.Sukoharjo, Seluruh Desa Dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	Dokumen	285.000.000	Pelaksanaan penatausahaan dan Penguji/Verivikasi Keuangan SKPD	Kab.Sukoharjo, Seluruh Desa Dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	Dokumen	215.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab.Sukoharjo, Seluruh Desa Dan Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab.Sukoharjo, Seluruh Desa Dan Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	3.000.000	

NO	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan							
	Program/kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program/kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Catatan
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab.Sukoharjo, Seluruh Desa Dan Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12	Laporan	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab.Sukoharjo, Seluruh Desa Dan Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12	Laporan	5.000.000	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab.Sukoharjo, Seluruh Desa Dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Dokumen	5.000.000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab.Sukoharjo, Seluruh Desa Dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Dokumen	3.000.000	

NO	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan							
	Program/kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program/kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Catatan	
	KEGIATAN ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	Kab.Sukoharjo, Seluruh Desa Dan Kelurahan	Cakupan Administrasi barang milik daerah pada SKPD	100	%	5.000.000	KEGIATAN ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	Kab.Sukoharjo, Seluruh Desa Dan Kelurahan	Cakupan Administrasi barang milik daerah pada SKPD	100	%	3.000.000		
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab.Sukoharjo, Seluruh Desa Dan Kelurahan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	5	Laporan	5.000.000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab.Sukoharjo, Seluruh Desa Dan Kelurahan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	5	Laporan	3.000.000		
	KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Kab.Sukoharjo, Seluruh Desa Dan Kelurahan	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	%	98.250.000	KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Kab.Sukoharjo, Seluruh Desa Dan Kelurahan	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	%	80.000.000		
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Kabupaten Sukoharjo	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	46	paket	17.250.000								

NO	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan							
	Program/kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program/kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Catatan
	Pendataan & Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Kab.Sukoharjo, Seluruh Desa Dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3	Dokumen	3.000.000	Pendataan & Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Kab.Sukoharjo, Seluruh Desa Dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3	Dokumen	3.000.000	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab.Sukoharjo, Seluruh Desa Dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1	Dokumen	15.000.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab.Sukoharjo, Seluruh Desa Dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1	Dokumen	75.000.000	
	Monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai	Kabupaten Sukoharjo	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai	2	dokumen	3.000.000				2	dokumen	2.000.000	
	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Kabupaten Sukoharjo	Jumlah pegawai sesuai tugas dan fungsi yang mengikuti	57	Orang	60.000.000							

NO	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan							
	Program/kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program/kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Catatan
			Pendidikan dan pelatihan										
	KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Kab.Sukoharjo, Seluruh Desa Dan Kelurahan	Cakupan Administrasi umum perangkat daerah	100	%	258.000.000	KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Kab.Sukoharjo, Seluruh Desa Dan Kelurahan	Cakupan Administrasi umum perangkat daerah	100	%	204.000.000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Kab.Sukoharjo, Seluruh Desa Dan Kelurahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	2.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Kab.Sukoharjo, Seluruh Desa Dan Kelurahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	2.000.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab.Sukoharjo, Seluruh Desa Dan Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan	3	Paket	50.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab.Sukoharjo, Seluruh Desa Dan Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan	3	Paket	18.000.000	

NO	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan							
	Program/kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program/kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Catatan	
			Kantor yang Disediakan						Kantor yang Disediakan					
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab.Sukoharjo, Seluruh Desa Dan Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4	Paket	5.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab.Sukoharjo, Seluruh Desa Dan Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4	Paket	6.000.000		
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab.Sukoharjo, Seluruh Desa Dan Kelurahan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	Paket	80.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab.Sukoharjo, Seluruh Desa Dan Kelurahan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	Paket	70.000.000		
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab.Sukoharjo, Seluruh Desa Dan Kelurahan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5	Paket	20.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab.Sukoharjo, Seluruh Desa Dan Kelurahan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5	Paket	15.000.000		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab.Sukoharjo, Seluruh Desa Dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	12	Dokumen	6.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab.Sukoharjo, Seluruh Desa Dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	12	Dokumen	6.000.000		

NO	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan							
	Program/kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program/kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Catatan	
			yang Disediakan						yang Disediakan					
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab.Sukoharjo, Seluruh Desa Dan Kelurahan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	10	Laporan	5.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab.Sukoharjo, Seluruh Desa Dan Kelurahan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	10	Laporan	5.000.000		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab.Sukoharjo, Seluruh Desa Dan Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	45	Laporan	90.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab.Sukoharjo, Seluruh Desa Dan Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	45	Laporan	80.000.000		
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kabupaten Sukoharjo	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	20	Dokumen	2.000.000			Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	20	Dokumen	2.000.000		

NO	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan							
	Program/kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program/kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Catatan
	KEGIATAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Kab.Sukoharjo, Seluruh Desa Dan Kelurahan	Cakupan Pengadaan barang milik penunjang urusan pemerintah daerah	100	%	20.000.000	KEGIATAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Kab.Sukoharjo, Seluruh Desa Dan Kelurahan	Cakupan Pengadaan barang milik penunjang urusan pemerintah daerah	100	%	32.000.000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab.Sukoharjo, Seluruh Desa Dan Kelurahan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2	unit	20.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab.Sukoharjo, Seluruh Desa Dan Kelurahan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2	unit	32.000.000	
	KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kab.Sukoharjo, Seluruh Desa Dan Kelurahan	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100	%	108.474.384	KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kab.Sukoharjo, Seluruh Desa Dan Kelurahan	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100	%	128.477.600	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab.Sukoharjo, Seluruh Desa Dan Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	3.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab.Sukoharjo, Seluruh Desa Dan Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	2.000.000	

NO	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan							
	Program/kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program/kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Catatan
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab.Sukoharjo, Seluruh Desa Dan Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	105.474.384	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab.Sukoharjo, Seluruh Desa Dan Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	126.477.600	
	KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kab.Sukoharjo, Seluruh Desa Dan Kelurahan	Cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100	%	175.000.000	KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kab.Sukoharjo, Seluruh Desa Dan Kelurahan	Cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100	%	164.000.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Kab.Sukoharjo, Seluruh Desa Dan Kelurahan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	20	unit	160.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Kab.Sukoharjo, Seluruh Desa Dan Kelurahan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	20	unit	153.000.000	

NO	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan							
	Program/kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program/kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Catatan	
			dibayarkan Pajaknya						dibayarkan Pajaknya					
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15	unit	15.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab.Sukoharjo, Seluruh Desa Dan Kelurahan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15	unit	11.000.000		
	PROGRAM PENATAAN DESA	Kab.Sukoharjo, Seluruh Desa Dan Kelurahan	Prosentase Penyelenggaraan Penataan Desa	100	%	2.900.000.000	PROGRAM PENATAAN DESA	Kab.Sukoharjo, Seluruh Desa Dan Kelurahan	Prosentase Penyelenggaraan Penataan Desa	100	%	2.759.000.000		
	KEGIATAN PENYELENGGARAAN PENATAAN DESA	Kab.Sukoharjo, Seluruh Desa Dan Kelurahan	Cakupan Fasilitasi Penyelenggaraan Penataan Desa	100	%	2.900.000.000	KEGIATAN PENYELENGGARAAN PENATAAN DESA	Kab.Sukoharjo, Seluruh Desa Dan Kelurahan	Cakupan Fasilitasi Penyelenggaraan Penataan Desa	100	%	2.759.000.000		
	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Kab.Sukoharjo, Seluruh Desa Dan Kelurahan	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya	150	Desa	2.900.000.000	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Kab.Sukoharjo, Seluruh Desa Dan Kelurahan	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya	150	Desa	2.759.000.000		
	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA	Kab.Sukoharjo, Seluruh Desa Dan	Prosentase Desa yang Melakukan	8,67 %	%	550.000.000	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA	Kab.Sukoharjo, Seluruh Desa Dan	Prosentase Desa yang Melakukan	8,67%	%	440.000.000		

NO	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan							
	Program/kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program/kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Catatan
	DESA	Kelurahan	Kerja Sama Desa				DESA	Kelurahan	Kerja Sama Desa				
	KEGIATAN FASILITASI KERJA SAMA ANTAR DESA	Kab.Sukoharjo, Seluruh Desa Dan Kelurahan	Cakupan fasilitasi kerja sama antar desa	100	%	550.000.000	KEGIATAN FASILITASI KERJA SAMA ANTAR DESA	Kab.Sukoharjo, Seluruh Desa Dan Kelurahan	Cakupan fasilitasi kerja sama antar desa	100	%	440.000.000	
	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten / Kota	Kab.Sukoharjo, Seluruh Desa Dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	1	Dokumen	400.000.000	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten / Kota	Kab.Sukoharjo, Seluruh Desa Dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	1	Dokumen	375.000.000	
	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak ketiga dalam Kabupaten / Kota	Kab.Sukoharjo, Seluruh Desa Dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	1	Dokumen	50.000.000	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak ketiga dalam Kabupaten / Kota	Kab.Sukoharjo, Seluruh Desa Dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	1	Dokumen	15.000.000	
	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kab.Sukoharjo, Seluruh Desa Dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	1	Dokumen	100.000.000	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kab.Sukoharjo, Seluruh Desa Dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	1	Dokumen	50.000.000	

NO	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan							
	Program/kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program/kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Catatan	
	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Kab.Sukoharjo, Seluruh Desa Dan Kelurahan	Prosentase Desa Yang Penyelenggaraan Administrasinya Tertib	53,33	%	3.863.000.000	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Kab.Sukoharjo, Seluruh Desa Dan Kelurahan	Prosentase Desa Yang Penyelenggaraan Administrasinya Tertib	53,33	%	3.204.000.000		
	KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Kab.Sukoharjo, Seluruh Desa Dan Kelurahan	Cakupan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	100	%	3.863.000.000	KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Kab.Sukoharjo, Seluruh Desa Dan Kelurahan	Cakupan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	100	%	3.204.000.000		
	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Kab.Sukoharjo, Seluruh Desa Dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	1	Dokumen	20.000.000	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Kab.Sukoharjo, Seluruh Desa Dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	1	Dokumen	20.000.000		
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Kab.Sukoharjo, Seluruh Desa Dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	2	Dokumen	60.000.000	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Kab.Sukoharjo, Seluruh Desa Dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	2	Dokumen	30.000.000		

NO	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan							
	Program/kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program/kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Catatan
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Kab.Sukoharjo, Seluruh Desa Dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	1	Dokumen	35.000.000	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Kab.Sukoharjo, Seluruh Desa Dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	1	Dokumen	20.000.000	
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Kab.Sukoharjo, Seluruh Desa Dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	3	Dokumen	2.468.000.000	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Kab.Sukoharjo, Seluruh Desa Dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	3	Dokumen	2.380.000.000	
	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Kab.Sukoharjo, Seluruh Desa Dan Kelurahan	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	150	orang	175.000.000	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Kab.Sukoharjo, Seluruh Desa Dan Kelurahan	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	150	orang	148.000.000	

NO	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan							
	Program/kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program/kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Catatan
	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Kab.Sukoharjo, Seluruh Desa Dan Kelurahan	Jumlah Laporan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	1	Laporan	20.000.000	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Kab.Sukoharjo, Seluruh Desa Dan Kelurahan	Jumlah Laporan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	1	Laporan	10.000.000	
	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Kab.Sukoharjo, Seluruh Desa Dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	1	Dokumen	100.000.000	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Kab.Sukoharjo, Seluruh Desa Dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	1	Dokumen	100.000.000	
	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerjasama antar Desa	Kab.Sukoharjo, Seluruh Desa Dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	1	Dokumen	50.000.000	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerjasama antar Desa	Kab.Sukoharjo, Seluruh Desa Dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa				

NO	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan							
	Program/kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program/kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Catatan
	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Kab.Sukoharjo, Seluruh Desa Dan Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	1	Laporan	500.000.000	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Kab.Sukoharjo, Seluruh Desa Dan Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	1	Laporan	306.000.000	
	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kab.Sukoharjo, Seluruh Desa Dan Kelurahan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1	Laporan	30.000.000	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kab.Sukoharjo, Seluruh Desa Dan Kelurahan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1	Laporan	10.000.000	
	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Kab.Sukoharjo, Seluruh Desa Dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	1	Dokumen	20.000.000	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Kab.Sukoharjo, Seluruh Desa Dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	1	Dokumen	10.000.000	
	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Kab.Sukoharjo, Seluruh Desa Dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintaha	1	Dokumen	100.000.000	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Kab.Sukoharjo, Seluruh Desa Dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan	1	Dokumen	57.000.000	

NO	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan							
	Program/kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program/kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Catatan
			n Desa						Desa				
	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Kab.Sukoharjo, Seluruh Desa Dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	2	Dokumen	75.000.000	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Kab.Sukoharjo, Seluruh Desa Dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	2	Dokumen	50.000.000	
	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Kab.Sukoharjo, Seluruh Desa Dan Kelurahan	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	150	Orang	60.000.000	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Kab.Sukoharjo, Seluruh Desa Dan Kelurahan	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	150	Orang	35.000.000	
	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan kelurahan	Kab.Sukoharjo, Seluruh Desa Dan Kelurahan	Jumlah dokumen hasil evaluasi perkembangan desa serta lomba desa dan kelurahan	1	Dokumen	150.000.000	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan kelurahan	Kab.Sukoharjo, Seluruh Desa Dan Kelurahan	Jumlah dokumen hasil evaluasi perkembangan desa serta lomba desa dan kelurahan	1	Dokumen	30.000.000	

NO	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan							
	Program/kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program/kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Catatan	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKTAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Kab.Sukoharjo, Seluruh Desa Dan Kelurahan	Persentase Jenis Lembaga Kemasyarakatan Desa yang diberdayakan/dibina	66,66%	%	5.305.000.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKTAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Kab.Sukoharjo, Seluruh Desa Dan Kelurahan	Persentase Jenis Lembaga Kemasyarakatan Desa yang diberdayakan/dibina	66,66 %	%	9.617.284.000		

	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Yang Bergerak Di Bidang Pemberdayaan Desa Dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat Yang Sama Dalam Daerah Kabupaten / Kota	Kab.Sukoharjo, Seluruh Desa Dan Kelurahan	Cakupan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat	100	%	5.305.000.000	KEGIATAN PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN YANG BERGERAK DI BIDANG PEMBERDAYAAN DESA DAN LEMBAGA ADAT TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT YANG MASYARAKAT PELAKUNYA HUKUM ADAT YANG SAMA DALAM DAERAH KABUPATEN / KOTA	Kab.Sukoharjo, Seluruh Desa Dan Kelurahan	Cakupan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat	100	%	9.617.284.000	

NO	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan							
	Program/kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program/kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif		Catatan
	Fasilitasi Penataan,Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa /Kelurahan (RT, RW ,PKK ,Posyandu,LPM dan Karang Taruna),Lembaga Adat Desa / Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kab.Sukoharjo, Seluruh Desa Dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	4	Dokumen	320.000.000	Fasilitasi Penataan,Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa /Kelurahan (RT, RW ,PKK ,Posyandu,LPM dan Karang Taruna),Lembaga Adat Desa / Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kab.Sukoharjo, Seluruh Desa Dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	4	Dokumen	5.070.000.000	

NO	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan							
	Program/kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program/kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Catatan	
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa / Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa / Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kab.Sukoharjo, Seluruh Desa Dan Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1	Lembaga	350.000.000	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa / Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa / Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kab.Sukoharjo, Seluruh Desa Dan Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1	Lembaga	152.248.000	
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Kab.Sukoharjo, Seluruh Desa Dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah	4	Dokumen	250.000.000	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Kab.Sukoharjo, Seluruh Desa Dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah	4	Dokumen	110.000.000	

NO	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan							
	Program/kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program/kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Catatan	
			Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa						Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa					
	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kab.Sukoharjo, Seluruh Desa Dan Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	2	Laporan	45.000.000	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kab.Sukoharjo, Seluruh Desa Dan Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	2	Laporan	20.000.000		
	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Kab.Sukoharjo, Seluruh Desa Dan Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1	Laporan	140.000.000	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Kab.Sukoharjo, Seluruh Desa Dan Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1	Laporan	90.000.000		

NO	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan							
	Program/kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program/kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Catatan
	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Kab.Sukoharjo, Seluruh Desa Dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	6	Dokumen	4.200.000.000	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Kab.Sukoharjo, Seluruh Desa Dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	6	Dokumen	4.175.000.000	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program dan kegiatan yang dirumuskan dalam Rencana Kerja DPMD Kabupaten sukoharjo tahun 2024, merupakan hasil analisis sesuai kebutuhan. Rumusan berdasarkan hasil Pembinaan, Monitoring, dan Evaluasi pelaksanaan Program tahun berjalan maupun tahun-tahun sebelumnya. Program dan Kegiatan merupakan analisis dan penelaahan Usulan pemangku kepentingan maupun DPMD , Kelurahan Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan ke Provinsi maupun hasil pengumpulan informasi dan pengamatan pelaksanaan hasil pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota dan Rapat Koordinasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa se-Kabupaten Sukoharjo. Program dan kegiatan yang telah dirumuskan merupakan penjabaran pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan pada satu anggaran berjalan sesuai dengan kewenangan, tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Usulan Program dan Kegiatan dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 disajikan pada Tabel 2.5 sebagai berikut :

Tabel 2. 8 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan TA 2024
Kabupaten Sukoharjo

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/VOLUME	Catatan
1.	**Program TNI Manunggal Membangun Desa TMMD**				
	TMMD Sengkuyung I	Desa Wirun, Kecamatan Mojolaban	Betonisasi Jl. Pertanian Rt 1/1 Desa Wirun Kec. Mojolaban	P : 600 m x L : 3 M Tb : 0,15 m	
			Betonisasi Jalan Pertanian Desa Wirun Kec. Mojolaban	P : 600 m x L : 3 m x Tb : 0,15	

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/VOLUME	Catatan
			Talud jalan pertanian Desa Wirun Kec. Mojolaban	250 m x L : 0,3 m x T : 0,8 m	
			Talud Jalan Pertanian Desa Wirun Kec. Mojolaban	620 m x L: 0,3 m x T : 0,8 m	
			Pembangunan Urug Jalan Pertanian	P : 300 m x x L : 0,3 m x T : : 0,3 m	
			Pembangunan Urug Jalan Pertanian	P : 250 m x x L : 0,3 m x T : : 0,3 m	
			Rehab Pos Kamling	Paket	
			Rehab MCK	Paket	
			Rehab Masjid	Paket	
			Pembangunan Rumah tidak Layak Huni	Paket	
	TMMD Sengkuyung II	Desa Pranan, Kecamatan Polokarto	Betonisasi Jalan	P : 955 m x L : 3 m x Tb : 0,12 m	
			Pembangunan Talud Jalan	P : 955 X L : 0,5 m x T : 1m	
	TMMD Sengkuyung III	Desa TanjungrejoKecamatan Nguter	Pembangunan Talud Jalan Tani	P : 1.600 m	
			Pembangunan Jalur Usaha Tani	250 m x 3 m	
			Saluran irigasi	P : 250 m x L : 0,6 m x T : 4 m	
			Makadam jalan Pertanian	P : 750 m x L : 3 m	
			Jalan Rabat Beton	P : 1.000 m x L : 2,5 m x T : 0,12 m	

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/VOLUME	Catatan
2.	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKTAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**				
	Fasilitasi Jasa Kader Posyandu Se Kabupaten Sukoharjo	Kab.Sukoharjo, Seluruh Desa Dan Kelurahan	7.624 Kader	4.574.400.000	Fasilitasi dulu di DKK ada usulan dipindah kepengurusannya di DPMD

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Kerja DPMD merupakan Rencana Kerja Daerah yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang tersinkronisasi dan terharmonisasi dengan Rencana Kerja Pemerintah mendukung pencapaian target pembangunan nasional sesuai dengan kewenangan daerah dan perangkat daerah terkait. Sejalan dengan hal tersebut, sebagaimana tugas dan fungsi DPMD Kabupaten sukoharjo yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, memiliki arah kebijakan sejalan dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional .

Arah kebijakan merupakan pedoman umum untuk mengarahkan dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Kebijakan umum pembangunan daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintah daerah dengan rumusan indikator sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan arah kebijakan yang ditetapkan.

Pada kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan DPMD memiliki tantangan dan permasalahan yang semakin kompleks, mengingat tugas dan fungsi perangkat daerah terkait dengan visi, misi Pembangunan Daerah Kabupaten Sukoharjo pada misi ke-3 (tiga) dalam memperkuat perekonomian rakyat yang berdaya saing tinggi dengan sasaran daerah untuk meningkatnya kemandirian desa. Penjabaran tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam rencana strategis tahun 2021-2026.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja DPMD

Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah adalah rumusan kondisi yang menggambarkan

tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Sukoharjo dalam menghadapi tantangan perubahan paradigma penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik *(good governnance)* dan adanya perubahan struktur organisasi dan tata kerja, perlu berpacu untuk menangkap peluang yang ada.

Pada kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memiliki tantangan dan permasalahan yang semakin kompleks, mengingat tugas dan fungsi perangkat daerah terkait dengan visi, misi Pembangunan Daerah Kabupaten Sukoharjo pada misi Ke 3 (tiga) dalam memperkuat perekonomian rakyat yang berdaya saing tinggi dengan sasaran derah untuk meningkatnya kemandirian desa. Penjabaran tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam rencana strategis tahun 2021 - 2026 diuraikan sebagai berikut :

3.2.1 Tujuan

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah. Dalam rangka mewujutkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode tahun 2021-2026, DPMD Kabupaten Sukoharjo perlu merumuskan tujuan dan sasaran-sasaran strategis jangka menengah sebagai penunjang misi tersebut.

Untuk menjabarkan visi dan misi pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sukoharjo tahun 2021-2026, maka Tujuan Jangka Menengah DPMD Kabupaten Sukoharjo tahun 2021-2026 adalah:

Tujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo adalah:

“Terwujudnya Kemandirian Desa”.

Dengan tujuan tersebut ditentukan pula indikator tujuan yaitu:

“Indek Desa Mambangun.”

3.2.2 SASARAN

Agar tujuan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Sukoharjo tahun 2021-2026 berjalan dengan optimal maka, diperlukan sasaran sebagai obyek dalam mewujudkan kemandirian desa, terdapat 3 (tiga) sasaran yang akan dicapai antara lain sebagai berikut :

1. Meningkatnya Desa Maju di Kabupaten Sukoharjo, dengan Indikator kinerja meliputi :
   - Persentase Desa Mandiri

     Pada tahun 2022 realisasi desa mandiri berdasarkan evaluasi renstra sudah melampaui target yang signifikan sehingga perlu adanya perubahan target.

   - Persentase Berdirinya Bumdes.

2. Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Desa, dengan indikator kinerja meliputi

   - Persentase Aparatur Pemerintahan Desa yang dibina.

     Pada tahun 2022 realisasi desa mandiri berdasarkan evaluasi renstra sudah melampaui target yang signifikan sehingga perlu adanya perubahan target.

4. Meningkatnya Kualitas Aparatur dan Pelayanan Publik, dengan indicator kinerja meliputi

   - Nilai Sakip PD

Rumusan tujuan dan sasaran Renja DPMD Kabupaten Sukoharjo beserta target indikator kinerja yang akan dicapai disajikan dalam tabel 4.1.:

Tabel 3. 1 Tujuan dan Sasaran DPMD Tahun 2024

No	Tujuan DPMD	Sasaran DPMD	Indikator Tujuan dan Sasaran	Satuan Kinerja	TH 2024
	Terwujudnya Kemandirian Desa		Indeks Desa Membangun	Angka	0,7456
1		Meningkatnya Desa Maju	Persentase Desa Mandiri	%	25,33
			Persentase Berdirinya Bumdes	%	98
2		Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Desa	Persentase Aparatur Pemerintahan Desa yang di bina	%	81,82
3		Meningkatnya Kualitas Aparatur dan Pelayanan Publik	Nilai Sakip PD	Angka	75

1.1 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Rencana Kerja DPMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 sesuai tugas dan fungsinya mendukung capaian Visi Pemerintah Kabupaten Sukoharjo “Mewujudkan Masyarakat Sukoharjo yang lebih Makmur” melalui Misi 3 yaitu “Memperkuat Perekonomian Rakyat yang Berdaya Saing Tinggi” yang tertuang dalam Renstra DPMD Kabupaten Sukoharjo.

Dalam rangka mencapai sasaran daerah sesuai dengan tupoksi tersebut, DPMD melaksanakan 5 Program dan 12 Kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota:
   - 1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
   - 1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
   - 1.3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
   - 1.4 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
   - 1.5 Administrasi Umum Perangkat Daerah;
   - 1.6 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
   - 1.7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
   - 1.8 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
2. Program Penataan Desa :
   - 2.1 Penyelenggaraan Penataan Desa.
3. Program Peningkatan Kerja Sama Desa:
   - 3.1 Fasilitasi Kerja Sama Desa
4. Program Administrasi Pemerintahan Desa
   - 4.1 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
5. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat:
   - 5.1 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak

di bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam daerah Kabupaten/Kota.

Rumusan Program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2025 berdasarkan urusan yang ditangani DPMD Kabupaten Sukoharjo berikut kebutuhan anggaran dan sumber pendanaannya dapat dilihat pada table 3.2 berikut ini sebagai berikut:

Tabel 3. 2 Rumusan Program dan Kegiatan DPMD Tahun 2024 Dan Perkiraan Maju Tahun 2025

Kabupaten Sukoharjo

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			**20.899.626.600,00**				**20.433.994.384,00**
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**20.899.626.600,00**				**20.433.994.384,00**
2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**			**20.899.626.600,00**				**20.433.994.384,00**
2.13.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase Kegiatan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	**100 persen**	**4.879.378.600,00**			**-**	**4.925.994.384,00**
2.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Cakupan Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	100 Persen	65.000.000,00			-	65.000.000,00
2.13.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	35.000.000,00	Kab. Sukoharjo, Bendosari, Jombor	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		35.000.000,00
2.13.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD							
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Sukoharjo, Bendosari, Jombor	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		5.000.000,00
2.13.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD							
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Sukoharjo, Bendosari, Jombor	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		5.000.000,00
2.13.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD							

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Sukoharjo, Bendosari, Jombor	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		5.000.000,00
2.13.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD							
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Sukoharjo, Bendosari, Jombor	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		5.000.000,00
2.13.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4.000.000,00	Kab. Sukoharjo, Bendosari, Jombor	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		5.000.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.13.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	6.000.000,00	Kab. Sukoharjo, Bendosari, Jombor	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		5.000.000,00
2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	100 Persen	4.202.901.000,00			-	4.257.270.000,00
2.13.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31 Orang/bulan	3.976.901.000,00	Kab. Sukoharjo, Bendosari, Jombor	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		3.957.270.000,00
2.13.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD							

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	215.000.000,00	Kab. Sukoharjo, Bendosari, Jombor	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		285.000.000,00
2.13.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD							
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	3.000.000,00	Kab. Sukoharjo, Bendosari, Jombor	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		5.000.000,00
2.13.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD							
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	5.000.000,00	Kab. Sukoharjo, Bendosari, Jombor	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		5.000.000,00
2.13.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran							

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Sukoharjo, Bendosari, Jombor	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		5.000.000,00
2.13.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Cakupan Administrasi Barang Milik Daerah pada SKPD*	100 persen	3.000.000,00			-	5.000.000,00
2.13.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD							
		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	5 Laporan	3.000.000,00	Kab. Sukoharjo, Bendosari, Jombor	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		5.000.000,00
2.13.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	100 Persen	80.000.000,00			-	37.250.000,00
2.13.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya							

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	46 Paket	0,00	Kab. Sukoharjo, Bendosari, Jombor	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		17.250.000,00
2.13.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian							
		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Sukoharjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2.000.000,00
2.13.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian							
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	75.000.000,00	Kab. Sukoharjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		15.000.000,00
2.13.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai							

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Sukoharjo, Bendosari, Jombor	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		3.000.000,00
2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	100 Persen	204.000.000,00			-	268.000.000,00
2.13.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.000.000,00	Kab. Sukoharjo, Bendosari, Jombor	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2.000.000,00
2.13.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	18.000.000,00	Kab. Sukoharjo, Bendosari, Jombor	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		50.000.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.13.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga							
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	6.000.000,00	Kab. Sukoharjo, Bendosari, Jombor	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		5.000.000,00
2.13.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	70.000.000,00	Kab. Sukoharjo, Bendosari, Jombor	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		80.000.000,00
2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	15.000.000,00	Kab. Sukoharjo, Bendosari, Jombor	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		20.000.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.13.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan							
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	6.000.000,00	Kab. Sukoharjo, Bendosari, Jombor	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		6.000.000,00
2.13.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu							
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	10 Laporan	5.000.000,00	Kab. Sukoharjo, Bendosari, Jombor	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		5.000.000,00
2.13.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	45 Laporan	80.000.000,00	Kab. Sukoharjo, Bendosari, Jombor	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		90.000.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.13.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD							
		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	20 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Sukoharjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		10.000.000,00
2.13.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Cakupan Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	100 Persen	32.000.000,00			-	10.000.000,00
2.13.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	32.000.000,00	Kab. Sukoharjo, Bendosari, Jombor	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		10.000.000,00
2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Cakupan Penyediaan Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*	100 Persen	128.477.600,00			-	108.474.384,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.13.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2.000.000,00	Kab. Sukoharjo, Bendosari, Jombor	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		3.000.000,00
2.13.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	126.477.600,00	Kab. Sukoharjo, Bendosari, Jombor	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		105.474.384,00
2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Cakupan Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	100 Persen	164.000.000,00			-	175.000.000,00
2.13.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	20 Unit	153.000.000,00	Kab. Sukoharjo, Bendosari, Jombor	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		160.000.000,00
2.13.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	11.000.000,00	Kab. Sukoharjo, Bendosari, Jombor	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		15.000.000,00
2.13.02	**PROGRAM PENATAAN DESA**	***Persentase Penyelenggaraan Penataan Desa***	**100 persen**	**2.759.000.000,00**			**-**	**2.000.000.000,00**
2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	*Cakupan Fasilitasi Penyelenggaraan Penataan Desa*	100 persen	2.759.000.000,00			-	2.000.000.000,00
2.13.02.2.01.0003	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa							

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya	150 Desa	2.759.000.000,00	Kab. Sukoharjo, Bendosari, Jombor	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2.000.000.000,00
2.13.03	**PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA**	***Persentase Desa yang Melakukan Kerja Sama Antar Desa***	**6,67 persen**	**440.000.000,00**			**-**	**530.000.000,00**
2.13.03.2.01	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	*Cakupan Fasilitasi kerja Sama Antar Desa*	100 persen	440.000.000,00			-	530.000.000,00
2.13.03.2.01.0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota							
		Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	1 Dokumen	375.000.000,00	Kab. Sukoharjo, Bendosari, Jombor	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		400.000.000,00
2.13.03.2.01.0002	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota							

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	1 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Sukoharjo, Bendosari, Jombor	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		50.000.000,00
2.13.03.2.01.0003	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan							
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Sukoharjo, Bendosari, Jombor	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		80.000.000,00
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Sukoharjo, Bendosari, Jombor	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		80.000.000,00
2.13.04	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	***Persentase Desa Yang Penyelenggaraan Administrasinya Tertib***	**46,67 Persen**	**3.204.000.000,00**			**-**	**3.358.000.000,00**
2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	*Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa*	100 Persen	3.204.000.000,00			-	3.358.000.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.13.04.2.01.0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa							
		Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	1 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Sukoharjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		20.000.000,00
2.13.04.2.01.0002								
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	2 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Sukoharjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		60.000.000,00
2.13.04.2.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa							
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	1 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Sukoharjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		35.000.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.13.04.2.01.0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa							
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	3 Dokumen	2.380.000.000,00	Kab. Sukoharjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2.468.000.000,00
2.13.04.2.01.0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa							
		Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	150 Orang	146.000.000,00	Kab. Sukoharjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		175.000.000,00
2.13.04.2.01.0006	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa							
		Jumlah Laporan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	1 Laporan	10.000.000,00	Kab. Sukoharjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		20.000.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.13.04.2.01.0007	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa							
		Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Sukoharjo, Bendosari, Jombor	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		75.000.000,00
2.13.04.2.01.0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa							
		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	1 Dokumen	0,00	Kab. Sukoharjo, Bendosari, Jombor	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		50.000.000,00
2.13.04.2.01.0009	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa							
		Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	1 Laporan	306.000.000,00	Kab. Sukoharjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		30.000.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.13.04.2.01.0010	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa							
		Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1 Laporan	10.000.000,00	Kab. Sukoharjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		20.000.000,00
2.13.04.2.01.0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa							
		Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Sukoharjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		20.000.000,00
2.13.04.2.01.0012	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa							
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	1 Dokumen	57.000.000,00	Kab. Sukoharjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		100.000.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.13.04.2.01.0013	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa							
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	2 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Sukoharjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		75.000.000,00
2.13.04.2.01.0014	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD							
		Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	150 Orang	35.000.000,00	Kab. Sukoharjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		60.000.000,00
2.13.04.2.01.0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan							
		Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	1 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Sukoharjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		150.000.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.13.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	***Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang diberdayakan/dibina***	**50 persen**	**9.617.248.000,00**			**-**	**9.620.000.000,00**
2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan lembaga adat dan Masyarakat Hukum Adat*	100 Persen	9.617.248.000,00			-	9.620.000.000,00
2.13.05.2.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat							
		Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat	4 Dokumen	5.070.000.000,00	Kab. Sukoharjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sukoharjo, Bendosari, Jombor	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		5.000.000.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat						
2.13.05.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat							
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	4 Lembaga	152.248.000,00	Kab. Sukoharjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sukoharjo, Bendosari, Jombor	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		200.000.000,00
2.13.05.2.01.0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa							

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	4 Dokumen	110.000.000,00	Kab. Sukoharjo, Semua Kecamatan, Jombor Kab. Sukoharjo, Bendosari, Jombor	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		100.000.000,00
2.13.05.2.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna							
		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	2 Laporan	20.000.000,00	Kab. Sukoharjo, Nguter, Jangglengan Kab. Sukoharjo, Bendosari, Jombor	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		20.000.000,00
2.13.05.2.01.0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat							
		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	3 Laporan	90.000.000,00	Kab. Sukoharjo, Bendosari, Jombor Kab. Sukoharjo, Kartasura, Ngemplak	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		100.000.000,00
2.13.05.2.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga							
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	6 Dokumen	4.175.000.000,00	Kab. Sukoharjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		4.200.000.000,00
J U M L A H				**20.899.626.600,00**				**20.433.994.384,00**

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dokumen Rencana Kerja DPMD Kabupaten Sukoharjo merupakan penjabaran dari dokumen rencana strategis DPMD yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sukoharjo. Rencana Kerja (Renja) disusun untuk satu tahun yang memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai dengan tugas dan fungsi DPMD Kabupaten Sukoharjo yang ditransformasikan melalui Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

Dalam Renja DPMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 terdapat 5 (lima) program dan 12 (dua belas) kegiatan, dan 53 (lima puluh tiga) sub kegiatan . Untuk menilai pencapaian kegiatan, maka pada setiap kegiatan dirumuskan indikator kinerja kegiatan. Perumusan kegiatan juga telah diarahkan untuk mendukung pencapaian kinerja pada setiap program.

Seluruh program dan kegiatan DPMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 yang tertuang dalam Renja didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBD) Kabupaten Sukoharjo yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU).

Rumusan Program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2024 berdasarkan urusan yang ditangani DPMD Kabupaten Sukoharjo berikut kebutuhan anggaran dan sumber pendanaannya dapat dilihat pada table 4.1 berikut ini :

Tabel 4. 1 Rencana Kerja dan Pendanaan DPMD Tahun Anggaran 2024

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024		
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6
	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			**20.899.626.600,00**	
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**20.899.626.600,00**	
2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**			**20.899.626.600,00**	
2.13.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase Kegiatan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	**100 persen**	**4.879.378.600,00**	
2.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Cakupan Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	100 Persen	65.000.000,00	
2.13.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	35.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
2.13.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
2.13.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024		
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
2.13.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
2.13.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
2.13.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
2.13.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	6.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	100 Persen	4.202.901.000,00	
2.13.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31 Orang/bulan	3.976.901.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024		
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6
2.13.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	215.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
2.13.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	3.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
2.13.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	5.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
2.13.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				
		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	3.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
2.13.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Cakupan Administrasi Barang Milik Daerah pada SKPD*	100 persen	3.000.000,00	
2.13.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				
		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	5 Laporan	3.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
2.13.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	100 Persen	80.000.000,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024		
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6
2.13.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	46 Paket	0,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
2.13.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				
		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3 Dokumen	3.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
2.13.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	75.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
2.13.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				
		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 Dokumen	2.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	100 Persen	204.000.000,00	
2.13.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
2.13.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	18.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
2.13.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024		
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	6.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
2.13.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	70.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	15.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
2.13.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	6.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
2.13.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	10 Laporan	5.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
2.13.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	45 Laporan	80.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
2.13.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				
		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	20 Dokumen	2.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
2.13.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Cakupan Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	100 Persen	32.000.000,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024		
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6
2.13.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	32.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Cakupan Penyediaan Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*	100 Persen	128.477.600,00	
2.13.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
2.13.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	126.477.600,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Cakupan Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	100 Persen	164.000.000,00	
2.13.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	20 Unit	153.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
2.13.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	11.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
2.13.02	**PROGRAM PENATAAN DESA**	***Persentase Penyelenggaraan Penataan Desa***	**100 persen**	**2.759.000.000,00**	
2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	*Cakupan Fasilitasi Penyelenggaraan Penataan Desa*	100 persen	2.759.000.000,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024		
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6
2.13.02.2.01.0003	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa				
		Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya	150 Desa	2.759.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
2.13.03	**PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA**	***Persentase Desa yang Melakukan Kerja Sama Antar Desa***	**6,67 persen**	**440.000.000,00**	
2.13.03.2.01	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	*Cakupan Fasilitasi kerja Sama Antar Desa*	100 persen	440.000.000,00	
2.13.03.2.01.0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota				
		Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	1 Dokumen	375.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
2.13.03.2.01.0002	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota				
		Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	1 Dokumen	15.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
2.13.03.2.01.0003	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan				
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	1 Dokumen	50.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	1 Dokumen	50.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
2.13.04	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	***Persentase Desa Yang Penyelenggaraan Administrasinya Tertib***	**46,67 Persen**	**3.204.000.000,00**	
2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	*Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa*	100 Persen	3.204.000.000,00	
2.13.04.2.01.0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa				

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024		
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6
		Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	1 Dokumen	20.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
2.13.04.2.01.0002					
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	2 Dokumen	30.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
2.13.04.2.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa				
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	1 Dokumen	20.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
2.13.04.2.01.0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa				
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	3 Dokumen	2.380.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
2.13.04.2.01.0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa				
		Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	150 Orang	146.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
2.13.04.2.01.0006	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa				
		Jumlah Laporan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	1 Laporan	10.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
2.13.04.2.01.0007	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa				
		Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	1 Dokumen	100.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
2.13.04.2.01.0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa				

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024		
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6
		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	1 Dokumen	0,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
2.13.04.2.01.0009	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa				
		Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	1 Laporan	306.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
2.13.04.2.01.0010	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa				
		Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1 Laporan	10.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
2.13.04.2.01.0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa				
		Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	1 Dokumen	10.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
2.13.04.2.01.0012	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa				
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	1 Dokumen	57.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
2.13.04.2.01.0013	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa				
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	2 Dokumen	50.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
2.13.04.2.01.0014	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD				
		Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	150 Orang	35.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024		
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6
2.13.04.2.01.0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan				
		Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	1 Dokumen	30.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
2.13.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	***Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang diberdayakan/dibina***	**50 persen**	**9.617.248.000,00**	
2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan lembaga adat dan Masyarakat Hukum Adat*	100 Persen	9.617.248.000,00	
2.13.05.2.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				
		Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	4 Dokumen	5.070.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
2.13.05.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	4 Lembaga	152.248.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
2.13.05.2.01.0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa				

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024		
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	4 Dokumen	110.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
2.13.05.2.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				
		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	2 Laporan	20.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
2.13.05.2.01.0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat				
		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	3 Laporan	90.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
2.13.05.2.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga				
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	6 Dokumen	4.175.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
J U M L A H				**20.899.626.600,00**	

BAB V
P E N U T U P

Dokumen rancangan akhir Rencana Kerja (Renja) DPMD Kabupaten Sukoharjo merupakan dokumen perencanaan yang menjadi acuan bagi dinas dalam rangka pelayanan kepada masyarakat khususnya di bidang urusan Pemberdayaan. Dokumen ini selain berisi program dan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan, juga menggambarkan besarnya anggaran yang dibutuhkan.

Rancangan akhir Renja DPMD mencakup berbagai indikator kinerja yang merupakan tolak ukur keberhasilan dari pencapaian rencana kerja yang telah dirumuskan. Renja DPMD disusun sebagai implementasi komitmen seluruh Aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarkat dan Desa untuk mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah berdasarkan skala prioritas dan kemampuan anggaran. Akhirnya kami berharap apa yang tertuang dalam Renja ini dapat membantu meningkatkan kesejahteraan khususnya masyarakat wilayah Kabupaten Sukoharjo.

Rencana tindak lanjut dari dokumen Rencana Kerja DPMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 adalah adanya masukan, informasi, saran dan data dari bidang-bidang untuk melakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya sehingga menghasilkan dokumen Rencana Kerja DPMD Kabupaten Sukoharjo yang prospektif, realistis dan akuntabel serta transparan.

Demikian rancangan akhir Renja DPMD Tahun 2024, semoga dokumen ini dapat menjadi sebuah pedoman perencanaan yang baik dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Sukoharjo, Agustus 2023

BUPATI SUKOHARJO

Ttd.

Hj. ETIK SURYANI, S.E., M.M.

RENCANA KERJA

DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

KABUPATEN SUKOHARJO

TAHUN 2024

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT. atas tersusunnya Dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024.

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026. Rencana Kerja ini memuat rencana program dan kegiatan, anggaran, sasaran kegiatan berupa indikator output kegiatan sebagai upaya untuk menyusun suatu perencanaan yang terpadu dan berorientasi hasil/kinerja.

Dalam rangka memenuhi dokumen perencanaan kerja pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sukoharjo, maka disusunlah Dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 yang berfungsi sebagai pedoman dan acuan dalam penyusunan kebutuhan program, kegiatan dan anggaran tahun 2024 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sukoharjo.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga perlu saran dan masukan demi peningkatan kualitas dokumen perencanaan.

Kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu sehingga tersusunnya Rencana Kerja (Renja) Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024.

Semoga Dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Tahun 2024 ini dapat berguna bagi kita semua.

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iii

BAB I. PENDAHULUAN I-1

1.1. Latar Belakang I-1

1.2. Landasan Hukum I-3

1.3. Maksud dan Tujuan I-5

1.4. Sistematika Penulisan I-6

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN LALU II-1

2.1. Hasil Evaluasi Renja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 dan Capaian Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sukoharjo II-1

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sukoharjo II-24

2.3. Isu-isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sukoharjo II-26

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD II-30

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN SUKOHARJO III-1

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional III-1

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sukoharjo III-3

3.3. Program dan Kegiatan III-5

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN SUKOHARJO IV-1

BAB V. PENUTUP V-1

DAFTAR TABEL

Tabel	2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 dan Pencapaian Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026 s/d Tahun 2022	II-2
Tabel	2.2	Realisasi Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2022	II-18
Tabel	2.3	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 s/d Tahun 2022	II-25
Tabel	2.4	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Sukoharjo	II-31
Tabel	3.1	Identifikasi Kebijakan Nasional dan Provinsi	III-2
Tabel	3.2	Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024	III-4
Tabel	3.3	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Kabupaten Sukoharjo	III-11
Tabel	4.1	Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024	IV-2

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sukoharjo menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024.

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dibuat dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dengan berpedoman pada RKPD dan RPJMD yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional disebutkan bahwa Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Renja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 diatur lebih lanjut bahwa penyusunan Rencana Kerja (Renja) dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut :

1. Persiapan penyusunan Renja.
2. Penyusunan rancangan Renja.
3. Pelaksanaan forum Penyusunan Renja.
4. Penetapan Renja.
5. Penjabaran Renja yang dituangkan dalam bentuk narasi dan tabel-tabel yang memuat hasil evaluasi, analisis dan perencanaan tahun lalu dan prakiraan maju.

Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sukoharjo sebagai lembaga Institusi yang bertugas membantu Bupati Sukoharjo dalam menentukan kebijakan teknis urusan Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata.

Dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 memuat kebijakan program dan kegiatan pembangunan, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Secara umum Rencana Kerja (Renja) Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sukoharjo diharapkan dapat menjawab dua hal mendasar, yaitu :

a. Arah pelayanan yang akan dikembangkan dan yang hendak dicapai Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sukoharjo dalam satu tahun kedepan;
b. Langkah - langkah strategis yang perlu dilakukan agar tujuan yang telah ditetapkan tercapai.

Selain itu Rencana Kerja (Renja) Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 ini merupakan salah satu perangkat dasar untuk dapat tercapainya pelayanan yang diberikan pada masyarakat yang akan dievaluasi setiap akhir tahun dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 berdasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 174);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 200);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 298);
17. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 43 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 – 2026 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 44).

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud :

Maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

a. Sebagai dokumen perencanaan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sukoharjo dalam waktu 1 (satu) tahun, yang berpedoman pada Renstra guna memberikan arah dalam tahapan-tahapan pembangunan di bidang Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sukoharjo dan sebagai penjabaran atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 – 2026;
b. Sebagai dasar dalam penyusunan Program dan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024;

c. Sebagai panduan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata dalam waktu satu tahun.

2. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

a. Menjabarkan tujuan, sasaran, dan indikator kinerja pembangunan bidang Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata di Kabupaten Sukoharjo yang akan dicapai selama jangka waktu satu tahun (tahun 2024).
b. Menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan di Kabupaten Sukoharjo tahun 2023 terhadap Renstra Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sukoharjo dan RKPD Tahun 2024;
c. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan program dan kegiatan pembangunan dengan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo serta dengan Pemerintah Provinsi dan Pusat; serta
d. Mewujudkan penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Bab I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Renja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sukoharjo sebagai berikut :

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sukoharjo, proses penyusunan Renja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan

Pariwisata Kabupaten Sukoharjo, keterkaitan antara dokumen Renja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sukoharjo dengan dokumen RKPD dan Renstra Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sukoharjo, serta tindak lanjutnya dengan proses RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sukoharjo, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sukoharjo.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sukoharjo.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sukoharjo, serta susunan garis besar isi dokumen.

Bab II. HASIL EVALUASI RENJA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN LALU

2.1 Hasil Evaluasi Renja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sukoharjo Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sukoharjo.

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sukoharjo tahun 2022 dan perkiraan tahun berjalan yaitu tahun 2023, mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sukoharjo sudah disahkan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sukoharjo

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sukoharjo berdasarkan Indikator Kinerja yang sudah ditentukan.

2.3 Isu-Isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sukoharjo

Berisikan uraian mengenai sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sukoharjo dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sukoharjo, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sukoharjo, dampaknya terhadap visi dan misi kepala daerah, tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sukoharjo dan formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Renja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sukoharjo

Berisikan uraian mengenai proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal Renja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sukoharjo dengan hasil analisis kebutuhan, penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan, penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal Renja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sukoharjo.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berisikan uraian hasil kajian terhadap program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan

kabupaten, LSM, asosiasi-asosiasi, Perguruan Tinggi yang langsung ditujukan kepada Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sukoharjo maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sukoharjo dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang Kabupaten.

Bab III. TUJUAN DAN SASARAN DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN SUKOHARJO

3.1 Tujuan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sukoharjo

Berisikan perumusan tujuan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sukoharjo yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sukoharjo yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sukoharjo.

3.2 Sasaran Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sukoharjo

Berisikan perumusan sasaran Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sukoharjo yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sukoharjo yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sukoharjo.

3.3 Program dan Kegiatan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sukoharjo

Berisikan rumusan program dan kegiatan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sukoharjo yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 dan prakiraan maju tahun 2025.

Bab IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN SUKOHARJO

Berisikan rumusan program, kegiatan dan anggaran yang akan dilaksanakan sesuai Renja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024.

Bab V. PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN LALU

2.1. Hasil Evaluasi Renja Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 dan Capaian Renstra Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Sukoharjo

Untuk melaksanakan kebijakan yang merupakan perwujudan dari Visi dan Misi akan sangat dipengaruhi oleh tingkat kualitas sumber daya manusia. Karena manusia sebagai subyek pelaku pembangunan yang sangat berperan dan menentukan baik sebagai perencana, pelaksana, pengguna maupun sebagai evaluator dari hasil kegiatan pembangunan. Dengan demikian tingginya tingkat kualitas sumber daya manusia para pelaku pembangunan sangat diperlukan dalam upaya mencapai tujuan pembangunan.

Secara umum Rencana Kerja (Renja) Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 memuat rencana program dan kegiatan dengan tetap memperhatikan potensi yang ada dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kabupaten Sukoharjo. Keberhasilan suatu proses perencanaan akan bisa dilihat dari hasil evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya, sejauh mana pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan berdampak terhadap capaian yang telah ditetapkan di dalam Renstra Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sukoharjo. Hasil dari evaluasi sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan di tahun mendatang.

Pada tahun Anggaran 2022, Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Sukoharjo telah melaksanakan seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.

Dalam penyusunan Renja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022. Adapun capaian kinerja dimaksud seperti pada tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 dan Pencapaian Renstra Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 – 2026 s/d Tahun 2022

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan(Outcome/Output)	Target Kinerja Capaian Renstra Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020 (n-3) ***)**	Target dan Realisasi Hasil Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.19.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota**	**Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100**	**-**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
2.19.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100**	**-**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
2.19.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun (dokumen)	7	-	3	2	66,67	1	3	42,85
2.19.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun (dokumen)	6	-	1	1	100	1	2	33,33

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan(Outcome/Output)	Target Kinerja Capaian Renstra Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020 (n-3) ***)**	Target dan Realisasi Hasil Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.19.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun (dokumen)	8	-	3	3	100	1	4	50,00
2.19.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun (dokumen)	6	-	1	1	100	1	2	33,33
2.19.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun (dokumen)	8	-	3	3	100	1	4	50,00
2.19.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja SKPD (dokumen)	12	-	2	2	100	2	4	33,33
2.19.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun (dokumen)	6	-	1	1	100	1	2	33,33

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan(Outcome/Output)	Target Kinerja Capaian Renstra Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020 (n-3) ***)**	Target dan Realisasi Hasil Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.19.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100**	**-**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
2.19.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan (pegawai)	144	-	22	22	100	24	46	31,94
2.19.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen SPJ yang telah diverifikasi dan disahkan (dokumen)	78	-	13	13	100	13	26	33,33
2.19.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen pelaporan keuangan akhir tahun (laporan)	6	-	1	1	100	1	2	33,33
2.19.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran (dokumen)	120	-	20	20	100	20	40	33,33

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan(Outcome/Output)	Target Kinerja Capaian Renstra Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020 (n-3) ***)**	Target dan Realisasi Hasil Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.19.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100**	**-**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
2.19.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya yang diadakan (stel)	249	-	57	1	1,75	36	37	14,85
2.19.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100**	**-**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
2.19.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik yang disediakan (buah)	545	-	48	48	100	97	145	26,60
2.19.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan (buah)	1.195	-	199	199	100	200	399	33,38
2.19.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah logistik kantor yang disediakan (jenis)	35	-	35	35	100	35	35	100

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan(Outcome/Output)	Target Kinerja Capaian Renstra Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020 (n-3) ***)**	Target dan Realisasi Hasil Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.19.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang yang dicetak dan digandakan (lembar)	117.520	-	33.520	33.520	100	19.450	67.620	57,53
2.19.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang disediakan tiap bulan (buah)	2.880	-	480	480	100	480	960	33,00
2.19.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (kali)	1.270	-	230	200	86,96	200	400	31,49
2.19.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit kendaraan dinas/kendaraan jabatan yang diadakan/dibeli (unit)	8	-	0	0	0	7	0	0
2.19.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan (unit)	30	-	4	4	100	6	10	33,33
2.19.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**-**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan(Outcome/Output)	Target Kinerja Capaian Renstra Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020 (n-3) ***)**	Target dan Realisasi Hasil Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.19.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pengelolaan Surat Masuk dan Keluar (surat)	7.800	-	1.300	1.279	98,38	1.300	2.579	33,06
2.19.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening jasa sumber daya yang dibayar tiap bulan (rekening)	6	-	6	6	100	5	6	100
2.19.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah SDM Pelayanan Umum yang disediakan (orang)	15	-	3	3	100	11	10	66,66
2.19.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**-**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
2.19.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit kendaraan dinas/jabatan yang dilakukan pemeliharaan (unit)	12	-	12	12	100	12	12	100
2.19.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara (unit)	16	-	16	16	100	16	16	100

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan(Outcome/Output)	Target Kinerja Capaian Renstra Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020 (n-3) ***)**	Target dan Realisasi Hasil Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.19.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	**Persentase organisasi kepemudaan yang aktif**	**66,67**	**-**	**45,83**	**45,83**	**100**	**50**	**50**	**74,99**
		Persentase wirausaha muda	**13,05**	**-**	**11**	**11,43**	**103,90**	**11**	**11,43**	**87,58**
2.19.02.2.01	**Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota**	**Persentase peran serta pemuda pelopor, wira usaha muda dan pemuda kader**	**16**	**-**	**13,50**	**13,25**	**98,14**	**14**	**14**	**87,50**

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan(Outcome/Output)	Target Kinerja Capaian Renstra Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020 (n-3) ***)**	Target dan Realisasi Hasil Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2-19.02.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah pemuda pelopor yang ditetapkan (orang)	270	-	15	0	0	30	45	16,66
2-19.02.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah peserta wira usaha pemula (orang)	4.080	-	80	80	100	250	330	8,08
2-19.02.2.01.05	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/Rad Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah data kepemudaan yang disusun (dokumen)	6	-	2	2	100	1	3	50,00
2-19.02.2.01.07	Pemberian Penghargaan Pemuda dan organisasi pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	Jumlah pemuda yang berprestasi (orang)	66	-	6	6	100	12	18	27,27

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan(Outcome/Output)	Target Kinerja Capaian Renstra Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020 (n-3) ***)**	Target dan Realisasi Hasil Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Jumlah organisasi kepemudaan yang berprestasi (lembaga)	15	-	3	3	100	3	6	40,00
2-19.02.2.01.08	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah peserta peningkatan kepemimpinan pemuda (orang)	520	-	60	60	100	70	130	25,00
		Jumlah peserta yang mendapatkan pelatihan paskibraka dan marching band (orang)	1.200	-	112	90	80,36	200	290	24,16
2-19.02.2.02	**Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase peningkatan kapasitas pemuda**	**3**	**-**	**2,50**	**1,54**	**61,60**	**2,75**	**2,75**	**91,66**

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan(Outcome/Output)	Target Kinerja Capaian Renstra Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020 (n-3) ***)**	Target dan Realisasi Hasil Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
219.02.2.02.02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi kepemudaan yang aktif	24	-	14	11	78,57	16	16	66,66
		Jumlah kerjasama/Kemitraan (dokumen)	8	-	0	0	0	1	0	0,00
		Jumlah pemuda yang aktif dalam kegiatan kepemudaan (orang)	12.510	-	600	600	100	2.085	2.685	21,46
2.19.03	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	**Cakupan pembinaan olahraga**	**72,50**	**-**	**60**	**60**	**100**	**62,50**	**62,50**	**86,20**
		Cakupan pelatih yang bersertifikasi	**35,82**	**-**	**11,94**	**11,94**	**100**	**17,91**	**17,91**	**50,00**
		Cakupan pembinaan atlet muda	**49,54**	**-**	**24,36**	**13,91**	**28,07**	**29,04**	**29,04**	**58,61**

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan(Outcome/Output)	Target Kinerja Capaian Renstra Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020 (n-3) ***)**	Target dan Realisasi Hasil Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Persentase atlet berprestasi	**67,89**	**-**	**62,81**	**32,47**	**51,69**	**63,75**	**50,00**	**73,64**
2.19.03.2.01	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah olahraga pendidikan yang menjadi kewenangan kabupaten yang dilakukan pembinaan dan pengembangan (lembaga)**	**533**	**-**	**533**	**533**	**100**	**533**	**533**	**100**
2.19.03.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi Oleh Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah atlet pelajar berprestasi (orang)	750	-	98	68	69,39	110	178	23,73
2.19.03.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah gedung olahraga yang dibangun (TA. 2021 Pengurugan Tanah Lokasi Pembangunan GOR) (unit)	1	-	1	1	100	1	0	0,00

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan(Outcome/Output)	Target Kinerja Capaian Renstra Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020 (n-3) ***)**	Target dan Realisasi Hasil Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Jumlah sarana olahraga yang dilakukan pemeliharaan (unit)	4	-	4	4	100	3	4	100
2.19.03.2.02	**Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah event kejuaraan olahraga yang diselenggarakan (event)**	**106**	**-**	**7**	**7**	**100**	**10**	**17**	**16,03**
2.19.03.2.02.01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah peserta multi event dan single event tingkat Kabupaten (orang)	8.250	-	670	412	61,49	730	1.142	13,84
2.19.03.2.02.02	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kab/Kota	Jumlah peserta yang dikirim untuk kejuaraan dan pekan olahraga tingkat Kabupaten (orang)	1.050	-	150	80	53,33	160	240	22,85
2.19.03.2.02.03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah atlet yang dikirimkan mengikuti kejuaraan (orang)	315	-	15	15	100	30	45	14,28

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan(Outcome/Output)	Target Kinerja Capaian Renstra Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020 (n-3) ***)**	Target dan Realisasi Hasil Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.19.03.2.03	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi**	**Jumlah peserta pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat daerah (orang)**	**1.985**	**120**	**120**	**100**	**100**	**275**	**395**	**19,89**
2.19.03.2.03.03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kab/Kota	Jumlah atlet berprestasi di Kabupaten (orang)	1.110	-	120	120	100	150	270	24,32
2.19.03.2.03.04	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah cabang olahraga yang diberikan penghargaan (cabor)	20	-	26	26	100	10	26	130,00
2.19.03.2.04	**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga**	**Jumlah organisasi keolahragaan yang dikembangkan (organisasi)**	**18**	**-**	**3**	**3**	**100**	**3**	**6**	**33,33**
2.19.03.2.04.02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah SDM organisasi keolahragaan yang telah mengikuti pembinaan (orang)	395	-	45	45	100	60	105	26,58

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan(Outcome/Output)	Target Kinerja Capaian Renstra Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020 (n-3) ***)**	Target dan Realisasi Hasil Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.19.03.2.04.04	Pemberian Penghargaan Bagi Organisasi Keolahragaan Berprestasi	Jumlah organisasi keolahragaan yang berprestasi (pengkab)	35	-	26	26	100	15	26	74,28
2.19.03.2.05	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi**	**Jumlah olahraga tradisional yang dikembangkan (jenis)**	**9**	**-**	**3**	**3**	**100**	**5**	**5**	**55,55**
2.19.03.2.05.01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah peserta festival olahraga rekreasi (orang)	765	-	100	100	100	120	220	28,75
2.19.03.2.05.04	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Jumlah peserta yang tuntas mengikuti olahraga wisata, tantangan dan petualangan (orang)	335	-	35	35	100	50	85	25,37

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan(Outcome/Output)	Target Kinerja Capaian Renstra Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020 (n-3) ***)**	Target dan Realisasi Hasil Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.19.04	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**	**Persentase pramuka berprestasi (%)**	**18**	**-**	**11**	**9**	**81,81**	**12**	**12**	**66,66**
2.19.04.2.01	**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**	**Jumlah organisasi kepramukaan yang dilakukan pembinaan (organisasi)**	**1**	**-**	**1**	**1**	**100**	**1**	**1**	**100**
2.19.04.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik	Jumlah data kepramukaan (dokumen)	6	-	1	1	100	1	2	33,33
2.19.04.2.01.02	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah organisasi kepramukaan yang diberikan hibah (organisasi)	1	-	1	1	100	1	1	100
2.19.04.2.01.03	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	170	-	50	50	100	24	24	43.53

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan(Outcome/Output)	Target Kinerja Capaian Renstra Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020 (n-3) ***)**	Target dan Realisasi Hasil Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.19.04.2.01.05	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	1	-	1	1	100	1	1	100
2.19.04.2.01.08	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan	4	-	-	-	-	1	1	25

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 dan Rencana Strategis Dinas Kepemudaan dan Olah Raga melaksanakan **4 Program dan 19 Kegiatan dan 46 Sub Kegiatan.**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022, Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 pada Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Sukoharjo sebesar Rp. 10.787.336.000,00 terealisasi sebesar Rp. 9.686.489.883,00 atau (89,80 %) dengan demikian terdapat efisiensi anggaran penggunaan sumber anggaran sebesar Rp. 1.100.846.117,00 atau sebesar (10,20 %) dari pagu anggaran yang ditetapkan.

Anggaran dan Realisasi Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2022 pada Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Sukoharjo secara terperinci dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.2

Realisasi Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Tahun Anggaran 2022

No.	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	CAPAIAN (%)
		10.787.336.000,00	**9.686.489.883,00**	**89,80**
1.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**2.874.280.000,00**	**2.615.690.696,00**	**91,00**
1.1.	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**80.000.000,00**	**43.346.000,00**	**54,18**
	1). Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	50.000.000,00	16.171.000,00	32,34
	2). Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.000.000,00	4.580.000,00	91,60
	3). Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00

No.	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	CAPAIAN (%)
	4). Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5.000.000,00	4.970.000,00	99,40
	5). Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	5.000.000,00	4.955.000,00	99,10
	6). Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.000.000,00	4.280.000,00	85,60
	7). Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000,00	3.390.000,00	67,80
1.2.	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**2.335.309.000,00**	**2.199.204.514,00**	**94,17**
	1). Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.091.659.000,00	1.998.064.514,00	95,53
	2). Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	233.650.000,00	191.410.000,00	81,92
	3). Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.000.000,00	4.730.000,00	94,60
	4). Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
1.3.	**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**19.900.000,00**	**1.000.000,00**	**5,03**
	1). Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	19.900.000,00	1.000.000,00	5,03
1.4.	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**200.696.000,00**	**184.520.000,00**	**91,94**
	1). Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.985.000,00	2.985.000,00	100,00
	2). Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	22.588.000,00	15.568.500,00	68,92

No.	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	CAPAIAN (%)
	3). Penyediaan Bahan Logistik Kantor	45.245.000,00	40.108.000,00	88,65
	4). Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00
	5). Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.095.000,00	4.095.000,00	100,00
	6). Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	95.783.000,00	91.763.500,00	95,80
1.5.	**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**22.000.000,00**	**21.500.000,00**	**97,73**
	1). Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	22.000.000,00	21.500.000,00	97,73
1.6.	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**78.450.000,00**	**41.959.909,00**	**53,49**
	1). Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.100.000,00	1.500.000,00	71,43
	2). Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	58.800.000,00	28.499.909,00	48,47
	3). Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	17.550.000,00	11.960.000,00	68,15
1.7.	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**137.925.000,00**	**124.160.273,00**	**90,02**
	1). Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	126.425.000,00	112.660.273,00	89,11
	2). Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.500.000,00	11.500.000,00	100,00
2.	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	**1.388.153.000,00**	**1.260.327.450,00**	**90,79**

No.	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	CAPAIAN (%)
2.1.	**Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota**	**727.278.000,00**	**631.068.450,00**	**86,77**
	1). Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	1.350.000,00	0,00	0,00
	2). Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	25.550.000,00	23.600.000,00	92,37
	3). Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/Rad Tingkat Kabupaten/Kota	220.000.000,00	170.768.500,00	77,62
	4). Pemberian Penghargaan Pemuda dan organisasi pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	43.180.000,00	40.170.000,00	93,03
	5). Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	15.000.000,00	14.850.000,00	99,00
	6). Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	422.198.000,00	381.679.950,00	90,40

No.	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	CAPAIAN (%)
2.2.	**Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**660.875.000,00**	**629.259.000,00**	**95,22**
	1). Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	660.875.000,00	629.259.000,00	95,22
3.	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	**5.894.503.000,00**	**5.186.515.737,00**	**87,99**
3.1.	**Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**3.838.240.000,00**	**3.330.129.737,00**	**86,76**
	1). Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi Oleh Satuan Pendidikan Dasar	394.330.000,00	251.597.000,00	63,80
	2). Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	3.443.910.000,00	3.078.532.737,00	89,39
3.2.	**Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**543.324.000,00**	**362.922.000,00**	**66,80**
	1). Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	100.365.000,00	61.586.000,00	61,36
	2). Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kab/Kota	382.959.000,00	241.336.000,00	63,02

No.	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	CAPAIAN (%)
	3). Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	60.000.000,00	60.000.000,00	100,00
3.3.	**Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi**	**1.049.775.000,00**	**1.032.750.000,00**	**98,38**
	1). Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kab/Kota	751.150.000,00	739.400.000,00	98,44
	2). Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	298.625.000,00	293.350.000,00	98,23
3.4.	**Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga**	**397.168.000,00**	**394.718.000,00**	**99,38**
	1). Pengembangan Organisasi Keolahragaan	29.668.000,00	28.018.000,00	94,44
	2). Pemberian Penghargaan Bagi Organisasi Keolahragaan Berprestasi	367.500.000,00	366.700.000,00	99,78
3.5.	**Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi**	**65.996.000,00**	**65.996.000,00**	**100,00**
	1). Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	30.996.000,00	30.996.000,00	100,00
	2). Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	35.000.000,00	35.000.000,00	100,00
4.	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**	**630.400.000,00**	**623.956.000,00**	**98,98**
4.1.	**Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**	**630.400.000,00**	**623.956.000,00**	**98,98**

No.	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	CAPAIAN (%)
	1). Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik	25.400.000,00	19.031.000,00	74,93
	2). Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	605.000.000,00	604.925.000,00	99,99

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sukoharjo

Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sukoharjo selaku lembaga teknis di bidang kepemudaan, keolahragaan dan Kepariwisataan harus mampu menjawab tantangan tersebut diatas. Keberhasilan suatu perencanaan dapat dilihat dari mulai proses penyampaian dengan pelaksanaan/implementasi di lapangan, sehingga terwujud sinergi antara perencanaan pembangunan baik di tingkat Nasional, Provinsi maupun Kabupaten. Namun di sisi lain seiring berubahnya regulasi tentang mekanisme perencanaan dari tingkat pusat akan memperlambat proses perencanaan dalam rangka keterpaduan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah provinsi dan perencanaan pembangunan kabupaten bisa secara optimal.

Kinerja Pelayanan Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Sukoharjo tahun 2022, seperti pada Tabel 2.3. berikut :

Tabel 2.3.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020-2022

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian			Proyeksi	Catatan Analisis
				Tahun 2020 (thn n-3)	Tahun 2021 (thn n-2)	Tahun 2022 (thn n-1)	Tahun 2023 (thn n)	Tahun 2024 (thn n+1)	Tahun 2020 (thn n-3)	Tahun 2021 (thn n-2)	Tahun 2022 (thn n-1)	Tahun 2023 (thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
I.	**TUJUAN**												
1.	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)			NA	39,51	41,90	53,00	53,50	NA	41,77	52,53	53,00	Akan Tercapai
II.	**SASARAN**												
1.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah			60,00	62,00	64,00	66,00	67,00	61,39	70,71	Belum Rilis	66,00	Akan Tercapai
2.	Cakupan Pemberdayaan Pemuda			13,60	13,60	13,75	14,25	14,50	13,60	13,05	13,94	14,25	Akan Tercapai
3.	Cakupan Prestasi Olahraga			2,50	2,50	3,25	48,00	53,00	2,50	2,50	3,25	48,00	Akan Tercapai

2.3 Isu-isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sukoharjo

Berdasarkan analisis gambaran pelayanan, kajian hasil evaluasi pelaksanaan serta kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sukoharjo, maka dapat dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sukoharjo.

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sukoharjo, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sukoharjo sebagai berikut :

1. Sejauhmana Tingkat Kinerja Pelayanan dan Hal Kritis yang Terkait dengan Pelayanan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sukoharjo

Pelayanan kepemudaan dan keolahragaan belum tertangani secara optimal, sehingga menimbulkan berbagai permasalahan. Hal ini disebabkan karena :

1) Terbatasnya jumlah kegiatan dan anggaran apabila dibandingkan dengan jumlah pemuda dan luasnya cakupan wilayah pembinaan yang tersebar di 12 Kecamatan.
2) Kegiatan kepemudaan belum dirasakan menyentuh kepada pemuda di daerah.
3) Belum tersedia prasarana Gedung Kepemudaan membuat aktivitas pemuda belum terakomodir melalui kegiatan/kreativitas pembinaan dalam ruang.
4) Prestasi Pemuda di Kabupaten Sukoharjo masih kurang khususnya pada keikutsertaan kegiatan pemuda di tingkat Provinsi dan Nasional.
5) Kurang optimalnya pembinaan kepada organisasi atau lembaga kepemudaan dan keolahragaan.
6) Kurang optimalnya pembinaan, pemberdayaan dan pengembangan kepemudaan dan keolahragaan.

7) Kurang optimalnya pembudayaan dan pemasyarakatan olah raga di masyarakat.
8) Belum tercukupinya sarana dan prasarana kepemudaan dan keolahragaan yang memadai;
9) Belum tersusunnya pola kerjasama yang sinergis dengan stakeholder di bidang kepemudaan dan keolahragaan
10) Masih kurangnya perhatian dan penghargaan kepada atlet yang berprestasi sehingga banyak atlet yang pindah ke daerah lain.
11) Belum optimalnya pengembangan destinasi wisata baru.
12) Kurangnya tingkat kunjungan wisata karena belum optimalnya pengembangan obyek wisata.
13) Belum dikenalnya Kabupaten Sukoharjo sebagai kawasan Pariwisata.

2. Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi dalam Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sukoharjo

a. Keterbatasan kebijakan pelayanan Kepemudaan dan Olahraga di Kabupaten Sukoharjo karena penanganan tidak seluruhnya menjadi kewenangan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata tetapi beberapa Perangkat Daerah terkait di antara tugas dan fungsinya membina Kepemudaan dan Olahraga dalam kegiatan tertentu, seperti : Dinas Sosial, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Sehingga dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sukoharjo harus selalu berkoordinasi dengan Dinas terkait.
b. Belum mempunyai Standar Pelayanan Minimal pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sukoharjo maupun dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP).

3. Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sukoharjo

a. Tantangan

1) Tantangan internal

a) Terbatasnya kuantitas dan kualitas SDM yang menguasai administrasi dan program komputer secara baik.
b) Belum maksimalnya pemanfaatan IPTEK dalam penyelesaian tugas keseharian.
c) SDM Pelaksana masih banyak hanya sekedar melaksanakan kegiatan tanpa memperhatikan apakah memberikan kontribusi bagi masyarakat atau tidak.
d) Belum adanya Informasi database/akses data di bidang kepemudaan.
e) Belum /masih kurangnya gagasan yang dituangkan dalam bentuk konsep dan informasi.
f) Belum memiliki pedoman yang jelas sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan.
g) Kurangnya update data kunjungan wisatawan.
h) Belum optimalnya SDM yang memiliki sertifikat atau memenuhi standar kompetensi bidang pariwisata.
i) Belum optimalnya pengembangan promosi pariwisata serta paket wisata dengan Kabupaten/Kota sekitar.

2) Tantangan ekternal

a) Banyaknya jumlah pemuda yang kurang produktif di Kabupaten Sukoharjo.
b) Luasnya wilayah pembinaan pemuda.
c) Penanganan Pemuda, organisasi kepemudaan dan organisasi keolahragaan belum tertangani secara optimal.
d) Bahaya Penyalahgunaan Narkoba dan perilaku destruktif.
e) Masih kurangnya prestasi pemuda dan prestasi atlet cabang olahraga prestasi.
f) Kurangnya fasilitas olahraga indoor milik pemerintah dan swasta.
g) Belum tercukupinya sarana dan prasarana untuk kegiatan kepemudaan dan keolahragaan yang memadai.

h) Masih ada pelaku usaha pariwisata yang belum memiliki sertifikasi/ memenuhi standar pariwisata.
i) Belum optimalnya pengembangan industri kreatif dan peningkatan kapasitas pelaku usaha ekonomi kreatif berbasis unggulan daerah.

b. Peluang

1) Adanya dukungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo terhadap pembinaan kepemudaan, olahraga dan pariwisata.
2) Adanya dukungan dari stakeholder terkait di Kabupaten Sukoharjo.
3) Adanya induk organisasi kepemudaan KNPI Kabupaten Sukoharjo.
4) Banyak jumlah organisasi kepemudaan dan organisasi masyarakat yang farsial.
5) Banyaknya jumlah dan potensi generasi muda (usia muda /pelajar).
6) Adanya Organisasi Olahraga seperti KONI, KORMI dan NPCI di Kabupaten Sukoharjo.
7) Adanya partisipasi masyarakat, insan olahraga dalam pengembangan minat, bakat dan prestasi olahraga di Kabupaten Sukoharjo.
8) Tersedianya industri ekonomi kreatif yang unggul dan kompetitif di Kabupaten Sukoharjo.
9) Banyaknya tempat yang berpotensi dikembangkan untuk menjadi destinasi wisata baru.

Formulasi isu-isu penting berupa Rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindak lanjuti dalam perumusan program prioritas tahun yang direncanakan

4. Alternatif Solusi untuk Mengatasi Hambatan dan Kendala

1. Mengirimkan aparatur sipil daerah untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan agar inovasinya berkembang.

2. Meningkatkan kompetensi dan responsibilitas aparatur melalui pendidikan dan pelatihan, diharapkan aparatur menjadi lebih kompeten dan responsive dalam melaksanakan tugas.
3. Meningkatkan pola pembinaan, pemberdayaan dan pengembangan kepemudaan dan keolahragaan.
4. Meningkatkan pembinaan terhadap organisasi kepemudaan dan keolahrgaan agar berperan aktif dalam pembangunan.
5. Meningkatkan pola pembibitan, pembinaan dan pemanduan atlet olahraga.
6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kepemudaan dan keolahragaan.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Telaahan terhadap rancangan awal Rencana Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sukoharjo dengan membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sukoharjo dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, sesuai prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap Perangkat Daerah berdasarkan review terhadap rancangan awal RKPD yang disajikan pada tabel 2.4.

Tabel 2.4.

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sukoharjo

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	URUSAN KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA				**19.370.259.500**					**19.725.085.000**	
	URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				**18.801.799.500**					**18.145.085.000**	
I.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100 %**	**6.236.099.500**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100 %**	**7.897.986.000**	
1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100 %**	**108.811.000**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100 %**	**75.000.000**	
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Sukoharjo	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	73.500.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Sukoharjo	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	40.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kabupaten Sukoharjo	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kabupaten Sukoharjo	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000	
1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kabupaten Sukoharjo	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	10.311.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kabupaten Sukoharjo	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	10.000.000	
1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kabupaten Sukoharjo	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kabupaten Sukoharjo	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kabupaten Sukoharjo	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kabupaten Sukoharjo	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000	
1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kabupaten Sukoharjo	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kabupaten Sukoharjo	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	5.000.000	
1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Sukoharjo	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	5.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Sukoharjo	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	5.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**	**(8)**	**(9)**	**(10)**	**(11)**	**(12)**
2.	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100 %**	**4.344.843.000**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100 %**	**4.174.962.000**	
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Sukoharjo	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29 Orang/ Bulan	4.072.794.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Sukoharjo	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29 Orang/ Bulan	3.941.462.000	
2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kabupaten Sukoharjo	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	13 Dokumen	262.049.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kabupaten Sukoharjo	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	13 Dokumen	223.500.000	
2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kabupaten Sukoharjo	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kabupaten Sukoharjo	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	5.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kabupaten Sukoharjo	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	16 Laporan	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kabupaten Sukoharjo	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	16 Laporan	5.000.000	
3	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100%**	**128.562.500**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100%**	**100.400.000**	
3.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kabupaten Sukoharjo	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	50 Paket	18.562.500	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kabupaten Sukoharjo	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	0	
3.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kabupaten Sukoharjo	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50 Orang	110.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kabupaten Sukoharjo	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50 Orang	100.400.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	**226.140.000**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	**222.936.000**	
4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kabupaten Sukoharjo	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kabupaten Sukoharjo	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	9.996.000	
4.2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kabupaten Sukoharjo	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	11.500.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kabupaten Sukoharjo	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	11.500.000	
4.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kabupaten Sukoharjo	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	56.750.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kabupaten Sukoharjo	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	56.750.000	
4.4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kabupaten Sukoharjo	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	12.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kabupaten Sukoharjo	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	10.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kabupaten Sukoharjo	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	3.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kabupaten Sukoharjo	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	3.240.000	
4.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Sukoharjo	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	220 Laporan	132.890.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Sukoharjo	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	220 Laporan	131.450.000	
5	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100 %**	**44.080.000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100 %**	**326.040.000**	
5.1	Pengadaan Mebel	Kabupaten Sukoharjo	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	0	Pengadaan Mebel	Kabupaten Sukoharjo	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	300.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Sukoharjo	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	44.080.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Sukoharjo	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	26.040.000	
6	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**1.190.555.000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**2.810.540.000**	
6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kabupaten Sukoharjo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2.900.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kabupaten Sukoharjo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2.900.000	
6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Sukoharjo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	108.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Sukoharjo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1.360.800.000	
6.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Sukoharjo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.079.655.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Sukoharjo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.446.840.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
7	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**193.108.000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**188.108.000**	
7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kabupaten Sukoharjo	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	12 Unit	178.108.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kabupaten Sukoharjo	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	12 Unit	178.108.000	
7.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Sukoharjo	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	16 Unit	15.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Sukoharjo	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	16 Unit	10.000.000	
II.	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**		**Persentase Organisasi Kepemudaan yang Aktif**	**91,89 %**	**1.700.000.000**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**		**Persentase Organisasi Kepemudaan yang Aktif**	**91,89 %**	**1.050.845.000**	
			Persentase Wirausaha Muda	**16,40%**				**Persentase Wirausaha Muda**	**16,40%**		

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	**Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota**		**Persentase Peran Serta Pemuda Pelopor, Wira Usaha Muda dan Pemuda Kader**	**15,00 %**	**850.000.000**	**Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota**		**Persentase Peran Serta Pemuda Pelopor, Wira Usaha Muda dan Pemuda Kader**	**15,00 %**	**550.000.000**	
1.1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Kabupaten Sukoharjo	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/ Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	60 Orang	60.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Kabupaten Sukoharjo	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/ Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	15 Orang	30.000.000	
1.2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Kabupaten Sukoharjo	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/ Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	550 Orang	325.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Kabupaten Sukoharjo	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/ Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	200 Orang	150.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.3	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/Rad Tingkat Kabupaten/Kota	Kabupaten Sukoharjo	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	2 Dokumen	200.000.000	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/Rad Tingkat Kabupaten/Kota	Kabupaten Sukoharjo	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	2 Dokumen	200.000.000	
1.4	Pemberian Penghargaan Pemuda dan organisasi pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	Kabupaten Sukoharjo	Jumlah Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi Penerima Penghargaan	36 Orang	175.000.000	Pemberian Penghargaan Pemuda dan organisasi pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	Kabupaten Sukoharjo	Jumlah Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi Penerima Penghargaan	24 Orang	150.000.000	
1.5	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Kabupaten Sukoharjo	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan	180 Orang	90.000.000	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Kabupaten Sukoharjo	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan	60 Orang	20.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2	**Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase Peningkatan Kapasitas Pemuda**	**2,95 %**	**850.000.000**	**Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase Peningkatan Kapasitas Pemuda**	**2,95 %**	**500.845.000**	
2.1	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Kabupaten Sukoharjo	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	8 Dokumen	850.000.000	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Kabupaten Sukoharjo	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	5 Dokumen	500.845.000	
III	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**		**Cakupan Pembinaan Olahraga**	**70,00 %**	**7.585.700.000**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**		**Cakupan Pembinaan Olahraga**	**70,00 %**	**8.511.254.000**	
			Cakupan Pelatih yang Bersertifikasi	**61,67 %**				**Cakupan Pelatih yang Bersertifikasi**	**61,67 %**		
			Cakupan Pembinaan Atlet Muda	**39,29 %**				**Cakupan Pembinaan Atlet Muda**	**39,29 %**		
			Persentase Atlet Berprestasi	**35,18 %**				**Persentase Atlet Berprestasi**	**35,18 %**		

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**		**Jumlah Olahraga Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan**	**533 Lembaga**	**2.190.700.000**	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**		**Jumlah Olahraga Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan**	**16 Lembaga**	**5.951.254.000**	
1.1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi Oleh Satuan Pendidikan Dasar	Kabupaten Sukoharjo	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Dasar	2 Dokumen	1.360.700.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi Oleh Satuan Pendidikan Dasar	Kabupaten Sukoharjo	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Dasar	24 Dokumen	951.254.000	
1.2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Kabupaten Sukoharjo	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	4 Unit	830.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Kabupaten Sukoharjo	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	4 Unit	5.000.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**	**(8)**	**(9)**	**(10)**	**(11)**	**(12)**
2	**Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		**Jumlah Event Kejuaraan Olahraga yang Diselenggara kan**	**14 Event**	**1.275.000.000**	**Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		**Jumlah Event Kejuaraan Olahraga yang Diselenggarakan**	**15 Event**	**930.000.000**	
2.1	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Kabupaten Sukoharjo	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan *Multi Event* dan *Single Event* Tingkat Kabupaten/Kota	4 Dokumen	600.000.000	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Kabupaten Sukoharjo	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan *Multi Event* dan *Single Event* Tingkat Kabupaten/Kota	4 Dokumen	150.000.000	
2.2	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kab/Kota	Kabupaten Sukoharjo	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	2 Dokumen	600.000.000	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kab/Kota	Kabupaten Sukoharjo	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	2 Dokumen	750.000.000	
2.3	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Kabupaten Sukoharjo	Jumlah atlet yang dikirimkan mengikuti kejuaraan	60 Orang	75.000.000	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Kabupaten Sukoharjo	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan	60 Orang	30.000.000	
3	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi**		**Jumlah Peserta Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Berprestasi Tingkat Daerah**	**375 Orang**	**3.240.000.000**	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi**		**Jumlah Peserta Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Berprestasi Tingkat Daerah**	**375 Orang**	**205.000.000**	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3.1	Seleksi Atlet Daerah	Kabupaten Sukoharjo	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	150 Orang	300.000.000	Seleksi Atlet Daerah	Kabupaten Sukoharjo	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	176 Orang	75.000.000	
3.2	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Kabupaten Sukoharjo	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang Berkualitas berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science)	0 Pelatda	0	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Kabupaten Sukoharjo	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang Berkualitas berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science)	10 Pelatda	75.000.000	
3.3	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kab/Kota	Kabupaten Sukoharjo	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan	200 Orang	2.075.000.000	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kab/Kota	Kabupaten Sukoharjo	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan	75 Orang	30.000.000	
3.4	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Kabupaten Sukoharjo	Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan	200 Orang	800.000.000	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Kabupaten Sukoharjo	Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan	0 Orang	0	
3.5	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Kabupaten Sukoharjo	Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan	1 Dokumen	40.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Kabupaten Sukoharjo	Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan	1 Dokumen	25.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**	**(8)**	**(9)**	**(10)**	**(11)**	**(12)**
4	**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga**		**Jumlah Organisasi Keolahragaan yang Dikembangkan**	**3 Organisasi**	**700.000.000**	**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga**		**Jumlah Organisasi Keolahragaan yang Dikembangkan**	**3 Organisasi**	**1.350.000.000**	
4.1	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Kabupaten Sukoharjo	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	45 Organisasi	50.000.000	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Kabupaten Sukoharjo	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	2 Organisasi	1.325.000.000	
4.2	Pemberian Penghargaan Bagi Organisasi Keolahragaan Berprestasi	Kabupaten Sukoharjo	Jumlah organisasi keolahragaan yang berprestasi	16 Organisasi	650.000.000	Pemberian Penghargaan Bagi Organisasi Keolahragaan Berprestasi	Kabupaten Sukoharjo	Jumlah Organisasi Keolahragaan yang Menerima Penghargaan	16 Organisasi	25.000.000	
5	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi**		**Jumlah Olahraga Tradisional yang Dikembangkan**	**6 Jenis**	**180.000.000**	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi**		**Jumlah Olahraga Tradisional yang Dikembangkan**	**6 Jenis**	**75.000.000**	
5.1	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Kabupaten Sukoharjo	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	1 Dokumen	60.000.000	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Kabupaten Sukoharjo	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	1 Dokumen	30.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5.2	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Kabupaten Sukoharjo	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	1 Dokumen	60.000.000	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Kabupaten Sukoharjo	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	1 Dokumen	20.000.000	
5.3	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Kabupaten Sukoharjo	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat	1 Dokumen	60.000.000	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Kabupaten Sukoharjo	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat	1 Dokumen	25.000.000	
IV	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**		**Persentase Pramuka Berprestasi**	**16 %**	**1.280.000.000**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**		**Persentase Pramuka Berprestasi**	**16 %**	**685.000.000**	
1	**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**		**Jumlah Organisasi Kepramukaan yang Dilakukan Pembinaan**	**1 Organisasi**	**1.280.000.000**	**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**		**Jumlah Organisasi Kepramukaan yang Dilakukan Pembinaan**	**1 Organisasi**	**685.000.000**	
1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik	Kabupaten Sukoharjo	Jumlah Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik yang Tersedia dan Termanfaatkan	1 Dokumen	25.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik	Kabupaten Sukoharjo	Jumlah Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik yang Tersedia dan Termanfaatkan	1 Dokumen	15.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.2	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Kabupaten Sukoharjo	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	1 Organisasi	605.000.000	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Kabupaten Sukoharjo	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	1 Organisasi	605.000.000	
1.3	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Kabupaten Sukoharjo	Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	50 Orang	50.000.000	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Kabupaten Sukoharjo	Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	20 Orang	20.000.000	
1.4	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Kabupaten Sukoharjo	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	2 Laporan	50.000.000	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Kabupaten Sukoharjo	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	1 Laporan	25.000.000	
1.5	Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Kabupaten Sukoharjo	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	1 Unit	500.000.000	Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Kabupaten Sukoharjo	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	0 Unit	0	
1.6	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	Kabupaten Sukoharjo	Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan	1 Organisasi	50.000.000	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	Kabupaten Sukoharjo	Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan	1 Organisasi	20.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
V	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**		**Persentase Daya Tarik / Destinasi Wisata yang Ditingkatkan**	**33,33 %**	**596.240.000**	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**		**Persentase Daya Tarik / Destinasi Wisata yang Ditingkatkan**	**33,33 %**	**995.000.000**	
1	**Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota**		**Jumlah Destinasi Wisata yang Dilakukan Pengelolaan dengan Baik**	**2 Destinasi**	**200.000.000**	**Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota**		**Jumlah Destinasi Wisata yang Dilakukan Pengelolaan dengan Baik**	**2 Destinasi**	**100.000.000**	
1.1	Pengadaan/Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Kabupaten Sukoharjo	Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	2 Lokasi	200.000.000	Pengadaan/Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Kabupaten Sukoharjo	Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	2 Lokasi	100.000.000	
2	**Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**		**Luas Area Strategis yang Dikembangkan sebagai Kawasan Wisata**	**44.463 m2**	**246.240.000**	**Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**		**Luas Area Strategis yang Dikembangkan sebagai Kawasan Wisata**	**44.463 m2**	**815.000.000**	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**	**(8)**	**(9)**	**(10)**	**(11)**	**(12)**
2.1	Pengadaan/Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kabupaten Sukoharjo	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	2 Unit	206.240.000	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kabupaten Sukoharjo	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	2 Unit	800.000.000	
2.2	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kabupaten Sukoharjo	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	12 Laporan	40.000.000	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kabupaten Sukoharjo	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	12 Laporan	15.000.000	
3	**Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota**		**Jumlah Destinasi Wisata di Sukoharjo yang Dilakukan Pengelolaan dengan Baik**	**2 Destinasi**	**150.000.000**	**Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota**		**Jumlah Destinasi Wisata di Sukoharjo yang Dilakukan Pengelolaan dengan Baik**	**2 Destinasi**	**80.000.000**	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3.1	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kabupaten Sukoharjo	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	2 Lokasi	150.000.000	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kabupaten Sukoharjo	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	2 Lokasi	80.000.000	
VI	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**		**Persentase Event Pariwisata yang Dilaksanakan**	**41,67 %**	**566.220.000**	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**		**Persentase Event Pariwisata yang Dilaksanakan**	**41,67 %**	**335.000.000**	
1	**Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**		**Jumlah Destinasi Wisata sebagai Daerah Tujuan Wisata**	**2 Obyek Wisata**	**566.220.000**	**Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**		**Jumlah Destinasi Wisata sebagai Daerah Tujuan Wisata**	**2 Obyek Wisata**	**335.000.000**	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.1	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Kabupaten Sukoharjo	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	12 Dokumen	33.020.000	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Kabupaten Sukoharjo	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	12 Dokumen	20.000.000	
1.2	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Kabupaten Sukoharjo	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	7 Dokumen	95.000.000	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Kabupaten Sukoharjo	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	7 Dokumen	30.000.000	
1.3	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Kabupaten Sukoharjo	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	3 Kegiatan	280.000.000	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Kabupaten Sukoharjo	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	3 Kegiatan	260.000.000	
1.4	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Kabupaten Sukoharjo	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	4 Promosi	158.200.000	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Kabupaten Sukoharjo	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	4 Promosi	25.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
VII	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**		**Persentase Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Dapat Dikembangkan**	**31,25 %**	**1.406.000.000**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**		**Persentase Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Dapat Dikembangkan**	**31,25 %**	**250.000.000**	
1	**Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar**		**Jumlah Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Meningkat Kapasitasnya**	**650 Orang**	**1.406.000.000**	**Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar**		**Jumlah Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Meningkat Kapasitasnya**	**650 Orang**	**250.000.000**	
1.1	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Kabupaten Sukoharjo	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	50 Orang	200.000.000	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Kabupaten Sukoharjo	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	50 Orang	100.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.2	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	Kabupaten Sukoharjo	Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI	500 Orang	946.000.000	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	Kabupaten Sukoharjo	Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI	500 Orang	100.000.000	
1.3	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Kabupaten Sukoharjo	Jumlah Masyarakat yang Memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	20 Orang	200.000.000	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Kabupaten Sukoharjo	Jumlah Masyarakat yang Memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	20 Orang	35.000.000	
1.4	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Kabupaten Sukoharjo	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	60 Orang	60.000.000	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Kabupaten Sukoharjo	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	60 Orang	15.000.000	

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN SUKOHARJO

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional merupakan penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

Hal yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional, yaitu reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pasca konflik, kebudayaan, kreatifitas, dan inovasi teknologi, politik, hukum dan keamanan serta provinsi untuk tahun rencana, yang terkait dengan pembangunan kabupaten.

Dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan pembangunan yang dihadapi dan capaian pembangunan selama ini, Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional untuk tahun 2020-2024 adalah :

"TERWUJUDNYA INDONESIA MAJU YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG"

Upaya untuk mewujudkan rancangan Pembangunan Nasional, perlu adanya Visi-Misi yaitu:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia.
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing.
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan.
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan.
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa.
6. Menegakkan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya.
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga.
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Untuk mencapai Visi Misi ada 5 Arahan Presiden yang terdiri dari:

1. Pembangunan SDM,
2. Pembangunan Infrastruktur,
3. Penyederhanaan Regulasi,
4. Penyederhanaan Birokrasi, dan
5. Transformasi Ekonomi.

Lima arahan Presiden ini diterjemahkan dalam 7 Agenda Pembangunan RPJMN yaitu :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.
6. Membangun Lingkungan Hidup,Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan transformasi Pelayanan Publik.

Adapun kebijakan nasional dan provinsi di bidang kepemudaan dan keolahragaan berdasarkan hasil indentifikasi sebagaimana rincian pada tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1

Identifikasi Kebijakan Nasional dan Provinsi

No.	Kebijakan Nasional/Provinsi	Sumber
(1)	(2)	(3)
	A Kebijakan Nasional	
1.	Program Pertukaran Pemuda Antar Negara	Kemenpora
2.	Program Desain Besar Olahraga Nasional	Kemenpora
3.	Program Penganugerahan Desa Wisata Indonesia	Kemenparekraf
4.	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif	Kemenparekraf

No.	Kebijakan Nasional/Provinsi	Sumber
(1)	(2)	(3)
	B. Kebijakan Provinsi	
1.	Sarjana Penggerak Pembangunan di Pedesaan (SP3)	Disporapar Prov. Jateng
2.	Seleksi dan Pembinaan Pertukaran Pemuda antar Provinsi	Disporapar Prov. Jateng
3.	Seleksi Kapal Pemuda Nusantara (KPN)	Disporapar Prov. Jateng
4.	Bakti Sosial Pemuda Provinsi Jawa Tengah	Disporapar Prov. Jateng
5.	Jambore Pemuda Provinsi Jawa Tengah	Disporapar Prov. Jateng
6.	Bantuan Kelompok Usaha Pemuda Produktif (KUPP)	Disporapar Prov. Jateng
7.	Fasilitas Kegiatan Pekan Olahraga Pemda Provinsi Jawa Tengah	Disporapar Prov. Jateng
8.	Fasilitas kegiatan Olahraga dalam rangka (HAORNAS) Tingkat Provinsi Jawa Tengah	Disporapar Prov. Jateng
9.	Gelar Desa Wisata Provinsi Jawa Tengah	Disporapar Prov. Jateng
10.	Pemilihan Duta Pariwisata Indonesia	Disporapar Prov. Jateng

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sukoharjo

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sukoharjo yang melaksanakan urusan wajib bukan pelayanan dasar yaitu urusan kepemudaan dan olahraga, tujuan dan sasaran renja perangkat daerah harus selaras dengan tujuan dan sasaran target kinerja Rencana Strategi (Renstra) Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 -2026.

3.2.1. TUJUAN

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun, yang akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program

dan kegiatan dalam rangka merealiasikan visi dan misi. Adapun tujuan yang akan dicapai Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sukoharjo adalah :

1. Terwujudnya Kualitas Pembangunan Pemuda.
2. Terwujudnya Destinasi Wisata yang Berdaya Saing.

3.2.2. SASARAN

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan; yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi obyek yang dilayani.

Adapun tujuan dan sasaran Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 sebagaimana rincian pada tabel 3.2 berikut :

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA
1.	Terwujudnya Kualitas Pembangunan Pemuda		Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	53,50 %
		Meningkatnya Kualitas Aparatur dan Pelayanan Publik	Nilai SAKIP	67,00
		Meningkatnya Kualitas Kepemudaan	Cakupan Pemberdayaan Pemuda	14,50 %
		Meningkatnya Kualitas Keolahragaan	Cakupan Prestasi Olahraga	53,00 %

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA
2.	Terwujudnya Destinasi Wisata yang Berdaya Saing		Persentase Destinasi Wisata yang Berdaya Saing	62,50 %
		Meningkatnya Kunjungan Wisata	Persentase Kunjungan Wisatawan	25,00 %

3.3. Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Sukoharjo tahun 2024 mencakup 7 program, 20 kegiatan dan 62 sub kegiatan, yaitu:

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota :**
   a. **Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah,** dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
      1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
      2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD.
      3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD.
      4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD.
      5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD.
      6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
      7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
   b. **Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah,** dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
      1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
      2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD.
      3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.
      4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD.

c. **Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah,** dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
   1) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.

d. **Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah,** dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
   1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
   2) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.
   3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
   4) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.
   5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.
   6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

e. **Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah,** dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
   1) Pengadaan Mebel.
   2) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

f. **Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah,** dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
   1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
   2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
   3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

g. **Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah,** dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
   1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
   2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

2. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan :

a. **Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota**, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :

1) Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor.
2) Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula.
3) Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/Rad Tingkat Kabupaten/Kota.
4) Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi.
5) Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda.

b. Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :

1) Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota.

3. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan :

a. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :

1) Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi Oleh Satuan Pendidikan Dasar.
2) Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota.

b. Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :

1) Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota.
2) Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota.
3) Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan.

c. **Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi,** dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
   1) Seleksi Atlet Daerah.
   2) Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science).
   3) Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota.
   4) Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga.

d. **Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga,** dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
   1) Pengembangan Organisasi Keolahragaan.
   2) Pemberian Penghargaan Bagi Organisasi Keolahragaan Berprestasi.

e. **Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi,** dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
   1) Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi.
   2) Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan.
   3) Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat.

4. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan :

a. **Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan,** dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
   1) Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik.
   2) Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah.
   3) Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah.
   4) Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah.
   5) Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan.

5. **Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata :**
   a. **Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota,** dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
      1) Pengadaan/Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota.
   b. **Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota,** dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
      1) Pengadaan/Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota.
      2) Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota.
   c. **Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota,** dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
      1) Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota.

6. **Program Pemasaran Pariwisata :**
   a. **Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota,** dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
      1) Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri.
      2) Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri.
      3) Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota.
      4) Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri.

7. **Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif :**
   a. **Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar,** dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
      1) Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif.

2) Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI.
3) Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata.
4) Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata.

Rumusan rencana kerja dan pendanaan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sukoharjo tahun 2024 dan prakiraan maju tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 3.3 sebagai berikut :

Tabel 3.3

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2024 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025 DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN SUKOHARJO

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
					URUSAN KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA				**19,725,085,000**				**30,513,984,000**
2	**19**				**URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA**				**18,145,085,000**				**25,205,244,000**
2	**19**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**	**Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**100 %**	**7,897,986,000**	APBD		**100 %**	**8,813,984,000**
2	**19**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**100 %**	**75,000,000**	APBD		**100 %**	**119,500,000**
2	19	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Sukoharjo	3 Dokumen	40,000,000	APBD		2 Dokumen	73,500,000
2	19	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kabupaten Sukoharjo	1 Dokumen	5,000,000	APBD		1 Dokumen	8,000,000
2	19	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kabupaten Sukoharjo	1 Dokumen	10,000,000	APBD		1 Dokumen	12,000,000

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2	19	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kabupaten Sukoharjo	1 Dokumen	5,000,000	APBD		1 Dokumen	7,000,000
2	19	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kabupaten Sukoharjo	1 Dokumen	5,000,000	APBD		1 Dokumen	7,000,000
2	19	01	2.01	0006	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPDdan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kabupaten Sukoharjo	2 Laporan	5,000,000	APBD		2 Laporan	7,000,000
2	19	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Sukoharjo	1 Laporan	5,000,000	APBD		1 Laporan	7,000,000
2	**19**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**100 %**	**4,174,962,000**	APBD		**100 %**	**4,33,794,000**
2	19	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Sukoharjo	29 Orang/ bulan	3,941,462,000	APBD		29 Orang/bulan	4,072,794,000
2	19	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kabupaten Sukoharjo	13 Dokumen	223,500,000	APBD		13 Dokumen	227,000,000

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2	19	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Laporan	5,000,000	APBD		1 Laporan	7,000,000
2	19	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD		16 Laporan	5,000,000	APBD		16 Laporan	8,000,000
2	**19**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**100 %**	**100,400,000**	APBD		**100 %**	**152,000,000**
2	19	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		0 Paket	0	APBD		1 Paket	32,000,000
2	19	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		50 Orang	100,400,000	APBD		50 Orang	120,000,000
2	**19**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**100 %**	**222,936,000**	APBD		**100 %**	**272,707,000**
2	19	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket	9.996,000	APBD		1 Paket	20,000,000
2	19	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		1 Paket	11,500,000	APBD		1 Paket	12,000,000

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2	19	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		2 Paket	56,750,000	APBD		2 Paket	60,000,000
2	19	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		1 Paket	10,000,000	APBD		1 Paket	13,000,000
2	19	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		12 Dokumen	3,240,000	APBD		12 Dokumen	4,000,000
2	19	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		220 Laporan	131,450,000	APBD		220 Laporan	135,000,000
2	**19**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**100 %**	**326,040,000**	APBD		**100 %**	**980,000,000**
2	19	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		0 Unit	0	APBD		9 Unit	740,000,000
2	19	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		1 Paket	300,000,000	APBD		1 Paket	200,000,000
	19	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		4 Unit	26,040,000	APBD		5 Unit	40,000,000

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2	**19**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**100 %**	**2,810,540,000**	APBD		**100 %**	**2,809,840**
2	19	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pengelolaan Surat Masuk dan Keluar		12 Laporan	2,900,000	APBD		12 Laporan	3,000,000
2	19	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Jasa Sumber Daya yang Dibayar Tiap Bulan		12 Laporan	1,360,800,000	APBD		12 Laporan	1,360,000,000
2	19	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan UmumKantor	Jumlah SDM Pelayanan Umum yang Disediakan		12 Laporan	1,446,840,000	APBD		12 Laporan	1,446,840,000
2	**19**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**100 %**	**188,108,000**	APBD		**100 %**	**200,000,000**
2	19	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kabupaten Sukoharjo	12 Unit	178,108,000	APBD		12 Unit	180,000,000
2	19	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kabupaten Sukoharjo	16 Unit	10,000,000	APBD		16 Unit	20,000,000
2	**19**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	**Persentase Organisasi Kepemudaan yang Aktif**		**91.89 %**	**1,050,845,000**	APBD		**94.59 %**	**2,775,000,000**
						Persentase Wirausaha Muda		**16.40 %**		APBD		**16.47 %**	

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	19	**02**	**2.01**		**Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota**	**Persentase Peran Serta Pemuda Pelopor, Wira Usaha Muda dan Pemuda Kader**		**15,00 %**	**550,000,000**	APBD		**15,50 %**	**1,625,000,000**
2	19	02	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Kabupaten Sukoharjo	15 Orang	30,000,000	APBD		30 Orang	175,000,000
2	19	02	2.01	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Kabupaten Sukoharjo	200 Orang	150,000,000	APBD		800 Orang	900,000,000
2	19	02	2.01	0005	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/Rad Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	Kabupaten Sukoharjo	2 Dokumen	200,000,000	APBD		2 Dokumen	250,000,000
2	19	02	2.01	0007	Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	Jumlah Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi Penerima Penghargaan	Kabupaten Sukoharjo	24 Orang	150,000,000	APBD		36 Orang	200,000,000

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2	19	02	2.01	0008	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan	Kabupaten Sukoharjo	60 Orang	20,000,000	APBD		100 Orang	100,000,000
2	**19**	**02**	**2.02**		**Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Pemuda**		**2.95 %**	**500,845,000**	APBD		**3,15 %**	**1,150,000,000**
2	19	02	2.02	0002	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	Kabupaten Sukoharjo	5 Dokumen	500,845,000	APBD		11 Dokumen	1,150,000,000
2	**19**	**03**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	**Cakupan Pembinaan Olahraga**		**70,00 %**	**8,511,254,000**	APBD		**75.00 %**	**13,615,000,000**
						Cakupan Pelatih yag Bersertifikasi		**61,67 %**		APBD		**62,69 %**	
						Cakupan Pembinaan Atlet Muda		**39.29 %**		APBD		**44,41 %**	
						Persentase Atlet Berprestasi		**35,18 %**		APBD		**36.35 %**	
2	**19**	**03**	**2.01**		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Olahraga Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan**		**16 Lembaga**	**5,951,254,000**	APBD		**17 Lembaga**	**6,755,000,000**

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2	19	03	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	Jumlah Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olagraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha yang Dikembangkan	Kabupaten Sukoharjo	Unit	0	APBD		1 Unit	2.340.000.000
2	19	03	2.01	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Dasar	Kabupaten Sukoharjo	24 Dokumen	951,254,000	APBD		24 Dokumen	1,415,000,000
2	19	03	2.01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	Kabupaten Sukoharjo	4 Unit	5,000,000,000	APBD		4 Unit	3,000,000,000
2	**19**	**03**	**2.02**		**Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Event Kejuaraan Olahraga yang Diselenggarakan**		**15 Event**	**930,000,000**	APBD		**16 Event**	**1,350,000,000**
2	19	03	2.02	0001	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan *Multi Event* dan *Single Event* Tingkat Kabupaten/Kota	Kabupaten Sukoharjo	4 Dokumen	150,000,000	APBD		3 Dokumen	250,000,000
2	19	03	2.02	0002	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Kabupaten Sukoharjo	2 Dokumen	750,000,000	APBD		2 Dokumen	1,000,000,000

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2	19	03	2.02	0003	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan	Kabupaten Sukoharjo	60 Orang	30,000,000	APBD		70 Orang	100,000,000
2	**19**	**03**	**2.03**		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi**	**Jumlah Peserta Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah**		**375 Orang**	**205,000,000**	APBD		**375 Orang**	**2,125,000,000**
2	19	03	2.03	0001	Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	Kabupaten Sukoharjo	176 Orang	75,000,000	APBD		200 Orang	175,000,000
2	19	03	2.03	0002	Pemusatan Latihan Daerah, IlmuPengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang Berkualitas berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science)	Kabupaten Sukoharjo	10 Pelatda	75,000,000	APBD		15 Pelatda	375,000,000
2	19	03	2.03	0003	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan	Kabupaten Sukoharjo	75 Orang	30,000,000	APBD		200 Orang	175,000,000
2	19	03	2.03	0004	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan	Kabupaten Sukoharjo	75 Orang	0	APBD		120 Orang	900,000,000
2	19	03	2.03	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan	Kabupaten Sukoharjo	1 Dokumen	25,000,000	APBD		2 Dokumen	500,000,000
2	**19**	**03**	**2.04**		**Pembinaan dan PengembanganOrganisasi Olahraga**	**Jumlah Organisasi Olahraga yangDikembangkan**		**3 Organisasi**	**1,350,000,000**	APBD		**3 Organisasi**	**890,113,000**

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2	19	03	2.04	0002	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Kabupaten Sukoharjo	2 Organisasi	1,325,000,000	APBD		2 Organisasi	3,000,000,000
2	19	03	2.04	0004	Pemberian Penghargaan Bagi Organisasi Keolahragaan Berprestasi	Jumlah Organisasi Keolahragaan yang Menerima Penghargaan	Kabupaten Sukoharjo	16 Organisasi	25,000,000	APBD		16 Organisasi	160,000,000
2	**19**	**03**	**2.05**		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi**	**Jumlah Olahraga Tradisional yang Dikembangkan**		**6 Jenis**	**75,000,000**	APBD		**7 Jenis**	**225,000,000**
2	19	03	2.05	0001	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangandan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Kabupaten Sukoharjo	1 Dokumen	30,000,000	APBD		1 Dokumen	75,000,000
2	19	03	2.05	0004	Pengembangan Olahraga Wisata,Tantangan dan Petualangan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Kabupaten Sukoharjo	1 Dokumen	20,000,000	APBD		1 Dokumen	75,000,000
2	19	03	2.05	0005	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat	Kabupaten Sukoharjo	1 Dokumen	25,000,000	APBD		1 Dokumen	75,000,000
2	**19**	**04**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**	**Persentase Pramuka Berprestasi**		**16 %**	**685,000,000**	APBD		**16 %**	**1,260,000,000**
2	**19**	**04**	**2.01**		**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**	**Jumlah Organisasi Pramuka yang Dilakukan Pembinaan**		**1 Organisasi**	**685,000,000**	APBD		**1 Organisasi**	**2,605,000,000**

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2	19	04	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik yang Tersedia dan Termanfaatkan	Kabupaten Sukoharjo	1 Dokumen	15,000,000	APBD		1 Dokumen	40,000,000
2	19	04	2.01	0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	Kabupaten Sukoharjo	1 Organisasi	605,000,000	APBD		1 Organisasi	605,000,000
2	19	04	2.01	0003	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	Kabupaten Sukoharjo	20 Orang	20,000,000	APBD		36 Orang	60,000,000
2	19	04	2.01	0005	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Kabupaten Sukoharjo	1 Laporan	25,000,000	APBD		2 Laporan	60,000,000
2	19	04	2.01	0006	Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	Kabupaten Sukoharjo	0 Unit	0	APBD		1 Unit	2,000,000,000
2	19	04	2.01	0008	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan	Kabupaten Sukoharjo	1 Organisasi	20,000,000	APBD		4 Organisasi	150,000,000
3	**26**				**URUSAN PARIWISATA**				**1,580,000,000**				**2,705,000,000**
3	**26**	**02**			**PROGRAM PENINGKATAN DAYATARIK DESTINASI PARIWISATA**	**Persentase Daya Tarik / Destinasi Wisata yang ditingkatkan**		**33,33 %**	**995,000,000**	APBD		**40,00 %**	**1,345,000,000**

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
3	**26**	**02**	**2.01**		**Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota**	**Jumlah Destinasi Wisata yang Dilakukan Pengelolaan dengan Baik**		**2 Destinasi**	**100,000,000**	APBD		**2 Destinasi**	**250,000,000**
3	26	02	2.01	0005	Pengadaan/Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Kabupaten Sukoharjo	2 Lokasi	100,000,000	APBD		2 Lokasi	250,000,000
3	**26**	**02**	**2.02**		**Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**	**Luas Area Strategis yang Dikembangkan Sebagai KawasanWisata**		**44,463 m2**	**815,000,000**	APBD		**44,463 m2**	**895,000,000**
3	26	02	2.02	0004	Pengadaan/Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kabupaten Sukoharjo	2 Unit	800,000,000	APBD		3 Unit	850,000,000
3	26	02	2.02	0009	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kabupaten Sukoharjo	12 Laporan	15,000,000	APBD		12 Laporan	45,000,000
3	**26**	**02**	**2.03**		**Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota**	**Jumlah Destinasi Wisata di Sukoharjo yang Dilakukan Pengelolaan dengan Baik**		**2 Destinasi**	**80,000,000**	APBD		**2 Destinasi**	**200,000,000**
3	26	02	2.03	0003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Kabupaten Sukoharjo	2 Lokasi	80,000,000	APBD		2 Lokasi	200,000,000

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
3	**26**	**03**			**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	**Persentase Event Pariwisata yang Dilaksanakan**		**41,67 %**	**335,000,000**	APBD		**50,00 %**	**560,000,000**
3	**26**	**03**	**2.01**		**Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**	**Jumlah Destinasi Wisata sebagai Daerah Tujuan Wisata**		2 OW	**335,000,000**	APBD		2 OW	**560,000,000**
3	26	03	2.01	0003	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam danLuar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Kabupaten Sukoharjo	12 Dokumen	20,000,000	APBD		12 Dokumen	50,000,000
3	26	03	2.01	0004	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Kabupaten Sukoharjo	7 Dokumen	30,000,000	APBD		7 Dokumen	1250,000,000
3	26	03	2.01	0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Kabupaten Sukoharjo	3 Laporan	260,000,000	APBD		3 Laporan	285,000,000
3	26	03	2.01	0007	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Kabupaten Sukoharjo	4 Dokumen	25,000,000	APBD		4 Dokumen	100,000,000
3	**26**	**05**			**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	**Persentase Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Dapat Dikembangkan**		**31,25 %**	**250,000,000**	APBD		**35,42 %**	**800,000,000**

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
3	**26**	**05**	**2.01**		**Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar**	**Jumlah Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Meningkat Kapasitasnya**		**650 Orang**	**250,000,000**	APBD		**600 Orang**	**800,000,000**
3	26	05	2.01	0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Kabupaten Sukoharjo	50 Orang	100,000,000	APBD		80 Orang	80,000,000
3	26	05	2.01	0008	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI	Kabupaten Sukoharjo	500 Orang	100,000,000	APBD		500 Orang	350,000,000
3	26	05	2.01	0009	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Jumlah Masyarakat yang Memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Kabupaten Sukoharjo	20 Orang	35,000,000	APBD		20 Orang	120,000,000
3	26	05	2.01	0010	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Kabupaten Sukoharjo	60 Orang	15,000,000	APBD		20 Orang	250,000,000

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN SUKOHARJO

Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, diuraikan bahwa pada Bab IV fokus perhatiannya adalah terkait dengan rencana kerja dan pendanaan dokumen rencana kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024.

Dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sukoharjo merupakan penjabaran dari dokumen Rencana Strategis Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sukoharjo yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sukoharjo. Rencana Kerja (Renja) disusun untuk satu tahun yang memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai dengan tugas dan fungsi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sukoharjo yang ditransformasikan melalui Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

Rumusan program dan kegiatan pembangunan daerah menghasilkan rencana pembangunan yang konkrit dalam bentuk program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah. Dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 terdapat 7 (tujuh) program, 20 (dua puluh) kegiatan dan 62 (enam puluh dua) sub kegiatan, baik program utama yang merupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam mendukung visi dan misi daerah, program pilihan dan program pendukung. Untuk menilai pencapaian kegiatan, maka pada setiap kegiatan dirumuskan indikator kinerja kegiatan. Perumusan kegiatan juga telah vdiarahkan untuk mendukung

pencapaian kinerja pada setiap program.

Seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 yang tertuang dalam Rencana Kerja (Renja) yang didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sukoharjo yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU).

Program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan urusan yang ditangani Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sukoharjo berikut kebutuhan anggaran dan sumber pendanaannya dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut ini.

Tabel 4.1

Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Pagu Dana
								2024	2024
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2	**19**				**DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA**				**19.725.085.000**
2	**19**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**%**	**100**	**7.897.986.000**
2	**19**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**%**	**100**	**75.000.000**
2	19	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	40.000.000
2	19	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	5.000.000
2	19	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	10.000.000
2	19	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	5.000.000

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Pagu Dana
								2024	2024
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2	19	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	5.000.000
2	19	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2	5.000.000
2	19	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	5.000.000
2	**19**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**%**	**100**	**4.174.962.000**
2	19	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bln	29	3.941.462.000
2	19	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	13	223.500.000
2	19	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	5.000.000
2	19	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	16	5.000.000
2	**19**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**%**	**100**	**100.400.000**
2	19	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	50	100.400.000
2	**19**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**%**	**100**	**222.936.000**
2	19	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	9.996.000
2	19	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan	Jumlah Paket Peralatan Rumah	Paket	1	11.500.000

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Pagu Dana
								2024	2024
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					Rumah Tangga	Tangga yang Disediakan			
2	19	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	56.750.000
2	19	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	10.000.000
2	19	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	3.240.000
2	19	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	220	131.450.000
2	**19**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**%**	**100**	**326.040.000**
2	19	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	1	300.000.000
2	19	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	4	26.040.000
2	**19**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**%**	**100**	**2.810.540.000**
2	19	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	2.900.000
2	19	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	1.360.800.000
2	19	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	1.446.840.000
2	**19**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**%**	**100**	**188.108.000**
2	19	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	12	178.108.000
2	19	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	16	10.000.000

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Pagu Dana
								2024	2024
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2	**19**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	**Persentase Organisasi Kepemudaan yang Aktif**	**%**	**91,89**	**1.050.845.000**
						Persentase Wirausaha Muda	**%**	**16,40**	
2	**19**	**02**	**2.01**		**Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota**	**Persentase Peran Serta Pemuda Pelopor, Wira Usaha Muda dan Pemuda Kader**	**%**	**15,00**	**550.000.000**
2	19	02	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Orang	15	30.000.000
2	19	02	2.01	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Orang	200	150.000.000
2	19	02	2.01	0005	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/Rad Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen	2	200.000.000
2	19	02	2.01	0007	Pemberian Penghargaan Pemuda dan organisasi pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	Jumlah Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi Penerima Penghargaan	Orang	24	150.000.000
2	19	02	2.01	0008	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan	Orang	60	20.000.000
2	**19**	**02**	**2.02**		**Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Pemuda**	**%**	**2,95**	**500.845.000**

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Pagu Dana
								2024	2024
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2	19	02	2.02	0002	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	Dokumen	5	500.845.000
2	**19**	**03**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	**Cakupan Pembinaan Olahraga**	**%**	**70,00**	**8.511.254.000**
						Cakupan Pelatih yag bersertifikasi	**%**	**61,67**	
						Cakupan pembinaan atlet muda	**%**	**39,29**	
						Persentase atlet berprestasi	**%**	**35,18**	
2	**19**	**03**	**2.01**		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**jumlah olahraga pendidikan yang menjadi kewenangan kab yang dilakukan pembinaan dan pengembangan**	**Lembaga**	**16**	**5.951.254.000**
2	19	03	2.01	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi Oleh Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Dasar	Dokumen	24	951.254.000
2	19	03	2.01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	Unit	4	5.000.000.000
2	**19**	**03**	**2.02**		**Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Event Kejuaraan Olahraga yang Diselenggarakan**	**Event**	**15**	**930.000.000**
2	19	03	2.02	0001	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan *Multi Event* dan *Single Event* Tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen	4	150.000.000
2	19	03	2.02	0002	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kab/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen	2	750.000.000

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Pagu Dana
								2024	2024
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2	19	03	2.02	0003	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan	Orang	60	30.000.000
2	**19**	**03**	**2.03**		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi**	**Jumlah Peserta Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Berprestasi Tingkat Daerah**	**Orang**	**375**	**205.000.000**
2	19	03	2.03	0001	Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	Orang	176	75.000.000
2	19	03	2.03	0002	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang Berkualitas berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science)	Pelatda	10	75.000.000
2	19	03	2.03	0003	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kab/Kota	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan	Orang	75	30.000.000
2	19	03	2.03	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan	Dokumen	1	25.000.000
2	**19**	**03**	**2.04**		**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga**	**Jumlah organisasi olahraga yang dikembangkan**	**Organisasi**	**3**	**1.350.000.000**
2	19	03	2.04	0002	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Organisasi	2	1.325.000.000
2	19	03	2.04	0004	Pemberian Penghargaan Bagi Organisasi Keolahragaan Berprestasi	Jumlah Organisasi Keolahragaan yang Menerima Penghargaan	Organisasi	16	25.000.000
2	**19**	**03**	**2.05**		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi**	**Jumlah Olahraga Tradisional yang Dikembangkan**	**Jenis**	**6**	**75.000.000**
2	19	03	2.05	0001	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Dokumen	1	30.000.000
2	19	03	2.05	0004	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Dokumen	1	20.000.000

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Pagu Dana
								2024	2024
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2	19	03	2.05	0005	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat	Dokumen	1	25.000.000
2	**19**	**04**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**	**Persentase Pramuka Berprestasi**	**%**	**16**	**685.000.000**
2	**19**	**04**	**2.01**		**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**	**Jumlah Organisasi Kepramukaan yang dilakukan Pembinaan**	**Organisasi**	**1**	**685.000.000**
2	19	04	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik yang Tersedia dan Termanfaatkan	Dokumen	1	15.000.000
2	19	04	2.01	0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	Organisasi	1	605.000.000
2	19	04	2.01	0003	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	Orang	20	20.000.000
2	19	04	2.01	0005	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Laporan	1	25.000.000
2	19	04	2.01	0008	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan	Organisasi	1	20.000.000
3	**26**	**02**			**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	**Persentase Daya Tarik / Destinasi Wisata yang Ditingkatkan**	**%**	**33,33**	**995.000.000**
3	**26**	**02**	**2.01**		**Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota**	**Jumlah Destinasi Wisata yang Dilakukan Pengelolaan dengan Baik**	**Destinasi**	**2**	**100.000.000**
3	26	02	2.01	0005	Pengadaan/Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Lokasi	2	100.000.000
3	**26**	**02**	**2.02**		**Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**	**Luas Area Strategis yang Dikembangkan sebagai Kawasan Wisata**	**m2**	**44.463**	**815.000.000**

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Pagu Dana
								2024	2024
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3	26	02	2.02	0004	Pengadaan/Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Unit	2	800.000.000
3	26	02	2.02	0009	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Laporan	12	15.000.000
3	**26**	**02**	**2.03**		**Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota**	**Jumlah Destinasi Wisata di Sukoharjo yang Dilakukan Pengelolaan dengan Baik**	**Destinasi**	**2**	**80.000.000**
3	26	02	2.03	0003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Lokasi	1	80.000.000
3	**26**	**03**			**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	**Persentase Event Pariwisata yang Dilaksanakan**	**%**	**41,67**	**335.000.000**
3	**26**	**03**	**2.01**		**Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**	**Jumlah Destinasi Wisata sebagai Daerah Tujuan Wisata**	**Obyek Wisata**	**2**	**335.000.000**
3	26	03	2.01	0003	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Dokumen	12	20.000.000
3	26	03	2.01	0004	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Dokumen	7	30.000.000
3	26	03	2.01	0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Kegiatan	3	260.000.000
3	26	03	2.01	0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Promosi	4	25.000.000

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Pagu Dana
								2024	2024
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3	**26**	**05**			**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	**Persentase Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Dapat Dikembangkan**	**%**	**31,25**	**250.000.000**
3	**26**	**05**	**2.01**		**Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar**	**Jumlah Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Meningkat Kapasitasnya**	**Orang**	**650**	**250.000.000**
3	26	05	2.01	0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Orang	50	100.000.000
3	26	05	2.01	0008	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI	Orang	500	100.000.000
3	26	05	2.01	0009	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Jumlah Masyarakat yang Memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Orang	20	35.000.000
	26	05	2.01	0010	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Orang	60	15.000.000

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 merupakan pelaksanaan rencana strategis tahun ke-4, periode Renstra tahun 2021-2026. Program dan kegiatan yang direncanakan merupakan prioritas dalam rangka mendukung tercapainya visi dan misi Pembangunan Daerah Jangka Menengah.

Rencana Kerja (Renja) tersebut harus diwujudkan melalui *action* atau tindakan melalui kegiatan yang dilaksanakan dengan tetap berpedoman pada RPJMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026 dan Renstra Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026.

Sebagai upaya untuk mencapai visi dan misi organisasi diperlukan langkah-langkah yang sistematis, terukur, terencana dan berkesinambungan dari tahun ke tahun. Untuk tujuan tersebut maka disusunlah perencanaan kinerja atau Rencana Kerja (Renja) Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Tahun 2024. Selain itu penyusunan Rencana Kerja (Renja) juga dimaksudkan agar organisasi dapat merumuskan langkah-langkah prioritas yang harus dilaksanakan untuk masa 1 tahun ke depan sehingga visi dan misi organisasi tetap dapat diwujudkan dan eksistensi organisasi dapat berjalan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan dalam rencana kerja.

Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sukoharjo harus dapat melaksanakan kegiatan dengan baik di bidang administrasi dan pembangunan, yang selanjutnya diharapkan dapat berfungsi dalam perjanjian kinerja serta dilaksanakan melalui program dan kegiatan tahun 2024 sehingga harapan dalam mencapai kinerja yang profesional dapat terwujud.

Rencana Kerja (Renja) ini akan dijadikan sebagai pedoman bagi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sukoharjo dalam menjalankan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta sebagai acuan dalam menyusun program / kegiatan Perangkat Daerah tahun 2024. Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sukoharjo tahun 2024 tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh karyawan-karyawati Dinas Kepemudaan, Olahraga

dan Pariwisata Kabupaten Sukoharjo serta peran aktif stakeholder yang bersangkutan.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sukoharjo guna mewujudkan masyarakat Sukoharjo yang semakin sejahtera.



RENCANA KERJA TAHUN 2024

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SUKOHARJO

Jl. Kyai Mawardi No.1 Sukoharjo (0271) 593178

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo dapat disusun dengan baik. Dokumen ini disusun sebagai wujud perencanaan tahunan yang memuat arah kebijakan, program, serta kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan guna mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Rencana Kerja Tahun 2024 ini merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas, yang juga selaras dengan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sukoharjo. Dokumen ini menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan yang berorientasi pada peningkatan kualitas layanan publik, khususnya dalam hal administrasi kependudukan, serta pelayanan yang transparan, efektif, dan akuntabel. Penyusunan Renja ini dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan sehingga harapannya seluruh program dan kegiatan yang direncanakan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan selaras dengan arah pembangunan nasional maupun daerah.

Kami menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam penyusunan dokumen ini. Semoga dokumen Rencana Kerja ini dapat menjadi pedoman yang efektif dalam pelaksanaan tugas-tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo tahun 2024 dan mampu mendorong peningkatan kinerja serta pelayanan prima kepada masyarakat.

Sukoharjo, 2023

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SUKOHARJO



BUDI SUSETYO, S.H, M.H
Pembina Utama Muda
NIP. 19730705 199203 1 004

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan tentang perlunya perencanaan di tingkat unit kerja untuk mendukung perencanaan daerah.

Sesuai dengan amanat Undang-undang dan guna lebih meningkatkan keterpaduan dan keselarasan antar Program-program dan Kegiatan-kegiatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai unit kerja di lingkungan Pemerintah di Kabupaten Sukoharjo juga melakukan penyusunan dokumen perencanaan unit kerja, yaitu Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024.

Dokumen Renja Perangkat Daerah pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya ke dalam Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah. Kualitas dokumen Renja sangat ditentukan oleh kualitas Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renja Perangkat Daerah sangat ditentukan oleh kemampuan Perangkat Daerah dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

Tugas pokok dan Fungsi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo adalah sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan kesekretariatan Dinas;
2. Penyusunan rencana program, pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
3. Pengelolaan Administrasi kependudukan
4. Pencatatan dan Penerbitan akta-akta kependudukan dan pencatatan sipil;
5. Pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
6. Pemanfaatan data dan Inovasi pelayanan;
7. Penyelenggaraan Sosialisasi;
8. Pembinaan jabatan fungsional.

Penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo didasarkan oleh Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo. Pedoman dalam penyusunan Renja PD adalah Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo.

Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo merupakan rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan untuk kurun waktu 1 (satu) tahun yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo, dan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah untuk tahun 2023.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum yang dipergunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo adalah:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali dirubah, terakhir dengan Undang-undang No. 12 Tahun 2008;
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
7. Undang- undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Atas Undang- undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahanan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2440, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
11. Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
12. Peraturan Presiden Nomor 26 tahun 2009 tentang penerapan KTP yang berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Keputusan Bupati (SK)Nomor 21 Tahun 2001Tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (Lembar Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peratutan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 14);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 10);sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
17. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 47 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Kabupaten Sukoharjo;

18. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 298);
19. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 32 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud

Maksud disusunnya Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) adalah :

1. Sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatannya dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan daerah tahun 2024.
2. Sebagai pedoman dalam Penyusunan evaluasi kinerja Pemerintah yaitu LKjIP serta sebagai rujukan dalam Penyusunan perencanaan Perangkat Daerah tahun berikutnya.

1.3.2. Tujuan

Adapun tujuan disusunnya Renja PD adalah :

1. Sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi seluruh personil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk satu tahun mendatang sebagai implementasi visi, misi dan kebijakan Perangkat Daerah.

2. Sebagai dokumen perencanaan teknis strategis dan sebagai alat koordinasi sinkronisasi pelaksanaan pembangunan dengan stakeholder.
3. Mencapai tujuan dan strategi kelembagaan serta kebijakan berdasarkan kewenangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo yang dijabarkan dalam RKPD Tahun 2024.
4. Mengarahkan kekuatan dan peluang yang telah diidentifikasi untuk mengatasi kelemahan dan tantangan dalam suatu strategi penyelenggaraan pelayanan urusan kewenangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD
- 3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

2.1 PENCAPAIAN PROGRAM/KEGIATAN TAHUN LALU

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo selama tahun 2022 dan perkiraan capaian target tahun 2023.

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Renja PD adalah sebagai berikut :

1. Semua program dan kegiatan Tahun 2022 dapat terealisasi dengan target kinerja sesuai yang direncanakan kecuali pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya tidak terealisasi karena tidak tersedianya spesifikasi barang sesuai permendagri tentang pakaian dinas. Tingkat pencapaian kinerja program dan kegiatan untuk mencapai sasaran serta

target Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo sampai dengan Tahun 2022 ini, hasilnya cukup bagus, namun ke depan tentunya masih banyak faktor yang harus diperhatikan dan ditingkatkan.

2. Realisasi program kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan: ada, hanya satu kegiatan yaitu pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya.
3. Faktor Faktor yang mempengaruhi Capaian target Kinerja:
    a. Meningkatkan kualitas layanan kependudukan dan pencatatan sipil melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan Sumber Daya Aparatur layanan serta penyediaan sarana dan prasarana penunjang layanan.
    b. Menyisir kepemilikan dokumen kependudukan oleh masyarakat melalui pelayanan jemput bola.
4. Kebijakan yang di ambil dalam menyelesaikan Target capaian Kinerja OPD :
    a. Mempercepat kepemilikan dokumen administrasi kependudukan dengan fokus pada wilayah-wilayah yang paling rendah capaiannya.
    b. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur melalui pelayanan prima.
    c. Pengembangan inovasi layanan administrasi kependudukan serta pemberian akses pemanfaatan data kependudukan melalui Kerjasama dengan *stakeholder* terkait.

Hal ini dapat dilihat dari capaian kinerja program dan kegiatan Tahun 2022 sebagaimana yang tertera pada Tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1 Realisasi Belanja Program Bersumber APBD Kabupaten Tahun 2022

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET & REALISASI	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Target : 100 persen Realisasi : 100 persen	100 %
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Target : Rp. 47,900,000 Realisasi : Rp. 41,690,000	87,04 %
Jumlah Dokumen Perencanaan PD yang disusun	Target : 2 dokumen Realisasi : 2 dokumen	100 %
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Target : Rp. 5,000,000 Realisasi : Rp. 3,016,000	60,32 %
Jumlah Dokumen RKA SKPD yang disusun	Target : 1 dokumen Realisasi : 1 dokumen	100 %
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Target : Rp. 5,000,000 Realisasi : Rp. 4,312,000	86,24 %
Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	Target : 1 dokumen Realisasi : 1 dokumen	100 %
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Target : Rp. 5,000,000 Realisasi : Rp. 5,000,000	100 %
Jumlah Dokumen DPA SKPD yang disusun	Target : 1 dokumen Realisasi : 1 dokumen	100 %
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Target : Rp. 5,000,000 Realisasi : Rp. 5,000,000	100 %
Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD yang disusun	Target : 1 dokumen Realisasi : 1 dokumen	100 %
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Target : Rp. 5,000,000 Realisasi : Rp. 4,234,000	84,68 %
Jumlah dokumen Laporan capaian kinerjadan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Target : 1 dokumen Realisasi : 1 dokumen	100 %

			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Target : Rp. 5,000,000 Realisasi : Rp. 4,550,000	91 %
			Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	Target : 1 dokumen Realisasi : 1 dokumen	100 %
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
		Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Target : 100 persen Realisasi : 100 persen	100 %
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Target : Rp. 5,292,466,000 Realisasi : Rp. 4,766,960,283	90,07 %
			Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan	Target : 46 orang Realisasi : 46 orang	100 %
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Target : Rp. 245,040,000 Realisasi : Rp. 202,100,000	82,48 %
			Jumlah ASN yang disediakan administrasi pelaksanaan tugas	Target : 16 Pegawai Realisasi : 16 Pegawai	100 %
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Target : Rp. 4,000,000 Realisasi : Rp. 3,250,000	81,25 %
			Jumlah dokumen SPJ yang telah diverifikasi dan disahkan	Target : 12 dokumen Realisasi : 12 dokumen	100 %
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Target : Rp. 5,500,000 Realisasi : Rp. 5,500,000	100 %
			Jumlah dokumen pelaporan keuangan akhir tahun	Target : 1 dokumen Realisasi : 1 dokumen	100 %
			Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Target : Rp. 4,000,000 Realisasi : Rp. 3,275,000	81,88 %
			Jumlah laporan tindak lanjut atas pemeriksaan/audit/reviu pada Laporan Keuangan SKPD oleh instansi terkait yang tersusun	Target : 4 laporan Realisasi : 4 laporan	100 %
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Target : Rp. 4,000,000 Realisasi : Rp. 3,700,000	92,5 %
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran	Target : 6 dokumen Realisasi : 6 dokumen	100 %
			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Target : Rp. 3,000,000 Realisasi : Rp. 2,600,000	86,67 %
			Jumlah dokumen pelaporan prognosis realisasi anggaran	Target : 2 laporan Realisasi : 2 laporan	100 %
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				
			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Target : Rp. 1,778,000 Realisasi : Rp. 1,778,000	100 %

				Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah pada SKPD yang disusun	Target : 1 dokumen Realisasi : 1 dokumen	100 %
			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Target : Rp. 4,000,000 Realisasi : Rp. 4,000,000	100 %
				Jumlah BMD pada SKPD yang diamankan	Target : 100 unit Realisasi : 100 unit	100 %
			Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD		Target : Rp. 2,870,000 Realisasi : Rp. 2,000,000	69,69 %
				Jumlah laporan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Target : 2 laporan Realisasi : 2 laporan	100 %
			Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Target : Rp. 2,500,000 Realisasi : Rp. 2,500,000	100 %
				Jumlah Dokumen Rekonsiliasi dan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang disusun	Target : 1 dokumen Realisasi : 1 dokumen	100 %
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					
			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Target : Rp. 2,500,000 Realisasi : Rp. 2,500,000	100 %
				Jumlah Laporan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian yang disusun	Target : 1 laporan Realisasi : 1 laporan	100 %
			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Target : Rp. 2,500,000 Realisasi : Rp. 2,500,000	100 %
				Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai yang disusun	Target : 1 dokumen Realisasi : 1 dokumen	100 %
			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Target : Rp. 262,968,900 Realisasi : Rp. 245,389,500	93,32 %
				Peraturan Perundang- Undangan	Target : 300 Pegawai Realisasi : 300 Pegawai	100 %
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan		Target : Rp. 52,822,000 Realisasi : Rp. 50,813,000	96,2 %
				Jumlah pegawai yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Target : 110 Pegawai Realisasi : 110 Pegawai	100 %
	Administrasi Umum Perangkat Daerah					
		Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah			Target : 100 persen Realisasi : 100 persen	100 %
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Target : Rp. 7,155,000 Realisasi : Rp. 7,155,000	100 %

				Jumlah Komponen listrik yang disediakan	Target : 20 jenis Realisasi : 20 jenis	100 %
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Target : Rp. 901,376,600 Realisasi : Rp. 873,603,200	96,92 %
				Jumlah Peralatan dan Perlengkapan	Target : 6 buah Realisasi : 6 buah	100 %
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Target : Rp. 136,000,000 Realisasi : Rp. 135,047,000	99,3 %
				Jumlah Logistik Kantor yang disediakan	Target : 81 jenis Realisasi : 81 jenis	100 %
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Target : Rp. 38,000,000 Realisasi : Rp. 37,998,650	100 %
				Jumlah jenis barang yang dicetak dan digandakan	Target : 8 jenis Realisasi : 8 jenis	100 %
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Target : Rp. 4,400,000 Realisasi : Rp. 4,260,000	96,82 %
				Jumlah Bahan Bacaan yang Disediakan tiap bulan	Target : 90 eksemplar Realisasi : 90 eksemplar	100 %
			Fasilitasi Kunjungan Tamu		Target : Rp. 2,000,000 Realisasi : Rp. 1,050,000	52,5 %
				Jumlah tamu yang difasilitasi	Target : 48 orang Realisasi : 48 orang	100 %
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Target : Rp. 204,855,000 Realisasi : Rp. 203,374,881	99,28 %
				Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti	Target : 40 kali Realisasi : 40 kali	100 %
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Target : Rp. 8,000,000 Realisasi : Rp. 8,000,000	100 %
				Jumlah laporan Penatausahaan Arsip Dinamis	Target : 12 laporan Realisasi : 12 laporan	100 %
			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Target : Rp. 6,000,000 Realisasi : Rp. 5,730,000	95,5 %
				Jumlah laporan Penatausahaan Arsip Dinamis	Target : 12 laporan Realisasi : 12 laporan	100 %
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					
		Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Target : 100 persen Realisasi : 100 persen	100 %

			Pengadaan Mebel	Target : Rp. 77,928,000 Realisasi : Rp. 74,128,000	95,12 %
			Jumlah Mebel yang diadakan	Target : 42 unit Realisasi : 42 unit	100 %
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Target : Rp. 538,934,300 Realisasi : Rp. 497,344,904	92,28 %
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	Target : 20 unit Realisasi : 20 unit	100 %
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Target : Rp. 45,953,000 Realisasi : Rp. 45,170,000	98,3 %
			Jumlah Sarana dan Prasarana pendukung Gedung	Target : 35 unit Realisasi : 35 unit	100 %
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
		Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Target : 100 persen Realisasi : 100 persen	100 %
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Target : Rp. 226,000,000 Realisasi : Rp. 222,357,103	98,39 %
			Jumlah surat masuk dan keluar yang dikelola	Target : 1200 Surat Realisasi : 1408 Surat	117,33 %
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Target : Rp. 165,700,000 Realisasi : Rp. 160,404,297	96,8 %
			Jumlah rekening jasa sumber daya yang dibayar tiap bulan	Target : 3 rekening Realisasi : 3 rekening	100 %
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Target : Rp. 26,550,000 Realisasi : Rp. 25,850,000	97,36 %
			Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	Target : 38 buah Realisasi : 38 buah	100 %
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Target : Rp. 484,144,192 Realisasi : Rp. 472,047,069	97,5 %
			Jumlah SDM pelayanan umum yang disediakan	Target : 3 orang Realisasi : 3 orang	100 %
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
		Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Target : 100 persen Realisasi : 100 persen	100 %
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Target : Rp. 155,650,000 Realisasi : Rp. 136,676,849	87,81 %

				Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara/ difasilitasi	Target : 29 unit Realisasi : 29 unit	100 %
			Pemeliharaan Mebel		Target : Rp. 14,000,000 Realisasi : Rp. 14,000,000	100 %
				Jumlah meubelair yang dipelihara	Target : 3 unit Realisasi : 3 unit	100 %
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Target : Rp. 63,166,000 Realisasi : Rp. 63,166,000	100 %
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Target : 3 unit Realisasi : 3 unit	100 %
			Pemeliharaan/Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Target : Rp. 574,938,000 Realisasi : Rp. 568,827,000	98,94 %
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Target : 1 unit Realisasi : 1 unit	100 %
			Pemeliharaan/Rehabilit asi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Target : Rp. 70,560,435 Realisasi : Rp. 70,560,435	100 %
				Jumlah Sarpras Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Target : 1 unit Realisasi : 1 unit	100 %
Program Pendaftaran Penduduk						
	Pelayanan Pendaftaran Penduduk					
		Cakupan Layanan Dokumen Kependudukan			Target : 100 persen Realisasi : 100 persen	100 %
			Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan		Target : Rp. 80,770,000 Realisasi : Rp. 80,349,800	99,48 %
				Jumlah terdatanya penduduk rentan administrasi kependudukan	Target : 5 Panti Realisasi : 5 Panti	100 %
			Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk		Target : Rp. 16,000,000 Realisasi : Rp. 15,242,100	95,26 %
				Jumlah laporan penatausahaan dokumen	Target : 12 laporan Realisasi : 12 laporan	100 %
			Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk		Target : Rp. 15,000,000 Realisasi : Rp. 13,947,875	92,99 %
				Jumlah laporan terselesaikannya masalah	Target : 12 laporan Realisasi : 12 laporan	100 %
			Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk		Target : Rp. 1,027,263,224 Realisasi : Rp. 973,119,156	94,73 %
				Jumlah terlayaninya pemohon pada pelayanan pendaftaran penduduk	Target : 12 bulan Realisasi : 12 bulan	100 %

Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Target : Rp. 13,000,000 Realisasi : Rp. 12,510,000	96,23 %
Jumlah dokumen hasil pelaporan peristiwa kependudukan	Target : 12 dokumen Realisasi : 12 dokumen	100 %
Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk		
Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Target : Rp. 25,000,000 Realisasi : Rp. 23,665,000	94,66 %
Jumlah peserta sosialisasi pendaftaran	Target : 180 orang Realisasi : 180 orang	100 %
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk		
Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk	Target : Rp. 20,602,000 Realisasi : Rp. 15,725,600	76,33 %
Jumlah peserta yang mengikuti Bimbingan teknis Pendaftaran penduduk	Target : 60 orang Realisasi : 60 orang	100 %
Program Pencatatan Sipil		
Pelayanan Pencatatan Sipil		
Jumlah produk layanan pencatatan sipil	Target : 20 jenis Realisasi : 20 jenis	100 %
Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Target : Rp. 24,320,000 Realisasi : Rp. 24,319,600	100 %
Jumlah Dokumen pelaporan peristiwa penting pencatatan sipil	Target : 12 dokumen Realisasi : 12 dokumen	100 %
Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Target : Rp. 277,348,768 Realisasi : Rp. 258,749,964	93,29 %
Jumlah penerbitan akta pencatatan sipil	Target : 33000 orang Realisasi : 31176 orang	94,47 %
Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil	Target : Rp. 10,000,000 Realisasi : Rp. 9,025,000	90,25 %
Jumlah Pendataan penduduk yang belum memiliki dokumen pencatatan sipil	Target : 1 kali Realisasi : 1 kali	100 %
Penyelenggaraan Pencatatan Sipil		
Persentase terlaksananya kegiatan pendukung terselenggaranya pencatatan sipil	Target : 100 persen Realisasi : 100 persen	100 %

			Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non- Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	Target : Rp. 53,000,000 Realisasi : Rp. 50,612,000	95,49 %
			Jumlah kerjasama dan koordinasi dengan Ormas dan Perguruan Tinggi	Target : 1 kali Realisasi : 1 kali	100 %
			Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	Target : Rp. 20,000,000 Realisasi : Rp. 17,322,000	86,61 %
			Jumlah jemput bola pelayanan pencatatan sipil	Target : 12 kali Realisasi : 12 kali	100 %
			Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi terkait Pencatatan Sipil	Target : Rp. 6,000,000 Realisasi : Rp. 5,938,400	98,97 %
			Jumlah kerjasama dan koordinasi dengan Ormas dan Perguruan Tinggi	Target : 1 kali Realisasi : 1 kali	100 %
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil				
		Persentase terbinanya dan terawasinya penyelenggaraan pencatatan sipil		Target : 12 persen Realisasi : 12 persen	100 %
			Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pencatatan Sipil	Target : Rp. 10,000,000 Realisasi : Rp. 9,980,000	99,8 %
			Jumlah laporan penggunaan blangko	Target : 12 laporan Realisasi : 12 laporan	100 %
			Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil	Target : Rp. 8,000,000 Realisasi : Rp. 7,505,000	93,81 %
			Jumlah pembinaan petugas pencatatan sipil	Target : 12 bulan Realisasi : 12 bulan	100 %
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan					
	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan				
		Persentase terselenggaranya Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan		Target : 100 persen Realisasi : 100 persen	100 %
			Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Target : Rp. 50,000,000 Realisasi : Rp. 50,000,000	100 %
			Jumlah tersusunnya Buku data kependudukan	Target : 1 buku Realisasi : 1 buku	100 %
			Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Target : Rp. 25,377,300 Realisasi : Rp. 25,307,150	99,72 %

				Jumlah perjanjian kerjasama	Target : 2 lembaga Realisasi : 2 lembaga	100 %
			Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah		Target : Rp. 20,000,000 Realisasi : Rp. 19,980,500	99,9 %
				Jumlah elemen data golongan darah	Target : 6000 Data Realisasi : 6000 Data	100 %
	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan					
		Persentase terselenggaranya pengelolaan Informasi administrasi kependudukan			Target : 100 persen Realisasi : 100 persen	100 %
			Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non- Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		Target : Rp. 6,000,000 Realisasi : Rp. 5,998,000	99,97 %
				Jumlah koordinasi antar lembaga	Target : 1 lembaga Realisasi : 1 lembaga	100 %
			Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		Target : Rp. 57,330,000 Realisasi : Rp. 57,310,000	99,97 %
				Jumlah sarana dan Prasarana penunjang SIAK	Target : 7 jenis Realisasi : 7 jenis	100 %
			Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan		Target : Rp. 22,753,000 Realisasi : Rp. 22,659,700	99,59 %
				Jumlah arsip adminduk yang terdigitalisasi	Target : 10000 Data Realisasi : 10000 Data	100 %
			Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		Target : Rp. 22,753,000 Realisasi : Rp. 22,659,700	99,59 %
				Jumlah peserta sosialisasi PIAK	Target : 60 orang Realisasi : 60 orang	100 %
			Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat		Target : Rp. 163,107,464 Realisasi : Rp. 160,463,148	98,38 %
				Jumlah media informasi cetak, digital dan kegiatan edukasi	Target : 5 jenis Realisasi : 5 jenis	100 %
			Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan		Target : Rp. 7,000,000 Realisasi : Rp. 6,999,900	100 %
				Jumlah Laporan sinergitas data dan informasi	Target : 12 laporan Realisasi : 12 laporan	100 %
	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan					
		Persentase terselenggaranya pembinaan dan pengawasan pengelolaan informasi adminduk			Target : 100 persen Realisasi : 100 persen	100 %

Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Target : Rp. 10,000,000 Realisasi : Rp. 9,805,000	98,05 %
Jumlah Laporan kondisi jaringan, database kependudukan dan SDM TIK	Target : 4 laporan Realisasi : 4 laporan	100 %
Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Target : Rp. 20,000,000 Realisasi : Rp. 18,880,000	94,4 %
Jumlah peserta Bimbingan teknis PIAK	Target : 70 orang Realisasi : 70 orang	100 %
Program Pengelolaan Profil Kependudukan		
Penyusunan Profil Kependudukan		
Persentase pengelolaan profil kependudukan	Target : 100 persen Realisasi : 100 persen	100 %
Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Target : Rp. 30,000,000 Realisasi : Rp. 29,811,300	99,37 %
Jumlah Data Kependudukan	Target : 12 dokumen Realisasi : 12 dokumen	100 %
Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Target : Rp. 38,300,000 Realisasi : Rp. 38,300,000	100 %
Jumlah tersusunnya Buku profil perkembangan	Target : 1 buku Realisasi : 1 buku	100 %

Pencapaian kinerja Program/Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk Tahun 2022 sebagaimana termuat pada Tabel 2.1 dapat disimpulkan bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang dan melaksanakan pelayanan publik bidang administrasi kependudukan telah dicapai dengan baik yang telah di tentukan dengan target yang ditetapkan. Untuk Persentase capaian output kegiatan sebesar 100% dengan penyerapan anggaran mencapai 93,06%, bila dibandingkan dengan penyerapan anggaran tahun 2021 dengan persentase 90,14%. Penyerapan anggaran Tahun 2022 mengalami **kenaikan** sebesar 2,92%.

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PD

Kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang melaksanakan pelayanan publik pengurusan dokumen kependudukan dan dokumen peristiwa penting pencatatan sipil dapat tercapai sesuai dengan yang ditargetkan. Berdasarkan tabel 2.2, bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) telah mencapai 86,66 ditahun 2022 dari target nilai 85 sedangkan Nilai SAKIP Perangkat Daerah sebesar 68,87 dari target nilai 65 dan Persentase terlayaninya pemohon dokumen pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil mencapai 100% sesuai dengan target, dan Rata-rata lamanya waktu pelayanan pembuatan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil terealisasi 24 jam dari target 24 jam.

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo

No	Indikator	Target Renstra PD				Realisasi Capaian Tahun 2022	Proyeksi Tahun 2023
		Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82	83	84	99,87	86,66	87,00
2.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	71	75	80	85	68,87	71,00
3.	Persentase terlayaninya pemohon dokumen pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil	100	100	100	100	100	100
4.	Rata- rata lama nya waktu pelayanan pembuatan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	12	6	1	0,5	1x24 jam	1x12 jam

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DINAS

2.3.1 Kinerja Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Tugas pokok Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya seperti tersebut di atas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai 4 (empat) Bidang dan 1 (satu) Sekretariat. 4 (empat) Bidang tersebut adalah: Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk mempunyai fungsi Penerbitan KK, KTP, SKOT, Perpindahan Penduduk dan pendataan penduduk rentan atau Dokumen Kependudukan lainnya.

Bidang Pencatatan Sipil mempunyai fungsi Pelayanan Akta Kelahiran, Kematian, Perkawinan dan Perceraian, Akta Pengakuan dan Pengesahan anak, pencatatan perubahan nama, Kutipan kedua dan seterusnya serta pencatatan pengangkatan anak. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan mempuyai fungsi Pengolahan Data dan tata kelola SDM TI, Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara terpadu, sedangkan Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan mempunyai fungsi Pemeliharaan dokumen dan pemanfaatan data , Penyuluhan dan Informasi serta Inovasi pelayanan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berpedoman pada Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Beberapa tugas pokok yang menjadi isu utama terkait pelaksanaan pelayanan publik dalam pengurusan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil antara lain adalah :

1. Pelaksanaan penerbitan Dokumen Administrasi Kependudukan tepat waktu. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, diatur jangka waktu penyelesaian dokumen kependudukan dan pencatatan sipil sebagai berikut :
    a. Penerbitan KK diselesaikan dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja, namun dapat terealisasikan 3 hari saja. Penerbitan KTP elektronik diselesaikan dalam waktu 3 (tiga) hari kerja, tetapi bisa terealisasikan 1 hari saja bisa langsung jadi apabila status data pemohon sudah PRR (Print Ready Record)
    b. Penerbitan Surat Keterangan Pindah dan Surat Keterangan Pindah Datang diselesaikan dalam waktu 5 (lima) hari kerja dapat terealisasikan dalam 1 hari saja
    c. Penerbitan Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri dan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri diselesaikan dalam waktu 5 (lima) hari kerja,
    d. Penerbitan Akta Kelahiran diselesaikan dalam waktu 3 (tiga) hari saja

e. Penerbitan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan diselesaikan dalam waktu 3 (tiga) hari kerja.
f. Penerbitan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian diselesaikan dalam waktu 3 (hari) hari kerja.

Tingkat kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo dalam penerbitan dokumen Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sudah lebih cepat waktu penyelesaiannya sebagaimana ketentuan waktu penyelesaian yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

2. Terlaksananya Implementasi Aplikasi KTP- el menggantikan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) di 3 Korwil se Kabupaten Sukoharjo
3. Penyelesaian program nasional perekaman KTP Elektronik bagi masyarakat Kabupaten Sukoharjo dengan pelayanan "Jemput Bola "
5. Peningkatan Pelayanan One Day Service
6. Terselenggaranya pelayanan penerbitan dokumen peristiwa penting pencatatan sipil dengan baik

2.3.2. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo

Permasalahan pada masing-masing program sesuai dengan kewenangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah:

1. Belum optimalnya pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat. Kendala ini memang menjadi salah satu tantangan berat bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, karena semakin

banyaknya masyarakat yang mengurus dokumen kependudukan dalam keterbatasan jumlah personil dalam pelayanan. Perpindahan penduduk menuju Kabupaten Sukoharjo menjadi salah satu penyebab dari meningkatnya permintaan pelayanan yang meningkat, sedangkan jumlah petugas pelayanan terbatas. Selain keterbatasan dari sisi kuantitas, kualitas SDM juga menjadi salah satu kendala yang harus diminimalisir.

2. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengurus dokumen kependudukan. Masih banyak masyarakat yang memandang dokumen kependudukan adalah sebuah dokumen yang kurang penting untuk diurus. Masyarakat mengurus dokumen kependudukan setelah mereka benar-benar membutuhkan dokumen tersebut.
3. Cakupan layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil masih perlu ditingkatkan. Validitas data penduduk masih kurang. Validitas data bisa disebabkan oleh faktor penduduk dan faktor aparat. Penduduk sering mengabaikan isian data pada formulir pengurusan data kependudukan, sehingga data tidak lengkap atau data janggal. Sementara itu, aparat pengelola layanan pengurusan kependudukan juga kurang tegas memeriksa validitas data. Kesadaran masyarakat terhadap tertib administrasi kependudukan masih kurang. Hal ini ditunjukkan rasio kepemilikan dokumen kependudukan (KTP, KK, dan akte kelahiran,) belum mencapai 100%.

2.3.3 Dampak terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilh Tahun 2021 – 2026, ditetapkan sebagai visi pembangunan jangka

menengah daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026 adalah:

"Mewujudkan Masyarakat Sukoharjo Yang Lebih Makmur"

Misi merupakan upaya umum tentang bagaimana cara mewujudkan Visi. Misi juga menjadi alasan utama mengapa suatu organisasi harus ada dan bagaimana komitmen terus dijaga oleh segenap *stakeholders* selaku pemangku kepentingan dalam pembangunan. Penjabaran misi RPJMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026 dilakukan dengan meyelaraskan misi kepala daerah terpilih dengan misi RPJPD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005-2025. Penjabaran misi pembangunan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026 dirumuskan sebagai berikut:

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Percepatan Reformasi Birokrasi
2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas
3. Memperkuat Perekonomian Rakyat Yang Berdaya Saing Tinggi
4. Memperkuat Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan
5. Meningkatkan Kualitas Kehidupan Sosial Dan Keagamaan

Sedangkan Program Kerja unggulan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo terpilih adalah sebagai berikut :

1. Reformasi Birokrasi yang Dinamis Berbasis Teknologi Informasi dan Sistem Layanan

Terintegrasi;

2. Penguatan Kapasitas Desa/Kelurahan;
3. Pemberian Bantuan Sarana dan Prasarana Kepada Kader Pembangunan Daerah;
4. Pemberian Bantuan Sarana dan Prasarana Keagamaan;
5. Penerapan Pendidikan bagi Semua yang Terjangkau;
6. Penguatan Sistem Kesehatan dan Penanganan Pandemi *Covid-19*;
7. Jaringan Pengaman Sosial Pasca Pandemi *Covid-19;*
8. Pengembangan Keolahragaan dan Pengembangan Generasi Muda;
9. Penguatan dan Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi *Covid-19*;
10. Penguatan Produksi Petani;
11. Pengembangan Pariwisata berbasis Ekonomi Kreatif;
12. Penguatan Infrastruktur Daerah;

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mendukung perwujudan misi nomor 1 yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Percepatan Reformasi Birokrasi. Faktor penghambat dan faktor pendorong pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam mendukung pencapaian Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo, sebagai berikut:

Tabel 2.3
Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah

No	Visi, Misi, Program Kerja Kepala Daerah 2021-2026	Tupoksi PD	Permasalahan Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Faktor	
				Penghambat	Pendorong
1. 2. 3.	**Visi :** "Masyarakat Sukoharjo Lebih Makmur" **Misi1 :** Mewujudkan tata Kelola Pemerintahan yang Baik Melalui Percepatan Reformasi Birokrasi **Program 1 :** Reformasi Birokrasi yang Dinamis Berbasis Teknologi Informasi dan Sistem Layanan Terintegrasi	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	1) Belum optimalnya kesadaran masyarakat akan pentingnya tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. 2) Belum optimalnya kualitas layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. 3) Belum semua institusi/lembaga memanfaatkan data kependudukan untuk pelayanan kepada masyarakat.	1) Masih terdapat masyarakat belum sadar akan pentingnya administrasi kependudukan 2) Sarana dan prasarana pendukung pelayanan belum sepenuhnya memadai 3) Pemanfaatan data kependudukan belum dianggap penting digunakan institusi/lembaga dalam perencanaan pembangunan maupun pelayanan	1) Komitmen Pemerintah Pusat dan Provinsi dalam mendukung peningkatan kualitas layanan Adminduk di Kabupaten/Kota 2) Adanya peluang dapat digunakannya database kependudukan sebagai data perencanaan pembangunan seluruh sektor.

Sesuai Visi- Misi Kabupaten Sukoharjo tahun 2021-2026 tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo akan melakukan pembenahan dan peningkatan sistem, prosedur, sarana dan prasarana serta penguatan pada aspek profesionalisme pelayanan masyarakat dalam mewujudkan pelayanan prima sehingga menjadi Lembaga yang Profesional dalam memberikan Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berbasis Teknologi Informasi yang Handal dengan melakukan :

1. Memberikan Pelayanan dengan santun, Cepat, tepat dan Akurat.

2. Meningkatkan kualitas SDM dalam melayani kebutuhan masyarakat akan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
3. Meningkatkan Akses terhadap Tehnologi Informasi dalam Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

2.3.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Berdasarkan kewenangan Pemerintah Daerah dalam kependudukan dan pencatatan Sipil maka gambaran umum pelayanan yang diberikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil meliputi:

1. Pencatatan biodata untuk penerbitan NIK, pencatatan peristiwa kependudukan dan pendataan Penduduk Rentan Adminduk.
2. Pencatatan Peristiwa Penting
3. Penerbitan Dokumen hasil Pendaftaran Penduduk, meliputi :
- Biodata penduduk
- Kartu Keluarga (KK)
- Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan
- Surat keterangan kependudukan

4. Penerbitan dokumen hasil pencatatan sipil, meliputi :
- Akta Kelahiran
- Akta Kematian
- Akta Perkawinan
- Akta Perceraian
- Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak

5.Perubahan akta catatan sipil karena terjadinya peristiwa penting, meliputi :
- Pengangkatan anak
- Pengesahan anak

- Perubahan nama
- Perubahan kewarganegaraan
- Peristiwa penting lainnya

Dari gambaran dan kondisi yang ada terkait dengan pelayanan kependudukan dan pelayanan pencatatan sipil maka Tantangan dan peluang yang dihadapai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo adalah sebagai berikut:

1.3.4.1. Tantangan

Tantangan yang dihadapi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagai berikut:

a. Sebaran penduduk yang belum merata diseluruh wilayah.
b. Perpindahan penduduk yang cukup tinggi
c. Kurang pedulinya masyarakat dalam mengurus administrasi kependudukan.
d. Melakukan peningkatan/perbaikan proses perencanaan program/kegiatan setiap tahunnya, mulai dari proses awal hingga akhir perencanaan serta memaksimalkan penyelarasan kegiatan Dinas yang mengacu pada Renstra dan RPJMD
e. Mewujudkan teknologi informasi yang terintegrasi antar jenis layanan pendaftaran penduduk dengan jenis layanan pencatatan sipil
f. Mengedepankan pengadaan sarana dan prasarana pelayanan administrasi kependudukan yang mutakhir yang mengacu pada spesifikasi pemerintah pusat
g. Melaksanakan penyusunan peraturan yang menindaklanjuti peraturan di atasnya serta selalu diikuti dengan sosialisasi intern dan ekstern.

1.3.4.2. Peluang

Peluang yang dihadapi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagai berikut:

a. Adanya dukungan peraturan perundang-undangan yang mendukung kewenangan DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil
b. Mengembangkan model-model pelayanan yang mengarah pada inovasi pelayanan (pelayanan jemput bola)
c. Mengembangkan optimalisasi kualitas pelayanan
d. Paralel service untuk masyarakat yang berusia 17 tahun
e. Mengembangkan teknologi
f. Meningkatkan kesejahteraan pegawai
g. Meningkatkan kompetensi pegawai sesuai dengan persyaratan jabatan
h. Meningkatkan tertib administrasi Kependudukan
i. Mensosialisasikan administrasi kependudukan kepada masyarakat

2.3.5 Rekomendasi dan Catatan Strategis untuk ditindaklanjuti

Berdasarkan hasil analisis terhadap isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah terutama evaluasi kinerja dan tantangan serta peluang yang telah diuraikan di atas maka rekomendasi dan catatan strategis untuk ditindaklanjuti dengan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut :

1. **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA, kegiatan meliputi :**
    1. **Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realiasi Kinerja SKPD
g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
c. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
e. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD
g. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

3. Administrasi Barang Milik Daerah

a. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
b. Pengamanan Barang Milik daerah SKPD
c. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD

d. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
e. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

a. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
b. Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai
c. Bimbingan Teknis Implementasi Perundang-undangan

5. Administrasi Umum Perangkat Daerah

a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor
b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
c. Penyediaan bahan Logistik Kantor
d. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsoltasi SKPD
g. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

6. Pengadaan Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

a. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
c. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

7. **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
    a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
    b. Penyedian Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
    c. Penyediaan Jasa Peralatan dn Perlengkapan Kantor
    d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

8. **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
    a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
    b. Pemeliharaan Mebeleur
    c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya
    d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
    e. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK, kegiatan meliputi :

1. Pelayanan Pendaftaran Penduduk
    a. Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan
    b. Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk
    c. Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk
    d. Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk
    e. Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan

2. **Penataan Pendaftaran Penduduk**
    a. Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EL, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan

3. **Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk**
    a. Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pendaftaran Penduduk
    b. Fasilitasi Pendaftaran Penduduk
    c. Sosialisasi Pendaftaran Penduduk

4. **Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk**
    a. Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk

3. PROGRAM PENCATATAN SIPIL, kegiatan meliputi :

1. **Pelayanan Pencatatan Sipil**
    a. Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting
    b. Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan sipil
    c. Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil
    d. Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-el, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan

2. **Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**
    a. Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil

b. Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil
c. Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil
d. Kerjasama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi terkait Pencatatan Sipil
e. Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pencatatan Sipil

3. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil

a. Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pencatatan Sipil
b. Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil

4. PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN, kegiatan meliputi :

1. Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan

a. Pengolahan Dan Penyajian Data Kependudukan
b. Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan
c. Inventarisasi Data Untuk Kepentingan Pembangunan Daerah

2. Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

a. Koordinasi antar lembaga pemerintah dan lembaga non-pemerintah di kabupaten/kota dalam penertiban pengelolaan informasi administrasi kependudukan

b. Fasilitasi terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan
c. Penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan
d. Sosialisasi terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan
e. Kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi
f. Komunikasi, informasi, dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat
g. Penyajian data kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan

3. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

1. Pembinaan dan pengawasan terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan

5. PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN, kegiatan meliputi:

1. Penyusunan Profil Kependudukan

a. Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota
b. Penyusunan profil data perkembangan dan proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Berikut ini akan disajikan review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2024 (Hasil Forum OPD Tahun 2023) seperti dalam Tabel 2.3. Rencana Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2022 diimplemantasikan melalui rencana pelaksanaan program dan kegiatan sebagai bagian dari perwujudan komitmen pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk satu

tahun mendatang sebagai implementasi visi, misi dan kebijakan Perangkat Dinas.

Rancangan awal program dan kegiatan tahun 2024 yang merupakan rumusan hasil musrenbang RKPD tahun 2023 terdiri atas 5 Program untuk mendukung Pelayanan Publik.

Kegiatan tersebut direncanakan membutuhkan anggaran sebesar Rp 13.148.090.000 untuk mendukung pelaksanaan operasional pelayanan publik program administrasi kependudukan melalui kegiatan Pembangunan dan Pengoperasional SIAK secara terpadu, Pelatihan Tenaga Pengelola SIAK, Implementasi Administrasi Kependudukan, Pembentukan dan penataan sistim koneksi NIK, Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan, Pengolahan dalam penyampian laporan informasi kependudukan, Penyediaan Informasi yang dapat diakses Masyarakat, Peningkatan Pelayanan publik dalam Bidang Kependudukan, Pengembangan Database Kependudukan, Peningkatan pelayanan publik dalam bidang catatan sipil, Penerbitan dokumen kependudukan, Pelaksanaan kerjasama administrasi kependudukan lintas sektoral, Monitoring evaluasi dan koordinasi bidang catatan sipil, Monitoring evaluasi dan koordinasi bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan, Monitoring evaluasi dan koordinasi bidang pemanfaatan data dan inovasi pelayanan, Penerbitan dokumen kependudukan dan identitas resmi anak, Pengelolaan SIAK, Pelayanan dokumen kependudukan, Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan kebijakan dan penyelenggaraan adminduk, Sosialisasi Kebijakan Kependudukan, Monitoring Evaluasi dan Pelaporan, serta kegiatan penyusunan kebijakan kependudukan.

Review terhadap rancangan awal RKPD sebagaimana Tabel 2.3 berikut :

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024 Kabupaten Sukoharjo

No.	Rancangan Awal RKPD (materi rumusan hasil Musrenbag RKPD Tahun 2023)					Hasil Analisis Kebutuhan (Materi RKPD Tahun 2023)				
	Program/Kegiatan /Sub Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/Sub Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		**Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**9.041.100,00**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**		**Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**9.041.100,00**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Kab. Sukoharjo**	**Jumlah dokumen perencanaan PD**	**8 dokumen**	80.000,00	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja perangkat Daerah**	**Kab. Sukoharjo**	**Jumlah dokumen perencanaan PD**	**8 dokumen**	55.000,00
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Sukoharjo	Jumlah Dokumen Renstra, Renja, dan Terlaksananya Forum OPD	2 dokumen, 1 kegiatan	38.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Sukoharjo	Jumlah Dokumen Renstra, Renja, dan Terlaksananya Forum OPD	2 dokumen, 1 kegiatan	38.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Sukoharjo	Jumlah Tersusunnya Dokumen RKA SKPD	1 dokumen	7.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Kab. Sukoharjo	Jumlah Tersusunnya Dokumen RKA SKPD	1 dokumen	7.000,00

	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Sukoharjo	Jumlah Tersusunnya Dokumen RKA Perubahan SKPD	1 dokumen	7.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Sukoharjo	Jumlah Tersusunnya Dokumen RKA Perubahan SKPD	1 dokumen	7.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Sukoharjo	Jumlah Tersusunnya Dokumen DPA SKPD	1 dokumen	7.000,00	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Sukoharjo	Jumlah Tersusunnya Dokumen DPA SKPD	1 dokumen	7.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kab. Sukoharjo	Jumlah Tersusunnya Dokumen DPA Perubahan SKPD	1 dokumen	7.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Sukoharjo	Jumlah Tersusunnya Dokumen DPA Perubahan SKPD	1 dokumen	7.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Sukoharjo	Jumlah Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja SKPD	1 dokumen	7.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Sukoharjo	Jumlah Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja SKPD	1 dokumen	7.000,00
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Sukoharjo	Jumlah dokumen evaluasi kinerja PD	1 dokumen	7.000,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Sukoharjo	Jumlah dokumen evaluasi kinerja PD	1 dokumen	7.000,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Sukoharjo	**Persentase Tersusunnya laporan keuangan yang akuntabel**	**100%**	5.335.600,00	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Kab. Sukoharjo	**Persentase Tersusunnya laporan keuangan yang akuntabel**	**100%**	5.335.600,00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Sukoharjo	Jumlah terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	46 orang	5.306.450,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Sukoharjo	Jumlah terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	46 orang	5.306.450,00

	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Sukoharjo	Jumlah Bulan Terbayarnya Honor Pengelola Keuangan	16 orang	6.600,00	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Kab. Sukoharjo	Jumlah Bulan Terbayarnya Honor Pengelola Keuangan	16 orang	6.600,00
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Sukoharjo	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan	12 dokumen	4.400,00	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Sukoharjo	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan	12 dokumen	4.400,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Sukoharjo	Jumlah Dokumen Laporan keuangan akhir tahun (Neraca, LRA, CALK)	1 dokumen	6.050,00	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Kab. Sukoharjo	Jumlah Dokumen Laporan keuangan akhir tahun (Neraca, LRA, CALK)	1 dokumen	6.050,00
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kab. Sukoharjo	Jumlah Dokumen Laporan keuangan triwulanan, dan semesteran	4 dokumen	4.400,00	Koordinasi dan Penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	Kab. Sukoharjo	Jumlah Dokumen Laporan keuangan triwulanan, dan semesteran	4 dokumen	4.400,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Sukoharjo	Jumlah Dokumen Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	6 dokumen	4.400,00	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi anggaran	Kab. Sukoharjo	Jumlah Dokumen Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	6 dokumen	4.400,00
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	**Kab. Sukoharjo**	**Persentase terkelolanya barang milik daerah**	**2 dokumen**	3.300,00	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Kab. Sukoharjo**	**Persentase terkelolanya barang milik daerah**	**2 dokumen**	3.300,00

	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Sukoharjo	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan BMD SKPD	**100%**	18.150,00	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Sukoharjo	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan BMD SKPD	**100%**	18.150,00
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Sukoharjo	Jumlah Laporan pengamanan barang milik daerah	1 dokumen	2.750,00	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Sukoharjo	Jumlah Laporan pengamanan barang milik daerah	1 dokumen	2.750,00
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Sukoharjo	Jumlah Laporan Pembinaan, Pengawasan dan pengendalian BMD pada SKPD	2 dokumen	4.400,00	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Sukoharjo	Jumlah Laporan Pembinaan, Pengawasan dan pengendalian BMD pada SKPD	2 dokumen	4.400,00
	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Sukoharjo	Jumlah Laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan BMD	2 dokumen	4.400,00	Rekonsiliasi dan Penyusunan laporan Barang Milim Daerah pada SKPD	Kab. Sukoharjo	Jumlah Laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan BMD	2 dokumen	4.400,00
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Sukoharjo	Jumlah Laporan Penatausahaan BMD	1 dokumen	2.750,00	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Sukoharjo	Jumlah Laporan Penatausahaan BMD	1 dokumen	2.750,00
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Sukoharjo	**Persentase terkelolanya administrasi kepegawaian**	2 dokumen	3.850,00	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Kab. Sukoharjo	**Persentase terkelolanya administrasi kepegawaian**	2 dokumen	3.850,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Sukoharjo	Jumlah pengadaan	**100%**	203.500,00	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta atribut Kelengkapannya	Kab. Sukoharjo	Jumlah pengadaan pakaian dinas pegawai	**100%**	203.500,00

			pakaian dinas pegawai							
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Sukoharjo	Jumlah dokumen data pegawai SKPD	-	30.800,00	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Sukoharjo	Jumlah dokumen data pegawai SKPD	-	30.800,00
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Sukoharjo	Jumlah dokumen data capaian kinerja pegawai	1 dokumen	2.750,00	Monitoring , Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Sukoharjo	Jumlah dokumen data capaian kinerja pegawai	1 dokumen	2.750,00
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Sukoharjo	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	1 dokumen	2.750,00	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Sukoharjo	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	1 dokumen	2.750,00
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Sukoharjo	Jumlah pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis	56 pegawai	110.000,00	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Kab. Sukoharjo	Jumlah pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis	-	110.000,00
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	**Kab. Sukoharjo**	**Persentase terlaksananya pengadministrasian umum**	**420 orang**	0,00	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kab. Sukoharjo**	**Persentase terlaksananya pengadministrasian umum**	**420 orang**	0,00
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Sukoharjo	Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	92 orang	57.200,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Sukoharjo	Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	92 orang	57.200,00

	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Sukoharjo	Jumlah Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	**100%**	442.750,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Sukoharjo	Jumlah Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	**100%**	442.750,00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Sukoharjo	Jumlah penyediaan alat tulis kantor, makanan dan minuman pegawai	20 jenis	7.700,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Sukoharjo	Jumlah penyediaan alat tulis kantor, makanan dan minuman pegawai	20 jenis	7.700,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Sukoharjo	Jumlah Penyediaan barang cetakan, penggandaan	5 jenis	61.600,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Sukoharjo	Jumlah Penyediaan barang cetakan, penggandaan	5 jenis	61.600,00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Sukoharjo	Jumlah Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	81 jenis, 24.288 Org/Hari	154.000,00	Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kab. Sukoharjo	Jumlah Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	81 jenis, 24.288 Org/Hari	154.000,00
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Sukoharjo	Persentase Terlayaninya kunjungan tamu	8 jenis, 27.020 lembar	38.500,00	Fasilitasi Kunjungan tamu	Kab. Sukoharjo	Persentase Terlayaninya kunjungan tamu	8 jenis, 27.020 lembar	38.500,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Sukoharjo	Jumlah dokumen yang dihasilkan dari rapat koordinasi dan konsultasi	1.080 eksemplar	4.950,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Sukoharjo	Jumlah dokumen yang dihasilkan dari rapat koordinasi dan konsultasi	1.080 eksemplar	4.950,00

	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Sukoharjo	Jumlah arsip dinamis yang tertata	-	2.200,00	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Sukoharjo	Jumlah arsip dinamis yang tertata	-	2.200,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Sukoharjo	Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana pendukung SPBE	20 dokumen	165.000,00	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Sukoharjo	Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana pendukung SPBE	20 dokumen	165.000,00
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	**Kab. Sukoharjo**	**Persentase terlaksananya pengadaan BMD**	**108.000 berkas**	5.500,00	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kab. Sukoharjo**	**Persentase terlaksananya pengadaan BMD**	**108.000 berkas**	5.500,00
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Sukoharjo	Jumlah Pengadaan Kendaraan dinas	-	3.300,00	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Sukoharjo	Jumlah Pengadaan Kendaraan dinas	-	3.300,00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Sukoharjo	Jumlah Pengadaan kendaraan dinas operasional	**100%**	1.794.000,00	Pengadaan dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Sukoharjo	Jumlah Pengadaan kendaraan dinas operasional	**100%**	1.794.000,00
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Sukoharjo	Jumlah pengadaan mebel	1 unit	0,00	Pengadaan mebel	Kab. Sukoharjo	Jumlah pengadaan mebel	1 unit	0,00
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Sukoharjo	Jumlah pengadaan perlatan dan mesin lainnya		800.000,00	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Kab. Sukoharjo	Jumlah pengadaan perlatan dan mesin lainnya		800.000,00

	Pengadaan Mebel	Kab. Sukoharjo	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor		44.000,00	Pengadaan sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan Lainnya	Kab. Sukoharjo	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor		44.000,00
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	**Kab. Sukoharjo**	**Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**100%**	730.000,00	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintah daerah**	**Kab. Sukoharjo**	**Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**100%**	730.000,00
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Sukoharjo	Jumlah Surat masuk dan surat keluar, Kerjasama Pengiriman dengan Kantor Pos	100%	220.000,00	Penyediaan Surat Menyurat	Kab. Sukoharjo	Jumlah Surat masuk dan surat keluar, Kerjasama Pengiriman dengan Kantor Pos	100%	220.000,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sukoharjo	Jumlah Terbayarnya Belanja tagihan telepon	**100%**	470.800,00	Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Sukoharjo	Jumlah Terbayarnya Belanja tagihan telepon	**100%**	470.800,00
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Sukoharjo	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara	1.200 Surat, 31.500 kali	253.000,00	Penyediaan jasa peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Sukoharjo	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara	1.200 Surat, 31.500 kali	253.000,00

	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Sukoharjo	Jumlah penyediaan alat dan jasa kebersihan, karangan bunga, mobil hias	12 bulan	13.200,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Sukoharjo	Jumlah penyediaan alat dan jasa kebersihan, karangan bunga, mobil hias	12 bulan	13.200,00
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Sukoharjo	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	3 laporan	30.800,00	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Kab. Sukoharjo	**Persentase terpeliharanya BMD**	22 unit	30.800,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Sukoharjo	Jumlah pajak kendaraan dinas yang terbayar, jumlah kendaraan dinas pejabat yang terpelihara	Alat kebersihan 41 jenis, Honor THL 3 org, Karangan Bunga 5 buah, Mobil Hias 1 paket	173.800,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Sukoharjo	Jumlah pajak kendaraan dinas yang terbayar, jumlah kendaraan dinas pejabat yang terpelihara	Alat kebersihan 41 jenis, Honor THL 3 org, Karangan Bunga 5 buah, Mobil Hias 1 paket	173.800,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sukoharjo	Jumlah pajak kendaraan operasional yang terbayar, jumlah kendaraan operasional yang terpelihara	**100%**	696.300,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Kab. Sukoharjo	Jumlah pajak kendaraan operasional yang terbayar, jumlah kendaraan operasional yang terpelihara	**100%**	696.300,00

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Sukoharjo	Jumlah mebel kantor yang terpelihara	Pemeliharaan kendaraan roda empat 4 unit, roda dua 40 unit	176.000,00	Pemeliharaan Mebel	Kab. Sukoharjo	Jumlah mebel kantor yang terpelihara	Pemeliharaan kendaraan roda empat 4 unit, roda dua 40 unit	176.000,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Sukoharjo	Jumlah pc,laptop, printer,dan peralatan mesin lainnya yang terpelihara		22.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	Kab. Sukoharjo	Jumlah pc,laptop, printer,dan peralatan mesin lainnya yang terpelihara		22.000,00
	Pemeliharaan Mebel	Kab. Sukoharjo	**Cakupan layanan dokumen kependudukan**	3 jenis	8.800,00	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	Kab. Sukoharjo	**Cakupan layanan dokumen kependudukan**	3 jenis	8.800,00
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Sukoharjo	**Jumlah Produk Layanan Pendaftaran penduduk**	3 jenis	66.000,00	**Pelayanan Pendaftaran penduduk**	Kab. Sukoharjo	**Jumlah Produk Layanan Pendaftaran penduduk**	3 jenis	66.000,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Sukoharjo	Jumlah terdatanya penduduk rentan administrasi kependudukan	**100%**	352.000,00	Pendaftaran Penduduk Non permanen dan Rentan administrasi Kependudukan	Kab. Sukoharjo	Jumlah terdatanya penduduk rentan administrasi kependudukan	**100%**	352.000,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan	Kab. Sukoharjo	Persentase penatausahaan	**6**	71.500,00	Pencatatan, Penatausahaan dan	Kab. Sukoharjo	Persentase penatausahaan	**6**	71.500,00

	Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		dokumen pendaftaran penduduk			Penerbitan dokumen atas pendaftaran Penduduk		dokumen pendaftaran penduduk		
	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Kab. Sukoharjo	Persentase terlaksananya pelayanan pendaftaran penduduk	100%	**3.223.890,00**	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Kab. Sukoharjo	Persentase terlaksananya pelayanan pendaftaran penduduk	100%	**3.223.890,00**
	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Kab. Sukoharjo	Jumlah dokumen hasil pelaporan peristiwa kependudukan	100	1.348.600,00	Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Kab. Sukoharjo	Jumlah dokumen hasil pelaporan peristiwa kependudukan	100	1.348.600,00
	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Kab. Sukoharjo	**Persentase terselenggaranya penataan pendaftaran penduduk**	100%	38.500,00	**Penataan Pendaftaran Penduduk**	Kab. Sukoharjo	**Persentase terselenggaranya penataan pendaftaran penduduk**	100%	38.500,00
	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Kab. Sukoharjo	Jumlah pengadaan Blangko	12 bulan	27.500,00	Pengadaan Dokumen kependudukan selain Blangko KTP-el, Formulir dan Buku terkait pendaftaran Penduduk sesuai dengan kebutuhan	Kab. Sukoharjo	Jumlah pengadaan Blangko	12 bulan	27.500,00
	Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	Kab. Sukoharjo	**Persentase terlaksananya kegiatan pendukung penyelenggaraan**	**100%**	22.000,00	**Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk**	Kab. Sukoharjo	**Persentase terlaksananya kegiatan pendukung penyelenggaraan pendaftaran penduduk**	**100%**	22.000,00

			pendaftaran penduduk							
	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Kab. Sukoharjo	Jumlah Jemput bola	50.000 buah	1.210.000,00	Pelayanan secara aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan pencatatan Peristiwa penting terkait pendaftaran penduduk	Kab. Sukoharjo	Jumlah Jemput bola	50.000 buah	1.210.000,00
	Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Kab. Sukoharjo	Persentase terfasilitasinya pendaftaran penduduk	**100%**	50.600,00	Fasilitasi Pendaftaran penduduk	Kab. Sukoharjo	Persentase terfasilitasinya pendaftaran penduduk	**100%**	50.600,00
	Penataan Pendaftaran Penduduk	Kab. Sukoharjo	Jumlah peserta sosialisasi	250 kali	1.237.323,00	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Kab. Sukoharjo	Jumlah peserta sosialisasi	250 kali	1.237.323,00
	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	Kab. Sukoharjo	**Persentase terbinanya dan terawasinya penyelenggaraan pendaftaran penduduk**	100%	1.237.323,00	**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk**	Kab. Sukoharjo	**Persentase terbinanya dan terawasinya penyelenggaraan pendaftaran penduduk**	100%	1.237.323,00
	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Kab. Sukoharjo	Jumlah peserta bintek	12 bulan	615.305,00	Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk	Kab. Sukoharjo	Jumlah peserta bintek	12 bulan	615.305,00
	Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Kab. Sukoharjo	**Cakupan layanan dokumen pencatatan sipil**	**100%**	32.305,00	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	Kab. Sukoharjo	**Cakupan layanan dokumen pencatatan sipil**	**100%**	32.305,00

	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Kab. Sukoharjo	**Jumlah produk layanan pencatatan sipil**	75 orang	550.000,00	**Pelayanan Pencatatan Sipil**	Kab. Sukoharjo	**Jumlah produk layanan pencatatan sipil**	75 orang	550.000,00
	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Kab. Sukoharjo	Jumlah Dokumen pelaporan peristiwa penting pencatatan sipil	**100%**	33.000,00	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Kab. Sukoharjo	Jumlah Dokumen pelaporan peristiwa penting pencatatan sipil	**100%**	33.000,00
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Kab. Sukoharjo	Jumlah Penerbitan Akta Pencatatan Sipil	**8**	22.662,00	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Kab. Sukoharjo	Jumlah Penerbitan Akta Pencatatan Sipil	**8**	22.662,00
	Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk	Kab. Sukoharjo	Jumlah pendataan penduduk yang belum memiliki dokumen pencatatan sipil	23.000 berkas	22.662,00	Pengumpulan, Analisis, Diseminasi Data pencatatan Sipil	Kab. Sukoharjo	Jumlah pendataan penduduk yang belum memiliki dokumen pencatatan sipil	23.000 berkas	22.662,00
	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Kab. Sukoharjo	Jumlah Blangko dan formulir terkait pencatatan sipil	23.000 kutipan	**682.890,00**	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-el, Formulir dan buku terkait Pencatatan Sipil seasuai dengan kebutuhan	Kab. Sukoharjo	Jumlah Blangko dan formulir terkait pencatatan sipil	23.000 kutipan	**682.890,00**
	Pelayanan Pencatatan Sipil	Kab. Sukoharjo	**Persentase terlaksananya kegiatan pendukung terselenggarany**	1 kali	508.607,00	**Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**	Kab. Sukoharjo	**Persentase terlaksananya kegiatan pendukung terselenggaranya pencatatan sipil**	1 kali	508.607,00

			a pencatatan sipil							
	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Kab. Sukoharjo	Jumlah Rapat koordinasi dengan Kemenag dan PA	7 jenis	57.607,00	Koordinasi dengan Kantor Kementrian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai,dan Rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam	Kab. Sukoharjo	Jumlah Rapat koordinasi dengan Kemenag dan PA	7 jenis	57.607,00
	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Kab. Sukoharjo	Jumlah Rapat koordinasi dengan Kemenag dan UPT Dukcapil	**100%**	363.000,00	Koordinasi dengan Kantor Kementrian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Agama Kabupaten/Kota dalam memelihara hubungan Timbal Balik melalui Pembinaan masing-masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	Kab. Sukoharjo	Jumlah Rapat koordinasi dengan Kemenag dan UPT Dukcapil	**100%**	363.000,00
	Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil	Kab. Sukoharjo	Jumlah Rapat koordinasi dengan Lembaga	4 kali	11.000,00	Koordinasi antar Lembaga pemerintah dan lembaga Non Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penerbitan	Kab. Sukoharjo	Jumlah Rapat koordinasi dengan Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah	4 kali	11.000,00

			Pemerintah dan Non Pemerintah			Pelayanan Pencatatan Sipil				
	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan	Kab. Sukoharjo	Jumlah Jemput bola pelayanan pencatatan sipil	4 kali	77.000,00	Pelayanan secara aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan pencatatan Peristiwa penting terkait Pencatatan Sipil	Kab. Sukoharjo	Jumlah Jemput bola pelayanan pencatatan sipil	4 kali	77.000,00
	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Kab. Sukoharjo	Jumlah peserta sosialisasi	1 kali	154.483,00	Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Kab. Sukoharjo	Jumlah peserta sosialisasi	1 kali	154.483,00
	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	Kab. Sukoharjo	Jumlah Koordinasi dengan ormas dan perguruan tinggi	12 bulan	31.800,00	Kerjasama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi terkait Pencatatan Sipil	Kab. Sukoharjo	Jumlah Koordinasi dengan ormas dan perguruan tinggi	12 bulan	31.800,00
	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	Kab. Sukoharjo	Jumlah Rapat koordinasi dengan Pemangku Kepentingan dan masyarakat	360 orang	22.000,00	Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan masyarakat terkait Pencatatan Sipil	Kab. Sukoharjo	Jumlah Rapat koordinasi dengan Pemangku Kepentingan dan masyarakat	360 orang	22.000,00
	Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Kab. Sukoharjo	**Persentase terbinanya dan terawasinya penyelenggaraan pencatatan sipil**	1 kali	67.583,00	**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil.**	Kab. Sukoharjo	**Persentase terbinanya dan terawasinya penyelenggaraan pencatatan sipil**	1 kali	67.583,00

	Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi terkait Pencatatan Sipil	Kab. Sukoharjo	Jumlah Laporan penggunaan blangko	1 kali	16.600,00	Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir dan Buku untuk Pelayanan Pencatatan Sipil	Kab. Sukoharjo	Jumlah Laporan penggunaan blangko	1 kali	16.600,00
	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pencatatan Sipil	Kab. Sukoharjo	Jumlah Pembinaan petugas pencatatan sipil	-	16.500,00	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil	Kab. Sukoharjo	Jumlah Pembinaan petugas pencatatan sipil	-	16.500,00
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Kab. Sukoharjo	**Cakupan Lembaga Pengguna yang Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan**	12 laporan	19.800,00	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	Kab. Sukoharjo	**Cakupan Lembaga Pengguna yang Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan**	12 laporan	19.800,00
	Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pencatatan Sipil	Kab. Sukoharjo	**Persentase terselenggaranya Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan**	12 bulan	11.000,00	**Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan**	Kab. Sukoharjo	**Persentase terselenggaranya Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan**	12 bulan	11.000,00

	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil	Kab. Sukoharjo	Jumlah buku data kependudukan	**2**	8.800,00	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Kab. Sukoharjo	Jumlah buku data kependudukan	**2**	8.800,00
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN		Jumlah perjanjian kerjasama	**100%**	**849.120,00**	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan		Jumlah perjanjian kerjasama	**100%**	**849.120,00**
	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Kab. Sukoharjo	Jumlah Elemen data golongan darah	360 buku	148.544,00	Inventarisasi Data untuk kepentingan Pembangunan Daerah	Kab. Sukoharjo	Jumlah Elemen data golongan darah	360 buku	148.544,00
	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Kab. Sukoharjo	**Persentase terselenggaranya pengelolaan Informasi administrasi kependudukan**	2 Lembaga Pengguna	55.044,00	**Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	Kab. Sukoharjo	**Persentase terselenggaranya pengelolaan Informasi administrasi kependudukan**	2 Lembaga Pengguna	55.044,00
	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Kab. Sukoharjo	Jumlah koordinasi antar lembaga	6.000 orang	38.500,00	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penerbitan Pelayanan Adminidtrasi Kependudukan	Kab. Sukoharjo	Jumlah koordinasi antar lembaga	6.000 orang	38.500,00
	Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Kab. Sukoharjo	Jumlah sarana dan prasarana penunjang SIAK	**100%**	55.000,00	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kab. Sukoharjo	Jumlah sarana dan prasarana penunjang SIAK	**100%**	55.000,00

	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kab. Sukoharjo	Jumlah pemanfaatan data kependudukan	1 kali	669.576,00	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Kab. Sukoharjo	Jumlah pemanfaatan data kependudukan	1 kali	669.576,00
	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kab. Sukoharjo	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi	7 jenis	6.600,00	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kab. Sukoharjo	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi	7 jenis	6.600,00
	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kab. Sukoharjo	Jumlah penyampaian informasi dan materi	10.000 berkas	121.000,00	Kerjasama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	Kab. Sukoharjo	Jumlah penyampaian informasi dan materi	10.000 berkas	121.000,00
	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Kab. Sukoharjo	Jumlah media informasi cetak, digital dan kegiatan edukasi	260 orang	156.000,00	Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan masyarakat .	Kab. Sukoharjo	Jumlah media informasi cetak, digital dan kegiatan edukasi	260 orang	156.000,00
	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kab. Sukoharjo	Jumlah Laporan sinergitas data dan informasi	141 kali	110.000,00	Penyediaan Data yang Akurat dan dapat di pertanggungjawabkan	Kab. Sukoharjo	Jumlah Laporan sinergitas data dan informasi	141 kali	110.000,00
	Kerja sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	Kab. Sukoharjo	**Persentase terselenggaranya pembinaan dan pengawasan pengelolaan**	12 baliho, 1 nomor WA, 2.000 leaflet, 1 kegiatan edukasi	36.176,00	**Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	Kab. Sukoharjo	**Persentase terselenggaranya pembinaan dan pengawasan pengelolaan informasi adminduk**	12 baliho, 1 nomor WA, 2.000 leaflet, 1 kegiatan edukasi	36.176,00

			informasi adminduk							
	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Kab. Sukoharjo	Jumlah Laporan kondisi jaringan, database kependudukan dan SDM TIK	12 bulan	232.100,00	Pembinaan dan PengawasanTerkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kab. Sukoharjo	Jumlah Laporan kondisi jaringan, database kependudukan dan SDM TIK	12 bulan	232.100,00
	Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	Kab. Sukoharjo	Jumlah peserta yang mengikuti Bimbingan teknis	**100%**	7.700,00	Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan.	Kab. Sukoharjo	Jumlah peserta yang mengikuti Bimbingan teknis	**100%**	7.700,00
	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kab. Sukoharjo	**Persentase pengelolaan profil data kependudukan**	4 dokumen	31.000,00	**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**	Kab. Sukoharjo	**Persentase pengelolaan profil data kependudukan**	4 dokumen	31.000,00
	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kab. Sukoharjo	**Persentase tersedianya data profil kependudukan**	**100%**	11.000,00	**Penyusunan Profil kependudukan**	Kab. Sukoharjo	**Persentase tersedianya data profil kependudukan**	**100%**	11.000,00
	Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Kab. Sukoharjo		**100%**	20.000,00	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Kab. Sukoharjo		**100%**	20.000,00

	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Kab. Sukoharjo		2 dokumen	**232.930,00**	Penyusunan Profil data perkembangan dan proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain	Kab. Sukoharjo		2 dokumen	**232.930,00**
	Penyusunan Profil Kependudukan			1 dokumen	232.930,00				1 dokumen	232.930,00
	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota				124.030,00					124.030,00
	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain				108.900,00					108.900,00

Tabel 2.4.
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023
Kabupaten Sukoharjo

No.	**Program**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Besaran / Volume**	**Catatan**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			NIHIL		

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 TELAAHAN TERHADAP PROGRAM NASIONAL

Program Nasional yang terkait dengan kependudukan dan pencatatan sipil adalah: **"Program Penataan Administrasi Kependudukan "**

Dengan sasaran program yaitu meningkatnya Kualitas Database Kependudukan Nasional sebagai dasar Penerbitan Dokumen Kependudukan, pelayanan publik dan pembangunan Nasional, serta mendukung Penyelenggaraan Pemilu/Pemilukada. Adapun Indikator Kegiatan Program (IKP) Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yaitu:

a. Penyediaan database kependudukan nasional yang akurat untuk memenuhi semua kepentingan dalam pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi serta penegakan hukum dan pencegahan kriminal;
b. Peningkatan pemanfaatan NIK, Database Kependudukan dan KTP-el oleh Lembaga Pengguna Pusat;
c. Peningkatan kualitas pelayanan dokumen administrasi kependudukan;

Program ini dijabarkan ke dalam 7 Kegiatan, yaitu:

a. Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SIAK) Terpadu

   Dengan sasaran kegiatan yaitu terbangunnya sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK) untuk pelayanan e-KTP di daerah, serta terlaksananya tertib administrasi kependudukan dengan tersedianya data dan informasi penduduk yang akurat dan terpadu.

b. Pengelolaan Informasi Kependudukan

   Dengan sasaran kegiatan yaitu meningkatnya kualitas implementasi kebijakan dan fasilitasi pengelolaan informasi kependudukan.

c. Pembinaan Administrasi Pencatatan Sipil

   Dengan sasaran kegiatan yaitu meningkatnya kualitas implementasi kebijakan dan cakupan fasilitasi pelaksanaan pencatatan sipil.

d. Pembinaan Administrasi Pendaftaran Penduduk

   Dengan sasaran kegiatan yaitu meningkatnya kualitas implementasi kebijakan dan cakupan fasilitasi pelaksanaan pendaftaran penduduk.

e. Pembinaan Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil

   Dengan sasaran kegiatan yaitu meningkatnya kualitas implementasi kebijakan dan fasilitasi pembinaan aparatur kependudukan dan pencatatan sipil.

f. Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan

   Dengan sasaran kegiatan yaitu meningkatnya kualitas implementasi kebijakan dan fasilitasi pemanfaatan data dan dokumen kependudukan.

g. Dukungan Manajemen Dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil

   Dengan sasaran kegiatan yaitu dukungan pelayanan teknis dan administrasi yang berkualitas di lingkungan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Program Nasional di Bidang Administrasi Kependudukan dan pencatatan sipil yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2021 adalah pemantapan Program Penataan Administrasi Kependudukan, tindak lanjut Program KTP- el dan penuntasan Akte Kelahiran.

Tindak lanjut Program KTP- el yang merupakan amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Kependudukan yang mengamanatkan penerapan KTP berbasis NIK tunggal secara nasional dengan menggunakan SIAK. Selanjutnya NIK wajib dicantumkan dalam setiap dokumen kependudukan dan menjadi dasar penerbitan Passport, SIM, NPWP, Polis Asuransi, Sertifikat hak atas tanah dan penerbitan dokumen lainnya.

Dalam rangka mendukung tindak lanjut program Nasional KTP- el di Kabupaten Sukoharjo maka yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo di tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan penuntasan perekaman KTP- el bagi wajib KTP di Kabupaten Sukoharjo yang belum melakukan perekaman dengan kegiatan kegiatan jemput bola bagi warga dengan keterbatasan,perekaman di panti-panti untuk mendukung program nasional penerapan KTP Elektronik .
2. Melaksanakan perekaman bagi wajib KTP pemula di sekolah-sekolah sehingga pada saat yang bersangkutan sudah menginjak usia 17 tahun akan menerima undangan dari Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil
3. Kabupaten Sukoharjo untuk mengambil KTP-el sudah langsung di antar ke rumah. Kegiatan ini bekerja sama dengan Kantor Pos Sukoharjo.
4. Melaksanakan Jemput Bola Akta Kelahiran dan Akta Kematian di Kecamatan.
5. Melaksanakan jemput bola layanan adminduk untuk Penduduk Rentan
6. Melaksanakan Sosialisasi kepada masyarakat dan aparatur Desa dan Kecamatan, untuk meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan mekanisme prosedur pelayanannya.
7. Peningkatan kualitas Sumber Daya Aparatur melalui pelatihan-pelatihan kepada operator atau petugas.

8. Digitalisasi atau alih media arsip/dokumen negara dan juga pemeliharaan arsip/dokumen negara.
9. Dukungan pemeliharaan perangkat komputer dan jaringan KTP- el diperuntukkan bagi perawatan perangkat keras pendukung operasional KTP- el dan jaringan koneksi database KTP- el dari kecamatan ke Data Center Kementerian Dalam Negeri RI dan dari Data Center Kementerian Dalam Negeri RI ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berupa:
   - PC (CPU, monitor, card reader, digital sign, scanner, web camera)
   - Printer KTP- el
   - Koneksi jaringan
   - Server KTP- el
   - UPS
   - Toner id card

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Perangkat Daerah melaksanakan dan mengawal tujuan dan sasaran daerah yang telah ditetapkan agar dapat tercapai. Tujuan daerah yang terkait dengan Kependudukan dan pencatatan sipil adalah : ” Mewujudkan Layanan Administrasi Kependudukan yang membahagiakan masyarakat ”, dengan sasaran :

a. Mewujudkan Layanan Administrasi Kependudukan yang membahagiakan masyarakat.
b. Meningkatnya kualitas aparatur dan pelayanan publik.

Berikut rumusan sasaran dan indikator sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dihasilkan pada tahapan Perumusan Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah, disajikan dalam tabel 3.1.berikut :

Tabel 3.1

Sasaran Dan Target Indikator Sasaran Tahun 2024

No	Tujuan, Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Satuan
1.	Mewujudkan Layanan Administrasi Kependudukan yang membahagiakan masyarakat	Persentase terlayaninya pemohon dokumen pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil	100	%
		Rata- rata lama nya waktu pelayanan pembuatan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	6	Jam
2.	Meningkatnya kualitas aparatur dan pelayanan publik	Nilai SAKIP PD	75 (B)	Nilai

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.3 Program dan Kegiatan

Usulan program dan kegiatan tahun 2024 dilaksanakan dalam rangka untuk mewujudkan tahapan visi Pemerintah Kabupaten Sukoharjo yang menjadi pedoman bagi pembangunan Kabupaten Sukoharjo, salah satunya memperkuat tatakelola pemerintahan yang bersih, efektif dan transparan. Jabaran visi tersebut harus dilakukan secara terukur dan terarah yang diimplementasikan dalam misi Pemerintah Kabupaten Sukoharjo

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mendukung perwujudan misi 1 yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Percepatan Reformasi Birokrasi

Dalam rangka mencapai Misi Tujuan dan Sasaran RPJMD maka rumusan Tujuan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagai berikut:

"**Mewujudkan Layanan Administrasi Kependudukan yang membahagiakan Masyarakat"**

Sedangkan Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata dari masing-masing tujuan dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam suatu indikator kinerja atau tolak ukur keberhasilan yan akan diwujudkan selama 5 (lima) tahun mendatang. Sasaran jangka menengah (RENSTRA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagai berikut:

1. **Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**
2. **Meningkatnya kualitas aparatur dan pelayanan publik**

Sebagai tindak lanjut dari misi tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengimplementasikannya kedalam Program dan Kegiatan dengan kebutuhan dana indikatif sebesar Rp.12.601.739.000,- dengan sumber dana dari APBD murni. Rencana program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana tabel 4.1 (terlampir)

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024 merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang memuat visi-misi Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021 – 2026, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Derah (RPJPD) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005-2025, serta merupakan kesinambungan dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.

1.1. Catatan Penting

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 akan menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan pada Tahun 2024, yang mengacu pada Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026 Urusan Wajib Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Apabila terjadi ketersedian anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan akan membuat skala prioritas penganggaran dan untuk selanjutnya dilakukan usulan penambahan anggaran pada saat perubahan anggaran pada tahun berjalan, dan tetap mengacu pada program prioritas sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Sukoharjo tahun 2021-2026.

1.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026 merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) PD, RencanaKerja (Renja) PD, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahunan. Dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan Kegiatan baik yang bersumber APBD maupun APBN tetap memperhatikan / mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya.

1.3. Rencana Tindak Lanjut

a. Perlu peningkatan kapasitas SDM aparatur perencanaan untuk melaksanakan tugas perencanaan yang semakin komplek. Upaya yang harus ditempuh bisa melalui Bimbingan teknis, Pelatihan, seminar atau kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur perencana.
b. Aparatur perencana yang ada pada saat ini masih kekurangan staf yang berpendidikan sarjana yang bisa membantu tugas lain dari perencana sehingga bisa menganalisis rencana kerja untuk masa yang akan datang dan bisa melaksanakan tugas perencanaan lebih fokus.
c. Dalam rangka sinergitas perencanaan program dan kegiatan perangkat daerah agar lebih intensif, dilaksanakan koordinasi antar bidang sehingga kegiatan yang akan dilaksanakan lebih berdaya guna dan berhasil guna.

Tabel 4.1 Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Sukoharjo
Tahun 2024

Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
					Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil								**13.884.189.500,00**					**14.691.732.000,00**
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**								**13.884.189.500,00**					**14.691.732.000,00**
2	**12**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**								**13.884.189.500,00**					**14.691.732.000,00**
2	**12**	**02**			**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**								**1.407.825.000,00**					**1.394.000.000,00**
2	**12**	**02**	**2.01**		**Pelayanan Pendaftaran Penduduk**								**1.172.000.000,00**					**1.165.000.000,00**
2	12	02	2.01	01	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan													
						-	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	-	- Kab. Sukoharjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	200 Dokumen	-	82.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	200 Dokumen	85.000.000,00
2	12	02	2.01	02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk													
						-	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	-	- Kab. Sukoharjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	48000 Dokumen	-	20.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	48000 Dokumen	22.000.000,00
2	12	02	2.01	03	Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk													
						-	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Pelayanan Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	-	- Kab. Sukoharjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	480 Orang	-	15.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Pelayanan Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	480 Orang	0,00
2	12	02	2.01	04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk													
						-	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	-	- Kab. Sukoharjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	12 Laporan	-	1.030.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	12 Laporan	1.032.000.000,00
2	12	02	2.01	07	Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						-	Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	-	- Kab. Sukoharjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	12 Laporan	-	25.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	12 Laporan	26.000.000,00
2	**12**	**02**	**2.03**		**Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk**								**205.825.000,00**					**194.000.000,00**
2	12	02	2.03	02	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk													
						-	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	-	- Kab. Sukoharjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1453 Dokumen	-	40.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	1453 Dokumen	26.000.000,00
2	12	02	2.03	05	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk													
						-	Jumlah Laporan Hasil Sosialiasi Pendaftaran Penduduk	-	- Kab. Sukoharjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Laporan	-	165.825.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Hasil Sosialiasi Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	168.000.000,00
2	**12**	**02**	**2.04**		**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk**								**30.000.000,00**					**35.000.000,00**
2	12	02	2.04	01	Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk													
						-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk	-	- Kab. Sukoharjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	12 Dokumen	-	10.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk	12 Dokumen	10.000.000,00
2	12	02	2.04	03	Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk													
						-	Jumlah Laporan bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	-	- Kab. Sukoharjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Laporan	-	20.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	25.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	**12**	**03**			**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**								**610.000.000,00**					**619.000.000,00**
2	**12**	**03**	**2.01**		**Pelayanan Pencatatan Sipil**								**317.000.000,00**					**326.000.000,00**
2	12	03	2.01	01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting													
						-	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	-	- Kab. Sukoharjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	12 Dokumen	-	25.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	12 Dokumen	26.000.000,00
2	12	03	2.01	02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil													
						-	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	-	- Kab. Sukoharjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	30000 Layanan	-	280.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	30000 Layanan	285.000.000,00
2	12	03	2.01	03	Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil													
						-	Jumlah Dokumen Hasil Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil	-	- Kab. Sukoharjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Dokumen	-	12.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil	1 Dokumen	15.000.000,00
2	**12**	**03**	**2.02**		**Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**								**285.000.000,00**					**283.000.000,00**
2	12	03	2.02	03	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil													
						-	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	-	- Kab. Sukoharjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	4 Laporan	-	55.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	4 Laporan	55.000.000,00
2	12	03	2.02	04	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						-	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	-	- Kab. Sukoharjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	12 Laporan	-	40.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	12 Laporan	30.000.000,00
2	12	03	2.02	08	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil													
						-	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil	-	- Kab. Sukoharjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Laporan	-	168.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil	1 Laporan	170.000.000,00
2	12	03	2.02	09	Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pencatatan Sipil													
						-	Jumlah Dokumen Hasil Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pencatatan Sipil	-	- Kab. Sukoharjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Dokumen	-	7.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pencatatan Sipil	1 Dokumen	8.000.000,00
2	12	03	2.02	10	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencatatan Sipil													
						-	Jumlah Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang Menerima Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Terkait Pencatatan Sipil	-	- Kab. Sukoharjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	200 Orang	-	15.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang Menerima Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Terkait Pencatatan Sipil	200 Orang	20.000.000,00
2	**12**	**03**	**2.03**		**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**								**8.000.000,00**					**10.000.000,00**
2	12	03	2.03	02	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						-	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan Sipil yang Telah Dilakukan	-	- Kab. Sukoharjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	12 Laporan	-	8.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan Sipil yang Telah Dilakukan	12 Laporan	10.000.000,00
2	**12**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**								**470.000.000,00**					**500.000.000,00**
2	**12**	**04**	**2.01**		**Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan**								**100.000.000,00**					**105.000.000,00**
2	12	04	2.01	01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan													
						-	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	-	- Kab. Sukoharjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	2 Dokumen	-	50.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	2 Dokumen	55.000.000,00
2	12	04	2.01	02	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan													
						-	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	-	- Kab. Sukoharjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	2 Dokumen	-	25.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	2 Dokumen	25.000.000,00
2	12	04	2.01	03	Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah													
						-	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	-	- Kab. Sukoharjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	12 Laporan	-	25.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	12 Laporan	25.000.000,00
2	**12**	**04**	**2.03**		**Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**								**340.000.000,00**					**358.000.000,00**
2	12	04	2.03	01	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan													
						-	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-	- Kab. Sukoharjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Laporan	-	7.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Laporan	7.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	12	04	2.03	03	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan													
						-	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-	- Kab. Sukoharjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	4 Laporan	-	80.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	4 Laporan	85.000.000,00
2	12	04	2.03	04	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan													
						-	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	-	- Kab. Sukoharjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Dokumen	-	20.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	1 Dokumen	22.000.000,00
2	12	04	2.03	05	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan													
						-	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-	- Kab. Sukoharjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Laporan	-	25.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Laporan	26.000.000,00
2	12	04	2.03	07	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat													
						-	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	-	- Kab. Sukoharjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	5 Laporan	-	200.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	5 Laporan	210.000.000,00
2	12	04	2.03	08	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan													
						-	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan	-	- Kab. Sukoharjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	2 Dokumen	-	8.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan	2 Dokumen	8.000.000,00
2	**12**	**04**	**2.04**		**Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**								**30.000.000,00**					**37.000.000,00**
2	12	04	2.04	01	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						-	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-	- Kab. Sukoharjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	12 Laporan	-	10.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	12 Laporan	12.000.000,00
2	12	04	2.04	03	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan													
						-	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	-	- Kab. Sukoharjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Laporan	-	20.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	1 Laporan	25.000.000,00
2	**12**	**05**			**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**								**70.000.000,00**					**76.000.000,00**
2	**12**	**05**	**2.01**		**Penyusunan Profil Kependudukan**								**70.000.000,00**					**76.000.000,00**
2	12	05	2.01	01	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota													
						-	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	-	- Kab. Sukoharjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	2 Dokumen	-	25.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	28.000.000,00
2	12	05	2.01	02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain													
						-	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	-	- Kab. Sukoharjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Dokumen	-	45.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	1 Dokumen	48.000.000,00
2	**12**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**11.326.364.500,00**					**12.102.732.000,00**
2	**12**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**80.000.000,00**					**103.000.000,00**
2	12	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
						-	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	- Kab. Sukoharjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	2 Dokumen	-	50.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	55.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	12	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD													
						-	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	- Kab. Sukoharjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Dokumen	-	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	8.000.000,00
2	12	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD													
						-	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	- Kab. Sukoharjo, Sukoharjo, Semua Kel/Desa	-	2 Dokumen	-	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	8.000.000,00
2	12	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD													
						-	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-	- Kab. Sukoharjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	2 Dokumen	-	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	8.000.000,00
2	12	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD													
						-	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-	- Kab. Sukoharjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	2 Dokumen	-	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	8.000.000,00
2	12	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						-	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	- Kab. Sukoharjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Laporan	-	5.000.000,00	-		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	8.000.000,00
2	12	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
						-	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	- Kab. Sukoharjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Laporan	-	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	8.000.000,00
2	**12**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**6.438.602.000,00**					**7.443.102.000,00**
2	12	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
						-	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	- Kab. Sukoharjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	46 Orang/bulan	-	6.216.502.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	46 Orang/bulan	7.216.502.000,00
2	12	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD													
						-	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	- Kab. Sukoharjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	12 Dokumen	-	201.600.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	201.600.000,00
2	12	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD													
						-	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	-	- Kab. Sukoharjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	12 Dokumen	-	4.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	5.000.000,00
2	12	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						-	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	- Kab. Sukoharjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Laporan	-	5.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	6.000.000,00
2	12	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan													
						-	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	-	- Kab. Sukoharjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	4 Dokumen	-	4.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	4 Dokumen	5.000.000,00
2	12	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD													
						-	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-	- Kab. Sukoharjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	6 Laporan	-	4.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	6 Laporan	5.000.000,00
2	12	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran													
						-	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-	- Kab. Sukoharjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	2 Dokumen	-	3.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	4.000.000,00
2	**12**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**								**11.500.000,00**					**12.000.000,00**
2	12	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD													
						-	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	-	- Kab. Sukoharjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Dokumen	-	2.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	2.000.000,00
2	12	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						-	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	- Kab. Sukoharjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	2 Laporan	-	2.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	3.000.000,00
2	12	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD													
						-	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	- Kab. Sukoharjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	2 Laporan	-	7.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	7.000.000,00
2	**12**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**271.262.500,00**					**286.000.000,00**
2	12	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya													
						-	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-	- Kab. Sukoharjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	105 Paket	-	35.437.500,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	105 Paket	40.000.000,00
2	12	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian													
						-	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-	- Kab. Sukoharjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	2 Dokumen	-	2.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 Dokumen	3.000.000,00
2	12	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai													
						-	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	-	- Kab. Sukoharjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	2 Dokumen	-	2.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 Dokumen	3.000.000,00
2	12	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan													
						-	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-	- Kab. Sukoharjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	500 Orang	-	165.825.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	500 Orang	170.000.000,00
2	12	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						-	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	- Kab. Sukoharjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	50 Orang	-	65.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	70.000.000,00
2	**12**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**707.400.000,00**					**733.000.000,00**
2	12	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
						-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	- Kab. Sukoharjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	12 Paket	-	7.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	7.000.000,00
2	12	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
						-	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	- Kab. Sukoharjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	2 Paket	-	295.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	300.000.000,00
2	12	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
						-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	- Kab. Sukoharjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	12 Paket	-	140.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	150.000.000,00
2	12	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
						-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	- Kab. Sukoharjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	12 Paket	-	65.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	65.000.000,00
2	12	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
						-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-	- Kab. Sukoharjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	90 Dokumen	-	4.400.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	90 Dokumen	5.000.000,00
2	12	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						-	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	- Kab. Sukoharjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	4 Laporan	-	2.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	2.000.000,00
2	12	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
						-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	- Kab. Sukoharjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	12 Laporan	-	180.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	190.000.000,00
2	12	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD													
						-	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-	- Kab. Sukoharjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	2 Dokumen	-	8.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen	8.000.000,00
2	12	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD													
						-	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-	- Kab. Sukoharjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Dokumen	-	6.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	6.000.000,00
2	**12**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**2.125.800.000,00**					**1.820.000.000,00**
2	12	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
						-	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	- Kab. Sukoharjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Unit	-	1.100.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	1.100.000.000,00
2	12	01	2.07	05	Pengadaan Mebel													
						-	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	- Kab. Sukoharjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	27 Unit	-	56.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	27 Unit	60.000.000,00
2	12	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
						-	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	- Kab. Sukoharjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	30 Unit	-	959.800.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	30 Unit	650.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	12	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
						-	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	- Kab. Sukoharjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	2 Unit	-	10.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	10.000.000,00
2	**12**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**1.080.230.000,00**					**1.090.630.000,00**
2	12	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
						-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	- Kab. Sukoharjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	12 Laporan	-	200.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	200.500.000,00
2	12	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
						-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	- Kab. Sukoharjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	12 Laporan	-	444.600.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	450.000.000,00
2	12	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
						-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	- Kab. Sukoharjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Laporan	-	20.130.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	20.130.000,00
2	12	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
						-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	- Kab. Sukoharjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	12 Laporan	-	415.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	420.000.000,00
2	**12**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**611.570.000,00**					**615.000.000,00**
2	12	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						-	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-	- Kab. Sukoharjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	30 Unit	-	171.450.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	30 Unit	172.000.000,00
2	12	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel													
						-	Jumlah Mebel yang Dipelihara	-	- Kab. Sukoharjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	40 Unit	-	8.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Mebel yang Dipelihara	40 Unit	8.000.000,00
2	12	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
						-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	- Kab. Sukoharjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	73 Unit	-	50.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	73 Unit	50.000.000,00
2	12	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
						-	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	- Kab. Sukoharjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Unit	-	312.120.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	315.000.000,00
2	12	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
						-	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	- Kab. Sukoharjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Unit	-	70.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	70.000.000,00
TOTAL													**13.884.189.500,00**					**14.691.732.000,00**

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024
INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO



Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo

Gedung Menara Wijaya Lt. 7

Jl. Jenderal Sudirman No. 199 Sukoharjo

Tahun 2023

KATA PENGANTAR

Puji serta syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 telah selesai disusun. Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo merupakan dokumen perencanaan yang bersifat teknis operasional dan merupakan penjabaran teknis dari Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo dalam aspek perencanaan pembangunan daerah, yang memuat Kebijakan, Program-Program dan Kegiatan indikatif Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo selama kurun waktu satu tahun sesuai Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Daerah.

Tersusunnya Rencana Kerja ini tidak terlepas dari partisipasi semua pihak yang ada di Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo, kami menyadari masih banyak kekurangan dalam Rencana Kerja ini, untuk itu kami sangat mengharapkan masukan-masukan positif dari semua pihak. Besar harapan kami agar Rencana Kerja ini dapat bermanfaat, khususnya bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Sukoharjo, 10 Agustus 2023

INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO

Abdul Haris Widodo, S.IP, M.Si, MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19680606 198903 1 013

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 1

1.3 Maksud dan Tujuan 3

1.4 Sistematika Penulisan 4

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU 5

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Inspektorat Kabupaten Sukoharjo 5

2.2 Analisis Capaian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo..... 13

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Sukoharjo 16

BAB III TUJUAN DAN SASARAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO..... 17

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional 17

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo 18

3.3 Tantangan dan Peluang 19

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN..... 20

BAB V PENUTUP 21

Lampiran :

Rumusan rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja (RENJA) merupakan acuan setiap perangkat daerah (PD) dalam mengoperasionalkan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi jangka menengah daerah. Dengan rencana kerja yang terukur dan didukung oleh pendanaan, maka menjadi suatu instrumen dan indikator yang digunakan dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah agar lebih terarah.

Penyusunan RENJA berpedoman pada renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo dan mengacu pada rencana kerja pemerintah daerah (RKPD). Penyusunan RENJA bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD. Rencana Kerja Inspektorat Daerah merupakan bagian yang utuh dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat Daerah. Keduanya merupakan penjabaran dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dengan demikian program dan kegiatan pembangunan yang ada pada dokumen perencanaan diatur secara rinci dalam Rencana Kerja (RENJA).

Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 memuat rumusan tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang dilengkapi dengan dana indikatif serta sumber dananya.

1.2 LANDASAN HUKUM

Dasar hukum yang melatarbelakangi penyusunan

renja Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; dan
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307).

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024, bertujuan untuk menunjukan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dari berbagai kegiatan, serta mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya pembangunan daerah.

Rencana Kerja disusun sebagai pedoman bagi :

1. Pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang ada di Inspektorat Daerah;
2. Penyusunan kebijakan anggaran, program dan kegiatan Tahun 2024.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA INSPEKTORAT DAERAH PADA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat Kabupaten Sukoharjo Tahun Lalu dan Capaian Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo

2.2. Kajian Capaian Kinerja Inspektorat Kabupaten Sukoharjo
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo

BAB III TUJUAN DAN SASARAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo
3.3. Tantangan dan Peluang Inspektorat Kabupaten Sukoharjo

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI
RENJA INSPEKTORAT KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA INSPEKTORAT KABUPATEN SUKOHARJO

Rencana Kerja Inspektorat Daerah kabupaten Sukoharjo adalah penjabaran perencanaan tahunan dan rencana strategis. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah.

Pengukuran Tingkat Capaian Kinerja Sasaran Program Inspektorat Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam tahun 2022 secara umum Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo telah dapat mencapai keberhasilan yang dapat dilihat dari pencapaian sebagian besar target indikator kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Evaluasi hasil perencanaan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 dapat dilihat dalam Rekapitulasi Evaluasi berikut ini :

Tabel. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2021

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD sampai dengan Renja OPD Tahun Lalu (Tahun 2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2020 (%)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2023 (%)	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	%
	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG			**12.259.867.000**		**8.157.108.650**		**2.938.228.000**		**2.789.358.307**		**94,93**		**89,29**
	PENGAWASAN			**12.259.867.000**		**8.157.108.650**		**2.938.228.000**		**2.789.358.307**		**94,93**		**89,29**
1	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**			**1.667.893.000**		**1.298.528.256**		**257.810.000**		**232.389.756**		**90,14**		**91,79**
		Prosentase pelayanan administrasi perkantoran (%)	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			42.210.000		27.678.500		4.560.000		2.502.800		54,89		71,5
		Jumlah surat masuk dan keluar dalam setahun (surat)	5250		1514		700		700		100		42,17	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			58.200.000		40.945.300		7.200.000		6.051.466		84,05		80,75
		Jumlah rekening Jasa Komunikasi yang dibayar (rekening)	60		48		12		12		100		100	
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			306.535.000		219.603.000		66.870.000		66.790.700		99,88		93,43
		Jumlah aparatur internal SKPD yang dilayani (orang)	180		144		36		36		100		100	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor			154.000.000		126.365.550		20.000.000		16.185.600		80,93		92,57
		Jumlah jenis ATK yang disediakan (jenis)	182		150		32		32		100		100	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			132.599.000		116.890.000		10.600.000		9.995.700		94,3		95,69
		Jumlah bahan yang dicetak/digandakan (lembar)	120250		102000		17250		16400		95,07		98,46	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor			24.568.000		18.414.600		2.000.000		1.992.600		99,63		83,06

		Jumlah jenis komponen instalasi listrik yang disediakan (jenis)	59		43		11		11		100		91,53	
	Penyediaan Jasa dan Peralatan Rumah Tangga			274.743.000		203.154.275		65.164.000		61.314.800		94,09		96,26
		Luas gedung dan halam yang disediakan jasa kebersihan (m2)	2250		1800		450		450		100		100	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			23.960.000		15.173.000		3.480.000		3.480.000		100		77,85
		Jumlah jenis bahan bacaan yang disediakan (jenis)	10		8		2		2		100		100	
	Penyediaan Makanan dan Minuman			191.788.000		122.194.000		45.810.000		33.720.440		73,61		81,3
		Jumlah makanan dan minuman yang disediakan (orang)	1570		1013		550		430		78,18		91,91	
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah			459.290.000		408.110.031		32.126.000		30.355.650		94,49		95,47
		Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilakukan (kali)	116		98		18		18		100		100	
										Rata - rata capaian kinerja (%)	97,33	87,59	92,41	86,79
										Predikat kinerja	Sangat tinggi	Tinggi	Sangat tinggi	Tinggi
2	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**			**1.818.442.000**		**784.550.763**		**930.850.000**		**880.581.311**		**94,6**		**91,57**
		Prosentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur penunjang kinerja (%)	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**	
	Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional			753.750.000		0		753.750.000		735.750.000		97,61		97,61
		Terlaksananya pengadaan mobil dinas (%)	100		0		100		100		100		100	
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor			263.870.000		206.621.300		40.900.000		37.010.000		90,49		92,33
		Jumlah jenis peralatan yang diadakan (jenis)	31		18		3		3		100		67,74	
	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor			41.000.000		26.802.000		6.000.000		5.206.000		86,77		78,07
		Jumlah gedung yang dipelihara (unit)	3		101		1		1		100		3400	

	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional			663.122.000		480.910.463		122.950.000		95.706.911		77,84		86,95
		Jumlah unit kendaraan dinas/operasional yang dipelihara secara rutin (unit)	54		46		14		14		100		111,11	
	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor			35.250.000		24.565.000		2.250.000		2.160.000		96		75,82
		Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara secara rutin (unit)	40		31		8		8		100		97,5	
	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor			51.950.000		37.410.000		5.000.000		4.748.400		94,97		81,15
		Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara secara rutin (unit)	24		20		4		4		100		100	
	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mebeleur			9.500.000		8.242.000		0		0		0		86,76
		Jumlah jenis mebeleur kantor yang rutin dipelihara (jenis)	16		8		0		0		0		50	
	Rata - rata capaian kinerja (%)										100	77,67	560,91	85,53
	Predikat kinerja										Sangat tinggi	Tinggi	Sangat tinggi	Tinggi
3	**PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR**			**22.275.000**		**0**		**22.275.000**		**0**		**0**		**0**
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya			22.275.000		0		22.275.000		0		0		0
		Jumlah ASN yang mendapat pakaian dinas (orang)	33		0		33		0		0		0	
	Rata - rata capaian kinerja (%)										0	0	0	0
	Predikat kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah
4	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR**			**169.115.000**		**121.031.880**		**25.560.000**		**22.918.500**		**89,67**		**85,12**
		Prosentase APIP yang mengikuti peningkatan kapasitas SDM (%)	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**	
	Study Banding			54.000.000		36.530.600		0		0		0		67,65

		Jumlah ASN yang mengikuti studi banding (orang)	4		301		0		0		0		7525	
	Seminar/ Lokakarya			56.000.000		47.771.280		6.000.000		4.321.000		72,02		93,02
		Jumlah ASN yang mengikuti seminar/lokakarya (orang)	38		34		4		4		100		100	
	Penilaian Angka Kredit Tenaga Fungsional			59.115.000		36.730.000		19.560.000		18.597.500		95,08		93,59
		Jumlah tenaga fungsional (orang)	60		39		20		18		90		95	
										Rata - rata capaian kinerja (%)	95	55,7	2573,33	84,75
										Predikat kinerja	Sangat tinggi	Rendah	Sangat tinggi	Tinggi
5	**PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN**			**65.950.000**		**24.812.000**		**6.375.000**		**5.025.000**		**78,82**		**45,24**
		Prosentase penyampaian laporan keuangan tepat waktu (%)	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**	
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			16.560.000		7.334.750		2.100.000		1.803.800		85,9		55,18
		Jumlah laporan Capaian kinerja dan Iktisar realisasi kinerja SKPD yang disusun (laporan)	60		48		12		12		100		100	
	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran			14.400.000		6.382.000		1.425.000		1.161.200		81,49		52,38
		Jumlah laporan keuangan semester yang disusun (laporan)	10		302		2		2		100		3040	
	Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran			15.665.000		5.484.900		1.425.000		1.235.000		86,67		42,9
		Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran yang disusun (laporan)	5		4		1		1		100		100	
	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun			19.325.000		5.610.350		1.425.000		825.000		57,89		33,3

		Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun (laporan)	5		301		1		1		100		6040	
										Rata - rata capaian kinerja (%)	100	77,99	2320	45,94
										Predikat kinerja	Sangat tinggi	Tinggi	Sangat tinggi	Sangat Rendah
6	**PROGRAM PERENCANAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)**			**69.844.000**		**57.216.900**		**10.744.000**		**10.283.600**		**95,71**		**96,64**
		Prosentase penyusunan dokumen perencanaan tepat waktu (%)	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**	
	Penyelenggaraan Forum SKPD			37.889.000		30.020.000		7.619.000		7.619.000		100		99,34
		Jumlah penyelenggaraan forum PD (kali)	401		400		1		1		100		100	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan			31.955.000		27.196.900		3.125.000		2.664.600		85,27		93,45
		Jumlah dokumen perencanaan (dokumen)	404		400		4		4		100		100	
										Rata - rata capaian kinerja (%)	100	92,63	100	96,39
										Predikat kinerja	Sangat tinggi	Sangat tinggi	Sangat tinggi	Sangat tinggi
7	**PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH**			**6.569.895.000**		**4.545.057.672**		**1.243.010.000**		**1.206.629.240**		**97,07**		**87,55**
		Level Kapabilitas APIP (level)	**3**		**0**		**3**		**2**		**66,67**		**66,67**	
		Tingkat maturitas SPIP (level)	**19**		**16**		**3**		**3**		**100**		**100**	
	Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala			3.295.229.000		2.120.783.610		795.840.000		770.846.440		96,86		87,75
		Jumlah laporan Pemeriksaan (laporan)	612		504		108		115		106,48		101,14	
	Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemda			139.337.000		51.821.000		20.920.000		17.730.000		84,75		49,92

		Jumlah pengaduan yang ditangani (kasus)	44		12		4		4		100		36,36	
	Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH			486.393.000		364.836.900		47.740.000		41.518.200		86,97		83,54
		Tingkat level kapabilitas APIP (level)	12		4		3		2		66,67		50	
	Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan			511.845.000		340.352.000		62.800.000		62.020.000		98,76		78,61
		jumlah penyelesaian tindak lanjut (temuan)	1350		600		150		150		100		55,56	
	Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif			1.840.210.000		1.450.676.762		304.620.000		303.424.600		99,61		95,32
		Jumlah peserta koordinasi monitoring dan evaluasi (orang)	110		88		22		22		100		100	
	Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan			184.891.000		147.139.400		0		0		0		79,58
		jumlah peserta rapat eavaluasi (orang)	1200		550		0		0		0		45,83	
	Pengelolaan LP-2P dan LHKPN			111.990.000		69.448.000		11.090.000		11.090.000		100		71,92
		jumlah Pejabat ASN yang melaporkan LHKPN (orang)	2544		1794		750		750		100		100	
										Rata - rata capaian kinerja (%)	95,52	80,99	69,84	78,09
										Predikat kinerja	Sangat tinggi	Tinggi	Sedang	Tinggi
8	**PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN**			**574.290.000**		**480.841.179**		**31.000.000**		**30.987.100**		**99,96**		**89,12**
		SDM APIP yang kompeten (%)	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**	
	Pelatihan Pengembangan tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan			574.290.000		480.841.179		31.000.000		30.987.100		99,96		89,12
		Jumlah aparat pengawasan yang mengikuti pelatihan (orang)	44		40		4		4		100		100	
										Rata - rata capaian kinerja (%)	100	99,96	100	89,12
										Predikat kinerja	Sangat tinggi	Sangat tinggi	Sangat tinggi	Tinggi

9	**PROGRAM PENATAAN DAN PENYEMPURNAAN KEBIJAKAN SISTEM DAN PROSEDUR PENGAWASAN**			**182.849.000**		**116.669.000**		**38.290.000**		**36.823.000**		**96,17**		**83,94**
		Prosentase penyediaan dokumen perencanaan pengawasan tepat waktu (%)	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**	
	Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan			182.849.000		116.669.000		38.290.000		36.823.000		96,17		83,94
		Jumlah dokumen program pengawasan (dokumen)	10		302		2		2		100		3040	
										Rata - rata capaian kinerja (%)	100	96,17	3040	83,94
										Predikat kinerja	Sangat tinggi	Sangat tinggi	Sangat tinggi	Tinggi
10	**PROGRAM PENGINTENSIFIKASIAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT**			**1.119.314.000**		**728.401.000**		**372.314.000**		**363.720.800**		**97,69**		**97,57**
		Terlaksananya monev dan sosialisasi saber pungli (%)	**100**		**0**		**100**		**100**		**100**		**100**	
	Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat			1.119.314.000		728.401.000		372.314.000		363.720.800		97,69		97,57
		jumlah peserta sosialisasi dan monev (orang)	400		320		80		80		100		100	
										Rata - rata capaian kinerja (%)	100	97,69	100	97,57
										Predikat kinerja	Sangat tinggi	Sangat tinggi	Sangat tinggi	Sangat tinggi
	JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM							2.938.228.000		2.789.358.307				
				12.259.867.000		8.157.108.650		2.938.228.000		2.789.358.307	100,03	94,93	83,98	89,29
				12.259.867.000		8.157.108.650		2.938.228.000		2.789.358.307	Sangat tinggi	Sangat tinggi	Tinggi	Tinggi

2.2 ANALISIS CAPAIAN KINERJA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

Sesuai dengan dokumen RENSTRA Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026 yang telah disusun maka hubungan antara tujuan, sasaran, serta indikatornya adalah sebagai berikut :

Tabel : Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2021

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	Kondisi Awal 2021	Target Capaian Sasaran				
					2022	2023	2024	2025	2026
1	Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih dan efektif		Opini BPK terhadap LKPD	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada Perangkat Daerah di Kabupaten Sukoharjo	% Rekomendasi Hasil Pengawasan pada Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Nilai SAKIP Kabupaten	B	B	B	BB	BB	BB
		Meningkatnya kualitas Implementasi SAKIP Perangkat Daerah di Kabupaten Sukoharjo	% Perangkat Daerah yang mendapat Nilai SAKIP B	50%	55%	60%	65%	70%	75%
2	Mewujudkan penyelenggaraan SPIP yang efektif		Level Maturitas SPIP	3	3	3	3	3	3
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan SPIP	Skor maturitas SPIP	3	3	3	3	3	3

3	Meningkatkan Kapabilitas APIP		Level Kapabilitas APIP	1	1	2	3	3	3
		Terpenuhinya Standar Kompetensi SDM APIP	% SDM APIP yang telah memenuhi standar kompetensi yang dipersyaratkan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya kapasitas APIP	% meningkatnya cakupan pelaksanaan tugas Mandatory APIP	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Analisis kinerja pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo sesuai dengan RENSTRA INSPEKTORAT tertuang dalam capaian Sasaran Strategis Tahun 2023 adalah sebagai berikut

Tabel : Pencapaian Kinerja Inspektorat Kabupaten Sukoharjo

NO	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Target Capaian Sasaran					Realisasi Tahun 2021
		2022	2023	2024	2025	2026	
1	Opini BPK terhadap LKPD	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	% Rekomendasi Hasil Pengawasan pada Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Nilai SAKIP Kabupaten	B	B	BB	BB	BB	B
4	% Perangkat Daerah yang mendapat Nilai SAKIP B	55%	60%	65%	70%	75%	50%
5	Level Maturitas SPIP	3	3	3	3	3	3
6	Skor maturitas SPIP	3	3	3	3	3	3
7	Level Kapabilitas APIP	3	3	3	3	3	3
8	% SDM APIP yang telah memenuhi standar kompetensi yang dipersyaratkan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9	% meningkatnya cakupan pelaksanaan tugas Mandatory APIP	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Ada beberapa faktor yang merupakan pendorong keberhasilan dan beberapa faktor penghambat/kendala dalam pelaksanaan atau perwujudan indikator sasaran organisasi, yaitu :

a. Faktor Pendorong :
   1) Mekanisme kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo yang berorientasi kepada pencapaian kinerja.
   2) Adanya hubungan kerja yang baik dan komitmen yang kuat antara pimpinan dan staf Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo dalam menciptakan suasana kerja yang kondusif sehingga menimbulkan motivasi kerja yang tinggi.
   3) Adanya kerjasama yang baik dari perangkat daerah terhadap upaya peningkatan kualitas hasil pengawasan.
   4) Pola kerja yang sistemik dan terjadwal sehingga memberikan hasil yang optimal, efektif dan efisien.

b. Faktor Penghambat :
   1) Belum memadainya jumlah aparatur pengawasan dibandingkan dengan jumlah objek (Perangkat daerah, Desa dan Kelurahan, objek lainnya) yang diperiksa.
   2) Belum memadainya kebijakan sistem dan prosedur pengawasan dalam rangka percepatan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme.
   3) Sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) yang dilaksanakan Perangkat Daerah masih belum optimal.
   4) Belum memadainya sarana dan prasarana pendukung operasional dalam rangka peningkatan kualitas pengawasan

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo tidak dapat lepas dari isu-isu strategis yang melingkupinya. Isu-isu strategis dimaksud antara lain :

1. Akuntabilitas pengelolaan keuangan wajib menjadi perhatian utama dalam penyelenggaran pemerintahan daerah dalam upaya mempertahankan Opini WTP dari BPK.
2. Penerapan sistem akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo secara keseluruhan belum berjalan dengan baik (Nilai SAKIP Pemerintah Tahun 2022 = B), sehingga tantangan kedepan terhadap SAKIP Kabupaten Sukoharjo masih harus berbenah untuk dapat meningkatkan nilai tersebut menjadi BB.
3. Penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI maupun APIP diharapkan menunjukkan progres yang menggembirakan.
4. Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sudah mendapatkan penilaian dari BPKP dengan berada pada tingkat 3 dengan catatan, sehingga masih banyak hal yang perlu dibenahi.
5. Level Kapabilitas APIP di Tahun 2022 mendapat level 3.
6. Keterbatasan jumlah fungsional APIP kurang ideal, dimana sesuai hasil analisa jabatan yang telah disusun dibutuhkan 42 fungsional APIP, tetapi jumlah ketersediaan baru 21 orang.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Inspektorat Daerah adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pengawasan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Di dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya melakukan koordinasi dengan perangkat daerah Kabupaten Sukoharjo (Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas / Badan / Kantor, Lembaga Teknis Daerah) juga dengan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah maupun eksternal Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang lebih tinggi (BPKP, Inspektorat Provinsi) melakukan pengawasan di Pemerintah Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan dan / atau jika diminta oleh Inspektorat Kabupaten berdasarkan sinergi pengawasan. Pada dasarnya lembaga pengawasan yang lebih tinggi, hanya memiliki kompetensi di bidang pengawasan represif dan fungsional atas kebijaksanaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten, kecuali BPK sebagai lembaga pengawasan eksternal memiliki kewenangan atas semua hal yang menyangkut keuangan negara.

Memperhatikan gambaran kondisi daerah dari hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan, isu-isu global, nasional dan regional termasuk dampak dari pandemi Covid-19, maka isu strategis pembangunan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 adalah :

1. Penurunan angka kemiskinan dan pengangguran;
2. Pemulihan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia;
3. Pertumbuhan ekonomi dan ketahanan ekonomi;
4. Pembangunan infrastruktur daerah; dan
5. Tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah.

Sesuai isu strategis tersebut, tugas Inspektorat terkait dengan isu tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah dan sejalan dengan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 yaitu pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta peningkatan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi dan misi yang telah ditetapkan dan berorientasi pada operasional visi dan misi. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun mendatang.

Untuk mewujudkan visi-misi Bupati terpilih yaitu dengan Visi "Mewujudkan Masyarakat Sukoharjo yang Lebih Makmur" serta Inspektorat Daerah mendukung pencapaian misi yang pertama yaitu "Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Percepatan Reformasi Birokrasi"

Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo merumuskan tujuan yang terkait dengan misi, yaitu :

Terwujudnya tata pemerintahan yang profesional melalui penguatan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah yang efektif.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh organisasi secara lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yg lebih pendek. Sesuai dengan tujuan organisasi maka sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 tahun ke depan, sebagai berikut : Meningkatnya efektivitas penerapan sistem pengendalian internal pemerintah, dengan indikator sasaran :

1. Level Maturitas SPIP : Tingkat 3
2. Level Kapabilitas APIP : Level 3

3.3. TANTANGAN DAN PELUANG

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Inspektorat Daerah

Kabupaten Sukoharjo memiliki tantangan serta peluang sebagai berikut :

1. Penerapan sistem akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo secara keseluruhan belum berjalan dengan baik (Nilai SAKIP Pemerintah Tahun 2022 = B), sehingga tantangan ke depan terhadap SAKIP Kabupaten Sukoharjo masih harus berbenah untuk dapat meningkatkan nilai tersebut.
2. Penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI maupun APIP diharapkan menunjukkan progres yang menggembirakan.
3. Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sudah mendapatkan penilaian dari BPKP dengan berada pada tingkat 3 dengan catatan, sehingga masih banyak hal yang perlu dibenahi.
4. Level Kapabilitas APIP di Tahun 2022 sudah mendapat level 3.
5. Keterbatasan jumlah fungsional APIP yang masih jauh dari ideal, dimana sesuai hasil analisa jabatan yang telah disusun dibutuhkan 42 fungsional APIP, tetapi jumlah ketersediaan baru 32 orang.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
INSPEKTORAT KABUPATEN SUKOHARJO

Rencana Kerja (RENJA) merupakan acuan setiap perangkat daerah (PD) dalam mengoperasionalkan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi jangka menengah daerah. Dengan rencana kerja yang terukur dan didukung oleh pendanaan, maka menjadi suatu instrumen dan indikator yang digunakan dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah agar lebih terarah.

Dalam Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 terdapat 3 Program, 11 kegiatan dan 37 sub kegiatan baik program utama yang merupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam mendukung visi dan misi daerah, maupun program dan kegiatan pendukung. Perumusan kegiatan pada setiap program telah mensinkronisasi peraturan perundangan yang mengatur tentang perencanaan pembangunan daerah dan penganggaran. Untuk menilai pencapaian kegiatan, maka pada setiap kegiatan dirumuskan indikator kinerja kegiatan. Perumusan kegiatan juga telah diarahkan untuk mendukung pencapaian kinerja pada setiap program. Seluruh kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo yang tertuang dalam Renja didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sukoharjo yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU).

Rumusan Rencana Kerja dan pendanaan Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 sebagaimana terlampir.

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 merupakan dokumen yang berisi identifikasi permasalahan, isu strategis, tujuan dan sasaran, serta program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun yang bersifat indikatif merupakan pedoman Inspektorat Kabupaten Sukoharjo dalam menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) guna penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi di bidang pengawasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo pada Tahun 2024. Karena Renja ini masih bersifat indikatif, maka jika terjadi kekurangan anggaran, maka harus dilakukan penyesuaian rencana dengan mengurangi kegiatan dengan skala prioritas lebih rendah atau dengan mengurangi target capaian. Jika ternyata dana yang tersedia melebihi, maka penyesuaian dilakukan dengan perubahan target kinerja dan penambahan kegiatan untuk mendukung sarana dan prasarana kerja. Renja ini sudah menyelaraskan target dan indikator kinerja yang telah tertuang dalam Review Renstra, dengan menyesuaikan bentuk dan susunan perangkat daerah yang baru, tugas pokok dan fungsi yang baru, dan perspektif Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan baik pada tingkatan pemerintah daerah maupun perangkat daerah.

Besar harapan kami agar dokumen Renja ini juga dapat bermanfaat dan menjadi acuan bagi pemangku peran terkait dalam mendukung penyelenggaraan pengawasan pemerintahan menuju terwujudnya birokrasi yang bersih dan responsif terhadap pemenuhan hak dasar rakyat melalui reformasi birokrasi pada Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.

Sukoharjo, 10 Agustus 2023

INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

Abdul Haris Widodo, S.IP, M.Si, MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19680606 198903 1 011

RENCANA KERJA

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KABUPATEN SUKOHARJO

TAHUN 2024

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT. atas tersusunnya Rencana Kerja (RENJA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024.

Rencana Kerja (RENJA) ini merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026. Rencana Kerja ini memuat rencana program, kegiatan, dan Sub Kegiatan, anggaran, sasaran Sub kegiatan berupa indikator output Sub kegiatan sebagai upaya untuk menyusun suatu perencanaan yang terpadu dan berorientasi hasil/kinerja.

Berkenaan dengan hal tersebut dalam memenuhi dokumen perencanaan kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukoharjo, maka disusunlah Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 yang berfungsi sebagai pedoman dan acuan dalam penyusunan kebutuhan program, kegiatan, Sub Kegiatan dan anggaran Tahun 2024 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga perlu saran dan masukan demi peningkatan kualitas daripada dokumen perencanaan yang kami susun.

Kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu sehingga tersusunnya Rencana Kerja (RENJA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024.

Semoga Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2024 ini dapat berguna bagi kita semua.

KEPALA PELAKASANA BPBD
KABUPATEN SUKOHARJO

ARIYANTO MULYATMOJO, SH
Pembina
NIP. 19740623 199311 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR **i**

DAFTAR ISI **ii**

DAFTAR TABEL **iii**

I. Pendahuluan **1**

A. Latar Belakang..... 1

B. Landasan Hukum..... 2

C. Maksud dan Tujuan 4

D. Sistematika Penulisan..... 5

II. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2021 **8**

A. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD..... 8

B. Analisis Kinerja Pelayanan PD 18

C. Isu-isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD..... 26

D. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 27

III. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan **35**

A. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 35

B. Tujuan dan Sasaran Renja PD 36

C. Program dan Kegiatan 37

IV. PENUTUP **47**

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD Tahun 2022 dan Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2022 Kabupaten Sukoharjo.....	13
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan PD BPBD Kabupaten Sukoharjo	20
Tabel 2.4	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Kabupaten Sukoharjo	28
Tabel 3.1	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan PD Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Kabupaten Sukoharjo.....	42

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukoharjo menyusun Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023.

Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 diatur lebih lanjut bahwa penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut :

1. Persiapan penyusunan Renja Perubahan
2. Penyusunan rancangan awal Renja Perubahan
3. Penyusunan Rancangan Renja Perubahan
4. Pelaksanaan Forum/ lintas bidang
5. Perumusan rancangan akhir Renja Perubahan
6. Penetapan Renja Perubahan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukoharjo sebagai lembaga Institusi yang bertugas membantu Bupati Sukoharjo dalam menentukan kebijakan teknis urusan Penanggulangan Bencana di daerah telah menetapkan program dan kegiatan urusan Penanggulangan Bencana yang akan dilaksanakan pada tahun 2024.

Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 memuat kebijakan program, kegiatan, Sub Kegiatan pembangunan, hasil evaluasi pelaksanaan program kegiatan, Sub Kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Secara umum Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah diharapkan dapat menjawab dua hal mendasar, yaitu :

a. Arah pelayanan yang akan dikembangkan dan yang hendak dicapai Perangkat Daerah dalam satu tahun kedepan;
b. Langkah - langkah strategis yang perlu dilakukan agar tujuan yang telah ditetapkan tercapai.

Selain itu Rencana Kerja (RENJA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 ini merupakan salah satu perangkat dasar untuk dapat tercapainya pelayanan yang diberikan pada masyarakat yang akan dievaluasi setiap akhir tahun dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024.

B. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 berdasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah.
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah.
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional.
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
10. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan.
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Keuangan Daerah.
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2024.
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

17. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo.
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah.
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005-2025.
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031.
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah.
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Nomor 3 Tahun 2021, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3 Tahun 2021).
23. Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236).
24. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sukoharjo Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 31 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022

C. Maksud Dan Tujuan

1. Maksud :

Maksud penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 adalah untuk memberikan pedoman atau arah dalam pelaksanaan program kegiatan, Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2024.

2. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 adalah :

a. Untuk menetapkan program kegiatan, Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode 1 (satu) tahun.
b. Untuk memasukkan program kegiatan, Sub Kegiatan yang ada di dalam Rencana Kerja (Renja) ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Pembangunan 2024.
c. Sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan kegiatan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah .
d. Sebagai indikator bahwa kinerja yang dilakukan apakah konsisten dengan proses dan ketentuan dalam rencana kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
e. Untuk meningkatkan kompetensi profesionalisme dan disiplin Pegawai Negeri Sipil di Badan Penanggulangan Bencana Daerah , agar bertanggung jawab, mampu, jujur, terarah dan terprogram, mengacu pada norma, standar, dan prosedur yang berlaku dengan didukung oleh sistem administrasi yang efektif dan efisien.
f. Terwujudnya pelayanan prima dalam melayani masyarakat.
g. Menciptakan kesinambungan kegiatan pembangunan dari tahun ketahun dan keselarasan program, kegiatan, Sub Kegiatan Perangkat Daerah dengan program kegiatan, Sub Kegiatan pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam RKPD maupun RPJMD.

D. Sistematika Penulisan

Bab I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan RENJA Perangkat Daerah sebagai berikut :

A. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja PD, proses penyusunan Renja PD, keterkaitan antara dokumen Renja PD dengan dokumen RKPD dan Renstra PD, serta tindak lanjutnya dengan proses RAPBD.

B. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan PD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran PD.

C. Maksud Dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja PD.

D. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja PD, serta susunan garis besar isi dokumen.

Bab II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2022 dan perkiraan tahun berjalan yaitu tahun 2024, mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan.

B. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan Indikator Kinerja yang sudah ditentukan.

C. Isu-Isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan uraian mengenai sejauhmana tingkat kinerja pelayanan PD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan PD, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi PD,

dampaknya terhadap visi dan misi kepala daerah, tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan PD dan formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

D. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

   Berisikan uraian mengenai proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan, penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD.

E. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

   Berisikan uraian hasil kajian terhadap program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan kabupaten, LSM, asosiasi-asosiasi, Perguruan Tinggi yang langsung ditujukan kepada PD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi PD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang Kabupaten.

Bab III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN

A. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

   Berisikan perumusan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra PD

B. Program dan Kegiatan

   Berisikan rumusan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai RKPD yang telah ditetapkan

Bab VI. PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Untuk melaksanakan kebijakan yang merupakan perwujudan dari Visi dan Misi akan sangat dipengaruhi oleh tingkat kualitas sumber daya manusia. Karena manusia sebagai subyek pelaku pembangunan yang sangat berperan dan menentukan baik sebagai perencana, pelaksana, pengguna maupun sebagai evaluator dari hasil kegiatan pembangunan. Dengan demikian tingginya tingkat kualitas sumber daya manusia para pelaku pembangunan sangat diperlukan dalam upaya mencapai tujuan pembangunan.

Secara umum Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 memuat rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dengan tetap memperhatikan potensi yang ada dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kabupaten Sukoharjo. Keberhasilan suatu proses perencanaan akan bisa dilihat dari hasil evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya, sejauh mana pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan berdampak terhadap capaian yang telah ditetapkan didalam Renstra Perangkat Daerah. Hasil dari evaluasi sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan di tahun mendatang.

Pada Tahun Anggaran 2022, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukoharjo telah melaksanakan seluruh Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 dan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah, pada Tahun Anggaran 2022 ada 2 Program 11 Kegiatan dan 34 Sub Kegiatan dengan realisasi kinerja keuangan sebagai berikut :

REALISASI PROGRAM ,KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

TAHUN 2022

NO.	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	PROSEN TASE (%)
A	**Program penunjang urusan pemerintahan daerah**	**2.072.631.000**	**2.800.164.520**	**80**
I	***Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah***	***42.000.000***	***40.780.800***	***97,1***
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*27.000.000*	*25.817.900*	95,6
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.000.000	5.000.000	100
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5.000.000	4.988.000	99,8
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.000.000	4.974.900	99,5
II	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	***1.115.769.000***	***986.387.356***	***88,4***
5	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.019.569000	891.719.156	87,5
6	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	91.200.000	89.680.000	98,3
7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.000.000	4.988.200	99,8
III	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	**179.735.000**	**117.577.820**	**98,8**
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.875.000	5.874.500	99,9
9	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.000.000	8.000.000	100
10	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	20.000.000	19.818.300	99
11	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	50.000.000	49.996.600	99,8
12	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	17.000.000	16.999.440	100
13	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.360.000	4.780.000	89,2

14	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	73.500.000	72.108.980	98,1
NO.	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	PROSEN TASE (%)
IV	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*40.000.000*	*40.000.000*	100
15	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*40.000.000*	*40.000.000*	100
V	***Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah***	***166.126.770***	***155.503.204***	**94**
16	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.500.000	6.490.000	99,8
17	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	51.500.000	46.744.984	90,8
18	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor	5.000.000	4.966.000	99,3
19	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	103.126.770	97.302.220	94,4
VI	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***204.220.000***	***203.026.525***	**98,61**
20	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	34.950.000	34.854.525	98,0
21	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	55.000.000	54.712.000	99,5
22	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.270.000	4.255.000	99,6
23	Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100.000.000	99.205.000	99,2
24	Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.000.000	10.000.000	100
B	**Program Penanggulangan Bencana**	**1.441.500.000**	**1.268. 893.499**	**88,03**
VII	***Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota***	***90.000.000***	***90.000.000***	***100***
25	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE Rawan bencana Kabupaten /Kota (Per Jenis Bencana)	90.000.000	90.000.000	100

NO.	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	PROSEN TASE (%)
VIII	***Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana***	***571.862.690***	***530.892.554***	***83,3***
26	Penyusunan rencana Penanggulangan bencana	110.000.000	98.169.500	89,2
27	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	30.000.000	28.560.000	95,2
28	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupaten /Kota	165.362.690	147.987.055	89,5
29	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	20.000.000	20.000.000	100
30	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten /Kota	50.000.000	49.870.000	99,7
31	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan	40.000.000	38.874.999	97,2
32	Penanganan Pasca Bencana Kabupaten /Kota	73.500.000	67.920.000	92,4
33	Pengembangan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	15.000.000	14.130.000	94,2
34	Penyusunan rencana Kontijensi	50.000.000	47.831.000	95,7
35	Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana	18.000.000	17.550.000	97,5
IX	**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	**776.500.000**	**720.198.000**	**92,75**
36	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	0	0	0
37	Respon Cepat Darurat Bencana kabupaten/Kota	34.824.000	29.232.000	83,9
38	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Kabupaten/Kota	113.050.000	113.050.000	100
39	Penyediaan Logistik Penyeamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	51.868.000	49.543.000	95,5
X	***Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana***	***25.000.000***	***24.015.500***	***96,06***
40	Kerjasama antar Lembaga kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	*25.000.000*	*25.000.000*	100

Dari 2 Program, 10 Kegiatan dan 40 Sub Kegiatan urusan wajib yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahun 2022, semua program , kegiatan dan sub kegiatan telah memenuhi target kinerja hasil dan keluaran yang direncanakan, yaitu sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan capaian realisasi anggaran sebesar 91,7 %, dengan realisasi outcome (hasil) sebesar 100 % melalui pelaksanaan kegiatan sebagai berikut : Perencanaan, Penganggaran, dan Evakuasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

2. Program Penanggulangan Bencana dengan capaian realisasi anggaran 94,5 % dengan realisasi outcome (hasil) sebesar 100 % melalui pelaksanaan kegiatan sebagai berikut : Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota, Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana, Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban bencana, dan Penataan dasar penanggulangan bencana.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra tersaji pada tabel **Tabel 2.1**

TABEL 2.1

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAN RENJA

HAL 13 - 17

TERLAMPIR (LAMPIRAN EXEL)

B. Analisis Kinerja Pelayanan PD

Badan Penanggulangan Bencana Daerah selaku lembaga teknis di bidang Penanggulangan Bencana harus mampu menjawab tantangan tersebut diatas. Keberhasilan suatu perencanaan dapat dilihat dari mulai proses penyampaian dengan pelaksanaan/implementasi di lapangan, sehingga terwujud sinergi antara perencanaan pembangunan baik di tingkat Nasional, Provinsi maupun Kabupaten. Namun disisi lain seiring berubahnya regulasi tentang mekanisme perencanaan dari tingkat pusat akan memperlambat proses perencanaan dalam rangka keterpaduan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah provinsi dan perencanaan pembangunan kabupaten/kota bisa secara optimal.

Pada tahun 2022, Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 dan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukoharjo, terdapat 2 sasaran strategis yang harus diwujudkan pada tahun 2021- 2026, yaitu :

1. Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Kapasitas Masyarakat dalam Mitigasi Bencana

Tolok ukur capaian Sasaran Strategis 1, terdiri dari 4 (empat) indikator yaitu : Prosentase Pelayanan Informasi Rawan

Bencana, Prosentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana, Prosentase Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban bencana dan Prosentase Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana.

Capaian indikator pada Sasaran Strategis 1 : Cakupan Mitigasi Bencana dari target 100 % terealisasi sebesar 94,5 % atau tercapai 100 % dari target akhir Renstra sebesar 100 %.

Program/kegiatan yang mendukung keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis 1, adalah : Program Penanggulangan Bencana, dengan kegiatan :

1. Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana.
2. Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana.
3. Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban bencana .
4. Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana.

2. ***Sasaran Strategis 2 :*** **Meningkatnya Kualitas Aparatur dan Pelayanan Publik**

Tolok ukur capaian Sasaran Strategis 2 , terdiri dari 7 (tujuh) indikator yaitu : Prosentase Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat Daerah, prosentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, prosentase Administrasi Kepegawaianr Perangkat Daerah, prosentase Administrasi Umum Perangkat Daeah, Prosentase Pengadaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintah Daerah, Prosentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dan Prosentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintah Daerah.

Capaian indikator pada Sasaran Strategis 2 : Nilai Sakip dari target 100 % terealisasi 91,7 % atau tercapai 40 % dari target akhir Renstra sebesar 100 %.

Program/kegiatan yang mendukung keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis 2, adalah Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan kegiatan antara lain :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat Daerah,
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah,.
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah,
5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintah Daerah,
6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah,
7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintah Daerah.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah seperti tersaji dalam tabel analisis **Tabel : 2.2.**

TABEL 2.2

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PD

HAL 20 - 24

TERLAMPIR (LAMPIRAN EXEL)

C. Isu-isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Berdasarkan analisis gambaran pelayanan, kajian hasil evaluasi pelaksanaan serta kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukoharjo, maka dapat dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukoharjo, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan

penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukoharjo sebagai berikut :

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukoharjo :

   Pelayanan Penanggulangan Bencana belum tertangani secara optimal, sehingga menimbulkan berbagai permasalahan. Hal ini disebabkan karena :

   1) Terbatasnya anggaran apabila dibandingkan dengan jumlah kejadian bencana dan luasnya cakupan wilayah yang tersebar di 12 Kecamatan.
   2) Kegiatan Penanggulangan Bencana belum dirasakan menyentuh kepada Masyarakat di semua Desa yang ada Di Kabupaten Sukoharjo.
   3) Kurangnya sarana dan prasarana Evakuasi Korban Bencana .
   4) Kurangnya SDM yang ada baik dari Kuantitas maupun kualitasnya

2. **Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukoharjo :**

   a. Keterbatasan kebijakan pelayanan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Sukoharjo karena penanganan tidak seluruhnya menjadi kewenangan BPBD tetapi beberapa SKPD terkait diantara tugas dan fungsinya melaksanakan teknis. seperti : PD Dinas Pertanian, PD Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Perumahan dan Pemukiman, Dinas Sosial dan BBWSBS. Sehingga dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukoharjo harus selalu berkoordinasi dengan Dinas terkait.

3. **Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukoharjo :**

a. Tantangan :

1) Tantangan internal

a) Terbatasnya kuantitas dan kualitas SDM yang menguasai administrasi dan program komputer secara baik.

b) Belum maksimalnya pemanfaatan IPTEK dalam penyelesaian tugas keseharian.

c) SDM Pelaksana masih banyak hanya sekedar melaksanakan kegiatan tanpa memperhatikan apakah memberikan kontribusi bagi masyarakat atau tidak.

d) Belum adanya Informasi database/akses data di bidang Kebencanaan.

e) Belum /masih kurangnya gagasan yang dituangkan dalam bentuk konsep dan informasi.

f) Belum memiliki pedoman yang jelas sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan.

2) Tantangan ekternal

a) Jumlah jenis bencana yang terjadi di Kabupaten Sukoharjo.

b) Luasnya wilayah Kabupaten Sukoharjo.

c) Penanganan Korban Bencana tertangani secara manual / seadanya.

d) Masih kurangnya partisipasi Masyarakat akan Bencana.

e) Belum tercukupinya sarana dan prasarana untuk kegiatan penanggulangan bencana yang memadai.

b. Peluang :

1) Luasan wilayah Kabupaten Sukoharjo.

2) Adanya dukungan Pemerintah Pusat/BNPB terhadap Penanggulangan Bencana

3) Adanya dukungan dari stakeholder terkait di Kabupaten Sukoharjo.

4) Adanya dukungan dari stakeholder terkait di Tingkat Propinsi maupun Pusat.

Formulasi isu-isu penting berupa Rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindak lanjuti dalam perumusan program prioritas tahun yang direncanakan

D. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Telaahan terhadap rancangan awal Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukoharjo dengan membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukoharjo dan tingkat kinerja yang dicapai oleh BPBD, sesuai prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap Perangkat Daerah berdasarkan review terhadap rancangan awal RKPD yang disajikan pada tabel 2.4

TABEL 2.4

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TH 2024

HAL 28- 34

TERLAMPIR (LAMPIRAN EXEL)

BAB III
TUJUAN, DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

A. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.

Telaahan terhadap kebijakan nasional merupakan penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi PD.

Yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional, yaitu reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pasca konflik, kebudayaan, kreatifitas, dan inovasi teknologi, politik, hukum dan keamanan serta provinsi untuk tahun rencana, yang terkait dengan pembangunan kabupaten.

Adapun kebijakan nasional dan provinsi dibidang Penanggulangan Bencana berdasarkan hasil indentifikasi adalah sebagai berikut :

1. Mengutamaan pengurangan risiko bencana dalam pengalokasian anggaran, rencana pembangunan dan penataan ruang harus terus ditingkatkan.
2. Manajemen penyelenggaraan penanggulangan bencana kedepan perlu dirancang pula untuk dapat mengakomodir upaya-upaya antisipasi terhadap kemungkinan kejadian bencana yang diakibatkan faktor non alam.
3. Meningkatkan ketersediaan dan akses ke sistem peringatan dini multi-bahaya dan informasi dan penilaian risiko bencana kepada masyarakat.
4. Meningkatkan Manajemen logistik dan peralatan yang andal mutlak diperlukan untuk mendukung penanganan bencana yang lebih cepat dan tepat sasaran.

5. Mengoptimalkan Pengkajian Kebutuhan , Penyusunan Rencana, Proses Pengusulan dan Penganggaran Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana.
6. Mengembangkan Kapasitas Aparatur Penanggulangan Bencana.
7. Pemenuhan SPM Sub Urusan Bencana

B. Tujuan dan Sasaran Renja PD

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukoharjo yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Rencana Strategi (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 -2026.

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun, yang akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealiasikan visi dan misi. Adapun tujuan yang akan dicapai Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah :

”Terwujudnya Lingkungan Sehat, Aman, Tangguh Berkelanjutan”

Sedangkan sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai dalam waktu yang lebih pendek dari tujuan, merupakan jabaran/langkah-langkah yang dirumuskan dalam rangka pencapaian tujuan. Berdasarkan tujuan tersebut sasaran yang ingin dicapai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kapasitas Masyarakat dalam Mitigasi Bencana.
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Aparatur dan pelayanan Publik

Indikator kinerja adalah suatu variabel yang dapat digunakan untuk mengukur seberapa besar tingkat keberhasilan

suatu program atau kegiatan. Dalam rencana kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2024, indikator kinerja sasaran yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Capaian Mitigasi Bencana.
2. Nilai Sakip.

C. Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Untuk menjaga kesinambungan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, perlu dilakukan penyesuaian sumber daya Badan Penanggulangan Bencana Daerah terhadap organisasi dan outcome yang ingin dicapai.

Perumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan untuk Tahun 2024, menyesuaikan antara indetifikasi kebutuhan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan berdasarkan hasil analisis dengan arahan prioritas Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukoharjo menurut rancangan awal RKPD, serta mempertimbangkan hasil telaahan kebijakan Nasional dan kebijakan Provinsi.

a. Rekapitulasi program , kegiatan dan sub kegiatan :

1) Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang diusulkan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2024 adalah 2 program , 10 Kegiatan dan 40 Sub Kegiatan.
2) Kebutuhan sumber pendanaan indikatif Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukoharjo sebesar Rp. 2.601.508.000 (Dua milyar enam ratus satu juta lima ratus delapan ribu rupiah) yang dibiayai oleh APBD Kabupaten Sukoharjo.
3) Indentifikasi kebutuhan program dan kegiatan untuk prakiraan maju Tahun 2024 dengan anggaran Rp. 3.737.500.000,-

b. Program, kegiatan dan Sub Kegiatan :

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota :

1. Kegiatan Perencanaan , penganggaran dan Evalu Kinerja Perangkat Daerah :
   a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
   b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
   c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD.
   d. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD.
   e. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD.
   f. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
   g. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah :
   a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
   b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD.
   c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.
3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah :
   a. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya.
   b. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah :

a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
c. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.
d. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
e. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.
f. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.
g. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah :
   a. Sub Kegiatan Pengadaan kendaraan Dinas jabatan.
   b. Sub Kegiatan Pengadaan kendaraan Dinas Operasional atau lapangan.
   c. Sub Kegiatan Pengadaan Mebeluer.
   d. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah :
   a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
   b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
   c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
   d. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah:
   a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.

b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
c. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
d. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
e. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

II. Program Penanggulangan Bencana.

1. Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota :
   a. Sub Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana).
2. Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana :
   a. Sub Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota.
   b. Sub Kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota.
   c. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana.
   d. Sub Kegiatan Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota.
   e. Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan.
   f. Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota.
   g. Sub Kegiatan Penyusunan rencana Kontijensi Bencana.
   h. Sub Kegiatan Gladi Kesiapsiagaan terhadap bencana.

3. Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana :
    a. Sub Kegiatan Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas.
    b. Sub Kegiatan Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota.
    c. Sub Kegiatan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota.
    d. Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota.
4. Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana :
    a. Sub Kegiatan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota .
    b. Sub Kegiatan Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota

Rumusan rencana program dan kegiatan disajikan dalam **Tabel 3.1.**

TABEL 3.1

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PD TH 2024

HAL 42 - 46

TERLAMPIR (LAMPIRAN EXEL)

BAB IV
PENUTUP

Demikian gambaran singkat tentang penjabaran Rencana Kerja (RENJA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024, pada akhirnya Rencana Kerja tersebut harus diwujudkan melalui *action* atau tindakan melalu kegiatan yang dilaksanakan dengan tetap berpedoman pada RPJMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026 dan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026.

Sebagai upaya untuk mencapai visi dan misi organisasi diperlukan langkah-langkah yang sistematis, terukur, terencana dan berkesinambungan dari tahun ke tahun. Untuk tujuan tersebut maka disusunlah perencanaan kinerja atau Rencana Kinerja (RENJA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2024. Selain itu penyusunan Rencana Kinerja (RENJA) juga dimaksudkan agar organisasi dapat merumuskan langkah-langkah prioritas yang harus dilaksanakan untuk masa 1 tahun kedepan sehingga visi dan misi organisasi tetap dapat diwujudkan dan eksistensi organisasi dapat berjalan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan dalam rencana kerja.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukoharjo harus dapat melaksanakan kegiatan dengan baik dibidang administrasi dan pembangunan, yang selanjutnya diharapkan dapat berfungsi dalam penetapan kinerja serta dilaksanakan melalui program dan kegiatan tahun 2024 sehingga harapan dalam mencapai kinerja yang profesional dapat terwujud.

Semoga Rencana Kerja (RENJA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 dapat memberikan arah dan pedoman bagi penyelenggaraan program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah , sehingga Visi dan Misi dapat diwujudkan dengan baik.

BUPATI SUKOHARJO

ETIK SURYANI

SALINAN

BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 35 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024;

b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 273 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan Kepala Daerah setelah Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 192) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 262);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tatacara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 200);
13. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);
14. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 298);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

Renja Perangkat Daerah disusun dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Pasal 3

Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

BAB II

SISTEMATIKA DAN FUNGSI RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 4

Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. bab I : pendahuluan;
b. bab II : hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu;
c. bab III : tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
d. bab IV : rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan
e. bab V : penutup.

Pasal 5

Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah.

BAB II

PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 6

(1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah.
(2) Kepala Perangkat Daerah melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi Renja Perangkat Daerah kepada Bupati melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.

BAB III

PERANGKAT DAERAH PENYUSUN

Pasal 7

(1) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun oleh Perangkat Daerah sebagai berikut:
    a. Sekretariat Daerah;
    b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
    c. Inspektorat Daerah;
    d. Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan;
    e. Dinas Kesehatan;
    f. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang;
    g. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
    h. Satuan Polisi Pamong Praja;
    i. Dinas Sosial;

j. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak;
k. Dinas Pangan;
l. Dinas Lingkungan Hidup;
m. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil;
n. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa;
o. Dinas Perhubungan;
p. Dinas Komunikasi Dan Informatika;
q. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
r. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;
s. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
t. Dinas Pertanian dan Perikanan;
u. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah dan Perdagangan;
v. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
w. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
x. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
y. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
z. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
aa. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
bb. Kecamatan Weru;
cc. Kecamatan Bulu;
dd. Kecamatan Tawangsari;
ee. Kecamatan Sukoharjo;
ff. Kecamatan Nguter;
gg. Kecamatan Bendosari;
hh. Kecamatan Polokarto;
ii. Kecamatan Mojolaban;
jj. Kecamatan Grogol;
kk. Kecamatan Baki;
ll. Kecamatan Gatak; dan
mm. Kecamatan Kartasura.

(2) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf mm tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 10 Agustus 2023

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 10 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd.

WIDODO

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2023 NOMOR 35

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ditandatangani secara elektronik oleh :

TEGUH PRAMONO, SH, MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19710429 199803 1 003

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 35 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN
SUKOHARJO TAHUN 2024

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2024

Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 terdiri atas:

1. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Inspektorat Daerah;
4. Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan;
5. Dinas Kesehatan;
6. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang;
7. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
8. Satuan Polisi Pamong Praja;
9. Dinas Sosial;
10. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak;
11. Dinas Pangan;
12. Dinas Lingkungan Hidup;
13. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil;
14. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa;
15. Dinas Perhubungan;
16. Dinas Komunikasi Dan Informatika;
17. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
18. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;
19. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
20. Dinas Pertanian dan Perikanan;
21. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah dan Perdagangan;
22. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
23. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
24. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
25. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
26. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
27. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
28. Kecamatan Weru;
29. Kecamatan Bulu;

30. Kecamatan Tawangsari;
31. Kecamatan Sukoharjo;
32. Kecamatan Nguter;
33. Kecamatan Bendosari;
34. Kecamatan Polokarto;
35. Kecamatan Mojolaban;
36. Kecamatan Grogol;
37. Kecamatan Baki;
38. Kecamatan Gatak; dan
39. Kecamatan Kartasura.

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI

PEMERINTAH
KABUPATEN SUKOHARJO

RENCANA KERJA

DINAS PANGAN KABUPATEN SUKOHARJO

2024



DINAS PANGAN KABUPATEN SUKOHARJO
Gedung Menara Wijaya Lantai 5
Jl. Jenderal Sudirman 199 Sukoharjo

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1
1.2. Landasan Hukum 2
1.3. Maksud dan Tujuan 4
1.4. Sistematika Penulisan 5

BAB II ANALISIS GAMBARAN PELAYANAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 6

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat daerah 19
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 20

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 23

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 23
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 24

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 25

BAB V PENUTUP 59

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur senantiasa kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 ini dapat diselesaikan dengan baik.

Renja Dinas Pangan Tahun 2024 merupakan penyempurnaan dari Rancangan Awal Renja Dinas Pangan Tahun 2024 yang telah disusun sebelumnya. Disamping itu juga berpedoman pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah yang disusun pada Tahun 2023. Renja Dinas Pangan Tahun 2024 akan menjadi pedoman pada pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 melalui pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang tertuang di dalamnya.

Pada kesempatan ini kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Renja Dinas Pangan Tahun 2023. Kami berharap dokumen ini bermanfaat pula bagi pihak-pihak yang berkepentingan

Sukoharjo, 2023

Plt. KEPALA DINAS PANGAN
KABUPATEN SUKOHARJO
KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN

IWAN SETIYONO, S.STP., M.Hum
Pembina Tingkat I
NIP. 197803041997031001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak azasi manusia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah berkewajiban mewujudkan ketahanan pangan masyarakat dalam rangka membangun sumber daya manusia yang berkualitas.

Ketahanan Pangan pada tingkat rumah tangga merupakan landasan bagi Ketahanan Pangan masyarakat, yang selanjutnya menjadi pilar bagi ketahanan pangan daerah dan nasional. Berdasarkan pemahaman tersebut, maka salah satu prioritas utama pembangunan ketahanan pangan adalah pemberdayaan masyarakat, agar mampu membangun ketersediaan pangan rumah tangganya secara mandiri, serta mewujudkan ketahanan pangan rumah tangganya secara berkelanjutan. Program-program ketahanan pangan diarahkan dalam upaya mencapai tujuan pembangunan ketahanan pangan, dilaksanakan secara berkesinambungan terpadu dan sinergi antara pusat dengan daerah, antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten, dan antar perangkat daerah lintas sektoral, yang tertuang di dalam RPJPD, RPJPMD, dan RKPD, serta dijabarkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah dibuat dalam jangka waktu satu tahunan dengan berpedoman pada RKPD dan RPJMD. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional disebutkan bahwa Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Kerja Perangkat Daerah, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6573), Renja Perangkat Daerah Dinas Pangan Tahun 2024 merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yaitu tahun 2024 yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 berdasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata CaraPenyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 174);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 200);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 3)
14. Peraturan Bupati Nomor 50 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor Tahun 2016 Nomor 50).
15. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 43 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 – 2026 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 44).

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo

   Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Pangan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

   a. Sebagai dokumen perencanaan Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo dalam waktu 1 (satu) tahun, yang berpedoman pada Renstra Dinas Pangan guna memberikan arah dalam tahapan-tahapan pembangunan ketahanan pangan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pangan sebagai penjabaran atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo tahun 2021 – 2026;
   b. Sabagai dasar dalam penyusunan Program dan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
   c. Sebagai panduan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang pangan dalam waktu satu tahun.

2. Tujuan

   Tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Pangan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

   a. Menjabarkan tujuan, sasaran, dan indikator kinerja pembangunan Ketahanan Pangan di Kabupaten Sukoharjo yang akan dicapai selama jangka waktu satu tahun (tahun 2024).

b. Menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan di Kabupaten Sukoharjo tahun 2024 terhadap Renstra Dinas Pangan dan RKPD Tahun 2024;
c. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan program dan kegiatan pembangunan antara Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo dengan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo serta dengan Pemerintah Provinsi dan Pusat; serta
d. Mewujudkan penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang Penyusunan Renja Perangkat daerah, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan

BAB II ANALISIS GAMBARAN PELAYANAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Pada bab ini membahas tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja Peragkat daerah Tahun Lalu meliputi : Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Review terhadap Rancangan Awal RKPD, dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Menjelaskan telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024

BAB V PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Dalam rangka penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dilakukan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022. Adapun capaian kinerja dimaksud seperti pada tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD Tahun 2021 – 2026 s/d Tahun 2022
Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan (Outcome/Output)	Target Kinerja Capaian Renstra Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021 (n-3) ***)**	Target dan Realisasi Hasil Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
I.	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten /kota	Persentase cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100	100	100	100	100	100	100	100
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	100	100	100	100	100	100	100
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun (dokumen)	8	2	1	1	100	1	4	50
1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun	7	1	1	1	100	1	3	42,85
1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	7	1	1	1	100	1	3	42,85
1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun	7	1	1	1	100	1	3	42,85

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan (Outcome/Output)	Target Kinerja Capaian Renstra Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021 (n-3) ***)**	Target dan Realisasi Hasil Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun	7	1	1	1	100	1	3	42,85
1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja SKPD	18	3	3	3	100	3	9	50
1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	1	1	-	-	-	-	1	100
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	100	100	100	100	100	100	100
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan (pegawai)	26	22	22	22	100	24	24	92,30
2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen SPJ yang telah diverifikasi dan disahkan (dokumen)	72	12	12	12	100	12	36	50
2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen pelaporan keuangan akhir tahun (laporan)	18	3	3	3	100	3	9	50
2.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/ triwulanan/semesteran (dokumen)	18	3	3	3	100	3	9	50

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan (Outcome/Output)	Target Kinerja Capaian Renstra Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021 (n-3) ***)**	Target dan Realisasi Hasil Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.5	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen pelaporan prognosis realisasi anggaran (laporan)	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	*Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	*Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	100	100	-	-	-	100	100	100
3.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya yang diadakan (stel)	246	-	-	-	-	31	47	87,03
	S.K. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4	-	-	-	-	4	-	-
3.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	26	-	-	-	-	24	23	88,46
4.	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	100	100	100	100	100	100	100	100
4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik yang disediakan (buah)	773	121	132	132	100	130	383	49,54
4.2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan (buah)	517	87	-	-	100	6	93	17,98

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan (Outcome/Output)	Target Kinerja Capaian Renstra Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021 (n-3) ***)**	Target dan Realisasi Hasil Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
4.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah logistik kantor yang disediakan (jenis)	298	49	49	49	100	2	100	33,55
4.4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang yang dicetak dan digandakan (lembar)	102.100	17050	17050	22700	133,14	2	39.752	38,93
4.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang disediakan tiap bulan (buah)	60	60	-	-	-	0	60	100
4.6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Tamu yang difasilitasi (orang)	600	200	100	171	171	6	377	62,83
4.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (kali)	361	72	60	98	163,33	12	182	50,41
5.	*Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	*Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	100	100	100	100	100	100	100	100
5.1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit kendaraan dinas/kendaraan jabatan yang diadakan/ dibeli	12	-	-	-	-	-	-	-
5.2	Pengadaan Mebel	Jenis mebeler yang diadakan/ dibeli	20	-	1	1	100	-	1	-

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan (Outcome/Output)	Target Kinerja Capaian Renstra Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021 (n-3) ***)**	Target dan Realisasi Hasil Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
5.3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan (unit)	7	12	-	-	-	-	-	171,42
5.4	Pengadaan aset tetap lainnya	Jumlah aset tetap lainnya yang diadakan	2	-	-	-	-	-	-	-
6.	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	100	100	100	100	100	100
6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pengelolaan Surat Masuk dan Keluar (surat)	10.885	1941	1800	1976	109,78	12	3.929	36,09
6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening jasa sumber daya yang dibayar tiap bulan (rekening)	1	1	1	1	100	1	1	100
6.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah SDM Pelayanan Umum yang disediakan (orang)	5	5	5	5	100	5	5	100
7.	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Cakupan pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	100	100	100	100	100	100	100	100
7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit kendaraan dinas/jabatan yang dilakukan pemeliharaan (unit)	22	13	14	14	100	18	18	81,81

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan (Outcome/Output)	Target Kinerja Capaian Renstra Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021 (n-3) ***)**	Target dan Realisasi Hasil Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional yang dilakukan pemeliharaan (unit)	1	1	-	-	-	-	-	100
7.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dilakukan pemeliharaan	11	11	11	100	100	11	11	100
7.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dilakukan perawatan / direhabilitasi (Gedung)	11	-	3	3	100	1	4	36,37
II.	Program Pengelolaan Sumberdaya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Prosentase Desa/Kelurahan yang mengelola Lumbung Pangan (Jumlah Desa/Kelurahan yang memiliki Lumbung Pangan dibagi jumlah Desa/Kelurahan dikalikan 100%)	13,17	8,98	10,78	11,98	111,3	11,97	11,97	
1.	*Kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota*	*Jenis Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan yang dibangun/ disediakan (jenis)*	2	2	2	2	100	2	2	100

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan (Outcome/Output)	Target Kinerja Capaian Renstra Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021 (n-3) ***)**	Target dan Realisasi Hasil Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.1	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Jumlah Lumbung Pangan Masyarakat dan sarana pendukung yang dibangun/ disediakan (unit)	6	1	4	4	100	1	6	100
1.2	Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur	Jumlah lantai jemur yang dibangun (m2)	5	0	4	4	100	1	5	100
1.3	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Kelompok Lumbung Pangan Masyarakat yang diisi (LPM)	12	1	3	3	100	3	7	33,34
1.4	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	Jumlah peserta Rakor dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik (orang)	495	415	271	271	100	24	710	58,33
III.	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Prosentase Ketersediaan Energi (Kalori)	127,91	153,96	120,80	127,29	105,37	125,54	125,54	94,44
		Koefisien Variasi Pangan Strategis :								
		- Telur	5,9	5,83	7,00	4,55	135,00	6,1	6,1	100
		- Bawang Merah	20,9	7,64	21,70	8,39	161,33	21,2	21,2	100
		- Cabe	46,1	9,63	47,5	20,56	156,71	46,8	46,8	100
1.	*Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan*	*Jenis bahan pangan pokok/pangan lainnya yang disediakan (jenis)*	3	3	3	3	100	3	3	100

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan (Outcome/Output)	Target Kinerja Capaian Renstra Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021 (n-3) ***)**	Target dan Realisasi Hasil Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan									
		Jenis bahan pangan pokok/pangan lainnya yang dipantau dan dianalisis ketersediaan dan harganya secara berkala	9	9	9	9	100	9	9	100
1.1	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Jumlah Laporan Prognosa HBKN dan Neraca Bahan Makanan	12	2	2	2	100	2	6	50
1.2	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Kelompok Wanita Tani yang dibina dalam rangka penyediaan pangan berbasis sumber daya lokal	145	25	-	-	100	-	25	33,79
1.3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan distribusi pangan pokok atau pangan lainnya (kali)	96	46	52	81	155,76	16	143	148,95
1.4	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah laporan Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan (laporan)	72	12	12	12	100	12	36	50

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan (Outcome/Output)	Target Kinerja Capaian Renstra Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021 (n-3) ***)**	Target dan Realisasi Hasil Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.5	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan yang dikembangkan (gapoktan)	35	31	32	32	100	33	33	94,28
1.6	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Jumlah Gapoktan LUPM, Toko Mitra Tani yang difasilitasi	16	1	3	3	100	3	7	43,75
2.	*Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota*	*Cadangan pangan pemerintah kabupaten yang dikelola (%)*	100	100	100	100	100	100	100	100
2.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi pengendalian cadangan pangan kabupaten yang diselenggarakan (kali)	24	4	4	4	100	4	12	50
2.2	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah pengisian Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten (ton GKG)	160,655	26,155	27	27	100	28	81,155	50,51
2.3	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten yang dilakukan pemeliharaan (ton GKG)	160,655	26,155	27	27	100	28	81,155	50,51
3.	*Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi*	*Angka Konsumsi Energi (kalori)*	2115,6	2150	2111	2110	99,95	2111,9	2111,9	99,82

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan (Outcome/Output)	Target Kinerja Capaian Renstra Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021 (n-3) ***)**	Target dan Realisasi Hasil Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
3.1	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Jumlah Laporan penetapan Target dan Realisasi Konsumsi Pangan yang disusun	12	2	2	2	100	2	6	50
3.2	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jenis Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	145	25	27	27	100	27	52	35,86
3.3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah koordinasi dan evaluasi konsumsi pangan yang dilakukan	12	2	2	2	100	2	6	50
IV.	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Prosentase Desa/Kelurahan Rawan Pangan yang ditangani (Rumus : jml.ds rawan pangan yang ditangani : jml desa rawan pangan keseluruhan x 100)	75	25	37,5	37,5	100	62,5	62,5	83,33
1.	*Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan*	*Jumlah dokumen Peta Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi yang disusun (dokumen)*	6	1	1	1	100	1	3	50
1.1	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Jumlah laporan Kerentanan dan Ketahanan Pangan yang disusun, dimutahirkan dan di analisa (laporan)	78	13	13	13	100	13	39	50

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan (Outcome/Output)	Target Kinerja Capaian Renstra Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021 (n-3) ***)**	Target dan Realisasi Hasil Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.	*Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota*	*Jenis kasus rawan pangan yang ditangani (jenis)*	2	2	2	2	100	2	2	100
2.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah desa rawan pangan yang diberdayakan (desa)	12	2	2	2	100	2	6	50
2.2	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan yang disalurkan pada kasus rawan pangan (ton Beras)	95	15	14	18,03	128,57	1	49,03	51,61
V.	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Prosentase Jenis Pangan Yang Dilakukan Pengawasan (%)	43,75	37,5	37,5	37,5	100	37,5	37,5	85,71
1.	*Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota*	*Jumlah pangan segar daerah yang dilakukan pengawasan (jenis)*	12	9	10	10	100	11	11	91,67
1.1	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta sosialisasi Keamanan Pangan	682	106	88	88	100	3	197	22,85
		Jml. peraturan perundang-undangan yg dibuat	1	1	-	-	-	-	1	100

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan (Outcome/Output)	Target Kinerja Capaian Renstra Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021 (n-3) ***)**	Target dan Realisasi Hasil Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.2	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sertifikat/Rekomendasi pangan segar asal tumbuhan yang diterbitkan (sertifikat)	60	71	15	25	166,67	8	104	*173,33*
1.3	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota (org)	Jumlah pelaku usaha PSAT yang dibina dalam rangka Registerasi Pangan Segar Asal Tumbuhan	10	24	-	-	-	-	24	240
1.4	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah nomor registerasi PSAT yang dikeluarkan	5	5	-	-	100	-	5	100
1.5	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah/Jenis Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan yang dibeli/disediakan (jenis)	2	1	1	1	100	1	1	50

Catatan : *) Periode Renstra Perangkat Daerah baru dimulai tahun 2021.

Tahun 2024 yang merupakan tahun ketiga periode Renstra 2021 – 2026, capaian kinerja pada program utama semua sudah di atas 30 %. Capaian tertinggi program utama sebesar 173,33 % yaitu pada Sub Kegiatan Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota (Sub Kegiatan yang masih dilaksanakan), hal ini disebabkan oleh adanya sosialisasi yang intensif bagi pelaku usaha Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT), agar segera mengajukan usulan sertifikasi PSAT, karena dengan terbitnya Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2018 tentang Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan, mewajibkan para pelaku Usaha PSAT memiliki nomor pendaftaran PSAT, terutama PSAT dalam kemasan yang diperdagangkan di pasaran/supermarket/swalayan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo baru terealisasi 2 (dua) tahun yaitu tahun 2022, karena periode Renstra dimulai pada tahun 2021, seperti pada Tabel 2.2. berikut:

Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo

No	Indikator	Target Renstra Tahun 2022	Realisasi Capaian Renstra Tahun 2022	Proyeksi Tahun 2023	Proyeksi Tahun 2024	Catatan Analisis
I.	**TUJUAN**					
1.	Skor Pola Pangan Harapan	93,6	93,8	93,8	93,9	Tercapai
II.	**SASARAN**					
1.	Tingkat Konsumsi Energi (Kalori) (%)	98,15	98,19	98,23	98,32	Tercapai
2.	Tingkat Konsumsi Protein (%)	96,49	96,49	97,89	98,95	Tercapai
3.	Penguatan Cadangan Pangan (%)	27	27	28	29	Tercapai
4.	Penanganan Daerah Rawan Pangan (%)	7,18	7,18	5,99	4,79	Tercapai
5.	Ketersediaan Pangan Utama (%)	214,6	258,44	218,8	222,8	Tercapai

No	Indikator	Target Renstra Tahun 2022	Realisasi Capaian Renstra Tahun 2022	Proyeksi Tahun 2023	Proyeksi Tahun 2024	Catatan Analisis
6.	Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan (%)	87,78	93,75	93,75	93,86	Tercapai
7.	Nilai SAKIP (Poin)	72,01	74,26	74,67	77,33	Tercapai*)

Catatan : *) Nilai Sakip yang dicantumkan adalah Nilai n-1 (Tahun 2021), karena Nilai Sakip tahun 2022 belum ada.

Dari analisis capaian kinerja dapat diketahui bahwa semua Indikator Kinerja mencapai target tahun 2022. Kondisi tersebut perlu dipertahankan agar tidak mengalami penurunan pada tahun-tahun yang akan datang, mengingat pangan merupakan kebutuhan pokok penduduk yang terpengaruh inflasi, dimana penduduk selalu bertumbuh setiap tahun, sehingga jumlahnya semakin meningkat. Kondisi tersebut harus diimbangi dengan pangan yang tersedia cukup, beragam, bergizi seimbang dan aman.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Permasalahan ketahanan pangan secara garis besar di Kabupaten Sukoharjo antara lain :

1. Konsumsi pangan masyarakat belum Ideal.

   Walaupun Skor Pola Pangan Harapan (PPH) pada tahun 2022 tercapai sebesar 93,8 % dari target tahun 2022 sebesar 93,6 %, tetapi Skor PPH ideal (100 %) tetap harus diupayakan karena semakin mendekati angka 100 % maka konsumsi pangan penduduk semakin beragam dan bergizi seimbang.

2. Belum mantapnya Cadangan Pangan

   Kabupaten Sukoharjo mempunyai Gudang Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten yang dikelola oleh Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo, untuk menyimpan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) Kabupaten yang berupa Gabah Kering Giling dengan kapasitas 100 Ton Ekuivalen Beras. Penguatan Gudang Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten selama kurun waktu 5 (lima) tahun adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3. Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 – 2021.

NO	URAIAN	2018	2019	2020	2021	2022	Ket.
1	Jumlah pengisian Gudang CPP (Ton)	-	-	23,3	26,155	27	Kapasitas Gudang CPP 100 ton ekuivalen beras

Dari Tabel 2.3. tersebut dapat disimpulkan bahwa Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten tersebut masih sangat terbatas jika dibandingkan dengan kapasitas Gudang sebesar 100 ton ekuivalen beras.

3. Masih terdapat kondisi kerawanan pangan dan Gizi

   Di Kabupaten Sukoharjo kondisi sampai dengan tahun 2022, masih terdapat kasus kerawanan pangan, yang ditimbulkan oleh adanya kasus rawan pangan dan masih terdapatnya daerah rawan pangan. Data tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.4. berikut :

Tabel 2.4. Jumlah Desa Rawan Pangan dan Jumlah Kasus Rawan Pangan di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022.

N0.	Uraian	Kondisi Tahun 2022	Kecamatan	Jumlah Desa Rawan Pangan	Keterangan
1.	Jumlah Desa Rawan Pangan	10 desa	Weru	1	Karangmojo
			Bulu	1	Malangan
			Tawangsari	1	Watubonang
			Sukoharjo	1	Bulakan
			Nguter	1	Serut
			Bendosari	1	Mertan
			Polokarto	2	Polokarto, Mranggen
			Mojolaban	1	Palur
			Grogol	1	Cemani
			Baki	1	Mancasan
			Gatak	1	Trangsan
2.	Jumlah Kasus Rawan Pangan dan gizi	1202 kasus		12	Tersebar di 12 kecamatan

Data awal jumlah Desa Rawan Pangan diambil dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Rilis 31 Oktober 2019 yang dipergunakan untuk pijakan awal pada saat penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021 – 2026 sebanyak 16 desa. Dengan adanya pemberdayaan pada 2 desa rawan pangan setiap tahun, maka pada tahun 2022 jumlah desa rawan pangan tetapi masih ada sebanyak 12 desa. Sedangkan kasus rawan pangan dan gizi sebanyak 1.202 kasus yang tersebar di 12 kecamatan.

4. Masih terdapat bahan pangan yang tidak “aman” di pasaran
   Dari Uji Laboratorium terhadap pangan segar asal tumbuhan dan pangan olahan, masih terdapat pangan yang mengandung bahan kimia berbahaya/bahan tambahan pangan yang tidak direkomendasikan untuk dikonsumsi masyarakat. Hasil dari uji laboratorium sebesar 93,75%, hal ini menunjukkan bahwa dari sampel pangan segar asal tumbuhan dan pangan olahan masih terdapat pangan yang tidak *“aman”* sebesar 6,25 %, prosentase bahan pangan yang tidak “aman” ini turun dibandingkan dengan tahun 2021 (tahun 2021 sebesar 6,52 %). Hal ini berarti bahwa keamanan pangan semakin meningkat.

Dari permasalahan yang ada maka dirumuskan ***Isu-Isu Strategis*** yang akan ditangani berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo yaitu sebagai berikut :

1. Konsumsi Pangan Masyarakat masih perlu ditingkatkan agar lebih Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman, dilihat dari Skor Pola Pangan Harapan (PPH) masih di bawah Skor PPH Ideal dan dari hasil pengawasan keamanan pangan (hasil uji laboratorium pangan segar asal tumbuhan serta pangan olahan) yang masih menunjukkan adanya pangan yang tidak “aman” di pasaran, walaupun semakin menurun prosentasenya.
2. Terbatasnya cadangan pangan pemerintah sehingga masih perlu peningkatan penguatan cadangan pangan pemerintah kabupaten. Disamping cadangan pangan pemerintah kabupaten, sangat penting untuk mengembangkan cadangan pangan masyarakat pada lumbung pangan masyarakat. Di Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2022 baru ada 20 desa yang mengelola lumbung pangan masyarakat dari 167 desa/kelurahan yang ada.
3. Masih terdapatnya daerah rawan pangan dan kasus rawan pangan yang perlu ditangani.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan ketahanan pangan nasional mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden yaitu Nawacita kedua “Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing”. Dalam upaya mendukung Nawacita kedua tersebut maka Badan Pangan Nasional menetapkan Misi, Tujuan dan Sasaran sebagai berikut :

Visi : “Terwujudnya tata kelola sistem pangan nasional yang inklusif, tangguh dan berkelanjutan untuk mencapai ketahanan pangan yang berlandaskan kedaulatan dan kemandirian pangan“.

Misi :

1. Menguatkan ketersediaan dan cadangan pangan
2. Memantapkan stabilitas pasokan dan harga pangan di produsen dan konsumen.
3. Mengentaskan kerawanan pangan dan gizi.
4. Menjamin keamanan dan mutu pangan segar.
5. Meningkatkan kualitas konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang.
6. Mengelola Badan Pangan Nasional yang bersih, efektif dan terpercaya.

Tujuan :

1. Peningkatan ketahanan pangan yang berlandaskan kedaulatan dan kemandirian pangan.
2. Peningkatan tata kelola organisasi Badan Pangan Nasional dalam mewujudkan organisasi yang transparan, akuntabel, professional, dan berintegritas tinggi dalam memberikan layanan kepada masyarakat.

Sasaran :

1. Terpenuhinya kebutuhan pangan secara optimal.
2. Terwujudnya stabilisasi pasokan dan harga pangan.
3. Terentaskannya kerawanan pangan dan gizi.

4. Terjaminnya keamanan dan mutu pangan segar
5. Meningkatkan kualitas konsumsi pangan masyarakat
6. Pengembangan data dan informasi pangan
7. Terwujudnya birokrasi Badan Pangan Nasional yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima

Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo sebagai pelaksana Urusan Pangan di Kabupaten Sukoharjo telah menetapkan Tujuan dan Sasaran guna mendukung kebijakan ketahanan pangan nasional, dengan langkah operasional yang dijabarkan dalam Program, Kegiatan, Sub Kegiatan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

1. Tujuan Renja Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo

Tujuan Strategis Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo dalam Rencana Kerja Dinas Pangan Tahun 2024 merupakan penjabaran dari tujuan strategis Renstra Dinas Pangan 2021 – 2026. Adapun tujuan strategis Renja Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 yaitu **"Terwujudnya Kualitas Konsumsi Pangan Masyarakat"** dengan indikator **Skor Pola Pangan Harapan (PPH)** yang ditargetkan sebesar **93,9%** pada tahun 2023.

2. Sasaran Renja Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo

Tujuan Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo didukung dengan upaya pencapaian sasaran. Adapun sasaran tahun 2024 adalah sebagai berikut :

a. Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan pangan yang berkualitas dengan indikator :
   1) Tingkat Konsumsi Energi (Kalori), dengan target : 98,32 %
   2) Tingkat Konsumsi Protein, dengan target : 98,85 %
   3) Penguatan Cadangan Pangan, target : 29 %
   4) Penanganan Daerah Rawan Pangan, target : 4,79 %
   5) Ketersediaan Pangan Utama, target : 222,8 %
   6) Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan, target : 93,86%

b. Meningkatnya kapasitas aparatur dan pelayanan publik dengan indikator Nilai SAKIP, target : 77,33.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pembangunan ketahanan pangan berupaya mewujudkan ketahanan pangan sampai tingkat perseorangan. Program aksi yang dilakukan dalam rangka mewujudkan konsumsi pangan masyarakat yang berkualitas, memenuhi konsumsi yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman tertuang dalam perencanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama satu tahun ke depan, yang terdiri dari program utama dan program penunjang (rutin). Usulan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan pada Sub Bab 3.3. ini sudah mengakomodir Keputusan Menter1 Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan daerah, pada indikator dan satuannya, sedangkan perangkaannya masih seperti Renstra Dinas Pangan Tahun 2021 – 2026, yang akan disesuaikan bersamaan dengan Reviu Renstra. Adapun Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Program Utama :
   a. PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN dengan rencana anggaran : Rp. 345.841.000,-
   b. PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN dengan rencana anggaran : Rp. 1.451.176.000,-
   c. PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN dengan rencana anggaran : Rp. 90.000.000,-
   d. PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN dengan rencana anggaran Rp. 57.386.000,-
2. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA dengan rencana anggaran sebesar Rp. 4.128.657.000,-

Total Anggaran dalam Renja Tahun 2024 sebesar Rp. 6.073.060.000,-

Adapun secara lengkap, rencana program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 4.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2024

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
					Dinas Pangan								6.073.060.000,00					6.972.378.000,00
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								6.073.060.000,00					6.972.378.000,00
2	09				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN								6.073.060.000,00					6.972.378.000,00
2	09	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								4.128.657.000,00					3.555.792.000,00
2	09	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								39.500.000,00					37.500.000,00
2	09	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Sukoharjo, Bendosari, Jombor	100 %	1 Dokumen	100 %	22.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	20.000.000,00
2	09	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD													
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Sukoharjo, Bendosari, Jombor	100 %	1 Dokumen	100 %	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	09	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD													
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Sukoharjo, Bendosari, Jombor	100 %	1 Dokumen	100 %	2.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2.500.000,00
2	09	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD													
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Sukoharjo, Bendosari, Jombor	100 %	1 Dokumen	100 %	2.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2.500.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	09	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD													
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Sukoharjo, Bendosari, Jombor	100 %	1 Dokumen	100 %	2.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	2.500.000,00
2	09	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Sukoharjo, Bendosari, Jombor	100 %	3 Laporan	100 %	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	5.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	09	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Sukoharjo, Bendosari, Jombor	100 %	0 Laporan	100 %	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0 Laporan	0,00
2	09	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								3.583.843.000,00					2.724.527.000,00
2	09	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Sukoharjo, Bendosari, Jombor	100 %	23 Orang/bulan	100 %	3.417.779.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23 Orang/bulan	2.558.513.000,00
2	09	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD													
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Sukoharjo, Bendosari, Jombor	100 %	12 Dokumen	100 %	159.564.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	159.514.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	09	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD													
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Sukoharjo, Bendosari, Jombor	100 %	3 Laporan	100 %	3.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 Laporan	3.000.000,00
2	09	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD													
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Sukoharjo, Bendosari, Jombor	100 %	12 Laporan	100 %	3.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	3.500.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	09	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								26.000.000,00					46.900.000,00
2	09	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya													
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Sukoharjo, Bendosari, Jombor	100 %	31 Paket	100 %	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	31 Paket	18.900.000,00
2	09	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian													
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Sukoharjo, Bendosari, Jombor	100 %	4 Dokumen	100 %	2.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 Dokumen	2.000.000,00
2	09	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi													
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Sukoharjo, Bendosari, Jombor	100 %	23 Orang	100 %	24.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	23 Orang	26.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	09	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								159.527.000,00					172.000.000,00
2	09	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Sukoharjo, Bendosari, Jombor	100 %	4 Paket	100 %	3.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	3.000.000,00
2	09	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Sukoharjo, Bendosari, Jombor	100 %	6 Paket	100 %	7.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6 Paket	7.000.000,00
2	09	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Sukoharjo, Bendosari, Jombor	100 %	12 Paket	100 %	45.764.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	45.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	09	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Sukoharjo, Bendosari, Jombor	100 %	12 Paket	100 %	9.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	9.000.000,00
2	09	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu													
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Sukoharjo, Bendosari, Jombor	100 %	6 Laporan	100 %	7.200.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	6 Laporan	8.000.000,00
2	09	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Sukoharjo, Bendosari, Jombor	100 %	60 Laporan	100 %	87.563.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	100.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	09	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								0,00					275.000.000,00
2	09	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Sukoharjo, Bendosari, Jombor	100 %	2 Unit	100 %	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit	275.000.000,00
2	09	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel													
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Sukoharjo, Bendosari, Jombor	100 %	0 Unit	100 %	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit	0,00
2	09	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Sukoharjo, Bendosari, Jombor	100 %	0 Unit	100 %	0,00	-		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	09	01	2.07	0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya													
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Sukoharjo, Bendosari, Jombor	100 %	0 Unit	100 %	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0,00
2	09	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								146.012.000,00					131.600.000,00
2	09	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sukoharjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	4 Laporan	100 %	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	5.000.000,00
2	09	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sukoharjo, Bendosari, Jombor	100 %	4 Laporan	100 %	4.400.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	3.600.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	09	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sukoharjo, Bendosari, Jombor	100 %	12 Laporan	100 %	136.612.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	123.000.000,00
2	09	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								173.775.000,00					168.265.000,00
2	09	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sukoharjo, Bendosari, Jombor	100 %	18 Unit	100 %	153.775.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	18 Unit	148.265.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	09	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sukoharjo, Bendosari, Jombor	100 %	0 Unit	100 %	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	0 Unit	0,00
2	09	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sukoharjo, Bendosari, Jombor	100 %	15 Unit	100 %	10.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	10.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	09	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sukoharjo, Bendosari, Jombor	100 %	2 Unit	100 %	10.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 Unit	10.000.000,00
2	09	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN								345.841.000,00					232.406.000,00
2	09	02	2.01		Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota								345.841.000,00					232.406.000,00
2	09	02	2.01	0003	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya													
						Prosentase Desa/Kelurahan yang mengelola Lumbung Pangan	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	Jenis Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan yang dibangun	Kab. Sukoharjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11,97 %	1 Unit	2 jns	275.841.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	1 Unit	125.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	09	02	2.01	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik													
						Prosentase Desa/Kelurahan yang mengelola Lumbung Pangan	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	Jenis Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan yang dibangun	Kab. Sukoharjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11,97 %	24 Laporan	2 jns	70.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	24 Laporan	107.406.000,00
2	09	03			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT								1.451.176.000,00					2.739.100.000,00
2	09	03	2.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan								282.434.000,00					1.283.330.000,00
2	09	03	2.01	0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal													
						Prosentase Ketersediaan Energi (Kalori) Koefisien Variasi Harga Pangan Strategis: Cabe Koefisien Variasi Harga Pangan Strategis:	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	Jenis bahan pangan pokok/pangan lainnya yang dipantau dan dianalisis ketersediaan dan harganya secara berkala Jenis bahan pangan pokok/pangan lainnya yang disediakan	Kab. Sukoharjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	125,54 % 46,8 % 21,2 % 6,1 %	0 Laporan	9 jns 3 jns	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	0 Laporan	0,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						Bawang Merah Koefisien Variasi Harga Pangan Strategis: Telur												
2	09	03	2.01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya													
						Prosentase Ketersediaan Energi (Kalori)Koefisien Variasi Harga Pangan Strategis: CabeKoefisien Variasi Harga Pangan Strategis: Bawang MerahKoefisien Variasi Harga Pangan Strategis: Telur	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jenis bahan pangan pokok/pangan lainnya yang dipantau dan dianalisis ketersediaan dan harganya secara berkalaJenis bahan pangan pokok/pangan lainnya yang disediakan	Kab. Sukoharjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	125,54 %46,8 %21,2 %6,1 %	12 Laporan	9 jns3 jns	65.623.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	12 Laporan	408.070.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	09	03	2.01	0006	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia													
						Prosentase Ketersediaan Energi (Kalori) Koefisien Variasi Harga Pangan Strategis: Cabe Koefisien Variasi Harga Pangan Strategis: Bawang Merah Koefisien Variasi Harga Pangan Strategis: Telur	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan	Jenis bahan pangan pokok/pangan lainnya yang dipantau dan dianalisis ketersediaan dan harganya secara berkala Jenis bahan pangan pokok/pangan lainnya yang disediakan	Kab. Sukoharjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	125,54 % 46,8 % 21,2 % 6,1 %	1 Unit	9 jns 3 jns	71.811.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan	1 Unit	436.540.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	09	03	2.01	0010	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota													
						Prosentase Ketersediaan Energi (Kalori) Koefisien Variasi Harga Pangan Strategis: Cabe Koefisien Variasi Harga Pangan Strategis: Bawang Merah Koefisien Variasi Harga Pangan Strategis: Telur	Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan	Jenis bahan pangan pokok/pangan lainnya yang dipantau dan dianalisis ketersediaan dan harganya secara berkala Jenis bahan pangan pokok/pangan lainnya yang disediakan	Kab. Sukoharjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	125,54 % 46,8 % 21,2 % 6,1 %	36 Unit	9 jns 3 jns	50.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan	36 Unit	173.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	09	03	2.01	0014	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis													
						Prosentase Ketersediaan Energi (Kalori) Koefisien Variasi Harga Pangan Strategis: Cabe Koefisien Variasi Harga Pangan Strategis: Bawang Merah Koefisien Variasi Harga Pangan Strategis: Telur	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis	Jenis bahan pangan pokok/pangan lainnya yang dipantau dan dianalisis ketersediaan dan harganya secara berkala Jenis bahan pangan pokok/pangan lainnya yang disediakan	Kab. Sukoharjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	125,54 % 46,8 % 21,2 % 6,1 %	12 Laporan	9 jns 3 jns	60.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis	12 Laporan	218.270.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	09	03	2.01	0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)													
						Prosentase Ketersediaan Energi (Kalori) Koefisien Variasi Harga Pangan Strategis: Cabe Koefisien Variasi Harga Pangan Strategis: Bawang Merah Koefisien Variasi Harga Pangan Strategis: Telur	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	Jenis bahan pangan pokok/pangan lainnya yang dipantau dan dianalisis ketersediaan dan harganya secara berkala Jenis bahan pangan pokok/pangan lainnya yang disediakan	Kab. Sukoharjo, Tawangsari, Kateguhan Kab. Sukoharjo, Sukoharjo, Sukoharjo Kab. Sukoharjo, Mojolaban, Bekonang Kab. Sukoharjo, Kartasura, Kartasura	125,54 % 46,8 % 21,2 % 6,1 %	2 Dokumen	9 jns 3 jns	35.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	2 Dokumen	47.450.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	09	03	2.02		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota								191.015.000,00					219.223.000,00
2	09	03	2.02	0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota													
						Koefisien Variasi Harga Pangan Strategis: TelurProsentase Ketersediaan Energi (Kalori)Koefisien Variasi Harga Pangan Strategis: Bawang MerahKoefisien Variasi Harga Pangan Strategis: Cabe	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/ Kota	Cadangan pangan pemerintah kabupaten yang dikelola	Kab. Sukoharjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6,1 %125,54 %21,2 %46,8 %	29 Ton	100 %	171.235.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/ Kota	29 Ton	186.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	09	03	2.02	0004	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota													
						Koefisien Variasi Harga Pangan Strategis: Telur Prosentase Ketersediaan Energi (Kalori) Koefisien Variasi Harga Pangan Strategis: Bawang Merah Koefisien Variasi Harga Pangan Strategis: Cabe	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/ Kota yang Terpelihara	Cadangan pangan pemerintah kabupaten yang dikelola	Kab. Sukoharjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6,1 % 125,54 % 21,2 % 46,8 %	29 Ton	100 %	3.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/ Kota yang Terpelihara	29 Ton	14.243.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	09	03	2.02	0005	Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota													
						Koefisien Variasi Harga Pangan Strategis: Telur Prosentase Ketersediaan Energi (Kalori) Koefisien Variasi Harga Pangan Strategis: Bawang Merah Koefisien Variasi Harga Pangan Strategis: Cabe	Jumlah penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	Cadangan pangan pemerintah kabupaten yang dikelola	Kab. Sukoharjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6,1 % 125,54 % 21,2 % 46,8 %	2 Ton	100 %	16.780.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	2 Ton	18.980.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	09	03	2.04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi								977.727.000,00					1.236.547.000,00
2	09	03	2.04	0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun													
						Koefisien Variasi Harga Pangan Strategis: Bawang Merah Koefisien Variasi Harga Pangan Strategis: Telur Koefisien Variasi Harga Pangan Strategis: Cabe Prosentase Ketersediaan Energi (Kalori)	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Angka Konsumsi Energi (kalori)	Kab. Sukoharjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21,2 % 6,1 % 46,8 % 125,54 %	1 Dokumen	2113,9 KKal/Kap/ Hari	11.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	1 Dokumen	12.337.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	09	03	2.04	0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal													
						Koefisien Variasi Harga Pangan Strategis: Bawang Merah Koefisien Variasi Harga Pangan Strategis: Telur Koefisien Variasi Harga Pangan Strategis: Cabe Prosentase Ketersediaan Energi (Kalori)	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Angka Konsumsi Energi (kalori)	Kab. Sukoharjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21,2 % 6,1 % 46,8 % 125,54 %	26 Laporan	2113,9 KKal/Kap/ Hari	958.227.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	26 Laporan	1.214.720.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	09	03	2.04	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun													
						Koefisien Variasi Harga Pangan Strategis: Bawang Merah Koefisien Variasi Harga Pangan Strategis: Telur Koefisien Variasi Harga Pangan Strategis: Cabe Prosentase Ketersediaan Energi (Kalori)	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	Angka Konsumsi Energi (kalori)	Kab. Sukoharjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21,2 % 6,1 % 46,8 % 125,54 %	2 Laporan	2113,9 KKal/Kap/ Hari	8.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	2 Laporan	9.490.000,00
2	09	04			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN								90.000.000,00					351.130.000,00
2	09	04	2.02		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota								90.000.000,00					351.130.000,00
2	09	04	2.02	0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						Prosentase Desa/Kelurahan Rawan Pangan yang Ditangani	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jenis penanganan kasus rawan pangan	Kab. Sukoharjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	62,5 %	1 Dokumen	2 jns	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	1 Dokumen	18.980.000,00
2	09	04	2.02	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota													
						Prosentase Desa/Kelurahan Rawan Pangan yang Ditangani	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/ kota	Jenis penanganan kasus rawan pangan	Kab. Sukoharjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	62,5 %	2 Laporan	2 jns	17.695.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/ kota	2 Laporan	237.250.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	09	04	2.02	0005	Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota													
						Prosentase Desa/Kelurahan Rawan Pangan yang Ditangani	Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/ Kota	Jenis penanganan kasus rawan pangan	Kab. Sukoharjo, Bendosari, Jombor	62,5 %	13 Dokumen	2 jns	72.305.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/ Kota	13 Dokumen	94.900.000,00
2	09	05			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN								57.386.000,00					93.950.000,00
2	09	05	2.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota								57.386.000,00					93.950.000,00
2	09	05	2.01	0004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota													
						Prosentase Jenis Pangan yang Dilakukan Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah pangan segar daerah yang dilakukan pengawasan	Kab. Sukoharjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	37,5 %	0 Dokumen	11 jns	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/ Kota	0 Dokumen	0,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	09	05	2.01	0006	Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan													
						Prosentase Jenis Pangan yang Dilakukan Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	Jumlah pangan segar daerah yang dilakukan pengawasan	Kab. Sukoharjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	37,5 %	6 Dokumen	11 jns	16.186.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	6 Dokumen	28.000.000,00
2	09	05	2.01	0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota													
						Prosentase Jenis Pangan yang Dilakukan Pengawasan	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/ kota	Jumlah pangan segar daerah yang dilakukan pengawasan	Kab. Sukoharjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	37,5 %	2 Dokumen	11 jns	11.200.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/ kota	2 Dokumen	18.500.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	09	05	2.01	0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan													
						Prosentase Jenis Pangan yang Dilakukan Pengawasan	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah pangan segar daerah yang dilakukan pengawasan	Kab. Sukoharjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	37,5 %	1 Dokuman	11 jns	30.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	1 Dokuman	47.450.000,00
												TOTAL	**6.073.060.000,00**					**6.972.378.000,00**

BAB V

P E N U T U P

Rencana Kerja Dinas Pangan Tahun 2024, disusun berdasarkan penyesuaian dari Rancangan awal Renja Dinas Pangan Tahun 2024, yang telah dilakukan pencermatan sampai pada sub kegiatan dan anggaran. Renja Dinas Pangan Tahun 2024 ini akan menjadi pedoman bagi Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2024, dalam melaksanakan pembangunan ketahanan pangan di Kabupaten Sukoharjo guna mencapai **Terwujudnya kualitas konsumsi pangan masyarakat**, dalam upaya mendukung tujuan pembangunan Kabupaten Sukoharjo yaitu Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas Dan Insklusif.

Tahun 2024 merupakan tahun ketiga RPJMD Kabupaten Sukoharjo, periode Renstra Dinas Pangan Tahun 2021 – 2026. Diperlukan pengambilan kebijakan yang sesuai dengan mempertimbangkan prioritas program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan guna pencapaian tujuan dan sasaran pada tahun 2024, yang akan berpengaruh pada pencapaian tujuan dan sasaran pada tahun-tahun perencanaan yang akan datang. Sub Kegiatan yang berbasis pemberdayaan masyarakat / kelompok masyarakat menjadi prioritas pada tahun 2024, untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam membangun kemandirian pangan rumah tangganya dan mendukung perbaikan kondisi perekonomian masyarakat pasca pandemi Covid 19 dan pengaruh inflasi yang mengakibatkan terganggunya stabilitas pasokan dan harga pangan. Dengan kemandirian pangan di tingkat rumah tangga akan terwujud ketahanan pangan rumah tangga, lebih lanjut akan memperkuat ketahanan pangan regional dan nasional.

Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pangan nantinya akan berkontribusi pada keberhasilan pembangunan daerah Kabupaten Sukoharjo yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh semua Perangkat Daerah dan Stake Holder serta masyarakat Kabupaten Sukoharjo.

Sukoharjo, 2023

BUPATI SUKOHARJO

Hj. ETIK SURYANI,SE.,MM.

RENCANA KERJA (RENJA)

KECAMATAN POLOKARTO

TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan Karunianya, kami telah dapat menyelesaikan penyusuan Rancana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kecamatan Polokarto Tahun 2024. RENJA Perangkat Daerah Tahun 2024 merupakan bentuk komitemen nyata Perangkat Daerah Kecamatan Polokarto dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan Perangkat Daerah yang baik sebagai mana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

RENJA adalah wujud perencanaan dokumen Perangkat Daerah dalam satu tahun anggaran. Proses rencana kegiatan dan pengaggaran Perangkat Daerah Kecamatan Polokarto telah disusun dalam Rencana Kerja (RENJA) tahun 2024.

Adapun tujuan penyusunan renja adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah, dalam bentuk rancana tahunan. Melalui penyusunan Renja juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsi *good governance*, yaitu dalam rangka terwujudnya perencanaan yang baik dan benar-benar terprogram.

Demikian Laporan RENJA ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Polokarto, Maret 2023

CAMAT POLOKARTO

KABUPATEN SUKOHARJO



HERY MULYADI, SE

Pembina

NIP. 19690712 199603 1 002

DAFTAR ISI

Cover .....

Kata Pengantar .....

Daftar Isi.....

BAB I PENDAHULUAN.....

1.1 Latar Belakang .....

1.2 Landasan Hukum .....

1.3 Maksud dan Tujuan.....

1.4 Sistematika Penulisan.....

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN LALU .....

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah .....

2.2 Analisis Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah… .....

2.3 Isu–isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD....

2.4 Review terhadap Rancangan Awal PD .....

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan masyarakat ....

BAB III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

3.1 Tujuan Renja OPD .....

3.2 Sasaran Renja OPD .....

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah .....

BAB V PENUTUP.....

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah perencanaan Perangkat Daerah untuk pereode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja Perangkat Daerah merupakan sebuah dokomen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya. Renja Perangkat Daerah memiliki fungsi yang sangat fondamental dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja Perangkat Daerah merupakan produk perencanaan pada Unit Organesasi pemerintah terendah dan terkecil. Renja Perangkat Daerah berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kualtitas penyusunan Renja Perangkat Daerah sangatlah menentukan pada kualitas pelayanan pada publik.

Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dimulai dengan persiapan penyusunan Renja Perangkat Daerah dengan mengumpulkan data dan informasi. Menganalisa gambaran pelayanan

Perangkat Daerah untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu berdasrkan Renstra Perangkat Daerah yang didasarkan pada penelaahan rancangan awal RKPD. Selanjutnya menjadi perumusan kegiatan prioritas yang juga didasarkan kepada penelaahan usulan kegiatan masyarakat.

Prinsip-prinsip di dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah, adalah sebagai berikut.

a. Berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan mengacu pada rancangan awal RKPD;
b. Rumusan program/kegiatan di dalam Renja Perangkat Daerah didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing Perangkat Daerah;
c. Penyusunan bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta memrupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD;
d. Rumusan program/kegiatan di dalam Renja Perangkat Daerah didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas

penangan dan mempertimbangkan pagu indikatif Perangkat Daerah;

e. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolak ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun n dan tahun n+1.

Keterkaitan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD dan Renstra Perangkat Daerah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena didalam Renja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD, Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Renja Perangkat Daerah merupakan masukan utama bagi penyusunan KUA, PPAS, RKA Perangkat Daerah, dan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Dasar Hukum Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 sebagai berikut.

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4421);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024;
13. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19 di Indonesia;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kodefikasi, Klasifikasi Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Renstra Kemendagri;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005-2025;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah;
23. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
24. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 82 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Staf Ahli Bupati, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat dan Kecamatan;

1.3 Maksud dan Tujuan

Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Polokarto Tahun 2024 merupakan dokumen resmi perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk 1 (satu) tahun ke depan, yang dimulai tanggal 1 Januari 2024 dan berakhir tanggal 31 Desember 2024, serta menggambarkan capaian kinerja yang dapat ditransformasikan ke dalam Renja Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah. Sedangkan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Polokarto adalah :

1. Mendeskripsikan tentang program-program prioritas yang akan dilaksanakan langsung oleh Perangkat Daerah Kecamatan Polokarto;
2. Program-program tersebut dapat terlaksana sesuai yang diharapkan dengan menitikberatkan pada program-program prioritas.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Polokarto Tahun 2024 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut.

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renja, landasan hukum penyusunan Renja, maksud dan tujuan penyusunan Renja, dan sistematika penulisan dokumen Renja.

Bab II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah. Analisa kinerja pelayanan Perangkat Daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, review terhadap Rancangan Awal Perangkat Daerah dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Bab ini memuat penelaahan terhadap kebijakan Nasional, tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah serta program dan kegiatan.

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab ini memuat Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab V Penutup

Memuat kata-kata penutup dan kaidah-kaidah di dalam pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu Dan Capaian Program Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan OPD untuk 1 (satu) periode yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja Kecamatan Polokarto menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dan hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kecamatan Polokarto selama tahun 2022.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Polokarto Tahun 2022 digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Selain itu, evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Polokarto Tahun 2022 dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja Kecamatan Polokarto Tahun 2022 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Kecamatan Polokarto Tahun 2021-2026 serta sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022.

Adapun realisasi program dan kegiatan tahun 2022 adalah sebagai berikut.

Tabel 2.1

Realisasi Keuangan Tahun Anggaran 2022

KODE REKENING	NAMA PROGRAM/ KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI KEUANGAN	%
1	2	3	6	7
	KECAMATAN POLOKARTO	**3.577.911.924**	**3.335.434.021**	**93,22%**
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**3.020.211.924**	**2.778.078.021**	**91,98%**
4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23.700.000	23.638.000	99,74%
4.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.900.000	8.900.000	100,00%
4.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.450.000	2.434.000	99,35%
4.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.500.000	2.484.000	99,36%
4.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.500.000	2.500.000	100,00%
4.02.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2.350.000	2.350.000	100,00%
4.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.500.000	2.470.000	98,80%
4.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.500.000	2.500.000	100,00%
4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.942.857.000	1.717.250.218	88,39%
4.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.844.797.000	1.619.232.218	87,77%
4.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	89.760.000	89.760.000	100,00%
4.02.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2.200.000	2.200.000	100,00%
4.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.250.000	2.236.000	99,38%

KODE REKENING	NAMA PROGRAM/ KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI KEUANGAN	%
1	2	3	6	7
4.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.550.000	1.536.000	99,10%
4.02.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2.300.000	2.286.000	99,39%
4.02.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4.750.000	4.750.000	100,00%
4.02.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	4.750.000	4.750.000	100,00%
4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	239.272.000	237.480.600	99,25%
4.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.000.000	20.000.000	100,00%
4.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.000.000	7.900.000	98,75%
4.02.01.2.06.04	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	18.000.000	18.000.000	100,00%
4.02.01.2.06.05	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	146.913.000	146.898.000	99,99%
4.02.01.2.06.06	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12.597.000	12.594.500	99,98%
4.02.01.2.06.08	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.000.000	3.375.000	67,50%
4.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	28.762.000	28.713.100	99,83%
4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	122.990.000	122.200.000	99,36%
4.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	19.000.000	18.400.000	96,84%
4.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	46.290.000	46.200.000	99,81%
4.02.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	48.400.000	48.400.000	100,00%
4.02.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9.300.000	9.200.000	98,92%
4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	197.642.924	187.986.203	95,11%
4.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.375.000	4.375.000	100,00%

KODE REKENING	NAMA PROGRAM/ KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI KEUANGAN	%
1	2	3	6	7
4.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	54.000.000	51.716.203	95,77%
4.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	139.267.924	131.895.000	94,71%
4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	489.000.000	484.773.000	99,14%
4.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	70.000.000	69.950.000	99,93%
4.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	15.000.000	15.000.000	100,00%
4.02.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	6.000.000	6.000.000	100,00%
4.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.000.000	14.970.000	99,80%
4.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	140.000.000	138.112.000	98,65%
4.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	48.000.000	48.000.000	100,00%
4.02.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	195.000.000	192.741.000	98,84%
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**19.000.000**	**18.950.000**	**99,74%**
4.02.01.2.16	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	19.000.000	18.950.000	99,74%
4.02.01.2.16.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	9.500.000	9.480.000	99,79%

KODE REKENING	NAMA PROGRAM/ KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI KEUANGAN	%
1	2	3	6	7
4.02.01.2.16.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	9.500.000	9.470.000	99,68%
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**88.900.000**	**88.840.000**	**99,93%**
4.02.01.2.19	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	15.600.000	15.600.000	100,00%
4.02.01.2.19.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	7.800.000	7.800.000	100,00%
4.02.01.2.19.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7.800.000	7.800.000	100,00%
4.02.01.2.21	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	73.300.000	73.240.000	99,92%
4.02.01.2.21.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	60.000.000	59.960.000	99,93%
4.02.01.2.21.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	13.300.000	13.280.000	99,85%
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	25.600.000	25.555.000	99,82%
4.02.01.2.23	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	16.600.000	16.600.000	100,00%
4.02.01.2.23.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	8.800.000	8.800.000	100,00%
4.02.01.2.23.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	7.800.000	7.800.000	100,00%
4.02.01.2.24	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	9.000.000	8.955.000	99,50%

KODE REKENING	NAMA PROGRAM/ KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI KEUANGAN	%
1	2	3	6	7
4.02.01.2.24.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	9.000.000	8.955.000	99,50%
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**356.000.000**	**355.836.000**	99,95%
4.02.01.2.27	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	356.000.000	355.836.000	99,95%
4.02.01.2.27.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	190.000.000	189.846.000	99,92%
4.02.01.2.27.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	166.000.000	165.990.000	99,99%
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**68.200.000**	**68.175.000**	**99,96%**
4.02.01.2.28	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	68.200.000	68.175.000	99,96%
4.02.01.2.28.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	7.400.000	7.380.000	99,73%
4.02.01.2.28.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	7.450.000	7.450.000	100,00%
4.02.01.2.28.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	9.000.000	9.000.000	100,00%
4.02.01.2.28.08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	9.250.000	9.245.000	99,95%
4.02.01.2.28.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	7.600.000	7.600.000	100,00%

KODE REKENING	NAMA PROGRAM/ KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI KEUANGAN	%
1	2	3	6	7
4.02.01.2.28.12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	7.500.000	7.500.000	100,00%
4.02.01.2.28.13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	20.000.000	20.000.000	100,00%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan tugasnya Kecamatan Polokarto mengacu pada tugas Camat yaitu membantu Bupati dalam menggkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan keluarahan, serta fungsi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Staf Ahli Bupati, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat dan Kecamatan. Tugas dan fungsi tersebut dilaksanakan menurut kedudukan masing-masing dalam struktur organisasi yang ada di Kecamatan Polokarto. Tugas pokok dan fungsi Kecamatan tersebut adalah

a. Camat

Tugas Camat membantu dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, dan

Pemberdayaan masyarakat desa dan kalurahan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Camat mempunyai fungsi :

1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
2. Pengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Pengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Pengoordinasikan penerapan dan pengakan Peraturan Daerahdan Peraturan Bupati.
5. Pengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Pengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yangdilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
7. Pembinaan dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa
8. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan;
9. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan Kecamatan; dan
10. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Sekretariat Kecamatan

Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh seorang Sekretaris Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan konsep dan pelaksananan kebijakan, pengoordinasiaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi keuangan, hukum, informasi, kehumasan,keoorganesasian dan ketatalaksanaan, pembinanan ketatusahaan, kearsipan kerumahtanggaan, kepegawaian, pengelolaan dan penatausahaan aset, dan pelayanan administrasi di lingkunganKecamatan. Dalam melaksanakan tugas Sekretariat Kecamatan mempunyai fungsi :

1. Pengoordinasian penyusunan kebiajkan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Kecamatan;
2. Pembinaan dan pemeberian dukungan administrasi yang meliputi keuangan, hukum, hubungan masyarakat, ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, dan pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan;
    a. Pengoordinasian, pembinaan dan penataan organesasi dan tata laksana di lingkungan Kecamatan;
    b. Pengoordinasiaan dan penyusunan peraturan perundang-unangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Kecamatan;
    c. Pengoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern

pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;

d. Penyelenggaraan dan penatausahaan aset dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingukungan Kecamatan;

e. Pelaksananan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;

f. Pengelolaan kepegawaian di lingkungan Kecamatan; dan

g. Pelaksananan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinansesuai dengan fungsinya.

c. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian berada dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Camat yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang perencanaan, data informasi, dan program kerja, dan pengelolaan keuangan di lingkungan Kecamatan.

d. Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Subbagian berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Camat yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemanatauan, evaluasi serta pelaporanyang meliputi pembinaan ketatausahaan , hukum, kehumasan, keorganesasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, kearsipan, kepegawaian, pengelolaan dan penatausahaan aset dan pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan.

e. Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat yang mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksananan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang pemerintahan umum dan desa meliputi administrasi kependudukan, dan meningkatkan kemadirian politik, monograafi kecamatan, pengisian Perangkat Desa dan Kepala Desa, pembinanan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa, pembinaan Badan Perwakilan Desa dan Lembaga Kemasyaraakatan Desa serta pelaksananan kegiatan baik di tingkat internal Kecamatan maupun dengan pihak terkait dan

pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat sebagai urusan otonomi daerah di bidang pemerintahan.

f. Seksi Keamanan dan Ketertiban.

Seksi Keamanan dan Ketertiban dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat yang mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksananan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang ketenteraman dan ketertiban wilayah serta pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat meliputi penanggulangan bencana alam, dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta pelaksanaan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat sebagian urusan otonomi daerah di bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

g. Seksi Pemerdayaan Masyarakat Desa

Seksi Pemerdayaan Masyarakat Desa dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat yang mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksananan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang pembangunan,

pemberdayaan masyarakat, perekonomian desa, produksi dan disstribusi dan pelaksanaan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camatsebagian urusan otonomi daerah di bidang pemberdayaan masyarakat desa.

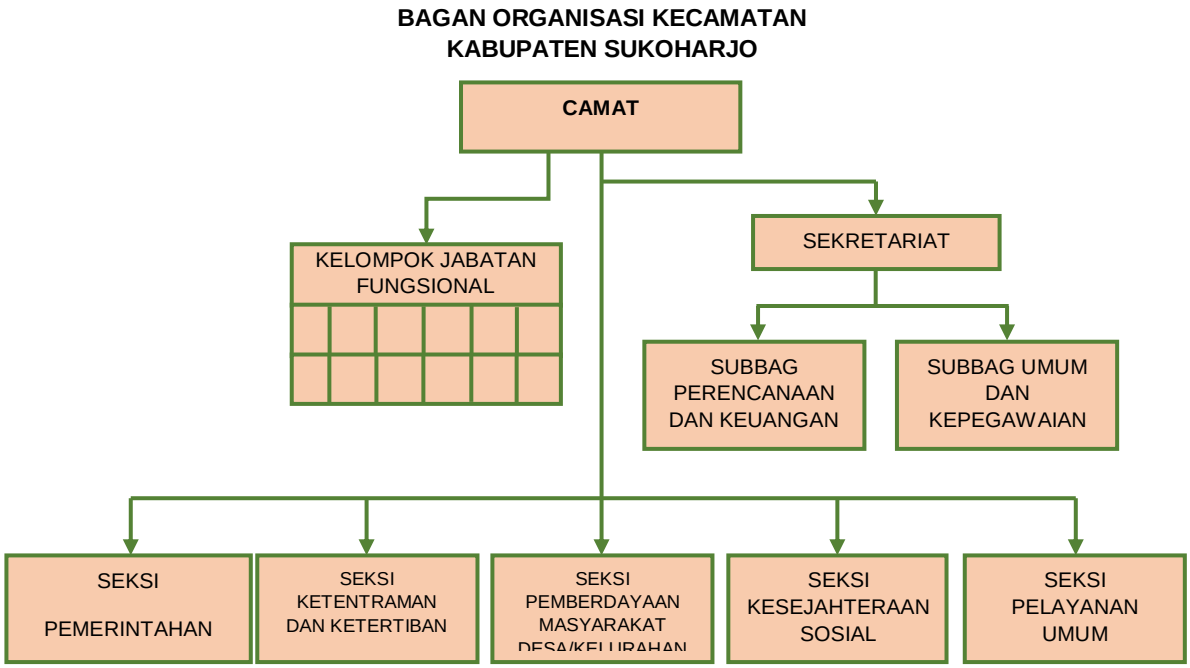
h. Seksi Kesejahteraan Sosial

Seksi Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat yang mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksananan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang kesejahteraan sosial yang meliputi masalah sosial, kepemudaan, peranan wanita, olah raga, kehidupan keagamaan, kebudayaan dan kesehatan, peningkatan kualitas sumber daya perangkat desa, lembaga desa dan pemberian bantuan sosial serta program pengentasan kemiskinan serta pelaksanaan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat sebagian urusan otonomi daerah di bidang kesejahteraan sosial.

j. Seksi Pelayanan Umum

Seksi Pelayanan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat yang mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan,

pengoordinasian, pelaksananan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang Pelayanan Umum yang meliputi inventarisasi data kekayaan desa,dan sarana prasarana desa, kebersihan lingkungan yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat, pelayanan kependudukan, kebersihan lingkungan, perizinan peningkatan sarana dan prasarana fasilitas umum dan pelayanan umum administrasi kependudukan, pelayanan administrasi terpadu kecamatan, percepatan pencapaian standar pelayanan minimal serta pelaksanaan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat sebagian urusan otonomi daerah di bidang Pelayanan Umum.



Gambar. 1 Struktur Organisasi Kecamatan Polokarto

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja palayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Kecamatan Polokarto dilakukan terhadap penilaian capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan.

IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah yang mengacu pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026. Secara rinci, capaian IKU Kecamatan Polokarto disajikan pada tabel berikut.

INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN POLOKARTO

Kode	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah (Tujuan/Sasaran)	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal	TARGET DAN CAPAIAN RENSTRA PD							
					2021	Capaian 2021	2022	Capaian 2022	2023	2024	2025	2026
Kecamatan Polokarto												
1	Terwujudnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Responsif dan Akuntabel	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	angka	81,18	78	86,48	83	87,54	84	85	86	87
1.1	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	Persentase Peningkatan Pelayanan Kecamatan	%	98,11	100	94,49	100	72,97	100	100	100	100
1.2	Meningkatnya kualitas aparatur dan pelayanan publik	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	angka	32,26	32	57,75	45		50	60	65	70

: untuk diisi kondisi awal, capaian tahun 2021 dan capaian tahun 2022

: dan dicek/ dibenarkan kembali tujuan/sasaran, indikator serta angkanya sesuai kesepakatan Desk kemarin

Program–program yang dilaksanakan pada tahun tahun 2022 yaitu:

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
4) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
5) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
6) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Program–program tersebut dilaksanakan dalam rangka memenuhi tugas untuk melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa.

PD Kecamatan merupakan representasi Pemerintah pada tingkat bawah, yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, menjadi pihak yang paling dekat dengan masyarakat. Melaksanakan tugas pelayanan publik yang paling dekat dengan masyarakat bukanlah hal yang mudah yang bisa dilalui tanpa ada hambatan dan permasalahan–permasalahan. Hambatan dan permasalahan yang ada dapat diselesaikan dengan kerjasama antara pegawai di lingkungan Kecamatan Polokarto.

Pencapaian indikator kinerja yang telah dilakukan Kecamatan Polokarto berdasarkan tugas dan fungsinya dalam rangka pencapaian indikator kinerja daerah, sesuai dengan tugasnya dalam melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat kelurahan, tampak dalam tabel berikut.

Tabel 2.2

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN POLOKARTO

KABUPATEN SUKOHARJO

NO	Program dan Kegiatan	Indikator kinerja Program dan Kegiatan sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangangkat Daerah Tahun ke -						Reaaliasasi Capaian Tahun ke -						Rasio Capaian pada tahun ke-					
						2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2		3	4	5	6	7	8	9		10	6	7	8	9		10	6	7	8	9		10
I	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Pablik	-	1 tahun	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan	Cakupan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kec	-	1 tahun	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Penyelenggaraan Urusan Permerinthan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Cakupan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kec	-	1 tahun	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	-	1 tahun	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Cakupan Koordinasi Kegiatan	-	1 tahun	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

NO	Program dan Kegiatan	Indikator kinerja Program dan Kegiatan sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangangkat Daerah Tahun ke -						Reaaliasasi Capaian Tahun ke -						Rasio Capaian pada tahun ke-					
						2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2		3	4	5	6	7	8	9		10	6	7	8	9		10	6	7	8	9		10
		Pemberdayaan Desa																					
5	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Cakupan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	1 tahun	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Capaian Ketentraman dan Keteriban Umum	-	1 tahun	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	jumlah koordinasi dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	-	1 tahun	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8	Koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	jumlah koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	-	1 tahun	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	-	1 tahun	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

NO	Program dan Kegiatan	Indikator kinerja Program dan Kegiatan sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangangkat Daerah Tahun ke -						Reaaliasasi Capaian Tahun ke -						Rasio Capaian pada tahun ke-					
						2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2		3	4	5	6	7	8	9		10	6	7	8	9		10	6	7	8	9		10
10	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	jumlah urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yg diselenggarakan	-	1 tahun	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
II	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	CakupanPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	1 tahun	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
11	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
22	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Perangkat Daerah	-	1 tahun	-	100%	100%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	0%
V	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Penyusunan Perencanaan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	1 tahun	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

NO	Program dan Kegiatan	Indikator kinerja Program dan Kegiatan sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangangkat Daerah Tahun ke -						Reaaliasasi Capaian Tahun ke -						Rasio Capaian pada tahun ke-					
						2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2		3	4	5	6	7	8	9		10	6	7	8	9		10	6	7	8	9		10
23	Administrasin Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Penyusunan Perencanaan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	1 tahun	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
24	Administrasin Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Penyusunan Perencanaan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	1 tahun	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
25	Administrasin Umum Perangkat Daerah	Cakupan Penyusunan Perencanaan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	1 tahun	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
26	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Penyusunan Perencanaan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	1 tahun	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
VI	Penyedia JasaPenunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Penyusunan Perencanaan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	1 tahun	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
27	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Penyusunan Perencanaan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	1 tahun	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Isu – Isu strategis adalah kondisi atau hal yang diperhatikan dalam perencanaan pembangunan selama 5 (Lima) tahun dalam melaksanakan atau menyelenggarakan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Polokarto kepada masyarakat. Analisa isu – isu strategis di identifikasikan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Polokarto dalam menjalankan pemerintahan ada berbagai permasalahan, sebagai berikut.

a. Bidang Pemerintahan dan Pelayanan Publik

1) Belum optimalnya kinerja aparatur Pemerintahan Desa
2) Masih ada sebagian jenis pelayanan administrasi kependudukan yang belum bias dilayani ditingkat Kecamatan
3) Perlu peningkatan sinergitas antar unit kerja dalam pelayanan kepada warga masyarakat

b. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1) Masih kurangnya kesadaran dan peran serta masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan wilayah
2) Perlu peningkatan kualitas sarana dan prasarana di Desa khusunya jaringan Internet Desa

c. Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum

1) Pemahaman warga masyarakat tentang peraturan perundangan belum optimal
2) Masih perlu peningkatan peran serta warga terhadap penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum belum optimal

d. Bidang Kesejahteraan Sosial

1) Belum terwujudnya sinkronisasi data sebagai dasar pengambilan kebijakan terkait dengan bantuan sosial.
2) Perlu peningkatan upaya strategis dalam rangka penanganan pandemi covid-19 terutama dari aspek ekomoni, kesehatan dan sosial

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal OPD

Adapun Review rancangan awal Renja Kecamatan Polokarto Tahun 2022 sebagaimana yang tertuang dalam rencana kegiatan 1 (satu) tahun yang menjadi acuan dalam menerapkan program/ kegiatan yang merupakan kebijakan dalam pengunaan anggaran dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel. 2.3

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL KECAMATAN POLOKARTO TAHUN 2023

Tujuan	Rancangan Awal RKPD/RENJA					HASIL Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Lokasi	Target capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN					**UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN**					
Terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel		Indek Kepuasan Masyarakat		81,00%			Indek Kepuasan Masyarakat		81,00%		
		Persentase Peningkatan Pelayanan Kecamatan		77,8%			Persentase Peningkatan Pelayanan Kecamatan		77,80%		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Kecamatan Polokarto**	**100%**	**38.500.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Kecamatan Polokarto**	**100%**	**38.500.000**	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Cakupan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kec	Kecamatan Polokarto	0	20.000.000	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Cakupan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kec	Kecamatan Polokarto	0	20.000.000	

Tujuan	Rancangan Awal RKPD/RENJA					HASIL Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Lokasi	Target capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Koordinasi /Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait	Jumlah Koordinasi kegiatan pemerintah dg PD dan instansi vertikal	Kecamatan Polokarto	0	10.000.000	Koordinasi /Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait	Jumlah Koordinasi kegiatan pemerintah dg PD dan instansi vertikal	Kecamatan Polokarto	0	10.000.000	
	Peningkatan efektifitas kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi Peningkatan Eektifitas Pemerinath di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Polokarto	0	10.000.000	Peningkatan efektifitas kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi Peningkatan Eektifitas Pemerinath di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Polokarto	0	10.000.000	
	Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja PD yang ada di kecamatan	Kecamatan Polokarto	100%	18.500.000	Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja PD yang ada di kecamatan	Kecamatan Polokarto	100%	18.500.000	
	Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan	Koordinasi percepatan Pencapaian standar pelayanan kecamatan	Kecamatan Polokarto	2 kali	9.000.000	Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan	Koordinasi percepatan Pencapaian standar pelayanan kecamatan	Kecamatan Polokarto	2 kali	9.000.000	

Tujuan	Rancangan Awal RKPD/RENJA					HASIL Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Lokasi	Target capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	Sosialisasi dan Koordinasi Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat	Kecamatan Polokarto	2 kali	9.500.000	Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	Sosialisasi dan Koordinasi Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat	Kecamatan Polokarto	2 kali	9.500.000	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan**	**Kecamatan Polokarto**	**100%**	**155.930.000**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan**	**Kecamatan Polokarto**	**100%**	**155.930.000**	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Cakupan kegiatan pemberdayaan desa	Kecamatan Polokarto	100%	23.930.000	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Cakupan kegiatan pemberdayaan desa	Kecamatan Polokarto	100%	23.930.000	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Monitoring musrenbangdes	Kecamatan Polokarto	17 desa	12.000.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Monitoring musrenbangdes	Kecamatan Polokarto	17 desa	12.000.000	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan sosialisasi Peningkatan Efektiitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kecamatan Polokarto	2 kali	11.930.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan sosialisasi Peningkatan Efektiitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kecamatan Polokarto	2 kali	11.930.000	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Cakupan Lembaga Kemasyarakatan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Polokarto	100%	132.000.000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Cakupan Lembaga Kemasyarakatan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Polokarto	100%	132.000.000	

Tujuan	Rancangan Awal RKPD/RENJA					HASIL Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Lokasi	Target capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Yang Diberdayakan	Kecamatan Polokarto	18 Lembaga	70.000.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Yang Diberdayakan	18 Lembaga	18 lembaga	70.000.000	
	Peningkatan Kapasitas Lembaga kemasyarakatan	Jumlah pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Polokarto	17 Lembaga	12.000.000	Peningkatan Kapasitas Lembaga kemasyarakatan	Jumlah pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	17 Lembaga	2 kali	12.000.000	
	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Pelaksanaan study banding ke daerah yang mempunyai tekhnologi maju	Kecamatan Polokarto	1 kegiatan	50.000.000	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Pelaksanaan study banding ke daerah yang mempunyai tekhnologi maju	Kecamatan Polokarto	0	50.000.000	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Persentase capaian ketentraman dan ketertiban umum**	**Kecamatan Polokarto**	**100%**	**388.850.000**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase capaian ketentraman dan ketertiban umum**	**Kecamatan Polokarto**	**100%**	**388.850.000**	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Cakupan Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Polokarto	100%	376.850.000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Cakupan Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Polokarto	100%	376.850.000	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi	Sinergitas dengan Kepolisian Negara, TNI dan Instansi Vertikal di	Kecamatan Polokarto	2 keg	12.000.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi	Sinergitas dengan Kepolisian Negara, TNI dan Instansi Vertikal di	Kecamatan Polokarto	2 keg	12.000.000	

Tujuan	Rancangan Awal RKPD/RENJA					HASIL Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Lokasi	Target capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	vertikal di wilayah kecamatan	Kecamatan (Lintas Sektor)				vertikal di wilayah kecamatan	Kecamatan (Lintas Sektor)				
	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Koordinasi Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	Kecamatan Polokarto	2 keg	364.850.000	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Koordinasi Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	Kecamatan Polokarto	2 keg	364.850.000	
	Koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Cakupan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada	Kecamatan Polokarto	100%	12.000.000	Koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Cakupan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada	Kecamatan Polokarto	100%	12.000.000	
	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah sosialiasi penegakan perda	Kecamatan Polokarto	1 kali	12.000.000	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah sosialiasi penegakan perda	Kecamatan Polokarto	1 kali	12.000.000	

Tujuan	Rancangan Awal RKPD/RENJA					HASIL Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Lokasi	Target capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**Cakupan Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum**	**Kecamatan Polokarto**	**100%**	**356.130.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Cakupan Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum**	**Kecamatan Polokarto**	**100%**	**356.130.000**	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Polokarto	100%	356.130.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Polokarto	100%	356.130.000	
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan	Pembinaan wawasan kebangsaan bagi generasi muda dan pelaksanaan kegiatan peringatan hari besar nasional	Kecamatan Polokarto	1 kegiatan	186.130.000	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan	Pembinaan wawasan kebangsaan bagi generasi muda dan pelaksanaan kegiatan peringatan hari besar nasional	Kecamatan Polokarto	1 kegiatan	186.130.000	

Tujuan	Rancangan Awal RKPD/RENJA					HASIL Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Lokasi	Target capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Negara Kesatuan Republik Indonesia					Negara Kesatuan Republik Indonesia					
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kecamatan Polokarto	12 kali	170.000.000	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kecamatan Polokarto	12 kali	170.000.000	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintah desa**	**Kecamatan Polokarto**	**100%**	**189.610.000**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintah desa**	**Kecamatan Polokarto**	**100%**	**189.610.000**	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Kecamatan Polokarto	100%	189.610.000	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Kecamatan Polokarto	100%	189.610.000	
	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Koordinasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kecamatan Polokarto	2 Dokumen	13.000.000	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Koordinasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kecamatan Polokarto	0	13.000.000	

Tujuan	Rancangan Awal RKPD/RENJA					HASIL Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Lokasi	Target capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Koordinasi Penyusuanan APBDes dan Laporan Pertanggungjawaban APBDes	Kecamatan Polokarto	2 Dokumen	13.000.000	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Koordinasi Penyusuanan APBDes dan Laporan Pertanggungjawaban APBDes	Kecamatan Polokarto	2 Dokumen	13.000.000	
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa (Monev)	Kecamatan Polokarto	2 Dokumen	13.000.000	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa (Monev)	Kecamatan Polokarto	2 Dokumen	13.000.000	
	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Koordinasi Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kecamatan Polokarto	3 Desa	13.000.000	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Koordinasi Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kecamatan Polokarto	3 Desa	13.000.000	
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Koordinasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kecamatan Polokarto	2 Dokumen	17.000.000	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Koordinasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kecamatan Polokarto	2 Dokumen	17.000.000	
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Koordinasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Kecamatan Polokarto	3 Dokumen	13.000.000	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Koordinasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Kecamatan Polokarto		13.000.000	
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa	Koordinasi , Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Kecamatan Polokarto	2 Dokumen	13.000.000	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa	Koordinasi , Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa	Kecamatan Polokarto	2 Dokumen	13.000.000	

Tujuan	Rancangan Awal RKPD/RENJA					HASIL Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Lokasi	Target capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Dengan Pembangunan Desa									
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Koordinasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Polokarto	2 Dokumen	13.000.000	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Koordinasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Polokarto	2 Dokumen	13.000.000	
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Pelaksanaan Musrenbangcam	Kecamatan Polokarto	2 Dokumen	55.610.000	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Pelaksanaan Musrenbangcam	Kecamatan Polokarto	2 Dokumen	55.610.000	
	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kecamatan Polokarto	2 Dokumen	13.000.000	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kecamatan Polokarto	0	13.000.000	
	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Polokarto	2 Dokumen	13.000.000	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Polokarto	0	13.000.000	
		NIALI SAKIP PD	Kecamatan Polokarto	CC			NIALI SAKIP PD	Kecamatan Polokarto	CC		

Tujuan	Rancangan Awal RKPD/RENJA					HASIL Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Lokasi	Target capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase Pelayanan Urusan Pemerintah Daerah**	**Kecamatan Polokarto**	**100%**	**2.816.480.000**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Pelayanan Urusan Pemerintah Daerah**	**Kecamatan Polokarto**	**100%**	**2.816.480.000**	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Penyusunan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Polokarto	100%	30.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Penyusunan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Polokarto	100%	30.000.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Ranstra dan Renja yang tersusun	Kecamatan Polokarto	1 Dokumen	15.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Ranstra dan Renja yang tersusun	Kecamatan Polokarto	1 Dokumen	15.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA yang tersusun	Kecamatan Polokarto	1 Dokumen	2.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA yang tersusun	Kecamatan Polokarto	1 Dokumen	2.500.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan yang tersusun	Kecamatan Polokarto	1 Dokumen	2.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan yang tersusun	Kecamatan Polokarto	1 Dokumen	2.500.000	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA yang tersusun	Kecamatan Tawangsari	1 Dokumen	2.500.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA yang tersusun	Kecamatan Tawangsari	1 Dokumen	2.500.000	

Tujuan	Rancangan Awal RKPD/RENJA					HASIL Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Lokasi	Target capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Dpa Perubahan yang tersusun	Kecamatan Tawangsari	1 Dokumen	2.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Dpa Perubahan yang tersusun	Kecamatan Tawangsari	1 Dokumen	2.500.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja (POK,Monev)	Kecamatan Polokarto	2 Dokumen	2.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja (POK,Monev)	Kecamatan Polokarto	2 Dokumen	2.500.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun (LKJIP,LPPD,LKPJ)	Kecamatan Polokarto	2 Dokumen	2.500.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun (LKJIP,LPPD,LKPJ)	Kecamatan Polokarto	2 Dokumen	2.500.000	
	Administrasin Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Penyusunan Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Polokarto	100%	2.056.980.000	Administrasin Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Penyusunan Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Polokarto	100%	2.056.980.000	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Polokarto	14 Bulan	1.954.419.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Polokarto	14 Bulan	1.954.419.000	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan	Jumlah Pengujian / Verifikasi Keuangan	Kecamatan Polokarto	12 Bulan	92.561.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan	Jumlah Pengujian / Verifikasi Keuangan	Kecamatan Polokarto	12 Bulan	92.561.000	

Tujuan	Rancangan Awal RKPD/RENJA					HASIL Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Lokasi	Target capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD	Jumlah Dokumen Akuntansi dan Laporan Keuangan (SPJ lengkap)	Kecamatan Polokarto	12 Laporan	2.500.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD	Jumlah Dokumen Akuntansi dan Laporan Keuangan (SPJ lengkap)	Kecamatan Polokarto	12 Laporan	2.500.000	
	Koorodinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Kecamatan Polokarto	1 Dokumen	2.500.000	Koorodinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Kecamatan Polokarto	1 Dokumen	2.500.000	
	Koorodinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran	Kecamatan Polokarto	3 Laporan	2.500.000	Koorodinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran	Kecamatan Polokarto	3 Laporan	2.500.000	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Kecamatan Polokarto	12 Laporan	2.500.000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Kecamatan Polokarto	12 Laporan	2.500.000	
	Administrasin Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat	Kecamatan Polokarto	100%	62.000.000	Administrasin Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat	Kecamatan Polokarto	100%	62.000.000	

Tujuan	Rancangan Awal RKPD/RENJA					HASIL Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Lokasi	Target capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Daerah Tingkat Disiplin Aparatur					Daerah Tingkat Disiplin Aparatur				
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atributnya	Jumlah Pakaian Dinas yang disediakan	Kecamatan Polokarto	0	-	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atributnya	Jumlah Pakaian Dinas yang disediakan	Kecamatan Polokarto	0	-	
	Pedataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Administrasi kepegawaian ASN yang dikelola	Kecamatan Polokarto	0	-	Pedataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Administrasi kepegawaian ASN yang dikelola		0	-	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan formal	Kecamatan Polokarto	50 Orang	62.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan formal	Kecamatan Polokarto	0	62.000.000	
	Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Sosialisasi Peraturan perundang _ Undangan yang dilaksanakan	Kecamatan Polokarto	0	-	Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Sosialisasi Peraturan perundang _ Undangan yang dilaksanakan	Kecamatan Polokarto	1 Kali	-	
	Administrasin Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Polokarto	100%	196.500.000	Administrasin Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Polokarto	100%	196.500.000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik yang dibeli	Kecamatan Polokarto	40 buah	7.500.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik yang dibeli	Kecamatan Polokarto	40 buah	7.500.000	

Tujuan	Rancangan Awal RKPD/RENJA					HASIL Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Lokasi	Target capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Polokarto	1 buah	10.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Polokarto	1 buah	10.000.000	
	Penyediaan Peralatan Rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang dibeli	Kecamatan Polokarto	48 buah	15.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang dibeli	Kecamatan Polokarto	48 buah	15.000.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jml jenis bahan untuk kegiatan kantor yang dibeli	Kecamatan Polokarto	400 buah 2500 dos	130.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jml jenis bahan untuk kegiatan kantor yang dibeli	Kecamatan Polokarto	400 buah 2500 dos	130.000.000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang yang dicetak dan digandakan	Kecamatan Polokarto	21.900 lembar	10.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang yang dicetak dan digandakan	Kecamatan Polokarto	21.900 lembar	10.000.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis bahan bacaan yang dibeli tiap bulan	Kecamatan Polokarto	1000 expl	4.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis bahan bacaan yang dibeli tiap bulan	Kecamatan Polokarto	1000 expl	4.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti	Kecamatan Polokarto	410 kali	20.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti	Kecamatan Polokarto	410 kali	20.000.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah	Kecamatan Polokarto	100%	50.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah	Kecamatan Polokarto	100%	50.000.000	

Tujuan	Rancangan Awal RKPD/RENJA					HASIL Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Lokasi	Target capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
	Pengadaan Mebel	Jumlah mebeleur yang dibeli	Kecamatan Polokarto	5 buah	15.000.000	Pengadaan Mebel	Jumlah mebeleur yang dibeli	Kecamatan Polokarto	5 buah	15.000.000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis peralatan dan mesin yang dibeli	Kecamatan Polokarto	6 buah	10.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis peralatan dan mesin yang dibeli	Kecamatan Polokarto	6 buah	10.000.000	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Jumlah jenis sarana prasarana gedung kantor yang dibeli	Kecamatan Polokarto	3 buah	15.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Jumlah jenis sarana prasarana gedung kantor yang dibeli	Kecamatan Polokarto	3 buah	15.000.000	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis sarana prasarana pendukung gedung kantor yang dibeli	Kecamatan Polokarto	5 buah	10.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis sarana prasarana pendukung gedung kantor yang dibeli	Kecamatan Polokarto	5 buah	10.000.000	
	Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Polokarto	100%	219.000.000	Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Polokarto	100%	219.000.000	
	Penyedia jasa surat menyurat	Jumlah surat yang dikelola	Kecamatan Polokarto	2.500 surat	14.000.000	Penyedia jasa surat menyurat	Jumlah surat yang dikelola	Kecamatan Polokarto	2.500 surat	14.000.000	

Tujuan	Rancangan Awal RKPD/RENJA					HASIL Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Lokasi	Target capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyedia jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik	Kecamatan Polokarto	12 bulan	50.000.000	Penyedia jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik	Kecamatan Polokarto	12 bulan	50.000.000	
	Penyedia jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah SDM Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Polokarto	8 orang	155.000.000	Penyedia jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah SDM Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Polokarto	8 orang	155.000.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Polokarto	100%	202.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Polokarto	100%	202.000.000	
	Penyedia jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas / operasional yang dipelihara	Kecamatan Polokarto	13 unit	70.000.000	Penyedia jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas / operasional yang dipelihara	Kecamatan Polokarto	13 unit	70.000.000	
	Penyedia jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak dan Perizinan Kendnaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional / lapangan yang dipelihara	Kecamatan Polokarto	1 unit	10.000.000	Penyedia jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak dan Perizinan Kendnaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional / lapangan yang dipelihara	Kecamatan Polokarto	1 unit	10.000.000	

Tujuan	Rancangan Awal RKPD/RENJA					HASIL Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Lokasi	Target capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pemeliharaan Mebel	Jumlah jenis mebelair yang dibeli	Kecamatan Polokarto	5 buah	7.000.000	Pemeliharaan Mebel	Jumlah jenis mebelair yang dibeli	Kecamatan Polokarto	5 buah	7.000.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara	Kecamatan Polokarto	5 jenis	5.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara	Kecamatan Polokarto	5 jenis	5.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	Kecamatan Polokarto	2 unit	30.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	Kecamatan Polokarto	2 unit	30.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Polokarto	2 unit	-	Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Polokarto	2 unit	-	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis perlengkapan rumah jabatan / dinas yang dipelihara	Kecamatan Polokarto	2 unit	70.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis perlengkapan rumah jabatan / dinas yang dipelihara	Kecamatan Polokarto	2 unit	70.000.000	

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Usulan program dan kegiatan Kecamatan Polokarto Tahun 2022 dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum dan kewenangan Pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati Sukoharjo penguatan otonomi daerah diarahkan pada :

a. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang menjadi kewenangan Kecamatan dan peningkaan kualitas aparaturnya.
b. Peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Pemerintahan Desa.
c. Memonitoring dan memfasilitasi pelaksanaan Bantuan Keuangan Desa sehingga pelaksanaan program/ kegiatan sesuai dengan APBDes dan RPJMDes dan hasilnya dapat memberikan manfaat yangmaksimal kepada masyarakat.
d. Peningkatan pengetahuan dan kemampuan satuan perlindungan masyarakat dalam rangka upaya penyelenggaraan ketertiban dan ketentraman umum.

BAB III
TUJUAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

A. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran/implementasi dari pernyataan visi dan misi Bupati Sukoharjo terpilih. Tujuan adalah sesuatu yang ingin dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan yang akan dicapai oleh Perangkat Daerah Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo adalah sebagai berikut.

"Terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang reponsif dan akuntabel"

B. Sasaran

Sasaran adalah suatu strategi atau arahan dan digunakan sebagai dasar dalam menentukan kebijakan. Adapun sasaran Renstra Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo antara lain:

1. **Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat.**
2. **Meningkatnya kualitas aparatut dan pelayanan pablik.**

Tujuan Dan Sasaran Renja OPD

Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Polokarto selama Tahun 2023 diselenggarakan dengan tujuan dan sasaran sebagai berikut.

1. Menciptakan pelayanan public yang mudah dan cepat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Memberikan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepada warga masyarakat.
3. Membantu meningkatkan perolehan sumber – sumber pendapatan asli daerah untuk kelancaran pelaksanaan pembangunan.

4. Mewujudkan pemerintahan yang bersih, professional, responsive dan bertanggungjawab dalam menyelenggarakan Pemerintahan dan Pembangunan.
5. Mengkoordinasikan kegiatan di bidang pemerintahan, ketentraman, ketertiban, pemberdayaan masyarakat desa, kesejahteraan social dan pelayanan umum.
6. Memotifasi masyarakat untuk membangun wilayah secara mandiri.

Adapun tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Polokarto dapat kita lihat secara rinci sebagai berikut.

Pemerintah Kabupaten Sukoharjo
Visi Misi Tujuan Dan Sasaran
Tahun Anggaran 2022

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir
							2022	2023	2024	2025	2026	
99	Pendapatan & Pembiayaan	Pendapatan & Pembiayaan				0	0	0	0	0	0	0
			Pendapatan & Pembiayaan			0	0	0	0	0	0	0
1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Melalui Percepatan Reformasi Birokrasi	Terwujudnya Tata Kepemerintahan yang Profesional		Indek Reformasi Birokrasi	angka	56.02	65	68	70	79	80	80
			Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Responsif dan Akuntabel	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	angka	78.39	81	82	83	84	84	85
				Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	nilai	3.54	3.64	3.7	3.74	3.8	3.8	3.84
				Evaluasi Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	angka	56.41	81	83	85	87	87	90

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir
							2022	2023	2024	2025	2026	
				Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)	Predikat	0	0	0	0	0	0	0
				Indeks Sistem Merit	indeks	0	0	0	0	0	0	0
				Indek Kapasitas Fiskal Daerah (IKFD)	angka	1.544	1.461	1.547	1.646	1.758	1.758	1.885
2	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas	Terwujudnya sumber daya manusia yang sehat, cerdas, inovatif, dan berkarakter		Laju Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	persen	76.98	77.73	77.89	78.06	78.23	78.4	78.4
				Laju Penurunan Angka Kemiskinan	persen	7.68	7.6	7.5	7.4	7.1	6.8	6.8
			Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun Keatas (Tahun)	tahun	9.1	9.35	9.36	9.37	9.38	9.38	9.39
				Harapan Lama Sekolah (Tahun)	tahun	13.82	13.84	13.85	13.85	13.86	13.86	13.86
			Meningkatnya akses dan kualitas hidup, perlindungan terhadap perempuan, anak, kesetaraan gender dan pemuda	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	nilai	96.94	96.51	96.52	96.53	96.54	96.54	96.55

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir
							2022	2023	2024	2025	2026	
				Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	angka	0	41.9	44.16	46.48	49.01	49.01	51.66
			Meningkatnya kualitas hidup penduduk miskin	Persentase penduduk miskin perdesaan (DTKS Desil 1 dan 2)	persen	2.94	2.85	2.8	2.75	2.7	2.7	2.65
				Persentase penduduk miskin perkotaan (DTKS Desil 1 dan 2)	persen	4.3	4.2	4.15	4.1	4.05	4.05	4
			Meningkatnya kearifan budaya lokal	Angka Partisipasi Pelaku Seni dan Budaya	persen	0	23	26	29	32	32	35
			Meningkatnya pengendalian penduduk	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	persen	0.88	0.88	0.87	0.87	0.86	0.86	0.86
			Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)	tahun	77.55	77.7	77.75	77.8	77.85	77.85	77.9
3	Memperkuat Perekonomian Rakyat yang Berdaya Saing Tinggi	Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Insklusif		Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	persen	4.3	4.3	4.9	5.3	5.94	6.28	6.28
				Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	persen	6.93	4.66	4.58	4.48	4	4	4
				Pendapatan Per Kapita	Rp. Juta	40.67	42.651	44.945	47.362	49.909	49.909	49.909

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir
							2022	2023	2024	2025	2026	
			Meningkatnya pertumbuhan produktifitas	Pertumbuhan investasi	persen	8	12	16	20	24	24	28
				Pertumbuhan PDRB sektor pertanian, dan perikanan	persen	2.27	2.4	2.6	2.8	3	3	3.1
				Skor Pola Pangan Harapan	persen	93.3	93.6	93.7	93.8	93.9	93.9	93.9
				Pertumbuhan PDRB sektor industri	persen	4.62	5.37	5.43	5.74	6.06	6.06	6.4
			Meningkatnya kemandirian desa	Indeks Desa Membangun (IDM)	nilai	0.7156	0.7356	0.7456	0.7556	0.7656	0.7656	0.7656
			Meningkatnya pertumbuhan produktifitas	Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	persen	4.6	4.69	5.08	5.3	5.4	5.4	5.6
				Pertumbuhan usaha mikro ke Usaha kecil	persen	2.6	2.8	3.1	3.5	3.6	3.6	3.7
				Pertumbuhan Wirausaha Baru	persen	10	12	13	14	15	15	16

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir
							2022	2023	2024	2025	2026	
				Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam Dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten/Kota	persen	83	84	84	84	85	85	85
4	Memperkuat Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan	Terwujudnya Pemerataan Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan		Indeks Pembangunan Infrastruktur (IPI)	nilai	59.34	61.96	65.12	68.26	71.09	74.2	74.2
				Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Prov/Kab/kota	nilai	59.05	61.12	61.22	61.32	61.41	61.51	61.51
				Indeks Resiko Bencana (IRB)	nilai	93.2	93	92.7	92.5	92.25	92	92
			Meningkatnya kualitas infrastruktur	Persentase Lingkungan Hunian Layak	persen	72.49	78.59	81.65	84.7	87.76	87.76	90.81
				Indeks Pelayanan Infrastruktur	indeks	66.21	68.36	69.6	70.79	71.24	71.24	71.38
				Indeks Fatalitas	indeks	0.0645	0.265	0.26	0.256	0.252	0.252	0.25
			Meningkatnya Kualitas Lingkungan	Hasil Pengukuruan Indeks kualitas Air	persen	45	50.5	50.75	51	51.25	51.25	51.5

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir
							2022	2023	2024	2025	2026	
				Hasil Pengukuruan Indeks kualitas Udara	persen	87.23	87.23	87.24	87.24	87.25	87.25	87.25
				Indeks Kapasitas Daerah	nilai	0.3	0.32	0.35	0.4	0.45	0.45	0.5
				Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	indeks	31.08	31.09	31.09	31.09	31.09	31.09	31.1
			Meningkatnya kualitas infrastruktur	Cakupan Layanan Telekomunikasi	persen	45	58	68	78	88	88	100
5	Meningkatkan Kualitas Kehidupan Sosial dan Keagamaan	Terwujudnya masyarakat Sukoharjo yang aman dan nyaman		Persentase Penanganan Gangguan Keamanan, Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum	persen	85.7	86.83	87.23	87.97	88.37	88.5	88.5
			Meningkatnya kualitas ketentraman dan ketertiban masyarakat	Cakupan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	persen	89.9	90.72	91.11	91.49	91.88	91.88	91.9
			Meningkatnya Kesatuan Bangsa dan Bernegara	Prosentase kesadaran berbangsa dan bernegara	persen	0	78	80	82	85	85	87

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 disajikan pada Tabel 4.1 berikut.

TABEL 4.1
DRAF RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PD TAHUN 2024
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025

Tujuan	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2024				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
				Lokasi	Target capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN							
Terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel			Indek Kepuasan Masyarakat		85			86	
			Persentase Peningkatan Pelayanan Kecamatan		100			100	
	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Polokarto	100	46.270.000,00	DAU	100	**45.550.000**
	7.01.02.2.01	*Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*	*Cakupan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kec*	Kecamatan Polokarto	100	24.000.000,00	DAU	100	**23.550.000**
	7.01.02.2.01.01	Koordinasi /Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait	Jumlah Koordinasi kegiatan pemerintah dg PD dan instansi vertikal	Kecamatan Polokarto	100	12.000.000,00	DAU	100	11.550.000
	7.01.02.2.01.02	Peningkatan efektifitas kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi Peningkatan Eektifitas Pemerinath di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Polokarto	90	1.200.000,00	DAU	90	12.000.000
	7.01.02.2.02	*Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja*	*Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja PD yang ada di kecamatan*	Kecamatan Polokarto	100	22.270.000,00	DAU	100	**22.000.000**

		perangkat daerah yang ada di kecamatan							
	7.01.02.2.02.02	Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan	Koordinasi percepatan Pencapaian standar pelayanan kecamatan	Kecamatan Polokarto	60	11.270.000,00	DAU	60	11.000.000
	7.01.02.2.02.03	Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	Sosialisasi dan Koordinasi Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat	Kecamatan Polokarto	100	11.000.000,00	DAU	100	11.000.000
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Kecamatan Polokarto	100	176.410.000,00	DAU	100	**193.300.000**
	7.01.03.2.01	*Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa*	*Cakupan kegiatan pemberdayaan desa*	*Kecamatan Polokarto*	*100*	*24.000.000,00*	*DAU*	*100*	**26.300.000**
	7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Monitoring musrenbangdes	Kecamatan Polokarto	17	12.000.000,00	DAU	17	13.300.000
	7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan sosialisasi Peningkatan Efektiitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kecamatan Polokarto	90	12.000.000,00	DAU	90	13.000.000
	7 01 03.2.03	*Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan*	*Cakupan Lembaga Kemasyarakatan di Tingkat Kecamatan*	*Kecamatan Polokarto*	*100*	*152.410.000,00*	*DAU*	*100*	**167.000.000**
	7 01 03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Yang Diberdayakan	Kecamatan Polokarto	18	80.000.000,00	DAU	18	90.000.000
	7 01 03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga kemasyarakatan	Jumlah pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Polokarto	70	12.000.000,00	DAU	70	17.000.000
	8 01 03.2.03.05	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Pelaksanaan study banding ke daerah yang mempunyai tekhnologi maju	Kecamatan Polokarto	50	60.410.000,00	DAU	50	60.000.000
	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase capaian ketentraman dan ketertiban umum	Kecamatan Polokarto	100	401.020.000,00	DAU	100	**406.170.000**
	7.01.04.2.01	*Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum*	*Cakupan Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum*	*Kecamatan Polokarto*	*100*	*385.020.000,00*	*DAU*	*100*	**388.170.000**
	7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara, TNI dan Instansi Vertikal di Kecamatan (Lintas Sektor)	Kecamatan Polokarto	100	16.000.000,00	DAU	100	16.000.000

	7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Koordinasi Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	Kecamatan Polokarto	100	369.020.000,00	DAU	100	372.170.000
	7.01.04.2.02	*Koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah*	*Cakupan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada*	*Kecamatan Polokarto*	*100*	*16.000.000,00*	*DAU*	*100*	**18.000.000**
	7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah sosialiasi penegakan perda	Kecamatan Polokarto	100	16.000.000,00	DAU	100	18.000.000
	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Kecamatan Polokarto	80	404.000.000,00	DAU	80	**455.520.000**
	7.01.05.2.01	*Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah*	*Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah*	*Kecamatan Polokarto*	*100*	*404.000.000,00*	*DAU*	*100*	**455.520.000**
	1.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Pembinaan wawasan kebangsaan bagi generasi muda dan pelaksanaan kegiatan peringatan hari besar nasional	Kecamatan Polokarto	75	220.000.000,00	DAU	75	250.000.000
	1.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kecamatan Polokarto	11	184.000.000,00	DAU	11	205.520.000
	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	Kecamatan Polokarto	100	216.900.000,00	DAU	100	**234.400.000**
	7.01.06.2.01	*Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa*	*Cakupan fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa*	*Kecamatan Polokarto*	*100*	*216.900.000,00*	*DAU*	*100*	**234.400.000**
	7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Koordinasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kecamatan Polokarto	17	16.000.000,00	DAU	17	18.000.000
	7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Koordinasi Penyusuanan APBDes dan Laporan Pertanggungjawaban APBDes	Kecamatan Polokarto	17	16.000.000,00	DAU	17	18.000.000

	7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa (Monev)	Kecamatan Polokarto	17	16.000.000,00	DAU	17	18.000.000
	7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Koordinasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kecamatan Polokarto	2	10.000.000,00	DAU	2	15.000.000
	7.01.06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Koordinasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Kecamatan Polokarto	13	17.000.000,00	DAU	13	-
	7.01.06.2.01.08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Koordinasi Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kecamatan Polokarto	17	18.000.000,00	DAU	17	20.000.000
	7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa	Koordinasi , Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa	Kecamatan Polokarto	17	16.000.000,00	DAU	17	18.000.000
	7.01.06.2.01.12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Koordinasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Polokarto	17	16.000.000,00	DAU	17	18.000.000
	7.01.06.2.01.13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Pelaksanaan Musrenbangcam	Kecamatan Polokarto	90	43.000.000,00	DAU	90	60.900.000
	7.01.06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kecamatan Polokarto	90	16.000.000,00	DAU	90	18.000.000
	7.01.06.2.01.18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Polokarto	17	32.900.000,00	DAU	17	30.500.000
			NIALI SAKIP PD	Kecamatan Polokarto	60		DAU	65	
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Polokarto	100	5.086.000.000,00	DAU	100	**5.072.500.000**
	7.01.01.2.01	*Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*Cakupan Penyusunan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*Kecamatan Polokarto*	*100*	*44.000.000,00*	*DAU*	*100*	**55.000.000**
	7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Ranstra dan Renja yang tersusun	Kecamatan Polokarto	3	20.000.000,00	DAU	3	25.000.000
	7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA yang tersusun	Kecamatan Polokarto	1	4.000.000,00	DAU	1	5.000.000
	7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan yang tersusun	Kecamatan Polokarto	1	4.000.000,00	DAU	1	5.000.000

	7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA yang tersusun	Kecamatan Polokarto	1	4.000.000,00	DAU	1	5.000.000
	7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Dpa Perubahan yang tersusun	Kecamatan Polokarto	1	4.000.000,00	DAU	1	5.000.000
	7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja (POK,Monev)	Kecamatan Polokarto	4	4.000.000,00	DAU	4	5.000.000
	7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun (LKJIP,LPPD,LKPJ)	Kecamatan Polokarto	4	4.000.000,00	DAU	4	5.000.000
	7.01.01.2.02	*Administrasin Keuangan Perangkat Daerah*	*Cakupan Penyusunan Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	*Kecamatan Polokarto*	*100*	*2.371.000.000,00*	*DAU*	*100*	**2.371.000.000**
	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Polokarto	18	2.250.000.000,00	DAU	18	2.250.000.000
	7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pengujian / Verifikasi Keuangan	Kecamatan Polokarto	12	105.000.000,00	DAU	12	105.000.000
	7.01.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD	Jumlah Dokumen Akuntansi dan Laporan Keuangan (SPJ lengkap)	Kecamatan Polokarto	12	4.000.000,00	DAU	12	4.000.000
	7.01.01.2.02.05	Koorodinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Kecamatan Polokarto	6	4.000.000,00	DAU	6	4.000.000
	7.01.01.2.02.07	Koorodinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran	Kecamatan Polokarto	18	4.000.000,00	DAU	18	4.000.000
	7.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Kecamatan Polokarto	12	4.000.000,00	DAU	12	4.000.000
	7.01.01.2.05	*Administrasin Kepegawaian Perangkat Daerah*	*Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Tingkat Disiplin Aparatur*	*Kecamatan Polokarto*	*100*	*200.500.000,00*	*DAU*	*100*	**200.500.000**
	7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atributnya	Jumlah Pakaian Dinas yang disediakan	Kecamatan Polokarto	60	120.000.000,00	DAU	60	15.500.000
	7.01.01.2.05.03	Pedataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Administrasi kepegawaian ASN yang dikelola		20	15.500.000,00	DAU	20	0
	7.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan formal	Kecamatan Polokarto	27	55.000.000,00	DAU	27	65.000.000
	7.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Sosialisasi Peraturan perundang _ Undangan yang dilaksanakan	Kecamatan Polokarto	1	10.000.000,00	DAU	1	120.000.000

	7.01.01.2.06	*Administrasin Umum Perangkat Daerah*	*Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*Kecamatan Polokarto*	*100*	*253.500.000,00*	*DAU*	*100*	**256.000.000**
	7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik yang dibeli	Kecamatan Polokarto	25	7.500.000,00	DAU	25	8.000.000
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Polokarto	4	15.000.000,00		4	15.000.000
	7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang dibeli	Kecamatan Polokarto	50	15.000.000,00	DAU	50	15.000.000
	7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jml jenis bahan untuk kegiatan kantor yang dibeli	Kecamatan Polokarto	4500	135.000.000,00	DAU	4500	135.000.000
	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang yang dicetak dan digandakan	Kecamatan Polokarto	8000	16.000.000,00	DAU	8000	18.000.000
	7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis bahan bacaan yang dibeli tiap bulan	Kecamatan Polokarto	20	5.000.000,00	DAU	20	5.000.000
	7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti	Kecamatan Polokarto	325	60.000.000,00	DAU	325	60.000.000
	7.01.01.2.07	*Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	*Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	*Kecamatan Polokarto*	*100*	*65.000.000,00*	*DAU*	*100*	**70.000.000**
	7.01.01.2.07.03	Pengadaan Mebel	Jumlah mebeleur yang dibeli	Kecamatan Polokarto	4	15.000.000,00	DAU	4	15.000.000
	7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis peralatan dan mesin yang dibeli	Kecamatan Polokarto	3	15.000.000,00	DAU	3	15.000.000
	7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Jumlah jenis sarana prasarana gedung kantor yang dibeli	Kecamatan Polokarto	3	20.000.000,00	DAU	3	20.000.000
	7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis sarana prasarana pendukung gedung kantor yang dibeli	Kecamatan Polokarto	3	15.000.000,00	DAU	3	20.000.000
	7.01.01.2.08	*Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	*Cakupan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah*	*Kecamatan Polokarto*	*100*	*225.000.000,00*	*DAU*	*100*	**230.000.000**
	7.01.01.2.08.01	Penyedia jasa surat menyurat	Jumlah surat yang dikelola	Kecamatan Polokarto	1500	15.000.000,00	DAU	1500	15.000.000
	7.01.01.2.08.02	Penyedia jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik	Kecamatan Polokarto	3	55.000.000,00	DAU	3	55.000.000
	7.01.01.2.08.04	Penyedia jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah SDM Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Polokarto	7	155.000.000,00	DAU	7	160.000.000

	7.01.01.2.09	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	*Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	*Kecamatan Polokarto*	*100*	*1.927.000.000,00*	*DAU*	*100*	**1.890.000.000**
	7.01.01.2.09.01	Penyedia jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas / operasional yang dipelihara	Kecamatan Polokarto	12	90.000.000,00	DAU	12	95.000.000
	7.01.01.2.09.02	Penyedia jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak dan Perizinan Kendnaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional / lapangan yang dipelihara	Kecamatan Polokarto	1	15.000.000,00	DAU	1	15.000.000
	7.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah jenis mebelair yang dibeli	Kecamatan Polokarto	10	10.000.000,00	DAU	10	10.000.000
	7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara	Kecamatan Polokarto	7	17.000.000,00	DAU	7	20.000.000
	7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	Kecamatan Polokarto	1	150.000.000,00	DAU	1	1.500.000.000
	7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara	Kecamatan Polokarto	3	100.000.000,00	-	3	100.000.000
	7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis perlengkapan rumah jabatan / dinas yang dipelihara	Kecamatan Polokarto	3	195.000.000,00	DAU	3	150.000.000
	JUMLAH					**6.330.600.000,00**			**6.407.440.000,00**

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 merupakan panduan kerja bagi Kecamatan Polokarto selama 1 (satu) tahun ke depan. Rencana Kerja ini disusun berdasarkan kebutuhan Perangkat Daerah dan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun dalam rangka mendukung pencapaian program Kepala Daerah. Mendasarkan pada hal tersebut, pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 didasarkan dari Rencana Strategis Kecamatan Polokarto tahun 2021–2026. Guna pencapaian tujuan perencanaan pembangunan dalam 1 (satu) tahun ke depan. Penyusunan perencanaan pembangunan yang berkualitas akan menopang dalam mewujudkan pembangunan yang berkualitas terutama dalam mencapai visi dan misi Kepala Daerah.

Renja Perangkat Daerah Kecamatan Polokarto Tahun 2023 merupakan indikator dalam proses evaluasi laporan perencananan atas kinerja satu tahun, sehingga dapat meminimalisir pelaksanaan kegiatan yang menyimpang dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2021-2026 sesuai dengan tupoksi Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo.

Polokarto, Maret 2023

Camat Polokarto

PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
KECAMATAN POLOKARTO

HERY MULYADI, SE

Pembina

NIP. 19690712 199603 1 002

RENCANA KERJA (RENJA)

KECAMATAN WERU

KABUPATEN SUKOHARJO

TAHUN 2024

SALINAN

BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 35 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024;

b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 273 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan Kepala Daerah setelah Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 192) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 262);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tatacara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 200);
13. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);
14. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 298);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

Renja Perangkat Daerah disusun dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Pasal 3

Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

BAB II

SISTEMATIKA DAN FUNGSI RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 4

Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. bab I : pendahuluan;
b. bab II : hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu;
c. bab III : tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
d. bab IV : rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan
e. bab V : penutup.

Pasal 5

Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah.

BAB II

PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 6

(1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah.
(2) Kepala Perangkat Daerah melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi Renja Perangkat Daerah kepada Bupati melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.

BAB III

PERANGKAT DAERAH PENYUSUN

Pasal 7

(1) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun oleh Perangkat Daerah sebagai berikut:
    a. Sekretariat Daerah;
    b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
    c. Inspektorat Daerah;
    d. Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan;
    e. Dinas Kesehatan;
    f. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang;
    g. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
    h. Satuan Polisi Pamong Praja;
    i. Dinas Sosial;

j. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak;
k. Dinas Pangan;
l. Dinas Lingkungan Hidup;
m. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil;
n. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa;
o. Dinas Perhubungan;
p. Dinas Komunikasi Dan Informatika;
q. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
r. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;
s. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
t. Dinas Pertanian dan Perikanan;
u. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah dan Perdagangan;
v. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
w. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
x. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
y. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
z. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
aa. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
bb. Kecamatan Weru;
cc. Kecamatan Bulu;
dd. Kecamatan Tawangsari;
ee. Kecamatan Sukoharjo;
ff. Kecamatan Nguter;
gg. Kecamatan Bendosari;
hh. Kecamatan Polokarto;
ii. Kecamatan Mojolaban;
jj. Kecamatan Grogol;
kk. Kecamatan Baki;
ll. Kecamatan Gatak; dan
mm. Kecamatan Kartasura.

(2) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf mm tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 10 Agustus 2023

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 10 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd.

WIDODO

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2023 NOMOR 35

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TEGUH PRAMONO, SH, MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19710429 199803 1 003

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 35 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN
SUKOHARJO TAHUN 2024

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2024

Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 terdiri atas:

1. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Inspektorat Daerah;
4. Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan;
5. Dinas Kesehatan;
6. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang;
7. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
8. Satuan Polisi Pamong Praja;
9. Dinas Sosial;
10. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak;
11. Dinas Pangan;
12. Dinas Lingkungan Hidup;
13. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil;
14. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa;
15. Dinas Perhubungan;
16. Dinas Komunikasi Dan Informatika;
17. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
18. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;
19. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
20. Dinas Pertanian dan Perikanan;
21. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah dan Perdagangan;
22. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
23. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
24. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
25. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
26. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
27. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
28. Kecamatan Weru;
29. Kecamatan Bulu;

30. Kecamatan Tawangsari;
31. Kecamatan Sukoharjo;
32. Kecamatan Nguter;
33. Kecamatan Bendosari;
34. Kecamatan Polokarto;
35. Kecamatan Mojolaban;
36. Kecamatan Grogol;
37. Kecamatan Baki;
38. Kecamatan Gatak; dan
39. Kecamatan Kartasura.

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karuniaNya, telah berhasil disusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 yang berisikan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan termasuk juga Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif.

Renja ini disusun dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah. Renja ini pada dasarnya merupakan penjabaran dari rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 di bidang Adminstrasi Pemerintah Umum. Adapun tujuannya adalah sebagai arahan, acuan atau rujukan yang harus dijabarkan dan dilaksanakan oleh seluruh pejabat structural, fungsional dan seluruh Organisasi Kemasyarakat di lingkungan Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo.

Pada kesempatan ini diucapkan terima kasih atas peran aktif seluruh staf, khususnya Tim Penyusunan serta para Pemangku Kepentingan "stakeholders" yang telah memberikan berbagai masukan terutama isu strategis, baik secara langsung pada saat rapat pembahasan/dialog maupun secara tak langsung untuk terwujudnya Renja ini.

Mudah mudahan dengan adanya Renja ini, dapat menjadi pedoman, acuan atau rujukan sehingga dalam pelaksanaannya dapat membawa hasil positif di bidang administrasi pemerintahan umum khususnya dalam menindaklanjuti RPJMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024.

Kami menyadari Renja ini jauh dari sempurna, untuk itu saran dan koreksi sangat kami harapkan demi kesempurnaan penyusunan Renja di periode berikutnya. Renja Pemerintah Kecamatan Weru Tahun 2024 ini semoga dapat bermanfaat bagi kita semua.

Weru, 10 Agustus 2023

CAMAT WERU

PANDIYANTO,ST,MM

Pembina

NIP. 19750608 200604 1 016

Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **II**

DAFTAR ISI ..... **III**

BAB I PENDAHULUAN **1**

1.1 LATAR BELAKANG 1

1.2 LANDASAN HUKUM 2

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN 6

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN 7

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU **8**

1.2 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH 8

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 18

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH 20

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD 21

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT 29

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH **38**

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL 38

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH 39

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH **41**

BAB V PENUTUP **51**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah (PD) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Berdasarkan Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, proses penyusunan Renja PD terdiri atas 6 (enam) tahapan yaitu tahap persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, penyusunan forum PD / lintas PD, perumusan rancangan akhir, dan penetapan. PD menyusun rancangan awal Renja PD dengan berpedoman pada Renstra PD, hasil evaluasi hasil Renja PD tahun lalu, dan hasil evaluasi Renja PD tahun berjalan.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Perangkat Daerah PD untuk menyusun Renja PD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Renja Kecamatan Weru disusun berdasarkan RKPD Kabupaten Sukoharjo, Renstra Bappeda Kabupaten Sukoharjo, serta berpedoman pada Renja Kementerian PPN / Bappenas dan Renja Bappeda Jawa Tengah.

Proses penyusunan Renja Kecamatan Weru Tahun 2024 didasarkan pada Renstra Kecamatan Weru 2021-2026 dengan memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan dalam RKPD Tahun 2024. Tahun 2024 merupakan tahun ke-3 perencanaan pembangunan Kabupaten Sukoharjo yang berpedoman pada RPJMD 2021-2026. Sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan serta sejalan dengan visi pembangunan jangka menengah daerah tahun 2021-2026 yaitu "Terwujudnya Masyarakat Sukoharjo yang lebih Makmur".

Selanjutnya Renja PD dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) OPD dan kemudian berubah menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Kecamatan Weru Tahun 2024 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 174);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2017 Nomor 1213);
16. Permendagri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024;
17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024;
18. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kodefikasi, Klasifikasi Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020 – 2024;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 174);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 192) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031(Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 262);
30. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun

2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);

31. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 298);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
33. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 82 Tahun 2020, Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi kecamatan;
34. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

   Rencana Kerja Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo ini disusun dengan maksud untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam PD serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

2. Tujuan

   a. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional;

   b. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan perangkat daerah;

c. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan perangkat daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan;

d. Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Tahun 2024 disusun dengan sistimatika sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan

Bab II. Hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

Bab III. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Bab IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab V. Penutup

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

1.2 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Berdasarkan RKPD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Kecamatan Weru mendukung pencapaian sasaran daerah "Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik melalui Percepatan Reformasi Birokrasi" dengan prioritas daerah "Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Responsif dan Akuntabel".

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Kecamatan melaksanakan fungsi memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam Urusan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan. Dalam rangka mencapai sasaran daerah serta sesuai dengan fungsi dan tugas pokok, Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo melaksanakan 6 Program, 14 Kegiatan dan 44 Sub Kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Kegiatan dan Sub Kegiatan** :

   a. **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**;

      1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
      2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
      3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
      4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
      5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
      6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

   b. **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**;

      1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
      2 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
      3 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
      4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
6 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

d. Administrasi Umum Perangkat Daerah

1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
4 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
6 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
3. Pemeliharaan Mebel
4. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
5. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik dengan Kegiatan dan Sub Kegiatan:

a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan

1. Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
2. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan dengan Kegiatan dan Sub Kegiatan :

a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
2. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

b. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

1. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan
2. Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan

4. **Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum dengan Kegiatan dan Sub Kegiatan:**

   a. **Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**;

      1. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
      2. Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

   b. **Koordinasi Penerapan dan Penegakan Qanun dan Peraturan Kepala Daerah**.

      1. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

5. **Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan Kegiatan dan Sub Kegiatan :**

   a. **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**

      1. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

      2. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

6. **Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan Kegiatan dan Sub Kegiatan:**

   a. **Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**

      1. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa.
      2. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa.
      3. Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
      4. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif.

Pengukuran kinerja Kecamatan Weru didasarkan pada sasaran-sasaran dengan capaian sasaran sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 2.1 Pengukuran Sasaran Rencana Kerja Kecamatan Weru Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)
1	*2*	*3*	*4*
Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	Persentase peningkatan pelayanan kecamatan	100,00	100
Meningkatnya kualitas aparatur dan pelayanan publik	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	62	55.03

Tabel 2.2 Pengukuran Kinerja Program Kecamatan Weru

Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)
1	*2*	*3*	*4*
Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	Tingkat kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	78	100
	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan	100	100
	Peersentase Capaian Ketentraman dan Ketertiban Umum	100	100
	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100	100
	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	100
Meningkatnya kualitas aparatur dan pelayanan publik	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	98.89

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2022: Rp 2.787.176.448,00

Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2022: Rp 2.735.787.022,00

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja PD dan pencapaian Renstra PD Kecamatan Weru sampai dengan tahun 2022 dapat dilihat dalam Tabel 2.3

Tabel 2.3

Capaian Kinerja Tahun 2022 Kecamatan Weru

PD: Kecamatan Weru

Kode			Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Hasil tahun 2022		Tingkat realisasi (%)
1			*2*	*3*	*4*	*5*		*6=(5/4)*
7			**UNSUR KEWILAYAHAN**					
7	01.01		**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah**	**100%**	**100%**		**94**
7	01.01	2.01	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah**	**Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100%**	**100%**		**100**
7	01.01	2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	1	1	Dok	100
7	01.01	2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun	1	1	Dok	100
7	01.01	2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	1	1	Dok	100
7	01.01	2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun	1	1	Dok	100
7	01.01	2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun	1	1	Dok	100
7	01.01	2.01.06	Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja SKPD	12	12	Dok	100
7	01.01	2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100%**	**98,89**	**%**	**98,89**
7	01.01	2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan	15	14	orang	93,33
7	01.01	2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen SPJ yang telah diverifikasi dan disahkan	14	14	Dok	100
7	01.01	2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi	Jumlah laporan realisasi anggaran dan neraca sesuai dengan SAP dan kebijakan akuntansi	2	2	Lap	100
7	01.01	2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen pelaporan keuangan akhir tahun	1	1	Dok	100
7	01.01	2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran	6	6	Dok	100
7	01.01	2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	12	12	Lap	100
7	01.01	2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100%**	**100**	**%**	**100**
7	01.01	2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	15	15	Pegawai	100
7	01.01	2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	**100**	**%**	**100**
7	01.01	2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik yang disediakan yang Disediakan	15	15	Buah	100

Kode			Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Hasil tahun 2022		Tingkat realisasi (%)
1			*2*	*3*	*4*	*5*		*6=(5/4)*
7	01.01	2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan yang disediakan	75	75	Buah	100
7	01.01	2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah logistik kantor yang disediakan	15	15	Jenis	100
7	01.01	2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang yang dicetak dan digandakan	6500	6500	Lembar	100
7	01.01	2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang disediakan tiap bulan	528	528	Buah	100
7	01.01	2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti	260	260	Kali	100
7	01.01	2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**100**	**%**	**100**
7	01.01	2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	3	3	Unit	100
7	01.01	2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	5	5	Unit	100
7	01.01	2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	100	**%**	**100**
7	01.01	2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang dikelola	2.000	2.000	Surat	100
7	01.01	2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening jasa sumber daya yang dibayar tiap bulan	5	5	Rekening	100
7	01.01	2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah SDM Pelayanan Umum yang disediakan	7	7	Orang	100
7	01.01	2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**100**	**%**	**100**
7	01.01	2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara/difasilitasi	10	10	Unit	100
7	01.01	2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara/difasilitasi	1	1	Unit	100
7	01.01	2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebeleur yang dipelihara	5	5	Unit	100
7	01.01	2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	10	10	Unit	100
7	01.01	2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1	1	Unit	100
7	01.02		**Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik**	**Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**100%**	**100%**		**100**
7	01.02	2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di**	**100%**	**100**	**%**	**100**

Kode			Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Hasil tahun 2022	Tingkat realisasi (%)
1			*2*	*3*	*4*	*5*	*6=(5/4)*
				Kecamatan			
7	01.02	2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Responden Survei IKM	65	65 Orang	100
7	01.02	2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah peserta sosialisasi pelayanan kepada masyarakat	160	160 Orang	100
7	01.03		**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan**	**Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan**	**100%**	**100 %**	**100**
7	01.03	2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Cakupan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**100%**	**100 %**	**100**
7	01.03	2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Desa yang terfasilitasi dalam kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	13	13 Desa	100
7	01.03	2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah peserta koordinasi Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamata	52	52 Orang	100
7	01.03	2.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Cakupan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**100%**	**100 %**	**100**
7	01.03	2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan tingkat Desa/Kelurahan yang terbina	1	1 Lembaga Kemasyarakatn	100
7	01.03	2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah peserta koordinasi antar organisasi kepemudaan di wilayah kecamatan	50	50 Orang	100
7	01.04		**Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum**	**Persentase capaian ketentraman dan ketertiban umum**	**100%**	**100 %**	**100**
7	01.04	2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Cakupan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**100%**	**100 %**	**100**
7	01.04	2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah peserta rapat koordinasi lintas sektoral	120	120 Orang	100
7	01.04	2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah peserta rapat koordinasi Paguyuban Kerukunan Umat Beragama (PKUB)	100	100 Orang	100
7	01.04	2.02	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala Daerah**	**Cakupan Koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah**	**100%**	**100 %**	**100**
7	01.04	2.02.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik	Jumlah peserta Koordinasi Linmas dan KST	80	80 Orang	100
7	01.05		**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum**	**100%**	**100 %**	**100**

Kode			Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Hasil tahun 2022		Tingkat realisasi (%)
1			*2*	*3*	*4*	*5*		*6=(5/4)*
7	01.05	2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**100%**	**100**	**%**	**100**
7	01.05	2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara	Jumlah Orang yang Mengikuti Paskibraka	90	90	Orang	100
7	01.05	2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah peserta Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan yang difasilitasi	132	132	Orang	100
7	01.06		**Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa**	**100%**	**100**	**%**	**100**
7	01.06	2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**100%**	**100**	**%**	**100**
7	01.06	2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi dalam administrasi tata Pemerintahan Desa	13	13	Desa	100
7	01.06	2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi dalam Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	13	13	Desa	100
7	01.06	2.01.08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang dikeluarkan	6	6	Desa	100
7	01.06	2.01.13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah orang mengikuti Musrenbangcam	100	100	Orang	100

Pencapaian hasil pelaksanaan Renja PD dan Renstra PD tidak terlepas dari adanya faktor pendorong yaitu adanya sistem informasi yang saling terintegrasi. Adanya sistem SIPD dan Simda FMIS membantu kerja Kecamatan Weru dalam pelaksanaan pengendalian dan perencanaan program kegiatan PD yang diampu. Namun di sisi lain juga terdapat faktor penghambat, yaitu adanya keterbatasan pegawai dan kecakapan pegawai dalam bidang komputerisasi.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pada tahun 2022 Kecamatan Weru telah melaksanakan 6 program dan 14 kegiatan dan 44 Sub Kegiatan, dengan beberapa capaian indikator sebagai berikut:

1. *Cakupan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*

   Kegiatan ini mencakup penyusunan dokumen perencanaan, RKA, DPA,RKAP, DPPA serta penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dengan capaian kinerja 100%.

2. *Cakupan administrasi Keuangan Perangkat Daerah*

   Kegiatan ini mencakup penyediaan gaji dan tunjangan ASN Kecamatan Weru beserta penatausahaan dan verifikasi keuangan serta laporan keuangan SKPD. Capaian administrasi keuangan sesuai dengan target sebesar 89%.

3. *Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*

   Kegiatan ini mencakup kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan bagi Pegawai serta pengadaan pakaian dinas beserta atributnya guna meningkatkan kedisiplinan Pegawai dalam berpakaian seragam. Capaian kinerja sesuai dengan target 93,33%.

4. *Cakupan Adminsitrasi Umum Perangkat Daerah*

   Kegiatan ini mencakup kegiatan rutin Kantor Kecamatan weru seperti penyediaan makan minum, ATK, penggandaan , Alat listrik, alat kebesihan, penyediaan bahan bacaan / koran serta perjalanan dinas. Capaian kinerja sebesar 100%.

5. *Cakupan Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*

   Kegiatan ini mencakup pengadaan peralatan dan mesin serta pengadaan sarana dan prasarana Gedung kantor. Pengadaan peralatan dan mesin terdiri atas pengadaan smart TV, laptop dan Hardisk external. Sedangkan untuk sarana dan prasarana Gedung kantor yaitu pengadaan gorden serta rehab palvon Pendopo Kecamatan Weru. Capaian kegiatan sebesar 100%.

6. *Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*

   Kegiatan ini mencakup penyediaan jasa surat menyurat, jasa komunikasi dan sumber daya listrik, jasa perlengkapan dan peralatan Kantor serta Jasa Pelayanan Umum. Capaian kinerja sudah sesuai denga target sebesar 100%.

7. *Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.*

   Kegiatan ini mencakup pemeliharaan kendaraan dinas jabatan, kendaraan dinas operasional, mebel, peralatan dan mesin pemeliharaan gedung kantor serta pemeliharaan sarana dan prasarana Gedung kantor. Capaian kinerja sebesar 100%.

8. *Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan.*

   Kegiatan ini mencakup pencapaian standar minimal pelayanan kepada masyarakat yang dilakukan dengan survey IKM dan sosialisasi pelayanan kepada masyarakat. Capaian kinerja sebesar 100%.

9. *Cakupan Koordinasi Pemerdayaan Desa dan Kelurahan.*

   Kegiatan ini mencakup peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum Musrenbangdes serta peningkatan BumDes. Capaian sebesar 100%.

10. *Cakupan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan.*

    Kegiatan ini mencakup pemberdayaan perempuan dalam organisasi PKK serta peningkatan kapasitas organisasi kepemudaan / karang taruna dengan capaian 100%.

11. *Cakupan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum.*

    Kegiatan ini mencakup upaya – upaya dalam menciptakan kondisi yang aman dan tertib di wilayah Kecamatan weru serta Harmonisasi hubungan TOGA dan TOMAS dengan capaian 100%.

12. *Cakupan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada*

Kegiatan ini mencakup pembinaan Linmas dan KST di wilayah Kecamatan Weru dengan capaian 100%.

13. *Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum*

Kegiatan ini mencakup pembinaan wawasan kebangsaan bagi generasi muda dengan pembinaan Paskibra serta pelaksanaan tugas forkompimcam.Capaian kinerja sebesar 100%.

14. *Cakupan Pembinaan dan Pengawasa Pemerintahan Desa*

Kegiatan ini mencakup pembinaan keuangan dan pendayagunaan aset Desa, pengangkatan dan pemebrhentian Perangkat Desa, penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum serta penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa di 13 Desa di kecamatan Weru, dengan capaian 100%.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dengan kedudukan dan fungsinya serta urusan pemerintahan yang diselenggarakan, Kecamatan Weru memiliki lingkup pelayanan yang luas. Sebagai unsur penyelenggaraan pelayanan publik Kecamatan memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat.

Permasalahan- permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan fungsi dan tugas Kecamatan yaitu:

- Kurangnya jumlah pegawai.
- Semakin kompleknya tuntutan dan aspirasi masyarakat dengan berbagai kepentingan sehingga memerlukan perencana yang berkualitas.
- Kurangnya Diklat peningkatan Aparatur.

Permasalahan-permasalahan tersebut secara tidak langsung berdampak pada pencapaian visi dan misi kepala daerah serta terhadap capaian program nasional, seperti SPM dan MDGs. Masih adanya program kegiatan yang tidak signifikan mempercepat pencapaian target indikator berdampak pada kurang optimalnya pencapaian sasaran daerah, sehingga berdampak pada pencapaian visi dan misi Kepala Daerah.

Berkaca pada permasalahan yang ada, dalam rangka meningkatkan kinerja kecamatan weru di masa yang akan datang, tantangan yang dihadapi Kecamatan Weru dalam jangka waktu 5 tahun mendatang adalah:

- Semakin strategisnya peran tahapan perencanaan sebagai konsekuensi tuntutan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan;
- Perubahan kebijakan perencanaan dari *money follow function* menjadi *money follow program*;
- Meningkatnya tuntutan masyarakat untuk perbaikan proses perencanaan dan implementasinya;
- Keterpaduan perencanaan antar kabupaten;
- Program prioritas nasional dan Jateng yang berada di Kecamatan Weru.

Isu penting yang perlu ditindaklanjuti dalam penyusunan program dan kegiatan prioritas tahun selanjutnya adalah adanya kualitas perencanaan belum memadai karena sebagian program/kegiatan belum mampu menjawab permasalahan daerah.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD Tahun 2024 menjadi acuan dalam penyusunan rancangan awal rencana kerja OPD tahun 2024. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan OPD . Secara keseluruhan, hasil telaahan terhadap rancangan awal RKPD dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut:

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2024

KECAMATAN WERU

KABUPATEN SUKOHARJO

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	RENSTRA PD TAHUN 2024			Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2024			Lokasi
			Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp.)	
			Satuan	Target		Satuan	Target		
3	4	5	9		10	11		12	20
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota**	**100%**		**2,357,750,000**	**100%**		**2,313,200,000**	Kecamatan Weru
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	***Cakupan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi Kinerja perangkat Daerah***	**100%**		**19,000,000**	**100%**		**19,000,000**	**Kecamatan Weru**
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	Dokumen	5,000,000	1	Dokumen	5,000,000	Kecamatan Weru
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	3,000,000	1	Dokumen	3,000,000	Kecamatan Weru
7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	2,000,000	1	Dokumen	2,000,000	Kecamatan Weru
7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen	3,000,000	1	Dokumen	3,000,000	Kecamatan Weru
7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen	2,000,000	1	Dokumen	2,000,000	Kecamatan Weru

7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12	Laporan	4,000,000	12	Laporan	4,000,000	Kecamatan Weru
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	***Cakupan administrasi keuangan perangkat daerah***	**100%**	**Persen**	**1,737,000,000**	**100%**	**Persen**	**1,737,078,000**	**Kecamatan Weru**
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12	Orang/bulan	1,615,000,000	12	Orang/bulan	1,615,078,000	Kecamatan Weru
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	Dokumen	111,000,000	12	Dokumen	111,000,000	Kecamatan Weru
7.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12	Dokumen	2,000,000	12	Dokumen	2,000,000	Kecamatan Weru
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	3,000,000	1	Laporan	3,000,000	Kecamatan Weru
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	16	Laporan	4,000,000	16	Laporan	4,000,000	Kecamatan Weru
7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Dokumen	2,000,000	1	Dokumen	2,000,000	Kecamatan Weru
7.01.01.2.05	***Administrasin Kepegawaian Perangkat Daerah***	***Cakupan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah***	**100%**	**Persen**	**31,750,000**	**100%**	**Persen**	**11,750,000**	Kecamatan Weru
7.01.01.2.05.0002	*Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya*	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya*	20	Paket	6,750,000	20	Paket	6,750,000	Kecamatan Weru
7.01.01.2.05.0009	*Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi*	*Jumlah Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan*	20	orang	20,000,000	20	orang	-	Kecamatan Weru
7.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	12	Orang	5,000,000	14	Orang	5,000,000	Kecamatan Weru
7.01.01.2.06	***Administrasin Umum Perangkat Daerah***	***Cakupan administrasi umum Perangkat Daerah***	**100%**	**Persen**	**141,000,000**	**100%**	**Persen**	**141,350,000**	**Kecamatan Weru**
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	Paket	7,000,000	12	Paket	7,000,000	Kecamatan Weru

7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	10	Paket	7,000,000	12	Paket	7,000,000	Kecamatan Weru
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	30	Paket	75,000,000	12	Paket	75,350,000	Kecamatan Weru
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	Paket	12,000,000	12	Paket	12,000,000	Kecamatan Weru
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	Dokumen	5,000,000	12	Dokumen	5,000,000	Kecamatan Weru
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	220	Laporan	35,000,000	240	Laporan	35,000,000	Kecamatan Weru
7.01.01.2.07	***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	***Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	**100%**	**Persen**	**85,000,000**	**100%**	**Persen**	**60,000,000**	Kecamatan Weru
7.01.01.2.07.0001	*Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan*	*Jumlah Kendaraan Dinas Perorangan atau kendaraan dinas jabatan yang diadakan*	1	Unit	25,000,000	0	Unit	0	Kecamatan Weru
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	60	unit	18,000,000	60	Unit	18,000,000	Kecamatan Weru
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4	unit	42,000,000	2	unit	42,000,000	Kecamatan Weru
7.01.01.2.08	***Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	**Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**Persen**	**226,000,000**	**100%**	**Persen**	**225,942,000**	Kecamatan Weru
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	12,000,000	12	Laporan	12,000,000	Kecamatan Weru
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	31,000,000	12	Laporan	30,950,000	Kecamatan Weru
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	183,000,000	12	Laporan	182,992,000	Kecamatan Weru
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**Persen**	**118,000,000**	**100%**	**Persen**	**118,080,000**	**Kecamatan Weru**

7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10	unit	70,000,000	10	unit	70,000,000	Kecamatan Weru
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1	unit	11,000,000	1	unit	11,080,000	Kecamatan Weru
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	9	unit	7,000,000	9	unit	7,000,000	Kecamatan Weru
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	unit	30,000,000	1	unit	30,000,000	Kecamatan Weru
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**78**	**Persen**	**30,000,000**	**79**	**Persen**	**30,000,000**	**Kecamatan Weru**
7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**100%**	**Persen**	**30,000,000**	**100%**	**Persen**	**30,000,000**	**Kecamatan Weru**
7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	2	Laporan	10,000,000	2	Laporan	10,000,000	Kecamatan Weru
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2	Laporan	20,000,000	2	Laporan	20,000,000	Kecamatan Weru
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan**	**100%**	**Persen**	**125,000,000**	**100%**	**Persen**	**125,000,000**	**Kecamatan Weru**
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	cakupan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	**100%**	**Persen**	**25,000,000**	**100%**	**Persen**	**25,000,000**	**Kecamatan Weru**
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	3	Lembaga Kemasyarakatan	15,000,000	3	Lembaga Kemasyarakatan	15,000,000	Kecamatan Weru

7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2	Laporan	10,000,000	2	Laporan	10,000,000	Kecamatan Weru
7.01.03.2.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Cakupan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**100%**	**Persen**	**100,000,000**	**100%**	**Persen**	**100,000,000**	Kecamatan Weru
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	1	Lemb. Kemasyarakatan	90,000,000	1	Lembaga Kemasyarakatan	90,000,000	Kecamatan Weru
7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1	Lembaga Kemasyarakatan	10,000,000	1	Lembaga Kemasyarakatan	10,000,000	Kecamatan Weru
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Prosentase Capaian Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**100%**	**Persen**	**41,000,000**	**100%**	**Persen**	**41,000,000**	Kecamatan Weru
7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Cakupan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum**	**100%**	**Persen**	**25,000,000**	**100%**	**Persen**	**25,000,000**	**Kecamatan Weru**
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2	Laporan	10,000,000	2	Laporan	10,000,000	Kecamatan Weru
7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2	Laporan	15,000,000	2	Laporan	15,000,000	Kecamatan Weru
7.01.04.2.02	**Koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah**	**Cakupan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah**	**100%**	**Persen**	**16,000,000**	**100%**	**Persen**	**16,000,000**	**Kecamatan Weru**

7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	2	Laporan	16,000,000	2	Laporan	16,000,000	Kecamatan Weru
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum**	**100%**	**Persen**	**376,000,000**	**100%**	**Persen**	**376,000,000**	**Kecamatan Weru**
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**100%**	**Persen**	**376,000,000**	**100%**	**Persen**	**376,000,000**	**Kecamatan Weru**
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	80	Orang	190,000,000	80	Orang	190,000,000	Kecamatan Weru
7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan pembinaan (Bimtek, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan pembinaan (Bimtek, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	100	orang	20,000,000	100	Orang	20,000,000	Kecamatan Weru
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12	Dokumen	166,000,000	12	Dokumen	166,000,000	Kecamatan Weru
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa**	**100%**	**Persen**	**78,000,000**	**100%**	**Persen**	**78,000,000**	**Kecamatan Weru**
7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Cakupan fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa**	**100%**	**Persen**	**78,000,000**	**100%**	**Persen**	**78,000,000**	**Kecamatan Weru**
7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4	Dokumen	15,000,000	4	Dokumen	15,000,000	Kecamatan Weru

7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	4	Dokumen	15,000,000	4	Dokumen	15,000,000	Kecamatan Weru
7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	10	Dokumen	15,000,000	1	Dokumen	15,000,000	Kecamatan Weru
7.01.06.2.01.0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	6	Dokumen	15,000,000	4	Dokumen	15,000,000	Kecamatan Weru
7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	1	Dokumen	18,000,000	1	Dokumen	18,000,000	Kecamatan Weru
	JUMLAH				**3,007,750,000**			**2,963,200,000**	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan PD Tahun 2024

Dan Prakiraan Maju Tahun 2025

Kabupaten Sukoharjo

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2024			Sumber Dana	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025			Lokasi
			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana (Rp)		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4		5	6	7		8	9
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota**	**100%**		**2,505,513,000**	**APBD**	**100%**		**2,368,000,000**	**Kecamatan Weru**
7.01.01.2.01	***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	***Cakupan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi Kinerja perangkat Daerah***	**100%**		***19,000,000***	***APBD***	***100%***		***21,000,000***	**Kecamatan Weru**
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	Dokumen	5,000,000	APBD	1	Dokumen	5,000,000	Kecamatan Weru
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	3,000,000	APBD	1	Dokumen	3,000,000	Kecamatan Weru
7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	2,000,000	APBD	1	Dokumen	2,000,000	Kecamatan Weru
7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen	3,000,000	APBD	1	Dokumen	4,000,000	Kecamatan Weru

7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen	2,000,000	APBD	1	Dokumen	3,000,000	Kecamatan Weru
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12	Laporan	4,000,000	APBD	12	Laporan	4,000,000	Kecamatan Weru
7.01.01.202	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	***Cakupan administrasi keuangan perangkat daerah***	**100%**		***1,851,141,000***	*APBD*	***100%***		***1,761,000,000***	Kecamatan Weru
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12	Orang/bulan	1,729,141,000	APBD	12	Orang/bulan	1,635,000,000	Kecamatan Weru
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	12	Dokumen	111,000,000	APBD	12	Dokumen	112,000,000	Kecamatan Weru
7.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12	Dokumen	2,000,000	APBD	12	Dokumen	3,000,000	Kecamatan Weru
7.01.01.2.02.0005	Koorodinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	3,000,000	APBD	2	Laporan	3,000,000	Kecamatan Weru
01.202.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Laporan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	-	-	-	APBD	2	Dokumen	2,000,000	Kecamatan Weru
7.01.01.2.02.0007	Koorodinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12	Laporan	4,000,000	APBD	16	Laporan	4,000,000	Kecamatan Weru
7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12	Dokumen	2,000,000	APBD	1	Dokumen	2,000,000	Kecamatan Weru

7.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	***Cakupan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah***	***100%***		***5,000,000***	*APBD*	***100%***		***32,000,000***	Kecamatan Weru
7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atributnya yang disediakan	19	Paket	-	APBD	20	Paket	7,000,000	Kecamatan Weru
7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Orang yang Mengikuti pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas da Fungsi	20	Orang	-	APBD	20	Orang	20,000,000	Kecamatan Weru
7.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan perundang _ Undangan yang dilaksanakan	``12	Orang	*5,000,000*	APBD	12	Orang	5,000,000	Kecamatan Weru
7.01.01.2.06	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***Cakupan administrasi umum Perangkat Daerah***	***100%***		**241,350,000**	APBD			**155,000,000**	Kecamatan Weru
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	Paket	7,000,000	APBD	12	Paket	7,000,000	Kecamatan Weru
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Paket	7,000,000		10	Paket	7,000,000	Kecamatan Weru
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0	Paket	-	APBD	8	Paket	5,000,000	Kecamatan Weru
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	Paket	175,350,000	APBD	35	Paket	80,000,000	Kecamatan Weru
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	Paket	12,000,000	APBD	12	Paket	15,000,000	Kecamatan Weru
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	Dokumen	5,000,000	APBD	12	Dokumen	5,000,000	Kecamatan Weru

7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	240	Laporan	35,000,000	APBD	220	Laporan	36,000,000	Kecamatan Weru
7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**		***45,000,000***	APBD	**100%**		**25,000,000**	Kecamatan Weru
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang Disediakan	60	Unit	18,000,000	APBD	4	Unit	0	Kecamatan Weru
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2	Unit	27,000,000	APBD	3	Unit	15,000,000	Kecamatan Weru
7.01.01.2.07.0010	Pengadaaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	0	Unit	-	APBD	5	Unit	10,000,000	Kecamatan Weru
7.01.01.2.08	***Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	**Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**		**225,942,000**	**APBD**	**100 %**		**236,000,000**	Kecamatan Weru
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	12,000,000	APBD	12	Laporan	13,000,000	Kecamatan Weru
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	30,950,000	APBD	12	Laporan	35,000,000	Kecamatan Weru
7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	Laporan	0		1	Laporan	3,000,000	Kecamatan Weru
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	10	Laporan	182,992,000	APBD	12	Laporan	185,000,000	Kecamatan Weru

7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**		**118,080,000**	**APBD**	**100%**		**138,000,000**	**Kecamatan Weru**
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10	Unit	70,000,000	APBD	10	Unit	70,000,000	Kecamatan Weru
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1	Unit	11,080,000	APBD	1	Unit	10,000,000	Kecamatan Weru
7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	0	Unit	0	APBD	5	Unit	5,000,000	Kecamatan Weru
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	9	Unit	7,000,000	APBD	10	Unit	8,000,000	Kecamatan Weru
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	30,000,000	APBD	1	Unit	40,000,000	Kecamatan Weru
7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	Unit	0	APBD	2	unit	5,000,000	Kecamatan Weru
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**100**		**30,000,000**	APBD	**100**		**32,000,000**	Kecamatan Weru
7.01.02.2.02	***Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan***	***Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan***	***100%***		***30,000,000***	*APBD*	***100%***		***32,000,000***	**Kecamatan Weru**

7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	**2**	Laporan	10,000,000	APBD	2	Laporan	12,000,000	Kecamatan Weru
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2	Laporan	20,000,000	APBD	2	Laporan	20,000,000	Kecamatan Weru
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Prosentase Pemberdayaan masyarakat desa dan Kalurahan**	**100%**		**125,000,000**	APBD	**100 %**		**136,000,000**	Kecamatan Weru
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	***cakupan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa***	***100%***		***25,000,000***	*APBD*	***100 %***		***31,000,000***	**Kecamatan Weru**
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	3	Lembaga Kemasyarakatan	15,000,000	APBD	3	Lembaga Kemasyarakatan	16,000,000	Kecamatan Weru
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2	Laporan	10,000,000	APBD	3	Laporan	15,000,000	Kecamatan Weru
7.01.03.2.03	***Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan***	***Cakupan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan***	***100%***		***100,000,000***	*APBD*	***100%***		***105,000,000***	Kecamatan Weru
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	1	Lembaga Kemasyarakatan	90,000,000	APBD	1	Lembaga Kemasyarakatan	90,000,000	Kecamatan Weru
7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1	Lembaga Kemasyarakatan	10,000,000	APBD	1	Lembaga Kemasyarakatan	15,000,000	Kecamatan Weru
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Prosentase Capaian Ketentraman dan Ketertiban Umu**	**100%**		**41,000,000**	**APBD**	**100%**		**53,000,000**	Kecamatan Weru

7.01.04.2.01	***Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum***	***Cakupan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum***	***100%***		***25,000,000***	*APBD*	***100 %***		***35,000,000***	**Kecamatan Weru**
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2	Laporan	10,000,000	APBD	4	Laporan	15,000,000	Kecamatan Weru
7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2	Laporan	15,000,000	APBD	4	Laporan	20,000,000	Kecamatan Weru
7.01.04.2.02	**Koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah**	**Cakupan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah**	**100%**		**16,000,000**	APBD	**100%**		**18,000,000**	**Kecamatan Weru**
7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	2	Laporan	16,000,000	APBD	3	Laporan	18,000,000	Kecamatan Weru
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Cakupan penyelenggaan urusan pemerintahan umum**	**100%**		**328,000,000**	**APBD**	**100%**		**376,000,000**	**Kecamatan Weru**
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**100%**		**328,000,000**	**APBD**	**100%**		**376,000,000**	**Kecamatan Weru**

7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	80	Orang	150,000,000	APBD	80	Orang	190,000,000	Kecamatan Weru
7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	80	Orang	12,000,000	APBD	100	Orang	20,000,000	Kecamatan Weru
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12	Dokumen	166,000,000	APBD	12	Dokumen	166,000,000	Kecamatan Weru
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa**	***100%***		**76,000,000**	APBD	***100%***		**68,000,000**	Kecamatan Weru
7.01.06.2.01	***Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa***	***Cakupan fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa***	***100%***		***76,000,000***	*APBD*	***100%***		***68,000,000***	**Kecamatan Weru**
7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4	Dokumen	15,000,000	APBD	4	Dokumen	15,000,000	Kecamatan Weru
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	4	Dokumen	15,000,000	APBD	4	Dokumen	15,000,000	Kecamatan Weru

7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam Pemilihan Kepala Desa	1	Dokumen	15,000,000	APBD	2	Dokumen	5,000,000	Kecamatan Weru
7.01.06.2.01.0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	4	Dokumen	15,000,000	APBD	5	Dokumen	15,000,000	Kecamatan Weru
7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	1	Dokumen	16,000,000	APBD	1	Dokumen	18,000,000	Kecamatan Weru
JUMLAH					**3,105,513,000**				**3,033,000,000**	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Tema Pembangunan Nasional yang direncanakan akan ditetapkan dalam RKP Tahun 2024 adalah "Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan " yang dijabarkan menjadi 7 prioritas nasional di tahun 2024, yaitu:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim;
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Prioritas pembangunan nasional disusun sebagai penjabaran operasional dari Strategi Pembangunan yang digariskan dalam RPJMN 2022-2026 dalam upaya melaksanakan Agenda Pembangunan Nasional untuk memenuhi Nawa Cita.



3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo tahun 2020-2025 yang hendak dicapai dalam tahapan ketiga Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sukoharjo adalah "Mewujudkan Masyarakat Sukoharjo yang lebih Makmur". Untuk mencapai visi Kabupaten tersebut, dirumuskan 5 (lima) misi pembangunan sebagai berikut:

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik melalui Percepatan Reformasi Birokrasi
2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas
3. Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Insklusif
4. Memperkuat Pembangunan Infra Struktur Berwawasan Lingkungan
5. Meningkatkan Kualitas Kehidupan Sosial dan Keagamaan

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dibentuk untuk melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan sehingga program kegiatan di Kecamatan Weru mendukung misi ke-1 (Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam lingkungan kehidupan yang aman, tertib dan tenteram).

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Sukoharjo, indikasi prioritas tema perencanaan tahun 2020 adalah "Meningkatkan kualitas SDM yang berkarakter dan berbudaya untuk mendorong pemanfaatan kawasan pusat pertumbuhan dalam rangka peningkatan perekonomian daerah". Pembangunan kawasan diarahkan meningkatkan manfaat potensi yang ada dari aspek ekonomi dengan tetap mengutamakan dukungan pembangunan sumberdaya manusia yang berlandaskan nilai-nilai budaya Jawa Tengah

Memperhatikan evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Weru, tujuan dan sasaran rencana kerja tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Tahun 2024

MISI RPJMD	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	IKU KEC
MISI 1 RPJMD : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Percepatan Reformasi Birokrasi	Terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	Peningkatan efektivitas kinerja birokrasi dan layanan publik yang responsif, transparan dan akuntabel	Mengembangkan layanan birokrasi yang prima	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

		Meningkatnya kualitas aparatur dan pelayanan publik	1.Meningkatkan kualitas pemanfaatan dan pengembangan publik, 2. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi Pemerintahan	Meningkatkan semangat dan kenyamanan bekerja, kemauan bekerjasama, transparansi dan akuntabel	Nilai SAKIP Perangkat Daerah

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perumusan program dan kegiatan pada Kecamatan Weru didasarkan pada beberapa faktor, diantaranya pencapaian visi dan misi kepala daerah (terutama misi ke-1) dan pengentasan kemiskinan. Rencana kerja Kecamatan Weru tahun 2024 mencakup 6 program terdiri 14 kegiatan dan 45 Sub Kegiatan yaitu:

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Kegiatan dan Sub Kegiatan** :

   a. **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**;
      1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
      2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
      3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD
      4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
      5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
      6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

   b. **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**;
      1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
      2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
      3. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
      4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
      5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD
      6. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

   c. **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**
      1. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

   d. **Administrasi Umum Perangkat Daerah**
      1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
      2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
      3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
      4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
      5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
      6. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

e. **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

1. Pengadaan Mebel
2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

f. **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

g. **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. **Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik dengan Kegiatan dan Sub Kegiatan**:

a. **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**

1. Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
2. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

3. **Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan dengan Kegiatan dan Sub Kegiatan :**

a. **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**

1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
2. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

b. **Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**

1. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan
2. Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan

4. **Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum dengan Kegiatan dan Sub Kegiatan:**

   a. **Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**;

      1. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
      2. Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

   b. **Koordinasi Penerapan dan Penegakan Qanun dan Peraturan Kepala Daerah**.

      1. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

5. **Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan Kegiatan dan Sub Kegiatan :**

   a. **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**

      1. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
      2. Fasilitasi, Koordinasi dan pembinaan (Bimtek, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional
      3. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

6. **Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan Kegiatan dan Sub Kegiatan:**

   a. **Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**

      1. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
      2. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
      3. Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
      4. Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
      5. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif

Rumusan rencana program dan kegiatan OPD tahun 2024 Kecamatan Weru untuk sumber dana APBD Kabupaten Sukoharjo secara detail dapat dilihat pada lampiran Tabel VII sebagai berikut :

TABEL 4.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 Kecamatan Weru

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2024				Catatan
			Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Kecamatan Weru**	**100%**	**30,000,000**	**APBD Kabupaten**	
7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Cakupan penyelenggaran urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja PD yang ada di Kecamatan**	**Kecamatan Weru**	**100%**	**30,000,000**	**APBD Kabupaten**	
7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wialyah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Weru	2 Laporan	10,000,000	APBD Kabupaten	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Weru	2 Laporan	20,000,000	APBD Kabupaten	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan**	**Kecamatan Weru**	**100%**	**125,000,000**	**APBD Kabupaten**	
7.01.02.2.01.04	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**cakupan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa**	**Kecamatan Weru**	**100%**	**25,000,000**	**APBD Kabupaten**	
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Weru	1 Lembaga Kemasyarakatan	15,000,000	APBD Kabupaten	

7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Weru	1 Laporan	10,000,000	APBD Kabupaten	
7.01.03.2.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Cakupan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	Kecamatan Weru	100%	100,000,000	APBD Kabupaten	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kecamatan Weru	1 Lembaga Kemasyarakatan	90,000,000	APBD Kabupaten	
7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kecamatan Weru	1 Lembaga Kemasyarakatan	10,000,000	APBD Kabupaten	
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase capaian ketentraman dan ketertiban umum**	Kecamatan Weru	100%	41,000,000	APBD Kabupaten	
7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Cakupan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum**	Kecamatan Weru	100%	25,000,000	APBD Kabupaten	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Weru	3 Laporan	10,000,000	APBD Kabupaten	
7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kecamatan Weru	2 Laporan	15,000,000	APBD Kabupaten	
7.01.04.2.02	**Koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah**	**Cakupan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah**	Kecamatan Weru	100%	16,000,000	APBD Kabupaten	
7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kecamatan Weru	2 Laporan	16,000,000	APBD Kabupaten	
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum**	Kecamatan Weru	100%	328,000,000	APBD Kabupaten	

7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Kecamatan Weru	100%	328,000,000	APBD Kabupaten	
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kecamatan Weru	80 orang	150,000,000	APBD Kabupaten	
7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan pembinaan (Bimtek, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan pembinaan (Bimtek, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	Kecamatan Weru	80 Orang	12,000,000	APBD Kabupaten	
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kecamatan Weru	12 Dokumen	166,000,000	APBD Kabupaten	
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa**	Kecamatan Weru	100%	76,000,000	APBD Kabupaten	
7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Cakupan fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa**	Kecamatan Weru	100%	76,000,000	APBD Kabupaten	
7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan Weru	4 Dokumen	15,000,000	APBD Kabupaten	
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kecamatan Weru	4 Dokumen	15,000,000	APBD Kabupaten	
7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kecamatan Weru	1 Dokumen	15,000,000	APBD Kabupaten	
7.01.06.2.01.0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kecamatan Weru	6 Dokumen	15,000,000	APBD Kabupaten	

7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Kecamatan Weru	1 Dokumen	16,000,000	APBD Kabupaten	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota**	Kecamatan Weru	64	2,505,513,000	APBD Kabupaten	
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**cakupan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi Kinerja perangkat Daerah**	Kecamatan Weru	100%	19,000,000	APBD Kabupaten	
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Weru	1 dokumen	5,000,000	APBD Kabupaten	
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Laporan hasil Koordinasi penyusunan Dokumen RKA -SKPD	Kecamatan Weru	1 dokumen	3,000,000	APBD Kabupaten	
7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA - SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	Kecamatan Weru	1 dokumen	2,000,000	APBD Kabupaten	
7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan Laporan hasil Koordinasi penyusunan Dokumen DPA -SKPD	Kecamatan Weru	1 dokumen	3,000,000	APBD Kabupaten	
7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan hasil Koordinasi penyusunan Dokumen Perubahan DPA -SKPD	Kecamatan Weru	1 dokumen	2,000,000	APBD Kabupaten	
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Weru	12 Laporan	4,000,000	APBD Kabupaten	
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Cakupan administrasi keuangan perangkat daerah**	Kecamatan Weru	100%	1,851,141,000	APBD Kabupaten	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Kecamatan Weru	12 Orang/bulan	1,729,141,000	APBD Kabupaten	
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahan dan Pengujian/ Verifikasi	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Kecamatan Weru	12 Dokumen	111,000,000	APBD Kabupaten	

7.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	Kecamatan Weru	12 Dokumen	2,000,000	APBD Kabupaten	
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Kecamatan Weru	1 laporan	3,000,000	APBD Kabupaten	
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan /semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan /semesteran SKPD	Kecamatan Weru	12 Laporan	4,000,000	APBD Kabupaten	
7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis prognosis Realisasi anggaran	Jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	Kecamatan Weru	12 dokumen	2,000,000	APBD Kabupaten	
7.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Cakupan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah**	Kecamatan Weru	100%	5,000,000	APBD Kabupaten	
7.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan Weru	14 Orang	5,000,000	APBD Kabupaten	
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan administrasi umum Perangkat Daerah**	Kecamatan Weru	100%	241,350,000	APBD Kabupaten	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Weru	12 paket	7,000,000	APBD Kabupaten	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Weru	12 paket	7,000,000	APBD Kabupaten	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kecamatan Weru	60 Paket	175,350,000	APBD Kabupaten	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kecamatan Weru	12 Paket	12,000,000	APBD Kabupaten	
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kecamatan Weru	12 Dokumen	5,000,000	APBD Kabupaten	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Weru	240 Laporan	35,000,000	APBD Kabupaten	

7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Cakupan pengadaan barang milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah**	Kecamatan Weru	100%	45,000,000	APBD Kabupaten	
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket mebel yang disediakan	Kecamatan Weru	1 Paket	18,000,000	APBD Kabupaten	
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kecamatan Weru	2 unit	27,000,000	APBD Kabupaten	
7.01.01.2.08	**Penyediaan jasa penunjang urusan permerintah daerah**	**Cakupan penyediaan jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kecamatan Weru**	**100%**	**225,942,000**	**APBD Kabupaten**	
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Weru	12 Laporan	12,000,000	APBD Kabupaten	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kecamatan Weru	12 Laporan	30,950,000	APBD Kabupaten	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kecamatan Weru	12 Laporan	182,992,000	APBD Kabupaten	
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah**	**Cakupan pemeliharaan barang milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah**	**Kecamatan Weru**	**100%**	**118,080,000**	**APBD Kabupaten**	
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	umlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kecamatan Weru	10 unit	70,000,000	APBD Kabupaten	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, pajak dan Perizinan kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kecamatan Weru	1 unit	11,080,000	APBD Kabupaten	
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kecamatan Weru	9 unit	7,000,000	APBD Kabupaten	
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilita	Kecamatan Weru	1 unit	30,000,000	APBD Kabupaten	

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Kecamatan Weru Tahun 2024 merupakan pelaksanaan Rencana Strategis tahun ke - 3, periode Renstra 2021 - 2026. Program dan Kegiatan yang direncanakan merupakan prioritas dalam rangka mencapai visi dan misi Kecamatan Weru dan mendukung tercapainya visi dan misi pembangunan Daerah jangka menengah.

Rencana ini akan dijadikan sebagai pedoman/ acuan dalam Menyusun program/ kegiatan PD tahun 2024. Keberhasilan pelaksanaan Renja Kecamatan Weru tahun 2024 tidak terlepas dari peran dan tanggungjawab seluruh karyawan - karyawati Kecamatan Weru serta peran aktif stakeholder yang bersangkutan.

BUPATI SUKOHARJO,

ETIK SURYANI



RENCANA KERJA (RENJA)
KECAMATAN MOJOLABAN
TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan Karunianya, kami telah dapat menyelesaikan penyusuan Rancana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kecamatan Mojolaban Tahun 2024. RENJA Perangkat Daerah Tahun 2024 merupakan bentuk komitemen nyata Perangkat Daerah Kecamatan Mojolaban dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan Perangkat Daerah yang baik sebagai mana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

RENJA adalah wujud perencanaan dokumen Perangkat Daerah dalam satu tahun anggaran. Proses rencana kegiatan dan pengaggaran Perangkat Daerah Kecamatan Mojolaban telah disusun dalam Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024.

Adapun tujuan penyusunan renja adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah, dalam bentuk rancana tahunan. Melalui penyusunan Renja juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsi *good governance*, yaitu dalam rangka terwujudnya perencanaan yang baik dan benar-benar terprogram.

Demikian Laporan RENJA ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Mojolaban, 10 Agustus 2023
CAMAT MOJOLABAN
KABUPATEN SUKOHARJO

JOKO WINDARTO,S,STP,MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19780627 199703 1 001

DAFTAR ISI

Cover 1
Kata Pengantar 2
Daftar Isi 4
BAB I Pendahuluan 6
A. Latar Belakang 6
B. Landasan Hukum 8
C. Maksud dan Tujuan 13
D Sistematika Penulisan 13

BAB II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu 18
A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 18
B. Analisis Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah..... 26
C. Isu–isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD 52
D. Review terhadap Rancangan Awal PD 54
E. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan masyarakat 70

BAB III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah..... 71
A. Telaah Terhadap Kebijakan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo 71
B. Tujuan dan Sasaran 79
BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah 84
BAB V PENUTUP..... 96

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, telah diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan nomenklatur urusan sampai dengan sub kegiatan yang sudah ditentukan. RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dimana dalam penyusunan RKPD diperlukan masukan dari Perangkat Daerah berupa Rencana Kerja Perangkat Daerah. Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah berjangka 1 (satu) tahun yang memuat kondisi pelayanan Perangkat Daerah, gambaran visi dan misi serta rencana pembangunan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun yang akan datang.

Rencana Kerja Perangkat Daerah juga merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran RPJMD oleh Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan oleh Perangkat Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan jangka waktu RPJMD. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku

kepentingan yang ada di Perangkat Daerah berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah perencanaan Perangkat Daerah untuk pereode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja Perangkat Daerah merupakan sebuah dokomen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya. Renja Perangkat Daerah memiliki fungsi yang sangat fondamental dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja Perangkat Daerah merupakan produk perencanaan pada Unit Organisasi pemerintah terendah dan terkecil. Renja Perangkat Daerah berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kualtitas penyusunan Renja Perangkat Daerah sangatlah menentukan pada kualitas pelayanan pada publik.

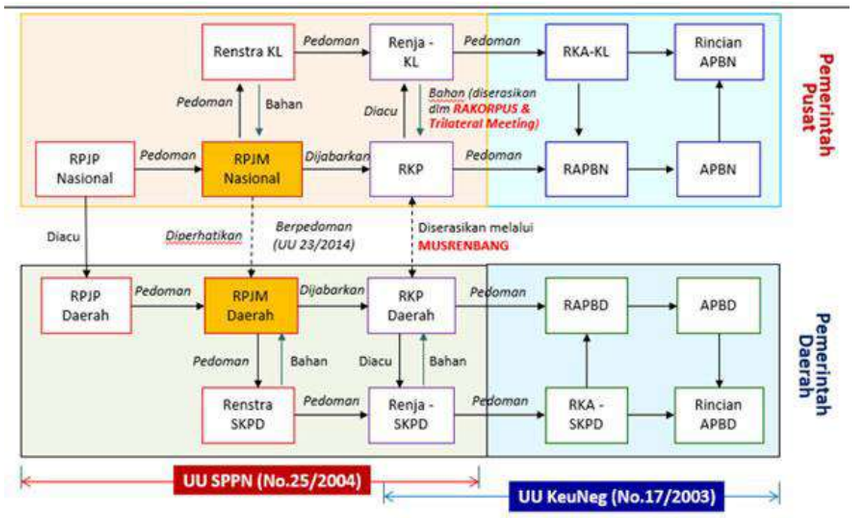
Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dimulai dengan persiapan penyusunan Renja Perangkat Daerah dengan mengumpulkan data dan informasi. Menganalisa gambaran pelayanan Perangkat Daerah untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu berdasrkan Renstra Perangkat Daerah yang didasarkan pada penelaahan rancangan awal RKPD. Selanjutnya menjadi perumusan kegiatan prioritas yang juga didasarkan kepada penelaahan usulan kegiatan masyarakat.

Rencana Kerja Perangkat Daerah juga merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran RPJMD oleh Perangkat Daerah.

Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan oleh Perangkat Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan jangka waktu RPJMD. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Perangkat Daerah berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo untuk periode Tahun 2024 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Sukoharjo dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun di Tahun 2024.

Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Mojolaban Tahun 2024 memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah pembangunan nasional, provinsi, dan mendukung arah perencanaan pembangunan daerah. Adapun Keterkaitan hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan yang ada pada Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan MojolabanTahun 2024 dapat dilihat pada gambar 1.1 :



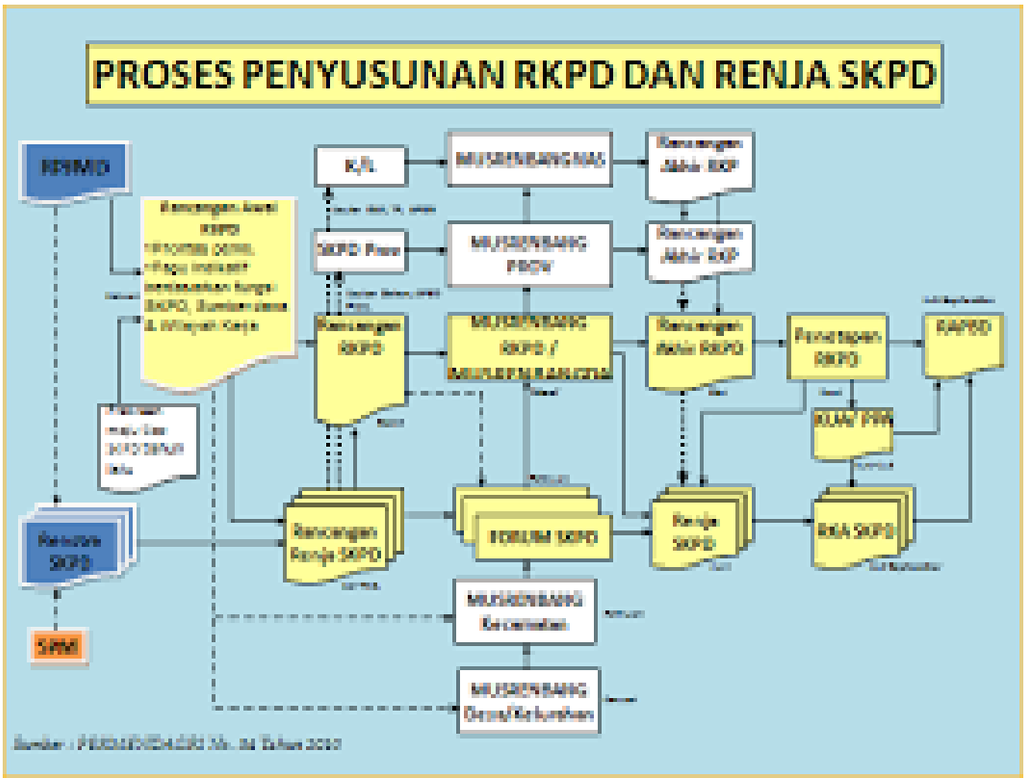
Gambar 1.1
Skema Rencana Pembangunan Pusat dan daerah

RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Nasional, yang memuat strategi pembangunan Nasional, kebijakan umum, program Kementerian/Lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam Rencana Kerjayang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Pasal 263 ayat 2 UU No. 23 Tahun 2014 RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan rencana tata ruang wilayah. Pasal 263 ayat 3 UU No. 23 Tahun 2014 RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat

Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.

Adapun penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 dilakukan melalui 5 (lima) pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan yaitu pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (top-down), dan bawah-atas (bottom-up). Kelima pendekatan dimaksud diselenggarakan secara berkelanjutan untuk membentuk satu siklus perencanaan yang utuh sebagai berikut (Gambar 1.2) :



Gambar 1.2
Alur Penyusunan RKPD dan Rencana Kerja Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo

Berdasarkan Bagan Alur tersebut penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Mojolaban merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021 – 2026. Selain itu Proses penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo merupakan dokumen yang tidak berdiri

sendiri melainkan dilakukan melalui beberapa tahapan, yakni diawali dengan mereview Rensta, Penyusunan Rancangan Rencana Kerja, dan Penetapan Rencana Kerja. Ketiga tahapan dimaksud diselenggarakan secara berkelanjutan untuk menghasilkan dokumen penganggaran yaitu Dokumen RKA SKPD dan Dokumen DPA SKPD yang dituangkan dalam Dokumen APBD Kabupaten Sukoharjo.

Prinsip-prinsip di dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah, adalah sebagai berikut.

a. Berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan mengacu pada rancangan awal RKPD;
b. Rumusan program/kegiatan di dalam Renja Perangkat Daerah didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing Perangkat Daerah;
c. Penyusunan bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta memrupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD;
d. Rumusan program/kegiatan di dalam Renja Perangkat Daerah didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penangan dan mempertimbangkan pagu indikatif Perangkat Daerah;
e. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolak ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun n dan tahun n+1.

Keterkaitan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD dan Renstra Perangkat Daerah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena didalam Renja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dan adanya hubungan

keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD, Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Renja Perangkat Daerah merupakan masukan utama bagi penyusunan KUA, PPAS, RKA Perangkat Daerah, dan RAPBD.

B. Landasan Hukum

Dasar Hukum Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2022 Nomor 180);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran

Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 174);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 192) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031(Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 262);
20. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);
21. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 298);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);

C. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Mojolaban Tahun 2024 adalah :

a. Memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan serta pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Mojolaban Tahun 2024
b. Sebagai acuan dan pedoman pelaksanaan Program/Kegiatan Kecamatan Mojolaban pada Tahun 2024

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Mojolaban Tahun 2024 adalah :

a. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2024 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
b. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Mojolaban selama kurun waktu 1 tahun yaitu Tahun 2024;
c. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan Kecamatan Mojolaban Tahun 2024;
d. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program dan kegiatan Kecamatan Mojolaban Tahun 2024; dan

e. Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Mojolaban Tahun 2024.

D. Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Mojolaban Tahun 2024 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Perubahan Renja SKPD, proses penyusunan Renja SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen RKPD, Renstra SKPD, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan APBD

B. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD

C. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Perubahan Renja SKPD

D. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renja SKPD, serta susunan garis besar isi

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN MOJOLABAN TAHUN 2022

A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Mojolaban Tahun 2022 dan Capaian Renstra Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun n-1) dan perkiraan capaian tahun berjalan, mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun sebelumnya.

B. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo

Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan Indikator Kinerja yang sudah ditetapkan dalam SPM maupun terhadap IKK. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

C. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo

Berisi uraian mengenai sejauhmana tingkat kinerja pelayanan Kecamatan Mojolaban dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah dan permasalahan/hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

BAB III TUJUAN, SASARAN

A. Telaahan Terhadap Kebijakan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo

Penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah, visi misi Kepala Daerah serta yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD

B. Tujuan dan Sasaran

Berisi perumusan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisi uraian garis besar mengenai rekapitulasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan Kecamatan Mojolaban Tahun 2024

BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu Dan Capaian Program Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan OPD untuk 1 (satu) periode yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja Kecamatan Mojolaban menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dan hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kecamatan Mojolaban selama tahun 2023.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Mojolaban Tahun 2022 digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Selain itu, evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Mojolaban Tahun 2022 dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja Kecamatan Mojolaban Tahun 2024 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Kecamatan Mojolaban Tahun 2021-2026 serta sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024.

Adapun realisasi program dan kegiatan tahun 2021-2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1

Realisasi Keuangan Tahun Anggaran 2021 - 2022

No.	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		REALISASI		CAPAIAN	
		2021	2022	2021	2022	2021	2022
1.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**2.770.894.000**	**2.919.022.988**	**2.616.446.947**	**2.838.055.820**	**94,43**	**97,23**
1.1.	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**30.000.000**	**34.000.000**	**29.599.000**	**33.998.000**	**98,66**	**99,99**
	1). Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.000.000	10.000.000	14.932.000	10.000.000	99,55	100
	2). Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.500.000	4.000.000	2.486.000	4.000.000	99,44	100
	3). Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.500.000	4.000.000	2.365.000	3.998.000	94,60	99,95
	4). Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.500.000	4.000.000	2.427.000	4.000.000	97,08	100
	5). Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2.500.000	4.000.000	2.457.000	4.000.000	98,28	100
	6). Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.500.000	4.000.000	2.472.000	4.000.000	98,88	100
	7). Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.500.000	4.000.000	2.460.000	4.000.000	98,40	100
1.2.	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**1.792.579.000**	**1.877.020.000**	**1.692.444.767**	**1.814.827.157**	**94,41**	**96,69**
	1). Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.674.859.000	1.759.348.000	1.581.474.767	1.697.158.157	94,42	96,47
	2). Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	107.720.000	105.672.000	101.659.000	105.672.000	94,37	100
	3). Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2.500.000	3.000.000	2.339.000	3.000.000	93,56	100

No.	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		REALISASI		CAPAIAN	
		2021	2022	2021	2022	2021	2022
	4). Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.500.000	3.000.000	2.279.000	3.000.000	91,16	100
	5). Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2.500.000	3.000.000	2.279.000	3.000.000	91,16	100
	6). Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2.500.000	3.000.000	2.414.000	2.997.000	95,56	99,90
1.3.	**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**139.900.000**	**5.000.000**	**137.607.000**	**4.910.000**	**98,36**	**98,20**
	1). Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	19.900.000	0	17.875.000	0	89,82	0
	2) Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan	120.000.000	5.000.000	119.732.000	4.910.000	99,78	98,20
1.4.	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**193.876.000**	**205.083.500**	**181.820.000**	**200.583.900**	**93,78**	**97,81**
	1). Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.995.500	9.998.100	7.995.500	9.998.100	100	100
	2). Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.700.000	15.000.000	7.700.000	15.000.000	100	100
	3). Penyediaan Bahan Logistik Kantor	127.000.000	111.665.000	126.864.000	111.655.000	99,89	99,99
	4). Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	15.725.500	14.790.400	15.725.500	14.790.000	100	100
	5). Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.000.000	5.000.000	3.915.000	5.000.000	97,88	100
	6). Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	31.455.000	48.630.000	19.620.000	44.140.800	62,37	90.77

No.	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		REALISASI		CAPAIAN	
		2021	2022	2021	2022	2021	2022
1.5.	**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**113.584.000**	**111.100.000**	**110.885.000**	**110.964.000**	**97,62**	**99,88**
	1). Pengadaan Mebel	11.950.000	17.530.000	11.040.000	17.495.000	99,92	99,80
	2). Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	80.950.000	82.319.000	80.675.000	82.235.000	99,73	99,90
	3). Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	9.924.000	8.421.000	7.510.000	8.415.000	75,68	99,93
	4). Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya	10.815.000	2.830.000	10.760.000	2.819.000	99,49	99,61
1.6.	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**249.495.000**	**263.221.988**	**219.679.518**	**253.976.746**	**88,05**	**96,49**
	1). Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.000.000	12.900.000	11.996.000	12.867.000	99,97	99,74
	2). Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	81.500.000	79.100.000	61.568.518	75.216.248	75,54	95.09
	3). Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	155.995.000	171.221.988	146.115000	165.893.498	93,67	96,89
1.7.	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**251.460.000**	**423.597.500**	**244.411.662**	**418.796.017**	**97,20**	**98,87**
	1). Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	70.000.000	73.450.000	66.391.662	70.890.517	94,85	96,52
	2). Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan , Pajak Dan	13.890.000	14.962.500	12.678.000	13.795.500	91,27	92,20

No.	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		REALISASI		CAPAIAN	
		2021	2022	2021	2022	2021	2022
	Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						
	3). Pemeliharaan Mebel	10.000.000	10.000.000	9.925.000	10.000.000	99,25	100
	4). Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.000.000	15.260.000	14.995.000	15.215.000	99,97	99,71
	5) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	137.575.000	301.850.000	135.457.000	300.835.000	98,46	99,66
	6). Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4.995.000	8.075.000	4.965.000	8.060.000	99,40	99,81
2.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**20.000.000**	**20.000.000**	**19.180.000**	**19.999.000**	**95,90**	**100**
2.1.	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**20.000.000**	**20.000.000**	**19.180.000**	**19.999.000**	**95,90**	**100**
	1) Fasilitasi Percepatan Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	10.000.000	10.000.000	9.621.000	9.999.000	96,21	99,99
	2) Peningkatan Efektiftas Pelaksanaan Pelayanan masyarakat di wilayah kecamatan	10.000.000	10.000.000	9.559.000	10.000.000	95,59	100
3.	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**80.000.000**	**99.700.000**	**79.648.000**	**99.699.000**	**99,56**	**100**
3.1.	**Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**20.000.000**	**25.000.000**	**19.842.000**	**25.000.000**	**99,21**	**100**

No.	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		REALISASI		CAPAIAN	
		2021	2022	2021	2022	2021	2022
	1). Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10.000.000	15.000.000	9.886.000	15.000.000	98,86	100
	2). Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	10.000.000	10.000.000	9.956.000	10.000.000	99,56	100
3.2.	**Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**60.000.000**	**74.700.000**	**59.806.000**	**74.699.000**	**99,68**	**100**
	1). Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000	59.700.000	49.865.000	59.700.000	99,73	100
	2). Peningkatan Kapasitas Lembaga kemasyarakatan	10.000.000	15.000.000	9.941.000	14.999.000	99,41	99,99
4.	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**533.236.000**	**37.000.000**	**526.338.000**	**37.000.000**	**98,71**	**100**
4.1.	**Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**528.236.000**	**27.000.000**	**521.353.000**	**27.000.000**	**98,70**	**100**
	1). Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah	10.000.000	12.000.000	9.310.000	12.000.000	93,10	100
	2). Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	518.236.000	15.000.000	512.043.000	15.000.000	98,80	100
4.2.	**Kegiatan Koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah**	**5.000.000**	**10.000.000**	**4.985.000**	**10.000.000**	**99,70**	**100**

No.	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		REALISASI		CAPAIAN	
		2021	2022	2021	2022	2021	2022
	dan peraturan kepala daerah						
	1). Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	5.000.000	10.000.000	4.985.000	10.000.000	99,70	100
5.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**130.000.000**	**356.000.000**	**122.764.000**	**355.952.000**	**94,43**	**99,99**
5.1.	**Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**130.000.000**	**356.000.000**	**122.764.000**	**355.952.000**	**94,43**	**99,99**
	1). Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	0	190.000.000	0	189.970.000	0	99,98
	2). Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	130.000.000	166.000.000	122.764.000	165.982.000	94,43	99,99

No.	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		REALISASI		CAPAIAN	
		2021	2022	2021	2022	2021	2022
6.	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**55.000.000**	**83.150.000**	**54.207.000**	**83.129.000**	**98,43**	**99.97**
6.1.	**Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**55.000.000**	**83.150.000**	**54.207.000**	**83.129.000**	**98,56**	**99.97**
	1). Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	10.000.0-00	15.000.000	9.898.000	14.979.000	98,98	99,86
	2). Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	10.000.000	15.000.000	9.636.000	15.000.000	96,36	100
	3). Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	15.000.000	18.150.000	14.942.000	18.150.000	99,61	100
	4). Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa	10.000.000	15.000.000	9.952.000	15.000.000	99,52	100
	5). Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	10.000.000	20.000.000	9.779.000	20.000.000	97,79	100
	TOTAL	**3.589.130.000**	**3.514.872.988**	**3.418.583.947**	**3.433.834.820**	**95,25**	**97,69**

B. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan tugasnya Kecamatan Mojolaban mengacu pada tugas Camat yaitu membantu Bupati dalam menggkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan keluarahan, serta fungsi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 81 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Staf

Ahli Bupati, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat dan Kecamatan. Tugas dan fungsi tersebut dilaksanakan menurut kedudukan masing-masing dalam struktur organisasi yang ada di Kecamatan Mojolaban. Tugas pokok dan fungsi Kecamatan tersebut adalah :

a. Camat

Tugas Camat membantu dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, dan Pemberdayaan masyarakat desa dan kalurahan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Camat mempunyai fungsi :

1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
2. Pengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Pengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Pengoordinasikan penerapan dan pengakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
5. Pengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Pengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yangdilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
7. Pembinaan dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa
8. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan;
9. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan Kecamatan; dan
10. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Sekretariat Kecamatan

Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh seorang Sekretaris Kecamatan yang berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Camat yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan konsep dan pelaksananan kebijakan, pengoordinasiaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi keuangan, hukum, informasi, kehumasan, keoorganesasian dan ketatalaksanaan, pembinanan ketatusahaan, kearsipan kerumahtanggaan, kepegawaian, pengelolaan dan penatausahaan aset, dan pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan. Dalam melaksanakan tugas Sekretariat Kecamatan mempunyai fungsi :

1. Pengoordinasian penyusunan kebiajkan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Kecamatan;
2. Pembinaan dan pemeberian dukungan administrasi yang meliputi keuangan, hukum, hubungan masyarakat, ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, dan pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan;
    a. Pengoordinasian, pembinaan dan penataan organesasi dan tata laksana di lingkungan Kecamatan;
    b. Pengoordinasiaan dan penyusunan peraturan perundang-unangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Kecamatan;
    c. Pengoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
    d. Penyelenggaraan dan penatausahaan aset dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingukungan Kecamatan;
    e. Pelaksananan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
    f. Pengelolaan kepegawaian di lingkungan Kecamatan; dan
    g. Pelaksananan fungsi kedinasan lain yang diberikan

oleh pimpinansesuai dengan fungsinya.

c. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian berada dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Camat yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang perencanaan, data informasi, dan program kerja, dan pengelolaan keuangan di lingkungan Kecamatan.

d. Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Subbagian berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Camat yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemanatauan, evaluasi serta pelaporanyang meliputi pembinaan ketatausahaan , hukum, kehumasan, keorganesasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, kearsipan, kepegawaian, pengelolaan dan penatausahaan aset dan pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan.

e. Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat yang mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksananan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang pemerintahan umum dan desa meliputi administrasi kependudukan, dan meningkatkan kemadirian politik, monograafi kecamatan, pengisian Perangkat Desa dan Kepala Desa, pembinanan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa, pembinaan Badan Perwakilan Desa dan Lembaga Kemasyaraakatan Desa serta pelaksananan kegiatan baik

di tingkat internal Kecamatan maupun dengan pihak terkait dan pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat sebagai urusan otonomi daerah di bidang pemerintahan.

f. Seksi Keamanan dan Ketertiban.

Seksi Keamanan dan Ketertiban dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat yang mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksananan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang ketenteraman dan ketertiban wilayah serta pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat meliputi penanggulangan bencana alam, dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta pelaksanaan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat sebagian urusan otonomi daerah di bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

g. Seksi Pemerdayaan Masyarakat Desa

Seksi Pemerdayaan Masyarakat Desa dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat yang mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksananan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang pembangunan, pemberdayaan masyarakat, perekonomian desa, produksi dan disstribusi dan pelaksanaan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camatsebagian urusan otonomi daerah di bidang pemberdayaan masyarakat desa.

h. Seksi Kesejahteraan Sosial

Seksi Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat yang mempunyai tugas penyiapan bahan

perumusan, pengoordinasian, pelaksananan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang kesejahteraan sosial yang meliputi masalah sosial, kepemudaan, peranan wanita, olah raga, kehidupan keagamaan, kebudayaan dan kesehatan, peningkatan kualitas sumber daya perangkat desa,lembaga desa dan pemberian bantuan sosial serta program pengentasan kemiskinan serta pelaksanaan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat sebagian urusan otonomi daerah di bidang kesejahteraan sosial.

j. Seksi Pelayanan Umum

Seksi Pelayanan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat yang mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksananan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang Pelayanan Umum yang meliputi inventarisasi data kekayaan desa, dan sarana prasarana desa, kebersihan lingkungan yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat, pelayanan kependudukan, kebersihan lingkungan, perizinan peningkatan sarana dan prasarana fasilitas umum dan pelayanan umum administrasi kependudukan, pelayanan administrasi terpadu kecamatan, percepatan pencapaian standar pelayanan minimal serta pelaksanaan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat sebagian urusan otonomi daerah di bidang Pelayanan Umum.



Gambar. 1 Struktur Organisasi Kecamatan Mojolaban

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja palayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Kecamatan Mojolaban dilakukan terhadap penilaian capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan.

IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah yang mengacu pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026. Secara rinci, capaian IKU Kecamatan Mojolaban disajikan pada tabel berikut :

INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH

KECAMATAN MOJOLABAN

Kode	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah(Tujuan/Sasaran)	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal	TARGET DAN CAPAIAN RENSTRA PD							
					Target 2021	Capaian 2021	Target 2022	Capaian 2022	Target 2023	Target 2024	Targetr 2025	Target 2026
Kecamatan Mojolaban												
1	Terwujudnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Responsif dan Akuntabel	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	angka	80	80	80,03	81	87,25	82	83	84	86
1.1	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	Persentase Peningkatan Pelayanan Kecamatan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1.2	Meningkatnya kualitas aparatur dan pelayanan publik	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	angka	59,32	59,32	69,18	62	Dinilai di Tahun 2023	64	67	69	71

Program–program yang dilaksanakan pada tahun tahun 2024 yaitu:

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
4) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
5) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
6) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Program–program tersebut dilaksanakan dalam rangka memenuhi tugas untuk melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa.

PD Kecamatan merupakan representasi Pemerintah pada tingkat bawah, yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, menjadi pihak yang paling dekat dengan masyarakat. Melaksanakan tugas pelayanan publik yang paling dekat dengan masyarakat bukanlah hal yang mudah yang bisa dilalui tanpa ada hambatan dan permasalahan–permasalahan. Hambatan dan permasalahan yang ada dapat diselesaikan dengan kerjasama antara pegawai di lingkungan Kecamatan Mojolaban.

Pencapaian indikator kinerja yang telah dilakukan Kecamatan Mojolaban berdasarkan tugas dan fungsinya dalam rangka pencapaian indikator kinerja daerah, sesuai dengan tugasnya dalam melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan peningkatan koordinasi penyelenggaraan

pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat kelurahan, tampak dalam tabel berikut :

Tabel 2.2

EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH KECAMATAN MOJOLABAN

TAHUN 2022

No	Kode Rekening	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Renja PD Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang dievaluasi		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran DPA PD 2022 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran DPA 2022 yang dievaluasi (%)		PD Penanggung Jawab	Permasalahan
							I		II		III		IV							
1		3	4	4.A	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5*100		12	13
					K	Rp (Ribu) DPA	K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)	K	%		
I	4.02.02.2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	%	100	20.000.000	1	150.000	38	7.621.000	39	7.710.000	23	4.518.000	100	19.999.000	100	100,00	Kecamatan Mojolaban	-
1	4.02.02.2.16	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	%	100	20.000.000	1	150.000	38	7.621.000	39	7.710.000	23	4.518.000	100	19.999.000	100	100,00		

	4.02.02.2.16.0002	Fasilitasi Percepatan Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Dokumen Responden Survey IKM	org	80	10.000.000	0	150.000	40	4.091.000	30	2.825.000	10	2.933.000	80	9.999.000	100	99,99		
	4.02.02.2.16.0004	Peiningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah peserta sosialisasi pelayanan kepada masyarakat	Org	160	10.000.000	0	-	50	3.530.000	70	4.885.000	40	1.585.000	160	10.000.000	100	100,00		
II	**4.02.02.2**	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan**	**Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan**	**%**	**100**	**99.700.000**	**13**	**12.504.000**	**25**	**25.365.500**	**35**	**34.550.000**	**27**	**27.279.500**	**100**	**99.699.000**	**100**	**100,00**	**Kecamatan Mojolaban**	**-**
2	**4.02.02.2.19**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Cakupan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**%**	**100**	**25.000.000**	**0**	**-**	**25**	**6.223.000**	**71**	**17.677.000**	**20**	**1.100.000**	**100**	**25.000.000**	**100**	**100,00**		
	4.02.02.2.19.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Desa yang terfasilitasi dalam kegiatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	desa	15	15.000.000	0	-	0	-	15	15.000.000	0	-	15	15.000.000	100	100,00		
	4.02.02.2.19.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah peserta koordinasi Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	org	110	10.000.000	0	-	60	6.223.000	30	2.677.000	20	1.100.000	110	10.000.000	100	100,00		

3	**4.02.02.2.21**	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Cakupan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**%**	**100**	**74.700.000**	**17**	**12.504.000**	**26**	**19.142.500**	**23**	**16.873.000**	**0**	**26.179.500**	**100**	**74.699.000**	**100**	**100,00**		
	4.02.02.2.21.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Desa yang terbina	lembaga	15	59.700.000	15	12.504.000	15	14.798.500	15	11.977.000	15	20.420.500	15	59.700.000	100	100,00		
	4.02.02.2.21.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah peserta koordinasi antar organisasi kepemudaan di wilayah kecamatan	org	100	15.000.000	0	-	30	4.344.000	30	4.896.000	40	5.759.000	100	14.999.000	100	99,99		
III	**4.02.02.2**	**Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum**	**Persentase capaian ketentraman dan ketertiban umum**	**%**	**100**	**37.000.000**	**6**	**2.239.000**	**23**	**8.672.000**	**58**	**21.499.000**		**4.590.000**	**100**	**37.000.000**	**100**	**100,00**	**Kecamatan Mojolaban**	**-**
4	**4.02.02.2.23**	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Cakupan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**%**	**100**	**27.000.000**	**8**	**2.239.000**	**31**	**8.397.000**	**52**	**14.024.000**	**32**	**2.340.000**	**100**	**27.000.000**	**100**	**100,00**		
	4.02.02.2.23.0001	Sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah peserta rapat koordinasi lintas sektoral	org	150	12.000.000	40	2.239.000	35	2.047.000	75	7.714.000	0	-	150	12.000.000	100	100,00		
	4.02.02.2.23.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokokh Masyarakat	Jumlah peserta rapat koordinasi Paguyuban Kerukunan Umat Beragama (PKUB)	org	212	15.000.000	0	-	90	6.350.000	90	6.310.000	32	2.340.000	212	15.000.000	100	100,00		

5	**4.02.02.2.24**	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**Cakupan Koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah**	**%**	**100**	**10.000.000**	**0**	**-**	**3**	**275.000**	**75**	**7.475.000**	**20**	**2.250.000**	**100**	**10.000.000**	**100**	**100,00**		
	4.02.02.2.24.0001	Koordinasi/sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah peserta Koordinasi Linmas dan KST	org	60	10.000.000	0	-	0	275.000	40	7.475.000	20	2.250.000	60	10.000.000	100	100,00		
IV	**4.02.02.2**	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**Cakupan Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum**	**%**	**100**	**356.000.000**	**10**	**28.084.000**	**15**	**54.711.000**	**54**	**191.749.000**	**23**	**81.408.000**	**100**	**355.952.000**	**100**	**99,99**	**Kecamatan Mojolaban**	**-**
6	**4.02.02.2.27**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**%**	**100**	**356.000.000**	**10**	**28.084.000**	**15**	**54.711.000**	**54**	**191.749.000**	**23**	**81.408.000**	**100**	**355.952.000**	**100**	**99,99**		
	4.02.02.2.27.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinenka Tunggal Ika serta	Jumlah peserta PASKIBRA yang difasilitasi	org	90	190.000.000	0	-	0	-	90	149.970.000	90	40.000.000	90	189.970.000	100	99,98		

		Pemertahananan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara																	
	4.02.02.2 .27.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan Di Kecamatan	Jumlah peserta Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan yang difasilitasi	org	132	166.000.000	33	28.084.000	33	54.711.000	33	41.779.000	33	41.408.000	132	165.982.000	100	99,99		
V	**4.02.02.2**	**Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa**	**%**	**100**	**83.150.000**	**40**	**32.927.000**	**22**	**18.372.500**	**14**	**11.991.000**	**24**	**19.838.500**	**100**	**83.129.000**	**100**	**99,97**	**Kecamatan Mojolaban**	**-**
7	**4.02.02.2 .28**	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengaasan Pemerintahan Desa**	**Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**%**	**100**	**83.150.000**	**40**	**32.927.000**	**22**	**18.372.500**	**14**	**11.991.000**	**24**	**19.838.500**	**100**	**83.129.000**	**100**	**99,97**		
	4.02.02.2 .28.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang dimonitoring dan dievaluasi dalam bidang administrasi pemerintahan desa	desa	15	15.000.000	15	4.303.000	15	4.419.500	15	4.606.000	15	1.650.500	15	14.979.000	100	99,86		
	4.02.02.2 .28.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi dalam Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	desa	15	15.000.000	15	2.684.000	15	4.342.000	15	900.000	15	7.074.000	15	15.000.000	100	100,00		
	4.02.02.2 .28.0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang dikeluarkan	desa	12	18.150.000	4	4.851.000	3	3.271.000	2	2.189.000	3	7.839.000	12	18.150.000	100	100,00		

	4.02.02.2.28.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan dan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	desa	15	15.000.000	15	1.239.000	15	6.190.000	15	4.296.000	15	3.275.000	15	15.000.000	100	100,00		
	4.02.02.2.15.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah peserta Musrenbangcam	org	100	20.000.000	100	19.850.000	0	150.000	0	-		-	100	20.000.000	100	100,00		
VI	**4.02.01.2**	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah**	**%**	**100**	**2.919.022.988**	**13**	**370.136.506**	**29**	**859.125.828**	**26**	**758.513.554**	**29**	**850.279.932**	**97**	**2.838.055.820**	**100,0**	**97,23**	**Kecamatan Mojolaban**	**-**
8	**4.02.01.2.01**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**%**	**100**	**34.000.000**	**11**	**3.577.500**	**30**	**10.339.000**	**32**	**10.740.500**	**27**	**9.341.000**	**100**	**33.998.000**	**100**	**99,99**		
	4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	dokumen	1	10.000.000	0	2.015.000	1	3.672.500	0	3.034.000	0	1.278.500	1	10.000.000	100	100,00		
	4.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang tersusun	dokumen	1	4.000.000	0	-	0	-	1	2.473.000	0	1.527.000	1	4.000.000	100	100,00		
	4.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang tersusun	dokumen	1	4.000.000	0	-	0	1.087.500	1	2.440.500	0	470.000	1	3.998.000	100	99,95		
	4.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang tersusun	dokumen	1	4.000.000	1	1.362.500	0	-		-	0	2.637.500	1	4.000.000	100	100,00		

	4.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang tersusun	dokumen	1	4.000.000	0	-	0	-	1	1.354.000	0	2.646.000	1	4.000.000	100	100,00		
	4.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja SKPD	dokumen	2	4.000.000	2	50.000	0	2.089.000	0	1.079.000	0	782.000	2	4.000.000	100	100,00		
	4.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	dokumen	2	4.000.000	2	150.000	0	3.490.000	0	360.000	0	-	2	4.000.000	100	100,00		
9	**4.02.01.2.02**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**%**	**100**	**1.877.020.000**	**14**	**264.585.136**	**32**	**604.752.033**	**26**	**489.629.802**	**24**	**455.860.186**	**97**	**1.814.827.157**	**100**	**96,69**		
	4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan	bulan	18	1.759.348.000	18	237.350.136	18	574.241.033	18	460.305.802	18	425.261.186	18	1.697.158.157	100	96,47		
	4.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen SPJ yang telah diverifikasi dan disahkan	dokumen	12	105.672.000	3	25.169.000	3	27.678.000	3	26.838.000	3	25.987.000	12	105.672.000	100	100,00		
	4.02.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah laporan realisasi anggaran dan neraca sesuai dengan SAP dan kebijakan akuntansi	laporan	12	3.000.000	3	672.000	3	629.000	3	1.037.000	3	662.000	12	3.000.000	100	100,00		
	4.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen pelaporan keuangan akhir tahun	dokumen	1	3.000.000	0	712.000	0	-	0	-	1	2.288.000	1	3.000.000	100	100,00		
	4.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan/ semesteran	dokumen	3	3.000.000	2	682.000	1	795.000	0	664.000	0	859.000	3	3.000.000	100	100,00		

	4.02.01.2.02.0008	Penyusunana Laporan dan Analisis Prognosisi Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen pelaporan prognosis realisasi anggaran	lapor an	12	3.000.000	3	-	3	1.409.000	3	785.000	3	803.000	12	2.997.000	100	99,90		
10	**4.02.01.2.05**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**%**	**100**	**5.000.000**	**32**	**1.603.000**	**0,00**	**-**	**66**	**3.307.000**	**0**	**-**	**98**	**4.910.000**	**100**	**98,20**		
	4.02.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	pega wai	20	5.000.000	20	1.603.000	0	-	20	3.307.000	0	-	20	4.910.000	100	98,20		
		Pengadaan Pakaian Dinas	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya yang diadakan	poton g	0	-	0		0	-	0	-	0	-	0	-	-			
		Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	orang	0	-	0	-	0	-	0	-	0		0	-	-			
11	**4.02.01.2.06**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**%**	**100**	**205.083.500**	**12**	**24.770.000**	**27**	**54.395.000**	**23**	**48.030.800**	**36**	**73.388.100**	**98**	**200.583.900**	**100**	**97,81**		
	4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik yang disediakan	buah	40	9.998.100	10	1.570.000	10	4.120.000	10	2.083.000	10	2.225.100	40	9.998.100	100	100,00		
	4.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan dan perlengkapan yang disediakan	buah	48	15.000.000	11	2.615.000	10	4.740.000	14	4.540.000	13	3.105.000	48	15.000.000	100	100,00		

	4.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah logistik kantor yang disediakan	jenis	6	111.665.000	6	15.380.000	6	31.439.000	6	18.197.000	6	46.639.000	6	111.655.000	100	99,99		
	4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang yang dicetak dan digandakan	lembar	21900	14.790.400	4282	2.200.000	6334	6.196.000	6130	3.910.000	5154	2.484.000	21900	14.790.000	100	100,00		
	4.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang disediakan tiap bulan	eks	90	5.000.000	90	1.055.000	90	1.165.000	90	1.055.000	90	1.725.000	90	5.000.000	100	100,00		
	4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti	kali	410	48.630.000	42	1.950.000	132	6.735.000	128	18.245.800	108	17.210.000	410	44.140.800	100	90,77		
12	**4.02.01.2.07**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**%**	**100**	**111.100.000**	**0**	**-**	**90**	**99.594.000**	**0,00**	**-**	**10**	**11.370.000**	**100**	**110.964.000**	**100**	**99,88**		
	4.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan	buah	19	17.530.000	0	-	19	17.495.000	0	-	0	-	19	17.495.000	100	99,80		
	4.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	unit	12	82.319.000	0	-	11	75.865.000	0	-	1	6.370.000	12	82.235.000	100	99,90		
	4.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	unit	7	8.421.000	0	-	2	3.415.000	0	-	5	5.000.000	7	8.415.000	100	99,93		
	4.02.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan	unit	3	2.830.000	0	-	3	2.819.000	0	-	0	-	3	2.819.000	100	99,61		

			Lainnya yang diadakan																
13	**4.02.01.2.08**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**%**	**100**	**263.221.988**	**21**	**55.915.870**	**21**	**55.582.559**	**28**	**74.449.071**	**26**	**68.029.246**	**96**	**253.976.746**	**100**	**96,49**		
	4.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang dikelola	surat	2500	12.900.000	430	2.337.000	625	4.228.000	510	4.011.000	935	2.291.000	2500	12.867.000	100	99,74		
	4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening jasa sumber daya yang dibayar tiap bulan	rekening	5	79.100.000	5	17.113.870	5	16.449.559	5	15.997.781	5	25.655.038	5	75.216.248	100	95,09		
	4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah SDM Pelayanan Umum yang disediakan	orang	8	171.221.988	8	36.465.000	8	34.905.000	8	54.440.290	8	40.083.208	8	165.893.498	100	96,89		
14	**4.02.01.2.09**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**%**	**100**	**423.597.500**	**5**	**19.685.000**	**8**	**34.463.236**	**31**	**132.356.381**	**55**	**232.291.400**	**99**	**418.796.017**	**100**	**98,87**		
	4.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara/difasilitasi	unit	13	73.450.000	13	12.570.000	13	20.195.236	13	17.682.381	13	20.442.900	13	70.890.517	100	96,52		
	4.02.01.2.09.0005	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara/difasilitasi	unit	1	14.962.500	1	3.280.000	1	3.683.000	1	3.240.000	1	3.592.500	1	13.795.500	100	92,20		

	4.02.01.2.09.0003	Pemeliharaan mebel	Jumlah mebeleur yang dipelihara	unit	100	10.000.000	12	1.200.000	10	1.800.000	47	5.250.000	31	1.750.000	100	10.000.000	100	100,00		
	4.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	unit	50	15.260.000	12	2.040.000	14	5.020.000	17	2.970.000	7	5.185.000	50	15.215.000	100	99,71		
	4.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	unit	1	301.850.000	0	-	0	-	1	101.227.000	0	199.608.000	1	300.835.000	100	99,66		
	4.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarpras Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	unit	20	8.075.000	7	595.000	5	3.765.000	0	1.987.000	8	1.713.000	20	8.060.000	100	99,81		
	JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM					**3.514.872.988**		**446.040.506**		**973.867.828**		**1.026.012.554**		**987.913.932**		**3.433.834.820**	**100,00**	**97,69**		

Tabel 2.2

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN MOJOLABAN

KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2022

No	Sasaran/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD 2026	2022		Persentase Capaian s/d Triwulan IV	Status Capaian RPJMD	PD Penanggung Jawab
					Target	Realisasi s/d Triwulan IV			
1	**Terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public yang responsive dan akuntabel**	**Indek Kepuasan Masyarakat**		**86**	**81**	**87,25**			
1.1	**Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat**	**Persentase peningkatan pelayanan Kecamatan**	**%**	**100**	**100**	**100**			
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	%	100	100	100,00	100,00	Telah Tercapai	Kecamatan Mojolaban
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	%	100	100	100,00	100,00	Telah Tercapai	Kecamatan Mojolaban
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Capaian Ketentraman Dan Ketertiban Umum	%	100	100	100,00	100,00	Telah Tercapai	Kecamatan Mojolaban

	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	%	100	100	100,00	100,00	Telah tercapai	Kecamatan Mojolaban
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	%	100	100	100,00	100,00	Telah tercapai	Kecamatan Mojolaban
1.2	**Meningkatnya Kualitas Aparatur dan Pelayanan Publik**	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**		**71**	**62**	**dinilai di tahun 2023**			
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Urusan Pemerintah Daerah	%	100	100	100,00	100,00	Telah tercapai	Kecamatan Mojolaban

Tabel 2.3

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN MOJOLABAN

KABUPATEN SUKOHARJO

TAHUN 2021-2026

NO	Program dan Kegiatan	Indikator kinerja Program dan Kegiatan sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangangkat Daerah Tahun ke -						Reaaliasasi Capaian Tahun ke -						Rasio Capaian pada tahun ke-					
						2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2		3	4	5	6	7	8	9		10	6	7	8	9		10	6	7	8	9		10
I	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Pablik	-	1 tahun	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	100%	100%	-	-	-	-
1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan	Cakupan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kec	-	1 tahun	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	100%	100%	-	-	-	-
2	Penyelenggaraan Urusan Permerinthan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Cakupan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kec	-	1 tahun	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	100%	100%	-	-	-	-
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	-	1 tahun	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	100%	100%	-	-	-	-
4	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Cakupan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	1 tahun	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	100%	100%	-	-	-	-
5	Pemberdayaan Lembaga	Cakupan Pemberdayaan Lembaga	-	1 tahun	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	100%	100%	-	-	-	-

NO	Program dan Kegiatan	Indikator kinerja Program dan Kegiatan sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangangkat Daerah Tahun ke -						Reaaliasasi Capaian Tahun ke -						Rasio Capaian pada tahun ke-					
						2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2		3	4	5	6	7	8	9		10	6	7	8	9		10	6	7	8	9		10
	Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan																					
6	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Capaian Ketentraman dan Keteriban Umum	-	1 tahun	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	100%	100%	-	-	-	-
7	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	jumlah koordinasi dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	-	1 tahun	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	100%	100%	-	-	-	-
8	Koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	jumlah koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	-	1 tahun	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	100%	100%	-	-	-	-
9	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	-	1 tahun	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	100%	100%	-	-	-	-
10	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	jumlah urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yg diselenggarakan	-	1 tahun	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	100%	100%	-	-	-	-
II	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	CakupanPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	1 tahun	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	100%	100%	-	-	-	-
11	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	100%	100%	-	-	-	-

NO	Program dan Kegiatan	Indikator kinerja Program dan Kegiatan sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangangkat Daerah Tahun ke -						Reaaliasasi Capaian Tahun ke -						Rasio Capaian pada tahun ke-					
						2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2		3	4	5	6	7	8	9		10	6	7	8	9		10	6	7	8	9		10
22	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Perangkat Daerah	-	1 tahun	-	100%	100%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	-	-	-	-	100%	100%	-	-	-	-
V	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Penyusunan Perencanaan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	1 tahun	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	100%	100%	-	-	-	-
23	Administrasin Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Penyusunan Perencanaan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	1 tahun	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	100%	100%	-	-	-	-
24	Administrasin Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Penyusunan Perencanaan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	1 tahun	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	100%	100%	-	-	-	-
25	Administrasin Umum Perangkat Daerah	Cakupan Penyusunan Perencanaan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	1 tahun	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	100%	100%	-	-	-	-
26	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Penyusunan Perencanaan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	1 tahun	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	100%	100%	-	-	-	-
VI	Penyedia JasaPenunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Penyusunan Perencanaan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	1 tahun	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	100%	100%	-	-	-	-
27	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Penyusunan Perencanaan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	1 tahun	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	100%	100%	-	-	-	-

C. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Isu – Isu strategis adalah kondisi atau hal yang diperhatikan dalam perencanaan pembangunan selama 5 (Lima) tahun dalam melaksanakan atau menyelenggarakan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Mojolaban kepada masyarakat. Analisa isu – isu strategis di identifikasikan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Mojolaban dalam menjalankan pemerintahan ada berbagai permasalahan, sebagai berikut.

a. Bidang Sekretariat

1) Masih kurangnya sumber daya dan keterampilan pegawai dalam mengoperasikan sarana dan prasarana komputer di wilayah Kecamatan Nguter sehingga memperlambat kinerja kegiatan administrasi perkantoran, untuk meningkatkan kinerja kegiatan administrasi perlu adanya pelatihan dalam mengoperasikan komputer;
2) Kurangnya personil di bagian sekretariat Kantor Kecamatan Nguter, sehingga banyak tenaga yang merangkap tugas lain, untuk meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat perlu adanya tambahan personil;
3) Kecamatan sebagai Perangkat Daerah yang belum diberikan kewenangan penuh untuk mengajukan dan mengelola anggaran Perangkat Daerah, kewenagan Kecamatan hanya sebatas pengelolaan Gaji pegawai dan biaya operasional Kecamatan. Sedangkan pengelolaan anggaran pembangunan masih melalui Perangkat Daerah terkait ;

b. Bidang Pemerintahan dan Pelayanan Publik

1) Belum optimalnya kinerja aparatur Pemerintahan Desa
2) Masih ada sebagian jenis pelayanan administrasi kependudukan yang belum bisa dilayani ditingkat Kecamatan
3) Perlu peningkatan sinergitas antar unit kerja dalam pelayanan kepada warga masyarakat

c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1) Masih kurangnya kesadaran dan peran serta masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan wilayah
2) Perlu peningkatan kualitas sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan pemberdayaan masyarakat

d. Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum

1) Pemahaman warga masyarakat tentang peraturan perundangan belum optimal
2) Masih perlu peningkatan peran serta warga terhadap penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum belum optimal

e. Bidang Kesejahteraan Sosial

1) Belum terwujudnya sinkronisasi data sebagai dasar pengambilan kebijakan terkait dengan bantuan sosial.
2) Perlu peningkatan upaya strategis dalam rangka penanganan pemulihan dsetelah pandemi covid-19 terutama dari aspek ekomoni, kesehatan dan sosial

D Review Terhadap Rancangan Awal PD

Adapun Review rancangan awal Renja Kecamatan Mojolaban Tahun 2024 sebagaimana yang tertuang dalam rencana kegiatan 1 (satu) tahun yang menjadi acuan dalam menerapkan program/ kegiatan yang merupakan kebijakan dalam pengunaan anggaran dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 2.3

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL PD KECAMATAN MOJOLABAN TAHUN 2024

Tujuan/Nomor Rekening	RENSTRA PD Tahun 2024					HASIL Analisis Kebutuhan Tahun 2024					Catatan Penting
	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Lokasi	Target capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN					**UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN**					
Terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel		Indek Kepuasan Masyarakat		83			Indek Kepuasan Masyarakat		83		
		Persentase Peningkatan Pelayanan Kecamatan		100			Persentase Peningkatan Pelayanan Kecamatan		100		
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Kecamatan Mojolaban**	**100**	**23.950.000,00**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Kecamatan Mojolaban**	**100**	**20.000.000,00**	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Cakupan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kec	Kecamatan Mojolaban	100	0	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Cakupan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kec	Kecamatan Mojolaban	100	0	

7.01.02.2.0001	Koordinasi /Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait	Jumlah Koordinasi kegiatan pemerintah dg PD dan instansi vertikal	Kecamatan Mojolaban	0	0	Koordinasi /Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait	Jumlah Koordinasi kegiatan pemerintah dg PD dan instansi vertikal	Kecamatan Mojolaban	0	0	
7.01.02.2.0002	Peningkatan efektifitas kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi Peningkatan Eektifitas Pemerinath di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Mojolaban	0	0	Peningkatan efektifitas kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi Peningkatan Eektifitas Pemerinath di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Mojolaban	0	0	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja PD yang ada di kecamatan	Kecamatan Mojolaban	100	23.950.000,00	Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja PD yang ada di kecamatan	Kecamatan Mojolaban	100	20.000.000,00	
7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Mojolaban	4	12.5000.000,00	Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Mojolaban	4	10.000.000,00	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatn	Kecamatan Mojolaban	12	11.450.000,00	Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatn	Kecamatan Mojolaban	12	10.000.000,00	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan**	**Kecamatan Mojolaban**	**100**	**130.000.000,00**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan**	**Kecamatan Mojolaban**	**100**	**125.424.000,00**	

7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Cakupan kegiatan pemberdayaan desa	Kecamatan Mojolaban	*100*	*20.000.000,00*	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Cakupan kegiatan pemberdayaan desa	Kecamatan Mojolaban	*100*	*22.925.000,00*	
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	Kecamatan Mojolaban	5	10.000.000,00	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	Kecamatan Mojolaban	5	12.250.000,00	
7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan	Sinkronisasi Program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan	Kecamatan Mojolaban	0	0	Sinkronisasi Program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan	Sinkronisasi Program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan	Kecamatan Mojolaban	0	0	
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	Kecamatan Mojolaban	3	10.000.000,00	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan sosialisasi Peningkatan Efektiitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kecamatan Mojolaban	3	10.675.000,00	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Cakupan Lembaga Kemasyarakatan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Mojolaban	*100*	*110.000.000,00*	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Cakupan Lembaga Kemasyarakatan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Mojolaban	*100*	*102.499..000,00*	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diselenggarakan	Kecamatan Mojolaban	1	90.000.000,00	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diselenggarakanb	Kecamatan Mojolaban	1	88.999.000,00	
7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga kemasyarakatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang ditingkatkan kapasitasnya	Kecamatan Mojolaban	1	11.000.000,00	Peningkatan Kapasitas Lembaga kemasyarakatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang ditingkatkan kapasitasnya	Kecamatan Mojolaban	1	10.500.000,00	

7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah laporan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	Kecamatan Mojolaban	1	9.000.000,00	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah laporan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	Kecamatan Mojolaban	1	3.000.000,00	
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase capaian ketentraman dan ketertiban umum**	**Kecamatan Mojolaban**	**100**	**31.810.000,00**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase capaian ketentraman dan ketertiban umum**	**Kecamatan Mojolaban**	**100**	**34.750.000,00**	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Cakupan koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Mojolaban	*100*	*22.810..000,00*	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Cakupan koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Mojolaban	*100*	*23.500..000,00*	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi 58ogistic di wilayah kecamatan	Jumlah laporan hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara, TNI dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	Kecamatan Mojolaban	6	11.000.000,00	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi 58ogistic di wilayah kecamatan	Jumlah laporan hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara, TNI dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	Kecamatan Mojolaban	6	12.000.000,00	
7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah laporan pelaksanaan Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	Kecamatan Mojolaban	3	11.810.000,00	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah laporan pelaksanaan Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	Kecamatan Mojolaban	3	11.500.000,00	
7.01.04.2.02	Koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Cakupan penerapan dan penegakan Peraturan daerah dan Peraturan kepala daerah	Kecamatan Mojolaban	*100*	*9.000.000,00*	Koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Cakupan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada	Kecamatan Mojolaban	*100*	*11.250..000,00*	
7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau	Jumlah laporan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan	Kecamatan Mojolaban	3	9.000..000,00	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah laporan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan	Kecamatan Mojolaban	3	11.250.000,00	

	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Cakupan Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum**	**Kecamatan Mojolaban**	**100**	**347.040.000,00**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Cakupan Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum**	**Kecamatan Mojolaban**	**100**	**316.000.000,00**	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Mojolaban	*100*	*347.040.000,00*	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Mojolaban	*100*	*316.000.000,00*	
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara	Kecamatan Mojolaban	90	155.000.000,00	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara	Kecamatan Mojolaban	90	150.000.000,00	

		Kesatuan Republik Indonesia					Kesatuan Republik Indonesia				
7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, koorduinasi dan pembinaan (Bimtek, sosialisasi, konsultasi) Wawsan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah orang mengikutifasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, sosialisasi, konsultasi) Wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	Kecamatan Mojolaban	90	57.040.000,00	Fasilitasi, koorduinasi dan pembinaan (Bimtek, sosialisasi, konsultasi) Wawsan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah orang mengikutifasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, sosialisasi, konsultasi) Wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	Kecamatan Mojolaban	0	0	
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kecamatan Mojolaban	12	135..000.000,00	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kecamatan Mojolaban	12	166.000.000,00	
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintah desa**	**Kecamatan Mojolaban**	**100**	**175.450.000,00**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintah desa**	**Kecamatan Mojolaban**	100	82.900.000,00	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Kecamatan Mojolaban	*100*	*175.450.000,00*	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Kecamatan Mojolaban	*100*	*82.900.000,00*	
7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kecamatan Mojolaban	2	7.000.000,00	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kecamatan Mojolaban	0	0	

7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang diFasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan Mojolaban	4	12.000.000,00	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang diFasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan Mojolaban	4	13.000.000,00	
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	Jumlah dokumen yang diFasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	Kecamatan Mojolaban	2	12.000.000,00	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	Jumlah dokumen yang diFasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	Kecamatan Mojolaban	2	13.000.000,00	
7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam pelaksanaan tugas kepala cdesa dan perangkat desa	Kecamatan Mojolaban	2	7.450.000,00	Fasilitasi Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam pelaksanaan tugas kepala cdesa dan perangkat desa	Kecamatan Mojolaban	0	0	
7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah dokumen fasilitasi dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa	Kecamatan Mojolaban	1	63.000.000,00	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah dokumen fasilitasi dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa	Kecamatan Mojolaban	1	10.000.000,00	
7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Kecamatan Mojolaban	1	6.000.000,00	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Kecamatan Mojolaban	1	3.900.000,00	
7.01.06.2.01.0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kecamatan Mojolaban	10	15.000.000,00	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kecamatan Mojolaban	10	13.000.000,00	

7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa	Jumlah dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa	Kecamatan Mojolaban	4	10.000.000,00	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa	Jumlah dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa	Kecamatan Mojolaban	4	10.000.000,00	
7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan	Jumlah dokumen dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan	Kecamatan Mojolaban	1	5.000.000,00	Fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan	Jumlah dokumen dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan	Kecamatan Mojolaban	0	0	
7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Kecamatan Mojolaban	1	20.000.000,00	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Kecamatan Mojolaban	1	20.000.000,00	
7.01.06.2.01.0014	Fasilitasi kerjasama antar desa dengan pihak ketiga	Jumlah dokumen Fasilitasidalam rangka kerjasama antar desa dengan pihak ketiga	Kecamatan Mojolaban	1	5.000.000,00	Fasilitasi kerjasama antar desa dengan pihak ketiga	Jumlah dokumen Fasilitasidalam rangka kerjasama antar desa dengan pihak ketiga	Kecamatan Mojolaban	0	0	
7.01.06.2.01.0017	Koordinasi pendampingan desa diwilayahnya	Jumlah laporan hasil Koordinasi pendampingan desa diwilayahnya	Kecamatan Mojolaban	2	7.000.000,00	Koordinasi pendampingan desa diwilayahnya	Jumlah laporan hasil Koordinasi pendampingan desa diwilayahnya	Kecamatan Mojolaban	0	0	
7.01.06.2.01.0018	Koordinasi pelaksaan pembangunan kawasan pedesaan di wilayah kecamatan	Jumlah laporan hasil Koordinasi pelaksaan pembangunan kawasan pedesaan di wilayah kecamatan	Kecamatan Mojolaban	2	6.000.000,00	Koordinasi pelaksaan pembangunan kawasan pedesaan di wilayah kecamatan	Jumlah laporan hasil Koordinasi pelaksaan pembangunan kawasan pedesaan di wilayah kecamatan	Kecamatan Mopjolaban	0	0	

		NIALI SAKIP PD	Kecamatan Mojolaban		69		NIALI SAKIP PD	Kecamatan Mojolaban		69	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Pelayanan Urusan Pemerintah Daerah**	**Kecamatan Mojolaban**	**100**	**3.328.690.000,00**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Pelayanan Urusan Pemerintah Daerah**	**Kecamatan Mojolaban**	**100**	**3.153.398.595,00**	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Penyusunan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Mojolaban	*100*	*34.000.000,00*	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Penyusunan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Mojolaban	*100*	*34.000.000,00*	
7.01.01.2..01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Mojolaban	2	10.000.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Mojolaban	2	10.000.000,00	
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Mojolaban	1	4.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Mojolaban	1	4.000.000,00	
7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang tersusun	Kecamatan Mojolaban	1	4.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang tersusun	Kecamatan Mojolaban	1	4.000.000,00	
7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kecamatan Mojolaban	1	4.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kecamatan Mojolaban	1	4.000.000,00	

7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kecamatan Mojolaban	1	4.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kecamatan Mojolaban	1	4.000.000,00	
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capain kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kecamatan Mojolaban	16	4.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capain kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kecamatan Mojolaban	16	4.000.000,00	
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kecamatan Mojolaban	2	4.000.000,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kecamatan Mojolaban	2	4.000.000,00	
	Administrasin Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Penyusunan Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Mojolaban	*100*	*2.184..500.000,00*	Administrasin Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Penyusunan Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Mojolaban	*100*	*2.166..379.000,00*	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Kecamatan Mojolaban	17	2.061.000.000,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Kecamatan Mojolaban	17	2.048.379.000,00	
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumenpenatausahaan dan pengujian /veriikasi keuangan SKPD	Kecamatan Mojolaban	12	110.000.000,00	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumenpenatausahaan dan pengujian /veriikasi keuangan SKPD	Kecamatan Mojolaban	12	106.000.000,00	

7.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD	Jumlah dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD	Kecamatan Mojolaban	12	3.000.000,00	Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD	Jumlah dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD	Kecamatan Mojolaban	12	3.000.000,00	
7.01.01.2.02.0005	Koorodinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Kecamatan Mojolaban	1	3.500.000,00	Koorodinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Kecamatan Mojolaban	1	3.000.000,00	
7.01.01.2.02.0007	Koorodinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/ semesteran dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/ semesteran SKPD	Kecamatan Mojolaban	3	3.500.000,00	Koorodinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/ semesteran dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/ semesteran SKPD	Kecamatan Mojolaban	3	3.000.000,00	
7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	Kecamatan Mojolaban	12	3.000.000,00	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	Kecamatan Mojolaban	12	3.000.000,00	
7.01.01.2.05	Administrasin Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Tingkat Disiplin Aparatur	Kecamatan Mojolaban	*100*	75.000.000,00	Administrasin Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Tingkat Disiplin Aparatur	Kecamatan Mojolaban	*100*	*32.000.000,00*	
7.01.01.2.05. 0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atributnya	Jumlah paket Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapan	Kecamatan Mojolaban	25	25.000.000,00	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atributnya	Jumlah paket Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapan	Kecamatan Mojolaban	0	0	
7.01.01.2.05. 0003	Pedataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan	Kecamatan Mojolaban	7	5.000.000,00	Pedataan dan Pengelolaan	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan	Kecamatan Mojolaban	7	4.000.000,00	

		administrasi kepegawaian				Administrasi Kepegawaian	administrasi kepegawaian				
7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Kecamatan Mojolaban	30	35.000.000,00	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Kecamatan Mojolaban	30	25.000.000,00	
7.01.01.2.05. 0010	Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan	Jumlah orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Mojolaban	30	10.000.000,00	Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan	Jumlah orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Mojolaban	30	3.000.000,00	
7.01.01.2.06	Administrasin Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Mojolaban	*100*	*228.190.000,00*	Administrasin Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Mojolaban	*100*	*365.141.550,00*	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Kecamatan Mojolaban	1	10.500.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Kecamatan Mojolaban	1	10.141.550,00	
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Kecamatan Mojolaban	3	17.000.000,00	Penyediaan Peralatan Rumah tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Kecamatan Mojolaban	3	15.000.000,00	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan 66ogistic kantor yang disediakan	Kecamatan Mojolaban	12	130.690.000,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan 66ogistic kantor yang disediakan	Kecamatan Mojolaban	12	280.000.000,00	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan Yang disediakan	Kecamatan Mojolaban	2	17.000.000,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	Kecamatan Mojolaban	2	15.000.000,00	
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan yang disediakan	Kecamatan Mojolaban	5	5.000.000,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan yang disediakan	Kecamatan Mojolaban	5	5.000.000,00	

7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kecamatan Mojolaban	410	48.000.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kecamatan Mojolaban	410	40.000.000,00	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Mojolaban	*100*	*134.000.000,00*	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Mojolaban	*100*	*38.976.545,00*	
7.01.01.2.07.0001	Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	Kecamatan Mojolaban	0	0	Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	Kecamatan Mojolaban	0	0	
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah paket Mebel yang disediakan	Kecamatan Mojolaban	6	15.000.000,00	Pengadaan Mebel	Jumlah paket Mebel yang disediakan	Kecamatan Mojolaban	3	4.500.000,00	
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Kecamatan Mojolaban	10	89.000.000,00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Kecamatan Mojolaban	3	20.776.545,00	
7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Kecamatan Mojolaban	2	15.000.000,00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Kecamatan Mojolaban	1	9.000.000,00	
7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Kecamatan Mojolaban	2	15.000.000,00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Kecamatan Mojolaban	2	4.700.000,00	
7.01.01.2.08	Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Mojolaban	*100*	*326.000.000,00*	Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Mojolaban	*100*	*338.195.000,00*	

7.01.01.2.08.0001	Penyedia jasa surat menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Kecamatan Mojolaban	2	20.000.000,00	Penyedia jasa surat menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Kecamatan Mojolaban	2	12.900.000,00	
7.01.01.2.08.0002	Penyedia jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa sumber daya air dan listrik yang disediakan	Kecamatan Mojolaban	12	111.000.000,00	Penyedia jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa sumber daya air dan listrik yang disediakan	Kecamatan Mojolaban	12	105.480.000,00	
7.01.01.2.08.0004	Penyedia jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan jasa penyediaan Pelayanan Umum yang disediakan	Kecamatan Mojolaban	12	195.000.000,00	Penyedia jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan jasa penyediaan Pelayanan Umum yang disediakan	Kecamatan Mojolaban	12	219.816.000,00	
7.01.01.2.0009	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Mojolaban	*100*	*347.000.000,00*	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Mojolaban	*100*	*178.705.500,00*	
7.01.01.2.09.0001	Penyedia jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Kecamatan Mojolaban	14	75.000.000,00	Penyedia jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Kecamatan Mojolaban	14	74.950.000,00	
7.01.01.2.09.0002	Penyedia jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak dan Perizinan Kendnaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional / lapangan yang dipelihara	Kecamatan Mojolaban	1	15.000.000,00	Penyedia jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak dan Perizinan Kendnaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional / lapangan yang dipelihara	Kecamatan Mojolaban	1	14.962.500,00	
7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah jenis mebelair yang dibeli	Kecamatan Mojolaban	50	12.000.000,00	Pemeliharaan Mebel	Jumlah jenis mebelair yang dibeli	Kecamatan Mojolaban	50	10.000.000,00	
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah jenis peralatan gedung	Kecamatan Mojolaban	50	22.000.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah jenis peralatan gedung	Kecamatan Mojolaban	20	12.550.000,00	

		kantor yang dipelihara					kantor yang dipelihara				
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	Kecamatan Mojolaban	1	188.000.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	Kecamatan Mojolaban	1	49.238.000,00	
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Mojolaban	0	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Mojolaban	0	0	
7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis perlengkapan rumah jabatan / dinas yang dipelihara	Kecamatan Mojolaban	1	35.000.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis perlengkapan rumah jabatan / dinas yang dipelihara	Kecamatan Mojolaban	1	16.975.000,00	
JUMLAH					**4.036.940.000**	**JUMLAH**				**3.732.472.595**	

E. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Usulan program dan kegiatan Kecamatan Mojolaban Tahun 2024 dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum dan kewenangan Pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati Sukoharjo penguatan otonomi daerah diarahkan pada :

a. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang menjadi kewenangan Kecamatan dan peningkaan kualitas aparaturnya.
b. Peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Pemerintahan Desa.
c. Memonitoring dan memfasilitasi pelaksanaan Bantuan Keuangan Desa sehingga pelaksanaan program/ kegiatan sesuai denganAPBDes dan RPJMDes dan hasilnya dapat memberikan manfaat yangmaksimal kepada masyarakat.
d. Peningkatan pengetahuan dan kemampuan satuan perlindungan
e. Masyarakat dalam rangka upaya penyelenggaraan ketertiban dan ketentraman umum.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

A. Telaahan Terhadap Kebijakan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo

Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan yang ada di Kabupaten Sukoharjo, agar lebih terarah dan berhasil guna serta berdaya guna, maka pemerintah bersama-sama masyarakat Kabupaten Sukoharjo telah menetapkan visi, misi dan strategi dalam mencapai tujuannya yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 - 2026.

1. VISI

Visi pembangunan Kabupaten Sukoharjo tahun 2021-2026 merupakan implementasi dari visi Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo periode tahun 2021-2026 yaitu:

“Mewujudkan masyarakat Sukoharjo Yang Lebih Makmur”

Visi pembangunan daerah Kabupaten Sukoharjo tahun 2021-2026 merupakan keberlanjutan dari cita-cita pembangunan Kabupaten Sukoharjo tahun 2016-2020.

Mengandung arti bahwa dalam lima tahun ke depan masyarakat Kabupaten Sukoharjo akan tercipta kondisi sejahtera, terpenuhi seluruh kebutuhan hidupnya baik sosial maupun ekonomi, secara lahir maupun batin. MAKMUR juga merupakan motto atau slogan Kabupaten Sukoharjo yaitu **Maju, Aman, Konstitusional**, **Mantap, Unggul, dan Rap**i.

MAJU

Maju mempunyai pengertian bergerak kedepan menjadi lebih baik, tidak berhenti, tidak terlambat, mencapai tingkat peradaban yang lebih tinggi.Sebagai tugas panggilan dalam hidup. Dengan maju kita ingin tumbuh dan berkembang, dan selalu berpikr dan berusaha keras kearah peningkatan menjadi lebih baik.

AMAN

Keamanan merupakan salah satu unsur/syarat mutlak untuk dapat terlaksananya pembangunan.Tanpa stabilitas keamanan yang terpelihara secara mantap dan berkesinambungan, tidak mungkin kegiatan pembangunan dapat terlaksana dengan lancar.

KONSTITUSIONAL

Penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, maupun kemasyarakatan harus dilandasi hukum atau dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum.

MANTAP

Warga masyarakat dan segenap penyelenggara pemerintahan optimis dalam membangun Sukoharjo.

UNGGUL

Unggul mempunyai arti semangat berprestasi untuk selalu berusaha mencapai yang terbaik.

RAPI

Rapi mengandung pengertian apik, baik, bersih, teratur ,tertib, beres.

2. MISI

Dalam rangka upaya menuju pencapaian visi pembangunan daerah Kabupaten Sukoharjo tahun 2021-2026, ditetapkan misi pembangunan daerah yaitu:

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Percepatan Reformasi Birokrasi

Misi kesatu ini bertujuan untuk semakin mempercepat implementasi reformasi birokrasi secara optimal, yang pada periode sebelumnya telah terwujud dalam membaiknya tata kelola pemerintahan Kabupaten Sukoharjo.

Reformasi birokrasi yang diharapkan kedepan adalah pada tiga dimensi utama yaitu pelayanan publik yang semakin dinamis, efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan, kapasitas kelembagaan, serta manajemen sumber daya manusia aparatur yang semakin baik.Pelayanan publik yang dinamis diwujudkan dengan membangun open government dan pemerintahan yang responsif. Open government dilakukan dengan perkuatan keterbukaan informasi publik, transparansi, partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta meningkatkan komunikasi dan serapan aspirasi publik.

Sedangkan pemerintahan yang responsif tercermin dalam respon pemerintah kabupaten dalam menghadapi aduan dan persoalan riil masyarakat, dengan cepat dan tepat, baik dalam bentuk kebijakan maupun kegiatan.Pelayanan publik yang dinamis, terbuka, dan responsif diikat dalam satu tagline pelayanan yang

mudah, murah, cepat, serta didukung inovasi dan teknologi informasi.

Efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan tergambarkan dalam proses perencanaan, penganggaran, serta evaluasi pembangunan yang akuntabel. Manajemen pembangunan Kabupaten Sukoharjo kedepan tidak hanya fokus pada kerja tetapi kinerja, dan berorientasi pada hasil (outcome). Untuk itu perlu juga dilakukan pengawasan dalam prosesnya, sejak dimulainya proses perencanaan, implementasi hingga evaluasi.

Agar dapat melaksanakan manajemen pemerintahan yang baik dan bersih maka dibutuhkan kelembagaan/organisasi yang tepat dan didukung dengan penataan sistem manajemen sumberdaya manusia aparatur yang baik.Manajemen sumber daya manusia aparatur yang baik terejawantahkan dalam bentuk integritas aparatur yang dibangun melalui kompetensi dan etika menuju integritas pribadi dan institusi, mendorong birokrasi yang inovatif, dan dijamin dalam quality assurance aparatur.

2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas

Misi kedua mengarah pada kualitas dan daya saing sumberdaya manusia Sukoharjo, agar semakin sehat, pintar, berbudaya, dan lebih mencintai lingkungan.Era globalisasi yang semakin terbuka menuntut kualitas sumberdaya manusia yang mampu bersaing secara kompetitif dalam kompetensi dan kualifikasi. Bonus demografi yang saat ini telah dialami

oleh Sukoharjo dapat dijadikan sebagai peluang sekaligus tantangan, bagaimana kedepan modal sosial ini akan menempatkan Sukoharjo sebagai salah satu daerah dengan sumberdaya manusia yang mampu bersaing. Sehingga diharapkan, dapat memberikan dampak pertumbuhan ekonomi yang semakin baik, dan menciptakan masyarakat Sukoharjo yang semakin sejahtera.

Tidak hanya tentang kualitas dan daya saing sumberdaya manusia yang diharapkan, namun juga bagaimana membentuk karakter masyarakat Sukoharjo yang semakin berbudaya. Di tengah arus keterbukaan informasi dunia yang nyata kemudian bagaimana masyarakat Sukoharjo tetap kuat menjaga etika dan norma serta nilai budaya asli Sukoharjo, serta menjaga kearifan lokal sejak dini.

3. **Memperkuat Perekonomian Rakyat Yang Berdaya Saing Tinggi**

Misi ketiga ini mempunyai tujuan mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan insklusif.Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang penting dalam melakukan pembangunan ekonomi yang terjadi pada suatu negara ataupun daerah.Pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan distribusi pendapatan yang merata sangat dibutuhkan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah diukur dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan laju pertumbuhannya atas dasar harga konstan. Pertumbuhan ekonomi yang cepat akan menimbulkan

ketimpangan distribusi pendapatan. Hal ini disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang bersifat sentralisasi. Pada tahun 1999 pemerintah mengubah kebijakan sentralisasi menjadi desentralisasi dengan memberlakukan Otonomi Daerah. Hal tersebut memberikan harapan dalam upaya mengurangi tingkat kemiskinan dan ketimpangan antar daerah.

Misi ini adalah untuk mengarahkan kebijakan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam rangka menurunkan jumlah penduduk miskin, yang didukung oleh perekonomian daerah yang stabil, berkualitas, inklusif, dan menyebar. Program pengentasan kemiskinan difokuskan kepada kelompok sasaran utama, seperti petani pelaku UKM dan pekerja dan kelompok rentan lainnya. Program pengentasan kemisikinan tersebut perlu didukung oleh pertumbuhan ekonomi yang tersebar, inklusif, dan berkualitas, yakni pertumbuhan ekonomi yang menyebar di seluruh wilayah Sukoharjo, memperhitungkan kelestarian lingkungan dan keberlangsungan ketersediaan sumber daya, melibatkan seluruh kelompok masyarakat dengan mengutamakan peran dan kontribusi kelompok masyarakat yang kurang beruntung, dan menghapus praktek ekonomi biaya tinggi.

4. **Memperkuat Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan**

Misi keempat mengarah kepada pembangunan infrastruktur akan terus dilaksanakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan

pelayanan dasar, yang akan dilaksanakan dengan penguatan konektivitas, penyediaan akses perumahan, permukiman, air minum dan sanitasi yang layak, telekomunikasi dan transportasi yang aman dan memadai.

Pembangunan berwawasan lingkungan hidup dilakukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan meningkatkan kualitas hidup manusia.Untuk menjaga kelestarian lingkungan agar kualitas lingkungan hiudp tetap terjaga, pemanfaatan sumber daya alam harus dilakukan secara bijaksana, adil, efisien, dan bertanggungjawab serta lingkungan yang tangguh bencana.

5. **Meningkatkan Kualitas Kehidupan Sosial dan Keagamaan**

Misi ini menggambarkan sebuah kondisi yang ingin diciptakan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera, tercermin dari rasa aman dan nyaman yang dirasakan dalam kehidupan masyarakat.Kondisi yang tercipta merupakan manifestasi implementasi nilai-nilai religius dalam kehidupan masyarakat. Membangun masyarakat Sukoharjo yang religius, toleran, dan guyup ini adalah dengan menciptakan kondisi obyektif yang memungkinkan interaksi antar umat beragama untuk saling menghormati dan menghargai satu sama lain, mendorong keberagaman, kebhinekaan, dan toleransi dalam kerangka kesatuan.

Upaya yang dilakukan antara lain dengan menguatkan pemahaman keberagaman dan kebhinekaan sejak usia dini, mengembangkan ruang-

ruang publik untuk membangun komunikasi antar masyarakat melalui kegiatan seni dan rekreasi, serta mendorong kearifan lokal dalam bentuk gerakan-gerakan masyarakat termasuk gerakan gotong royong. Dalam misi ini terkandung tujuan untuk menciptakan kehidupan masyarakat Sukoharjo yang aman dan nyaman, tanpa ada konflik sosial maupun agama, bahkan konflik SARA.

Misi yang dapat dijabarkan oleh Perangkat Daerah Kecamatan adalah Misi kesatu, yaitu "**Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Percepatan Reformasi Birokrasi"**

TELAAH VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

VISI : MEWUJUDKAN MASYARAKAT SUKOHARJO YANG LEBIH MAKMUR.

MISI 1	PROGRAM	TUSI OPD	PERMASALAHAN PELAYANAN OPD	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT
Mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik melalui percepatan reformasi birokrasi	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan publik	Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan	Masih ada sebagian jenis pelayanan administrasi kependudukan yang belum bisa dilayani ditingkat Kecamatan	Kapasitas dan kualitas aparatur serta sarana prasarana cukup memadai	Regulasi dan kebijakan pelayanan administrasi kependudukan sampai di tingkat Kecamatan masih lemah
	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kalurahan	Pengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat	Masih kurangnya kesadaran dan peran serta masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan wilayah Perlu peningkatan kualitas sarana dan prasarana di Desa khususnya jaringan Internet Desa	Mekanisme perencannaan yang cukup baik Sumber pembiayaan cukup tersedia	Kesadaran warga masih rendah Kebijakan di tingkat desa masih rendah

Mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik melalui percepatan reformasi birokrasi	Koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum	Pengkoordinasian Upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Pemahaman warga masyarakat tentang peraturan perundangan belum optimal.	Anggaran untuk kegiatan sosialisasi cukup memadai.	Kesadaran warga masih kurang
		Pengkoordinasian penerapan dan penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	Masih perlu peningkatan peran serta warga terhadap penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Peran media social cukup efektif.	Sosialisasi peraturan perundangan masih masih kurang
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Belum terwujudnya sinkronisasi data sebagai dasar pengambilan kebijakan terkait dengan bantuan sosial. Perlu peningkatan upaya strategis dalam rangka penanganan pandemi covid-19 terutama dari aspek ekomoni, kesehatan dan sosial	Dukungan SDM dan Sarana prasarana Dukungan SDM , sarana prasarana dan pembiayaan	Kebijakan antar unit kerja masih lemah Kebijakan di semua lini pemerintahan masih kurang
	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Pembinaan dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa	Belum optimalnya kinerja aparatur Pemerintahan Desa	Peningkatan kesejahteraan aparatur pemerintah desa.	Paradigma pola kerja tradisional.
	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan	Perlu peningkatan sinergitas antar unit kerja dalam pelayanan kepada warga masyarakat	Kualitas SDM dan sarana prasarana.	Aspek regulasi masih lemah

B. Tujuan dan Sasaran

1. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran/implementasi dari pernyataan visi dan misi Bupati Sukoharjo terpilih. Tujuan adalah sesuatu yang ingin dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan

yang akan dicapai oleh Perangkat Daerah Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo adalah sebagai berikut :

"Terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel"

2. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan. Sasaran yang akan diraih Perangkat Daerah Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo adalah :

a. Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat yang di jabarkan dalam beberapa Program antara lain :
   1) Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
   2) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
   3) Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
   4) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
   5) Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
b. Meningkatnya kualitas aparatur dan pelayanan publik yang di jabarkan dalam Program antara lain :
   1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Pemerintah Kabupaten Sukoharjo
Visi Misi Tujuan Dan Sasaran
Tahun Anggaran 2022-2026

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir
							2022	2023	2024	2025	2026	
99	Pendapatan & Pembiayaan	Pendapatan & Pembiayaan				0	0	0	0	0	0	0
			Pendapatan & Pembiayaan			0	0	0	0	0	0	0
1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Melalui Percepatan Reformasi Birokrasi	Terwujudnya Tata Kepemerintahan yang Profesional		Indek Reformasi Birokrasi	angka	56.02	65	68	70	79	80	80
			Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Responsif dan Akuntabel	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	angka	78.39	81	82	83	84	84	85
				Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	nilai	3.54	3.64	3.7	3.74	3.8	3.8	3.84
				Evaluasi Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	angka	56.41	81	83	85	87	87	90

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir
							2022	2023	2024	2025	2026	
				Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)	Predikat	0	0	0	0	0	0	0
				Indeks Sistem Merit	indeks	0	0	0	0	0	0	0
				Indek Kapasitas Fiskal Daerah (IKFD)	angka	1.544	1.461	1.547	1.646	1.758	1.758	1.885
2	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas	Terwujudnya sumber daya manusia yang sehat, cerdas, inovatif, dan berkarakter		Laju Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	persen	76.98	77.73	77.89	78.06	78.23	78.4	78.4
				Laju Penurunan Angka Kemiskinan	persen	7.68	7.6	7.5	7.4	7.1	6.8	6.8
			Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun Keatas (Tahun)	tahun	9.1	9.35	9.36	9.37	9.38	9.38	9.39
				Harapan Lama Sekolah (Tahun)	tahun	13.82	13.84	13.85	13.85	13.86	13.86	13.86

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir
							2022	2023	2024	2025	2026	
				Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	angka	0	41.9	44.16	46.48	49.01	49.01	51.66
			Meningkatnya kualitas hidup penduduk miskin	Persentase penduduk miskin perdesaan (DTKS Desil 1 dan 2)	persen	2.94	2.85	2.8	2.75	2.7	2.7	2.65
				Persentase penduduk miskin perkotaan (DTKS Desil 1 dan 2)	persen	4.3	4.2	4.15	4.1	4.05	4.05	4
			Meningkatnya kearifan budaya lokal	Angka Partisipasi Pelaku Seni dan Budaya	persen	0	23	26	29	32	32	35
			Meningkatnya pengendalian penduduk	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	persen	0.88	0.88	0.87	0.87	0.86	0.86	0.86
			Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)	tahun	77.55	77.7	77.75	77.8	77.85	77.85	77.9

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 disajikan pada Tabel 4.1 berikut :

TABEL 4.1
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PD TAHUN 2024
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025

Tujuan	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2024				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
				Lokasi	Target capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN							
Terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel			Indek Kepuasan Masyarakat		83			84	
			Persentase Peningkatan Pelayanan Kecamatan		100			100	
	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Mojolaban	100	20.000.000,00	DAU	100	25.000.000,00
	7.01.02.2.01	*Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*	*Cakupan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kec*	Kecamatan Mojolaban	100	20.000.000,00	DAU	100	25.000.000,00
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi /Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait	Jumlah Koordinasi kegiatan pemerintah dg PD dan instansi vertikal	Kecamatan Mojolaban	0	0	DAU	0	0

Tujuan	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2024				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
				Lokasi	Target capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan efektifitas kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi Peningkatan Eektifitas Pemerinath di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Mojolaban	0	0	DAU	0	0
	7.01.02.2.02	*Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan*	*Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja PD yang ada di kecamatan*	Kecamatan Mojolaban	100	20.000.000,00	DAU	100	25.000.000,00
	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Mojolaban	4	10.000.000,00	DAU	4	13.000.000,00
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatn	Kecamatan Mojolaban	12	10.000.000,00	DAU	12	12.000.000,00
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Kecamatan Mojolaban	100	125.424.000,00	DAU	100	140.970.000,00
	7.01.03.2.01	*Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa*	*Cakupan kegiatan pemberdayaan desa*	*Kecamatan Mojolaban*	*100*	*22.925.000,00*	*DAU*	*100*	26.000.000,00
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	Kecamatan Mojolaban	5	12.250.000,00	DAU	5	15.000.000,00
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan sosialisasi Peningkatan Efektiitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kecamatan Mojolaban	3	10.675.000,00	DAU	3	11.000.000,00

Tujuan	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2024				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
				Lokasi	Target capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	7 01 03.2.03	*Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan*	*Cakupan Lembaga Kemasyarakatan di Tingkat Kecamatan*	*Kecamatan Mojolaban*	*100*	*102.499.000,00*	*DAU*	*100*	114.970.000,00
	7 01 03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diselenggarakan	Kecamatan Mojolaban	1	88.999.000,00	DAU	1	87.970.000,00
	7 01 03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga kemasyarakatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang ditingkatkan kapasitasnya	Kecamatan Mojolaban	1	10.500.000,00	DAU	1	17.000.000,00
	8 01 03.2.03.0005	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah laporan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	Kecamatan Mojolaban	1	3.000000,00	DAU	1	10.000.000,00
	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase capaian ketentraman dan ketertiban umum	Kecamatan Mojolaban	100	34.750.000,00	DAU	100	39.000.000,00
	7.01.04.2.01	*Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum*	*Cakupan Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum*	*Kecamatan Mojolaban*	*100*	*23.500.000,00*	*DAU*	*100*	27.000.000,00
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah laporan hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara, TNI dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	Kecamatan Mojolaban	6	12.000.000,00	DAU	6	12.000.000,00
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah laporan pelaksanaan Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	Kecamatan Mojolaban	3	11.500.000,00	DAU	3	15.000.000,00
	7.01.04.2.02	*Koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah*	*Cakupan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada*	*Kecamatan Mojolaban*	*100*	*11.250.000,00*	*DAU*	*100*	12.000.000,00

Tujuan	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2024				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
				Lokasi	Target capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah laporan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kecamatan Mojolaban	3	11.250.000,00	DAU	3	12.000.000,00
	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Kecamatan Mojolaban	100	316.000.000,00	DAU	80	363.000.000,00
	7.01.05.2.01	*Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah*	*Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah*	*Kecamatan Mojolaban*	*100*	*316.000.000,00*	*DAU*	*100*	363.000.000,00
	1.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kecamatan Mojolaban	90	150.000.000,00	DAU	90	195.000.000,00
	1.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kecamatan Mojolaban	12	166.000.000,00	DAU	12	168.000.000,00
	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	Kecamatan Mojolaban	100	82.900.000,00	DAU	100	96.000.000,00

Tujuan	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2024				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
				Lokasi	Target capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	7.01.06.2.01	*Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa*	*Cakupan fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa*	*Kecamatan Mojolaban*	*100*	*82.900.000,00*	*DAU*	*100*	96.000.000,00
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kecamatan Mojolaban	0	0	DAU	0	0
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang diFasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan Mojolaban	4	13.000.000,00	DAU	4	15.000.000,00
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	Jumlah dokumen yang diFasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan	Kecamatan Mojolaban	2	13.000.000,00	DAU	2	15.000.000,00
	7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah dokumen fasilitasi dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa	Kecamatan Mojolaban	1	10.000.000,00	DAU	1	8.000.000,00
	7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Kecamatan Mojolaban	1	3.900.000,00	DAU	1	8.000.000,00
	7.01.06.2.01.0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kecamatan Mojolaban	10	13.000.000,00	DAU	10	15.000.000,00
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa	Jumlah dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa	Kecamatan Mojolaban	4	10.000.000,00	DAU	4	15.000.000,00
	7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Mojolaban	0	0	DAU	0	0

Tujuan	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2024				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
				Lokasi	Target capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Kecamatan Mojolaban	1	20.000.000,00	DAU	1	20.900.000,00
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah laporan hasil kooedinasi Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kecamatan Mojolaban	0	0	DAU	0	0
	7.01.06.2.01.0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Mojolaban	0	0	DAU	0	0
			NIALI SAKIP PD	Kecamatan Mojolaban		67	DAU		69
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Mojolaban	100	3.153.398.595,00	DAU	100	5.072.500.000,00
	7.01.01.2.01	*Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*Cakupan Penyusunan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*Kecamatan Mojolaban*	*100*	*34.000.000,00*	*DAU*	*100*	34.000.000,00
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Mojolaban	2	10.000.000,00	DAU	2	10.000.000,00
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Mojolaban	1	4.000.000,00	DAU	1	4.000.000,00
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang tersusun	Kecamatan Mojolaban	1	4.000.000,00	DAU	1	4.000.000,00
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kecamatan Mojolaban	1	4.000.000,00	DAU	1	4.000.000,00

Tujuan	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2024				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
				Lokasi	Target capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Kecamatan Mojolaban	1	4.000.000,00	DAU	1	4.000.000,00
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capain kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kecamatan Mojolaban	16	4.000.000,00	DAU	16	4.000.000,00
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kecamatan Mojolaban	2	4.000.000,00	DAU	2	4.000.000,00
	7.01.01.2.02	*Administrasin Keuangan Perangkat Daerah*	*Cakupan Penyusunan Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	*Kecamatan Mojolaban*	*100*	*2.166.379.000,00*	*DAU*	*100*	2.178.500.000,00
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Kecamatan Mojolaban	17	2.048.379.000,00	DAU	17	2.055.000.000,00
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumenpenatausahaan dan pengujian /veriikasi keuangan SKPD	Kecamatan Mojolaban	12	106.000.000,00	DAU	12	110.000.000,00
	7.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD	Jumlah dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD	Kecamatan Mojolaban	12	3.000.000,00	DAU	12	3.000.000,00
	7.01.01.2.02.0005	Koorodinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Kecamatan Mojolaban	1	3.000.000,00	DAU	1	3.500.000,00
	7.01.01.2.02.0007	Koorodinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	Kecamatan Mojolaban	3	3.000.000,00	DAU	3	3.500.000,00

Tujuan	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2024				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
				Lokasi	Target capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	Kecamatan Mojolaban	12	3.000.000,00	DAU	12	3.000.000,00
	7.01.01.2.05	*Administrasin Kepegawaian Perangkat Daerah*	*Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Tingkat Disiplin Aparatur*	*Kecamatan Mojolaban*	*100*	*32.000.000,00*	*DAU*	*100*	55.000.000,00
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atributnya	Jumlah paket Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapan	Kecamatan Mojolaban	0	0	DAU	25	9.000.000,00
	7.01.01.2.05.0003	Pedataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Kecamatan Mojolaban	7	4.000.000,00	DAU	20	0
	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Kecamatan Mojolaban	27	55.000.000,00	DAU	27	65.000.000,00
	7.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan	Jumlah orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Mojolaban	30	3.000.000,00	DAU	1	120.000.000,00
	7.01.01.2.06	*Administrasin Umum Perangkat Daerah*	*Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*Kecamatan Mojolaban*	*100*	*365.141.550,00*	*DAU*	*100*	215.000.000,00
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Kecamatan Mojolaban	1	10.141.000,00	DAU	25	10.000.000,00
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Kecamatan Mojolaban	0	0	DAU	0	0
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakam	Kecamatan Mojolaban	3	15.000.000,00	DAU	3	15.000.000,00
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jml jpaket bahan logistik kantor yang disediakan	Kecamatan Mojolaban	12	280.000.000,00	DAU	12	120.000.000 ,00

Tujuan	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2024				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
				Lokasi	Target capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Kecamatan Mojolaban	2	15.000.000,00	DAU	2	17.000.000,00
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perudang-undangan yang disediakan	Kecamatan Mojolaban	5	5.000.000,00	DAU	5	5.000.000,00
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kecamatan Mojolaban	410	40.000.000,00	DAU	410	48.000.000,00
	7.01.01.2.07	*Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	*Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	*Kecamatan Mojolaban*	*100*	*38.976.545,00*	*DAU*	*100*	124.000.000,00
	7.01.01.2.07.0003	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang diserdiakan	Kecamatan Mojolaban	3	4.500.000,00	DAU	4	10.000.000,00
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Kecamatan Mojolaban	3	20.776.545,00	DAU	3	89.000.000,00
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit sarana prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Kecamatan Mojolaban	1	9.000.000,00	DAU	3	10.000.000,00
	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang didsediakan	Kecamatan Mojolaban	2	4,700.000,00	DAU	4	15.000.000,00
	7.01.01.2.08	*Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	*Cakupan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah*	*Kecamatan Mojolaban*	*100*	*338.196.000,00*	*DAU*	*100*	310.000.000,00
	7.01.01.2.08.0001	Penyedia jasa surat menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat	Kecamatan Mojolaban	2	12.900.000,00	DAU	2	15.000.000,00

Tujuan	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2024				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
				Lokasi	Target capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	7.01.01.2.08.0002	Penyedia jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jum;lah laporan Penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik yang disediakan	Kecamatan Mojolaban	12	10-5.480.000,00	DAU	3	110.000.000,00
	7.01.01.2.08.0004	Penyedia jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Kecamatan Mojolaban	12	219.816.000,00	DAU	12	185.000.000 ,00
	7.01.01.2.09	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	*Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	*Kecamatan Mojolaban*	*100*	*178.705.500,00*	*DAU*	*100*	342.000.000,00
	7.01.01.2.09.0001	Penyedia jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Kecamatan Mojolaban	14	74.950.000,00	DAU	14	75.000.000,00
	7.01.01.2.09.0002	Penyedia jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak dan Perizinan Kendnaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Kecamatan Mojolaban	1	14.962.500,00	DAU	1	15.000.000,00
	7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	Kecamatan Mojolaban	50	10.000.000,00	DAU	10	10.000.000,00
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Kecamatan Mojolaban	20	12.500.000,00	DAU	20	14.000.000,00
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Kecamatan Mojolaban	1	49.238.000,00	DAU	1	188.000.000,00
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Kecamatan Mojolaban	0	0	DAU	0	0

Tujuan	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2024				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
				Lokasi	Target capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/drehabilitasi	Kecamatan Mojolaban	1	18.975000,00	DAU	3	40.000.000,00
	JUMLAH					**3.732.472.595,00**			**3.922.470.000,00**

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 merupakan panduan kerja bagi Kecamatan Mojolaban selama 1 (satu) tahun ke depan. Rencana Kerja ini disusun berdasarkan kebutuhan Perangkat Daerah dan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun dalam rangka mendukung pencapaian program Kepala Daerah. Mendasarkan pada hal tersebut, pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 didasarkan dari Rencana Strategis Kecamatan Mojolaban tahun 2021–2026. Guna pencapaian tujuan perencanaan pembangunan dalam 1 (satu) tahun ke depan. Penyusunan perencanaan pembangunan yang berkualitas akan menopang dalam mewujudkan pembangunan yang berkualitas terutama dalam mencapai visi dan misi Kepala Daerah.

Renja Perangkat Daerah Kecamatan Mojolaban Tahun 2024 merupakan indikator dalam proses evaluasi laporan perencananan atas kinerja satu tahun, sehingga dapat meminimalisir pelaksanaan kegiatan yang menyimpang dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2021-2026 sesuai dengan tupoksi Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo.

Mojolaban, 10 Agustus 2023
Camat Mojolaban

JOKO WINDARTO,S,STP.,MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19780627 199703 1 001



RENCANA KERJA (RENJA)

KECAMATAN BULU

TAHUN 2024

PERANGKAT DAERAH KECAMATAN BULU

KABUPATEN SUKOHARJO

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan Karunianya, kami telah dapat menyelesaikan penyusuan Rancana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kecamatan Bulu Tahun 2024. RENJA Perangkat Daerah Tahun 2024 merupakan bentuk komitemen nyata Perangkat Daerah Kecamatan Bulu dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan Perangkat Daerah yang baik sebagai mana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

RENJA adalah wujud perencanaan dokumen Perangkat Daerah dalam satu tahun anggaran. Proses rencana kegiatan dan penganggaran Perangkat Daerah Kecamatan Bulu telah disusun dalam Rencana Kerja (RENJA) tahun 2024.

Adapun tujuan penyusunan renja adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah, dalam bentuk rancana tahunan. Melalui penyusunan Renja juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsi *good governance*, yaitu dalam rangka terwujudnya perencanaan yang baik dan benar-benar terprogram.

Demikian Laporan RENJA ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang

Bulu, 10 Agustus 2023
CAMAT BULU
KABUPATEN SUKOHARJO

WIDYANTO SETYA WIBOWO,S STP, MM
Pembina Tk I
NIP. 19780617 199711 1 001

SALINAN

BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 35 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024;

b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 273 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan Kepala Daerah setelah Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 192) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 262);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tatacara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 200);
13. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);
14. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 298);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

Renja Perangkat Daerah disusun dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Pasal 3

Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

BAB II

SISTEMATIKA DAN FUNGSI RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 4

Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. bab I : pendahuluan;
b. bab II : hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu;
c. bab III : tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
d. bab IV : rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan
e. bab V : penutup.

Pasal 5

Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah.

BAB II

PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 6

(1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah.
(2) Kepala Perangkat Daerah melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi Renja Perangkat Daerah kepada Bupati melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.

BAB III

PERANGKAT DAERAH PENYUSUN

Pasal 7

(1) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun oleh Perangkat Daerah sebagai berikut:
    a. Sekretariat Daerah;
    b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
    c. Inspektorat Daerah;
    d. Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan;
    e. Dinas Kesehatan;
    f. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang;
    g. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
    h. Satuan Polisi Pamong Praja;
    i. Dinas Sosial;

j. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak;
k. Dinas Pangan;
l. Dinas Lingkungan Hidup;
m. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil;
n. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa;
o. Dinas Perhubungan;
p. Dinas Komunikasi Dan Informatika;
q. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
r. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;
s. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
t. Dinas Pertanian dan Perikanan;
u. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah dan Perdagangan;
v. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
w. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
x. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
y. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
z. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
aa. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
bb. Kecamatan Weru;
cc. Kecamatan Bulu;
dd. Kecamatan Tawangsari;
ee. Kecamatan Sukoharjo;
ff. Kecamatan Nguter;
gg. Kecamatan Bendosari;
hh. Kecamatan Polokarto;
ii. Kecamatan Mojolaban;
jj. Kecamatan Grogol;
kk. Kecamatan Baki;
ll. Kecamatan Gatak; dan
mm. Kecamatan Kartasura.

(2) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf mm tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 10 Agustus 2023

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 10 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd.

WIDODO

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2023 NOMOR 35

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ditandatangani secara elektronik oleh:

TEGUH PRAMONO, SH, MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19710429 199803 1 003

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 35 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN
SUKOHARJO TAHUN 2024

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2024

Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 terdiri atas:

1. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Inspektorat Daerah;
4. Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan;
5. Dinas Kesehatan;
6. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang;
7. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
8. Satuan Polisi Pamong Praja;
9. Dinas Sosial;
10. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak;
11. Dinas Pangan;
12. Dinas Lingkungan Hidup;
13. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil;
14. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa;
15. Dinas Perhubungan;
16. Dinas Komunikasi Dan Informatika;
17. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
18. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;
19. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
20. Dinas Pertanian dan Perikanan;
21. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah dan Perdagangan;
22. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
23. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
24. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
25. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
26. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
27. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
28. Kecamatan Weru;
29. Kecamatan Bulu;

30. Kecamatan Tawangsari;
31. Kecamatan Sukoharjo;
32. Kecamatan Nguter;
33. Kecamatan Bendosari;
34. Kecamatan Polokarto;
35. Kecamatan Mojolaban;
36. Kecamatan Grogol;
37. Kecamatan Baki;
38. Kecamatan Gatak; dan
39. Kecamatan Kartasura.

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ii

Daftar Isi..... iii

BAB I PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang..... 1

1.2 Landasan Hukum 3

1.3 Maksud dan Tujuan..... 7

1.4 Sistematika Penulisan..... 7

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah..... 9

2.2Analisis Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah... 13

2.3Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD 21

2.4Review terhadap Rancangan Awal PD..... 23

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1Telaahan Terhadap Kebijakan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo..... 34

3.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah 40

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 44

BAB IV PENUTUP..... 65

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja Perangkat Daerah merupakan sebuah dokomen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya. Renja Perangkat Daerah memiliki fungsi yang sangat fondamental dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja Perangkat Daerah merupakan produk perencanaan pada Unit Organesasi pemerintah terendah dan terkecil. Renja Perangkat Daerah berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kualtitas penyusunan Renja Perangkat Daerah sangatlah menentukan pada kualitas pelayanan pada publik.

Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dimulai dengan persiapan penyusunan Renja Perangkat Daerah dengan mengumpulkan data dan informasi. Menganalisa gambaran pelayanan Perangkat Daerah untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu berdasrkan Renstra Perangkat Daerah yang didasarkan pada penelaahan rancangan awal RKPD. Selanjutnya menjadi perumusan kegiatan prioritas yang juga didasarkan kepada penelaahan usulan kegiatan masyarakat.

Prinsip-prinsip di dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah , adalah sebagai berikut :

a. Berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan mengacu pada rancangan awal RKPD;
b. Rumusan program/kegiatan di dalam Renja Perangkat Daerah didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing Perangkat Daerah;
c. Penyusunan bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD;
d. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolak ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun n dan tahun n+1.

Keterkaitan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD dan Renstra Perangkat Daerah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena didalam Renja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD, Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Renja Perangkat Daerah merupakan masukan utama bagi penyusunan KUA, PPAS, RKA Perangkat Daerah, dan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Dasar Hukum Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Bulu Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang

Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

10. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);

17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 174);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 192) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031(Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 262);

20. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);

21. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 298);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);

23. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 82 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Staf Ahli Bupati, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat dan Kecamatan;

1.3 Maksud dan Tujuan

Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Bulu Tahun 2024 merupakan dokumen resmi perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk 1 (satu) tahun ke depan, yang dimulai tanggal 1 Januari 2024 dan berakhir tanggal 31 Desember 2024, serta menggambarkan capaian kinerja yang dapat ditransformasikan ke dalam Renja Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah. Sedangkan maksud dan tujuan Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Bulu adalah :

1. Sebagai dokumen pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kecamatan Bulu dengan berpedoman pada RKPD Kabupaten Sukoharjo.
2. Untuk menjamin program-program tersebut dapat terlaksana sesuai yang diharapkan dengan menitikberatkan pada program-program prioritas.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Bulu Tahun 2024 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renja, landasan hukum penyusunan Renja, maksud dan tujuan penyusunan Renja, dan sistematika penulisan dokumen Renja.

Bab II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah, analisa kinerja pelayanan Perangkat Daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dan review terhadap Rancangan Awal Perangkat Daerah.

Bab III Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah

Bab ini memuat tentang telaahan terhadap kebijakan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, serta tujuan dan sasaran dari Perangkat Daerah.

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab ini memuat rencana kerja serta pendanaan dari program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pada tahun 2024.

Bab IV Penutup

Memuat kata-kata penutup dan kaidah-kaidah di dalam pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bulu Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

BAB II

EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu Dan Capaian Program Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan OPD untuk 1 (satu) periode yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja Kecamatan Bulu menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dan hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kecamatan Bulu selama tahun 2022.

Realisasi dan evaluasi program dan kegiatan Kecamatan Bulu Tahun 2022 mengacu pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran – Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah untuk menetapkan APBD 2022. Adapun realisasi program dan kegiatan tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1

ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA

PERANGKAT DAERAH KECAMATAN BULU

TAHUN 2022

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	SELISIH (Rp)	%
1	2	3	4	5	6
A	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**2.577.367.688**	**2.516.888.606**	**60.479.082**	**97,65**
I	***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	***29.000.000***	***29.000.000***	***-***	***100***
	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.000.000	5.000.000	-	100
	2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.000.000	4.000.000	-	100
	3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.000.000	4.000.000	-	100
	4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.000.000	4.000.000	-	100
	5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	4.000.000	4.000.000	-	100
	6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.000.000	4.000.000	-	100
	7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.000.000	4.000.000	-	100
II	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	***1.662.155.000***	***1.627.671.107***	***34.483.893***	***97,93***
	8 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.550.155.000	1.515.671.107	34.483.893	97,78
	9 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100.000.000	100.000.000	-	100
	10 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	3.000.000	3.000.000	-	100
	11 Koorodinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.000.000	3.000.000	-	100
	12 Koorodinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3.000.000	3.000.000	-	100
	13 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	3.000.000	3.000.000	-	100
III	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***186.690.000***	***177.825.000***	***8.865.000***	***95,25***
	14 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.975.000	4.975.000	-	100
	15 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	15.015.000	15.015.000	-	100
	16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	104.075.000	104.057.000	18.000	99,98
	17 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.500.000	7.500.000	-	100
	18 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.100.000	5.100.000	-	100
	19 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50.025.000	41.178.000	8.847.000	82,31
IV	***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	***278.441.000***	***277.638.000***	***803.000***	***99,71***
	20 Pengadaan Mebel	20.972.000	20.972.000	-	100
	21 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	29.640.000	29.640.000	-	100
	22 Pengadaan Gedung Kantor atau bangunan Lainnya	198.803.000	198.000.000		100
	23 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	14.513.000	14.513.000	-	100
	24 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	14.513.000	14.513.000	-	100
V	***Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	***278.061.688***	***266.983.503***	***11.078.185***	***96,02***
	25 Penyedia Jasa Surat Menyurat	15.000.000	15.000.000	-	100
	26 Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	109.950.000	105.878.503	4.071.497	96,30
	27 Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor	153.111.688	146.105.000	7.006.688	95,42

VI		***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***143.020.000***	***137.770.996***	***5.249.004***	***96,33***
	28	Penyedia Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	49.450.000	45.328.476	4.121.524	91,67
	29	Penyedia Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	17.000.000	16.000.000	1.000.000	94,12
	30	Pemeliharaan Mebel	5.500.000	5.500.000	-	100
	31	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.490.000	5.490.000	-	100
	32	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	63.060.000	62.932.520	127.480	99,80
	33	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.	2.520.000	2.520.000	-	100
B		**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**12.000.000**	**12.000.000**	**-**	**100**
VII		***Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja***	***12.000.000***	***12.000.000***	***-***	***100***
	34	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	6.000.000	6.000.000	-	100
	35	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6.000.000	6.000.000	-	100
C		**Program Pemberdayaan Masyarakata Desa dan Kelurahan**	**85.000.000**	**84.744.750**	**255.250**	**99,70**
VIII		***Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa***	***20.000.000***	***20.000.000***	***-***	***100***
	36	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10.000.000	10.000.000	-	100
	37	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	10.000.000	10.000.000	-	100
IX		***Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan***	***65.000.000***	***64.744.750***	***255.250***	***99,61***
	38	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000	49.984.750	15.250	99,97
	39	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	15.000.000	14.760.000	240.000	98,40
D		**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**37.000.000**	**37.000.000**	**-**	**100**
X		***Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum***	***27.000.000***	***27.000.000***	***-***	***100***
	40	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	12.000.000	12.000.000	-	100
	41	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	15.000.000	15.000.000	-	100
XI		***Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala***	***10.000.000***	***10.000.000***	***-***	***100***
	42	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	10.000.000	10.000.000	-	100
E		**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**356.000.000**	**356.000.000**	**-**	**100,00**
XII		***Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah***	***356.000.000***	***356.000.000***	***-***	***100,00***
	43	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka	190.000.000	190.000.000	-	100
	44	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	166.000.000	166.000.000	-	100

F	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**		**50.200.000**	**49.300.000**	**900.000**	**98,21**
XIII	***Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan***		***50.200.000***	***49.300.000***	***900.000***	***98,21***
	45	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	7.500.000	7.500.000	-	100
	46	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Pendayagunaan Aset Desa	7.500.000	7.500.000	-	100
	47	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	10.200.000	10.200.000	-	100
	48	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan dan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan	5.000.000	5.000.000	-	100
	49	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	20.000.000	19.100.000	900.000	95,50
TOTAL			**3.117.567.688**	**3.055.933.356**	**61.634.332**	**98,02**

Evaluasi Renja Kecamatan Bulu selama kurun waktu 1 (satu) tahun dengan perbandingan realisasi Renja tahun sebelumnya serta target kinerja program/ kegiatan Renja tahun berjalan serta capaian program Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Bulu dapat dilihat pada tabel halaman berikut :

TABEL 2.2

TABEL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD

No	Sasaran/Program	Indikator Kinerja	Target Renstra PD (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja PD s/d Renja PD 2021		Target Kinerja PD Tahun Berjalan (Tahun 2022)		Realisasi Kinerja PD Tahun Berjalan (Tahun 2022)		Realisasi Capaian Kinerja PD s/d Renja PD 2022		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d 2022 (%)	
1	2	3	4		5		6		5		5		6	
			K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	Rp
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	17.667.800.000	20	2.585.866.265	100	2.577.367.688	100	2.576.888.606	40	5.182.754.871	40	28,88
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100	81.050.000	20	20.000.000	100	12.000.000	100	12.000.000	40	32.000.000	40	39,48
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Prosentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100	683.530.000	20	85.000.000	100	85.000.000	100	84.744.750	40	169.744.750	40	24,83
4	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Posentase Capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100	304.630.000	20	148.921.000	100	37.000.000	100	37.000.000	40	785.921.000	40	257,99
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100	1.779.690.000	20	118.000.000	100	356.000.000	100	356.000.000	40	474.000.000	40	26,63
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	693.200.000	20	49.550.000	100	50.200.000	100	49.300.000	40	98.850.000	40	14,26

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan tugasnya Kecamatan Bulu mengacu pada tugas Camat yaitu membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan keluarahan, serta fungsi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Staf Ahli Bupati, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat dan Kecamatan. Tugas dan fungsi tersebut dilaksanakan menurut kedudukan masing-masing dalam struktur organisasi yang ada di Kecamatan Bulu. Tugas pokok dan fungsi Kecamatan tersebut adalah

a. Camat

Tugas Camat adalah melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan.. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Camat mempunyai fungsi :

1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
2. Pengkoordinaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa;
3. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
5. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
7. Pembinaan dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa

8. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan;
9. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan Kecamatan; dan
10. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Sekretariat Kecamatan

Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh seorang Sekretaris Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan konsep dan pelaksananan kebijakan, pengoordinasiaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi keuangan, hukum, informasi, kehumasan, keoorganesasian dan ketatalaksanaan, pembinanan ketatusahaan, kearsipan kerumahtanggaan, kepegawaian, pengelolaan dan penatausahaan aset, dan pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan. Dalam melaksanakan tugas Sekretariat Kecamatan mempunyai fungsi :

1. Pengoordinasian penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Kecamatan;
2. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi keuangan, hukum, hubungan masyarakat, ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, dan pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan;

a) Pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Kecamatan;
b) Pengoordinasiaan dan penyusunan peraturan perundang-unangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Kecamatan;
c) Pengoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;

d) Penyelenggaraan dan penatausahaan aset dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingukungan Kecamatan;

e) Pelaksananan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;

f) Pengelolaan kepegawaian di lingkungan Kecamatan; dan

g) Pelaksananan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.

c. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian berada dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Camat yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang perencanaan, data informasi, dan program kerja, dan pengelolaan keuangan di lingkungan Kecamatan.

d. Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Subbagian berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Camat yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemanatauan, evaluasi serta pelaporanyang meliputi pembinaan ketatausahaan , hukum, kehumasan, keorganesasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, kearsipan, kepegawaian, pengelolaan dan penatausahaan aset dan pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan.

e. Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat yang mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksananan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang

pemerintahan umum dan desa meliputi administrasi kependudukan, dan meningkatkan kemadirian politik, monograafi kecamatan, pengisian Perangkat Desa dan Kepala Desa, pembinanan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa, pembinaan Badan Perwakilan Desa dan Lembaga Kemasyaraakatan Desa serta pelaksananan kegiatan baik di tingkat internal Kecamatan maupun dengan pihak terkait dan pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat sebagai urusan otonomi daerah di bidang pemerintahan.

f. Seksi Keamanan dan Ketertiban.

Seksi Keamanan dan Ketertiban dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat yang mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksananan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang ketenteraman dan ketertiban wilayah serta pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat meliputi penanggulangan bencana alam, dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta pelaksanaan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat sebagian urusan otonomi daerah di bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

g. Seksi Pemerdayaan Masyarakat Desa

Seksi Pemerdayaan Masyarakat Desa dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat yang mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksananan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang pembangunan, pemberdayaan masyarakat, perekonomian desa, produksi dan disstribusi dan pelaksanaan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat sebagian urusan otonomi daerah di bidang pemberdayaan masyarakat desa.

h. Seksi Kesejahteraan Sosial

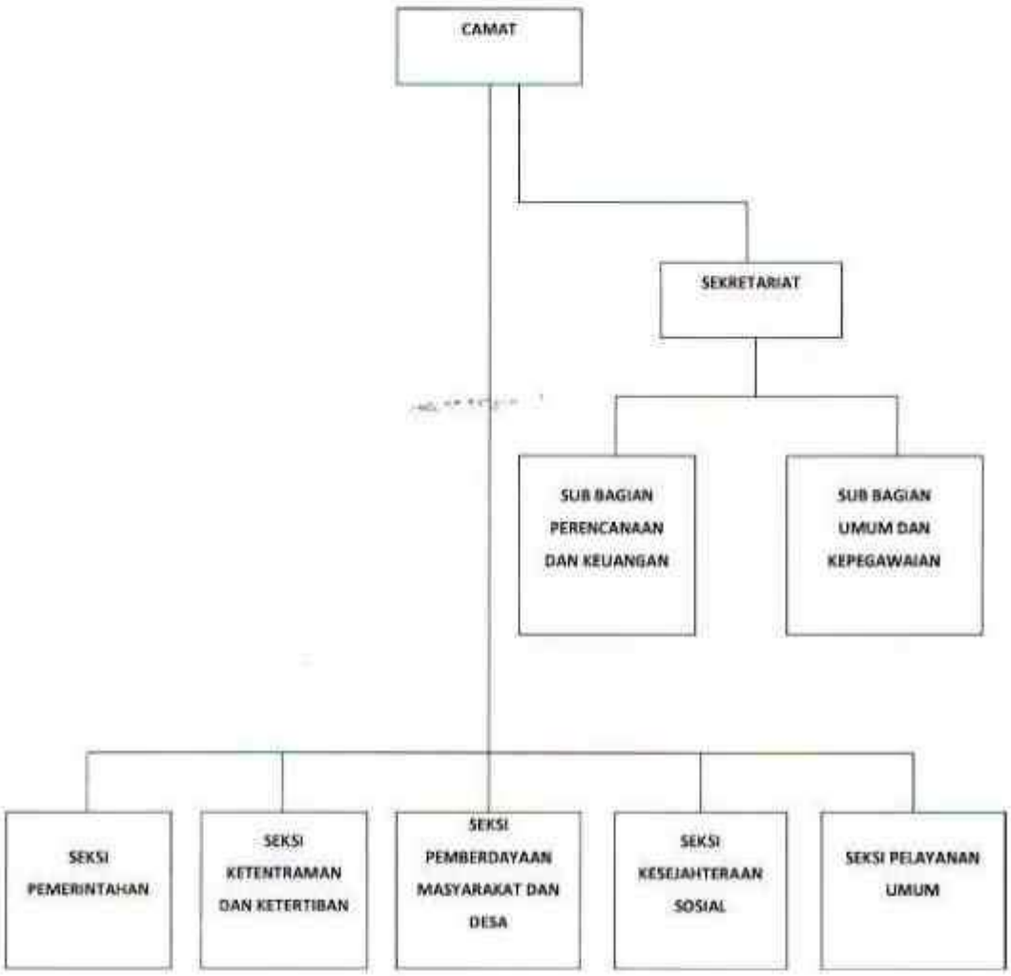
Seksi Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat yang mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksananan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang kesejahteraan sosial yang meliputi masalah sosial, kepemudaan, peranan wanita, olah raga, kehidupan keagamaan, kebudayaan dan kesehatan, peningkatan kualitas sumber daya perangkat desa, lembaga desa dan pemberian bantuan sosial serta program pengentasan kemiskinan serta pelaksanaan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat sebagian urusan otonomi daerah di bidang kesejahteraan sosial.

j. Seksi Pelayanan Umum

Seksi Pelayanan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat yang mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksananan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang Pelayanan Umum yang meliputi inventarisasi data kekayaan desa, dan sarana prasarana desa, kebersihan lingkungan yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat, pelayanan kependudukan, kebersihan lingkungan, perizinan peningkatan sarana dan prasarana fasilitas umum dan pelayanan umum administrasi kependudukan, pelayanan administrasi terpadu kecamatan, percepatan pencapaian standar pelayanan minimal serta pelaksanaan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat sebagian urusan otonomi daerah di bidang Pelayanan Umum.

Gambar 2. 1

Bagan Organisasi Kecamatan Bulu



Program-program yang dilaksanakan pada tahun tahun 2022 yaitu:

1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2) Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
3) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
4) Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
5) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

6) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Program-program tersebut dilaksanakan dalam rangka memenuhi tugas untuk melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa.

PD Kecamatan merupakan representasi Pemerintah pada tingkat bawah, yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, menjadi pihak yang paling dekat dengan masyarakat. Melaksanakan tugas pelayanan publik yang paling dekat dengan masyarakat bukanlah hal yang mudah yang bisa dilalui tanpa ada hambatan dan permasalahan-permasalahan. Hambatan dan permasalahan yang ada dapat diselesaikan dengan kerjasama antara pegawai di lingkungan Kecamatan Bulu.

Kinerja pelayanan Kecamatan Bulu didasarkan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 – 2026, dalam rangka mendukung pada : Misi 1 RPJMD : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik melalui Percepatan Reformasi Birokrasi. Dengan Misi, yaitu : Mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik melalui percepatan reformasi birokrasi dan Sasaran yang ingin dicapai, yaitu : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel.

Kinerja Pelayanan pada Kecamatan Bulu Kabupaten Sukoharjo menunjukkan tingkat capaian kinerja Kecamatan Bulu berdasarkan sasaran/target Renstra Kecamatan Bulu tahun 2021-2026 sebagaimana disajikan dalam tabel berikut :

TABEL 2.3
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN BULU
KABUPATEN SUKOHARJ0
TAHUN 2021-2026

No	Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD 2026	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun						Reaaliasasi Capaian Tahun						Rasio Capaian pada tahun					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	**Terwujudnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Responsif dan Akuntabel**	**Indek Kepuasan Masyarakat**	**Nilai**	**86,5**	**79**	**80**	**85**	**85,5**	**86**	**86,5**	**82,67**	**84,33**					**104,64**	**105,41**				
1.1	**Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat**	**Persentase Peningkatan Pelayanan Kecamatan**	**%**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**97,97**	**100**					**97,97**	**100**				
1.1.1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100					100	100				
1.1.2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Prosentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100					100	100				
1.1.3	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Posentase Capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100					100	100				
1.1.4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100					100	100				
1.1.5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100					100	100				
1.2	**Meningkatnya Kualitas Aparatur dan Pelayanan Publik**	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**Nilai**	**72**	**45**	**51**	**57**	**61**	**67**	**72**	**57,23**	**Dinilai di th 2023**					**127,18**	**0,00**				
1.2.1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100					100	100				

TABEL 2.4
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN BULU
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2022

No	Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Renstra	Realisasi 2021	2022		Persentase Capaian 2022 (%)	Persentase Capaian s/d Tahun 2022 terhadap Renstra (%)	PD Penanggung Jawab
						Target	Realisasi s/d Triwulan IV			
1	**Terwujudnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Responsif dan Akuntabel**	**Indek Kepuasan Masyarakat**	**Nilai**	**86,5**	**82,667**	**80**	**84,33**	**105,41**	**97,49**	**Kec Bulu**
1.1	**Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat**	**Persentase Peningkatan Pelayanan Kecamatan**	**%**	**100**	**97,97**	**100**	**100**	**100**	**39,59**	**Kec Bulu**
1.1.1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Tingkat Kinerja Penyelenggaraa n Pemerintahan dan Pelayanan Publik	%	100	100	100	100	100	40	Kec Bulu
1.1.2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Prosentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	%	100	100	100	100	100	40	Kec Bulu
1.1.3	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Posentase Capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum	%	100	100	100	100	100	40	Kec Bulu
1.1.4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan Umum	%	100	100	100	100	100	40	Kec Bulu
1.1.5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	%	100	100	100	100	100	40	Kec Bulu
1.2	**Meningkatnya Kualitas Aparatur dan Pelayanan Publik**	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**Nilai**	**72**	**57,23**	**51**	**Penilaian di tahun 2023**		**15,90**	**Kec Bulu**
1.2.1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	100	100	100	40	Kec Bulu

Dari tabel capaian kinerja program pada tahun anggaran 2023 dapat dilihat bahwa capaian kinerja sangat baik karena sudah mencapai target. Tercapainya target kinerja program tersebut tidak lepas dari faktor-faktor yang mendukung tercapainya program, dan juga hambatan.

Faktor-faktor yang menjadi pendukung dari capaian kinerja Kecamatan Bulu antara lain adalah:

1. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan para staf sehingga tercipta suasana yang nyaman dan kondusif.
2. Tersedianya dukungan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
3. Sarana dan prasarana yang cukup memadai.
4. Adanya dukungan bimbingan dan pelatihan teknis dari Dinas terkait.

Sedangkan faktor-faktor yang menjadi penghambat capaian kinerja Kecamatan Bulu adalah :

1. Masih kurangnya profesionalisme dan kualitas sumber daya aparatur kecamatan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Isu – Isu strategis adalah kondisi atau hal yang diperhatikan dalam perencanaan pembangunan selama 5 (Lima) tahun dalam melaksanakan atau menyelenggarakan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Bulu kepada masyarakat. Analisa isu – isu strategis di identifikasikan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Bulu dalam menjalankan pemerintahan ada berbagai permasalahan, sebagai berikut :

a. Bidang Sekretariat

1) Kurangnya kebutuhan personil di bagian sekretariat Kantor Kecamatan Bulu, sehingga banyak tenaga yang merangkap tugas lain, untuk meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat perlu adanya tambahan personil.

b. Bidang Pelayanan Publik

1) Layanan di OPD Kecamatan Bulu kurang maksimal, hal ini disebabkan keterbatasan dan kemampuan individu tenaga (SDM).
2) Waktu pelayanan di OPD Kecamatan Bulu dinilai masih kurang maksimal, hal ini disebabkan ketrbatasan kemampuan sumberdaya manusia dalam memberikan pelayanan.

c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1) Belum optimalnya peran serta dan swadaya masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan wilayah.
2) Belum optimalnya peran serta Lembaga kemasyarakatan dalam pemberdayaan lembaga kemasyarakata

d. Bidang Kesejahteraan Sosial

1) Belum terwujudnya sinkronisasi data sebagai dasar pengambilan kebijakan terkait dengan bantuan sosial.

e. Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum

1) Peran serta warga terhadap penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum belum optimal
2) Tingkat kinerja pelayanan pengelola ketentraman dan ketertiban yang belum optimal.
3) Kurangnya pemahaman warga masyarakat tentang peraturan perundangan dan hukum.

f. Bidang Pemerintahan

1) Belum optimalnya kinerja aparatur Pemerintahan Desa
2) Pengelolaan data pemerintahan umum, pengelolaan data Pemerintahan Desa, pengelola data kependudukan dan pertanahan yang belum optimal.
3) Perlu peningkatan sinergitas yang bak antar unit kerja dan peningkatan pelayanan kepada warga masyarakat.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal OPD

Adapun Review rancangan awal Renja Kecamatan Bulu Tahun 2024 sebagaimana yang tertuang dalam rencana kegiatan 1 (satu) tahun yang menjadi acuan dalam menerapkan program/ kegiatan yang merupakan kebijakan dalam pengunaan anggaran dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL 2.5

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL KECAMATAN BULU TAHUN 2024

RANCANGAN AWAL RKPD/ RENJA							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							Catatan Penting
Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						3.203.039.000							3.196.289.000	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			**Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Kecamatan Bulu**	**100%**	**12.000.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			**Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Kecamatan Bulu**	**100%**	**12.000.000**	
	Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan		***Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan***	***Kecamatan Bulu***	***100%***	***12.000.000***		***Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan***		***Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan***	***Kecamatan Bulu***	***100%***	***12.000.000***	
		Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Bulu	2 Laporan	6.000.000			Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Bulu	2 Laporan	6.000.000	
		Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Bulu	2 Laporan	6.000.000			Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Bulu	2 Laporan	6.000.000	

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			**Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Kecamatan Bulu**	**100%**	**118.500.000**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Kecamatan Bulu**	**100%**	**118.500.000**	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		**Cakupan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	***Kecamatan Bulu***	***100%***	***20.000.000***		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**		**Cakupan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	***Kecamatan Bulu***	***100%***	***20.000.000***	
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Bulu	5 Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000,00			Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Bulu	5 Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000,00	
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Bulu	3 Laporan	10.000.000,00			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Bulu	3 Laporan	10.000.000,00	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		***Cakupan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan***	***Kecamatan Bulu***	***100%***	***98.500.000***		***Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan***		***Cakupan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan***	***Kecamatan Bulu***	***100%***	***98.500.000***	
		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kecamatan Bulu	1 Lembaga Kemasyarakatan	80.000.000,00			Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kecamatan Bulu	1 Lembaga Kemasyarakatan	80.000.000,00	
		Peningkatan Kapasitas Lembaga kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kecamatan Bulu	1 Lembaga Kemasyarakatan	15.000.000,00			Peningkatan Kapasitas Lembaga kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kecamatan Bulu	1 Lembaga Kemasyarakatan	15.000.000,00	
		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Bulu	1 Laporan	3.500.000,00			Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Bulu	1 Laporan	3.500.000,00	
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			**Persentase Capaian Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Kecamatan Bulu**	**100%**	**37.000.000**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			**Persentase Capaian Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Kecamatan Bulu**	**100%**	**37.000.000**	

	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		***Cakupan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum***	***Kecamatan Bulu***	***100%***	***27.000.000***		***Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum***		***Cakupan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum***	***Kecamatan Bulu***	***100%***	***27.000.000***	
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Bulu	4 laporan	12.000.000			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Bulu	4 laporan	12.000.000	
		Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kecamatan Bulu	4 laporan	15.000.000			Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kecamatan Bulu	4 laporan	15.000.000	
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		**Cakupan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	***Kecamatan Bulu***	***100%***	***10.000.000***		***Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah***		**Cakupan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	***Kecamatan Bulu***	***100%***	***10.000.000***	
		Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kecamatan Bulu	3 laporan	10.000.000			Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kecamatan Bulu	3 laporan	10.000.000	
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			**Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**Kecamatan Bulu**	**100%**	**316.000.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**			**Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**Kecamatan Bulu**	**100%**	**316.000.000**	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		***Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah***	***Kecamatan Bulu***	***100%***	***316.000.000***		***Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah***		***Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah***	***Kecamatan Bulu***	***100%***	***316.000.000***	

		Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kecamatan Bulu	80 org	150.000.000			Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kecamatan Bulu	80 org	150.000.000	
		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kecamatan Bulu	12 dokumen	166.000.000			Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kecamatan Bulu	12 dokumen	166.000.000	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			**Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Kecamatan Bulu**	100%	76.500.000	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**			**Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Kecamatan Bulu**	100%	76.500.000	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		***Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa***	***Kecamatan Bulu***	*100%*	***76.500.000***		***Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa***		***Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa***	***Kecamatan Bulu***	*100%*	***76.500.000***	
		Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kecamatan Bulu	3 Dokumen	5.000.000			Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kecamatan Bulu	3 Dokumen	5.000.000	
		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan Bulu	12 Dokumen	7.500.000			Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan Bulu	12 Dokumen	7.500.000	

		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kecamatan Bulu	2 Dokumen	7.500.000			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kecamatan Bulu	2 Dokumen	7.500.000	
		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kecamatan Bulu	4 Dokumen	5.000.000			Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kecamatan Bulu	4 Dokumen	5.000.000	
		Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kecamatan Bulu	1 Dokumen	10.000.000			Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kecamatan Bulu	1 Dokumen	10.000.000	
		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Kecamatan Bulu	2 Dokumen	5.000.000			Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Kecamatan Bulu	2 Dokumen	5.000.000	
		Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kecamatan Bulu	2 Dokumen	7.500.000			Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kecamatan Bulu	2 Dokumen	7.500.000	
		Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kecamatan Bulu	12 Dokumen	5.000.000			Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kecamatan Bulu	12 Dokumen	5.000.000	
		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Bulu	2 Dokumen	4.000.000			Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Bulu	2 Dokumen	4.000.000	

		Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Kecamatan Bulu	1 Dokumen	20.000.000			Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Kecamatan Bulu	1 Dokumen	20.000.000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA			**Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kecamatan Bulu**	**100%**	**2.643.039.000**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kecamatan Bulu**	**100%**	**2.636.289.000**	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		***Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	***Kecamatan Bulu***	100%	29.000.000		***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***		***Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	***Kecamatan Bulu***	100%	29.000.000	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Bulu	1 Dokumen	5.000.000			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Bulu	1 Dokumen	5.000.000	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Bulu	1 Dokumen	4.000.000			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Bulu	1 Dokumen	4.000.000	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kecamatan Bulu	1 Dokumen	4.000.000			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kecamatan Bulu	1 Dokumen	4.000.000	
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kecamatan Bulu	1 Dokumen	4.000.000			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kecamatan Bulu	1 Dokumen	4.000.000	
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kecamatan Bulu	1 Dokumen	4.000.000			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kecamatan Bulu	1 Dokumen	4.000.000	

		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Bulu	16 Laporan	4.000.000			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Bulu	16 Laporan	4.000.000	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Bulu	2 laporan	4.000.000			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Bulu	2 laporan	4.000.000	
	Administrasin Keuangan Perangkat Daerah		***Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	***Kecamatan Bulu***	**100%**	**1.780.313.000**		***Administrasin Keuangan Perangkat Daerah***		***Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	***Kecamatan Bulu***	**100%**	**1.780.313.000**	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Bulu	12 Orang/bulan	1.668.313.000			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Bulu	12 Orang/bulan	1.668.313.000	
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kecamatan Bulu	12 Dokumen	100.000.000			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kecamatan Bulu	12 Dokumen	100.000.000	
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kecamatan Bulu	12 Dokumen	3.000.000			Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kecamatan Bulu	12 Dokumen	3.000.000	
		Koorodinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Bulu	1 Laporan	3.000.000			Koorodinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Bulu	1 Laporan	3.000.000	
		Koorodinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kecamatan Bulu	2 Laporan	3.000.000			Koorodinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kecamatan Bulu	3 Laporan	3.000.000	

		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kecamatan Bulu	12 Dokumen	3.000.000			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kecamatan Bulu	12 Dokumen	3.000.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		***Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***	***Kecamatan Bulu***	***100%***	***34.750.000***		***Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***		***Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***	***Kecamatan Bulu***	***100%***	***28.000.000***	
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kecamatan Bulu	20 Paket	6.750.000			Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kecamatan Bulu	0	0,00	Menyesuaikan kebutuhan dan ketersediaan anggran
		Monitoring , evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kecamatan Bulu	2 Dokumen	3.000.000			Monitoring , evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kecamatan Bulu	2 Dokumen	3.000.000	
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kecamatan Bulu	20 Orang	20.000.000			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kecamatan Bulu	20 Orang	20.000.000	
		Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan Bulu	60 Orang	5.000.000			Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan Bulu	60 Orang	5.000.000	
	Administrasin Umum Perangkat Daerah		**Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	***Kecamatan Bulu***	**100%**	**247.475.000**		***Administrasin Umum Perangkat Daerah***		**Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	***Kecamatan Bulu***	**100%**	**247.475.000**	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Bulu	19 Paket	4.975.000			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Bulu	19 Paket	4.975.000	
		Penyediaan Peralatan Rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kecamatan Bulu	38 Paket	15.000.000			Penyediaan Peralatan Rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kecamatan Bulu	38 Paket	15.000.000	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kecamatan Bulu	50 Paket	175.000.000			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kecamatan Bulu	50 Paket	175.000.000	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kecamatan Bulu	6 Paket	7.500.000			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kecamatan Bulu	6 Paket	7.500.000	

		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kecamatan Bulu	730 Dokumen	5.000.000			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kecamatan Bulu	730 Dokumen	5.000.000	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Bulu	422 Laporan	40.000.000			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Bulu	422 Laporan	40.000.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		**Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	***Kecamatan Bulu***	**100%**	**92.664.000**		***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***		**Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	***Kecamatan Bulu***	**100%**	**92.664.000**	
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kecamatan Bulu	1 Unit	2.000.000			Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kecamatan Bulu	1 Unit	2.000.000	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kecamatan Bulu	5 Unit	30.000.000			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kecamatan Bulu	5 Unit	30.000.000	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kecamatan Bulu	4 Unit	50.000.000			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kecamatan Bulu	4 Unit	50.000.000	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kecamatan Bulu	1 Unit	10.664.000			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kecamatan Bulu	1 Unit	10.664.000	
	Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		***Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Kecamatan Bulu***	**100%**	**306.077.000**		***Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***		***Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Kecamatan Bulu***	**100%**	**306.077.000**	
		Penyedia jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Bulu	12 laporan	15.000.000			Penyedia jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Bulu	12 laporan	15.000.000	
		Penyedia jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kecamatan Bulu	12 laporan	98.400.000			Penyedia jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kecamatan Bulu	12 laporan	98.400.000	

		Penyedia jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kecamatan Bulu	12 laporan	192.677.000			Penyedia jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kecamatan Bulu	12 laporan	192.677.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		***Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Kecamatan Bulu***	***100%***	***152.760.000***		***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***		***Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Kecamatan Bulu***	***100%***	***152.760.000***	
		Penyedia jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kecamatan Bulu	13 Unit	50.750.000			Penyedia jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kecamatan Bulu	13 Unit	50.750.000	
		Penyedia jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak dan Perizinan Kendnaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kecamatan Bulu	1 Unit	15.000.000			Penyedia jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak dan Perizinan Kendnaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kecamatan Bulu	1 Unit	15.000.000	
		Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Kecamatan Bulu	44 Unit	4.000.000			Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Kecamatan Bulu	44 Unit	4.000.000	
		Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kecamatan Bulu	9 Unit	5.490.000			Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kecamatan Bulu	9 Unit	5.490.000	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kecamatan Bulu	2 Unit	75.000.000			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kecamatan Bulu	2 Unit	75.000.000	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Kecamatan Bulu	7 Unit	2.520.000			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Kecamatan Bulu	7 Unit	2.520.000	
JUMLAH						**3.203.039.000**			**JUMLAH**				**3.196.289.000**	

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo

Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan yang ada di Kabupaten Sukoharjo, agar lebih terarah dan berhasil guna serta berdaya guna, maka pemerintah bersama-sama masyarakat Kabupaten Sukoharjo telah menetapkan visi, misi dan strategi dalam mencapai tujuannya yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 – 2026.

a. VISI

Visi pembangunan Kabupaten Sukoharjo tahun 2021-2026 merupakan implementasi dari visi Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo periode tahun 2021-2026 yaitu:

"Mewujudkan Masyarakat Sukoharjo Yang Lebih Makmur"

Visi pembangunan daerah Kabupaten Sukoharjo tahun 2021-2026 merupakan keberlanjutan dari cita-cita pembangunan Kabupaten Sukoharjo tahun 2016-2020.

Mengandung arti bahwa dalam lima tahun kedepan masyarakat Kabupaten Sukoharjo akan tercipta kondisi sejahtera, terpenuhi seluruh kebutuhan hidupnya baik social maupun ekonomi, secara lahir maupun batin. MAKMUR juga merupakan motto atau slogan Kabupaten Sukoharjo yaitu **Maju, Aman, Konstitusional, Mantap, Unggul, dan Rapi**.

MAJU

Maju mempunyai pengertian bergerak ke depan menjadi lebih baik, tidak berhenti, tidak terlambat, mencapai tingkat peradaban yang lebih tinggi. Sebagai tugas panggilan dalam hidup. Dengan maju kita ingin tumbuh dan berkembang, dan selalu berpikir dan berusaha keras ke arah peningkatan menjadi lebih baik.

AMAN

Keamanan merupakan salah satu unsur/syarat mutlak untuk dapat terlaksananya pembangunan. Tanpa stabilitas keamanan yang terpelihara secara mantap dan berkesinambungan, tidak mungkin kegiatan pembangunan dapat terlaksana dengan lancar.

KONSTITUSIONAL

Penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, maupun kemasyarakatan harus dilandasi hokum atau dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum.

MANTAP

Warga masyarakat dan segenap penyelenggara pemerintahan optimis dalam membangun Sukoharjo.

UNGGUL

Unggul mempunyai arti semangat berprestasi untuk selalu berusaha mencapai yang terbaik.

RAPI

Rapi mengandung pengertian apik, baik, bersih, teratur ,tertib, beres.

b. MISI

Dalam rangka upaya menuju pencapaian visi pembangunan daerah Kabupaten Sukoharjo tahun 2021-2026, ditetapkan misi pembangunan daerah yaitu:

1. **Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Percepatan Reformasi Birokrasi**

Misi kesatu ini bertujuan untuk semakin mempercepat implementasi reformasi birokrasi secara optimal, yang pada periode sebelumnya telah terwujud dalam membaiknya tata kelola pemerintahan Kabupaten Sukoharjo.

Reformasi birokrasi yang diharapkan ke depan adalah pada tiga dimensi utama yaitu pelayanan publik yang semakin dinamis, efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan, kapasitas

kelembagaan, serta manajemen sumber daya manusia aparatur yang semakin baik. Pelayanan publik yang dinamis diwujudkan dengan membangun open government dan pemerintahan yang responsif. Open government dilakukan dengan perkuatan keterbukaan informasi publik, transparansi, partisipasi public dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta meningkatkan komunikasi dan serapan aspirasi publik.

Sedangkan pemerintahan yang responsive tercermin dalam respon pemerintah kabupaten dalam menghadapi aduan dan persoalan riil masyarakat, dengan cepat dan tepat, baik dalam bentuk kebijakan maupun kegiatan. Pelayanan publik yang dinamis, terbuka, dan responsive diikat dalam satu tagline pelayanan yang mudah, murah, cepat, serta didukung inovasi dan teknologi informasi.

Efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan tergambarkan dalam proses perencanaan, penganggaran, serta evaluasi pembangunan yang akuntabel. Manajemen pembangunan Kabupaten Sukoharjo ke depantidakhanyafokus pada kerjatetapikinerja, dan berorientasi pada hasil (outcome). Untukituperlu juga dilakukan pengawasan dalam prosesnya, sejak dimulainya proses perencanaan, implementasi hingga evaluasi.

Agar dapat melaksanakan manajemen pemerintahan yang baik dan bersih maka dibutuhkan kelembagaan/organisasi yang tepat dan didukung dengan penataan system manajemen sumber daya manusia aparatur yang baik. Manajemen sumber daya manusia aparatur yang baik terejawantahkan dalam bentuk integritas aparatur yang dibangun melalui kompetensi dan etika menuju integritas pribadi dan institusi, mendorong birokrasi yang inovatif, dan dijamin dalam quality assurance aparatur.

2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas

Misi kedua mengarah pada kualitas dan daya saing sumber daya manusia Sukoharjo, agar semakin sehat, pintar, berbudaya, dan lebih mencintai lingkungan. Eraglobalisasi yang semakin terbuka menuntut kualitas sumber daya manusia yang mampu bersaing secara kompetitif dalam kompetensi dan kualifikasi. Bonus

demografi yang saat ini telah dialami oleh Sukoharjo dapat dijadikan sebagai peluang sekaligus tantangan, bagaimana ke depan modal social ini akan menempatkan Sukoharjo sebagai salah satu daerah dengan sumber daya manusia yang mampu bersaing. Sehingga diharapkan, dapat memberikan dampak pertumbuhan ekonomi yang semakin baik, dan menciptakan masyarakat Sukoharjo yang semakin sejahtera.

Tidak hanya tentang kualitas dan daya saing sumber daya manusia yang diharapkan, namun juga bagaimana membentuk karakter masyarakat Sukoharjo yang semakin berbudaya. Di tenga harus keterbukaan informasi dunia yang nyata kemudian bagaimana masyarakat Sukoharjo tetap kuat menjaga etika dan norma serta nilai budaya asli Sukoharjo, serta menjaga kearifan local sejak dini.

3. Memperkuat Perekonomian Rakyat Yang Berdaya Saing Tinggi

Misi ketiga ini mempunyai tujuan mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan insklusif. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang penting dalam melakukan pembangunan ekonomi yang terjadi pada suatu negara atau pun daerah. Pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan distribusi pendapatan yang merata sangat dibutuh kan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah diukur dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan laju pertumbuhannya atas dasar harga konstan. Pertumbuhan ekonomi yang cepat akan menimbulkan ketimpangan distribusi pendapatan. Hal ini disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang bersifat sentralisasi. Pada tahun 1999 pemerintah mengubah kebijakan sentralisasi menjadi desentralisasi dengan memberlakukan Otonomi Daerah. Hal tersebut memberikan harapan dalam upaya mengurangi tingkat kemiskinan dan ketimpangan antar daerah.

Misi ini adalah untuk mengarahkan kebijakan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam rangka menurunkan jumlah penduduk miskin, yang

didukung oleh perekonomian daerah yang stabil, berkualitas, inklusif, dan menyebar. Program pengentasan kemiskinan difokuskan kepada kelompok sasaran utama, seperti petani pelaku UKM dan pekerja dan kelompok rentan lainnya. Program pengentasan kemisikinan tersebut perlu didukung oleh pertumbuhan ekonomi yang tersebar, inklusif, dan berkualitas, yakni pertumbuhan ekonomi yang menyebar di seluruh wilayah Sukoharjo, memperhitungkan kelestarian lingkungan dan keberlangsungan ketersediaan sumber daya, melibatkan seluruh kelompok masyarakat dengan mengutamakan peran dan kontribusi kelompok masyarakat yang kurang beruntung, dan menghapus praktek ekonomi biaya tinggi.

4. Memperkuat Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan

Misi keempat mengarah kepada pembangunan infrastruktur akan terus dilaksanakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar, yang akan dilaksanakan dengan penguatan konektivitas, penyediaan akses perumahan, permukiman, air minum dan sanitasi yang layak, telekomunikasi dan transportasi yang aman dan memadai.

Pembangunan berwawasan lingkungan hidup dilakukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan meningkatkan kualitas hidup manusia. Untuk menjaga kelestarian lingkungan agar kualitas lingkungan hidup tetap terjaga, pemanfaatan sumber daya alam harus dilakukan secara bijaksana, adil, efisien, dan bertanggungjawab serta lingkungan yang tangguh bencana.

5. Meningkatkan Kualitas Kehidupan Sosial dan Keagamaan

Misi ini menggambarkan sebuah kondisi yang ingin diciptakan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera, tercermin dari rasa aman dan nyaman yang dirasakan dalam kehidupan masyarakat. Kondisi yang tercipta merupakan manifestasi implementasi nilai-nilai religious dalam kehidupan masyarakat. Membangun masyarakat Sukoharjo yang religius, toleran, dan guyup ini adalah dengan menciptakan kondisi obyektif

yang memungkinkan interaksi antar umat beragama untuk saling menghormati dan menghargai satu sama lain, mendorong keberagaman, kebhinekaan, dan toleransi dalam kerangka kesatuan.

Upaya yang dilakukan antara lain dengan menguatkan pemahaman keberagaman dan kebhinekaan sejak usia dini, mengembangkan ruang-ruang publik untuk membangun komunikasi antar masyarakat melalui kegiatan seni dan rekreasi, serta mendorong kearifan local dalam bentuk gerakan-gerakan masyarakat termasuk gerakan gotong royong. Dalam misi ini terkandung tujuan untuk menciptakan kehidupan masyarakat Sukoharjo yang aman dan nyaman, tanpa ada konflik social maupun agama, bahkan konflik SARA.

Misi yang dapat dijabarkan oleh Perangkat Daerah Kecamatan adalah Misi kesatu, yaitu" **Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Percepatan Reformasi Birokrasi "**

TELAAH VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

VISI : MEWUJUDKAN MASYARAKAT SUKOHARJO YANG LEBIH MAKMUR.

MISI 1	PROGRAM	TUSI OPD	PERMASALAHAN PELAYANAN OPD	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT
Mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik melalui percepatan reformasi birokrasi	1.Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan publik	Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan	Layanan di OPD Kecamatan Bulu kurang maksimal;	Sarana prasarana cukup memadai	keterbatasan dan kemampuan individu tenaga (SDM
			Waktu pelayanan di OPD Kecamatan Bulu dinilai masih kurang maksimal.	Sarana prasarana cukup memadai	ketrbatasan kemampuan sumberdaya manusia dalam memberikan pelayanan.
TUJUAN : Terwujudnya Tata Pemerintahan yang Profesional	2.Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kalurahan	Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat	Belum optimalnya peran serta dan swadaya masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan wilayah	Mekanisme perencannaan yang cukup baik	Kesadaran warga masih lemah/ rendah
SASARAN : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang reponsif dan akuntabel		Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat Kecamatan	Belum optimalnya peran serta Lembaga kemasyarakatan dalam pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	Anggaran untuk kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan cukup memadai	Kesadaran masyarakat masih lemah/ rendah

	3.Koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum	Pengkoordinasian Upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Peran serta warga terhadap penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum belum optimal Tingkat kinerja pelayanan pengelola ketentraman dan ketertiban yang belum optimal	Anggaran untuk kegiatan sosialisasi cukup memadai.	Kesadaran warga masih kurang Personil pengelola ketentraman dan ketertiban yang masih kurang
		Pengkoordinasian penerapan dan penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	Kurangnya pemahaman warga masyarakat tentang peraturan perundangan dan hukum.	Peran media social cukup efektif.	Sosialisasi peraturan perundangan masih kurang
	4.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Belum terwujudnya sinkronisasi data sebagai dasar pengambilan kebijakan terkait dengan bantuan sosial.	Dukungan SDM dan Sarana prasarana	Koordinasi kebijakan antar unit kerja masih lemah
	5.Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Pembinaan dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa	Belum optimalnya kinerja aparatur Pemerintahan Desa Pengelolaan data pemerintahan umum, pengelolaan data Pemerintahan Desa, pengelola data kependudukan dan pertanahan yang belum optimal	Peningkatan kesejahteraan aparatur pemerintah desa. Peningkatan kesejahteraan aparatur pemerintah desa.	Paradigma pola kerja tradisional masih rendah Jumlah perangkat desa yang masih kurang di beberapa desa
	6.Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan	Perlu peningkatan sinergitas yang bak antar unit kerja dan peningkatan pelayanan kepada warga masyarakat	Kualitas SDM dan sarana prasarana.	Aspek regulasi masih lemah , kurangnya personil

3.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Penentuan tujuan dan sasaran pada Perangkat Daerah Kecamatan Bulu, tidak bisa lepas dari visi misi Bupati Sukoharjo dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Renja Perangkat Daerah Kecamatan Bulu merupakan upaya untuk mewujudkan visi misi tersebut yang didalamnya memuat indikator-indikator keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan dalam Renja.

Tujuan dari Perangkat Daerah Kecamatan Bulu sesuai dengan tugas dan fungsi kecamatan dalam mendukung tercapainya visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sukoharjo, serta untuk memberikan kontribusi atas tercapainya indikator kinerja daerah adalah:

"Terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel"

Sedangkan sasaran yang hendak dicapai oleh Perangkat Daerah Kecamatan Bulu adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat yang di jabarkan dalam beberapa Program antara lain :
   1) Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
   2) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
   3) Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
   4) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
   5) Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
2. Meningkatnya kualitas aparatur dan pelayanan publik yang di jabarkan dalam Program antara lain :
   1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Berikut ini disajikan keterkaitan antara tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan Kecamatan Bulu sesuai dengan Visi dan Misi Bupati Sukoharjo sebagai berikut :

Tabel 3.1

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Bulu

VISI RPJMD	**Mewujudkan masyarakat Sukoharjo yang lebih makmur.**			
MISI I RPJMD	**Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui percepatan reformasi birokrasi.**			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan	IKU Kecamatan
1.Terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	1.1. Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	Peningkatan efektivitas kinerja birokrasi dan layanan publik yang responsif, transparan dan akuntabel	Mengembangkan layanan birokrasi yang prima	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
	1.2. Meningkatnya kualitas aparatur dan pelayanan publik	1.2.1 Meningkatkan kualitas, pemanfaatan, dan pengembangan pelayanan publik. 1.2.2 Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemerintahan	Meningkatkan semangat dan kenyamanan bekerja, kemauan bekerjasama, transparansi dan akuntabel	Nilai Sakip

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Kabupaten Sukoharjo diterbitkannya Peraturan Bupati Sukoharjo nomor 4 tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pemerintah Kabupaten Sukoharjo tahun 2021-2026. Berikut ini Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bulu :

Tabel 3.2 Indikator Kinerja Utama

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	FORMULASI PERHITUNGAN / PENJELASAN
1	2	3	4	5	6
1	Terwujudnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Responsif dan Akuntabel	Indek Kepuasan Masyarakat			Hasil Survey Indek Kepuasan Masyarakat Tahun N
	1.1 Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	Persentase Peningkatan Pelayanan Kecamatan.	Peningkatan efektivitas kinerja birokrasi dan layanan publik yang responsif, transparan dan akuntabel.	Mengembangkan layanan birokrasi yang prima.	Jumlah masyarakat yang terlayani ..... X100% Jumlah Masyarakat yang datang utk dilayani
	1.2 Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Nilai SAKIP PD.	1.2.1 Meningkatkan kualitas, pemanfaatan, dan pengembangan pelayanan publik. 1.2.2 Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemerintahan.	Meningkatkan semangat dan kenyamanan bekerja, kemauan bekerjasama, transparansi dan akuntabel.	Hasil Nilai SAKIP PD Tahun N

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program merupakan kumpulan kegiatan yang merupakan tindakan – tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi. Sesuai Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Bulu maka program –program yang akan dilaksanakan tahun anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.
3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum.
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.
6. Program Penunjang Urusan pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan merupakan suatu tindakan dan penjabaran Program untuk mencapai tujuan tetentu sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan.

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024, merupakan jawaban atas permasalahan yang ada di Kecamatan Bulu. Selain itu, rencana program dan kegiatan tersebut merupakan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Kecamatan Bulu.

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan juga merupakan cara untuk mencapai terwujudnya pembangunan di Kabupaten Sukoharjo, sesuai dengan tugas dan fungsi yang melekat pada PD Kecamatan Bulu melaksanakan urusan kewilayahan.

Berpedoman pada tahun sebelumnya untuk kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

I. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, dengan Kegiatan:

1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada di Kecamatan, dengan Sub Kegiatan :
    a. Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
    b. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

II. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, dengan Kegiatan:

1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, dengan Sub Kegiatan :
    a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
    b. Peningkatan Efektitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
2. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan, dengan Sub Kegiatan:
    a. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan
    b. Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan
    c. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat

III. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum, dengan Kegiatan:

1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, dengan Sub Kegiatan:
    a. Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
    b. Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat.
2. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, dengan Sub Kegiatan:
    a. Koordinasi/Sinergitas dengan Perangkat Daerah Yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan

Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.

IV. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, dengan Kegiatan:

1. Penelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah, dengan Sub Kegiatan :
   a. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
   b. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan

V.Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa,dengan Kegiatan:

1.Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, dengan Sub Kegiatan:
   a. Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa.
   b. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
   c. Fasilitasi Pengelolaa Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa.
   d. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dan Perangkat Desa.
   e. Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
   f. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa.
   g. Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
   h. Fasiltasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
   i. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan.

j. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipasif.

VI. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan Kegiatan :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan :
   a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
   b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
   c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
   d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
   e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
   f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
   g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan :
   a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
   b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD
   c. Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD
   d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
   e. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
   f. Penyusunan Pelaporan dan Analisi Prognosis Realisasi Anggaran
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan :
   a. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
   b. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsinya.
   c. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan.
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan:

a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
b. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
d. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan Sub Kegiatan:
   a. Pengadaan Mebel
   b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
   c. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
   d. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
6. Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Sub Kegiatan :
   a. Penyedia Jasa Surat Menyurat
   b. Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
   c. Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Sub Kegiatan:
   a. Penyedia Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan, Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
   b. Penyedia Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
   c. Pemeliharaan Mebel
   d. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
   e. Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

f. Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

Draft rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Bulu Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kab. Sukoharjo
Tahun 2024

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Bulu

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Bulu

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
					Kecamatan Bulu								3.196.289.000,00					3.605.060.000,00
7					UNSUR KEWILAYAHAN								3.196.289.000,00					3.605.060.000,00
7	01				KECAMATAN								3.196.289.000,00					3.605.060.000,00
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								2.636.289.000,00					3.010.280.000,00
7	01	01	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**29.000.000,00**					**37.000.000,00**
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Sukoharjo, Bulu, Semua Kel/Desa	100 %	1 Dokumen	100 %	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	10.000.000,00
7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD													
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Sukoharjo, Bulu, Semua Kel/Desa	100 %	1 Dokumen	100 %	4.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	4.500.000,00

7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD												
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Sukoharjo, Bulu, Semua Kel/Desa	100 %	1 Dokumen	100 %	4.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	4.500.000,00
7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD												
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Sukoharjo, Bulu, Semua Kel/Desa	100 %	1 Dokumen	100 %	4.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	4.500.000,00
7	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD												
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Sukoharjo, Bulu, Semua Kel/Desa	100 %	1 Dokumen	100 %	4.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	4.500.000,00
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD												
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Sukoharjo, Bulu, Semua Kel/Desa	100 %	16 Laporan	100 %	4.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16 Laporan	4.500.000,00

7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Sukoharjo, Bulu, Semua Kel/Desa	100 %	2 Laporan	100 %	4.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	4.500.000,00
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**1.780.313.000,00**					**2.011.000.000,00**
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Sukoharjo, Bulu, Semua Kel/Desa	100 %	12 Orang/bulan	100 %	1.668.313.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	1.880.000.000,00
7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD													
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Sukoharjo, Bulu, Semua Kel/Desa	100 %	12 Dokumen	100 %	100.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	113.000.000,00
7	01	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD													
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Sukoharjo, Bulu, Semua Kel/Desa	100 %	12 Dokumen	100 %	3.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	4.500.000,00
7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD													
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Sukoharjo, Bulu, Semua Kel/Desa	100 %	1 Laporan	100 %	3.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	4.500.000,00

7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD												
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Sukoharjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	2 Laporan	100 %	3.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	2 Laporan	4.500.000,00
7	01	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran												
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Sukoharjo, Bulu, Semua Kel/Desa	100 %	12 Dokumen	100 %	3.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12 Dokumen	4.500.000,00
7	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**28.000.000,00**				**51.500.000,00**
7	01	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai												
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Sukoharjo, Bulu, Semua Kel/Desa	100 %	2 Dokumen	100 %	3.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 Dokumen	3.000.000,00
7	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi												
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Sukoharjo, Bulu, Semua Kel/Desa	100 %	20 Orang	100 %	20.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	23.000.000,00

7	01	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan													
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Sukoharjo, Bulu, Semua Kel/Desa	100 %	60 Orang	100 %	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	60 Orang	6.500.000,00
7	01	01	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**247.475.000,00**					**235.000.000,00**
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Sukoharjo, Bulu, Semua Kel/Desa	100 %	19 Paket	100 %	4.975.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	19 Paket	10.000.000,00
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Sukoharjo, Bulu, Semua Kel/Desa	100 %	38 Paket	100 %	15.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	38 Paket	18.000.000,00
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Sukoharjo, Bulu, Semua Kel/Desa	100 %	50 Paket	100 %	175.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	50 Paket	138.000.000,00
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Sukoharjo, Bulu, Semua Kel/Desa	100 %	6 Paket	100 %	7.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	13.000.000,00

7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Sukoharjo, Bulu, Semua Kel/Desa	100 %	730 Dokumen	100 %	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	730 Dokumen	6.000.000,00
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Sukoharjo, Bulu, Semua Kel/Desa	100 %	422 Laporan	100 %	40.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	422 Laporan	50.000.000,00
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**92.664.000,00**					**120.000.000,00**
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel													
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Sukoharjo, Bulu, Semua Kel/Desa	100 %	1 Unit	100 %	2.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	20.000.000,00
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Sukoharjo, Bulu, Semua Kel/Desa	100 %	5 Unit	100 %	30.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	45.000.000,00
7	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Sukoharjo, Bulu, Semua Kel/Desa	100 %	4 Unit	100 %	50.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	40.000.000,00

7	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya												
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Sukoharjo, Bulu, Semua Kel/Desa	100 %	1 Unit	100 %	10.664.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	15.000.000,00
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**306.077.000,00**					**291.000.000,00**
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sukoharjo, Bulu, Semua Kel/Desa	100 %	12 Laporan	100 %	15.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	16.000.000,00
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sukoharjo, Bulu, Semua Kel/Desa	100 %	12 Laporan	100 %	98.400.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	105.000.000,00
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sukoharjo, Bulu, Semua Kel/Desa	100 %	12 Laporan	100 %	192.677.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	170.000.000,00
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**152.760.000,00**					**264.780.000,00**

7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan												
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sukoharjo, Bulu, Semua Kel/Desa	100 %	13 Unit	100 %	50.750.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	13 Unit	77.000.000,00
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan												
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sukoharjo, Bulu, Semua Kel/Desa	100 %	1 Unit	100 %	15.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	16.000.000,00
7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel												
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sukoharjo, Bulu, Semua Kel/Desa	100 %	44 Unit	100 %	4.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Mebel yang Dipelihara	44 Unit	6.000.000,00
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya												
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sukoharjo, Bulu, Semua Kel/Desa	100 %	9 Unit	100 %	5.490.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	9 Unit	12.280.000,00
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya												
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sukoharjo, Bulu, Semua Kel/Desa	100 %	2 Unit	100 %	75.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	150.000.000,00

7	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya												
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sukoharjo, Bulu, Semua Kel/Desa	100 %	7 Unit	100 %	2.520.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	3.500.000,00
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								12.000.000,00					13.290.000,00
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan								12.000.000,00					13.290.000,00
7	01	02	2.02	0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan													
						Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kab Sukoharjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	2 Laporan	100 %	6.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	6.000.000,00
7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan													
						Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kab. Sukoharjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	2 Laporan	100 %	6.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	7.290.000,00
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								118.500.000,00					133.810.000,00
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa								20.000.000,00					44.000.000,00
7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa													

						Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Cakupan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kab. Sukoharjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	5 Lembaga Kemasyarakatan	100 %	10.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5 Lembaga Kemasyarakatan	24.000.000,00
7	01	03	7.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan													
						Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Cakupan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kab. Sukoharjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	3 Laporan	100 %	10.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3 Laporan	20.000.000,00
7	**01**	**03**	**2.03**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**								**98.500.000,00**					**89.810.000,00**
7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan													
						Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Cakupan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kab. Sukoharjo, Bulu, Semua Kel/Desa	100 %	1 Lembaga Kemasyarakatan	100 %	80.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	1 Lembaga Kemasyarakatan	68.000.000,00
7	01	03	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan													
						Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Cakupan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kab. Sukoharjo, Bulu, Semua Kel/Desa	100 %	1 Lembaga Kemasyarakatan	100 %	15.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Lembaga Kemasyarakatan	17.000.000,00
7	01	03	2.03	0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat													
						Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Cakupan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kab. Sukoharjo, Bulu, Semua Kel/Desa	100 %	1 Laporan	100 %	3.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan	4.810.000,00

7	01	04			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**								**37.000.000,00**				**35.110.000,00**
7	01	04	2.01		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**								**27.000.000,00**				**24.000.000,00**
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan												
						Persentase capaian ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Cakupan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kab. Sukoharjo, Bulu, Semua Kel/Desa	100 %	4 Laporan	100 %	12.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	12.000.000,00
7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat												
						Persentase capaian ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Cakupan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kab. Sukoharjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	4 Laporan	100 %	15.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	4 Laporan	12.000.000,00
7	01	04	2.02		**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**								**10.000.000,00**				**11.110.000,00**
7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia												
						Persentase capaian ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Cakupan Koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Kab. Sukoharjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	3 Laporan	100 %	10.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	3 Laporan	11.110.000,00

7	01	05			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**								**316.000.000,00**				**300.070.000,00**
7	01	05	2.01		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**								**316.000.000,00**				**300.070.000,00**
7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia												
						Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Perugasan Kepala Daerah	Kab Sukoharjo, Bulu, Semua Kel/Desa	100 %	80 Orang	100 %	150.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	80 Orang	157.000.000,00
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan												
						Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kab. Sukoharjo, Bulu, Semua Kel/Desa	100 %	12 Dokumen	100 %	166.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	143.070.000,00
7	01	06			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**								**76.500.000,00**				**112.500.000,00**

7	01	06	2.01		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**								**76.500.000,00**					**112.500.000,00**
7	01	06	2.01	0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa													
						Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kab. Sukoharjo, Bulu, Semua Kel/Desa	100 %	3 Dokumen	100 %	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	3 Dokumen	11.000.000,00
7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa													
						Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kab. Sukoharjo, Bulu, Semua Kel/Desa	100 %	12 Dokumen	100 %	7.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12 Dokumen	12.000.000,00
7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa													
						Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kab. Sukoharjo, Bulu, Semua Kel/Desa	100 %	2 Dokumen	100 %	7.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	2 Dokumen	11.000.000,00
7	01	06	2.01	0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa													
						Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kab. Sukoharjo, Bulu, Semua Kel/Desa	100 %	4 Dokumen	100 %	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	4 Dokumen	11.000.000,00

7	01	06	2.01	0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa												
						Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kab. Sukoharjo, Bulu, Semua Kel/Desa	100 %	1 Dokumen	100 %	10.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1 Dokumen	2.000.000,00
7	01	06	2.01	0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa												
						Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kab. Sukoharjo, Bulu, Semua Kel/Desa	100 %	2 Dokumen	100 %	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	2 Dokumen	11.000.000,00
7	01	06	2.01	0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa												
						Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kab. Sukoharjo, Bulu, Semua Kel/Desa	100 %	2 Dokumen	100 %	7.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	2 Dokumen	11.500.000,00
7	01	06	2.01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa												
						Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kab. Sukoharjo, Bulu, Semua Kel/Desa	100 %	12 Dokumen	100 %	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	12 Dokumen	11.500.000,00
7	01	06	2.01	0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan												
						Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kab. Sukoharjo, Bulu, Semua Kel/Desa	100 %	2 Dokumen	100 %	4.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	2 Dokumen	11.500.000,00

7	01	06	2.01	0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif													
						Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kab. Sukoharjo, Bulu, Semua Kel/Desa	100 %	1 Dokumen	100 %	20.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	1 Dokumen	20.000.000,00
												TOTAL	3.196.289.000,00					3.605.060.000,00

BAB IV
PENUTUP

Rencana Kerja Kantor Kecamatan Bulu Tahun 2024 disusun berdasarkan visi dan misi Kecamatan yang tertuang dalam Renstra yang dalam penyusunan Program Kegiatan diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukoharjo. Rencana Kerja yang merupakan perencanaan program dan kegiatan satu tahun ke depan dibuat secara efektif dan partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat menfasilitasi segenap aspires masyarakat di Kecamatan Bulu untuk menjamin keberhasilan program/ kegaiatan Renja OPD (Program Tahunan) yang merupakan implementasi dari Renstra OPD (program 5 tahunan) maka perlu dilakukan upaya sebagai berikut :

1. Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan Rencana Kerja secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat kebutuhan pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan.
2. Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja seluruh aparatur.
3. Rencana Kerja Kantor Kecamatan Bulu selain menjadi program/ kegiatan selama tahun 2024 juga berfungsi sebagai peningkatan kinerja aparatur serta barometer untuk menjadi umpan balik untuk perencanaan pada tahun berikutnya.

Demikian Rencana Kerja Kecamatan Bulu Tahun 2024 disusun agar dapat dipakai sebagai pedoman penetapan kebijakan, program dan strategi yang dilakukan pada tahun berikutnya untuk meningkatkan pelayanan prima di Kecamatan Bulu.

BUPATI SUKOHARJO

ttd

ETIK SURYANI

RENCANA KERJA



KECAMATAN TAWANGSARI

KABUPATEN SUKOHARJO

TAHUN 2024

Kata Pengantar

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan Karunianya, kami telah dapat menyelesaikan penyusuan Rancana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kecamatan Tawangsari Tahun 2024. RENJA Perangkat Daerah Tahun 2024 merupakan bentuk komitemen nyata Perangkat Daerah Kecamatan Tawangsari dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan Perangkat Daerah yang baik sebagai mana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

RENJA adalah wujud perencanaan dokumen Perangkat Daerah dalam satu tahun anggaran. Proses rencana kegiatan dan pengaggaran Perangkat Daerah Kecamatan Tawangsari telah disusun dalam Rencana Kerja (RENJA) tahun 2024 Adapun tujuan penyusunan renja adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah, dalam bentuk rancana tahunan. Melalui penyusunan Renja juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsi *good governance*, yaitu dalam rangka terwujudnya perencanaan yang baik dan benar-benar terprogram.

Demikian Laporan RENJA ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang

Tawangsari, 10 Agustus 2023

Camat Tawangsari

BAMBANG DWI SUMIRATNO, S Sos
Pembina Tingkat I
NIP. 19700508 199003 1 005

SALINAN

BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 35 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024;

b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 273 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan Kepala Daerah setelah Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 192) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 262);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tatacara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 200);
13. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);
14. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 298);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

Renja Perangkat Daerah disusun dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Pasal 3

Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

BAB II

SISTEMATIKA DAN FUNGSI RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 4

Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. bab I : pendahuluan;
b. bab II : hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu;
c. bab III : tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
d. bab IV : rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan
e. bab V : penutup.

Pasal 5

Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah.

BAB II

PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 6

(1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah.
(2) Kepala Perangkat Daerah melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi Renja Perangkat Daerah kepada Bupati melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.

BAB III

PERANGKAT DAERAH PENYUSUN

Pasal 7

(1) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun oleh Perangkat Daerah sebagai berikut:
    a. Sekretariat Daerah;
    b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
    c. Inspektorat Daerah;
    d. Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan;
    e. Dinas Kesehatan;
    f. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang;
    g. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
    h. Satuan Polisi Pamong Praja;
    i. Dinas Sosial;

j. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak;
k. Dinas Pangan;
l. Dinas Lingkungan Hidup;
m. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil;
n. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa;
o. Dinas Perhubungan;
p. Dinas Komunikasi Dan Informatika;
q. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
r. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;
s. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
t. Dinas Pertanian dan Perikanan;
u. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah dan Perdagangan;
v. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
w. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
x. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
y. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
z. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
aa. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
bb. Kecamatan Weru;
cc. Kecamatan Bulu;
dd. Kecamatan Tawangsari;
ee. Kecamatan Sukoharjo;
ff. Kecamatan Nguter;
gg. Kecamatan Bendosari;
hh. Kecamatan Polokarto;
ii. Kecamatan Mojolaban;
jj. Kecamatan Grogol;
kk. Kecamatan Baki;
ll. Kecamatan Gatak; dan
mm. Kecamatan Kartasura.

(2) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf mm tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 10 Agustus 2023

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 10 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd.

WIDODO

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2023 NOMOR 35

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ditandatangani secara elektronik oleh :

TEGUH PRAMONO, SH, MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19710429 199803 1 003

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 35 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN
SUKOHARJO TAHUN 2024

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2024

Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 terdiri atas:

1. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Inspektorat Daerah;
4. Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan;
5. Dinas Kesehatan;
6. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang;
7. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
8. Satuan Polisi Pamong Praja;
9. Dinas Sosial;
10. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak;
11. Dinas Pangan;
12. Dinas Lingkungan Hidup;
13. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil;
14. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa;
15. Dinas Perhubungan;
16. Dinas Komunikasi Dan Informatika;
17. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
18. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;
19. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
20. Dinas Pertanian dan Perikanan;
21. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah dan Perdagangan;
22. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
23. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
24. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
25. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
26. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
27. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
28. Kecamatan Weru;
29. Kecamatan Bulu;

30. Kecamatan Tawangsari;
31. Kecamatan Sukoharjo;
32. Kecamatan Nguter;
33. Kecamatan Bendosari;
34. Kecamatan Polokarto;
35. Kecamatan Mojolaban;
36. Kecamatan Grogol;
37. Kecamatan Baki;
38. Kecamatan Gatak; dan
39. Kecamatan Kartasura.

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR 2

DAFTAR ISI 3

TABEL 5

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 6

B. Landasan Hukum 8

C. Maksud dan Tujuan 12

D. Sistematika Penulis..... 12

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan Capaian Program Renstra Perangkat Daerah 14

2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 31

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 33

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 41

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 51

BAB III TUJUAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional..... 53

3.2 Tujuan dan Sasaran serta Arah Kebijakan 53

3.3 Program dan Kegiatan..... 54

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan 58

BAB V PENUTUP

Penutup 75

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Rekapitullasi Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Tawangsari tahun 2022;
Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Tawangsari;
Tabel 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD;
Tabel 4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Tawangsari tahun 2024 dan Perkiraan maju tahun 2025

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah perencanaan Perangkat Daerah untuk pereode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja Perangkat Daerah merupakan sebuah dokomen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya. Renja Perangkat Daerah memiliki fungsi yang sangat fondamental dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja Perangkat Daerah merupakan produk perencanaan pada Unit Organesasi pemerintah terendah dan terkecil. Renja Perangkat Daerah berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kualtitas penyusunan Renja Perangkat Daerah sangatlah menentukan pada kualitas pelayanan pada publik.

Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dimulai dengan persiapan penyusunan Renja Perangkat Daerah dengan mengumpulkan data dan informasi. Menganalisa gambaran pelayanan Perangkat Daerah untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan reviu hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu berdasarkan Renstra Perangkat Daerah yang didasarkan pada penelaahan rancangan awal RKPD. Selanjutnya menjadi perumusan kegiatan prioritas yang juga didasarakan kepada penelaahan usulan kegiatan masyarakat.

Prinsip-prinsip di dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah, adalah sebagai berikut :

a. Berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan mengacu pada rancangan awal RKPD;

b. Rumusan program/kegiatan/sub kegiatan di dalam Renja Perangkat Daerah didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerluksan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing Perangkat Daerah;

c. Penyusunan bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD;

d. Rumusan program/kegiatan/sub kegiatan di dalam Renja Perangkat Daerah didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penangan dan mempertimbangkan pagu indikatif Perangkat Daerah;

e. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolak ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun n dan tahun n+1.

Keterkaitan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD dan Renstra Perangkat Daerah memrupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena didalam Renja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD, Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Renja Perangkat Daerah merupakan masukan utama bagi penyususnan RKP, Renstra Perangkat Daerah. Dan RPJMD bagi RKA Perangkat Daerah, KUA, PPAS dan RAPBD.

B. Landasan Hukum

Dasar Hukum Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Tawangsari Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 adalah

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2017 Nomor 1312);

12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kodefikasi, Klasifikasi Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

20. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005-2025;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah;
22. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);
23. PeraturanDaerah KabupatenSukoharjo Nomor 3 Tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 3. Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 298);
24. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Renstra Kemendagri (T2)

C. Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Tawangsari Tahun 2024 merupakan dokumen resmi perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk 1 (satu) tahun ke depan, dalam rangka mendorong pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.

Sedangkan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Tawangsari adalah :

1. Penyelarasan Program dan Kegiatan Kecamatan Tawangsari sesuai dengan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;
2. Penajaman Indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Penyesuaian pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif masing-masing Perangkat Daerah.

D. Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Tawangsari Tahun 2024 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renja, landasan hukum penyusunan Renja, maksud dan tujuan penyusunan Renja, dan sistematika penulisan dokumen Renja.

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

Memuat Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah . Analis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah , Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan fungsi Perangkat Daerah , Review terhadap Rancangan Awal Perangkat Daerah dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

Bab ini memuat penelaahan terhadapa kebijakan Nasional, Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah serta Program dan Kegiatan.

Bab IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DARAH

Bab V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN SEBELUMNYA

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan Capaian Program Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 merupakan kajian(*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan perkiraan capaian Renja Perangkat Daerah Tahun 2023. Evaluasi tersebut dilakukan melalui penilaian terhadap realisasi DPA Perangkat Daerah yang mencakup program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran, lokasi serta dana indikatif.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Tawangsari Tahun 2023 digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Selain itu, evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Tawangsari Tahun 2023 dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja Kecamatan Tawangsari Tahun 2024 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Tawangsari Tahun 2021-2026 serta sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Tawangsari Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut : (Tabel 2.1)

Tabel 2.1

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSKANANAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022 DAN PENCAPAIAN RENSTRA S/D TAHUN 2026

KECAMATAN TAWANGSARI

Kabupaten Sukoharjo

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun 2023)	Perkiraan tahun berjalan	
					Target Renja PD tahun 2022	Realisasi Renja PD tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7)	11=(10/4)
7 01 02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**100**	**100**	100	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
7 01 02 2,02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	Cakupan penyelenggaran urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja PD yang ada di Kecamatan	**100**	**100**	100	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

7 01 02 2,0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wialyah Kecamatan	Jumlah laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	***8***					2	1	100
7 01 02 2,02 0003	Peningkatan efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan	Jumlah laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	***8***					2	1	100
7 01 03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan**	**100**	**100**	100	**100**	**100**	**100**	**50**	**100**
7 01 03 2 01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**cakupan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa**	**100**	**100**	100	**100**	**100**	**100**	**50**	**100**

7 01 03 2 01 0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpatsipasi dalam forum musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	***12***					12	-	100
7 01 03 2 01 0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	***4***					1	1	100
7 01 03 2 03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Cakupan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**100**	**100**	100	**100**	**100**	**100**	**70**	**100**

7 01 03 2 03 0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diselenggarakan	**12**					12	12	100
7 01 03 2 03 0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang ditingkatkan kapasitasnya	**12**					**12**	12	100
7 01 04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase capaian ketentraman dan ketertiban umum**	**100**	**100**	100	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
7 01 04 2 01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Capaian Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**100**	**100**	100	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

7 01 04 2 01 0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah laporan hasil sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	***8***					*1*	1	100
7 01 04 2 01 0002	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah laporan pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	***4***					1	1	100
7 01 04 2 02	**Koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah**	**Capaian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah**	**100**	**100**	100	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

7 01 04 2 02 0001	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah laparan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	***4***					1	1	100
7 01 05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum**	**100**	**100**	100	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
7 01 05 2,01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**100**	**100**	100	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

7 01 05 2,0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	**480**	160	80	80	100	**80**	80	100
7 01 05 2,01 0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah dokumen Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	**48**					12	7	100
7 01 05 06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa**	**100**	**100**	100	**100**	**100**	**100**	**80**	**100**
7 01 06 2 01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Cakupan fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa**	**100**	**100**	100	**100**	**100**	**100**	**80**	**100**

7 01 06 2 01 0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah dokumen yang diFasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Praturan Kepala Desa	***1***							
7 01 06 2 01 0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen yang diFasilitasi dalam rangka administrasi Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	***8***					2	2	100
7 01 06 2 01 0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	Jumlah dokumen yang diFasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	***4***					1	1	100
7 01 06 2 01 0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa	Jumlah dokumen yang diFasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	***1***		-					
7 01 06 2 01 0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	***1***		-					

7 01 06 2 01 0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa	***1***		-					
7 01 06 2 01 0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	***30***	13	5	5	100	5	4	100
7 01 06 2 01 0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa	Jumlah dokumen sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	***8***					2	2	100
7 01 06 2 01 0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	jumlah peserta musrenbangcam	***1***					1	1	100

7 01 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Prosesntase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100**	**100**	100	**100**	**100**	**100**	**80**	**100**
7 01 01 2,01	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Cakupan pelayanan urusan pemerintah daerah**	**100**	**100**	100	**100**	**100**	**100**	**80**	**100**
7 01 01 2,01 0001	Penyusunan Dok Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	**8**	3	**1**	1	100	2	2	100
7 01 01 2,01 0002	Koordinasi dan Penyusunan Dok RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	**6**	2	**1**	1	100	1		100
7 01 01 2,01 0003	Koordinasi dan penyusunan Dok Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	**1**	2	**1**	1	100	1		100
7 01 01 2,01 0004	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	**1**	2	**1**	1	100	1		100
7 01 01 2,01 0005	Koordinasi dan penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	**6**	2	**1**	1	100	1		100

7 01 01 2,01 0006	Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	***18***	6	***3***	3	100	3	3	100
7 01 01 2,01 0007	Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	***48***	16	***8***	8	100	8	8	100
7 01 01 2,02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Cakupan pelaporan capaian kinerja keuangan**	***100***	100	***100***	100	100	100	100	100
7 01 01 2,02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	***16***	16	***16***	16	100	16	16	100
7 01 01 2,02 0003	Pelaksanaan Penatausahan dan Pengujian/ Verifikasi	Jumlah Dokumen Penatausahaan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	***72***	24	***12***	12	100	12	7	100
7 01 01 2,02 0004	Koordinasi dan pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan pelaksanaan Akuntansi SKPD	***72***	24	***12***	12	100	12	7	100
7 01 01 2,02 0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir tahun	Jumlah Laporan Keuanga Akhir Tahun SKPD dan laporan hasil Koordinasi penyusunan Laporan keuangan Akhir Tahun SKPD	***6***	2	***1***	1	100	1		100

7 01 01 2,02 0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan blnan/triwulanan/semesteran SKPD	Jumlah Laporan keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	***108***	36	***18***	18	100	18	9	100
7 01 01 2,02 0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis prognosis Realisasi anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	***72***	24	***12***	12	100	12	7	100
7 01 01 2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Cakupan layanan administrasi kepegawaian**	***100***	100	100	100	100	100	100	100
7 01 01 2.05 0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta kelengkapannya dan Pakaian Kerja lapangan yang terbeli	***150***	25	25	0	0	25	25	100
7 01 01 2.05 0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	***138***	46	23	23	100	23	23	100

7 01 01 2.05 0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	***138***	46	23	23	100	23		100
7 01 01 2.05 0003	Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Jumlah laporan Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	**4**					1	1	100
7 01 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan layanan administrasi umum**	**100**	100	100	**100**	100	**100**	100	100
7 01 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	**48**					12	7	100
7 01 01 2.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket Peralatan Rumah tangga yang disediakan	**48**					12	7	100
7 01 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik kantor	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	**48**					12	7	100
7 01 01 2.06 0005	Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	**48**					12	7	100

7 01 01 2.06 0006	Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan yang disediakan	***8***					2	2	100
7 01 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	**48**					7	7	100
7 01 01 2,07	**Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan**	**Capaian sarana dan prasarana aparatur kondisi baik**	**100**	100	100	**100**	100	**100**	100	100
7 01 01 2,07 0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit kendaraan yang diadakan	**1**					1		100
7 01 01 2,07 0005	Pengadaan Mebel	Jumlah unit mebel yang diadakan	***17***		6	6	100	1	1	100
7 01 01 2,07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin yang diadakan	***9***		6	6	100			100
7 01 01 2,07 0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor yang diadakan	***6***		9	9	100			100

7 01 01 2.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yangdiadakan	***10***		4	4	100			100
7 01 01 2,08	**Penyediaan jasa penunjang urusan permerintah daerah**	**cakupan tingkat disiplin aparatur, Prosentase pegawai yang mengikuti program peningkatan kapasitas pendukung tusi**	**100**	100	100	**100**	100	**100**	100	100
7 01 01 2,0008 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	***48***							
7 01 01 2,08,0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik	Jumlah Laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	***48***							
7 01 01 2,08,0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	***48***							
7 01 01 2,08,0004	Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	***48***							

7 01 01 2,09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah**	**Cakupan sarana dan prasarana aparatur kondisi baik**	**100**	100	100	**100**	100	**100**	100	100
7 01 01 2,09,0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya.	***12***	12	12	12	12	100	12	100
7 01 01 2,09,0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, pajak dan Perizinan kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya.	***1***	1	1	1	1	100	1	100
7 01 01 2,09,0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	***20***					3	1	100
7 01 01 2,09,0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	***90***					5	2	100
7 01 01 2,09,0009	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	**18**					3	2	100

2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja palayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Kecamatan Tawangsari dilakukan terhadap penilaian capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan.

IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah yang mengacu pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026. Secara rinci, capaian IKU Kecamatan Tawangsari disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.2

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN TAWANGSARI

KABUPATEN SUKOHARJO

No.	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra SKPD						Realissi Capaian Tahun					Prediksi Capainan 2023	Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2025	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			87	87	88	89	90	90	84,75	88,33	90.051			90	
2	Proesntasi Peningkatan Pelayanan Kecamatan			100	100	100	100	100	100	100	100				100	
3	Nilai Sakip Perangkat Daerah			51	56	62	68	74	80	51,16					65	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaran Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah .

Sebagai Perangkat Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati Kecamatan Tawangsari merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan fungsi lainnya.

Kecamatan Tawangsari adalah merupakan salah satu dari 12 Kecamtan yang berada di wilayah Kabupaten Sukoharjo. Adapun batas-batas Kecamatan Tawangsari adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Sukoharjo
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Weru
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Klaten, dan
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Nguter

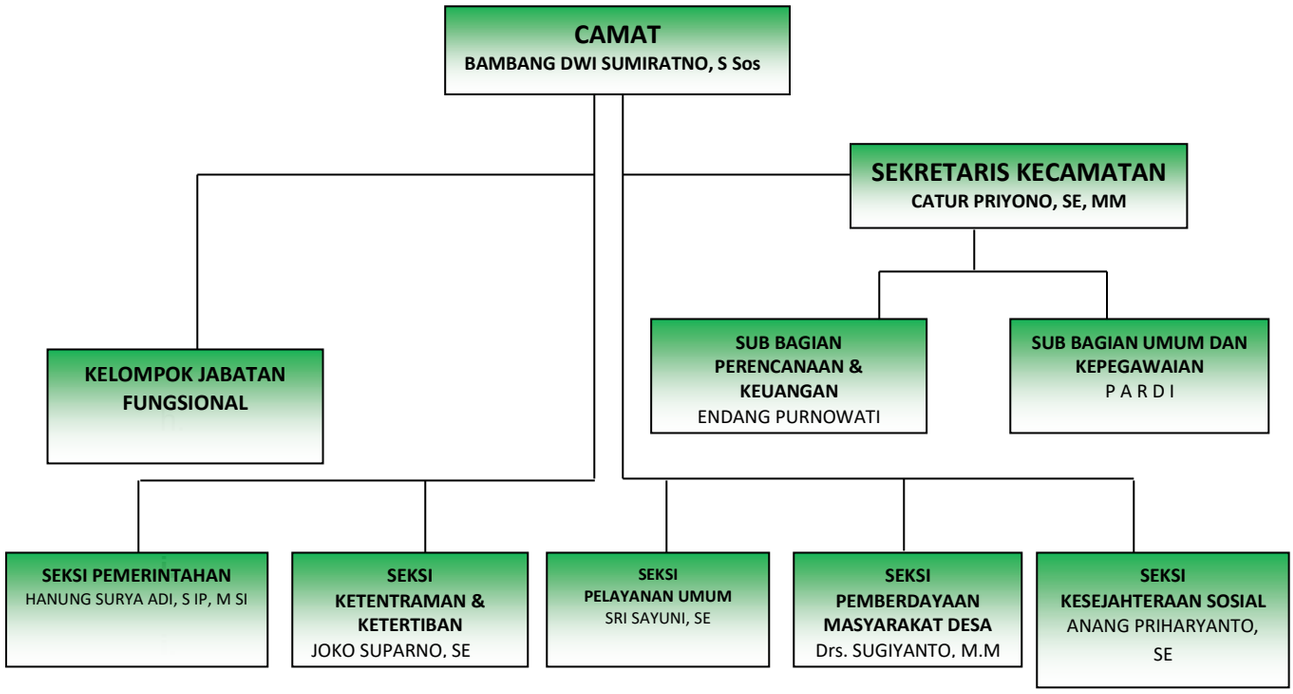
2.3.1. Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organesasi Perangkat Daerah Kecamatan Tawangsari.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);

Susunan organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Tawangsari terdiri atas :

a. Camat;
b. Sekretariat Kecamatan, terdiri atas :
    1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
    2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
c. Seksi Pemerintahan;
d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa;
f. Seksi Kesejahteraan Sosial;
g. Seksi Pelayanan Umum;

BAGAN STRUKTUR
ORGANISASI KECAMATAN TAWANGSARI



Pada Peraturan Bupati tersebut jelas disebutkan bahwa Kecamatan merupakan koordinator dan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kalurahan.Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya Camat, Sekretaris Kecamatan, masing–masing Seksi dan masing-masing Sub Bagian mengacu pada tugas dan fungsinya sebagai berikut :

1. Camat

1.1. Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, dan Pemberdayaan masyarakat desa dan kalurahan.

1.2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) Kecamatan mempunyai fungsi:

a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;

b. Pengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

c. Pengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;

d. Pengoordinasikan penerapan dan pengakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

e. Pengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;

f. Pengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;

g. Pembinaan dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;

h. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Pemerintah Daerak Kabupaten yang ada di Kecamatan;

i. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan Kecamatan; dan

j. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat Kecamatan

2.1. Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b adalah unsur pembantu pimpinan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat;

2.2. Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan konsep dan pelaksananan kebijakan, pengoordinasiaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi keuangan, hukum, informasi, kehumasan, keoorganesasian dan ketatalaksanaan, pembinanan ketatusahaan, kearsipan kerumahtanggaan, kepegawaian, pengelolaan dan penatausahaan aset, dan pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan.

2. 3 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Sekretariat Kecamatan mempunyai fungsi:

a. Pengoordinasian penyusunan kebiajkan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Kecamatan;

b. Pembinaan dan pemeberian dukungan administrasi yang meliputi keuangan, hukum, hubungan masyarakat, ketatusahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, dan pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan;

c. Pengoordinasian, pembinaan dan penataan organesasi dan tata laksana di lingkungan Kecamatan;

d. Pengoordinasiaan dan penyusunan peraturan perundang-unangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Kecamatan;

e. Pengoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;

f. Penyelenggaraan dan penatausahaan aset dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingukungan Kecamatan;

g. Pelaksananan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;

h. Pengelolaan kepegawaian di lingkungan Kecamatan; dan

i. Pelaksananan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.

3. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian berada dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Camat yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang perencanaan, data informasi, dan program kerja, dan pengelolaan keuangan di lingkungan Kecamatan.

4. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b dipimpin oleh Subbagian berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Camat yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporanyang meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, kearsipan, kepegawaian, pengelolaan dan penatausahaan aset dan pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan.

5. Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat yang mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksananan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang pemerintahan umum dan desa meliputi administrasi kependudukan, dan meningkatkan kemandirian politik, monografi kecamatan, pengisian Perangkat Desa dan Kepala Desa, pembinanan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa, pembinaan Badan Perwakilan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa serta pelaksananan kegiatan baik di tingkat internal Kecamatan maupun dengan pihak terkait dan pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat sebagai urusan otonomi daerah di bidang pemerintahan.

6. Seksi Keamanan dan Ketertiban.

Seksi Keamanan dan Ketertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat yang mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksananan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang ketenteraman dan ketertiban wilayah serta pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat meliputi penanggulangan bencana alam, dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta pelaksanaan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat sebagian urusan otonomi daerah di bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

7. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa

Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf c dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat yang mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksananan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang pembangunan, pemberdayaan masyarakat, perekonomian desa, produksi dan distribusi dan pelaksanaan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat sebagian urusan otonomi daerah di bidang pemberdayaan masyarakat desa.

8. Seksi Kesejahteraan Sosial

Seksi Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf d dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang

berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat yang mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksananan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang kesejahteraan sosial yang meliputi masalah sosial, kepemudaan, peranan wanita, olah raga, kehidupan keagamaan, kebudayaan dan kesehatan, peningkatan kualitas sumber daya perangkat desa, lembaga desa dan pemberian bantuan sosial serta program pengentasan kemiskinan serta pelaksanaan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat sebagian urusan otonomi daerah di bidang kesejahteraan sosial.

9. Seksi Pelayanan Umum

Seksi Pelayanan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf e dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat yang mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksananan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang Pelayanan Umum yang meliputi inventarisasi data kekayaan desa, dan sarana prasarana desa, kebersihan lingkungan yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat, pelayanan kependudukan, kebersihan lingkungan, perizinan peningkatan sarana dan prasarana fasilitas umum dan pelayanan umum administrasi kependudukan, pelayanan administrasi terpadu kecamatan, percepatan pencapaian standar pelayanan minimal serta pelaksanaan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat sebagian urusan otonomi daerah di bidang Pelayanan Umum.

Dari tugas dan fungsi dimaksud , Perangkat Daerah Kecamatan Tawangsari ada bebrapa permasalahan dan hambatan yang ada. Antara Lain :

1. Permasalahan :
    - Keterbatasan Sumberdaya Manusia baik dari segi kwantitas maupun kwalitas;
    - Kompleknya tuntutan dan aspirasi masyarakat, yang tidak sinkron dengan skala prioritas dari pemangku kepentingan.
2. Hambatan :
    - Banyak pekerjaan yang menumpuk dan memerlukan waktu yang lebih lama untuk penyelesaian.
    - Kesulitan dalam memprioritaskan program/kegiatan di masyarakat.

TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN KECAMATAN TAWANGSARI

Untuk mencapaia tujuan yang ingin dicapai ada beberapa hal yang menjadi tantangan maupun peluang dalam pengembangan pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Tawangsari :

- **Tantangan :**
  1. Masih belum meratanya yang menerima jenjang pendidikan non formal seperti diklat yang dilaksanakan oleh Pemerintah ;
  2. Kurangnya sumberdaya aparatur baik kuantitas maupun kualitas
  3. Beragamnya tuntutan aspirasi masyarakat dengan berbagai kepentingan kadang-kadang menimbulkan pertentangan
  4. Bervarisinya tingkat pendidikan dan sosial ekonomi perpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat;
  5. Belum optimalnya pemahaman warga tentang peraturan perundang undangan.
  6. Sarana dan prasarana khususnya jaringan internet desa masih perlu ditingkatkan.
  7. Semakin tingginya anggaran yang terserap di Desa, sehingga dituntut untuk bisaa mendampingi secara optimal.
- **Peluang :**
  1. Letak Geografis Wilayah Kecamatan Tawangsari, yang berada ditengah Desa-desa wilayah Kecamatan, dan hanya terdiri dari 12 desa se Kecamatan Tawangsari;
  2. Sarana dan prasarana walaupun belum sepenuhnya ada, namun dirasa cukup memadai;

3. Adanya dukungan bimbingan dan pelatihan teknis dari Dinas terkait.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD Kecamatan Tawangsari tahun 2024 dilakukan dengan membandingkan antara rancangan awal RKPD Kabupaten Sukoharjo tahun 2024 dengan hasil analisa kebutuhan Kecamatan Tawangsari tahun 2024. Hasil review terhadap rancangan awal RKPD Kabupaten Sukoharjo tahun 2024 disampaikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.4

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2024 KECAMATAN TAWANGSARI

Kabupaten Sukoharjo

	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
1	2	3	4	5	6	7	8	4	5	6	12
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kec Tawangsari**	**Prosesntase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**2.857.625.550**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kec Tawangsari**	**Prosesntase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**2.957.625.550**	
1	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kec Tawangsari**	**Cakupan pelayanan urusan pemerintah daerah**	100%	22.000.000	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kec Tawangsari**	**Cakupan pelayanan urusan pemerintah daerah**	100%	22.000.000	
1.1	Penyusunan Dok Perencanaan Perangkat Daerah	**Kec Tawangsari**	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 dok	5.000.000	Penyusunan Dok Perencanaan Perangkat Daerah	**Kec Tawangsari**	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 dok	5.000.000	
1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dok RKA SKPD	**Kec Tawangsari**	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dok	3.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dok RKA SKPD	**Kec Tawangsari**	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dok	3.000.000	
1.3	Koordinasi dan penyusunanDokPerubahan RKA-SKPD	**Kec Tawangsari**	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dok	3.000.000	Koordinasi dan penyusunanDokPerubahan RKA-SKPD	**Kec Tawangsari**	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dok	3.000.000	

1.4	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	**Kec Tawangsari**	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dok	3.000.000	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	**Kec Tawangsari**	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dok	3.000.000	
1.6	Koordinasi dan penyusunanPerubahan DPA-SKPD	**Kec Tawangsari**	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dok	3.000.000	Koordinasi dan penyusunanPerubahan DPA-SKPD	**Kec Tawangsari**	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dok	3.000.000	
1.6	Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	**Kec Tawangsari**	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 lap	2.500.000	Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	**Kec Tawangsari**	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 lap	2.500.000	
1.7	EvaluasikinerjaPerangkat Daerah	**Kec Tawangsari**	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 lap	2.500.000	EvaluasikinerjaPerangkat Daerah	**Kec Tawangsari**	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 lap	2.500.000	
2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kec Tawangsari**	**Cakupan pelaporan capaian kinerja keuangan**	100%	2.088.542.000	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kec Tawangsari**	**Cakupan pelaporan capaian kinerja keuangan**	100%	2.088.542.000	
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	**Kec Tawangsari**	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16 orang/bln	1.968.542.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	**Kec Tawangsari**	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16 orang/bln	1.968.542.000	
2.2	Pelaksanaan Penatausahan dan Pengujian/ Verifikasi	**Kec Tawangsari**	Jumlah Dokumen Penatausahaan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	12 dok	110.000.000	Pelaksanaan Penatausahan dan Pengujian/ Verifikasi	**Kec Tawangsari**	Jumlah Dokumen Penatausahaan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	12 dok	110.000.000	
2.3	Koordinasi dan pelaksanaan Akuntansi SKPD	**Kec Tawangsari**	Jumlah Dokumen Koordinasi dan pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 dok	2.500.000	Koordinasi dan pelaksanaan Akuntansi SKPD	**Kec Tawangsari**	Jumlah Dokumen Koordinasi dan pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 dok	2.500.000	
2.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir tahun	**Kec Tawangsari**	Jumlah Laporan Keuanga Akhir Tahun SKPD dan laporan hasil Koordinasi penyusunan Laporan keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	2.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir tahun	**Kec Tawangsari**	Jumlah Laporan Keuanga Akhir Tahun SKPD dan laporan hasil Koordinasi penyusunan Laporan keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	2.500.000	

2.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan blnan/triwulanan/semesteran SKPD	**Kec Tawangsari**	Jumlah Laporan keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	18 laporan	2.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan blnan/triwulanan/semesteran SKPD	**Kec Tawangsari**	Jumlah Laporan keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	18 laporan	2.500.000	
2.6	PenyusunanPelaporan dan Analisis prognosis Realisasianggaran	**Kec Tawangsari**	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12 dok	2.500.000	PenyusunanPelaporan dan Analisis prognosis Realisasianggaran	**Kec Tawangsari**	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12 dok	2.500.000	
3	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kec Tawangsari**	**Cakupan layanan administrasi kepegawaian**	100%	32.000.000	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kec Tawangsari**	**Cakupan layanan administrasi kepegawaian**	100%	32.000.000	
3.1	Pendataan dan pengolahan administrasi Kegawaian	**Kec Tawangsari**	Jumlah dokumen Pendataan dan pengolahan administrasi Kegawaian	2 dokumen	3.000.000	Pendataan dan pengolahan administrasi Kegawaian	**Kec Tawangsari**	Jumlah dokumen Pendataan dan pengolahan administrasi Kegawaian	2 dokumen	3.000.000	
3.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	**Kec Tawangsari**	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	25 orang	24.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	**Kec Tawangsari**	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	25 orang	24.000.000	
3.3	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	**Kec Tawangsari**	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	25 orang	5.000.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	**Kec Tawangsari**	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	25 orang	5.000.000	
4	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kec Tawangsari**	**Cakupan layanan administrasi umum**	100%	166.357..350	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kec Tawangsari**	**Cakupan layanan administrasi umum**	100%	266.537.350	
4.1	Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	**Kec Tawangsari**	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	12 paket	8.716.750	Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	**Kec Tawangsari**	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	12 paket	8.716.750	
4.2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	**Kec Tawangsari**	Jumlah paket Peralatan Rumah tangga yang disediakan	12 paket	15.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	**Kec Tawangsari**	Jumlah paket Peralatan Rumah tangga yang disediakan	12 paket	15.000.000	

4.3	Penyediaan Bahan Logistik kantor	**Kec Tawangsari**	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	12 paket	90.000.000	Penyediaan Bahan Logistik kantor	**Kec Tawangsari**	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	12 paket	190.000.000	
4.4	Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	**Kec Tawangsari**	Jumlah paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	12 paket	9.296.600	Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	**Kec Tawangsari**	Jumlah paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	12 paket	9.296.600	
4.5	Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan	**Kec Tawangsari**	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan yang disediakan	2 dokumen	3.965.000	Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan	**Kec Tawangsari**	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	2 dokumen	3.965.000	
4.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	**Kec Tawangsari**	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	39.539.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	**Kec Tawangsari**	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	39.539.000	
5	**Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan**	**Kec Tawangsari**	**Capaian sarana dan prasarana aparatur kondisi baik**	100%	54.650.000	**Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan**	**Kec Tawangsari**	**Capaian sarana dan prasarana aparatur kondisi baik**	100%	54.650.000	
5.4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung bGedung kantor atau bangunan lainnya	**Kec Tawangsari**	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang terbeli	3 unit	54.650.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya	**Kec Tawangsari**	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang terbeli	3 unit	54.650.000	
6	**Penyediaanjasa penunjang urusan permerintah daerah**	**Kec Tawangsari**		100%	276.385.600	**Penyediaanjasa penunjang urusan permerintah daerah**	**Kec Tawangsari**		100%	276.385.600	
6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	**Kec Tawangsari**	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	10.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	**Kec Tawangsari**	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	10.000.000	
6.2	Penyediaan JasaKomunikasi, Sumberdaya air dan Listrik	**Kec Tawangsari**	Jumlah Laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 laporan	74.750.000	Penyediaan JasaKomunikasi, Sumberdaya air dan Listrik	**Kec Tawangsari**	Jumlah Laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 laporan	74.750.000	
6.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	**Kec Tawangsari**	Jumlah Laporan penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	12 laporan	19.950.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	**Kec Tawangsari**	Jumlah Laporan penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	12 laporan	19.950.000	

6.4	Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor	**Kec Tawangsari**	Jumlah laporan penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 laporan	171.685.600	Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor	**Kec Tawangsari**	Jumlah laporan penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 laporan	171.685.600	
7	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah**	**Kec Tawangsari**	**Cakupan sarana dan prasarana aparatur kondisi baik**	100%	217.510.600	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah**	**Kec Tawangsari**	**Cakupan sarana dan prasarana aparatur kondisi baik**	100%	217.510.600	
7.1	Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan dan {pajak kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	**Kec Tawangsari**	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	12 unit	79.350.000	Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan dan {pajak kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	**Kec Tawangsari**	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	12 unit	79.350.000	
7.2	Penyediaan JasaPemeliharaan, Biaya pemeliharaan, pajak dan Perizinan kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	**Kec Tawangsari**	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pjak dan perizinannya	1 unit	10.996.000	Penyediaan JasaPemeliharaan, Biaya pemeliharaan, pajak dan Perizinan kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	**Kec Tawangsari**	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pjak dan perizinannya	1 unit	10.996.000	
7.3	PemeliharaanMebel	**Kec Tawangsari**	Jumlah Mebel yang dipeliharan	20 unit	8.600.000	PemeliharaanMebel	**Kec Tawangsari**	Jumlah Mebel yang dipeliharan	20 unit	8.600.000	
7.4	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	**Kec Tawangsari**	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	23 unit	14.910.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	**Kec Tawangsari**	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	23 unit	14.910.000	
7.5	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	**Kec Tawangsari**	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	3 unit	103.654.600	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	**Kec Tawangsari**	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	3 unit	103.654.600	
II	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Kec Tawangsari**	**Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	100%	25.00.0000	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Kec Tawangsari**	**Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	100%	25.00.0000	
1	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Kec Tawangsari**	Cakupan penyelenggara nurusan pemerintahan yang tida dilaksanakan oleh Unit Kerja PD yang ada di Kecamatan	100%	25.000.000	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Kec Tawangsari**	Cakupan penyelenggara nurusan pemerintahan yang tida dilaksanakan oleh Unit Kerja PD yang ada di Kecamatan	100%	25.000.000	

1.1.	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wialyah Kecamatan	**Kec Tawangsari**	Jumlah laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	10.000.000	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wialyah Kecamatan	**Kec Tawangsari**	Jumlah laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	10.000.000	
1.2	Peningkatan efektifitas Pelaksanaan Pelayanank epadamasyarakat di wilayah Kecamatan	**Kec Tawangsari**	Jumlah laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	15.000.000	Peningkatan efektifitas Pelaksanaan Pelayanank epadamasyarakat di wilayah Kecamatan	**Kec Tawangsari**	Jumlah laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	15.000.000	
III	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Kec Tawangsari**	**Persentasepemberdayaanmasyarakatdesa dan kelurahan**	100%	110.000.000	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Kec Tawangsari**	**Persentasepemberdayaanmasyarakatdesa dan kelurahan**	100%	110.000.000	
1	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Kec Tawangsari**	**cakupan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa**	100%	20.000.000	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Kec Tawangsari**	**cakupan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa**	100%	20.000.000	
1.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	**Kec Tawangsari**	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	12 Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	**Kec Tawangsari**	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	12 Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000	
1.3	Peningkatan EfektifitasKegiatanPemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	**Kec Tawangsari**	Jumlah laporan Peningkatan Efektifitas KegiatanPemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	10.000.000	PeningkatanEfektifitasKegiatanPemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	**Kec Tawangsari**	Jumlah laporan Peningkatan Efektifitas KegiatanPemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	10.000.000	
2	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Kec Tawangsari**	**CakupanPemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	100%	90.000.000	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Kec Tawangsari**	**CakupanPemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	100%	90.000.000	

2.1.	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	**Kec Tawangsari**	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diselenggarakan	12 lembaga kemasyarakatan	80.000.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	**Kec Tawangsari**	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diselenggarakan	12 lembaga kemasyarakatan	80.000.000	
	Peningkatan Kapasitas Lembaga kemasyarakatan	**Kec Tawangsari**	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang ditingkatkan kapasitasnya	12 lembaga kemasyarakatan	10.000.000	Peningkatan Kapasitas Lembaga kemasyarakatan	**Kec Tawangsari**	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang ditingkatkan kapasitasnya	12 lembaga kemasyarakatan	10.000.000	
IV	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Kec Tawangsari**	**Persentase capaian ketentraman dan ketertiban umum**	100%	**30.000.000**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Kec Tawangsari**	**Persentase capaian ketentraman dan ketertiban umum**	100%	**30.000.000**	
1	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Kec Tawangsari**	**Capaian Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	100%	20.000.000	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Kec Tawangsari**	**Capaian Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	100%	20.000.000	
1.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	**Kec Tawangsari**	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	1 Laporan	10.000.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	**Kec Tawangsari**	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	1 Laporan	10.000.000	
1.2	HarmonisasiHubunganDenganTokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	**Kec Tawangsari**	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	10.000.000	HarmonisasiHubunganDenganTokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	**Kec Tawangsari**	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	10.000.000	
2	**Koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah**	**Kec Tawangsari**	**Capaian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah**	100%	10.000.000	**Koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah**	**Kec Tawangsari**	**Capaian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah**	100%	10.000.000	

2.1	Koordinasi/SinergiDengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	**Kec Tawangsari**	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 Laporan	10.000.000	Koordinasi/SinergiDengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	**Kec Tawangsari**	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 Laporan	10.000.000	
V	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Kec Tawangsari**	**Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum**	100%	**316.000.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Kec Tawangsari**	**Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum**	100%	**316.000.000**	
1	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Kec Tawangsari**	**Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	100%	316.000.000	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Kec Tawangsari**	**Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	100%	316.000.000	
1.1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam angka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	**Kec Tawangsari**	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	80 orang	150.000 .000	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam angka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	**Kec Tawangsari**	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	80 orang	150.000 .000	

III	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	**Kec Tawangsari**	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	166.000.000	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	**Kec Tawangsari**	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	166.000.000	
VI	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Kec Tawangsari**	**Cakupanpembinaan dan pengawasanpemerintahandesa**	100%	**82 .000.000**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Kec Tawangsari**	**Cakupanpembinaan dan pengawasanpemerintahandesa**	100%	**82.000.000**	
1	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Kec Tawangsari**	**Cakupan fasilitas irekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintaha ndesa**	100%	82..000.000	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Kec Tawangsari**	**Cakupan fasilitas irekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintaha ndesa**	100%	82..000.000	
1.1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	**Kec Tawangsari**	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1 Dokumen	10.000.000	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	**Kec Tawangsari**	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1 Dokumen	10.000.000	
1.2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	**Kec Tawangsari**	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	2 Dokumen	10.000.000	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	**Kec Tawangsari**	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	2 Dokumen	10.000.000	
1.3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	**Kec Tawangsari**	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	2 Dokumen	10.000.000	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	**Kec Tawangsari**	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	2 Dokumen	10.000.000	
1.4	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	**Kec Tawangsari**	Jumlah Dokumen fasilitasi dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	12 Dokumen	10.000.000	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	**Kec Tawangsari**	Jumlah Dokumen fasilitasi dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	12 Dokumen	10.000.000	

1.5	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Rakyat	**Kec Tawangsari**	Jumlah Dokumen fasilitasi dalam rangka pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Rakyat	1 Dokumen	5.000.000	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	**Kec Tawangsari**	Jumlah Dokumen fasilitasi dalam rangka pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Rakyat	1 Dokumen	5.000.000	
1.6	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	**Kec Tawangsari**	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	5 Dokumen	15.000.000	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	**Kec Tawangsari**	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	5 Dokumen	15.000.000	
17	FasilitasiSinkronisasiPerencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa	**Kec Tawangsari**	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa	2 Dokumen	10.000.000	FasilitasiSinkronisasiPerencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa	**Kec Tawangsari**	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa	2 Dokumen	10.000.000	
1.8	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	**Kec Tawangsari**	Jumlah Dokumen fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	1 Dokumen	20.000.000	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	**Kec Tawangsari**	Jumlah Dokumen fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	1 Dokumen	20.000.000	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 tahun 2012 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah, serta kebijakan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam pelaksanaan pembangunan bahwa kegiatan peningkatan infrastruktur dan lingkungan hidup masyarakat berupa peningkatan sarana dan prasarana fasilitas umum ataupun social baik fisik maupun non fisik tidak dapat diakomodir dalam perencanaan di kecamatan . kegiatan pembangunan baik fisik maupun non fisik di wilayah desa Kecamatan hanya memfasilitasi serta mengakomodir perencanaan kebutuhan masyarakat melalui kegiatan Musrenbangdes maupun musrenbangcam serta mengawasi pelaksanaan kegiatannya.

BAB III

TUJUAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaah terhadap kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional sebagaimana dimaksud, Kecamatan Tawangsari tidak secara langsung melaksanakan Program dan Kegiataan yang menjadi kebijakan Nasional.

3.2. Tujuan dan Sasaran serta Arah Kebijakan

Sebagaimana yang tercantum dalan Rencana Strategis Kecamatan Tawangsari tahun 2021-2026, mempunyai tujuan dan sasaran sebagai berikut :

a. **Tujuan** :

“ Terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang reponsif dan akuntabel “

b. **Sasaran** :

Adapun yang menjadi sasaran antara lain adalah :

1) Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat;

2) Meningkatnya kualitas aparatur dan pelayanan publik.

Sedangkan untuk Perangkat Daerah Kecamatan Tawangsari atas dasar Visi dan Misi (I) Bupati 2021-2026, Tujuan, Sasaran dan arah kebijakan Jangka Menengah adalah :

MISI RPJMD	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	IKU KEC
MISI 1 RPJMD : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Percepatan Reformasi Birokrasi	Terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	Peningkatan efektivitas kinerja birokrasi dan layanan publik yang responsif, transparan dan akuntabel	Mengembangkan layanan birokrasi yang prima	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
		Meningkatnya kualitas aparatur dan pelayanan publik	Meningkatkan kualitas pelayanan public, pemanfaatan dan peningkatan pengembangan publik, efektivitas dan efisiensi pemerintahan	Meningkatkan semangat dan kenyamanan bekerja, kemauan bekerja sama, transparansi dan akuntabel	Nilai SAKIP

3.3. Program Kegiatan dan Sub Kegiatan

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerja sama dengan masyarakat, guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Program dan Kegiatan Kecamatan Tawangsari Kabupaten Sukoharjo yang direncanakan untuk Periode Tahun 2024 program dan kegiatan. Antara lain :

I. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
   1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
      (1) Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di wilayah Kecamatan
      (2) Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan

II. Program Pemeberdayaan Masyarakat Desa dan Kalurahan
   1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
      (1) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencananan Pembangunan di Desa
      (2) Peningkatan efektitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
   2. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan
      (1) Penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan
      (2) Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan

III. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
   (1) Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan
   (2) Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat.
2. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada
   (1) Koordinasi/Sinergitas dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.

IV. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

1. Penelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

   (1) Pembinaan wawasan kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan Pengamalan Pancasila, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan
   (2) Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan

V. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

   (1) Fasilitasi Penyusunan Peraturan dan Peraturan Kepala Desa

   (2) Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa

(3) Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pemeberdayaan Aset Desa

(4) Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

(5) Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa

(6) Rekomendsi Pengangkaan dan Pemberhentian Perangkat Desa

(7) Fasiltasi Sinkronisasi Perencanaan Pembanagunan Daerah dengan Pembangunan Desa

(8) Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipasif.

VI. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

   (1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
   (2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
   (3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
   (4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
   (5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
   (6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
   (7) Evaluasi Kinerja

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

   (1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
   (2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
   (3) Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD

(4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir
(5) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
(6) Penyusunan Pelaporan dan Analisi Prognosis Realisasi Anggaran

3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
   (1) Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian
   (2) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi
   (3) Sosialisasi Peraturan Perundangan Undangan
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
   (1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
   (2) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
   (3) Penyediaan Bahan Logistik
   (4) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
   (5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-undangan
   (6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   (1) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya
6. Penyedia jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah
   (1) Penyedia jasa surat menyurat
   (2) Penyedia jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
   (3) Penyedia jasa Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor
   (4) Penyedia jasa Pelayanan Umum

7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerinah Daerah
   (1) Penyedia jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan, Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
   (2) Penyedia jasa pemeliharan, biaya pemeliharaan, dan pajak perizinan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
   (3) Pemeliharaan Mebel
   (4) Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya
   (5) Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan

Rencana kerja dan pendanaan Kecamatan Tawangsari tahun 2024 dan perkiraan maju tahun 2025. Tercantum dalam tabel 4.1

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan PD Tahun 2024

Dan Prakiraan Maju Tahun 2025

Perangkat Daerah Kecamatan Tawangsari Kabupaten Sukoharjo

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif(dalam ribuan)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (dalam ribuan)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7 01 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Prosesntase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kec Tawangsari**	**100%**	**2.957.625.550**	**APBD Kabupaten**	**0**	**100%**	**3.086.000.000**
7 01 01 2,01	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Cakupan pelayanan urusan pemerintah daerah**	**Kec Tawangsari**	100%	22.000.000	**APBD Kabupaten**		100%	40.000.000
7 01 01 2,01 0001	Penyusunan Dok Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec Tawangsari	1 dok	5.000.000	APBD Kabupaten		1 dok	10.000.000

7 01 01 2,01 0002	Koordinasi dan PenyusunanDok RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kec Tawangsari	1 dok	3.000.000	APBD Kabupaten		1 dok	5.000.000
7 01 01 2,01 0003	Koordinasi dan penyusunanDokPerubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kec Tawangsari	1 dok	3.000.000	APBD Kabupaten		1 dok	5.000.000
7 01 01 2,01 0004	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kec Tawangsari	1 dok	3.000.000	APBD Kabupaten		1 dok	5.000.000
7 01 01 2,01 0005	Koordinasi dan penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kec Tawangsari	1 dok	3.000.000	APBD Kabupaten		1 dok	5.000.000

7 01 01 2,01 0006	Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec Tawangsari	3 dok	2.500.000	APBD Kabupaten		1 dok	5.000.000
7 01 01 2,01 0007	Evaluasi kinerja erangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec Tawangsari	8 dok	2.500.000	APBD Kabupaten		8dok	5.000.000
7 01 01 2,02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Cakupan pelaporan capaian kinerja keuangan**	**Kec Tawangsari**	100%	2.088.542.000	APBD Kabupaten		100%	2.135.000.000
7 01 01 2,02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	**Kec Tawangsari**	16 orang/bln	1.968.542.000	APBD Kabupaten		16 orang/bln	2.000.000.000

7 01 01 2,02 0003	Pelaksanaan Penatausahan dan Pengujian/ Verifikasi	Jumlah Dokumen Penatausahaan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	**Kec Tawangsari**	12 dok	110.000.000	APBD Kabupaten		12 dok	115.000.000
7 01 01 2,02 0004	Koordinasi dan pelaksanaanAkuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan pelaksanaan Akuntansi SKPD	**Kec Tawangsari**	12 dok	2.500.000	APBD Kabupaten		12 dok	5.000.000
7 01 01 2,02 0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhirt ahun	Jumlah Laporan Keuanga Akhir Tahun SKPD dan laporan hasil Koordinasi penyusunan Laporan keuangan Akhir Tahun SKPD	**Kec Tawangsari**	1 laporan	2.500.000	APBD Kabupaten		1 laporan	5.000.000
7 01 01 2,02 0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan blnan/triwulanan/ semesteran SKPD	Jumlah Laporan keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	**Kec Tawangsari**	18 laporan	2.500.000	APBD Kabupaten		2 laporan	5.000.000

7 01 01 2,02 0008	PenyusunanPelaporan dan Analisis prognosis Realisasianggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	**Kec Tawangsari**	12 dok	2.500.000	APBD Kabupaten		12 dok	5.000.000
7 01 01 2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Cakupan layanan administrasi kepegawaian**	**Kec Tawangsari**	100%	32.000.000	APBD Kabupaten		100%	50.000.000
7-01.01.2-05.0003	Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawian	Jumlah dokumen Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawian	Kec Tawangsari	2 dokumen	3.000.000	APBD Kabupaten		2 dokumen	10.000.000
7 01 01 2.05 0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kec Tawangsari	25 orang	24.000.000	APBD Kabupaten		24 orang	30.000.000

7 01 01 2.05 0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	Kec Tawangsari	25 orang	5.000.000	APBD Kabupaten		16 orang	10.000.000
7 01 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan layanan administrasi umum**	**Kec Tawangsari**	100%	266.537.350	**APBD Kabupaten**		100%	270.000.000
7 01 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Kec Tawangsari	12 paket	8.716.750	APBD Kabupaten		12 paket	15.000.000
7 01 01 2.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket Peralatan Rumah tangga yang disediakan	Kec Tawangsari	12 paket	15.000.000	APBD Kabupaten		12 paket	25.000.000

7 01 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan logistik kantor	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Kec Tawangsari	12 paket	190.000.000	APBD Kabupaten		12 paket	150.000.000
7 01 01 2.06 0005	Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Kec Tawangsari	12 paket	9.296.600	APBD Kabupaten		12 paket	15.000.000
7 01 01 2.06 0006	Penyediaanbahanbacaan dan perundang-undangan	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan yang disediakan	Kec Tawangsari	2 dokumen	3.965.000	APBD Kabupaten		12 dokumen	5.000.000
7 01 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec Tawangsari	12 laporan	39.559.000	APBD Kabupaten		12 laporan	50.000.000

7 01 01 2,07	**Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan**	**Capaian sarana dan prasarana aparatur kondisi baik**	**Kec Tawangsari**	100%	54.650.000	APBD Kabupaten		100%	65.000.000
7 01 01 2,07 0005	Pengadaan Mebel	Jumlah paket Mebel yang disediakan	Kec Tawangsari			APBD Kabupaten		3 unit	15.000.000
7 01 01 2,07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Kec Tawangsari			APBD Kabupaten		5 unit	20.000.000
7 01 01 2,07 0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Kec Tawangsari			APBD Kabupaten		5 unit	15.000.000

7 01 01 2,0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor ataubangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Kec Tawangsari	3 unit	54.650.000	APBD Kabupaten		3 unit	15.000.000
7 01 01 2,08	**Penyediaan jasa penunjang urusan permerintah daerah**		**Kec Tawangsari**	100%	276.385.600	**APBD Kabupaten**		100%	275.000.000
7 01 01 2,08 0001	PenyediaanJasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	**Kec Tawangsari**	12 laporan	10.000.000	**APBD Kabupaten**		12 surat	15.000.000
7 01 01 2,08,0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya air dan Listrik	Jumlah Laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	**Kec Tawangsari**	12 laporan	74.750.000	**APBD Kabupaten**		12 laporan	100.000.000
7 01 01 2,08,0003	PenyediaanJasaPeralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	**Kec Tawangsari**	12 laporan	19.950.000	**APBD Kabupaten**		20 kegaiatan	25.000.000

7 01 01 2,08,0004	Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	**Kec Tawangsari**	12 laporan	171.685.600	**APBD Kabupaten**		7 orang	140.000.000
7 01 01 2,09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah**	**Cakupan sarana dan prasarana aparatur kondisi baik**	**Kec Tawangsari**	100%	217.510.600	**APBD Kabupaten**		100%	251.000.000
7 01 01 2,09,0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan DinasJabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Kec Tawangsari	12 unit	79.350.000	APBD Kabupaten		12 unit	100.000.000
7 01 01 2,09,0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, pajak dan Perizinan kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pjak dan perizinannya	Kec Tawangsari	1 unit	10.996.000	APBD Kabupaten		1 unit	11.000.000

7 01 01 2,09,0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang dipeliharan	Kec Tawangsari	20 unit	8.600.000	APBD Kabupaten		20 unit	20.000.000
7 01 01 2,09,0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Kec Tawangsari	23 unit	14.910.000	APBD Kabupaten		10 unit	20.000.000
7 01 01 2,09,0009	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Kec Tawangsari	3 unit	103.654.600	APBD Kabupaten		2 paket	100.000.000
7 01 02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Kec Tawangsari**	100%	25.000.000	**APBD Kabupaten**		100%	30.000.000
7 01 02 2,0002	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tdak dilaksanakan oleh Unit KerjaPerangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	Cakupan penyelenggara nurusan pemerintahan yang tida dilaksanakan oleh Unit Kerja PD yang ada di Kecamatan	**Kec Tawangsari**	100%	25.000.000	**APBD Kabupaten**		100%	30.000.000

7 01 02 2,0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wialyah Kecamatan	Jumlah laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	**Kec Tawangsari**	1 Laporan	10.000.000	**APBD Kabupaten**		1 Laporan	15.000.000
7 01 02 2,02 0003	Peningkatan efektifitas Pelaksanaa Pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan	Jumlah laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	**Kec Tawangsari**	1 Laporan	15.000.000	**APBD Kabupaten**		1 Laporan	15.000.000
7 01 03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentasepemberdayaanmasyarakatdesa dan kelurahan**	**Kec Tawangsari**	100%	110.000.000	**APBD Kabupaten**		100%	165.000.000
7 01 03 2 01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**cakupan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa**	**Kec Tawangsari**	100%	20.000.000	**APBD Kabupaten**		100%	45.000.000
7 01 03 2 01 0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	**Kec Tawangsari**	12 Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000	**APBD Kabupaten**		12 Lembaga Kemasyarakatan	25.000.000
7 01 03 2 01 0003	Peningkatan efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	**Kec Tawangsari**	1 Laporan	10.000.000	**APBD Kabupaten**		1 Laporan	20.000.000

7 01 03 2 03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**CakupanPemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Kec Tawangsari**	100%	90.000.000	**APBD Kabupaten**		100%	120.000.000
7 01 03 2 03 0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diselenggarakan	Kec Tawangsari	12 Lembaga Kemasyarakatan	80.000.000	APBD Kabupaten		12 desa	100.000.000
7 01 03 2 03 0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang ditingkatkan kapasitasnya	Kec Tawangsari	12 Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000	APBD Kabupaten		50 orang	20.000.000
7 01 04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase capaian ketentraman dan ketertiban umum**	**Kec Tawangsari**	100%	**30.000.000**	**APBD Kabupaten**		100%	**60.000.000**
7 01 04 2 01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraa nKetenteraman dan Ketertiban Umum**	**Capaian Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Kec Tawangsari**	100%	20.000.000	**APBD Kabupaten**		100%	40.000.000
7 01 04 2 01 0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansivertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Kec Tawangsari	1 Laporan	10.000.000	APBD Kabupaten		1 Laporan	20.000.000

7 01 04 2 01 0002	Harmonisasi Hubungan DenganTokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kec Tawangsari	1 Laporan	10.000.000.	APBD Kabupaten		1 Laporan	20.000.000
7 01 04 2 02	**Koordinasipenerapan dan penegakanperaturandaerah dan peraturankepaladaerah**	**Capaian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah**	**Kec Tawangsari**	100%	10.000.000	**APBD Kabupaten**		100%	10.000.000
7 01 04 2 02 0001	Koordinasi/SinergiDenganPerangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di BidangPenegakanPeraturanPerundang-Undangan dan/atauKepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kec Tawangsari	1 Laporan	10.000.000	APBD Kabupaten		1 Laporan	10.000.000
7 01 05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum**	**Kec Tawangsari**	100%	**316.000.000**	**APBD Kabupaten**		100%	**450.000.000**
7 01 05 2,01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Kec Tawangsari**	100%	316.000.000	**APBD Kabupaten**		100%	450.000.000

7 01 05 2,0001	PembinaanWawasanKebangsaan dan Ketahanan Nasional dalamRangkaMemantapkanPengamalan Pancasila, PelaksanaanUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, PelestarianBhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan PemeliharaanKeutuhan Negara KesatuanRepublik Indonesia	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kec Tawangsari	80 orang	150.000.000	APBD Kabupaten		80 orang	250.000.000
7 01 05 2,01 0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec Tawangsari	12 Dokumen	166.000.000	APBD Kabupaten		12 Dokumen	2000.000.000
7 01 05 06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Cakupanpembinaan dan pengawasanpemerintahandesa**	**Kec Tawangsari**	100%	**82.000.000**	**APBD Kabupaten**		100%	**140.000.000**
7 01 06 2 01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerinta hanDesa**	**Cakupan fasilitas irekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintaha ndesa**	**Kec Tawangsari**	100%	82.000.000	**APBD Kabupaten**		100%	140.000.000
7 01 06 2 01 0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kec Tawangsari	1 Dokumen	10.000.000	APBD Kabupaten		1 Dokumen	10.000.000
7 01 06 2 01 0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec Tawangsari	2 Dokumen	10.000.000	APBD Kabupaten		2 Dokumen	20.000.000
7 01 06 2 01 0003	Fasilitasi Pengelolaan Kuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	Kec Tawangsari	2 Dokumen	10.000.000	APBD Kabupaten		2 Dokumen	15.000.000
7 01 06 2 01 0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen yang fasilitasi pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kec Tawangsari			APBD Kabupaten		1 Dokumen	15.000.000
7 01 06 2 01 0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen fasilitasi dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kec Tawangsari	12 Dokumen	10.000.000	APBD Kabupaten			

7 01 06 2 01 0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kec Tawangsari	1 Dokumen	5 .000.000	APBD Kabupaten			
7 01 06 2 01 0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian PerangkatDesa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kec Tawangsari	5 Dokumen	15.000.000	APBD Kabupaten		5 Dokumen	15.000.0000
7 01 06 2 01 0009	FasilitasiSinkronisasiPerencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa	Kec Tawangsari	2 Dokumen	10.000.000	APBD Kabupaten		2 Dokumen	10.000.000
7 01 06 2 01 0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Kec Tawangsari	1 Dokumen	20.000.000	APBD Kabupaten		1 Dokumen	25.000.000
	JUMLAH				**3.525.625.550**		**0**	**0**	**3.940.999.860**

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kecamatan Tawangsari Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 merupakan panduan kerja bagi Kecamatan Tawangsari selama 1 (satu) tahun ke depan. Rencana Kerja ini disusun berdasarkan kebutuhan Perangkat Daerah dan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun dalam rangka mendukung pencapaian program Kepala Daerah. Mendasarkan pada hal tersebut, pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Tawangsari Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 didasarkan dari Rencana Strategis Kecamatan Tawangsari tahun 2021 – 2026. Guna pencapaian tujuan perencanaan pembangunan dalam 1 (satu) tahun ke depan. Penyusunan perencanaan pembangunan yang berkualitas akan menopang dalam mewujudkan pembangunan yang berkualitas terutama dalam mencapai visi dan misi Kepala Daerah.

Renja Perangkat Daerah Kecamatan Tawangsari Tahun 2024 merupakan indikator dalam proses evaluasi laporan perencananan atas kinerja satu tahun, sehingga dapat meminimalisir pelaksanaan kegiatan yang menyimpang dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2021-2026 sesuai dengan tupoksi Kecamatan Tawangsari Kabupaten Sukoharjo.

Tawangsari, 10 Agustus 2023

Camat Tawangsari

BAMBANG DWI SUMIRATNO, S Sos
Pembina Tingkat I
NIP. 19700508 199003 1 005

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024



Kecamatan Nguter
Kabupaten Sukoharjo

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan karunia-Nya, Rencana KerjaPemerintah Kecamatan Nguter Tahun 2024 dapat kami susun. Penyusunan Renja ini bertujuan untuk memberikan arah dalam menyusun Perencananan dan Pelaksanaan Program dan Kegiatan dalam kurun waktu 1 (tahun). Pelaksanaan program dan kegiatan di Kecamatan Nguter tersebut diarahkan untuk pencapaian keberhasilan pembangunan dan pencapaian program pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan sesuai dengan visi misi Kecamatan Nguter sehingga pemerintahan yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien dapat terwujud.

Kami menyadari Renja ini jauh dari sempurna, untuk itu saran dan koreksi sangat kami harapkan demi kesempurnaan Renja ini dan keberlanjutan penyusunan diperiode berikutnya. Kami berharap apa yang terangkum dalam Renja Pemerintah Kecamatan Nguter Tahun 2024 ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Nguter, 10 Agustus 2023

CAMAT NGUTER

KABUPATEN SUKOHARJO

PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
KECAMATAN NGUTER

SUKATMAN, S.Sos., MM.

NIP. 19700614 198903 1 002

SALINAN

BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 35 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024;

b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 273 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan Kepala Daerah setelah Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 192) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 262);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tatacara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 200);
13. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);
14. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 298);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

Renja Perangkat Daerah disusun dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Pasal 3

Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

BAB II

SISTEMATIKA DAN FUNGSI RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 4

Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. bab I : pendahuluan;
b. bab II : hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu;
c. bab III : tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
d. bab IV : rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan
e. bab V : penutup.

Pasal 5

Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah.

BAB II

PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 6

(1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah.
(2) Kepala Perangkat Daerah melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi Renja Perangkat Daerah kepada Bupati melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.

BAB III

PERANGKAT DAERAH PENYUSUN

Pasal 7

(1) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun oleh Perangkat Daerah sebagai berikut:
    a. Sekretariat Daerah;
    b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
    c. Inspektorat Daerah;
    d. Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan;
    e. Dinas Kesehatan;
    f. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang;
    g. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
    h. Satuan Polisi Pamong Praja;
    i. Dinas Sosial;

j. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak;
k. Dinas Pangan;
l. Dinas Lingkungan Hidup;
m. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil;
n. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa;
o. Dinas Perhubungan;
p. Dinas Komunikasi Dan Informatika;
q. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
r. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;
s. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
t. Dinas Pertanian dan Perikanan;
u. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah dan Perdagangan;
v. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
w. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
x. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
y. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
z. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
aa. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
bb. Kecamatan Weru;
cc. Kecamatan Bulu;
dd. Kecamatan Tawangsari;
ee. Kecamatan Sukoharjo;
ff. Kecamatan Nguter;
gg. Kecamatan Bendosari;
hh. Kecamatan Polokarto;
ii. Kecamatan Mojolaban;
jj. Kecamatan Grogol;
kk. Kecamatan Baki;
ll. Kecamatan Gatak; dan
mm. Kecamatan Kartasura.

(2) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf mm tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 10 Agustus 2023

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 10 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd.

WIDODO

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2023 NOMOR 35

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ditandatangani secara elektronik oleh :

TEGUH PRAMONO, SH, MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19710429 199803 1 003

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 35 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN
SUKOHARJO TAHUN 2024

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2024

Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 terdiri atas:

1. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Inspektorat Daerah;
4. Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan;
5. Dinas Kesehatan;
6. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang;
7. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
8. Satuan Polisi Pamong Praja;
9. Dinas Sosial;
10. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak;
11. Dinas Pangan;
12. Dinas Lingkungan Hidup;
13. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil;
14. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa;
15. Dinas Perhubungan;
16. Dinas Komunikasi Dan Informatika;
17. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
18. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;
19. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
20. Dinas Pertanian dan Perikanan;
21. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah dan Perdagangan;
22. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
23. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
24. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
25. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
26. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
27. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
28. Kecamatan Weru;
29. Kecamatan Bulu;

30. Kecamatan Tawangsari;
31. Kecamatan Sukoharjo;
32. Kecamatan Nguter;
33. Kecamatan Bendosari;
34. Kecamatan Polokarto;
35. Kecamatan Mojolaban;
36. Kecamatan Grogol;
37. Kecamatan Baki;
38. Kecamatan Gatak; dan
39. Kecamatan Kartasura.

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI

DAFTAR ISI.

KATA PENGANTAR.....i
DAFTAR ISI iii
DAFTAR TABEL iiii
DAFTAR GAMBAR.....ivv
BAB I - PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang.....1
B. Landasan Hukum 4
C. Maksud dan Tujuan.....8
D. Sistematika Penulisan.....9
BAB II - EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 12
A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Nguter Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Nguter Tahun 2021-2026 12
B. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....16
C. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD 24
D. Review Terhadap Rancangan Awal OPD.....26
BAB III - TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 37
A. Telaahan Terhadap Kebijakan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo ...37
B. Tujuan dan Sasaran 44
BAB IV - RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 46
BAB V - PENUTUP 60

DAFTAR TABEL

tabel 2.1. Anggaran Dan Realisasi Belanja Perangkat Daerah Kecamatan Nguter Tahun 2022 12
Tabel 2.2 Tabel Evaluasi Pelaksanaan Renja Opd 15
Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Nguter 22
Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 24
Tabel 2.5 Review Terhadap Rancangan Awal Renja Kecamatan Nguter Tahun 2024 27
Tabel 3.1 Telaah Visi, Misi, Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 43
Tabel 4.1 Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 47
Tabel 4.2 Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Nguter Tahun 2024 57

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Skema Rencana Pembangunan Pusat dan Daerah 2
Gambar 1.2. Alur Penyusunan RKPD dan Rencana Kerja Kecamatan Nguter 4
Gambar 2.1 Bagan Organisasi Kecamatan Nguter 20

BAB I

PENDAHULUAN

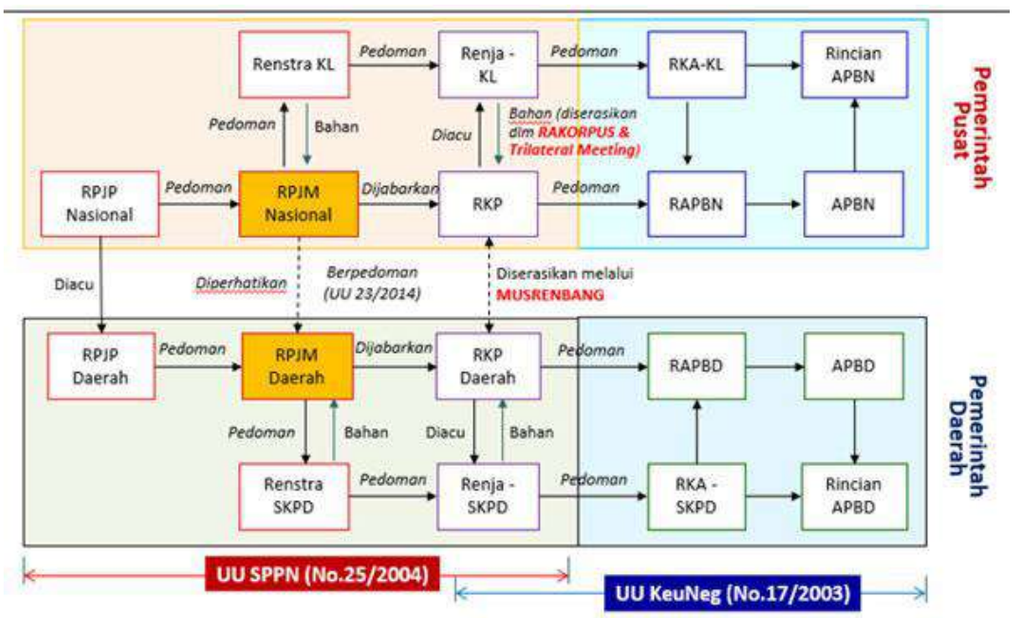
A. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, telah diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan nomenklatur urusan sampai dengan sub kegiatan yang sudah ditentukan. RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dimana dalam penyusunan RKPD diperlukan masukan dari Perangkat Daerah berupa Rencana Kerja Perangkat Daerah. Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah berjangka 1 (satu) tahun yang memuat kondisi pelayanan Perangkat Daerah, gambaran visi dan misi serta rencana pembangunan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun yang akan datang.

Rencana Kerja Perangkat Daerah juga merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran RPJMD oleh Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan oleh Perangkat Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan jangka waktu RPJMD. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Perangkat Daerah berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo untuk periode Tahun 2024 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Sukoharjo dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun di Tahun 2024.

Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Nguter Tahun 2024 memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah pembangunan nasional, provinsi, dan mendukung arah perencanaan pembangunan daerah. Adapun Keterkaitan hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan yang ada pada Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Nguter Tahun 2024 dapat dilihat pada gambar 1.1 :



Gambar 1.1.

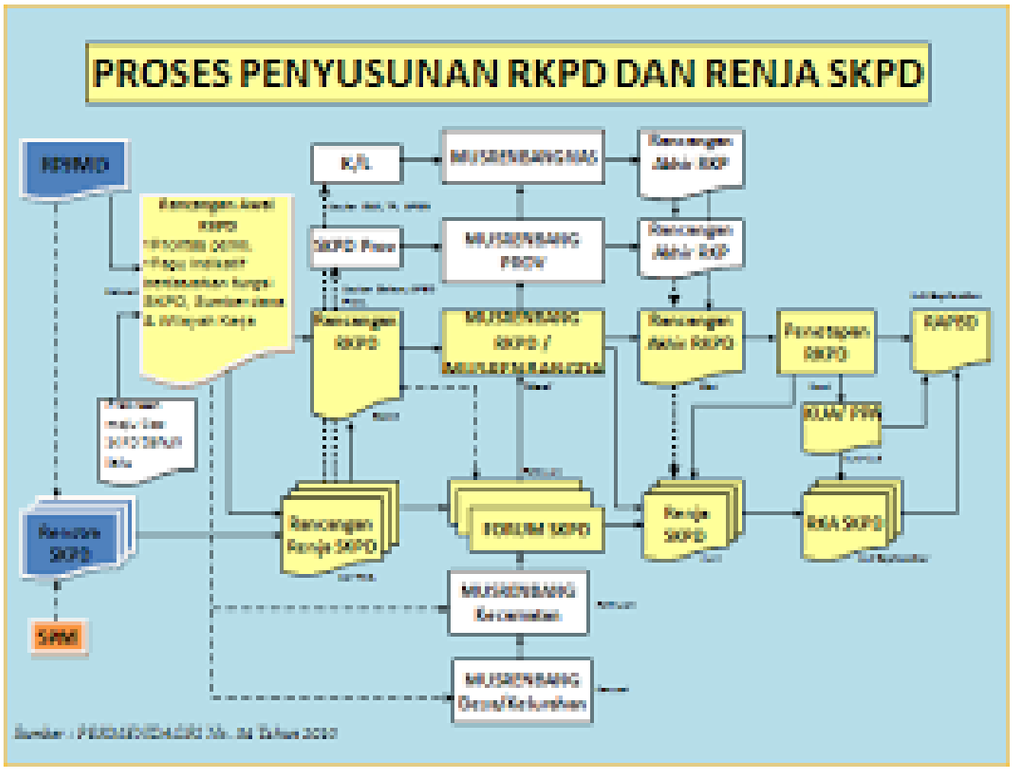
Skema Rencana Pembangunan Pusat dan Daerah

RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Nasional, yang memuat strategi pembangunan Nasional, kebijakan umum, program Kementerian / Lembaga dan lintas Kementerian / Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara

menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam Rencana Kerjayang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Pasal 263 ayat 2 UU No. 23 Tahun 2014 RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan rencana tata ruang wilayah. Pasal 263 ayat 3 UU No. 23 Tahun 2014 RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.

Adapun penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 dilakukan melalui 5 (lima) pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan yaitu pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (top-down), dan bawah-atas (bottom-up). Kelima pendekatan dimaksud diselenggarakan secara berkelanjutan untuk membentuk satu siklus perencanaan yang utuh sebagai berikut (Gambar 1.2) **:**



Gambar 1.2.

Alur Penyusunan RKPD dan Rencana Kerja Kecamatan Nguter

Berdasarkan Bagan Alur tersebut penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Nguter merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021 – 2026. Selain itu Proses penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo merupakan dokumen yang tidak berdiri sendiri melainkan dilakukan melalui beberapa tahapan, yakni diawali dengan mereview Rensta, Penyusunan Rancangan Rencana Kerja, dan Penetapan Rencana Kerja. Ketiga tahapan dimaksud diselenggarakan secara berkelanjutan untuk menghasilkan dokumen penganggaran yaitu Dokumen RKA SKPD dan Dokumen DPA SKPD yang dituangkan dalam Dokumen APBD Kabupaten Sukoharjo.

B. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Dearah Kecamatan Nguter Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 174);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 192) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031(Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 262);
20. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);

21. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 298);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);

C. **Maksud dan Tujuan**

1. Maksud penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Nguter Tahun 2024 adalah :
   a. Memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan serta pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Nguter Tahun 2024
   b. Sebagai acuan dan pedoman pelaksanaan Program/Kegiatan Kecamatan Nguter pada Tahun 2024
2. Tujuan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Tahun 2024 adalah :
   a. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2024 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
   b. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Nguter selama kurun waktu 1 tahun yaitu Tahun 2024;

c. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan Kecamatan Nguter Tahun 2024;
d. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program dan kegiatan Kecamatan Nguter Tahun 2024; dan
e. Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Nguter Tahun 2024.

D. **Sistematika Penulisan**

Adapun sitematika penulisan dalam penyajian Rencana Kerja Kecamatan Nguter Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

BAB I – PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Perubahan Renja SKPD, proses penyusunan Renja SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen RKPD, Renstra SKPD, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan APBD

B. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD

C. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Perubahan Renja SKPD

D. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renja SKPD, serta susunan garis besar isi

BAB II - EVALUASI RENJA KECAMATAN NGUTER TAHUN LALU

A. Evaluasi Renja Kecamatan Nguter Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Nguter

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun n-1) dan perkiraan capaian

tahun berjalan, mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun sebelumnya.

B. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo

   Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan Indikator Kinerja yang sudah ditetapkan dalam SPM maupun terhadap IKK. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

C. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Nguter , Kabupaten Sukoharjo

   Berisi uraian mengenai sejauhmana tingkat kinerja pelayanan Kecamatan Nguter dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah dan permasalahan/hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

BAB III – TUJUAN, SASARAN

A. Telaahan Terhadap Kebijakan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo

   Penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah, visi misi Kepala Daerah serta yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD

B. Tujuan dan Sasaran

   Berisi perumusan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD

BAB IV - RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisi uraian garis besar mengenai rekapitulasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan Kecamatan Nguter Tahun 2024

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Nguter Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Nguter Tahun 2021-2026

Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan OPD untuk 1 (satu) periode yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja Kecamatan Nguter menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dan hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kecamatan Nguter selama tahun 2022.

Realisasi dan evaluasi program dan kegiatan Kecamatan Nguter Tahun 2022 mengacu pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran – Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah untuk menetapkan APBD 2022. Adapun realisasi program dan kegiatan tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1.

Anggaran Dan Realisasi Belanja Perangkat Daerah Kecamatan Nguter Tahun 2022

NO		PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	SELISIH (Rp)	%
A		**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**2.736.756.040**	**2.602.603.853**	**134.152.187**	
I		***Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	***28.000.000***	***27.784.600***	***215.400***	***99,23%***
	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.000.000	9.785.000	215.000	97,85%
	2	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.500.000	2.500.000	-	100,00%
	3	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.500.000	2.500.000	-	100,00%
	4	Koordinasi Dan Penyusunan DPA-SKPD	2.500.000	2.500.000	-	100,00%
	5	Koordinasi Dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2.500.000	2.500.000	-	100,00%
	6	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.000.000	3.999.600	400	99,99%
	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.000.000	4.000.000	-	100,00%
II		***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	***1.997.878.000***	***1.881.400.051***	***116.477.949***	***94,17%***

	8	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	1.882.878.000	1.766.400.051	116.477.949	93,81%
	9	Pelaksanaan Penatausahaan Dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	103.000.000	103.000.000	-	100,00%
	10	Koordinasi Dan Pelaksanaan Akutansi SKPD	3.000.000	3.000.000	-	100,00%
	11	Koorodinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.500.000	2.500.000	-	100,00%
	12	Koorodinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4.000.000	4.000.000	-	100,00%
	13	Penyusunan Pelaporan Dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2.500.000	2.500.000	-	100,00%
III	***Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***		***11.000.000***	***10.993.500***	***6.500***	**99,94%**
	14	Pendataan Dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6.000.000	5.993.500	6.500	99,89%
	15	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	5.000.000	5.000.000	-	100,00%
IV	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***		***254.352.000***	***253.059.700***	***1.292.300***	***99,49%***
	16	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000	9.999.600	400	100,00%
	17	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	33.768.000	33.100.000	668.000	98,02%
	18	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	15.000.000	15.000.000	-	100,00%
	19	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	127.460.000	127.440.500	19.500	99,98%
	20	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	10.724.000	10.723.800	200	100,00%
	21	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	5.000.000	5.000.000	-	100,00%
	22	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	52.400.000	51.795.800	604.200	98,85%
V	***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***		***67.946.000***	***65.360.000***	***2.586.000***	***96,19%***
	23	Pengadaan Mebel	10.920.000	10.920.000	-	100,00%
	24	Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	57.026.000	54.440.000	2.586.000	95,47%
VI	***Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***		***238.530.040***	***225.875.974***	***12.654.066***	***94,69%***
	25	Penyedia Jasa Surat Menyurat	15.330.000	15.330.000	-	100,00%
	26	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	61.000.000	52.109.266	8.890.734	85,43%
	27	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	162.200.040	158.436.708	3.763.332	97,68%
VII	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***		***139.050.000***	***138.130.028***	***919.972***	***99,34%***
	28	Penyedia Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	60.550.000	60.547.791	2.209	100,00%
	29	Penyedia Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Dan Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	14.000.000	13.975.237	24.763	99,82%
	30	Pemeliharaan Mebel	6.000.000	6.000.000	-	100,00%
	31	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	11.500.000	11.500.000	-	100,00%
	32	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	47.000.000	46.107.000	893.000	98,10%

B	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik**	**17.500.000**	**17.500.000**	**-**	**100,00%**
VIII	***Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan***	***17.500.000***	***17.500.000***	-	***100,00%***
	33 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Di Wilayah Kecamatan	10.000.000	10.000.000	-	100,00%
	34 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	7.500.000	7.500.000	-	100,00%
C	**Program Pemberdayaan Masyarakata Desa Dan Kelurahan**	**99.000.000**	**98.961.300**	**38.700**	**99,96%**
IX	***Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa***	***24.000.000***	***23.991.800***	***8.200***	***99,97%***
	35 Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa	9.000.000	9.000.000	-	100,00%
	36 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	15.000.000	14.991.800	8.200	99,95%
X	***Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan***	***75.000.000***	***74.969.500***	***30.500***	***99,96%***
	37 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	60.000.000	59.969.500	30.500	99,95%
	38 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	15.000.000	15.000.000	-	100,00%
D	**Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum**	**32.000.000**	**31.945.000**	**55.000**	**99,83%**
XI	***Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum***	***22.000.000***	***21.945.000***	***55.000***	***99,75%***
	39 Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia Dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan	12.000.000	12.000.000	-	100,00%
	40 Harmonsasi Hubungan Dengan Tokoh Agama Dan Tokoh Masyarakat	10.000.000	9.945.000	55.000	99,45%
XII	***Koordinasi Penerapan Dan Penegakan Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah***	***10.000.000***	***10.000.000***	-	***100,00%***
	41 Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah Yang Tugas Dan Fungsinya Di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Dan/Atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	10.000.000	10.000.000	-	100,00%
E	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**356.000.000**	**355.975.000**	**25.000**	**99,99%**
XII	***Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah***	***356.000.000***	***355.975.000***	***25.000***	***99,99%***
	42 Pembinaan Wawasan Kebangsaan Dan Ketahanan Nasional Dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan Dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	190.000.000	190.000.000	-	100,00%

	43	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan Di Kecamatan	166.000.000	165.975.000	25.000	99,98%
F	**Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa**		**60.000.000**	**59.315.000**	**685.000**	**98,86%**
XIII	***Fasilitasi, Rekomendasi Dan Koordinasi Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa***		***60.000.000***	***59.315.000***	***685.000***	***98,86%***
	44	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	10.000.000	10.000.000	-	100,00%
	45	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Dan Pendayagunaan Aset Desa	10.000.000	10.000.000	-	100,00%
	46	Rekomendasi Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa	10.000.000	9.925.000	75.000	99,25%
	47	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa	10.000.000	10.000.000	-	100,00%
	48	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	20.000.000	19.390.000	610.000	96,95%
TOTAL			**3.301.256.040**	**3.166.300.153**	**134.955.887**	**95,91%**

Evaluasi Renja Kecamatan Nguter selama kurun waktu 1 (satu) tahun dengan perbandingan realisasi Renja tahun sebelumnya serta target kinerja program/ kegiatan Renja tahun berjalan serta capaian program Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Nguter dapat dilihat pada tabel halaman berikut :

Tabel 2.2

Tabel Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD

No	Sasaran/Program	Indikator Kinerja	Target Renstra PD (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja PDs/d Renja PD 2021		Target Kinerja PD Tahun Berjalan (Tahun 2022)		Realisasi Kinerja PD Tahun Berjalan (Tahun 2022)		Realisasi Capaian Kinerja PDs/d Renja PD 2022		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PDs/d 2022 (%)	
1	2	3	4		5		6		5		5		8	
			K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	Rp
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	17.667.800.000	20	2.585.866.265	100	2.577.367.688	100	2.516.888.606	40	5.102.754.871	40	28,88
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100	81.050.000	20	20.000.000	100	12.000.000	100	12.000.000	40	32.000.000	40	39,48
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Prosentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100	683.530.000	20	85.000.000	100	85.000.000	100	84.744.750	40	169.744.750	40	24,83
4	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Posentase Capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100	304.630.000	20	748.921.000	100	37.000.000	100	37.000.000	40	785.921.000	40	257,99
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100	1.779.690.000	20	118.000.000	100	356.000.000	100	356.000.000	40	474.000.000	40	26,63
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	693.200.000	20	49.550.000	100	50.200.000	100	49.300.000	40	98.850.000	40	14,26

B. **Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Dalam melaksanakan tugasnya Kecamatan Nguter mengacu pada tugas Camat yaitu membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan keluarahan, serta fungsi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Staf Ahli Bupati, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat dan Kecamatan. Tugas dan fungsi tersebut dilaksanakan menurut kedudukan masing-masing dalam struktur organisasi yang ada di Kecamatan Nguter . Tugas pokok dan fungsi Kecamatan tersebut adalah

a. Camat

Tugas Camat adalah melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan.. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Camat mempunyai fungsi:

1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
2. Pengkoordinaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa;
3. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
5. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
7. Pembinaan dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa;
8. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi

kewenangan Daerah Kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan;

9. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan Kecamatan; dan
10. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Sekretariat Kecamatan

Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh seorang Sekretaris Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan konsep dan pelaksananan kebijakan, pengoordinasiaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi keuangan, hukum, informasi, kehumasan, keoorganesasian dan ketatalaksanaan, pembinanan ketatusahaan, kearsipan kerumahtanggaan, kepegawaian, pengelolaan dan penatausahaan aset, dan pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan. Dalam melaksanakan tugas Sekretariat Kecamatan mempunyai fungsi :

1. Pengoordinasian penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Kecamatan;
2. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi keuangan, hukum, hubungan masyarakat, ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, dan pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan;
    a) Pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Kecamatan;
    b) Pengoordinasiaan dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Kecamatan;
    c) Pengoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
    d) Penyelenggaraan dan penatausahaan aset dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingukungan

Kecamatan;

e) Pelaksananan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;

f) Pengelolaan kepegawaian di lingkungan Kecamatan; dan

g) Pelaksananan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.

c. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian berada dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Camat yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang perencanaan, data informasi, dan program kerja, dan pengelolaan keuangan di lingkungan Kecamatan.

d. Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Subbagian berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Camat yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemanatauan, evaluasi serta pelaporanyang meliputi pembinaan ketatausahaan , hukum, kehumasan, keorganesasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, kearsipan, kepegawaian, pengelolaan dan penatausahaan aset dan pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan.

e. Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat yang mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksananan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang pemerintahan umum dan desa meliputi administrasi kependudukan, dan meningkatkan kemadirian politik, monograafi kecamatan, pengisian Perangkat Desa dan Kepala Desa, pembinanan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa, pembinaan Badan Perwakilan Desa dan

Lembaga Kemasyaraakatan Desa serta pelaksananan kegiatan baik di tingkat internal Kecamatan maupun dengan pihak terkait dan pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat sebagai urusan otonomi daerah di bidang pemerintahan.

f. Seksi Keamanan dan Ketertiban

Seksi Keamanan dan Ketertiban dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat yang mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksananan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang ketenteraman dan ketertiban wilayah serta pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat meliputi penanggulangan bencana alam, dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta pelaksanaan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat sebagian urusan otonomi daerah di bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

g. Seksi Pemerdayaan Masyarakat Desa

Seksi Pemerdayaan Masyarakat Desa dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat yang mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksananan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang pembangunan, pemberdayaan masyarakat, perekonomian desa, produksi dan disstribusi dan pelaksanaan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat sebagian urusan otonomi daerah di bidang pemberdayaan masyarakat desa.

h. Seksi Kesejahteraan Sosial

Seksi Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat yang mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksananan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang kesejahteraan sosial yang meliputi masalah sosial, kepemudaan, peranan wanita, olah raga, kehidupan keagamaan, kebudayaan dan kesehatan,

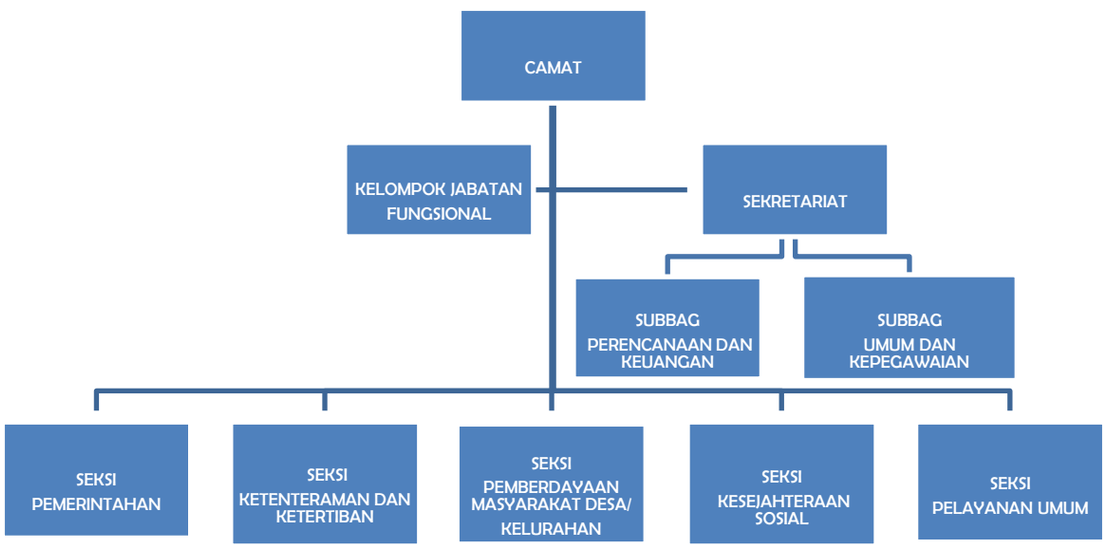
peningkatan kualitas sumber daya perangkat desa, lembaga desa dan pemberian bantuan sosial serta program pengentasan kemiskinan serta pelaksanaan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat sebagian urusan otonomi daerah di bidang kesejahteraan sosial.

i. Seksi Pelayanan Umum

Seksi Pelayanan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat yang mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksananan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang Pelayanan Umum yang meliputi inventarisasi data kekayaan desa, dan sarana prasarana desa, kebersihan lingkungan yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat, pelayanan kependudukan, kebersihan lingkungan, perizinan peningkatan sarana dan prasarana fasilitas umum dan pelayanan umum administrasi kependudukan, pelayanan administrasi terpadu kecamatan, percepatan pencapaian standar pelayanan minimal serta pelaksanaan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat sebagian urusan otonomi daerah di bidang Pelayanan Umum.

Gambar 2.1

Bagan Organisasi Kecamatan Nguter



Program–program yang dilaksanakan pada tahun tahun 2022 yaitu:

1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2) Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
3) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
4) Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
5) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
6) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Program–program tersebut dilaksanakan dalam rangka memenuhi tugas untuk melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa.

PD Kecamatan merupakan representasi Pemerintah pada tingkat bawah, yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, menjadi pihak yang paling dekat dengan masyarakat. Melaksanakan tugas pelayanan publik yang paling dekat dengan masyarakat bukanlah hal yang mudah yang bisa dilalui tanpa ada hambatan dan permasalahan–permasalahan. Hambatan dan permasalahan yang ada dapat diselesaikan dengan kerjasama antara pegawai di lingkungan Kecamatan Nguter .

Kinerja pelayanan Kecamatan Nguter didasarkan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 – 2026, dalam rangka mendukung pada : Misi 1 RPJMD : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik melalui Percepatan Reformasi Birokrasi. Dengan Misi, yaitu: Mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik melalui percepatan reformasi birokrasi dan Sasaran yang ingin dicapai, yaitu: Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel.

Kinerja Pelayanan pada Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo menunjukkan tingkat capaian kinerja Kecamatan Nguter

berdasarkan sasaran/target Renstra Kecamatan Nguter tahun 2021-2026 sebagaimana disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Nguter
Kabupaten Sukoharj0
Tahun 2021-2026

No	Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD 2026	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun						Realiasasi Capaian Tahun						Rasio Capaian pada tahun					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	**Terwujudnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Responsif dan Akuntabel**	**Indek Kepuasan Masyarakat**	**Nilai**	**95**	**81**	**82**	**92**	**93**	**94**	**95**	**89,778**	**90,51**					**110,8**	**110,3**				
1.1	**Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat**	**Persentase Peningkatan Pelayanan Kecamatan**	**%**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**					**100**	**100**				
1.1.1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100					100	100				
1.1.2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Prosentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100					100	100				
1.1.3	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Posentase Capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100					100	100				
1.1.4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100					100	100				
1.1.5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100					100	100				
1.2	**Meningkatnya Kualitas Aparatur dan Pelayanan Publik**	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**Nilai**	**70**	**61**	**62**	**63**	**64**	**65**	**70**	**53,45**	**Dinilai di th 2023**					**87,6**	**0,00**				
1.2.1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100					100	100				

Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Nguter

Kabupaten Sukoharjo

Tahun 2022

No	Sasaran/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD 2026	Realisasi 2021	2022		Persentase Capaian s/d Triwulan IV	Status Capaian RPJMD	PD Penanggung Jawab
						Target	Realisasi s/d Triwulan IV			
1	**Terwujudnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Responsif dan Akuntabel**	**Indek Kepuasan Masyarakat**	**Nilai**	**95**	**89,778**	**82**	**90,51**	**110,3**	**Tercapai**	**Kec Nguter**
1.1	**Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat**	Persentase peningkatan pelayanan kecamatan	%	100	100	100	100	100	Tercapai	Kec Nguter
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	%	100	100	100	100	100	Tercapai	Kec Nguter
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Perberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	%	100	100	100	100	100	Tercapai	Kec Nguter
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Capaian Ketentraman dan Ketertiban	%	100	100	100	100	100	Tercapai	Kec Nguter
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	%	100	100	100	100	100	Tercapai	Kec Nguter
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	%	100	100	100	100	100	Tercapai	Kec Nguter
1.2	**Meningkatnya Kualitas Aparatur dan Pelayanan Publik**	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	angka	70	53,45	62	Penilaian di tahun 2023			Kec Nguter
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	100	100	100	Tercapai	Kec Nguter

C. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Isu – Isu strategis adalah kondisi atau hal yang diperhatikan dalam perencanaan pembangunan selama 5 (Lima) tahun dalam melaksanakan atau menyelenggarakan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Nguter kepada masyarakat. Analisa isu – isu strategis di identifikasikan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Nguter dalam menjalankan pemerintahan ada berbagai permasalahan, sebagai berikut:

a. Bidang Sekretariat

1) Kurangnya personil di bagian sekretariat Kantor Kecamatan Nguter, sehingga banyak tenaga yang

merangkap tugas lain, untuk meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat perlu adanya tambahan personil.

b. Bidang Pelayanan Publik

1) Layanan di OPD Kecamatan Nguter kurang maksimal, hal ini disebabkan keterbatasan dan kemampuan individu tenaga (SDM).
2) Waktu pelayanan di OPD Kecamatan Nguter dinilai masih kurang maksimal, hal ini disebabkan ketrbatasan kemampuan sumberdaya manusia dalam memberikan pelayanan.

c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1) Belum optimalnya peran serta dan swadaya masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan wilayah.
2) Kurangnya personil pengelolaan pemberdayaan masyarakat dan pengelola partisipasi masyarakat, sehingga untuk meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat perlu adanya tambahan personil dan tenaga operasional.
3) Kurangnya pemerataan pembangunan wilayah Desa.

d. Bidang Kesejahteraan Sosial

1) Belum terwujudnya sinkronisasi data sebagai dasar pengambilan kebijakan terkait dengan bantuan sosial.
2) Kurangnya personil pengelola kesejahteraan sosial, sehingga untuk meningkatkan kinerja pelayanan kesejahteraan sosial perlu adanya tambahan personil pengelola kesejahteraan sosial.

e. Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum

1) Kurangnya pemahaman warga masyarakat tentang peraturan perundangan dan hukum.
2) Peran serta warga terhadap penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum belum optimal.
3) Kurangnya personil pengelola ketentraman dan ketertiban sehingga untuk meningkatkan kinerja

pelayanan masyarakat perlu adanya tambahan personil dan tenaga operasional.

f. Bidang Pemerintahan

1) Belum optimalnya kinerja aparatur Pemerintahan Desa.
2) Kurangnya personil pengelolaan data pemerintahan umum, pengelolaan data Pemerintahan Desa, pengelola data kependudukan dan pertanahan sehingga untuk meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat perlu adanya tambahan personil dan tenaga operasional

D. Review Terhadap Rancangan Awal OPD

Adapun Review rancangan awal Renja Kecamatan Nguter Tahun 2024 sebagaimana yang tertuang dalam rencana kegiatan 1 (satu) tahun yang menjadi acuan dalam menerapkan program/ kegiatan yang merupakan kebijakan dalam pengunaan anggaran dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.5
Review Terhadap Rancangan Awal Renja
Kecamatan Nguter
Tahun 2024

RANCANGAN AWAL RKPD/ RENJA							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							Catatan Penting
Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			**Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Kecamatan Nguter**	**100%**	**20.000.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			**Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Kecamatan Nguter**	**100%**	**20.000.000**	
	Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan		***Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan***	***Kecamatan Nguter***	***100%***	***20.000.000***		***Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan***		***Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan***	***Kecamatan Nguter***	***100%***	***20.000.000***	
		Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Nguter	1 Laporan	10.000.000			Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Nguter	1 Laporan	10.000.000	
		Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Nguter	2 Laporan	10.000.000			Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Nguter	2 Laporan	10.000.000	

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			**Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Kecamatan Nguter**	**100%**	**119.850.000**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Kecamatan Nguter**	**100%**	**118.500.000**	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		**Cakupan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	***Kecamatan Nguter***	***100%***	***25.000.000***		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**		**Cakupan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	***Kecamatan Nguter***	***100%***	***25.000.000***	
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Nguter	16 Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000			Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Nguter	16 Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000	
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Nguter	2 Laporan	15.000.000			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Nguter	3 Laporan	15.000.000	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		***Cakupan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan***	***Kecamatan Nguter***	***100%***	***94.850.000***		***Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan***		***Cakupan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan***	***Kecamatan Nguter***	***100%***	***94.850.000***	
		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kecamatan Nguter	1 Lembaga Kemasyarakatan	84.850.000			Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kecamatan Nguter	1 Lembaga Kemasyarakatan	84.850.000	
		Peningkatan Kapasitas Lembaga kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kecamatan Nguter	1 Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000			Peningkatan Kapasitas Lembaga kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kecamatan Nguter	1 Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000	
		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Nguter	1 Laporan	5.000.000			Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Nguter	0	0	Menyesuiakan kebutuhan dan kesediaan anggaran

PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			**Persentase Capaian Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Kecamatan Nguter**	**100%**	**30.000.000**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			**Persentase Capaian Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Kecamatan Nguter**	**100%**	**30.000.000**	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		***Cakupan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum***	***Kecamatan Nguter***	***100%***	***20.000.000***		***Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum***		***Cakupan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum***	***Kecamatan Nguter***	***100%***	***20.000.000***	
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Nguter	2 laporan	10.000.000			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Nguter	2 laporan	10.000.000	
		Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kecamatan Nguter	4 laporan	10.000.000			Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kecamatan Nguter	4 laporan	10.000.000	
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		**Cakupan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	***Kecamatan Nguter***	***100%***	***10.000.000***		***Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah***		**Cakupan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	***Kecamatan Nguter***	***100%***	***10.000.000***	
		Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kecamatan Nguter	2 laporan	10.000.000			Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kecamatan Nguter	2 laporan	10.000.000	
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			**Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**Kecamatan Nguter**	**100%**	**316.000.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**			**Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**Kecamatan Nguter**	**100%**	**316.000.000**	

	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		***Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah***	***Kecamatan Nguter***	***100%***	***316.000.000***		***Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah***		***Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah***	***Kecamatan Nguter***	***100%***	***316.000.000***	
		Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kecamatan Nguter	80 org	150.000.000			Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kecamatan Nguter	80 org	150.000.000	
		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kecamatan Nguter	12 dokumen	166.000.000			Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kecamatan Nguter	12 dokumen	166.000.000	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			**Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Kecamatan Nguter**	100%	55.000.000	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**			**Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Kecamatan Nguter**	100%	55.000.000	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		***Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa***	***Kecamatan Nguter***	*100%*	***55.500.000***		***Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa***		***Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa***	***Kecamatan Nguter***	*100%*	***55.500.000***	
		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan Nguter	2 Dokumen	10.000.000			Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan Nguter	2 Dokumen	10.000.000	

		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kecamatan Nguter	2 Dokumen	10.000.000			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kecamatan Nguter	2 Dokumen	10.000.000	
		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kecamatan Nguter	4 Dokumen	5.000.000			Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kecamatan Nguter	0	0	Menyesuaikan kebutuhan dan kesediaan anggaran
		Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kecamatan Nguter	5 Dokumen	5.000.000			Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kecamatan Nguter	5 Dokumen	5.000.000	
		Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kecamatan Nguter	2 Dokumen	10.000.000			Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kecamatan Nguter	2 Dokumen	10.000.000	
		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Nguter	1 Dokumen	5.000.000			Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Nguter	0	0	Menyesuaikan kebutuhan dan kesediaan anggaran
		Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Kecamatan Nguter	1 Dokumen	20.000.000			Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Kecamatan Nguter	1 Dokumen	20.000.000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA			**Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kecamatan Nguter**	**100%**	**3.119.566.040**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kecamatan Nguter**	**100%**	**3.119.566.040**	

	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		***Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	***Kecamatan Nguter***	100%	28.000.000		***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***		***Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	***Kecamatan Nguter***	100%	28.000.000	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Nguter	1 Dokumen	10.000.000			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Nguter	1 Dokumen	10.000.000	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Nguter	1 Dokumen	3.000.000			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Nguter	1 Dokumen	3.000.000	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kecamatan Nguter	1 Dokumen	3.000.000			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kecamatan Nguter	1 Dokumen	3.000.000	
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kecamatan Nguter	1 Dokumen	3.000.000			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kecamatan Nguter	1 Dokumen	3.000.000	
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kecamatan Nguter	1 Dokumen	3.000.000			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kecamatan Nguter	1 Dokumen	3.000.000	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Nguter	12 Laporan	3.000.000			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Nguter	12 Laporan	3.000.000	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Nguter	1 laporan	3.000.000			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Nguter	1 laporan	3.000.000	

	Administrasin Keuangan Perangkat Daerah		***Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	***Kecamatan Nguter***	**100%**	**2.158.696.000**		***Administrasin Keuangan Perangkat Daerah***		***Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	***Kecamatan Nguter***	**100%**	**2.158.696.000**	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Nguter	16 Orang/bulan	2.043.346.000			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Nguter	16 Orang/bulan	2.043.346.000	
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kecamatan Nguter	12 Dokumen	103.350.000			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kecamatan Nguter	12 Dokumen	103.350.000	
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kecamatan Nguter	1 Dokumen	3.000.000			Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kecamatan Nguter	1 Dokumen	3.000.000	
		Koorodinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Nguter	1 Laporan	2.400.000			Koorodinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Nguter	1 Laporan	2.400.000	
		Koorodinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kecamatan Nguter	20 Laporan	3.600.000			Koorodinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kecamatan Nguter	20 Laporan	3.600.000	
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kecamatan Nguter	2 Dokumen	3.000.000			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kecamatan Nguter	2 Dokumen	3.000.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		***Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***	***Kecamatan Nguter***	***100%***	***34.000.000***		***Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***		***Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***	***Kecamatan Nguter***	***100%***	***34.000.000***	
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kecamatan Nguter	24 Paket	8.100.000			Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kecamatan Nguter	0	0	Menyesuiakan kebutuhan dan kesediaan

														anggaran
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kecamatan Nguter	40 Dokumen	6.000.000			Monitoring , evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kecamatan Nguter	40 Dokumen	6.000.000	
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kecamatan Nguter	25 Orang	23.000.000			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kecamatan Nguter	25 Orang	23.000.000	
		Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan Nguter	25 Orang	5.000.000			Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan Nguter	24 Orang	5.000.000	
	Administrasin Umum Perangkat Daerah		**Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	***Kecamatan Nguter***	**100%**	**280.565.000**		***Administrasin Umum Perangkat Daerah***		**Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	***Kecamatan Nguter***	**100%**	**280.565.000**	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Nguter	12 Paket	6.000.000			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Nguter	12 Paket	6.000.000	
		Penyediaan Peralatan Rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kecamatan Nguter	15 Paket	24.200.000			Penyediaan Peralatan Rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kecamatan Nguter	15 Paket	24.200.000	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kecamatan Nguter	4 Paket	185.365..000			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kecamatan Nguter	4 Paket	185.365..000	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kecamatan Nguter	12 Paket	15.000.000			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kecamatan Nguter	12 Paket	15.000.000	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kecamatan Nguter	3 Dokumen	5.000.000			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kecamatan Nguter	3 Dokumen	5.000.000	

		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Nguter	235 Laporan	45.000.000			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Nguter	235 Laporan	45.000.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		**Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	***Kecamatan Nguter***	**100%**	**64.895.000**		***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***		**Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	***Kecamatan Nguter***	**100%**	**64.895.000**	
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kecamatan Nguter	3 Unit	13.750.000			Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kecamatan Nguter	3 Unit	13.750.000	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kecamatan Nguter	10 Unit	51.145.000			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kecamatan Nguter	10 Unit	51.145.000	
	Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		***Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Kecamatan Nguter***	**100%**	**273.360.000**		***Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***		***Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Kecamatan Nguter***	**100%**	**273.360.000**	
		Penyedia jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Nguter	12 laporan	15.000.000			Penyedia jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Nguter	12 laporan	15.000.000	
		Penyedia jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kecamatan Nguter	12 laporan	70.300.000			Penyedia jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kecamatan Nguter	12 laporan	70.300.000	
		Penyedia jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kecamatan Nguter	12 laporan	188.060.000			Penyedia jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kecamatan Nguter	12 laporan	188.060.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		***Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Kecamatan Nguter***	***100%***	***280.050.000***		***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***		***Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Kecamatan Nguter***	***100%***	***280.050.000***	
		Penyedia jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kecamatan Nguter	11 Unit	60.550.000			Penyedia jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kecamatan Nguter	11 Unit	60.550.000	

		Penyedia jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak dan Perizinan Kendnaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kecamatan Nguter	1 Unit	10.000.000			Penyedia jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak dan Perizinan Kendnaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kecamatan Nguter	1 Unit	10.000.000	
		Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Kecamatan Nguter	40 Unit	6.000.000			Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Kecamatan Nguter	40 Unit	6.000.000	
		Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kecamatan Nguter	27 Unit	13.500.000			Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kecamatan Nguter	27 Unit	13.500.000	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kecamatan Nguter	1 Unit	40.000.000			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kecamatan Nguter	1 Unit	40.000.000	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Kecamatan Nguter	2 Unit	150.000.000			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Kecamatan Nguter	2 Unit	150.000.000	
JUMLAH						**3.683.516.040**			**JUMLAH**				**3.660.416.040**	

1)

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

A. Telaahan Terhadap Kebijakan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo

Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan yang ada di Kabupaten Sukoharjo, agar lebih terarah dan berhasil guna serta berdaya guna, maka pemerintah bersama-sama masyarakat Kabupaten Sukoharjo telah menetapkan visi, misi dan strategi dalam mencapai tujuannya yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 - 2026.

1. VISI

Visi pembangunan Kabupaten Sukoharjo tahun 2021-2026 merupakan implementasi dari visi Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo periode tahun 2021-2026 yaitu:

“Mewujudkan masyarakat Sukoharjo Yang Lebih Makmur”

Visi pembangunan daerah Kabupaten Sukoharjo tahun 2021-2026 merupakan keberlanjutan dari cita-cita pembangunan Kabupaten Sukoharjo tahun 2016-2020.

Mengandung arti bahwa dalam lima tahun ke depan masyarakat Kabupaten Sukoharjo akan tercipta kondisi sejahtera, terpenuhi seluruh kebutuhan hidupnya baik sosial maupun ekonomi, secara lahir maupun batin. MAKMUR juga merupakan motto atau slogan Kabupaten Sukoharjo yaitu **Maju, Aman, Konstitusional**, **Mantap, Unggul, dan Rap**i.

MAJU

Maju mempunyai pengertian bergerak kedepan menjadi lebih baik, tidak berhenti, tidak terlambat, mencapai tingkat peradaban yang lebih tinggi.Sebagai tugas panggilan dalam hidup. Dengan maju kita ingin tumbuh dan berkembang, dan selalu berpikr dan berusaha keras kearah peningkatan menjadi lebih baik.

AMAN

Keamanan merupakan salah satu unsur/syarat mutlak untuk dapat terlaksananya pembangunan.Tanpa stabilitas keamanan yang terpelihara secara mantap dan berkesinambungan, tidak mungkin kegiatan pembangunan dapat terlaksana dengan lancar.

KONSTITUSIONAL

Penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, maupun kemasyarakatan harus dilandasi hukum atau dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum.

MANTAP

Warga masyarakat dan segenap penyelenggara pemerintahan optimis dalam membangun Sukoharjo.

UNGGUL

Unggul mempunyai arti semangat berprestasi untuk selalu berusaha mencapai yang terbaik.

RAPI

Rapi mengandung pengertian apik, baik, bersih, teratur, tertib, beres.

2. MISI

Dalam rangka upaya menuju pencapaian visi pembangunan daerah Kabupaten Sukoharjo tahun 2021-2026, ditetapkan misi pembangunan daerah yaitu:

1. **Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Percepatan Reformasi Birokrasi**

   Misi kesatu ini bertujuan untuk semakin mempercepat implementasi reformasi birokrasi secara optimal, yang pada periode sebelumnya telah terwujud dalam membaiknya tata kelola pemerintahan Kabupaten Sukoharjo.

   Reformasi birokrasi yang diharapkan kedepan adalah pada tiga dimensi utama yaitu pelayanan publik yang semakin dinamis, efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan, kapasitas kelembagaan, serta manajemen sumber daya manusia aparatur yang

semakin baik.Pelayanan publik yang dinamis diwujudkan dengan membangun open government dan pemerintahan yang responsif. Open government dilakukan dengan perkuatan keterbukaan informasi publik, transparansi, partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta meningkatkan komunikasi dan serapan aspirasi publik.

Sedangkan pemerintahan yang responsif tercermin dalam respon pemerintah kabupaten dalam menghadapi aduan dan persoalan riil masyarakat, dengan cepat dan tepat, baik dalam bentuk kebijakan maupun kegiatan.Pelayanan publik yang dinamis, terbuka, dan responsif diikat dalam satu tagline pelayanan yang mudah, murah, cepat, serta didukung inovasi dan teknologi informasi.

Efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan tergambarkan dalam proses perencanaan, penganggaran, serta evaluasi pembangunan yang akuntabel. Manajemen pembangunan Kabupaten Sukoharjo kedepan tidak hanya fokus pada kerja tetapi kinerja, dan berorientasi pada hasil (outcome). Untuk itu perlu juga dilakukan pengawasan dalam prosesnya, sejak dimulainya proses perencanaan, implementasi hingga evaluasi.

Agar dapat melaksanakan manajemen pemerintahan yang baik dan bersih maka dibutuhkan kelembagaan/organisasi yang tepat dan didukung dengan penataan sistem manajemen sumberdaya manusia aparatur yang baik.Manajemen sumber daya manusia aparatur yang baik terejawantahkan dalam bentuk integritas aparatur yang dibangun melalui kompetensi dan etika menuju integritas pribadi dan institusi, mendorong birokrasi yang inovatif, dan dijamin dalam quality assurance aparatur.

2. **Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas**

Misi kedua mengarah pada kualitas dan daya saing sumberdaya manusia Sukoharjo, agar semakin sehat, pintar, berbudaya, dan lebih mencintai lingkungan.Era globalisasi yang semakin terbuka menuntut kualitas sumberdaya manusia yang mampu bersaing secara kompetitif dalam kompetensi dan kualifikasi. Bonus demografi yang saat ini telah dialami oleh Sukoharjo dapat dijadikan sebagai peluang sekaligus tantangan, bagaimana kedepan modal sosial ini akan menempatkan Sukoharjo sebagai salah satu daerah dengan sumberdaya manusia yang mampu bersaing. Sehingga diharapkan, dapat memberikan dampak pertumbuhan ekonomi yang semakin baik, dan menciptakan masyarakat Sukoharjo yang semakin sejahtera.

Tidak hanya tentang kualitas dan daya saing sumberdaya manusia yang diharapkan, namun juga bagaimana membentuk karakter masyarakat Sukoharjo yang semakin berbudaya. Di tengah arus keterbukaan informasi dunia yang nyata kemudian bagaimana masyarakat Sukoharjo tetap kuat menjaga etika dan norma serta nilai budaya asli Sukoharjo, serta menjaga kearifan lokal sejak dini.

3. **Memperkuat Perekonomian Rakyat Yang Berdaya Saing Tinggi**

Misi ketiga ini mempunyai tujuan mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan insklusif.Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang penting dalam melakukan pembangunan ekonomi yang terjadi pada suatu negara ataupun daerah.Pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan distribusi pendapatan yang merata sangat dibutuhkan dalam meningkatkan

kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah diukur dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan laju pertumbuhannya atas dasar harga konstan. Pertumbuhan ekonomi yang cepat akan menimbulkan ketimpangan distribusi pendapatan. Hal ini disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang bersifat sentralisasi. Pada tahun 1999 pemerintah mengubah kebijakan sentralisasi menjadi desentralisasi dengan memberlakukan Otonomi Daerah. Hal tersebut memberikan harapan dalam upaya mengurangi tingkat kemiskinan dan ketimpangan antar daerah.

Misi ini adalah untuk mengarahkan kebijakan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam rangka menurunkan jumlah penduduk miskin, yang didukung oleh perekonomian daerah yang stabil, berkualitas, inklusif, dan menyebar. Program pengentasan kemiskinan difokuskan kepada kelompok sasaran utama, seperti petani pelaku UKM dan pekerja dan kelompok rentan lainnya. Program pengentasan kemisikinan tersebut perlu didukung oleh pertumbuhan ekonomi yang tersebar, inklusif, dan berkualitas, yakni pertumbuhan ekonomi yang menyebar di seluruh wilayah Sukoharjo, memperhitungkan kelestarian lingkungan dan keberlangsungan ketersediaan sumber daya, melibatkan seluruh kelompok masyarakat dengan mengutamakan peran dan kontribusi kelompok masyarakat yang kurang beruntung, dan menghapus praktek ekonomi biaya tinggi.

4. Memperkuat Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan

Misi keempat mengarah kepada pembangunan infrastruktur akan terus dilaksanakan untuk

mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar, yang akan dilaksanakan dengan penguatan konektivitas, penyediaan akses perumahan, permukiman, air minum dan sanitasi yang layak, telekomunikasi dan transportasi yang aman dan memadai.

Pembangunan berwawasan lingkungan hidup dilakukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan meningkatkan kualitas hidup manusia.Untuk menjaga kelestarian lingkungan agar kualitas lingkungan hiudp tetap terjaga, pemanfaatan sumber daya alam harus dilakukan secara bijaksana, adil, efisien, dan bertanggungjawab serta lingkungan yang tangguh bencana.

5. **Meningkatkan Kualitas Kehidupan Sosial dan Keagamaan**

Misi ini menggambarkan sebuah kondisi yang ingin diciptakan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera, tercermin dari rasa aman dan nyaman yang dirasakan dalam kehidupan masyarakat.Kondisi yang tercipta merupakan manifestasi implementasi nilai-nilai religius dalam kehidupan masyarakat. Membangun masyarakat Sukoharjo yang religius, toleran, dan guyup ini adalah dengan menciptakan kondisi obyektif yang memungkinkan interaksi antar umat beragama untuk saling menghormati dan menghargai satu sama lain, mendorong keberagaman, kebhinekaan, dan toleransi dalam kerangka kesatuan.

Upaya yang dilakukan antara lain dengan menguatkan pemahaman keberagaman dan kebhinekaan sejak usia dini, mengembangkan ruang-ruang publik untuk membangun komunikasi antar masyarakat melalui kegiatan seni dan rekreasi, serta mendorong kearifan lokal dalam bentuk gerakan-

gerakan masyarakat termasuk gerakan gotong royong. Dalam misi ini terkandung tujuan untuk menciptakan kehidupan masyarakat Sukoharjo yang aman dan nyaman, tanpa ada konflik sosial maupun agama, bahkan konflik SARA.

Misi yang dapat dijabarkan oleh Perangkat Daerah Kecamatan adalah Misi kesatu, yaitu "**Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Percepatan Reformasi Birokrasi"**

Tabel 2.6
Telaah Visi, Misi, Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

VISI : MEWUJUDKAN MASYARAKAT SUKOHARJO YANG LEBIH MAKMUR.

MISI 1	PROGRAM	TUSI OPD	PERMASALAHAN PELAYANAN OPD	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT
Mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik melalui percepatan reformasi birokrasi	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan publik	Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan	Masih ada sebagian jenis pelayanan administrasi kependudukan yang belum bisa dilayani ditingkat Kecamatan	Kapasitas dan kualitas aparatur serta sarana prasarana cukup memadai	Regulasi dan kebijakan pelayanan administrasi kependudukan sampai di tingkat Kecamatan masih lemah
	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kalurahan	Pengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat	Masih kurangnya kesadaran dan peran serta masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan wilayah Perlu peningkatan kualitas sarana dan prasarana di Desa khususnya jaringan Internet Desa	Mekanisme perencannaan yang cukup baik Sumber pembiayaan cukup tersedia	Kesadaran warga masih rendah Kebijakan di tingkat desa masih rendah
Mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik melalui percepatan reformasi birokrasi	Koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum	Pengkoordinasian Upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Pemahaman warga masyarakat tentang peraturan perundangan belum optimal.	Anggaran untuk kegiatan sosialisasi cukup memadai.	Kesadaran warga masih kurang
		Pengkoordinasian penerapan dan penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	Masih perlu peningkatan peran serta warga terhadap penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Peran media social cukup efektif.	Sosialisasi peraturan perundangan masih masih kurang

	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Belum terwujudnya sinkronisasi data sebagai dasar pengambilan kebijakan terkait dengan bantuan sosial. Perlu peningkatan upaya strategis dalam rangka penanganan pandemi covid-19 terutama dari aspek ekomoni, kesehatan dan sosial	Dukungan SDM dan Sarana prasarana Dukungan SDM , sarana prasarana dan pembiayaan	Kebijakan antar unit kerja masih lemah Kebijakan di semua lini pemerintahan masih kurang
	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Pembinaan dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa	Belum optimalnya kinerja aparatur Pemerintahan Desa	Peningkatan kesejahteraan aparatur pemerintah desa.	Paradigma pola kerja tradisional.
	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan	Perlu peningkatan sinergitas antar unit kerja dalam pelayanan kepada warga masyarakat	Kualitas SDM dan sarana prasarana.	Aspek regulasi masih lemah

B. **Tujuan dan Sasaran**

1. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran/implementasi dari pernyataan visi dan misi Bupati Sukoharjo terpilih. Tujuan adalah sesuatu yang ingin dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan yang akan dicapai oleh Perangkat Daerah Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo adalah sebagai berikut :

“Terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel”

2. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan. Sasaran yang akan diraih Perangkat Daerah Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo adalah :

a. Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat yang di jabarkan dalam beberapa Program antara lain :
    1) Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
    2) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
    3) Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
    4) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
    5) Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
b. Meningkatnya kualitas aparatur dan pelayanan publik yang di jabarkan dalam Program antara lain :
    1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Nguter Tahun 2024 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan Kecamatan Nguter Tahun 2024 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 4.1

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Nguter

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Nguter

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
										Target Capaian Kinerja					Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Tolok Ukur	Target	
					Kecamatan Nguter								3.660.416.040,00				4.250.875.000,00
7					UNSUR KEWILAYAHAN								3.660.416.040,00				4.250.875.000,00
7	01				KECAMATAN								3.660.416.040,00				4.250.875.000,00
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								3.119.566.040,00				3.356.875.000,00
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								28.000.000,00				34.000.000,00
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah												
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Sukoharjo, Nguter, Semua Kel/Desa	100 %	1 Dokumen	100 %	10.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	10.000.000,00
7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD												
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Sukoharjo, Nguter, Semua Kel/Desa	100 %	1 Dokumen	100 %	3.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	4.000.000,00
7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD												
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Sukoharjo, Nguter, Semua Kel/Desa	100 %	1 Dokumen	100 %	3.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	4.000.000,00
7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD												
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Sukoharjo, Nguter, Semua Kel/Desa	100 %	1 Dokumen	100 %	3.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	4.000.000,00
7	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD												
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Sukoharjo, Nguter, Semua Kel/Desa	100 %	1 Dokumen	100 %	3.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	4.000.000,00
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD												

						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Sukoharjo, Nguter, Semua Kel/Desa	100 %	12 Laporan	100 %	3.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	4.000.000,00
7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Sukoharjo, Nguter, Semua Kel/Desa	100 %	1 Laporan	100 %	3.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	4.000.000,00
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								2.158.696.000,00				2.330.000.000,00
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN												
						-	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Sukoharjo, Nguter, Semua Kel/Desa	-	16 Orang/bulan	100 %	2.043.346.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16 Orang/bulan	2.200.000.000,00
7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD												
						-	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Sukoharjo, Nguter, Semua Kel/Desa	-	12 Dokumen	100 %	103.350.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	115.000.000,00
7	01	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD												
						-	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Sukoharjo, Nguter, Semua Kel/Desa	-	1 Dokumen	100 %	3.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	3.000.000,00
7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD												
						-	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Sukoharjo, Nguter, Semua Kel/Desa	-	1 Laporan	100 %	2.400.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	3.000.000,00
7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD												
						-	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Sukoharjo, Nguter, Semua Kel/Desa	-	20 Laporan	100 %	3.600.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	20 Laporan	6.000.000,00
7	01	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran												

						-	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Sukoharjo, Nguter, Semua Kel/Desa	-	2 Dokumen	100 %	3.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	3.000.000,00
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								34.000.000,00				76.875.000,00
7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya												
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Sukoharjo, Nguter, Semua Kel/Desa	100 %	24 Paket	100 %	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	24 Paket	16.875.000,00
7	01	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian												
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Sukoharjo, Nguter, Semua Kel/Desa	100 %	40 Dokumen	100 %	6.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	40 Dokumen	10.000.000,00
7	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi												
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Sukoharjo, Nguter, Semua Kel/Desa	100 %	25 Orang	100 %	23.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	25 Orang	25.000.000,00
7	01	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan												
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Sukoharjo, Nguter, Semua Kel/Desa	100 %	25 Orang	100 %	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	25 Orang	25.000.000,00
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								280.565.000,00				231.000.000,00
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor												
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Sukoharjo, Nguter, Semua Kel/Desa	100 %	12 Paket	100 %	6.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	6.000.000,00
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor												
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Sukoharjo, Nguter, Semua Kel/Desa	100 %	2 Paket	100 %	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	20.000.000,00
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga												
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Persentase cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Sukoharjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sukoharjo, Nguter, Semua Kel/Desa	100 %	15 Paket	100 %	24.200.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	15 Paket	20.000.000,00
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor												

						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Sukoharjo, Nguter, Semua Kel/Desa	100 %	4 Paket	100 %	185.365.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	120.000.000,00
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan												
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Sukoharjo, Nguter, Semua Kel/Desa	100 %	12 Paket	100 %	15.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	15.000.000,00
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan												
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Persentase cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Sukoharjo, Nguter, Semua Kel/Desa	100 %	3 Dokumen	100 %	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	5.000.000,00
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD												
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Sukoharjo, Nguter, Semua Kel/Desa	100 %	235 Laporan	100 %	45.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	235 Laporan	45.000.000,00
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								64.895.000,00				205.000.000,00
7	01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan												
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Sukoharjo, Nguter, Semua Kel/Desa	100 %	5 Unit	100 %	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	5 Unit	100.000.000,00
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel												
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Sukoharjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	3 Unit	100 %	13.750.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	25.000.000,00
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya												
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Sukoharjo, Nguter, Semua Kel/Desa	100 %	10 Unit	100 %	51.145.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	50.000.000,00
7	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya												
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Sukoharjo, Nguter, Semua Kel/Desa	100 %	4 Unit	100 %	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	30.000.000,00
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								273.360.040,00				270.000.000,00
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat												

						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sukoharjo, Nguter, Semua Kel/Desa	100 %	12 Laporan	100 %	15.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	15.000.000,00
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik												
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sukoharjo, Nguter, Semua Kel/Desa	100 %	12 Laporan	100 %	70.300.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	75.000.000,00
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor												
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sukoharjo, Nguter, Semua Kel/Desa	100 %	12 Laporan	100 %	188.060.040,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	180.000.000,00
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								280.050.000,00				210.000.000,00
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan												
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sukoharjo, Nguter, Semua Kel/Desa	100 %	11 Unit	100 %	60.550.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	11 Unit	0,00
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan												
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sukoharjo, Nguter, Semua Kel/Desa	100 %	1 Unit	100 %	10.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	10.000.000,00
7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel												
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sukoharjo, Nguter, Semua Kel/Desa	100 %	40 Unit	100 %	6.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Mebel yang Dipelihara	40 Unit	10.000.000,00
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya												
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sukoharjo, Nguter, Semua Kel/Desa	100 %	27 Unit	100 %	13.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	27 Unit	20.000.000,00
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya												
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sukoharjo, Nguter, Semua Kel/Desa	100 %	1 Unit	100 %	40.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	90.000.000,00
7	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya												

						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sukoharjo, Nguter, Semua Kel/Desa	100 %	2 Unit	100 %	150.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	80.000.000,00
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								20.000.000,00				44.000.000,00
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								0,00				22.000.000,00
7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait												
						Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Cakupan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kab. Sukoharjo, Nguter, Semua Kel/Desa	100 %	1 Laporan	100 %	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	12.000.000,00
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan												
						Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Cakupan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kab. Sukoharjo, Nguter, Semua Kel/Desa	100 %	2 Dokumen	100 %	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	10.000.000,00
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan								20.000.000,00				22.000.000,00
7	01	02	2.02	0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan												
						Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di	Kab. Sukoharjo, Nguter, Semua Kel/Desa	100 %	1 Laporan	100 %	10.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	12.000.000,00
7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan												
						Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di	Kab. Sukoharjo, Nguter, Semua Kel/Desa	100 %	2 Laporan	100 %	10.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	10.000.000,00
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								119.850.000,00				170.000.000,00
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa								25.000.000,00				35.000.000,00
7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa												
						Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Cakupan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kab. Sukoharjo, Nguter, Semua Kel/Desa	100 %	16 Lembaga Kemasyarakatan	100 %	10.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	16 Lembaga Kemasyarakatan	15.000.000,00
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan												

						Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Cakupan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kab. Sukoharjo, Nguter, Semua Kel/Desa	100 %	2 Laporan	100 %	15.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	20.000.000,00
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan								94.850.000,00				135.000.000,00
7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan												
						Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Cakupan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kab. Sukoharjo, Nguter, Semua Kel/Desa	100 %	1 Lembaga Kemasyarakatan	100 %	84.850.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	1 Lembaga Kemasyarakatan	90.000.000,00
7	01	03	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan												
						Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Cakupan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kab. Sukoharjo, Nguter, Semua Kel/Desa	100 %	1 Lembaga Kemasyarakatan	100 %	10.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Lembaga Kemasyarakatan	15.000.000,00
7	01	03	2.03	0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat												
						Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Cakupan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kab. Sukoharjo, Nguter, Semua Kel/Desa	100 %	1 Laporan	100 %	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan	30.000.000,00
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								30.000.000,00				210.000.000,00
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum								20.000.000,00				200.000.000,00
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan												
						-	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Cakupan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kab. Sukoharjo, Nguter, Semua Kel/Desa	-	2 Laporan	100 %	10.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	20.000.000,00
7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat												
						-	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Cakupan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kab. Sukoharjo, Nguter, Semua Kel/Desa	-	4 Laporan	100 %	10.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	4 Laporan	180.000.000,00
7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah								10.000.000,00				10.000.000,00
7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian												

						Persentase capaian ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Cakupan Koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Kab. Sukoharjo, Nguter, Semua Kel/Desa	100 %	2 Laporan	100 %	10.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	2 Laporan	10.000.000,00
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM								316.000.000,00				326.000.000,00
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah								316.000.000,00				326.000.000,00
7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar												
						Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kab. Sukoharjo, Nguter, Semua Kel/Desa	100 %	80 Orang	100 %	150.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	80 Orang	150.000.000,00
7	01	05	2.01	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional												
						Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kab. Sukoharjo, Nguter, Semua Kel/Desa	100 %	100 Orang	100 %	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	100 Orang	10.000.000,00
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan												
						Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kab. Sukoharjo, Nguter, Semua Kel/Desa	100 %	12 Dokumen	100 %	166.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	166.000.000,00
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA								55.000.000,00				144.000.000,00
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa								55.000.000,00				144.000.000,00
7	01	06	2.01	0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa												

						Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kab. Sukoharjo, Nguter, Semua Kel/Desa	100 %	2 Dokumen	100 %	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	2 Dokumen	10.000.000,00
7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa											
						Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kab. Sukoharjo, Nguter, Semua Kel/Desa	100 %	2 Dokumen	100 %	10.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	2 Dokumen	15.000.000,00
7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa											
						Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kab. Sukoharjo, Nguter, Semua Kel/Desa	100 %	2 Dokumen	100 %	10.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	2 Dokumen	20.000.000,00
7	01	06	2.01	0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa											
						Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kab. Sukoharjo, Nguter, Semua Kel/Desa	100 %	2 Dokumen	100 %	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	2 Dokumen	10.000.000,00
7	01	06	2.01	0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa											
						Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kab. Sukoharjo, Nguter, Semua Kel/Desa	100 %	5 Dokumen	100 %	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	5 Dokumen	10.000.000,00
7	01	06	2.01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa											
						Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kab. Sukoharjo, Nguter, Semua Kel/Desa	100 %	2 Dokumen	100 %	10.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	2 Dokumen	10.000.000,00
7	01	06	2.01	0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan											
						Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kab. Sukoharjo, Nguter, Semua Kel/Desa	100 %	1 Dokumen	100 %	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	1 Dokumen	5.000.000,00
7	01	06	2.01	0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif											

						Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kab. Sukoharjo, Nguter, Semua Kel/Desa	100 %	1 Dokumen	100 %	20.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	1 Dokumen	20.000.000,00
7	01	06	2.01	0014	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga											
						Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kab. Sukoharjo, Nguter, Semua Kel/Desa	100 %	1 Dokumen	100 %	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	1 Dokumen	10.000.000,00
7	01	06	2.01	0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya											
						Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kab. Sukoharjo, Nguter, Semua Kel/Desa	100 %	2 Laporan	100 %	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	2 Laporan	24.000.000,00
7	01	06	2.01	0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan											
						Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kab. Sukoharjo, Nguter, Semua Kel/Desa	100 %	2 Laporan	100 %	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	10.000.000,00
												TOTAL	**3.660.416.040,00**			**4.250.875.000,00**

Tabel 4.2

Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Nguter Tahun 2024

NO			PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU PENDANAAN (Rp.)
P	K	sub K		
1			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	20.000.000
	1		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	20.000.000
		1	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	10.000.000
		2	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	10.000.000
2			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	119.850.000
	2		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	25.000.000
		3	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10.000.000
		4	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	15.000.000
	3		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	94.850.000
		5	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	84.850.000
		6	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000
3			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	30.000.000
	4		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	20.000.000
		7	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	10.000.000
		8	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	10.000.000
	5		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	10.000.000
		9	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	10.000.000
4			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	316.000.000
	6		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	316.000.000

		10	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	150.000.000
			Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	166.000.000
5			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	55.000.000
	7		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	55.000.000
		11	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	10.000.000
		12	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	10.000.000
		13	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	-
		14	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	5.000.000
		15	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	10.000.000
			Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	20.000.000
6			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.119.566.040
	8		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	28.000.000
		16	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.000.000
		17	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.000.000
		18	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.000.000
		19	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.000.000
		20	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	3.000.000
		21	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.000.000
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.000.000
	9		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.158.696.000
		22	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.043.346.000
		23	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	103.350.000
		24	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	3.000.000
		25	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.400.000
		26	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3.600.000
		27	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	3.000.000

	10		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	34.000.000
		28	Pendataan dan Pengolahan Administrasi kepegawaian	6.000.000
		29	Pendidikan dan Pelatihan Formal	23.000.000
		30	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	5.000.000
	11		Administrasi Umum Perangkat Daerah	280.565.000
		31	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.000.000
		32	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	24.200.000
		33	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	185.365.000
		34	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	15.000.000
		35	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.000.000
		36	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	45.000.000
	12		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	64.895.000
		37	Pengadaan Mebel	13.750.000
		38	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	51.145.000
	13		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	273.360.040
		39	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.000.000
		40	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	70.300.000
		41	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	188.060.040
	14		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	280.050.000
		42	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	60.550.000
		43	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	10.000.000
		44	Pemeliharaan Mebel	6.000.000
		45	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13.500.000
		46	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	40.000.000
		47	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	150.000.000
JUMLAH				**3.660.416.040**

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Nguter Tahun 2024 merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran, program dan kegiatan Kecamatan Nguter selama 1 (satu) tahun mendatang yang mengacu pada Rencana Straategis (Renstra) Kecamatan Nguter .

Renja SKPD Kecamatan Nguter Tahun 2024 yang telah disusun ini hendaknya dilaksanakan secara konsisten, transparansi, jujur, partisipatif, penuh tanggung jawab dan merupakan pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-SKPD) Kecamatan Nguter .

Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) SKPD Kecamatan Nguter Tahun 2024, Camat Nguter melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penjabaran Renja Kecamatan Nguter Tahun 2024 dalam bentuk Rencana Kerjadan Anggaran Kecamatan setiap Kegiatan dan Sub Kegiatan.

Dengan mengharap keridhoan Alloh SWT, Tuhan Yang Maha Esa, semoga Rencana Kerjayang telah dibuat bersama-sama ini dapat diwujudkan bersama, untuk mencapai tujuan akhir bersama yaitu : **“Mewujudkan Masyarakat Sukoharjo Yang Lebih Makmur”**

Nguter, 10 Agustus 2023

CAMAT NGUTER

KABUPATEN SUKOHARJO

PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO KECAMATAN NGUTER

SUKATMAN, S.Sos., MM.

NIP. 19700614 198903 1 002

SALINAN

BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 35 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024;

b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 273 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan Kepala Daerah setelah Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 192) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 262);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tatacara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 200);
13. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);
14. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 298);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

Renja Perangkat Daerah disusun dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Pasal 3

Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

BAB II

SISTEMATIKA DAN FUNGSI RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 4

Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. bab I : pendahuluan;
b. bab II : hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu;
c. bab III : tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
d. bab IV : rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan
e. bab V : penutup.

Pasal 5

Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah.

BAB II

PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 6

(1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah.
(2) Kepala Perangkat Daerah melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi Renja Perangkat Daerah kepada Bupati melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.

BAB III

PERANGKAT DAERAH PENYUSUN

Pasal 7

(1) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun oleh Perangkat Daerah sebagai berikut:
    a. Sekretariat Daerah;
    b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
    c. Inspektorat Daerah;
    d. Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan;
    e. Dinas Kesehatan;
    f. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang;
    g. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
    h. Satuan Polisi Pamong Praja;
    i. Dinas Sosial;

j. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak;
k. Dinas Pangan;
l. Dinas Lingkungan Hidup;
m. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil;
n. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa;
o. Dinas Perhubungan;
p. Dinas Komunikasi Dan Informatika;
q. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
r. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;
s. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
t. Dinas Pertanian dan Perikanan;
u. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah dan Perdagangan;
v. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
w. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
x. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
y. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
z. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
aa. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
bb. Kecamatan Weru;
cc. Kecamatan Bulu;
dd. Kecamatan Tawangsari;
ee. Kecamatan Sukoharjo;
ff. Kecamatan Nguter;
gg. Kecamatan Bendosari;
hh. Kecamatan Polokarto;
ii. Kecamatan Mojolaban;
jj. Kecamatan Grogol;
kk. Kecamatan Baki;
ll. Kecamatan Gatak; dan
mm. Kecamatan Kartasura.

(2) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf mm tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 10 Agustus 2023

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 10 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd.

WIDODO

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2023 NOMOR 35

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ditandatangani secara elektronik oleh :

TEGUH PRAMONO, SH, MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19710429 199803 1 003

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 35 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN
SUKOHARJO TAHUN 2024

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2024

Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 terdiri atas:

1. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Inspektorat Daerah;
4. Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan;
5. Dinas Kesehatan;
6. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang;
7. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
8. Satuan Polisi Pamong Praja;
9. Dinas Sosial;
10. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak;
11. Dinas Pangan;
12. Dinas Lingkungan Hidup;
13. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil;
14. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa;
15. Dinas Perhubungan;
16. Dinas Komunikasi Dan Informatika;
17. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
18. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;
19. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
20. Dinas Pertanian dan Perikanan;
21. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah dan Perdagangan;
22. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
23. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
24. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
25. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
26. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
27. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
28. Kecamatan Weru;
29. Kecamatan Bulu;

30. Kecamatan Tawangsari;
31. Kecamatan Sukoharjo;
32. Kecamatan Nguter;
33. Kecamatan Bendosari;
34. Kecamatan Polokarto;
35. Kecamatan Mojolaban;
36. Kecamatan Grogol;
37. Kecamatan Baki;
38. Kecamatan Gatak; dan
39. Kecamatan Kartasura.

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
KECAMATAN NGUTER KAB. SUKOHARJO
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		KECAMATAN NGUTER						**3.660.416.040,00**							**4.250.875.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**3.660.416.040,00**							**4.250.875.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**3.660.416.040,00**							**4.250.875.000,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah***	**-**			**100 %**	**3.119.566.040,00**						**-**	**3.356.875.000,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	-			100 %	28.000.000,00			-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 3. Perkuatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa, kondusivitas wilayah, dan peningkatan kapasitas fiskal daerah serta kolaborasi yang inklusif	Semua ASN di Lingkup Kecamatan	-	34.000.000,00	KECAMATAN NGUTER
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Sukoharjo, Nguter, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 3. Perkuatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa, kondusivitas wilayah, dan peningkatan kapasitas fiskal daerah serta kolaborasi yang inklusif	Semua ASN di Lingkup Kecamatan		10.000.000,00	KECAMATAN NGUTER
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Sukoharjo, Nguter, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 3. Perkuatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa, kondusivitas wilayah, dan peningkatan kapasitas fiskal daerah serta kolaborasi yang inklusif	Semua ASN di Lingkup Kecamatan		4.000.000,00	KECAMATAN NGUTER
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Sukoharjo, Nguter, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 3. Perkuatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa, kondusivitas wilayah, dan peningkatan kapasitas fiskal daerah serta kolaborasi yang inklusif	Semua ASN di Lingkup Kecamatan		4.000.000,00	KECAMATAN NGUTER
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Sukoharjo, Nguter, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 3. Perkuatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa, kondusivitas wilayah, dan peningkatan kapasitas fiskal daerah serta kolaborasi yang inklusif	Semua ASN di Lingkup Kecamatan		4.000.000,00	KECAMATAN NGUTER
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Sukoharjo, Nguter, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 3. Perkuatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa, kondusivitas wilayah, dan peningkatan kapasitas fiskal daerah serta kolaborasi yang inklusif	Semua ASN di Lingkup Kecamatan		4.000.000,00	KECAMATAN NGUTER
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Laporan	3.000.000,00	Kab. Sukoharjo, Nguter, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 3. Perkuatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa, kondusivitas wilayah, dan peningkatan kapasitas fiskal daerah serta kolaborasi yang inklusif	Semua ASN di Lingkup Kecamatan		4.000.000,00	KECAMATAN NGUTER
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	3.000.000,00	Kab. Sukoharjo, Nguter, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 3. Perkuatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa, kondusivitas wilayah, dan peningkatan kapasitas fiskal daerah serta kolaborasi yang inklusif	Semua ASN di Lingkup Kecamatan		4.000.000,00	KECAMATAN NGUTER
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	-			100 %	2.158.696.000,00			-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 3. Perkuatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa, kondusivitas wilayah, dan peningkatan kapasitas fiskal daerah serta kolaborasi yang inklusif	Semua ASN di Lingkup Kecamatan	-	2.330.000.000,00	KECAMATAN NGUTER
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				16 Orang/bulan	2.043.346.000,00	Kab. Sukoharjo, Nguter, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 3. Perkuatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa, kondusivitas wilayah, dan peningkatan kapasitas fiskal daerah serta kolaborasi yang inklusif	Semua ASN di Lingkup Kecamatan		2.200.000.000,00	KECAMATAN NGUTER
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	103.350.000,00	Kab. Sukoharjo, Nguter, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 3. Perkuatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa, kondusivitas wilayah, dan peningkatan kapasitas fiskal daerah serta kolaborasi yang inklusif	Semua ASN di Lingkup Kecamatan		115.000.000,00	KECAMATAN NGUTER
	7.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Sukoharjo, Nguter, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 3. Perkuatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa, kondusivitas wilayah, dan peningkatan kapasitas fiskal daerah serta kolaborasi yang inklusif	Semua ASN di Lingkup Kecamatan		3.000.000,00	KECAMATAN NGUTER
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	2.400.000,00	Kab. Sukoharjo, Nguter, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 3. Perkuatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa, kondusivitas wilayah, dan peningkatan kapasitas fiskal daerah serta kolaborasi yang inklusif	Semua ASN di Lingkup Kecamatan		3.000.000,00	KECAMATAN NGUTER
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				20 Laporan	3.600.000,00	Kab. Sukoharjo, Nguter, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 3. Perkuatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa, kondusivitas wilayah, dan peningkatan kapasitas fiskal daerah serta kolaborasi yang inklusif	Semua ASN di Lingkup Kecamatan		6.000.000,00	KECAMATAN NGUTER
	7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				2 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Sukoharjo, Nguter, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 3. Perkuatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa, kondusivitas wilayah, dan peningkatan kapasitas fiskal daerah serta kolaborasi yang inklusif	Semua ASN di Lingkup Kecamatan		3.000.000,00	KECAMATAN NGUTER

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	-			100 %	34.000.000,00			-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 3. Perkuatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa, kondusivitas wilayah, dan peningkatan kapasitas fiskal daerah serta kolaborasi yang inklusif	Semua ASN di Lingkup Kecamatan	-	76.875.000,00	KECAMATAN NGUTER
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				24 Paket	0,00	Kab. Sukoharjo, Nguter, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 3. Perkuatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa, kondusivitas wilayah, dan peningkatan kapasitas fiskal daerah serta kolaborasi yang inklusif	Semua ASN di Lingkup Kecamatan		16.875.000,00	KECAMATAN NGUTER
	7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				40 Dokumen	6.000.000,00	Kab. Sukoharjo, Nguter, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 3. Perkuatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa, kondusivitas wilayah, dan peningkatan kapasitas fiskal daerah serta kolaborasi yang inklusif	Semua ASN di Lingkup Kecamatan		10.000.000,00	KECAMATAN NGUTER
	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				25 Orang	23.000.000,00	Kab. Sukoharjo, Nguter, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 3. Perkuatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa, kondusivitas wilayah, dan peningkatan kapasitas fiskal daerah serta kolaborasi yang inklusif	Semua ASN di Lingkup Kecamatan		25.000.000,00	KECAMATAN NGUTER
	7.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				25 Orang	5.000.000,00	Kab. Sukoharjo, Nguter, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 3. Perkuatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa, kondusivitas wilayah, dan peningkatan kapasitas fiskal daerah serta kolaborasi yang inklusif	Semua ASN di Lingkup Kecamatan		25.000.000,00	KECAMATAN NGUTER
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-			100 %	280.565.000,00			-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 3. Perkuatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa, kondusivitas wilayah, dan peningkatan kapasitas fiskal daerah serta kolaborasi yang inklusif	Semua ASN di Lingkup Kecamatan	-	231.000.000,00	KECAMATAN NGUTER
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	6.000.000,00	Kab. Sukoharjo, Nguter, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 3. Perkuatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa, kondusivitas wilayah, dan peningkatan kapasitas fiskal daerah serta kolaborasi yang inklusif	Semua ASN di Lingkup Kecamatan		6.000.000,00	KECAMATAN NGUTER
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	0,00	Kab. Sukoharjo, Nguter, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 3. Perkuatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa, kondusivitas wilayah, dan peningkatan kapasitas fiskal daerah serta kolaborasi yang inklusif	Semua ASN di Lingkup Kecamatan		20.000.000,00	KECAMATAN NGUTER
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				15 Paket	24.200.000,00	Kab. Sukoharjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sukoharjo, Nguter, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 3. Perkuatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa, kondusivitas wilayah, dan peningkatan kapasitas fiskal daerah serta kolaborasi yang inklusif	Semua ASN di Lingkup Kecamatan		20.000.000,00	KECAMATAN NGUTER
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	185.365.000,00	Kab. Sukoharjo, Nguter, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 3. Perkuatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa, kondusivitas wilayah, dan peningkatan kapasitas fiskal daerah serta kolaborasi yang inklusif	Semua ASN di Lingkup Kecamatan		120.000.000,00	KECAMATAN NGUTER
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	15.000.000,00	Kab. Sukoharjo, Nguter, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 3. Perkuatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa, kondusivitas wilayah, dan peningkatan kapasitas fiskal daerah serta kolaborasi yang inklusif	Semua ASN di Lingkup Kecamatan		15.000.000,00	KECAMATAN NGUTER
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				3 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Sukoharjo, Nguter, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 3. Perkuatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa, kondusivitas wilayah, dan peningkatan kapasitas fiskal daerah serta kolaborasi yang inklusif	Semua ASN di Lingkup Kecamatan		5.000.000,00	KECAMATAN NGUTER
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				235 Laporan	45.000.000,00	Kab. Sukoharjo, Nguter, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 3. Perkuatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa, kondusivitas wilayah, dan peningkatan kapasitas fiskal daerah serta kolaborasi yang inklusif	Semua ASN di Lingkup Kecamatan		45.000.000,00	KECAMATAN NGUTER
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	-			100 %	64.895.000,00			-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 3. Perkuatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa, kondusivitas wilayah, dan peningkatan kapasitas fiskal daerah serta kolaborasi yang inklusif	Semua ASN di Lingkup Kecamatan	-	205.000.000,00	KECAMATAN NGUTER
	7.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				5 Unit	0,00	Kab. Sukoharjo, Nguter, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 3. Perkuatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa, kondusivitas wilayah, dan peningkatan kapasitas fiskal daerah serta kolaborasi yang inklusif	Semua ASN di Lingkup Kecamatan		100.000.000,00	KECAMATAN NGUTER
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				3 Unit	13.750.000,00	Kab. Sukoharjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 3. Perkuatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa, kondusivitas wilayah, dan peningkatan kapasitas fiskal daerah serta kolaborasi yang inklusif	Semua ASN di Lingkup Kecamatan		25.000.000,00	KECAMATAN NGUTER
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	51.145.000,00	Kab. Sukoharjo, Nguter, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 3. Perkuatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa, kondusivitas wilayah, dan peningkatan kapasitas fiskal daerah serta kolaborasi yang inklusif	Semua ASN di Lingkup Kecamatan		50.000.000,00	KECAMATAN NGUTER
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				4 Unit	0,00	Kab. Sukoharjo, Nguter, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 3. Perkuatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa, kondusivitas wilayah, dan peningkatan kapasitas fiskal daerah serta kolaborasi yang inklusif	Semua ASN di Lingkup Kecamatan		30.000.000,00	KECAMATAN NGUTER

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			100 %	273.360.040,00			-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 3. Perkuatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa, kondusivitas wilayah, dan peningkatan kapasitas fiskal daerah serta kolaborasi yang inklusif	Semua ASN di Lingkup Kecamatan	-	270.000.000,00	KECAMATAN NGUTER
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	15.000.000,00	Kab. Sukoharjo, Nguter, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 3. Perkuatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa, kondusivitas wilayah, dan peningkatan kapasitas fiskal daerah serta kolaborasi yang inklusif	Semua ASN di Lingkup Kecamatan		15.000.000,00	KECAMATAN NGUTER
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	70.300.000,00	Kab. Sukoharjo, Nguter, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 3. Perkuatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa, kondusivitas wilayah, dan peningkatan kapasitas fiskal daerah serta kolaborasi yang inklusif	Semua ASN di Lingkup Kecamatan		75.000.000,00	KECAMATAN NGUTER
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	188.060.040,00	Kab. Sukoharjo, Nguter, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 3. Perkuatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa, kondusivitas wilayah, dan peningkatan kapasitas fiskal daerah serta kolaborasi yang inklusif	Semua ASN di Lingkup Kecamatan		180.000.000,00	KECAMATAN NGUTER

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			100 %	280.050.000,00			-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 3. Perkuatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa, kondusivitas wilayah, dan peningkatan kapasitas fiskal daerah serta kolaborasi yang inklusif	Semua ASN di Lingkup Kecamatan	-	210.000.000,00	KECAMATAN NGUTER
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				11 Unit	60.550.000,00	Kab. Sukoharjo, Nguter, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 3. Perkuatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa, kondusivitas wilayah, dan peningkatan kapasitas fiskal daerah serta kolaborasi yang inklusif	Semua ASN di Lingkup Kecamatan		0,00	KECAMATAN NGUTER
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	10.000.000,00	Kab. Sukoharjo, Nguter, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 3. Perkuatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa, kondusivitas wilayah, dan peningkatan kapasitas fiskal daerah serta kolaborasi yang inklusif	Semua ASN di Lingkup Kecamatan		10.000.000,00	KECAMATAN NGUTER
	7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				40 Unit	6.000.000,00	Kab. Sukoharjo, Nguter, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 3. Perkuatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa, kondusivitas wilayah, dan peningkatan kapasitas fiskal daerah serta kolaborasi yang inklusif	Semua ASN di Lingkup Kecamatan		10.000.000,00	KECAMATAN NGUTER
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				27 Unit	13.500.000,00	Kab. Sukoharjo, Nguter, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 3. Perkuatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa, kondusivitas wilayah, dan peningkatan kapasitas fiskal daerah serta kolaborasi yang inklusif	Semua ASN di Lingkup Kecamatan		20.000.000,00	KECAMATAN NGUTER
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	40.000.000,00	Kab. Sukoharjo, Nguter, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 3. Perkuatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa, kondusivitas wilayah, dan peningkatan kapasitas fiskal daerah serta kolaborasi yang inklusif	Semua ASN di Lingkup Kecamatan		90.000.000,00	KECAMATAN NGUTER
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	150.000.000,00	Kab. Sukoharjo, Nguter, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 3. Perkuatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa, kondusivitas wilayah, dan peningkatan kapasitas fiskal daerah serta kolaborasi yang inklusif	Semua ASN di Lingkup Kecamatan		80.000.000,00	KECAMATAN NGUTER
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	***Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik***	**-**			**100 %**	**20.000.000,00**						**-**	**44.000.000,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Cakupan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*	-			100 %	0,00			-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 3. Perkuatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa, kondusivitas wilayah, dan peningkatan kapasitas fiskal daerah serta kolaborasi yang inklusif	Pelayanan di Kecamatan Nguter	-	22.000.000,00	KECAMATAN NGUTER
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	0,00	Kab. Sukoharjo, Nguter, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 3. Perkuatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa, kondusivitas wilayah, dan peningkatan kapasitas fiskal daerah serta kolaborasi yang inklusif	Pelayanan di Kecamatan Nguter		12.000.000,00	KECAMATAN NGUTER
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				2 Dokumen	0,00	Kab. Sukoharjo, Nguter, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 3. Perkuatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa, kondusivitas wilayah, dan peningkatan kapasitas fiskal daerah serta kolaborasi yang inklusif	Pelayanan di Kecamatan Nguter		10.000.000,00	KECAMATAN NGUTER

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan*	-			100 %	20.000.000,00			-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 3. Perkuatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa, kondusivitas wilayah, dan peningkatan kapasitas fiskal daerah serta kolaborasi yang inklusif	Masyarakat	-	22.000.000,00	KECAMATAN NGUTER
	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	10.000.000,00	Kab. Sukoharjo, Nguter, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 3. Perkuatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa, kondusivitas wilayah, dan peningkatan kapasitas fiskal daerah serta kolaborasi yang inklusif	Masyarakat		12.000.000,00	KECAMATAN NGUTER
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				2 Laporan	10.000.000,00	Kab. Sukoharjo, Nguter, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 3. Perkuatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa, kondusivitas wilayah, dan peningkatan kapasitas fiskal daerah serta kolaborasi yang inklusif	Masyarakat		10.000.000,00	KECAMATAN NGUTER
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan***	**-**			**100 %**	**119.850.000,00**						**-**	**170.000.000,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Cakupan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa*	-			100 %	25.000.000,00			-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 3. Perkuatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa, kondusivitas wilayah, dan peningkatan kapasitas fiskal daerah serta kolaborasi yang inklusif	Musrenbangdes, BUMDes, UMKM, Instansi Swasta, Stakeholder terkait	-	35.000.000,00	KECAMATAN NGUTER
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				16 Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000,00	Kab. Sukoharjo, Nguter, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 3. Perkuatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa, kondusivitas wilayah, dan peningkatan kapasitas fiskal daerah serta kolaborasi yang inklusif	Musrenbangdes, BUMDes, UMKM, Instansi Swasta, Stakeholder terkait		15.000.000,00	KECAMATAN NGUTER
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				2 Laporan	15.000.000,00	Kab. Sukoharjo, Nguter, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 3. Perkuatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa, kondusivitas wilayah, dan peningkatan kapasitas fiskal daerah serta kolaborasi yang inklusif	Musrenbangdes, BUMDes, UMKM, Instansi Swasta, Stakeholder terkait		20.000.000,00	KECAMATAN NGUTER

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Cakupan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan*	-			100 %	94.850.000,00			-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 3. Perkuatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa, kondusivitas wilayah, dan peningkatan kapasitas fiskal daerah serta kolaborasi yang inklusif	Masyarakat, Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	135.000.000,00	KECAMATAN NGUTER
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				1 Lembaga Kemasyarakatan	84.850.000,00	Kab. Sukoharjo, Nguter, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 3. Perkuatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa, kondusivitas wilayah, dan peningkatan kapasitas fiskal daerah serta kolaborasi yang inklusif	Masyarakat, Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		90.000.000,00	KECAMATAN NGUTER
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				1 Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000,00	Kab. Sukoharjo, Nguter, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 3. Perkuatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa, kondusivitas wilayah, dan peningkatan kapasitas fiskal daerah serta kolaborasi yang inklusif	Masyarakat, Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		15.000.000,00	KECAMATAN NGUTER
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				1 Laporan	0,00	Kab. Sukoharjo, Nguter, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 3. Perkuatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa, kondusivitas wilayah, dan peningkatan kapasitas fiskal daerah serta kolaborasi yang inklusif	Masyarakat, Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		30.000.000,00	KECAMATAN NGUTER
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**-**	**-**			**-**	**30.000.000,00**						**-**	**210.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Cakupan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum*	-			100 %	20.000.000,00			-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 3. Perkuatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa, kondusivitas wilayah, dan peningkatan kapasitas fiskal daerah serta kolaborasi yang inklusif	Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Stakeholder terkait	-	200.000.000,00	KECAMATAN NGUTER
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				2 Laporan	10.000.000,00	Kab. Sukoharjo, Nguter, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 3. Perkuatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa, kondusivitas wilayah, dan peningkatan kapasitas fiskal daerah serta kolaborasi yang inklusif	Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Stakeholder terkait		20.000.000,00	KECAMATAN NGUTER
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				4 Laporan	10.000.000,00	Kab. Sukoharjo, Nguter, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 3. Perkuatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa, kondusivitas wilayah, dan peningkatan kapasitas fiskal daerah serta kolaborasi yang inklusif	Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Stakeholder terkait		180.000.000,00	KECAMATAN NGUTER
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	*Cakupan Koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah*	-			100 %	10.000.000,00			-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 3. Perkuatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa, kondusivitas wilayah, dan peningkatan kapasitas fiskal daerah serta kolaborasi yang inklusif	Linmas, Tokoh Masyarakat, Satpol	-	10.000.000,00	KECAMATAN NGUTER
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				2 Laporan	10.000.000,00	Kab. Sukoharjo, Nguter, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 3. Perkuatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa, kondusivitas wilayah, dan peningkatan kapasitas fiskal daerah serta kolaborasi yang inklusif	Linmas, Tokoh Masyarakat, Satpol		10.000.000,00	KECAMATAN NGUTER
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	***Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum***	**-**			**100 %**	**316.000.000,00**						**-**	**326.000.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah*	-			100 %	316.000.000,00			-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 3. Perkuatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa, kondusivitas wilayah, dan peningkatan kapasitas fiskal daerah serta kolaborasi yang inklusif	Paskibra Kecamatan, Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	-	326.000.000,00	KECAMATAN NGUTER
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				80 Orang	150.000.000,00	Kab. Sukoharjo, Nguter, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 3. Perkuatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa, kondusivitas wilayah, dan peningkatan kapasitas fiskal daerah serta kolaborasi yang inklusif	Paskibra Kecamatan, Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		150.000.000,00	KECAMATAN NGUTER
	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				100 Orang	0,00	Kab. Sukoharjo, Nguter, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 3. Perkuatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa, kondusivitas wilayah, dan peningkatan kapasitas fiskal daerah serta kolaborasi yang inklusif	Paskibra Kecamatan, Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		10.000.000,00	KECAMATAN NGUTER
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				12 Dokumen	166.000.000,00	Kab. Sukoharjo, Nguter, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 3. Perkuatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa, kondusivitas wilayah, dan peningkatan kapasitas fiskal daerah serta kolaborasi yang inklusif	Paskibra Kecamatan, Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		166.000.000,00	KECAMATAN NGUTER
6.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	***Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa***	**-**			**100 %**	**55.000.000,00**						**-**	**144.000.000,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa*	-			100 %	55.000.000,00			-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 3. Perkuatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa, kondusivitas wilayah, dan peningkatan kapasitas fiskal daerah serta kolaborasi yang inklusif	Pemerintahan Desa, Stakeholder terkait, Masyarakat	-	144.000.000,00	KECAMATAN NGUTER
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				2 Dokumen	0,00	Kab. Sukoharjo, Nguter, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 3. Perkuatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa, kondusivitas wilayah, dan peningkatan kapasitas fiskal daerah serta kolaborasi yang inklusif	Pemerintahan Desa, Stakeholder terkait, Masyarakat		10.000.000,00	KECAMATAN NGUTER
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa														
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				2 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Sukoharjo, Nguter, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 3. Perkuatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa, kondusivitas wilayah, dan peningkatan kapasitas fiskal daerah serta kolaborasi yang inklusif	Pemerintahan Desa, Stakeholder terkait, Masyarakat		15.000.000,00	KECAMATAN NGUTER
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				2 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Sukoharjo, Nguter, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 3. Perkuatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa, kondusivitas wilayah, dan peningkatan kapasitas fiskal daerah serta kolaborasi yang inklusif	Pemerintahan Desa, Stakeholder terkait, Masyarakat		20.000.000,00	KECAMATAN NGUTER
	7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa														
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa				2 Dokumen	0,00	Kab. Sukoharjo, Nguter, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 3. Perkuatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa, kondusivitas wilayah, dan peningkatan kapasitas fiskal daerah serta kolaborasi yang inklusif	Pemerintahan Desa, Stakeholder terkait, Masyarakat		10.000.000,00	KECAMATAN NGUTER
	7.01.06.2.01.0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa				5 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Sukoharjo, Nguter, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 3. Perkuatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa, kondusivitas wilayah, dan peningkatan kapasitas fiskal daerah serta kolaborasi yang inklusif	Pemerintahan Desa, Stakeholder terkait, Masyarakat		10.000.000,00	KECAMATAN NGUTER
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa														
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				2 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Sukoharjo, Nguter, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 3. Perkuatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa, kondusivitas wilayah, dan peningkatan kapasitas fiskal daerah serta kolaborasi yang inklusif	Pemerintahan Desa, Stakeholder terkait, Masyarakat		10.000.000,00	KECAMATAN NGUTER
	7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan				1 Dokumen	0,00	Kab. Sukoharjo, Nguter, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 3. Perkuatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa, kondusivitas wilayah, dan peningkatan kapasitas fiskal daerah serta kolaborasi yang inklusif	Pemerintahan Desa, Stakeholder terkait, Masyarakat		5.000.000,00	KECAMATAN NGUTER
	7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif														
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif				1 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Sukoharjo, Nguter, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 3. Perkuatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa, kondusivitas wilayah, dan peningkatan kapasitas fiskal daerah serta kolaborasi yang inklusif	Pemerintahan Desa, Stakeholder terkait, Masyarakat		20.000.000,00	KECAMATAN NGUTER
	7.01.06.2.01.0014	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga				1 Dokumen	0,00	Kab. Sukoharjo, Nguter, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 3. Perkuatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa, kondusivitas wilayah, dan peningkatan kapasitas fiskal daerah serta kolaborasi yang inklusif	Pemerintahan Desa, Stakeholder terkait, Masyarakat		10.000.000,00	KECAMATAN NGUTER
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya														
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				2 Laporan	0,00	Kab. Sukoharjo, Nguter, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 3. Perkuatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa, kondusivitas wilayah, dan peningkatan kapasitas fiskal daerah serta kolaborasi yang inklusif	Pemerintahan Desa, Stakeholder terkait, Masyarakat		24.000.000,00	KECAMATAN NGUTER
	7.01.06.2.01.0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan				2 Laporan	0,00	Kab. Sukoharjo, Nguter, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 3. Perkuatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa, kondusivitas wilayah, dan peningkatan kapasitas fiskal daerah serta kolaborasi yang inklusif	Pemerintahan Desa, Stakeholder terkait, Masyarakat		10.000.000,00	KECAMATAN NGUTER
	J U M L A H							**3.660.416.040,00**							**4.250.875.000,00**	

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024



Kecamatan Nguter
Kabupaten Sukoharjo

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan karunia-Nya, Rencana KerjaPemerintah Kecamatan Nguter Tahun 2024 dapat kami susun. Penyusunan Renja ini bertujuan untuk memberikan arah dalam menyusun Perencananan dan Pelaksanaan Program dan Kegiatan dalam kurun waktu 1 (tahun). Pelaksanaan program dan kegiatan di Kecamatan Nguter tersebut diarahkan untuk pencapaian keberhasilan pembangunan dan pencapaian program pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan sesuai dengan visi misi Kecamatan Nguter sehingga pemerintahan yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien dapat terwujud.

Kami menyadari Renja ini jauh dari sempurna, untuk itu saran dan koreksi sangat kami harapkan demi kesempurnaan Renja ini dan keberlanjutan penyusunan diperiode berikutnya. Kami berharap apa yang terangkum dalam Renja Pemerintah Kecamatan Nguter Tahun 2024 ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Nguter, 10 Agustus 2023

CAMAT NGUTER

KABUPATEN SUKOHARJO

PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
KECAMATAN NGUTER

SUKATMAN, S.Sos., MM.

NIP. 19700614 198903 1 002

DAFTAR ISI.

KATA PENGANTAR.....i
DAFTAR ISI iii
DAFTAR TABEL iiii
DAFTAR GAMBAR.....ivv
BAB I - PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang.....1
B. Landasan Hukum 4
C. Maksud dan Tujuan.....8
D. Sistematika Penulisan.....9
BAB II - EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 12
A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Nguter Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Nguter Tahun 2021-2026 12
B. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....16
C. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD 24
D. Review Terhadap Rancangan Awal OPD.....26
BAB III - TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 37
A. Telaahan Terhadap Kebijakan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo ...37
B. Tujuan dan Sasaran 44
BAB IV - RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 46
BAB V - PENUTUP 60

DAFTAR TABEL

tabel 2.1. Anggaran Dan Realisasi Belanja Perangkat Daerah Kecamatan Nguter Tahun 2022 12
Tabel 2.2 Tabel Evaluasi Pelaksanaan Renja Opd 15
Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Nguter 22
Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 24
Tabel 2.5 Review Terhadap Rancangan Awal Renja Kecamatan Nguter Tahun 2024 27
Tabel 3.1 Telaah Visi, Misi, Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 43
Tabel 4.1 Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 47
Tabel 4.2 Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Nguter Tahun 2024 57

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Skema Rencana Pembangunan Pusat dan Daerah 2
Gambar 1.2. Alur Penyusunan RKPD dan Rencana Kerja Kecamatan Nguter 4
Gambar 2.1 Bagan Organisasi Kecamatan Nguter 20

BAB I

PENDAHULUAN

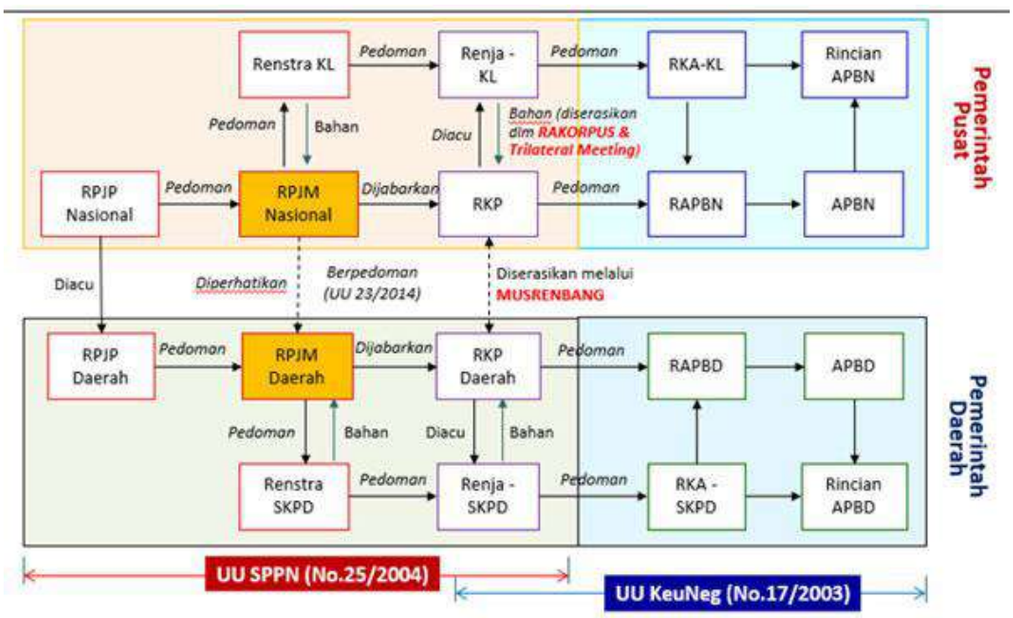
A. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, telah diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan nomenklatur urusan sampai dengan sub kegiatan yang sudah ditentukan. RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dimana dalam penyusunan RKPD diperlukan masukan dari Perangkat Daerah berupa Rencana Kerja Perangkat Daerah. Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah berjangka 1 (satu) tahun yang memuat kondisi pelayanan Perangkat Daerah, gambaran visi dan misi serta rencana pembangunan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun yang akan datang.

Rencana Kerja Perangkat Daerah juga merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran RPJMD oleh Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan oleh Perangkat Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan jangka waktu RPJMD. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Perangkat Daerah berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo untuk periode Tahun 2024 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Sukoharjo dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun di Tahun 2024.

Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Nguter Tahun 2024 memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah pembangunan nasional, provinsi, dan mendukung arah perencanaan pembangunan daerah. Adapun Keterkaitan hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan yang ada pada Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Nguter Tahun 2024 dapat dilihat pada gambar 1.1 :



Gambar 1.1.

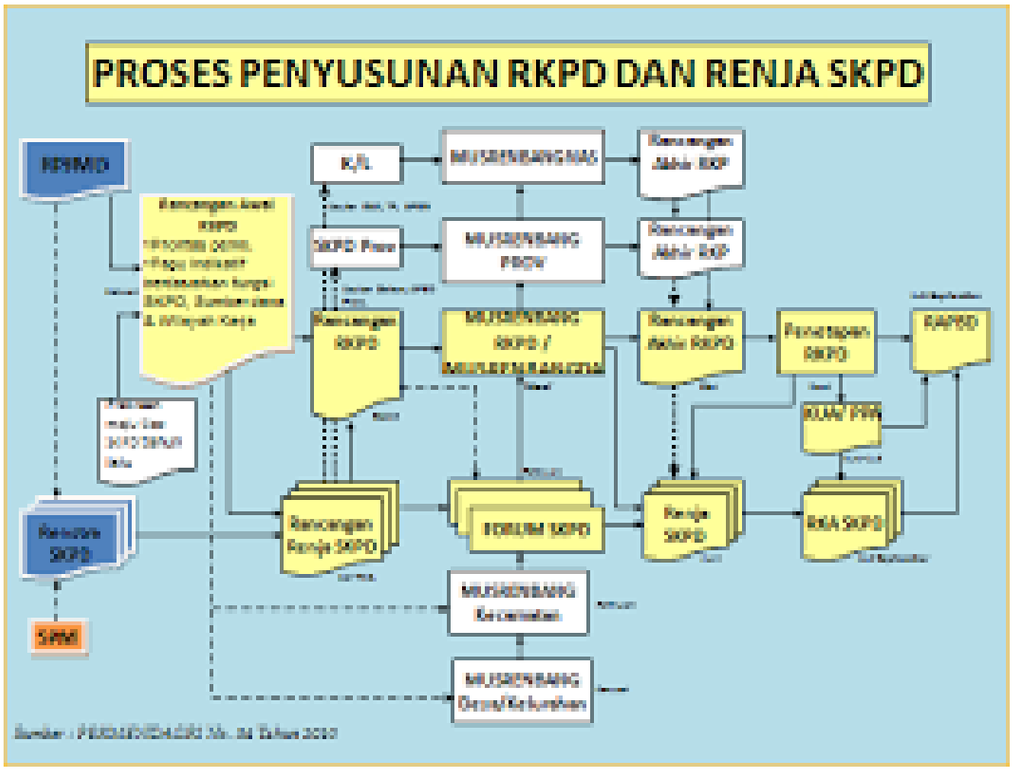
Skema Rencana Pembangunan Pusat dan Daerah

RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Nasional, yang memuat strategi pembangunan Nasional, kebijakan umum, program Kementerian / Lembaga dan lintas Kementerian / Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara

menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam Rencana Kerjayang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Pasal 263 ayat 2 UU No. 23 Tahun 2014 RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan rencana tata ruang wilayah. Pasal 263 ayat 3 UU No. 23 Tahun 2014 RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.

Adapun penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 dilakukan melalui 5 (lima) pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan yaitu pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (top-down), dan bawah-atas (bottom-up). Kelima pendekatan dimaksud diselenggarakan secara berkelanjutan untuk membentuk satu siklus perencanaan yang utuh sebagai berikut (Gambar 1.2) **:**



Gambar 1.2.

Alur Penyusunan RKPD dan Rencana Kerja Kecamatan Nguter

Berdasarkan Bagan Alur tersebut penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Nguter merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021 – 2026. Selain itu Proses penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo merupakan dokumen yang tidak berdiri sendiri melainkan dilakukan melalui beberapa tahapan, yakni diawali dengan mereview Rensta, Penyusunan Rancangan Rencana Kerja, dan Penetapan Rencana Kerja. Ketiga tahapan dimaksud diselenggarakan secara berkelanjutan untuk menghasilkan dokumen penganggaran yaitu Dokumen RKA SKPD dan Dokumen DPA SKPD yang dituangkan dalam Dokumen APBD Kabupaten Sukoharjo.

B. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Dearah Kecamatan Nguter Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 174);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 192) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031(Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 262);
20. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);

21. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 298);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);

C. **Maksud dan Tujuan**

1. Maksud penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Nguter Tahun 2024 adalah :
   a. Memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan serta pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Nguter Tahun 2024
   b. Sebagai acuan dan pedoman pelaksanaan Program/Kegiatan Kecamatan Nguter pada Tahun 2024
2. Tujuan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Tahun 2024 adalah :
   a. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2024 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
   b. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Nguter selama kurun waktu 1 tahun yaitu Tahun 2024;

c. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan Kecamatan Nguter Tahun 2024;
d. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program dan kegiatan Kecamatan Nguter Tahun 2024; dan
e. Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Nguter Tahun 2024.

D. **Sistematika Penulisan**

Adapun sitematika penulisan dalam penyajian Rencana Kerja Kecamatan Nguter Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

BAB I – PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Perubahan Renja SKPD, proses penyusunan Renja SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen RKPD, Renstra SKPD, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan APBD

B. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD

C. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Perubahan Renja SKPD

D. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renja SKPD, serta susunan garis besar isi

BAB II - EVALUASI RENJA KECAMATAN NGUTER TAHUN LALU

A. Evaluasi Renja Kecamatan Nguter Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Nguter

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun n-1) dan perkiraan capaian

tahun berjalan, mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun sebelumnya.

B. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo

   Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan Indikator Kinerja yang sudah ditetapkan dalam SPM maupun terhadap IKK. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

C. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Nguter , Kabupaten Sukoharjo

   Berisi uraian mengenai sejauhmana tingkat kinerja pelayanan Kecamatan Nguter dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah dan permasalahan/hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

BAB III – TUJUAN, SASARAN

A. Telaahan Terhadap Kebijakan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo

   Penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah, visi misi Kepala Daerah serta yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD

B. Tujuan dan Sasaran

   Berisi perumusan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD

BAB IV - RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisi uraian garis besar mengenai rekapitulasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan Kecamatan Nguter Tahun 2024

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Nguter Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Nguter Tahun 2021-2026

Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan OPD untuk 1 (satu) periode yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja Kecamatan Nguter menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dan hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kecamatan Nguter selama tahun 2022.

Realisasi dan evaluasi program dan kegiatan Kecamatan Nguter Tahun 2022 mengacu pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran – Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah untuk menetapkan APBD 2022. Adapun realisasi program dan kegiatan tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1.

Anggaran Dan Realisasi Belanja Perangkat Daerah Kecamatan Nguter Tahun 2022

NO		PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	SELISIH (Rp)	%
A		**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**2.736.756.040**	**2.602.603.853**	**134.152.187**	
I		***Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	***28.000.000***	***27.784.600***	***215.400***	***99,23%***
	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.000.000	9.785.000	215.000	97,85%
	2	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.500.000	2.500.000	-	100,00%
	3	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.500.000	2.500.000	-	100,00%
	4	Koordinasi Dan Penyusunan DPA-SKPD	2.500.000	2.500.000	-	100,00%
	5	Koordinasi Dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2.500.000	2.500.000	-	100,00%
	6	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.000.000	3.999.600	400	99,99%
	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.000.000	4.000.000	-	100,00%
II		***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	***1.997.878.000***	***1.881.400.051***	***116.477.949***	***94,17%***

	8	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	1.882.878.000	1.766.400.051	116.477.949	93,81%
	9	Pelaksanaan Penatausahaan Dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	103.000.000	103.000.000	-	100,00%
	10	Koordinasi Dan Pelaksanaan Akutansi SKPD	3.000.000	3.000.000	-	100,00%
	11	Koorodinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.500.000	2.500.000	-	100,00%
	12	Koorodinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4.000.000	4.000.000	-	100,00%
	13	Penyusunan Pelaporan Dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2.500.000	2.500.000	-	100,00%
III	***Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***		***11.000.000***	***10.993.500***	***6.500***	**99,94%**
	14	Pendataan Dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6.000.000	5.993.500	6.500	99,89%
	15	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	5.000.000	5.000.000	-	100,00%
IV	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***		***254.352.000***	***253.059.700***	***1.292.300***	***99,49%***
	16	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000	9.999.600	400	100,00%
	17	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	33.768.000	33.100.000	668.000	98,02%
	18	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	15.000.000	15.000.000	-	100,00%
	19	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	127.460.000	127.440.500	19.500	99,98%
	20	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	10.724.000	10.723.800	200	100,00%
	21	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	5.000.000	5.000.000	-	100,00%
	22	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	52.400.000	51.795.800	604.200	98,85%
V	***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***		***67.946.000***	***65.360.000***	***2.586.000***	***96,19%***
	23	Pengadaan Mebel	10.920.000	10.920.000	-	100,00%
	24	Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	57.026.000	54.440.000	2.586.000	95,47%
VI	***Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***		***238.530.040***	***225.875.974***	***12.654.066***	***94,69%***
	25	Penyedia Jasa Surat Menyurat	15.330.000	15.330.000	-	100,00%
	26	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	61.000.000	52.109.266	8.890.734	85,43%
	27	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	162.200.040	158.436.708	3.763.332	97,68%
VII	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***		***139.050.000***	***138.130.028***	***919.972***	***99,34%***
	28	Penyedia Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	60.550.000	60.547.791	2.209	100,00%
	29	Penyedia Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Dan Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	14.000.000	13.975.237	24.763	99,82%
	30	Pemeliharaan Mebel	6.000.000	6.000.000	-	100,00%
	31	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	11.500.000	11.500.000	-	100,00%
	32	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	47.000.000	46.107.000	893.000	98,10%

B	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik**	**17.500.000**	**17.500.000**	**-**	**100,00%**
VIII	***Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan***	***17.500.000***	***17.500.000***	-	***100,00%***
	33 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Di Wilayah Kecamatan	10.000.000	10.000.000	-	100,00%
	34 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	7.500.000	7.500.000	-	100,00%
C	**Program Pemberdayaan Masyarakata Desa Dan Kelurahan**	**99.000.000**	**98.961.300**	**38.700**	**99,96%**
IX	***Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa***	***24.000.000***	***23.991.800***	***8.200***	***99,97%***
	35 Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa	9.000.000	9.000.000	-	100,00%
	36 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	15.000.000	14.991.800	8.200	99,95%
X	***Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan***	***75.000.000***	***74.969.500***	***30.500***	***99,96%***
	37 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	60.000.000	59.969.500	30.500	99,95%
	38 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	15.000.000	15.000.000	-	100,00%
D	**Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum**	**32.000.000**	**31.945.000**	**55.000**	**99,83%**
XI	***Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum***	***22.000.000***	***21.945.000***	***55.000***	***99,75%***
	39 Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia Dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan	12.000.000	12.000.000	-	100,00%
	40 Harmonsasi Hubungan Dengan Tokoh Agama Dan Tokoh Masyarakat	10.000.000	9.945.000	55.000	99,45%
XII	***Koordinasi Penerapan Dan Penegakan Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah***	***10.000.000***	***10.000.000***	-	***100,00%***
	41 Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah Yang Tugas Dan Fungsinya Di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Dan/Atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	10.000.000	10.000.000	-	100,00%
E	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**356.000.000**	**355.975.000**	**25.000**	**99,99%**
XII	***Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah***	***356.000.000***	***355.975.000***	***25.000***	***99,99%***
	42 Pembinaan Wawasan Kebangsaan Dan Ketahanan Nasional Dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan Dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	190.000.000	190.000.000	-	100,00%

	43	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan Di Kecamatan	166.000.000	165.975.000	25.000	99,98%
F	**Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa**		**60.000.000**	**59.315.000**	**685.000**	**98,86%**
XIII	***Fasilitasi, Rekomendasi Dan Koordinasi Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa***		***60.000.000***	***59.315.000***	***685.000***	***98,86%***
	44	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	10.000.000	10.000.000	-	100,00%
	45	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Dan Pendayagunaan Aset Desa	10.000.000	10.000.000	-	100,00%
	46	Rekomendasi Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa	10.000.000	9.925.000	75.000	99,25%
	47	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa	10.000.000	10.000.000	-	100,00%
	48	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	20.000.000	19.390.000	610.000	96,95%
TOTAL			**3.301.256.040**	**3.166.300.153**	**134.955.887**	**95,91%**

Evaluasi Renja Kecamatan Nguter selama kurun waktu 1 (satu) tahun dengan perbandingan realisasi Renja tahun sebelumnya serta target kinerja program/ kegiatan Renja tahun berjalan serta capaian program Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Nguter dapat dilihat pada tabel halaman berikut :

Tabel 2.2

Tabel Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD

No	Sasaran/Program	Indikator Kinerja	Target Renstra PD (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja PDs/d Renja PD 2021		Target Kinerja PD Tahun Berjalan (Tahun 2022)		Realisasi Kinerja PD Tahun Berjalan (Tahun 2022)		Realisasi Capaian Kinerja PDs/d Renja PD 2022		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PDs/d 2022 (%)	
1	2	3	4		5		6		5		5		8	
			K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	Rp
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	17.667.800.000	20	2.585.866.265	100	2.577.367.688	100	2.516.888.606	40	5.102.754.871	40	28,88
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100	81.050.000	20	20.000.000	100	12.000.000	100	12.000.000	40	32.000.000	40	39,48
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Prosentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100	683.530.000	20	85.000.000	100	85.000.000	100	84.744.750	40	169.744.750	40	24,83
4	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Posentase Capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100	304.630.000	20	748.921.000	100	37.000.000	100	37.000.000	40	785.921.000	40	257,99
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100	1.779.690.000	20	118.000.000	100	356.000.000	100	356.000.000	40	474.000.000	40	26,63
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	693.200.000	20	49.550.000	100	50.200.000	100	49.300.000	40	98.850.000	40	14,26

B. **Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Dalam melaksanakan tugasnya Kecamatan Nguter mengacu pada tugas Camat yaitu membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan keluarahan, serta fungsi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Staf Ahli Bupati, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat dan Kecamatan. Tugas dan fungsi tersebut dilaksanakan menurut kedudukan masing-masing dalam struktur organisasi yang ada di Kecamatan Nguter . Tugas pokok dan fungsi Kecamatan tersebut adalah

a. Camat

Tugas Camat adalah melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan.. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Camat mempunyai fungsi:

1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
2. Pengkoordinaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa;
3. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
5. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
7. Pembinaan dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa;
8. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi

kewenangan Daerah Kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan;

9. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan Kecamatan; dan
10. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Sekretariat Kecamatan

Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh seorang Sekretaris Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan konsep dan pelaksananan kebijakan, pengoordinasiaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi keuangan, hukum, informasi, kehumasan, keoorganesasian dan ketatalaksanaan, pembinanan ketatusahaan, kearsipan kerumahtanggaan, kepegawaian, pengelolaan dan penatausahaan aset, dan pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan. Dalam melaksanakan tugas Sekretariat Kecamatan mempunyai fungsi :

1. Pengoordinasian penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Kecamatan;
2. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi keuangan, hukum, hubungan masyarakat, ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, dan pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan;
    a) Pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Kecamatan;
    b) Pengoordinasiaan dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Kecamatan;
    c) Pengoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
    d) Penyelenggaraan dan penatausahaan aset dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingukungan

Kecamatan;

e) Pelaksananan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;

f) Pengelolaan kepegawaian di lingkungan Kecamatan; dan

g) Pelaksananan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.

c. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian berada dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Camat yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang perencanaan, data informasi, dan program kerja, dan pengelolaan keuangan di lingkungan Kecamatan.

d. Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Subbagian berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Camat yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemanatauan, evaluasi serta pelaporanyang meliputi pembinaan ketatausahaan , hukum, kehumasan, keorganesasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, kearsipan, kepegawaian, pengelolaan dan penatausahaan aset dan pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan.

e. Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat yang mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksananan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang pemerintahan umum dan desa meliputi administrasi kependudukan, dan meningkatkan kemadirian politik, monograafi kecamatan, pengisian Perangkat Desa dan Kepala Desa, pembinanan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa, pembinaan Badan Perwakilan Desa dan

Lembaga Kemasyaraakatan Desa serta pelaksananan kegiatan baik di tingkat internal Kecamatan maupun dengan pihak terkait dan pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat sebagai urusan otonomi daerah di bidang pemerintahan.

f. Seksi Keamanan dan Ketertiban

Seksi Keamanan dan Ketertiban dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat yang mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksananan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang ketenteraman dan ketertiban wilayah serta pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat meliputi penanggulangan bencana alam, dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta pelaksanaan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat sebagian urusan otonomi daerah di bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

g. Seksi Pemerdayaan Masyarakat Desa

Seksi Pemerdayaan Masyarakat Desa dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat yang mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksananan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang pembangunan, pemberdayaan masyarakat, perekonomian desa, produksi dan disstribusi dan pelaksanaan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat sebagian urusan otonomi daerah di bidang pemberdayaan masyarakat desa.

h. Seksi Kesejahteraan Sosial

Seksi Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat yang mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksananan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang kesejahteraan sosial yang meliputi masalah sosial, kepemudaan, peranan wanita, olah raga, kehidupan keagamaan, kebudayaan dan kesehatan,

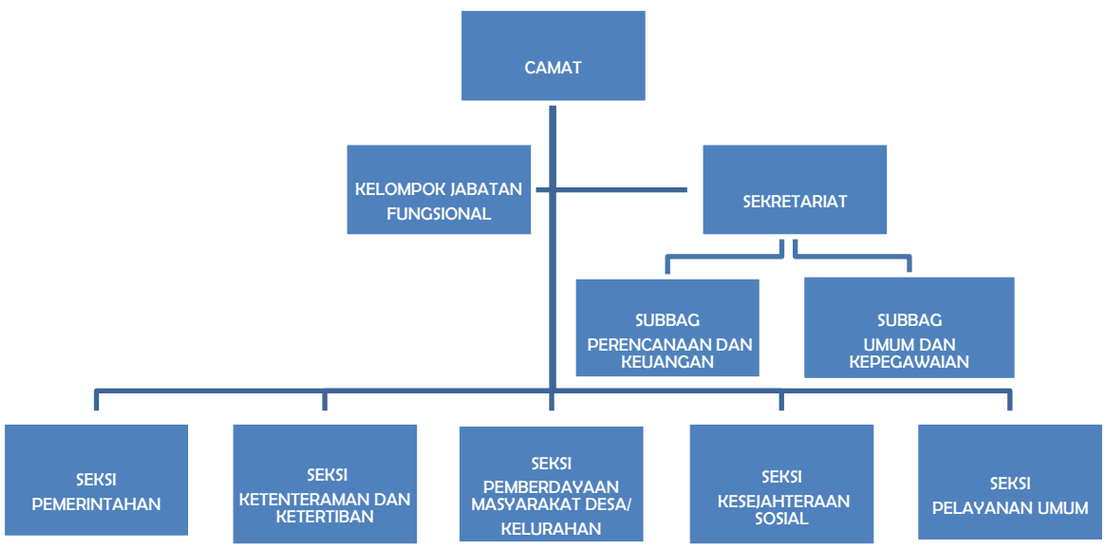
peningkatan kualitas sumber daya perangkat desa, lembaga desa dan pemberian bantuan sosial serta program pengentasan kemiskinan serta pelaksanaan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat sebagian urusan otonomi daerah di bidang kesejahteraan sosial.

i. Seksi Pelayanan Umum

Seksi Pelayanan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat yang mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksananan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang Pelayanan Umum yang meliputi inventarisasi data kekayaan desa, dan sarana prasarana desa, kebersihan lingkungan yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat, pelayanan kependudukan, kebersihan lingkungan, perizinan peningkatan sarana dan prasarana fasilitas umum dan pelayanan umum administrasi kependudukan, pelayanan administrasi terpadu kecamatan, percepatan pencapaian standar pelayanan minimal serta pelaksanaan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat sebagian urusan otonomi daerah di bidang Pelayanan Umum.

Gambar 2.1

Bagan Organisasi Kecamatan Nguter



Program–program yang dilaksanakan pada tahun tahun 2022 yaitu:

1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2) Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
3) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
4) Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
5) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
6) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Program–program tersebut dilaksanakan dalam rangka memenuhi tugas untuk melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa.

PD Kecamatan merupakan representasi Pemerintah pada tingkat bawah, yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, menjadi pihak yang paling dekat dengan masyarakat. Melaksanakan tugas pelayanan publik yang paling dekat dengan masyarakat bukanlah hal yang mudah yang bisa dilalui tanpa ada hambatan dan permasalahan–permasalahan. Hambatan dan permasalahan yang ada dapat diselesaikan dengan kerjasama antara pegawai di lingkungan Kecamatan Nguter .

Kinerja pelayanan Kecamatan Nguter didasarkan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 – 2026, dalam rangka mendukung pada : Misi 1 RPJMD : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik melalui Percepatan Reformasi Birokrasi. Dengan Misi, yaitu: Mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik melalui percepatan reformasi birokrasi dan Sasaran yang ingin dicapai, yaitu: Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel.

Kinerja Pelayanan pada Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo menunjukkan tingkat capaian kinerja Kecamatan Nguter

berdasarkan sasaran/target Renstra Kecamatan Nguter tahun 2021-2026 sebagaimana disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Nguter
Kabupaten Sukoharj0
Tahun 2021-2026

No	Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD 2026	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun						Realiasasi Capaian Tahun						Rasio Capaian pada tahun					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	**Terwujudnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Responsif dan Akuntabel**	**Indek Kepuasan Masyarakat**	**Nilai**	**95**	**81**	**82**	**92**	**93**	**94**	**95**	**89,778**	**90,51**					**110,8**	**110,3**				
1.1	**Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat**	**Persentase Peningkatan Pelayanan Kecamatan**	**%**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**					**100**	**100**				
1.1.1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100					100	100				
1.1.2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Prosentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100					100	100				
1.1.3	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Posentase Capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100					100	100				
1.1.4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100					100	100				
1.1.5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100					100	100				
1.2	**Meningkatnya Kualitas Aparatur dan Pelayanan Publik**	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**Nilai**	**70**	**61**	**62**	**63**	**64**	**65**	**70**	**53,45**	**Dinilai di th 2023**					**87,6**	**0,00**				
1.2.1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100					100	100				

Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Nguter

Kabupaten Sukoharjo

Tahun 2022

No	Sasaran/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD 2026	Realisasi 2021	2022		Persentase Capaian s/d Triwulan IV	Status Capaian RPJMD	PD Penanggung Jawab
						Target	Realisasi s/d Triwulan IV			
1	**Terwujudnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Responsif dan Akuntabel**	**Indek Kepuasan Masyarakat**	**Nilai**	**95**	**89,778**	**82**	**90,51**	**110,3**	**Tercapai**	**Kec Nguter**
1.1	**Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat**	Persentase peningkatan pelayanan kecamatan	%	100	100	100	100	100	Tercapai	Kec Nguter
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	%	100	100	100	100	100	Tercapai	Kec Nguter
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Perberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	%	100	100	100	100	100	Tercapai	Kec Nguter
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Capaian Ketentraman dan Ketertiban	%	100	100	100	100	100	Tercapai	Kec Nguter
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	%	100	100	100	100	100	Tercapai	Kec Nguter
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	%	100	100	100	100	100	Tercapai	Kec Nguter
1.2	**Meningkatnya Kualitas Aparatur dan Pelayanan Publik**	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	angka	70	53,45	62	Penilaian di tahun 2023			Kec Nguter
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	100	100	100	Tercapai	Kec Nguter

C. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Isu – Isu strategis adalah kondisi atau hal yang diperhatikan dalam perencanaan pembangunan selama 5 (Lima) tahun dalam melaksanakan atau menyelenggarakan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Nguter kepada masyarakat. Analisa isu – isu strategis di identifikasikan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Nguter dalam menjalankan pemerintahan ada berbagai permasalahan, sebagai berikut:

a. Bidang Sekretariat

1) Kurangnya personil di bagian sekretariat Kantor Kecamatan Nguter, sehingga banyak tenaga yang

merangkap tugas lain, untuk meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat perlu adanya tambahan personil.

b. Bidang Pelayanan Publik

1) Layanan di OPD Kecamatan Nguter kurang maksimal, hal ini disebabkan keterbatasan dan kemampuan individu tenaga (SDM).
2) Waktu pelayanan di OPD Kecamatan Nguter dinilai masih kurang maksimal, hal ini disebabkan ketrbatasan kemampuan sumberdaya manusia dalam memberikan pelayanan.

c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1) Belum optimalnya peran serta dan swadaya masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan wilayah.
2) Kurangnya personil pengelolaan pemberdayaan masyarakat dan pengelola partisipasi masyarakat, sehingga untuk meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat perlu adanya tambahan personil dan tenaga operasional.
3) Kurangnya pemerataan pembangunan wilayah Desa.

d. Bidang Kesejahteraan Sosial

1) Belum terwujudnya sinkronisasi data sebagai dasar pengambilan kebijakan terkait dengan bantuan sosial.
2) Kurangnya personil pengelola kesejahteraan sosial, sehingga untuk meningkatkan kinerja pelayanan kesejahteraan sosial perlu adanya tambahan personil pengelola kesejahteraan sosial.

e. Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum

1) Kurangnya pemahaman warga masyarakat tentang peraturan perundangan dan hukum.
2) Peran serta warga terhadap penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum belum optimal.
3) Kurangnya personil pengelola ketentraman dan ketertiban sehingga untuk meningkatkan kinerja

pelayanan masyarakat perlu adanya tambahan personil dan tenaga operasional.

f. Bidang Pemerintahan

1) Belum optimalnya kinerja aparatur Pemerintahan Desa.
2) Kurangnya personil pengelolaan data pemerintahan umum, pengelolaan data Pemerintahan Desa, pengelola data kependudukan dan pertanahan sehingga untuk meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat perlu adanya tambahan personil dan tenaga operasional

D. Review Terhadap Rancangan Awal OPD

Adapun Review rancangan awal Renja Kecamatan Nguter Tahun 2024 sebagaimana yang tertuang dalam rencana kegiatan 1 (satu) tahun yang menjadi acuan dalam menerapkan program/ kegiatan yang merupakan kebijakan dalam pengunaan anggaran dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.5
Review Terhadap Rancangan Awal Renja
Kecamatan Nguter
Tahun 2024

RANCANGAN AWAL RKPD/ RENJA							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							Catatan Penting
Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			**Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Kecamatan Nguter**	**100%**	**20.000.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			**Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Kecamatan Nguter**	**100%**	**20.000.000**	
	Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan		***Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan***	***Kecamatan Nguter***	***100%***	***20.000.000***		***Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan***		***Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan***	***Kecamatan Nguter***	***100%***	***20.000.000***	
		Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Nguter	1 Laporan	10.000.000			Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Nguter	1 Laporan	10.000.000	
		Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Nguter	2 Laporan	10.000.000			Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Nguter	2 Laporan	10.000.000	

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			**Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Kecamatan Nguter**	**100%**	**119.850.000**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Kecamatan Nguter**	**100%**	**118.500.000**	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		**Cakupan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	***Kecamatan Nguter***	***100%***	***25.000.000***		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**		**Cakupan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	***Kecamatan Nguter***	***100%***	***25.000.000***	
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Nguter	16 Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000			Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Nguter	16 Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000	
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Nguter	2 Laporan	15.000.000			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Nguter	3 Laporan	15.000.000	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		***Cakupan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan***	***Kecamatan Nguter***	***100%***	***94.850.000***		***Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan***		***Cakupan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan***	***Kecamatan Nguter***	***100%***	***94.850.000***	
		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kecamatan Nguter	1 Lembaga Kemasyarakatan	84.850.000			Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kecamatan Nguter	1 Lembaga Kemasyarakatan	84.850.000	
		Peningkatan Kapasitas Lembaga kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kecamatan Nguter	1 Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000			Peningkatan Kapasitas Lembaga kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kecamatan Nguter	1 Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000	
		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Nguter	1 Laporan	5.000.000			Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Nguter	0	0	Menyesuiakan kebutuhan dan kesediaan anggaran

PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			**Persentase Capaian Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Kecamatan Nguter**	**100%**	**30.000.000**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			**Persentase Capaian Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Kecamatan Nguter**	**100%**	**30.000.000**	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		***Cakupan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum***	***Kecamatan Nguter***	***100%***	***20.000.000***		***Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum***		***Cakupan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum***	***Kecamatan Nguter***	***100%***	***20.000.000***	
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Nguter	2 laporan	10.000.000			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Nguter	2 laporan	10.000.000	
		Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kecamatan Nguter	4 laporan	10.000.000			Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kecamatan Nguter	4 laporan	10.000.000	
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		**Cakupan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	***Kecamatan Nguter***	***100%***	***10.000.000***		***Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah***		**Cakupan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	***Kecamatan Nguter***	***100%***	***10.000.000***	
		Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kecamatan Nguter	2 laporan	10.000.000			Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kecamatan Nguter	2 laporan	10.000.000	
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			**Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**Kecamatan Nguter**	**100%**	**316.000.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**			**Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**Kecamatan Nguter**	**100%**	**316.000.000**	

	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		***Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah***	***Kecamatan Nguter***	***100%***	***316.000.000***		***Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah***		***Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah***	***Kecamatan Nguter***	***100%***	***316.000.000***	
		Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kecamatan Nguter	80 org	150.000.000			Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kecamatan Nguter	80 org	150.000.000	
		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kecamatan Nguter	12 dokumen	166.000.000			Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kecamatan Nguter	12 dokumen	166.000.000	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			**Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Kecamatan Nguter**	100%	55.000.000	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**			**Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Kecamatan Nguter**	100%	55.000.000	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		***Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa***	***Kecamatan Nguter***	*100%*	***55.500.000***		***Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa***		***Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa***	***Kecamatan Nguter***	*100%*	***55.500.000***	
		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan Nguter	2 Dokumen	10.000.000			Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan Nguter	2 Dokumen	10.000.000	

		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kecamatan Nguter	2 Dokumen	10.000.000			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kecamatan Nguter	2 Dokumen	10.000.000	
		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kecamatan Nguter	4 Dokumen	5.000.000			Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kecamatan Nguter	0	0	Menyesuaikan kebutuhan dan kesediaan anggaran
		Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kecamatan Nguter	5 Dokumen	5.000.000			Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kecamatan Nguter	5 Dokumen	5.000.000	
		Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kecamatan Nguter	2 Dokumen	10.000.000			Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kecamatan Nguter	2 Dokumen	10.000.000	
		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Nguter	1 Dokumen	5.000.000			Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Nguter	0	0	Menyesuaikan kebutuhan dan kesediaan anggaran
		Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Kecamatan Nguter	1 Dokumen	20.000.000			Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Kecamatan Nguter	1 Dokumen	20.000.000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA			**Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kecamatan Nguter**	**100%**	**3.119.566.040**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kecamatan Nguter**	**100%**	**3.119.566.040**	

	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		***Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	***Kecamatan Nguter***	100%	28.000.000		***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***		***Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	***Kecamatan Nguter***	100%	28.000.000	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Nguter	1 Dokumen	10.000.000			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Nguter	1 Dokumen	10.000.000	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Nguter	1 Dokumen	3.000.000			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Nguter	1 Dokumen	3.000.000	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kecamatan Nguter	1 Dokumen	3.000.000			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kecamatan Nguter	1 Dokumen	3.000.000	
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kecamatan Nguter	1 Dokumen	3.000.000			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kecamatan Nguter	1 Dokumen	3.000.000	
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kecamatan Nguter	1 Dokumen	3.000.000			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kecamatan Nguter	1 Dokumen	3.000.000	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Nguter	12 Laporan	3.000.000			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Nguter	12 Laporan	3.000.000	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Nguter	1 laporan	3.000.000			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Nguter	1 laporan	3.000.000	

	Administrasin Keuangan Perangkat Daerah		***Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	***Kecamatan Nguter***	**100%**	**2.158.696.000**		***Administrasin Keuangan Perangkat Daerah***		***Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	***Kecamatan Nguter***	**100%**	**2.158.696.000**	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Nguter	16 Orang/bulan	2.043.346.000			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Nguter	16 Orang/bulan	2.043.346.000	
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kecamatan Nguter	12 Dokumen	103.350.000			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kecamatan Nguter	12 Dokumen	103.350.000	
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kecamatan Nguter	1 Dokumen	3.000.000			Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kecamatan Nguter	1 Dokumen	3.000.000	
		Koorodinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Nguter	1 Laporan	2.400.000			Koorodinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Nguter	1 Laporan	2.400.000	
		Koorodinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kecamatan Nguter	20 Laporan	3.600.000			Koorodinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kecamatan Nguter	20 Laporan	3.600.000	
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kecamatan Nguter	2 Dokumen	3.000.000			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kecamatan Nguter	2 Dokumen	3.000.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		***Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***	***Kecamatan Nguter***	***100%***	***34.000.000***		***Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***		***Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***	***Kecamatan Nguter***	***100%***	***34.000.000***	
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kecamatan Nguter	24 Paket	8.100.000			Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kecamatan Nguter	0	0	Menyesuiakan kebutuhan dan kesediaan

														anggaran
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kecamatan Nguter	40 Dokumen	6.000.000			Monitoring , evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kecamatan Nguter	40 Dokumen	6.000.000	
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kecamatan Nguter	25 Orang	23.000.000			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kecamatan Nguter	25 Orang	23.000.000	
		Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan Nguter	25 Orang	5.000.000			Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan Nguter	24 Orang	5.000.000	
	Administrasin Umum Perangkat Daerah		**Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	***Kecamatan Nguter***	**100%**	**280.565.000**		***Administrasin Umum Perangkat Daerah***		**Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	***Kecamatan Nguter***	**100%**	**280.565.000**	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Nguter	12 Paket	6.000.000			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Nguter	12 Paket	6.000.000	
		Penyediaan Peralatan Rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kecamatan Nguter	15 Paket	24.200.000			Penyediaan Peralatan Rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kecamatan Nguter	15 Paket	24.200.000	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kecamatan Nguter	4 Paket	185.365..000			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kecamatan Nguter	4 Paket	185.365..000	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kecamatan Nguter	12 Paket	15.000.000			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kecamatan Nguter	12 Paket	15.000.000	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kecamatan Nguter	3 Dokumen	5.000.000			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kecamatan Nguter	3 Dokumen	5.000.000	

		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Nguter	235 Laporan	45.000.000			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Nguter	235 Laporan	45.000.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		**Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	***Kecamatan Nguter***	**100%**	**64.895.000**		***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***		**Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	***Kecamatan Nguter***	**100%**	**64.895.000**	
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kecamatan Nguter	3 Unit	13.750.000			Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kecamatan Nguter	3 Unit	13.750.000	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kecamatan Nguter	10 Unit	51.145.000			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kecamatan Nguter	10 Unit	51.145.000	
	Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		***Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Kecamatan Nguter***	**100%**	**273.360.000**		***Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***		***Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Kecamatan Nguter***	**100%**	**273.360.000**	
		Penyedia jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Nguter	12 laporan	15.000.000			Penyedia jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Nguter	12 laporan	15.000.000	
		Penyedia jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kecamatan Nguter	12 laporan	70.300.000			Penyedia jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kecamatan Nguter	12 laporan	70.300.000	
		Penyedia jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kecamatan Nguter	12 laporan	188.060.000			Penyedia jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kecamatan Nguter	12 laporan	188.060.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		***Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Kecamatan Nguter***	***100%***	***280.050.000***		***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***		***Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Kecamatan Nguter***	***100%***	***280.050.000***	
		Penyedia jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kecamatan Nguter	11 Unit	60.550.000			Penyedia jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kecamatan Nguter	11 Unit	60.550.000	

		Penyedia jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak dan Perizinan Kendnaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kecamatan Nguter	1 Unit	10.000.000			Penyedia jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak dan Perizinan Kendnaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kecamatan Nguter	1 Unit	10.000.000	
		Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Kecamatan Nguter	40 Unit	6.000.000			Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Kecamatan Nguter	40 Unit	6.000.000	
		Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kecamatan Nguter	27 Unit	13.500.000			Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kecamatan Nguter	27 Unit	13.500.000	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kecamatan Nguter	1 Unit	40.000.000			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kecamatan Nguter	1 Unit	40.000.000	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Kecamatan Nguter	2 Unit	150.000.000			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Kecamatan Nguter	2 Unit	150.000.000	
JUMLAH						**3.683.516.040**			**JUMLAH**				**3.660.416.040**	

1)

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

A. Telaahan Terhadap Kebijakan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo

Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan yang ada di Kabupaten Sukoharjo, agar lebih terarah dan berhasil guna serta berdaya guna, maka pemerintah bersama-sama masyarakat Kabupaten Sukoharjo telah menetapkan visi, misi dan strategi dalam mencapai tujuannya yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 - 2026.

1. VISI

Visi pembangunan Kabupaten Sukoharjo tahun 2021-2026 merupakan implementasi dari visi Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo periode tahun 2021-2026 yaitu:

“Mewujudkan masyarakat Sukoharjo Yang Lebih Makmur”

Visi pembangunan daerah Kabupaten Sukoharjo tahun 2021-2026 merupakan keberlanjutan dari cita-cita pembangunan Kabupaten Sukoharjo tahun 2016-2020.

Mengandung arti bahwa dalam lima tahun ke depan masyarakat Kabupaten Sukoharjo akan tercipta kondisi sejahtera, terpenuhi seluruh kebutuhan hidupnya baik sosial maupun ekonomi, secara lahir maupun batin. MAKMUR juga merupakan motto atau slogan Kabupaten Sukoharjo yaitu **Maju, Aman, Konstitusional**, **Mantap, Unggul, dan Rap**i.

MAJU

Maju mempunyai pengertian bergerak kedepan menjadi lebih baik, tidak berhenti, tidak terlambat, mencapai tingkat peradaban yang lebih tinggi.Sebagai tugas panggilan dalam hidup. Dengan maju kita ingin tumbuh dan berkembang, dan selalu berpikr dan berusaha keras kearah peningkatan menjadi lebih baik.

AMAN

Keamanan merupakan salah satu unsur/syarat mutlak untuk dapat terlaksananya pembangunan.Tanpa stabilitas keamanan yang terpelihara secara mantap dan berkesinambungan, tidak mungkin kegiatan pembangunan dapat terlaksana dengan lancar.

KONSTITUSIONAL

Penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, maupun kemasyarakatan harus dilandasi hukum atau dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum.

MANTAP

Warga masyarakat dan segenap penyelenggara pemerintahan optimis dalam membangun Sukoharjo.

UNGGUL

Unggul mempunyai arti semangat berprestasi untuk selalu berusaha mencapai yang terbaik.

RAPI

Rapi mengandung pengertian apik, baik, bersih, teratur, tertib, beres.

2. MISI

Dalam rangka upaya menuju pencapaian visi pembangunan daerah Kabupaten Sukoharjo tahun 2021-2026, ditetapkan misi pembangunan daerah yaitu:

1. **Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Percepatan Reformasi Birokrasi**

   Misi kesatu ini bertujuan untuk semakin mempercepat implementasi reformasi birokrasi secara optimal, yang pada periode sebelumnya telah terwujud dalam membaiknya tata kelola pemerintahan Kabupaten Sukoharjo.

   Reformasi birokrasi yang diharapkan kedepan adalah pada tiga dimensi utama yaitu pelayanan publik yang semakin dinamis, efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan, kapasitas kelembagaan, serta manajemen sumber daya manusia aparatur yang

semakin baik.Pelayanan publik yang dinamis diwujudkan dengan membangun open government dan pemerintahan yang responsif. Open government dilakukan dengan perkuatan keterbukaan informasi publik, transparansi, partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta meningkatkan komunikasi dan serapan aspirasi publik.

Sedangkan pemerintahan yang responsif tercermin dalam respon pemerintah kabupaten dalam menghadapi aduan dan persoalan riil masyarakat, dengan cepat dan tepat, baik dalam bentuk kebijakan maupun kegiatan.Pelayanan publik yang dinamis, terbuka, dan responsif diikat dalam satu tagline pelayanan yang mudah, murah, cepat, serta didukung inovasi dan teknologi informasi.

Efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan tergambarkan dalam proses perencanaan, penganggaran, serta evaluasi pembangunan yang akuntabel. Manajemen pembangunan Kabupaten Sukoharjo kedepan tidak hanya fokus pada kerja tetapi kinerja, dan berorientasi pada hasil (outcome). Untuk itu perlu juga dilakukan pengawasan dalam prosesnya, sejak dimulainya proses perencanaan, implementasi hingga evaluasi.

Agar dapat melaksanakan manajemen pemerintahan yang baik dan bersih maka dibutuhkan kelembagaan/organisasi yang tepat dan didukung dengan penataan sistem manajemen sumberdaya manusia aparatur yang baik.Manajemen sumber daya manusia aparatur yang baik terejawantahkan dalam bentuk integritas aparatur yang dibangun melalui kompetensi dan etika menuju integritas pribadi dan institusi, mendorong birokrasi yang inovatif, dan dijamin dalam quality assurance aparatur.

2. **Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas**

Misi kedua mengarah pada kualitas dan daya saing sumberdaya manusia Sukoharjo, agar semakin sehat, pintar, berbudaya, dan lebih mencintai lingkungan.Era globalisasi yang semakin terbuka menuntut kualitas sumberdaya manusia yang mampu bersaing secara kompetitif dalam kompetensi dan kualifikasi. Bonus demografi yang saat ini telah dialami oleh Sukoharjo dapat dijadikan sebagai peluang sekaligus tantangan, bagaimana kedepan modal sosial ini akan menempatkan Sukoharjo sebagai salah satu daerah dengan sumberdaya manusia yang mampu bersaing. Sehingga diharapkan, dapat memberikan dampak pertumbuhan ekonomi yang semakin baik, dan menciptakan masyarakat Sukoharjo yang semakin sejahtera.

Tidak hanya tentang kualitas dan daya saing sumberdaya manusia yang diharapkan, namun juga bagaimana membentuk karakter masyarakat Sukoharjo yang semakin berbudaya. Di tengah arus keterbukaan informasi dunia yang nyata kemudian bagaimana masyarakat Sukoharjo tetap kuat menjaga etika dan norma serta nilai budaya asli Sukoharjo, serta menjaga kearifan lokal sejak dini.

3. **Memperkuat Perekonomian Rakyat Yang Berdaya Saing Tinggi**

Misi ketiga ini mempunyai tujuan mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan insklusif.Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang penting dalam melakukan pembangunan ekonomi yang terjadi pada suatu negara ataupun daerah.Pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan distribusi pendapatan yang merata sangat dibutuhkan dalam meningkatkan

kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah diukur dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan laju pertumbuhannya atas dasar harga konstan. Pertumbuhan ekonomi yang cepat akan menimbulkan ketimpangan distribusi pendapatan. Hal ini disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang bersifat sentralisasi. Pada tahun 1999 pemerintah mengubah kebijakan sentralisasi menjadi desentralisasi dengan memberlakukan Otonomi Daerah. Hal tersebut memberikan harapan dalam upaya mengurangi tingkat kemiskinan dan ketimpangan antar daerah.

Misi ini adalah untuk mengarahkan kebijakan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam rangka menurunkan jumlah penduduk miskin, yang didukung oleh perekonomian daerah yang stabil, berkualitas, inklusif, dan menyebar. Program pengentasan kemiskinan difokuskan kepada kelompok sasaran utama, seperti petani pelaku UKM dan pekerja dan kelompok rentan lainnya. Program pengentasan kemisikinan tersebut perlu didukung oleh pertumbuhan ekonomi yang tersebar, inklusif, dan berkualitas, yakni pertumbuhan ekonomi yang menyebar di seluruh wilayah Sukoharjo, memperhitungkan kelestarian lingkungan dan keberlangsungan ketersediaan sumber daya, melibatkan seluruh kelompok masyarakat dengan mengutamakan peran dan kontribusi kelompok masyarakat yang kurang beruntung, dan menghapus praktek ekonomi biaya tinggi.

4. Memperkuat Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan

Misi keempat mengarah kepada pembangunan infrastruktur akan terus dilaksanakan untuk

mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar, yang akan dilaksanakan dengan penguatan konektivitas, penyediaan akses perumahan, permukiman, air minum dan sanitasi yang layak, telekomunikasi dan transportasi yang aman dan memadai.

Pembangunan berwawasan lingkungan hidup dilakukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan meningkatkan kualitas hidup manusia.Untuk menjaga kelestarian lingkungan agar kualitas lingkungan hiudp tetap terjaga, pemanfaatan sumber daya alam harus dilakukan secara bijaksana, adil, efisien, dan bertanggungjawab serta lingkungan yang tangguh bencana.

5. **Meningkatkan Kualitas Kehidupan Sosial dan Keagamaan**

Misi ini menggambarkan sebuah kondisi yang ingin diciptakan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera, tercermin dari rasa aman dan nyaman yang dirasakan dalam kehidupan masyarakat.Kondisi yang tercipta merupakan manifestasi implementasi nilai-nilai religius dalam kehidupan masyarakat. Membangun masyarakat Sukoharjo yang religius, toleran, dan guyup ini adalah dengan menciptakan kondisi obyektif yang memungkinkan interaksi antar umat beragama untuk saling menghormati dan menghargai satu sama lain, mendorong keberagaman, kebhinekaan, dan toleransi dalam kerangka kesatuan.

Upaya yang dilakukan antara lain dengan menguatkan pemahaman keberagaman dan kebhinekaan sejak usia dini, mengembangkan ruang-ruang publik untuk membangun komunikasi antar masyarakat melalui kegiatan seni dan rekreasi, serta mendorong kearifan lokal dalam bentuk gerakan-

gerakan masyarakat termasuk gerakan gotong royong. Dalam misi ini terkandung tujuan untuk menciptakan kehidupan masyarakat Sukoharjo yang aman dan nyaman, tanpa ada konflik sosial maupun agama, bahkan konflik SARA.

Misi yang dapat dijabarkan oleh Perangkat Daerah Kecamatan adalah Misi kesatu, yaitu "**Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Percepatan Reformasi Birokrasi"**

Tabel 2.6
Telaah Visi, Misi, Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

VISI : MEWUJUDKAN MASYARAKAT SUKOHARJO YANG LEBIH MAKMUR.

MISI 1	PROGRAM	TUSI OPD	PERMASALAHAN PELAYANAN OPD	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT
Mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik melalui percepatan reformasi birokrasi	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan publik	Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan	Masih ada sebagian jenis pelayanan administrasi kependudukan yang belum bisa dilayani ditingkat Kecamatan	Kapasitas dan kualitas aparatur serta sarana prasarana cukup memadai	Regulasi dan kebijakan pelayanan administrasi kependudukan sampai di tingkat Kecamatan masih lemah
	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kalurahan	Pengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat	Masih kurangnya kesadaran dan peran serta masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan wilayah Perlu peningkatan kualitas sarana dan prasarana di Desa khususnya jaringan Internet Desa	Mekanisme perencannaan yang cukup baik Sumber pembiayaan cukup tersedia	Kesadaran warga masih rendah Kebijakan di tingkat desa masih rendah
Mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik melalui percepatan reformasi birokrasi	Koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum	Pengkoordinasian Upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Pemahaman warga masyarakat tentang peraturan perundangan belum optimal.	Anggaran untuk kegiatan sosialisasi cukup memadai.	Kesadaran warga masih kurang
		Pengkoordinasian penerapan dan penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	Masih perlu peningkatan peran serta warga terhadap penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Peran media social cukup efektif.	Sosialisasi peraturan perundangan masih masih kurang

	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Belum terwujudnya sinkronisasi data sebagai dasar pengambilan kebijakan terkait dengan bantuan sosial. Perlu peningkatan upaya strategis dalam rangka penanganan pandemi covid-19 terutama dari aspek ekomoni, kesehatan dan sosial	Dukungan SDM dan Sarana prasarana Dukungan SDM , sarana prasarana dan pembiayaan	Kebijakan antar unit kerja masih lemah Kebijakan di semua lini pemerintahan masih kurang
	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Pembinaan dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa	Belum optimalnya kinerja aparatur Pemerintahan Desa	Peningkatan kesejahteraan aparatur pemerintah desa.	Paradigma pola kerja tradisional.
	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan	Perlu peningkatan sinergitas antar unit kerja dalam pelayanan kepada warga masyarakat	Kualitas SDM dan sarana prasarana.	Aspek regulasi masih lemah

B. **Tujuan dan Sasaran**

1. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran/implementasi dari pernyataan visi dan misi Bupati Sukoharjo terpilih. Tujuan adalah sesuatu yang ingin dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan yang akan dicapai oleh Perangkat Daerah Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo adalah sebagai berikut :

“Terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel”

2. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan. Sasaran yang akan diraih Perangkat Daerah Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo adalah :

a. Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat yang di jabarkan dalam beberapa Program antara lain :
    1) Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
    2) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
    3) Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
    4) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
    5) Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
b. Meningkatnya kualitas aparatur dan pelayanan publik yang di jabarkan dalam Program antara lain :
    1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Nguter Tahun 2024 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan Kecamatan Nguter Tahun 2024 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 4.1

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Nguter

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Nguter

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
										Target Capaian Kinerja					Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Tolok Ukur	Target	
					Kecamatan Nguter								3.660.416.040,00				4.250.875.000,00
7					UNSUR KEWILAYAHAN								3.660.416.040,00				4.250.875.000,00
7	01				KECAMATAN								3.660.416.040,00				4.250.875.000,00
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								3.119.566.040,00				3.356.875.000,00
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								28.000.000,00				34.000.000,00
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah												
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Sukoharjo, Nguter, Semua Kel/Desa	100 %	1 Dokumen	100 %	10.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	10.000.000,00
7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD												
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Sukoharjo, Nguter, Semua Kel/Desa	100 %	1 Dokumen	100 %	3.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	4.000.000,00
7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD												
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Sukoharjo, Nguter, Semua Kel/Desa	100 %	1 Dokumen	100 %	3.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	4.000.000,00
7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD												
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Sukoharjo, Nguter, Semua Kel/Desa	100 %	1 Dokumen	100 %	3.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	4.000.000,00
7	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD												
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Sukoharjo, Nguter, Semua Kel/Desa	100 %	1 Dokumen	100 %	3.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	4.000.000,00
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD												

						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Sukoharjo, Nguter, Semua Kel/Desa	100 %	12 Laporan	100 %	3.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	4.000.000,00
7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Sukoharjo, Nguter, Semua Kel/Desa	100 %	1 Laporan	100 %	3.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	4.000.000,00
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								2.158.696.000,00				2.330.000.000,00
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN												
						-	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Sukoharjo, Nguter, Semua Kel/Desa	-	16 Orang/bulan	100 %	2.043.346.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16 Orang/bulan	2.200.000.000,00
7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD												
						-	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Sukoharjo, Nguter, Semua Kel/Desa	-	12 Dokumen	100 %	103.350.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	115.000.000,00
7	01	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD												
						-	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Sukoharjo, Nguter, Semua Kel/Desa	-	1 Dokumen	100 %	3.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	3.000.000,00
7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD												
						-	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Sukoharjo, Nguter, Semua Kel/Desa	-	1 Laporan	100 %	2.400.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	3.000.000,00
7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD												
						-	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Sukoharjo, Nguter, Semua Kel/Desa	-	20 Laporan	100 %	3.600.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	20 Laporan	6.000.000,00
7	01	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran												

						-	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Sukoharjo, Nguter, Semua Kel/Desa	-	2 Dokumen	100 %	3.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	3.000.000,00
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								34.000.000,00				76.875.000,00
7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya												
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Sukoharjo, Nguter, Semua Kel/Desa	100 %	24 Paket	100 %	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	24 Paket	16.875.000,00
7	01	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian												
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Sukoharjo, Nguter, Semua Kel/Desa	100 %	40 Dokumen	100 %	6.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	40 Dokumen	10.000.000,00
7	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi												
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Sukoharjo, Nguter, Semua Kel/Desa	100 %	25 Orang	100 %	23.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	25 Orang	25.000.000,00
7	01	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan												
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Sukoharjo, Nguter, Semua Kel/Desa	100 %	25 Orang	100 %	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	25 Orang	25.000.000,00
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								280.565.000,00				231.000.000,00
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor												
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Sukoharjo, Nguter, Semua Kel/Desa	100 %	12 Paket	100 %	6.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	6.000.000,00
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor												
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Sukoharjo, Nguter, Semua Kel/Desa	100 %	2 Paket	100 %	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	20.000.000,00
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga												
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Persentase cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Sukoharjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sukoharjo, Nguter, Semua Kel/Desa	100 %	15 Paket	100 %	24.200.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	15 Paket	20.000.000,00
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor												

						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Sukoharjo, Nguter, Semua Kel/Desa	100 %	4 Paket	100 %	185.365.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	120.000.000,00
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan												
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Sukoharjo, Nguter, Semua Kel/Desa	100 %	12 Paket	100 %	15.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	15.000.000,00
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan												
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Persentase cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Sukoharjo, Nguter, Semua Kel/Desa	100 %	3 Dokumen	100 %	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	5.000.000,00
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD												
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Sukoharjo, Nguter, Semua Kel/Desa	100 %	235 Laporan	100 %	45.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	235 Laporan	45.000.000,00
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								64.895.000,00				205.000.000,00
7	01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan												
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Sukoharjo, Nguter, Semua Kel/Desa	100 %	5 Unit	100 %	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	5 Unit	100.000.000,00
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel												
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Sukoharjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	3 Unit	100 %	13.750.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	25.000.000,00
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya												
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Sukoharjo, Nguter, Semua Kel/Desa	100 %	10 Unit	100 %	51.145.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	50.000.000,00
7	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya												
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Sukoharjo, Nguter, Semua Kel/Desa	100 %	4 Unit	100 %	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	30.000.000,00
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								273.360.040,00				270.000.000,00
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat												

						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sukoharjo, Nguter, Semua Kel/Desa	100 %	12 Laporan	100 %	15.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	15.000.000,00
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik												
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sukoharjo, Nguter, Semua Kel/Desa	100 %	12 Laporan	100 %	70.300.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	75.000.000,00
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor												
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sukoharjo, Nguter, Semua Kel/Desa	100 %	12 Laporan	100 %	188.060.040,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	180.000.000,00
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								280.050.000,00				210.000.000,00
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan												
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sukoharjo, Nguter, Semua Kel/Desa	100 %	11 Unit	100 %	60.550.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	11 Unit	0,00
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan												
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sukoharjo, Nguter, Semua Kel/Desa	100 %	1 Unit	100 %	10.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	10.000.000,00
7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel												
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sukoharjo, Nguter, Semua Kel/Desa	100 %	40 Unit	100 %	6.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Mebel yang Dipelihara	40 Unit	10.000.000,00
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya												
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sukoharjo, Nguter, Semua Kel/Desa	100 %	27 Unit	100 %	13.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	27 Unit	20.000.000,00
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya												
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sukoharjo, Nguter, Semua Kel/Desa	100 %	1 Unit	100 %	40.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	90.000.000,00
7	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya												

						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sukoharjo, Nguter, Semua Kel/Desa	100 %	2 Unit	100 %	150.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	80.000.000,00
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								20.000.000,00				44.000.000,00
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								0,00				22.000.000,00
7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait												
						Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Cakupan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kab. Sukoharjo, Nguter, Semua Kel/Desa	100 %	1 Laporan	100 %	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	12.000.000,00
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan												
						Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Cakupan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kab. Sukoharjo, Nguter, Semua Kel/Desa	100 %	2 Dokumen	100 %	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	10.000.000,00
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan								20.000.000,00				22.000.000,00
7	01	02	2.02	0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan												
						Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di	Kab. Sukoharjo, Nguter, Semua Kel/Desa	100 %	1 Laporan	100 %	10.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	12.000.000,00
7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan												
						Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di	Kab. Sukoharjo, Nguter, Semua Kel/Desa	100 %	2 Laporan	100 %	10.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	10.000.000,00
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								119.850.000,00				170.000.000,00
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa								25.000.000,00				35.000.000,00
7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa												
						Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Cakupan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kab. Sukoharjo, Nguter, Semua Kel/Desa	100 %	16 Lembaga Kemasyarakatan	100 %	10.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	16 Lembaga Kemasyarakatan	15.000.000,00
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan												

						Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Cakupan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kab. Sukoharjo, Nguter, Semua Kel/Desa	100 %	2 Laporan	100 %	15.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	20.000.000,00
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan								94.850.000,00				135.000.000,00
7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan												
						Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Cakupan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kab. Sukoharjo, Nguter, Semua Kel/Desa	100 %	1 Lembaga Kemasyarakatan	100 %	84.850.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	1 Lembaga Kemasyarakatan	90.000.000,00
7	01	03	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan												
						Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Cakupan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kab. Sukoharjo, Nguter, Semua Kel/Desa	100 %	1 Lembaga Kemasyarakatan	100 %	10.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Lembaga Kemasyarakatan	15.000.000,00
7	01	03	2.03	0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat												
						Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Cakupan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kab. Sukoharjo, Nguter, Semua Kel/Desa	100 %	1 Laporan	100 %	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan	30.000.000,00
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								30.000.000,00				210.000.000,00
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum								20.000.000,00				200.000.000,00
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan												
						-	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Cakupan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kab. Sukoharjo, Nguter, Semua Kel/Desa	-	2 Laporan	100 %	10.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	20.000.000,00
7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat												
						-	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Cakupan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kab. Sukoharjo, Nguter, Semua Kel/Desa	-	4 Laporan	100 %	10.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	4 Laporan	180.000.000,00
7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah								10.000.000,00				10.000.000,00
7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian												

						Persentase capaian ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Cakupan Koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Kab. Sukoharjo, Nguter, Semua Kel/Desa	100 %	2 Laporan	100 %	10.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	2 Laporan	10.000.000,00
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM								316.000.000,00				326.000.000,00
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah								316.000.000,00				326.000.000,00
7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar												
						Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kab. Sukoharjo, Nguter, Semua Kel/Desa	100 %	80 Orang	100 %	150.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	80 Orang	150.000.000,00
7	01	05	2.01	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional												
						Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kab. Sukoharjo, Nguter, Semua Kel/Desa	100 %	100 Orang	100 %	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	100 Orang	10.000.000,00
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan												
						Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kab. Sukoharjo, Nguter, Semua Kel/Desa	100 %	12 Dokumen	100 %	166.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	166.000.000,00
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA								55.000.000,00				144.000.000,00
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa								55.000.000,00				144.000.000,00
7	01	06	2.01	0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa												

						Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kab. Sukoharjo, Nguter, Semua Kel/Desa	100 %	2 Dokumen	100 %	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	2 Dokumen	10.000.000,00
7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa											
						Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kab. Sukoharjo, Nguter, Semua Kel/Desa	100 %	2 Dokumen	100 %	10.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	2 Dokumen	15.000.000,00
7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa											
						Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kab. Sukoharjo, Nguter, Semua Kel/Desa	100 %	2 Dokumen	100 %	10.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	2 Dokumen	20.000.000,00
7	01	06	2.01	0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa											
						Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kab. Sukoharjo, Nguter, Semua Kel/Desa	100 %	2 Dokumen	100 %	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	2 Dokumen	10.000.000,00
7	01	06	2.01	0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa											
						Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kab. Sukoharjo, Nguter, Semua Kel/Desa	100 %	5 Dokumen	100 %	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	5 Dokumen	10.000.000,00
7	01	06	2.01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa											
						Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kab. Sukoharjo, Nguter, Semua Kel/Desa	100 %	2 Dokumen	100 %	10.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	2 Dokumen	10.000.000,00
7	01	06	2.01	0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan											
						Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kab. Sukoharjo, Nguter, Semua Kel/Desa	100 %	1 Dokumen	100 %	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	1 Dokumen	5.000.000,00
7	01	06	2.01	0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif											

						Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kab. Sukoharjo, Nguter, Semua Kel/Desa	100 %	1 Dokumen	100 %	20.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	1 Dokumen	20.000.000,00
7	01	06	2.01	0014	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga											
						Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kab. Sukoharjo, Nguter, Semua Kel/Desa	100 %	1 Dokumen	100 %	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	1 Dokumen	10.000.000,00
7	01	06	2.01	0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya											
						Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kab. Sukoharjo, Nguter, Semua Kel/Desa	100 %	2 Laporan	100 %	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	2 Laporan	24.000.000,00
7	01	06	2.01	0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan											
						Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kab. Sukoharjo, Nguter, Semua Kel/Desa	100 %	2 Laporan	100 %	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	10.000.000,00
												TOTAL	**3.660.416.040,00**			**4.250.875.000,00**

Tabel 4.2

Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Nguter Tahun 2024

NO			PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU PENDANAAN (Rp.)
P	K	sub K		
1			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	20.000.000
	1		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	20.000.000
		1	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	10.000.000
		2	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	10.000.000
2			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	119.850.000
	2		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	25.000.000
		3	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10.000.000
		4	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	15.000.000
	3		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	94.850.000
		5	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	84.850.000
		6	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000
3			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	30.000.000
	4		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	20.000.000
		7	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	10.000.000
		8	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	10.000.000
	5		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	10.000.000
		9	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	10.000.000
4			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	316.000.000
	6		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	316.000.000

		10	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	150.000.000
			Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	166.000.000
5			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	55.000.000
	7		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	55.000.000
		11	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	10.000.000
		12	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	10.000.000
		13	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	-
		14	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	5.000.000
		15	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	10.000.000
			Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	20.000.000
6			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.119.566.040
	8		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	28.000.000
		16	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.000.000
		17	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.000.000
		18	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.000.000
		19	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.000.000
		20	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	3.000.000
		21	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.000.000
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.000.000
	9		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.158.696.000
		22	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.043.346.000
		23	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	103.350.000
		24	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	3.000.000
		25	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.400.000
		26	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3.600.000
		27	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	3.000.000

	10		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	34.000.000
		28	Pendataan dan Pengolahan Administrasi kepegawaian	6.000.000
		29	Pendidikan dan Pelatihan Formal	23.000.000
		30	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	5.000.000
	11		Administrasi Umum Perangkat Daerah	280.565.000
		31	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.000.000
		32	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	24.200.000
		33	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	185.365.000
		34	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	15.000.000
		35	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.000.000
		36	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	45.000.000
	12		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	64.895.000
		37	Pengadaan Mebel	13.750.000
		38	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	51.145.000
	13		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	273.360.040
		39	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.000.000
		40	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	70.300.000
		41	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	188.060.040
	14		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	280.050.000
		42	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	60.550.000
		43	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	10.000.000
		44	Pemeliharaan Mebel	6.000.000
		45	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13.500.000
		46	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	40.000.000
		47	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	150.000.000
JUMLAH				**3.660.416.040**

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Nguter Tahun 2024 merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran, program dan kegiatan Kecamatan Nguter selama 1 (satu) tahun mendatang yang mengacu pada Rencana Straategis (Renstra) Kecamatan Nguter .

Renja SKPD Kecamatan Nguter Tahun 2024 yang telah disusun ini hendaknya dilaksanakan secara konsisten, transparansi, jujur, partisipatif, penuh tanggung jawab dan merupakan pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-SKPD) Kecamatan Nguter .

Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) SKPD Kecamatan Nguter Tahun 2024, Camat Nguter melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penjabaran Renja Kecamatan Nguter Tahun 2024 dalam bentuk Rencana Kerjadan Anggaran Kecamatan setiap Kegiatan dan Sub Kegiatan.

Dengan mengharap keridhoan Alloh SWT, Tuhan Yang Maha Esa, semoga Rencana Kerjayang telah dibuat bersama-sama ini dapat diwujudkan bersama, untuk mencapai tujuan akhir bersama yaitu : **“Mewujudkan Masyarakat Sukoharjo Yang Lebih Makmur”**

Nguter, 10 Agustus 2023

CAMAT NGUTER

KABUPATEN SUKOHARJO

PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO KECAMATAN NGUTER

SUKATMAN, S.Sos., MM.

NIP. 19700614 198903 1 002

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
KECAMATAN NGUTER KAB. SUKOHARJO
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		KECAMATAN NGUTER						**3.660.416.040,00**							**4.250.875.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**3.660.416.040,00**							**4.250.875.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**3.660.416.040,00**							**4.250.875.000,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah***	**-**			**100 %**	**3.119.566.040,00**						**-**	**3.356.875.000,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	-			100 %	28.000.000,00			-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 3. Perkuatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa, kondusivitas wilayah, dan peningkatan kapasitas fiskal daerah serta kolaborasi yang inklusif	Semua ASN di Lingkup Kecamatan	-	34.000.000,00	KECAMATAN NGUTER
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Sukoharjo, Nguter, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 3. Perkuatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa, kondusivitas wilayah, dan peningkatan kapasitas fiskal daerah serta kolaborasi yang inklusif	Semua ASN di Lingkup Kecamatan		10.000.000,00	KECAMATAN NGUTER
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Sukoharjo, Nguter, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 3. Perkuatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa, kondusivitas wilayah, dan peningkatan kapasitas fiskal daerah serta kolaborasi yang inklusif	Semua ASN di Lingkup Kecamatan		4.000.000,00	KECAMATAN NGUTER
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Sukoharjo, Nguter, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 3. Perkuatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa, kondusivitas wilayah, dan peningkatan kapasitas fiskal daerah serta kolaborasi yang inklusif	Semua ASN di Lingkup Kecamatan		4.000.000,00	KECAMATAN NGUTER
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Sukoharjo, Nguter, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 3. Perkuatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa, kondusivitas wilayah, dan peningkatan kapasitas fiskal daerah serta kolaborasi yang inklusif	Semua ASN di Lingkup Kecamatan		4.000.000,00	KECAMATAN NGUTER
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Sukoharjo, Nguter, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 3. Perkuatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa, kondusivitas wilayah, dan peningkatan kapasitas fiskal daerah serta kolaborasi yang inklusif	Semua ASN di Lingkup Kecamatan		4.000.000,00	KECAMATAN NGUTER
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Laporan	3.000.000,00	Kab. Sukoharjo, Nguter, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 3. Perkuatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa, kondusivitas wilayah, dan peningkatan kapasitas fiskal daerah serta kolaborasi yang inklusif	Semua ASN di Lingkup Kecamatan		4.000.000,00	KECAMATAN NGUTER
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	3.000.000,00	Kab. Sukoharjo, Nguter, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 3. Perkuatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa, kondusivitas wilayah, dan peningkatan kapasitas fiskal daerah serta kolaborasi yang inklusif	Semua ASN di Lingkup Kecamatan		4.000.000,00	KECAMATAN NGUTER
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	-			100 %	2.158.696.000,00			-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 3. Perkuatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa, kondusivitas wilayah, dan peningkatan kapasitas fiskal daerah serta kolaborasi yang inklusif	Semua ASN di Lingkup Kecamatan	-	2.330.000.000,00	KECAMATAN NGUTER
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				16 Orang/bulan	2.043.346.000,00	Kab. Sukoharjo, Nguter, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 3. Perkuatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa, kondusivitas wilayah, dan peningkatan kapasitas fiskal daerah serta kolaborasi yang inklusif	Semua ASN di Lingkup Kecamatan		2.200.000.000,00	KECAMATAN NGUTER
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	103.350.000,00	Kab. Sukoharjo, Nguter, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 3. Perkuatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa, kondusivitas wilayah, dan peningkatan kapasitas fiskal daerah serta kolaborasi yang inklusif	Semua ASN di Lingkup Kecamatan		115.000.000,00	KECAMATAN NGUTER
	7.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Sukoharjo, Nguter, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 3. Perkuatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa, kondusivitas wilayah, dan peningkatan kapasitas fiskal daerah serta kolaborasi yang inklusif	Semua ASN di Lingkup Kecamatan		3.000.000,00	KECAMATAN NGUTER
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	2.400.000,00	Kab. Sukoharjo, Nguter, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 3. Perkuatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa, kondusivitas wilayah, dan peningkatan kapasitas fiskal daerah serta kolaborasi yang inklusif	Semua ASN di Lingkup Kecamatan		3.000.000,00	KECAMATAN NGUTER
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				20 Laporan	3.600.000,00	Kab. Sukoharjo, Nguter, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 3. Perkuatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa, kondusivitas wilayah, dan peningkatan kapasitas fiskal daerah serta kolaborasi yang inklusif	Semua ASN di Lingkup Kecamatan		6.000.000,00	KECAMATAN NGUTER
	7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				2 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Sukoharjo, Nguter, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 3. Perkuatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa, kondusivitas wilayah, dan peningkatan kapasitas fiskal daerah serta kolaborasi yang inklusif	Semua ASN di Lingkup Kecamatan		3.000.000,00	KECAMATAN NGUTER

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	-			100 %	34.000.000,00			-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 3. Perkuatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa, kondusivitas wilayah, dan peningkatan kapasitas fiskal daerah serta kolaborasi yang inklusif	Semua ASN di Lingkup Kecamatan	-	76.875.000,00	KECAMATAN NGUTER
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				24 Paket	0,00	Kab. Sukoharjo, Nguter, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 3. Perkuatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa, kondusivitas wilayah, dan peningkatan kapasitas fiskal daerah serta kolaborasi yang inklusif	Semua ASN di Lingkup Kecamatan		16.875.000,00	KECAMATAN NGUTER
	7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				40 Dokumen	6.000.000,00	Kab. Sukoharjo, Nguter, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 3. Perkuatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa, kondusivitas wilayah, dan peningkatan kapasitas fiskal daerah serta kolaborasi yang inklusif	Semua ASN di Lingkup Kecamatan		10.000.000,00	KECAMATAN NGUTER
	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				25 Orang	23.000.000,00	Kab. Sukoharjo, Nguter, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 3. Perkuatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa, kondusivitas wilayah, dan peningkatan kapasitas fiskal daerah serta kolaborasi yang inklusif	Semua ASN di Lingkup Kecamatan		25.000.000,00	KECAMATAN NGUTER
	7.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				25 Orang	5.000.000,00	Kab. Sukoharjo, Nguter, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 3. Perkuatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa, kondusivitas wilayah, dan peningkatan kapasitas fiskal daerah serta kolaborasi yang inklusif	Semua ASN di Lingkup Kecamatan		25.000.000,00	KECAMATAN NGUTER
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-			100 %	280.565.000,00			-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 3. Perkuatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa, kondusivitas wilayah, dan peningkatan kapasitas fiskal daerah serta kolaborasi yang inklusif	Semua ASN di Lingkup Kecamatan	-	231.000.000,00	KECAMATAN NGUTER
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	6.000.000,00	Kab. Sukoharjo, Nguter, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 3. Perkuatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa, kondusivitas wilayah, dan peningkatan kapasitas fiskal daerah serta kolaborasi yang inklusif	Semua ASN di Lingkup Kecamatan		6.000.000,00	KECAMATAN NGUTER
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	0,00	Kab. Sukoharjo, Nguter, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 3. Perkuatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa, kondusivitas wilayah, dan peningkatan kapasitas fiskal daerah serta kolaborasi yang inklusif	Semua ASN di Lingkup Kecamatan		20.000.000,00	KECAMATAN NGUTER
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				15 Paket	24.200.000,00	Kab. Sukoharjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sukoharjo, Nguter, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 3. Perkuatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa, kondusivitas wilayah, dan peningkatan kapasitas fiskal daerah serta kolaborasi yang inklusif	Semua ASN di Lingkup Kecamatan		20.000.000,00	KECAMATAN NGUTER
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	185.365.000,00	Kab. Sukoharjo, Nguter, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 3. Perkuatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa, kondusivitas wilayah, dan peningkatan kapasitas fiskal daerah serta kolaborasi yang inklusif	Semua ASN di Lingkup Kecamatan		120.000.000,00	KECAMATAN NGUTER
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	15.000.000,00	Kab. Sukoharjo, Nguter, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 3. Perkuatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa, kondusivitas wilayah, dan peningkatan kapasitas fiskal daerah serta kolaborasi yang inklusif	Semua ASN di Lingkup Kecamatan		15.000.000,00	KECAMATAN NGUTER
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				3 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Sukoharjo, Nguter, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 3. Perkuatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa, kondusivitas wilayah, dan peningkatan kapasitas fiskal daerah serta kolaborasi yang inklusif	Semua ASN di Lingkup Kecamatan		5.000.000,00	KECAMATAN NGUTER
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				235 Laporan	45.000.000,00	Kab. Sukoharjo, Nguter, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 3. Perkuatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa, kondusivitas wilayah, dan peningkatan kapasitas fiskal daerah serta kolaborasi yang inklusif	Semua ASN di Lingkup Kecamatan		45.000.000,00	KECAMATAN NGUTER
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	-			100 %	64.895.000,00			-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 3. Perkuatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa, kondusivitas wilayah, dan peningkatan kapasitas fiskal daerah serta kolaborasi yang inklusif	Semua ASN di Lingkup Kecamatan	-	205.000.000,00	KECAMATAN NGUTER
	7.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				5 Unit	0,00	Kab. Sukoharjo, Nguter, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 3. Perkuatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa, kondusivitas wilayah, dan peningkatan kapasitas fiskal daerah serta kolaborasi yang inklusif	Semua ASN di Lingkup Kecamatan		100.000.000,00	KECAMATAN NGUTER
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				3 Unit	13.750.000,00	Kab. Sukoharjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 3. Perkuatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa, kondusivitas wilayah, dan peningkatan kapasitas fiskal daerah serta kolaborasi yang inklusif	Semua ASN di Lingkup Kecamatan		25.000.000,00	KECAMATAN NGUTER
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	51.145.000,00	Kab. Sukoharjo, Nguter, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 3. Perkuatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa, kondusivitas wilayah, dan peningkatan kapasitas fiskal daerah serta kolaborasi yang inklusif	Semua ASN di Lingkup Kecamatan		50.000.000,00	KECAMATAN NGUTER
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				4 Unit	0,00	Kab. Sukoharjo, Nguter, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 3. Perkuatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa, kondusivitas wilayah, dan peningkatan kapasitas fiskal daerah serta kolaborasi yang inklusif	Semua ASN di Lingkup Kecamatan		30.000.000,00	KECAMATAN NGUTER

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			100 %	273.360.040,00			-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 3. Perkuatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa, kondusivitas wilayah, dan peningkatan kapasitas fiskal daerah serta kolaborasi yang inklusif	Semua ASN di Lingkup Kecamatan	-	270.000.000,00	KECAMATAN NGUTER
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	15.000.000,00	Kab. Sukoharjo, Nguter, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 3. Perkuatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa, kondusivitas wilayah, dan peningkatan kapasitas fiskal daerah serta kolaborasi yang inklusif	Semua ASN di Lingkup Kecamatan		15.000.000,00	KECAMATAN NGUTER
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	70.300.000,00	Kab. Sukoharjo, Nguter, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 3. Perkuatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa, kondusivitas wilayah, dan peningkatan kapasitas fiskal daerah serta kolaborasi yang inklusif	Semua ASN di Lingkup Kecamatan		75.000.000,00	KECAMATAN NGUTER
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	188.060.040,00	Kab. Sukoharjo, Nguter, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 3. Perkuatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa, kondusivitas wilayah, dan peningkatan kapasitas fiskal daerah serta kolaborasi yang inklusif	Semua ASN di Lingkup Kecamatan		180.000.000,00	KECAMATAN NGUTER

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			100 %	280.050.000,00			-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 3. Perkuatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa, kondusivitas wilayah, dan peningkatan kapasitas fiskal daerah serta kolaborasi yang inklusif	Semua ASN di Lingkup Kecamatan	-	210.000.000,00	KECAMATAN NGUTER
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				11 Unit	60.550.000,00	Kab. Sukoharjo, Nguter, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 3. Perkuatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa, kondusivitas wilayah, dan peningkatan kapasitas fiskal daerah serta kolaborasi yang inklusif	Semua ASN di Lingkup Kecamatan		0,00	KECAMATAN NGUTER
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	10.000.000,00	Kab. Sukoharjo, Nguter, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 3. Perkuatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa, kondusivitas wilayah, dan peningkatan kapasitas fiskal daerah serta kolaborasi yang inklusif	Semua ASN di Lingkup Kecamatan		10.000.000,00	KECAMATAN NGUTER
	7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				40 Unit	6.000.000,00	Kab. Sukoharjo, Nguter, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 3. Perkuatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa, kondusivitas wilayah, dan peningkatan kapasitas fiskal daerah serta kolaborasi yang inklusif	Semua ASN di Lingkup Kecamatan		10.000.000,00	KECAMATAN NGUTER
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				27 Unit	13.500.000,00	Kab. Sukoharjo, Nguter, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 3. Perkuatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa, kondusivitas wilayah, dan peningkatan kapasitas fiskal daerah serta kolaborasi yang inklusif	Semua ASN di Lingkup Kecamatan		20.000.000,00	KECAMATAN NGUTER
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	40.000.000,00	Kab. Sukoharjo, Nguter, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 3. Perkuatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa, kondusivitas wilayah, dan peningkatan kapasitas fiskal daerah serta kolaborasi yang inklusif	Semua ASN di Lingkup Kecamatan		90.000.000,00	KECAMATAN NGUTER
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	150.000.000,00	Kab. Sukoharjo, Nguter, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 3. Perkuatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa, kondusivitas wilayah, dan peningkatan kapasitas fiskal daerah serta kolaborasi yang inklusif	Semua ASN di Lingkup Kecamatan		80.000.000,00	KECAMATAN NGUTER
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	***Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik***	**-**			**100 %**	**20.000.000,00**						**-**	**44.000.000,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Cakupan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*	-			100 %	0,00			-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 3. Perkuatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa, kondusivitas wilayah, dan peningkatan kapasitas fiskal daerah serta kolaborasi yang inklusif	Pelayanan di Kecamatan Nguter	-	22.000.000,00	KECAMATAN NGUTER
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	0,00	Kab. Sukoharjo, Nguter, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 3. Perkuatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa, kondusivitas wilayah, dan peningkatan kapasitas fiskal daerah serta kolaborasi yang inklusif	Pelayanan di Kecamatan Nguter		12.000.000,00	KECAMATAN NGUTER
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				2 Dokumen	0,00	Kab. Sukoharjo, Nguter, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 3. Perkuatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa, kondusivitas wilayah, dan peningkatan kapasitas fiskal daerah serta kolaborasi yang inklusif	Pelayanan di Kecamatan Nguter		10.000.000,00	KECAMATAN NGUTER

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan*	-			100 %	20.000.000,00			-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 3. Perkuatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa, kondusivitas wilayah, dan peningkatan kapasitas fiskal daerah serta kolaborasi yang inklusif	Masyarakat	-	22.000.000,00	KECAMATAN NGUTER
	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	10.000.000,00	Kab. Sukoharjo, Nguter, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 3. Perkuatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa, kondusivitas wilayah, dan peningkatan kapasitas fiskal daerah serta kolaborasi yang inklusif	Masyarakat		12.000.000,00	KECAMATAN NGUTER
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				2 Laporan	10.000.000,00	Kab. Sukoharjo, Nguter, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 3. Perkuatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa, kondusivitas wilayah, dan peningkatan kapasitas fiskal daerah serta kolaborasi yang inklusif	Masyarakat		10.000.000,00	KECAMATAN NGUTER
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan***	**-**			**100 %**	**119.850.000,00**						**-**	**170.000.000,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Cakupan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa*	-			100 %	25.000.000,00			-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 3. Perkuatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa, kondusivitas wilayah, dan peningkatan kapasitas fiskal daerah serta kolaborasi yang inklusif	Musrenbangdes, BUMDes, UMKM, Instansi Swasta, Stakeholder terkait	-	35.000.000,00	KECAMATAN NGUTER
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				16 Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000,00	Kab. Sukoharjo, Nguter, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 3. Perkuatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa, kondusivitas wilayah, dan peningkatan kapasitas fiskal daerah serta kolaborasi yang inklusif	Musrenbangdes, BUMDes, UMKM, Instansi Swasta, Stakeholder terkait		15.000.000,00	KECAMATAN NGUTER
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				2 Laporan	15.000.000,00	Kab. Sukoharjo, Nguter, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 3. Perkuatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa, kondusivitas wilayah, dan peningkatan kapasitas fiskal daerah serta kolaborasi yang inklusif	Musrenbangdes, BUMDes, UMKM, Instansi Swasta, Stakeholder terkait		20.000.000,00	KECAMATAN NGUTER

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Cakupan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan*	-			100 %	94.850.000,00			-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 3. Perkuatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa, kondusivitas wilayah, dan peningkatan kapasitas fiskal daerah serta kolaborasi yang inklusif	Masyarakat, Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	135.000.000,00	KECAMATAN NGUTER
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				1 Lembaga Kemasyarakatan	84.850.000,00	Kab. Sukoharjo, Nguter, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 3. Perkuatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa, kondusivitas wilayah, dan peningkatan kapasitas fiskal daerah serta kolaborasi yang inklusif	Masyarakat, Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		90.000.000,00	KECAMATAN NGUTER
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				1 Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000,00	Kab. Sukoharjo, Nguter, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 3. Perkuatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa, kondusivitas wilayah, dan peningkatan kapasitas fiskal daerah serta kolaborasi yang inklusif	Masyarakat, Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		15.000.000,00	KECAMATAN NGUTER
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				1 Laporan	0,00	Kab. Sukoharjo, Nguter, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 3. Perkuatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa, kondusivitas wilayah, dan peningkatan kapasitas fiskal daerah serta kolaborasi yang inklusif	Masyarakat, Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		30.000.000,00	KECAMATAN NGUTER
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**-**	**-**			**-**	**30.000.000,00**						**-**	**210.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Cakupan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum*	-			100 %	20.000.000,00			-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 3. Perkuatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa, kondusivitas wilayah, dan peningkatan kapasitas fiskal daerah serta kolaborasi yang inklusif	Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Stakeholder terkait	-	200.000.000,00	KECAMATAN NGUTER
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				2 Laporan	10.000.000,00	Kab. Sukoharjo, Nguter, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 3. Perkuatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa, kondusivitas wilayah, dan peningkatan kapasitas fiskal daerah serta kolaborasi yang inklusif	Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Stakeholder terkait		20.000.000,00	KECAMATAN NGUTER
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				4 Laporan	10.000.000,00	Kab. Sukoharjo, Nguter, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 3. Perkuatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa, kondusivitas wilayah, dan peningkatan kapasitas fiskal daerah serta kolaborasi yang inklusif	Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Stakeholder terkait		180.000.000,00	KECAMATAN NGUTER
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	*Cakupan Koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah*	-			100 %	10.000.000,00			-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 3. Perkuatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa, kondusivitas wilayah, dan peningkatan kapasitas fiskal daerah serta kolaborasi yang inklusif	Linmas, Tokoh Masyarakat, Satpol	-	10.000.000,00	KECAMATAN NGUTER
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				2 Laporan	10.000.000,00	Kab. Sukoharjo, Nguter, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 3. Perkuatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa, kondusivitas wilayah, dan peningkatan kapasitas fiskal daerah serta kolaborasi yang inklusif	Linmas, Tokoh Masyarakat, Satpol		10.000.000,00	KECAMATAN NGUTER
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	***Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum***	**-**			**100 %**	**316.000.000,00**						**-**	**326.000.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah*	-			100 %	316.000.000,00			-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 3. Perkuatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa, kondusivitas wilayah, dan peningkatan kapasitas fiskal daerah serta kolaborasi yang inklusif	Paskibra Kecamatan, Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	-	326.000.000,00	KECAMATAN NGUTER
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				80 Orang	150.000.000,00	Kab. Sukoharjo, Nguter, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 3. Perkuatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa, kondusivitas wilayah, dan peningkatan kapasitas fiskal daerah serta kolaborasi yang inklusif	Paskibra Kecamatan, Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		150.000.000,00	KECAMATAN NGUTER
	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				100 Orang	0,00	Kab. Sukoharjo, Nguter, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 3. Perkuatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa, kondusivitas wilayah, dan peningkatan kapasitas fiskal daerah serta kolaborasi yang inklusif	Paskibra Kecamatan, Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		10.000.000,00	KECAMATAN NGUTER
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				12 Dokumen	166.000.000,00	Kab. Sukoharjo, Nguter, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 3. Perkuatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa, kondusivitas wilayah, dan peningkatan kapasitas fiskal daerah serta kolaborasi yang inklusif	Paskibra Kecamatan, Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		166.000.000,00	KECAMATAN NGUTER
6.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	***Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa***	**-**			**100 %**	**55.000.000,00**						**-**	**144.000.000,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa*	-			100 %	55.000.000,00			-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 3. Perkuatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa, kondusivitas wilayah, dan peningkatan kapasitas fiskal daerah serta kolaborasi yang inklusif	Pemerintahan Desa, Stakeholder terkait, Masyarakat	-	144.000.000,00	KECAMATAN NGUTER
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				2 Dokumen	0,00	Kab. Sukoharjo, Nguter, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 3. Perkuatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa, kondusivitas wilayah, dan peningkatan kapasitas fiskal daerah serta kolaborasi yang inklusif	Pemerintahan Desa, Stakeholder terkait, Masyarakat		10.000.000,00	KECAMATAN NGUTER
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa														
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				2 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Sukoharjo, Nguter, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 3. Perkuatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa, kondusivitas wilayah, dan peningkatan kapasitas fiskal daerah serta kolaborasi yang inklusif	Pemerintahan Desa, Stakeholder terkait, Masyarakat		15.000.000,00	KECAMATAN NGUTER
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				2 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Sukoharjo, Nguter, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 3. Perkuatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa, kondusivitas wilayah, dan peningkatan kapasitas fiskal daerah serta kolaborasi yang inklusif	Pemerintahan Desa, Stakeholder terkait, Masyarakat		20.000.000,00	KECAMATAN NGUTER
	7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa														
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa				2 Dokumen	0,00	Kab. Sukoharjo, Nguter, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 3. Perkuatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa, kondusivitas wilayah, dan peningkatan kapasitas fiskal daerah serta kolaborasi yang inklusif	Pemerintahan Desa, Stakeholder terkait, Masyarakat		10.000.000,00	KECAMATAN NGUTER
	7.01.06.2.01.0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa				5 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Sukoharjo, Nguter, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 3. Perkuatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa, kondusivitas wilayah, dan peningkatan kapasitas fiskal daerah serta kolaborasi yang inklusif	Pemerintahan Desa, Stakeholder terkait, Masyarakat		10.000.000,00	KECAMATAN NGUTER
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa														
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				2 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Sukoharjo, Nguter, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 3. Perkuatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa, kondusivitas wilayah, dan peningkatan kapasitas fiskal daerah serta kolaborasi yang inklusif	Pemerintahan Desa, Stakeholder terkait, Masyarakat		10.000.000,00	KECAMATAN NGUTER
	7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan				1 Dokumen	0,00	Kab. Sukoharjo, Nguter, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 3. Perkuatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa, kondusivitas wilayah, dan peningkatan kapasitas fiskal daerah serta kolaborasi yang inklusif	Pemerintahan Desa, Stakeholder terkait, Masyarakat		5.000.000,00	KECAMATAN NGUTER
	7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif														
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif				1 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Sukoharjo, Nguter, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 3. Perkuatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa, kondusivitas wilayah, dan peningkatan kapasitas fiskal daerah serta kolaborasi yang inklusif	Pemerintahan Desa, Stakeholder terkait, Masyarakat		20.000.000,00	KECAMATAN NGUTER
	7.01.06.2.01.0014	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga				1 Dokumen	0,00	Kab. Sukoharjo, Nguter, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 3. Perkuatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa, kondusivitas wilayah, dan peningkatan kapasitas fiskal daerah serta kolaborasi yang inklusif	Pemerintahan Desa, Stakeholder terkait, Masyarakat		10.000.000,00	KECAMATAN NGUTER
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya														
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				2 Laporan	0,00	Kab. Sukoharjo, Nguter, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 3. Perkuatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa, kondusivitas wilayah, dan peningkatan kapasitas fiskal daerah serta kolaborasi yang inklusif	Pemerintahan Desa, Stakeholder terkait, Masyarakat		24.000.000,00	KECAMATAN NGUTER
	7.01.06.2.01.0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan				2 Laporan	0,00	Kab. Sukoharjo, Nguter, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 3. Perkuatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa, kondusivitas wilayah, dan peningkatan kapasitas fiskal daerah serta kolaborasi yang inklusif	Pemerintahan Desa, Stakeholder terkait, Masyarakat		10.000.000,00	KECAMATAN NGUTER
	J U M L A H							**3.660.416.040,00**							**4.250.875.000,00**	

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

(RENJA-PD)



KECAMATAN BENDOSARI

KABUPATEN SUKOHARJO

TAHUN 2024

SALINAN

BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 35 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024;

b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 273 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan Kepala Daerah setelah Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 192) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 262);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tatacara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 200);
13. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);
14. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 298);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

Renja Perangkat Daerah disusun dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Pasal 3

Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

BAB II

SISTEMATIKA DAN FUNGSI RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 4

Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. bab I : pendahuluan;
b. bab II : hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu;
c. bab III : tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
d. bab IV : rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan
e. bab V : penutup.

Pasal 5

Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah.

BAB II

PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 6

(1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah.
(2) Kepala Perangkat Daerah melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi Renja Perangkat Daerah kepada Bupati melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.

BAB III

PERANGKAT DAERAH PENYUSUN

Pasal 7

(1) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun oleh Perangkat Daerah sebagai berikut:
    a. Sekretariat Daerah;
    b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
    c. Inspektorat Daerah;
    d. Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan;
    e. Dinas Kesehatan;
    f. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang;
    g. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
    h. Satuan Polisi Pamong Praja;
    i. Dinas Sosial;

j. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak;
k. Dinas Pangan;
l. Dinas Lingkungan Hidup;
m. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil;
n. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa;
o. Dinas Perhubungan;
p. Dinas Komunikasi Dan Informatika;
q. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
r. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;
s. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
t. Dinas Pertanian dan Perikanan;
u. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah dan Perdagangan;
v. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
w. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
x. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
y. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
z. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
aa. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
bb. Kecamatan Weru;
cc. Kecamatan Bulu;
dd. Kecamatan Tawangsari;
ee. Kecamatan Sukoharjo;
ff. Kecamatan Nguter;
gg. Kecamatan Bendosari;
hh. Kecamatan Polokarto;
ii. Kecamatan Mojolaban;
jj. Kecamatan Grogol;
kk. Kecamatan Baki;
ll. Kecamatan Gatak; dan
mm. Kecamatan Kartasura.

(2) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf mm tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 10 Agustus 2023

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 10 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd.

WIDODO

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2023 NOMOR 35

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TEGUH PRAMONO, SH, MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19710429 199803 1 003

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 35 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN
SUKOHARJO TAHUN 2024

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2024

Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 terdiri atas:

1. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Inspektorat Daerah;
4. Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan;
5. Dinas Kesehatan;
6. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang;
7. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
8. Satuan Polisi Pamong Praja;
9. Dinas Sosial;
10. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak;
11. Dinas Pangan;
12. Dinas Lingkungan Hidup;
13. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil;
14. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa;
15. Dinas Perhubungan;
16. Dinas Komunikasi Dan Informatika;
17. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
18. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;
19. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
20. Dinas Pertanian dan Perikanan;
21. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah dan Perdagangan;
22. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
23. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
24. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
25. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
26. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
27. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
28. Kecamatan Weru;
29. Kecamatan Bulu;

30. Kecamatan Tawangsari;
31. Kecamatan Sukoharjo;
32. Kecamatan Nguter;
33. Kecamatan Bendosari;
34. Kecamatan Polokarto;
35. Kecamatan Mojolaban;
36. Kecamatan Grogol;
37. Kecamatan Baki;
38. Kecamatan Gatak; dan
39. Kecamatan Kartasura.

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI

PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
KECAMATAN BENDOSARI
Jl. Muwardi 27 Telp (0271) 593529, Fax (0271) 593529, kode Pos 57572
Website : www.bendosari.sukoharjokab.go.id
Email: kecbendosari@sukoharjokab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT BENDOSARI KABUPATEN SUKOHARJO

Nomor : 050 / / 2023

Tentang

RENCANA KERJA
KECAMATAN BENDOSARI
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2024

CAMAT BENDOSARI,

Menimbang:

a. bahwa sebagai penjabaran lebih lanjut dalam rangka pelaksanaan RPJMD Kabupaten Sukoharjo perlu disusun dokumen Rencana Perangkat Daerah Tahun 2024 Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo;

b. bahwa Rencana Kerja Kecamatan Bendosari yang selanjutnya disingkat RENJA Kecamatan Bendosari sebagaimana tersebut huruf a adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif;

c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a dan b, maka dipandang perlu menetapkan Rencana Kerja RENJA) Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 dengan

Keputusan Camat Bendosari Kabupaten Sukoharjo.

Mengingat :

a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4421);
b. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali , terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5679);

e. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
f. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
g. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
h. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
i. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 6178);
j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka PanjangDaerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2017 Nomor 1312);

l. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung, dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang;

m. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024;

n. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19 di Indonesia;

o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kodefikasi, Klasifikasi Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah;

r. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;

s. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;

t. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023;

u. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

v. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah;

w. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

x. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

y. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 82 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Staff Ahli Bupati, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat dan Kecamatan.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA) Kantor Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 berikut lampirannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA) Kantor Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 merupakan acuan/pedoman bagi Kantor Keamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya;

KETIGA : Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA) Kantor Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 wajib dilaksanakan oleh seluruh jajaran di Kantor Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bendosari
Pada tanggal : 2024

CAMAT BENDOSARI

FIRMANSYAH MAYMORA, S.STP., MH

TEMBUSAN : dikirim kepada Yth. :

1. Bupati Sukoharjo, sebagai laporan;
2. Ketua DPRD Kab. Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Sekretaris Daerah Kab. Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Kepala BAPPELBANGDA Kab. Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Pertinggal.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan karunia-Nya, Rencana Kinerja Pemerintah Kecamatan Bendosari tahun 2024 dapat kami susun. Penyusunan Renja ini bertujuan untuk memberikan arahan dalam menyusun Perencanaan dan Pelaksanaan Program dan Kegiatan dalam kurun Waktu 1 (satu) tahun, Pelaksanaan program dan kegiatan di Kecamatan Bendosari tersebut diarahkan untuk pencapaian kebersihan pembangunan dan pencapaian program pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan sesuai dengan visi misi Kecamatan Bendosari sehingga pemerintah yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien dapat terwujud.

Kami menyadari Renja ini jauh dari sempurna, untuk itu saran dan koreksi sangat kami harapkan demi kesempurnaan Renstra ini dan keberlajutan penyusunan diperiode berikutnya. Kami berharap apa yang terangkum dalam Renja Pemerintah Kecamatan Bendosari Tahun 2024 ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Bendosari, Februari 2023

CAMAT BENDOSARI

FIRMANSYAH MAYMORA, S.STP.,MH
Pembina
NIP. 19830517 200112 1 001

DAFTAR ISI

		Halaman
HALAMAN JUDUL		i
KATA PENGANTAR		ii
DAFTAR ISI		iii
BAB I	PENDAHULUAN	
	A. Latar Belakang	1
	B. Landasan Hukum	6
	C. Maksud dan Tujuan	9
	D. Sistematika Penulisan	10
BAB II	HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	
	A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Program Renstra Perangkat Daerah	12
	B. Analisa Kinerja Perangkat Daerah	30
	C. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi perangkat daerah	41
	D. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023	42
	E. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	58
BAB III	TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	
	A. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional	59
	B. Tujuan dan Sasaran serta Arah Kebijakan	59
	C. Program dan Kebijakan	61
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	
	A. Rencana Kerja	64
	B. Program, Kegiatan, dan Pendanaan	64
BAB V	PENUTUP.....	96
LAMPIRAN		

BAB I
PENDAHULUAN

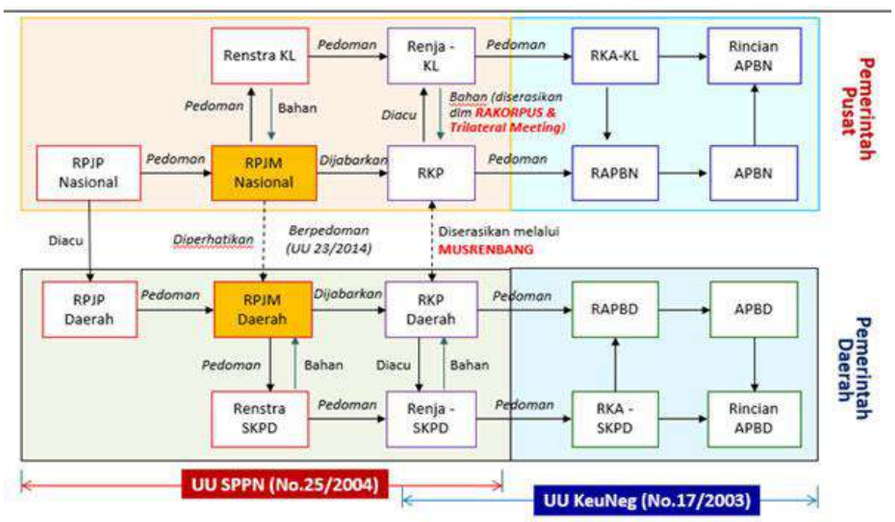
A. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja Perangkat daerah merupakan sebuah dokument rencana resmi daerah yang persyaratannya untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya. Renja Perangkat Daerah memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja Perangkat Daerah merupakan produk perencanaan pada Unit Organisasi Pemerintah terendah dan terkecil. Renja Perangkat Daerah berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kualitas penyusunan Renja Perangkat Daerah sangatlah menentukan pada kualitas pelayanan pada publik.

Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dimulai dengan persiapan penyusunan Renja Perangkat Daerah dengan mengumpulkan data dan informasi. Menganalisa gambaran pelayanan Perangkat Daerah untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu berdasarkan Renstra Perangkat Daerah yang didasarkan pada penelaahan rencana awal RKPD. Selanjutnya menjadi perumusan kegiatan prioritas awal RKPD. Selanjutnya menjadi perumusan kegiatan prioritas yang juga didasarkan kepada penelaah usulan kegiatan masyarakat.

Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Bendosari tahun 2024 didasarkan pada Renstra Kecamatan Bendosari 2021-2026 dengan memberikan program prioritas. Tahun 2024 merupakan tahun ke-4 perencanaan pembangunan Kabupaten Sukoharjo yang berpedoman pada RPJMD 2021-2026. Sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Bendosari serta sejalan dengan visi pembangunan jangka menengah daerah tahun 2021-2026 yaitu yaitu " **Mewujudkan Masyarakat Sukoharjo Yang Lebih Makmur** ".

Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Bendosari Tahun 2024 juga memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah pembangunan nasional, provinsi, dan mendukung arah perencanaan pembangunan yang ada pada Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Bendosari tahun 2024 yang dilihat pada gambar 1.1 :



Gambar 1.1
Skema Rencana Pembangunan Pusat dan daerah

RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Nasional, yang memuat strategi pembangunan Nasional, kebijakan umum, program Kementerian/Lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan

fiskal dalam Rencana Kerjayang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Pasal 263 ayat 2 UU No. 23 Tahun 2014 RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan rencana tata ruang wilayah. Pasal 263 ayat 3 UU No. 23 Tahun 2014 RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.

Adapun penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 dilakukan melalui 5 (lima) pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan yaitu pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (top-down), dan bawah-atas (bottom-up). Kelima pendekatan dimaksud diselenggarakan secara berkelanjutan untuk membentuk satu siklus perencanaan yang utuh sebagai berikut (Gambar 1.2) :



Gambar 1.2
Alur Penyusunan RKPD dan Rencana Kerja Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo

Berdasarkan Bagan Alur tersebut penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Bedndosari merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021 – 2026. Selain itu Proses penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo merupakan dokumen yang tidak berdiri sendiri melainkan dilakukan melalui beberapa tahapan, yakni diawali dengan mereview Rensta, Penyusunan Rancangan Rencana Kerja, dan Penetapan Rencana Kerja. Ketiga tahapan dimaksud diselenggarakan secara berkelanjutan untuk menghasilkan dokumen penganggaran yaitu Dokumen RKA SKPD dan Dokumen DPA SKPD yang dituangkan dalam Dokumen APBD Kabupaten Sukoharjo.

Prinsip-prinsip di dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah, adalah sebagai berikut :

a. Bepedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan mengacu pada rancangan awal RKPD;
b. Rumusan program/kegiatan/sub kegiatan di dalam Renja Perangkat Daerah didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintah daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing Perangkat Daerah;
c. Penyusunan bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD;
d. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolak ukur dan target capaian kinerja, kelurahan, biaya satuan per kelurahan, total kebutuhan dana, baik untuk tahun n dan tahun n+1.

Keterkaitan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD dan Renstra Perangkat Daerah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena didalam Renja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD, Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Renja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari RKP,Renstra Perangkat daerah, dan RPJMD bagi RKA Perangkat Daerah, KUA PPAS dan RAPBD.

B. Landasan Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Bendosari adalah:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
6. Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
11. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik sIndonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 174);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 192) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031(Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 262);
21. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);

22. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 298);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2021 tentang pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
25. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 73 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 81 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Staf Ahli Bupati, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat Dan Kecamatan.

C. Maksud dan Tujuan

Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA) Kecamtan Bendosari Tahun 2024 merupakan dokumen resmi perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk 1 (satu) tahun ke depan, yang dimulai tanggal 1 Januari 2024 dan berakhir tanggal 31 Desember 2024, serta menggabarkan capaian kinerja yang dapat ditrasformasikan ke dalam Renja Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah.

Maksud penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Bendosari Tahun 2024 adalah :

1. Memberikan arahan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan serta pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Bendosari Tahun 2024.
2. Sebagai Acuhan dan pedoman pelasanaan Peogram/Kegiatan Kecamatan Bendosari Tahun 2024.

Sedangkan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Perangkar Daerah Kecamatan Bendosari :

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2024 yang akuntable, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
2. Sebagai acuhan pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Bendosari selama kurun waktu 1 Tahun yaitu Tahun 2024
3. Program-program tersebut dapat terlaksana sesuai yang diharapkan dengan menitik beratkan pada program-program prioritas
4. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan Kecamatan Bendosari tahun 2024;
5. Sebagai bahan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Kecamatan Bendosari tahun 2024.

D. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penyusunan Renja Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renja, landasan hukum penyusunan Renja, maksud dan tujuan penyusunan Renja, dan sistematika penulisan dokumen Renja.

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

Memuat Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah. Analis Kinerja Pelayanan Perangkat daerah, Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan fungsi Perangkat Daerah, Review terhadap Rancangan Awal Perangkat Daerah dan Penelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Bab ini memuat penelaah terhadap kebijakan Nasional serta tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah.

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab ini berisi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah serta Pendanaannya.

Bab V Penutup

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Bendosari Tahun lalu dan Capaian Program Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Kecamatan Bendosari tahun 2022 dan capaian Renstra Perangkat Daerah tahun 2021-2026 merupakan kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan perkiraan capaian renja perangkat daerah tahun 2023. Evaluasi tersebut dilakukan melalui penilaian terhadap realisasi DPA Perangkat daerah yang mencakup program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran, lokasi serta dana indikatif.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Bendosari Tahun 2022 digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Selain itu, evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Bendosari tahun 2022 dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja Kecamatan Bendosari tahun 2022 dapat dicapai dalam rangka mewujutkan tujuan dan sasaran perubahan Renstra Kecamatan Bendosari Tahun 2021-2026 serta sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Sukoharjo tahun 2022.

Pengukuran Kinerja Kecamatan Bendosari di dasarkan pada sasaran dengan capaian sasaran sebagaimana pada tabel berikut :

Pengukuran Sasaran Rencana Kerja Kecamtan Bendosari Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1	2	3	4
Meningkatnya kualitas aparatur dan pelayanan publik	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	65	59,73
Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	Persentase peningkatan pelayanan kecamatan	79	84,98

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Bendosari Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut : (Tabel 2.1)

Tabel 2.1
REKAPITULASI EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2022
KECAMATAN BENDOSARI
KABUPATEN SUKOHARJO

No	Kode Rekening	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Satuan	Target Renstra PD (Akhir Periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD s/d Tahun 2026		Target Kinerja Renja PD Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran DPA PD 2022 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran DPA 2022 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2026		PD Penanggung Jawab	Permasalahan
														I		II		III		IV									
1		2	3	4	4.A	5		6		5				6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5*100		14=6+12		15=14/5*100		12	13
						K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu) Renja	K	Rp (Ribu) DPA	K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)	K	%	K	Rp (Ribu)	K	%		
I	*7.01.02.2*		**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	*Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik*	*%*		*target tahun 2022*		*Realisasi tahun 2026*	*220*	*20.000.000*		*20.000.000*		*-*	*60*	*4.632.500*	*160*	*15.346.800*		*-*	*220*	*19.979.300*	*200*	*99,90*					*Kecamatan Bendosari*	*-*

1	**7.01.02.2.02**	**Masyarakat**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Cakupan Penyelenggaraan Urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan**						**220**	**20.000.000**	**220**	**20.000.000**	**0,00**	**-**	**60**	**4.632.500**	**160**	**15.346.800**	**0,00**	**-**	**220**	**19.979.300**	**200**	**99,90**							
	7.01.02.2.02.02		Fasilitasi Percepatan Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Responding Survei IKM	Orang					120	10.000.000	120	10.000.000	0	-	60	4.632.500	60	5.347.300	0	-	120	9.979.800	100	99,80							
	7.01.02.2.02.03		Peiningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah peserta sosialisasi pelayanan kepada masyarakat	Orang					100	10.000.000	100	10.000.000	0	-	0	-	100	9.999.500	0	-	100	9.999.500	100	100,00							
II	***7.01.03***		**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan***	**%**		***target tahun 2022***		***Realisasi tahun 2026***	***100***	***1.267.643.000***		***1.528.623.000***		***19.484.000***		***657.780.006***		***483.873.100***		***326.319.197***		***1.487.456.303***		***97,31***					***Kecamatan Bendosari***	**-**
2	**7.01.03.2.01**	**Masyarakat**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Cakupan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**%**						**25.000.000**		**25.000.000**		**3.150.000**		**6.840.000**		**14.993.800**		**-**		**24.983.800**		**99,94**							

	7.01.03.2.01.01		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah desa dan kelurahan dalam kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa dan Kelurahan	desa+kel					14	15.000.000	14	15.000.000	0	-	0	-	14	14.993.800	0	-	14	14.993.800	100	99,96						
	7.01.03.2.01.03		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah peserta koordinasi peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Orang					180	10.000.000	180	10.000.000	80	3.150.000	100	6.840.000		-		-	180	9.990.000	100	99,90						
3	7.01.03.2.02	**Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan di Tingkat Kelurahan**	**Kegiatan pemberdayaan Kelurahan**	**Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**						**475**	**1.147.643.000**	**475**	**1.408.623.000**	-	-	**200**	**623.073.406**	**275**	**442.942.000**	-	**301.467.497**	**475**	**1.367.482.903**		97,08						
	7.01.03.2.02.01		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah peserta musrenbang kecamatan dan kelurahan	Orang					175	15.000.000	175	15.000.000	0	-	0	-	175	14.988.000	0	-	175	14.988.000	100	99,92						

	7 01 03 2.02 03		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah peserta koordinasi pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Orang					300	1.132.643.000	300	1.393.623.000		-	200	623.073.406	100	427.954.000	0	301.467.497	300	1.352.494.903	100	97,05						
3	**7.01.03.2.03**	**Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan di Tingkat Kecamatan**	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Cakupan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**							**95.000.000**		**95.000.000**		**16.334.000**		**27.866.600**		**25.937.300**		**24.851.700**		**94.989.600**		**99,99**						
	7.01.03.2.03.01		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan tingkat desa yang terbina	Lembaga					2	70.000.000	2	70.000.000	2	16.334.000	2	27.866.600	2	10.937.500	2	14.851.700	2	69.989.800	100	99,99						
	7.01.03.2.03.02		Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah peserta koordinasi antar organisasi kepemudaan di wilayah kecamatan	Orang					150	25.000.000	150	25.000.000		-		-	100	14.999.800	50	10.000.000	150	24.999.800	100	100,00						
III	***7.01.04***		**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	***Persentase Capaian Ketentraman Dan Ketertiban Umum***	***%***		***target tahun 2021***		***Realisasi tahun 2016***	***100***	***47.000.000***	***100***	***47.000.000***		-		***3.375.000***		***23.614.700***		***20.000.000***		***46.989.700***		***99,98***					***Kecamatan Bendosari***	**-**
4	**7.01.04.2.01**	**Masyarakat dan Stakeholder Terkait**	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Cakupan Upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban**							**27.000.000**		**27.000.000**		-		**3.375.000**		**23.614.700**		-		**26.989.700**		**99,96**						

	7.01.04.2.01.01		Sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah peserta rapat koordinasi lintas sektoral	Orang					150	12.000.000	150	12.000.000	0	-	0	-	150	11.995.900	0	-	150	11.995.900	100	99,97						
	7.01.04.2.01.02		Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah peserta rapat koordinasi paguyuban kerukunan umat beragama	Orang					140	15.000.000	140	15.000.000	0	-	40	3.375.000	100	11.618.800		-	140	14.993.800	100	99,96						
5	**7.01.04.2.02**	**Linmas, Tokoh Masyarakat dan Satpol**	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**Cakupan koordinasi Penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah**	**%**						**20.000.000**		**20.000.000**		-		-		-		**20.000.000**		**20.000.000**		**100,00**						
	7.01.04.2.02.01		Koordinasi/sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah peserta koordinasi linmas dan KST	Orang					125	20.000.000	125	20.000.000	0	-	0	-	0	-	125	20.000.000	125	20.000.000	100	100,00						

IV	***7.01.05***		***PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM***	***Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum***	***%***		***target tahun 2021***		***Realisasi tahun 2026***		***316.000.000***		***356.000.000***		***26.000.000***		***65.474.000***		***181.154.800***		***78.867.000***		***351.495.800***		***98,73***					***Kecamatan Bendosari***	***-***
6	**7.01.05.2.01**	**Forkopimcam dan Paskribaka**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan kepala daerah**							**316.000.000**		**356.000.000**		**26.000.000**		**65.474.000**		**181.154.800**		**78.867.000**		**351.495.800**		**98,73**						
	7.01.05.2.01.01		Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinenka Tunggal Ika serta Pemertahanan an dan Pemeliharaan Keutuhan Negara	Jumlah PASKIBRA yang difasilitasi	Orang					80	150.000.000	80	190.000.000		-	80	6.525.000	80	143.114.800	80	40.360.000	80	189.999.800	100	100,00						

	7.01.05.2.01.08		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan Di Kecamatan	Jumlah peserta forum koordinasi pimpinan di kecamatan yang difasilitasi	Orang					11	166.000.000	11	166.000.000	11	26.000.000	11	58.949.000	11	38.040.000	11	38.507.000	11	161.496.000	100	97,29							
V	***7.01.06***		***PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA***	***Prosentase Pembinaan Pengawasan dan Penyelenggaraan administrasi Pemerintahan desa***	***%***		***target tahun 2022***		***Realisasi tahun 2026***		***105.000.000***		***105.000.000***		***28.228.000***		***17.531.494***		***4.902.000***		***54.138.900***		***104.800.394***		***99,81***					***Kecamatan Bendosari***	***-***
7	**7.01.06.2.01**	**Pemerintah Desa dan steakholder**	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengaasan Pemerintahan Desa**	**Cakupan Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**							**105.000.000**		**105.000.000**		**28.228.000**		**17.531.494**		**4.902.000**		**54.138.900**		**104.800.394**		**99,81**						
	7.01.06.2.01.02		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang dimonitoring dan dievaluasi dalam bidang administrasi pemerintahan desa	Desa					13	15.000.000	13	15.000.000		-	13	5.989.494	13	4.245.000	13	4.755.000	13	14.989.494	100	99,93						

	7.01.06.2.01.03		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	kel					1	15.000.000	1	15.000.000	0	-	0	-	0	-	1	15.000.000	1	15.000.000	100	100,00						
	7.01.06.2.01.06		Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa	Desa					2	10.000.000	2	10.000.000							2	9.958.900	2	9.958.900	100	99,59						
	7 01 06 2.01 07		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusywaratan Desa	Jumlah orang yang difasilitasi pelaksanaan pembekalan tentang tugas dan fungsi BPD	Desa					13	15.000.000	13	15.000.000							13	15.000.000	13	15.000.000	100	100,00						
	7.01.06.2.01.08		Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yang dikeluarkan	Desa					5	15.000.000	5	15.000.000		-	2	7.942.000		-	3	7.047.500	5	14.989.500	100	99,93						
	7.01.06.2.01.09		Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan dan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam koordinasi dan sinkoronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan	desa					13	15.000.000	13	15.000.000	13	8.355.000	13	3.600.000	13	657.000	13	2.377.500	13	14.989.500	100	99,93						

				pembangunan desa																											
	7.01.06.2.01.13		Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah peserta Musrenbangcam	Orang					150	20.000.000	150	20.000.000	150	19.873.000		-		-		-	150	19.873.000	100	99,37						
VI	***7.01.01***		***PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA***	***Persentase Pelayanan Urusan Pemerintah Daerah***	***%***		***target tahun 2022***		***Realisasi tahun 2026***		***3.588.201.068***		***3.524.264.068***		***469.029.571***		***1.311.254.101***		***791.122.366***		***809.137.706***		***3.380.543.744***		***95,92***					***Kecamatan Bendosari***	***-***
8	**7.01.01.2.01**	**Semua ASN di Lingkup Kecamatan Bendosari**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Cakupan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat**						**11**	**34.000.000**	**11**	**34.000.000**		**6.912.500**		**9.405.400**		**8.819.100**		**8.827.200**	**0**	**33.964.200**		**99,89**						
	7.01.01.2.01.01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Yang Disusun	dok					2	10.000.000	2	10.000.000	1	4.170.500	1	5.809.400		-		-	2	9.979.900	100	99,80						
	7.01.01.2.01.02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD yang disusun	dok					1	4.000.000	1	4.000.000	0	-	1	2.311.500	1	1.678.500	0	-	1	3.990.000	100	99,75						

	7.01.01.2.01.03		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD yang disusun	dok					1	4.000.000	1	4.000.000	0	-	0	-	1	3.232.900	1	767.000	1	3.999.900	100	100,00										
	7.01.01.2.01.04		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun	dok					1	4.000.000	1	4.000.000		-	1	1.284.500		-	1	2.710.400	1	3.994.900	100	99,87										
	7.01.01.2.01.05		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun	dok					1	4.000.000	1	4.000.000		-	0	-	0	-	1	3.999.800	1	3.999.800	100	100,00										
	7.01.01.2.01.06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ihtisar Realisasi Kinerja SKPD	dok					2	4.000.000	2	4.000.000		-		-	1	2.649.800	1	1.350.000	2	3.999.800	100	100,00										
	4.02.01.2.01.07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun (LKJIP,LPPD,LKPJ)	dok					3	4.000.000	3	4.000.000	2	2.742.000		-	1	1.257.900		-	3	3.999.900	100	100,00										
9	**4.02.01.2.02**	**Seluruh ASN di Lingkup Kecamatan Bendosari**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Cakupan administrasi keuangan perangkat daerah**							**2.445.974.000**		**2.351.097.000**		**320.143.028**		**787.226.813**		**608.889.848**		**546.946.841**		**2.263.206.530**		**96,26**										

	7.01.01.2.02.01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan	Orang					19	2.283.539.000	19	2.185.582.000	19	295.013.028	19	733.945.813	19	567.239.548	19	501.567.441	19	2.097.765.830	100	95,98						
	7.01.01.2.02.03		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah pengelola keuangan kecamatan dan kelurahan	dok					12	150.435.000	12	153.515.000	3	25.130.000	3	50.330.000	3	39.306.000	3	38.740.000	12	153.506.000	100	99,99						
	7.01.01.2.02.04		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah laporan realisasi anggaran dan neraca sesuai dengan SAP dan kebijakan akumulasi	laporan					12	3.000.000	12	3.000.000		-	6	1.314.500	6	1.669.300	0		12	2.983.800	100	99,46						
	7.01.01.2.02.05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	dok					1	3.000.000	1	3.000.000	0	-	0	-	0	-	1	3.000.000	1	3.000.000	100	100,00						
	4.02.01.2.02.07		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran	dok					3	3.000.000	3	3.000.000		-	1	477.500	1	675.000	1	1.820.400	3	2.972.900	100	99,10						
	7.01.01.2.02.08		Penyusunana Laporan dan Analisis Prognosisi Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	laporan					12	3.000.000	12	3.000.000		-	6	1.159.000		-	6	1.819.000	12	2.978.000	100	99,27						

10	**7.01.01.2.05**	**ASN di Lingkup Kecamatan bendosari**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**						**50**	**5.000.000**	**50**	**5.000.000**	**18**	**1.125.000**	**0**	-	**7**	**405.000**	**25**	**3.467.900**	**50**	**4.997.900**	**100**	**99,96**								
	7.01.01.2.05.10		Sosialisasi Peraturan Perundang – Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	Pegawai					50	5.000.000	50	5.000.000	18	1.125.000		-	7	405.000	25	3.467.900	50	**4.997.900**	100	99,96								
11	**4.02.01.2.06**	**ASN di Lingkup Kecamatan bendosari**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**325**	**274.243.000**		**336.733.000**		**76.240.450**		**120.089.600**		**22.658.150**		**110.575.600**		**329.563.800**		**97,87**								
	7.01.01.2.06.01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Listrik Yang Disediakan	Buah					325	17.000.000	325	17.000.000	84	4.468.950	89	4.829.800	70	3.591.150	82	4.110.100	325	17.000.000	100	100,00								
	7 01 01 2.06 02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Buah					5	49.020.000	5	49.020.000			5	49.020.000				-	5	49.020.000	100	100,00								
	7 01 01 2.06 03		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga Yang Disedoakan	Buah					672	24.723.000	672	24.723.000	100	3.823.000	125	4.904.500	150	5.270.500	297	10.725.000	672	24.723.000	100	100,00								
	7 01 01 2.06 04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah logistik kantor yang disediakan	Jenis					43	105.000.000	43	171.685.000	13	63.828.500	10	35.719.000	5	2.417.000	15	69.720.500	43	171.685.000	100	100,00								

	7 01 01 2.06 05		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Yang Dicetak dan Digandakan	Buah					20000	20.000.000	20000	20.000.000	2700	2.730.000	7600	7.665.500	5900	5.974.500	3800	3.630.000	20000	20.000.000	100	100,00						
	7 01 01 2.06 06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Jenis Bahan Bacaan Yang Dibeli Tiap Bulan	Buah					6	8.000.000	6	8.000.000	6	1.390.000	6	2.780.000	6	2.085.000	6	1.745.000	6	8.000.000	100	100,00						
	7.01.01 .2.06.09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi Yang Diikuti	kali					230	50.500.000	230	46.305.000		-	80	15.170.800	30	3.320.000	120	20.645.000	230	39.135.800	100	84,52						
12	**7.01.01.2.02**	**ASN di Lingkup Kecamatan Bendosari**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**55.580.000**		**55.580.000**		**1.217.000**		**35.339.000**		**4.204.000**		**14.820.000**		**55.580.000**		**100,00**						
	7.01.01 .2.07.05		Pengadaan Mebel	Jumlah Mebeleur Yang Dibeli	unit					2	18.320.000	2	18.320.000		-	1	12.500.000		-	1	5.820.000	2	18.320.000	100	100,00						
	7.01.01 .2.07.06		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang diadakan	unit					8	23.463.000	8	23.463.000	1	624.000	7	22.839.000		-		-	8	23.463.000	100	100,00						

	7.01.01.2.07.10		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Yang Dibeli	unit					5	13.797.000	5	13.797.000	1	593.000		-	1	4.204.000	3	9.000.000	1,666667	13.797.000	33,3333	100,00							
13	**4.02.01.2.08**	**ASN di Lingkup Kecamatan Bendosari**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**353.563.068**		**318.123.068**		**42.234.918**		**81.356.588**		**88.230.268**		**73.857.865**		**285.679.639**		**89,80**							
	7.01.01.2.08.01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pengelolaan surat menmyurat	Surat					4000	30.000.000	4000	30.000.000	500	2.832.000	2000	15.430.503	850	7.817.500	650	3.879.400	4000	29.959.403	100	99,86							
	7.01.01.2.08.02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening jasa sumber daya yang dibayarkan tiap bulan	rek					3	137.280.000	3	105.220.000	3	17.887.918	3	21.671.085	3	21.102.868	3	30.393.465	3	91.055.336	100	86,54							
	7.01.01.2.08.04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah SDM Pelayanan Umum yang disediakan	Orang					8	186.283.068	8	182.903.068	8	21.515.000	8	44.255.000	8	59.309.900	8	39.585.000	8	164.664.900	100	90,03							
14	**7.01.01.2.09**	**Barang Milik Daerah di Lingkup Kecamatan Bendosari**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerint**							**419.841.000**		**423.731.000**		**21.156.675**		**277.836.700**		**57.916.000**		**50.642.300**		**407.551.675**		**96,18**							

				ah Daerah																										
	7.01.01.2.09.01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara atau difasilitasi	unit					17	97.000.000	17	90.930.000	17	13.681.675	17	24.439.700	17	17.528.000	17	27.088.300	17	82.737.675	100	90,99						
	7.01.01.2.09.02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara/difasilitasi	unit					1	15.000.000	1	12.750.000	1	1.100.000	1	2.041.000	1	1.900.000	1	4.703.000	1	9.744.000	100	76,42						
	7.01.01.2.09.05		Pemeliharaan mebel	Jumlah Mebeleir Yang Dipelihara	unit					6	5.500.000	6	5.500.000	1	1.000.000	1	800.000	3	2.800.000	1	900.000	6	5.500.000	100	100,00						
	7.01.01.2.09.06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya Yang Dipelihara	unit					4	25.210.000	4	37.420.000	1	5.375.000	1	11.944.000	1	2.450.000	1	17.651.000	4	37.420.000	100	100,00						

	7.01.01.2.09.09		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor Yang Dipelihara	unit					2	260.000.000	2	260.000.000	0	-	1	222.881.000	1	32.107.000		300.000	2	255.288.000	100	98,19							
	7.01.01.2.09.010		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah sarpras gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara /direhabilitas	unit					1	17.131.000	1	17.131.000	-	-	1	15.731.000		1.131.000		-	1	16.862.000	100	98,43							
	JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										**5.343.844.068**		**5.580.887.068**		**542.741.571**		**2.060.047.101**		**1.500.013.766**		**1.288.462.803**		**5.391.265.241**		**96,60**							

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Kecamatan Bendosari tahun 2022 pada Tabel 2.1 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Rata-rata capaian output 6 program 15 Kegiatan 53 sub kegiatan Urusan Administrasi Pemerintah Kecamtan Bendosari pada Tahun 2022 adalah sebesar 100,00 % dengan prosentase keuangan sebesar 96,60 %.

a). Permasalahan dan Solusi

1. Capaian Realisasi Output

   Berdasarkan Tabel tersebut diatas, dari 53 sub kegiatan telah dapat mencapai target output 100,00 % ini menunjukan ada efisiensi yang berasal dari penghematan belanja.

2. Capaian Anggaran

   Berdasarkan tabel tersebut diatas, dari 53 sub kegiatan dengan realisasi keuangan 96,60% untuk Urusan Administrasi Pemerintahan Kecamatan Bendosari pada tahun 2022 tidak terdapat permasalahan dalam pencapaian target output Sub Kegiatan ataupun pencapaian realisasi anggaran sub kegiatan.

B. Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kecamatan adalah Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo yang dipimpin oleh seorang disebut Camat, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja, Staf Ahli Bupati, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat Dan Kecamatan, menyebutkan bahwa Kecamatan merupakan

koordinator penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas diatas, Kecamatan Bendosari mempunyai Tugas dan fungsi :

a. Camat

(1) Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kecamatan mempunyai fungsi:

a. penyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum;
b. pengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
c. pengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
d. pengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
e. pengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
f. pengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
g. pembina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
h. pelaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten yang ada di kecamatan;
i. pelaksanaan fungsi kesekretariatan kecamatan; dan
j. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Sekretariat Kecamatan

(1) Sekretariat adalah unsur pembantu pimpinan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris Kecamatan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi keuangan, hukum, informasi, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian, pengelolaan dan penatausahaan aset, dan pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan.

(3) Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat mempunyai fungsi:

a. pengoordinasian penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Kecamatan;
b. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi keuangan, hukum, hubungan masyarakat, ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, dan pelayanan administrasi di lingkunganKecamatan;
c. pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Kecamatan;
d. pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Kecamatan;
e. pengoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
f. penyelenggaraan dan penatausahaan aset dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kecamatan;
g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
h. pengelolaan kepegawaian di lingkungan Kecamatan; dan
i. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.

c. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Subbagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Camat yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang perencanaan, data, informasi, dan program kerja, dan pengelolaan keuangan di lingkungan Kecamatan.

d. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Camat yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, kearsipan, kepegawaian, pengelolaan dan penatausahaan aset dan pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan.

e. **Seksi Pemerintahan**

Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat yang mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang pemerintahan umum dan desa/kelurahan meliputi administrasi kependudukan, dan meningkatkan kemandirian politik, monografi kecamatan, pengisian perangkat desa dan kepala desa, pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan, pembinaan badan perwakilan desa dan lembaga kemasyarakatan desa serta pelaksanaan kegiatan baik di tingkat internal kecamatan maupun dengan pihak terkait dan Pelaksanaan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati Kepada Camat sebagian urusan otonomi daerah di bidang pemerintahan.

f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban.

Seksi Ketenteraman dan Ketertibandipimpin oleh seorang Kepala Seksi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat yangmempunyai tugas penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang ketenteraman dan ketertiban wilayah serta pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat meliputi penanggulangan bencana alam, dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta Pelaksanaan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati Kepada Camat sebagian urusan otonomi daerah di bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum.

g. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan

Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahandipimpin oleh seorang Kepala Seksi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat yangmempunyai tugas penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporandi bidang pembangunan, pemberdayaan masyarakat, perekonomian desa/kelurahan, produksi dan distribusi danPelaksanaan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati Kepada Camat sebagian urusan otonomi daerah di bidang pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan.

h. Seksi Kesejahteraan Sosial.

Seksi Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Seksi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat yangmempunyai tugas penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang kesejahteraan sosial yang meliputi masalah sosial, kepemudaan, peranan wanita, olah raga, kehidupan keagamaan, kebudayaan dan kesehatan, peningkatan kualitas sumber daya perangkat desa, lembaga desa dan pemberian bantuan sosial serta program pengentasan kemiskinanserta Pelaksanaan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati Kepada Camat sebagian urusan otonomi daerah di bidang kesejahteraan sosial.

i. Seksi Pelayanan Umum

Seksi Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Seksi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat yangmempunyai tugas penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang pelayanan umum yang meliputi inventarisasi data kekayaan desa/kelurahan, dan sarana prasarana desa, kebersihan lingkungan yang berkaitan denganpelayanan masyarakat, pelayanan kependudukan, kebersihan lingkungan, perizinan peningkatan sarana prasarana fasilitas umum dan pelayanan umum administrasi kependudukan, pelayanan administrasi terpadu kecamatan, percepatan pencapaianstandar pelayanan minimal serta Pelaksanaan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati Kepada Camat sebagian urusan otonomi daerah di bidang Seksi Pelayanan Umum.

j. Kelurahan

(1) Kelurahan dipimpin oleh seorang Lurah yang merupakan pembantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat.

(2) Lurah mempunyai tugas membantu camat dalam:

a. melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan;
b. melakukan pemberdayaan masyarakat;
c. melaksanakan pelayanan masyarakat;
d. memelihara ketenteraman dan ketertiban umum;
e. memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum;
f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat; dan
g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan .

k. Sekretariat Kelurahan

(1) Sekretariat Kelurahan adalah unsur pembantu pimpinan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang Sekretaris Kelurahan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Lurah yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi keuangan, hukum, informasi, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian, pengelolaan dan penatausahaan aset, dan pelayanan administrasi di lingkungan Kelurahan.

l. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kelurahan

Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban dipimpin oleh seorang Kepala Seksi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Lurah yangmempunyai tugas penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang administasi pemerintahan umum, administrasi kependudukan, pertanahan, dan membantu pelaksanaan dan pengawasan kegiatan pemilihan umum,ketenteraman dan ketertiban masyarakat serta membantu penyelenggaraan kegiatan administrasi perlindungan masyarakat.

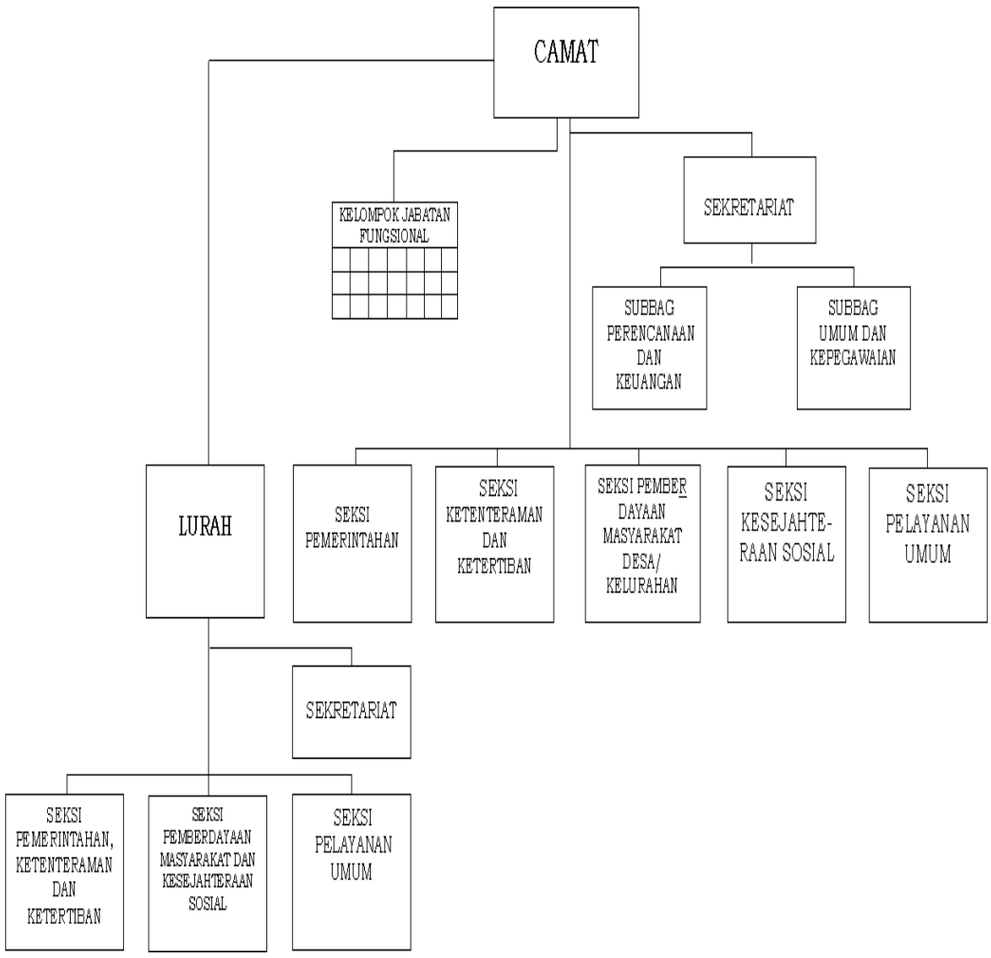
m. Seksi Pemberdayaan Masyarakatdan Kesejahteraan Sosial Kelurahan

Seksi Pemberdayaan Masyarakatdan Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Seksi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Lurah yangmempunyai tugas penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang pembangunan, perekonomian, pemberdayaan masyarakat, serta menjaga, memelihara dan menyediakan sarana dan prasarana fasilitas umum, lingkungan hidupserta kesejahteraan sosial.

n. Seksi Pelayanan Umum Kelurahan

Seksi Pelayanan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Lurah yangmempunyai tugas penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang administrasi dan pelayanan umum.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN
KABUPATEN SUKOHARJO



Analisa kinerja pelayanan Perangkat daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Kecamatan Bendosari dilakukan terhadap penilaian capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan.

IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah yang mengacu pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026. Secara rinci, capaian IKU Kecamatan Sukoharjo disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.2
INDIKATOR KINERJA UTAMA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN BENDOSARI KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2021 – 2026

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN / PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2		3	4	5	6
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel					
	1.1	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Hasil survey indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan kinerja di Kecamatan Bendosari pada tahun N	Camat Bendosari	Dokumen IKM
	1.2	Meningkatnya kualitas Aparatur dan Pelayanan Publik	Nilai SAKIP PD	Penilaian SAKIP PD tahun N	Camat Bendosari	- Rensta PD - Renja PD - DPA/DPPA - Laporan pertanggung jawaban keuangan OPD

Kecamatan Bendosari telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Sesuai dengan perjanjian kinerja Camat Bendosari, Kabupaten Sukoharjo dan Rencana Strategis Kecamatan Bendosari dengan beberapa indikator sebagai berikut :

- Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah.
  Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah dengan anggaran sebesar Rp. 3.524.264.068,- terealisasi Rp. 3.380.543.744,- dengan capaian kinerja 95,92 %.

- Tingkat kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
  Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan anggaran sebesar Rp. 20.000.000,- terealisasi Rp.19.979.300,- dengan capaian kinerja 99,90 %.
- Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
  Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan anggaran sebesar Rp. 1.528.623.000,- terealisasi Rp. 1.487.456.303,- dengan capaian kinerja 97,31 %
- Persentase capaian ketentraman dan ketertiban umum.
  Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan anggaran sebesar Rp. 47.000.000,- terealisasi Rp. 46.989.700,- dengan capaian kinerja 99,98 %.
- Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan Umum.
  Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum dengan anggaran sebesar Rp. 356.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 351.495.000,- dengan capaian kinerja 98,73 %.
- Cakupan Pembinaan dan pengawasan pemerintah desa.
  Program Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa dengan anggaran sebesar Rp. 105.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 104.800.394,- dengan capaian kinerja 99,81 %

Tabel 2.3

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Bendosari

Kabupaten Sukoharjo

Tahun 2021 - 2026

NO.	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-						Realisasi Capaian Tahun ke-		Rasio Capaian pada Tahun ke-	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2022	2023
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayana Publik	100	100	100	100	100	100	99,90		99,90	
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100	100	100	100	100	100	97,31		97,31	
3	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100	100	100	100	100	100	99,98		99,98	
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100	100	100	100	100	100	98,73		98,73	
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	100	100	100	100	100	100	99,81		99,81	
6	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100	100	100	100	100	100	95,92		95,92	

C. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu – Isu strategis adalah kondisi atau hal yang diperhatikan dalam perencanaan pembangunan selama 5 (Lima) tahun dalam melaksanakan atau menyelenggarakan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Bendosari kepada masyarakat. Analisa isu – isu strategis di identifikasikan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Bendosari dalam menjalankan pemerintahan ada berbagai permasalahan, sebagai berikut.

a. Bidang Sekretariat

1) Masih kurangnya sumber daya dan keterampilan pegawai dalam mengoperasikan sarana dan prasarana komputer di wilayah Kecamatan Bendosari sehingga memperlambat kinerja kegiatan administrasi perkantoran, untuk meningkatkan kinerja kegiatan administrasi perlu adanya pelatihan dalam mengoperasikan komputer;
2) Kurangnya personil di bagian sekretariat Kantor Kecamatan Bendosari, sehingga banyak tenaga yang merangkap tugas lain, untuk meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat perlu adanya tambahan personil;
3) Kecamatan sebagai Perangkat Daerah yang belum diberikan kewenangan penuh untuk mengajukan dan mengelola anggaran Perangkat Daerah, kewenagan Kecamatan hanya sebatas pengelolaan Gaji pegawai dan biaya operasional Kecamatan. Sedangkan pengelolaan anggaran pembangunan masih melalui Perangkat Daerah terkait ;

b. Bidang Pemerintahan dan Pelayanan Publik

1) Belum optimalnya kinerja aparatur Pemerintahan Desa
2) Masih ada sebagian jenis pelayanan administrasi kependudukan yang belum bisa dilayani ditingkat Kecamatan
3) Perlu peningkatan sinergitas antar unit kerja dalam pelayanan kepada warga masyarakat.

c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1) Masih kurangnya kesadaran dan peran serta masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan wilayah
2) Perlu peningkatan kualitas sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan pemberdayaan masyarakat

d. Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum

1) Pemahaman warga masyarakat tentang peraturan perundangan belum optimal
2) Masih perlu peningkatan peran serta warga terhadap penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum belum optimal

e. Bidang Kesejahteraan Sosial

1) Belum terwujudnya sinkronisasi data sebagai dasar pengambilan kebijakan terkait dengan bantuan sosial.
2) Perlu peningkatan upaya strategis dalam rangka penanganan pemulihan setelah pandemi covid-19 terutama dari aspek ekomoni, kesehatan dan sosial

D. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Proses penyusunan RKPD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Guna menghasilkan suatu rencana kerja OPD yang selaras dengan rencana kerja pemerintah daerah, maka diperlukan suatu telaahan (*review*) terhadap rancangan awal penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024.

Berdasarkan pada isu strategis dan evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2023 dan RKPD Tahun Berjalan 2024 agar sasaran pembangunan tahun 2024 lebih fokus, maka perlu disusun prioritas pembangunan Kabupaten Sukoharjo, yaitu sebagai berikut :

1. Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Infrastruktur;
2. Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat;
3. Penurunan Angka Kemiskinan;
4. Pelayanan Publik yang Prima serta Tata Kelola Pemerintahan yang Baik;
5. Peningkatan Kemandirian Ekonomi Dalam Rangka Mewujudkan Ketahan Pangan.

Adapun Review rancangan awal Renja Kecamatan Bendosari Tahun 2024 sebagaimana yang tertuang dalam rencana kegiatan 1 (satu) tahun yang menjadi acuan dalam menerapkan program/ kegiatan yang merupakan kebijakan dalam pengunaan anggaran dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 2.4

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL PD KECAMATAN BENDOSARI TAHUN 2024

Tujuan/Nomor Rekening	RENSTRA PD Tahun 2024					HASIL Analisis Kebutuhan Tahun 2024					Catatan Penting
	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Lokasi	Target capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN					**UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN**					
Terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel		Indek Kepuasan Masyarakat		88			Indek Kepuasan Masyarakat		84		
		Persentase Peningkatan Pelayanan Kecamatan		100			Persentase Peningkatan Pelayanan Kecamatan		100		
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Kecamatan Bendosari**	**100**	**20.000.000,00**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Kecamatan Bendosari**	**100**	**22.000.000,00**	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Cakupan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kec	Kecamatan Bendosari	100	0	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Cakupan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kec	Kecamatan Bendosari	100	0	
7.01.02.2.0001	Koordinasi /Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait	Jumlah Koordinasi kegiatan pemerintah dg PD dan instansi vertikal	Kecamatan Bendosari	0	0	Koordinasi /Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait	Jumlah Koordinasi kegiatan pemerintah dg PD dan instansi vertikal	Kecamatan Bendosari	0	0	

Tujuan/Nomor Rekening	RENSTRA PD Tahun 2024					HASIL Analisis Kebutuhan Tahun 2024					Catatan Penting
	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Lokasi	Target capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
7.01.02.2.0002	Peningkatan efektifitas kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi Peningkatan Eektifitas Pemerinath di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Bendosari	0	0	Peningkatan efektifitas kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi Peningkatan Eektifitas Pemerinath di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Bendosari	0	0	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja PD yang ada di kecamatan	Kecamatan Mojolaban	100	20.000.000,00	Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja PD yang ada di kecamatan	Kecamatan Bendosari	100	20.000.000,00	
7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Bendosari	2	10.000.000,00	Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Bendosari	2	10.000.000,00	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatn	Kecamatan Bendosari	2	10.000.000,00	Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatn	Kecamatan Bendosari	2	10.000.000,00	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan**	Kecamatan Bendosari	**100**	**1.243.723.000,00**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan**	Kecamatan Bendosari	**100**	**1.228.723.000,00**	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Cakupan kegiatan pemberdayaan desa	Kecamatan Bendosari	*100*	*25.000.000,00*	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Cakupan kegiatan pemberdayaan desa	Kecamatan Bendosari	*100*	*20.000.000,00*	

Tujuan/Nomor Rekening	RENSTRA PD Tahun 2024					HASIL Analisis Kebutuhan Tahun 2024					Catatan Penting
	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Lokasi	Target capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	Kecamatan Bendosari	2	15.000.000,00	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	Kecamatan Bendosari	14	10.000.000,00	
7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan	Sinkronisasi Program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan	Kecamatan Bendosari	0	0	Sinkronisasi Program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan	Sinkronisasi Program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan	Kecamatan Bendosari	0	0	
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	Kecamatan Bendosari	4	10.000.000,00	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	Kecamatan Bendosari	2	10.000.000,00	
7.01.03.2.02	Pemberdayaan Kelurahan	Cakupan Pemberdayaan Kelurahan	Kecamatan Bendosari	*100*	*1.093.723.000,00*	Pemberdayaan Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Bendosari	*100*	*1.083.723.000,00*	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Kecamatan Bendosari	2	15.000.000,00	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Kecamatan Bendosari	3	15.000.000	

Tujuan/Nomor Rekening	RENSTRA PD Tahun 2024					HASIL Analisis Kebutuhan Tahun 2024					Catatan Penting
	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Lokasi	Target capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	Kecamatan Bendosari	10	465.223.000	Pembangunan Sarana dan prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	Kecamatan Bendosari	10	465.223.000	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Kecamatan Bendosari	4	613.500.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Kecamatan Bendosari	2	603.500.000	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Cakupan Lembaga Kemasyarakatan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Bendosari	*100*	*125.000.000,00*	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Cakupan Lembaga Kemasyarakatan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Bendosari	*100*	*125.000..000,00*	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diselenggarakan	Kecamatan Bendosari	14	100.000.000,00	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diselenggarakanb	Kecamatan Bendosari	16	100.000.000,00	
7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga kemasyarakatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang ditingkatkan kapasitasnya	Kecamatan Bendosari	26	25.000.000,00	Peningkatan Kapasitas Lembaga kemasyarakatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang ditingkatkan kapasitasnya	Kecamatan Bendosari	28	25.000.000,00	
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah laporan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	Kecamatan Bendosari	0	0	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah laporan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	Kecamatan Bendosari	0	0	
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase capaian ketentraman dan ketertiban umum**	Kecamatan Bendosari	**100**	**49.000.000,00**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase capaian ketentraman dan ketertiban umum**	Kecamatan Bendosari	**100**	**49.000.000,00**	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Cakupan koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan	Kecamatan Bendosari	*100*	*27.000.000,00*	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Cakupan koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan	Kecamatan Bendosari	*100*	*27.000..000,00*	

Tujuan/Nomor Rekening	RENSTRA PD Tahun 2024					HASIL Analisis Kebutuhan Tahun 2024					Catatan Penting
	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Lokasi	Target capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
		Ketertiban Umum					Ketertiban Umum				
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertical di wilayah kecamatan	Jumlah laporan hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara, TNI dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	Kecamatan Bendosari	2	12.000.000,00	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertical di wilayah kecamatan	Jumlah laporan hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara, TNI dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	Kecamatan Bendosari	2	12.000.000,00	
7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah laporan pelaksanaan Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	Kecamatan Bendosari	2	15.000.000,00	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah laporan pelaksanaan Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	Kecamatan Bendosari	2	15.000.000,00	
7.01.04.2.02	Koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Cakupan penerapan dan penegakan Peraturan daerah dan Peraturan kepala daerah	Kecamatan Bendosari	*100*	*22.000.000,00*	Koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Cakupan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada	Kecamatan Bendosari	*100*	*22.000..000,00*	
7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah laporan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kecamatan Bendosari	3	22.000..000,00	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah laporan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kecamatan Bendosari	4	22.000.000,00	

Tujuan/Nomor Rekening	RENSTRA PD Tahun 2024					HASIL Analisis Kebutuhan Tahun 2024					Catatan Penting
	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Lokasi	Target capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Cakupan Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum**	Kecamatan Bendosari	**100**	**356.000.000,00**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Cakupan Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum**	Kecamatan Bendosari	**100**	**316.000.000,00**	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Bendosari	*100*	*356.000.000,00*	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Bendosari	*100*	*316.000.000,00*	
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kecamatan Bendosari	80	190.000.000,00	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kecamatan Bendosari	80	150.000.000,00	

Tujuan/Nomor Rekening	RENSTRA PD Tahun 2024					HASIL Analisis Kebutuhan Tahun 2024					Catatan Penting
	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Lokasi	Target capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kecamatan Bendosari	3	166.000.000,00	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kecamatan Bendosari	3	166.000.000,00	
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintah desa**	Kecamatan Bendosari	**100**	**175.450.000,00**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintah desa**	Kecamatan Bendosari	100	65.000.000,00	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Kecamatan Bendosari	*100*	*65.000.000,00*	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Kecamatan Bendosari	*100*	*65.000.000,00*	
7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang diFasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan Bendosari	13	10.000.000,00	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang diFasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan Bendosari	2	10.000.000,00	
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	Jumlah dokumen yang diFasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	Kecamatan Bendosari	2	10.000.000,00	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	Jumlah dokumen yang diFasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	Kecamatan Bendosari	17	10.000.000,00	
7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam pelaksanaan tugas kepala cdesa dan perangkat desa	Kecamatan Bendosari	0	0	Fasilitasi Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam pelaksanaan tugas kepala cdesa dan perangkat desa	Kecamatan Bendosari	0	0	

Tujuan/Nomor Rekening	RENSTRA PD Tahun 2024					HASIL Analisis Kebutuhan Tahun 2024					Catatan Penting
	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Lokasi	Target capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah dokumen fasilitasi dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa	Kecamatan Bendosari	3	5.000.000,00	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah dokumen fasilitasi dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa	Kecamatan Bendosari	1	5.000.000,00	
7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Kecamatan Bendosari	1	15.000.000,00	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Kecamatan Bendosari	1	15.000.000,00	
7.01.06.2.01.0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kecamatan Bendosari	3	5.000.000,00	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kecamatan Bendosari	3	5.000.000,00	
7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa	Jumlah dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa	Kecamatan Bendosari	13	5.000.000,00	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa	Jumlah dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa	Kecamatan Bendosari	3	5.000.000,00	
7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan	Jumlah dokumen dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan	Kecamatan Bendosari	0	0,00	Fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan	Jumlah dokumen dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan	Kecamatan Bendosari	0	0	
7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan	Kecamatan Bendosari	1	15.000.000,00	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan	Kecamatan Bendosari	1	15.000.000,00	

Tujuan/Nomor Rekening	RENSTRA PD Tahun 2024					HASIL Analisis Kebutuhan Tahun 2024					Catatan Penting
	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Lokasi	Target capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
		Partisipatif					Partisipatif				
7.01.06.2.01.0014	Fasilitasi kerjasama antar desa dengan pihak ketiga	Jumlah dokumen Fasilitasidalam rangka kerjasama antar desa dengan pihak ketiga	Kecamatan Bendosari	0	0,00	Fasilitasi kerjasama antar desa dengan pihak ketiga	Jumlah dokumen Fasilitasidalam rangka kerjasama antar desa dengan pihak ketiga	Kecamatan Bendosari	0	0	
7.01.06.2.01.0017	Koordinasi pendampingan desa diwilayahnya	Jumlah laporan hasil Koordinasi pendampingan desa diwilayahnya	Kecamatan Bendosari	0	0,00	Koordinasi pendampingan desa diwilayahnya	Jumlah laporan hasil Koordinasi pendampingan desa diwilayahnya	Kecamatan Bendosari	0	0	
7.01.06.2.01.0018	Koordinasi pelaksaan pembangunan kawasan pedesaan di wilayah kecamatan	Jumlah laporan hasil Koordinasi pelaksaan pembangunan kawasan pedesaan di wilayah kecamatan	Kecamatan Bendosari	0	0,00	Koordinasi pelaksaan pembangunan kawasan pedesaan di wilayah kecamatan	Jumlah laporan hasil Koordinasi pelaksaan pembangunan kawasan pedesaan di wilayah kecamatan	Kecamatan Bendosari	0	0	
		NILAI SAKIP PD	Kecamatan Bendosari	68			NILAI SAKIP PD	Kecamatan Bendosari	0		
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Pelayanan Urusan Pemerintah Daerah**	Kecamatan Bendosari	**100**	**4.206.637.000,00**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Pelayanan Urusan Pemerintah Daerah**	Kecamatan Bendosari	**100**	**3.898.394.068,00**	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Penyusunan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Bendosari	*100*	*29.000.000,00*	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Penyusunan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Bendosari	*100*	*29.000.000,00*	

Tujuan/Nomor Rekening	RENSTRA PD Tahun 2024					HASIL Analisis Kebutuhan Tahun 2024					Catatan Penting
	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Lokasi	Target capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
7.01.01.2..01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Bendosari	2	5.000.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Bendosari	3	5.000.000,00	
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Bendosari	1	4.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Bendosari	1	4.000.000,00	
7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang tersusun	Kecamatan Bendosari	1	4.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang tersusun	Kecamatan Bendosari	1	4.000.000,00	
7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kecamatan Bendosari	1	4.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kecamatan Bendosari	1	4.000.000,00	
7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kecamatan Bendosari	1	4.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kecamatan Bendosari	1	4.000.000,00	
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan laporan	Kecamatan Bendosari	16	4.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan laporan	Kecamatan Bendosari	16	4.000.000,00	

Tujuan/Nomor Rekening	RENSTRA PD Tahun 2024					HASIL Analisis Kebutuhan Tahun 2024					Catatan Penting
	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Lokasi	Target capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
		capain kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD					capain kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD				
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kecamatan Bendosari	2	4.000.000,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kecamatan Bendosari	2	4.000.000,00	
	Administrasin Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Penyusunan Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Bendosari	*100*	*2.547.102.000,00*	Administrasin Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Penyusunan Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Bendosari	*100*	*2.589.490.000,00*	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Kecamatan Bendosari	20	2.380.192.000,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Kecamatan Bendosari	17	2.561.580.000,00	
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumenpenatausahaan dan pengujian /veriikasi keuangan SKPD	Kecamatan Bendosari	12	154.910.000,00	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumenpenatausahaan dan pengujian /veriikasi keuangan SKPD	Kecamatan Bendosari	12	154.910.000,00	
7.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD	Jumlah dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD	Kecamatan Bendosari	12	3.000.000,00	Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD	Jumlah dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD	Kecamatan Bendosari	12	3.000.000,00	
7.01.01.2.02.0005	Koorodinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Kecamatan Bendosari	1	3.000.000,00	Koorodinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Kecamatan Bendosari	1	3.000.000,00	

Tujuan/Nomor Rekening	RENSTRA PD Tahun 2024					HASIL Analisis Kebutuhan Tahun 2024					Catatan Penting
	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Lokasi	Target capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
7.01.01.2.02.0007	Koorodinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/ semesteran dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/ semesteran SKPD	Kecamatan Bendosari	3	3.000.000,00	Koorodinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/ semesteran dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/ semesteran SKPD	Kecamatan Bendosari	3	3.000.000,00	
7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	Kecamatan Bendosari	12	3.000.000,00	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	Kecamatan Bendosari	12	3.000.000,00	
7.01.01.2.05	Administrasin Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Tingkat Disiplin Aparatur	Kecamatan Bendosari	*100*	47.200.000,00	Administrasin Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Tingkat Disiplin Aparatur	Kecamatan Bendosari	*100*	*32.000.000,00*	
7.01.01.2.05. 0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atributnya	Jumlah paket Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapan	Kecamatan Bendosari	28	11.200.000,00	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atributnya	Jumlah paket Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapan	Kecamatan Bendosari	0	0	
7.01.01.2.05. 0003	Pedataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Kecamatan Bendosari	0	0	Pedataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Kecamatan Bendosari	0	0	
7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Kecamatan Bendosari	20	31.000.000,00	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Kecamatan Bendosari	28	27.000.000,00	

Tujuan/Nomor Rekening	RENSTRA PD Tahun 2024					HASIL Analisis Kebutuhan Tahun 2024					Catatan Penting
	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Lokasi	Target capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
7.01.01.2.05. 0010	Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan	Jumlah orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Bendosari	50	5.000.000,00	Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan	Jumlah orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Bendosari	50	5.000.000,00	
7.01.01.2.06	Administrasin Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Bendosari	*100*	*526.093.000,00*	Administrasin Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Bendosari	*100*	*395.723.000,00*	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Kecamatan Bendosari	35	19.895.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Kecamatan Bendosari	2	19.895.000,00	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kecamatan Bendosari	6	42.800.000,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kecamatan Bendosari	2	24.000.000,00	
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Kecamatan Bendosari	5	19.500.000,00	Penyediaan Peralatan Rumah tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Kecamatan Bendosari	2	19.500.000,00	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan 56ogistic kantor yang disediakan	Kecamatan Bendosari	6	213.530.000,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan 56ogistic kantor yang disediakan	Kecamatan Bendosari	12	266.960.000,00	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan Yang disediakan	Kecamatan Bendosari	2	20.000.000,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	Kecamatan Bendosari	6	20.000.000,00	
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan yang disediakan	Kecamatan Bendosari	6	7.960.000,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan yang disediakan	Kecamatan Bendosari	5	7.960.000,00	

Tujuan/Nomor Rekening	RENSTRA PD Tahun 2024					HASIL Analisis Kebutuhan Tahun 2024					Catatan Penting
	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Lokasi	Target capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kecamatan Bendosari	200	202.408.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kecamatan Bendosari	410	37.408.000,00	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Bendosari	*100*	*102.971.000,00*	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Bendosari	*100*	*61.290.000,00*	
7.01.01.2.07.0001	Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	Kecamatan Bendosari	0	0	Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	Kecamatan Bendosari	0	0	
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah paket Mebel yang disediakan	Kecamatan Bendosari	2	12.500.000,00	Pengadaan Mebel	Jumlah paket Mebel yang disediakan	Kecamatan Bendosari	2	12.250.000,00	
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Kecamatan Bendosari	10	41.520.000,00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Kecamatan Bendosari	3	19.290.000,00	
7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Kecamatan Bendosari	2	48.951.000,00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Kecamatan Bendosari	2	29.750.000,00	
7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Kecamatan Bendosari	0	0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Kecamatan Bendosari	0	0,00	

Tujuan/Nomor Rekening	RENSTRA PD Tahun 2024					HASIL Analisis Kebutuhan Tahun 2024					Catatan Penting
	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Lokasi	Target capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
7.01.01.2.08	Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Bendosari	*100*	*402.891.000,00*	Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Bendosari	*100*	*402.891.068,00*	
7.01.01.2.08.0001	Penyedia jasa surat menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Kecamatan Bendosari	9	30.000.000,00	Penyedia jasa surat menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Kecamatan Bendosari		30.000.000,00	
7.01.01.2.08.0002	Penyedia jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa sumber daya air dan listrik yang disediakan	Kecamatan Bendosari	3	142.000.000,00	Penyedia jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa sumber daya air dan listrik yang disediakan	Kecamatan Bendosari	3	142.000.000,00	
7.01.01.2.08.0004	Penyedia jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan jasa penyediaan Pelayanan Umum yang disediakan	Kecamatan Bendosari	12	230.891.000,00	Penyedia jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan jasa penyediaan Pelayanan Umum yang disediakan	Kecamatan Bendosari	12	230.891.068,00	
7.01.01.2.0009	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Bendosari	*100*	*551.380.00000*	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Bendosari	*100*	*388.000.000,00*	
7.01.01.2.09.0001	Penyedia jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Kecamatan Bendosari	16	94.750.000,00	Penyedia jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Kecamatan Bendosari	16	94.750.000,00	
7.01.01.2.09.0002	Penyedia jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak dan Perizinan Kendnaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional / lapangan yang dipelihara	Kecamatan Bendosari	1	12.750.000,00	Penyedia jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak dan Perizinan Kendnaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional / lapangan yang dipelihara	Kecamatan Bendosari	1	12.750.000,00	

Tujuan/Nomor Rekening	RENSTRA PD Tahun 2024					HASIL Analisis Kebutuhan Tahun 2024					Catatan Penting
	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Lokasi	Target capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah jenis mebelair yang dibeli	Kecamatan Bendosari	10	5.500.000,00	Pemeliharaan Mebel	Jumlah jenis mebelair yang dibeli	Kecamatan Bendosari	10	5.500.000,00	
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara	Kecamatan Bendosari	30	34.380.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara	Kecamatan Bendosari	20	25.000.000,00	
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	Kecamatan Bendosari	2	235.000.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	Kecamatan Bendosari	1	135.000.000,00	
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Bendosari	2	169.000.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Bendosari	0	115.000.000,00	
7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis perlengkapan rumah jabatan / dinas yang dipelihara	Kecamatan Bendosari	0	0,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis perlengkapan rumah jabatan / dinas yang dipelihara	Kecamatan Bendosari	0	0,00	
JUMLAH					**6.050.810.000**	**JUMLAH**				**5.716.117.068**	

E. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kecamatan Bendosari sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga yang melaksanakan pengelolaan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah dan membantu Bupati Sukoharjo dalam menyusun dan merumuskan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah dituntut untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas terutama produk berupa rencana pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan.

Dalam menjaring usulan dari para pemangku kepentingan tersebut, Kecamatan Bendosari selaku unsur perencana mengadakan beberapa mekanisme antara lain dengan melalui musrenbang mulai dari tingkat Desa sampai Kabupaten.

Usulan-usulan tersebut ditampung dan ditelaah manfaatnya dan dianalisis berdasarkan kebutuhan masyarakat untukdituangkanmenjadi RKPD dan Renja Organisasi Perangkat Daerah terkait.

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

A. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Untuk mendukung pencapaian tujuan Strategis, dirumuskan Sasaran Strategis Kementerian Dalam Negeri, sebagai berikut :

Untuk mewujudkan tujuan pada T2 di tetapkan Sasaran Strategis :

a. Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM aparatur Pemerintahan Dalam Negeri (SS5) dengan indikator sasaran strategis sebagai tolak ukur tercapainya sasaran strategis ini.
b. Meningkatnya tata Kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, professional, proaktif dan inovatif (SS7) dengan indikator sasaran strategis sebagai tolak ukur tercapainya sasaran strategis ini.
c. Meningkatnya tata Kelola penyelenggaraan kewilayahan (SS9) dengan indikator sasaran strategis sebagai tolak ukur tercapainya sasaran strategis ini, yaitu index tata Kelola penyelenggaraan kewilayahan.

B. Tujuan dan Sasaran serta Arah Kebijakan

Berdasarkan visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Sukoharjo tahun 2021-2026, tujuan dan sasaran pembangunan selama lima tahun kedepan sebagai berikut :

VISI :

“ MEWUJUDKAN MASYARAKAT SUKOHARJO YANG LEBIH MAKMUR “

Visi ini diharapkan akan mewujudkan keinginan dan amanat masyakarat Kabupaten Sukoharjo. Visi Kabupaten Sukoharjo tersebut harus dapat diukur keberhasilannya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan. Adapun makna yang terkandung dalam visi tersebut dijabarkan dengan misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan Tata kelola Pemerintahan yang baik melalui Percepatan reformasi birokrasi
2. Meningkatkan Sumber daya manusia yang berkualitas
3. Memperkuat perekonomian rakyat yang berdaya saing tinggi
4. Memperkuat pembangunan infrastruktur berwawasan lingkungan
5. Meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan keagamaan

Sedangkan untuk Perangkat daerah Kecamatan bendosari atas dasar Visi dan Misi (1) Bupati 2021 – 2026, Tujuan, Sasaran dan arah kebijakan Jangka Menengah adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Rencana kerja Perangkat daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada tahun 2023
1.	Terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemerintah dan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel		Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	84,98
		Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	Persentase peningkayan pelayanan kecamatan	100 %
		Meningkatnya kualitas aparatur dan pelayanan publik	Nilai SAKIP perangkat Daerah	CC (56)

C. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Kecamatan Bendosari tahun 2024 disusun berdasarkan pada tupoksi Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo. Adapun program dan kegiatan tersebut adalah sebagaimana tersebut dalam Tabel 3.2 :

Tabel 3.2

Program dan Kegiatan Kecamatan Bendosari Tahun 2024

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	*Penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan*	Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan
		Peningkatan Efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	*Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa*	Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan pembangunan di desa
		Peningkatan Efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan
		Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan pembangunan di Kelurahan
		Pembangunan Sarana dan Prasarana kelurahan
		Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamtan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan
		Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	*Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum*	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah kecamatan
		Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan tokoh masyarakat
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Koordinasi/Sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan

		peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
PROGAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	*Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala daerah*	Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional dalam rangka memantabkan pengamalan pancasila, Pelaksanaan undang-undang dasar tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamtan
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	*Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa*	Fasilitasi administrasi tata pemerintahan Desa
		Fasilitasi Pelaksanaan pemilihan kepala desa
		Fasilitasi Pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa
		Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa
		Rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa
		Fasilitasi singkronisasi perencanaan pembangunan Daerah dengan Pembangunan desa
		Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	*Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	Administrasi Keuangan Perangkat desa	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi

		SKPD
		Koorodinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir
		Koorodinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan fungsinya
		Sosialisasi peraturan Perundang-undangan
	Adminstrasi Umum Perangkat daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		Penyediaan Peralatan Rumah tangga
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	Pengadaan barang Milik daerah penunjang Urusan pemerintah daerah	Pengadaan Mebel
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	Penyedia jasa surat menyurat
		Penyedia jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
		Penyedia jasa Pelayanan Umum Kantor
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Peunjang Urusan Pemerintahan daerah	Penyedia jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
		Penyedia jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak dan Perizinan Kendnaraan Dinas Operasional atau Lapangan
		Pemeliharaan Mebel
		Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
		Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

A. Rencana Kerja

Rencana Kerja yang berisi tentang program dan kegiatan Perangkat daerah adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerja sama dengan masyarakat, guna mencapai sasaran tertentu. Program dan Kegiatan tahun 2024 disusun melalui proses perencanaan mulai dari Musrenbang Kelurahan dan Musrenbang Kecamatan. Dengan adanya program dan Kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan – permasalahan yang dihadapi.

B. Program, Kegiatan, dan Pendanaan

Secara umum sasaran program dan kegiatan perangkat daerah tahun 2024 dijabarkan di dalam Rencana Kerja tahun 2024 ini. Rencana Kerja Kecamatan Bendosari tahun 2024 terdiri dari 6 Program, 15 Kegiatan dan 54 Sub kegiatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 disajikan pada Tabel 4.1 dan 4.2 sebagai berikut:

Tabel 4.1

RENCANA AKSI KINERJA KECAMATAN BENDOSARI
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2023

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA SASARAN				PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	RENCANA AKSI	ANGGARAN (Rp.)	PENANGGUNG JAWAB	JADWAL KEGIATAN												KET
		TR 1	TR 2	TR 3	TR 4							TR 1			TR 2			TR 3			TR 4			
												1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10												11
Meningkatnya kualitas Pelayanan kepada masyarakat	**Indek Kepuasan Masyarakat (IKU)**					**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**IKM di Kecamatan**			**5.735.110.068**														
						Penyelenggaraan urusan pemerintah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	**Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan**															
		0%	50 %	0%	50 %	Fasilitasi Percepatan Pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimum di Wilayah Kecamatan	2 lap	Pembagian Quisoner kepada responding	10.000.000	Kecamatan						V						V	
		0%	100 %	0%	0%	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 lap	Pelaksanaan sosialisasi tentang pelayanan kepada masyarakat	10.000.000	Kecamatan			V							V			

						PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Persentase Pemberdayaan masyarakat desa dan Kelurahan**																	
						Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan desa	**Cakupan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan desa**																	
		0%	0%	100 %	0%	Peningkatan partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di desa	Jumlah lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	13 lembaga kemasyarakatan	Pelaksanaan Musdes dan Persiapan pelaksanaan Musrenbangkel	15.000.000	Kecamatan								V				
		25 %	50 %	25 %	0%	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah kecematan	Jumlah laporan peningkatan Efektifitas kegiatan pemberdayaan Masyarakat di wilayah kecamatan	13 Laporan	Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat	10.000.000	Kecamatan		V			V		V					
						Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	**Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**																	
		100 %	0%	0%	0%	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di kelurahan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	2 lembaga	Pelaksanaan Musrenbangkel	15.000.000	Kelurahan Jombor	V											
		25 %	25 %	25 %	25 %	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakanpemberdayaan masyarakat di kelurahan	2 pokmas/ormas	Pelaksanaan pemberdayaan masayarakat di kelurahan	1.351.000.000	Kelurahan Jombor	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	
						Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	**Cakupan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat kecamatan**																	

		25 %	25 %	25 %	25 %	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diselenggarakan	14 lembaga (PKK desa/Kel)	Pelaksanan Kegiatan pembinaan Organisasi Perempuan di Kecamatan dan Kelurahan	100.000.000	Kecamatan Bendosari dan Kelurahan jombor	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V		
		0%	0%	100 %	0%	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang ditingkatkan kapasitasnya	14 Lembaga (kepemudaan/karangtaruna)	Pelaksanaan kegiatan Kepemudaan/Karangtaruna di wilayah Kecamatan	25.000.000	Kecamatan Bendosari dan Kelurahan jombor							V							
						PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN																			
						Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	**Cakupan Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**																		
		25 %	25 %	25 %	25 %	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instalasi Vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2 lap	Pelaksanaan rapat koordinasi Lintas sektoral di wilayah Kecamatan Bendosari	12.000.000	Kecamatan Bendosari				V					V					
		0%	50 %	0%	50 %	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan tokoh masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2 lap	Pelaksanaann rapat koordinasi dengan PKUB	15.000.000	Kecamatan Bendosari				V						V				
						Koordinasi Penerapan dan Penegaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	**Cakupan Koordinasi Penerapan dan Penegaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**																		

		0%	100 %	0%	0%	koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan atau Kepolisian	Jumlah laporan koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau kepolisian Negara Republik Indonesia	3 Lap	Pelaksanaan Rapat koordinasi Linmas dan KST	20.000.000	Kecamatan Bendosari dan Kelurahan jombor			V			V			V				
						PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM																		
						Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daertah	**CakupanPenyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daertah**																
		0%	50 %	50 %	0%	Pembinaan wawasan kebangsaan dan Ketahanan nasional dalam rangka memantabkan pengamalan pancasila, Pelaksanaan undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pelestarian Bhineka tunggal ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan negara kesatuan republik indonesia	Jumlah orang yng mengikuti Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila, Pelaksanaan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan negara kesatuan republik Indonesia	80 orang	PASKIB dan Pelaksanaan Upacara peringatan Hari Kemerdekaan	150.000.000	Kecamatn Bendosari							V	V					
		25 %	25 %	25 %	25 %	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	3 dok	Pelaksanaan Rapat/Kegiatan koordinasi Tim pembinawilayah	166.000.000	Kecamatn Bendosari	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	

						PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA																		
						Fasilitasi,Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	**Cakupan Fasilitasi,Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**																
		0%	50 %	0%	50 %	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka administrasi tata pemerintahan desa	13 Dok	Pelaksanaan Monitoring Desa/Kelurahan	10.000.000	Kecamatan Bendosari						V					V		
		0%	50 %	0%	50 %	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	2 dok	Pelaksanaan lelang bondo desa	10.000.000	Kelurahan Jombor						V						V	
		0%	0%	50 %	50 %	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka pelaksanaan pemilihan kepala desa	3 dok	Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa	5.000.000	Kecamatan Bendosari							V				V		
		0%	0%	0%	100 %	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa	1 dok	Pelaksanaan Rapat koordinasi BPD se Kec. Bendosari	15.000.000	Kecamatan Bendosari										V			
		0%	0%	100 %	0%	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian perangkat desa	Jumlah dokumen rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa	3 dok	Pelaksanaan pengangkatan Perangkat desa	5.000.000	Kecamatan Bendosari										V			
		25 %	0%	75 %	0%	Fasilitasi singkronisasi perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan desa	Jumlah dokumen sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	13 dok	Pelaksanaan Singkronisasi perencanaan pembangunan desa	5.000.000	Kecamatan Bendosari			V				V						

		100 %	0%	0%	0%	Fasilitasi Penyusunan perencanaan pembangunan Partisipatif	Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka perencanaan pembangunan partisipasi	13 dok	Pelaksanaan Musrenbangcam	15.000.000	Kecamatan Bendosari		V											
Meningkatnya Kwalitas Aparatur Pelayanan Publik	**Nilai SAKIP**					**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**																		
						Perencanaan,Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Cakupan Perencanaan,Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**																	
		50 %	50 %	0%	0%	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dok	Terlaksananya penyusunan Dok. Perencanaan	5.000.000	Kecamatan Bendosari	V	V											
		100 %	0%	0%	0%	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dok	Terlaksananya penyusunan Dok. RKA	4.000.000	Kecamatan Bendosari	V												
		0%	0%	100 %	0%	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dok	Terlaksananya penyusunan Dok. Perubahan RKA	4.000.000	Kecamatan Bendosari								V	V				
		100 %	0%	0%	0%	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dok	Terlaksananya penyusunan Dok. DPA	4.000.000	Kecamatan Bendosari		V	V										
		0%	0%	100 %	0%	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1 dok	Terlaksananya penyusunan Dok. Perubahan DPA	4.000.000	Kecamatan Bendosari								V	V				

							Dokumen Perubahan DPA-SKPD																	
		25 %	25 %	25 %	25 %	Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 lap	Terlaksananya laporan capaian kinerja	4.000.000	Kecamatan Bendosari	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	
		100 %	0%	0%	0%	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 lap	Terlaksananya Evaluasi kinerja perangkat daerah	4.000.000	Kecamatan Bendosari	V											
						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																		
		25 %	25 %	25 %	25 %	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	org/bln	Tersedianyan gaji dan tunjangan ASN	2.380.192.000	Kecamatan Bendosari	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	
		25 %	25 %	25 %	25 %	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	dok	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/Verifikasi keuangan SKPD	154.910.000	Kecamatan Bendosari	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	
		25 %	25 %	25 %	25 %	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	dok	Pelaksanaan koordinasi dan pelaksanaan akuntansi	3.000.000	Kecamatan Bendosari	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	
		0%	0%	0%	100 %	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	lap	Pelaksanaan koordinasi dan penyusuanan lap keuangan akhir tahun	3.000.000	Kecamatan Bendosari											V	

		25 %	25 %	25 %	25 %	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan bulanan/Triwulanan/Semesteran SKDS	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	lap	Terlaksanannya penyusunan laporan keuangan	3.000.000	Kecamatan Bendosari			V			V			V			V	
		0%	0%	0%	100 %	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	lap	Terlaksananya penyusuanan laporan realisasi anggaran	3.000.000	Kecamatan Bendosari												V	
						Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																		
		0%	100 %	0%	0%	*Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya*	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	28 paket	Terlaksananya pengadan pakaian dinas	9.450.000	Kecamatan Bendosari				V									
		0%	100 %	0%	0%	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	org	Terlaksananya sosialisasi perundangan	5.000.000	Kecamatan Bendosari						V							
						Administrasi Umum Perangkat Daerah																		
		25 %	25 %	25 %	25 %	Penyediaan Komponen instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	Tersedianyan komponen instalasi listrik	17.000.000	Kecamatan Bendosari dan Kelurahan jombor	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	
		25 %	25 %	25 %	25 %	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	Tersedianyan peralatan dan perlengkapan kantor	34.765.000	Kecamatan Bendosari dan Kelurahan jombor	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	
		25 %	25 %	25 %	25 %	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket	Tersedianyan peralatan Rumah tangga	25.000.000	Kecamatan Bendosari dan Kelurahan jombor	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	

		25 %	25 %	25 %	25 %	Penyediaan Bahan Logistik	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	Tersedianya bahan logistik	106.303.000	Kecamatan Bendosari dan Kelurahan jombor	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V		
		25 %	25 %	25 %	25 %	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	paket	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	20.000.000	Kecamatan Bendosari dan Kelurahan jombor	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V		
		25 %	25 %	25 %	25 %	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	dok	Tersedianyan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	8.000.000	Kecamatan Bendosari dan Kelurahan jombor	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V		
		25 %	25 %	25 %	25 %	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	lap	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	190.500.000	Kecamatan Bendosari dan Kelurahan jombor	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V		
						Pengadaan Barang Milik Daaerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																			
						Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan	jenis	Terlaksananya pengadaan mebel	8.000.000	Kecamatan Bendosari dan Kelurahan jombor													
		100 %	0%	0%	0%	Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	Terlaksananya pengadaan peralatan dan mesin	24.917.000	Kecamatan Bendosari dan Kelurahan jombor			V										
		100 %	0%	0%	0%	Pengadaan saranan dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	paket	Terlaksannya pengadaan sarana dan prasarana gedung	15.000.000	Kecamatan Bendosari dan Kelurahan jombor			V										
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																			

		25 %	25 %	25 %	25 %	Penyediaan Jasa surar menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	lap	Tersedianya jasa surat menyurat	30.000.000	Kecamatan Bendosari dan Kelurahan jombor	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	
		25 %	25 %	25 %	25 %	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	lap	Terbayarnya tagihan listrik, air dan tel	142.000.000	Kecamatan Bendosari dan Kelurahan jombor	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	
		25 %	25 %	25 %	25 %	Penyediaan Jasa Pelayanan umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	lap	Tersedianya jasa pelayanan umum	186.283.068	Kecamatan Bendosari dan Kelurahan jombor	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	
						Pemeliharaan Barang Milik Daaerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																		
		25 %	25 %	25 %	25 %	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	Terlaksananya pemeliharran kendaraan dinas roda 4 dan roda 2	94.750.000	Kecamatan Bendosari dan Kelurahan jombor	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	
		25 %	25 %	25 %	25 %	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan , Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	Terlaksananya pemeliharaan Ambulance	15.000.000	Kecamatan Bendosari dan Kelurahan jombor	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	
		0%	100 %	0%	0%	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	unit	Terlaksananya pemeliharaan mebel	5.500.000	Kecamatan Bendosari dan Kelurahan jombor				V								
		25 %	25 %	25 %	25 %	Pemeliharaan Peralatan dan Masin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin	19.540.000	Kecamatan Bendosari dan Kelurahan jombor	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	

		100 %	0%	0%	0%	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	paket	Terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi gedung	203.000.000	Kecamatan Bendosari dan Kelurahan jombor			V										
		100 %	0%	0%	0%	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasaranan Gedung kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasaranan gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	paket	Terlaksananya pemeliharaan /rehabilitasi sarana gedung kantor	35.000.000	Kecamatan Bendosari dan Kelurahan jombor			V										

Tabel 4.2

PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

KECAMATAN BENDOSARI

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
																Tolok Ukur	Target	
7	**01**				**KECAMATAN**								**5.716.117.068**					**6.198.500.000**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**4.037.394.068**					**4.314.500.000**
7	**01**	**01**	**2,01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**29.000.000**					**40.000.000**
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Sukoharjo, Bendosari, Semua Kelurahan	100 %	2 Dokumen	100 %	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	10.000.000
7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Sukoharjo, Bendosari, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	4.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	5.000.000

7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Sukoharjo, Bendosari, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	4.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	5.000.000
7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Sukoharjo, Bendosari, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	4.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	5.000.000
7	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Sukoharjo, Bendosari, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	4.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	5.000.000

7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Sukoharjo, Bendosari, Semua Kelurahan	100 %	2 Laporan	100 %	4.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	5.000.000
7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Sukoharjo, Bendosari, Semua Kelurahan	100 %	3 Laporan	100 %	4.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	5.000.000
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**2.728.490.000**					**2.676.000.000**
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Sukoharjo, Bendosari, Semua Kelurahan	100 %	20 Orang/bulan	100 %	2.561.580.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	2.500.000.000

7 01 01 2.02 0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifika si Keuangan SKPD	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Sukoharjo, Bendosari, Semua Kelurahan	100 %	12 Dokumen	100 %	154.910.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	160.000.000
7 01 01 2.02 0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Sukoharjo, Bendosari, Semua Kelurahan	100 %	12 Dokumen	100 %	3.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	4.000.000
7 01 01 2.02 0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Sukoharjo, Bendosari, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	100 %	3.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	4.000.000

7 01 01 2.02 0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Sukoharjo, Bendosari, Semua Kelurahan	100 %	4 Laporan	100 %	3.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	4.000.000
7 01 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Sukoharjo, Bendosari, Semua Kelurahan	100 %	12 Dokumen	100 %	3.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	4.000.000
7 01 01 2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**32.000.000**					**65.000.000**
7 01 01 2.05 0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Sukoharjo, Bendosari, Semua Kelurahan	100 %	-	-	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	15.000.000

7 01 01 2.05 0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Sukoharjo, Bendosari, Semua Kelurahan	100%	28 Orang	100%	27.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	40.000.000
7 01 01 2.05 0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Sukoharjo, Bendosari, Semua Kelurahan	100 %	50 Orang	100 %	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	10.000.000
7 01 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**395.723.000**					**558.000.000**
7 01 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Sukoharjo, Bendosari, Semua Kelurahan	100 %	2 Paket	100 %	19.895.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	20.000.000
7 01 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Sukoharjo, Bendosari, Semua Kelurahan	100 %	2 Paket	100 %	24.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umu		Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	45.000.000

										m				
7 01 01 2.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Sukoharjo, Bendosari, Semua Kelurahan	100 %	4 Paket	100 %	19.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	20.000.000
7 01 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Sukoharjo, Bendosari, Semua Kelurahan	100 %	11 Paket	100 %	266.960.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	220.000.000
7 01 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Sukoharjo, Bendosari, Semua Kelurahan	100 %	4 Paket	100 %	20.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	25.000.000

7 01 01 2.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Sukoharjo, Bendosari, Semua Kelurahan	100 %	6 Dokumen	100 %	7.960.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	8.000.000
7 01 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Sukoharjo, Bendosari, Semua Kelurahan	100 %	405 Laporan	100 %	37.408.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	220.000.000
7 01 01 2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**61.290.000**					**430.000.000**
7 01 01 2.07 0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Dearah	Kab. Sukoharjo, Bendosari, Semua Kelurahan	100%	-	100 %	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	300.000.000
7 01 01 2.07 0005	Pengadaan Mebel	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Dearah	Kab. Sukoharjo, Bendosari, Semua Kelurahan	100%	1 Unit	100 %	12.250.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umu		Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	100%	15.000.000

										m				
7 01 01 2.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Dearah	Kab. Sukoharjo, Bendosari, Semua Kelurahan	100 %	5 Unit	100 %	19.290.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	45.000.000
7 01 01 2.07 0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Dearah	Kab. Sukoharjo, Bendosari, Semua Kelurahan	100 %	1 Paket	100 %	29.750.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	100%	60.000.000
7 01 01 2.07 0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Dearah	Kab. Sukoharjo, Bendosari, Semua Kelurahan	100%	-	100%	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	100%	10.000.000
7 01 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**402.891.068**					**425.000.000**

7 01 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sukoharjo, Bendosari, Semua Kelurahan	100 %	4 Laporan	100 %	30.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	35.000.000
7 01 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sukoharjo, Bendosari, Semua Kelurahan	100 %	6 Laporan	100 %	142.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	150.000.000
7 01 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sukoharjo, Bendosari, Semua Kelurahan	100 %	14 Laporan	100 %	230.891.068	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	240.000.000
7 01 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**388.000.000**					**120.500.000**
7 01 01 2.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sukoharjo, Bendosari, Semua Kelurahan	100 %	16 Unit	100 %	94.750.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umu		Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	98.000.000

			Pajaknya							m				
7 01 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sukoharjo, Bendosari, Semua Kelurahan	100 %	1 Unit	100 %	12.750.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	15.000.000
7 01 01 2.09 0005	Pemeliharaan Mebel	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sukoharjo, Bendosari, Semua Kelurahan	100 %	17 Unit	100 %	5.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	7.500.000
7 01 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sukoharjo, Bendosari, Semua Kelurahan	100 %	55 Unit	100 %	25.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	40.000.000

7 01 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direha bilitasi	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sukoharjo, Bendosari, Semua Kelurahan	100 %	1 Unit	100 %	135.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	250.000.000
7 01 01 2.09 0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direha bilitasi	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sukoharjo, Bendosari, Semua Kelurahan	100 %	4 Unit	100 %	115.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	175.000.000
7 01 02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**								**20.000.000**					**30.000.000**
7 01 02 2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**								**20.000.000**					**30.000.000**
7 01 02 2.02 0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak		100 %	2 Laporan	100 %	10.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tingkat Kinerja Penyelenggar aan Pemerintahan	100 %	15.000.000
	Kecamatan		Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan								dan Pelayanan Publik		

7 01 02 2.02 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kab. Sukoharjo, Bendosari, Semua Kelurahan	100 %	2 Laporan	100 %	10.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tingkat Kinerja Penyelenggar aan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 %	15.000.000
7 01 03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**								**1.228.723.000**					**1.330.000.000**
7 01 03 2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**								**20.000.000**					**30.000.000**
7 01 03 2.01 0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Cakupan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kab. Sukoharjo, Bendosari, Semua Kelurahan	100 %	14 Lemb. Kemasyarak atan	100 %	10.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemberdayaa n masyarakat desa dan kelurahan	100 %	15.000.000
7 01 03 2.01 0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Cakupan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kab. Sukoharjo, Bendosari, Semua Kelurahan		2 Laporan	100 %	10.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemberdayaa n masyarakat desa dan kelurahan	100 %	15.000.000
7 01 03 2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**								**1.083.723.000**					**1.170.000.000**

7 01 03 2.02 0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Cakupan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kab. Sukoharjo, Bendosari, Semua Kelurahan	100 %	3 Lemb. Kemasyarakatan	100 %	15.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemberdayaa n masyarakat desa dan kelurahan	100 %	20.000.000
7 01 03 2.02 0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Cakupan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kab. Sukoharjo, Bendosari, Semua Kelurahan	100%	10 Laporan	100 %	465.223.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100%	500.000.000
7 01 03 2.02 0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Cakupan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kab. Sukoharjo, Bendosari, Semua Kelurahan	100%	2 Pokmas / Ormas	100 %	603.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100%	650.000.000
7 01 03 2.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**								**125.000.000**					**130.000.000**

7 01 03 2.03 0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Cakupan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kab. Sukoharjo, Bendosari, Semua Kelurahan	100 %	16 Lemb. Kemasyarakatan	100 %	100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100 %	100.000.000
7 01 03 2.03 0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Cakupan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kab. Sukoharjo, Bendosari, Semua Kelurahan	100 %	28 Lemb. Kemasyarakatan	100 %	25.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100 %	30.000.000
7 01 04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**								**49.000.000**					**60.000.000**
7 01 04 2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**								**27.000.000**					**35.000.000**
7 01 04 2.01 0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase capaian ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Cakupan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kab. Sukoharjo, Bendosari, Semua Kelurahan	100 %	2 Laporan	100 %	12.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase capaian ketentraman dan ketertiban umum	100 %	15.000.000

7 01 04 2.01 0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Persentase capaian ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Cakupan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kab. Sukoharjo, Bendosari, Semua Kelurahan	100 %	2 Laporan	100 %	15.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase capaian ketentraman dan ketertiban umum	100 %	20.000.000
7 01 04 2.02	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**								**22.000.000**					**25.000.000**
7 01 04 2.02 0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Persentase capaian ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Cakupan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kab. Sukoharjo, Bendosari, Semua Kelurahan	100 %	4 Laporan	100 %	22.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase capaian ketentraman dan ketertiban umum	100 %	25.000.000
7 01 05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**								**316.000.000**					**370.000.000**
7 01 05 2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**								**316.000.000**					**370.000.000**

7 01 05 2.01 01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kab. Sukoharjo, Bendosari, Semua Kelurahan	100 %	80 Orang	100 %	150.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan penyelenggar aan urusan pemerintahan umum	100 %	200.000.000
7 01 05 2.01 0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kab. Sukoharjo, Bendosari, Semua Kelurahan	100 %	12 Dokumen	100 %	166.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umu		Cakupan penyelenggar aan urusan pemerintahan umum	100 %	170.000.000

										m				
7 01 06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**								**65.000.000**					**94.000.000**
7 01 06 2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**								**65.000.000**					**94.000.000**
7 01 06 2.01 0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kab. Sukoharjo, Bendosari, Semua Kelurahan	100 %	2 Dokumen	100 %	10.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100 %	12.000.000
7 01 06 2.01 0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kab. Sukoharjo, Bendosari, Semua Kelurahan	100%	17 Dokumen	100%	10.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100 %	12.000.000

7 01 06 2.01 0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kab. Sukoharjo, Bendosari, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100 %	10.000.000
7 01 06 2.01 0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kab. Sukoharjo, Bendosari, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	15.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100 %	20.000.000
7 01 06 2.01 0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kab. Sukoharjo, Bendosari, Semua Kelurahan	100 %	3 Dokumen	100 %	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100 %	10.000.000

7 01 06 2.01 0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kab. Sukoharjo, Bendosari, Semua Kelurahan	100 %	3 Dokumen	100 %	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100 %	10.000.000
7 01 06 2.01 13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kab. Sukoharjo, Bendosari, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	15.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100 %	20.000.000
								TOTAL	**5.716.117.068**					**6.198.500.000**

BAB IV
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 merupakan panduan kerja bagi Kecamatan Bendosari selama 1 (satu) tahun ke depan. Rencana Kerja ini disusun berdasarkan kebutuhan Perangkat Daerah dan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun dalam rangka mendukung pencapaian program Kepala Daerah. Mendasarkan pada hal tersebut, pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 didasarkan dari Rencana Strategis Kecamatan Bendosari tahun 2021–2026. Guna pencapaian tujuan perencanaan pembangunan dalam 1 (satu) tahun ke depan. Penyusunan perencanaan pembangunan yang berkualitas akan menopang dalam mewujudkan pembangunan yang berkualitas terutama dalam mencapai visi dan misi Kepala Daerah.

Renja Perangkat Daerah Kecamatan Bendosari Tahun 2024 merupakan indikator dalam proses evaluasi laporan perencananan atas kinerja satu tahun, sehingga dapat meminimalisir pelaksanaan kegiatan yang menyimpang dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2021-2026 sesuai dengan tupoksi Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo.

BUPATI SUKOHARJO,

ETIK SURYANI

RENCANA KERJA



KECAMATAN GROGOL
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2024

KATA PENGATAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan Karunianya, kami telah dapat menyelesaikan penyusuan Rancana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kecamatan Grogol Tahun 2024. RENJA Perangkat Daerah Tahun 2024 merupakan bentuk komitemen nyata Perangkat Daerah Kecamatan Grogol dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan Perangkat Daerah yang baik sebagai mana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

RENJA adalah wujud perencanaan dokumen Perangkat Daerah dalam satu tahun anggaran. Proses rencana kegiatan dan pengaggaran Perangkat Daerah Kecamatan Grogol telah disusun dalam Rencana Kerja (RENJA) tahun 2024.

Adapun tujuan penyusunan renja adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah, dalam bentuk rancana tahunan. Melalui penyusunan Renja juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsi *good governance*, yaitu dalam rangka terwujudnya perencanaan yang baik dan benar-benar terprogram.

Demikian Laporan RENJA ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang

Grogol, Agustus 2023
Camat Grogol

PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
KECAMATAN GROGOL

HERDIS KURNIA WIJAYA, S.Sos
Pembina Tingkat I
NIP. 19740110 199303 1 002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ii
Daftar Isi iii
Daftar Tabel iv
Bab I : PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Landasan Hukum 3
C. Maksud dan Tujuan 6
D. Sistematikan Penulisan 7
BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 8
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Program Renstra PD 8
2.2. Analisa KInerja Perangkat Daerah 25
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 28
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023…… 33
BAB III : TUJUAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN …… 49
3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional 49
3.2. Tujuan dan Sasaran serta Arah Kebijakan 49
3.3. Program dan Kegiatan 51
BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH ……..... 52
BAB V : PENUTUP 72

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi evaluasi hasil pelakskananan renja PD Tahun 2020 dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2026..... 9

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo 27

Tabel 2.3 Identifikasi Permasalahan Kecamatan Grogol..... 28

Tabel 2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2024..... 34

Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan PD Tahun 2024 Dan Prakiraan Maju Tahun 2024..... 57

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah perencanaan Perangkat Daerah untuk pereode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja Perangkat Daerah merupakan sebuah dokomen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya. Renja Perangkat Daerah memiliki fungsi yang sangat fondamental dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja Perangkat Daerah merupakan produk perencanaan pada Unit Organisasi pemerintah terendah dan terkecil. Renja Perangkat Daerah berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kualtitas penyusunan Renja Perangkat Daerah sangatlah menentukan pada kualitas pelayanan pada publik.

Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dimulai dengan persiapan penyusunan Renja Perangkat Daerah dengan mengumpulkan data dan informasi. Menganalisa gambaran pelayanan Perangkat Daerah untuk menentukan isu-isu pentyeng penyelkenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan Renstra Perangkat Daerah yang berdasarkan pada penelaahan rancangan awal RKPD. Selanjutnya menjadi perumusan kegiatan prioritas yang juga didasarkan penelaahan usulan kegiatan masyarakat.

Prinsip-prinsip di dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah , adalah sebagai berikut :

a. Berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan mengacu pada rancangan awal RKPD;

b. Rumusan program/kegiatan/sub kegiatan di dalam Renja Perangkat Daerah didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerluksan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing Perangkat Daerah;

c. Penyusunan bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta memrupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD;

d. Rumusan program/kegiatan/sub kegiatan di dalam Renja Perangkat Daerah didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penangan dan mempertimbangkan pagu indikatif Perangkat Daerah;

e. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolak ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun n dan tahun n+1.

Keterkaitan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD dan Renstra Perangkat Daerah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena di dalam Renja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD, Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Renja Perangkat Daerah merupakan masukan utama bagi penyususnan RKP, Renstra Perangkat Daerah. Dan RPJMD bagi RKA Perangkat Daerah, KUA, PPAS dan RAPBD.

B. Landasan Hukum

Dasar Hukum Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 6178)

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka PanjangDaerah dan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2017 Nomor 1312);

12. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung, dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang;
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024;
14. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19 di Indonesia;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kodefikasi, Klasifikasi Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;

19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005-2025;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah;
24. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

C. Maksud dan Tujuan

Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Grogol Tahun 2023 merupakan dokumen resmi perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk 1 (satu) tahun ke depan, yang dimulai tanggal 1 Januari 2023 dan berakhir tanggal 31 Desember 2023, serta menggambarkan capaian kinerja yang dapat ditransformasikan ke dalam Renja Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah. Sedangkan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Grogol adalah :

1. Mendeskripsikan tentang program-program prioritas yang akan dilaksanakan langsung oleh Perangkat Daerah Kecamatan Grogol;
2. Program-program tersebut dapat terlaksana sesuai yang diharapkan dengan menitikberatkan pada program-program prioritas.

D. Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Grogol Tahun 2023 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renja, landasan hukum penyusunan Renja, maksud dan tujuan penyusunan Renja, dan sistematika penulisan dokumen Renja.

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

Memuat Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah . Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan fungsi Perangkat Daerah, Review terhadap Rancangan Awal Perangkat Daerah dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

Bab ini memuat penelaahan terhadap kebijakan Nasional, Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah serta Program dan Kegiatan.

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab ini memuat Perumusan Program, Kegiatan dan Sub. Kegitan Tahun 2024

Bab V Penutup

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan Capaian Program Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2020 merupakan kajian(*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan perkiraan capaian Renja Perangkat Daerah Tahun 2023. Evaluasi tersebut dilakukan melalui penilaian terhadap realisasi DPA Perangkat Daerah yang mencakup program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran, lokasi serta dana indikatif.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Grogol Tahun 2024 digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Selain itu, evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Grogol Tahun 2022 dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja Kecamatan Grogol Tahun 2022 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Kecamatan Grogol Tahun 2021-2026 serta sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Grogol Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut : (Tabel 2.1.)

TABEL 2.1

REKAPITULASI EVALUASI HASIL RENJA PD KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2022

KECAMATAN GROGOL

KABUAPATEN SUKOHARJO

No	Kode Rekening	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Renja PD Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran DPA PD 2022 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran DPA 2022 yang dievaluasi (%)	
									I		II		III		IV					
1		2	3	4	5				6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5*100	
					K	Rp (Ribu) Renja	K	Rp (Ribu) DPA	K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)	K	%
I	7.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Perangkat Daerah	100 %	2,750,655,000	100%	2,464,356,000	16	354,115,889	35	754,119,288	20	522,547,485	27,5	671,618,083	98,50	2,420,756,524	98,50	98.23
	2.01	*Semua ASN di Lingkup Kecamatan*	*Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*Cakupan Penyusunan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	100 %	*23,000,000*	100%	*29,000,000*	25	10,293,500	9	4,775,000	33	5,915,500	33	8,015,000	100	28,999,000	100	100.00

1	2.01.01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Ranstra dan Renja yang tersusun	1 Dokumen	5,000,000	1	**5,000,000**	1	2,568,500	0	1,149,000	0	192,500	0	1,090,000	1	**5,000,000**	100	**100.00**
2	2.01.02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA yang tersusun	1 Dokumen	3,000,000	1	**4,000,000**	1	4,000,000	0	0	0	0	0	0	1	**4,000,000**	100	**100.00**
3	2.01.03		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan yang tersusun	1 Dokumen	3,000,000	1	**4,000,000**	0	0	0	0	1	4,000,000	0	0	1	**4,000,000**	100	**100.00**
4	2.01.04		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA yang tersusun	1 Dokumen	3,000,000	1	**4,000,000**	1	2,650,000	0	1,350,000	0	0	0	0	1	**4,000,000**	100	**100.00**
5	2.01.05		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Dpa Perubahan yang tersusun	1 Dokumen	3,000,000	1	**4,000,000**	0	0	0	0	1	1,125,000	0	2,875,000	1	**4,000,000**	100	**100.00**
6	2.01.06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja (POK,Monev)	16 Dokumen	3,000,000	16	**4,000,000**	0	0	2	802,000	6	498,000	8	2,700,000	16	**4,000,000**	100	**100.00**
7	2.01.07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	3 Dokumen	3,000,000	3	**4,000,000**	3	1,075,000	0	1,474,000	0	100,000	0	1,350,000	3	**3,999,000**	100	**99.98**

	2.02	***Semua ASN di Lingkup Kecamatan***	***Administrasin Keuangan Perangkat Daerah***	***Cakupan Penyusunan Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	**100 %**	**1,862,435,000**	**100**	**1,744,133,000**	**8**	**238,793,817**	**39**	**561,471,916**	**14**	**465,850,641**	**39**	**460,200,543**	**100**	**1,726,316,917**	**100**	**98.98**
8	2.02.01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15 pegawai	1,745,435,000	15	**1,627,133,000**	15	214,012,317	15	530,110,416	15	440,859,641	15	424,334,543	15	**1,609,316,917**	100	98.91
9	2.02.03		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pengujian / Verifikasi Keuangan	12 dokumen	105,000,000	12	**105,000,000**	3	24,781,500	3	28,677,500	3	24,610,000	3	26,931,000	12	**105,000,000**	100	100.00
10	2.02.04		Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD	Jumlah Dokumen Akuntansi dan Laporan Keuangan	12 Dokumen	3,000,000	12	**3,000,000**	0	0	6	1,094,000	3	381,000	3	1,525,000	12	**3,000,000**	100	100.00
11	2.02.05		Koorodinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	1 Dokumen	3,000,000	1	**3,000,000**	0	0	0	0	0	0	1	3,000,000	1	**3,000,000**	100	100.00
12	.02.02.07		Koorodinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran	2 Laporan	3,000,000	2	**3,000,000**	0	0	0	0	0	0	2	3,000,000	2	**3,000,000**	100	100.00

13	2.02.08		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	12 Dokumen	3,000,000	12	**3,000,000**	0	0	6	1,590,000	0	0	6	1,410,000	12	**3,000,000**	100	100.00
	2.05	**ASN, Tokoh Masyarakat, Perangkat Desa, LKD**	***Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***	***Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Tingkat Disiplin Aparatur***	**100 %**	***178,055,000***	**100**	***5,000,000***	**67**	**3,875,000**	**33**	**1,125,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100**	**5,000,000**	**100**	**100.00**
	2.05.02		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atributnya	Jumlah Pakaian Dinas beserta perlengkapannya, Pakaian Kerja Lapangan, Pakaian Korpri	50 Stel	16,875,000	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.05.09		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan formal	25 orang	36,180,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	2.05.10		Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Sosialisasi Peraturan perundang -	75 orang	120,000,000	75	***5,000,000***	50	3,875,000	25	1,125,000	0	0	0	0	75	**5,000,000**	100	100.00

				Undangan yang dilaksanakan															
	2.05.11		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bimbingan Teknis Peraturan Perundang-undangan	4 kali	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.06	***Semua ASN di Lingkup Kecamatan***	***Administrasin Umum Perangkat Daerah***	***Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah***	**100 %**	***219,000,000***	**100**	***197,780,000***	**1**	**24,196,000**	**13**	**40,113,850**	**33**	**47,893,600**	**51,5**	**84,351,050**	**98,50**	**196,554,500**	**98,50**	**99.38**
15	2.06.01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik yang dibeli	151 buah	10,000,000	151	**10,000,000**	0	0	45	4,632,250	50	1,721,000	56	6,674,750	151	**13,028,000**	100	**130.28**
16	2.06.03		Penyediaan Peralatan Rumah tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga yang dibeli	563 buah	12,000,000	563	**14,500,000**	100	2,069,000	150	5,328,000	140	3,703,000	173	372,000	563	**11,472,000**	100	**79.12**
17	2.06.04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jml jenis bahan untuk kegiatan kantor yang dibeli	27 jenis	130,000,000	27	**99,721,000**	5	16,545,000	8	21,923,000	5	18,607,500	9	42,645,500	27	**99,721,000**	100	**100.00**

18	2.06.05		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang yang dicetak dan digandakan	16195 lbr	12,000,000	16195	**15,000,000**	0	0	1950	1,818,600	5500	5,706,600	8745	7,474,800	16195	**15,000,000**	100	**100.00**
19	2.06.06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis bahan bacaan yang dibeli tiap bulan	6 Jenis	5,000,000	6	**5,000,000**	3	1,172,000	2	1,192,000	1	1,192,000	0	1,444,000	6	**5,000,000**	100	**100.00**
20	2.06.09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti	401 Kali	50,000,000	401	**53,559,000**	100	4,410,000	100	5,220,000	100	16,963,500	95	25,740,000	395	**52,333,500**	98.5037	**97.71**
	2.07	***Semua ASN di Lingkup Kecamatan***	***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	***Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	**100 %**	***45,273,000***	**100**	***50,273,000***	**0**	**0**	**70**	**34,067,500**	**15**	**9,952,500**	**15**	**6,158,000**	**100**	**50,225,500**	**100**	**99.91**
21	2.07.05		Pengadaan Mebel	Jumlah jenis mebeleur yang diadakan	8 unit	8,720,000	6	**8,720,000**	0	0	6	8,720,000	0	0	0	0	6	**8,720,000**	100	**100.00**
22	2.07.06		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis peralatan dan mesin yang diadakan	4 unit	8,200,000	4	**13,200,000**	0	0	2	5,200,000	1	3,000,000	1	5,000,000	4	**13,200,000**	100	**100.00**
23	2.07.10		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Jumlah jenis sarana prasarana gedung kantor yang dibeli	6 unit	20,195,000	6	**20,195,000**	0	0	6	20,147,500	0	0	0	0	6	**20,195,000**	100	**100.00**

24	2.07.11		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis sarana prasarana pendukung gedung kantor yang dibeli	4 unit	8,158,000	4	**8,158,000**	0	0	0	0	2	6,952,500	2	1,158,000	4	**8,110,500**	100	**99.42**
	2.08		***Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	**Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100 %**	***276,055,000***	**100**	***286,813,000***	**0.6**	**57,445,572**	**30**	**59,481,732**	**30.4**	**79,476,023**	**39**	**72,655,152**	**100**	**269,058,479**	**100**	**93.81**
25	2.08.01		Penyedia jasa surat menyurat	Jumlah surat masuk dan Keluar	2000 surat	*12,000,000*	2000	***12,000,000***	0	0	621	2,548,800	600	2,602,800	779	6,848,400	2000	**12,000,000**	100	100.00
26	2.08.02		Penyedia jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Pembayaran rekening jasa sumber daya yang dibayar tiap bulan	2 rekenig	*66,060,000*	2	***55,960,000***	2	12,725,572	2	12,407,932	2	13,513,223	2	15,716,693	2	**54,363,420**	100	97.15
27	2.08.04		Penyedia jasa Pelayanan Umum Kantor	Pembayaran jasa THL Terselenggaranya Karnaval	10 orang	*197,995,000*	10	***218,853,000***	10	44,720,000	10	44,525,000	10	63,360,000	10	50,090,059	10	**202,695,059**	100	92.62
	2.09	***Barang Milik Daerah di Lingkup Kecamatan***	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100 %**	***146,837,000***	**100**	***151,357,000***	**7.52**	**19,512,000**	**50.376**	**53,084,290**	**17.29**	**31,767,500**	**24.812**	**40,238,338**	**100**	**144,602,128**	**100**	**95.54**

28	2.09.01		Penyedia jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan dinas operasional yang dipelihara dan pajak yang dibayarkan	11 unit	69,980,000	11	**72,500,000**	3	15,012,000	3	8,830,636	3	13,767,500	2	29,066,338	11	**66,676,474**	100	**91.97**
29	2.09.02		Penyedia jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak dan Perizinan Kendnaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas lapangan yang dipelihara dan pajak yang dibayarkan (ambulance)	1 unit	13,000,000	1	**15,000,000**	1	2,500,000	0	4,250,000	0	3,375,000	0	3,992,000	1	**14,117,000**	100	**94.11**
30	2.09.05		Pemeliharaan Mebel	Jumlah jenis mebeleur yang dipelihara	55 unit	10,000,000	55	**10,000,000**	0	0	41	4,500,000	14	5,500,000	0	0	55	**10,000,000**	100	**100.00**
31	2.09.06		Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	27 Unit	15,600,000	27	**15,600,000**	6	2,000,000	8	5,820,000	3	3,450,000	10	4,330,000	27	**15,600,000**	100	**100.00**
32	2.09.09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara	1 unit	30,000,000	1	**30,000,000**	0	0	1	26,551,654	0	3,400,000	0	0	1	**29,951,654**	100	**99.84**
33	2.09.11		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gd. Kantor	Jumlah jenis peralatan Rumah Jabatan yang yang dipelihara Jumlah Perlengkapan Rumah jabatan/Dinas yang dipelihara	38 unit	8,257,000	38	**8,257,000**	0	0	14	3,132,000	3	2,275,000	21	2,850,000	38	**8,257,000**	100	**100.00**

2.	**7.01.02**		**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**100 %**	***20,000,000***	100	***20,000,000***	**0**	**0**	**16,42**	**6,928,000**	**53,58**	**4,896,000**	**30**	**9,976,000**	**100**	**20,000,000**	**100**	**100.00**
	2.01	**Masyarakat**	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Cakupan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kec**	**100 %**	***10,000,000***	**100**	***10,000,000***	**0**	**0**	**16.67**	**824,000**	**53.33**	**2,925,000**	**30**	**6,251,000**	**100**	**10,000,000**	**100**	**100.00**
34	2.01.01		Koordinasi /Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal	Jumlah Koordinasi perencanaan Kegiatan Pelayanan Administrasi terpadu	160 orang	10,000,000	150	**10,000,000**	0	0	25	824,000	80	2,925,000	45	6,251,000	150	**10,000,000**	100	**100.00**
	2.02	**Masyarakat**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**100 %**	***10,000,000***	**100**	***10,000,000***	**0**	**0**	**75**	**6,104,000**	**25**	**1,971,000**	**0**	**3,725,000**	**100**	**10,000,000**	**100**	**100.00**
35	2.02.03		Peningkatan Efektiftas Pelaksanaan Pelayanan	Jumlah koordinasi pelaksanaan pelayanan	1600rang	10,000,000	160	**10,000,000**	0	0	120	6,104,000	40	1,971,000	0	3,725,000	160	**10,000,000**	100	**100.00**

			masyarakat di wilayah kecamatan	kepada masyarakat															
3.	**7.01.03**		**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan**	**100 %**	***101,174,000***	**100**	***85,000,000***	**30,81**	**14,306,500**	**25,14**	**24,449,000**	**1,15**	**19,867,500**	**42,90**	**24,577,000**	**100**	**85,000,000**	**100**	**100.00**
	2.01	**Masyarakat**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Cakupan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**100 %**	***31,174,000***	**100**	***25,000,000***	**24,13**	**3,801,000**	**25,27**	**7,258,500**	**2,30**	**5,670,000**	**48.276**	**6,470,500**	**100**	**25,000,000**	**100**	**100.00**
36	2.01.01		Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah koordinasi musyawarah dalam forum perencanaan Pembangunan di Desa	14 Desa	20,000,000	14	**15,000,000**	2	2,001,000	4	3,999,000	4	5,400,000	4	3,600,000	14	**15,000,000**	100	**100.00**
37	2.01.03		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di	Jumlah koordinasi pelaksanaan kegiatan	160 orang	11,174,000	160	**10,000,000**	40	1,800,000	40	3,259,500	0	270,000	80	2,870,500	160	**10,000,000**	100	**100.00**

			Wilayah Kecamatan	BUMDes di wilayah kecamatan															
	2.03		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Cakupan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**100 %**	***70,000,000***	**100**	***60,000,000***	**37.5**	**10,505,500**	**25**	**17,190,500**	**0**	**14,197,500**	**37,5**	**18,106,500**	**100**	**60,000,000**	**100**	**100.00**
38	2.03.01		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah organisasi atau kelompok perempuan yang dibina	14 lembaga	60,000,000	14	**50,000,000**	14	7,805,500	14	14,162,500	14	14,197,500	14	11,134,500	**14**	**50,000,000**	100	**100.00**
39	2.03.02		Peningkatan Kapasitas Lembaga kemasyarakatan	Jumlah pelaksanaan kegiatan pembinaan karang taruna	160 orang	10,000,000	160	**10,000,000**	60	2,700,000	40	3,028,000	0	0	60	6,972,000	160	**10,000,000**	100	**100.00**
4.	**7.01.04**		**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase capaian ketentraman dan ketertiban umum**	**100 %**	***330,000,000***	**100**	***30,000,000***	**4,17**	**675,000**	**20,83**	**5,686,000**	**5.56**	**1,575,000**	**69,44**	**22,064,000**	**100**	**30,000,000**	**100**	**100.00**

	04.02.01	**Masyarakat dan stekeholder terkait**	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Jumlah koordinasi dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum**	**100 %**	***325,000,000***	**100**	***25,000,000***	**4,17**	**675,000**	**20,83**	**5,686,000**	**5,56**	**1,575,000**	**69,44**	**17,064,000**	**100**	**25,000,000**	**100**	**100.00**
40	02.01.01		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah pelaksanaan koordinasi dengan instansi vertikal	160 orang	15,000,000	160	**10,000,000**	0	0	0	0	0	0	160	10,000,000	160	**10,000,000**	100	**100.00**
41	02.01.02		Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah pelaksanaan koordinasi dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	200 orang	310,000,000	200	**15,000,000**	15	675,000	75	5,686,000	20	1,575,000	90	7,064,000	200	**15,000,000**	100	**100.00**
		Linmas, Toko h Masyarakat dan Satpol	**Koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah**	**Jumlah koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah**	**100 %**	***5,000,000***	**100**	***5,000,000***	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100**	**5,000,000**	**100**	**5,000,000**	**100**	**100.00**

42	2.02.01		Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah koordinasi Linmas, Tokoh Masyarakat dan Satpol	100 orang	5,000,000	100	**5,000,000**	0	0	0	0	0	0	100	5,000,000	100	**5,000,000**	100	**100.00**
5.	**7.01.05**	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum**	**100 %**	**286,000,000**	**100**	**356,000,000**	**0**	**39,000,000**	**0**	**44,100,000**	**100**	**190,599,000**	**0**	**82,301,000**	**100**	**356,000,000**	**100**	**100.00**
	05.2.01	**Generasi Muda, ASN dan Masyarakat**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Jumlah urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yg diselenggarakan**	**100 %**	**286,000,000**	**100**	**356,000,000**	**0**	**39,000,000**	**0**	**44,100,000**	**100**	**190,599,000**	**0**	**82,301,000**	**100**	**356,000,000**	**100**	**100.00**
43	01.01	01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,	Jumlah pembinaan wawasan kebangsaan dan Fasilitasi Penanaman Ideologi Cinta Tanah Air Bangsa bagi generasi muda	75 orang	150,000,000	75	**190,000,000**	0	0	0	0	75	150,000,000	0	40,000,000	75	190,000,000	100	**100.00**

			Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																
44			Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Tugas Forum koordinasi pimpinan di kecamatan	13 orang	136,000,000	13	**166,000,000**	13	39,000,000	13	44,100,000	13	40,599,000	13	42,301,000	13	166,000,000	100	**100.00**
6.	**7.01.06**	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa**	**100 %**	**73,000,000**	**10 0**	**50,000,000**	**70,75**	**20,410,000**	**14,25**	**15,027,000**	**0**	**114,000**	**14,97**	**14,449,000**	**10 0**	**50,000,000**	**100**	**100.00**
	06.2.01		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Cakupan fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa**	**100 %**	**73,000,000**	**10 0**	**50,000,000**	**70,75**	**20,410,000**	**14,25**	**15,027,000**	**0**	**114,000**	**14.966**	**14,449,000**	**10 0**	**50,000,000**	**100**	**100.00**
45	01.02		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi Tata Pemerintahan Desa	14 Desa	15,000,000	14	**10,000,000**	2	2,485,000	6	4,330,000	0	114,000	6	3,071,000	14	10,000,000	100	**100.00**
46	01.03		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Fasilitasi Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Keuangan Desa	14 Desa	15,000,000	14	**10,000,000**	2	2,925,000	6	4,049,000	0	0	6	3,026,000	14	10,000,000	100	**100.00**

47	01.08		Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Fasilitasi Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	5 Desa	15,000,000	5	**5,000,000**	0	0	3	2,003,000	0	0	2	2,997,000	5	5,000,000	100	**100.00**
48	01.09		Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa	Jumlah koordinasi fasilitasi singkronisasi perencanaan dengan pembangunan desa	14 Desa	15,000,000	14	**10,000,000**	0	0	6	4,645,000	0	0	8	5,355,000	14	10,000,000	100	**100.00**
49	01.13		Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Pelaksanaan Musrenbangcam /Forum PD	100 orang	13,000,000	100	**15,000,000**	100	15,000,000	0	0	0	0	0	0	100	15,000,000	100	**100.00**
	JUMLAH					**3,560,829,000**	**100**	**3,005,356,000**	**20,28**	**428,507,389**	**18,60**	**850,309,288**	**30**	**739,598,985**	**29.62**	**824,985,083**	**98,50**	**2,961,756,524**	**98,50**	**98.55**

Berdasarkan hasil Evaluasi terhadap Renja Kecamatan Grogol tahun 2022 pada Tabel 2.1 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Rata-rata capaian output 6 program 15 kegiatan 49 sub kegiatan Urusan Administrasi Pemerintahan Kecamatan Grogol pada Tahun 2022 Capaian Kinerja adalah sebesar 98,50 % dengan prosentase realisasi keuangan sebesar 98,55 %

a) Permasalahan dan Solusi

1. Capaian Realisasi Output

Berdasarkan tabel tersebut di atas pada tahun 2022, dari 49 sub kegiatan telah dapat mencapai target output 98,55 %, ada sub kegiatan terdapat efisiensi yang berasal dari penghematan belanja.

Untuk capaian output kinerja yang kurang dari 100 persen, bisa kita lihat pada table dibawah ini :

NO	SUB KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA	PERMASALAHAN
1.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti	Capaian output kinerja sub kegiatan 98,50%, dengan realisasi anggaran 98, 55%. Hal ini disebabkan karena realiasasi Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD berdasarkan surat undangan yang masuk

2. Capaian Anggaran

Penyerapan Anggaran tahun 2022 adalah 98,55 %. Selain menunjukan adanya efisiensi, tingkat penyerapan anggaran tersebut disebabkan oleh permasalahan sebagai berikut:

NO	SUB KEGIATAN	PERMASALAHAN
1.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Adanya agenda study banding yang dialihkan ke

	SKPD	perjalanan luar daerah

3. Solusi

Atas permasalahan tersebut diatas, upaya perbaikan yang akan dilakukan pada tahun anggaran berikutnya adalah sebagai berikut :

Dalam melaksanakan kegiatan rapat dan konsultasi ke luar daerah dimaksimalkan sesuai surat edaran dari Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.

2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja palayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Kecamatan Grogol dilakukan terhadap penilaian capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan.

IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah yang mengacu pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026. Secara rinci, capaian IKU Kecamatan Grogol disajikan pada tabel berikut :

INDIKATOR KINERJA UTAMA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN GROGOL KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2021 – 2026

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2		3	4	5	6
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel		**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Kinerja di Kecamatan Grogol	Camat Grogol	Hasil Survey Masyarakat
	1.1	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	**Persentase Peningkatan Pelayanan Kecamatan**	Jumlah masyarakat yang terlayani / Jumlah masyarakat yang datang untuk dilayani x 100%	Camat Grogol	Masyarakat
	1.2	Meningkatkan kualitas	**Nilai SAKIP**	**Hasil Nilai SAKIP PD Tahun N**	Camat	Nilai SAKIP

		Aparatur dan Pelayan Publik			Grogol	

Tabel. 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Grogol
Kabupaten Sukoharjo
Tahun 2021-2026

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Renstra dan Capaian Renstra Tahun ke –							
				2021		2022		2023	2024	2025	2025
				Target (%)	Capaian (%)	Target (%)	Capaian (%)	Target (%)	Target (%)	Target (%)	Target (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100	85	100	98,50	100	100	100	100
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik			100	90	100	100	100	100	100	100
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kalurahan			100	100	100	100	100	100	100	100
4.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum			100	100	100	100	100	100	100	100
5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum			100	100	100	100	100	100	100	100
6.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			100	100	100	100	100	100	100	100

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sebagai Perangkat Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati Kecamatan Grogol merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan fungsi lainnya.

Dalam menyelenggarakan urusan tersebut selama tahun 2024 Kecamatan Grogol menghadapi beberapa permasalahan sebagai berikut :

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi selama tahun 2023

Tabel 2.3

Identifikasi Permasalahan Kecamatan Grogol

No.	Permasalahan	Hambatan
1.	Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelayanan publik di Kecamatan	Belum optimalnya sarana dan prasarana pelayanan publik sesuai standar
		Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan publik
		Belum optimalnya budaya kerja aparatur
		Jumlah, kapabilitas, kapasitas dan kompetensi aparatur perlu ditingkatkan mengingat luasnya kecamtan Grogol dan banyaknya jumlah penduduk yang harus dilayani
2.	Masih adanya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat	Kurangnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan perundangan
		Masih kurangnya peran serta masyarakat untuk menjaga

		ketertiban dan ketentraman lingkungan
		Kuantitas dan kualitas anggota linmas yang belum memadai
3.	Perlu peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	Peran dan fungsi kelembagaan masyarakat dalam pembangunan perlu dioptimalkan
		Koordinasi lintas sektor untuk melaksanakan perlu dioptimalkan
4.	Perlu peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan di lingkungan perlu ditingkatkan
		Kondisi sarana dan prasarana lingkungan perlu ditingkatkan
		Potensi lokal kewilayahan perlu dukungan pembinaan dan pengembangan
5.	Belum optimalnya pengelolaan asset pemerintah di kecamatan	Perlu peningkatan tertib pencatatan dan pengelolaan asset di kecamatan
6.	Belum optimalnya penerimaan PAD dari Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan	Perlu peningkatan kesadaran masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Grogol tahun 2023

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan, para aparatur kecamatan bekerjasama untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan bersama, yang pada prosesnya mempunyai peluang sekaligus tantangan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja. Tantangan dan peluang pengembangan OPD Kecamatan Grogol, dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Tantangan

Tantangan yang dihadapi Kantor Kecamatan Grogol dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat diuraikan sebagai berikut:

a) Kualitas/profesionalisme aparatur pemerintahan, baik yang ada di Kantor Kecamatan maupun Perangkat desa masih belum maksimal;
b) Munculnya sikap apatis dan menurunnya disiplin aparatur pemerintahan, baik yang ada di Kantor Kecamatan maupun Perangkat desa;
c) Adanya fenomena demokrasi yang mengarah kepada kebebasan dan aroganisi dalam berpendapat dan menyikapi kebijakan pemerintah;
d) Masyarakat Kecamatan Grogol yang heterogen;
e) Semakin meningkatnya pengangguran utamanya usia produktif sebagai akibat dari tidak seimbangnya pertumbuhan penduduk angkatan kerja dengan kesempatan kerja;
f) Ada indikasi menurunnya partisipasi masyarakat dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
g) Semakin berkurangnya luas lahan pertanian yang dialihfungsikan menjadi pemukiman;

h) Semakin transparannya informasi melalui media elektronik aparatur dituntut harus lebih responsive terhadap dinamika pembangunan masyarakat.

2) Peluang

Peluang yang dihadapi Kantor Kecamatan Grogol dalam menjalankan tugas dan fungsinya dapat diuraikan sebagai berikut :

a) Adanya kebijakan otonomi daerah, yang memberi keleluasaan penyerahan sebagian kewenangan urusan pemerintahan dan urusan umum lain dari Bupati kepada Camat;
b) Adanya kebijakan pengembangan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri No 4 Tahun 2010;
c) Adanya kebijakan penerapan disiplin PNS melalui Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS;
d) Potensi pengembangan industri dan perdagangan di Wilayah Grogol;
e) Adanya aparatur dari OPD (Dinas/Badan) yang bertugas di Kecamatan;
f) Jumlah penduduk yang besar yang tersebar di 14 (empat belas) desa;
g) Adanya dukungan dari lembaga lain (lembaga sosial dan keagamaan) dalam mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi serta pencapaian tujuan dalam pemberdayaan masyarakat;
h) Posisi wilayah yang strategis berbatasan langsung dengan Kota Surakarta;

Dari uraian diatas dapat dilihat perbandingan antara peluang dan tantangan adalah 8:8, dengan perbandingan tersebut jelas terlihat bahwa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan visi dan misi yang ingin dicapai diperlukan suatu usaha dan strategi yang tepat agar tantangan yang lebih besar tersebut dapat

teratasi sehingga dapat menghasilkan kinerja yang lebih baik dari periode sebelumnya.

Dengan memperhatikan Permasalahan dan hambatan serta Peluang dan Tantangan yang dihadapi selama tahun 2023, maka isu-isu penting berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindak lanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Kecamatan Grogol tahun 2024 adalah sebagai berikut

1. Perlu penambahan kwantitas SDM dan peningkatan kwalitas SDM karyawan
2. Adanya monitoring yang terjadwal secara rutin
3. Peningkatan kwalitas perencanaan

Sedangkan isu-isu penting lainnya yang ada di Kecamatan Grogol adalah sebagai berikut :

a. Bidang Pemerintahan dan Pelayanan Publik

1) Belum optimalnya kinerja aparatur Pemerintahan Desa
2) Masih ada sebagian jenis pelayanan administrasi kependudukan yang belum bisa dilayani ditingkat Kecamatan
3) Perlu peningkatan sinergitas antar unit kerja dalam pelayanan kepada warga masyarakat

b. Bidang Pemberdayaan Masyarakatdan Desa

1) Masih kurangnya kesadaran dan peran serta masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan wilayah
2) Perlu peningkatan kualitas sarana dan prasarana di Desa khusunya jaringan Internet Desa

c. Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum

1) Pemahaman warga masyarakat tentang peraturan perundangan belum optimal
2) Masih perlu peningkatan peran serta warga terhadap penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum belum optimal

d. Bidang Kesejahteraan Sosial

1) Belum terwujudnya sinkronisasi data sebagai dasar pengambilan kebijakan terkait dengan bantuan sosial.
2) Perlu peningkatan upaya strategis dalam rangka pemulihan pandemi covid-19 terutama dari aspek ekomoni, kesehatan dan sosial

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2023

Review terhadap rancangan awal RKPD Kecamatan Grogol tahun 2023 dilakukan dengan membandingkan antara rancangan awal RKPD Kabupaten Sukoharjo tahun 2023 dengan hasil analisa kebutuhan Kecamatan Grogol tahun 2023. Hasil review terhadap rancangan awal RKPD Kabupaten Sukoharjo tahun 2023 disampaikan pada tabel sebagai berikut : tabel (2.4)

Tabel 2.4

RIVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2023
KECAMATAN GROGOL
KABUPATEN SUKOHARJO

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	RENSTRA PD TAHUN 2023			Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2023			Lokasi
			Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp.000)	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp.000)	
			Satuan	Target		Satuan	Target		
3	4	5	9		10	11		12	20
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**100%**		**3.018.000.000**	**100%**		**3.285.093.500**	Kecamatan Grogol
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	***Cakupan Penyusunan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	**100%**		**23.000.000**	**100%**		**29.000.000**	
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	Dokumen	5.000.000	1	Dokumen	5.000.000	

7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	3.000.000	1	Dokumen	4.000.000	
7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	3.000.000	1	Dokumen	4.000.000	
7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen	3.000.000	1	Dokumen	4.000.000	
7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen	3.000.000	1	Dokumen	4.000.000	
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16	Laporan	3.000.000	16	Laporan	4.000.000	
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	Laporan	3.000.000	3	Laporan	4.000.000	
7.01.01,2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	***Cakupan Penyusunan Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat***	**100 %**		**2.267.000.000**	**100 %**		**1.973.236.000**	

		Daerah							
7.01.01,2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15	Orang/bulan	2.145.000.000		Orang/bulan	1.856.236.000	
7.01.01,2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	Dokumen	110.000.000	12	Dokumen	105.000.000	
7.01.01,2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12	Dokumen	3.000.000	12	Dokumen	3.000.000	
7.01.01,2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penhyusunan Laporan Keungan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	3.000.000	1	Laporan	3.000.000	
7.01.01,2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi	2	Laporan	3.000.000	2	Laporan	3.000.000	

		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD							
7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12	Dokumen	3.000.000	12	Dokumen	3.000.000	
7.01.01.2.05	***Administrasin Kepegawaian Perangkat Daerah***	***Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Tingkat Disiplin Aparatur***	**100 %**		**66.000.000**	**100 %**		**38.437.500**	
7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atributnya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	50	Paket	18.000.000	25	Paket	8.437.500	
7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4	Dokumen	5.000.000	4	Dokumen	5.000.000	
7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegaai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	25	Orang	38.000.000	20	Orang	20.000.000	
7.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	75	Orang	5.000.000	75	Orang	5.000.000	

7.01.01.2.06	***Administrasin Umum Perangkat Daerah***	***Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah***	**100 %**		**207.000.000**	**100 %**		**390.378.000**	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	151	Paket	10.000.000	151	Paket	10.000.000	
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	563	Paket	12.000.000	563	Paket	13.797.000	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	27	Paket	130.000.000	5	Paket	170.000.000	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	16195	Paket	10.000.000	1	Paket	13.000.000	
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	6	Dokumen	5.000.000	6	Dokumen	5.000.000	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	401	Laporan	40.000.000	370	Laporan	38.180.000	
7.01.01.2.07	***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	***Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	**100 %**		**20.000.000**	**100 %**		**358.961.000**	

7.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas Jabatan yang disediakan	1	-	-	1	unit	315.000.000	
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	8	unit	5.000.000	8	unit	8.881.000	
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3	unit	5.000.000	3	unit	8.580.000	
7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6	unit	5.000.000	6	unit	19.500.000	
7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4	unit	5.000.000	4	unit	7.000.000	
7.01.01.2.08	***Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	**Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100 %**		**288.000.000**	**100 %**		**345.949.000**	
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2000	surat	13.000.000	2000	surat	12.099.000	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2	rekening	68.000.000	2	rekening	65.850.000	

7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	10	orang	207.000.000	10	orang	268.000.000	
7.01.01.209	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100 %**		**147.000.000**	**100 %**		**149.132.000**	
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	11	unit	70.000.000	11	unit	72.500.000	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1	unit	15.000.000	1	unit	15.000.000	
7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	55	unit	10.000.000	55	unit	10.000.000	
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	27	unit	13.000.000	15	unit	13.600.000	

7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	unit	30.000.000	1	unit	30.000.000	
7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	36	unit	9.000.000	28	unit	8.032.000	
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**78**		**68.260.000**	**79**		**25.000.000**	
7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Cakupan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kec**	**100 %**		**22.000.000**	**100 %**		**10.000.000**	
7,01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4	Laporan	22.000.000	4	Laporan	10.000.000	

7,01.02.2.01.0002	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**100 %**		**46.260.000**	**100 %**		**15.000.000**	
7.01.02.2,02	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	4	Laporan	20.000.000	2	Laporan	5.000.000	
7.01.02.202.0001	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4	Laporan	26.260.000	4	Laporan	10.000.000	
7.01.02.202.0003	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		**100**		**99.000.000**	**100**		**115.000.000**	
7.01.03	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**		**100 %**		**39.000.000**	**100 %**		**25.000.000**	

7.01.03.2.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	14	Lembaga Kemasyarakatan	20.000.000	14	Lembaga Kemasyarakatan	15.000.000	
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4	Laporan	19.000.000	4	Laporan	10.000.000	
7.01.03.2.01.0003	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**		**100 %**		**60.000.000**	**100 %**		**90.000.000**	
7.01.03.2.03	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	14	Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000	14	Lembaga Kemasyarakatan	80.000.000	
7.01,03.2.03.0001	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	160	Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000	14	Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000	
7..01.03.2.03.0003	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Prosentase Capaian Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**100**		**70.000.000**	**100**		**30.000.000**	

7.01.04	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Jumlah koordinasi dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum**	**100 %**		**45.000.000**	**100 %**		**10.000.000**	
7.01.04.2.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2	Laporan	25.000.000	1	Laporan	10.000.000	
7.01.04.2.01.0002	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2	Laporan	25.000.000	1	Laporan	10.000.000	
7.01.04.2.02	**Koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah**	**Jumlah koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah**	**100 %**		**25.000.000**	**100 %**		**10.000.000**	
7.01.04.2.02	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan	1	Laporan	25.000.000	3	Laporan	10.000.000	

	Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia							
7.01.04.2.01.0001	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	4	Laporan	20.000.000	3	Laporan	10.000.000	
7.01.04.2.02.0001	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum**	**85**		**351.000.000**	**87**		**316.000.000**	
7.01.05	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Jumlah urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yg diselenggarakan**	**100 %**		**351.000.000**	**100 %**		**316.000.000**	
7.01.05.2.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan	75	Orang	150.000.000	75	Orang	150.000.000	

	Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia							
7.01.05.2.01.0001	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	300	Orang	33.000.000	-	-	0	
7.01.05.2.01.0002	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12	Dokumen	168.000.000	12	Dokumen	166.000.000	
7.01.05.2.01.0008	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**		**85**		**120.380.000**	**85**		**60.000.000**	
7.01.06	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Cakupan fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa**	**100 %**		**120.380.000**	**100 %**		**60.000.000**	

7.01.06.2.01	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	14	Dokumen	31.000.000	4	Dokumen	10.000.000	
7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	14	Dokumen	30.000.000	4	Dokumen	10.000.000	
7.01.06.2.01.0002	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	8	Dokumen	14.380.000	4	Dokumen	5.000.000	
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	6	Dokumen	20.000.000	6	Dokumen	10.000.000	
7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	1	Dokumen	25.000.000	1	Dokumen	15.000.000	
7.01.06.2.01.0007	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	4	Laporan	14.000.000	4	Laporan	5.000.000	

7.01.06.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	14	Laporan	15.620.000	4	Laporan	5.000.000	
	JUMLAH				**3.726.640.000**			**3.831.093.500**	

BAB III

TUJUAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaah terhadap kebijakan Nasional

Untuk mendukung pencapaian tujuan Strategis, dirumuskan Sasaran Strategis Kementerian Dalam Negeri, sebagai berikut:

1. **Untuk mewujudkan tujuan pada T1 ditetapkan Sasaran Strategis:**
   a. Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia (SS1), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi: (1) Indeks Demokrasi Indonesia. (2) Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilukada dan Pemilu. (3) Indeks Kinerja Ormas.
   b. Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah (SS2), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi: (1) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi. (2) Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM). (3) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi. (4) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya.
   c. Meningkatnya kewaspadaan nasional (SS3), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, yaitu Indeks Kewaspadaan Nasional.
   d. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas (SS4), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi: (1) Jumlah daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas kategori “Baik”. (2) Indeks Kepuasaan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas.

3.2. Tujuan dan Sasaran serta Arah Kebijakan

Berdasarkan visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Sukoharjo tahun 2021-2026, tujuan dan sasaran pembangunan selama lima tahun kedepan sebagai berikut :

V I S I :

“ MEWUJUDKAN MASYARAKAT SUKOHARJO YANG LEBIH MAKMUR “

Visi ini diharapkan akan mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat Kabupaten Sukoharjo. Visi Kabupaten Sukoharjo tersebut harus dapat diukur keberhasilannya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan. Adapun makna yang terkandung dalam Visi tersebut dijabarkan dengan misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik melalui Percepatan reformasi birokrasi
2. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas
3. Memperkuat perekonomian rakyat yang berdaya saing tinggi
4. Memperkuat pembangunan infrastruktur berwawasan lingkungan
5. Meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan keagamaan

Sedangkan untuk Perangkat Daerah Kecamatan Grogol atas dasar Visi dan Misi (I) Bupati 2021-2026, Tujuan, Sasaran dan arah kebijakan Jangka Menengah adalah :

MISI RPJMD	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	IKU KEC
MISI 1 RPJMD : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Percepatan Reformasi Birokrasi	Terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	Peningkatan efektivitas kinerja birokrasi dan layanan publik yang responsif, transparan dan akuntabel	Mengembangkan layanan birokrasi yang prima	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

		Meningkatnya kualitas aparatur dan pelayanan publik	Meningkatkan kualitas pelayanan public, pemanfaatan dan peningkatan pengembangan publik, efektivitas dan efisiensi pemerintahan	Meningkatkan semangat dan kenyamanan bekerja, kemauan bekerjasama, transparansi dan akuntabel	Nilai SAKIP

3.3. Program dan Kegiatan

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerja sama dengan masyarakat, guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perumusan program dan kegiatan pada Kecamatan Grogol didasarkan pada beberapa faktor, diantaranya pencapaian visi dan misi kepala daerah (terutama misi ke-1) dan pengentasan kemiskinan. Rencana kerja Kecamatan Grogol tahun 2024 mencakup 6 program terdiri 15 kegiatan dan 58 Sub Kegiatan yaitu :

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH

1.1. Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub. Kegiatan :

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1.2 Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub. Kegiatan :

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran
- Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

1.3 Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub. Kegiatan :

- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapannya
- Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Nerdasarkan Tugas

dan Fungsi
- Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan

1.4 Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub. Kegiatan :

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang undangan
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

1.5 Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub. Kegiatan :

- Pengadaan Mebel
- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

1.6 Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub. Kegiatan :

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

1.7 Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah

Sub. Kegiatan :

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas atau Lapangan
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- Pemeliharaan Mebel
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

II. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK

2.1 Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Sub. Kegiatan :

- Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
- Peningkatan efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

2.2 Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan

Sub. Kegiatan :

- Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan
- Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan

III. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KALURAHAN

3.1 Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Sub. Kegiatan :

- Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
- Peningkatan Efektifitas KegiatanPemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

3.2 Kegiatan : Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

Sub. Kegiatan :

- Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan
- Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan

IV. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

4.1 Kegiatan : Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentrama dan Ketertiban Umum

Sub. Kegiatan :

- Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,

Tentara Nasioanal Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
- Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

4.2 Kegiatan : Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Sub. Kegiatan :

- Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

V. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

5.1 Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

Sub. Kegiatan :

- Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
- Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

VI. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA

6.1 Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Sub. Kegiatan :

- Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
- Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
- Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
- Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
- Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa
- Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
- Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
- Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan

Partisipasif

- Koordinasi Pendampingan Desa di wilayahnya
- Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di wilayalah Kecamatan

Rumusan rencana program dan kegiatan OPD tahun 2024 Kecamatan Grogol untuk sumber dana APBD Kabupaten Sukoharjo secara detail dapat dilihat pada lampiran Tabel 4.1 sebagai berikut :

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan PD Tahun 2024
Dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Kabupaten Sukoharjo

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2024		Sumber Dana	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025		Lokasi
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**100%**	**3.042.935.000**	**APBD**	**100%**	**3.263.600.000**	
7.01.01.2.0.1	***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	***Cakupan Penyusunan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	**100%**	***29,000,000***	***APBD***	***100%***	***34,000,000***	
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	5,000,000	APBD	1 Dokumen	10,000,000	

7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	4,000,000	APBD	1	Dokumen	4,000,000	
7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	4,000,000	APBD	1	Dokumen	4,000,000	
7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen	4,000,000	APBD	1	Dokumen	4,000,000	
7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen	4,000,000	APBD	1	Dokumen	4,000,000	
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16	Laporan	4,000,000	APBD	16	Laporan	4,000,000	

7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	Laporan	4,000,000	APBD	3	Laporan	4,000,000	
7.01.01.2.0.2	***Administrasin Keuangan Perangkat Daerah***	***Cakupan Penyusunan Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	**100%**		***2.082.659.000***	*APBD*	***100%***		***2,303,500,000***	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15	Orang/bulan	1.965.659,000	APBD	15	Orang/bulan	2,176,500,000	
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	Dokumen	105,000,000	APBD	12	Dokumen	115,000,000	
7.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12	Dokumen	3,000,000	APBD	12	Dokumen	3,000,000	
7.01.01.2.02.0005	Koorodinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3	Laporan	3,000,000	APBD	3	Laporan	3,000,000	
7.01.01.2.02.0007	Koorodinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan	12	Laporan	3,000,000	APBD	12	Laporan	3,000,000	

		Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD								
7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Dokumen	3,000,000	APBD	1	Dokumen	3,000,000	
7.01.01.2.0.5	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	***Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***	***100%***		***35.000.000***	*APBD*	***100%***		***65,000,000***	
7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	25	Paket	-	APBD	25	Paket	20,000,000	
7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4	Dokumen	10,000,000	APBD	4	Dokumen	10,000,000	
7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	25	Orang	25,000,000	APBD	25	Orang	30,000,000	
7.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Sosialisasi Peraturan perundang _ Undangan yang dilaksanakan	75	Orang	5,000,000	APBD	75	Orang	5,000,000	
7.01.01.2.0.6	***Administrasin Umum Perangkat Daerah***	***Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***100%***		**354.703.000**	APBD			**167.000.000**	

7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	10,000,000	APBD	1	Paket	10,000,000	
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	Paket	14,100,500	APBD	1	Paket	12,000,000	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	275.391,000	APBD	1	Paket	80,000,000	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	10.270.000	APBD	1	Paket	15,000,000	
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	6	Dokumen	5,000,000	APBD	6	Dokumen	5,000,000	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	227	Laporan	39.942,000	APBD	230	Laporan	45,000,000	
7.01.01.2.0.7	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**		***160,984,000***	APBD	**100%**		**85,000,000**	
7.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Dinas atau Kendaraan Perorangan Dinas atau	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	-		1	unit	25,000,000	

	Kendaran Dinas Jabatan	yang Disediakan								
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	25	Unit	17.065.500	APBD	4	Unit	10,000,000	
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1	Unit	7.350.000	APBD	4	Unit	10,000,000	
7.01.01.2.07.0010	Pengadaaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2	Unit	65.898.000	APBD	2	Unit	25,000,000	
7.01.01.2.07.0011	Pengadaaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2	Unit	7,000,000	APBD	3	Unit	15,000,000	
7.01.01.2.0.8	***Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	**Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**		**297.237.000**	APBD	**100 %**		**357.000.000**	
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	15,000,000	APBD	12	Laporan	13,000,000	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	55.050.000	APBD	12	Laporan	69,000,000	

7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	10	Laporan	230,088,000	APBD	12	Laporan	275.000.000	
7.01.01.2.0.9	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**		**147.022.000**	**APBD**	**100%**		**252.100.000**	
0.0.01.2.0.9.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	11	Unit	72,500,000	APBD	11	Unit	72,500,000	
0.0.01.2.0.9.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1	Unit	15,000,000	APBD	1	Unit	15,000,000	
0.0.01.2.0.9.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	55	Unit	10,000,000	APBD	55	Unit	10,000,000	
0.0.01.2.0.9.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30	Unit	11.490.000	APBD	30	Unit	15,600,000	

0.0.01.2.0.9.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	30,000,000	APBD	1	Unit	130.000.000	
0.0.01.2.0.9.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	28	unit	8.032.000	APBD	28	unit	9,000,000	
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**79**		**25,000,000**	APBD	**80**		**50.000.000**	
7.01.02.2.0.1	***Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan***	***Cakupan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kec***	***100%***		10,000,000	*APBD*	***100 %***		***25.000.000***	
7.01. 02.201.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4	Laporan	10,000,000	*APBD*		Laporan	15,000,000	
7.1.2.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah peserta koordinasi Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4	Laporan	-	*APBD*	4	Laporan	10,000,000	

7.01.02.2.0.2	***Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan***	***Cakupan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan***	***100%***		***15,000,000***	*APBD*	***100%***		***25.000.000***	
7.01.02.2.0.2.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2	Laporan	5,000,000	APBD	4	Laporan	10,000,000	
7.01.02.2.0.2.0001	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di wilayah kecamatan	4	Laporan	10,000,000		4	Laporan	15,000,000	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Prosentase Pemberdayaan masyarakat desa dan Kalurahan**	**100%**		**115,000,000**	APBD	**100 %**		**135.000.000**	
7.01.03.2.0.1	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	***Cakupan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa***	***100%***		***25,000,000***	*APBD*	***100 %***		***40,000,000***	
7.01. 03.2.0.3.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	14	Lembaga Kemasyarakatan	15,000,000	APBD	14	Lembaga Kemasyarakatan	20,000,000	

7.01. 03.2.0.3.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4	Laporan	10,000,000	APBD	4	Laporan	20,000,000	
7.01.03.2.0.3	***Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan***	***Cakupan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan***	***100%***		***90,000,000***	*APBD*	***100%***		***95.000,000***	
7.01.03.2.0.3. 0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	14	Lembaga Kemasyarakatan	80,000,000	APBD	14	Lembaga Kemasyarakatan	80,000,000	
7.01.03.2.0.3. 0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diselenggarakan	14	Lembaga Kemasyarakatan	10,000,000	APBD	14	Lembaga Kemasyarakatan	15,000,000	
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Prosentase capaian ketentraman dan ketertiban umum**	**100%**		**30,000,000**	**APBD**	**100%**		**60,000,000**	
7.01.04.2.0.1	***Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum***	***Jumlah koordinasi dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum***	***100%***		***35,000,000***	*APBD*	***100 %***		***50,000,000***	

7.01.04.2.0.1.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2	Laporan	10,000,000	APBD	2	Laporan	20,000,000	
7.01.04.2.0.1.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	4	Laporan	10,000,000	APBD	4	Laporan	20,000,000	
7.01.04.7.0.4	**Koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah**	**Cakupan Koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah**	**100%**		**10,000,000**	APBD	**100%**		**15,000,000**	
7.01.04.7.0.4.0001	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1	Laporan	10,000,000	APBD	1	Laporan	15,000,000	

7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Cakupan penyelenggaan urusan pemerintahan umum**	**100%**		**366,000,000**	**APBD**	**100%**		**335.000.000**	
7.01.05.2.0.1	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Jumlah urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yg diselenggarakan**	**100%**		**316,000,000**	**APBD**	**100%**		**355.000.000**	
7.01.05.2.0.1.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	75	Orang	150,000,000	APBD	75	Orang	150,000,000	

7.1.5.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	75	Orang	-	APBD	75	Orang	35.000,000	
7.01.05.2.0.1.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12	Dokumen	166,000,000	APBD	12	Dokumen	170,000,000	
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa**	***100%***		**90.500.000**	APBD	***100%***		**90.000.000**	
7.01.06.2.0.1	***Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa***	***Cakupan fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa***	***100%***		**90.500.000**	*APBD*	***100%***		***90.000.000***	
7.1.6.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi dalam Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	14	Dokumen	10,000,000	APBD		-	-	
7.1.6.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4	Dokumen	10,000,000	APBD	14	Dokumen	15,000,000	

7.1.6.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	4	Dokumen	10,000,000	APBD	14	Dokumen	15,000,000	
7.1.6.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	14	Dokumen	10,500,000	APBD		-	-	
7.1.6.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah orang yang difasilitasi dalam Pembekalan tentang Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	14	Dokumen	10,000,000	APBD		-	-	
7.1.6.2.01.0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	6	Dokumen	5,000,000	APBD	8	Dokumen	10,000,000	
7.1.6.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	4	Dokumen	10,000,000	APBD	14	Dokumen	10,000,000	
7.1.6.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	1	Dokumen	15,000,000	APBD	100	Dokumen	20,000,000	

7.1.6.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	4	Laporan	5,000,000	APBD	4	Laporan	10.000,000	
7.1.6.2.01.0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	4	Laporan	5,000,000	APBD	14	Laporan	10,000,000	
JUMLAH					**3.619.435.000**				**3.933.600.000**	

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 merupakan panduan kerja bagi Kecamatan Grogol selama 1 (satu) tahun ke depan. Rencana Kerja ini disusun berdasarkan kebutuhan Perangkat Daerah dan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun dalam rangka mendukung pencapaian program Kepala Daerah. Mendasarkan pada hal tersebut, pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 didasarkan dari Rencana Strategis Kecamatan Grogol tahun 2021 – 2026. Guna pencapaian tujuan perencanaan pembangunan dalam 1 (satu) tahun ke depan. Penyusunan perencanaan pembangunan yang berkualitas akan menopang dalam mewujudkan pembangunan yang berkualitas terutama dalam mencapai visi dan misi Kepala Daerah.

Renja Perangkat Daerah Kecamatan Grogol Tahun 2024 merupakan indikator dalam proses evaluasi laporan perencananan atas kinerja satu tahun, sehingga dapat meminimalisir pelaksanaan kegiatan yang menyimpang dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2021-2026 sesuai dengan tupoksi Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo.

SALINAN

BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 35 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024;

b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 273 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan Kepala Daerah setelah Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 192) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 262);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tatacara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 200);
13. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);
14. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 298);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

Renja Perangkat Daerah disusun dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Pasal 3

Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

BAB II

SISTEMATIKA DAN FUNGSI RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 4

Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. bab I : pendahuluan;
b. bab II : hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu;
c. bab III : tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
d. bab IV : rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan
e. bab V : penutup.

Pasal 5

Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah.

BAB II

PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 6

(1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah.
(2) Kepala Perangkat Daerah melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi Renja Perangkat Daerah kepada Bupati melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.

BAB III

PERANGKAT DAERAH PENYUSUN

Pasal 7

(1) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun oleh Perangkat Daerah sebagai berikut:
    a. Sekretariat Daerah;
    b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
    c. Inspektorat Daerah;
    d. Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan;
    e. Dinas Kesehatan;
    f. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang;
    g. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
    h. Satuan Polisi Pamong Praja;
    i. Dinas Sosial;

j. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak;
k. Dinas Pangan;
l. Dinas Lingkungan Hidup;
m. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil;
n. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa;
o. Dinas Perhubungan;
p. Dinas Komunikasi Dan Informatika;
q. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
r. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;
s. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
t. Dinas Pertanian dan Perikanan;
u. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah dan Perdagangan;
v. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
w. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
x. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
y. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
z. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
aa. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
bb. Kecamatan Weru;
cc. Kecamatan Bulu;
dd. Kecamatan Tawangsari;
ee. Kecamatan Sukoharjo;
ff. Kecamatan Nguter;
gg. Kecamatan Bendosari;
hh. Kecamatan Polokarto;
ii. Kecamatan Mojolaban;
jj. Kecamatan Grogol;
kk. Kecamatan Baki;
ll. Kecamatan Gatak; dan
mm. Kecamatan Kartasura.

(2) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf mm tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 10 Agustus 2023

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 10 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd.

WIDODO

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2023 NOMOR 35

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ditandatangani secara elektronik oleh :

TEGUH PRAMONO, SH, MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19710429 199803 1 003

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 35 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN
SUKOHARJO TAHUN 2024

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2024

Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 terdiri atas:

1. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Inspektorat Daerah;
4. Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan;
5. Dinas Kesehatan;
6. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang;
7. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
8. Satuan Polisi Pamong Praja;
9. Dinas Sosial;
10. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak;
11. Dinas Pangan;
12. Dinas Lingkungan Hidup;
13. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil;
14. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa;
15. Dinas Perhubungan;
16. Dinas Komunikasi Dan Informatika;
17. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
18. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;
19. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
20. Dinas Pertanian dan Perikanan;
21. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah dan Perdagangan;
22. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
23. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
24. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
25. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
26. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
27. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
28. Kecamatan Weru;
29. Kecamatan Bulu;

30. Kecamatan Tawangsari;
31. Kecamatan Sukoharjo;
32. Kecamatan Nguter;
33. Kecamatan Bendosari;
34. Kecamatan Polokarto;
35. Kecamatan Mojolaban;
36. Kecamatan Grogol;
37. Kecamatan Baki;
38. Kecamatan Gatak; dan
39. Kecamatan Kartasura.

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI

RENCANA KERJA
KECAMATAN BAKI
TAHUN 2024



Kantor Kecamatan Baki
Jl. WR. Supratman No. 158, Kadilangu, Baki
Telp. (0271) 625535

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan segala Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga telah tersusun dokumen Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 dengan baik.

Rencana Kerja Kecamatan Baki Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan Kecamatan Baki untuk periode satu tahun dan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026, yang memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024

Kami berharap Dokumen Renja ini dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo, serta mendukung dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah dan Pencapaian Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026.

Kami menyadari dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2024 ini masih terdapat banyak kekurangan, untuk itu kami berharap saran dan koreksi demi penyempurnaan Rencana Kerja ini dan keberlanjutan penyusunan pada periode selanjutnya.

Baki, 10 Agustus 2023

CAMAT BAKI
KABUPATEN SUKOHARJO

PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
KECAMATAN BAKI

SUTARTO, S STP, M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19780624 199711 1 001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI iii

DAFTAR TABEL iv

BAB I PENDAHULUAN 1

A Latar Belakang 1

B Landasan Hukum 2

C Maksud dan Tujuan 6

D Sistematika Penulisan 7

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 9

A Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 9

B Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo 20

C Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo 26

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 30

A Telaahan Terhadap Kebijakan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo 30

B Tujuan dan Sasaran Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo 38

C Program dan Kegiatan Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo 39

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN 50

BAB IV PENUTUP 57

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Realisasi Anggaran Per Program Tahun Anggaran 2022 ..	11
Tabel 2.2	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo	12
Tabel 2.3	Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo.....	20
Tabel 3.1	Telaah Visi, Misi, Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	37
Tabel 3.1	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025	37

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun yang merupakan terjemahan dari perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai dokumen Perangkat Daerah, Renja mempunyai kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah, adalah meliputi:

1. persiapan penyusunan;
2. penyusunan rancangan awal;
3. penyusunan rancangan
4. pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan Baki;
5. perumusan rancangan akhir; dan
6. penetapan.

Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD serta didasarkan pada evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah dan pada akhirnya Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

B. LANDASAN HUKUM

Landasan hukun penyusunan Renja Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024, adalah:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkela jutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 174);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo

Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 192) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 262);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
16. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 298);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RRPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
24. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 73 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 81 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Staf Ahli Bupati, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat dan Kecamatan.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

   Maksud disusunnya Renja adalah untuk merumuskan rencana kerja Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo untuk periode 1

(satu) tahun sebagai implementasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah.

2. Tujuan

Tujuan disusunnya Renja adalah sebagai pedoman:

a. pelaksanaan pelayanan Perangkat;
b. pelaksanaan dan evaluasi program dan kegiatan;
c. penyusunan rencana anggaran Perangkat Daerah.

D. SISTEMATIKA PENULISAN

Adapun sistematika penyusunan Renja Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Bab I PENDAHULUAN

Bab ini memberi gambaran umum tentang penyusunan Renja Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024, yang meliputi :

1. Latar Belakang
2. Landasan Hukum
3. Maksud dan Tujuan
4. Sistematika Penulisan

Bab II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini memuat terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Baki Tahun 2022 dan perkiraan Tahun 2023

1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Bab III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menguraikan tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang direncanakan

1. Telaahan terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah
2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah
3. Program dan Kegiatan

Bab IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Bab V PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja Kecmatan Baki Kabupaten Sukoharjo merupakan penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo, tercapai tidaknya pelaksanaan program yang telah diformulasikan dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. untuk itu diperlukan tahapan evaluasi dalam rangka mengukur tingkat keberhasilan kebijakan yang telah diformulasikan dan diimplementasikan oleh Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo.

Evaluasi memainkan sejumlah fungsi utama dalam analisis kebijakan, karena evaluasi memiliki beberapa tujuan diantaranya dengan adanya evaluasi terhadap suatu kebijakan atau program maka diharapkan kebijakan kedepannya akan lebih baik. selain dari pada itu, evaluasi juga untuk mengetahui apakah suatu kebijakan berhasil atau gagal, point selanjutnya evaluasi kebijakan digunakan untuk memenuhi aspek akuntabilitas publik, karena dengan melakukan penilaian kinerja suatu kebijakan maka dapat dipahami sebagai bentuk pertanggung jawaban Pemerintah kepada Publik sebagai pemilik dana dan mengambil manfaat dari kebijakan dan

program Pemerintah. Lebih lanjut dapat disampaikan evaluasi kebijakan dilakukan agar tidak mengulangi kesalahan yang sama dan pada akhirnya evaluasi kebijakan bermanfaat untuk memberikan masukan bagi proses pengambilan kebijakan yang akan datang.

Demikian dapat dimaknai secara umum Rencana Kerja Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 memuat rencana program dan kegiatan dengan tetap memperhatikan potensi yang ada dalam rangka **mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas** yang tertuang dalam Renstra Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo. Keberhasilan perencanaan dapat dilihat dari hasil evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya, sejauh mana pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan berdampak terhadap capaian yang telah ditetapkan di dalam Renstra Perangkat Daerah, hasil dari evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan- kebijakan perencanaan. Dukungan pembiayaan pelaksanaan kegiatan- kegiatan Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo, berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sukoharjo berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, yang di jabarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023, tanggal 30 November 2022.

Total Alokasi anggaran belanja sebesar **Rp. 3.104.637.000,00** terealisasi Sebesar **Rp. 3.030.617.855,00** atau sebesar **97,62%.**

Tabel 2.1.
Realisasi Anggaran per Program
Tahun Anggaran 2022

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi Tahun 2022	
			Anggaran (Rp)	%
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.531.637.000	2.457.637.855	97,08
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	20.000.000	20.000.000	100
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	90.000.000	90.000.000	100
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	37.000.000	37.000.000	100
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	356.000.000	356.000.000	100
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	70.000.000	69.980.000	99.97
	Jumlah	**3.104.637.000**	**3.030.617.855**	**97,62**

Berdasarkan besar penyerapan dana sebagaimana dijelaskan di atas, maka telah terjadi penyimpangan/deviasi positif sebesar **2,38%** dari alokasi dana, atau tercapai sisa lebih sebesar Rp. **74.019.145,00** yang disebabkan oleh :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, sebesar 97,080% dikarenakan disesuaikan dengan kebutuhan;
2. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, sebesar 99,97% dikarenakan disesuaikan dengan kebutuhan;

Tabel 2.2
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022
Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan Output	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*6*	*7*	*9*	*10*	*11*	*13*	*14*
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah**	**2.155.487.000,00**	**2.535.503.308,00**	**2.531.637.000,00**	**2.457.637.855,00**	**97,08%**	**3.041.057.500,00**	**6.452.096.033,00**	**29,12%**
1.1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**248.000.000,00**	**30.000.000,00**	**34.000.000,00**	**33.940.000,00**	**99,82%**	**34.000.000,00**	**80.694.000,00**	**32,54%**
1.1.1	*Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	*85.000.000,00*	15.000.000,00	*10.000.000,00*	9.940.000,00	99,40%	10.000.000,00	33.505.000,00	39,42%
1.1.2	*Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*	*26.000.000,00*	2.500.000,00	*4.000.000,00*	4.000.000,00	100,00%	4.000.000,00	7.850.000,00	30,19%
1.1.3	*Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD*	*Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD*	*26.000.000,00*	2.500.000,00	*4.000.000,00*	4.000.000,00	100,00%	4.000.000,00	7.850.000,00	30,19%
1.1.4	*Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD*	*Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD*	*27.000.000,00*	2.500.000,00	*4.000.000,00*	4.000.000,00	100,00%	4.000.000,00	6.500.000,00	24,07%
1.1.5	*Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD*	*Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD*	*27.000.000,00*	2.500.000,00	*4.000.000,00*	4.000.000,00	100,00%	4.000.000,00	6.500.000,00	24,07%

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan Output	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*6*	*7*	*9*	*10*	*11*	*13*	*14*
1.1.6	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	*32.000.000,00*	2.500.000,00	*4.000.000,00*	4.000.000,00	100,00%	4.000.000,00	9.105.000,00	28,45%
1.1.7	*Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*25.000.000,00*	2.500.000,00	*4.000.000,00*	4.000.000,00	100,00%	4.000.000,00	9.384.000,00	37,54%
1.2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**14.974.166.000,00**	**1.642.729.004,00**	**1.734.989.000,00**	**1.696.792.821,00**	**97,80%**	**1.883.620.000,00**	**4.313.826.866,00**	**28,81%**
1.2.1	*Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	14.060.666.000,00	1.528.029.004,00	1.626.989.000,00	1.588.792.821,00	97,65%	1.775.620.000,00	4.041.006.866,00	28,74%
1.2.2	*Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD*	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD*	800.000.000,00	104.700.000,00	96.000.000,00	96.000.000,00	100,00%	94.000.000,00	246.500.000,00	30,81%
1.2.3	*Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD*	*Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD*	39.500.000,00	2.500.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00%	5.000.000,00	6.040.000,00	15,29%
1.2.4	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	23.000.000,00	2.500.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00%	3.000.000,00	8.500.000,00	36,96%
1.2.5	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD*	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD*	29.000.000,00	2.500.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00%	3.000.000,00	6.280.000,00	21,66%
1.2.6	*Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran*	*Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran*	22.000.000,00	2.500.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00%	3.000.000,00	5.500.000,00	25,00%

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan Output	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*6*	*7*	*9*	*10*	*11*	*13*	*14*
1.3	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**415.775.000,00**	**136.525.000,00**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**100,00%**	**13.437.500,00**	**149.962.500,00**	**36,07%**
1.3.1	*Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya*	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*	72.625.000,00	16.525.000,00	-	-	0,00%	8.437.500,00	24.962.500,00	34,37%
1.3.2	*Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi*	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*	75.000.000,00	-	-	-	0,00%	-	-	0,00%
1.3.3	*Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan*	*Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan*	268.150.000,00	120.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00%	5.000.000,00	125.000.000,00	46,62%
1.4	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**2.041.668.000,00**	**237.065.000,00**	**261.928.000,00**	**259.628.731,00**	**99,12%**	**338.742.000,00**	**613.510.731,00**	**30,05%**
1.4.1	*Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor*	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	76.000.000,00	6.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00%	10.000.000,00	21.000.000,00	27,63%
1.4.2	*Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	110.000.000,00	9.900.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00%	15.000.000,00	28.700.000,00	26,09%
1.4.3	*Penyediaan Peralatan Rumah Tangga*	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*	120.000.000,00	14.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00%	15.000.000,00	36.400.000,00	30,33%
1.4.4	*Penyediaan Bahan Logistik Kantor*	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	1.028.784.000,00	148.675.000,00	143.500.000,00	143.445.000,00	99,96%	93.742.000,00	362.787.000,00	35,26%
1.4.5	*Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	116.884.000,00	10.000.000,00	18.428.000,00	18.428.000,00	100,00%	15.000.000,00	35.928.000,00	30,74%
1.4.6	*Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan*	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*	35.000.000,00	4.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00%	5.000.000,00	11.490.000,00	32,83%
1.4.7	*Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	555.000.000,00	44.490.000,00	55.000.000,00	52.755.731,00	95,92%	185.000.000,00	117.205.731,00	21,12%

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan Output	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*6*	*7*	*9*	*10*	*11*	*13*	*14*
1.5	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**726.028.000,00**	**60.000.000,00**	**84.720.000,00**	**84.139.000,00**	**99,31%**	**61.258.000,00**	**203.189.000,00**	**27,99%**
1.5.1	*Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan*	*Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.5.2	*Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	*Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.5.3	*Pengadaan Mebel*	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan*	112.738.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00%	8.408.000,00	18.200.000,00	16,14%
1.5.4	*Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*	141.840.000,00	10.000.000,00	9.420.000,00	9.420.000,00	100,00%	15.000.000,00	34.420.000,00	24,27%
1.5.5	*Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	210.450.000,00	10.000.000,00	10.300.000,00	10.300.000,00	100,00%	19.850.000,00	38.150.000,00	18,13%
1.5.6	*Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	261.000.000,00	30.000.000,00	65.000.000,00	64.419.000,00	99,11%	18.000.000,00	112.419.000,00	43,07%
1.6	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**2.228.850.000,00**	**190.254.804,00**	**258.000.000,00**	**230.417.803,00**	**89,31%**	**275.000.000,00**	**548.194.802,00**	**24,60%**
1.6.1	*Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	98.000.000,00	15.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00%	10.000.000,00	29.000.000,00	29,59%
1.6.2	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	648.000.000,00	59.034.804,00	68.000.000,00	66.667.803,00	98,04%	84.000.000,00	163.099.802,00	25,17%
1.6.3	*Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	1.482.850.000,00	116.220.000,00	181.000.000,00	154.750.000,00	85,50%	181.000.000,00	356.095.000,00	24,01%

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan Output	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*6*	*7*	*9*	*10*	*11*	*13*	*14*
1.7	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.521.000.000,00**	**238.929.500,00**	**153.000.000,00**	**147.719.500,00**	**96,55%**	**435.000.000,00**	**542.718.134,00**	**35,68%**
1.7.1	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan*	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*	625.000.000,00	66.310.500,00	75.000.000,00	71.386.500,00	95,18%	80.000.000,00	174.881.134,00	27,98%
1.7.2	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	60.000.000,00	8.633.000,00	15.000.000,00	13.833.000,00	92,22%	10.000.000,00	25.686.000,00	42,81%
1.7.3	*Pemeliharaan Mebel*	*Jumlah Mebel yang Dipelihara*	60.000.000,00	5.000.000,00	-	-	0,00%	10.000.000,00	15.000.000,00	25,00%
1.7.4	*Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	116.000.000,00	10.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	100,00%	15.000.000,00	29.465.000,00	25,40%
1.7.5	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya*	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	660.000.000,00	148.986.000,00	50.000.000,00	49.500.000,00	99,00%	50.000.000,00	248.486.000,00	37,65%
1.7.6	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya*	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	158.300.000,00	49.200.000,00	0,00	0,00	0,00%	270.000.000,00	49.200.000,00	31,08%
2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**160.000.000,00**	**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	**100,00%**	**20.000.000,00**	**40.000.000,00**	**25,00%**
2.1	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**160.000.000,00**	**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	**100,00%**	**20.000.000,00**	**40.000.000,00**	**25,00%**
2.1.1	*Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan*	*Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan*	80.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00%	10.000.000,00	20.000.000,00	25,00%

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan Output	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*6*	*7*	*9*	*10*	*11*	*13*	*14*
2.1.2	*Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	80.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00%	10.000.000,00	20.000.000,00	25,00%
3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan**	**826.000.000,00**	**85.000.000,00**	**90.000.000,00**	**90.000.000,00**	**100,00%**	**115.000.000,00**	**220.640.000,00**	**26,71%**
3.1	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Cakupan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**200.000.000,00**	**25.000.000,00**	**25.000.000,00**	**25.000.000,00**	**100,00%**	**25.000.000,00**	**56.375.000,00**	**28,19%**
3.1.1	*Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa*	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa*	100.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00%	10.000.000,00	30.000.000,00	30,00%
3.1.2	*Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	100.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00%	15.000.000,00	26.375.000,00	26,38%
3.2	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Cakupan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**626.000.000,00**	**60.000.000,00**	**65.000.000,00**	**65.000.000,00**	**100,00%**	**90.000.000,00**	**164.265.000,00**	**26,24%**
3.2.1	*Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan*	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan*	536.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00%	80.000.000,00	136.965.000,00	25,55%
3.2.2	*Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan*	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya*	90.000.000,00	10.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00%	10.000.000,00	27.300.000,00	30,33%
4	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase capaian ketentraman dan ketertiban umum**	**1.325.168.000,00**	**553.524.000,00**	**37.000.000,00**	**37.000.000,00**	**100,00%**	**32.000.000,00**	**601.849.000,00**	**45,42%**
4.1	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Cakupan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**1.251.168.000,00**	**548.524.000,00**	**27.000.000,00**	**27.000.000,00**	**100,00%**	**22.000.000,00**	**584.449.000,00**	**46,71%**

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan Output	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*6*	*7*	*9*	*10*	*11*	*13*	*14*
4.1.1	*Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan*	*Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan*	88.000.000,00	9.765.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00%	10.000.000,00	25.815.000,00	29,34%
4.1.2	*Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat*	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat*	1.163.168.000,00	538.759.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00%	12.000.000,00	558.634.000,00	48,03%
4.2	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**Cakupan Koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah**	**74.000.000,00**	**5.000.000,00**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**100,00%**	**10.000.000,00**	**17.400.000,00**	**23,51%**
4.2.1	*Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/ atau Kepolisian Negara Republik Indonesia*	*Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/ atau Kepolisian Negara Republik Indonesia*	74.000.000,00	5.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00%	10.000.000,00	17.400.000,00	23,51%
5	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum**	**2.266.000.000,00**	**128.500.000,00**	**356.000.000,00**		**0,00%**			**0,00%**
5.1	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**2.266.000.000,00**	**128.500.000,00**	**356.000.000,00**	**356.000.000,00**	**100,00%**	**316.000.000,00**	**569.100.000,00**	**25,11%**
5.1.1	*Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD Negara RI Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia*	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia*	1.010.000.000,00	-	190.000.000,00	190.000.000,00	100,00%	150.000.000,00	192.100.000,00	19,02%

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan Output	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*6*	*7*	*9*	*10*	*11*	*13*	*14*
5.1.3	*Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan*	*Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan*	1.256.000.000,00	128.500.000,00	166.000.000,00	166.000.000,00	100,00%	166.000.000,00	377.000.000,00	30,02%
6	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa**	**489.000.000,00**	**44.450.000,00**	**70.000.000,00**	**69.980.000,00**	**99,97%**	**60.000.000,00**	**151.241.000,00**	**30,93%**
6.1	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Prosentase Pembinaan Pengawasan dan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**	**489.000.000,00**	**44.450.000,00**	**70.000.000,00**	**69.980.000,00**	**99,97%**	**60.000.000,00**	**151.241.000,00**	**30,93%**
6.1.1	*Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa*	*Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa*	110.000.000,00	10.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00%	15.000.000,00	32.200.000,00	29,27%
6.1.2	*Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Asset Desa*	*Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa*	110.000.000,00	10.000.000,00	15.000.000,00	14.980.000,00	99,87%	15.000.000,00	32.216.000,00	29,29%
6.1.3	*Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa*	*Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa*	25.000.000,00		5.000.000,00	5.000.000,00	100,00%		5.000.000,00	20,00%
6.1.4	*Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa*	*Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa*	100.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00%	10.000.000,00	32.375.000,00	32,38%
6.1.5	*Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif*	*Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif*	144.000.000,00	9.450.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00%	20.000.000,00	49.450.000,00	34,34%

B. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan Kecamatan Baki didasarkan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 – 2026, dalam rangka mendukung pada : Misi 1 RPJMD : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik melalui Percepatan Reformasi Birokrasi. Misi ini memiliki tujuan : Terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel. Sasaran yang ingin dihasilkan dalam rangka mencapai tujuan tersebut adalah : Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat dan meningkatnya kualitas aparatur dan pelayanan publik

Kinerja Pelayanan pada Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo menunjukkan tingkat capaian kinerja Kecamatan Baki berdasarkan sasaran/target Renstra Kecamatan Baki tahun 2021-2026 sebagaimana disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.3.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Baki
Kabupaten Sukoharjo

No	Indikator	Satuan	Target Renstra				Capaian Realisasi		Proyeksi		Catatan Analisis
			2021	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2025	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
A.	**Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah**	***Persen***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	
1.	**Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	***Persen***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	
1.1	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Dokumen*	*2*	*2*	*2*	*2*	*2*	*2*	*2*	*2*	
1.2	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	*Dokumen*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	

No	Indikator	Satuan	Target Renstra				Capaian Realisasi		Proyeksi		Catatan Analisis
			2021	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2025	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
1.3	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	*Dokumen*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	
1.4	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	*Dokumen*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	
1.5	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	*Dokumen*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	
1.6	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Laporan*	*3*	*3*	*3*	*3*	*3*	*3*	*3*	*3*	
1.7	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Laporan*	*3*	*3*	*3*	*3*	*3*	*3*	*3*	*3*	
2.	**Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	***Persen***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	
2.1	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	*Orang*	*15*	*15*	*17*	*15*	*15*	*17*	*15*	*15*	
2.2	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Dokumen*	*12*	*12*	*12*	*12*	*12*	*12*	*12*	*12*	
2.3	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	*Dokumen*	*12*	*12*	*12*	*12*	*12*	*12*	*12*	*12*	
2.4	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Laporan*	*5*	*5*	*5*	*5*	*5*	*5*	*5*	*5*	
2.5	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	*Laporan*	*12*	*12*	*12*	*12*	*12*	*12*	*12*	*12*	

No	Indikator	Satuan	Target Renstra				Capaian Realisasi		Proyeksi		Catatan Analisis
			2021	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2025	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
2.6	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	*Dokumen*	*2*	*2*	*2*	*2*	*2*	*2*	*2*	*2*	
3.	**Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	***Persen***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	
3.1	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	*Paket*	*0*	*0*	*23*	*0*	*0*	*23*	*0*	*0*	
3.2	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	*Orang*	*0*	*0*	*0*	*25*	*0*	*0*	*25*	*25*	
3.3	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	*Orang*	*25*	*25*	*25*	*25*	*25*	*25*	*25*	*25*	
4.	**Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	***Persen***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	
4.1	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	*Paket*	*1*	*1*	*12*	*1*	*1*	*12*	*1*	*1*	
4.2	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	*Paket*	*1*	*1*	*3*	*1*	*1*	*3*	*1*	*1*	
4.3	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	*Paket*	*1*	*1*	*12*	*1*	*1*	*12*	*1*	*1*	
4.4	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	*Paket*	*1*	*1*	*12*	*1*	*1*	*12*	*1*	*1*	
4.5	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	*Paket*	*1*	*1*	*12*	*1*	*1*	*12*	*1*	*1*	
4.6	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	*Dokumen*	*30*	*30*	*12*	*30*	*30*	*12*	*30*	*30*	
4.7	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 250	*Laporan*	*250*	*250*	*234*	*250*	*250*	*234*	*250*	*250*	
5.	**Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	***Persen***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	
5.1	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	*Unit*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	

No	Indikator	Satuan	Target Renstra				Capaian Realisasi		Proyeksi		Catatan Analisis
			2021	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2025	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
5.2	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	*Unit*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
5.3	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	*Unit*	*50*	*50*	*5*	*50*	*50*	*5*	*50*	*50*	
5.4	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	*Unit*	*3*	*3*	*2*	*3*	*3*	*2*	*3*	*3*	
5.5	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	*Unit*	*4*	*4*	*1*	*2*	*4*	*1*	*2*	*2*	
5.6	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	*Unit*	*2*	*2*	*1*	*2*	*2*	*1*	*2*	*2*	
7.	**Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	***Persen***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	
7.1	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Laporan*	*180*	*200*	*300*	*200*	*200*	*300*	*200*	*300*	
7.3	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	*Laporan*	*72*	*72*	*72*	*72*	*60*	*72*	*60*	*72*	
7.4	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	*Laporan*	*12*	*12*	*12*	*12*	*12*	*12*	*12*	*12*	
8.	**Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	***Persen***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	
8.1	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	*Unit*	*9*	*9*	*11*	*9*	*9*	*11*	*9*	*10*	
8.2	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	*Unit*	*1*	*1*	*1*	*0*	*1*	*1*	*0*	*0*	
8.3	Jumlah Mebel yang Dipelihara	*Unit*	*25*	*25*	*25*	*25*	*25*	*25*	*25*	*25*	
8.4	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	*Unit*	*13*	*13*	*13*	*13*	*13*	*13*	*13*	*13*	

No	Indikator	Satuan	Target Renstra				Capaian Realisasi		Proyeksi		Catatan Analisis
			2021	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2025	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
8.5	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	*Unit*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	
8.6	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	*Unit*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	
B	**Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	***Persen***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	
1.	**Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	***Persen***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	
1.1	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	*Laporan*	*2*	*2*	*2*	*2*	*2*	*2*	*2*	*2*	
1.2	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	*Laporan*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	
C	**Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan**	***Persen***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	
1.	**Cakupan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	***Persen***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	
1.1	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	*Lembaga Kemasyarakatan*	*5*	*5*	*5*	*5*	*5*	*5*	*5*	*5*	
1.2	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	*Laporan*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	
2.	**Cakupan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	***Persen***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	
2.1	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	*Lembaga Kemasyarakatan*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	
2.2	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	*Lembaga Kemasyarakatan*	*5*	*5*	*5*	*5*	*5*	*5*	*5*	*5*	

No	Indikator	Satuan	Target Renstra				Capaian Realisasi		Proyeksi		Catatan Analisis
			2021	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2025	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
D	**Persentase capaian ketentraman dan ketertiban umum**	***Persen***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	
1	**Cakupan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	***Persen***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	
1.1	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	*Laporan*	*4*	*4*	*4*	*4*	*4*	*4*	*4*	*4*	
1.2	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	*Laporan*	*14*	*14*	*14*	*14*	*14*	*14*	*14*	*14*	
2.	**Cakupan Koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah**	***Persen***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	
2.1	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	*Laporan*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	
E	**Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum**	***Persen***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	
1.	**Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	***Persen***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	
1.1	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	*Orang*	*75*	*75*	*75*	*75*	*75*	*75*	*75*	*75*	

No	Indikator	Satuan	Target Renstra				Capaian Realisasi		Proyeksi		Catatan Analisis
			2021	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2025	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
1.2	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	*Dokumen*	*12*	*12*	*12*	*12*	*12*	*12*	*12*	*12*	
F	**Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa**	***Persen***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	
1.	**Prosentase Pembinaan Pengawasan dan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**	***Persen***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	
1.1	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	*Dokumen*	*2*	*2*	*2*	*2*	*2*	*2*	*2*	*2*	
1.2	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	*Dokumen*	*2*	*2*	*2*	*2*	*2*	*2*	*2*	*2*	
1.3	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	*Dokumen*	*0*	*5*	*0*	*0*	*5*	*0*	*0*	*1*	
1.4	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	*Dokumen*	*6*	*6*	*5*	*6*	*6*	*5*	*6*	*6*	
1.5	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	*Dokumen*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	

C. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu-Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang diperhatikan dalam perencanaan pembangunan selama 5 (Lima) tahun dalam melaksanakan atau menyelenggarakan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Baki kepada masyarakat. Analisa isu-isu strategis di identifikasikan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Baki dalam menjalankan pemerintahan ada berbagai permasalahan, sebagai berikut :

1. **Bidang Sekretariat**

   a. Masih kurangnya sumber daya dan keterampilan pegawai dalam mengoperasikan sarana dan prasarana komputer di wilayah Kecamatan Baki sehingga memperlambat kinerja kegiatan administrasi perkantoran, untuk meningkatkan kinerja kegiatan administrasi perlu adanya pelatihan dalam mengoperasikan computer;

   b. Kurangnya personil di bagian sekretariat Kantor Kecamatan Baki, sehingga banyak tenaga yang merangkap tugas lain, untuk meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat perlu adanya tambahan personil ;

   c. Kecamatan sebagai Perangkat Daerah yang belum diberikan kewenangan penuh untuk mengajukan dan mengelola anggaran Perangkat Daerah, kewenagan Kecamatan hanya sebatas pengelolaan Gaji pegawai dan biaya operasional Kecamatan. Sedangkan pengelolaan anggaran pembangunan masih melalui Perangkat Daerah terkait ;

2. **Bidang Pemerintahan**

   Kurangnya personil pengelolaan data pemerintahan umum, pengelolaan data Pemerintahan Desa, pengelola data kependudukan dan pertanahan sehingga untuk meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat perlu adanya tambahan personil dan tenaga operasional;

3. **Bidang Pemberdayaan Masyarakat**

   a. Kurangnya personil pengelolaan pemberdayaan masyarakat dan pengelola partisipasi masyarakat, sehingga untuk

meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat perlu adanya tambahan personil dan tenaga operasional;

b. Kurangnya pemerataan pembangunan wilayah Desa; 3) Belum optimalnya peranserta dan swadaya masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan wilayah ;
c. Tingginya kerusakan infrastruktur wilayah desa seperti jalan desa, jalan lingkungan, sanitasi lingkungan masih rendah.

4. Bidang Keamanan dan Kenyamanan lingkungan

a. Kurangnya personil pengelolaan pendidikan, kebudayaan dan kesehatan, pengelola keamanan dan ketertiban dan pengelola kesejahteraan sosial, sehingga untuk meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat perlu adanya tambahan personil dan tenaga operasional;
b. Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang hukum;
c. Kurangnya personil Linmas di masing – masing Desa dan Linmas yang ada belum berjalan secara maksimal;
d. Kurangnya sarana dan prasarana Kamtibmas di Kantor Kecamatan Baki;

5. Bidang Ekonomi dan Pembangunan

a. Kurangnya personil pengelolaan pengendalian monitoring dan evaluasi pembangunan dan pengelola pendaftaran dan pendataan pajak/retrebusi, sehingga untuk meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat perlu adanya tambahan personil dan tenaga operasional;
b. Pembangunan Infrastruktur di Kecamatan Baki sudah cukup baik, namun hal ini perlu ditingkatkan keberadaannya, khususnya untuk peningkatan pembangunan jalan desa yang

sudah secara bertahap dilakukan pembangunan melalui berbagai program pembangunan. Masalah pembangunan jalan di wilayah Kecamatan Baki terkendala dengan cepatnya usia fisiknya, karena struktur tanah yang mudah bergerak, kualitas yang kurang baik dan pada lokasi tertentu sering tergenang air sehingga usia teknis menjadi pendek ;

c. Kurangnya personil di bagian Ekonomi dan Pembangunan Kantor Kecamatan Baki, sehingga banyak tenaga yang merangkap tugas lain, untuk meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat perlu adanya tambahan personil.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

A. Telaahan Terhadap Kebijakan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo

Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan yang ada di Kabupaten Sukoharjo, agar lebih terarah dan berhasil guna serta berdaya guna, maka pemerintah bersama-sama masyarakat Kabupaten Sukoharjo telah menetapkan visi, misi dan strategi dalam mencapai tujuannya yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 - 2026.

1. VISI

Visi pembangunan Kabupaten Sukoharjo tahun 2021-2026 merupakan implementasi dari visi Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo periode tahun 2021-2026 yaitu:

"Mewujudkan masyarakat Sukoharjo Yang Lebih Makmur"

Visi pembangunan daerah Kabupaten Sukoharjo tahun 2021-2026 merupakan keberlanjutan dari cita-cita pembangunan Kabupaten Sukoharjo tahun 2016-2020.

Mengandung arti bahwa dalam lima tahun ke depan masyarakat Kabupaten Sukoharjo akan tercipta kondisi sejahtera, terpenuhi seluruh kebutuhan hidupnya baik sosial maupun ekonomi, secara lahir maupun batin. MAKMUR juga merupakan motto atau slogan Kabupaten Sukoharjo yaitu **Maju, Aman, Konstitusional**, **Mantap, Unggul, dan Rap**i.

MAJU

Maju mempunyai pengertian bergerak kedepan menjadi lebih baik, tidak berhenti, tidak terlambat, mencapai tingkat

peradaban yang lebih tinggi.Sebagai tugas panggilan dalam hidup. Dengan maju kita ingin tumbuh dan berkembang, dan selalu berpikr dan berusaha keras kearah peningkatan menjadi lebih baik.

AMAN

Keamanan merupakan salah satu unsur/syarat mutlak untuk dapat terlaksananya pembangunan.Tanpa stabilitas keamanan yang terpelihara secara mantap dan berkesinambungan, tidak mungkin kegiatan pembangunan dapat terlaksana dengan lancar.

KONSTITUSIONAL

Penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, maupun kemasyarakatan harus dilandasi hukum atau dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum.

MANTAP

Warga masyarakat dan segenap penyelenggara pemerintahan optimis dalam membangun Sukoharjo.

UNGGUL

Unggul mempunyai arti semangat berprestasi untuk selalu berusaha mencapai yang terbaik.

RAPI

Rapi mengandung pengertian apik, baik, bersih, teratur, tertib, beres.

2. MISI

Dalam rangka upaya menuju pencapaian visi pembangunan daerah Kabupaten Sukoharjo tahun 2021-2026, ditetapkan misi pembangunan daerah yaitu:

a. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Percepatan Reformasi Birokrasi

Misi kesatu ini bertujuan untuk semakin mempercepat implementasi reformasi birokrasi secara optimal, yang pada periode sebelumnya telah terwujud dalam membaiknya tata kelola pemerintahan Kabupaten Sukoharjo.

Reformasi birokrasi yang diharapkan kedepan adalah pada tiga dimensi utama yaitu pelayanan publik yang semakin dinamis, efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan, kapasitas kelembagaan, serta manajemen sumber daya manusia aparatur yang semakin baik.Pelayanan publik yang dinamis diwujudkan dengan membangun open government dan pemerintahan yang responsif. Open government dilakukan dengan perkuatan keterbukaan informasi publik, transparansi, partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta meningkatkan komunikasi dan serapan aspirasi publik.

Sedangkan pemerintahan yang responsif tercermin dalam respon pemerintah kabupaten dalam menghadapi aduan dan persoalan riil masyarakat, dengan cepat dan tepat, baik dalam bentuk kebijakan maupun kegiatan.Pelayanan publik yang dinamis, terbuka, dan responsif diikat dalam satu tagline pelayanan yang mudah, murah, cepat, serta didukung inovasi dan teknologi informasi.

Efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan tergambarkan dalam proses perencanaan, penganggaran, serta evaluasi pembangunan yang akuntabel. Manajemen pembangunan Kabupaten Sukoharjo kedepan tidak hanya

fokus pada kerja tetapi kinerja, dan berorientasi pada hasil (outcome). Untuk itu perlu juga dilakukan pengawasan dalam prosesnya, sejak dimulainya proses perencanaan, implementasi hingga evaluasi.

Agar dapat melaksanakan manajemen pemerintahan yang baik dan bersih maka dibutuhkan kelembagaan/organisasi yang tepat dan didukung dengan penataan sistem manajemen sumberdaya manusia aparatur yang baik.Manajemen sumber daya manusia aparatur yang baik terejawantahkan dalam bentuk integritas aparatur yang dibangun melalui kompetensi dan etika menuju integritas pribadi dan institusi, mendorong birokrasi yang inovatif, dan dijamin dalam quality assurance aparatur.

2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas

Misi kedua mengarah pada kualitas dan daya saing sumberdaya manusia Sukoharjo, agar semakin sehat, pintar, berbudaya, dan lebih mencintai lingkungan.Era globalisasi yang semakin terbuka menuntut kualitas sumberdaya manusia yang mampu bersaing secara kompetitif dalam kompetensi dan kualifikasi. Bonus demografi yang saat ini telah dialami oleh Sukoharjo dapat dijadikan sebagai peluang sekaligus tantangan, bagaimana kedepan modal sosial ini akan menempatkan Sukoharjo sebagai salah satu daerah dengan sumberdaya manusia yang mampu bersaing. Sehingga diharapkan, dapat memberikan dampak pertumbuhan ekonomi yang semakin baik, dan menciptakan masyarakat Sukoharjo yang semakin sejahtera.

Tidak hanya tentang kualitas dan daya saing sumberdaya manusia yang diharapkan, namun juga bagaimana membentuk karakter masyarakat Sukoharjo yang semakin berbudaya. Di tengah arus keterbukaan informasi dunia yang nyata kemudian bagaimana masyarakat Sukoharjo tetap kuat menjaga etika dan norma serta nilai budaya asli Sukoharjo, serta menjaga kearifan lokal sejak dini.

3. Memperkuat Perekonomian Rakyat Yang Berdaya Saing Tinggi

Misi ketiga ini mempunyai tujuan mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan insklusif.Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang penting dalam melakukan pembangunan ekonomi yang terjadi pada suatu negara ataupun daerah.Pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan distribusi pendapatan yang merata sangat dibutuhkan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah diukur dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan laju pertumbuhannya atas dasar harga konstan. Pertumbuhan ekonomi yang cepat akan menimbulkan ketimpangan distribusi pendapatan. Hal ini disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang bersifat sentralisasi. Pada tahun 1999 pemerintah mengubah kebijakan sentralisasi menjadi desentralisasi dengan memberlakukan Otonomi Daerah. Hal tersebut memberikan harapan dalam upaya mengurangi tingkat kemiskinan dan ketimpangan antar daerah.

Misi ini adalah untuk mengarahkan kebijakan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam rangka menurunkan jumlah penduduk miskin, yang didukung oleh perekonomian daerah yang stabil, berkualitas, inklusif, dan menyebar. Program pengentasan kemiskinan difokuskan kepada kelompok sasaran utama, seperti petani pelaku UKM dan pekerja dan kelompok rentan lainnya. Program pengentasan kemisikinan tersebut perlu didukung oleh pertumbuhan ekonomi yang tersebar, inklusif, dan berkualitas, yakni pertumbuhan ekonomi yang menyebar di seluruh wilayah Sukoharjo, memperhitungkan kelestarian lingkungan dan keberlangsungan ketersediaan sumber daya, melibatkan seluruh kelompok masyarakat dengan mengutamakan peran dan kontribusi kelompok masyarakat yang kurang beruntung, dan menghapus praktek ekonomi biaya tinggi.

4. Memperkuat Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan

Misi keempat mengarah kepada pembangunan infrastruktur akan terus dilaksanakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar, yang akan dilaksanakan dengan penguatan konektivitas, penyediaan akses perumahan, permukiman, air minum dan sanitasi yang layak, telekomunikasi dan transportasi yang aman dan memadai.

Pembangunan berwawasan lingkungan hidup dilakukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkualitas

dan meningkatkan kualitas hidup manusia.Untuk menjaga kelestarian lingkungan agar kualitas lingkungan hiudp tetap terjaga, pemanfaatan sumber daya alam harus dilakukan secara bijaksana, adil, efisien, dan bertanggungjawab serta lingkungan yang tangguh bencana.

5. Meningkatkan Kualitas Kehidupan Sosial dan Keagamaan

Misi ini menggambarkan sebuah kondisi yang ingin diciptakan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera, tercermin dari rasa aman dan nyaman yang dirasakan dalam kehidupan masyarakat.Kondisi yang tercipta merupakan manifestasi implementasi nilai-nilai religius dalam kehidupan masyarakat. Membangun masyarakat Sukoharjo yang religius, toleran, dan guyup ini adalah dengan menciptakan kondisi obyektif yang memungkinkan interaksi antar umat beragama untuk saling menghormati dan menghargai satu sama lain, mendorong keberagaman, kebhinekaan, dan toleransi dalam kerangka kesatuan.

Upaya yang dilakukan antara lain dengan menguatkan pemahaman keberagaman dan kebhinekaan sejak usia dini, mengembangkan ruang-ruang publik untuk membangun komunikasi antar masyarakat melalui kegiatan seni dan rekreasi, serta mendorong kearifan lokal dalam bentuk gerakan-gerakan masyarakat termasuk gerakan gotong royong. Dalam misi ini terkandung tujuan untuk menciptakan kehidupan masyarakat Sukoharjo yang aman dan nyaman, tanpa ada konflik sosial maupun agama, bahkan konflik SARA.

Misi yang dapat dijabarkan oleh Perangkat Daerah Kecamatan adalah Misi kesatu, yaitu "**Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Percepatan Reformasi Birokrasi"**

Tabel 3.1
TELAAH VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

VISI : MEWUJUDKAN MASYARAKAT SUKOHARJO YANG LEBIH MAKMUR

MISI 1	PROGRAM	TUSI OPD	PERMASALAHAN PELAYANAN OPD	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT
Mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik melalui percepatan reformasi birokrasi	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan publik	Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan	Masih ada sebagian jenis pelayanan administrasi kependudukan yang belum bisa dilayani ditingkat Kecamatan	Kapasitas dan kualitas aparatur serta sarana prasarana cukup memadai	Perlu penguatan regulasi dan kebijakan pelayanan administrasi kependudukan sampai di tingkat Kecamatan
	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kalurahan	Pengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat	Masih kurangnya kesadaran dan peran serta masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan wilayah Perlu peningkatan kualitas sarana dan prasarana di Desa khususnya jaringan Internet Desa	Mekanisme perencannaan yang cukup baik Sumber pembiayaan cukup tersedia	Kesadaran warga masih perlu ditingkatkan Perlu penguatan kebijakan di tingkat desa
Mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik melalui percepatan reformasi birokrasi	Koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum	Pengkoordinasian Upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Pemahaman warga masyarakat tentang peraturan perundangan belum optimal.	Anggaran untuk kegiatan sosialisasi cukup memadai.	Kesadaran warga perlu ditingkatkan
		Pengkoordinasian penerapan dan penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	Masih perlu peningkatan peran serta warga terhadap penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Peran media social cukup efektif.	Sosialisasi peraturan perundangan masih Perlu ditingkatkan
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Belum terwujudnya sinkronisasi data sebagai dasar pengambilan kebijakan terkait dengan bantuan sosial. Perlu peningkatan upaya strategis dalam rangka penanganan pandemi covid-19 terutama dari aspek ekomoni, kesehatan dan sosial	Dukungan SDM dan Sarana prasarana Dukungan SDM , sarana prasarana dan pembiayaan	Perlu penguatan kebijakan antar unit kerja Perlu penguatan kebijakan di semua lini pemerintahan
	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Pembinaan dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa	Belum optimalnya kinerja aparatur Pemerintahan Desa	Peningkatan kesejahteraan aparatur pemerintah desa.	Paradigma pola kerja tradisional.

	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan	Perlu peningkatan sinergitas antar unit kerja dalam pelayanan kepada warga masyarakat	Kualitas SDM dan sarana prasarana.	Perlu penguatan dari aspek regulasi

B. Tujuan dan Sasaran Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo

1. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran/implementasi dari pernyataan visi dan misi Bupati Sukoharjo terpilih. Tujuan adalah sesuatu yang ingin dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan yang akan dicapai oleh Perangkat Daerah Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo adalah sebagai berikut :

"Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel di Kecamatan Baki"

2. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan. Sasaran yang akan diraih Perangkat Daerah Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo adalah :

a. Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat

Yang di jabarkan dalam beberapa Program antara lain :

1) PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
2) PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

3) PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
4) PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
5) PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

b. Meningkatnya kualitas aparatur dan pelayanan publik

Yang di jabarkan dalam beberapa Program antara lain :

1) PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

C. Program dan Kegiatan Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo

Secara garis besar Program dan Kegiatan yang direncanakan pada tahun 2024 dan bersifat Kewenangan Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo adalah sebagai berikut :

1. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK :
   a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan;
2. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
   a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
   b. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
3. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
   a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan

Ketertiban Umum

b. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

4. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
   a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
5. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
   a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
6. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
   a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
   b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
   c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
   d. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
   e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
   f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
   g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;

Dalam Renja Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 ini, Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo merencanakan 6 (enam) program dan 14 (empat belas) kegiatan dengan jumlah total pagu indikatif sebesar Rp. 3.510.362.000 dengan lokasi kegiatan

terpusat di wilayah Kabupaten Sukoharjo kecuali untuk kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang dilakukan di luar daerah. Dari total pagu indikatif tersebut, seluruhnya bersumber dari dana alokasi umum (DAU). Berikut disajikan pada tabel 3.2 rumusan rencana program dan kegiatan Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 dan pakiraan maju Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 3.2
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Baki

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun Rencana Tahun 2025	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah**	**Persen**	**Kecamatan Baki**	**100%**	**2.967.362.000**	**DAU**		**100%**	**2.905.000.000**
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persen**	**Kecamatan Baki**	**100%**	**26.000.000**	**DAU**		**100%**	**39.000.000**
7.01.01.2.01.0001	*Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	*Dokumen*	*Kecamatan Baki*	*2*	*5.000.000*	*DAU*		*2*	*15.000.000*
7.01.01.2.01.0002	*Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*	*Dokumen*	*Kecamatan Baki*	*1*	*3.000.000*	*DAU*		*1*	*4.000.000*
7.01.01.2.01.0003	*Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD*	*Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD*	*Dokumen*	*Kecamatan Baki*	*1*	*3.000.000*	*DAU*		*1*	*4.000.000*
7.01.01.2.01.0004	*Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD*	*Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD*	*Dokumen*	*Kecamatan Baki*	*1*	*4.000.000*	*DAU*		*1*	*4.000.000*
7.01.01.2.01.0005	*Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD*	*Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD*	*Dokumen*	*Kecamatan Baki*	*1*	*4.000.000*	*DAU*		*1*	*4.000.000*
7.01.01.2.01.0006	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	*Laporan*	*Kecamatan Baki*	*3*	*5.000.000*	*DAU*		*3*	*4.000.000*

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun Rencana Tahun 2025	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
7.01.01.2.01.0007	*Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*Laporan*	*Kecamatan Baki*	*3*	*2.000.000*	*DAU*		*3*	*4.000.000*
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persen**	**Kecamatan Baki**	**100%**	**2.085.912.000**	**DAU**		**100%**	**1.919.000.000**
7.01.01.2.02.0001	*Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	*Orang*	*Kecamatan Baki*	*15*	*1.974.412.000*	*DAU*		*15*	*1.800.000.000*
7.01.01.2.02.0003	*Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD*	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD*	*Dokumen*	*Kecamatan Baki*	*12*	*94.000.000*	*DAU*		*12*	*105.000.000*
7.01.01.2.02.0004	*Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD*	*Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD*	*Dokumen*	*Kecamatan Baki*	*12*	*7.500.000*	*DAU*		*12*	*5.000.000*
7.01.01.2.02.0005	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir TahunSKPD*	*Laporan*	*Kecamatan Baki*	*5*	*3.000.000*	*DAU*		*5*	*3.000.000*
7.01.01.2.02.0007	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD*	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD*	*Laporan*	*Kecamatan Baki*	*12*	*5.000.000*	*DAU*		*12*	*3.000.000*
7.01.01.2.02.0008	*Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran*	*Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran*	*Dokumen*	*Kecamatan Baki*	*2*	*2.000.000*	*DAU*		*2*	*3.000.000*
7.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persen**	**Kecamatan Baki**	**100%**	**28.150.000**	**DAU**		**100%**	**145.000.000**
7.01.01.02.05	*Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya*	*Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*	*Paket*	*Kecamatan Baki*	*-*	*-*	*DAU*		*-*	*-*
7.01.01.2.05.0009	*Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi*	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*	*Orang*	*Kecamatan Baki*	*25*	*25.000.000*	*DAU*		*25*	*25.000.000*

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun Rencana Tahun 2025	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
7.01.01.2.05.0010	*Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan*	*Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan*	*Orang*	*Kecamatan Baki*	*25*	*3.150.000*	*DAU*		*25*	*120.000.000*
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persen**	**Kecamatan Baki**	**100%**	**295.620.000**	**DAU**		**100%**	**247.000.000**
7.01.01.2.06.0001	*Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor*	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	*Paket*	*Kecamatan Baki*	*1*	*10.000.000*	*DAU*		*1*	*10.000.000*
7.01.01.2.06.0002	*Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	*Paket*	*Kecamatan Baki*	*1*	*15.000.000*	*DAU*		*1*	*20.000.000*
7.01.01.2.06.0003	*Penyediaan Peralatan Rumah Tangga*	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*	*Paket*	*Kecamatan Baki*	*1*	*15.000.000*	*DAU*		*1*	*20.000.000*
7.01.01.2.06.0004	*Penyediaan Bahan Logistik Kantor*	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	*Paket*	*Kecamatan Baki*	*1*	*198.000.000*	*DAU*		*1*	*127.000.000*
7.01.01.2.06.0005	*Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	*Paket*	*Kecamatan Baki*	*1*	*15.786.000*	*DAU*		*1*	*15.000.000*
7.01.01.2.06.0006	*Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan*	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*	*Dokumen*	*Kecamatan Baki*	*30*	*2.000.000*	*DAU*		*30*	*5.000.000*
7.01.01.2.06.0009	*Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*Laporan*	*Kecamatan Baki*	*250*	*39.834.000*	*DAU*		*250*	*50.000.000*
7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persen**	**Kecamatan Baki**	**100%**	**93.330.000**	**DAU**		**100%**	**95.000.000**
7.01.01.02.07.01	*Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan*	*Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan*	*Unit*	*Kecamatan Baki*	*-*	*-*	*DAU*		*-*	*-*
7.01.01.02.07.02	*Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	*Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan*	*Unit*	*Kecamatan Baki*	*-*	*-*	*DAU*		*-*	*-*

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun Rencana Tahun 2025	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
7.01.01.2.07.0005	*Pengadaan Mebel*	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan*	*Unit*	*Kecamatan Baki*	*50*	*29.830.000*	*DAU*		*50*	*25.000.000*
7.01.01.2.07.0006	*Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*	*Unit*	*Kecamatan Baki*	*3*	*25.500.000*	*DAU*		*3*	*30.000.000*
7.01.01.2.07.0010	*Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	*Unit*	*Kecamatan Baki*	*2*	*25.000.000*	*DAU*		*4*	*20.000.000*
7.01.01.2.07.0011	*Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	*Unit*	*Kecamatan Baki*	*2*	*13.000.000*	*DAU*		*2*	*20.000.000*
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persen**	**Kecamatan Baki**	**100%**	**294.000.000**	**DAU**		**100%**	**280.000.000**
7.01.01.2.08.0001	*Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	*Laporan*	*Kecamatan Baki*	*200*	*10.000.000*	*DAU*		*300*	*15.000.000*
7.01.01.2.08.0002	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	*Laporan*	*Kecamatan Baki*	*60*	*84.000.000*	*DAU*		*60*	*84.000.000*
7.01.01.2.08.0004	*Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	*Laporan*	*Kecamatan Baki*	*12*	*200.000.000*	*DAU*		*12*	*181.000.000*
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persen**	**Kecamatan Baki**	**100%**	**144.350.000**	**DAU**		**100%**	**180.000.000**
7.01.01.2.09.0001	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan*	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*	*Unit*	*Kecamatan Baki*	*9*	*71.050.000*	*DAU*		*10*	*80.000.000*
7.01.01.2.09.0002	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	*Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	*Unit*	*Kecamatan Baki*	*0*	*0*	*DAU*		*0*	*0*

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun Rencana Tahun 2025	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
7.01.01.2.09.0005	*Pemeliharaan Mebel*	*Jumlah Mebel yang Dipelihara*	*Unit*	*Kecamatan Baki*	*25*	*10.000.000*	*DAU*		*25*	*10.000.000*
7.01.01.2.09.0006	*Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	*Unit*	*Kecamatan Baki*	*13*	*15.000.000*	*DAU*		*13*	*20.000.000*
7.01.01.2.09.0009	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya*	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	*Unit*	*Kecamatan Baki*	*1*	*30.000.000*	*DAU*		*1*	*50.000.000*
7.01.01.02.09.10	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya*	*Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	*Unit*	*Kecamatan Baki*	*-*	*-*	*DAU*		*-*	
7.01.01.2.09.0011	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya*	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi*	*Unit*	*Kecamatan Baki*	*1*	*18.300.000*	*DAU*		*1*	*20.000.000*
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Persen**	**Kecamatan Baki**	**100%**	**20.000.000**	**DAU**		**100%**	**20.000.000**
7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**Persen**	**Kecamatan Baki**	**100%**	**20.000.000**	**DAU**		**100%**	**20.000.000**
7.01.02.2.02.0002	*Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan*	*Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan*	*Laporan*	*Kecamatan Baki*	*2*	*10.000.000*	*DAU*		*2*	*10.000.000*
7.01.02.2.02.0003	*Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	*Laporan*	*Kecamatan Baki*	*1*	*10.000.000*	*DAU*		*1*	*10.000.000*

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun Rencana Tahun 2025	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan**	**Persen**	**Kecamatan Baki**	**100%**	**115.000.000**	**DAU**		**100%**	**120.000.000**
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Cakupan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persen**	**Kecamatan Baki**	**100%**	**25.000.000**	**DAU**		**100%**	**30.000.000**
7.01.03.2.01.0001	*Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa*	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa*	*Lembaga Kemasyarakatan*	*Kecamatan Baki*	*5*	*10.000.000*	*DAU*		*5*	*15.000.000*
7.01.03.2.01.0003	*Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	*Laporan*	*Kecamatan Baki*	*1*	*15.000.000*	*DAU*		*1*	*15.000.000*
7.01.03.2.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Cakupan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Persen**	**Kecamatan Baki**	**100%**	**90.000.000**	**DAU**		**100%**	**90.000.000**
7.01.03.2.03.0001	*Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan*	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan*	*Lembaga Kemasyarakatan*	*Kecamatan Baki*	*1*	*80.000.000*	*DAU*		*1*	*80.000.000*
7.01.03.2.03.0002	*Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan*	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya*	*Lembaga Kemasyarakatan*	*Kecamatan Baki*	*5*	*10.000.000*	*DAU*		*5*	*10.000.000*
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Capaian Ketentraman Dan Ketertiban Umum**	**Persen**	**Kecamatan Baki**	**100%**	**32.000.000**	**DAU**		**100%**	**422.584.000**
7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Cakupan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Persen**	**Kecamatan Baki**	**100%**	**22.000.000**	**DAU**		**100%**	**412.584.000**
7.01.04.2.01.0001	*Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan*	*Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan InstansiVertikal di Wilayah Kecamatan*	*Laporan*	*Kecamatan Baki*	*4*	*10.000.000*	*DAU*		*4*	*10.000.000*
7.01.04.2.01.0002	*Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat*	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat*	*Laporan*	*Kecamatan Baki*	*14*	*12.000.000*	*DAU*		*14*	*402.584.000*

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun Rencana Tahun 2025	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
7.01.04.2.02	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**Cakupan Koordinasi Penerapan Dan Penegakan Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah**	**Persen**	**Kecamatan Baki**	**100%**	**10.000.000**	**DAU**		**100%**	**10.000.000**
7.01.04.2.02.0001	*Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia*	*Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia*	*Laporan*	*Kecamatan Baki*	*1*	*10.000.000*	*DAU*		*1*	*10.000.000*
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**Persen**	**Kecamatan Baki**	**100%**	**316.000.000**	**DAU**		**100%**	**316.000.000**
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Persen**	**Kecamatan Baki**	**100%**	**316.000.000**	**DAU**		**100%**	**316.000.000**
7.01.05.2.01.0001	*Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD Negara RI Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia*	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia*	*Orang*	*Kecamatan Baki*	*75*	*150.000.000*	*DAU*		*75*	*150.000.000*
7.01.05.2.01.0008	*Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan*	*Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan*	*Dokumen*	*Kecamatan Baki*	*12*	*166.000.000*	*DAU*		*12*	*166.000.000*
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Cakupan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Persen**	**Kecamatan Baki**	**100%**	**60.000.000**	**DAU**		**100%**	**65.000.000**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun Rencana Tahun 2025	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Prosentase Pembinaan Pengawasan dan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**	**Persen**	**Kecamatan Baki**	**100%**	**60.000.000**	**DAU**		**100%**	**65.000.000**
7.01.06.2.01.0002	*Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa*	*Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa*	*Dokumen*	*Kecamatan Baki*	*2*	*15.000.000*	*DAU*		*2*	*15.000.000*
7.01.06.2.01.0003	*Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Asset Desa*	*Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa*	*Dokumen*	*Kecamatan Baki*	*2*	*15.000.000*	*DAU*		*2*	*15.000.000*
7.01.06.2.01.0008	*Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa*	*Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa*	*Dokumen*	*Kecamatan Baki*	*6*	*10.000.000*	*DAU*		*6*	*15.000.000*
7.01.06.2.01.0013	*Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif*	*Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif*	*Dokumen*	*Kecamatan Baki*	*1*	*20.000.000*	*DAU*		*1*	*20.000.000*

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, diuraikan bahwa pada Bab IV fokus perhatiannya adalah terkait dengan rencana kerja dan pendanaan dokumen rencana kerja Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024.

Dokumen Rencana Kerja Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo merupakan penjabaran dari dokumen rencana strategis Kecamatan Baki yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sukoharjo. Rencana Kerja (Renja) disusun untuk satu tahun yang memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo yang ditransformasikan melalui Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

Rumusan program dan kegiatan pembangunan daerah menghasilkan rencana pembangunan yang konkrit dalam bentuk program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah. Dalam Renja Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 terdapat 6 (enam) program dan 14 (empat belas) kegiatan, baik program utama yang merupakan pelaksanaan tugas

pokok dan fungsi dalam mendukung visi dan misi daerah, maupun program dan kegiatan pendukung. Untuk menilai pencapaian kegiatan, maka pada setiap kegiatan dirumuskan indikator kinerja kegiatan. Perumusan kegiatan juga telah diarahkan untuk mendukung pencapaian kinerja pada setiap program.

Seluruh program dan kegiatan Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 yang tertuang dalam Renja didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sukoharjo yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU).

Program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan urusan yang ditangani Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo, dituangkan dalam tabel 4.1 berikut ini :

Tabel 4.1
Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Pagu Dana 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	KECAMATAN BAKI				**3.510.362.000**
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persen**	**100%**	**2.967362.000**
I.1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persen**	**100%**	**26.000.000**
I.1.1	*Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	*Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah*	*dokumen*	*2*	*5.000.000*
I.1.2	*Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*	*Jumlah Dokumen RKA SKPD Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*	*dokumen*	*1*	*3.000.000*
I.1.3	*Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD*	*Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD*	*dokumen*	*1*	*3.000.000*
I.1.4	*Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD*	*Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD*	*dokumen*	*1*	*4.000.000*

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Pagu Dana 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I.1.5	*Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD*	*Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD*	*dokumen*	*1*	*4.000.000*
I.1.6	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	*Laporan*	*3*	*5.000.000*
I.1.7	*Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*Jumlah laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah*	*Laporan*	*3*	*2.000.000*
I.2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persen**	**100%**	**2.085.912.000**
I.2.1	*Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	*Orang*	*15*	*1.974.412.000*
I.2.2	*Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD*	*Dokumen*	*12*	*94.000.000*
I.2.3	*Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD*	*Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD*	*Dokumen*	*12*	*7.500.000*
I.2.4	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	*Laporan*	*5*	*3.000.000*
I.2.5	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD*	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD*	*Laporan*	*12*	*5.000.000*
I.2.6	*Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran*	*Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran*	*Dokumen*	*2*	*2.000.000*
I.3	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persen**	**100%**	**28.150.000**
I.3.1	*Pengadaan Pakaian Dinas Beserta kelengkapannya*	*Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*	*Paket*	*0*	*0*
I.3.2	*Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi*	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*	*Paket*	*25*	*25.000.000*
I.3.3	*Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan*	*Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan*	*Orang*	*25*	*3.150.000*

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Pagu Dana 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I.4	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	**Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persen**	**100%**	**295.620.000**
I.4.1	*Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor*	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	*Paket*	*1*	*10.000.000*
I.4.2	*Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	*Paket*	*1*	*15.000.000*
I.4.3	*Penyediaan Peralatan Rumah Tangga*	*Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan*	*Paket*	*1*	*15.000.000*
I.4.4	*Penyediaan Bahan Logistik Kantor*	*Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan*	*Paket*	*1*	*198.000.000*
I.4.5	*Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	*Paket*	*1*	*15.786.000*
I.4.6	*Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan*	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*	*Dokumen*	*30*	*2.000.000*
I.4.7	*Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*Laporan*	*250*	*39.834.000*
I.5	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintaah Daerah**	**Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persen**	**100%**	**93.330.000**
I.5.1	*Pengadaan Mebel*	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan*	*Paket*	*50*	*29.830.000*
I.5.2	*Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnyaa*	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*	*Unit*	*3*	*25.500.000*
I.5.3	*Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	*Unit*	*2*	*25.000.000*
I.5.4	*Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	*Unit*	*2*	*13.000.000*
I.6	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persen**	**100%**	**294.000.000**
I.6.1	*Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	*Laporan*	*200*	*10.000.000*
I.6.2	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	*Laporan*	*60*	*84.000.000*
I.6.3	*Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum*	*Laporan*	*12*	*200.000.000*

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Pagu Dana 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I.7	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persen**	**100%**	**144.350.000**
I.7.1	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan*	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*	*Unit*	*9*	*71.050.000*
I.7.2	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	*Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	*Unit*	*-*	*0*
I.7.3	*Pemeliharaan Mebel*	*Jumlah Mebel yang Dipelihara*	*Unit*	*25*	*10.000.000*
I.7.4	*Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	*Unit*	*13*	*15.000.000*
I.7.5	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya*	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	*Unit*	*1*	*30.000.000*
I.7.6	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya*	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	*Unit*	*1*	*18.300.000*
II	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Tingkat Kinerja Penyelenggara-an Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Persen**	**100%**	**20.000.000**
II.1	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**Persen**	**100%**	**20.000.000**
II.1.1	*Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan*	*Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan*	*Laporan*	*2*	*10.000.000*
II.1.2	*Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	*Laporan*	*1*	*10.000.000*
III	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan**	**Persen**	**100%**	**115.000.000**
III.1	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Cakupan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persen**	**100%**	**115.000.000**

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Pagu Dana 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
III.1.1	*Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa*	*Jumlah Lembaga Kemasyarakat-an yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa*	*Lembaga Kemasya rakatan*	*5*	*10.000.000*
III.1.2	*Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	*Laporan*	*1*	*15.000.000*
III.2	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Cakupan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Persen**	**100%**	**90.000.000**
III.2.1	*Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan*	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan*	*Lembaga Kemasya rakatan*	*1*	*80.000.000*
III.2.2	*Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan*	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya*	*Lembaga Kemasya rakatan*	*5*	*10.000.000*
III.2.3	*Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat*	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa*	*Dokumen*	*-*	*-*
IV	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Capaian Ketentraman Dan Ketertiban Umum**	**Persen**	**100%**	**32.000.000**
IV.1	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Cakupan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Persen**	**100%**	**22.000.000**
IV.1.1	*Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan*	*Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan*	*Laporan*	*4*	*10.000.000*
IV.1.2	*Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat*	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat*	*Laporan*	*14*	*12.000.000*
IV.2	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**Cakupan Koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah**	**Persen**	**100%**	**10.000.000**

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Pagu Dana 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
IV.2.1	*Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia*	*Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia*	*Laporan*	*1*	*10.000.000*
V	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**Persen**	**100%**	**316.000.000**
V.1	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Persen**	**100%**	**316.000.000**
V.1.1	*Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD Negara RI Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia*	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia*	*Orang*	*75*	*150.000.000*
V.1.2	*Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan*	*Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan*	*Dokumen*	*12*	*166.000.000*
VI	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Cakupan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Persen**	**100%**	**60.000.000**
VI.1	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Prosentase Pembinaan Pengawasan dan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**	**Persen**	**100%**	**60.000.000**
VI.1.1	*Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa*	*Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa*	*Dokumen*	*2*	*15.000.000*
VI.1.2	*Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Asset Desa*	*Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendaya-gunaan Aset Desa*	*Dokumen*	*2*	*15.000.000*
VI.1.3	*Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa*	*Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhenti-an Perangkat Desa*	*Dokumen*	*6*	*10.000.000*
VI.1.4	*Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif*	*Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif*	*Dokumen*	*1*	*20.000.000*

BAB V
PENUTUP

Dokumen Rencana Kerja Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 ini nantinya merupakan pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026. Program dan kegiatan yang direncanakan merupakan prioritas dalam rangka mencapai visi dan misi Kabupaten Sukoharjo dan mendukung tercapainya visi dan misi pembangunan daerah jangka menengah. Rencana Kerja Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo dalam menjalankan tugas dan fungsinya dan sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2024.

Renja SKPD Kecamatan Baki Tahun 2024 yang telah disusun ini hendaknya dilaksanakan secara konsisten, transparansi, jujur, partisipatif, penuh tanggung jawab dan merupakan pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-SKPD) Kecamatan Baki.

Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) SKPD Kecamatan Baki Tahun 2024, Camat Baki melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penjabaran Renja Kecamatan Baki Tahun 2024 dalam bentuk Rencana Kerja dan Anggaran Kecamatan setiap Kegiatan dan Sub Kegiatan.

Dengan mengharap keridhoan Alloh SWT, Tuhan Yang Maha Esa, semoga Rencana Kerja yang telah dibuat bersama-sama ini dapat diwujudkan bersama, untuk mencapai tujuan akhir bersama yaitu : **“Mewujudkan masyarakat Sukoharjo Yang Lebih Makmur”**

Sukoharjo, 10 Agustus 2023

CAMAT BAKI
KABUPATEN SUKOHARJO



SUTARTO, S.STP. M.H.
NIP. 19780624 199711 1 001

SALINAN

BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 35 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024;

b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 273 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan Kepala Daerah setelah Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 192) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 262);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tatacara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 200);
13. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);
14. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 298);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

Renja Perangkat Daerah disusun dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Pasal 3

Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

BAB II

SISTEMATIKA DAN FUNGSI RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 4

Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. bab I : pendahuluan;
b. bab II : hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu;
c. bab III : tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
d. bab IV : rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan
e. bab V : penutup.

Pasal 5

Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah.

BAB II

PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 6

(1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah.
(2) Kepala Perangkat Daerah melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi Renja Perangkat Daerah kepada Bupati melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.

BAB III

PERANGKAT DAERAH PENYUSUN

Pasal 7

(1) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun oleh Perangkat Daerah sebagai berikut:
    a. Sekretariat Daerah;
    b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
    c. Inspektorat Daerah;
    d. Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan;
    e. Dinas Kesehatan;
    f. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang;
    g. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
    h. Satuan Polisi Pamong Praja;
    i. Dinas Sosial;

j. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak;
k. Dinas Pangan;
l. Dinas Lingkungan Hidup;
m. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil;
n. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa;
o. Dinas Perhubungan;
p. Dinas Komunikasi Dan Informatika;
q. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
r. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;
s. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
t. Dinas Pertanian dan Perikanan;
u. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah dan Perdagangan;
v. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
w. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
x. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
y. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
z. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
aa. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
bb. Kecamatan Weru;
cc. Kecamatan Bulu;
dd. Kecamatan Tawangsari;
ee. Kecamatan Sukoharjo;
ff. Kecamatan Nguter;
gg. Kecamatan Bendosari;
hh. Kecamatan Polokarto;
ii. Kecamatan Mojolaban;
jj. Kecamatan Grogol;
kk. Kecamatan Baki;
ll. Kecamatan Gatak; dan
mm. Kecamatan Kartasura.

(2) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf mm tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 10 Agustus 2023

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 10 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd.

WIDODO

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2023 NOMOR 35

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TEGUH PRAMONO, SH, MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19710429 199803 1 003

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 35 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN
SUKOHARJO TAHUN 2024

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2024

Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 terdiri atas:

1. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Inspektorat Daerah;
4. Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan;
5. Dinas Kesehatan;
6. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang;
7. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
8. Satuan Polisi Pamong Praja;
9. Dinas Sosial;
10. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak;
11. Dinas Pangan;
12. Dinas Lingkungan Hidup;
13. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil;
14. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa;
15. Dinas Perhubungan;
16. Dinas Komunikasi Dan Informatika;
17. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
18. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;
19. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
20. Dinas Pertanian dan Perikanan;
21. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah dan Perdagangan;
22. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
23. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
24. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
25. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
26. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
27. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
28. Kecamatan Weru;
29. Kecamatan Bulu;

30. Kecamatan Tawangsari;
31. Kecamatan Sukoharjo;
32. Kecamatan Nguter;
33. Kecamatan Bendosari;
34. Kecamatan Polokarto;
35. Kecamatan Mojolaban;
36. Kecamatan Grogol;
37. Kecamatan Baki;
38. Kecamatan Gatak; dan
39. Kecamatan Kartasura.

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI

RENCANA KERJA
KECAMATAN GATAK TAHUN 2024
KABUPATEN SUKOHARJO



KECAMATAN GATAK
KABUPATEN SUKOHARJO
Jln. Stasiun No 41 Gatak

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan karunia-Nya, Rencana Kerja Pemerintah Kecamatan Gatak Tahun 2024 dapat kami susun. Penyusunan Renja ini bertujuan untuk memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Gatak Tahun 2024.

Kami menyadari Renja ini masih jauh dari sempurna, untuk itu saran dan koreksi sangat kami harapkan demi kesempurnaan Renja ini dan keberlanjutan penyusunan di periode berikutnya. Kami berharap apa yang terangkum dalam Renja Pemerintah Kecamatan Gatak Tahun 2024 ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Sukoharjo, Agustus 2023

CAMAT GATAK

KABUPATEN SUKOHARJO

PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
KECAMATAN GATAK

TRI WAHYUDI, SH,MM

NIP. 19670604 199803 1 004

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI iii

BAB I PENDAHULUAN .....

A. Latar Belakang 1

B. Landasan Hukum 4

C. Maksud dan Tujuan 8

D. Sistematika Penulisan 9

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN GATAK TAHUN 2022.....

A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Gatak Tahun 2022 Dan Capaian Renstra Kecamatan Gatak Tahun 2021 - 2026 11

B. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo 22

C. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo 24

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.....

A. Telaahan Terhadap Kebijakan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo 27

B. Tujuan dan Sasaran 36

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 39

BAB V PENUTUP .....

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah merupaknkan suatu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Hal ini dimaksudkan agar perencanaan pembangunan daerah senantiasa konsisten, sejalan dan selaras dengan kebijakan perencanaan pembangunan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Selaras dengan hal tersebut, perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 mengacu pada perencanaan Nasional dan Provinsi sehingga diharapkan ada kesinambungan program-program pembangunan baik dari tingkat pusat hingga daerah.

Selain itu, perencanaan pembangunan daerah dilakukan bersama-sama dengan para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing, mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah serta mempertimbangkan kondisi dan potensi yang dimiliki, sesuai dengan dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Disamping itu, perencanaan pembangunan harus disesuaikan dengan kondisi riil yang dialami oleh Kabupaten Sukoharjo dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, dimana kapasitas fiskal memegang peranan penting dan menentukan dalam memilih arah kebijakan pembangunan yang akan ditempuh.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 adalah bagian dari suatu sistem perencanaan pembangunan yang merupakan dokumen perencanaan tahunan yang menggambarkan permasalahan pembangunan daerah serta indikasi daftar program dan kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2024 oleh Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo untuk memecahkan permasalahan pembangunan daerah secara terencana melalui sumber pembiayaan yang ada yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten (APBD Kabupaten)

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo disusun berdasarkan dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Sukoharjo 2021-2026, Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo serta rancangan awal Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sukoharjo, yang selanjutnya dapat dijadikan sebagai acuan dalam mengoperasionalkan RKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo dalam menjalankan visi jangka menengah daerah.

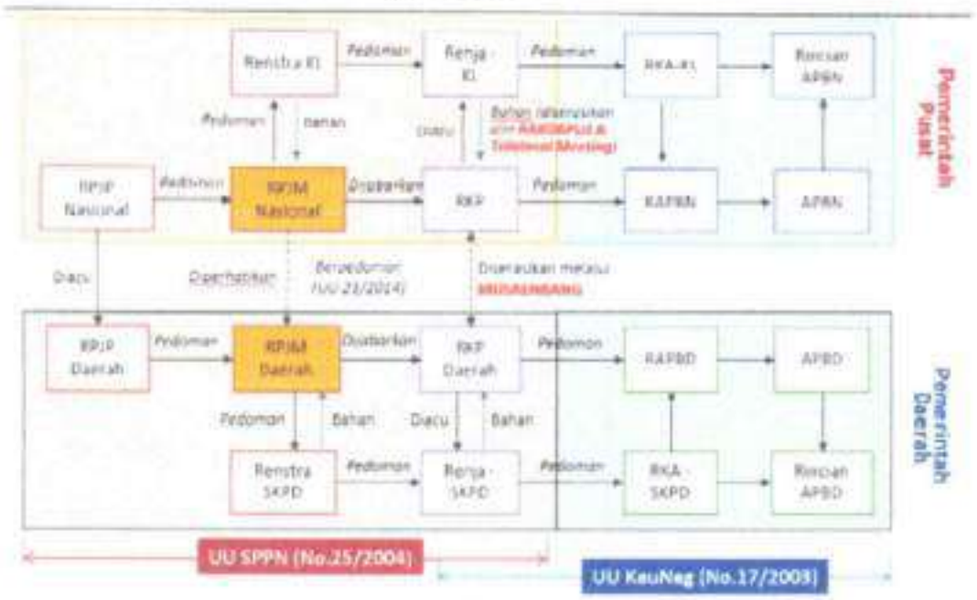
Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, telah diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan nomenklatur urusan sampai dengan sub kegiatan yang sudah ditentukan. RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dimana dalam penyusunan RKPD diperlukan masukan dari Perangkat Daerah berupa Rencana Kerja Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah berjangka 1 (satu) tahun yang memuat kondisi pelayanan Perangkat Daerah, gambaran visi dan misi serta rencana pembangunan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun yang akan datang.

Renja Perangkat Daerah juga merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran RPJMD oleh Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan oleh Perangkat Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan jangka waktu RPJMD. Selanjutnya dalam rangka

meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renja Perangkat Daerah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Perangkat Daerah berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo untuk periode Tahun 2024 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Sukoharjo dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun di Tahun 2024

Renja Kecamatan Gatak Tahun 2024 memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah pembangunan nasional, provinsi, dan mendukung arah perencanaan pembangunan daerah. Adapun Keterkaitan hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan yang ada pada Renja Kecamatan Gatak Tahun 2024 dapat dilihat pada gambar 1.1 :



Gambar 1.1
Skema Rencana Pembangunan Pusat dan Daerah

RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Nasional, yang memuat strategi pembangunan Nasional, kebijakan umum, program Kementerian/Lembaga dan lintas

Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Pasal 263 ayat 2 UU No. 23 Tahun 2014 RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan rencana tata ruang wilayah. Pasal 263 ayat 3 UU No. 23 Tahun 2014 RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.

Adapun penyusunan Renja Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 dilakukan melalui 5 (lima) pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan yaitu pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (top-down), dan bawah-atas (bottom-up). Kelima pendekatan dimaksud diselenggarakan secara berkelanjutan untuk membentuk satu siklus perencanaan yang utuh sebagai berikut (Gambar 1.2) :



Gambar 1.2
Alur Penyusunan RKPD dan Rencana Kerja Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo

Berdasarkan Bagan Alur tersebut penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Gatak merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD) Tahun 2021 – 2026. Selain itu Proses penyusunan Renja Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo merupakan dokumen yang tidak berdiri sendiri melainkan dilakukan melalui beberapa tahapan, yakni diawali dengan mereview Renstra, Penyusunan Rancangan Renja, dan Penetapan Renja. Ketiga tahapan dimaksud diselenggarakan secara berkelanjutan untuk menghasilkan dokumen penganggaran yaitu RKA/DPA dan dituangkan dalam dokumen APBD Kabupaten Sukoharjo.

B. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renja Kecamatan Gatak Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180
10. Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);

11. Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
15 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
16. Peraturan Daerah Provinsi jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
17. Peraturan Daerah Provinsi jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 192) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 262);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tatacara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 200);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
22. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021

tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah DaerahTahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud penyusunan Renja Kecamatan Gatak Tahun 2024 adalah :
   a. Memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan serta pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Gatak Tahun 2024
   b. Sebagai acuan dan pedoman pelaksanaan Program/Kegiatan Kecamatan Gatak pada Tahun 20242.

Tujuan penyusunan Renja Kecamatan Gatak Tahun 2024 adalah :

a. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2024 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
b. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Gatak selama kurun waktu 1 tahun yaitu Tahun 2024;
c. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan Kecamatan Gatak Tahun 2024;
d. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program dankegiatan Kecamatan Gatak Tahun 2024 dan
e. Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Gatak Tahun 2024.

D. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penyajian Renja Kecamatan Gatak Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja SKPD, proses penyusunan Renja SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen RKPD, Renstra SKPD, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan APBD

B. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD

C. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja SKPD

D. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta susunan garis besar isi

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN GATAK TAHUN 2023

A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Gatak Tahun 2023 dan Capaian Renstra Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun n-1) dan perkiraan capaian tahun berjalan, mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target renstra SKPD berdasarkan realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun sebelumnya.

B. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo

Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan Indikator Kinerja yang sudah ditetapkan dalam SPM maupun terhadap IKK. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing masing OPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

C. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Gatak , Kabupaten Sukoharjo

Berisi uraian mengenai sejauhmana tingkat kinerja pelayanan Kecamatan Gatak dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah dan permasalahan/hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

BAB III TUJUAN, SASARAN

A. Telaahan Terhadap Kebijakan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo

Penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah, visi misi Kepala Daerah serta yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD

B. Tujuan dan Sasaran

Berisi perumusan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisi uraian garis besar mengenai rekapitulasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan Kecamatan Gatak Tahun 2024

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN GATAK

TAHUN 2023

A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Gatak Tahun 2023 dan Capaian Renstra Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo

Dalam melakukan penyusunan Renja Kecamatan Gatak Tahun 2024, diperlukan adanya evaluasi atas pelaksanaan Renja Kecamatan Gatak Tahun 2022 terhadap capaian renstra Kecamatan Gatak Tahun 2021-2026, serta evaluasi terhadap proyeksi capaian Renja untuk tahun berjalan yaitu Tahun 2023. Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi sampai dengan tahun 2021dan target akhir Renstra tahun 2021-2026.

Evaluasi terhadap capaian Renstra Kecamatan Gatak Tahun 2021-2026 telah dapat dilakukan, dimana capaian kinerja Tahun 2022 sebagai tahun kedua pelaksanaan Renstra Kecamatan Gatak 2021-2026 telah dapat diketahui. Adapun hasil evaluasi adalah sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

TABEL 2.1

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA

KECAMATAN GATAK

TAHUN 2022 dan 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Target Akhir Renstra	Realisasi 2022	Target 2023
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				
7					UNSUR KEWILAYAHAN							
7	01				KECAMATAN					17.648.270.000	3.274.000.166	3.943.510.000
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					12.885.850.000	3.065.723.157	3.249.950.000
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					175.000.000	23.401.450	25.000.000
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra, Renja yang disusun	Cakupan Penyusunan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec Gatak	55.000.000	6.393.000	7.000.000
7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA yang disusun	Cakupan Penyusunan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec Gatak	20.000.000	2.745.300	3.000.000
7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan RKA yang disusun	Cakupan Penyusunan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec Gatak	20.000.000	2.933.800	3.000.000

7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen DPA yang disusun	Cakupan Penyusunan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec Gatak	20.000.000	2.753.300	3.000.000
7	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan DPA yang disusun	Cakupan Penyusunan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec Gatak	20.000.000	2.726.600	3.000.000
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Money, POK dan Review yang disusun	Cakupan Penyusunan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec Gatak	20.000.000	2.860.950	5.000.000
7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen LKPJ, LKjIP yang disusun	Cakupan Penyusunan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec Gatak	20.000.000	2.975.500	5.000.000
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**					**6.183.540.000**	**1.660.753.700**	**1.920.996.000**
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangannya	Cakupan Penyusunan Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec Gatak	7.632.540.000	1.561.525.000	1.801.996.000
7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan/ Verifikasi Keuangan SKPD	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah pengelola keuangan yang terbayarkan honornya	Cakupan Penyusunan Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec Gatak	475.000.000	88.561.000	107.000.000

7	01	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen SPJ Fungsional yang disusun	Cakupan Penyusunan Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec Gatak	19.000.000	2.319.300	3.000.000
7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan (CaLK, Neraca, LRA, LO, LPE yang disusun)	Cakupan Penyusunan Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec Gatak	19.000.000	5.591.000	3.000.000
7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen SPJ Fungsional yang disusun	Cakupan Penyusunan Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec Gatak	16.000.000	2.759.400	3.000.000
7	01	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran yang disusun	Cakupan Penyusunan Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec Gatak	19.000.000	1.660.755.700	3.000.000
7	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**					**342.000.000**	**4.123.500**	**13.100.000**
7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec. Gatak	87.000.000	0	8.100.000
7	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsinya	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsinya	Jumlah Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsinya	Kec. Gatak	123.000.000	0	0

7	01	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan yang dilaksanakan	Jumlah kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan yang dilaksanakan	Kec Gatak	132.000.000	4.125.500	5.000.000
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**					**872.710.000**	**236.812.750**	**441.432.000**
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec Gatak	52.000.000	7.997.650	8.000.000
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan untuk kegiatan	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec Gatak	70.000.000	9.095.000	10.000.000
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Peralatan Rumah Tangga dan Bahan Pembersih yang tersedia	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec Gatak	88.000.000	14.374.100	15.000.000
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah ATK, Bahan Material dan Makan Minum yang tersedia	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec Gatak	380.000.000	157.593.000	92.593.000
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang tersedia	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec Gatak	40.000.000	4.960.000	10.000.000
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Tagihan Langganan Surat Kabar yang terbayarkan	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec Gatak	28.710.000	42.793.000	5.000.000
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan rapat rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec Gatak	220.000.000	7.997.650	40.000.000

7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**					**925.000.000**	**85.150.000**	**106.500.000**
7	01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang diadakan	Cakupan Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec Gatak	345.000.000	0	315.000.000
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah pengadaan mebelur yang diadakan	Cakupan Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec Gatak	115.000.000	7.400.000	0
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	Cakupan Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec Gatak	195.000.000	54.000.000	24.000.000
7	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	Cakupan Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec Gatak	185.000.000	24.750.000	25.000.000
7	01	01	2.07	0011	Pengadaan Saraca Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah peralatan pendukung gedung kantor yang diadakan	Cakupan Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec Gatak	85.000.000		20.000.000
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**					**1.292.000.000**	**232.831.493**	**283.140.000**
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah surat menyurat yang dikirim	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec Gatak	75.000.000	14.873.320	16.800.000

7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Rekening Listrik, Telepon dan Internet yang terbayarkan	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec Gatak	345.000.000	49.116.406	70.700.000
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Tenaga Harian Lepas yang Terbayar	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec Gatak	863.00.000	168.841.787	195.640.000
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**					**1.095.000.000**	**295.149.414**	**152.232.000**
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Kendaraan dinas yang dipelihara	Cakupan pemeliharaan BMD di Lingkungan Kecamatan	Kec Gatak	340.000.000	47.956.614	72.232.000
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Kendaraan operasional lapangan yang terpelihara	Cakupan pemeliharaan BMD di Lingkungan Kecamatan	Kec Gatak	40.000.000	9.915.500	10.000.000
7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah mebelear yang dipelihara	Cakupan pemeliharaan BMD di Lingkungan Kec	Kec Gatak	40.000.000	0	10.000.000
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah peralatan dan Mesin yang terpelihara	Cakupan pemeliharaan BMD di Lingkungan Kecamatan	Kec Gatak	100.000.000	14.985.000	15.000.000
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah bangunan gedung kantor yang terpelihara	Cakupan pemeliharaan BMD di Lingkungan	Kec Gatak	350.000.000	172.551.800	35.000.000

								Kecamatan				
7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Cakupan pemeliharaan BMD di Lingkungan Kecamatan	Kec Getak	23.000.000	9.487.500	5.000.000
7	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Rumah Dinas yang terpelihara	Cakupan pemeliharaan BMD di Lingkungan Kecamatan	Kec Getak	200.000.000	40.333.000	40.000.000
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**					**156.000.000**	**19.004.300**	**20.000.000**
7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**					**79.000.000**	**19.004.300**	**20.000.000**
7	01	02	2.02	0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Kecamatan	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kec Getak	38.770.000	9.981.850	10.000.000
7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah Peningkatan Efektifitas Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kec Getak	40.920.000	9.022.750	10.000.000

7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**					**396.690.000**	**81.879.200**	**114.200.0000**
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**					**93.000.000**	**23.160.000**	**25.000.000**
7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan desa di Kecamatan	Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec Catak	55.000.000	14.971.600	15.000.000
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Sosialisasi Peningkatan BUMDES yang dilaksanakan	Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec Catak	38.000.000	8.186.700	10.000.000
7	**01**	**03**	**2.03**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan**					**303.690.000**	**58.719.200**	**89.200.000**
7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Persentase Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kec Catak	263.690.000	49.505.150	80.000.000
7	01	03	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Persentase Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kec Catak	40.000.000	9.216.050	9.200.000
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**					**1.820.920.000**	**35.028.500**	**33.200.000**
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**					**1.780.390.000**	**25.135.500**	**23.200.000**

7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Persentase Capaian ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada	Terlaksanannya kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kec Gatak	40.000.000	9.993.000	10.000.000	9.996.450
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**					**1.506.390.000**	Kec Gatak	**356.000.000**	**355.885.400**
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**					**1.506.390.000**	**344.333.950**	**356.000.000**	**355.885.400**
7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Pasikibra Kecamatan yang dibina	Jumlah Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang diselenggarakan	Kec Gatak	600.000.000	189.340.250	199.000.000	189.885.400
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang diselenggarakan	Kec Gatak	520.000.000	154.993.700	166.000.000	166.000.000
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**					**880.260.000**	**46.163.800**	**70.160.000**	**69.791.761**

7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**					**880.260.000**	**46.163.800**	**70.160.000**	**69.791.751**
7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec Gatak	40.000.000	14.969.000	15.000.000	14.927.300
7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec Gatak	40.000.000	12.717.600	21.010.000	20.951.000
7	01	06	2.01	0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec Gatak	80.000.000	0	14.150.000	14.136.550
7	01	06	2.01	0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Musrenbangcam yang disusun	Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec Gatak	50.000.000	18.477.200	20.000.000	19.756.901

B. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo

Kinerja pelayanan Kecamatnn Gatak didasarkan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 – 2026, dalam rangka 5mendukung pada : Misi 1 RPJMD : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik melalui Percepatan Reformasi Birokrasi. Misi ini memiliki tujuan : Terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel. Sasaran yang ingin dihasilkan dalam rangka mencapai tujuan tersebut adalah : Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat dan meningkatnya kualitas aparatur dan pelayanan publik

Kinerja Pelayanan pada Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo menunjukkan tingkat capaian kinerja Kecamatan Gatak berdasarkan sasaran/target Renstra Kecamatan Gatak tahun 2021-2026 sebagaimana disajikan dalam tabel berikut :

NO	Indikator	Data capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target						
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	80	81	82	83	84	85	86	
2	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	50	50	55	62	68	74	80	

C. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo

Isu Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang diperhatikan dalam perencanaan pembangunan selama 5 (Lima) tahun dalam melaksanakan atau menyelenggarakan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Gatak kepada masyarakat. Analisa isu-isu strategis di identifikasikan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Gatak dalam menjalankan pemerintahan ada berbagai permasalahan, sebagai berikut :

1. Bidang Sekretariat

a. Masih kurangnya sumber daya dan ketcrampilan pegawai dalam mengoperasikan sarana dan prasarana komputer di wilayah Kecamatan Gatak sehingga memperlambat kinerja kegiatan administrasi perkantoran, untuk meningkatkan kinerja kegiatan administrasi perlu adanya pelatihan dalam mengoperasikan computer;

b. Kurangnya personil di bagian sekretariat Kantor Kecamatan Gatak, sehingga banyak tenaga yang merangkap tugas lain, untuk meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat perlu adanya tambahan personil ;

c. Kecamatan sebagai Perangkat Daerah yang belum diberikan kewenangan penuh untuk mengajukan dan mengelola anggaran Perangkat Daerah, kewenagan Kecamatan hanya sebatas pengelolaan Gaji pegawai dan biaya operasional Kecamatan. Sedangkan pengelolaan anggaran pembangunan masih melalui Perangkat Daerah terkait ;

2. Bidang Pemerintahan

Kurangnya personil pengelolaan data pemerintahan umum, pengelolaan data Pemerintahan Desa, pengelola data kependudukan dan pertanahan sehingga untuk meningkatkan kinerja pelayanan

masyarakat perlu adanya tambahan personil dan tenaga operasional;

3. **Bidang Pemberdayaan Masyarakat**

   a. Kurangnya personil pengelolaan pemberdayaan masyarakat dan pengelola partisipasi masyarakat, sehingga untuk meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat perlu adanya tambahan personil dan tenaga operasional;

   b. Kurangnya pemerataan pembangunan wilayah Desa; Belum optimalnya peranserta dan swadaya masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan wilayah ;

   c. Tingginya kerusakan infrastruktur wilayah desa seperti jalan desa, jalan lingkungan, sanitasi lingkungan masih rendah.

4. **Bidang Keamanan dan Kenyamanan lingkungan**

   a. Kurangnya personil pengelolaan pendidikan, kebudayaan dan kesehatan, pengelola keamanan dan ketertiban dan pengelola kesejahteraan sosial, sehingga untuk meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat perlu adanya tambahan personil dan tenaga operasional;

   b. Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang hukum;

   c. Kurangnya personil Linmas di masing – masing Desa dan Linmas yang ada belum berjalan secara maksimal;

   d. Kurangnya sarana dan prasarana Kamtibmas di Kantor Kecamatan Gatak ;

5. **Bidang Ekonomi dan Pembangunan**

   a. Kurangnya personil pengelolaan pengendalian monitoring dan evaluasi pembangunan dan pengelola pendaftaran dan pendataan pajak/retribusi, sehingga untuk meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat perlu adanya tambahan personil dan tenaga operasional;

b. Pembangunan Infrastruktur di Kecamatan Gatak sudah cukup baik, namun hal ini perlu ditingkatkan keberadaannya, khususnya untuk peningkatan pembangunan jalan desa yang sudah secara bertahap dilakukan pembangunan melalui berbagai program pembangunan. Masalah pembangunan jalan di wilayah Kecamatan Gatak terkendala dengan cepatnya usia fisiknya, karena struktur tanah yang mudah bergerak, kualitas yang kurang baik dan pada lokasi tertentu sering tergenang air sehingga usia teknis menjadi pendek ;

c. Kurangnya personil di bagian Ekonomi dan Pembangunan Kantor Kecamatan Gatak , sehingga banyak tenaga yang merangkap tugas lain, untuk meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat perlu adanya tambahan personil;

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

A. Telaahan Terhadap Kebijakan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo

Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan yang ada di Kabupaten Sukoharjo, agar lebih terarah dan berhasil guna serta berdaya guna, maka pemerintah bersama-sama masyarakat Kabupaten Sukoharjo telah menetapkan visi, misi dan strategi dalam mencapai tujuannya yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 - 2026.

1. VISI

Visi pembangunan Kabupaten Sukoharjo tahun 2021-2026 merupakan implementasi dari visi Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo periode tahun 2021-2026 yaitu:

"Mewujudkan masyarakat Sukoharjo Yang Lebih Makmur"

Visi pembangunan daerah Kabupaten Sukoharjo tahun 2021-2026 merupakan keberlanjutan dari cita-cita pembangunan Kabupaten Sukoharjo tahun 2016-2020.

Mengandung arti bahwa dalam lima tahun ke depan masyarakat Kabupaten Sukoharjo akan tercipta kondisi sejahtera, terpenuhi seluruh kebutuhan hidupnya baik sosial maupun ekonomi, secara lahir maupun batin. MAKMUR juga merupakan motto atau slogan Kabupaten

Sukoharjo yaitu **Maju, Aman, Konstitusional, Mantap, Unggul, dan Rapi**.

MAJU

Maju mempunyai pengertian bergerak kedepan menjadi lebih baik, tidak berhenti, tidak terlambat, mencapai tingkat peradaban yang lebih tinggi.Sebagai tugas panggilan dalam hidup. Dengan maju kita ingin tumbuh dan berkembang, dan selalu berpikr dan berusaha keras kearah peningkatan menjadi lebih baik.

AMAN

Keamanan merupakan salah satu unsur/syarat mutlak untuk dapat terlaksananya pembangunan.Tanpa stabilitas keamanan yang terpelihara secara mantap dan berkesinambungan, tidak mungkin kegiatan pembangunan dapat terlaksana dengan lancar.

KONSTITUSIONAL

Penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, maupun kemasyarakatan harus dilandasi hukum atau dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum.

MANTAP

Warga masyarakat dan segenap penyelenggara pemerintahan optimis dalam membangun Sukoharjo.

UNGGUL

Unggul mempunyai arti semangat berprestasi untuk selalu berusaha mencapai yang terbaik.

RAPI

Rapi mengandung pengertian apik, baik, bersih, teratur, tertib, beres.

2. MISI

Dalam rangka upaya menuju pencapaian visi pembangunan daerah Kabupaten Sukoharjo tahun 2021-2026, ditetapkan misi pembangunan daerah yaitu:

a. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Percepatan Reformasi Birokrasi

Misi kesatu ini bertujuan untuk semakin mempercepat implementasi reformasi birokrasi secara optimal, yang pada periode sebelumnya telah terwujud dalam membaiknya tata kelola pemerintahan Kabupaten Sukoharjo.

Reformasi birokrasi yang diharapkan kedepan adalah pada tiga dimensi utama yaitu pelayanan publik yang semakin dinamis, efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan, kapasitas kelembagaan, serta manajemen sumber daya manusia aparatur yang semakin baik.Pelayanan publik yang dinamis diwujudkan dengan membangun open government dan pemerintahan yang responsif. Open government dilakukan dengan perkuatan keterbukaan informasi publik, transparansi, partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta meningkatkan komunikasi dan serapan aspirasi publik.

Sedangkan pemerintahan yang responsif tercermin dalam respon pemerintah kabupaten dalam menghadapi aduan dan persoalan riil masyarakat, dengan cepat dan

tepat, baik dalam bentuk kebijakan maupun kegiatan.Pelayanan publik yang dinamis, terbuka, dan responsif diikat dalam satu tagline pelayanan yang mudah, murah, cepat, serta didukung inovasi dan teknologi informasi.

Efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan tergambarkan dalam proses perencanaan, penganggaran, serta evaluasi pembangunan yang akuntabel. Manajemen pembangunan Kabupaten Sukoharjo kedepan tidak hanya fokus pada kerja tetapi kinerja, dan berorientasi pada hasil (outcome). Untuk itu perlu juga dilakukan pengawasan dalam prosesnya, sejak dimulainya proses perencanaan, implementasi hingga evaluasi.

Agar dapat melaksanakan manajemen pemerintahan yang baik dan bersih maka dibutuhkan kelembagaan/organisasi yang tepat dan didukung dengan penataan sistem manajemen sumberdaya manusia aparatur yang baik.Manajemen sumber daya manusia aparatur yang baik terejawantahkan dalam bentuk integritas aparatur yang dibangun melalui kompetensi dan etika menuju integritas pribadi dan institusi, mendorong birokrasi yang inovatif, dan dijamin dalam quality assurance aparatur.

2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas

Misi kedua mengarah pada kualitas dan daya saing sumberdaya manusia Sukoharjo, agar semakin sehat, pintar, berbudaya, dan lebih mencintai lingkungan.Era

globalisasi yang semakin terbuka menuntut kualitas sumberdaya manusia yang mampu bersaing secara kompetitif dalam kompetensi dan kualifikasi. Bonus demografi yang saat ini telah dialami oleh Sukoharjo dapat dijadikan sebagai peluang sekaligus tantangan, bagaimana kedepan modal sosial ini akan menempatkan Sukoharjo sebagai salah satu daerah dengan sumberdaya manusia yang mampu bersaing. Sehingga diharapkan, dapat memberikan dampak pertumbuhan ekonomi yang semakin baik, dan menciptakan masyarakat Sukoharjo yang semakin sejahtera.

Tidak hanya tentang kualitas dan daya saing sumberdaya manusia yang diharapkan, namun juga bagaimana membentuk karakter masyarakat Sukoharjo yang semakin berbudaya. Di tengah arus keterbukaan informasi dunia yang nyata kemudian bagaimana masyarakat Sukoharjo tetap kuat menjaga etika dan norma serta nilai budaya asli Sukoharjo, serta menjaga kearifan lokal sejak dini.

3. Memperkuat Perekonomian Rakyat Yang Berdaya Saing Tinggi

Misi ketiga ini mempunyai tujuan mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan insklusif.Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang penting dalam melakukan pembangunan

ekonomi yang terjadi pada suatu negara ataupun daerah.Pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan distribusi pendapatan yang merata sangat dibutuhkan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.Pertumbuhan ekonomi suatu daerah diukur dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan laju pertumbuhannya atas dasar harga konstan. Pertumbuhan ekonomi yang cepat akan menimbulkan ketimpangan distribusi pendapatan. Hal ini disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang bersifat sentralisasi. Pada tahun 1999 pemerintah mengubah kebijakan sentralisasi menjadi desentralisasi dengan memberlakukan Otonomi Daerah. Hal tersebut memberikan harapan dalam upaya mengurangi tingkat kemiskinan dan ketimpangan antar dacrah.

Misi ini adalah untuk mengarahkan kebijakan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam rangka menurunkan jumlah penduduk miskin, yang didukung oleh perekonomian daerah yang stabil, berkualitas, inklusif, dan menyebar. Program pengentasan kemiskinan difokuskan kepada kelompok sasaran utama, seperti petani pelaku UKM dan pekerja dan kelompok rentan lainnya. Program pengentasan kemisikinan tersebut perlu didukung oleh pertumbuhan ekonomi yang tersebar, inklusif, dan berkualitas, yakni pertumbuhan ekonomi yang menyebar di seluruh wilayah Sukoharjo, memperhitungkan

kelestarian lingkungan dan keberlangsungan ketersediaan sumber daya, melibatkan seluruh kelompok masyarakat dengan mengutamakan peran dan kontribusi kelompok masyarakat yang kurang beruntung, dan menghapus praktek ekonomi biaya tinggi.

4. **Memperkuat Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan**

Misi keempat mengarah kepada pembangunan infrastruktur akan terus dilaksanakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar, yang akan dilaksanakan dengan penguatan konektivitas, penyediaan akses perumahan, permukiman, air minum dan sanitasi yang layak, telekomunikasi dan transportasi yang aman dan memadai.

Pembangunan berwawasan lingkungan hidup dilakukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan meningkatkan kualitas hidup manusia.Untuk menjaga kelestarian lingkungan agar kualitas lingkungan hiudp tetap terjaga, pemanfaatan sumber daya alam harus dilakukan secara bijaksana, adil, efisien, dan bertanggungjawab serta lingkungan yang tangguh bencana.

5. **Meningkatkan Kualitas Kehidupan Sosial dan Keagamaan**

Misi ini menggambarkan sebuah kondisi yang ingin diciptakan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera, tercermin dari rasa aman dan nyaman yang

dirasakan dalam kehidupan masyarakat.Kondisi yang tercipta merupakan manifestasi implementasi nilai-nilai religius dalam kehidupan masyarakat. Membangun masyarakat Sukoharjo yang religius, toleran, dan guyup ini adalah dengan menciptakan kondisi obyektif yang memungkinkan interaksi antar umat beragama untuk saling menghormati dan menghargai satu sama lain, mendorong keberagaman, kebhinekaan, dan toleransi dalam kerangka kesatuan.

Upaya yang dilakukan antara lain dengan menguatkan pemahaman keberagaman dan kebhinekaan sejak usia dini, mengembangkan ruang-ruang publik untuk membangun komunikasi antar masyarakat melalui kegiatan seni dan rekreasi, serta mendorong kearifan lokal dalam bentuk gerakan-gerakan masyarakat termasuk gerakan gotong royong. Dalam misi ini terkandung tujuan untuk menciptakan kehidupan masyarakat Sukoharjo yang aman dan nyaman, tanpa ada konflik sosial maupun agama, bahkan konflik SARA.

Misi yang dapat dijabarkan oleh Perangkat Daerah Kecamatan adalah Misi kesatu, yaitu "**Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Percepatan Reformasi Birokrasi**"

TELAAH VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

VISI : **MEWUJUDKAN MASYARAKAT SUKOHARJO YANG LEBIH MAKMUR.**

MISI 1	PROGRAM	TUSI OPD	PERMASALAHAN PELAYANAN OPD	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT
Mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik melalui percepatan reformasi birokrasi	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan publik	Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan	Masih ada sebagian jenis pelayanan administrasi kependudukan yang belum bisa dilayani ditingkat Kecamatan	Kapasitas dan kualitas aparatur serta sarana prasarana cukup memadai	Perlu penguatan regulasi dan kebijakan pelayanan administrasi kependudukan sampai di tingkat Kecamatan
	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Pengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat	Masih kurangnya kesadaran dan peran serta masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan wilayah Perlu peningkatan kualitas sarana dan prasarana di Desa khususnya jaringan Internet Desa	Mekanisme pemerintahan yang cukup baik Sumber pembiayaan cukup tersedia	Kesadaran warga masih perlu ditingkatkan Perlu penguatan kebijakan di tingkat desa
Mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik melalui percepatan reformasi birokrasi	Koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum	Pengkoordinasian Upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Pemahaman warga masyarakat tentang peraturan perundangan belum optimal.	Anggaran untuk kegiatan sosialisasi cukup memadai.	Kesadaran warga perlu ditingkatkan
		Pengkoordinasian penerapan dan penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	Masih perlu peningkatan peran serta warga terhadap penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Peran media social cukup efektif.	Sosialisasi peraturan perundangan masih Perlu ditingkatkan
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Belum terwujudnya sinkronisasi data sebagai dasar pengambilan kebijakan terkait dengan bantuan sosial. Perlu peningkatan upaya strategis dalam rangka penanganan pandemi covid 19 terutama dari aspek ekonomi, kesehatan dan sosial	Dukungan SDM dan Sarana prasarana Dukungan SDM , sarana prasarana dan pembiayaan	Perlu penguatan kebijakan antar unit kerja Perlu penguatan kebijakan di semua lini pemerintahan
	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Pembinaan dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa	Belum optimalnya kinerja aparatur Pemerintahan Desa	Peningkatan kesejahteraan aparatur pemerintah desa.	Paradigma pola kerja tradisional
	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan	Perlu peningkatan sinergitas antar unit kerja dalam pelayanan kepada warga masyarakat	Kualitas SDM dan sarana prasarana.	Perlu penguatan dari aspek regulasi

B. Tujuan dan Sasaran

1. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran/implementasi dari pernyataan visi dan misi Bupati Sukoharjo terpilih. Tujuan adalah sesuatu yang ingin dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu 1(satu)sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan yang akan dicapai oleh Perangkat Daerah Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo adalah sebagai berikut :

"Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel di Kecamatan Gatak"

2. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan. Sasaran yang akan diraih Perangkat Daerah Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo adalah :

a. Meningkatnya kualitas pelayanan Administrasi kepada masyarakat

Yang di jabarkan dalam beberapa Program antara lain :

1) PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
2) PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
3) PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

4) PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

5) PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

b. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Yang di jabarkan dalam beberapa Program antara lain :

1) PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan di Kecamatan Gatak tahun 2024 mencakup 6 program terdiri 14 kegiatan dan 52 sub kegiatan yaitu:

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   1) Peyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
   2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
   3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
   4) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
   5) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
   6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
   7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
   2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
   3) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
   4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
   5) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
   6) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
   1) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi
   2) Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
   1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
   2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
   4) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
   5) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
   6) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
   7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   1) Pengadaan Mebel
   2) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
   3) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
   4) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
   2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
   3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah
   1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
   2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operarional atau Lapangan
   3) Pemeliharaan Mebel
   4) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
   5) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
   6) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bsngunan Lainnya.

2. **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**
   a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
      1) Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
      2) Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
3. **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**
   a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
      1) Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
      2) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
   b. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
      1) Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan
      2) Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan
4. **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**
   a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
      1) Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
      2) Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
   b. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
      1) Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

5. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

1) Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

2) Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

6. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

a. Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

1) Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa

2) Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa

3) Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

4) Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa

5) Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

6) Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Gatak Tahun 2024 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Gatak Tahun 2024 dapat disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 4.1
Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Pagu Dana 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7.01	KECAMATAN GATAK				3.577.344.000
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	%	100%	3.003.294.000
7.01.01.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100%	25.000.000
7.01.01.2.01.0001	*Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	*Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah*	*dokumen*	*2*	*7.000.000*
7.01.01.2.01.0002	*Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD*	*Jumlah Dokumen RKA SKPD Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*	*dokumen*	*1*	*3.000.000*
7.01.01.2.01.0003	*Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD*	*Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen*	*dokumen*	*1*	*3.000.000*
7.01.01.2.01.0004	*Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD*	*Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD*	*dokumen*	*1*	*3.000.000*
7.01.01.2.01.0005	*Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD*	*Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD*	*dokumen*	*1*	*3.000.000*
7.01.01.2.01.0006	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	*Jumlah Dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	*laporan*	*5*	*3.000.000*
7.01.01.2.01.0007	*Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*Jumlah dokumen evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun*	*laporan*	*5*	*3.000.000*
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan Daerah Perangkat Daerah	%	100 %	2.071.468.000
7.01.01.2.02.0001	*Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	*Orang bulan*	*17*	*1.957.468.000*
7.01.01.2.02.0003	*Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD*	*Dokumen*	*12*	*107.000.000*
7.01.01.2.02.0004	*Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD*	*Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD akuntansi*	*Dokumen*	*12*	*3.000.000*
7.01.01.2.02.0005	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	*Laporan*	*5*	*2.000.000*
7.01.01.2.02.0007	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD*	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD*	*Laporan*	*12*	*3.000.000*
7.01.01.2.02.0008	*Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran*	*Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran*	*Dokumen*	*2*	*3.000.000*

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Pagu Dana 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi Kepegawaian Daerah**	**%**	**100**	**30.000.000**
7.01.01.2.05.0002	*Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi*	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*	*Paket*	*25*	*25.000.000*
7.01.01.2.05.0010	*Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan*	*Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan*	*Orang*	*30*	*5.000.000*
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**%**	**100**	**304.477.200**
7.01.01.2.06.0001	*Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor*	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	*Paket*	*1*	*10.000.000*
7.01.01.2.06.0002	*Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	*Paket*	*1*	*10.000.000*
7.01.01.2.06.0003	*Penyediaan Peralatan Rumah Tangga*	*Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan*	*Paket*	*1*	*15.000.000*
7.01.01.2.06.0004	*Penyediaan Bahan Logistik Kantor*	*Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan*	*Paket*	*2*	*219.477.200*
7.01.01.2.06.0005	*Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	*Paket*	*5*	*5.000.000*
7.01.01.2.06.0006	*Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan*	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*	*Dokumen*	*1*	*5.000.000*
7.01.01.2.06.0008	*Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*Laporan*	*350*	*40.000.000*
7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**%**	**100**	**75.000.000**
7.01.01.2.07.0005	*Pengadaan Mebel*	*Jumlah Mebel yang diadakan*	*unit*	*3*	*10.000.000*
7.01.01.2.07.0006	*Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan*	*unit*	*5*	*20.000.000*
7.01.01.2.07.0010	*Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	*Jumlah unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan*	*unit*	*5*	*25.000.000*
7.01.01.2.07.0011	*Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	*Jumlah unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan*	*unit*	*3*	*20.000.000*
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**%**	**100**	**327.348.800**
7.01.01.2.08.0001	*Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	*Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat*	*laporan*	*2.160*	*15.000.000*
7.01.01.2.08.0002	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik yang Disediakan*	*laporan*	*3*	*88.600.000*

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Pagu Dana 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7.01.01.2.08.0004	*Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*	*Jumlah SIM Pelayanan Umum yang disediakan*	*laporan*	*8*	*225.748.800*
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**%**	**100**	**170.000.000**
7.01.01.2.09.0001	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan*	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara/difasilitasi*	*unit*	*10*	*70.000.000*
7.01.01.2.09.0002	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara/difasilitasi*	*unit*	*1*	*10.000.000*
7.01.01.2.09.0005	*Pemeliharaan Mebel*	*Jumlah mebel yang dipelihara*	*unit*	*25*	*5.000.000*
7.01.01.2.09.0006	*Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	*Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara*	*unit*	*10*	*15.000.000*
7.01.01.2.09.0009	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya*	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi*	*unit*	*1*	*25.000.000*
7.01.01.2.09.0010	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	*Jumlah Sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi*	*unit*	*5*	*5.000.000*
7.01.01.2.09.0011	*Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	*Jumlah Sarana dan prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi*	*unit*	*2*	*80.000.000*
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**%**	**100**	**20.000.000**
7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**%**	**100**	**20.000.000**
7.01.02.2.02.0002	*Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan*	*Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan*	*Laporan*	*2*	*10.000.000*
7.01.02.2.02.0003	*Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	*Laporan*	*2*	*10.000.000*
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan**	**%**	**100**	**117.550.000**
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Cakupan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**%**	**100**	**25.000.000**

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Pagu Dana 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7.01.03.2.01.0001	*Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa*	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa*	*Lembaga kemasyarakatan*	*14*	*10.000.000*
7.01.03.2.01.0003	*Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	*Laporan*	*2*	*15.000.000*
7.01.03.2.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Cakupan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**%**	**100**	**92.550.000**
7.01.03.2.03.0001	*Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan*	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan*	*Lembaga kemasyarakatan*	*11*	*82.550.000*
7.01.03.2.03.0002	*Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan*	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya*	*Lembaga kemasyarakatan*	*14*	*10.000.000*
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase capaian ketentraman dan ketertiban umum**	**%**	**100**	**35.000.000**
7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Cakupan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**%**	**100**	**25.000.000**
7.01.04.2.01.0001	*Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan*	*Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan*	*laporan*	*2*	*10.000.000*
7.01.04.2.01.0002	*Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat*	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat*	*Laporan*	*2*	*15.000.000*
7.01.04.2.02	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**Cakupan Koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah**	**%**	**100**	**10.000.000**
7.01.04.2.02.0001	*Koordinasi Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia*	*Jumlah Laporan Koordinasi Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia*	*Laporan*	*2*	*10.000.000*
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum**	**%**	**100**	**316.000.000**
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Krpala Daerah**	**Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Krpala Daerah**	**%**	**100**	**316.000.000**
7.01.05.2.01.0001	*Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan*	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan*	*orang*	*70*	*150.000.000*

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Pagu Dana 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	*Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia*			
7.01.05.2.01.0008	*Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan*	*Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan*	*Dok*	*12*	*166.000.000*
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa**	**%**	**100**	**85,500,000**
7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**%**	**100**	**85,500,000**
7.01.06.2.01.02	*Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa*	*Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa*	*Dokumen*	*1*	*15.000.000*
7.01.06.2.01.03	*Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa*	*Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa*	*Dokumen*	*1*	*15.000.000*
7.01.06.2.01.06	*Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa*	*Jumlah dokumen fasilitasi dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa*	*Dokumen*	*1*	*10.500.000*
7.01.06.2.01.07	*Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Permusyawaratan Desa*	*Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa*	*Dokumen*	*1*	*10.000.000*
7.01.06.2.01.08	*Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa*	*Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa*	*Dokumen*	*1*	*15.000.000*
7.01.06.2.01.13	*Fasilitasi penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif*	*Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif*	*Dokumen*	*1*	*20.000.000*

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Gatak Tahun 2024 merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Gatak selama 1 (satu) tahun mendatang yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Gatak .

Renja SKPD Kecamatan Gatak Tahun 2024 yang telah disusun ini hendaknya dilaksanakan secara konsisten, transparansi, jujur, partisipatif, penuh tanggung jawab dan merupakan pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-SKPD) Kecamatan Gatak.

Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) SKPD Kecamatan Gatak Tahun 2024, Camat Gatak melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penjabaran Renja Kecamatan Gatak Tahun 2024 dalam bentuk Rencana Kerja dan Anggaran Kecamatan setiap Kegiatan dan Sub Kegiatan.

Dengan mengharap keridhoan Alloh SWT, Tuhan Yang Maha Esa, semoga Rencana Kerja yang telah dibuat bersama-sama ini dapat diwujudkan bersama, untuk mencapai tujuan akhir bersama yaitu : **"Mewujudkan masyarakat Sukoharjo Yang Lebih Makmur"**

Sukoharjo, Agustus 2023

CAMAT GATAK

KABUPATEN SUKOHARJO

PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
KECAMATAN GATAK

TRI WAHYUDI, SH.MM

NIP. 19720604 199803 1 004

KECAMATAN KARTASURA
KABUPATEN SUKOHARJO



RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA PD)

TAHUN 2024

KECAMATAN KARTASURA
Jl. Adi Soemarmo No. 68 Kartasura
Telp./Fax : (0271) 780673
Email : keckartasura@sukoharjokab.go.id
keckartasura@gmail.com
Website : kartasura.sukoharjokab.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan karunia-Nya, Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) Kecamatan Kartasura Tahun 2024 dapat kami susun. Penyusunan RENJA PD ini bertujuan untuk memberikan arah dalam menyusun Perencananan dan Pelaksanaan Program dan Kegiatan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun ke depan, yaitu tahun 2024. Pelaksanaan program dan kegiatan di Kecamatan Kartasura tersebut diarahkan untuk pencapaian keberhasilan pembangunan dan pencapaian program pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan sesuai dengan visi misi Kecamatan Kartasura sehingga pemerintahan yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien dapat terwujud.

Kami menyadari RENJA PD ini jauh dari sempurna, untuk itu saran dan koreksi sangat kami harapkan demi kesempurnaan RENJA PD ini dan keberlanjutan penyusunan diperiode berikutnya. Kami berharap apa yang terangkum dalam RENJA PD Kecamatan Kartasura Tahun 2024 ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Kartasura, 10 Agustus 2023
CAMAT KARTASURA

IKHWAN SAPTO DARMONO, S.Pd, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19681202 199403 1 007

SALINAN

BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 35 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024;

b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 273 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan Kepala Daerah setelah Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 192) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 262);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tatacara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 200);
13. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);
14. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 298);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

Renja Perangkat Daerah disusun dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Pasal 3

Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

BAB II

SISTEMATIKA DAN FUNGSI RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 4

Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. bab I : pendahuluan;
b. bab II : hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu;
c. bab III : tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
d. bab IV : rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan
e. bab V : penutup.

Pasal 5

Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah.

BAB II

PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 6

(1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah.
(2) Kepala Perangkat Daerah melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi Renja Perangkat Daerah kepada Bupati melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.

BAB III

PERANGKAT DAERAH PENYUSUN

Pasal 7

(1) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun oleh Perangkat Daerah sebagai berikut:
   a. Sekretariat Daerah;
   b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
   c. Inspektorat Daerah;
   d. Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan;
   e. Dinas Kesehatan;
   f. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang;
   g. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
   h. Satuan Polisi Pamong Praja;
   i. Dinas Sosial;

j. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak;
k. Dinas Pangan;
l. Dinas Lingkungan Hidup;
m. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil;
n. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa;
o. Dinas Perhubungan;
p. Dinas Komunikasi Dan Informatika;
q. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
r. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;
s. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
t. Dinas Pertanian dan Perikanan;
u. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah dan Perdagangan;
v. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
w. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
x. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
y. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
z. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
aa. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
bb. Kecamatan Weru;
cc. Kecamatan Bulu;
dd. Kecamatan Tawangsari;
ee. Kecamatan Sukoharjo;
ff. Kecamatan Nguter;
gg. Kecamatan Bendosari;
hh. Kecamatan Polokarto;
ii. Kecamatan Mojolaban;
jj. Kecamatan Grogol;
kk. Kecamatan Baki;
ll. Kecamatan Gatak; dan
mm. Kecamatan Kartasura.

(2) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf mm tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 10 Agustus 2023

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 10 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd.

WIDODO

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2023 NOMOR 35

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ditandatangani secara elektronik oleh :

TEGUH PRAMONO, SH, MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19710429 199803 1 003

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 35 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN
SUKOHARJO TAHUN 2024

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2024

Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 terdiri atas:

1. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Inspektorat Daerah;
4. Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan;
5. Dinas Kesehatan;
6. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang;
7. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
8. Satuan Polisi Pamong Praja;
9. Dinas Sosial;
10. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak;
11. Dinas Pangan;
12. Dinas Lingkungan Hidup;
13. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil;
14. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa;
15. Dinas Perhubungan;
16. Dinas Komunikasi Dan Informatika;
17. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
18. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;
19. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
20. Dinas Pertanian dan Perikanan;
21. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah dan Perdagangan;
22. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
23. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
24. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
25. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
26. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
27. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
28. Kecamatan Weru;
29. Kecamatan Bulu;

30. Kecamatan Tawangsari;
31. Kecamatan Sukoharjo;
32. Kecamatan Nguter;
33. Kecamatan Bendosari;
34. Kecamatan Polokarto;
35. Kecamatan Mojolaban;
36. Kecamatan Grogol;
37. Kecamatan Baki;
38. Kecamatan Gatak; dan
39. Kecamatan Kartasura.

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iii
DAFTAR TABEL iv
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 4
B. Landasan Hukum 1
C. Maksud dan Tujuan 9
D. Sistematika Penulisan 9
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KECAMATAN KARTASURA TAHUN 2023..... 12
A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Kartasura Tahun 2023 dan Capaian Renstra Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo..... 12
B. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo..... 31
C. Isu Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Katasura Kabupaten Sukoharjo..... 33
BAB III TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH..... 36
A. Telaahan Terhadap Kebijakan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo..... 36
B. Tujuan dan Sasaran..... 45
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 47
A. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah..... 47
BAB V PENUTUP 61

DAFTAR GAMBAR DAN TABEL

Gambar 1.1	Skema Rencana Pembangunan Pusat dan Daerah	2
Gambar 1.2	Alur Penyusunan RKPD dan Rencana Kerja Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo	9
Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Kartasura Tahun 2022 dan 2023.....	13
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Kartasura.....	32
Tabel 3.1	Telaah Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	44
Tabel 4.1	Rencana Pendanaan Kecamatan Kartasura Tahun 2024.....	52

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

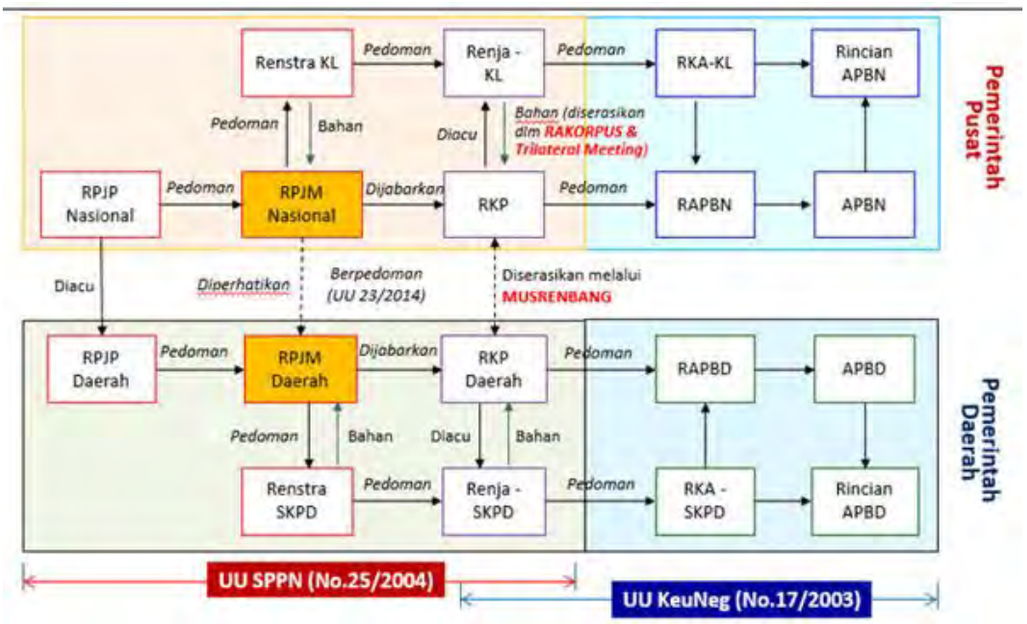
Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, telah diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan nomenklatur urusan sampai dengan sub kegiatan yang sudah ditentukan. RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dimana dalam penyusunan RKPD diperlukan masukan dari Perangkat Daerah berupa Rencana Kerja Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah berjangka 1 (satu) tahun yang memuat kondisi pelayanan Perangkat Daerah, gambaran visi dan misi serta rencana pembangunan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun yang akan datang.

Renja Perangkat Daerah juga merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran RPJMD oleh Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan oleh Perangkat Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan jangka waktu RPJMD. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renja Perangkat Daerah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Perangkat Daerah berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta

urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo untuk periode Tahun 2024 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Sukoharjo dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun di Tahun 2024.

Renja Kecamatan Kartasura Tahun 2024 memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah pembangunan nasional, provinsi, dan mendukung arah perencanaan pembangunan daerah. Adapun Keterkaitan hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan yang ada pada Renja Kecamatan Kartasura Tahun 2024 dapat dilihat pada gambar 1.1 :



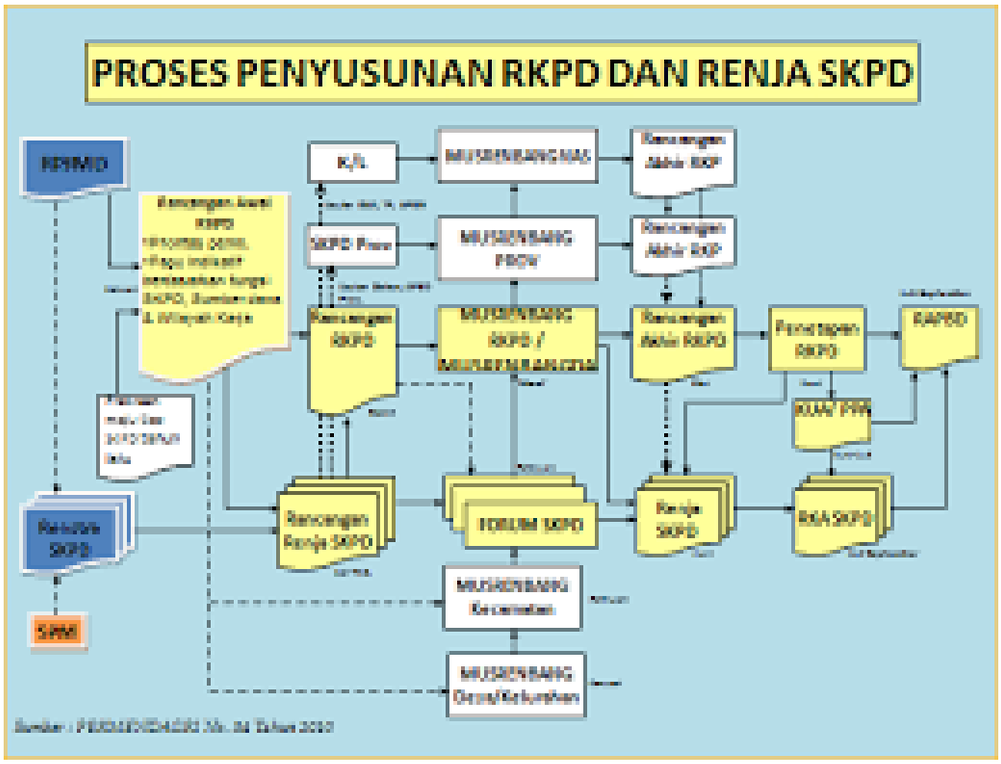
Gambar 1.1
Skema Rencana Pembangunan Pusat dan Daerah

RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Nasional, yang memuat strategi pembangunan Nasional, kebijakan umum, program Kementerian/Lembaga dan lintas

Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Pasal 263 ayat 2 UU No. 23 Tahun 2014 RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan rencana tata ruang wilayah. Pasal 263 ayat 3 UU No. 23 Tahun 2014 RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.

Adapun penyusunan Renja Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 dilakukan melalui 5 (lima) pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan yaitu pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (top-down), dan bawah-atas (bottom-up). Kelima pendekatan dimaksud diselenggarakan secara berkelanjutan untuk membentuk satu siklus perencanaan yang utuh sebagai berikut (Gambar 1.2) :



Gambar 1.2
Alur Penyusunan RKPD dan Rencana Kerja
Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo

Berdasarkan Bagan Alur tersebut penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Kartasura merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD) Tahun 2021 – 2026. Selain itu Proses penyusunan Renja Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo merupakan dokumen yang tidak berdiri sendiri melainkan dilakukan melalui beberapa tahapan, yakni diawali dengan mereview Rensta, Penyusunan Rancangan Renja, dan Penetapan Renja. Ketiga tahapan dimaksud diselenggarakan secara berkelanjutan untuk menghasilkan dokumen penganggaran yaitu RKA/DPA dan dituangkan dalam dokumen APBD Kabupaten Sukoharjo.

B. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renja Kecamatan Kartasura Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4817);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah

Provinsi Jawa Tengah Nomor 65) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);

14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 174);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 192) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran

Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 262);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tatacara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 200);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
20. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 298);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Nomor).

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud penyusunan Renja Kecamatan Kartasura Tahun 2024 adalah :
   a. Memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan serta pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Kartasura Tahun 2024
   b. Sebagai acuan dan pedoman pelaksanaan Program/ Kegiatan Kecamatan Kartasura pada Tahun 2024
2. Tujuan penyusunan Renja Kecamatan Tahun 2024 adalah :
   a. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2024 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
   b. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Kartasura selama kurun waktu 1 tahun yaitu Tahun 2024;
   c. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan Kecamatan Kartasura Tahun 2024;
   d. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program dan kegiatan Kecamatan Kartasura Tahun 2024; dan
   e. Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Kartasura Tahun 2024.

D. Sistematika Penulisan

Adapun sitematika penulisan dalam penyajian Renja Kecamatan Kartasura Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja SKPD, proses penyusunan Renja SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen RKPD, Renstra SKPD, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/ Kabupaten, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan APBD

B. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD

C. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja SKPD

D. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta susunan garis besar isi

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN KARTASURA TAHUN 2023

A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Kartasura Tahun 2023 dan Capaian Renstra Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun n-1) dan perkiraan capaian tahun berjalan, mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target renstra SKPD berdasarkan realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun sebelumnya.

B. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo

Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan Indikator Kinerja yang sudah ditetapkan dalam SPM maupun terhadap IKK. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

C. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo

Berisi uraian mengenai sejauhmana tingkat kinerja pelayanan Kecamatan Kartasura dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah dan permasalahan/hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

A. Telaahan Terhadap Kebijakan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo

Penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah, visi misi Kepala Daerah serta yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD

B. Tujuan dan Sasaran

Berisi perumusan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisi uraian garis besar mengenai rekapitulasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan Kecamatan Kartasura Tahun 2024

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KECAMATAN KARTASURA TAHUN 2023

A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Kartasura Tahun 2023 dan Capaian Renstra Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo

Dalam melakukan penyusunan Renja Kecamatan Kartasura Tahun 2024, diperlukan adanya evaluasi atas pelaksanaan Renja Kecamatan Kartasura Tahun 2023 terhadap capaian renstra Kecamatan Kartasura Tahun 2021-2026, serta evaluasi terhadap proyeksi capaian Renja untuk tahun berjalan yaitu Tahun 2023. Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi sampai dengan tahun 2023 dan target akhir Renstra tahun 2021-2026.

Evaluasi terhadap capaian Renstra Kecamatan Kartasura Tahun 2021-2026 telah dapat dilakukan, dimana capaian kinerja Tahun 2023 sebagai tahun kedua pelaksanaan Renstra Kecamatan Kartasura 2021-2026 telah dapat diketahui. Adapun hasil evaluasi adalah sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

TABEL 2.1

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA

KECAMATAN KARTASURA

TAHUN 2022 dan 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Target Akhir Renstra	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan					
7					UNSUR KEWILAYAHAN								
7	01				KECAMATAN					50.008.840.000	8.245.213.339	8.985.076.000	9.385.076.000
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					169.000.000	25.838.700	23.000.000	23.000.000
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Cakupan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Kartasura	70.000.000	7.839.500	5.000.000	5.000.000
7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Presentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Cakupan Peyusunan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Kartasura	16.500.000	2.999.800	3.000.000	3.000.000

7	01	01	2.01	00 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Presentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Cakupan Peyusunan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Kartasura	16.500.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
7	01	01	2.01	00 04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Presentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Cakupan Peyusunan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Kartasura	16.500.000	2.999.500	3.000.000	3.000.000
7	01	01	2.01	00 05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Presentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Cakupan Peyusunan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Kartasura	16.500.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
7	01	01	2.01	00 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Presentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusuanan	Cakupan Peyusunan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Kartasura	16.500.000	2.999.900	3.000.000	3.000.000

							Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						
7	01	01	2.01	00 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Peyusunan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Kartasura	16.500.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					26.159.190.000	4.141.884.674	4.349.953.000	4.349.953.000
7	01	01	2.02	00 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Presentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Kartasura	24.418.806.000	3.869.900.774	4.040.649.000	4.040.649.000
7	01	01	2.02	00 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Presentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Kartasura	1.674.384.000	261.984.000	299.304.000	299.304.000
7	01	01	2.02	00 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Presentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Kartasura	16.500.000	2.499.900	2.500.000	2.500.000

7	01	01	2.02	00 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Presentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Kartasura	16.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
7	01	01	2.02	00 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Presentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Kartasura	16.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
7	01	01	2.02	00 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Presentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Kartasura	16.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					577.750.000	34.750.000	22.550.000	22.550.000
7	01	01	2.05	00 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Presentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kecamatan Kartasura	222.750.000	0	17.550.000	17.550.000

7	01	01	2.05	00 05	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Presentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokuemn Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kecamatan Kartasura	25.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
7	01	01	2.05	00 11	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Presentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kecamatan Kartasura	330.000.000	0	0	0
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					1.448.000.000	280.915.054	381.522.000	381.522.000
7	01	01	2.06	00 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Presentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Kartasura	60.000.000	17.436.850	14.000.000	14.000.000
7	01	01	2.06	00 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Presentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah yang disediakan	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Kartasura	180.000.000	35.498.334	35.500.000	35.500.000
7	01	01	2.06	00 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Presentase Pelaksanaan	Jumlah Paket Bahan Logistik	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Kartasura	822.000.000	153.314.370	127.429.000	127.429.000

						Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kantor Yang Disediakan						
7	01	01	2.06	00 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Presentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Kartasura	108.000.000	21.142.500	24.153.000	24.153.000
7	01	01	2.06	00 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Presentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Kartasura	48.000.000	8.060.000	8.640.000	8.640.000
7	01	01	2.06	00 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Presentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Kartasura	270.000.000	45.463.000	171.800.000	171.800.000
7	01	01	2.07		Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					1.684.140.000	195.829.000	122.573.000	122.573.000
7	01	01	2.07	00 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Presentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Pengadaan Kendaraan Dinas yang Disediakan	Cakupan Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Kartasura	250.000.000	0	0	0
7	01	01	2.07	00 05	Pengadaan Mebel	Presentase Pelaksanaan	Jumlah Paket Mebel Yang Disediakan	Cakupan Pengadaan BMD	Kecamatan Kartasura	60.000.000	64.264.000	33.612.000	33.612.000

						Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					
7	01	01	2.07	00 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Presentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Cakupan Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Kartasura	120.000.000	131.565.000	88.961.000	88.961.000
7	01	01	2.07	00 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Presentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang Disediakan	Cakupan Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Kartasura	1.134.140.000	0	0	0
7	01	01	2.07	00 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Presentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Cakupan Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Kartasura	60.000.000	0	0	0
7	01	01	2.07	00 11	Pengadaan Sarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Presentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Sarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Cakupan Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Kartasura	60.000.000	0	0	0
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1,533,600,000	371.798.384	493.577.000	493.577.000
7	01	01	2.08	00 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Presentase Pelaksanaan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan Penyediaan Jasa	Kecamatan Kartasura	132.000.000	17.530.000	20.500.000	20.500.000

						Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					
7	01	01	2.08	00 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Presentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Kartasura	738.000.000	94.738.384	154.200.000	154.200.000
7	01	01	2.08	00 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Presentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Kartasura	1.203.240.000	259.530.000	318.877.000	318.877.000
7	01	01	2.09		Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					900.000.000	334.560.345	759.809.000	759.809.000
7	01	01	2.09	00 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Presentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Cakupan pemeliharaan BMD di Lingkungan Kecamatan	Kecamatan Kartasura	480.000.000	64.914.54	76.250.000	76.250.000
7	01	01	2.09	00 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	Presentase Pelaksanaan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cakupan pemeliharaan BMD	Kecamatan Kartasura	60.000.000	7.825.000	10.000.000	10.000.000

					Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	di Lingkungan Kecamatan					
7	01	01	2.09	00 05	Pemeliharaan Mebel	Presentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Cakupan pemeliharaan BMD di Lingkungan Kecamatan	Kecamatan Kartasura	30.000.000	7.920.000	6.000.000	6.000.000
7	01	01	2.09	00 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Presentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Cakupan pemeliharaan BMD di Lingkungan Kecamatan	Kecamatan Kartasura	90.000.000	28.528.000	25.000.000	25.000.000
7	01	01	2.09	00 09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Presentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Cakupan pemeliharaan BMD di Lingkungan Kecamatan	Kecamatan Kartasura	240.000.000	225.372.800	642.559.000	642.559.000
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								
7	01	02	2.01		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**					30.000.000	0	5.000.000	5.000.000
7	01	02	2.01	00 01	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di	Cakupan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Kartasura	30.000.000	0	5.000.000	5.000.000

							Tingkat Kecamatan						
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan					112.490.000	9.159.850	10.000.000	10.000.000
7	01	02	2.02	00 02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di kecamatan	Kecamatan Kartasura	56.245.000	0	0	0
7	01	02	2.02	00 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan	Kecamatan Kartasura	56.245.000	9.159.850	10.000.000	10.000.000
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa					260.000.000	32.484.500	30.000.000	30.000.000
7	01	03	2.01	00 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase Pemberdayaan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi	Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kecamatan Kartasura	90.000.000	12.484.800	10.000.000	10.000.000

						Masyarakat Desa dan Kelurahan	dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa						
7	01	03	2.01	00 02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kecamatan Kartasura	60,000,000	9.999.900	10.000.000	10.000.000
7	01	03	2.01	00 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kecamatan Kartasura	110.000.000	9.999.800	10.000.000	10.000.000
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					13.041.520.000	2.597.405.250	2.202.592.000	2.202.592.000

7	01	03	2.02	00 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kecamatan Kartasura	60.000.000	9.988.000	10.000.000	10.000.000
7	01	03	2.02	00 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kecamatan Kartasura	7.591.420.000	1.275.083.500	1.044.094.000	1.044.094.000
7	01	03	2.02	00 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kecamatan Kartasura	5.390.100.000	1.312.333.750	1.148.498.000	1.148.498.000
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan					440.000.000	111.950.275	150.000.000	150.000.000
7	01	03	2.03	00 01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Persentase Pemberdayaan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan	Kecamatan Kartasura	475.000.000	91.950.675	130.000.000	130.000.000

						Masyarakat Desa dan Kelurahan	Yang Diselenggarakan	Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan					
7	01	03	2.03	00 02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Yang Ditingkatakan Kapasitasnya	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Kartasura	60.000.000	19.999.600	20.000.000	20.000.000
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum					120.000.000	18.999.700	20.000.000	20.000.000
7	01	04	2.01	00 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase Capaian ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertilkal di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Kartasura	60.000.000	9.249.900	10.000.000	10.000.000
7	01	04	2.01	00 02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Persentase Capaian	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi	Terlaksananya kegiatan Koordinasi Upaya	Kecamatan Kartasura	60.000.000	9.749.800	10.000.000	10.000.000

						ketentraman dan ketertiban umum	Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum					
7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah					825.180.000	36.789.900	37.000.000	37.000.000
7	01	04	2.02	00 01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Persentase Capaian ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Terlaksananya kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penagakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kecamatan Kartasura	825.180.000	36.789.900	37.000.000	37.000.000
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM								
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah					1.652.860.000	365.024.600	322.500.000	322.500.000
7	01	05	2.01	00 01	Pembinaan Wawasan Kebangsasn dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-undang Dasar	Cakupan Penyelenggaraan Urusan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	Kecamatan Kartasura	812.860.000	189.969.800	150.000.000	150.000.000

					Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Pemerintahan Umum	Kebangsasn dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah					
7	01	05	2.01	00 02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Orang Yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi)	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai	Kecamatan Kartasura	60.000.000	9.999.800	10.000.000	10.000.000

							Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Penugasan Kepala Daerah					
7	01	05	2.01	00 08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Kartasura	780.000.00	165.055.000	162.500.000	162.500.000
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA								
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					380.470.000	53.736.500	55.000.000	55.000.000
7	01	06	2.01	00 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi Dalam Rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Kartasura	60.000.000	9.674.050	10.000.000	10.000.000
7	01	06	2.01	00 03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi Dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan	Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan	Kecamatan Kartasura	60.000.000	9.999.800	10.000.000	10.000.000

							Pendayagunaan Aset Desa	Pengawasan Pemerintahan Desa					
7	01	06	2.01	00 07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi Dalam Rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi, Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Kecamatan Kartasura	100.470.000	9.999.900	10.000.000	10.000.000
7	01	06	2.01	00 08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Kartasura	40.000.000	4.999.800	5.000.000	5.000.000
7	01	06	2.01	00 09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi Dalam Rangka Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembanguna Desa	Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Kartasura	60.000.000	9.269.950	10.000.000	10.000.000

7	01	06	2.01	00 13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi Dalam Rangka Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Kartasura	60.000.000	9.793.000	10.000.000	10.000.000

B. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo

Kinerja pelayanan Kecamatan Kartasura didasarkan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 – 2026, dalam rangka mendukung pada : Misi 1 RPJMD : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik melalui Percepatan Reformasi Birokrasi. Misi ini memiliki tujuan : Terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel. Sasaran yang ingin dihasilkan dalam rangka mencapai tujuan tersebut adalah : Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat dan meningkatnya kualitas aparatur dan pelayanan publik

Kinerja Pelayanan pada Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo menunjukkan tingkat capaian kinerja Kecamatan Kartasura berdasarkan sasaran/target Renstra Kecamatan Kartasura tahun 2021-2026 sebagaimana disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Kartasura

No	Indikator	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target						Ket
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	82.61	83	83.5	84	84.5	85	85.5	
2	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	50	50	50	62	65	70	72	

C. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo

Isu-Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang diperhatikan dalam perencanaan pembangunan selama 5 (Lima) tahun dalam melaksanakan atau menyelenggarakan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Kartasura kepada masyarakat. Analisa isu-isu strategis di identifikasikan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Kartasura dalam menjalankan pemerintahan ada berbagai permasalahan, sebagai berikut :

1. Bidang Sekretariat

a. Masih kurangnya sumber daya dan keterampilan pegawai dalam mengoperasikan sarana dan prasarana komputer di wilayah Kecamatan Kartasura sehingga memperlambat kinerja kegiatan administrasi perkantoran, untuk meningkatkan kinerja kegiatan administrasi perlu adanya pelatihan dalam mengoperasikan computer;

b. Kurangnya personil di bagian sekretariat Kantor Kecamatan Kartasura, sehingga banyak tenaga yang merangkap tugas lain, untuk meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat perlu adanya tambahan personil ;

c. Kecamatan sebagai Perangkat Daerah yang belum diberikan kewenangan penuh untuk mengajukan dan mengelola anggaran Perangkat Daerah, kewenagan Kecamatan hanya sebatas pengelolaan Gaji pegawai dan biaya operasional Kecamatan. Sedangkan pengelolaan anggaran pembangunan masih melalui Perangkat Daerah terkait ;

2. Bidang Pemerintahan

Kurangnya personil pengelolaan data pemerintahan umum, pengelolaan data Pemerintahan Desa, pengelola data

kependudukan dan pertanahan sehingga untuk meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat perlu adanya tambahan personil dan tenaga operasional;

3. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

a. Kurangnya personil pengelolaan pemberdayaan masyarakat dan pengelola partisipasi masyarakat, sehingga untuk meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat perlu adanya tambahan personil dan tenaga operasional;

b. Kurangnya pemerataan pembangunan wilayah Desa; 3) Belum optimalnya peranserta dan swadaya masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan wilayah ;

c. Tingginya kerusakan infrastruktur wilayah desa seperti jalan desa, jalan lingkungan, sanitasi lingkungan masih rendah.

4. Bidang Keamanan dan Kenyamanan lingkungan

a. Kurangnya personil pengelolaan pendidikan, kebudayaan dan kesehatan, pengelola keamanan dan ketertiban dan pengelola kesejahteraan sosial, sehingga untuk meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat perlu adanya tambahan personil dan tenaga operasional;

b. Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang hukum;

c. Kurangnya personil Linmas di masing – masing Desa dan Linmas yang ada belum berjalan secara maksimal;

d. Kurangnya sarana dan prasarana Kamtibmas di Kantor Kecamatan Kartasura;

5. Bidang Ekonomi dan Pembangunan

a. Kurangnya personil pengelolaan pengendalian monitoring dan evaluasi pembangunan dan pengelola pendaftaran dan pendataan pajak/retrebusi, sehingga untuk meningkatkan

kinerja pelayanan masyarakat perlu adanya tambahan personil dan tenaga operasional;

b. Pembangunan Infrastruktur di Kecamatan Kartasura sudah cukup baik, namun hal ini perlu ditingkatkan keberadaannya, khususnya untuk peningkatan pembangunan jalan desa yang sudah secara bertahap dilakukan pembangunan melalui berbagai program pembangunan. Masalah pembangunan jalan di wilayah Kecamatan Kartasura terkendala dengan cepatnya usia fisiknya, karena struktur tanah yang mudah bergerak, kualitas yang kurang baik dan pada lokasi tertentu sering tergenang air sehingga usia teknis menjadi pendek ;

c. Kurangnya personil di bagian Ekonomi dan Pembangunan Kantor Kecamatan Kartasura, sehingga banyak tenaga yang merangkap tugas lain, untuk meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat perlu adanya tambahan personil;

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

A. Telaahan Terhadap Kebijakan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo

Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan yang ada di Kabupaten Sukoharjo, agar lebih terarah dan berhasil guna serta berdaya guna, maka pemerintah bersama-sama masyarakat Kabupaten Sukoharjo telah menetapkan visi, misi dan strategi dalam mencapai tujuannya yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 - 2026.

1. VISI

Visi pembangunan Kabupaten Sukoharjo tahun 2021-2026 merupakan implementasi dari visi Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo periode tahun 2021-2026 yaitu:

“Mewujudkan masyarakat Sukoharjo Yang Lebih Makmur”

Visi pembangunan daerah Kabupaten Sukoharjo tahun 2021-2026 merupakan keberlanjutan dari cita-cita pembangunan Kabupaten Sukoharjo tahun 2016-2020.

Mengandung arti bahwa dalam lima tahun ke depan masyarakat Kabupaten Sukoharjo akan tercipta kondisi sejahtera, terpenuhi seluruh kebutuhan hidupnya baik sosial maupun ekonomi, secara lahir maupun batin. MAKMUR juga merupakan motto atau slogan Kabupaten

Sukoharjo yaitu **Maju, Aman, Konstitusional**, **Mantap, Unggul, dan Rapi.**

MAJU

Maju mempunyai pengertian bergerak kedepan menjadi lebih baik, tidak berhenti, tidak terlambat, mencapai tingkat peradaban yang lebih tinggi.Sebagai tugas panggilan dalam hidup. Dengan maju kita ingin tumbuh dan berkembang, dan selalu berpikr dan berusaha keras kearah peningkatan menjadi lebih baik.

AMAN

Keamanan merupakan salah satu unsur/syarat mutlak untuk dapat terlaksananya pembangunan.Tanpa stabilitas keamanan yang terpelihara secara mantap dan berkesinambungan, tidak mungkin kegiatan pembangunan dapat terlaksana dengan lancar.

KONSTITUSIONAL

Penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, maupun kemasyarakatan harus dilandasi hukum atau dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum.

MANTAP

Warga masyarakat dan segenap penyelenggara pemerintahan optimis dalam membangun Sukoharjo.

UNGGUL

Unggul mempunyai arti semangat berprestasi untuk selalu berusaha mencapai yang terbaik.

RAPI

Rapi mengandung pengertian apik, baik, bersih, teratur, tertib, beres.

2. MISI

Dalam rangka upaya menuju pencapaian visi pembangunan daerah Kabupaten Sukoharjo tahun 2021-2026, ditetapkan misi pembangunan daerah yaitu:

a. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Percepatan Reformasi Birokrasi

Misi kesatu ini bertujuan untuk semakin mempercepat implementasi reformasi birokrasi secara optimal, yang pada periode sebelumnya telah terwujud dalam membaiknya tata kelola pemerintahan Kabupaten Sukoharjo.

Reformasi birokrasi yang diharapkan kedepan adalah pada tiga dimensi utama yaitu pelayanan publik yang semakin dinamis, efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan, kapasitas kelembagaan, serta manajemen sumber daya manusia aparatur yang semakin baik.Pelayanan publik yang dinamis diwujudkan dengan membangun open government dan pemerintahan yang responsif. Open government dilakukan dengan perkuatan keterbukaan informasi publik, transparansi, partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta meningkatkan komunikasi dan serapan aspirasi publik.

Sedangkan pemerintahan yang responsif tercermin dalam respon pemerintah kabupaten dalam menghadapi aduan dan persoalan riil masyarakat, dengan cepat dan tepat, baik dalam bentuk kebijakan maupun kegiatan.Pelayanan publik yang dinamis, terbuka, dan responsif diikat dalam satu tagline pelayanan yang mudah, murah, cepat, serta didukung inovasi dan teknologi informasi.

Efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan tergambarkan dalam proses perencanaan, penganggaran, serta evaluasi pembangunan yang akuntabel. Manajemen pembangunan Kabupaten Sukoharjo kedepan tidak hanya fokus pada kerja tetapi kinerja, dan berorientasi pada hasil (outcome). Untuk itu perlu juga dilakukan pengawasan dalam prosesnya, sejak dimulainya proses perencanaan, implementasi hingga evaluasi.

Agar dapat melaksanakan manajemen pemerintahan yang baik dan bersih maka dibutuhkan kelembagaan/organisasi yang tepat dan didukung dengan penataan sistem manajemen sumberdaya manusia aparatur yang baik.Manajemen sumber daya manusia aparatur yang baik terejawantahkan dalam bentuk integritas aparatur yang dibangun melalui kompetensi dan etika menuju integritas pribadi dan

institusi, mendorong birokrasi yang inovatif, dan dijamin dalam quality assurance aparatur.

2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas

Misi kedua mengarah pada kualitas dan daya saing sumberdaya manusia Sukoharjo, agar semakin sehat, pintar, berbudaya, dan lebih mencintai lingkungan.Era globalisasi yang semakin terbuka menuntut kualitas sumberdaya manusia yang mampu bersaing secara kompetitif dalam kompetensi dan kualifikasi. Bonus demografi yang saat ini telah dialami oleh Sukoharjo dapat dijadikan sebagai peluang sekaligus tantangan, bagaimana kedepan modal sosial ini akan menempatkan Sukoharjo sebagai salah satu daerah dengan sumberdaya manusia yang mampu bersaing. Sehingga diharapkan, dapat memberikan dampak pertumbuhan ekonomi yang semakin baik, dan menciptakan masyarakat Sukoharjo yang semakin sejahtera.

Tidak hanya tentang kualitas dan daya saing sumberdaya manusia yang diharapkan, namun juga bagaimana membentuk karakter masyarakat Sukoharjo yang semakin berbudaya. Di tengah arus keterbukaan informasi dunia yang nyata kemudian bagaimana masyarakat Sukoharjo tetap kuat menjaga etika dan

norma serta nilai budaya asli Sukoharjo, serta menjaga kearifan lokal sejak dini.

3. **Memperkuat Perekonomian Rakyat Yang Berdaya Saing Tinggi**

Misi ketiga ini mempunyai tujuan mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan insklusif.Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang penting dalam melakukan pembangunan ekonomi yang terjadi pada suatu negara ataupun daerah.Pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan distribusi pendapatan yang merata sangat dibutuhkan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah diukur dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan laju pertumbuhannya atas dasar harga konstan. Pertumbuhan ekonomi yang cepat akan menimbulkan ketimpangan distribusi pendapatan. Hal ini disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang bersifat sentralisasi. Pada tahun 1999 pemerintah mengubah kebijakan sentralisasi menjadi desentralisasi dengan memberlakukan Otonomi Daerah. Hal tersebut memberikan harapan dalam upaya mengurangi tingkat kemiskinan dan ketimpangan antar daerah.

Misi ini adalah untuk mengarahkan kebijakan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam rangka

menurunkan jumlah penduduk miskin, yang didukung oleh perekonomian daerah yang stabil, berkualitas, inklusif, dan menyebar. Program pengentasan kemiskinan difokuskan kepada kelompok sasaran utama, seperti petani pelaku UKM dan pekerja dan kelompok rentan lainnya. Program pengentasan kemisikinan tersebut perlu didukung oleh pertumbuhan ekonomi yang tersebar, inklusif, dan berkualitas, yakni pertumbuhan ekonomi yang menyebar di seluruh wilayah Sukoharjo, memperhitungkan kelestarian lingkungan dan keberlangsungan ketersediaan sumber daya, melibatkan seluruh kelompok masyarakat dengan mengutamakan peran dan kontribusi kelompok masyarakat yang kurang beruntung, dan menghapus praktek ekonomi biaya tinggi.

4. Memperkuat Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan

Misi keempat mengarah kepada pembangunan infrastruktur akan terus dilaksanakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar, yang akan dilaksanakan dengan penguatan konektivitas, penyediaan akses perumahan, permukiman, air minum dan sanitasi yang layak, telekomunikasi dan transportasi yang aman dan memadai.

Pembangunan berwawasan lingkungan hidup dilakukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan meningkatkan kualitas hidup manusia.Untuk menjaga kelestarian lingkungan agar kualitas lingkungan hiudp tetap terjaga, pemanfaatan sumber daya alam harus dilakukan secara bijaksana, adil, efisien, dan bertanggungjawab serta lingkungan yang tangguh bencana.

5. Meningkatkan Kualitas Kehidupan Sosial dan Keagamaan

Misi ini menggambarkan sebuah kondisi yang ingin diciptakan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera, tercermin dari rasa aman dan nyaman yang dirasakan dalam kehidupan masyarakat.Kondisi yang tercipta merupakan manifestasi implementasi nilai-nilai religius dalam kehidupan masyarakat. Membangun masyarakat Sukoharjo yang religius, toleran, dan guyup ini adalah dengan menciptakan kondisi obyektif yang memungkinkan interaksi antar umat beragama untuk saling menghormati dan menghargai satu sama lain, mendorong keberagaman, kebhinekaan, dan toleransi dalam kerangka kesatuan.

Upaya yang dilakukan antara lain dengan menguatkan pemahaman keberagaman dan kebhinekaan sejak usia dini, mengembangkan ruang-ruang publik untuk membangun komunikasi antar

masyarakat melalui kegiatan seni dan rekreasi, serta mendorong kearifan lokal dalam bentuk gerakan-gerakan masyarakat termasuk gerakan gotong royong. Dalam misi ini terkandung tujuan untuk menciptakan kehidupan masyarakat Sukoharjo yang aman dan nyaman, tanpa ada konflik sosial maupun agama, bahkan konflik SARA.

Misi yang dapat dijabarkan oleh Perangkat Daerah Kecamatan adalah Misi kesatu, yaitu "**Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Percepatan Reformasi Birokrasi"**

Tabel 3.1

TELAAH VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

VISI : MEWUJUDKAN MASYARAKAT SUKOHARJO YANG LEBIH MAKMUR

MISI 1	PROGRAM	TUSI OPD	PERMASALAHAN PELAYANAN OPD	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT
Mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik melalui percepatan reformasi birokrasi	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan publik	Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan	Masih ada sebagian jenis pelayanan administrasi kependudukan yang belum bisa dilayani ditingkat Kecamatan	Kapasitas dan kualitas aparatur serta sarana prasarana cukup memadai	Perlu penguatan regulasi dan kebijakan pelayanan administrasi kependudukan sampai di tingkat Kecamatan
	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kalurahan	Pengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat	Masih kurangnya kesadaran dan peran serta masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan wilayah Perlu peningkatan kualitas sarana dan prasarana di Desa khususnya jaringan Internet Desa	Mekanisme perencannaan yang cukup baik Sumber pembiayaan cukup tersedia	Kesadaran warga masih perlu ditingkatkan Perlu penguatan kebijakan di tingkat desa
Mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik melalui percepatan reformasi birokrasi	Koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum	Pengkoordinasian Upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Pemahaman warga masyarakat tentang peraturan perundangan belum optimal.	Anggaran untuk kegiatan sosialisasi cukup memadai.	Kesadaran warga perlu ditingkatkan
		Pengkoordinasian penerapan dan penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	Masih perlu peningkatan peran serta warga terhadap penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Peran media social cukup efektif.	Sosialisasi peraturan perundangan masih Perlu ditingkatkan

	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Belum terwujudnya sinkronisasi data sebagai dasar pengambilan kebijakan terkait dengan bantuan sosial. Perlu peningkatan upaya strategis dalam rangka penanganan pandemi covid-19 terutama dari aspek ekomoni, kesehatan dan sosial	Dukungan SDM dan Sarana prasarana Dukungan SDM , sarana prasarana dan pembiayaan	Perlu penguatan kebijakan antar unit kerja Perlu penguatan kebijakan di semua lini pemerintahan
	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Pembinaan dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa	Belum optimalnya kinerja aparatur Pemerintahan Desa	Peningkatan kesejahteraan aparatur pemerintah desa.	Paradigma pola kerja tradisional.
	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan	Perlu peningkatan sinergitas antar unit kerja dalam pelayanan kepada warga masyarakat	Kualitas SDM dan sarana prasarana.	Perlu penguatan dari aspek regulasi

B. Tujuan dan Sasaran

1. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran/implementasi dari pernyataan visi dan misi Bupati Sukoharjo terpilih. Tujuan adalah sesuatu yang ingin dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan yang akan dicapai oleh Perangkat Daerah Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo adalah sebagai berikut :

“Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel di Kecamatan Kartasura“

2. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan oleh instansi pemerintah

dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan. Sasaran yang akan diraih Perangkat Daerah Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo adalah :

a. Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat

   Yang di jabarkan dalam beberapa Program antara lain :

   1) PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
   2) PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
   3) PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
   4) PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
   5) PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

b. Meningkatnya kualitas aparatur dan pelayanan publik

   Yang di jabarkan dalam beberapa Program antara lain :

   1) PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

A. Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah

Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan di Kecamatan Kartasura tahun 2024 mencakup 6 program terdiri 16 kegiatan dan 58 sub kegiatan yaitu:

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   1) Peyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
   2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
   3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
   4) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
   5) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
   6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
   7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
   2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
   3) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
   4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
   5) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
   6) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
   1) Pengadaan Pakaian Dinas Besera Kelengkapannya
   2) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

3) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
   1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
   2) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
   3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
   4) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
   5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
   6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   1) Pengadaan Mebel
   2) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
   3) Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
   4) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
   5) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
   2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
   3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah
   1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
   2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operarional atau Lapangan
   3) Pemeliharaan Mebel
   4) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

5) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

1) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

b. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan

1) Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
2) Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELUARAHAN

a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

1) Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
2) Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
3) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

b. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

1) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
2) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
3) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

c. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

1) Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan
2) Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan

4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

1) Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

2) Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

b. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

1) Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

5. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

1) Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

2) Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional

3) Pelaksaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

6. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

a. Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

1) Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa

2) Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
3) Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa
4) Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
5) Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
6) Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Kartasura Tahun 2024 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Kartasura Tahun 2024 dapat disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 4.1
Rencana Pendanaan Kecamatan Kartasura
Tahun 2024

Keterangan Warna :
Merah : Prioritas
Kuning : Cukup Prioritas
Hijau : Kurang Prioritas

*) pagu dalam ribuan

Kode	Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			Lokasi	APBD 2023 (Rp)	RENJA 2024	Ket
					Tahun 2024						
					Target Review	Satuan	Rp				
Kecamatan Kartasura											
99	Pendapatan & Pembiayaan						0				
99.1	Pendapatan & Pembiayaan						0				
1	Terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84,5	angka			84,5				
1.1	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	Persentase Peningkatan Pelayanan Kecamatan	100	%			100				
7.1.2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100	%	100	%	15,000		15,000	15,000	

7.1.2.2.01	*Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*	*Cakupan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*	*100*	*%*	*100*	*%*	*5,000*		*5,000*	*5,000*	
7.1.2.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4	Dokumen	4	Dokumen	5,000	Kecamatan Kartasura	5,000	5,000	
7.1.2.2.02	*Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan*	*Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan*	*100*	*%*	*100*	*%*	*10,000*		*10,000*	*10,000*	
7.1.2.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1	Dokumen	0	-	0	Kecamatan Kartasura	0	0	
7.1.2.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2	Laporan	2	Laporan	10,000	Kecamatan Kartasura	10,000	10,000	
7.1.3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100	%	100	%	1,938,766		2,382,592	1,938,766	
7.1.3.2.01	*Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa*	*Cakupan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa*	*100*	*%*	*100*	*%*	*30,000*		*30,000*	*30,000*	
7.1.3.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10	Lembaga	10	Lembaga	10,000	kecamatan Kartasura	10,000	10,000	
7.1.3.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	4	Dokumen	4	Dokumen	10,000	kecamatan Kartasura	10,000	10,000	

7.1.3.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	8	Laporan	8	Laporan	10,000	Kecamatan Kartasura	10,000	10,000	
7.1.3.2.02	*Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan*	*Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan*	*100*	*%*	*100*	*%*	*1,743,766*		*2,202,592*	*1,743,766*	
7.1.3.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	160	Lembaga	160	Lembaga	11,000	Kecamatan Kartasura	10,000	11,000	
7.1.3.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6	paket	6	paket	1,066,074	Kecamatan Kartasura	1,044,094	1,066,074	
7.1.3.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	119	Pokmas / ormas	119	Pokmas / ormas	666,692	Kecamatan Kartasura	1,148,498	666,692	
7.1.3.2.03	*Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan*	*Cakupan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan*	*100*	*%*	*100*	*%*	*165,000*		*150,000*	*165,000*	
7.1.3.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	3	Lembaga	3	Lembaga	135,000	Kecamatan Kartasura	130,000	135,000	
7.1.3.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	24	Lembaga	24	Lembaga	30,000	Kecamatan Kartasura	20,000	30,000	
7.1.4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase capaian ketentraman dan ketertiban umum	100	%	100	%	57,900		57,000	57,900	
7.1.4.2.01	*Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum*	*Cakupan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum*	*100*	*%*	*100*	*%*	*20,000*		*20,000*	*20,000*	
7.1.4.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	6	Laporan	6	Laporan	10,000	Kecamatan Kartasura	10,000	10,000	

7.1.4.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyaraka	2	Laporan	2	Laporan	10,000	Kecamatan Kartasura	10,000	10,000	
7.1.4.2.02	*Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah*	*Cakupan Koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah*	*100*	*%*	*100*	*%*	*37,900*		*37,000*	*37,900*	
7.1.4.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	4	Laporan	4	Laporan	37,900	Kecamatan Kartasura	37,000	37,900	
7.1.5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100	%	100	%	329,500		322,500	329,500	
7.1.5.2.01	*Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah*	*Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah*	*100*	*%*	*100*	*%*	*329,500*		*322,500*	*329,500*	
7.1.5.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	80	orang	80	Orang	155,000	Kecamatan Kartasura	150,000	155,000	
7.1.5.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi)	80	orang	80	Orang	12,000	Kecamatan Kartasura	10,000	12,000	

		Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional									
7.1.5.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12	Dokumen	12	Dokumen	162,500	Kecamatan Kartasura	162,500	162,500	
7.1.6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100	%	100	%	60,000		55,000	60,000	
7.1.6.2.01	*Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa*	*Prosentase Pembinaan Pengawasan dan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa*	*100*	*%*	*100*	*%*	*60,000*		*55,000*	*60,000*	
7.1.6.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	10	Dokumen	10	Dokumen	10,000	Kecamatan Kartasura	10,000	10,000	
7.1.6.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	10	Dokumen	10	Dokumen	10,000	Kecamatan Kartasura	10,000	10,000	
7.1.6.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	10	Dokumen	10	Dokumen	10,000	Kecamatan Kartasura	10,000	10,000	
7.1.6.2.01.0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	4	Dokumen	4	Dokumen	5,000	Kecamatan Kartasura	5,000	5,000	
7.1.6.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	10	Dokumen	10	Dokumen	10,000	Kecamatan Kartasura	10,000	10,000	
7.1.6.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	1	Dokumen	1	Dokumen	15,000	Kecamatan Kartasura	10,000	15,000	

1.2	Meningkatnya kualitas aparatur dan pelayanan publik	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	65	angka			65				
0.0.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	100	%	100	%	0		6,192,984	6,192,984	
0.0.1.2.01	*Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*100*	*%*	*100*	*%*	*23,000*		*23,000*	*23,000*	
0.0.1.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	Dokumen	1	Dokumen	5,000	Kecamatan Kartasura	5,000	5,000	
0.0.1.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	1	Dokumen	3,000	Kecamatan Kartasura	3,000	3,000	
0.0.1.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	1	Dokumen	3,000	Kecamatan Kartasura	3,000	3,000	
0.0.1.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen	1	Dokumen	3,000	Kecamatan Kartasura	3,000	3,000	
0.0.1.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen	1	Dokumen	3,000	Kecamatan Kartasura	3,000	3,000	
0.0.1.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12	Dokumen	12	Dokumen	3,000	Kecamatan Kartasura	3,000	3,000	
0.0.1.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	Dokumen	3	Dokumen	3,000	Kecamatan Kartasura	3,000	3,000	
0.0.1.2.02	*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	*Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	*100*	*%*	*100*	*%*	*4,710,617*		*4,349,953*	*4,710,617*	

0.0.1.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33	Orang / Bulan	33	Orang/ Bulan	4,462,617	Kecamatan Kartasura	4,040,649	4,462,617	
0.0.1.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	Dokumen	12	Dokumen	238,000	Kecamatan Kartasura	299,304	238,000	
0.0.1.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12	Dokumen	12	Dokumen	2,500	Kecamatan Kartasura	2,500	2,500	
0.0.1.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	Laporan	5	Laporan	2,500	Kecamatan Kartasura	2,500	2,500	
0.0.1.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12	Laporan	12	Laporan	2,500	Kecamatan Kartasura	2,500	2,500	
0.0.1.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2	Laporan	2	Dokumen	2,500	Kecamatan Kartasura	2,500	2,500	
0.0.1.2.05	*Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	*Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	*100*	*%*	*100*	*%*	*5,000*		*22,550*	*5,000*	
0.0.1.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	38	Paket	0	Paket	0	Kecamatan Kartasura	17,550	0	
0.0.1.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	38	Dokumen	33	Dokumen	5,000	Kecamatan Kartasura	5,000	5,000	
0.0.1.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	38	Pegawai	0	Pegawai	0	Kecamatan Kartasura	0	0	
0.0.1.2.06	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*100*	*%*	*100*	*%*	*478,083*		*381,522*	*478,083*	
0.0.1.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3	Paket	3	Paket	23,000	Kecamatan Kartasura	14,000	23,000	

0.0.1.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6	Paket	6	Paket	35,500	Kecamatan Kartasura	35,500	35,500	
0.0.1.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	18	Paket	18	Paket	333,623	Kecamatan Kartasura	127,429	333,623	
0.0.1.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6	Paket	6	Paket	25,000	Kecamatan Kartasura	24,153	25,000	
0.0.1.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	72	Dokumen	72	Dokumen	9,960	Kecamatan Kartasura	8,640	9,960	
0.0.1.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	450	Laporan	450	Laporan	51,000	Kecamatan Kartasura	171,800	51,000	
		Jumlah Pelaksanaan Study Banding	1	Kali	1	Kali					
0.0.1.2.07	*Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	*Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	*100*	*%*	*100*	*%*	*100,920*		*122,573*	*100,920*	
0.0.1.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0	unit	0	Unit	0	Kecamatan Kartasura	0	0	
0.0.1.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	15	unit	15	Unit	19,551	Kecamatan Kartasura	33,612	19,551	
0.0.1.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5	unit	7	Unit	60,343	Kecamatan Kartasura	171,800	60,343	
0.0.1.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Paket Gedung kantor atau bangunan Lainnya Yang Disediakan	0	Paket	0	Paket	0	Kecamatan Kartasura	0	0	
0.0.1.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	unit	0	Unit	0	Kecamatan Kartasura	0	0	
0.0.1.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5	unit	4	Unit	21,026	Kecamatan Kartasura	0	21,026	

0.0.1.2.08	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*100*	*%*	*100*	*%*	*535,445*		*493,577*	*535,445*	
0.0.1.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	330	Laporan	330	Laporan	20,500	Kecamatan Kartasura	20,500	20,500	
0.0.1.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36	Laporan	36	Laporan	144,800	Kecamatan Kartasura	154,200	144,800	
0.0.1.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36	Laporan	36	Laporan	364,020	Kecamatan Kartasura	318,877	364,020	
		Jumlah Penyediaan Kendaraan / Mobil Hias	1	Paket	1	Paket					
0.0.1.2.09	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*100*	*%*	*100*	*%*	*894,964*		*759,809*	*894,964*	
0.0.1.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	19	unit	19	Unit	81,700	Kecamatan Kartasura	76,250	81,700	
0.0.1.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1	unit	1	Unit	10,000	Kecamatan Kartasura	10,000	10,000	
0.0.1.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	15	unit	15	Unit	6,000	Kecamatan Kartasura	6,000	6,000	
0.0.1.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15	unit	15	Unit	30,700	Kecamatan Kartasura	25,000	30,700	
0.0.1.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	unit	3	Unit	325,000	Kecamatan Kartasura	642,559	325,000	
	JUMLAH								8,985,076	8,701,506	

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kartasura Tahun 2024 merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Kartasura selama 1 (satu) tahun mendatang yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kartasura.

Renja SKPD Kecamatan Kartasura Tahun 2024 yang telah disusun ini hendaknya dilaksanakan secara konsisten, transparansi, jujur, partisipatif, penuh tanggung jawab dan merupakan pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-SKPD) Kecamatan Kartasura.

Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) SKPD Kecamatan Kartasura Tahun 2024, Camat Kartasura melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penjabaran Renja Kecamatan Kartasura Tahun 2024 dalam bentuk Rencana Kerja dan Anggaran Kecamatan setiap Kegiatan dan Sub Kegiatan.

Dengan mengharap keridhoan Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, semoga Rencana Kerja yang telah dibuat bersama-sama ini dapat diwujudkan bersama, untuk mencapai tujuan akhir bersama yaitu : **“Mewujudkan Masyarakat Sukoharjo Yang Lebih Makmur”**

BUPATI SUKOHARJO,

ETIK SURYANI